

PROSIDING
TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019
“PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI”



Diterbitkan Oleh:
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI
JAWA TIMUR

Bekerjasama dengan
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
DAN
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2019

PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019
“PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI”

Panitia Pelaksana:

- | | |
|---|--|
| 1. Pembina | : Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur |
| 2. Penanggung Jawab | : Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan dan SIDA |
| 3. Ketua Pelaksana | : Irwantoro, S.Sos., M.Si |
| 4. Sekretaris | : Kasubbid. Pengembangan Kemitraan |
| 5. Koordinator Seksi Acara,
Materi & Narasumber
Anggota | : Kasubbid. Pengembangan SIDA
: Ari Setyanto, M.Si
: Sri Wahyuningsih, S.Sos
: Sumadi, SP
: Windu Kustawanto, S.Sos
: Abdul Wakhid, SE |
| 6. Koordinator Seksi Makalah
Dan Artikel
Anggota | : Darmawan Soecahyo, S.Pi
: Drs, Nakkok Aruan, M.IP
Tri Weda Rahardjo, SE., M.Si
Adibah Sayyidati, SIP
Ratna Dewi Judhaswati, SP
Slamet Hari Susanto, S.Sos |

Tim Komiter Ilmiah:

Prof. Dr. Anis Eliyana, M.Si
Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si
Hery Toiba, MP., Ph.D
Dr. rer.pol. Wildan Syafitri, ME
Dr. Tri Weda Raharjo, M.Si

Tim Penyunting:

Anggraeni Rahmasari, SE., MM
Drs, Nakkok Aruan, M.IP
Slamet Hari Susanto, S.Sos

Penerbit:

Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Redaksi:

Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya
Telepon (031) 8290738,
Fax (031) 8290719
Email: bidangkemitraandansida.litbang@gmail.com
Website: <http://balitbang.jatimprov.go.id/>

ISBN : 978-979-682-777-0

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	xi
Laporan Ketua Panitia	xiii
Pembukaan dan Pengarahan	xvi
Susunan Panitia	xxii
Agenda Kegiatan Temu Ilmiah	xxiii
Pembagian Kelas	xxvii
Paparan Gubernur Jawa Timur :	
“Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Desa Mandiri”	
<i>Khofifah Indar Parawansa</i>	1
Keynote Speaker:	
“Percepatan Pengembangan Desa Mandiri”	
<i>Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, SE., M.Sc.Phd</i>	13
Pemateri I Tim Navigasi Gubernur Jawa Timur / Direktur Pasca Sarjana	
Universitas Islam (Unisma) Malang	
“Integrasi Dana Desa dan Pengembangan Ekonomi Desa”	
<i>Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM</i>	31
Pemateri II Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa Universitas Brawijaya:	
“Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Desa”	
<i>Prof. Dr. Maryunani, MS</i>	43
Pemateri III Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
Universitas Brawijaya, Malang	
“Kualitas SDM Perdesaan : Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Aparatur”	
<i>Dr. Rer.pol Wildan Syafitri, SE., MEc</i>	63
Pemateri IV Tim Ahli Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri	
“Pelatihan Online Untuk Perangkat Desa: Peluang dan Tantangan”	
<i>Cecep Effendi, PhD</i>	75

Sub Tema I

Pengembangan Kualitas SDM Perdesaan (Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Aparatur Pemerintah Desa)

Penguatan Kapasitas Remaja di Perdesaan Sebagai Pendidik Sebaya Dalam Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja.....	83
<i>Juriah</i>	
Pemberdayaan Masyarakat Desa Balongbendo Melalui Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos.....	91
<i>Yulianto Ade Prasetya dan Khoirun Nisyak</i>	
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Pendekatan Konsep Manajemen Eduwisata Mikrohidro Dalam Mewujudkan Desa Mandiri	99
<i>Endra Yuafanedi Arifianto, Tri Budi Prayogo, Rr Diah Nugraheni Setyowati, Rizki Nurul Arsy</i>	

Pelatihan Daur Ulang Botol Plastik Bekas Menjadi Ovitrap di Desa Balongbendo Sebagai Upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue	107
<i>A'yunil Hisbiyah, Eviomitta Rizki Amanda, Khoirun Nisyak</i>	
Pelatihan Pembuatan Hidrogel Aromaterapi Untuk Pencegahan Demam Berdarah Dengue di Desa Balongbendo Kabupaten Sidoarjo	115
<i>Eviomitta Rizki Amanda, A'yunil Hisbiyah, Khoirun Nisyak</i>	
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Komitmen Organisasi dan <i>Organizational Citizenship Behavior</i> Terhadap Kinerja Karyawan Serta Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Sukorame-Lamongan	121
<i>Joko Hadi Susilo, Maulana Ghani Yusuf, Nur Riska Agustina</i>	
Implementasi Dana Desa Guna Memperkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lamongan Jawa Timur	133
<i>Eko Sutrisno</i>	
Peningkatan Kualitas SDM Perdesaan Melalui Penguatan Kelembagaan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	143
<i>RM. Moch. Wispandono, Eny Sri Rahayu N</i>	
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	155
<i>Jouzar Farouq Ishak, Aprillah Tarihoran, dan Khozin Arief</i>	
Urbanisasi Dan Ancaman Ketersediaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Di Desa: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur	165
<i>Munari Kustanto</i>	
Transformasi Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Desa Mandiri: Analisis Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pedesaan Di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	177
<i>Intihaul Khiyaroh</i>	
Pengembangan Eduwisata Kanoman Family Strength (KFS) Untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro	189
<i>Indah Fajrotuz Zahro, dan Nur Laila Rahmawati</i>	
Lapak Baca Komunitas Literasi Ponorogo: Menghidupkan Semangat Baca Dari Taman Kota Hingga Kampung Idiot	201
<i>Vivi Vellanita Wanda Damayanti, Aan Diang Frastika Aji</i>	
Program Penguatan Kapasitas Layanan Posyandu Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Posyandu Di Desa Pungpungan-Kalitidu-Bojonegoro	209
<i>M. Hestu Widiyastono, dan Indah Fajrotuz Zahro</i>	

Pendampingan Distribusi Bibit Tanaman Dan Pemetaan Greenhouse Pada Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP-PKPS) TP-PKK Desa Se-Kabupaten Tuban 223
Riska Andriani, Marita Ika Joesidawati, Sriwulan

Sekolah Perempuan Dalam Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Desa 233
Agustina Dewi Setyari

Percepatan Pencapaian Kemandirian Desa Melalui Pendampingan Wirausaha Pembelajar (Studi Kasus Di Desa Jogorepuh, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan) 239
Sugeng Hariadi, Susila Candra, dan Arum Soesanti

Triple Helix Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Desa-Desa Wisata Kabupaten Malang 247
Rumsari Hadi Sumarto, Asmi Desanta

Inovasi atau Pendekatan Kolaborasi? Pengembangan Sumberdaya Manusia Terpadu Secara Online, “DESIMA” bagi Aparat Desa 257
Idham Ibtu, Faizal Aco, Syamsudin, Arif Kurniar Rakhman

Peluang Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Melalui Pelatihan Berbasis Online 269
Bening Hadilatih, Bambang Irjanto, Nurhadi, Cecep Effendi

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian 283
Hayat

Upaya Membangun Kemampuan Literasi Baca Tulis Masyarakat Desa Melalui Komunitas Baca: Studi Atas Tbm Gelaran Buku Jambu Daar El Fikr, Desa Jambu, Kayen Kidul, Kediri 293
Yulitin Sungkowati

Penguatan Tata Kelola Demokratik Untuk Kemandirian Desa: Pengalaman Kepala Desa Sekapuk 305
Noor Rohman, Aniek Nurhayati

Sub Tema II

Pengembangan Ekonomi Desa, Revitalisasi Koperasi, UMKM, dan BUMDes

Desa Industri Mandiri Pertanian Organik Kemitraan Universitas Negeri Gorontalo Dan Kabupaten Gorontalo Utara 317
Herwin Mopangga

<i>Community Based Tourism in Sekapuk, Ujungpangkah, sovereignty and independency effort in empowering local economy</i>	325
<i>Achmad Room Fitrianto</i>	
Peran Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Desa Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dengan Sistem Tumpangsari	337
<i>Lambang Raspriyo Aji</i>	
Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Community Development: Studi Di Desa Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur	345
<i>Ana Toni Roby Candra Yudha, Akmalur Rijal, Habibah Awwaliah</i>	
Strategi Memperkuat Pelaku Usaha Tempe Melalui Inovasi Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Di Desa Tembarak Kertosono Nganjuk.....	357
<i>Wiwik Maryati</i>	
Produksi “Nata De Soya” Dari Limbah Cair Tahu Sebagai Potensi Ekonomi Baru Masyarakat Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur..	367
<i>Maisarah Maisarah, Nur Muji Astuti</i>	
Pengembangan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat Desa: Studi Pada Musholla Mambaus Saadah Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	375
<i>Lilik Rahmawati, Abdul Hakim, Nurlailah</i>	
Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Inovasi Sektor Bisnis Dan Publik	385
<i>Anugerah Yuka Asmara, dan Irwantoro</i>	
Perancangan Sistem Informasi Bumdes Banyuwangi Berbasis Web	399
<i>Khoirul Hidayat, M Fuad Fauzul Mu'tamar, R Arief Firmansyah</i>	
Inovasi Budidaya Ayam Kampung Asli Unggul Pancamurti Malang Dalam Menunjang Ketahanan Pangan dan Ekonomi Perdesaan	407
<i>Misdiantoro, Irwantoro, Agung Budi Irawan</i>	
Upaya Perlindungan Potensi Terumbu Karang Di Wilayah Pesisir Bali Utara Untuk Mewujudkan Desa Wisata Bahari Dan Memperkuat Pengembangan Ekonomi Desa...	419
<i>Mukti Ali Asyadzili</i>	
Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Product Competitive Analysis Pada Kerajinan Pahat Batu Di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang	429
<i>Maulana Ghani Yusuf, Joko Hadi Susilo, Adi Firmanzah</i>	
Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Pertanian Kacang Bambara	439
<i>Endah Sri Redjeki</i>	

Pengembangan Potensi Desa Pesisir Jawa Timur Menuju Masyarakat Sejahtera	451
<i>Ratna Ekasari, Heru Prastiyono</i>	
Strategi Bertahan Hidup Nelayan Jaring Robin (Studi kasus nelayan di Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat).....	465
<i>Silvia Devi</i>	
Pendampingan Usaha Sambal Pecel Di Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.....	479
<i>Lilis Suaibah, Abdur Rahman, Rakhmawati</i>	
Pemetaan Pengembangan Desa Tematik Di Kabupaten Pacitan	489
<i>Endriana Wahyu Alita, Yulianto P. Prihatmaji, Maharani Thalia Purwa Aditya</i>	
Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Asset Badan Kredit Desa (BKD) Hasil Transformasi Di Kabupaten Banyuwangi	507
<i>Emy Hidayati</i>	
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pengelola Hasil Hutan Di Kabupaten Kepulauan Yapen	525
<i>Muhamad Ismail, SE. M.Si</i>	
Strategi Bumdes Dalam Memberdayakan Masyarakat Lokal Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.....	539
<i>A. Taufiq Hidayat</i>	
Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Pengelolaan Sagu Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Petani.....	549
<i>Agustinus Hartopo</i>	
BUMDes Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Desa	559
<i>Mulyanto</i>	
Peningkatan Produksi Dan Manajemen Usaha Ikan Asap Melalui Alat Pengasapan Ikan “Efhilink”	569
<i>Marita Ika Joesidawati, Suwarsih, Heni Sri Astuti</i>	
Pengembangan Ekonomi Lokal Menuju Desa Pesisir Mandiri (Studi Kasus Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura).....	575
<i>Endang Tri Wahyurini</i>	
Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Mempercepat Pengembangan Desa Mandiri Di Bidang Umkm Dan Perekonomian Desa Di Paciran Lamongan	585
<i>Eny Latifah</i>	

Alat Pemotong Ikan Rucuh” Bagi Kelompok Kja “Sendang Marina” Kabupaten
Tuban..... 597
Susanti Dhini Anggraini, Abdul Wahid Nuruddin, Yuyun Suprpti

Revitalisasi Budaya Sebagai Atraksi Wisata Baru Guna Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat Di Desa Adat Kemiren, Banyuwangi 607
Ayu Wanda Febrian, Dora Melati Nurita Sandi, Masetya Mukti

Stabilisasi Pangan Desa melalui Model Bisnis Berbasis Teknologi Informasi di Jawa
Timur 617
Medea Rahmadhani Utomo, Novil Dedy Andriatmoko

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya
Pengembangan Ekonomi Desa (Studi di Desa Wisata Sawahan, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek) 631
Muchammad Firman Mauludin

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pemanfaatan Tanah Baon (Studi pada
Pemanfaatan Tanah Baon oleh Masyarakat Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Ngawi)..... 637
Sumarno, Nining Wulandari

Penguatan Manajemen Agribisnis Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Desa
Mandiri Pilot Project Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten
Banyuwangi..... 647
*Andrean Eka Hardana, Djoko Koestiono, Imaniar Ilmi Pariasa, Anisa Aprilia,
Novi Haryati, dan Heptari Elita Dewi*

Pembangunan Berbasis Partisipasi Menuju Kemandirian Ekonomi Melalui BUMDES di
Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi 655
Irwan Kurniawan Soetijono, SH., M.Hum

Sub Tema III

Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Desa (Koperasi Perempuan, Petani, Nelayan, Penataan Pasar Tradisional, OVOP, dan Agropolitan)

Optimalisasi Budidaya Durian Lokal Sebagai Upaya Terwujudnya Desa Agropolitan
Sebagai Basis Desa Agrowisata Di Wonosalam 663
Heru Irianto, Hj. Mahmudah Enny, Sutarman

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sidoarjo Dalam
Meningkatkan Inovasi Desa 673
Fitriyatus Sholihah, Munari Kustanto

Kompetensi Inti Industri Daerah Untuk Pengembangan Ekonomi Desa Yang Berdaya Saing.....	683
<i>Edy Santoso</i>	
Modal Sosial Pendukung Perempuan Peramu Herbal Dalam Pengelolaan Pondok Jamu Berbasis Shelter Untuk Pengembangan Wisata Sebagai Rintisan Desa Mandiri Di Kabupaten Bangkalan Dan Sumenep	691
<i>Ekna Satriyati</i>	
Optimalisasi Pelibatan Perempuan Dalam Pengembangan Desa Mandiri Melalui Koperasi Perempuan (Studi kasus Koperasi Wanita Ananda Desa Pagendingan Kabupaten Pamekasan)	701
<i>Nur Dina Camelia</i>	
Pengembangan Potensi Pesisir dan Wisata Lokal dalam Skema <i>Collaborative Governance</i> : Studi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang	709
<i>Indra Pratama Putra, Ismail, Haryono</i>	
Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kawasan Perkebunan Dilem Wilis	721
<i>M. Amir. HT, Ratna Dewi Judhaswati</i>	
Pengembangan Kawasan Agribisnis Apel dengan Peningkatan Lahan Produksi Berbasis Sistem Informasi Geografis.....	735
<i>Dendy Setyawan</i>	
Peningkatan Daya Tarik Wisata Pantai Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Desa Studi Kasus: Pantai Kutang, Kabupaten Lamongan	747
<i>Diah Novianti, Judiono</i>	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa maka Prosiding Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dapat diselesaikan. Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur telah diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 5 September 2019 di Hotel Regent Kota Malang dengan Tema “Percepatan Pengembangan Desa Mandiri”.

Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dihadiri oleh beberapa kalangan akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, para praktisi maupun birokrasi dari Lembaga Litbang yang berasal dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota yang akan membahas dan mendiskusikan situasi problematik yang dihadapi Desa dalam upaya mempercepat kemandiriannya guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil penelitian maupun kajian berupa 94 paper dari 166 yang telah melalui proses seleksi dan review oleh para pakar yang dilanjutkan dengan editing, maka diharapkan dapat memberikan wawasan, masukan maupun *best practice* yang relevan berkaitan dengan percepatan pengembangan desa mandiri.

Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah berkenan membuka acara Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dan *Keynote Speaker*, para Pembicara/Narasumber, Moderator, *Reviewer*, Editor dan para Peserta serta Pemakalah yang telah menyumbangkan pemikirannya melalui paper dalam prosiding ini. Disamping itu disampaikan terima kasih pula kepada Universitas Brawijaya Malang dan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang yang telah mendukung terselenggaranya acara Temu Ilmiah Nasional 2019.

Surabaya, 23 Desember 2019

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur

Agus Wahyudi, S.H., M.Si



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 56, Telp. 8290738 - 8290719
Surabaya, 60235

LAPORAN
KEPALA BALITBANG PROV. JAWA TIMUR
PADA TEMU ILMIAH PENELITI TAHUN 2019
Malang, 3 September 2019

" BISMILLAHIRROHMANIROOHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SELAMAT MALAM DAN
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA "

YTH.

1. IBU GUBERNUR JAWA TIMUR;
2. Prof. AHMAD ERANI YUSTIKA, M.Sc, Ph.D (Staf Khusus Presiden Bid. Ekonomi);
3. Prof. M. MAS'UD SAID, Ph.D (Direktur Pasca Sarjana UNISMA);
4. Prof. Dr. MARYUNANI, MS (Guru Besar FEB Univ. Brawijaya Malang);
5. Dr. rer. pol. WILDAN SYAFITRI, ME (Kajur. Ilmu Ekonomi FEB Univ. Brawijaya Malang);
6. Kepala Perangkat Daerah Terkait Pemerintah Kabupaten Malang Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu (Balitbangda, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Camat Bumiaji Kota Batu);
7. BAPAK/IBU Moderator dan Pemakalah dan Peserta Temu Ilmiah Nasional;

MENGAWALI LAPORAN INI PERKENANKANLAH KAMI MEMANJATKAN PUJI SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YME ATAS SEGALA KARUNIA, RAHMAD DAN HIDAYAHNYA SEHINGGA PADA HARI INI SELASA 3 SEPTEMBER 2019 PELAKSANAAN ACARA TEMU ILMIAH NASIONAL DAPAT BERJALAN SESUAI RENCANA DAN DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

IBU GUBERNUR JAWA TIMUR YANG SAYA HORMATI

PADA KESEMPATAN INI PERKENANKANLAH KAMI MENGHATURKAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA IBU GUBERNUR YANG TELAH MENYEMPATKAN WAKTU DAN HADIR DI TENGAH-TENGAH KITA UNTUK BERKENAN MENYAMPAIKAN SAMBUTAN, PENGARAHAN DAN MEMBUKA ACARA TEMU ILMIAH NASIONAL HARI INI.

PADA KESEMPATAN INI PULA KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG DAN TERIMA KASIH KEPADA BAPAK/IBU NARA SUMBER, REVIEWWEAR, PESERTA TEMU ILMIAH NASIONAL DAN SELURUH UNDANGAN YANG HADIR PADA HARI INI. DAN PERMOHONAN MAAF APABILA SELAMA ACARA BERLANGSUNG ADA KEKURANGAN DAN KEHILAFAN.

SELANJUTNYA SEBELUM IBU GUBERNUR JAWA TIMUR MEMBERI SAMBUTAN, PENGARAHAN DAN MEMBUKA ACARA TEMU ILMIAH NASIONAL PADA HARI INI, PERKENANKANLAH MELAPORKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. DASAR PENYELENGGARAAN

- a. PERATURAN DAERAH PROV. JAWA TIMUR NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG APBD TAHUN 2019;
- b. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019;
- c. KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 914/313/213.2/2018 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA – OPD) BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. SEBAGAI MASUKAN/IDEA/SUMBANGAN PEMIKIRAN PENELITI DAN AKADEMISI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN SOLUSI PERMASALAHANNYA SECARA ILMIAH DAN INOVATIF.
- b. SEBAGAI MEDIA DAN MEMPERTEMUKAN ANTAR PENELITI PEMERINTAH DAERAH, PENELITI PERGURUAN TINGGI, PENELITI LEMBAGA PENELITIAN DI JAWA TIMUR MAUPUN DI LUAR JAWA TIMUR UNTUK SALING BERBAGI PENGALAMAN ATAU TRANSFER KNOWLEDGE.
- c. SEBAGAI WAHANA UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PENELITI.

3. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

ACARA INI DILAKSANAKAN PADA HARI SELASA S/D KAMIS TANGGAL 3 S/D 5 SEPTEMBER 2019 BERTEMPAT DI HOTEL HOTEL REGENT’S PARK MALANG JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 12 – 16 MALANG.

4. TEMA

”PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI”. TEMA INI DIANGKAT UNTUK MENDUKUNG NAWA BHAKTI SATYA KE 7 (JATIM BERDAYA) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR.

5. KEYNOTE SPEAKER

Prof. AHMAD ERANI YUSTIKA, SE, M.Sc, Ph.D (STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG EKONOMI).

6. NARASUMBER

- Prof. Dr. M. MAS’UD SAID, Ph.D (Universitas Islam Malang)
- Prof. Dr. MARYUNANI, MS (Universitas Brawijaya Malang)
- WILDAN SYAFITRI, Ph.D (Universitas Brawijaya Malang)
- CECEP EFENDI, Ph.D (Staf Ahli Dirjen PMD Kemendagri)

7. REVIEWER

- HERY TOIBA, NP. PhD (Universitas Brawijaya).
- Prof. Dr. TANTI HADRIANA, SE, MSi. (Universitas Airlangga).
- Dr. M. R. KHAIRUL MULUK, M.Si. (Universitas Brawijaya).

8. PESERTA DAN PEMAKALAH SEBANYAK 130 ORG TERDIRI DARI

- PERANGKAT DAERAH TERKAIT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG, PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PEMERINTAH KOTA BATU (BALITBANGDA, BAPPEDA, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN CAMAT BUMIAJI);
- PEMAKALAH TERDIRI DARI
 - a) PENELITI PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR;
 - b) PENELITI DAN DOSEN PERGURUAN TINGGI DI JAWA TIMUR;
 - c) PENELITI PEMERINTAH DAERAH DI LUAR JAWA TIMUR YAITU PROV. PAPUA, PROV. JAWA BARAT, PROV. JAWA TENGAH, PROV. BANTEN,
 - d) PROV. SULAWESI TENGAH, PROV. KALIMANTAN SELATAN;
 - e) LEMBAGA PENELITIAN KEMENTERIAN DAN LIPI;
 - f) MAHASISWA DI JAWA TIMUR.

9. AGENDA/ACARA

- SAMBUTAN DAN PENGARAHAN IBU GUBERNUR JAWA TIMUR;
- PAPARAN UMUM DAN DISKUSI OLEH KEYNOTE SPEAKER DAN NARA SUMBER;
- PAPARAN PEMAKALAH DAN PEMBAHASAN YANG DIBAGI KEDALAM 3 (TIGA) KELOMPOK SUB TEMA YAITU; (1) PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PEDESAAN; (2) PENGEMBANGAN EKONOMI DESA, REVITALISASI KOPERASI, UMKM DAN BUMDES; (3) PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI LAPORKAN DAN SELANJUTNYA DIMOHON IBU GUBERNUR JAWA TIMUR BERKENAN MEMBERIKAN SAMBUTAN, PENGARAHAN DAN MEMBUKA SECARA RESMI ACARA TEMU ILMIAH NASIONAL PADA HARI INI. SEKIAN TERIMA KASIH.

***” WASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLOHI
WABAROKATUH ”***

KEPALA BALITBANG
PTOVINSI JAWA TIMUR

AGUS WAHYUDI, SH, M.Si



SAMBUTAN
GUBERNUR JAWA TIMUR
PADA ACARA
PEMBUKAAN TEMU ILMIAH NASIONAL TAHUN 2019
Malang, 3 September 2019

BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM
ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI
WA BAROKATUH
SELAMAT MALAM DAN SALAM SEJAHTERA
BAGI KITA SEMUA

YTH.

1. Prof. AHMAD ERANI YUSTIKA, SE, MSc, Ph.D
2. Prof. MAS'UD SAID, MA, Ph.D
3. Prof. MARYUNANI, MS
4. Dr.rer.pol. WILDAN SYAFITRI, ME
5. KEPALA PERANGKAT DAERAH TERKAIT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
(BALITBANGDA, BAPPEDA, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
(BAPPEDA DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)
6. KEPALA PERANGKAT DAERAH TERKAIT PEMERINTAH KOTA BATU (BAPPEDA,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN CAMAT BUMIAJI)
7. PESERTA TEMU ILMIAH NASIONAL
8. BAPAK/IBU HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA – TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL DAN BERSILATUROHMI DI TEMPAT YANG INSYAALLAH PENUH BEROKAH, SEHAT WAL AFIAT DAN BAHAGIA.

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN

SAYA MENGAPRESIASI ATAS TERSELENGGARANYA TEMU ILMIAH NASIONAL INI DENGAN MENGANGKAT TEMA "PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI". TEMA INI SANGAT TEPAT DENGAN SALAH SATU NAWA BHAKTI SATYA KE 7 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR. NAWA BHAKTI SATYA INI ADALAH WUJUD TEKAD UNTUK SELALU SIAP MELAYANI MASYARAKAT JAWA TIMUR DENGAN HASIL AKHIR SEMUA LAPISAN MASYARAKAT YANG BERADA DI KOTA MAUPUN DESA DENGAN BERBAGAI MACAM PROFESI DAPAT MULIA HIDUPNYA.

TEMA DESA SELALU MENARIK UNTUK DIBAHAS, DESA ADALAH GARDA TERDEPAN PEMBANGUNAN, MAKANYA TIDAK HERAN APABILA BAPAK PRESIDEN JOKOWI DALAM NAWA CITA JUGA BERKEHENDAK UNTUK MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN.

GAGASAN UNTUK MENGUATKAN DESA SEBENARNYA TIDAK SAJA MUNCUL PADA ABAD SEKARANG, JAUH SEBELUM INDONESIA MERDEKA RAJA PEREMPUAN MAJAPAHIT, TRIBUANA TUNGGGA DEWI MENEKANKAN AKAN PENTINGNYA MEMELIHARA DESA DALAM SEBUAH TATANAN KEHIDUPAN BERNegara. MENURUT NEGARA KERTAGAMA HASIL KARYA EMPU PRAPANCA DISEBUTKAN BAHWA, “*NEGARA DAN DESA BEDRHUBUNGAN RAPAT SEPerti SINGA DAN HUTAN, JIKA DESA RUSAK NEGARA AKAN KEKURANGAN BAHAN MAKANAN. KALAU TIDAK ADA TENTARA, NEGARA LAIN MUDAH MENYERANG KITA, MAKANYA PELIHARALAH KEDUANYA*”.

PESERTA TEMU ILMIAH DAN UNDANGAN YANG TERHORMAT

PADA TANGGAL 16 JULI 2019 UNDANG-UNDANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DISYAHKAN. UNDANG-UNDANG INI MENGGANTIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (P3 IPTEK). PERUBAHAN INI DILAKUKAN GUNA REVISI DAN RELEFANSI TERHADAP PENERAPAN YANG DIRASA BELUM OPTIMAL, BELUM MENGATUR HAL-HAL KHUSUS DAN STRATEGIS.

UNDANG-UNDANG SISNAS IPTEK MENJADI LANDASAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AGAR MAMPU MEMPERKUAT DAYA DUKUNG IPTEK DALAM RANGKA MENACAPAI TUJUAN NEGARA. ADA DUA TUJUAN PERUBAHAN REGULASI, PERTAMA MEMAJUKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG MENGHASILKAN INVensi DAN INOVASI. KEDUA, MENINGKATKAN PEMANFAATAN IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI DASAR PEMBANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MEMAJUKAN PERADABAN, MENJAGA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGASA INDONESIA.

BAPAK/ IBU HADIRIN SEKALIAN,

KEGIATAN TEMU ILMIAH NASIONAL INI DIHARAPKAN MENJADI MEDIA DISKUSI, MASUKAN, IDE, SUMBANGAN PEMIKIRAN SERTA WADAH BAGI PARA AKADEMISI DAN PROFESIONAL SECARA ILMIAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN MELALUI PENGEMBANGAN INOVASI UNTUK TUJUAN PENYELESAIAN BERBAGAI MASALAH PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR. AKAN SANGAT BANYAK MANFAAT IKUTAN DARI INOVASI, PENGEMBANGAN MAUPUN IMPLEMENTASINYA. ANTARA LAIN, MENUMBUHKAN LAPANGAN KERJA, TRANSFER TEKNOLOGI, PENDAPATAN NEGARA, PENINGKATAN KEMAMPUAN NASIONAL, MAUPUN NILAI TAMBAH SECARA UMUM.

HARAPAN SAYA, MELALUI TEMU ILMIAH NASIONAL TAHUN 2019, KARYA ILMIAH - KARYA ILMIAH YANG AKAN DIPAPARKAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI

YANG MAKSIMAL DALAM MENGEMBANGKAN INOVASI UNTUK SUATU TUJUAN PENYELESAIAN BERBAGAI MASALAH PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR KHUSUS-NYA DAN DI INDONESIA PADA UMUMNYA.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, MAKA DENGAN MENGUCAP :

"BISMILLAHIRROHMANIRROHIM"

TEMU ILMIAH NASIONAL TAHUN 2019 SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN DIMULAI.

GUBERNUR JAWA TIMUR

Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Telp. 8290738 – 8290719 Fax. 8290719
SURABAYA 60235

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 070 / 698 / 206.5 / 2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA
TEMU ILMIAH

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Temu Ilmiah agar berjalan lancar dan tertib administrasi yang ada di Bidang Pengembangan Kemitraan dan SIDA Balitbang Provinsi Jawa Timur, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Temu Ilmiah dengan Keputusan Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 th 2016 seri c, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No.63);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 903/313/203.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Temu Ilmiah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama sebagai berikut;
1. Membuat/menyusun perencanaan, persiapan dan jadwal pelaksanaan;
 2. Menyiapkan pedoman penulisan artikel ilmiah, brosur persyaratan yang akan disebar untuk peserta temu ilmiah dan mengkompulir artikel yang masuk;
 3. Melakukan koordinasi dengan nara sumber dan sekaligus menyiapkan bahan/materi paparan dari nara sumber;
 4. Melakukan koordinasi dengan tim refiewer;
 5. Menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan;
 6. Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dll;
 7. Verifikasi ulang terhadap semua keperluan perlengkapan/bahan/materi tersebut diatas;
 8. Melaporkan hasil tim dimaksud kepada Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur.
- Ketiga : Membebankan biaya yang timbul atas tim dimaksud pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Kegiatan 3.10.81001 (Pengembangan Kemitraan).

- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 15 Februari 2019

KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



AGUS WAHYUDI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 070 / 698 / 206.5 / 2019

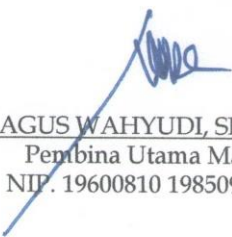
TANGGAL : 15 Februari 2019

TENTANG : Panitia Pelaksana Temu Ilmiah pada Program Pengembangan Kemitraan dan SIDA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PELAKSANA TEMU ILMIAH

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA
1.	Pembina	KEPALA BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR
2.	Penanggung Jawab	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SIDA
3.	Ketua Pelaksana	IRWANTORO, S.Sos, M.Si
4.	Sekretaris	KASUBBID. PENGEMBANGAN KEMITRAAN
5.	Koordinator Seksi Acara, Materi & Nara Sumber	KASUBBID. PENGEMBANGAN SIDA
	Anggota :	1. ARI SETYANTO, M.Si 2. SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos 3. SUMADI, SP 4. WINDU KUSTAWANTO, S.Sos 5. SURONO, SE 6. ABDUL WAKHID, SE
6.	Koordinator Seksi Makalah dan Artikel	DARMAWAN SOECAHYO, S.Pi
	Anggota :	1. Drs. NAKKOK ARUAN, M.IP 2. TRI WEDA RAHARDJO, SE, M.Si 3. ADIBAH SAYYIDATI, SIP 4. RATNA DEWI JUDHASWATI, SP 5. SLAMET HARI SUSANTO, S.Sos

KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR


AGUS WAHYUDI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003

SUSUNAN ACARA
TEMU ILMIAH NASIONAL TAHUN 2019
BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR

WAKTU	A C A R A	KETERANGAN
Selasa, tanggal 3 September 2019		
13.00-15.00	Registrasi	Panitia
19.00-22.00	PEMBUKAAN	Panitia
	Pembukaan oleh Pembawa Acara (MC)	
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Hadirin dimohon berdiri
	Laporan Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur	Agus Wahyudi, SH, M.Si
	Pembacaan Puisi Menyanyikan Lagu Desaku	<ul style="list-style-type: none"> • Silvi Asna Prstianawati, SE, M.Si, Staf Pengajar FE-UB • Siswi MTs Al Huda, Desa Patokpici, Kec. Wajak, Kabupaten Malang
	Sambutan Gubernur Jawa Timur	
	Doa	Didik Priyagung Wicaksono, M.Pd Univ. Nurul Jadid Probolinggo
	<i>Coffe Break</i>	15 menit, lagu-lagu oleh siswi MTs Al Huda, Desa Patokpici, Kec. Wajak, Kab. Malang
	Keynote Speaker: Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, Ph.D, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa dan PDTT: <i>“Percepatan Pengembangan Desa Mandiri”</i>	Moderator: Fadilah Putra, Ph.D, Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
22.00	Istirahat	Panitia
Rabu, tanggal 4 September 2019		
07.00-11.30	Diskusi Panel: Paripurna	Ruang Ballroom

	<p>1. Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM, Tim Navigasi Gubernur Jawa Timur / Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam (Unisma) Malang: <i>“Integrasi Dana Desa dan Pengembangan Ekonomi Desa”</i></p> <p>2. Prof. Dr. Maryunani, MS, Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa Universitas Brawijaya: <i>“Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Desa”</i></p> <p>3. Dr. rer.pol Wildan Syafitri, ME, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang: <i>“Pengembangan Kualitas SDM Perdesaan”</i></p> <p>4. Cecep Efendi, Ph.D, Tim Ahli Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri: <i>“Pelatihan Online untuk Perangkat Desa” : Peluang dan Tantangan</i></p> <p>Diskusi (Tanya Jawab)</p>	<p>Moderator: Didik Priyagung Wicaksono, M.Pd Universitas Nurul Jadid Probolinggo.</p>
11.30-16.00	<p>Field Trip ke Lumbung Strawberi BUMDes “Raharjo”, Desa Pandanrejo, Kota Batu.</p>	Panitia
16.00-19.00	Istirahat	Panitia
19.00-22.00	<p>Diskusi Paralel Sesi 1</p> <p>Sub-tema: <i>“Pengembangan Kualitas SDM Perdesaan”</i></p> <p></p> <p>Sub-tema: <i>“Pengembangan Ekonomi Desa, Revitalisasi Koperasi dan UMKM, serta BUMDes”</i></p>	<p>Panitia</p> <p>Ruang I Moderator: Silvi Asna Prstianawati, SE, M.Si, Staf Pengajar FEB Universitas Brawijaya</p> <p>Ruang II Moderator: Dr. Ike Wanusmawatie, MAP, Staf Pengajar FIA Univ. Brawijaya</p>

		Ruang III
		Moderator: Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati, M.Kes, dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Sidoarjo
22.30	Istirahat	Panitia
Kamis, tanggal 5 September 2019		
07.00-11.00	Diskusi Paralel Sesi 2	Panitia
	Sub-tema: <i>“Pengembangan Kualitas SDM Perdesaan”</i>	Ruang I Moderator: Silvi Asna Prstianawati, SE, M.Si, Staf Pengajar FEB Universitas Brawijaya
		Ruang II Moderator: Dr. Ike Wanusmawatie, MAP, Staf Pengajar FIA Univ. Brawijaya
	Sub-tema: <i>“Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Desa”</i>	Ruang III
		Moderator: Dr. Siti Nur Husnul Yusmiati, M.Kes, dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Sidoarjo
11.00-11.30	PENUTUPAN	Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur
11.30-12.00	Ishoma	Panitia

SUBTEMA 1
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEDESAAN
(PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, APARATUR PEMERINTAHAN
DESA)

TANGGAL 4 SEPTEMBER 2019 RUANG I

N O.	NAMA LENGKAP	INSTANSI ASAL	JUDUL ARTIKEL
1	Ahmad	Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim)	PENINGKATAN KAPASITAS KADER PENGGERAK DESA MELALUI PENDEKATAN <i>ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT</i> (ABCD) DI KABUPATEN BANGKALAN - MADURA
2	Juariah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Balitbangdaprov Jabar)	PENGUATAN KAPASITAS REMAJA DI PEDESAAN SEBAGAI PENDIDIK SEBAYA DALAM PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSINYA
3	Yulianto Ade Prasetya	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit (STIKes RS) Anwar Medika Sidoarjo	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BALONGBENDO MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI PUPUK KOMPOS
4	Endra Yuafanedi Arifianto	Universitas Brawijaya	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENDEKATAN KONSEP MANAJEMEN EDUWISATA MIKROHIDRO DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI
5	A'yunil Hisbiyah	STIKes RS Anwar Medika Sidoarjo	PELATIHAN DAUR ULANG BOTOL PLASTIK BEKAS MENJADI OVITRAP DI DESA BALONGBENDO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE
6	Eviomitta Rizki Amanda	STIKes RS Anwar Medika Sidoarjo	PELATIHAN PEMBUATAN HIDROGEL AROMATERAPI UNTUK PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DESA BALONGBENDO - KABUPATEN SIDOARJO
8	Joko Hadi Susilo	Universitas Diponegoro	ANALISIS KINERJA PERANGKAT DESA DENGAN MODERASI <i>ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR</i> DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT: STUDI PADA PERANGKAT DESA SE-KECAMATAN SUKORAME - KABUPATEN LAMONGAN
9	Eko Sutrisno	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	IMPLEMENTASI DANA DESA GUNA MEMPERKUAT KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

		(P3MD) Kecamatan Glagah - Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur	MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN
13	Jouzar Farouq Ishak	Politeknik Negeri Bandung	AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
11	R.M. Moch. Wispandono	Universitas Trunojoyo Madura	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PEDESAAN MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI
12	Arry Irawan	Politeknik Negeri Bandung	PELATIHAN SABLON KERTAS SEBAGAI RINTISAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) UNTUK KEMANDIRIAN DESA

SUBTEMA 1

**PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEDESAAN
(PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, APARATUR PEMERINTAHAN
DESA)**

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019 RUANG I

14	Munari Kustanto	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Bappedakab) Sidoarjo	URBANISASI DAN ANCAMAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DI DESA
10	Sirajuddin	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngijo - Kecamatan Karangploso - Kabupaten Malang	MODEL SINERGITAS DAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN DESA
15	Intihaul Khiyaroh	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI Tabah) Lamongan	TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI: ANALISI PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PEDESAAN DI DESA SIDOKELAR - KECAMATAN PACIRAN - KABUPATEN LAMONGAN
16	Indah Fajrotuz Zahro	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tanwir Bojonegoro	PENGEMBANGAN EDUWISATA <i>KANOMAN FAMILY STRENGTH</i> (KFS) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI DESA CAMPUREJO - KABUPATEN BOJONEGORO
17	Vivi Vellanita Wanda Damayanti	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	LAPAK BACA KOMUNITAS LITERASI PONOROGO: MENGHIDUPKAN SEMANGAT BACA DARI TAMAN KOTA HINGGA KAMPUNG IDIOT
18	M. Hestu Widiyastono	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indonesia	PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NUSA INDAH DI DESA PUNGPUNGAN - KALITIDU - BOJONEGORO
19	Riska Andriani	Universitas PGRI Ronggolawe Tuban	PENDAMPINGAN DISTRIBUSI BIBIT TANAMAN DAN PEMETAAN <i>GREENHOUSE</i> PADA PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR (P2KP-PKPS) TIM PENGGERAK - PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP - PKK) DESA SE-KABUPATEN TUBAN

20	Agustina Dewi Setyari	Universitas Jember	SEKOLAH PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI DESA
21	Sugeng Hariadi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya	PERCEPATAN PENCAPAIAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI PENDAMPINGAN WIRUSAHA PEMBELAJAR: STUDI KASUS DI DESA JOGOREPUH - KECAMATAN PASREPAN - KABUPATEN PASURUAN
22	Rossa Ilma Silfiah	Universitas Yudharta Pasuruan	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LINGGO - KECAMATAN KEJAYAN - KABUPATEN PASURUAN
23	Rumsari Hadi Sumarto	Program Doktor Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) - Universitas Brawijaya	<i>TRIPLE HELIX</i> DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA-DESA WISATA KABUPATEN MALANG
24	Idham Ibty	Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	INOVASI ATAU PENDEKATAN KOLABORASI?: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU DENGAN <i>ON LINE</i> “DESIMA” BAGI APARATUS DESA

SUBTEMA 1

**PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEDESAAN
(PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, APARATUR PEMERINTAHAN
DESA)
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019 RUANG IV**

25	Bening Hadilinatih	Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA MELALUI PELATIHAN BERBASIS <i>ON LINE</i>
26	Hayat	Universitas Islam Malang	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN
27	Yulitin Sungkowati	Balai Bahasa Jawa Timur	UPAYA MEMBANGUN KEMAMPUAN LITERASI BACA TULIS MASYARAKAT DESA MELALUI KOMUNITAS BACA: STUDI ATAS TBM GELARAN BUKU JAMBU DAAR EL FIKR - DESA JAMBU - KAYENKIDUL - KEDIRI
28	Eri Yusnita Arvianti	Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang	KECENDERUNGAN KARAKTERISTIK PETANI MUDA YANG MENJADI PENDORONG DALAM MENEKUNI MINAT USAHA TANI HORTIKULTURA DI KABUPATEN MALANG
29	Fadillah Putra	Universitas Brawijaya	PARTISIPASI DAN GOVERNANSI DESA
30	Noor Rohman	Pusat Kajian Perdesaan dan Politik Lokal (PUKAPPOL) - UIN Sunan Ampel	PENGUATAN TATA KELOLA DEMOKRATIK UNTUK KEMANDIRIAN DESA: PENGALAMAN KEPALA DESA SEKAPUK
31	Saiku Rokhim	Fakultas Psikologi dan Kesehatan - UIN Sunan Ampel	PEMBINAAN PERAN SERTA KADER DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN POSYANDU DI DESA MOJOSARIREJO - KECAMATAN DRIYOREJO - KABUPATEN GRESIK
32	Silvi Asna Prestianawati	Universitas Brawijaya	TRANSFORMASI POTENSI EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT MELALUI MODAL SOSIAL (STUDI KASUS DI DESA PADANG TEGAL - BALI)

SUBTEMA 2
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA, REVITALISASI KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM),
DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2019 RUANG II

No	NAMA LENGKAP	INSTANSI ASAL	JUDUL ARTIKEL
1	Herwin Mopangga	Universitas Negeri Gorontalo	DESA INDUSTRI MANDIRI PERTANIAN ORGANIK KEMITRAAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
2	Achmad Room Fitrianto	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Ampel	PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI SEKAPUK - UJUNG PANGKAH: UPAYA KEDAULATAN DAN KEMERDEKAAN DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI LOKAL
3	Lambang Raspriyo Aji	Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur	PERAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR UNTUK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DENGAN SISTEM TUMPANGSARI
4	Ana Toni Roby Candra Yudha	UIN Sunan Ampel	PEMBERDAYAAN EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS PEMBANGUNAN KOMUNITAS: STUDI DI DESA PUNCU - KABUPATEN KEDIRI - JAWA TIMUR
5	Wiwik Maryati	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)	STRATEGI MENGUATKAN PELAKU USAHA TEMPE MELALUI INOVASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI DI DESA TEMBARAK - KERTOSONO - NGANJUK
6	Maisarah	Unipdu	PRODUKSI “NATA DE SOYA” DARI LIMBAH CAIR TAHU SEBAGAI POTENSI EKONOMI

			BARU MASYARAKAT DESA DRENGES - KECAMATAN KERTOSONO - KABUPATEN NGANJUK - JAWA TIMUR
7	Lilik Rahmawati	UIN Sunan Ampel	PENGEMBANGAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI PUSAT EKONOMI MASYARAKAT DESA: STUDI PADA MUSHOLLA MAMBAUS SAADAH DESA MANYARSIDORUKUN - KECAMATAN MANYAR - KABUPATEN GRESIK
8	M. Imron Mas'ud	Universitas Yudharta Pasuruan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HASIL TANGKAP IKAN DI KABUPATEN PASURUAN
9	Khoirul Hidayat	Universitas Trunojoyo Madura	PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BANYUSANGKA BERBASIS <i>WEB</i>
10	Misdiantoro	<i>Mandiri Entrepreneur Center (MEC)</i> - Kampus Kemandirian - Yayasan Yatim Mandiri	INOVASI BUDIDAYA AYAM KAMPUNG ASLI UNGGUL DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI PEDESAAN
11	Petrus Wijayanto	Fakultas Ekonomika & Bisnis (FEB) - Universitas Kristen Satya Wacana	MODEL KEWIRAUSAHAAN DESA UNTUK MENUJU DESA MANDIRI: BELAJAR DARI DESA PONGGOK - KECAMATAN POLANHARJO - KABUPATEN KLATEN
12	Maulana Ghani Yusuf	Universitas Diponegoro	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA EKONOMI LOKAL MELALUI ANALISA PRODUK KOMPETITIF PADA KERAJINAN PAHAT BATU DI DESA TAMANAGUNG - KABUPATEN MAGELANG

SUBTEMA 2

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA, REVITALISASI KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TANGGAL 4 SEPTEMBER 2019 RUANG III

13	Dimas Aditya Eka Wardana	Universitas Islam Malang	UNIT STUDIO <i>MARKETING</i> DAN LINTAS JARINGAN (USMAN) SEBAGAI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
14	Ratna Ekasari	Universitas Ma'arif Hasyim Latif	PENGEMBANGAN POTENSI DESA PESISIR JAWA TIMUR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
15	Mokh. Rum	Program Doktor Ilmu Pertanian - Universitas Gadjah Mada (UGM)	STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LEMBAH DILEM SEBAGAI ASET POTENSIAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA DILEM - KECAMATAN KEPANJEN - KABUPATEN MALANG
16	Lilis Suaibah	Universitas Trunojoyo Madura	PENDAMPINGAN USAHA SAMBAL PECEL DI DESA CAMPOR - KECAMATAN GEGER - KABUPATEN BANGKALAN
17	Mei K. Abdullah	Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Banyuwangi	MOMENGI DAN PERANNYA SEBAGAI KONTRIBUTOR UTAMA PENGEMBANGAN EKONOMI DUSUN TUMBA - DESA PONGONGAILA
40	Endah Sri Redjeki	Universitas Muhammadiyah Gresik	PENGEMBANGAN EKONOMI DESA BERBASIS PERTANIAN KACANG BAMBARA
19	Muhamad Ismail	Balitbangdaprov Papua	PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KEPULAUAN YAPEN - PROVINSI PAPUA
20	A.Taufiq Hidayat	Desa Bendo - Kecamatan Kapas - Kabupaten Bojonegoro	STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT LOKAL: STUDI TENTANG TINDAKAN RASIONAL INSTRUMENTA PENGELOLAAN WISATA WADUK GROBOGAN -

			DESA BENDO - KECAMATAN KAPAS - KABUPATEN BOJONEGORO
21	Agustinus Hartopo	Balitbangdaprov Papua	PENGEMBANGAN EKONOMI DESA MELALUI PENGELOLAAN SAGU GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANINYA
22	Mulyanto	Universitas Sebelah Maret	BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
23	Marita Ika Joesidawati	Universitas PGRI Ronggolawe	PENINGKATAN PRODUKSI DAN MANAJEMEN USAHA IKAN ASAP MELALUI ALAT PENGASAPAN IKAN "EFHILIK"

SUBTEMA 2

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA, REVITALISASI KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019 RUANG II

24	Dian Ferricha	Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (PUSKOD) - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung	PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MELALUI PENGUATAN SISTEM RESI GUDANG
25	Eny Latifah	Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI Tabah) Lamongan	KONTRIBUSI KOPERASI SYARIAH DALAM MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN DESA MANDIRI DI BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN PEREKONOMIAN DESA DI PACIRAN - LAMONGAN
26	Susanti Dhini Anggraini	Universitas PGRI Ronggolawe Tuban	ALAT PEMOTONG IKAN RUCAH BAGI KELOMPOK KJA “SENDANG MARINA” KABUPATEN TUBAN
27	Abd. Hannan	Magister Sosiologi - Universitas Airlangga	KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA BERKELANJUTAN: STUDI PADA EKONOMI KREATIF DESA BERBASIS <i>SANTRIPRENEURSHIP</i> DI DESA KACOK - KABUPATEN PAMEKASAN
28	Rizqi Rahmawati	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	POTENSI PENGEMBANGAN DESA MANGUNSUMAN SEBAGAI KAMPUNG PECEL DI KABUPATEN PONOROGO
29	Muchammad Firman Mauludin	UIN Sunan Ampel	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA: STUDI DI DESA WISATA SAWAHAN - KECAMATAN WATULIMO - KABUPATEN TRENGGALEK
30	Sumarno	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah -	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI PEMANFAATAN TANAH BAON:

		Tempurrejo - Ngawi	STUDI PADA MASYARAKAT DESA PANDEAN - KECAMATAN KARANGANYAR - KABUPATEN NGAWI
31	Andrean Eka Hardana	Universitas Brawijaya	PENGUATAN MANAJEMEN AGRIBISNIS DALAM RANGKA Mendukung Pengembangan Desa Mandiri <i>PILOT PROJECT</i> DESA SUMBERGONDO - KECAMATAN GLENMORE - KABUPATEN BANYUWANGI
32	Irwan Kurniawan Soetijono	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI BUMDES DI DESA TAMANSARI - KECAMATAN LICIN - KABUPATEN BANYUWANGI
33	Dania Rahmatina	Universitas Trunojoyo Madura	STRATEGI PEMBANGUNAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI: STUDI PEMBANGUNAN PARIWISATA BATIK DI DESA TELAGA BIRU - KECAMATAN TANJUNG BUMI - KABUPATEN BANGKALAN
34	Medea Rahmadhani Utomo	Fakultas Pertanian - Universitas Brawijaya	STABILISASI PANGAN DESA MELALUI MODEL BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI JAWA TIMUR

SUBTEMA 2

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA, REVITALISASI KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019 RUANG III

35	Ayu Wanda Febrian	Politeknik Negeri Banyuwangi	REVITALISASI BUDAYA SEBAGAI ATRAKSI WISATA BARU GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA ADAT KEMIREN - BANYUWANGI
36	Endang Tri Wahyurini	Universitas Islam Madura	PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MENUJU DESA PESISIR MANDIRI
37	Endriana Wahyu	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan	MODEL PENGEMBANGAN DESA TEMATIK DI KABUPATEN PACITAN
38	Rahayu Relawati	Universitas Muhammadiyah Malang	STRATEGI PENGEMBANGAN EDUWISATA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KOMUNITAS DI DESA TAWANGARGO
39	Silvia Devi	Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat	STRATEGI BERTAHAN HIDUP NELAYAN JARING ROBIN: STUDI KASUS NELAYAN JARING ROBIN DI NAGARI LANSANO TARATAK - KECAMATAN SUTERA - KABUPATEN PESISIR SELATAN - PROVINSI SUMATERA BARAT
18	Emy Hidayati	IAI Ibrahimy Banyuwangi	TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA MENJADI UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEBERLANJUTAN SUMBER PERMODALAN PELAKU USAHA MIKRO PEDESAAN
41	Mukti Ali Asyadzili	Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan - Universitas Diponegoro	UPAYA PERLINDUNGAN POTENSI TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR BALI UTARA UNTUK MEWUJUDKAN DESA WISATA BAHARI DAN MEMPERKUAT PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

42	Yudiyanto Tri Kurniawan	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur (Balitbangprov Jatim)	PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SENTUL
43	Akhmad Farid	Universitas Trunojoyo Madura	PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR BERBASIS DESA WISATA BAHARI DI PULAU GILI IYANG - KABUPATEN SUMENEP - JAWA TIMUR
44	Anugerah Yuka A.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PERSPEKTIF INOVASI SEKTOR BISNIS DAN PUBLIK
45	Teuku Muhammad Fadil	Universitas Brawijaya	REVITALISASI EKONOMI LOKAL MELALUI <i>CAFÉ</i> SAWAH (STUDI KASUS DESA PUJON KIDUL – KABUPATEN MALANG)

SUBTEMA 3
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA
(KOPERASI PEREMPUAN, PETANI, NELAYAN; PENATAAN
PASAR TRADISIONAL;
***ONE VILLAGE ONE PRODUCT*; DAN AGROPOLITAN)**
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2019 RUANG IV

No	NAMA LENGKAP	INSTANSI ASAL	JUDUL ARTIKEL
1	Heru Irianto	Universitas Bhayangkara	MODEL OPTIMALISASI BUDIDAYA DURIAN LOKAL SEBAGAI BASIS TERWJUDNYA DESA AGROWISATA DI WONOSALAM
2	Fitriyatus Sholihah	Bappedakab Sidoarjo	PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN INOVASI DESA
3	Edy Santoso	Program Doktor Ilmu Ekonomi - Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) - Universitas Brawijaya	KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DESA YANG BERDAYA SAING
4	Ekna Satriyati	Universitas Trunojoyo Madura	MODAL SOSIAL SEBAGAI PENDUKUNG PEREMPUAN PERAMU HERBAL DALAM PENGELOLAAN PONDOK JAMU BERBASIS <i>SHELTER</i> UNTUK PENGEMBANGAN WISATA SEBAGAI RINTISAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN BANGKALAN DAN SUMENEP
5	Sujarwo	Universitas Brawijaya	REVITALISASI SENTRA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS (SPA) SEBAGAI <i>LEVERAGE FACTOR</i> EKONOMI WILAYAH BERBASIS EKONOMI PEDESAAN
6	Nur Dina Camelia	UIN Sunan Ampel	OPTIMALISASI PELIBATAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN DESA

			MANDIRI MELALUI KOPERASI PEREMPUAN
7	Indra Pratama Putra Salmon	UGM	PENGEMBANGAN POTENSI PESISIR DAN WISATA LOKAL DALAM SKEMA <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> : STUDI DI DESA TANJUNG PASIR – KABUPATEN TANGERANG
8	Hevi Kurnia Hardini	Universitas Muhammadiyah Malang	MEMBANGUN DESA MANDIRI MELALUI <i>SMALL-SCALE FISHERIES GOVERNANCE</i> SEKTOR KOMODITAS TANGKAP GURITA PADA DESA KEDUNGSALAM - KECAMATAN DONOMULYO - KABUPATEN MALANG
9	Masetya Mukti	Politeknik Negeri Banyuwangi	KLASTERISASI <i>ONE VILLAGE ONE PRODUCT</i> (OVOP) - <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i> (CBT) GUNA PENINGKATAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING DI BANYUWANGI
10	M. Amir. H.T.	Balitbangprov Jatim	PENGEMBANGAN MODEL AGROPOLITAN BERBASIS INDUSTRI PERTANIAN DI JAWA TIMUR
11	Dendy Setyawan	Balitbangprov Jatim	PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS APEL DENGAN MENINGKATKAN LAHAN PRODUKSI BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
12	Diah Novianti	Balitbangprov Jatim	PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA PANTAI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DESA: STUDI KASUS PANTAI KUTANG – KABUPATEN LAMONGAN



Pemerintah
Provinsi Jawa Timur

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI

oleh Khofifah Indar Parawansa

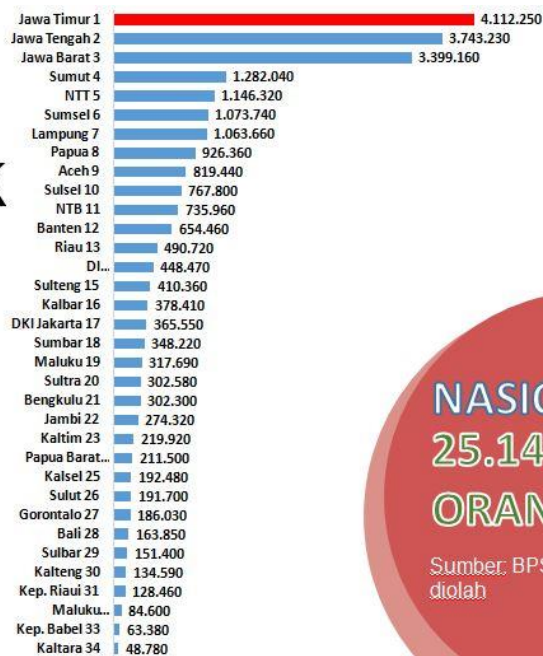
Disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Balitbang

BATU | 3 SEPTEMBER 2019

1

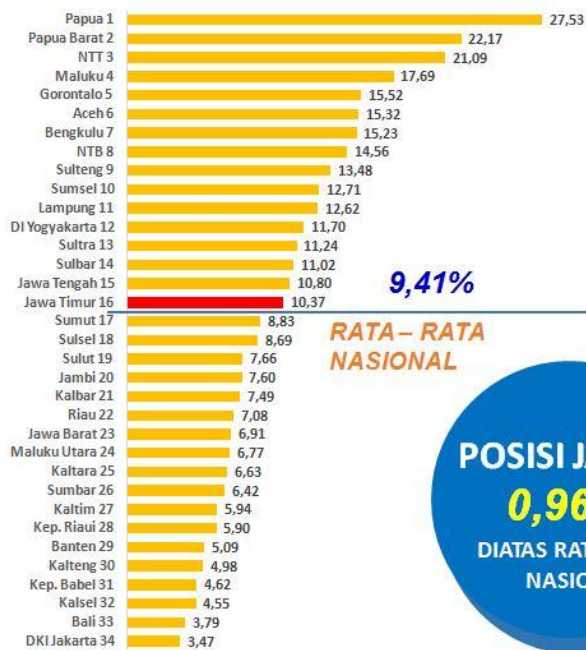
JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI

MARET
2019



NASIONAL
25.144.720
ORANG

Sumber: BPS RI, 2019,
diolah



9,41%
RATA – RATA NASIONAL



TINGKAT KEMISKINAN

MENURUT PROVINSI

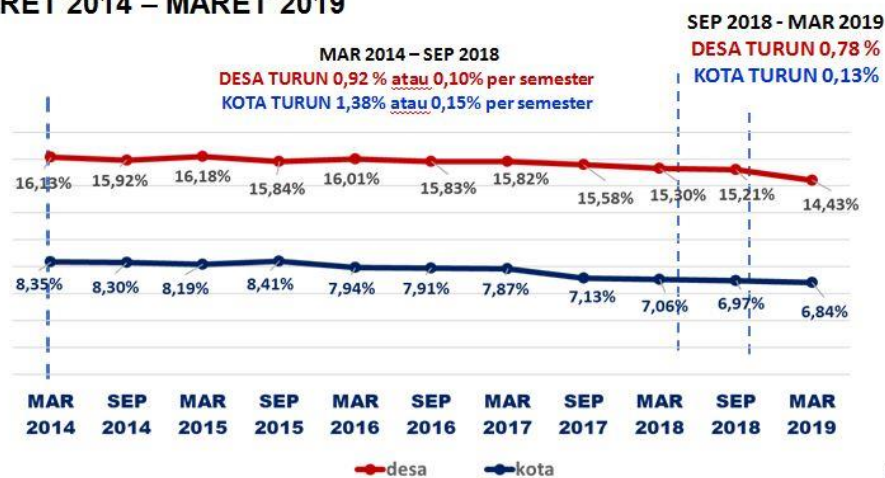
MARET 2019

Sumber: BPS RI, 2019, diolah

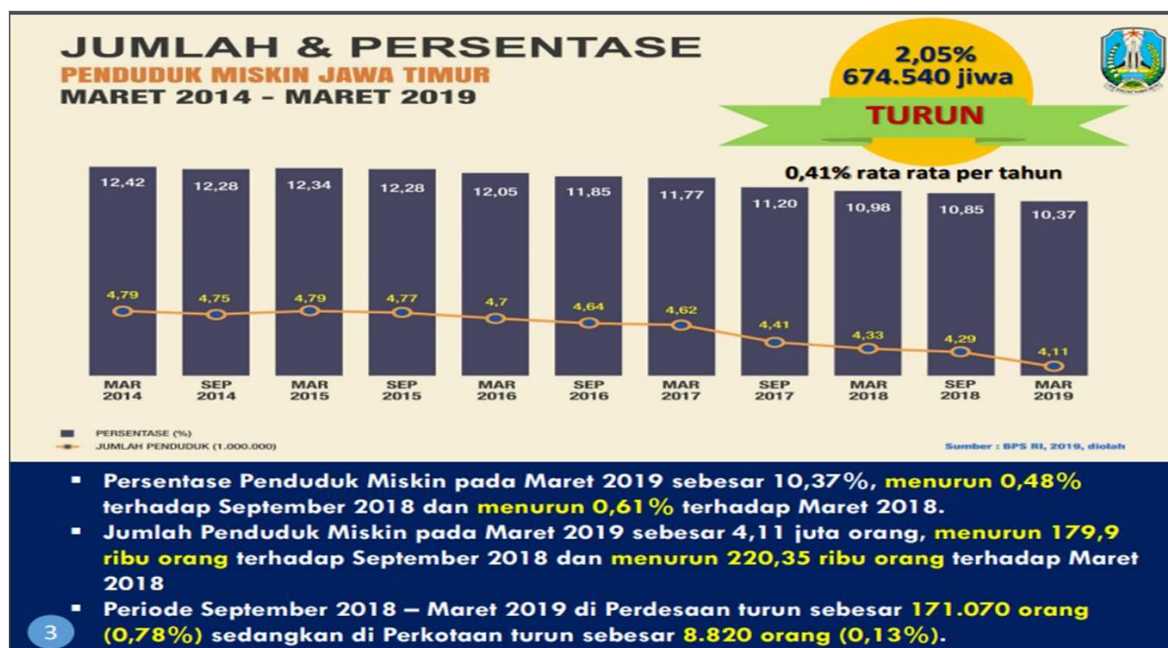
PERSENTASE KEMISKINAN PERKOTAAN & PERDESAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

MARET 2014 – MARET 2019



Sumber: BPS Jatim 2019



KANTONG KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR



No	Nama Wilayah Kantong Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	Prevalensi Stunting (%)
1	Sampang	21.21	47.93
2	Sumenep	20.16	34.33
3	Bangkalan	19.59	41.87
4	Probolinggo	18.71	39.90
5	Tuban	15.31	30.76
6	Pamekasan	14.47	44.12
7	Bondowoso	14.39	37.98
8	Lamongan	13.80	35.49
9	Bojonegoro	13.16	34.91
10	Situbondo	11.82	30.66
11	Kediri	11.31	29.36
12	Malang	10.37	31.74
13	Lumajang	9.98	34.01
14	Jember	9.98	38.31
15	Pasuruan	9.45	39.70

Angka Stunting Di Jawa Timur Tahun 2018 Mencapai 32,81 % Kabupaten Dengan Angka Stunting Tinggi Di Antaranya Adalah:

1. Pamekasan,
2. Sampang
3. Bangkalan,
4. Sumenep,
5. Nganjuk,
6. Trenggalek,
7. Probolinggo,
8. Lamongan,
9. Malang,
10. Jember Dan
11. Bondowoso

ANGKA STUNTING DI JAWA TIMUR



Sumber: Susenas dan Riskesdas 2018

KERANGKA PENCEGAHAN STUNTING

**Intervensi Gizi
Spesifik
Berkontribusi 30 %**

Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.

**Intervensi Gizi
Sensiti
Berkontribusi 70%**

Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK.

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

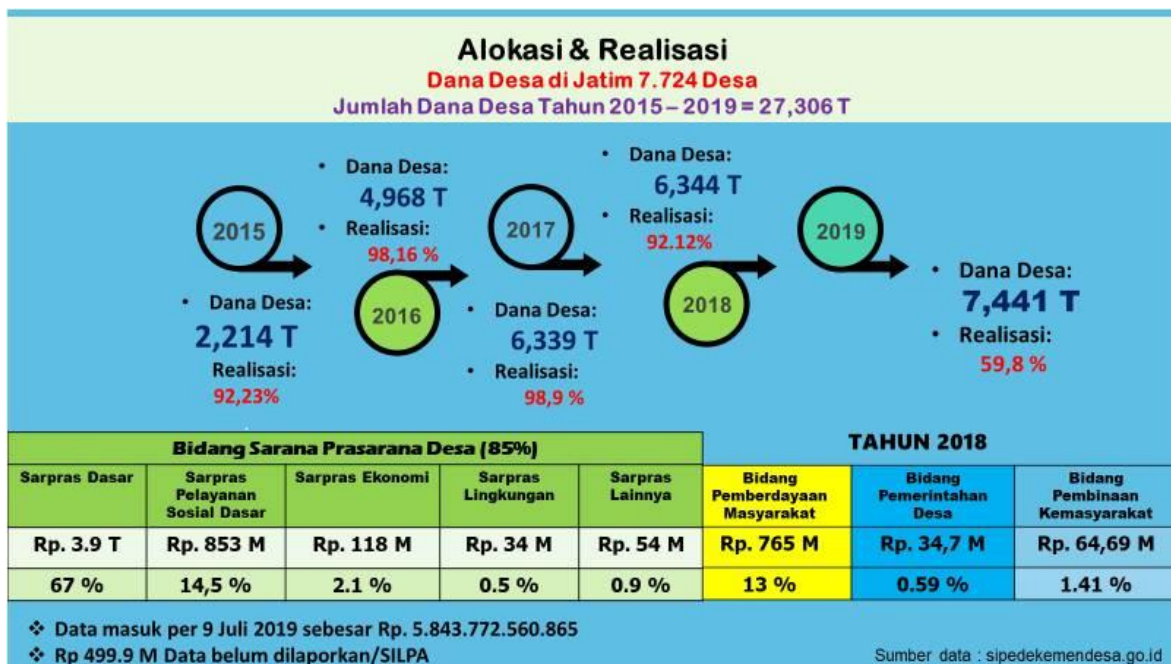
BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Status Desa	2018	2019	Perubahan
Sangat Tertinggal	88 Desa	-	Turun 88 Desa
Tertinggal	1.569 Desa	361 Desa	Turun 1.208 Desa
Berkembang	5.006 Desa	5.355 Desa	Naik 349 Desa
Maju	989 Desa	1.838 Desa	Naik 849 Desa
Mandiri	69 Desa	166 Desa	Naik 97 Desa
	7.721 Desa	7.721 Desa	

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

BERDASARKAN INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)

Status Desa	BAPPENAS 2014	BPS PODES 2018	Perubahan
Tertinggal	207 Desa	82 Desa	Turun 125 Desa
Berkembang	6.822 Desa	6.604 Desa	Turun 218 Desa
Mandiri	692 Desa	1.035 Desa	Naik 343 Desa
	7.721 Desa	7.721 Desa	



NAWA BHAKTI SATYA JATIM BERDAYA



KLINIK BUMDesa

- PEMETAAN
- PELATIHAN
- PENDAMPINGAN
- EXPO



PENGAMPU

DINAS PMD PROV. JATIM
PT. HM SAMPOERNA, Tbk
5 BAKORWIL
4 PERGURUAN TINGGI
(UB, UNAIR, UNEJ, UNIJOYO)

LINGKUP KEGIATAN

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 SOSIALISASI DI 5 BAKORWIL
4 PERGURUAN TINGGI (MEI 2019) 2 PEMETAAN DAN POTENSI JENIS USAHA BUMDesa (JUNI 2019) 3 TUTORIAL ONLINE
KLINIK BUMDesa (JUNI - DES 2019) 4 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BUMDesa
SETC PT. HM SAMPOERNA Tbk
BAKORWIL (JULI 2019) | <ol style="list-style-type: none"> 5 PENDAMPINGAN DESA
PERGURUAN TINGGI & BAKORWIL
(AGUSTUS - NOVEMBER 2019) 6 LOMBA BUMDesa
(APRIL 2019) 7 EXPO BUMDesa
(NOVEMBER - DESEMBER 2019) |
|---|--|

SASARAN

1. 20 Desa di 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur (Malang, Jember, Sumenep, Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Tuban, Kediri, Lamongan, Bojonegoro)
2. Setiap satu desa diwakili oleh 1 BUMDES
3. Setiap Bumdes mengirimkan 30 orang untuk mengikuti pelatihan
4. Pasca pelatihan, setiap bumdes akan didampingi oleh 1 fasilitator
5. Setiap BUMDES menghasilkan 2 UKM unggulan

MATERI KLINIK BUMDesa

Ceremonial peluncuran Klinik BUM Desa dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 di Wisata Boonpring BUM Desa Kerto Raharjo Desa Sanankerto Kec. Turen Kabupaten Malang.

Klinik BUM Desa merupakan kolaborasi antara Dinas PMD Prov. Jatim dengan PT. HM Sampoerna. Tbk, meliputi kegiatan:

- Tutorial Klinik BUM Desa secara online
- Pemetaan potensi & jenis usaha BUM Desa
- Peningkatan kapasitas & kewirausahaan BUM Desa
- Penguatan jejaring pemasaran
- Pertumbuhan ekonomi UMKM

Klinik BUM Desa:

BUM Desa yang terdaftar se Jatim: 421
BUM Desa aktif di Klinik BUM Desa: 117
Jumlah Materi yg diikuti: 8 Materi
Materi terbanyak: Sistem Keuangan BUM Desa

PERMASALAHAN KLINIK BUMDesa

- Buku Panduan Peserta perlu pembenahan
- Panduan sekretariat perlu perbaikan
- Pengembangan grafik user interface untuk aplikasi
- Pengembangan aplikasi ke arah mobile base
- Kurangnya penyediaan materi penunjang kurikulum klinik BUM Desa
- Belum adanya materi pembelajaran berbasis video animasi
- Belum ada pengembangan Inovasi materi secara berkelanjutan
- Pengintegrasian data BUM Desa dan Klinik BUM Desa berdasarkan klasifikasi data isian BUM Desa

Pengenalan SNI
BUM Desa

Pengelolaan Manajemen
BUM Desa

Filosofi
BUM Desa

Produk Hukum
BUM Desa

1 Desain
Produk

2

3 Pengelolaan
BUM Desa

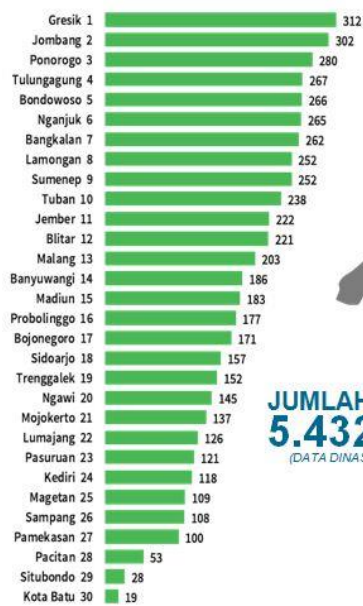
4

5 Sistem Keuangan
BUM Desa

6

7 Pendirian
BUM Desa

8

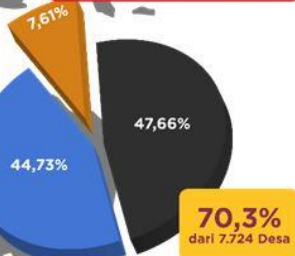


JUMLAH BUM Desa
5.432 UNIT
(DATA DINAS PMD JATIM 2018)



TINGKAT DASAR
2.589 UNIT
TINGKAT TUMBUH
2.430 UNIT
TINGKAT BERKEMBANG & MAJU
413 UNIT

Klasifikasi Pengembangan BUM Desa di Jawa Timur



BUMDES KERTO
 RAHARJO
 DESA SANANKERTO
 KEC. TUREN, KAB.
 MALANG JAWA TIMUR

Laba Th.2018 : Rp. 1.457.044.000,-
PAD 2018 : Rp. 437.113.000
Laba 2018 : Rp. 1.098.330.900,-
Ienis Wisata : Embung, Eko & Edukasi Wisata Pohon Bambu, Pasar Rakyat, Agen Laku Pandai, PAM, Bank Sampah, EO

Eko Wisata



BOON PRING





BUMDesa Bersama “Singosari”
Kecamatan : SINGOSARI
Kabupaten : MALANG

Mempunyai usaha “Desa S'Mart” yaitu program dari kemendesa PDTT, berbentuk toko mini market yang menampung kebutuhan pokok masyarakat dan hasil produk dari kelompok dan Desa di Kecamatan Singosari



1. UNIT USAHA SIMPAN PINJAM



2. UNIT USAHA GALERI KERAJINAN

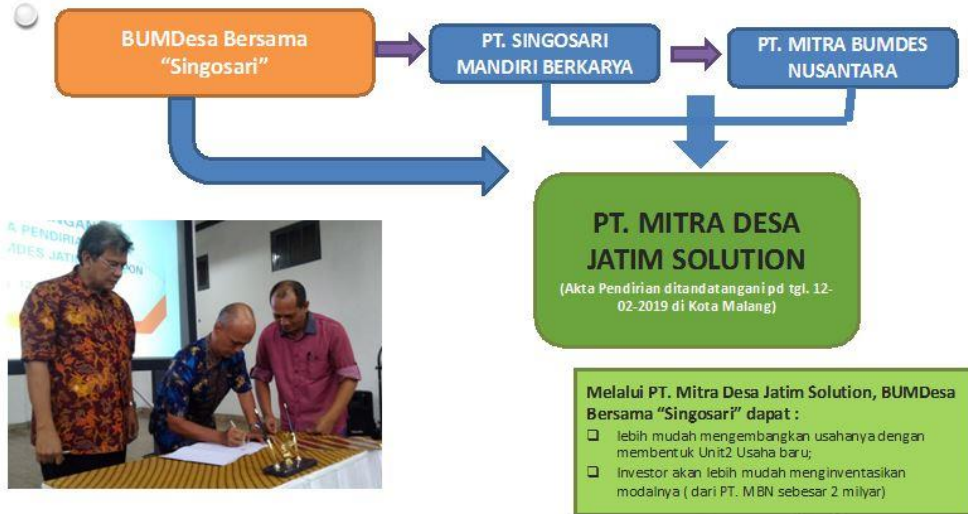
(WWW.GALERIKERAJINAN.SINGOSARI.COM)



3. Unit Usaha Perdagangan
(Singosari Smart)



KESUKSESAN BUMDesMa KERJASAMA Dengan PIHAK KETIGA



TERIMA KASIH



PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI

AHMAD ERANI YUSTIKA

KERANGKA PAPARAN

- Pembesaran Kapasitas Ekonomi
- Pembangunan Ekonomi
Indonesia
- Pembangunan Desa
- Pembangunan Kawasan
Perdesaan
- Hasil Pembangunan Desa
- Peningkatan Literasi Desa
- Contoh Inovasi

PEMBESARAN KAPASITAS EKONOMI

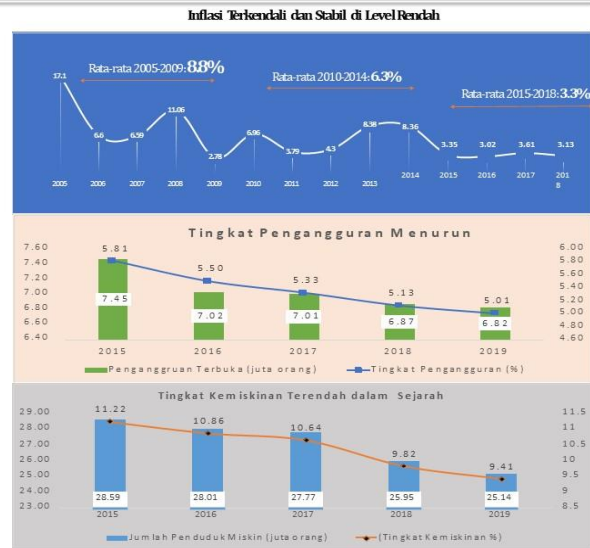
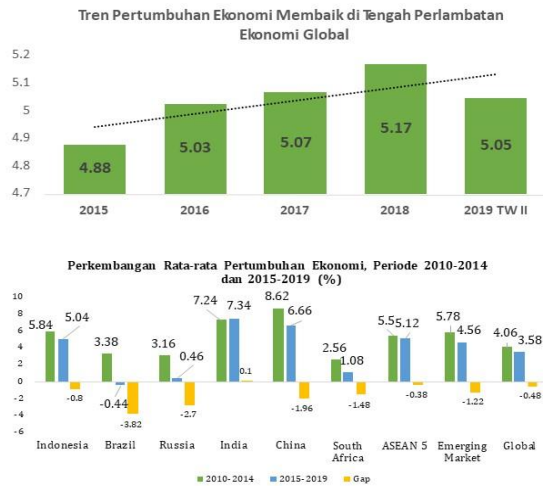


PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

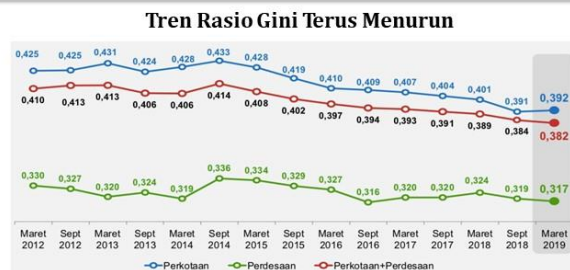


- Kerangka Makroekonomi yang Kokoh
- Keadilan Ekonomi
- Kemandirian Ekonomi
- Pembangunan yang Berkelanjutan
- Tata Kelola Pembangunan

KERANGKA MAKROEKONOMI KOKOH



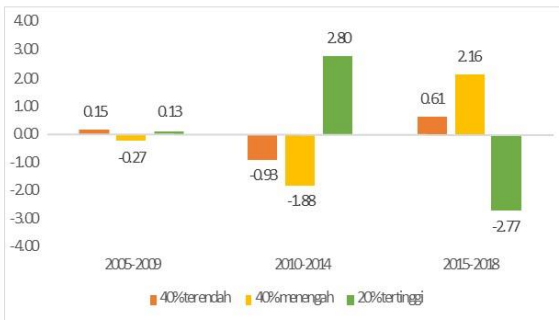
KEADILAN EKONOMI



Bantuan Sosial



Distribusi Pengeluaran Penduduk Berpendapatan Rendah dan Menengah Naik



Reforma Agraria

- **Target Reforma Agraria:** 9 juta hektar
- **Target Perhutanan Sosial:** 12,7 juta hektar

KEMANDIRIAN EKONOMI



Divestasi Freeport

Dampak Positif

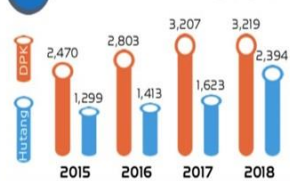
- ▶ Kelangsungan operasi PTFI (aktivitas ekonomi Papua)
- ▶ Pendapatan negara meningkat
- ▶ Terciptanya multiplier effect (smelter + TKDN)
- ▶ Transfer teknologi pengelolaan tambang paling kompleks
- ▶ Divestasi saham 51% yang lebih efisien
- ▶ Menghindari pengadilan arbitrase

Pemerintah berhasil mengakuisisi sumber daya alam strategis, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

1. Perkembangan BUMN Yang Mengalami Kerugian

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah BUMN Rugi	30	27	21	25	14
Total BUMN	139	119	118	118	115
Persentase BUMN Rugi	22%	23%	18%	21%	12%
Total Kerugian	Rp34,7 T	Rp10,2 T	Rp11,1 T	Rp6,7 T	Rp5,5 T

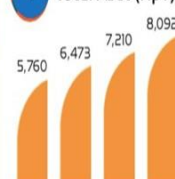
2 Total DPK & Hutang (RpT)



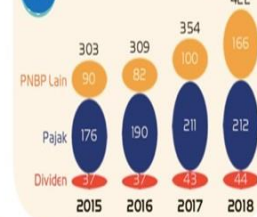
3 Total Laba (RpT)



4 Total Aset (RpT)



5 Kontribusi APBN (RpT)



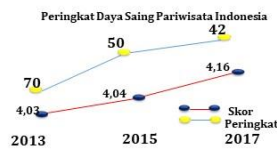
Sumber: Kementerian BUMN

TATA KELOLA PEMBANGUNAN

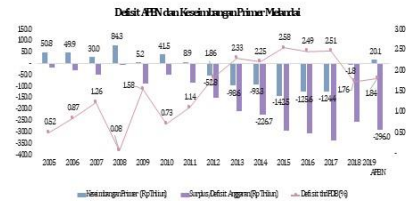
Postur APBN Produktif

Alokasi Belanja Fungsi terhadap Belanja Pusat (%)	2005-2009	2010-2014	2015-2019
Pelayanan Umum	68.3	65.0	35.7
Pertahanan	4.2	5.8	8.2
Ketertiban dan Keamanan	3.5	2.7	8.3
Ekonomi	8.0	9.1	20.1
Perlindungan Hidup	0.9	0.9	0.9
Perumahan dan Fasilitas Umum	1.7	2.6	1.9
Kesehatan	2.4	1.6	4.0
Pariwisata	0.2	0.2	0.4
Agama	0.3	0.3	0.6
Pendidikan	10.0	11.0	10.7
Perlindungan Sosial	0.5	0.8	9.4

Pengembangan Sumber Ekonomi Baru: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



No.	Tahun	Devisa (milyar USD)
1.	2012	9,12
2.	2013	10,05
3.	2014	11,16
4.	2015	12,23
5.	2016	13,48
6.	2017	15,20
7.	*2018	17,00
8.	*2019	20,00

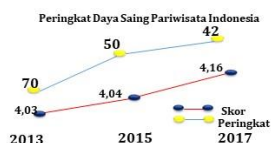


TATA KELOLA PEMBANGUNAN

Postur APBN Produktif

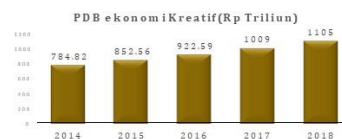
Alokasi Belanja Fungsi terhadap Belanja Pusat (%)	2005-2009	2010-2014	2015-2019
Pelayanan Umum	68.3	65.0	35.7
Pertahanan	4.2	5.8	8.2
Ketertiban dan Keamanan	3.5	2.7	8.3
Ekonomi	8.0	9.1	20.1
Perlindungan Hidup	0.9	0.9	0.9
Perumahan dan Fasilitas Umum	1.7	2.6	1.9
Kesehatan	2.4	1.6	4.0
Pariwisata	0.2	0.2	0.4
Agama	0.3	0.3	0.6
Pendidikan	10.0	11.0	10.7
Perlindungan Sosial	0.5	0.8	9.4

Pengembangan Sumber Ekonomi Baru: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Devisa Sektor Pariwisata

No.	Tahun	Devisa (milyar USD)
1.	2012	9,12
2.	2013	10,05
3.	2014	13,16
4.	2015	12,23
5.	2016	13,48
6.	2017	15,20
7.	*2018	17,00
8.	*2019	20,00

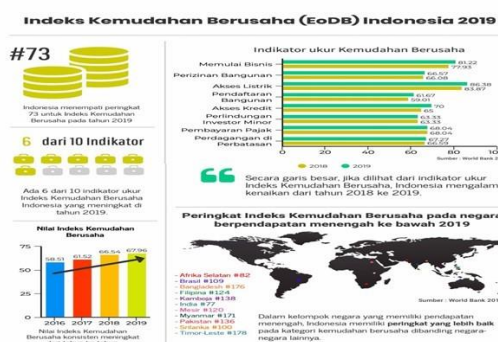
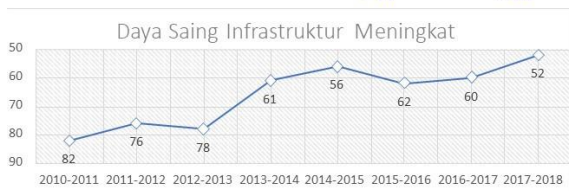


PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Peringkat Indeks Logistik dan Perbaikan Iklim Dunia Usaha Membaik

Peringkat *Logistic Performance Index (LPI)* Keseluruhan

TAHUN	INDONESIA	FILIPINA	MALAYSIA	VIETNAM	THAILAND	SINGAPURA
2016	63	71	32	64	45	5
2018	46	60	41	39	32	7
	↑ 17	↑ 11	↓ 9	↑ 25	↑ 13	↓ 2



PEMBANGUNAN DESA

DESKRIPSI DESA DI INDONESIA

Jumlah Desa di
Indonesia 74.958

Lebih dari 80 persen
berbasis sektor
pertanian (dalam
pengertian luas)

Sekitar 80 persen
masuk dalam kategori
Desa Berkembang dan
Mandiri (Indeks
Pembangunan Desa)

Jumlah penduduk desa
sekitar 49 persen dari
total penduduk
Indonesia

Persentase penduduk
miskin desa jauh lebih
tinggi dibandingkan
wilayah perkotaan

Tingkat pengangguran
dan ketimpangan desa
lebih rendah
dibandingkan wilayah
perkotaan

12

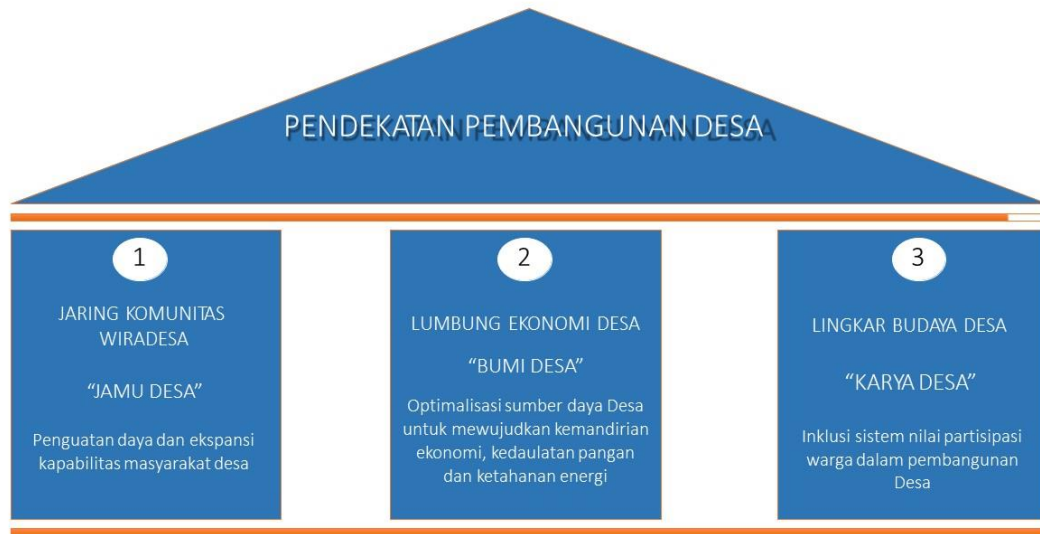
POLITIK PEMBANGUNAN DESA



POLITIK KEDAULATAN DESA



TRI MATRA PEMBANGUNAN DESA



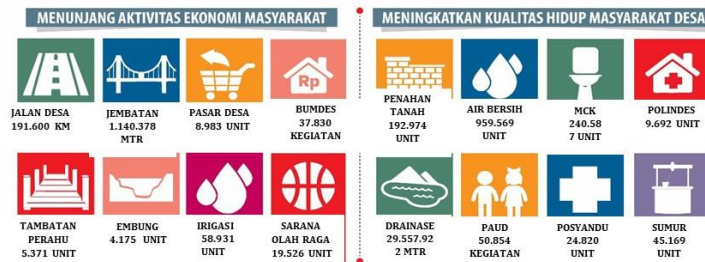
POLITIK LITERASI DESA: BALAI RAKYAT



DANA DESA



Alokasi Dana Desa



Pemanfaatan Dana Desa*

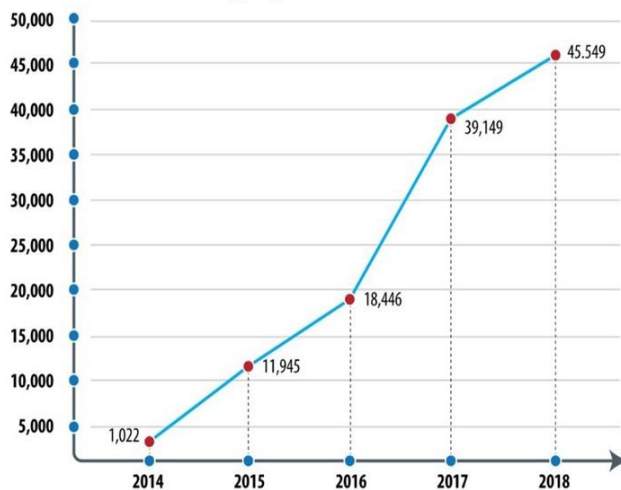
Pemerintah berkomitmen membangun ekonomi dari kota hingga pelosok desa melalui peningkatan dana desa,

Sumber <http://sipede.pjmd.kemendes.go.id>
*per 12 Desember 2018

17

OPTIMALISASI BUMDESA

Perkembangan Jumlah BUMDesa

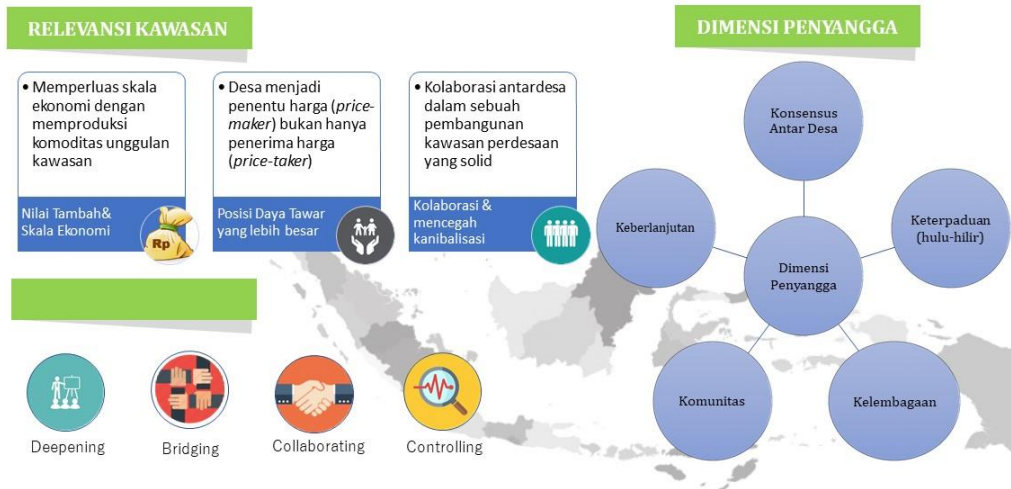


- BUMDesa merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja.
- BUMDesa juga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan dengan tujuan menggerakkan perekonomian warga desa
- Kerjasama peningkatan literasi masyarakat melalui BUMDesa dalam penyelenggaraan taman baca atau perpustakaan desa

Sumber : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2018

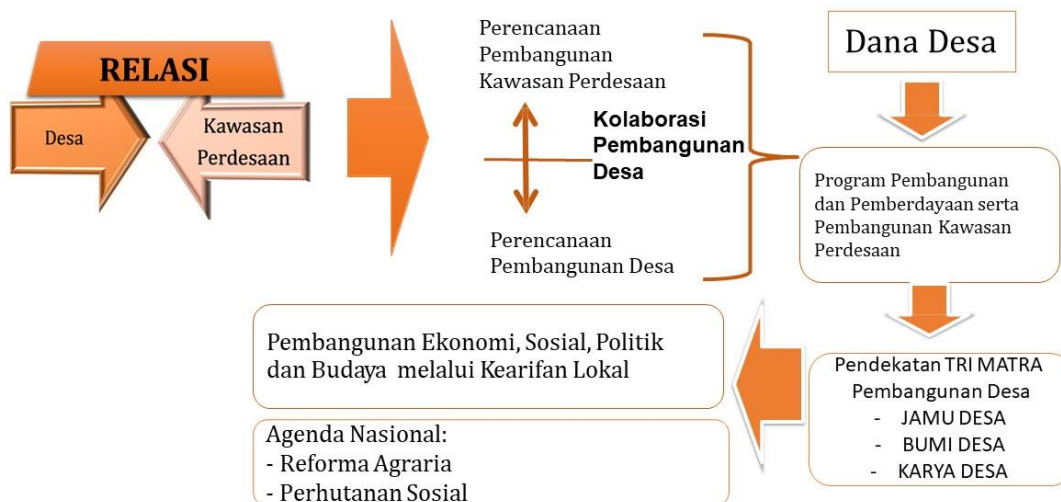
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Kerangka Dasar Pembangunan Kawasan Perdesaan



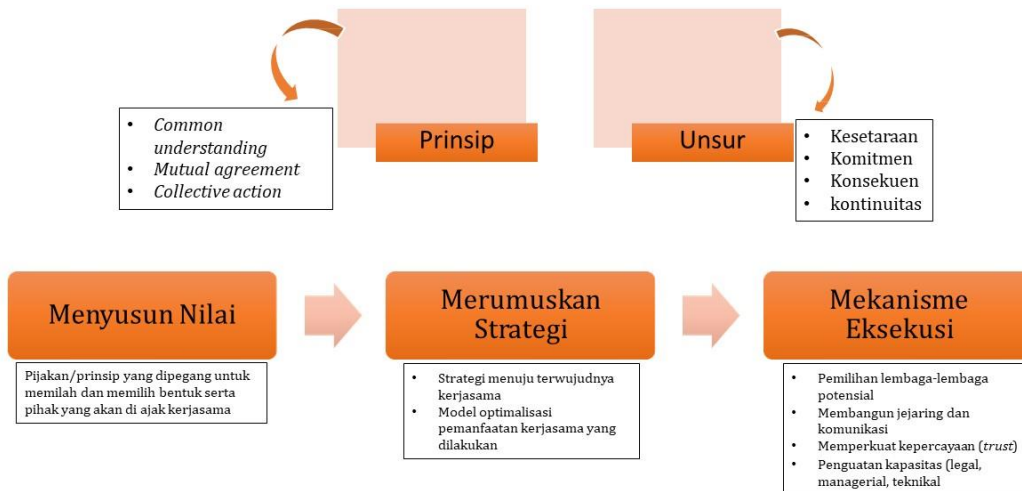
KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KOLABORASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

PRINSIP DAN UNSUR KOLABORASI

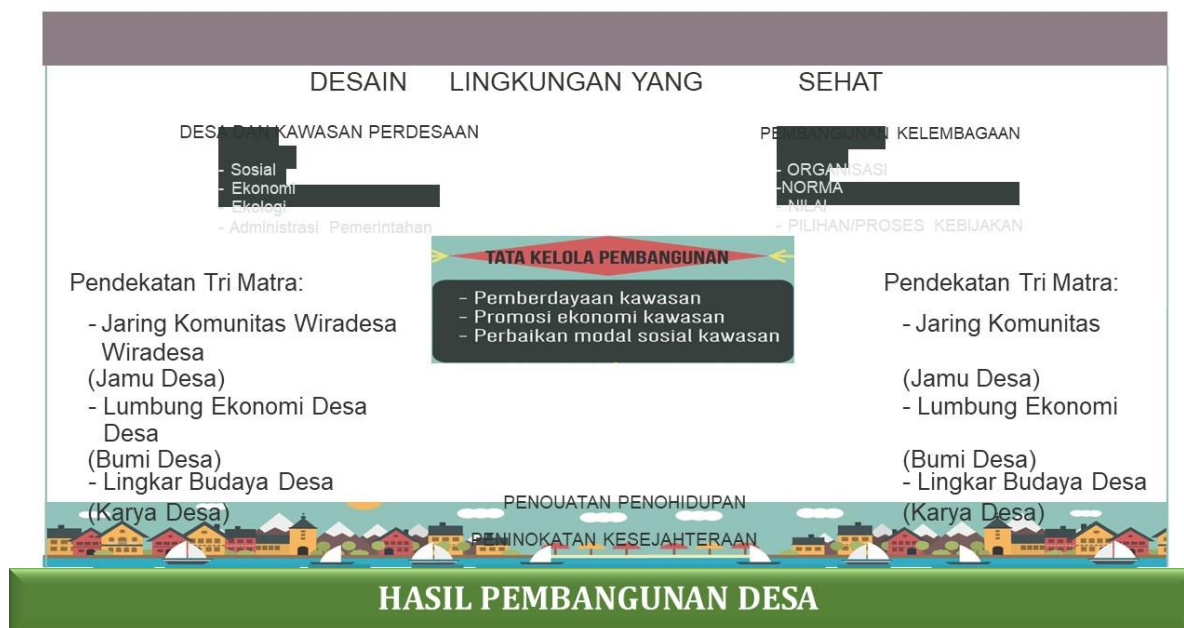


PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

TEMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

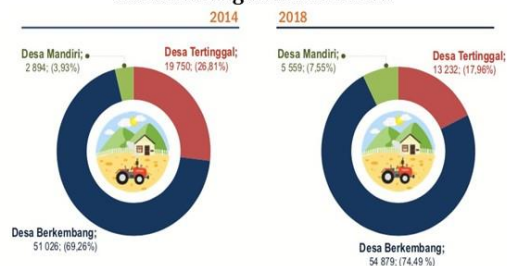


Penggunaan Dana Desa per Bidang (%)

NO	BIDANG KEGIATAN	PRESENTASE
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	▪ Sarana Prasarana Dasar	45%
	▪ Sarpras Pelayanan Sosial Dasar	19%
	▪ Sarpras Ekonomi	3%
	▪ Sarpras Lingkungan	5%
	▪ Sarpras Lainnya	4%
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa	13%
3	Penyelenggaraan Pemerintahan	2%
4	Pembinaan Kemasyarakatan	9%

- Berdasarkan survei PODES 2018 Jumlah desa berdasarkan status mandiri dan berkembang mengalami peningkatan dari 51.026 Desa (2014) menjadi 54.879 desa (2018)
- Jumlah desa dengan status tertinggal mengalami penurunan dari 19.559 (2014) menjadi 13.232 (2018)

Perkembangan Status Desa



Perkembangan Status Desa berdasarkan Indikator



Sumber: BPS

PENINGKATAN LITERASI DESA

Tahapan Literasi Masyarakat

Tahap Penyadaran

Tahap pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri

Tahap Transformasi

Tahap perubahan wawasan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan

Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual

Tahap kecakapan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sumber: Ambar Teguh (2004)

LANJUTAN...

Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides)

Laboratorium Desa

Rekrutmen Pendamping Desa

Pelatihan dan Pengembangan Perdesaan (kewirausahaan, Investasi Perdesaan, teknologi tepat guna, dll)

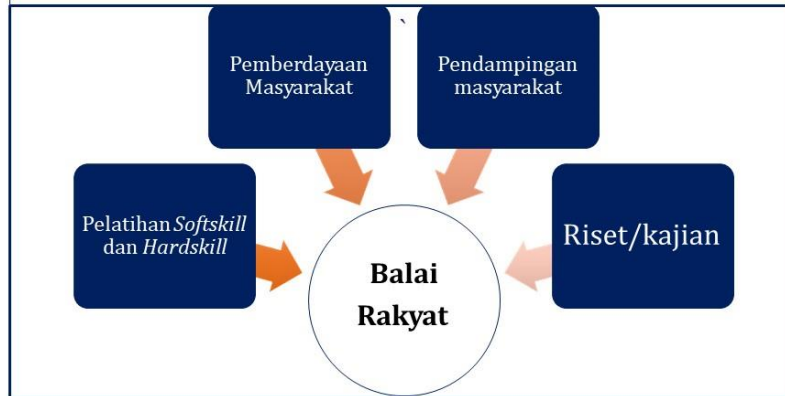
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Riset, Penelitian, Kajian

LANJUTAN...

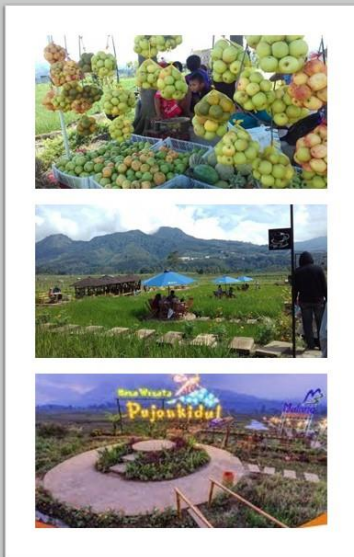
PENGUATAN LITERASI PERDESAAN:

- Inovasi Teknologi
- Inovasi Sistem Pembangunan Desa



INOVASI BUDIDAYA KEPITING

- Inovasi perikanan budidaya: budidaya kepiting
- Budidaya dengan cara vertical yaitu satu kamar satu ekor, dan sistem pengairan tertutup, sehingga Kepiting bisa dibudidaya di dalam "apartemen".
- Ruang budidaya yang digunakan cukup 70 meter per segi untuk 1.000 ekor; penggunaan pakan sedikit, penggunaan air dan listrik hemat, dan kepiting yang dihasilkan juga lebih bersih dengan pertumbuhan baik
- Kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi nelayan dan petambak, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah menjadi kunci
- Inovasi ini membuktikan bahwa budidaya protein hewani air asin (ke depannya) sudah dapat dilakukan meskipun tidak di pantai



29

INOVASI DESA WISATA

- Beberapa tahun terakhir; banyak bermunculan desa yang berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
- Beberapa desa memanfaatkan potensi alam yang dimiliki untuk bertransformasi menjadi desa wisata.
- Desa wisata Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur; memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang ada sebagai desa wisata dan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar
- Tema yang diusung oleh desa ini adalah wahana wisata alam dan edukasi dengan menyediakan gazebo “café sawah”, kolam ikan, lahan pertanian untuk bunga dan sayuran
- Desa wisata ini menyediakan kuliner lokal desa dan wahana wisata berbasis pertanian yang semua dikelola oleh BUMDesa dan tenaga kerja lokal.

INOVASI DESA BUDAYA

- Desa Panggungharjo, Yogyakarta, berinovasi dengan membuat kampoeng matraman sebagai destinasi wisata edukasi dan kuliner yang berbasis agraris.
- Kampoeng Mataraman resmi dibuka pada tanggal 29 Juni 2017 dengan produk dan layanan yang di tawarkan kepada konsumen berupa warung makan dengan menu khas tradisional Jawa.
- Menyediakan ruang pertemuan, area parkir yang luas, kolam ikan, lahan pertanian yang dikelola oleh unit agro dengan berbagai jenis tanaman baik padi, kacang-kacangan sampai pada sayur-sayuran.
- Pendirian bank sampah Pengelolaan sampah dan menjadi pupuk organik yang berbasis pemberdayaan masyarakat
- Pengelolaan minyak goreng bekas untuk bahan bakar bekrjasama dengan swata





INOVASI KAWASAN PERDESAAN



- Pengembangan kawasan perdesaan Prioritas Nasional Ajibata, Kabupaten Toba Samosir merupakan kerjasama antara 7 desa yaitu Desa Motung, Desa Parsaoran Sibisa, Desa Sirungkunon, Desa Pardamean Sibisa, Desa Pardomuan Motung, Desa Horsik dan Desa Sigapiton
- Kawasan Perdesaan Wisata Alam dengan menonjolkan sisi danau toba melalui bukit senyum, bukit pardomuan motung, dan tanjung Sigapiton, serta Bukit Gibeon dan juga Hutan adat yang ada di dalamnya yang menawarkan paket wisata Agrowisata dan *coffee trip*
- Potensi perkebunan kopi dan kakao diangkat sebagai produk unggulan untuk oleh-oleh khas toba yang dikelola oleh BUMDesa Bersama



PENUTUP



- Besarnya jumlah penduduk dan dominasi penduduk usia produktif Indonesia merupakan modal utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan.
- Kualitas SDM merupakan aset penting bagi pembangunan ekonomi.
- Penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi mengubah arah pembangunan ekonomi Indonesia.
- Abad digital menuntut manusia untuk selalu kreatif dan inovatif dalam meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- Indonesia memiliki banyak inovator muda yang berdampak sosial tinggi serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.

32

TERIMA KASIH





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**INTEGRASI DANA DESA
DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM
Tim Navigasi - Direktur Pascasarjana Unisma

Makalah ini adalah pengembangan dari materi
Musrenbang 2019-2024 dan RKP 2020, Propinsi Jawa Timur 2019

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

- PIDATO PRESIDEN TENTANG ANCANGAN KE DEPAN.....
- PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN PENANGANAN KEMISKINAN.....
- SINERGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.....
- FOKUS PEMBIAYAAN PENANGANAN KEMISKINAN DI JATIM.....
- OPTIMALISASI DANA DESA DAN DANA KEMENTERIAN SOSIAL.....
- KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN.....
- CONTOH OPTIMALISASI DANA BANSOS DAN DANA DESA.....
- PENUTUP.....

PIDATO PRESIDEN RI, 14 JULI 2019

(LIHAT ARAHAN TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN)

Pointer Pidato
Presiden Joko Widodo,
Sentul, 14 Juli 2019



PENDANAAN RPJMN...

Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat implementasi *Money Follow Program* dengan 3 strategi utama :

1 Memperkuat kualitas alokasi pada Prioritas

- Memperkuat integrasi pendanaan untuk prioritas
- Fokus pada pendanaan prioritas khususnya *Major Project*

2 Memperbesar Kapasitas Pendanaan

- Diperkirakan Belanja K/L hanya dapat mendanai 20-25% seluruh kebutuhan pembangunan
- Mendorong peran BUMN, KPBU, Masyarakat
- Mendorong inovasi skema pendanaan (*creative financing*) antara lain PINA, *Blended Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah

3 Memperkuat *Delivery Mechanism*

- Menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan *Major Project* sebagai alat kendali

PENDEKATAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN SEKTORAL

- PEMBANGUNAN NASIONAL DILAKUKAN MELALUI BERBAGAI KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTORAL YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH

PEMBANGUNAN WILAYAH

- PEMBANGUNAN BERBASIS KEPULAUAN, PERKOTAAN DAN PERDESAAN, KAWASAN STRATEGIS, DAERAH TERLUAR DAN TERTINGGAL

KODE	KETERKAITAN DENGAN NAWA BHAKTI SATYA
PROGRAM 1	JATIM SEJAHTERA - kemiskinan, kesejahteraan sosial
PROGRAM 2	JATIM KERJA -- lapangan pekerjaan dan keunggulan ekonomi
PROGRAM 3	JATIM CERDAS DAN SEHAT – pendidikan dan kesehatan berkualitas
PROGRAM 4	JATIM AKSES –infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu
PROGRAM 5	JATIM BERKAH -- karakter masyarakat dan nilai sosial yang luhur
PROGRAM 6	JATIM AGRO – pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan,
PROGRAM 7	JATIM BERDAYA –ekonomi kerakyatan, BUMD, UMKM, BUMdes, Pendes
PROGRAM 8	JATIM AMANAH – pemerintahan yang bersih, efektif, anti korupsi
PROGRAM 9	JATIM HARMONI –harmini budaya, harmoni sosial, dan harmoni alam

SINERGI ANGGARAN DAN PROGRAM PUSAT, PROPINSI DAN DAERAH

APBD PROPINSI
APBD KABUPATEN / KOTA,
PENDAPATAN ASLI DAERAH,

PROGRAM KEMENTRIAN & BANTUAN KHUSUS, SEMISAL

1. Kementrian Desa, 7,4 T tahun 2019
2. Kementrian Sosial, 6,7 T, tahun 2018
3. Kementrian Kesehatan,
4. Kementrian PU PR
5. Kementrian Pertanian

BERBENTUK PROGRAM PUSAT
KEMENTRIAN NEGARA,
LEMBAGA NEGARA,
BADAN NEGARA

LEMBAGA DONOR

USAID, DFAT AUSTRALIA, JEPANG
LPPM KAMPUS, PERBANKAN, CSR,
YAYASAN DONASI

KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

1

• **KUAT DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN**

2

• **KUAT DUKUNGAN REGULASI**

3

• **PRIORITAS ANGGARAN**

4

• **KUAT KELEMBAGAAN DAN APARATUR**

5

• **AKSES PROGRAM KEMENTRIAN**





OPTIMASLISASI DANA DESA

OPTIMALISASI 7, 4 T DANA DESA DI JATIM

OPTIMALISASI TENAGA PENDAMPING DESA

Tahun	Pagu	No	Bidang Kegiatan	%
2015	2.214.014.855.000	1	Sarana Prasarana Dasar	67%
2016	4.969.123.651.000	2	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	14,61%
2017	6.339.556.181.000	3	Sarana Prasarana Ekonomi	1,94%
2018	6.343.608.189.000	4	Sarana Prasarana Lingkungan	0,61%
2019	7.441.561.392.000	5	Sarana Prasarana lainnya	0,93%
TOTAL	27.307.864.268.000	6	Pemberdayaan Masyarakat	12,83%
		7	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0,59%
		8	Pembinaan Kemasyarakatan	1,07%

Alokasi & Pencairan Dana Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu	Pencairan			%
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	
2015	2.214.014.855.000	889.496.366.600	883.012.325.600	441.506.162.800	100%
2016	4.969.123.651.000	2.970.779.222.460	1.983.774.595.632	-	99,71%
2017	6.339.556.181.000	3.795.090.761.252	2.539.336.237.093	-	99,92%
2018	6.343.608.189.000	1.268.721.637.800	2.527.135.738.006	2.537.443.394.400	99,84%
2019	7.441.561.392.000	1.488.312.277.800	2.970.510.950.857	0	59,92%
TOTAL	27.307.864.268.000	10.412.400.265.912	10.903.769.847.188	2.978.949.557.200	88,97%

Sumber : **SIPEDA**

* Tahap 3 untuk tahun 2019 belum Salur

Realisasi Penggunaan Dana Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

(sumber: TOR Kunjungan Presiden RI di Jatiim, 2019)

No	Bidang Kegiatan	Alokasi	%
1	Sarana Prasarana Dasar	3.652.786.729.358	67%
2	Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar	791.608.930.483	14,61%
3	Sarana Prasarana Ekonomi	105.030.376.113	1,94%
4	Sarana Prasarana Lingkungan	32.854.837.937	0,61%
5	Sarana Prasarana lainnya	50.172.384.126	0,93%
6	Pemberdayaan Masyarakat	694.974.541.712	12,83%
7	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	32.087.869.522	0,59%
8	Pembinaan Kemasyarakatan	58.210.710.514	1,07%



Program Kemendes yang Mampu Ditampung Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

- Pembangunan embung dan bangunan air di daerah rawan pangan
- Pembangunan embung dan bangunan air lainnya
- Pembangunan sarana dan prasarana (Reverse Osmosis)
- Program pembangunan desan mandiri
- Pembangunan Pasar Kecamatan untuk mendukung prukades
- Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan pasca panen hasil produksi pertanian di kawasan pertanian
- Pasar kecamatan yang dibangun fungsional

Selengkapnya lihat di <https://itjen.kemendes.go.id>

Mengapa Pendekatan Kewilayahan



- Karena terjadi ketimpangan mendalam antar beberapa daerah di Jawa Timur. Akselerasi pusat pertumbuhan tidak akan terkerjar oleh daerah yang minim akses dan oleh sebab itu harus ada perhatian khusus bagi daerah tertinggal. Kata Prof Mardiasmo, untuk daerah maju **let them go**.
- Kenyataan bahwa Jawa Timur tidaklah simetris, kondisinya asimetris. Terdapat setidaknya 10 Kabupaten dan kota yang tergolong miskin, dan terdapat 100 an Kecamatan dan desa desa yang bisa menjadi fokus utama pengentasan kemiskinan

SEAKAN AKAN KITA MEMBANGUN CEPAT
DENGAN PERTUMBUHAN TINGGI

HATI HATI KITA MENAMBAH
THE LOSSER
WIDEN ECONOMIC GAP



SINERGITAS PENDANAAN UNTUK KOPERASI, UMKM DAN BUMDES



USAHA LAGI TREND DI KOTA DAN DESA

www.duniakaryawan.com

- 1 • JASA LAUNDRY
- 2 • CAFÉ ATAU WARKOP
- 3 • USAHA ONLINE
- 4 • LES PRIVATE
- 5 • MAKELAR PROPERTY
- 6 • JASA DESAIN GRAFIS
- 7 • JUAL BELI MOTOR BEKAS

JATIM, PERLU SUPER TEAM

Cirque du Soleil can teach all teams a few lessons.

1. Your team must be strong
2. You must have great balance
3. Momentum is key to performance
4. You must be flexible...very flexible.
5. You must practice
6. Support from each other is key
7. Everyone must play their role.
8. What you accomplish may look astonishing to outsiders, but you know it comes from lot's of hard work.
9. Everyone needs to be in synch.
10. Great teams have a story to share.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA¹⁾



Prof. Dr. MARYUNANI, MS

- 1) Disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional "Percepatan Pengembangan Desa Mandiri", diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur di Hotel Regent's Park jalan Jaksa Agung Suprpto no 12-16 Kota Malang, pada tanggal 3-5 September 2019.
- 2) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Guru besar Ilmu Ekonomi Pembangunan.

OUTLINE

- PENGANTAR
- INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA
- KONDISI EKSISTING EKONOMI DESA
- LEMBAGA EKONOMI DESA SEBAGAI INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA
- PENUTUP: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA.

PENGANTAR

- Infrastruktur Ekonomi Desa memegang peranan penting, sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Desa.
- Keberadaan infrastruktur Ekonomi Desa yang memadai sangat diperlukan, karena merupakan bagian yang sangat penting (vital) dalam sistem pelayanan masyarakat, dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.
- Karenanya, dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, semuanya memerlukan dukungan yang handal.

INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA



INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA, SEBUAH SISTEM

- Infrastruktur ekonomi desa adalah aset yang dirancang dalam sistem, memberikan pelayanan publik yang penting. Karena itu, infrastruktur ini merupakan bagian-bagian sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam sebuah sistem di suatu wilayah desa.
- Infrastruktur ekonomi Desa, dapat bersifat “lunak”, bahwa segala hal (fisik, lembaga dan sistem) yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar ekonomi, kesehatan dan sosial budaya satu sama lain saling berkaitan dalam sebuah perkembangan Desa.
- Misal, keterikatan: sistem keuangan dan perbankan, sistem pendidikan, sistem kesehatan, pemerintahan, hukum, regulasi, dan termasuk sektor jasa lainnya, seperti: penyedia akses internet dan telekomunikasi.

INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA, MENUNJANG SISTEM SOSIAL DAN EKONOMI

- Secara ekonomi, infrastruktur ekonomi desa dapat berwujud modal publik “*public capital*” yang terdiri dari: layanan ekonomi pertanian, wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Koperasi, Pasar Desa, dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- Infrastruktur yang dimaksud ialah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan Desa, lingkungan antar Desa, di mana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.
- Termasuk infrastruktur Ekonomi Desa, diantaranya: Lembaga Ekonomi Desa (BUMDesa, Pasar Desa, dll), Pelayanan publik, Undang-undang Desa dan turunannya, dan lain sebagainya.

PASAR DESA: SEBAGAI CONTOH

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;**
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Aset Desa*.

BANGUNAN PASAR DESA

- Pembangunan pasar desa dapat dilakukan secara mandiri oleh BUMDesa atau melalui kerja sama dengan pihak lain atau swasta.
- Selain bangunan utama pasar yang berisi lapak/kios tempat usaha, bangunan pasar, juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung, seperti: kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sementara, air bersih, sanitasi atau drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengolahan air limbah, hydran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, serta area bongkar-muat dagangan.

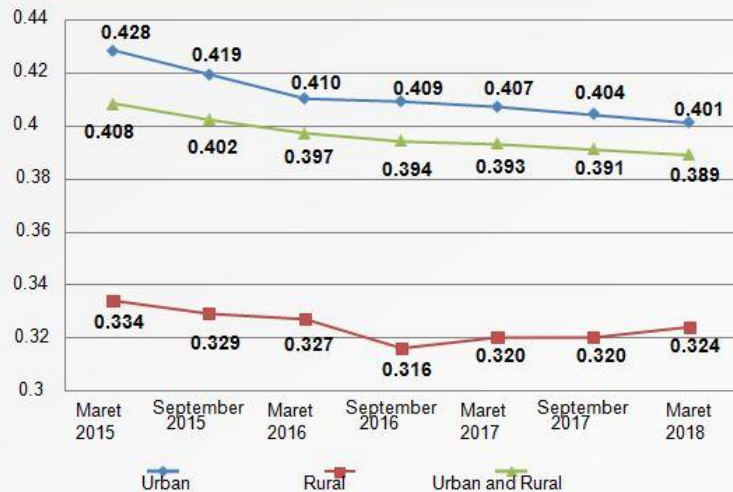
MANFAAT INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA

- Infrastruktur Ekonomi Desa mempunyai banyak manfaat. Di bidang sosial, infrastruktur ini bermanfaat sebagai sarana komunikasi. Maka, jika tidak ada infrastruktur ini, suatu Desa akan terisolasi dan tidak dapat bersosialisasi dengan daerah lainnya. Desa yang terisolasi, jaringannya akan terputus dari daerah luar, sehingga kehidupan masyarakat di Desa tersebut terganggu.
- Di bidang ekonomi, infrastruktur bermanfaat sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi (transaksi jual beli). Selain itu, infrastruktur ini berfungsi sebagai sarana penghubung dalam melakukan distribusi produksi dan jasa. Jika infrastruktur tersebut lancar, maka kegiatan ekonomi pun akan menjadi lancar. Masyarakat dapat hidup sejahtera dan perekonomian masyarakat akan semakin meningkat.

KONDISI EKSISTING EKONOMI DESA



GINI RATIO DI PERDESAAN DAN PERKOTAAN

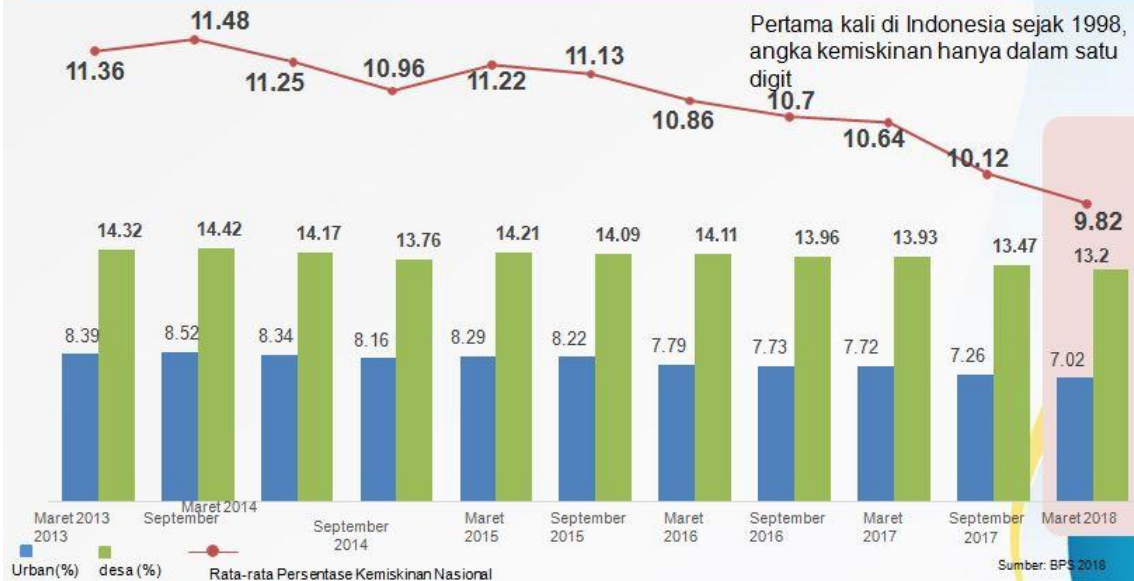


Sumber: BPS 2018

Bila Gini Rasio = 0, perfect income inequality, meaning that everyone receives the same income as the others.
Bila Gini Rasio = 1, means that inequality of income is unbalanced or the income is only received by one person or one group.

- Menurut penjelasan BPS, semua pendapatan penduduk desa naik 3%, tetapi percepatan peningkatan kelas atas lebih tinggi daripada kelompok lain. Ini menyebabkan sedikit peningkatan rasio gini.
- Ini normal pada awal perkembangan ekonomi, yang sesuai dengan kurva Kuznets berbentuk U terbalik. Pada awalnya kelas atas dapat memanfaatkan peluang ekonomi. Tetapi orang miskin juga belajar melalui pekerjaan dan pendidikan. Setelahnya desa menjadi lebih mandiri, kesenjangan menurun.
- Upaya untuk menjaga rasio Gini rendah adalah dengan mulai memberdayakan masyarakat pedesaan, terutama kelas menengah dan bawah, misalnya melalui tenaga kerja padat uang di bidang ekonomi dan Akademi Desa dalam kapasitas desa.

PERSENTASE KEMISKINAN DI PERDESAAN MASIH TINGGI



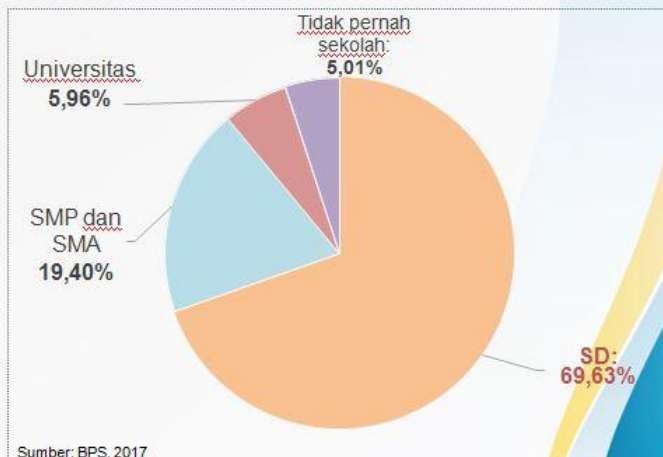
Sumber: BPS 2018

TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA DI DESA MASIH RENDAH



69.63% tenaga kerja pedesaan (59,49 juta) adalah lulusan sekolah dasar

Tantangan: untuk membalikkan piramida tenaga kerja pedesaan yang saat ini didominasi oleh lulusan SD menjadi pekerja terampil & terdidik



Sumber: BPS, 2017

Sumber: Sekjen Kementerian Desa PDTT, 2018

ISU-ISU PEMBANGUNAN DESA

Tingginya Angka Kemiskinan di Desa



Persentase penduduk miskin di perdesaan (13,96%) lebih besar dibandingkan perkotaan (7,43%)

Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja di Desa



Jumlah penduduk desa 119,8 juta jiwa dengan total angkatan kerja 58,4 juta jiwa yang didominasi lulusan SD (57,78%)

Besarnya Dana yang Masuk ke Desa dari Berbagai Sumber



Diperkirakan dana yang masuk ke desa dari berbagai sumber sebesar Rp 371,4 Triliun

Banyaknya Jumlah Desa Tertinggal di Indonesia



- >> Desa Sangat Tertinggal: 13.144 Desa
- >> Desa Tertinggal: 33.592 Desa
- >> Desa Berkembang: 22.882 Desa
- >> Desa Maju: 3.608 Desa
- >> Desa Mandiri: 174 Desa



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN



61.821 (82,7%)
Desa memiliki potensi pertanian



20.034 (26,8%)
Desa memiliki potensi perkebunan



12.827 (17,1%)
Desa memiliki potensi perikanan



1.902 (2,5%)
Desa memiliki potensi wisata



1,8 Juta
Komoditas UKM ada di Desa

- >> Melimpahnya **kekayaan dan potensi desa belum dimanfaatkan secara maksimal** untuk meningkatkan produktivitas ekonomi desa
- >> Produktivitas ekonomi desa sudah memasuki fase penanganan pasca panen dan integrasi vertikal

Salah satu faktor utama lemahnya ekonomi desa adalah belum optimalnya peran kelembagaan ekonomi produktif desa yang dapat menjadi wadah bagi para pelaku usaha di perdesaan



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Keterangan: data potensi desa bukan merupakan data akumulasi potensi unggulan desa

15

KEBIJAKAN DANA DESA



Note :
a. Allocation phase I : Rp. 12 Trillion (20%)
b. Phase II : Rp. 24 Trillion (40%)
c. Phase III : Rp. 24 Trillion (40%)

Sumber: Sekjen Kementerian Desa PDTT, 2018

LEMBAGA EKONOMI DESA: BENTUK INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA



LEMBAGA EKONOMI DESA

- Sebagai bentuk infrastruktur Desa, lembaga ekonomi desa adalah sekelompok status sosial, norma umum dan peran relatif stabil dan saling berhubungan di sekitar pengumpulan sumber daya produksi dan distribusi barang serta jasa.
- Lembaga Ekonomi Pedesaan didirikan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat miskin. Proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang makin penting dan berbelit-belit juga sebagai faktor utama yang melatarbelakangi munculnya lembaga ekonomi desa.
- Jadi, lembaga ini dibentuk untuk mengembangkan, membina, mengayomi, dan menampung aspirasi, serta segala bentuk potensi perekonomian desa, untuk meningkatkan daya saing dan nilai dari kegiatan usaha, baik dalam skala mikro maupun makro.

PERAN LEMBAGA EKONOMI DESA

- Lembaga Ekonomi Desa muncul sejak seseorang membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan orang lain. Akibatnya lahir perdagangan yang mulanya sederhana (barter), hingga yang kompleks, yaitu sistem pembagian tugas dalam menghasilkan sebuah produk.
- Lembaga Ekonomi Desa menangani masalah kesejahteraan materiil: mengatur cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat di Desa (mengakui adanya tuntutan seseorang terhadap orang lain).
- Lembaga Ekonomi Desa menjadi sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

BUMDesa, BENTUK DARI LEMBAGA EKONOMI DESA

- Lembaga ekonomi desa menggerakkan perekonomian masyarakat dalam skala mikro, di dalamnya terdapat beberapa unit-unit usaha yang berkaitan dengan ekonomi di pedesaan.
- Bentuk lembaga ekonomi desa, antara lain: Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), *koperasi* dan lainnya, adalah pilar atau penyangga ekonomi yang diharapkan mampu mendukung dan menopang kegiatan pembangunan di pedesaan dalam berbagai bidang.
- Lembaga ini dan berbagai Unit Usaha Desa sebagai sarana, dimaksudkan untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi desa, misal: *kelompok tani, kelompok pedagang, kelompok buruh, dan kelompok pendukung lainnya.*

ILUSTRASI BUM DESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA

Permasalahan Kelembagaan Ekonomi Desa:

- >> Rendahnya skala ekonomi
- >> Akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola "ijon"
- >> Kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah
- >> Rendahnya penerapan teknologi

Akibat:

- >> Biaya produksi tinggi
- >> Harga jual produksi tidak kompetitif
- >> Penetrasi pasar rendah.

EKONOMI STAGNAN



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Fungsi BUM Desa:

1. Menyediakan pendanaan
2. Meningkatkan kapasitas produksi
3. Meperluas akses pasar

Tujuan BUM Desa:

Peningkatan nilai investasi; Peningkatan nilai tambah; Perluasan pemasaran; dan Peningkatan daya saing

Ruang Lingkup Kegiatan BUM Desa:

1. **Unit Layanan** (Pelayanan Publik dan Penyaluran Bantuan Pemerintah)
2. **Unit Usaha Perdagangan dan Jasa** (Produksi Barang dan Mengurangi Rantai Logistik)
3. **Lembaga Keuangan Desa** (Menciptakan Financial Inclusion di Desa).

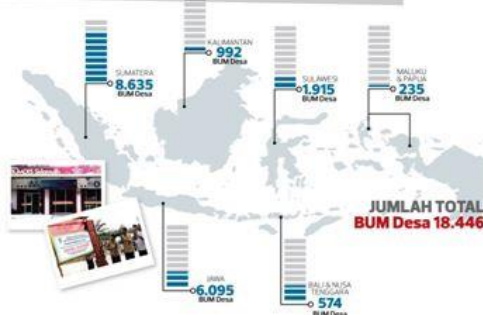
Meningkatkan produktivitas masyarakat

Meningkatkan produktivitas masyarakat

Peningkatan Pendapatan

23

DISTRIBUSI BUM DESA HINGGA AWAL TAHUN 2017



1. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUM Desa meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun hingga awal tahun 2017 meningkat drastis hingga 18.446 Unit.
2. Dari total jumlah BUM Desa, Sebanyak 6.728 unit (36,4%) berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, diikuti Jawa Barat sebanyak 2.964 unit (16%) dan Jawa Timur sebanyak 1.424 unit (7,7%).

- >> Harga jual produksi tidak kompetitif
- >> Penetrasi pasar rendah.

EKONOMI STAGNAN



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Meningkatkan produktivitas masyarakat

Meningkatkan produktivitas masyarakat

Peningkatan Pendapatan

24

SEBARAN BUM DESA PER PROVINSI

NO.	NAMA PROVINSI	JUMLAH BUMDESA
1	Nangroe Aceh Darusalam	6.728
2	Sumatera Utara	430
3	Bali	336
4	Bangka Belitung	19
5	Banten	146
6	Bengkulu	360
7	DI Yogyakarta	148
8	Gorontalo	68
9	Jambi	11
10	Jawa Barat	2.964
11	Jawa Tengah	1.413
12	Jawa Timur	1.424
13	Kalimantan Timur	369
14	Kalimantan Tengah	256
15	Kalimantan Selatan	160
16	Kepulauan Riau	255
17	Lampung	76
18	Maluku	76
19	Nusa Tenggara Barat	178
20	Riau	319
21	Sulawesi Selatan	313
22	Sulawesi Tenggara	259
23	Sulawesi Tengah	496
24	Sulawesi Utara	639
25	Sumatera Barat	339
26	Sumatera Selatan	154
27	Nusa Tenggara Timur	60
28	Kalimantan Barat	152
29	Kalimantan Utara	55
30	Maluku Utara	134
31	Papua	10
32	Papua Barat	15
33	Sulawesi Barat	150
TOTAL		18.446

naan
sitas produksi
sar

stasi; Peningkatan nilai tambah;
; dan Peningkatan daya saing

Fungsi BUM Desa:

- 1. **Unit Layanan** (Pelayanan Publik dan Penyaluran Bantuan Pemerintah)
- 2. **Unit Usaha Perdagangan dan Jasa** (Produksi Barang dan Mengurangi Rantai Logistik)
- 3. **Lembaga Keuangan Desa** (Menciptakan Financial Inclusion di Desa).

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

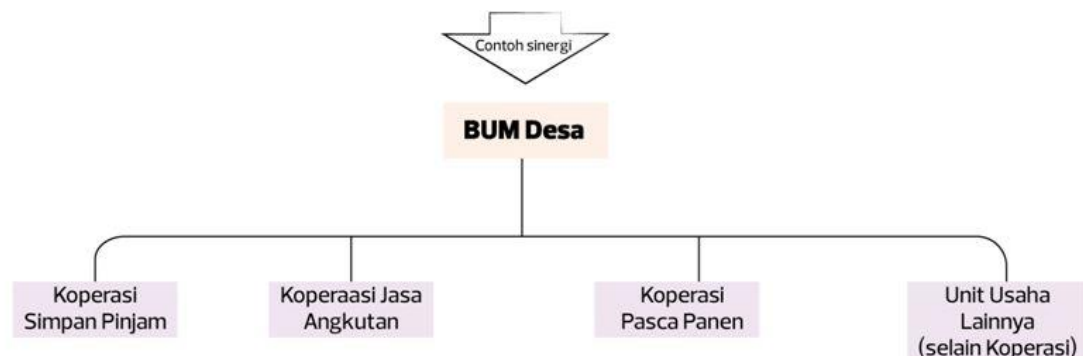


PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI DESA

- Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa merupakan revitalisasi dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Ekonomi Desa.
- Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya pembangunan sektor-sektor perdesaan (tradisional; agrokomples) dengan mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan.
- Dengan maksud mengembangkan dan meningkatkan *Usaha Ekonomi Desa* menjadi lebih berkualitas, lembaga ekonomi desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

ILUSTRASI SINERGI BUM DESA DAN KOPERASI

- >> Sinergi BUM Desa dan Koperasi dilakukan melalui kerjasama saling menguntungkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
- >> BUM Desa bisa mempunyai anak perusahaan yang bekerjasama dengan koperasi dengan komposisi penyertaan modal 60:40%
- >> Anak perusahaan yang bekerjasama dengan koperasi bisa lebih dari 1 usaha sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan anggota/kelompok, contoh koperasi simpan pinjam, koperasi angkutan, dan koperasi pasca panen.



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

26

KOPERASI: seluk beluk

- Koperasi adalah aktor penggerak ekonomi Desa yang tak kalah penting. Koperasi adalah suatu perserikatan yang dibuat dengan tujuan berusaha bersama, terdiri dari orang-orang dan berusaha bersama, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap Koperasi.
- Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang dengan keinginannya sendiri hendak berkerja sama untuk memajukan ekonominya. Dengan demikian, koperasi adalah suatu badan/ lembaga usaha yang anggotanya orang-seorang dan bertujuan memperbaiki nasib penghidupan ekonomi dalam bentuk kerja sama yang bersifat sukarela berdasarkan azas kekeluargaan.

KEBERADAAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN DESA

- Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Desa yang mencakup berbagai sektor,
- Penyedia lapangan kerja yang dalam jumlah besar,
- Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal (Desa) dan pemberdayaan masyarakat lokal,
- Pencipta pasar baru dan sumber inovasi baru secara nyata.

PERAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN DESA

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa dan para anggotanya pada khususnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Desa.
- Memperkokoh perekonomian masyarakat di Desa sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian di Desa yang merupakan perwujudan dari usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

PENUTUP: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA

INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA: masalah dan penanganannya

- Pengalaman menunjukkan bahwa Koperasi, BUMDesa, UMKM sebagai bentuk infrastruktur ekonomi desa yang sangat strategis bagi perekonomian Desa, banyak desa belum dapat mengelola dengan baik dan secara profesional.
- Hal ini menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, seperti: kemiskinan, kesenjangan dan kertusakan lingkungan (kekumuhan).
- Karena itu, perlu upaya penataan dan pembinaan dalam pengelolaan infrastruktur ekonomi desa tersebut, demi terwujudnya desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA

Pembangunan Desa

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Desa

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, pendapatan & perluasan skala ekonomi warga atau kelompok masyarakat desa

*harus mempertimbangkan tipologi Desa
(Indeks Desa Membangun/IDM)*

PERMODALAN



PELATIHAN KE TERAMPILAN DAN KEWIRAUSAHAAN



PENGEMBANGAN ALAT DAN SARANA PRODUKSI



PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI KREATIF



1. Pengembangan infrastruktur desa harus didorong dengan menggunakan konsep atau pendekatan ekonomi kreatif, berarti mampu menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, *thinking out of the box*, *invention* dan *innovation*.
2. Ekonomi kreatif merupakan era baru yang mengintensifkan informasi (*on line*) dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.
3. Dengan Ekonomi kreatif akan **menciptakan nilai tambah secara ekonomi dan nilai tambah sosial dan budaya**

PENGEMBANGAN IKAN ASIN MENJADI PRODUK CAMILAN



Pengolahan Rumput Laut di Desa Bilibante Lombok



PENGOLAHAN PASCA PANEN ALPUKAT MENJADI AVOCADO OIL OLEH GANESHA ALAMI

Proses Pengolahan Avocado Oil

1



Bahan

2



Pengirisan

3



Pengeringan Dehidrator 4 Jam.

4



Penghalusan (Simplisia)

5



Ekstraksi Maserasi (72 Jam) & Soxhletasi (4 Jam; 65drjt celcius)

6



Evaporasi



Avocado Oil & Avocado Seeds Oil

Parameter Pembanding	ALPUKAT (Raw Material)	AVOCADO OIL	Produk Turunan
Masa Simpan	< 14 Hari	1-2 Tahun	1-2 Tahun
Harga per Kg buah alpukat	Rp. 5.000 – 25.000	Rp. 300.000 – 700.000	Rp. 250.000 – 500.000
Peningkatan nilai jual	0%	120% - 175%	175% - 350%
Peningkatan Nilai Jual	Densitas Kamba Tinggi, membutuhkan ruang yang banyak	Lebih efisien dan hemat ruang	Lebih efisien dan hemat ruang
Penggunaan	Food	Food, Kosmetik, Farmasi	Food, Kosmetik, Farmasi

Source : Ganesha Alami

**CONTOH
PACKAGING
GULA
MERAH**



MEMBALIK BEBAN LINGKUNGAN MENJADI MANFAAT



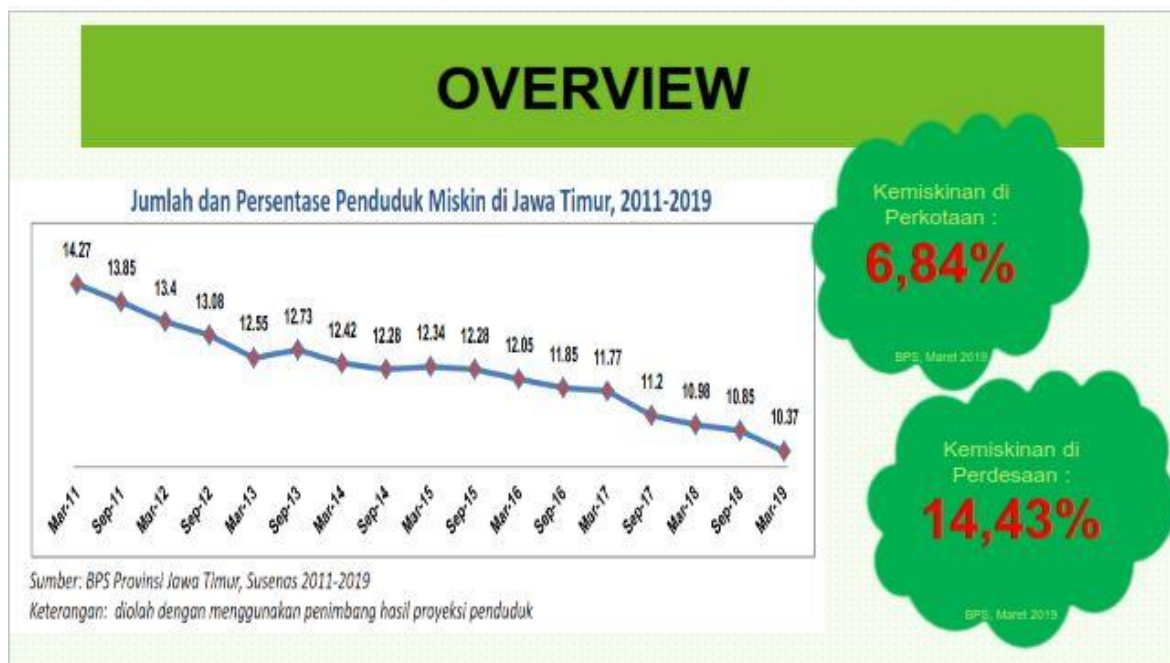
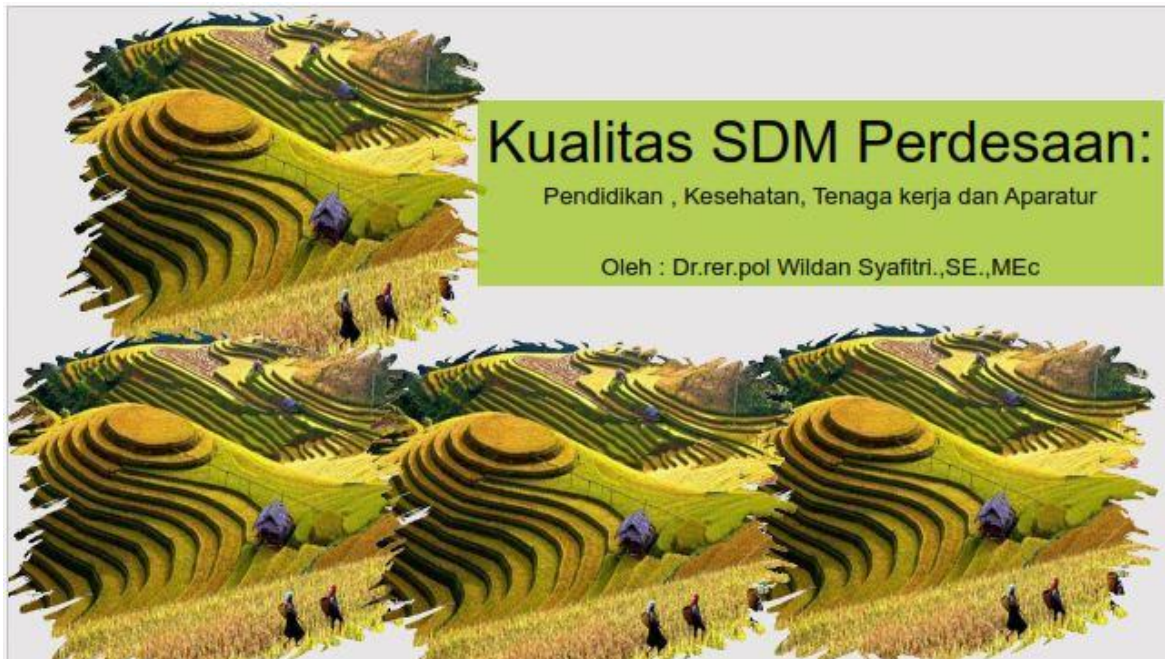
Kasus di Gampong Kubu, Arongan Lambalek, Aceh Barat:
mengelola enceng gondok
menjadi sumberdaya ekonomi



SELF CONTROL



TERIMAKASIH



Lanjutan...

- Sejak tahun 2010, populasi penduduk perkotaan lebih tinggi dari wilayah pedesaan

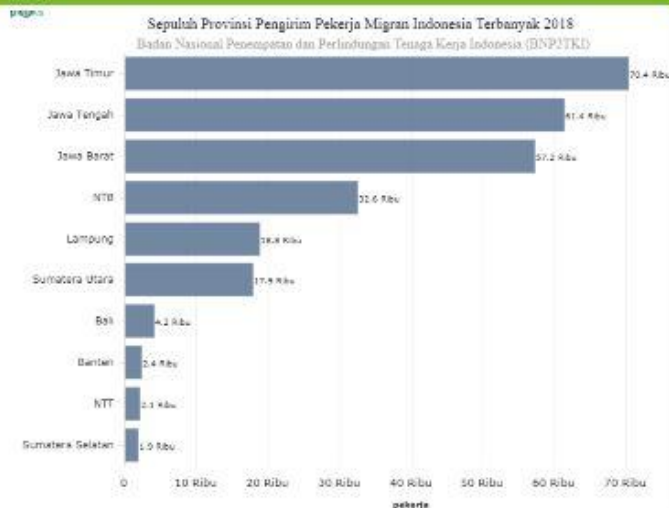


Lanjutan...



**KABUPATEN
SAMPANG**
MENJADI
KABUPATEN DENGAN
PROSENTASE
PENDUDUK MISKIN
TERTINGGI

Lanjutan...



Jatim penyumbang pekerja migran Indonesia tertinggi



Jatim, 1 Desember 2018 - 10.00 WIB

Wakil Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI), Riza Jusuf Purno, Sabtu (1 Desember 2018) menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang menyumbang pekerja migran tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 50.000 orang.

Sementara data dari BNPPTKI, Jawa Timur sebagai penyumbang tertinggi tenaga kerja migran di Tanah Air, bahkan hingga mencapai 70.400 orang. Riza Jusuf Purno, Wakil Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI), mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang menyumbang pekerja migran tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 50.000 orang.

Karena tingginya minat masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri tersebut, Riza Jusuf Purno, Wakil Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI), mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang menyumbang pekerja migran tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 50.000 orang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA MIGRAN

Migrasi dan formasi Sosial	Transmigrasi	Migrasi dan Pembangunan kawasan	Migrasi Internasional	Migrasi Tenaga Kerja
<ul style="list-style-type: none"> Pemusatan Jawa Mobilisasi TK untuk perkebunan dan industri Budaya Merantau Alasan Keamanan di remote area 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka lahan pertanian di luar Jawa Mobilisasi pemerintah Distribusi capital Politik keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan Industri Pemusatan pertumbuhan Ketimpangan SDM: desa-kota, Jawa - luar Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik Tujuan utama Saudi Arabia dan Malaysia, Asia Pasifik Ketergantungan pada remitansi Penurunan dignity 	<ul style="list-style-type: none"> Ketrampilan Pemenuhan Hak Anti Diskriminasi (dignity) Pembangunan des

RUANG LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

4 ASPEK UTAMA PEMERATAAN PEMBANGUNAN:

- 1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS
- 2 PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN AFIRMATIF
- 3 MENEKAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH
- 4 STABILITAS POLITIK & KEAMANAN, Keadilan Hukum & PEMAJUAN KEBUDAYAAN

83.931 wilayah administrasi setingkat **desa** di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas **75.436** desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian **8.444** kelurahan serta **51** Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah **Jawa Tengah**, yakni **8.559** desa/kelurahan. Kemudian diikuti **Jawa Timur 8.496** desa/kelurahan di urutan kedua dan **Aceh** dengan **6.508** desa di posisi ketiga.

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

(Pasal 1 UU 6/2014)

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama **pertanian**, termasuk **pengelolaan sumber daya alam** dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat **permukiman perdesaan**, pelayanan **jasaekonomi**.

Kawasan Perdesaan



Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kab./ Kota

Pihak Ketiga

Pemerintah Desa

Dalam rangka pencapaian sasaran, pembangunan kawasan dilakukan secara sinergis antar berbagai komponen (K/L, Korporasi, Masyarakat) sehingga perlu sinkronisasi pengembangan kawasan perdesaan.

Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah untuk mempercepat peningkatan:

Kualitas Pelayanan

Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

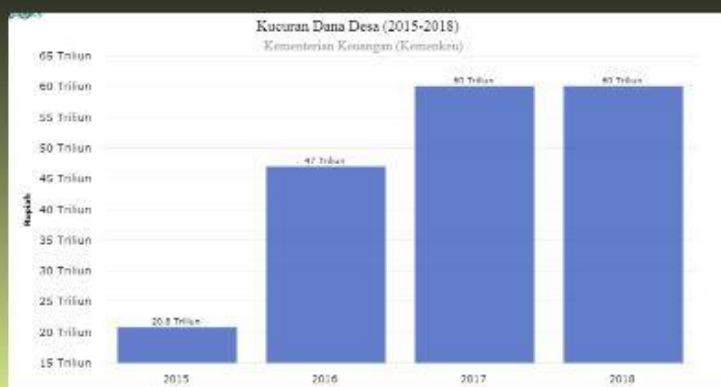
Melalui Pendekatan Partisipatif

Prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu pada Pengembangan Potensi dan atau Pemecahan Masalah Kawasan Perdesaan

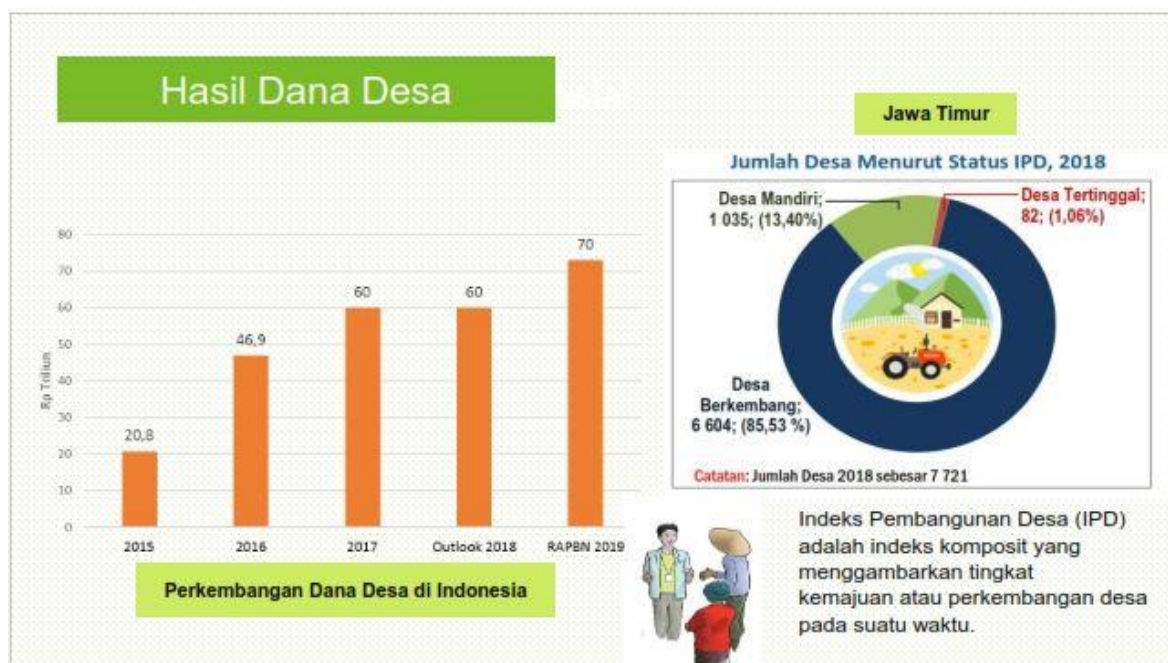
Dana Desa?



Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa & memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.



Telah terbangun **191,6** ribu km jalan desa, **58.931** unit sarana irigasi dan sarana prasarana penunjang. Dari gelontoran dana tersebut juga berhasil membangun **1,14** juta meter jembatan, sebanyak **4.175** embung desa, kegiatan BUMDesa **37.830** unit dan beberapa sarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa.



Lanjutan.....



Jumlah Desa Menurut Kategori IPD, 2014-2018



Catatan: Penghitungan berdasarkan desa-desa yang match sejumlah 7.719 desa di Jawa Timur pada PODES 2014

Desa Mandiri bertambah menjadi 343 desa bila dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, **Desa Tertinggal** juga berkurang sebesar 127 desa

Lanjutan.....



Perkembangan IPD Menurut Dimensi Penyusun IPD, 2014 dan 2018

Jawa Timur



Secara umum, semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah **Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, yaitu sebesar 6,95 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah **Pelayanan Dasar**, yaitu sebesar 0,34 poin.

DANA DESA : CASH FOR WORK

Pemanfaatan Dana Desa melalui skema padat karya tunai merupakan terobosan baru untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

TUJUAN

- 1 menciptakan lapangan kerja
- 2 meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
- 3 menaikkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, & kesenjangan antar desa

SASARAN PROGRAM

- 1 **Penganggur**
penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
- 2 **Setengah penganggur**
• penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu)
• masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- 3 **Penduduk miskin**
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- 4 **Penerima PKH**
Penduduk yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan.
- 5 **Stunting**
Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.

Prinsip Pelaksanaan

- **Swakelola**, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa;
- Menyerap sebanyak-banyaknya **tenaga kerja setempat**; dan
- menggunakan **bahan baku setempat**.



Kriteria Kegiatan

- Fokus 3 s.d. 5 kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa;
- Besaran upah:
 - setara upah buruh tani;
 - minimal 30% dari nilai pekerjaan fisik;
 - dibayar harian atau mingguan.
- Cakupan kegiatan diperluas, mulai pengadaan, pembangunan, pengembangan, sampai pemeliharaan;
- Tidak dilaksanakan bersamaan dgn masa panen;
- Keberlanjutan program selama setahun; dan
- Mengoptimalkan peran pendamping desa.

DANA DESA : CASH FOR WORK

1

Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin di Desa.

MANFAAT

2

Meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan, dan daya beli masyarakat Desa.

DAMPAK

1

Tersedianya **lapangan kerja dan usaha** bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin.

3

Terkelolanya **potensi** sumber daya lokal secara **optimal**.

5

Terjangkaunya (**aksesibilitas**) masyarakat Desa terhadap **pelayanan dasar** dan kegiatan sosial-ekonomi.

2

Tumbuhnya rasa **kebersamaan**, keswadayaan, **gotong-royong**, dan partisipasi masyarakat.

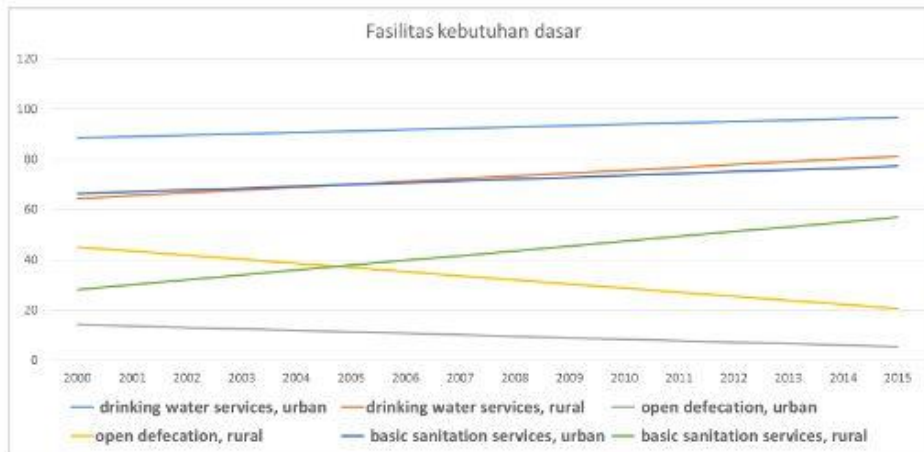
4

Berkurangnya jumlah **balita kurang gizi (stunting)** di Desa.

6

Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Lanjutan...



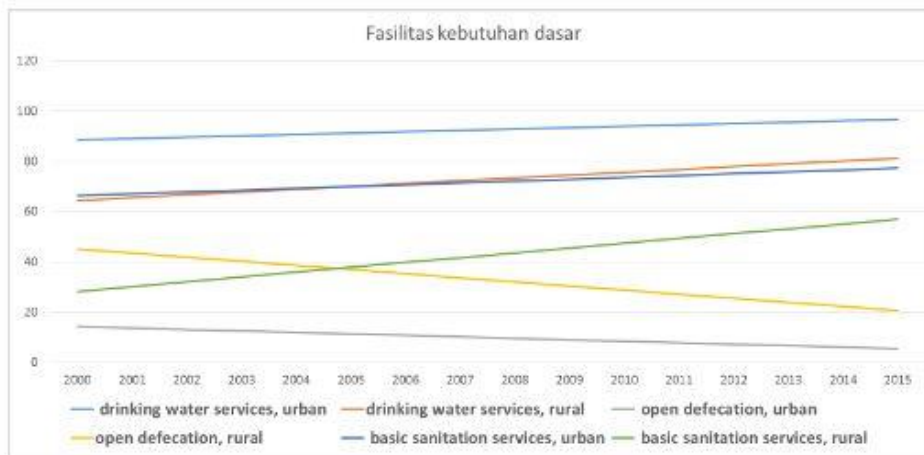
Kebutuhan Dasar Manusia adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua **manusia** dan **kebutuhan** tersebut esensial agar seseorang dapat bertahan hidup.

Konsep Pembangunan Manusia

The basic purpose of development is to enlarge people's choices. In principle, these choices can be infinite and can change over time. The objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives - Mahbub ul Haq



Lanjutan...



Kebutuhan Dasar Manusia adalah **kebutuhan** yang dibutuhkan oleh semua **manusia** dan **kebutuhan** tersebut **essensial** agar seseorang dapat bertahan hidup.

COMPARING APPROACH

	Pembangunan Manusia	Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Sumberdaya Manusia	Pendekatan Kebutuhan Dasar
Manusia	Nilai-instrumental dan intrinsik	Instrumental	Faktor produksi-instrumental	Penerima manfaat
Tujuan Akhir	Pembentukan kemampuan manusia dan penggunaan kemampuan yang diperoleh	Penciptaan kesejahteraan	Memaksimalkan produktivitas manusia	Kesejahteraan
Indikator	Kemerdekaan manusia dan pilihan	GDP per kapita	Produktivitas tenaga kerja	Pemberantasan Kemiskinan
Orientasi	Etnis	Ekonomi	Utilitarian	Proteksionis

Karakteristik Pembangunan Manusia



➤ Under Construction



➤ Multidimensional



➤ Inter-disciplinary

➤ Pragmatic



EMPAT PILAR PEMBANGUNAN MANUSIA

Kesejahteraan



Partisipasi



Efisiensi



Keberlanjutan





***“Indonesia
tidak akan
bercahaya
karena obor
besar di
Jakarta, tetapi
Indonesia
baru akan
bercahaya
karena
lilinlilin di
desa”- Bung
Hatta***

TERIMA KASIH



PELATIHAN ONLINE UNTUK PERANGKAT DESA : PELUANG DAN TANTANGAN

Oleh :

Cecep Effendi, PhD

**Tim Ahli Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Direktur Jenderal Centre on Integrated Rural
Development for Asia and the Pacific 2012-2017**

**Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menugaskan
Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten untuk :**

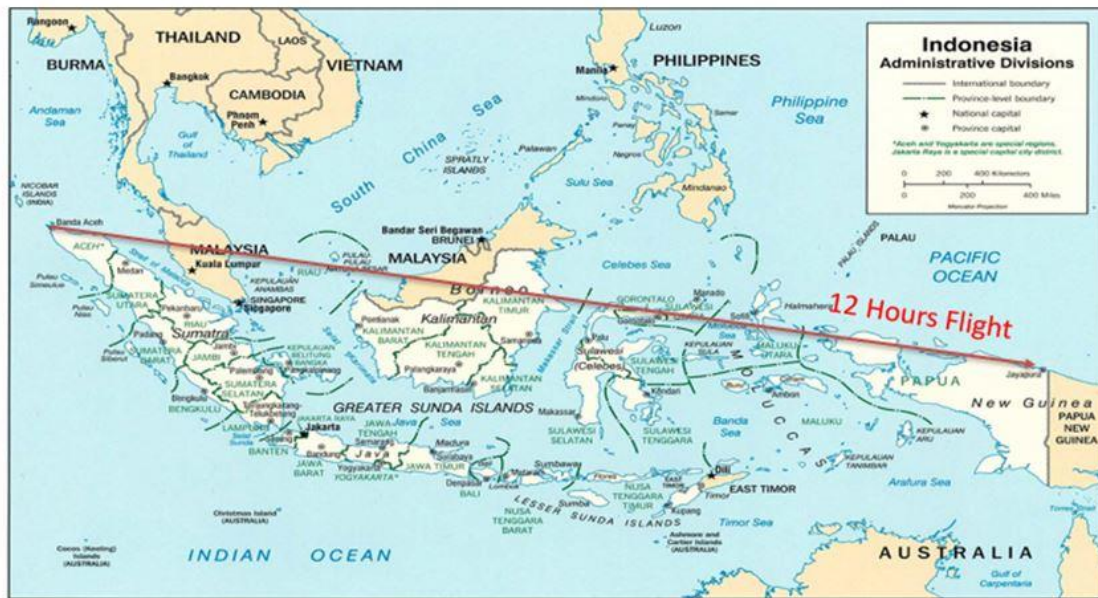
- meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan.
- melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Deskripsi :

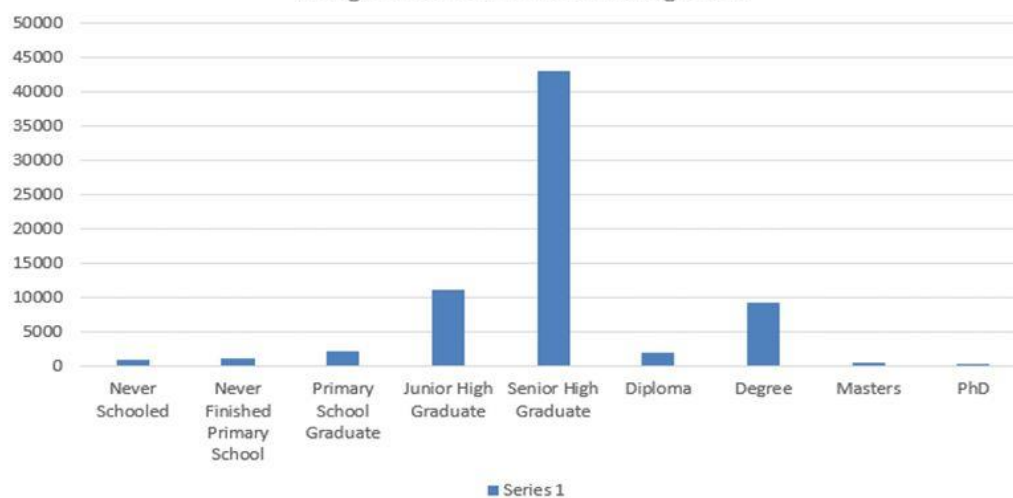
- Pelatihan perangkat desa adalah program pelatihan yang ditujukan kepada perangkat pemerintahan desa termasuk didalamnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan perangkat desa lainnya.
- Tujuan Pelatihan : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pelatihan perangkat desa melibatkan :

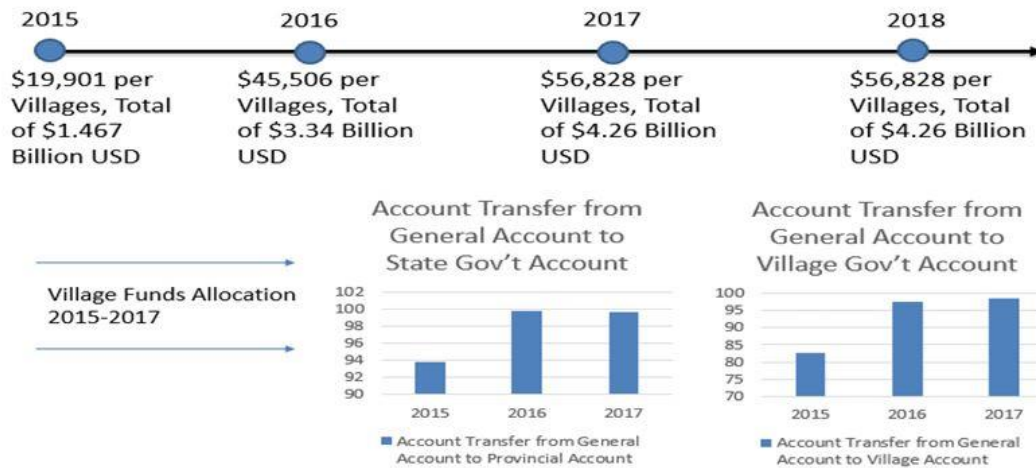
- 74.954 desa di Indonesia x 8 perangkat desa per Kantor Kepala Desa = 599.632 perangkat desa.
- Berapa banyak pelatihan yang harus diselenggarakan ?
- Pelatihan tatap muka tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi juga dibatasi oleh waktu dan lokasi pelatihan dengan jumlah peserta yang relatif terbatas ?
- Teknologi dan metode pelatihan inovatif dibutuhkan untuk menekan biaya pelatihan, waktu dan lokasi serta meningkatkan jumlah peserta pelatihan? Salah satu alternatif teknologi dan metode pelatihan adalah **E-Learning**.



Village Chief Educational Background



Village Funds Allocation (2015-2018)



Sumber informasi teknis yang digunakan perangkat desa dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (2012-16)

Sumber Informasi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pelatihan Pemerintah Perangkat Desa	34,97	36,22	36,41	35,30	100	100
Pedoman Pemerintah Desa	57,44	55,64	56,54	55,91	100	100

Pelatihan hanya dinikmati oleh 35% desa sepanjang tahun 2011-2014. Pemerintah desa juga kekurangan informasi berkait dengan petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa. Hanya 56 % desa yang memiliki petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa selama tahun 2011-2014. (Nata Irawan, 2017:5).

Countries with the highest Internet Usage

TOP 20 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS

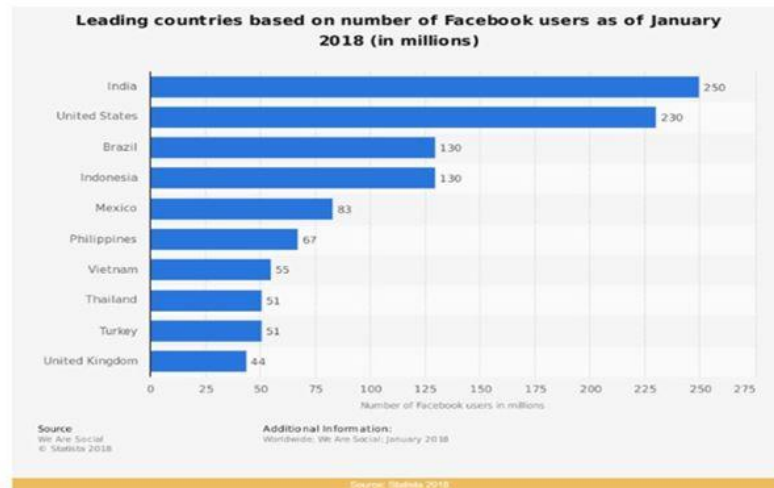
TOP 20 COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS - DECEMBER 31, 2017						
#	Country or Region	Population, 2015 Est.	Population 2000 Est.	Internet Users 31 Dec 2017	Internet Users 31 Dec 2000	Internet Growth
1	China	1,415,045,928	1,283,198,970	772,000,000	22,500,000	3,331 %
2	India	1,354,051,854	1,053,050,912	462,124,989	5,000,000	9,142 %
3	United States	326,766,748	281,982,778	312,322,257	95,354,000	227 %
4	Brazil	210,867,954	175,287,587	149,057,635	5,000,000	2,891 %
5	Indonesia	266,794,980	211,540,429	143,260,000	2,000,000	7,053 %
6	Japan	127,185,332	127,533,034	118,626,672	47,080,000	152 %
7	Russia	143,964,709	146,398,514	109,552,842	3,100,000	3,434 %
8	Nigeria	195,875,237	122,352,009	98,391,456	200,000	49,095 %
9	Mexico	130,759,074	101,719,673	85,000,000	2,712,400	3,033 %
10	Bangladesh	166,368,149	131,581,243	80,483,000	100,000	80,383 %
11	Germany	82,293,457	81,487,757	79,127,551	24,000,000	229 %
12	Philippines	106,512,074	77,991,589	67,000,000	2,000,000	3,250 %
13	Vietnam	96,491,146	80,285,552	64,000,000	200,000	31,600 %
14	United Kingdom	66,573,504	58,950,548	63,061,419	15,400,000	309 %
15	France	65,233,271	59,008,201	60,421,689	8,500,000	610 %
16	Thailand	69,183,173	62,958,021	57,000,000	2,300,000	2,378 %
17	Iran	82,011,735	66,131,854	56,700,000	250,000	22,550 %
18	Turkey	81,916,871	63,240,121	56,000,000	2,000,000	2,700 %
19	Italy	59,290,969	57,293,721	54,798,299	13,200,000	315 %
20	Egypt	99,375,741	69,005,088	48,211,493	450,000	10,613 %
TOP 20 Countries		5,146,561,906	4,312,407,691	2,937,139,302	251,346,400	1,098 %
Rest of the World		2,488,196,622	1,832,509,295	1,219,792,838	106,639,092	1,012 %
Total World		7,634,758,428	6,145,006,986	4,156,932,140	357,985,492	1,051 %

NOTES: (1) Top 20 Internet Countries Statistics were updated in December 31, 2017. (2) Growth percentage represents the increase in the number of Internet users between the years 2000 and 2017. (3) The most recent user information comes from data published by Facebook, International Telecommunications Union, official country telecom reports, and other trustworthy research sources. (4) Data from this site may be cited, giving the due credit and establishing a link back to www.internetworldstats.com. Copyright © 2018, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.

Ranking of Countries with High Smartphone Usage

RANK	IMAGE	COUNTRY	TOTAL POPULATION	SMARTPHONE PENETRATION	SMARTPHONE USERS
1		China	1,415,046,000	55.3%	782,848,000
2		India	1,354,052,000	27.7%	374,893,000
3		United States	326,767,000	77.0%	251,688,000
4		Russian Federation	143,965,000	63.8%	91,865,000
5		Brazil	210,868,000	41.3%	87,172,000
6		Indonesia	266,795,000	27.4%	73,155,000
7		Japan	127,185,000	55.3%	70,327,000

Country Ranking per Facebook Usage



Manfaat menggunakan E-Learning untuk pelatihan perangkat desa



- Mampu menjangkau semua lokasi desa, sejauh tersedia jaringan internet melalui Handphone.
- Pelatihan dapat dilakukan secara mandiri atau Bersama sama dengan menggunakan perangkat seperti PC, Laptop atau Smartphones dan dapat dilakukan 24/7).
- Mengurangi biaya akomodasi, transportasi, makanan dan minuman yang biasanya harus dibelanjakan dalam pelatihan tradisional.
- Mencapai aspek aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (dalam bentuk penugasan atau action learning).



Flexibilitas E-Learning



Tidak membutuhkan pusat belajar desa untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa.

Dapat belajar:

- Kapan saja
- Dimana saja
- Melalui perangkat IT



Powered by HarukaEdu.com

- Dirjen Bina Desa -

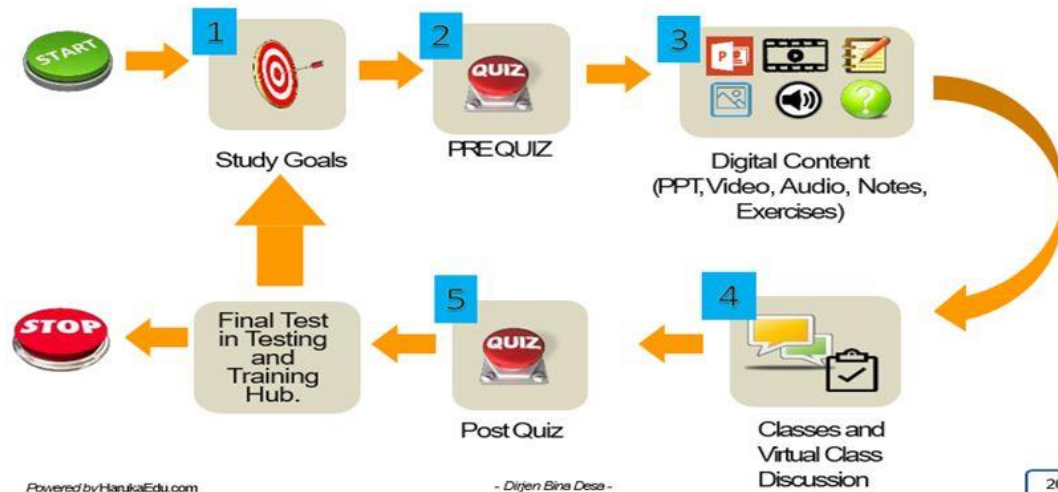
1
6



Online Study Pattern



Implementation of Blended Learning Programme Advantage for Partner Institution



SUB TEMA

1

PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PEDESAAN

(PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, APARATUR PEMERINTAHAN DESA)



PENGUATAN KAPASITAS REMAJA DI PEDESAAN SEBAGAI PENDIDIK SEBAYA DALAM PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

STRENGTHENING THE CAPACITY OF ADOLESCENTS IN RURAL AREAS AS PEER EDUCATORS IN ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH PROMOTION

Juariah^{1*}

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Kawalayaan Indah Raya No.6 Bandung, Kode Pos: 40286

*Alamat email: ai_arriandhi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Latar belakang: Remaja di pedesaan menghadapi tantangan permasalahan kesehatan reproduksi yang tidak lebih mudah daripada remaja di perkotaan. Memampukan remaja pedesaan dengan pengetahuan yang memadai untuk menjadi pendidik sebaya akan sangat mendukung upaya promosi kesehatan reproduksi remaja; karena yang paling memahami permasalahan remaja adalah remaja itu sendiri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas remaja sebagai pendidik sebaya melalui pemberian pendidikan kesehatan reproduksi remaja. **Metode:** Penelitian ini menggunakan *pre experimental design* dengan *pretest and posttest one group design*. Penelitian bertempat di SMPN 1 dan SMPN 2 Pusakajaya Kabupaten Subang pada bulan Juli 2018. Sampel penelitian ditetapkan secara purposif yang berjumlah 46 orang terdiri dari 24 orang remaja putri dan 22 orang remaja putra. Variabel bebas adalah program pendidikan kesehatan dan variabel terikat adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan lembar *pre* dan *posttest*. Data yang terkumpul dianalisis dengan *paired sample T-Test*. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk responden putra ($n=22$), rentang nilai *pretest* adalah 23 dan 90. Sedangkan rentang nilai *posttest* adalah 47 dan 97. Terdapat perbedaan rata-rata nilai *pretest* dan *posttest* sebesar 14,45 ($p = 0.0000$). Sedangkan untuk responden putri ($n=24$), rentang nilai *pretest* 13 dan 68. Sedangkan rentang nilai *posttest* adalah 35 dan 84. Terdapat perbedaan rata-rata nilai *pretest* dan *posttest* sebesar 13,5 ($p = 0.0000$). **Kesimpulan:** Pendidikan kesehatan meningkatkan pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi. **Saran:** Pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas remaja sebagai pendidik sebaya sebaiknya dilakukan secara kontinu.

Kata kunci: kapasitas, remaja, pedesaan, pendidik sebaya, promosi kesehatan reproduksi remaja

ABSTRACT

Background: Adolescents in villages facing challenge on reproductive health problem which is no easier than teenagers in urban areas. Enabling rural teenagers with sufficient knowledge to become peer educators will strongly support the promotion of adolescent reproductive health, because the one who understands the problems of adolescents are the teenagers themselves. **Purpose:** This study aimed to increase the capacity of adolescents as peer educators through the provision of adolescent reproductive health education. **Methods:** This study used *pre experimental design* with *pretest and posttest one group design*. The research was conducted in SMPN 1 and SMPN 2 Pusakajaya Subang Regency on July 2018. The sample was determined purposively. Number of sample was 46, they were 24 girls and 22 boys. The independent variable was health education program and the dependent variable was knowledge on adolescent reproductive health. Data collection was done by distributing *pre* and *posttest* sheet. The collected data was analyzed by *paired sample T-Test*. **Results:** The results of this study showed that for boy respondents ($n = 22$), the ranges value of *pretest* were 23 and 90; while the ranges value of *posttest* were 47 and 97. There was an average difference between *pretest* and *posttest* as big as 14,45 ($p = 0.0000$). Result of girl respondents ($n=24$), the ranges value of *pretest* were 13 and 68; while the ranges value of *posttest* were 35 and 84. There was an average difference between *pretest* and *posttest* as big as 13,5 ($p = 0.0000$). **Conclusion:** The health education increased

*adolescent knowledge about reproductive health. **Recommendation:** Health education to increase the capacity of adolescents as peer educators should be carried out continuously.*

Keywords: capacity, adolescent, rural areas, peer educator, adolescent reproductive health promotion

PENDAHULUAN

Masa remaja yang berada pada kelompok usia 10 – 19 tahun merupakan tahapan transisi dalam kehidupan. Pada periode ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Salah satu perubahan fisik yang sangat besar adalah mulai berfungsinya organ reproduksi yang ditandai dengan menstruasi pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki (UNESCO, 1998). Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, mereka akan jatuh ke dalam perilaku beresiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial (Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi (Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2015). Ada tiga Permasalahan utama kesehatan reproduksi remaja yaitu masalah seksualitas, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) termasuk merokok. Kehamilan remaja sebagai akibat dari menikah di usia muda karena faktor budaya di pedesaan yang masih bangga kalau wanita menikah cepat dan juga pengaruh gaya hidup global sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah, memberikan dampak buruk terutama pada remaja perempuan. Hamil dan melahirkan di usia muda meningkatkan resiko kematian ibu (Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014; UNESCO, 1998) dan juga bayinya (Badan penelitian dan pengembangan kesehatan, 2008).

Selain kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman, inisiasi dini aktifitas seksual menghadapi remaja pada peningkatan risiko PMS dan HIV / AIDS (World Health Organization, 2008). Penularan PMS dan AIDS ini 81,3% terjadi karena hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Ada sekitar 1,6% remaja wanita usia 15-19 tahun yang berhubungan seksual sebelum usia 15 tahun dan 21% remaja pria dengan usia yang sama (Statistics Indonesia *et al*, 2013). Padahal usia pertama kali berhubungan seksual merupakan titik awal individu pertama kali terkena resiko tertular HIV. Hal ini berarti semakin muda usia pertama kali berhubungan seksual maka semakin dini dan semakin besar resiko tertular HIV/AIDS.

Perilaku berisiko tinggi yang lain pada remaja adalah menggunakan NAPZA. Hasil penelitian Saleh dkk (2014) memberikan data bahwa sebagian besar remaja sudah menggunakan NAPZA sejak masih di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian besar terjadi karena pengaruh teman sebaya. Padahal merokok dan penyalahgunaan NAPZA juga meningkatkan kemungkinan melakukan hubungan seksual pranikah (Pinandari dkk, 2014) dan juga meningkatkan resiko terkena PMS dan HIV/AIDS (Shaleh dkk, 2014, Putro, 2010).

Remaja di pedesaan tidak terlepas dari ketiga masalah kesehatan reproduksi ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktawati (2017) menunjukkan bahwa jenis kenakalan yang

dilakukan remaja selain mencuri adalah pemakaian narkoba, sabu-sabu, minuman keras, dan terlibat seks bebas. Kenakalan remaja terjadi karena tidak adanya pengawasan dan perhatian dari orang tua dan lingkungan terhadap pertumbuhan anak-anak, dan tidak adanya penanaman nilai agama dan nilai kesusilaan di lingkungan di mana anak-anak itu tumbuh dan berkembang (Oktawati, 2017). Selain itu, perkembangan media dan teknologi informasi memudahkan masuknya pengaruh gaya hidup global ke desa melalui media yang mereka lihat, baca dan dengar sehingga mempengaruhi gaya hidup remaja desa saat ini. Akhirnya mereka meniru dan mengikuti sebagai usaha untuk mengaktualisasikan identitas dirinya seperti yang ada di media tersebut (Hastuti & Sudarwati, 2007).

Mempromosikan perilaku sehat selama masa remaja, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kaum muda dari risiko kesehatan dengan lebih baik sangat penting untuk pencegahan masalah kesehatan di masa dewasa. Selain itu juga akan berdampak pada kesehatan secara umum dan kemampuan negara di masa depan (World Health Organization, 2018). Melibatkan remaja dalam program kesehatan reproduksi merupakan langkah penting karena mereka lebih memahami permasalahan mereka sendiri (Save the Children, 2014).

Banyaknya hotel, motel dan warung remang-remang yang juga berfungsi sebagai tempat transaksi seksual serta adanya lokalisasi Genteng menjadikan Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang yang berada di jalur pantai utara, termasuk daerah yang beresiko tinggi untuk masalah kesehatan reproduksi. Meskipun termasuk daerah pedesaan, tetapi lingkungan seperti ini dapat memberikan pengaruh yang negatif pada remaja yang secara psikologis masih dalam tahap pencarian jati diri. Oleh karena itu remaja sejak awal harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat menjaga kesehatan reproduksinya. **Pemberian wawasan mengenai kesehatan reproduksi kepada sebagian remaja yang nantinya akan menjadi bekal untuk menjadi pendidik bagi sebayanya, merupakan upaya bermanfaat yang dapat dilakukan.**

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai penguatan remaja untuk menjadi pendidik sebaya **mengenai kesehatan reproduksi** antara lain penelitian yang dilakukan oleh Harini dkk (2014) yang dilakukan pada pengurus PIK-KRM di fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan konselor sebaya terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa pengurus PIK-KRM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitrianingrum dkk (2018) pada 38 orang remaja karang taruna di Desa Purwobinangun yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan konselor sebaya terhadap pengetahuan dan keterampilan remaja dalam memberikan konseling HIV/AIDS. Mengingat permasalahan dan kondisi remaja di Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang dan belum adanya upaya yang melibatkan remaja setempat, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan remaja sehingga nantinya dapat menjadi pendidik untuk sebayanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguatkan kapasitas remaja di Kecamatan Pusakajaya sebagai pendidik sebaya melalui pendidikan kesehatan kesehatan reproduksi sehingga mereka dapat mengedukasi sesama remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian menggunakan *pre experimental design* dengan jenis *pretest and posttest one group design* karena semua subjek dalam penelitian ini mendapat perlakuan yang sama dan tidak ada kelompok kontrol/pembanding. Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 dan SMPN 2 Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli 2018. Responden penelitian berjumlah 46

orang yang terdiri dari 22 orang siswa putra dan 24 orang siswa putri. Responden dipilih secara purposif atas rekomendasi dari pihak sekolah karena mereka memiliki prestasi yang baik secara akademik ataupun di organisasi sekolah seperti PRAMUKA dan OSIS, memiliki perilaku yang baik dan juga memiliki antusiasme untuk menjadi pendidik bagi sebayanya. Sehingga setelah mendapatkan pendidikan kesehatan nantinya mereka diharapkan dapat berbagi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sebayanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan lembar *pretest* dan *posttest* kepada responden. Soal *pretest* dan *posttest* diberikan dalam bentuk soal pilihan ganda, sehingga diharapkan jawaban siswa lebih menggambarkan pengetahuan mereka, bukan asal memilih jawaban. Soal untuk responden putra dan responden putri dibedakan dalam bagian perubahan fisik. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan *paired sample T Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Analisis Univariat

Mengenai gambaran pengetahuan responden sebelum dan setelah mendapatkan pendidikan kesehatan dapat dilihat pada hasil *pretest* dan *posttest* dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest Pengetahuan Remaja Putra

Variabel	Jumlah Responden	Mean	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
Pengetahuan				
<i>Pretest</i>	22	45,77	23	90
<i>Posttest</i>	22	60,22	47	97
Selisih	22	14,45	-3	34

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 22 responden putra, nilai *pretest* terendah adalah 23 dan nilai *pretest* tertinggi adalah 90. Sedangkan nilai *posttest* terendah adalah 47 dan nilai *posttest* tertinggi adalah 97. Terdapat kenaikan rata-rata nilai *pretest* ke *posttest* sebesar 14,45 dengan nilai selisih tertinggi 34.

Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest Pengetahuan Remaja Putri

Variabel	Jumlah Responden	Mean	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
Pengetahuan				
<i>Pretest</i>	24	42	13	68
<i>Posttest</i>	24	55,5	35	84
Selisih	24	13,5	-4	42

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 24 responden putri, nilai *pretest* terendah adalah 13 dan nilai *pretest* tertinggi adalah 68. Sedangkan nilai *posttest* terendah adalah 35 dan nilai *posttest* tertinggi adalah 84. Terdapat kenaikan rata-rata nilai *pretest* ke *posttest* sebesar 13,5 dengan nilai selisih tertinggi 42.

2. Analisis Bivariat

Mengenai hasil analisis bivariat dengan *paired sample T-Test* dengan tingkat kemaknaan $p < 0.05$ dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Perbedaan pengetahuan remaja putra sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan pendidik sebaya

Variabel	Mean	t-hitung	CI 95%	<i>p</i>
<i>Pretest</i>	45,77	6,08	9,5-19,4	0,000
<i>Posttest</i>	60,22			
Selisih rerata	14,45			

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan analisis didapatkan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) dengan nilai *t* hitung sebesar 6,08 (lebih besar dari *t* tabel; 2,074). Hal ini bermakna bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan responden putra antara sebelum dan sesudah mendapat pendidikan kesehatan.

Tabel 4. Perbedaan pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan pendidik sebaya

Variabel	Mean	t-hitung	CI 95%	<i>p</i>
<i>Pretest</i>	42	5,29	8,2-18,7	0,000
<i>Posttest</i>	55,5			
Selisih rerata	13,5			

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan analisis diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) dengan nilai *t* hitung sebesar 5,29 (lebih besar dari *t* tabel; 2,064). Hal ini berarti bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan responden putra antara sebelum dan sesudah mendapat pendidikan kesehatan.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada remaja siswa SMP kelas IX (44 orang) dan kelas VIII (2 orang) terdiri dari 22 orang putra dan 24 orang putri yang disiapkan untuk menjadi pendidik sebaya bagi sesama remaja terutama yang bersekolah di SMP yang sama. Menurut BKKBN (2010) dalam (Triyani, S.I., 2016), pendidik sebaya adalah remaja yang memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya. Hasil *pretest* responden putra menunjukkan rentang nilai antara 23 dan 90 dengan nilai rata-rata 45,77. Sedangkan hasil *posttest*nya berada pada rentang nilai 47 dan 97. Terdapat kenaikan rata-rata nilai *pretest* ke *posttest* sebesar 14,45. Mengenai nilai *pretest* responden putri, berada pada nilai terendah 13 dan tertinggi adalah 68. Sedangkan nilai *posttest* terendah adalah 35 dan nilai *posttest* tertingginya 84. Terdapat kenaikan rata-rata nilai *pretest* ke *posttest* sebesar 13,5.

Setelah dilakukan uji statistik dengan *paired sample T-Test* menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan responden antara sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan nilai $p = 0,000$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Harini, R. dkk (2014) yang menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan konselor sebaya di PIK-KRM dalam memberikan informasi dan konseling

tentang kesehatan reproduksi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ristraningsih juga menunjukkan adanya pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi remaja pada siswi kelas VIII SMP Negeri 28 Semarang (Ristraningsih, 2017). Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitrianingrum dkk (2018) pada 38 orang remaja Karang Taruna di Desa Purwobinangun, Sleman juga menunjukkan hasil terdapat perbedaan pengetahuan secara signifikan antara sebelum dan sesudah diberi pelatihan dengan $p = 0,000$; nilai t hitung sebesar 8,72.

Adanya peningkatan pengetahuan para remaja siswa SMP di Kecamatan Pusakajaya yang disiapkan untuk menjadi pendidik sebaya ini sesuai dengan pendapat Triyani (2016) bahwa manfaat yang banyak dirasakan dengan menjadi pendidik sebaya adalah mendapatkan wawasan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena mereka mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi yang lengkap dari sumber yang tepat. Selain itu juga karena sejak awal sebelum mengikuti kegiatan pelatihan mereka memiliki motivasi untuk mempelajari dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat ditransfer ke teman sesama remaja.

Selain memberikan manfaat secara individu sebagai remaja, signifikansi peningkatan pengetahuan responden antara sebelum dan setelah mendapatkan pendidikan kesehatan merupakan modal awal yang akan menjadi bekal mereka pada saat berbagi pengetahuan dengan sebayanya. Sehingga diharapkan pada saat kegiatan mentoring sebaya kesehatan reproduksi remaja, para responden yang sudah memiliki pengetahuan yang memadai ini, dapat berbagi pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi kepada sesama remaja.

KESIMPULAN

Pemberian pendidikan kesehatan kepada remaja siswa SMP di Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang dapat menguatkan kemampuan mereka untuk menjadi pendidik bagi sebayanya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata pengetahuan antara sebelum dan setelah mendapatkan pendidikan kesehatan (masing-masing 14,45 untuk putra dan 13,5 untuk putri). Selain itu juga adanya signifikansi perbedaan pengetahuan antara sebelum dan setelah menerima pendidikan kesehatan (nilai $p = 0,000$). Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas remaja sebagai pendidik sebaya dapat dilakukan secara kontinu sehingga remaja dapat terlibat dalam upaya promosi kesehatan reproduksi remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para responden yang telah dengan semangat terlibat dalam penelitian ini. Selain itu juga ucapan terima kasih disampaikan kepada kepala sekolah SMPN 1 dan SMPN 2 Pusakajaya yang sudah memberikan izin untuk menjadi tempat penelitian. Kepada Kepala dan jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, terima kasih atas dukungan dana dan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan penelitian dan pengembangan kesehatan, Depkes RI 2008, *Riset Kesehatan Dasar 2007*, Depkes RI, Jakarta. 291 hlm
- Fitrianingrum, N.M., Supiyati, S. & Sumarni, S. 2018, Pengaruh Pelatihan Konselor Sebaya pada Remaja Desa Purwobinangun Sleman Terhadap Pengetahuan dan Keterampilan Memberikan Konseling HIV / AIDS, *Jurnal Kesehatan Vokasi*, 3(2): 96–104.
- Harini, R., Rahmat, I. & Nisman, W. A. 2014, Upaya peningkatan keterampilan konseling kesehatan reproduksi mahasiswa melalui pelatihan konselor sebaya, *Jurnal Ners*, 9(2): 173–

- Hastuti, S. & Sudarwati, L. 2007, Gaya Hidup Remaja Pedesaan (Studi di Desa Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, *Jurnal Harmoni Sosial*, 1(2): 69–82.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015, *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. 188 hlm
- Oktawati, W 2017, Kenakalan Remaja di Desa Sungai Paku (Studi Kasus SMP 4 Kampar Kiri Kabupaten Kampar), *Jom FISIP*, 4(2): 1-15.
- Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2014, *Situasi Kesehatan Ibu*. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. 6 hlm
- Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2015, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. 7 hlm
- Ristraningsih, G. 2017, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Siswi Kelas VIII di SMP Negeri 28 Semarang*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saleh, D.H., Rokhmah, D., Nafikadini, I. 2014, Fenomena Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Remaja Ditinjau dari Teori Interaksionisme Simbolik di Kabupaten Jember, *Pustaka Kesehatan*, 2(3): 486–475.
- Save the Children 2014, *Adolescent Sexual & Reproductive Health and Right Update*. Save the Children, Nepal. 18 p.
- Statistics Indonesia, National Population and Family Planning Board, Ministry of Health and MEASURE DHS 2013, *Indonesia Demographic and Health Survey 2012: Adolescent Reproductive Health*. Jakarta.
- Triyani, S.I. 2016, Studi Deskriptif Pendidik Sebaya dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Kec. Pujon Kabupaten Malang, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 5(1): 1–9.
- UNESCO 1998, *Handbook for Educating on Adolescent Reproductive and Sexual Health Book Two: Strategies and Materials on Adolescent Reproductive and*. Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific. 58 p.
- World Health Organization 2008, *Accelerating implementation of Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in the South-East Asia Region: Report of the Meeting of the National Adolescent Health Programme Managers in Members Countries of The South-East Asia Region*. Report of the Meeting of the National Adolescent Health Programme Managers in Member countries of the South-East Asia Region, Bali.
- World Health Organization (2018) *Adolescents: health risks and solutions*. diakses pada 8 Juni 2019 (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BALONGBENDO MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI PUPUK KOMPOS

EMPOWERMENT OF BALONGBENDO VILLAGE THROUGH ORGANIC WASTE PROCESSING TO BE COMPOSITE FERTILIZER

Yulianto Ade Prasetya¹ dan Khoirun Nisyak²

^{1,2}Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis, STIKES Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo, Jalan Raya By Pass Krian Km 33 Sidoarjo, Jawa Timur 61263

¹Email: yuliantoadeprasetya@gmail.com

ABSTRAK

Sampah organik merupakan salah satu jenis sampah yang masih menjadi permasalahan di Indonesia, dimana sebanyak 70% sampah yang dihasilkan berasal dari rumah tangga, termasuk di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terletak di sekitar bantaran sungai Brantas dan disekitar rumah warga banyak ditemukan pabrik, sehingga sungai beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni memberikan edukasi tentang kesehatan sampah dan upaya untuk mengurangi sampah organik dengan sistem tertutup. Metode yang digunakan yakni sosialisasi pemilihan sampah berdasarkan jenisnya, sosialisasi tentang kesehatan sampah, pelatihan pembuatan pupuk cair dari sampah organik, dan pelatihan pembuatan pupuk kompos dengan sistem takakura. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 15 hari. Hasil yang didapatkan yakni warga sudah mulai dapat membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Warga sudah mengetahui dampak sampah bagi kesehatan dan dengan harapan warga desa Balongbendo tidak lagi membakar sampah plastik dan membuang sampah di sungai lagi. Pelatihan pembuatan pupuk cair dan pupuk kompos secara takakura sudah dapat dilakukan warga secara mandiri dan harapannya dapat berkelanjutan. Pupuk yang sudah dibuat oleh warga dapat digunakan untuk menanam tanaman obat keluarga dan hortikultura.

Kata Kunci: Pengabdian masyarakat, Sampah, Pupuk, Takakura, Desa

ABSTRACT

Organic waste is one type of waste that is still a problem in Indonesia, where as much as 70% of the waste generated comes from households, including in Balongbendo Village, Balongbendo District, Sidoarjo Regency. The village is located around the banks of the Brantas river and around the houses of many residents found factories, so the river is converted into a garbage dump. The purpose of community service activities is to provide education about waste health and efforts to reduce organic waste with a closed system. The method used is the socialization of waste selection based on its type, socialization about waste health, training on making liquid fertilizer from organic waste, and training on making compost with the takakura system. Community service activities were carried out for 15 days. The results obtained are that residents have begun to be able to distinguish between organic and inorganic waste. Residents already know the impact of waste on health and with the hope that Balongbendo villagers will no longer burn plastic waste and dispose of garbage in the river again. Takakura has been able to conduct training on the manufacture of liquid fertilizer and compost fertilizer independently and his hopes can be sustainable. Fertilizers that have been made by residents can be used to grow family medicinal plants (TOGA) and horticulture.

Keyword: Community service, Garbage, Fertilizer, Takakura, Village

PENDAHULUAN

Sampah pada dasarnya merupakan proses buangan sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam hal ini proses yang dimaksud adalah proses yang dilakukan

manusia, dalam alam tidak ada sampah yang ada hanya sesuatu yang tidak bergerak (Waluya, 2012). Sampah terbagi menjadi dua golongan berdasarkan zat kimianya yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan bahan yang tidak dapat didaur ulang dan dipakai lagi, namun termasuk bahan yang mampu terdekomposisi relatif lebih cepat dan dapat dikelola menjadi bahan lain yang bermanfaat yakni berupa kompos. Menurut asalnya, yang tergolong sampah organik yakni sisa-sisa dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun spesifik untuk kalangan rumah tangga yang sering disebut sampah rumah tangga yakni sampah organik dan terdiri dari sisa-sisa makanan (cangkang buah-buahan, sisa sayuran yang tidak terpakai), serta daun-daun yang berguguran baik di halaman rumah ataupun taman (Brata dan Nelistya, 2009). Sampah merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh semua negara, termasuk di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia. Semakin tinggi jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah yang dihasilkan terus meningkat. Kabupaten Sidoarjo termasuk memiliki penduduk yang padat dengan total penduduk yakni 3.315.994 jiwa yang terdiri dari 2.216.799 merupakan penduduk wanita dan 1.099.195 merupakan penduduk dengan jenis kelamin pria (Dispendukcapil, 2018). Oleh karena itu, sampah yang dihasilkan juga memiliki volume yang besar, salah satunya yakni desa Balongbendo.

Desa Balongbendo memiliki 78.703 jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di kota Sidoarjo itu sendiri (Dispendukcapil, 2018), dengan persentase timbunan sampah 166,24 m³/hari (Anindita, 2014). Namun, masalah sampah lebih kompleks dibandingkan perkotaan. Desa ini terletak dan dilewati oleh bantaran sungai Brantas dan di sekitar desa tersebut banyak ditemukan Pabrik yang menghasilkan berbagai macam produk dari skala rumah tangga hingga skala besar. Warga sekitar hanya menumpuk sampah tersebut beberapa minggu sampai diambil petugas untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Rochimi dan Nurcholis, 2012). Warga sekitar belum mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Pendekatan pengelolaan sampah seharusnya dilakukan melalui pendekatan 3R yakni mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*). Undang-undang No. 18 tahun 2008 menjelaskan tentang pengelolaan sampah yakni pada Bab 1 ayat 3 bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, yang terdiri dari kegiatan pengurangan dan pengelolaan. Proses pengurangan berarti mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut dan diproses di tempat akhir pemrosesan sampah (Simangkulakit dkk., 2009). Kegiatan yang kami lakukan berupa pengurangan sampah melalui proses mendaur ulang kembali. Sistem yang digunakan untuk solusi tersebut yakni secara tertutup. Maksud hal tersebut yakni sampah organik yang dihasilkan warga dikumpulkan untuk diolah menjadi pupuk berupa pupuk cair dan pupuk kompos dengan sistem takakura. Hasil pupuk yang dihasilkan dapat digunakan kembali oleh warge desa Balongbendo untuk menanam tanaman hortikultura dan tanaman obat keluarga (TOGA). Dimana disekitar rumah warga desa juga banyak ditemukan sawah dan tanaman obat sehingga teknik ini cocok untuk dilakukan.

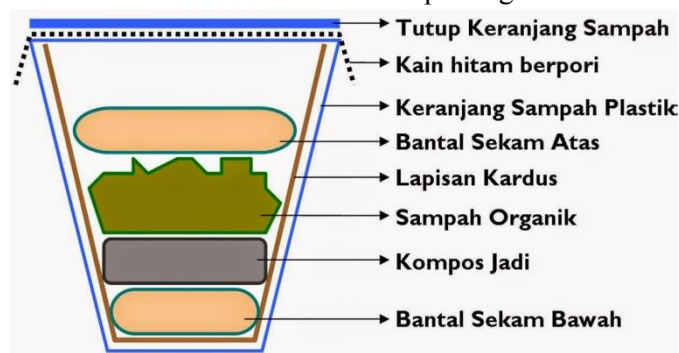
BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan mulai tanggal 2 Maret sampai 15 Maret 2017 bertempat di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Bahan yang digunakan untuk pengelolaan sampah dengan teknik takakura yakni EM (*Effective Microorganism*), bekatul, sampah organik, sekam, air sumur, kain hitam, benang dan jarum, kardus, serta keranjang. Pengelolaan pupuk cair dibuat dengan mencampurkan sampah organik dengan air kelapa, nasi, gula merah, dan air cucian beras secukupnya.

Metode takakura merupakan metode yang ditemukan oleh Koji Takakura dari Jepang, dimana penelitiannya dilakukan di Surabaya untuk mencari sistem pengelolaan sampah organik dengan baik. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil sampah rumah tangga dan telah berhasil menemukan bakteri tertentu yang mampu merombak sampah organik dengan tanpa menimbulkan bau dan menimbulkan cairan (Gufron dkk., 2017).

Hal pertama yang dilakukan yakni dilakukan dengan keranjang yang berlubang disiapkan dan tempakan pada wadah yang teduh terhindar dari sinar matahari, air hujan, dan hewan pengerat sekalipun dan harus memiliki sirkulasi udara yang bagus. Sekam dimasukkan dalam kain hitam dan dijahit menjadi sebuah bantal. Bantal ini berfungsi untuk menyerap air dan mengurangi bau serta mengontrol udara agar mikroba berkembang dengan baik. Keranjang dilapisi dengan kardus, ikat, dan tali. Keranjang kemudian diisi dengan starter atau kompos dengan tebal tidak lebih dari 5 cm (8kg). Kompos berfungsi sebagai starter proses pengomposan karena di dalamnya terkandung mikroba- mikroba pengurai. Sampah dimasukkan ke dalam keranjang takakura. Sampah sebelum dimasukkan ke keranjang harus dipotong kecil-kecil ukuran 2 cm x 2 cm. Tulang ikan dipotong kecil-kecil, tulang ayam dihancurkan. Semakin kecil ukuran akan semakin cepat terurai. Aduk-aduklah setiap selesai memasukkan bahan-bahan yang akan dikomposkan. Hati-hati dalam mengaduk agar tidak merobek kardus. Untuk mempercepat pengomposan, dapat ditambahkan EM4/ air bekas cucian beras/ kompos jadi secukupnya. Untuk memudahkan dan menghemat penggunaan EM4, masukkan EM4 dicampur air 1:5 atau 1:10 kedalam alat penyemprot/ Sprayer. Semprotkan secukupnya (tidak kering ataupun terlalu basah) campuran tersebut setiap kali akan mengaduk sampah yang baru dimasukan. Jika terlalu basah, tambahkan sekam atau serbuk kayu gergajian. Agar kompos beraroma jeruk, dapat tambahkan kulit jeruk ke dalam keranjang. Bantal sekam dimasukkan dan kemudian tutupi mulut keranjang dengan kain. Kemudian tutuplah tutup keranjang rapat-rapat agar serangga dan lalat tidak masuk. Keranjang tidak harus diisi langsung penuh, masukkan sampah organik seadanya. Lakukan secara rutin setiap hari sampai keranjang penuh. Sampah yang baru dimasukkan akan difermentasi dalam 1-2 hari. Untuk memastikan proses pengomposan berjalan, letakkan tangan kita 2 cm dari kompos. Bila terasa hangat, dapat dipastikan proses pengomposan bekerja dengan baik. Jika tidak, percikkan sedikit air untuk memicu mikroorganisme bekerja. Bisa jadi kompos terlalu kering sehingga memerlukan air (Marliani, 2015).

Gambar 1. Susunan takakura dari sampah organik rumah tangga



Teknik pengambilan data dan analisisnya dilakukan pada panen pupuk kompos dilakukan bila kompos di dalam Keranjang Takakura telah penuh dengan cara mengambil 1/3-nya dan matangkan selama seminggu dengan cara didiamkan atau diangin-anginkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sisanya yang 2/3 bisa kita gunakan kembali sebagai starter

untuk pengolahan berikutnya. Kompos takakura sudah terbentuk sempurna apabila teksturnya sudah seperti tanah, warna coklat kehitaman, tidak berbau. Untuk menguji kualitas kompos larutkan dalam air bersih. Kompos yang baik akan tenggelam, apabila ada yang terapung berarti material tersebut belum menjadi kompos. Air akan tetap bersih, apabila air berubah warnanya jadi kecoklatan, artinya dalam kompos terdapat cairan hasil fermentasi anaerobik (Gufron dkk., 2017).

Prosedur pembuatan pupuk cair dilakukan dengan memilih dan memasukkan sampah organik seperti sisa sayuran, kulit buah, dedaunan kering, dan sisa pangkasan rumput/tanaman ke dalam botol 1 L. Sampah yang berukuran besar seperti batang tanaman, sayuran daun, atau kulit buah yang keras sebaiknya dirajang terlebih dahulu agar pembusukannya sempurna. Selain itu, volume sampah yang terapung juga semakin banyak. Setelah botol penuh, siapkan cairan bioaktivator, lalu semprotkan hingga merata ke seluruh sampah dan tutup rapat komposter. Selanjutnya, tunggu sampai menghasilkan lindi (air sampah). Untuk mempercepat terbentuknya kompos tambahkan air santan yang tidak lagi digunakan, atau air cucian beras, gula merah atau air tebu. Pada awal pemakaian, botol tersebut baru bisa menghasilkan lindi (air sampah) atau kompos cair setelah satu minggu. Selanjutnya, pemanenan lindi dapat dilakukan setiap 1 hari sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendataan dan survei yang dilakukan di desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo didapatkan bahwa keadaan geografis yakni bagian utara merupakan Jalan Raya Wringinanom, Selatan merupakan Jalan Mayjen Bambang Yuwono, Bagian Timur merupakan Desa Semawut dan Barat merupakan Lebani Waras. Keadaan demografi dari hasil pendataan pada warga Desa Balongbendo yakni terdapat 180 KK. Data sasaran yang diambil untuk dilakukan di Desa Balongbendo adalah usaha pembuatan pupuk kompos yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Data sampel yang diambil ialah sebanyak hasil pendataan yakni 180 Kepala Keluarga, berdasarkan data tersebut dijadikan sampel untuk dilakukan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk. Pada kegiatan sosialisasi masyarakat desa Balobendo (Gambar 2) jumlah peserta yang hadir yakni 43 orang termasuk tokoh masyarakat. Hal ini lebih dari target yang diinginkan yakni sebanyak 30 orang. Hal ini menunjukkan antusiasme warga Desa Balongbendo untuk mengetahui pemilahan sampah dan dampak sampah bagi kesehatan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan teknik presentasi, tanya jawab, pemberian leaflet. Pada sesi tanya jawab banyak warga antusias terhadap kesehatan tubuh yang berkaitan dengan sampah seperti dilarangnya pembakaran sampah anorganik. Sampah anorganik seperti plastik akan digunakan warga untuk digunakan kembali menjadi produk yang lebih bermanfaat. Warga juga sudah mengetahui bahaya membakar sampah plastik. Sampah plastik yang dibakar akan mengeluarkan senyawa dioksin yang berbahaya untuk pernafasan dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Sampah yang tidak dapat didaur ulang dan dipakai kembali jangan dibiarkan tertumpuk. Sampah tersebut hendaknya dibuang atau ditanam. Sampah anorganik yang tidak dapat terurai sebanyak jangan ditanam karena akan mencemari lingkungan tanah dan menyebabkan tanah kehilangan fungsinya dalam menyediakan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Warga diberikan solusi untuk dibuatkan bank sampah, dimana sampah yang dikumpulkan mencapai berapa kilogram akan ditukarkan menjadi rupiah atau kebutuhan lain.



Gambar 2. Sosialisasi Pemilahan sampah dan dampak sampah bagi kesehatan

Pada kegiatan pemilahan sampah warga sudah mampu mengetahui cara membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang warga hasilkan setiap harinya dikelola menjadi pupuk kompos dengan sistem takakura dan pupuk cair. Sosialisasi ini bertujuan agar warga desa Balongbendo mampu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan peduli terhadap kesehatan lingkungan sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih. Dalam kegiatan sosialisasi ini dihadiri juga oleh lurah, kepala RT dan RW. Keberadaan tokoh masyarakat juga penting agar kegiatan ini memiliki dampak yang lebih bermakna. Pada kegiatan sosialisasi pemilahan sampah warga diajarkan manajemen pemilahan sampah. Pada pelatihan tersebut dijelaskan bahwa manajemen pengelolaan sampah itu mudah yakni dimulai dari skala rumah tangga. Manajemen tersebut secara tersurat menjelaskan agar tiap keluarga menyediakan tempat sampah lebih dari satu, yakni minimal dua buah untuk membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik yang tidak dapat digunakan kembali tidak boleh dikubur dalam tanah dan dibuang ke sungai Brantas. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah sampah, melainkan dapat menimbulkan masalah baru yakni masalah kesehatan. Hal ini tercatat dimana warga desa Balongbendo juga pernah ada warganya yang menderita sakit Demam Berdarah Dengue dan Diare. Tidak sedikit warga yang masih melakukan kegiatan rumah tangga dengan sungai Brantas yang ada di sekitar rumah mereka. Pada sosialisasi pemilahan sampah, warga juga diberikan permainan yakni membedakan sampah untuk ditaruh kedalam bak sampah organik atau anorganik. Warga yang berhasil akan diberikan hadiah kenang-kenangan.

Pada proses pembuatan pupuk cair warga sebelumnya dihibau untuk membawa sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga masing-masing. Sebagai starter ditambahkan EM4 dan untuk mempercepat proses terbentuknya pupuk kompos (Subandriyo, 2012). Selain itu dapat pula ditambahkan air cucian beras sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan mikroorganisme aerobik. Proses pembuatan pupuk cair cukup cepat begitupula dengan pelatihannya karena bahan-bahan yang digunakan sudah pasti tersedia dan proses terbentuknya pupuk cair ini cukup cepat yakni minimal tujuh hari. Proses ini lebih cepat dibandingkan sistem takakura karena melibatkan air, dimana senyawa kimia yang larut dalam air akan lebih mudah dicerna oleh mikroorganisme.

Penambahan aktivator seperti EM4 dalam bentuk cair juga lebih cepat karena mikroorganisme yang digunakan seperti *Rhodopseudomonas* sp. memiliki flagela untuk bergerak sehingga memungkinkan untuk mencerna bahan organik lebih cepat. EM4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme menguntungkan yang bermanfaat dalam menyuburkan tanah, pertumbuhan dan produksi tanaman serta ramah lingkungan (Sinaga, 2009). EM4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang terdiri dari bakteri asam laktat (*Lactobacillus* sp.), bakteri fotosintetik (*Rhodopseudomonas* sp.), *Actinomyeteces* sp., *Streptomyetes* sp., dan yeast. Pupuk cair yang sudah dibuat diharapkan dapat dimanfaatkan warga sebagai untuk menanam

tanaman obat keluarga ataupun tanaman hortikultura yang ada di pekarangan rumah warga desa Balongbendo.



Gambar 3. Pengelolaan Sampah dengan Sistem Takakura dan Pupuk Cair

Pada pengelolaan sampah secara takakura, warga desa Balongbendo tampak antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pada pembuatan pupuk kompos dengan sistem takakura peserta diajarkan mulai dari awal yakni membuat bantal sekam. Kain hitam yang sudah disediakan kemudian dijahit membentuk bantal dan diisi sekam. Pada kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah ibu rumah tangga. Sasaran utama kegiatan pengmas ini memang ibu rumah tangga, karena kepala rumah tangga yakni pagi hingga sore bekerja di pabrik setempat sedangkan malam hari lebih digunakan waktunya untuk istirahat. Warga dibekali dengan keranjang yang belubang, sedangkan karton warga menyiapkan sendiri. Kardus digunakan sebagai penutup. Selain kardus, warga juga dihibung untuk membawa sampah organik yang sudah diumumkan pada waktu kegiatan penyuluhan pertama kali. Beberapa warga sudah benar membawa sampah organik, tetapi ada beberapa juga yang masih membawa sampah plastik dan kertas. Sampah organik yang dibawa oleh mereka sebagian besar berupa sampah dapur yakni buah dan sayur-sayuran. Kegiatan pelatihan takakura dilaksanakan di rumah Bu RT desa Balongbendo. Kegiatan ini dilakukan dengan presentasi dan dilanjutkan dengan praktek langsung oleh warga.

Setelah menjahit bantal sekam, dilanjutkan dengan meletakkan sampah organik ke dalam keranjang yang berisi takakura. Warga juga dibekali *leaflet* metode pengolahan pupuk dengan sistem takakura. Seminggu kemudian setelah pelatihan takakura dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah setelah satu minggu sudah terbentuk pupuk. Warga datang ketempat semula sewaktu diadakan pelatihan pengolahan sampah secara takakura dengan membawa keranjang takakura. Pupuk yang jadi ditandai dengan warna yang merata, kering dan tidak terdapat cairan, warna coklat kehitaman, dan tidak berbau. Untuk menguji kualitas kompos dapat dilakukan dengan melarutkannya dalam air bersih. Kompos yang terbentuk baik akan tenggelam dan air akan tetap bersih. Apabila air berubah warna menjadi coklat maka dalam kompos masih terdapat cairan hasil fermentasi anaerobik. Pada keranjang takakura yang masih belum jadi ditambahkan lagi EM4 untuk mendegradasi sampah organik yang ada (Thoyib, 2016). Sampah yang belum terbentuk menjadi kompos sebagian besar disebabkan karena terlalu sering membuka tutup takakura, sehingga proses fermentasi tidak terbentuk sempurna.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dikarenakan desa tersebut tidak mendapatkan tempat pembuangan akhir, dimana volume sampah di daerah tersebut yakni 166,24 m³/hari sehingga banyak masalah kesehatan terkait dengan pengolahan sampah yang buruk. Pengolahan sampah organik

dilakukan untuk mengurangi sampah organik yang ada dengan sistem tertutup, dimana sampah organik yang berasal dari rumah tangga diubah menjadi kompos yang dapat dilakukan untuk menanam tanaman obat keluarga dan hortikultura di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo yang sudah memberikan dana bantuan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini sebanyak Rp 5.000.000,- dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang sudah memberikan dana bantuan sebanyak Rp 2.000.000 dan memberikan kemudahan dalam perijinan dan pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, D. 2014. Optimalisasi Sistem Pengangkutan Sampah di Wilayah Utara Kabupaten Sidoarjo. *Tugas Akhir*. Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Insitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Brata, K.R dan Nelistya, A. 2009. Lubang Resapan Biopori. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. 2018. //http: dispendukcapil,sidoarjo.go.id.
- Gufron, M.A., Rozak, R.R., dan Fitrianingsih, A. 2017. Pelatihan pengolahan sampah organik dengan media keranjang takakura. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1): 98-108.
- Marliani, N. 2015. Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) sebagai Bentuk Implementasi dari Pendidikan Lingkungan Hidup. *Jurnal Formatif*. 4:(2): 124-132.
- Rochimi dan Nurcholis, A. 2012. Penanganan Sampah Organik di Kota Delta Mas.
- Sinaga, Damayanti. 2009. Pembuatan Pupuk Cair dari Sampah Organik dengan Menggunakan Boisca Sebagai Starter. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Simanungkalit RDM, Suriadikarta DA, Saraswati R, Setyorini D dan Hartatik W. 2009. *Teknik Pembuatan Kompos*. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Subandriyo. 2012. Optimasi Pengomposan Sampah Organik Rumah Tangga Menggunakan Kombinasi Aktivator Em4 dan Mol Terhadap Rasio C/N. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 10(2):xx-xx.
- Thoyib, N. 2016. Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Sampah Organik Rumah Tangga Dengan Penambahan Bioaktivator Em4 (Effective Microorganisms). *Jurnal Konversi*. 5(2): xx-xx.
- Waluya, B. 2012. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indoneisa.



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENDEKATAN KONSEP MANAJEMEN EDUWISATA MIKROHIDRO DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES WITH THE EDUWISATA MICROHIDRO MANAGEMENT CONCEPT APPROACH TO REALIZING INDEPENDENT VILLAGE

Endra Yuafanedi Arifianto¹, Tri Budi Prayogo², Rr Diah Nugraheni Setyowati³, Rizki Nurul Arsy⁴

^{1,2,4}. Universitas Brawijaya, Jalan Veteran, Malang, 65145

³. UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl Jend.A.Yani 117 Surabaya, 60237

endra@ub.ac.id.

ABSTRAK

Sumber daya manusia masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pengembangan desa mandiri di era industri 4.0. Masyarakat desa yang terus tumbuh, berkembang serta mampu adaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan berhasil menguasai persaingan di era digital dengan mengoptimalkan potensi desa. Salah satu potensi desa yang harus dikembangkan oleh masyarakat desa adalah potensi alam yang asli dan murni. Desa Mangliawan Kabupaten Malang Jawa Timur salah satu yang memiliki potensi alam desa berupa sumber mata air yang melimpah. Untuk itu perlu adanya penelitian strategi pengembangan sumber daya manusia masyarakat Desa Mangliawan dalam mengelola potensi alam desa berupa sumber air. Tujuan penelitian ini untuk menumbuhkan kepedulian akan potensi alam desa khususnya sumber air, memberikan pengetahuan, pemahaman tentang konsep manajemen eduwisata mikrohidro, membentuk manajemen pengelola potensi alam, mempraktikkan dan mengembangkan desa wisata sebagai icon penunjang pengembangan desa mandiri. Metode penelitian deskriptif dengan melakukan pengambilan data primer secara langsung melalui wawancara, diskusi, kuisioner dan simulasi lapangan. Hasil penelitian ini berupa tingkat pemahaman masyarakat sekitar sumber mata air tentang pentingnya potensi alam desa, pemahaman tentang konsep manajemen eduwisata mikrohidro, pembentukan kelompok sadar wisata, hasil desain dan penataan desa wisata, tumbuhnya ekonomi mikro masyarakat sekitar. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan sumber daya manusia masyarakat desa bisa berkembang bila didukung penuh oleh tiga pilar, yaitu : pemerintah, akademisi dan perusahaan. Pendampingan berkala oleh tiga pilar akan memberikan motivasi masyarakat desa untuk terus berkarya dan berkontribusi nyata di desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: desa, eduwisata, mikrohidro, sumber daya manusia, kelompok sadar wisata

ABSTRACT

Human resources in rural communities are the key to the success of independent village development in the industrial era 4.0. Village communities that continue to grow, develop and can adapt to the advancement of science and technology, will succeed in mastering competition in the digital era by optimizing village potential. One of the village potentials that must be developed by the village community is genuine and pure natural potential. Mangliawan Village, Malang, East Java, one of the villages that have the potential of natural villages in the form of abundant springs. For this reason, it is necessary to research the development of human resources in the Mangliawan village community in managing the natural potential of the village in the form of water sources. The purpose of this study is to foster awareness of the natural potential of the village, especially water resources, provide knowledge, understanding of the concept of micro-hydro tourism management, establish management of natural potential management, practice and develop tourism villages as supporting icons for independent village development. Descriptive research method by conducting primary data collection directly through interviews, discussions, questionnaires and field simulations. The results of this study are the level of understanding of the people around the spring about the importance of village natural

potential, understanding of the concepts of micro-hydro tourism management, the formation of tourism conscious groups, the results of design and structuring of tourism villages, the growth of the micro economy of the surrounding community. Based on research that has been carried out the human resources of rural communities can develop if fully supported by three pillars, namely: government, academics, companies. Periodic assistance by the three pillars will motivate for the village community to continue to work and contribute significantly to the village by utilizing science and technology.

Keywords: villages, tourism, micro-hydro, human resources, tourism conscious groups

PENDAHULUAN

Kabupaten Malang berdasarkan Badan Pusat Statistik di tahun 2015, berpenduduk sebanyak 2.544.315 jiwa yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan dengan luas wilayah 3.534,86 km². Walau Kabupaten Malang terkenal dengan pariwisatanya, angka kemiskinan Kabupaten Malang pada tahun 2016, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang masih berada di kisaran yang cukup tinggi yaitu 11,49 persen. Angka tersebut bukan angka yang baru bagi Kabupaten Malang. Bila ditilik selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan mereka selalu berada di kisaran 11 sampai 12 persen. Tentu hal semacam ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki, termasuk salah satunya yakni pariwisata. Potensi yang sudah ada disektor pariwisata diharapkan mampu menjadikan beberapa desa di Kabupaten Malang menjadi percontohan dalam pengembangan desa mandiri.

Berdasarkan data wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang tercatat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebanyak 5.849.544 orang. Jumlah wisatawan yang secara bertahap sejak tahun 2010 mengalami kenaikan hingga tahun 2016. Grafik dan tren yang naik ini menunjukkan peluang pemerintah Kabupaten Malang dan masyarakat sekitar lokasi wisata untuk berkembang lebih baik dalam mengoptimalkan potensi alam khususnya wisata alam.

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2010	4 187	1 938 066	1 942 253
2011	9 983	2 101 822	2 111 805
2012	29 504	2 014 105	2 043 609
2013	33 226	2 517 248	2 550 474
2014	80 792	3 170 575	3 251 367
2015	99 873	3 554 609	3 654 482
2016	129 663	5 719 881	5 849 544

Gambar 1.1 Data Jumlah Wisatawan Kabupaten Malang
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan potensi desa adalah keterbatasan sumber daya manusia masyarakat desa khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi potensi alam desa. Sumber daya manusia masyarakat desa pada umumnya sangat heterogen sama seperti kondisi sumber daya manusia Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Menurut Gary Dessler (2010:296), pengembangan sumber daya manusia adalah usaha untuk meningkatkan

prestasi manajemen dengan menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, atau peningkatan keterampilan. Berdasarkan pengamatan lapangan ada beberapa kelompok usia masyarakat desa yang potensial bila diberikan peran dan tugas secara terstruktur oleh pemerintah dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Pengelompokan usia akan memudahkan dalam memberikan transfer keilmuan dan pengetahuan secara bertahap sesuai dengan zamannya. Saat ini yang paling dominan diharapkan mampu untuk mengembangkan desa mandiri adalah generasi milenial, generasi yang sangat dekat dengan teknologi informasi dalam komunikasi setiap harinya.

Salah satu kondisi saat ini tentang kemajuan dan kemudahan dalam mengakses informasi dengan menggunakan layanan internet atau teknologi informasi seharusnya menjadikan masyarakat cepat beradaptasi dalam belajar ilmu pengetahuan. Tantangan di era yang biasa disebut industri 4.0 kecepatan akses dan teknologi otomatisasi mempengaruhi perkembangan di negara maju bahkan di kota – kota terpencilpun khususnya dalam hal produksi/sektor industri. Secara tidak langsung perkembangan industri 4.0 juga mendorong beberapa sektor perekonomian diantaranya sektor pariwisata alam, khususnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam mempublikasikan. Perlu disadari perkembangan teknologi yang cepat harus diimbangi dengan perkembangan sumber daya manusia masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Untuk itu perlunya penelitian ini yang memfokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa dengan pendekatan manajemen eduwisata mikrohidro. Pendekatan eduwisata mikrohidro menjadi salah satu terobosan untuk mengoptimalkan potensi Desa Mangliawan yang berupa potensi alam sumber air. Tentu dengan penelitian ini, harapannya mampu memberikan terobosan alternatif atau sebagai penunjang dalam mewujudkan desa mandiri

BAHAN DAN METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia atau masyarakat, suatu objek, suatu sistem pemikiran. Dalam hal ini meneliti status tokoh masyarakat RT 04 RW 08 Desa Mangliawan dengan potensi desa bidang pariwisata alam berupa melimpahnya sumber air yang potensial. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian akan potensi alam desa khususnya sumber air yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, memberikan pengetahuan, pemahaman tentang konsep manajemen eduwisata mikrohidro atau dengan kata lain meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia masyarakat sekitar sumber air melalui konsep manajemen eduwisata mikrohidro, membentuk manajemen pengelola potensi alam sebagai penganggungjawab dalam menjalankan program pemanfaatan potensi desa yang berupa sumber air menjadi wisata modern, mempraktikkan dan mengembangkan desa wisata sebagai icon penunjang pengembangan desa mandiri.

Penelitian ini dilakukan pada awal Januari 2018 sampai November 2018 di RT 04 RW08 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain : wawancara, diskusi, kuisioner dan simulasi lapangan/observasi. Wawancara : pengumpulan data dengan mewawancarai langsung beberapa tokoh masyarakat, ketua RT 04, Ketua RW 08, Kepala Dusun dan Kepala Desa Mangliawan. Kegiatan wawancara dilaksanakan secara bertahap dan terpisah sehingga diharapkan menghasilkan informasi yang independen dan akurat. Diskusi dilaksanakan beberapa kali dengan masyarakat sekitar sumber air yang memanfaatkan secara langsung setiap harinya, beberapa pengunjung yang mampir ke lokasi sumber air selama bulan penelitian, masyarakat komunitas lingkungan yang merawat sumber air selama ini. Diskusi juga dilaksanakan bersama dengan perangkat Desa Mangliawan untuk mengetahui potensi dan peluang pendanaan serta prioritas pengembangan desa

kedepan. Kuisisioner diberikan kepada sampling masyarakat sekitar yang memanfaatkan keberadaan sumber air selama ini dan perangkat desa yang terlibat membantu mengurus dan merawat sumber air. Simulasi lapangan khusus dilaksanakan dalam mengukur dan mengambil data awal sebagai inputan dalam mendesain wisata alam sumber air kedepan. Pengambilan kuisisioner dilaksanakan berbarengan dengan transfer keilmuan tentang pengembangan sumber daya manusia, konsep manajemen, konsep eduwisata dan konsep mikrohidro sebagai solusi paling cepat dalam mengoptimalkan potensi yang ada dengan biaya yang relative murah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Alam dan Kondisi Saat Ini

Berdasarkan pengumpulan data selama penelitian berlangsung maka ada beberapa gambaran nyata tentang potensi alam yang dimiliki RT04 RW08 Desa Mangliawan dan kondisi saat penelitian. Potensi alam yang paling potensial adalah sumber air yang melimpah dengan debit air yang besar. Potensi alam ini masih dimanfaatkan secara tradisional atau konvensional oleh masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci pakaian, dan kebutuhan air sehari-hari. Jumlah sumber airnya tidak hanya satu, melainkan beberapa titik yang berdekatan. Hasil wawancara dan diskusi bersama masyarakat dan perangkat desa dapat diketahui bahwa selama ini belum ada ide dan rencana pengembangan yang signifikan tentang potensi alam ini. Munculnya inisiatif komunitas masyarakat lingkungan yang mulai merapikan bambu-bambu sekitar sumber air dan peduli dengan sumber air bersamaan dengan adanya penelitian menjadikan langkah awal masyarakat dan perangkat desa untuk berdiskusi lebih lanjut tentang pengembangannya.

Kondisi waktu penelitian di perparah dengan jumlah sampah yang masih banyak disekitar sumber air. Namun, ada komitmen masyarakat untuk secara bertahap membersihkan sampah disekitar sumber air supaya mudah merencanakan target pengembangan kedepannya. Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat sekitar merasa sangat terbantu ketika ada perwakilan akademisi melakukan penelitian dan peduli dengan potensi Desa Mangliawan khususnya sumber air. Hal ini secara langsung memotivasi mereka untuk memberikan pandangan, semangat dalam menjaga potensi alam yang sudah ada dan siap belajar lebih lanjut. Informasi terakhir di bulan terakhir penelitian peneliti mendapatkan informasi, bahwa sudah diperhatikan SKPD Kabupaten Malang yang terkait dengan memberikan bantuan pembangunan fasilitas penunjang untuk menjaga potensi alam sumber air.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Konsep Manajemen Eduwisata Mikrohidro

Masyarakat sekitar sumber air sangat heterogen pendapat/opini, pandangan dan gagasan tentang harapan dan strategi pengembangan sumber air agar lebih bermanfaat dan mendatangkan nilai ekonomis yang bisa dinikmati bersama. Dengan kata lain, bisa mendatangkan uang/pendapatan untuk masyarakat sekitar dan Desa Mangliawan. Langkah awal dalam penelitian ini, beberapa tokoh masyarakat yang diwakilkan sekitar 25 orang dikumpulkan di balai Desa Mangliawan untuk mengikuti transfer keilmuan dan materi tentang konsep manajemen eduwisata mikrohidro menjadi salah satu alternative untuk memanfaatkan potensi alam sumber air RT04 RW08 Desa Mangliawan. Kuisisioner awal digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan tentang konsep manajemen, konsep eduwisata dan konsep mikrohidro. Hasil kuisisioner awal menunjukkan data bahwa pengetahuan masyarakat tentang konsep manajemen masih kurang, pengetahuan tentang konsep eduwisata juga masih kurang dan bahkan belum mengetahuai tentang konsep mikrohidro. Hasil kuisisioner ini memudahkan peneliti dan tim untuk memulai memberikan materi

secara bertahap dalam rangka meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia masyarakat perwakialn sekitar sumber air.

Langkah selanjutnya, memahami masyarakat tentang pentingnya ketiga konsep diatas untuk segera di aplikasi dalam memanfaatkan sumber air. Tahap pemahaman ini yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih lama dikarenakan masyarakat akan berhitung secara matematis untung rugi dalam mengembangkan potensi desanya yang berupa sumber air menjadi wisata modern yang menghasilkan nilai ekonomis. Untuk mendukung pemahaman masyarakat maka secara bertahap dilaksanakan transfer keilmuan tentang peran penting teknologi informasi dalam mempublikasikan dan memasarkan wisata ini. Mengingat era digitalisasi saat ini, golongan usia masyarakat yang tepat untuk mengemban amanah ini adalah masyarakat generasi milineal. Hasil berdiskusi dan simulasi maka masyarakat harus berbagi peran sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang sudah dimilikinya dengan kata lain pembuatan *job description* sudah mulai dipikiran dan harus direalisasikan.

Hasil dari proses pengembangan sumber daya manusia dengan konsep manajemen eduwisata mikrohidro bisa dipaparkan sebagai berikut, proses manajemen yang sebelumnya belum ada sudah mulai dipikirkan bersama *planning* (fungsi perencanaan), *organizing* (fungsi pengorganisasian), *actuating* (fungsi pengarahan) dan *controlling* (fungsi pengendalian). Bukti mulainya penerapan POAC dalam proses pengelolaan sumber air sebagai potensi desa adalah kemajuan dalam sumber daya manusia masyarakat yang berpikir sistematis dan terukur. Penerapan empat fungsi manajemen harus dilaksanakan secara bertahap dan menyeluruh, tidak boleh ada fungsi yang kurang optimal. Untuk itu, penyusunan POAC dari tahap paling kecil sampai paling besar harus tercantum dalam dokumen yang bisa diakses bersama. Tentu hal ini sudah menjadikan masyarakat memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selanjutnya hasil dari konsep eduwisata dengan adanya kesamaan ide tentang salah satu kegiatan pariwisata yang mengutamakan aspek pembelajaran dan pendidikan dan aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal. Keinginan menekankan pembelajaran dan pendidikan yang bisa ditawarkan dalam mengembangkan wisata ini. Sumber air memiliki komponen – komponen penyusun yang terlibat sangat rumit, dimulai dari tanaman/pohon yang mampu menyerap/menyimpan air yang bagus yang harus dilestarikan, sumber air ynag mengalir, besaran sebit air, luberan sumber, kualitas air dan sebagainya, Perlu adanya semangat bersama untuk mengedukasi kepada semua pengunjung supaya mengetahui, memahami secara mendalam dampak dan fungsi sumber air.

Terakhir perpaduan dengan konsep mikrohidro, artinya kegiatan pariwisata yang mengutamakan aspek pembelajaran dan pendidikan dengan memanfaatkan sumber air sebagai hal yang sangat vital dalam kehidupan makhluk hidup bahkan bisa menjadi salah satu sumber listrik. Kedepan harapannya dari sumber air bisa membangun pembangkit mini mikrohidro sebagai laboratorium pembelajaran dan pendidikan sehingga segmentasi pengunjung mulai dari usia TK sampai dewasa bisa belajar secara menyeluruh/ komprehensif.

Pegelolaan Potensi Desa

Dalam konsep manajemen wisata selalu ada pengelola yang bertanggungjawab setiap hari untuk merencanakan, menjalankan apa yang sudah direncanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol atau mengevaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan. Model konsep pengelolaan potensi alam yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang telah disepakati berbentuk kelompok sadar wisata. Kelompok ini diangkat dan dilantik secara resmi oleh kepala Desa Mangliawan, memiliki wewenang untuk mengelola sumber air desa sebagai

potensi alam desa yang harapannya mampu membantu pertumbuhan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat sekitar. Ketika transfer keilmuan berhasil dan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia maka perlu ada legalitas pengelola supaya perkembangan wisata ini bisa berjalan secara bertahap dan signifikan. Legalitas pengelola akan memudahkan dalam banyak hal diantaranya, pengurusan perijinan, pengajuan hibah pemerintah, pengajuan hibah CSR perusahaan, pengajuan MoU kerjasama, pengajuan pendampingan dari berbagai instansi dan sebagainya.

Desain dan penataan Desa Wisata

Desain awal yang secara umum diutarakan oleh masyarakat pengelola yang kemudian digambarkan dan divisualisasi dalam bentuk gambar tiga dimensi. Namun, desain ini masih sangat fleksibel berubah mengingat penelitian hanya dilaksanakan selama enam bulan, tentu bila ada ide dan gagasan yang lebih aplikatif bisa diadopsi dan segera direalisasikan. Desain dan penataan desa wisata dilaksanakan bersama dengan tokoh masyarakat, tim peneliti dan perangkat desa. Desain awal menjadi indikator tahap pembangunan untuk masa depan desa wisata.

Peran Tiga Pilar

Sumber daya manusia masyarakat desa bisa berkembang bila didukung penuh oleh tiga pilar, yaitu : pemerintah, akademisi dan perusahaan. Pilar pertama pemerintah sebagai pemilik wilayah, pembuat regulasi dan perencanaan pengembangan suatu desa mandiri harus sensitif dan peka terhadap potensi nyata di desa dan harapan masyarakatnya. Pemerintah harus memberikan ruang diskusi dengan semua kelompok masyarakat, komunitas, golongan yang peduli dengan perkembangan desanya. Hanya ruang diskusi yang terjadwal dan mudah diakses akan melahirkan konsep gagasan yang cemerlang dan membangun. Pilar kedua, akademisi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu menjalankan tri dharma perguruan tinggi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terukur dengan output yang langsung bisa dirasakan masyarakat desa. Keterlibatan perguruan tinggi negeri maupun swasta akan memotivasi langsung masyarakat desa dalam mengembangkan potensi alamnya. Pendampingan berkala dengan mengirim dosen, mahasiswa dan bantuan hibah akan sangat signifikan berdampak dalam mewujudkan desa mandiri. Pilar ketiga adalah perusahaan dengan kemampuan finansial dan kinerja perusahaan yang kuat harapannya menjadi pendamping kegiatan masyarakat khususnya dalam pengembangan wisata alam sehingga mampu mendorong menjadi desa mandiri.

KESIMPULAN

Proses pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa akan sangat bisa berdampak nyata apabila mampu membagi kelompok usia masyarakat dengan keilmuan yang akan disampaikan. Pembagian peran atau tugas sangat diperlukan dalam mengembangkan wisata desa sehingga disepakati dibuat kelompok pengelola potensi desa. Kelompok ini memiliki legalitas dan akan bertanggungjawab penuh dalam membangun wisata sehingga menjadi penunjang desa mandiri. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan sumber daya manusia masyarakat desa bisa berkembang bila didukung penuh oleh tiga pilar, yaitu : pemerintah, akademisi dan perusahaan. Pendampingan berkala oleh tiga pilar akan memberikan motivasi masyarakat desa untuk terus berkarya dan berkontribusi nyata di desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saran pengembangan potensi desa harus dibuatkan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang. Selain itu mengoptimalkan tiga pilar untuk mendukung pengembangan konsep wisata modern yang mendukung tercapainya desa mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, diantaranya : LPPM Universitas Brawijaya yang telah memberikan pendampingan dan fasilitator dalam mendapatkan pendanaan, Kepala Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur beserta perangkat yang telah mendukung penuh kegiatan selama penelitian, masyarakat Desa Mangliawan yang tergabung secara langsung mendampingi selama penelitian, komunitas karang taruna dan generasi milenial melek teknologi informasi yang menjadi inisiator publikasi, kelompok informasi masyarakat (KIM), tim peneliti dari kalangan dosen dan mahasiswa yang menemani selama proses pengambilan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dessler, Gary. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit PT INDEKS.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 57 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Cetakan Keenam. Bandung: Refika Aditama.



PELATIHAN DAUR ULANG BOTOL PLASTIK BEKAS MENJADI OVITRAP DI DESA BALONGBENDO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE

A'yunil Hisbiyah^{1*}, Eviomitta Rizki Amanda², Khoirun Nisyak³

^{1,2,3}Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis, STIKES Rumah Sakit Anwar Medika, Jl. Raya By Pass Krian KM 33, Balongbendo, Sidoarjo, 61263, Indonesia

ABSTRAK

Kebiasaan masyarakat desa Balongbendo dalam membuang sampah rumah tangga ke sungai dan menimbun sampah menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar timbunan sampah tersebut adalah sampah plastik, salah satunya botol plastik. Pada musim hujan, botol plastik tersebut menjadi sarang nyamuk *A. aegypti* sehingga mengakibatkan peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue di desa Balongbendo. Berdasarkan hal tersebut, keterampilan daur ulang botol plastik diperlukan oleh masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu rumah tangga sehingga dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang terdapat di desa Balongbendo, alat pengendali vektor nyamuk juga diperlukan sebagai upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue, salah satu alat pengendali vektor nyamuk yang ekonomis dan mudah dibuat adalah ovitrap (penjebak telur nyamuk). Ovitrap dapat dibuat dari botol plastik. Oleh karena itu, Desa balongbendo memerlukan adanya pelatihan yang dapat menambah keterampilan masyarakat desa dalam pemanfaatan botol plastik bekas sebagai ovitrap. Metode penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Metode pelatihan yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan praktek tentang pembuatan ovitrap. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil pertemuan, pelatihan ini dirasakan banyak memberikan keterampilan dan pengetahuan bagi ibu-ibu rumah tangga. Hasil dari proses pelatihan, para peserta mengerti tentang daur ulang botol plastik bekas menjadi ovitrap serta cara kerja ovitrap dalam mengendalikan vektor nyamuk Demam Berdarah Dengue.

Kata kunci: pelatihan; botol bekas; demam berdarah dengue; ovitrap.

ABSTRACT

Balongbendo's villagers' habits in removing household waste into the river and hoarding waste cause environmental pollution. Most of the trash heap is plastic waste, one of which is plastic bottles. In the rainy season, the plastic bottle became a nest of A. aegypti mosquitoes resulting in an increase of Dengue Haemorrhagic Fever cases in Balongbendo village. Based on that, plastic bottles recycling skills are needed by the surrounding community, especially housewives so as to reduce the amount of plastic waste found in Balongbendo village, a mosquito vector control device is also needed as a preventative measure of Dengue Haemorrhagic Fever, one of the economical mosquito vector control devices and easy to make is ovitrap (Mosquito trap trap). Ovitrap can be made from plastic bottles. Therefore, balongbendo village needs training that can increase village community skills in the use of used plastic bottles as ovitrap. This research method is a class action research. Methods of training used are lectures, discussions, and practices on the manufacture of ovitrap. The data analysis method used is descriptive qualitative. From the results of the meeting, this training is felt to provide many skills and knowledge for housewives. As a result of the training process, participants understand about the recycling of used plastic bottles into ovitrap and the way ovitrap works in controlling the Dengue Haemorrhagic Fever mosquito vector.

Keywords: DHF; Ovitrap; Preventing; Used Bottles.

PENDAHULUAN

Pada musim pancaroba, resiko masyarakat Indonesia terkena penyakit tropis lebih tinggi. Salah satu penyakit tropis yang mudah menjangkit masyarakat adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Selama 41 tahun terakhir, DBD menjadi permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia

(Sukowati, 2010). DBD merupakan penyakit tropis yang disebabkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Pencegahan demam berdarah yang paling efektif dan efisien sampai saat ini melalui kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan cara 3M Plus yaitu Menguras, Menutup, dan Memanfaatkan kembali barang bekas. Adapun yang dimaksud dengan Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan lainnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Prinsip dasar kegiatan pencegahan DBD yaitu pengendalian vektor nyamuk. Salah satu teknologi yang berguna dalam pengendalian vektor nyamuk adalah alat penjebak telur nyamuk (Ovitrap) (Atikasari & Sulistyorini, 2018). Ovitrap merupakan suatu alat sederhana berupa bejana (kaleng plastik) yang dindingnya dicat hitam dan diberi air secukupnya untuk menarik *A. aegypti* bertelur dan terperangkap, sehingga dapat memutus siklus hidup *A. aegypti* (Alfiantya, Baskoro, & Zuhriyah, 2018). Ovitrap sudah dikembangkan sejak tahun 1966 oleh Fay dan Eliason. Hamzah & Basri (2010) menunjukkan bahwa ovitrap dapat dibuat dari bahan-bahan bekas seperti botol bekas. Penggunaan ovitrap sudah banyak diterapkan di berbagai negara. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui tentang kegunaan dan pembuatan ovitrap. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pembuatan ovitrap berbahan dasar botol plastik bekas kepada masyarakat. Kegiatan pelatihan tersebut diberikan kepada masyarakat desa Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Desa balongbendo RT.05 RW.02 desa balongbendo merupakan kampung yang cukup padat penduduknya, posisi rumah warga sangat berdempetan dan banyak yang tidak memiliki pekarangan. Selain itu, RT.05 RW.02 terletak cukup dekat dengan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) desa balongbendo sehingga saat musim pancaroba bau sampah dapat tercium sampai RT.05 RW.02 ini. Pada tahun 2019 terjadi kasus DBD pertama pada warga RT.05 desa Balongbendo, berdasarkan hasil interview dengan warga RT.05, sebanyak 3 kasus DBD terjadi secara beruntun. Oleh karena itu, warga RT.05 ingin adanya tindakan pencegahan DBD yang ramah lingkungan dan ekonomis. Mempertimbangkan banyaknya tumpukan sampah botol plastik, maka dilakukan pelatihan pembuatan ovitrap (penjebak nyamuk) dari botol plastik bekas kepada warga RT.05 RW.04 desa balongbendo. Pelatihan pemanfaatan botol plastik bekas menjadi ovitrap ini diharapkan dapat mengurangi timbunan limbah botol bekas dan mencegah terjadinya kasus DBD di desa balongbendo. Tujuan utama pelatihan ini adalah menambah keterampilan masyarakat desa balongbendo dalam pemanfaatan botol bekas menjadi ovitrap dan menambah wawasan masyarakat balongbendo tentang pencegahan nyamuk DBD.

BAHAN DAN METODE

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan pelatihan pengolahan botol plastik bekas dirancang untuk membekali masyarakat desa khususnya ibu-ibu rumah tangga RT 05 Dusun Balongbendo Desa Balongbendo dengan keterampilan daur ulang botol bekas. Pelatihan ini dilaksanakan atas kerja sama antara warga RT 05 Dusun Balongbendo Desa Balongbendo dengan Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik STIKES Rumah Sakit Anwar Medika. Pelatihan dilaksanakan di Pos pertemuan RT 05 secara berkesinambungan selama 1 bulan pada bulan Februari 2019.

B. Metode

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 4 tahapan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahap perencanaan diawali dengan diskusi bersama warga tentang identifikasi dan merumuskan permasalahan melalui observasi awal kondisi lingkungan dan kegiatan-kegiatan warga di Desa Balongbendo. Berdasarkan rumusan permasalahan, maka ditetapkan perencanaan tindakan berupa pelatihan pengolahan botol bekas menjadi ovitrap.

Selanjutnya dilakukan perencanaan prosedur kerja, instrumen untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan lembar pengamatan untuk mengamati proses kegiatan.

Setelah melalui perencanaan, selanjutnya ke tahap pelaksanaan yaitu warga desa mengikuti pelatihan pengolahan botol bekas. Metode pelatihan melalui ceramah, diskusi, dan pelatihan dilakukan sebagai media alih teknologi yang bersifat interaktif dan berlangsung dua arah. Penerapan program dilanjutkan dengan peningkatan ketrampilan warga RT 05 melalui kegiatan pelatihan secara demonstrasi dengan melibatkan seluruh peserta secara aktif. Kegiatan pelatihan meliputi teknik pembuatan ovitrap dari botol bekas dan cara penggunaan ovitrap sebagai pengebak nyamuk.

Selama pelatihan berlangsung, dilakukan pengamatan (observasi) secara sadar, kritis, dan objektif dalam memantau pelaksanaan kegiatan. Observasi ini dilakukan secara komprehensif sehingga diharapkan dapat mengenali dan merekam dengan lengkap gejala-gejala baik yang memang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang cenderung mempertinggi maupun yang menurunkan efektivitas tindakan. Aspek-aspek yang harus dipantau meliputi seberapa jauh tingkat pengetahuan peserta pelatihan tentang pencegahan penyakit DBD sebelum dan setelah pelatihan, serta tingkat keterampilan peserta pelatihan dalam mengolah botol bekas menjadi ovitrap. Adapun instrumen observasi berupa soal pre test dan post test.

Setelah melalui tahap observasi, maka dilakukan refleksi terhadap hasil observasi. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi (Madya, 2007). Pada tahap ini dilaksanakan pemahaman dan pemberian makna terhadap proses dan hasil perubahan yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan dari program pelatihan ini. Refleksi dilakukan melalui *Forum Group Discussion*. Peningkatan pengetahuan didapatkan dengan membandingkan hasil Pre Test dan Post Test. Peningkatan ketrampilan peserta diukur dengan mengamati jumlah peserta yang mampu membuat ovitrap dari botol plastik bekas dengan baik dan benar.

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2015). Sedangkan dokumentasi dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya melalui data berupa arsip, foto, video maupun *recorder* sehingga memperkuat suatu penelitian atau mendukung data penelitian. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana menurut Zuriah (2005) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan dan menguji hipotesis". Pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu dengan menganalisis data hasil diskusi dan observasi peserta pelatihan selama kegiatan pelatihan berlangsung. Miles dan Huberman (2004) menjelaskan bahwa metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Pencegahan DBD

Pelatihan pengolahan botol plastik bekas menjadi ovitrap sebagai upaya pencegahan DBD merupakan serangkaian kegiatan yang berisi teori maupun praktek tentang cara pencegahan DBD, pengolahan botol plastik bekas, dan teknik pembuatan ovitrap. Sebelum pelaksanaan pelatihan ini, dilaksanakan pre test terhadap masyarakat desa balongbendo terkait pengetahuan tentang pencegahan DBD dan pembuatan ovitrap dari botol plastik bekas. Jumlah peserta pelatihan pada

tahap pertama ini sebanyak 28 orang yang semuanya merupakan ibu-ibu rumah tangga. Dari hasil pre test, didapatkan bahwa 50% responden mengetahui cara pencegahan DBD sedangkan 0% responden tidak mengetahui tentang ovitrap dan cara pembuatannya dari botol plastik bekas. Berikut ini adalah soal pre test yang diajukan kepada peserta pelatihan.

1. Apa yang dimaksud dengan gerakan 3M Plus?
2. Sebutkan tindakan apa saja yang dapat mencegah penyebaran nyamuk?
3. Apa yang anda ketahui Demam berdarah dengue?
4. Apakah anda mengetahui apa itu ovitrap?

Kegiatan ini dilaksanakan di pos pertemuan warga RT.05 Dusun Balongbendo Desa Balongbendo sebanyak 2 kali pertemuan. Sosialisasi ini merupakan pertemuan pertama dari serangkaian kegiatan pelatihan ini, pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2019. Sosialisasi pada pertemuan pertama menjelaskan tentang penyakit DBD dan siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti*. Peserta perlu mengetahui lebih dalam tentang penyakit DBD dan siklus hidup *A. aegypti* supaya dapat memahami penanganan kasus DBD yang tepat. Pertemuan ini berfokus pada pengenalan sumber permasalahan terjadinya kasus DBD.

Dari pertemuan ini, peserta mendapatkan wawasan tentang siklus penyakit DBD, penyebab DBD, penyebaran DBD, siklus hidup nyamuk *A. aegypti*. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait topik sosialisasi, maka dilakukan sesi diskusi. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta selama tahap diskusi ini meliputi:

1. Bagaimana membedakan penyakit DBD dengan demam biasa? (Pada DBD, demam terjadi secara mendadak, disertai nyeri sendi, tanpa flu dan batuk. Pasien harus segera dibawa ke dokter dan dilakukan uji laboratorium)
2. Apa saja pertolongan pertama yang dapat dilakukan bila terdapat anggota keluarga yang diduga terkena DBD? (Konsumsi cairan yang cukup, istirahat total, dan kompres, mengonsumsi makanan yang mudah dicerna, mengonsumsi buah-buahan yang dapat meningkatkan kadar trombosit (jambu merah))

Sosialisasi Pencegahan DBD merupakan Pertemuan kedua yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2019 di pos pertemuan warga RT.05 Dusun Balongbendo Desa Balongbendo. Pertemuan kedua ini menjelaskan tentang cara pencegahan DBD. Kegiatan tersebut ditunjukkan oleh Gambar 1. Hasil pre test menunjukkan bahwa 80% peserta belum paham tentang konsep 3M plus, sebagian peserta mengetahui 3M yang meliputi menguras, menutup, dan mengubur, sedangkan pada tahun 2019 Kemenkes mengeluarkan pembaruan tentang 3M yang meliputi menguras, menutup, dan mendaur ulang kembali.



Sumber : Data Primer diolah (2019)

Gambar 1. Sosialisasi DBD dan Pencegahannya

Setelah kegiatan sosialisasi tersebut, dilakukan post test untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu-ibu rumah tangga mengenai DBD. Hasil post test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan terkait pencegahan DBD. Selain post test, juga dilakukan wawancara melalui forum diskusi disetiap akhir pertemuan. Suasana diskusi pada pertemuan pertama dan kedua berbeda, yang mana pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan kedua lebih banyak dan mendetail, diskusi beberapa kasus DBD juga ditanyakan oleh ibu-ibu rumah tangga pada pertemuan kedua. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan pada diskusi meliputi:

1. Apakah *fogging* adalah cara yang paling optimal dalam memberantas nyamuk *A. aegypti*? (Belum tentu, karena fogging merupakan pilihan terakhir untuk memberantas nyamuk karena beracun/pencemaran udara dan beberapa nyamuk sudah resisten dengan fogging)
2. Berapa banyak telur yang dihasilkan oleh satu nyamuk *A. aegypti*? (Setelah mengisap darah, nyamuk *A. aegypti* betina menghasilkan rata-rata 100-200 telur setiap fase. Selama hidupnya, nyamuk betina dapat memiliki 5 (lima) fase bertelur dan jumlah telur bergantung pada banyaknya darah yang dihisap).
3. Berapa lama telur dapat menetas menjadi larva nyamuk? (pada suhu panas, dalam 2 hari telur menetas menjadi larva, sedangkan pada suhu dingin, dalam seminggu telur menetas menjadi larva).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan ibu-ibu rumah tangga dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua.

B. Pelatihan Pembuatan Ovitrap dari Botol Bekas

Pertemuan ini menjelaskan tentang teknologi ovitrap sebagai alat penjebak telur nyamuk dan cara pembuatannya. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan ibu-ibu rumah tangga tentang inovasi pencegahan DBD melalui pengendalian nyamuk *A. aegypti* serta menambah keterampilan ibu-ibu rumah tangga dalam memanfaatkan botol plastik bekas. Pertemuan ini ditunjukkan pada Gambar 2.

Pada awalnya ovitrap digunakan untuk mendeteksi keberadaan nyamuk dan kemudian dikembangkan penerapannya sebagai alat penjebak telur nyamuk sehingga Siklus hidup nyamuk *A. aegypti* terputus. Ovitrap yang standar berupa tabung gelas kecil bermulut lebar yang dicat hitam di bagian luarnya. Tabung gelas tersebut dilengkapi dengan tongkat kayu yang dijepit vertikal di bagian kasarnya menghadap ke arah dalam. Tabung diisi air sampai setengahnya dan ditempatkan di lokasi yang diduga menjadi habitat nyamuk, biasanya di dalam atau di sekitar lingkungan rumah. Air rendaman daun kering dapat digunakan sebagai media yang menarik nyamuk untuk bertelur (Alfiantya *et al.*, 2018).



Sumber: Data Primer diolah (2019)

Gambar 2. Pelatihan pemanfaatan botol plastik bekas menjadi ovitrap

Pembuatan ovitrap dari botol plastik bekas ini terdiri dari 5 tahap. Tahap Pertama, tutup botol dilepas, kemudian botol plastik dipotong menjadi dua bagian yaitu bagian atas dan bawah. Tahap kedua, daun kering dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam bagian bawah botol dan dicampur dengan air sampai tiga per empat bagian wadah. Tahap ketiga, bagian atas botol ditutupkan secara terbalik ke bagian bawah botol yang berisi rendaman daun kering. Tahap keempat, botol dibungkus dengan kain atau plastik berwarna hitam (gelap). Tahap kelima, ovitrap diletakkan dibagian gelap ruangan. Penggunaan kain atau plastik gelap bertujuan untuk menarik nyamuk bertelur didalam ovitrap. Hendayani (2007) menyatakan bahwa air rendaman daun kering menghasilkan Selulosa ($C_6H_{10}O_5$) adalah polimer berantai panjang polisakarida karbohidrat dari glukosa juga merupakan komponen struktural utama dari tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh manusia yang mempengaruhi syaraf penciuman nyamuk untuk meletakkan telurnya.

Peserta sangat aktif berdiskusi pada pertemuan ketiga ini, hal tersebut ditunjukkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Adapun pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi yaitu:

1. Bagaimana membunuh jentik yang terperangkap dalam ovitrap?(air dalam ovitrap dibuang ke tanah, maka jentik nyamuk akan terbunuh)
2. Setelah sosialisasi ovitrap, maka dilakukan pelatihan pembuatan ovitrap sederhana dari botol plastik bekas dan air rendaman daun kering. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan bekas meliputi botol plastik bekas, daun kering, kresek hitam, air, dan selotip besar. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting (Latifa, Arusyid, Iswidaty, & Sutiningsih, 2013; Rati & Rustam, 2016). Pada sesi pelatihan ini peserta langsung diarahkan membuat ovitrap untuk dipasang di tempat tinggal masing-masing.

Selama proses pelatihan pembuatan ovitrap, peserta sangat antusias, hal ini ditunjukkan dari jumlah ovitrap yang dihasilkan, dimana satu orang bisa membuat 2 sampai 3 ovitrap. Sesi terakhir yaitu sesi diskusi, selama proses diskusi terlihat bahwa peserta sangat antusias dan semangat untuk melanjutkan program pemanfaatan botol plastik bekas menjadi ovitrap. Hasil post test menunjukkan terjadi peningkatan wawasan peserta tentang ovitrap dan cara pembuatannya.

C. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat hasil pelatihan pemanfaatan botol plastik bekas menjadi ovitrap sebagai upaya pencegahan DBD. Tahap ini dilakukan 2 minggu setelah pertemuan ketiga, yaitu pada tanggal 25 Februari 2019. Pada tahap ini akan dilakukan pemberantasan jentik-jentik nyamuk yang terperangkap didalam ovitrap. Oleh karena itu, penentuan waktu monitoring dan evaluasi ini didasarkan pada siklus hidup nyamuk *A. aegypti*. Berdasarkan beberapa penelitian, setelah nyamuk bertelur di media air, 6-14 hari kemudian telur akan menetas menjadi nyamuk. Telur dapat menetas pada media air yang tidak tersentuh tanah (Nadifa *et al.*, 2016). Maka dari itu, pemberantasan jentik-jentik nyamuk yang terperangkap dilakukan dengan cara menuang air dari ovitrap ke tanah. Sebelum air dituang ke tanah, peserta diajak untuk membuktikan adanya telur nyamuk yang terperangkap ke dalam ovitrap, adapun caranya yaitu melihat air rendaman daun kering dibawah sinar matahari atau pencahayaan yang terang. Jentik-jentik nyamuk akan terlihat dalam rendaman air yang diberi pencahayaan. Setelah yakin terdapat jentik-jentik nyamuk yang terperangkap, air rendaman tersebut dituang ke tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan pemanfaatan botol plastik menjadi ovitrap sebagai upaya pencegahan DBD di Dusun Balongbendo, Desa Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dirasakan banyak memberikan keterampilan dan pengetahuan bagi

ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan dengan metode penyampaian materi serta pelatihan dan diskusi yang kondusif. Hasil dari proses pelatihan, para peserta mengerti tentang pembuatan ovitrap dari botol bekas dan cara kerja ovitrap dalam mengendalikan vektor nyamuk DBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiantya, P. F., Baskoro, A. D., & Zuhriyah, L. (2018). Pengaruh Variasi Lama Penyimpanan Air Rendaman Jerami Padi terhadap Jumlah Telur Nyamuk *Aedes aegypti* di Ovitrap Model Kepanjen, *Global Medical and Health Communication*, 6(1), 57–62.
- Atikasari, E. & Sulistyorini, L. (2018). Pengendalian vektor nyamuk *aedes aegypti* di rumah sakit kota surabaya, *Indonesian Journal of Public Health*, 13 (1), 71–82. <https://doi.org/10.20473/ijph.v113il.2018.71-82>
- Hamzah, E., & Basri, S. (2016). Perbedaan Ovitrap Indeks Botol, Ember dan Port Mosquito Trap sebagai Perangkap Nyamuk *Aedes sp.* di Area Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda Wilayah Kerja Sangatta Kabupaten Kutai Timur, *Hiegene*, 2 (3), 155-158.
- Kementerian Kesehatan RI, (2019), Kendalikan DBD dengan Pesan 3M plus, pp. 1-2.
- Latifa, K. N., Arusyd, W. B., Iswidaty, T., & Sutiningsih, D. (2013). Pengaruh Ovitrap Sebagai Monitoring Keberadaan Vektor *Aedes sp* di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3 (1), 26–29.
- Nadifa, F., Muhajir, N.F., Arisandi, D., & Lobo M.D.O., (2016). Identifikasi Larva Nyamuk pada Tempat Penampungan Air di Padukuhan Dero Condong Catur Kabupaten Sleman, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10 (2), 172–178.
- Rati, G., & Rustam, E. (2016). Artikel Penelitian Perbandingan Efektivitas Berbagai Media Ovitrap terhadap Jumlah Telur *Aedes Spp* yang Terperangkap di Kelurahan Jati Kota Padang, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), 385–390.
- Sukowati, S. (2 Agustus 2010.), Masalah Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Pengendaliannya di Indonesia, *Buletin Jendela Epidemiologi*, pp. 26-30



PELATIHAN PEMBUATAN HIDROGEL AROMATERAPI UNTUK PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DESA BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

WORKSHOP OF HOW TO MAKE AROMATHERAPY HYDROGEL TO PREVENT DENGUE FEVER IN BALONGBENDO SIDOARJO

Eviomitta Rizki Amanda^{1*}, A'yunil Hisbiyah¹, Khoirun Nisyak¹

¹Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medis STIKES Rumah Sakit Anwar Medika
Jl. Raya By Pass Krian KM. 33, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo (61263)

Email: eviomittarizki@gmail.com

ABSTRAK

Desa Balongbendo merupakan desa di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terletak di sepanjang aliran sungai Brantas yang mengarah ke arah hilir Kali Mas Surabaya, sehingga desa ini menjadi kawasan yang beresiko terjangkit penyakit demam berdarah dengue (DBD) pada saat musim hujan tiba. Pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah wabah DBD terutama pada saat musim hujan. Hidrogel aromaterapi dibuat menggunakan butiran (manik-manik) hidrogel yang direndam dalam campuran air dan minyak atsiri serai wangi (*Cymbopogon nardus*) atau lavender (*Lavandula angustifolia*). Hidrogel aromaterapi yang terbentuk kemudian diletakkan dalam vas bunga dan dijadikan sebagai hiasan atau media tanam bunga segar dalam vas. Adanya hidrogel dalam ruangan akan menyebarkan aroma wangi dari minyak atsiri yang diserap oleh hidrogel sehingga dapat berperan sebagai pengusir nyamuk. Pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi ini diikuti oleh 30 orang ibu rumah tangga yang tergabung dalam organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Pelatihan dilaksanakan dengan metode penyampaian materi serta pelatihan dan diskusi. Hasil kegiatan pengabdian ini dianalisis berdasarkan penelitian tindakan kelas dan data diolah secara kualitatif (berdasarkan observasi dan hasil diskusi). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa semua peserta memahami cara pembuatan hidrogel aromaterapi sehingga memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yaitu pembuatan hidrogel aromaterapi untuk hiasan dan pengusir nyamuk.

Kata kunci: hidrogel, aromaterapi, nyamuk, demam berdarah dengue

ABSTRACT

Balongbendo is a village in Sidoarjo Regency. This village is located in the riverside of Brantas, therefore it has potentially infected dengue haemorrhagic fever (DHF) while rainy season is coming. This workshop has an aim to prevent dengue fever by using aromatherapy hydrogel. Aromatherapy hydrogel was made by using hydrogel beads which soaked in a mixture of water and essential oil of lemongrass (*Cymbopogon nardus*) and lavender (*Lavandula angustifolia*). Aromatherapy hydrogel then placed in a vase and used as decoration or medium for flower. Aromatherapy hydrogel would share a fragrant from the adsorbed essential oil, therefore it can use as mosquito repellents. This workshop was attended by 30 participants who were the housewives from family welfare development organization (PKK). This event was carried out by teaching, training, and discussion method. The results of the workshop was analyzed according to the classroom action research approach using qualitative data (according to observation and discussion). The results showed that all of the participants understood how to make aromatherapy hydrogel as a decoration and mosquitoes repellent.

Keywords: hydrogel, aromatherapy, mosquito, dengue fever

PENDAHULUAN

Penyakit *demam berdarah dengue* (DBD) merupakan salah satu penyakit yang mewabah saat musim penghujan tiba. Selama 41 tahun terakhir, DBD menjadi permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia (Sukowati, 2010). DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* sebagai vektor primer (Kemenkes RI, 2018). Nyamuk *Aedes Spp* tersebut membawa virus Dengue dan menularkannya pada manusia melalui gigitan (Kemeskes RI, 2010). Virus dengue ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan kebanyakan ditemukan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota di Indonesia (Kemenkes RI, 2018). Pada rentang tahun 2004 hingga 2010, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi diantara 30 negara wilayah endemis (WHO, 2010). Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua jumlah penderita DBD terbanyak di Indonesia pada tahun 2017 dengan 7836 kasus (Kemeskes RI, 2018). Penyakit DBD merupakan penyakit menular yang pada umumnya menyerang anak-anak pada usia kurang dari 15 tahun dan juga orang dewasa (Kemenkes RI, 2018).

Desa Balongbendo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis, desa ini terletak di sepanjang aliran sungai Brantas yang mengarah ke arah hilir Kali Mas Surabaya. Kecamatan Balongbendo terletak di pada bagian barat Kabupaten Sidoarjo sehingga berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto. Sebagai ibukota Kecamatan Balongbendo, Desa Balongbendo merupakan salah satu desa yang padat penduduk. Posisi rumah warga saling berdempetan dan dekat dengan tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Saat musim pancaroba tiba, bau sampah tercium menyengat. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil wawancara dengan arga terdapat 3 kasus DBD yang menyerang warga Desa Balongbendo secara beruntun. Berdasarkan kejadian tersebut diperlukan tindakan pencegahan penyakit DBD.

Meningkatnya jumlah penderita dan meluasnya wilayah sebaran penyakit DBD setiap tahun, diperlukan upaya yang tepat untuk pencegahannya. Selain faktor musim, faktor pengetahuan masyarakat Indonesia yang kurang mendukung membuat kasus DBD berulang dan muncul kembali setiap tahun. Salah satu upaya yang digalakkan oleh pemerintah ialah pemberantasan sarang nyamuk dengan membasmi nyamuk *Aedes aegypti* sebagai pembawa virus dengue. Pemberantasan sarang nyamuk ini akan lebih efektif apabila diikuti dengan berbagai upaya pengendalian seperti 3M (menguras bakmandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas), mengganti air pada vas bunga, membersihkan saluran air yang tergenang, memelihara ikan cupang pada kolam, melakukan *fogging* dengan malathion, serta menaburkan bubuk abate dalam bak penampungan air. Untuk mencegah berulangnya kasus kejadian DBD, maka berbagai upaya pengendalian perlu disebarluaskan ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit DBD.

Salah satu upaya pengendalian yang dapat diaplikasikan dengan mudah ialah melalui pembuatan hidrogel aromaterapi dari bahan alami untuk membasmi nyamuk. Aromaterapi alami yang terbukti efektif sebagai pengusir (repellent) nyamuk ialah minyak atsiri serai sitronelal dari wangi (*Cymbopogon nardus*) dan lavender (*Lavandula angustifolia*) (Kim, 20015; Silalahi, 2016). Selain efektif membasmi nyamuk, aromaterapi alami tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Aromaterapi yang terbuat dari bahan dasar minyak atsiri memiliki sifat mudah menguap, sehingga diperlukan media penjerap untuk menstabilkan aromanya sehingga aroma wangi dapat bertahan lama di ruangan. Hidrogel merupakan butiran gel yang dapat menyerap dan melepaskan air, sehingga hidrogel banyak

dimanfaatkan sebagai media tanam. Berdasarkan manfaat dari minyak serai wangi, minyak lavender dan juga hidrogel, maka keduanya dikombinasikan sebagai media tanam yang juga mampu mengusir nyamuk di ruangan. Penggunaan hidrogel aromaterapi ini juga bermanfaat untuk menggantikan air dalam vas bunga sehingga meminimalisir sarang nyamuk. Pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi pada masyarakat Desa Balongbendo bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat melalui upaya pengendalian dan pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD).

BAHAN DAN METODE

A. BAHAN

Bahan yang digunakan dalam pembuatan hidrogel aromaterapi ialah butiran gel kering, air, ekstrak minyak serai wangi, ekstrak minyak lavender, vas bunga, dan bunga.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi dirancang untuk membekali masyarakat Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan dilaksanakan di Balai RT. 05 Desa Balongbendo secara berkesinambungan selama 1 bulan pada bulan Februari 2019 dan diikuti oleh 30 orang ibu rumah tangga yang bergabung dalam organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Balongbendo.

C. METODE

Metode kegiatan PKM ini terdiri dari 4 tahap kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tahap perencanaan diawali dengan kegiatan diskusi bersama warga mengenai pembahasan permasalahan yang terjadi di Desa Balongbendo. Dari hasil diskusi dengan warga serta observasi, maka dapat dirumuskan permasalahan dan ditetapkan solusi yang akan ditawarkan yakni pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi. Selanjutnya dilakukan perijinan, perencanaan program kerja, instrument untuk mengukur keberhasilan kegiatan, serta lembar pengamatan untuk mengamati proses kegiatan.

Setelah melakukan proses perencanaan, maka dilakukan kegiatan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan dengan materi teknik pembuatan dan cara penggunaan hidrogel aromaterapi. Metode pelatihan dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan pelatihan serta alih teknologi yang bersifat interaktif dan berdua arah. Penerapan program juga dilakukan menggunakan metode demonstrasi dengan melibatkan seluruh peserta secara aktif.

Selama pelatihan berlangsung, maka dilakukan pengamatan (observasi) untuk mengetahui tingkat pemahaman warga. Proses observasi dilakukan secara komprehensif, sadar, kritis, dan objektif, selama berlangsungnya kegiatan sehingga diharapkan dapat mengenali dan merekam seluruh aktivitas yang terjadi selama pelatihan. Dari kegiatan observasi dapat diketahui gejala-gejala yang dapat menurunkan dan menaikkan efektivitas tindakan. Beberapa aspek yang dipantau ialah tingkat pengetahuan peserta tentang pencegahan penyakit DBD sebelum dan setelah pelatihan, serta tingkat keterampilan peserta pelatihan dalam membuat hidrogel aromaterapi. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini ialah lembar soal *pretest* dan *posttest*.

Setelah dilakukan tahap observasi, maka dilakukan tahap refleksi. Tahap ini bertujuan untuk mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan yang telah dicatat dalam observasi. Tahap refleksi dilakukan melalui kegiatan *forum group discussion* untuk mengulas kembali materi yang disampaikan serta melengkapi kekurangan yang ada selama kegiatan. Hasil peningkatan pengetahuan peserta dapat

diukur melalui hasil *pretest* dan *posttest* dengan indikator keberhasilan ialah meningkatnya jumlah peserta yang mampu membuat hidrogel aromaterapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi merupakan serangkaian kegiatan yang berisi teori maupun praktik tentang pencegahan dan pengendalian demam berdarah serta upaya yang bisa dilakukan melalui pembuatan hidrogel aromaterapi. Melalui kegiatan pembuatan hidrogel aromaterapi, masyarakat Desa Balongbendo khususnya ibu-ibu rumah tangga telah mendapat satu pengalaman dan keterampilan yang sebelumnya belum pernah diperoleh. Pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi diharapkan mampu mengurangi dan memberantas sarang nyamuk sehingga menurunkan angka kejadian penyakit DBD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, salah satu senyawa aktif dalam serai yang memberikan efek dapat menolak nyamuk ialah sitronelal. Sitronelal merupakan senyawa golongan monoterpenoid yang dapat mengeluarkan wangi lemon yang khas. Sitronelal dapat diisolasi dari tanaman serai melalui metode destilasi fraksional dalam minyak serai terbukti memiliki efektivitas yang tinggi sebagai penolak nyamuk (Kim, 20105). Selain serai, tumbuhan lain yang dapat dimanfaatkan minyak atsirinya sebagai pengusir nyamuk ialah lavender. Lavender didominasi oleh kandungan senyawa linalool dan linalyl asetat. Minyak atsiri lavender diperoleh dengan metode destilasi uap. senyawa linalool dan linalyl asetat terbukti berperan sebagai pengusir nyamuk.

1. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 30 rang ibu rumah tangga. Pelatihan ini difokuskan terhadap pembuatan hidrogel aromaterapi karena proses pembuatan dan aplikasinya mudah. Bahan-bahan yang digunakan juga mudah diperoleh. Pembuatan hidrogel aromaterapi ini, selain digunakan sebagai pengusir nyamuk dapat juga digunakan sebagai media tanam. Dengan demikian penggunaan hidrogel aromaterapi ini dapat meminimalisir penggunaan air dalam vas bunga yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Proses pembuatan hidrogel aromaterapi dimulai dengan mempersiapkan ekstrak minyak serai wangi dan minyak lavender. Masing-masing ekstrak diteteskan ke dalam air sebanyak lima tetes dalam 500 mL air dalam botol tertutup. Setelah itu minyak dan air dikocok. Butiran gel yang kering dimasukkan dalam campuran air dan minyak kemudian dikocok dan dibiarkan hingga gel mengembang. Apabila gel telah mengembang sempurna, mak gel dapat dimasukkan vas bunga untuk dijadikan sebagai media tanam dan hiasan. Pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi dapat ditampilkan pada Gambar Sebelum dilaksanakan pelatihan dilakukan *pretest* untuk mengetahui tingkat pemahaman warga tentang pencegahan penyakit DBD serta cara pembuatan hidrogel aromaterapi. Dari hasil *pretest* diketahui bahwa 70% warga mengetahui cara pencegahan DBD, namun 0% warga yang mengetahui cara pembuatan hidrogel aromaterapi.



Gambar 1. Kegiatan pelatihan pembuatan hidrogel aromaterapi

Berikut adalah soal *pretest* yang diajukan untuk peserta:

1. Apa yang anda ketahui tentang penyakit DBD?
2. Apakah anda mengetahui gerakan 3M plus?
3. Apakah anda mengetahui apa itu hidrogel aromaterapi?

Di sela-sela kegiatan pelatihan, tim membuka sesi tanya jawab untuk mencairkan suasana. Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh peserta seperti berikut:

1. Apakah bahan dasar pembuatan gel? (sodium alginate dan kalsium klorida, namun gel yang sudah jadi dalam bentuk sediaan kering sangat mudah diperoleh di toko mainan, sehingga lebih mudah menggunakan gel yang sudah siap diaplikasikan).
2. Berapa lama gel aromaterapi dapat bertahan di ruangan? (gel dapat bertahan hingga bertahun-tahun, namun wangi aromaterapi biasanya semakin berkurang setiap hari, sehingga perlu ditambahkan

minyak kembali setiap seminggu sekali. Apabila ukuran gel mengecil, maka cukup disemprot dengan air bercampur minyak kembali).

Pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta berhasil dijawab oleh tim, sehingga diskusi berlangsung dengan lancar. Berdasarkan hasil diskusi diketahui antusias masyarakat tentang pembuatan hidrogel aromaterapi. Selain itu juga terlihat bahwa semua peserta bisa mengaplikasikan materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil *posttest* diketahui bahwa 100% peserta memahami tentang pencegahan demam berdarah dan cara pembuatan hidrogel aromaterapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan pencegahan penyakit DBD serta pembuatan hidrogel aromaterapi di Desa Balongbendo dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan banyak manfaat berupa pengetahuan serta keterampilan untuk ibu-ibu PKK. Kegiatan ini juga berlangsung kondusif dengan diskusi dua arah yang aktif. Berdasarkan hasil pelatihan diketahui bahwa 100% peserta mengetahui cara pencegahan DBD serta pembuatan hidrogel aromaterapi dalam mengendalikan vektor nyamuk. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat akan wabah DBD datang melanda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada STIKES Rumah Sakit Anwar Medika atas pembiayaan yang diberikan untuk terlaksananya kegiatan pelatihan ini dalam serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh tim Dosen DIII Teknologi Laboratorium Medis STIKES Rumah Sakit Anwar Medika. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada segenap pemerintah Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidorjo atas kerjasanya dalam acara pelatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kim, J.K., C.S. Kang., J.K. Lee., Y.R. Kim., H.Y. Han, dan H.K. Yun. 2005. Evaluation of repellency effect of two natural aroma mosquito repellent compounds, citronella and citronellal. *Entomological Research*. 35(2);117-120
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. Situasi Penyakit Demam Berdarah di Indonesia Tahun 2017. *Buletin Hari Demam Berdarah Dengue (DBD)*, 22 April 2018
- Silalahi, L.N. 2016. Aktivitas Gel Sitronelal dan Minyak Lavender Sebagai Penolah Nyamuk *Aedes aegypti*. *Skripsi*.
- Sukowati, S. (2 Agustus 2010.), Masalah Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Pengendaliannya di Indonesia, *Buletin Jendela Epidemiologi* , pp. 26-30
- World Health Organization. Dengue hemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: The Organization; 2010

**PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KOMITMEN ORGANISASI DAN
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA KARYAWAN
SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN SUKORAME-LAMONGAN**

***INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL
COMMITMENT AND BEHAVIOR ORGANIZATION ON BEHAVIOR PERFORMANCE OF
EMPLOYEES AND VILLAGE COMMUNITY PARTICIPATION IN SUKORAME-LAMONGAN
DISTRICT***

Joko Hadi Susilo¹, Maulana Ghani Yusuf², Nur Riska Agustina³

¹Universitas Diponegoro Semarang 50241

²Universitas Diponegoro Semarang 50241

³Inspektorat Kabupaten Ponorogo 63416

Email: Jokohadi@student.undip.ac.id

ABSTRAK

Kualitas pelayanan publik mempunyai peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat desa dengan moderasi *organizational citizenship behavior* serta hubungannya terhadap partisipasi masyarakat desa se-Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *quota sampling* yaitu 86 sampel. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan *moderating regression analysis*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perangkat desa dengan *organizational citizenship behavior* memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut. Artinya bahwa semakin baik kepemimpinan transformasional serta semakin kuat komitmen organisasi dan *organizational citizenship behavior* akan meningkatkan kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, artinya bahwa kinerja perangkat desa yang semakin baik tidak memberikan dampak pada peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa partisipasi sudah menjadi budaya dalam masyarakat dan kuatnya kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kemajuan desa muncul secara alami. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran bahwa dalam peningkatan kinerja perangkat desa dapat diwujudkan melalui kepemimpinan transformasional yang baik serta peningkatan komitmen organisasi dan *organizational citizenship behavior*.

Kata kunci: kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi, *organizational citizenship behavior*, kinerja dan partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

The quality of public services has an important role in achieving community welfare and overcoming national development gaps, so there needs to be an increase in the performance of the village government as well as community participation in the implementation of village development to realize sustainable economic independence. The purpose of this study was to examine and analyze the effect of transformational leadership and organizational commitment on the performance of village officials by moderating organizational citizenship behavior and its relationship to village community participation in Sukorame District, Lamongan Regency. The method of this research is quantitative descriptive analysis with a quota sampling technique that is 86 samples. Methods of data analysis using multiple linear regression with moderating regression analysis. The results of data analysis show that partially or

simultaneously transformational leadership variables and organizational commitment have a significant and positive effect on the present work of village officials with organizational citizenship behavior reinforcing the influence of these two variables. This means that the better transformational leadership and the stronger the organizational commitment and organizational citizenship behavior will improve the performance of village officials. The performance of the village apparatus does not affect community participation, meaning that the better performance of the village apparatus does not have an impact on increasing community participation. This is due to the fact that participation has become a culture in the community and the strong concern of the community in improving village progress so that community participation arises naturally. The results of this study can provide suggestions that in improving the performance of village officials can be realized through good transformational leadership and increased organizational commitment and organizational citizenship behavior.

Keywords: transformational leadership, organizational commitment, organizational citizenship behavior, performance and community participation.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu wilayah merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi pedoman khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai peran sebagai penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia. Peran pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tentunya harus didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang dapat ditunjukkan melalui kinerjanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Helmayani *et al*, 2017).

Kinerja karyawan dalam suatu lembaga dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi baik sektor privat maupun pada sektor publik. Kinerja dapat dinilai dari perbandingan hasil kerja secara nyata berdasarkan standart kerja yang telah ditetapkan oleh lembaga sektor publik dalam pencapaian tujuan lembaga (Astono. 2013; Yulianti & Wuryanti 2015). Kinerja mempunyai peran penting dalam proses pencapaian tujuan suatu lembaga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah gaya kepemimpinan (Astono. 2013; Kosasih 2018) Dalam sistem organisasi formal terdapat berbagai aktivitas yang dikoordinasikan dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan di bawah wewenang dan kepemimpinan (Srimiatun 2018). Dilihat dari pelaksanaannya kepemimpinan transformasional merupakan kondisi dimana pemimpin mampu memberikan motivasi kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan dan bukan untuk kepentingan pribadi (Yulianti & Wuryanti 2015). Dalam sistem penyelenggaran pemerintah desa yang baik tidak terlepas dari kepemimpinan sorang kepada desa (Aprilia *et al* 2017). Pemimpin sebagai cerminan kedudukan seseorang dalam kelompok yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab (Sedarmayanti, 2013:120).

Selain gaya kepemimpinan, komitmen organisasi sangat dibutuhkan dan berdampak pada kinerja suatu lembaga (Sujana 2012). Komitmen organisasi menunjukkan adanya kemampuan dan kepedulian yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi (Lakshmi 2010). Komitmen organisasi merupakan ukuran sejauh mana karyawan memihak dan berupaya mempertahankan suatu organisasi (Lubis 2010: 54). Komitmen organisasi mempunyai dampak pada hasil kerja yang diinginkan (Anggraeni & Wulansari 2015). Kesuksesan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada

kepemilikan sumber daya manusia yang berkompeten, melainkan perlu adanya dorongan pada komitmen organisasinya (Bakan *et al* 2011).

Kinerja yang tinggi perlu didukung dengan adanya aktivitas karyawan yang dilakukan melebihi harapan, adanya perilaku karyawan yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab diluar perannya merupakan *Organizational Citizenship Behavior (OCB)* (Nurnaningsih & Wahyono 2017). Kesuksesan suatu organisasi membutuhkan pekerja yang melakukan lebih dari tanggung jawab, pada umumnya mereka akan memberikan kinerja diatas harapan (Robbins & Judge 2015:19). OCB merupakan perilaku yang dilakukan karyawan tidak hanya sebatas peraturan organisasi melainkan perilaku *ektra-role* atau perilaku yang muncul atas dasar kesadaran dalam melakukan kinerja yang lebih (Mayasari *et al* 2010). Mengingat banyaknya hambatan, perilaku OCB dapat meminimalisir terjadinya penurunan kinerja suatu organisasi (Nurnaningsih & Wahyono 2017).

UU No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa telah berkembang pada berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan. Keterlibatan masyarakat mempunyai peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Konsep partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok dalam penyatuan kepentingan bersama untuk pengembangan tenaga dan sumber daya kepada institusi atau sistem yang mengatur dalam pencapaian tujuan kehidupan (Sobri *et al* 2018). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan desa akan mengalami kegagalan (Julianto & Dewi 2019). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kinerja pemerintah desa dan partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan suatu lembaga baik pada sektor privet maupun sektor publik telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Eka & Ismiyati (2015); Srimiatun (2018); Maharani *et al* (2013) menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perangkat desa. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi (Kosasih 2018). *Organizational citizenship behavior* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perangkat desa (Nurnaningsih & Wahyono 2017). Kinerja berpengaruh terhadap tingkat partisipatif masyarakat (Nur *et al* 2018). Dengan demikian dapat jelaskan bahwa peningkatan kinerja perangkat desa dapat dilakukan melalui gaya kepemimpinan yang sesuai, komitmen organisasi dan *organizational citizenship behavior* yang tinggi pada perangkat desa, sedangkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas kinerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Sukorame, jika dilihat dari sudut pandang kinerja masih jauh dari kata maksimal. Hal tersebut dilihat saat peneliti mengunjungi setiap kantor kepala desa kebanyakan kantor kepala desa masih tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya profesionalitas dalam pelaksanaan kinerja. Berdasarkan informasi dari kepala desa dan sekretaris desa dalam pelaksanaan pengelolaan kantor desa (balaidesa) telah dibagi jadwal atau piket setiap hari selain mewajibkan seluruh perangkat desa untuk hadir di kantor. Kondisi tersebut bertujuan agar tidak adanya kekosongan perangkat yang ada di kantor desa.

Selain itu, permasalahan lain yang terjadi dikarenakan pekerjaan sebagai perangkat desa berbeda dengan pekerjaan sebagai karyawan pada sektor privat yang tidak adanya promosi jabatan, kemudian pelaksanaan kinerja yang mengedepankan basis kultural yang kuat. Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi lemahnya profesionalitas dalam bekerja. Sedangkan dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa seperti pembangunan keikutsertaan

dalam rapat sangat baik. Melihat permasalahan tersebut tentunya peran kepala desa dalam menerapkan gaya kepemimpinannya dan adanya komitmen yang kuat dari karyawan serta kinerja *ekstra-role* yang dilakukan karyawan mampu meminimalisir permasalahan yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat desa serta hubungannya dengan partisipasi masyarakat di Desa Se-Kecamatan Sukorame.

KAJIAN TEORI

Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan merupakan tingkat pencapaian kerja setiap individu dalam pelaksanaan kerjanya (Silalahi 2013: 408). Kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang diwujudkan setiap karyawan pada prestasi kerja sesuai dengan perannya (Rifai & Sagala 2013: 548). Kinerja dapat dinilai dari perbandingan hasil kerja secara nyata berdasarkan standart kerja yang telah ditetapkan oleh lembaga sektor publik dalam pencapaian tujuan lembaga yang telah ditetapkan (Astono. 2013; Yulianti & Wuryanti 2015). Kinerja karyawan dapat diukur dengan indikator 1). kualitas, 2). kuantitas dan 3). ketepatan waktu (Bangun 2012: 234); (Setiyarti & Mulyanto 2013).

Partisipasi Masyarakat

Sujarweni (2015: 29) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan salah satu prinsip *good governance*, dimana warga desa mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan untuk pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsep partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok dalam penyatuan kepentingan bersama untuk pengembangan tenaga dan sumber daya kepada institusi atau sistem yang mengatur dalam pencapaian tujuan kehidupan (Sobri *et al* 2018). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan desa akan mengalami kegagalan (Julianto & Dewi 2019).

Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan kondisi dimana pemimpin mampu memberikan motivasi kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan dan bukan untuk kepentingan pribadi (Yulianti & Wuryanti 2015). Hughes *et al* (2012: 542) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki visi, keahlian retorika, dan pengelolaan kesan yang baik dan menggunakannya untuk mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya, sehingga mendorong tergugahnya emosi pengikut serta kesediaan mereka untuk bekerja mewujudkan visi sang pemimpin, kepemimpinan transformasional dapat diukur melalui 1). *Idealized Influence* (Pengaruh Ideal), 2). *Inspirational Motivation* (Motivasi Inspirasional), 3). *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual) dan 4). *Individualized Consideration* (Pertimbangan Individual)

Komitmen organisasi

Kreitner & Kinicki (2014:165) komitmen organisasi merupakan tingkatan dimana seseorang mampu mengenal organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya. Seseorang yang mempunyai komitmen tinggi akan menganggap dirinya sebagai karyawan sejati dalam suatu organisasi, begitu pula sebaliknya jika seseorang kurang berkomitmen akan menganggap dirinya sebagai orang luar dalam organisasi (Moorhead & Griffin 2013:73). Komitmen organisasi merupakan perasaan keterkaitan atau keterikatan secara psikologis maupun fisik seorang pegawai pada lembaga dimana seseorang tersebut bekerja, komitmen organisasi dapat diukur dengan indikator 1) Komitmen afektif, 2). Komitmen berkelanjutan dan 3). Komitmen normatif (Wirawan 2013:713).

Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Perilaku karyawan yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab diluar perannya merupakan *Organizational Citizenship Behavior (OCB)* (Nurnaningsih & Wahyono 2017). OCB merupakan perilaku yang dilakukan karyawan tidak hanya sebatas peraturan organisasi melainkan perilaku *ekstra-role* atau perilaku yang muncul atas dasar kesadaran dalam melakukan kinerja yang lebih (Mayasari *et al* 2010). *Organizational citizenship behavior* dapat diukur melalui indikator 1). *Altruism* (perilaku menolong), 2). *Conscientiousness* (perilaku yang menunjukkan usaha lebih), 3). *Sportmanship* (perilaku toleransi), 4). *Courtesy* (menjaga hubungan baik) dan 5). *Civic Virtue* (perilaku yang mendedikasikan dirinya kepada tanggung jawab). OCB merupakan perilaku individu yang bebas dan tidak berkaitan langsung dengan *reward* yang dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi (Organ dalam Titisari 2014: 5).

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukorame Kabuptaen Lamongan. Waktu penelitian ini berlangsung pada tanggal 1 mei 2019 sampai 10 juni 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa pada 9 Desa di Kecamatan Sukorame, teknik pengambilan sampel menggunakan kuota sampling dengan jumlah 86 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa wawancara dan kuisioner dengan pengukuran skala likert. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program *SPSS for Windows Release 25.0*, sedangkan dalam pengujian pengaruh moderasi menggunakan Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji kualitas data yang dilakukakan melalui uji validitas dan reliabilitas menyimpulkan bahwa penggunaan data dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, hasil uji validitas dapat ditunjukkan melalui nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,06.

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat dari uji linieritas, normalitas, multikolonieritas dan heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji linieritas dapat diketahui bahwa nilai signifikanis masing-masing variabel kurang dari tingkat signifikanis 0,05 sehingga asumsi nilieritas terpenuhi. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menghasilakn nilai lebih dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukan bahwa nilai *variance inflation factor* kurang dari 10, untuk variabel kepemimpinan transformasional sebesar 2,700, komitmen organisasi sebesar 2,279, *organizational citizenship behavior* sebesar 2,237 dan kinerja perangkat desa sebesar 1,000, dengan demikian asumsi multikolonieritas terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *sig* lebih dari 0,05, variabel kepemimpinan transformasional sebesar 0,909, komitmen organisasi sebesar 0,993, *organizational citizenship behavior* sebesar 0,122 dan kinerja perangkat desa sebesar 0,080 sehingga uji hetero terpenuhi.

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.600	.332		-4.814	.000
X1	.342	.128	.239	2.677	.009
X2	.282	.107	.216	2.630	.010
Z	.763	.125	.507	6.120	.000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persamaan regresi berganda dapat dijelaskan bahwa $Y_1 = -1.600 + 0,342x_1 + 0,282x_2 + 0,763z$. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa koefisien x_1 (kepemimpinan transformasional) sebesar 0,342 artinya setiap satu unit nilai x_1 akan menambah nilai y_1 (kinerja perangkat desa) sebesar 0,342. Koefisien x_2 (komitmen organisasi) sebesar 0,282 artinya setiap satu unit nilai x_2 akan menambah y_1 sebesar 0,282. Koefisien z (*organizational citizenship behavior*) sebesar 0,763 artinya setiap satu unit nilai z akan menambah y_1 sebesar 0,763. Sedangkan konstanta sebesar -1.600 menunjukkan jika x_1 , x_2 dan $z = 0$ maka $y_1 = -1.600$.

Pada hasil uji t menunjukkan bahwa nilai *coefficients sig value* x_1 (kepemimpinan transformasional) sebesar 0,009, x_2 (komitmen organisasi) sebesar 0,010 dan z (*organizational citizenship behavior*) sebesar 0,000 besaran nilai setiap variabel tersebut lebih kecil dari *p value* atau tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 sehingga secara parsial variabel kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi dan *organizational citizenship behavior* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perangkat desa.

Pada hasil uji f (simultan) menunjukkan nilai *sig* sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 dengan total penyimpangan sebesar 12.800 yang dapat dilihat dari *sum of squares*. Artinya variabel x_1 (kepemimpinan transformasional), x_2 (komitmen organisasi) dan z (*organizational citizenship behavior*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Nilai *R Square* 0,758 sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 75,8% sedangkan sisanya sebesar 24,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 2 *Moderated Regression Analysis* X₁ (Kepemimpinan Transformasional) Terhadap Y₁ (Kinerja Perangkat Desa) Dengan Modeasi Z (*Organizational Citizenship Behavior*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.371	4.030		1.829	.071
X1	-1.787	1.043	-1.249	-1.713	.090
Z	-1.460	1.059	-.971	-1.378	.172
MODERASI1	.597	.271	2.920	2.204	.030

b. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data diolah tahun 2019

Hasil uji *moderated regression analysis* x₁ (kepemimpinan transformasional) terhadap y₁ (kinerja perangkat desa) dengan modeasi z (*organizational citizenship behavior*) menunjukkan bahwa nilai sig 0,030 lebih kecil dari 0,05 sehingga *organizational citizenship behavior* memoderasi kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perangkat desa.

Tabel 3 *Moderated Regression Analysis* Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dengan Modeasi *Organizational Citizenship Behavior*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.006	3.675		1.634	.106
X2	-1.469	.935	-1.124	-1.570	.120
Z	-1.049	.980	-.697	-1.070	.288
MODERASI2	.500	.247	2.514	2.025	.046

c. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data diolah tahun 2019

Sedangkan pada hasil uji *moderated regression analysis* x₂ (komitmen organisasi) terhadap y₁ (kinerja perangkat desa) dengan modeasi z (*organizational citizenship behavior*) menunjukkan bahwa nilai sig 0,046 lebih kecil dari 0,05 sehingga *organizational citizenship behavior* memoderasi komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat desa.

Variabel *organizational citizenship behavior* dinyatakan sebagai *quasi moderator*, hal ini ditunjukkan bahwa nilai sig pada model regresi sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel moderasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel moderasi tidak hanya mampu memoderasi pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi akan tetapi variabel moderasi *organizational citizenship behavior* mampu menjadi variabel independen.

Tabel 4 Pengaruh Kinerja Perangkat Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.893	.414		6.993	.000
Y1	.193	.111	.187	1.740	.086

a. Dependent Variable: Y2

Sumber: Data diolah tahun 2019

Variabel kinerja perangkat desa tidak mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, hal ini ditunjukkan dari nilai *sig* 0,086 lebih besar dari 0,05. Hal ini terjadi karena budaya di setiap desa Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam penerapan konsep partisipasi masyarakat tanpa memandang kinerja perangkat desa, artinya masyarakat desa mempunyai kesadaran untuk terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan desa karena diyakini akan berdampak pada kemajuan desa dimana masyarakat tersebut tinggal.

Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perangkat desa

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif baik secara parsial maupun simultan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perangkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Eka & Ismiyati (2015); Srimiatun (2018); Maharani *et al* (2013) menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perangkat desa. Kepemimpinan transformasional merupakan kondisi dimana pemimpin mampu memberikan motivasi kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan dan bukan untuk kepentingan pribadi (Yulianti & Wuryanti 2015). Hughes *et al* (2012: 542) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki visi, keahlian retorika, dan pengelolaan kesan yang baik dan menggunakannya untuk mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya, sehingga mendorong tergugahnya emosi pengikut serta kesediaan mereka untuk bekerja mewujudkan visi sang pemimpin.

Kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh masing-masing kepala desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara langsung akan meningkatkan kinerja perangkat desa. Peningkatan kualitas kinerja perangkat desa dapat ditentukan dari seberapa efektif peran kepemimpinan transformasional yang dilakukan oleh kepala desa. Hal ini mencerminkan bahwa salah satu penentu keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sangat ditentukan oleh kepala desa, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mencapai kinerja perangkat desa yang berkualitas dapat dilaksanakan melalui pemaksimalan kepemimpinan transformasional dari kepala desa.

Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat desa

Hasil analisis data menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perangkat desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi (Kosasih 2018). komitmen organisasi sangat dibutuhkan dan berdampak pada kinerja suatu lembaga (Sujana 2012). Komitmen organisasi menunjukkan adanya kemampuan dan kepedulian yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi (Lakshmi 2010). Komitmen organisasi merupakan ukuran sejauh mana karyawan memihak dan berupaya mempertahankan suatu organisasi (Lubis 2010: 54). Kreitner & Kinicki (2014:165) komitmen organisasi merupakan tingkatan dimana seseorang mampu mengenal

organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya. Seseorang yang mempunyai komitmen tinggi akan menganggap dirinya sebagai karyawan sejati dalam suatu organisasi, begitu pula sebaliknya jika seseorang kurang berkomitmen akan menganggap dirinya sebagai orang luar dalam organisasi (Moorhead & Griffin 2013:73).

Peran komitmen organisasi dalam suatu pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Perangkat desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan yang mempunyai komitmen tinggi dengan menunjukkan rasa memiliki pada organisasi akan melaksanakan kinerja yang berkualitas. Dengan demikian, komitmen organisasi karyawan mampu menciptakan kinerja perangkat desa yang berkualitas. Perangkat desa yang mampu mempertahankan komitmennya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab akan mampu menciptakan iklim kerja yang baik. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja perangkat desa dapat diwujudkan melalui peningkatan komitmen organisasi oleh perangkat desa tersebut.

***Organizational citizenship behavior* memoderasi pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat desa**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa *organizational citizenship behavior* memoderasi pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi. *Organizational citizenship behavior* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perangkat desa (Nurnaningsih & Wahyono 2017). Kinerja berpengaruh terhadap tingkat partisipatif masyarakat (Nur *et al* 2018). Dengan demikian dapat jelaskan bahwa peningkatan kinerja perangkat desa dapat dilakukan melalui gaya kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi dan *organizational citizenship behavior* yang tinggi pada perangkat desa, sedangkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas kinerja perangkat desa. Perilaku karyawan yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab diluar perannya merupakan *Organizational Citizenship Behavior (OCB)* (Nurnaningsih & Wahyono 2017). OCB merupakan perilaku yang dilakukan karyawan tidak hanya sebatas peraturan organisasi melainkan perilaku *ekstra-role* atau perilaku yang muncul atas dasar kesadaran dalam melakukan kinerja yang lebih (Mayasari *et al* 2010).

Organizational citizenship behavior atau perilaku kinerja yang lebih dari tanggung jawab menjadi faktor penentu dalam menentukan kinerja karyawan. Dalam hal ini, kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi yang di imbangi dengan *organizational citizenship behavior* akan lebih meningkatkan kinerja perangkat desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Perangkat desa yang mempunyai perilaku *ekstea-role* atau perilaku yang muncul atas kesadaran perangkat desa akan berdampak pada peningkatan kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi untuk mewujudkan kualitas kinerja perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya peningkatan kinerja perangkat desa yang lebih baik lagi dapat dilakukan melalui perilaku *organizational citizenship behavior* pada perangkat desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Dengan demikian menunjukkan bahwa perilaku karyawan yang *ekstra-role* dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab harus ditingkatkan untuk mencapai kinerja perangkat desa yang lebih baik.

Pengaruh kinerja perangkat desa terhadap partisipasi masyarakat

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja perangkat desa tidak mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, Konsep partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok dalam penyatuan kepentingan bersama untuk pengembangan tenaga dan sumber daya kepada institusi atau sistem yang mengatur dalam pencapaian tujuan kehidupan (Sobri *et al* 2018). Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, tanpa adanya partisipasi

masyarakat pembangunan desa akan mengalami kegagalan (Julianto & Dewi 2019). Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kinerja pemerintah desa dan partisipasi masyarakat harus berjalan beriringan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

Peran kinerja perangkat desa bukan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap kondisi desa dan kemajuan desa dilakukan tanpa memandang seberapa baiknya kinerja perangkat desa. Masyarakat menyadari bahwa kemajuan dan perkembangan desa menjadi tanggungjawab bersama tanpa memandang kinerja perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kinerja karyawan tidak mempunyai dampak pada tingkat partisipasi masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat desa baik dalam pelaksanaan pemerintahan desa sudah muncul secara alami dan menjadi budaya bagi masyarakat. Selain itu kepedulian, rasa memiliki, budaya kekeluargaan dan gotong-royong terhadap desa pada masyarakat yang sangat tinggi untuk mewujudkan kemajuan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) adanya pengaruh signifikan dan positif secara parsial maupun simultan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perangkat desa, 2) adanya pengaruh signifikan dan positif secara parsial maupun simultan komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat desa, 3) *organizational citizenship behavior* memoderasi pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat desa, 4) kinerja perangkat desa tidak mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam kelangsungan penelitian ini di antaranya adalah jajaran kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Serta Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Terimakasih juga kepada tim pelaksana penelitian yang telah berkontribusi berupa biaya, tenaga dan pikiran sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni & Wulansari N.R 2015, Pengaruh Keadilan Organisasional pada Komitmen Organisasional dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening, *Management Anaysis Journal*, 4(4): 310-317
- Aprilia S.H, Kencana N & Febriyanti D 2017, Peran Kepala Desa Untuk Meujudkan Swadaya Masyarakat Dilihat Dari Pembangunan Infra Struktur Desa Studi Pada Kasus Di Desa Cinta Damai Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*. 2(1): 31-36.
- Astono, Juni Dwi 2013, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, *Jurnal sains 00Manajemen UNPAR*, 2(2): 36-49.
- Bangun, Wilson 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga, Jakarta, 234 p.

- Bakan, İsmail; Tuba, Buyukbese, & Burcu Erşahan 2011, An Investigation of Organizational Commitment and Education Level among Employees, *International Journal of Emerging Sciences*, 1(3): 231-245
- Eka S.N & Ismiyati 2015, Pengaruh Kepemimpinan, Fasilitas Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, *Economic Education Analysis Journal*, 4(2): 562-574
- Helmayani, P.L, Sulindawati N.L.G.E & Dewi P.E.D.M 2017, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawaratan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Pada Desa Di Kabupaten Buleleng), *e-Journal SIAk Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), diakses pada 28 Juni 2019, (<https://scholar.google.co.id/>).
- Hughes, R.L., Ginnett, R.C., & Curphy, G.J 2012, *Leadership: Memperkaya Pelajaran dari Pengalaman*, Edisi Ketujuh, Salemba Humanika, Jakarta, 524 p.
- Julianto, I Putu & Dewi, Gusti A.K.R.S 2019, Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1): 24-42.
- Kosasih. Niki 2018, Pengaruh Perilaku Pemimpin dan Komitmen Karyawan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Puskesmas Desa Aro Kecamatan Muara Bulian, *Journal of Economics and Business*, 3(1): 27-35.
- Kreitner. R & A. Kinicki 2014, *Perilaku Organisasi*, Edisi 9, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 165 p.
- Lakshmi M.S, Srinivas K & Krishna, K.V.R 2010, Employee Engagement for Talent Retention with Reference to The Academicians, *Review of Bussines Research*, 10(3): 137-142.
- Lubis, Arfan Ikhsan 2010, *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta, 54 p.
- Maharani V, Troena E.A & Noermijati 2013, Organizational Citizenship Behavior Role in Mediating the Effect of Transformational Leadership, Job Satisfaction on Employee Performance: Studies in PT Bank Syariah Mandiri Malang East Java. *International Journal of Business and Management*, 8(17): 1-12.
- Mayasari D, Syahlani SP & Ahmadi 2010, 2010. Peran Penambahan Gaya Kepemimpinan Transformasional pada Gaya Kepemimpinan Transaksional dalam Memprediksi Kinerja Organizational Citizenship Behavior, dan Sikap Bawahan terhadap Atasan Studi Empiris pada Perusahaan Peternakan, *Jurnal Manajemen bisnis*, 14(1): 63-77
- Moorhead G & Ricky W Griffin 2013, *Perilaku Organisasi : Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 73 p.
- Nur M.Z, Holilullah & Nurmalisa Y 2018, Pengaruh Kinerja Kpmd Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pnpm Mandiri Perdesaan, diakses pada 28 Juni 2019, (<https://scholar.google.co.id/>).
- Nurnaningsih S & Wahyono 2017, Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Melalui Organizational Citizenship Behavior (OCB) Sebagai Variabel Intervening, *Economic Education Analysis Journal*, 6(2): 365-378.

- Organ, D. W 1988, *Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome*, dalam, Titisari. Purnamie 2014, *Peranan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 5 p.
- Rivai.V & Sagala E.J 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : Dari Teori ke Praktik*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 548 p.
- Robbins, Stephen P & Timothy, A. Judge. 2015, *Perilaku Organisasi* : Edisi 16. Terjemahan Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, Salemba Empat, Jakarta, 19 p.
- Sedarmayanti 2013, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 120 p.
- Setiyarti M & Mulyanto 2013, Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, STIE AUB Surakarta, 13(1): 49-57.
- Silalahi. Ulber 2013, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 408 p.
- Sobri M, Thamrin M.H & Prabujaya S.P 2018, Model Pembangunan Desa Mandiri Berdasarkan Kinerja Pendamping Desa Dan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, *International Conference on Education and Regional Development 2018 (ICERD 3rd 2018)*, diakses pada 28 Juni 2019, (<https://scholar.google.co.id/>).
- Srimiatun 2018, Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, *Journal Politeknik Negeri Madiun*, 2(1): 38-43
- Sujana, Edy 2012, Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung Dan Buleleng), *Jurnal Ilmiah Dan Akuntansi*, 2(1): 1-27.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 29 p.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wirawan 2013, *Kepemimpinan. Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, Edisi 1, Cetakan 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 713 p.
- Yulianti & Wuryanti 2015, Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Integritas P Erilaku Dan Kepercayaan Terhadap Pimpinan Dalam Peningkatan kinerja Sdm (Studi blhkp, Bkppd Dan Bpmp Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara), *2nd Conference In Business, Accounting, And Management*, 2(1): 283-300.

IMPLEMENTASI DANA DESA GUNA MEMPERKUAT KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS TO STRENGTHEN THE QUALITY OF PUBLIC EDUCATION AND HEALTH IN LAMONGAN DISTRICT, EAST JAVA

Eko Sutrisno

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan Prov. Jawa Timur
Jl. Raya Glagah No.80, Glagah, Lamongan, Jawa Timur 62292
e-mail: ekosudrun@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan dan ketrampilan masyarakat merupakan tanggungjawab Desa. Segala biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan amanat tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat melalui program Dana Desa yang setiap tahun dananya selalu meningkat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dibidang kesehatan dan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa. Peraturan Bupati Lamongan No 21 Tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah dana desa yang disalurkan ke 462 desa sebesar Rp. 321.349.755.000,-. Pemanfaatan dana desa oleh masyarakat secara umum dikategorikan menjadi dua yaitu fisik dan non fisik. Bidang pendidikan secara non fisik menyerap dana 1,89% dan secara fisik 3,73%. Bidang kesehatan secara non fisik menyerap anggaran sebesar 3,13% sedangkan secara fisik sebesar 1,65%. Penggunaan anggaran dana desa dibidang kesehatan dan pendidikan sebesar 10,40%, hal ini membuktikan bahwa masyarakat desa menyadari tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Kata Kunci: Dana Desa, Kualitas, Kesehatan, Pendidikan

ABSTRACT

The Republic of Indonesia's constitution number 6 of 2014 mandates that, improving the quality of life and the skills of the community is the responsibility of the village. All funding needed to carry out the mandate is given by the central government through the Village Fund program which every year always increases. The research objective was to find out the utilization of village funds in the field of health and education in the Lamongan Regency area in 2018. The study was conducted with a qualitative descriptive approach, data collections was carried out by field observations, interviews and documentation of development activities using village funds. The Lamongan District Regulation No. 21 of 2018 states that the amount of village funds distributed to 462 villages is Rp. 321,349,755,000. The use of village funds by the community in general is categorized into two categories, namely physical and non-physical. The non-physical education sector consumes 1,89%, and physically spends 3.73%. The non-physical health sector consumes 3,13% while physically it consumes 1,62%. The use of village funds in the health and education sector amounted to 10.40%, this proves that the village community is very aware of the importance of health and education.

Keywords: Village Funds, Quality, Health, Education

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan pengakuan pemerintah tentang keberadaan desa selanjutnya diperkuat dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah mengeluarkan peraturan No. 60 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat prioritas seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Menteri keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 247 Tahun 2015 tentang prioritas, pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa. Mendagri mengeluarkan permendagri No. 114 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahun 2018 merupakan tahun ke empat bergulirnya dana desa. Kabupaten Lamongan melalui Peraturan Bupati Lamongan No 21 Tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah dana desa yang disalurkan ke 462 desa sebesar Rp. 321.349.755.000,-. Kegiatan pembangunan desa selain untuk infrastruktur juga dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan. Jamaluddin, *dkk* (2018) menyatakan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa belum memberikan dampak secara signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah. Masyarakat desa banyak yang sudah merasakan manfaat dari dana desa tetapi belum meningkatkan pendapatannya (Isti, *dkk*, 2017).

Penggunaan dana desa lebih difokuskan pembangunan infrastruktur prasarana kawasan pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Banurea dan Mahmuddin, 2018). Salah satu kewajiban pembangunan di tingkat desa adalah pelayanan Dasar Desa yang meliputi pelayanan pendidikan anak usia dini dan kesehatan (Dakelan, *dkk.*, 2016). Dana desa dapat digunakan untuk membayar insentif guru PAUD, untuk membangun dan menyelenggarakan kesehatan di tingkat desa (Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa untuk memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

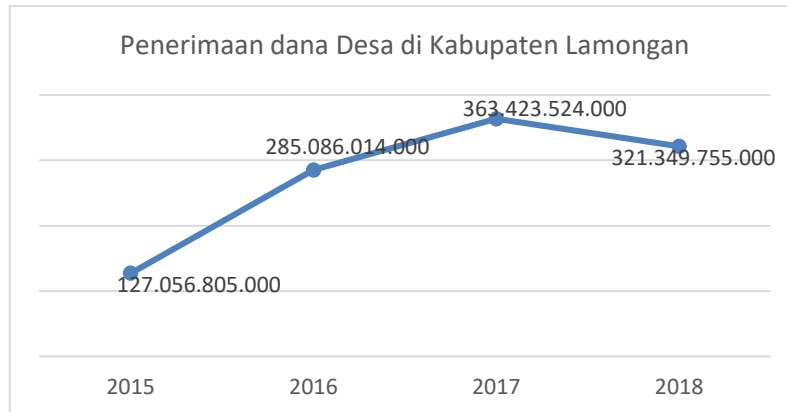
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang terdiri dari 462 desa yang telah menerima dan memanfaatkan Dana desa untuk kegiatan membangun desa. Desain penelitian menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan sekunder untuk diolah dan dianalisis secara matematis. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana desa dan pemanfaatannya. Data dianalisa melalui beberapa tahapan yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

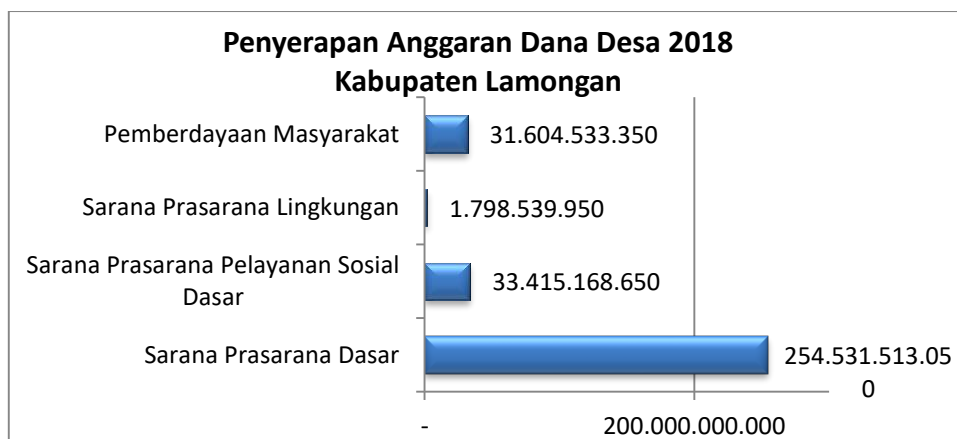
Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Jawa Timur

Dana Desa yang diterima Kabupaten Lamongan dari tahun 2015 hingga 2018 sebagaimana tabel berikut:



Gambar 1. Jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten Lamongan dari tahun 2015-2018

Berdasarkan pada gambar 1, diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2017, jumlah dana desa yang diterima Kabupaten Lamongan semakin naik, tetapi pada tahun 2018, jumlah penerimaan dana desa mengalami penurunan sebesar 13% dari tahun 2017. Salah satu bidang kegiatan yang memanfaatkan anggaran Dana Desa yaitu bidang Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar sebesar 10,40 % dari total dana desa yang diterima Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 sebagaimana grafik berikut:

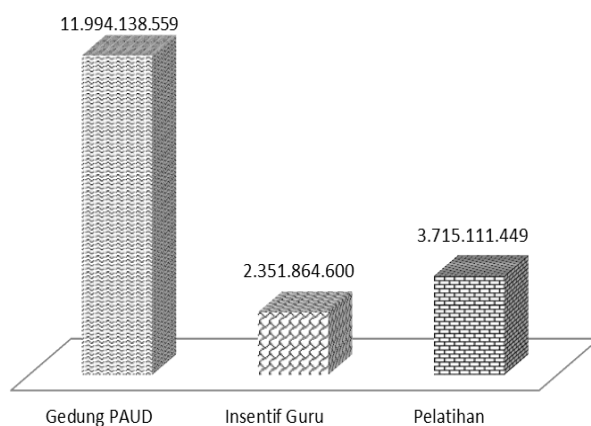


Gambar 2. Penyerapan Dana Desa di Kabupaten Lamongan tahun 2018

Kegiatan pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial dasar di Kabupaten Lamongan difokuskan pada bidang kesehatan dan Pendidikan. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu indikator sosial ekonomi (Yuliati dan Pirnomop, 2003). Bidang kesehatan menyerap anggaran sebesar Rp. 15.354.054.100,- dan bidang Pendidikan sebesar Rp. 18.061.114.550,-. Pemanfaatan dana desa di bidang Pendidikan dapat dilihat pada gambar 3. Pendidikan merupakan sarana guna meningkatkan pembangunan nasional, karena suatu pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam segala bidang. Saat ini biaya Pendidikan mahal, tidak semua masyarakat yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Anggaran pendidikan dimanfaatkan oleh pemerintah desa digunakan untuk membangun Gedung PAUD/TK.

Dengan adanya pembangunan Gedung PAUD/TK, antusias masyarakat untuk mengikut sertakan anaknya dalam kegiatan PAUD HI sangat tinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari antusiasme masyarakat di tiap desa, apabila jadwalnya kegiatan PAUD HI selalu ramai dengan

anak-anak balita dengan diantar oleh ibunya. Antusiasme masyarakat desa semakin bertambah ketika ada kegiatan penambahan makanan tambahan (PMT) bagi balita yang dianggarkan dari dana desa.



Gambar 3. Penyerapan Dana Desa bidang Pendidikan

Tenaga pengajar di PAUD HI juga bukan tenaga pengajar profesional, tetapi kader posyandu atau perwakilan masyarakat yang peduli terhadap Pendidikan usia dini. Hal tersebut karena tenaga pengajar di PAUD HI mendapatkan insentif yang sangat kecil, tetapi semangat para pengajar tersebut patut untuk diapresiasi.



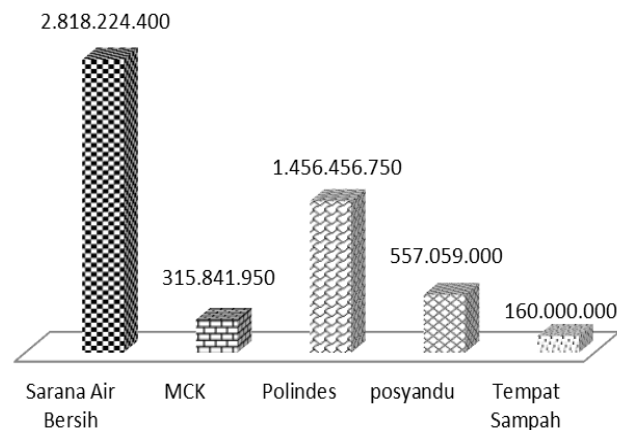
Gambar 4.

Proses Peresmian

gedung PAUD di Kecamatan Kembangbahu Lamongan (doc. <https://radarbangsa.co.id>)

Berdasar pada keadaan tersebut, maka sebagian besar pemerintah desa menganggarkan kegiatan pelatihan untuk kader pengajar di PAUD HI dari dana desa. Pelaksanaan pelatihan untuk tenaga pengajar dengan cara mengundang tenaga ahli dari kabupaten yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan dan pengajaran anak usia dini. Proses pelatihan dilakukan secara Bersama-sama dengan desa yang merencanakan kegiatan tersebut dan tertuang dalam APBDes tahun 2018.

Hal tersebut dilakukan guna menghemat biaya, karena honor pelatih dilakukan secara iuran oleh beberapa desa. Tenaga pengajar juga senang karena mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang metode yang baik dalam proses pengajaran anak usia dini. Guna memperbaharui pengetahuan dan cara pengajaran (kompetensi), guru PAUD mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kapasitas dengan menggunakan anggaran dana desa (Rochayadi, 2014).



Pemanfaatan dana desa di bidang kesehatan seperti pada gambar 5 dan 6. Berdasar pada gambar 4, pembangunan sarana air bersih menjadi urutan pertama, hal ini karena air bersih merupakan kebutuhan yang dominan dalam rumah tangga. Kabupaten lamongan dikenal dengan slogan “*rendeng gak iso ndodok, tigo gak iso cewok*” artinya, kalau musim penghujan banyak wilayah di kabupaten lamongan yang terendam banjir sehingga untuk duduk aja kesulitan, tetapi saat musim kering atau kemarau, mencari air untuk membersihkan diri saat buang air besar sangat susah. Bantuan PAMSIMAS dari pemerintah kabupaten lamongan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi stimulus bagi warga desa untuk membuat saluran air bersih. Bantuan pamsiman memiliki skema pendanaan yang baik, yaitu 10% dana di tanggung oleh masyarakat desa, 30% pemerintah desa dan 60% pemerintah kabupaten lamongan.

Layaknya masyarakat desa pada umumnya, kegiatan buang air besar dilakukan di sembarang tempat, bias di sungai, sawah, tegal atau sawah. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Lamongan membuat Gerakan lamongan bebas dari buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2018. Berkaitan dengan instruksi tersebut, pemerintah desa melalui kader posyandu melakukan pendataan kepada masyarakat yang belum memiliki jamban. Pembuatan 329 jamban dianggarkan dari dana desa tahun 2018 sebesar Rp. 315.841.950,-





Gambar 7. Proses pembangunan sarana air bersih dan MCK

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang di wujudkan dalam bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Bentuk UKBM yang mudah diketahui adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin desa) dan Desa Siaga (Arisanti dan Sunjaya, 2015). Keberadaan posyandu dan polindes di desa dinilai sangat membantu masyarakat desa. Berdasar data dari Riskedas (2018) proses persalinan di polindes hanya 4 % sedangkan pada bidang praktek mandiri 29%. Rendahnya pemanfaatan tersebut, karena fasilitas dan tenaga medis (Sugiharti & Lestary, 2011) tidak tinggal di desa atau polindes (Sunarto, 2005) dan tidak semua desa memiliki gedung polindes yang memadai (Paramita & Pranata, 2013). Maka pada tahun 2018, 25 desa menganggarkan pembangunan polindes dan posyandu yang menyerap anggaran Rp. 2.013.515.750,-.

Dana desa juga digunakan untuk membayar honorarium dari kader posyandu. Para kader tersebut menerima disini honor kader Posyandu Rp. 50.000 per bulan per orang. Rendahnya minat para pemerintah desa di lamongan untuk membangun posyandu atau polindes karena adanya pemikiran bahwa pembangunan gedung posyandu atau polindes merupakan tanggung jawab dinas kesehatan lamongan, bukan pihak desa. Tidak adanya usulan pembangunan polindes pada saat pembuatan RKPDes dan Musyawarah Desa tahun 2017, maka pembangunan polindes tidak dianggarkan di tahun 2018. Jumlah Posyandu di Kabupaten Lamongan sebanyak 1.744 Posyandu dan yang Aktif sebanyak 1.412 Posyandu (80,96%) dengan Rasio Posyandu sebesar 2 Posyandu per 100 balita (Dinkes, 2017). Di beberapa desa tidak memiliki lahan milik desa guna membangun bangunan polindes, sehingga kegiatan posyandu, PMT lansia berada di desa, apabila ada warga yang sakit, bidan desa membawa ke ruang kerjanya sekaligus ruang prakteknya

Beberapa desa menggunakan dana desa guna membangun TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) karena warga desa masih suka membuang sampah sembarangan. Warga desa masih banyak yang berpikir bahwa sampah itu harus di buang dan dibakar (Mulasari, 2012). Kegiatan lainnya yaitu operasional mobil sehat, belum semua desa memiliki mobil sehat, hingga tahun 2018 sebanyak 182 desa yang mengoperasikan mobil sehat dari bantuan Dinkes Kabupaten Lamongan. Penyelenggaraan kegiatan operasional mobil sehat meliputi honorarium sopir, BBM dan biaya servis rutin kendaraan serta pembelian ban yang sudah aus.

Anggaran terbesar dana desa digunakan untuk pemberian makanan tambahan pada lansia dan balita yaitu sebesar Rp. 5.805.000.000,-. Pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) pada Balita biasanya dilaksanakan di balai desa dengan kegiatan sudah terjadwal. Yang menjadi sasaran adalah para balita yang kurang mendapatkan asupan gizi yang cukup. Makanan

yang diberikan dapat berupa makanan buatan pabrik atau makanan lokal. PMT pabrikan biasanya dalam bentuk biskuit yang mengandung 10 vitamin dan 7 mineral. Sedangkan PMT berbahan lokal biasanya seperti bubur kacang hijau, kudapan atau variasi dari berbagai olahan hasil kreatifitas tim kader posyandu bersama bidan setempat.



Gambar 8. Biscuit yang berikan saat kegiatan PMT di desa (doc. google.com)

Kegiatan penambahan makanan bagi lansia bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Kegiatan tersebut biasanya disertai dengan melakukan cek kesehatan, penyuluhan, senam lansia, pemberian makanan tambahan atau gizi. Berdasarkan aturan yang berlaku, yang mendapat fasilitas makanan tambahan adalah lansia yang usianya diatas 60 tahun. Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak lansia yang usianya belum 60 tahun, apabila tidak diberi makanan tambahan maka akan marah kepada kader posyandu dan perangkat desa.



Gambar 9. Kegiatan PMT lansia oleh kader posyandu dan bidan desa

Kegiatan yang baik menurut Tjokrowinoto (1994) memiliki 6 ciri, yaitu 1) Tujuan jelas, 2) Peralatan guna mencapai tujuan, 3) kebijakan yang konsisten, 4) kesimbangan antara biaya dan manfaat, 5) Hubungan dengan kegiatan lainnya dan 6) manajemen yang baik. Penentuan jenis kegiatan di lingkungan desa dilakukan secara berjenjang melalui kegiatan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan Musyawarah Desa. Kriteria kegiatan meliputi manfaat, sumber daya dan keberlanjutan program kegiatan. Kegiatan juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat di bidang kesehatan dan pendidikan (sarana dan parasarana layanan sosial dasar).

Guna melengkapi kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar sosial di Kabupaten Lamongan, pemerintah desa menggunakan anggaran dari Dana Desa. Dana desa yang diterima

kabupaten Lamongan tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 11,58%. Kegiatan Sarana Prasarana Pelayanan Sosial Dasar bidang Kesehatan menyerap anggaran sebesar Rp. 15.354.054.100,- dan bidang pendidikan Rp. 18.061.114.550,-. Jadi 95,22% dana desa di kabupaten lamongan dimanfaatkan untuk pembangunan non pendidikan dan non kesehatan. Pemerintah desa selaku pemegang kebijakan sekaligus pengguna anggaran Dana Desa lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan tataruang dan pemukiman seperti Rabat beton jalan desa atau jalan pemukiman, jembatan, saluran air/irigasi, tembok penahan tanah, Penerangan Jalan Umum dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Kegiatan pendidikan yang menggunakan anggaran Dana desa tahun 2018 sebesar Rp. 18.061.114.550,- (5,62%) sedangkan bidang kesehatan menyerap dana Rp. 15.354.054.100,- (4,78%) hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah desa sudah menyadari tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi warga desanya meskipun persentasinya masih sangat kecil yaitu 4,78%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman PLD, PD/PDTI dan TA P3MD, khususnya satker P3MD Kecamatan Glagah yang telah memberi dukungan terhadap kelancaran penelitian ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Dosen di Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, N dan Sunjaya, Deni K. 2015. Gambaran Pemanfaatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Kecamatan Jatinangor. *JSK*. 1 (1) 7- 11
- Bafadal, I. 1999. *Administrasi dan Supervisi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*. Dirjen Dikti : Depdikbud.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. 2017. *Profil Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2017*.
- Mulasari, S. A. 2012. Hubungan tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah Di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas*, 6 (3) :204-211
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kementerian Keuangan RI. 2017. *Buku Saku Dana Desa. Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Hasil Utama Riskesdas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kodoatie. 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Paramita, A. dan S. prananta. 2013. Analisis Faktor Pemanfaatan Polindes Menurut Konsep Model Perilaku Kesehatan "Anderson" (Analisis Lanjut Data Riskesdas 2007). *Buletin Penelitian Kesehatan*. 41 (3): 179 - 194
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian dan adesa setiap desa se-kabupaten lamongan.
- Rochyadi, I. 2014. Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Paud Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Guru Di PAUD Bougenville Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *Jurnal Empowerment*. Vol. 4 (1) Hal: 1 - 10
- Sunarto. 2005. Pemanfaatan Polindes Ngudi Waras Dalam pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran kabupaten Sragen Februari 2005, Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sugiharti dan H. Lestary. 2011. Faktor-faktor yang memengaruhi Pemanfaatan Posyandu/Polindes Pada Ibu Hamil Di Indonesia. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, Vol. 10 (2). Hal: 65–71.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang keberadaan desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Yuliati, Y. dan M. Pirnomop. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang. Pustaka Utama.



PENINGKATAN KUALITAS SDM PEDESAAN MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI

RM. Moch. Wispandono¹⁾, Eny Sri Rahayu N²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis – Universitas Trunojoyo Madura
Jln. Raya Telang 1, Kamal – Bangkalan (Kode Pos: 69162)

²⁾ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis – Universitas Trunojoyo Madura
Jln. Raya Telang 1, Kamal – Bangkalan (Kode Pos: 69162)

E-mail: wispandono@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) dimaksudkan untuk melatih pencari kerja/calon entrepreneur sesuai dengan bidang minat dan kemampuannya agar lebih berkompeten dan menguasai bidang pekerjaannya secara maksimal. Maksud ini akan tercapai kalau disertai dengan adanya penguatan kelembagaan pelatihan kerja yang menjamin kontinuitas dan kualitas pelatihan kerja. Dalam penguatan kelembagaan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Bangkalan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia pedesaan yang menjadi kajian dalam penelitian ini perlu dikemukakan terlebih dulu permasalahan yang muncul, yang di antaranya menyangkut bagaimanakah penguatan kelembagaan pelatihan kerja bisa diwujudkan sehingga tujuan untuk bisa meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan yang diberikan oleh lembaga bisa tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan sample dilakukan secara *purposive* di BLK Bangkalan dengan menggunakan *snowball* untuk penentuan informan. Berdasarkan hasil studi didapatkan temuan bahwa untuk mewujudkan penguatan kelembagaan berbasis kompetensi, sebuah lembaga pelatihan kerja perlu memenuhi beberapa aspek. Beberapa aspek yang dimaksud adalah: kompetensi kerja, kurikulum, materi pelatihan, manajemen atau tata kelola lembaga pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, administrasi keuangan, dan asesmen. Kedelapan aspek inilah yang menjadikan sebuah lembaga pelatihan kerja kuat dan kredibel di mata masyarakat khususnya di lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagai institusi yang bertugas dan berwenang dalam melakukan penilaian kompetensi lembaga pelatihan kerja.

Kata kunci: Penguatan kelembagaan, kompetensi, pelatihan, lembaga pelatihan kerja.

ABSTRACT

The establishment of the Vocational Training Center (BLK) is intended to train job seekers / prospective entrepreneurs in accordance with their areas of interest and ability to be more competent and master their fields of work to the fullest. This intention will be achieved if accompanied by the strengthening of job training institutions that ensure continuity and quality of work training. In strengthening competency-based work training institutions in Bangkalan that are directed at improving the quality of human resources, especially rural human resources which are the study in this study, it is necessary to put forward the problems that arise, which include how the strengthening of work training institutions can be realized so that the objectives to be able to improve the quality of human resources through training provided by the institution can be achieved. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive design. The sampling technique was done purposively in Bangkalan BLK using snowball for informant determination. Based on the results of the study it was found that in order to realize competency-based institutional strengthening, a job training institution needs to fulfill several aspects. Some of the aspects in question are: work competency, curriculum, training material, management or governance of job training institutions, instructors and training personnel, facilities and infrastructure, financial administration, and assessment. These eight aspects make a job training institution strong and credible in the eyes of the public, especially in accreditation institutions for job training institutions as institutions that are tasked with and authorized to conduct competency assessments of a job training institution.

Keywords: Strengthening institutions, competencies, training, job training institutions

PENDAHULUAN

Salah satu pendorong peningkatan arus perdagangan barang, jasa, dan manusia di era globalisasi saat ini adalah semakin longgarnya regulasi yang dibuat pemerintah yang mengatur perdagangan tersebut. Peningkatan arus perdagangan ini merupakan sasaran dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintahan negara-negara yang tergabung dalam forum kerja sama ekonomi baik di tingkat regional kawasan Asia (AFTA) yang sejak 2015 memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maupun kerja sama ekonomi dan perdagangan di tingkat internasional (APEC). Di sisi lain, peningkatan arus perdagangan ini menjadi permasalahan sekaligus tantangan tersendiri yang harus dihadapi bersama oleh bangsa Indonesia. Contoh: peningkatan arus kedatangan tenaga kerja asing yang saat ini terjadi di Indonesia di berbagai lapangan pekerjaan. Mereka bekerja di sektor pertanian, pertambangan, transportasi, dan sebagainya dengan posisi pekerjaan mulai dari level bawah sampai pada level yang tinggi. Mereka migrasi karena ada daya tarik dan daya dorong lapangan pekerjaan di Indonesia yang menurut mereka bisa menjanjikan.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan persaingan yang semakin tajam untuk bisa meraih pekerjaan bagi para pencari kerja Indonesia. Mereka harus memiliki kemampuan daya saing yang tinggi untuk bisa memperebutkan “kue” lapangan pekerjaan. Mereka harus berjuang keras untuk membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan keahlian profesi yang memadai sesuai dengan yang dituntut oleh bidang pekerjaan tertentu (Wispondono *et al.* 2018). Perjuangan keras mereka tentu harus diimbangi oleh upaya-upaya pihak pemerintah dan lembaga swasta yang peduli dengan peningkatan daya saing pekerja Indonesia dengan menyediakan berbagai fasilitas yang bisa meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual mereka.

Lembaga pemerintahan dan atau swasta yang memfasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi pekerja diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau Menteri ketenagakerjaan RI, Hanif Dakhiri (2017) meminta semua pihak untuk bersinergi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja berkualitas dan berkompeten. Menurut Hanif, pesatnya perkembangan teknologi perlahan dapat menghilangkan beberapa pekerjaan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Ini menjadi tantangan baru bagi para tenaga kerja untuk dapat meningkatkan penguasaan kompetensi.

Penguasaan kompetensi ini dinilai masih belum banyak dilakukan para tenaga kerja. Dari total 130 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 60% diantaranya merupakan tenaga kerja berpendidikan SD dan SMP (Hanif, 2017). Jika di dunia kerja, jumlah tenaga kerja ini akan banyak masuk di sektor informal dan padat karya. Rendahnya kompetensi ini membuat para tenaga kerja tidak berdaya tergerus persaingan global. Kekhawatiran akan tergantikannya peran manusia oleh teknologi menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian.

Mengingat begitu pentingnya kompetensi dalam sudut pandang ketenagakerjaan maka dibutuhkan suatu gerakan nasional yang masif yang oleh Menaker diberi julukan Gerakan Nasional Peningkatan Kompetensi (GNPK).

"Peranan instruktur di balai-balai latihan Kerja harus diperkuat karena memiliki korelasi yang determinan di dalam rangka perwujudan GNPK sebagai pintu masuk dalam mewujudkan Indonesia kompeten," ujar Menaker dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Saat ini tidak hanya pemerintahan saja yang bisa memfasilitasi peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja migran. Banyak pihak swasta yang mendirikan lembaga pelatihan kerja yang bergerak dalam pelatihan peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja (migran). Lembaga ini memberikan peningkatan mutu serta pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap

serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan bagi calon pekerja migran. Pelatihan yang diselenggarakan bukan hanya untuk peningkatan kualitas tetapi juga persyaratan dalam aksesibilitas pekerja terhadap lapangan pekerjaan.

Sementara itu pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) oleh pemerintah dimaksudkan untuk melatih siswa sesuai dengan bidang minat dan kemampuannya agar lebih berkompeten dan menguasai bidang pekerjaannya secara maksimal. Pada dasarnya pembentukan BLK dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah bahwa peningkatan SDM merupakan salah satu kunci dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Dengan merujuk pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer and Spencer (1993), yaitu kemampuan melaksanakan pekerjaan atau tugas yang didasari ketrampilan maupun pengetahuan dan didukung oleh sikap kerja yang ditetapkan oleh pekerjaan maka pembentukan BLK seharusnya bisa meningkatkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (perilaku) kerja lulusan sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/industri. Tujuan ini terwujud kalau BLK bisa menjalankan fungsinya dengan baik yang didukung oleh sistem dan manajemen yang bisa menopang kebutuhan yang diprasyaratkan.

Kenyataannya kondisi lulusan BLK berdasarkan hasil pemetaan (*Mapping*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang diperkuat oleh temuan di lapangan (Wisbandono, 2017) menunjukkan bahwa pada umumnya kualitas lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (*demand driven*). Hal ini selain karena program pelatihan masih konvensional dan belum berpijak pada pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training/CBT*), sarana dan prasarana pelatihan kurang memadai dan tidak dipelihara dengan baik. Selain itu untuk menghasilkan SDM yang kompeten harus didukung oleh tersedianya sumber daya dan infrastruktur memadai dan terbaru, regulasi dan kelembagaan yang kuat, arah pembinaan dan kebijakan yang tepat serta komitmen dan koordinasi yang baik antar lintas instansi.

Di sisi lain, sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pasca reformasi memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sistem pembinaan lembaga pelatihan dari sentralisasi ke desentralisasi (UU No. 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pasca otonomi daerah banyak lembaga pelatihan yang dialihfungsikan menjadi di luar kegiatan pelatihan sehingga berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan.

Pemerintahan kabupaten yang ada di pulau Madura juga memiliki hak pengelolaan daerah secara otonomi termasuk dalam pengelolaan BLK. Akibat pengelolaan daerah secara otonomi tersebut menimbulkan dampak besar pada kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BLK yang sangat bervariasi sesuai dengan potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas pemerintah masing-masing daerah. Contoh: Pembentukan BLK di kabupaten Bangkalan yang diharapkan bisa membekali keterampilan bagi lulusannya sehingga bisa mandiri dalam menjalankan bisnis dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan ternyata kalau dilihat dari kegiatan ekonomi kreatif yang dikategorikan ke dalam lima industri kreatif hanya mampu menyerap 975 tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran BLK dalam menjalankan fungsinya mencetak lulusan yang memiliki kemampuan tidak hanya dari sisi kemampuan teknis semata (*Hard Skill*), tapi juga wawasan industri, etika dan motivasi atau yang biasa disebut dengan istilah *Softskill* yakni kemampuan *Interpersonal*. Belum terpenuhinya lulusan yang berkualitas dan kompeten dipersepsikan oleh pelaku dunia usaha dan industri sebagai lulusan yang belum cukup memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan. Terbatasnya Instruktur baik kuantitas maupun kualitas serta penyebarannya merupakan masalah mengemuka yang perlu dicarikan jalan keluarnya melalui penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan berbasis kompetensi menjadi penting karena selain bisa menjamin tersedianya instruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai juga dengan penguatan kelembagaan akan menghasilkan lulusan yang kompeten karena pelaksanaan pelatihan bagi siswa yang kontinyu dan berkesinambungan dengan instruktur, sarana prasarana, infrastruktur, program, dan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun sayangnya, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah instruktur di BLK secara nasional saat ini hanya 3.013 orang (Biro Kahumas, 2019). Sedangkan berdasarkan hasil kajian Kemnaker, kebutuhan instruktur sampai dengan tahun 2019 di seluruh balai latihan kerja (BLK) sekitar 7.200 orang. Padahal diketahui bahwa peran instruktur sangatlah strategis sebagai ujung tombak dalam menghasilkan SDM yang kompeten.

Kondisi di atas menunjukkan salah satu instrumen dalam penguatan kelembagaan BLK belum mendapatkan perhatian utama bagi pengambil kebijakan di pemerintahan pusat maupun daerah. Selain itu perlu ditelusuri pula instrumen lainnya dalam penguatan kelembagaan agar diperoleh luaran penguatan kelembagaan yang *credible*, *acceptable*, dan mandiri, melalui suatu perancangan penguatan kelembagaan. Atas dasar itulah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan dan mendayagunakan fungsi kelembagaan pelatihan kerja serta bagaimanakah penguatan kelembagaan pelatihan kerja bisa diwujudkan sehingga peningkatan kualitas SDM khususnya di pedesaan bisa ditingkatkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini karena disesuaikan dengan sasaran yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu memperoleh gambaran secara sistematis tentang informasi yang berupa fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah melakukan pemetaan permasalahan utama yang terjadi yaitu penguatan kelembagaan berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Penguatan kelembagaan penting dilakukan karena dirasakan selama ini belum maksimal dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Tahap kedua dengan mengumpulkan data dari Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya dari para informan. Penentuan secara *purposive* terhadap BLK Bangkalan ini karena pertimbangan karakteristik pekerja migran yang unik (seperti tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi – budaya, sikap/perilaku) dan mengirimkan warganya dalam jumlah banyak sebagai pekerja migran (internasional) sehingga mewakili karakteristik penduduk Madura. Selain itu ditinjau dari sisi legalitas dan kepemilikan, lembaga ini di bawah naungan pemerintah daerah sehingga bisa diharapkan terjadi kontinuitas dalam penyelenggaraan pelatihan.

Adapun waktu penelitian dimulai pada Februari 2019 hingga data yang diperlukan terkumpul. Pihak yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian yaitu orang yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga pemilihan informan dilakukan secara *snowball sampling technique* (Sugiyono, 2016). Melalui hasil wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen (seperti peraturan pemerintah, undang-undang, dan lainnya), data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara domain analysis. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi (Sugiyono, 2016).

Uji keabsahan data terkait dengan tingkat kebenaran data dan memperjelas data berdasarkan fakta yang ada di lapangan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2016:273) triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Analisis data dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu: (a). Reduksi Data; dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, (b) Penyajian Data; Penyajian data ini dilakukan setelah data direduksi, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya; (c). Verifikasi/Kesimpulan Data; kesimpulan yang ditarik merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Awal berdirinya Balai Latihan Kerja (BLK) berasal dari ide pembentukan Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) bidang industri pada tahun 1953. Pada tahun 1960 PPKPI diarahkan menjadi Pelatihan Pencari Kerja Pegawai Instansi agar menjadi tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Pada tahun 1970, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan dari PPKPI menjadi Balai Latihan Kerja dibawah pembinaan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan sejak otonomi daerah Balai Latihan Kerja (BLK) berubah menjadi Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) yang berada dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah di Indonesia.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan didirikan pada tahun 2012. Latar belakang pendirian UPTD BLK di lingkungan dinas tersebut adalah karena permasalahan klasik yang muncul dalam ketenagakerjaan di kabupaten Bangkalan yang hampir sama seperti di daerah lain di Indonesia yaitu para calon pelamar/pencari kerja yang kebanyakan berasal dari pedesaan di kabupaten Bangkalan banyak yang tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai seperti yang diminta oleh para pengguna. Hal ini tergambar dari tingkat pendidikan yang dienyam oleh pekerja yang terlihat berikut ini :

Tabel 1. Sebaran Tingkat Pendidikan Pekerja di Bangkalan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	334
2	SMP	167
3	SMA	234
4	SMK	173
5	DIPLOMA	112
6	SARJANA	255

Sumber: Hasil Penelitian Wijanarko & Yustina, 2016.

Berdasarkan table 1 di atas terlihat bahwa pekerja di Bangkalan didominasi oleh pekerja dengan pendidikan yang masih rendah (SMA/SMK ke bawah) yang nota bene kualitas SDM-nya masih rendah dan belum kompeten sehingga daya saing SDM-nya rendah.

Adanya dorongan dan tuntutan dari dunia kerja/industri (para pengguna) agar pemerintah bisa memfasilitasi ketersediaan calon pelamar/pencari kerja yang bisa memenuhi kualifikasi yang mereka butuhkan merupakan alasan lain keberadaan BLK sehingga pembentukan BLK ini

dimaksudkan untuk melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pencari kerja agar memiliki kemampuan dan kompetensi seperti yang diharapkan para pengguna. Atas dasar itulah maka tugas pokok UPTD BLK Dinsosnakertrans Bangkalan melakukan sebagian kegiatan teknis di bidang pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan ketatausahaan serta pengelolaan BLK yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas yang diemban oleh UPTD BLK Bangkalan di atas tidak terlepas dari fungsi UPTD tersebut yang termuat dalam peraturan daerah (Kabupaten Bangkalan) No. 16 tahun 2011, di mana terdapat berbagai fungsi yang melekat di UPTD BLK, di antaranya adalah pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerja sama pelatihan. Pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga ini diadakan setiap tahun sesuai dengan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. Selama ini BLK Dinsosnakertrans Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan pelatihan untuk 7 bidang kejuruan yang rinciannya terlihat berikut.

Tabel 2. Pelatihan Keterampilan yang Diselenggarakan BLK Bangkalan

No	Jenis Pelatihan	Maksimum Jumlah Peserta	Frekuensi/tahun
1	Kejuruan Komputer	16	5 kali
2	Kejuruan Las Listrik	16	Idem
3	Kejuruan Otomotif	16	Idem
4	Kejuruan Menjahit	16	Idem
5	Kejuruan Bordir	16	Idem
6	Kejuruan Listrik	16	Idem
7	Kejuruan Pertukangan	16	Idem

Sumber: Hasil Wawancara dengan BLK Bangkalan, 2018.

Walau cukup banyak lulusan yang telah dihasilkan namun sebagian besar mereka belum bisa dinyatakan kompeten di bidang jenis pelatihan yang diikuti. Padahal sasaran pelatihan bukan mencari kerja bagi lulusannya melainkan adalah mencari keterampilan dengan dilatih selama sekitar satu bulan atau selama 240 jam per angkatan. Sasaran ini tidak berbeda dengan yang dinyatakan Dessler. Dessler (2015:284), mengemukakan bahwa :

“Pelatihan merupakan proses mengajarkan pegawai baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Pegawai baik yang baru atau pun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan”

Sedangkan pelatihan kerja menurut undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal I ayat 9. Adalah:

“keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan”.

Peserta pelatihan di BLK Dinsosnakertrans Bangkalan tidak dibatasi hanya penduduk kota saja melainkan boleh dari luar kota Bangkalan (terutama dari pedesaan di kabupaten Bangkalan) sepanjang yang bersangkutan memiliki KTP dan berusia sekitar 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Yang dilatih dan dididik di BLK selain tenaga kerja formal juga calon wirausaha. Ternyata

mendidik dan melatih seseorang menjadi wirausaha jauh lebih sulit dibanding mendidik dan melatih menjadi tenaga kerja formal yang terampil (transkrip wawancara dengan instruktur, 2019).

B. PEMBAHASAN

Pada dasarnya pendirian lembaga pelatihan kerja dimaksudkan untuk membekali para siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kepentingan para siswa perlu diutamakan dengan salah satu upayanya adalah melalui penguatan kelembagaan pelatihan kerja. Melalui penguatan kelembagaan diharapkan bisa memberikan keyakinan penyelenggaraan pelatihan secara kontinyu dan bermutu.

Dalam rangka pengoptimalan dan pendayagunaan kelembagaan (*institutional empowerment*) maka faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah:

1. Menjadikan mampu (to enable) lembaga pelatihan mengelola secara mandiri berbagai kebutuhan pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan keterampilan dan pengetahuan karyawan (terutama tenaga instruktur) yang sesuai atau *matching* dengan perkembangan teknologi (terlebih memasuki era revolusi industri 4.0). Untuk menjadikan mampu mengelola kelembagaan juga diperlukan sumber daya lainnya, seperti dana atau anggaran yang memadai untuk mendanai semua kegiatan.
2. Memberi kesempatan (to chance) lembaga untuk berkreasi dalam menjalankan fungsinya meski terdapat SOP dalam setiap pekerjaan yang ditangani. Selain itu pemerintah daerah bisa memfasilitasi lembaga pelatihan untuk membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi baik di pemerintahan maupun swasta.
3. Penataan kapasitas kelembagaan melalui perbaikan manajemen kelembagaan di antaranya struktur kelembagaan, pola kepemimpinan, dan transparansi. Struktur perlu dibuat yang ramping, efisien, dan tepat sasaran. Sedangkan pola kepemimpinan diubah dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengedepankan partisipasi para karyawan. Temuan ini mendukung temuan Sri Yuniati et al, (2017).
4. Aspek legalitas, akreditasi, dan penilaian kinerja. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 62 maka lembaga yang bergerak di pelatihan kerja harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan input layanan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai maksud tersebut lembaga pelatihan kerja juga perlu mengantongi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

Untuk mewujudkan penguatan kelembagaan yang berbasis kompetensi sebuah lembaga pelatihan kerja perlu memiliki delapan aspek yang menurut Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA LPK) sebagai syarat sebuah lembaga dikatakan kredibel atau tidak. Kedelapan aspek untuk penguatan kelembagaan berbasis kompetensi tersebut adalah:

1. Kompetensi Kerja

Kompetensi kerja diartikan sebagai kualifikasi pekerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar nasional yang disepakati. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan jenis pekerjaan penting dimiliki dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi pegawai terhadap organisasinya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh gambaran bahwa para instruktur pada umumnya memiliki kompetensi kerja yang memadai dengan tugasnya walau ada keterbatasan dengan fasilitas pelatihan.

2. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan satuan pembelajaran yang mencakup isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan atau pelatihan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta/siswa dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum untuk setiap jenis pelatihan berbeda-beda namun pada dasarnya penyusunan kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja/industri sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pembaharuan kurikulum. Untuk setiap pelatihan semua materi yang ada dalam kurikulum harus tuntas diberikan/diajarkan kepada peserta pelatihan.

Kurikulum yang digunakan oleh BLK/LPK di Bangkalan walau telah mengacu pada pedoman standar nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat namun tetap perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja/industri lokal. Untuk itu lembaga ini harus berani berimprovisasi dengan melakukan kajian melalui diskusi tentang penyusunan kurikulum yang sesuai dengan industri dan metode mengajar serta pengajaran yang mudah diterima oleh peserta/siswa dan didesain secara fleksibel.

3. Materi Pelatihan

Di antara kajian kurikulum yang perlu diperhatikan adalah materi pelatihan yang memenuhi tuntutan dunia kerja/industri. Materi pelatihan dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan keahlian pelatihan serta pesan pelatihan itu sendiri. Materi pelatihan adalah bagian penting dari setiap program atau kegiatan yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan retensi. Pendekatan terbaik untuk mengembangkan bahan ajar adalah mulai dengan memeriksa rencana pelatihan dan sumber daya yang tersedia. Mengembangkan manual materi pelatihan merupakan bagian penting dalam merancang program pelatihan secara formal (Dessler, 2015). Sebuah materi manual pelatihan formal menjamin konsistensi dalam penyajian program pelatihan. Materi pelatihan yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu dalam membuat materi pelatihan perlu memperhatikan hal-hal berikut: (a) buat catatan penting sebelum menyusun materi, (b) membangun materi pelatihan dengan kebutuhan peserta, (c) buat handout dari bahan yang sama, (d) membuat buku pelatihan, (e) bagikan materi sebelum pelatihan dimulai, (f) keahlian teknis, (g) Ukuran kelas, dan (h) Adaptasi

4. Tata Kelola

Tata kelola (governance) kelembagaan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan yang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (pemangku kepentingan) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Komponen transparansi mencakup keseluruhan informasi lembaga, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok masyarakat.

Partisipasi (inklusifitas), adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan lembaga pelatihan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan pelatihan. Komponen yang menjamin akses partisipasi publik mencakup: tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan (sarasehan, FGD, dsb),

proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

Akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di lembaga pelatihan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (access to justice) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

5. Instruktur dan tenaga pelatihan

Tenaga instruktur yang dimiliki oleh BLK ini sebanyak 10 orang dengan status kepegawaian: 6 instruktur sebagai pegawai aktif, dan 4 instruktur pegawai tidak aktif (purna tugas/pensiun). Untuk instruktur yang masih aktif maka mereka diwajibkan setiap hari hadir di kantor (walau tidak ada kegiatan pelatihan) dengan tugas untuk memperbaiki, merawat, membersihkan, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan menjadi “ready to use”. Sedangkan instruktur tidak aktif (pensiun) tidak ada kewajiban hadir di kantor setiap hari. Mereka ada di kantor ketika ada kegiatan pelatihan.

Menilik dari jumlah instruktur dengan kejuruan yang diselenggarakan oleh BLK ini maka sesungguhnya masih terjadi “lag” tenaga instruktur sehingga perlu dipikirkan ke depannya untuk penambahan jumlah instruktur terutama juga karena alasan regenerasi tenaga instruktur.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pelaksanaan pelatihan. Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung dapat menunjang berjalannya proses pelatihan. Di lembaga pelatihan kerja ini kondisi sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan di kejuruan tertentu cukup canggih dan bagus serta memadai untuk peningkatan keterampilan peserta. Misalkan untuk pelatihan otomotif R2 tersedia sepeda motor sistem 2 TAK, dan 4 TAK, baik yang menggunakan transmisi manual maupun yang sistem matic. Begitu pula untuk pelatihan menjahit tersedia mesin jahit yang cukup canggih (otomatis). Untuk pelatihan desain grafis juga tersedia komputer dan peralatan lainnya yang memadai. Hanya peralatan mesin bubut yang kondisinya sudah usang sehingga perlu diperbaiki/pengadaan baru. Sedangkan untuk prasarana yang dimiliki oleh lembaga pelatihan ini berdasarkan pengamatan di lapangan masih dianggap layak dan memenuhi persyaratan, seperti tersedianya ruang perkantoran, musholla/masjid, kantin, aula, bahkan tersedia asrama untuk siswa

7. Administrasi Keuangan

Beberapa komponen administrasi keuangan yang perlu diperhatikan terdiri dari penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, pencarian keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan dan penyimpanan keuangan. Apabila seluruh komponen tersebut berfungsi maka akan membentuk kinerja administrasi keuangan yang baik, sehingga tujuan organisasi ataupun penguatan kelembagaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

8. Assesmen

Asesmen mandiri bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi instruktur. Data hasil asesmen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun pelatihan instruktur yang berbasis pada kebutuhan setiap level kompetensi. Makin tinggi level seorang instruktur, maka makin tinggi pula kualifikasinya, makin tinggi pula tugas dan tanggungjawabnya. Dengan level

kompetensi yang jelas, diharapkan kualitas instruktur akan terus meningkat sehingga kualitas lulusan sebagai tenaga kerja siap pakai juga akan turut meningkat.

KESIMPULAN

Pemerintah dan swasta diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia melalui penguatan lembaga pelatihan kerja. Penguatan kelembagaan berbasis kompetensi haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak otoritas yang dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal serta Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

Berdasarkan hasil studi ternyata terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian untuk penguatan kelembagaan. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) kondisi sarana prasarana pelatihan, khususnya untuk bidang kejuruan teknik mesin, (2) penambahan jumlah tenaga instruktur yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang mengikuti pelatihan (3) peningkatan kompetensi instruktur yang mana instruktur perlu memiliki kompetensi metodologi dan teknis yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang harus dimiliki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian kami selama 3 tahun (2017 – 2019)
2. Kepala Balai Latihan Kerja kabupaten Bangkalan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayahnya.
3. Teman-teman dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, perwakilan BLK, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdiskusi dalam wadah FGD.
4. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk presentasi hasil penelitian di forum kegiatan Temu Ilmiah Nasional, Agustus 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Humas Kemnaker 2019, Hadapi Industri 4.0, Peranan Instruktur BLK Terus Diperkuat, diakses pada tanggal 12 Juli 2019, (<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/>)
- Dessler, G 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi empat belas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 850 p
- Maulana, A 2017, Menteri Ketenagakerjaan RI: Sumber Daya Manusia Indonesia Harus Tingkatkan Kompetensi, diakses pada tanggal 30 Juni 2019, (<http://www.unpad.ac.id/2017/08>).
- Spencer, ML & Spencer 1993, *Competence at Work Models for Superior Performance*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 384 p.
- Sri Yuniati, Djoko Susilo, Fuat Albayumi 2017, Penguatan Kelembagaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS): 498-505.

- Sugiyono 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 334 p
- Nordman, C. J., & Pasquier-Doumer, L. 2012, Vocational Education, On-the-Job Training and Labour Market Integration of Young Workers in Urban West Africa. Paris: UNESCO, EFA Global Monitoring Report: Youth, Skills and Work, 43 p.
- Wijanarko A., Yustina Ch. 2016. PASAR TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKALAN, Media Trend 11 (2) : 195-208.
- Wispondono, Moch RM 2017, Pengembangan Sumber Daya Manusia: untuk pekerja migran, edisi pertama, Deepublish, Yogyakarta, 223 p.
- Wispondono, Moch RM, Eny Sri Rahayu, Netty DK, Deny 2018, Training Center in Madura (Problems and Challenges), International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 6 (3): 8 – 14.
- Wujudkan Indonesia Kompeten, Hanif Perkuat Peranan Instruktur BLK 2015, diakses pada tanggal 28 Juni 2019, (<http://www.kiosblklembang.com>)

Peraturan/ Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 16 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Kab. bangkalan No 3 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Jouzar Farouq Ishak^{1*}, Aprillah Tarihoran², dan Khozin Arief³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Jalan Gegerkalong Hilir, Bandung Barat, 40012

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Jalan Gegerkalong Hilir, Bandung Barat, 40012

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Jalan Gegerkalong Hilir, Bandung Barat, 40012

Email: jouzar.farouq@polban.ac.id

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana masyarakat oleh Pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan mulai dari tingkat Pedesaan dengan memberikan suatu dana khusus yang disebut alokasi dana desa. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari empat tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan studi eksploratif pada kondisi objek alamiah, faktual dan sistematis serta penggunaan wawancara dengan paradigma interpretif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan pada ketiga tahap tersebut sehingga akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sariwangi belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: akuntabilitas, alokasi, dana desa

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Indonesia 2014).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Pemerintah Indonesia 2014).

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah,

maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa (Wida *et al.* 2017).

Akuntabilitas merupakan prinsip dalam pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya yaitu dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebarkan ke desa (Farida *et al.* 2018).

Menurut Nahrudin (2014) bahwa keberadaan akuntabilitas begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Peran masyarakat penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau institusi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Rakhmat (2009) menyimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sumber kontrol internal bertolak pada kewenangan yang melekat pada hubungan formal secara hubungan sosial informal dengan agen publik. Sumber kontrol eksternal suatu pemisahan yang serupa, dimana kewenangan mereka dapat dibedakan dalam dalam kewenangan yang berasal dari serangkaian peraturan atau pelaksanaan kekuasaan secara informal oleh kepentingan yang berasal di luar agen publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran ADD yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance* karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi (Arifiyanto & Kurrohman 2014).

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan oleh Arifiyanto & Kurrohman (2014); Nafidah & Suryaningtyas (2015); Wida *et al.* (2017); Farida *et al.* (2018) dan Triani & Handayani (2018). Dengan memahami hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di mana akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut.

BAHAN DAN METODE

Menurut Sekaran & Bougie (2016) bahwa studi eksplorasi dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui tentang situasi yang dihadapi atau informasi tidak tersedia tentang bagaimana masalah penelitian serupa telah diselesaikan sebelumnya. Di kasus seperti itu, pekerjaan pendahuluan yang luas perlu dilakukan untuk mendapatkan keakraban dengan fenomena di situasi dan memahami apa yang terjadi, sebelum kita mengembangkan model dan menyiapkan desain yang ketat untuk investigasi komprehensif.

Intinya, studi eksplorasi dilakukan untuk lebih memahami sifat masalah sejak itu sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan di daerah itu. Wawancara ekstensif dengan banyak orang mungkin harus dilakukan untuk menangani situasi dan memahami fenomena tersebut. Beberapa studi kualitatif di mana data dikumpulkan melalui observasi, bersifat eksploratif. Saat datanya mengungkap beberapa pola berkenaan dengan fenomena minat, teori dikembangkan & hipotesis dirumuskan untuk pengujian selanjutnya.

Studi kasus eksploratif berdasarkan wawancara dengan Desa Sariwangi. Proses pengaturan dan organisasi studi kasus wawancara dilakukan dengan strategi pembagian waktu. Setelah meninjau literatur mengenai dana desa, penelitian ini memaparkan bagaimana ADD dalam proses pengalokasian dana desa, penyerapan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, menurut Triani & Handayani (2018) bertujuan untuk mengeksplorasi, menggambarkan evaluasi kinerja dari perspektif, mengidentifikasi & menerjemahkan jenis hasil dan dampak yang dinilai.

Selain wawancara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan metode observasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk merumuskan konsep dan teori sebagai landasan penelitian melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Sedangkan metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa *knowledge* digali melalui penjelasan ilmiah atas *human intention* dalam serangkaian interpretasi subjektif dan persesuaian *common sense* dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian ini mencoba melihat pengelolaan keuangan dana desa dari pemaknaan akuntansi dan para pelaksana keuangan dana desa (Triani & Handayani 2018). Praktik akuntansi dipandang sebagai kajian yang erat kaitannya serta dipengaruhi oleh organisasional, manusia, lingkungan dan agama setempat. Akuntansi & sosiologi merupakan kombinasi tak terpisahkan. Akuntansi sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban masyarakat (Darmayasa & Aneswari 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sariwangi memiliki wilayah seluas 244,347 hektar, terletak sekitar 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 22 hingga 23 derajat celcius. Akan tetapi, ketika memasuki musim kemarau maka suhu pada pagi dan malam hari dapat di bawah 20 derajat celcius. Jumlah penduduk berdasarkan registrasi Sensus Penduduk tercatat 16.627 jiwa terdiri dari laki-laki 8.446 jiwa dan perempuan 8.181 jiwa dengan Kepala Keluarga 4.125. Dengan jumlah penduduk seperti ini, maka perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek karena berhubungan terhadap sumberdaya pembangunan, sekaligus juga sebagai subjek dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Desa Sariwangi yang dibiayai dengan ADD terdapat empat bidang, yaitu Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun mengingat keterbatasan dalam hal pembiayaan sehingga Desa Sariwangi sehingga prioritas penggunaannya pada pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pemerintah Desa Sariwangi melakukan perencanaan alokasi dana desa dalam rapat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) melibatkan semua unsur masyarakat, seperti Tokoh Masyarakat, Badan Pemusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping

Kabupaten atau Kecamatan, dan Tokoh Agama. Tujuan dilaksanakannya Musrenbangdes yaitu untuk membahas berbagai usulan dari masyarakat mengenai program kerja yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pelaksanaan Musrenbangdes telah dilaksanakan di Desa Sariwangi, dengan hasil wawancara: “Perencanaan dilakukan di Musyawarah Desa, nantinya dibahas semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ditambah dengan usulan masyarakat, mulai dari bahasan di Musyawarah Desa nanti ada berupa penyusunan APBDDes serta harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa supaya APBDDes dapat ditetapkan.” (Hasil Wawancara Sekretaris Desa).

Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Program alokasi dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga dalam hal ini masyarakat sangat antusias dalam rapat Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sariwangi setiap tahun.

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara: “Ya sangat antusias. Pertama diadakan terlebih dahulu Musyawarah Desa tentang pengajuan kebutuhan dari masyarakat melalui Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat. Setelah itu, pengajuan tersebut ditampung baru akan diproses mana menjadi prioritas yang harus dilaksanakan.” (Hasil wawancara Kepala Desa).

Namun apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan penggunaan alokasi dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat serta RT dan RW yang tidak hadir atau tidak memenuhi undangan dalam rapat atau forum musyawarah yang diadakan oleh Desa Sariwangi. Akan tetapi, kehadiran 70 persen dapat mendukung tugas Pemerintah Desa Sariwangi dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Hal ini diperjelas dalam hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan: “Musrenbangdes mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara internal desan sendiri, Badan Permusyawaratan Desa dan kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya dan ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk Musrenbangdes, di sana usulan-usulan kami tampung dan memutuskan usulan yang paling mendesak kami dahulukan.” (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa harus benar-benar mengikutsertakan masyarakat dalam forum Musrenbangdes agar mampu menampung aspirasi dari masyarakat karena kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi pembangunan desa.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan: “Segala sesuatu yang menyangkut perencanaan program ADD disampaikan langsung kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa kemudian ke RT, RW dan Tokoh Masyarakat. Hal ini disampaikan karena perangkat desa menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oleh karena itu, perangkat desa selalu terbuka.” (Hasil wawancara Kepala Desa).

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan alokasi dana desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Dengan adanya prinsip transparansi, partisipasi dan keterbukaan informasi dari masyarakat yang cukup baik, maka pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sariwangi menunjukkan bahwa Desa Sariwangi telah melakukan tugasnya dengan baik pada tahap perencanaan.

Pelaksanaan alokasi dana desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Jadi dengan melakukan swakelola diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, kegiatan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Hal ini senada dengan informasi dari hasil wawancara dengan informan dan juga dari data observasi dimana kegiatan swakelola telah diterapkan pada Desa Sariwangi sebagai berikut: “Iya, kalau pelaksanaan alokasi dana desa itu dilaksanakan secara swakelola supaya dapat memberdayakan dan meningkatkan taraf ekoomi masyarakat Desa Sariwangi.” (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut: “Kalau secara keseluruhan penyampaian informasi kepada masyarakat itu tidak langsung tapi melalui RT atau RW dan tokoh masyarakat yang akan menyampaikan informasi kepada masyarakat ada juga lewat spanduk dari situ bisa masyarakat mengetahui informasinya.” (Hasil wawancara Kepala Desa). Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sariwangi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat baik sehingga hal ini memberikan dampak yang baik pada masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa.

Dari sisi pelaksanaan alokasi dana desa sangat bergantung pada pencairan dana alokasi dana desa, karena pencairan alokasi dana desa dari pusat sering terlambat dikarenakan tidak lengkapnya dokumen-dokumen pencairan dan juga keadaan di lapangan sering mengalami keterlambatan pembangunan sehingga pencairan dana alokasi dana desa sering terlambat.

Hal ini sependapat dengan informan sebagai berikut: “Belum bisa tepat waktu karena pencairan dana dari pusat mengalami keterlambatan yang disebabkan karena dokumen yang belum lengkap sama kalau pembangunan juga sering tidak sesuai dengan jadwal pembangunan selesai.” (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Sedangkan dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan fisik atau lapangan berupa dokumentasi kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan: “Ya, tentu sesuai dengan aturan, jadi setiap tahun setelah selesai pelaksanaan diminta laporan realisasi anggaran pelaksanaan, bahkan setiap tahap pelaksanaan ada laporan semester dan tahunan.” (Hasil wawancara Kepala Desa).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam Tahap Pelaksanaan ADD belum tepat waktu dikarenakan kurang lengkapnya dokumen dan juga keterlambatan pada kegiatan di lapangan, namun dalam pelaksanaan ADD Pemerintah Desa Sariwangi senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola alokasi dana desa di tingkat desa kepada masyarakat, terutama tentang kegiatan fisik dan penggunaan ADD. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan alokasi dana desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sariwangi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa. Dalam peraturan tersebut dimaksudkan bahwa pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel. Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Hal ini sesuai dengan informasi dari informan sebagai berikut: “Pada dasarnya Desa Sariwangi tidak lepas dari aturan seperti jadwal pelaporan, format pelaporan, dan juga teknis pelaporan. Kita juga menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, kalau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah itu diberikan ke Pemkab Bandung Barat, kalau Laporan Pelaksanaan Kegiatan itu diberikan kepada masyarakat.” (Hasil wawancara Kepala Desa).

Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban Desa Sariwangi telah sesuai dengan struktural yaitu pelaporan dari desa ke kecamatan atau tim pendamping kecamatan lalu dari kecamatan ke tim pendamping kabupaten atau pemerintah kabupaten. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan sebagai berikut: “Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah kabupaten dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.” (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Sariwangi dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Namun, Desa Sariwangi juga sampai saat ini masih menggunakan sistem manual dalam mengelola keuangan desa sehingga Desa Sariwangi masih memiliki kendala apakah menggunakan aplikasi atau manual. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi antara pihak desa dengan kecamatan dan kabupaten dalam menggunakan aplikasi atau manual.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan: “Kesulitan tidak ada, cuma untuk sekarang Desa Sariwangi kurang koordinasi antara pihak kecamatan dan kabupaten dalam menggunakan aplikasi atau manual, sehingga adanya kendala dalam pengelolaan administrasi keuangan berbasis aplikasi atau manual.” (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Sedangkan untuk penyampaian informasi Laporan APBDDes dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa belum mampu atau masih mengalami keterlambatan sehingga pencairan ADD dan Dana Desa masih sering terlambat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: “Sampai saat ini memang masih mengalami keterlambatan dari yang seharusnya tetapi masih bisa dikatakan wajar.” (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Keterlambatan pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan oleh kegiatan di lapangan yang masih berlangsung dan juga keterlambatan pada saat pencairan dana. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: “Kegiatan di lapangan masih berlangsung yang disebabkan pencairan dana yang telat sehingga penyampaian Laporan Pertanggungjawaban belum bisa tepat waktu.” (Hasil wawancara Sekretaris Desa).

Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Pembinaan dan Pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan serta evaluasi realisasi penggunaan.

Sedangkan Pembinaan dan Pengawasan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi Administrasi keuangan desa, Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, Memfasilitasi

upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta Melaksanakan evaluasi realisasi penggunaan.

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Inspektorat dan Lembaga Pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan penggunaan;
2. Memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa agar sesuai dengan rencana kegiatan;
3. Menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang sah;
4. Memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal terjadi permasalahan.

Pemerintah Desa Sariwangi dalam tahap pengawasan pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan sudah baik dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Hal ini sesuai dengan yang informasi dari informan sebagai berikut: “Kalau dari Pemkab di akhir tahun setelah selesai pelaksanaan ADD diperiksa oleh Inspektorat yang terdiri dari tiga tahap, yaitu Rencana Anggaran Biaya, administrasi dan kunjungan lapangan atau fisik”. (Hasil wawancara Kepala Desa).

Keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dapat diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya alokasi dana desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan tingkat desa serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa oleh Pemerintah Desa.

Keberhasilan penggunaan alokasi dana desa diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan alokasi dana desa;
6. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa;
7. Mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada dapat dikatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sariwangi sudah sangat baik. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Sariwangi diantaranya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, terbentuknya inisiatif dalam pengelolaan dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa.

KESIMPULAN

Perencanaan alokasi dana desa di Desa Sariwangi telah melakukan prinsip partisipasi, namun dalam prinsip ini belum baik karena masih ada beberapa Tokoh Masyarakat, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kepala Dusun yang tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan rapat Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa yang diadakan oleh perangkat Desa Sariwangi untuk membahas perencanaan alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat bahwa kehadiran perwakilan dari

masyarakat sebesar 70%. Dengan persentase kehadiran tersebut, maka bahwa prinsip partisipasi dalam alokasi dana desa belum dapat dikatakan baik.

Prinsip transparansi alokasi dana Desa Sariwangi berdasarkan hasil wawancara bahwa Pemerintah Desa Sariwangi telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik seperti Pemerintah Desa Sariwangi menyampaikan perencanaan kepada masyarakat dalam rapat, pembuatan baligho atau spanduk untuk menyampaikan kegiatan perencanaan pembangunan serta informasi penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa Sariwangi telah melakukan swakelola dikarenakan keinginan Aparatur Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang semakin lebih baik. Pada prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa, Pemerintah Desa Sariwangi telah melakukan tugas dengan baik dalam memberikan informasi secara langsung kepada Tokoh Masyarakat ketika melalui forum atau rapat dan menyampaikan informasi dengan pembuatan spanduk atau baligho pada setiap kegiatan pelaksanaan yang dibiayai dari alokasi dana desa.

Prinsip akuntabilitas alokasi dana desa, Desa Sariwangi sudah melakukan tugasnya dengan baik tanpa adanya kekurangan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada Pemerintah Kecamatan atau pun Pemerintah Kabupaten serta masyarakat. Namun dalam pelaksanaan alokasi dana desa ini masih terdapat keterlambatan pada saat pencairan alokasi dana desa dikarenakan kurang lengkapnya dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana serta pembangunan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Jalur struktural di Desa Sariwangi telah menyampaikan informasi pertanggung-jawaban kepada Pemerintah di atasnya maupun masyarakat, namun dalam prinsip akuntabilitas sudah dikatakan baik di mana setiap triwulanan terdapat evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa yang mengundang tokoh masyarakat perwakilan masyarakat. Aparatur Desa Sariwangi menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan Desa.

Prinsip transparansi di Desa Sariwangi telah dilakukan dengan penyampaian informasi dalam kegiatan Musyawarah Desa setiap semester. Pencairan alokasi dana desa untuk menyampaikan laporan keuangan alokasi dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Aparatur Desa Sariwangi dalam mengelola keuangan desa.

Pada tahap pengawasan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau Kecamatan Parongpong melakukan pengawasan setiap tiga kali dalam satu tahun sehingga hal ini sebagai bentuk preventif agar kejadian yang tidak diinginkan dapat diantisipasi. Prinsip partisipatif dalam tahap pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa Sariwangi sangat baik di mana dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam forum atau rapat pembahasan perencanaan dan pelaksanaan yang didanai dari alokasi dana desa sehingga dapat mencegah penyalahgunaan keuangan alokasi dana desa dan dana desa.

Alokasi dana desa, dana desa dan teknologi digital dapat dioptimalkan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Kesempatan kerja dan akses permodalan yang ditimbulkan dua hal itu berdampak pada pendapatan penduduk miskin. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas lapangan kerja yang terus-menerus ditingkatkan bisa mempertahankan kesejahteraan dibandingkan dengan bantuan atau subsidi. Pemanfaatan dana desa untuk program padat karya, antara lain pelatihan tenaga terampil, pembangunan jalan desa, irigasi pertanian dan pelatihan pemanfaatan akses teknologi digital harus diperkuat. Program-program tersebut akan menarik minat dan bakat bagi penduduk miskin di desa, terutama di luar masa tanam dan panen pertanian atau perkebunan.

Tahun-tahun sebelumnya alokasi dana desa dan dana desa fokus pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan infrastruktur desa. Untuk kedepannya agar alokasi dana desa dan dana desa tersebut prioritasnya lebih kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dana desa juga selain untuk program pada karya dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan institusi pedesaan seperti koperasi desa atau badan usaha milik desa. Dengan program-program tersebut diharapkan terdapat peningkatan dan pemerataan akses hidup yang layak, lapangan kerja, permodalan, serta kepemilikan aset melalui program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Program alokasi dana desa dan dana desa dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha produktif sehingga ikut berperan menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat juga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli serta memperluas akses masyarakat terhadap barang. Lapangan kerja mesti diciptakan agar masyarakat memiliki pendapatan. Tingkat harga barang harus dijaga agar terjangkau.

Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan sebagai saran kepada Pemerintah Desa Sariwangi agar dalam rapat Musrenbangdes Pemerintah Desa dapat terbantu dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Untuk memudahkan masyarakat di luar Desa Sariwangi, alangkah lebih baiknya Pemerintah Desa Sariwangi mengajukan permohonan sumber daya manusia yang dikhususkan untuk mengelola situs milik Pemerintah Desa sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi secara mudah dan cepat.

Untuk penelitian selanjutnya maka disarankan agar menambahkan informan dari sisi masyarakat desa maupun pihak Kecamatan ataupun Kabupaten. Sisi informan dari beberapa pihak tersebut agar dapat menilai pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang keseluruhan tidak hanya melihat dari bukti fisik pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, DF & Kurrohman, T 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3): 473-485.
- Darmayasa, IN & Aneswari, YR 2015, Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6 (3): 350-361.
- Farida, V, Jati, WA & Harventy, R 2018, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1 (1): 64-73.
- Kabupaten Bandung Barat 2015, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Nafidah, LN & Surayningtyas, M 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (1): 213-239.
- Nahrudin, Z 2014, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, IV (2): 193-201.
- Pemerintah Indonesia 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Rakhmat, 2009, *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*, Pustaka Arif, Banten.
- Sekaran, U & Bougie, R 2016, *Research Methods for Business (A skill Building Approach) – Fifth Edition*, Wiley, West Sussex, 83p.

- Triani, NNA & Handayani, S 2018, Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9 (1): 136-155.
- Wida, SA, Supatmoko, D & Kurrohman, T 2017, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV (2): 148-152.

URBANISASI DAN ANCAMAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DI DESA: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR

URBANIZATION AND THREATS OF QUALITY AVAILABILITY OF HUMAN RESOURCES IN THE VILLAGE: CASE STUDY IN EAST JAVA PROVINCE

Munari Kustanto

Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo – 61211

munarikustanto@gmail.com

ABSTRAK

Dampak urbanisasi tidak hanya dirasakan oleh kota sebagai tempat tujuan. Desa ternyata juga menghadapi ancaman yang tidak kalah serius. Salah satu ancaman serius yang dihadapi adalah defisit sumber daya manusia berkualitas di desa. Menggunakan pendekatan literatur, tulisan ini berupaya menguraikan ancaman urbanisasi terhadap ketersediaan sumber daya manusia berkualitas di desa. Program pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak jarang malah mendorong terjadinya urbanisasi. Dampak urbanisasi yang dirasakan kota salah satunya adalah munculnya pemukiman kumuh. Adapun bagi desa, urbanisasi menjadi pintu bagi keluarnya sumberdaya manusia berkualitas. Pemerintah perlu merumuskan langkah strategi guna mengubah *brain drain* menjadi *reserve brain* agar desa tetap memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan desa.

Kata Kunci : brain drain, reserve brain, sumberdaya manusia, urbanisasi

ABSTRACT

The impact of urbanization is not only felt by the city as a destination. The village apparently also faces a threat that is no less serious. One serious threat faced is a deficit of quality human resources in the village. Using a literary approach, this paper attempts to describe the threat of urbanization to the availability of quality human resources in the village. The development program launched by the government often leads to urbanization. The impact of urbanization felt by the city one of which is the emergence of slums. As for the village, urbanization is a door for the release of quality human resources. The government needs to formulate strategic steps to change brain drain into reserve brain so that villages will still have quality human resources for village development.

Keywords : brain drain, reserve brain, human resources, urbanization

PENDAHULUAN

Urbanisasi menjadi sebuah permasalahan yang penting dalam isu demografi di banyak negara, terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia. Pembahasan masalah pengangguran, ketimpangan hingga kemiskinan acapkali berkelindan dengan masalah urbanisasi. Pada negara berkembang, terjadinya restrukturisasi perekonomian dari pertanian menjadi manufaktur dan jasa selanjutnya diikuti dengan terjadinya transformasi spasial (Christiaensen & Todo, 2013). Perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan menjadi sebuah kondisi yang tidak dapat dicegah, maka terjadilah urbanisasi.

Awalnya urbanisasi diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kawasan pedesaan sehingga membuka peluang bagi pengurangan kemiskinan di pedesaan. Kenyataan yang terjadi di

lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Konsentrasi spasial dan perubahan ekonomi pedesaan menuju ekonomi perkotaan malah mengakibatkan terjadinya diferensiasi pendapatan dan kesejahteraan. Kondisi ini berujung pada terjadinya disparitas antar wilayah dan melahirkan efek pemiskinan terhadap wilayah yang tertinggal (Febrianto & Syahbana, 2016). Proses pemiskinan tidak dapat dihindari manakala sumberdaya wilayah tertinggal semakin tersedot ke wilayah potensial, termasuk didalamnya adalah sumberdaya manusia.

Tersedotnya sumberdaya pedesaan ke wilayah perkotaan menjadi permasalahan serius di Indonesia. Apalagi jika melihat perkembangan tingkat urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 merilis tingkat urbanisasi di Indonesia sebesar 49,8% (Badan Pusat Statistik, 2013). Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, maka tingkat urbanisasi meningkat menjadi 72,9% pada tahun 2045. Bahkan untuk beberapa provinsi seperti provinsi di Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan diproyeksikan memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dari tingkat urbanisasi nasional (Badan Pusat Statistik, 2018). Dengan demikian dalam kurun waktu 35 tahun penduduk perkotaan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 46,39%.

Menilik data tersebut, permasalahan penyedotan sumberdaya pedesaan (termasuk sumberdaya manusia) melalui proses urbanisasi perlu mendapat perhatian dari banyak pihak, tidak terkecuali pemerintah. Bahwa kebijakan pembangunan yang berdampak pada kemunculan urbanisasi tentunya tidak dapat dilepaskan dari campur tangan pemerintah. Bersama berbagai pihak pemerintah perlu memikirkan solusi terhadap permasalahan penggerusan sumberdaya pedesaan, termasuk didalamnya penyedotan sumberdaya manusia. Arus urbanisasi yang tidak mungkin dihindari tentunya diharapkan tidak menjadikan desa semakin tertinggal.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan adalah sumberdaya manusia. Guna mempercepat pembangunan disuatu negara, maka diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas (Siregar, 2017). Demikian pula dengan desa, keberadaan sumberdaya manusia berkualitas sangat diperlukan bagi upaya pembangunan. Banyaknya sumberdaya manusia berkualitas di desa yang memilih untuk bermigrasi ke kota tentu patut mendapat perhatian serius. Ketiadaan sumberdaya manusia berkualitas di desa tentunya menjadikan pembangunan terhambat.

Permasalahan di atas nampaknya juga sedang dihadapi Provinsi Jawa Timur apabila memperhatikan proyeksi penduduk yang dirilis Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data tersebut penduduk Provinsi Jawa Timur yang tinggal diperkotaan diproyeksikan mencapai 66,7% pada tahun 2035. Jumlah tersebut berada di atas capaian rata-rata nasional sebesar 66,6% maupun Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,8% (Badan Pusat Statistik, 2018). Kondisi di atas memperlihatkan urbanisasi di Jawa Timur lebih tinggi dibanding urbanisasi di tingkat nasional dan Jawa Tengah. Tingginya tingkat urbanisasi tentunya menjadi ancaman terhadap ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa.

Selama ini penanganan terhadap permasalahan urbanisasi terlihat masih kurang optimal. Akibatnya keluhan terhadap dampak urbanisasi terus bermunculan. Ironi terjadi manakala pembangunan di desa masih kurang ekspansif meskipun telah digelontor dana cukup besar oleh pemerintah (Friana, 2019). Dampaknya arus migrasi keluar sumberdaya manusia dari desa ke kota menjadi tidak terbendung. Tulisan ini berupaya mengupas dampak urbanisasi terhadap ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa.

Studi yang mengangkat permasalahan urbanisasi telah banyak dilakukan, umumnya mengangkat dampak urbanisasi terhadap kondisi perkotaan. Studi dengan judul Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (*Slum Area*) di Daerah Perkotaan salah satunya. Studi ini berupaya mengulas dampak yang ditimbulkan dari proses urbanisasi terhadap keberadaan *slum area* di perkotaan. Menurut Malau (2013) urbanisasi berkontribusi terhadap kemunculan *slum area* di

perkotaan. Minimnya pendidikan dan keahlian menjadikan kaum urban bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang minim. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan mengakses tempat tinggal yang layak, sehingga memunculkan permukiman kumuh.

Terdapat pula studi yang mengangkat urbanisasi dengan melihat dampaknya bagi kota dan desa. Penelitian Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan ini berupaya mengupas dampak urbanisasi terhadap pengurangan kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan yang terdiri dari daerah perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi ternyata memiliki tingkat pengurangan kemiskinan yang rendah. Sebaliknya daerah yang memiliki tingkat urbanisasi di bawah kedua kota tersebut ternyata memiliki kinerja pengurangan kemiskinan lebih baik. Urbanisasi di kawasan perkotaan dengan demikian belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan (Febrianto & Syahbana, 2016).

Berbeda dengan kedua studi di atas, tulisan ini berupaya mengangkat dampak urbanisasi bagi ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa. Penulis belum menemukan studi yang mengupas permasalahan urbanisasi dalam kaitannya dengan sumberdaya manusia berkualitas di desa. Jikapun terdapat studi yang mengupas permasalahan penyedotan sumberdaya manusia (*brain drain*), analisis dilakukan pada tataran yang lebih luas dalam konteks antar negara. Penelitian Gerakan Silicon Valley Indian Professionals Association (SIPA) Dalam Membantu India Mengubah Brain Drain Menjadi Brain Circulation adalah salah satunya. Penelitian ini berupaya menguraikan pergerakan SIPA dalam mengubah masalah *brain drain* menjadi *brain circulation* di India. Isnarti (2012) menemukan bahwa SIPA mampu menciptakan *brain circulation* dengan menggugah kesadaran para tenaga kerja terampil IT di India. *Organic intellectual* menjadi salah satu strategi untuk membangun kesadaran tersebut.

Tulisan ini dengan demikian berupaya mengisi ruang kosong yang ada dengan mendiskusikan permasalahan urbanisasi dalam konteks yang lebih kecil. Urbanisasi dalam tulisan ini akan dilihat sebagai pintu masuk untuk memahami terjadinya fenomena penyedotan sumberdaya manusia berkualitas (*brain drain*) di desa. Harapannya dapat dirumuskan sebuah solusi untuk meminimalisir dampak urbanisasi terhadap ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa.

BAHAN DAN METODE

Tulisan ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Tulisan ini mengambil referensi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan urbanisasi dan sumberdaya manusia di desa. Dalam hal ini sumber referensi berupa makalah, jurnal ilmiah yang dipublikasikan, dan website yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini.

Data sekunder akan dimanfaatkan untuk melakukan analisa ancaman urbanisasi terhadap ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa. Data sekunder sendiri merupakan data dari sumber tertentu yang memiliki kewenangan dan kredibilitas mengeluarkan data tersebut. Dalam hal ini data Statistik Migrasi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS menjadi sumber data yang digunakan dalam tulisan ini. Adapun data Statistik Migrasi Jawa Timur yang digunakan adalah hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

Dalam upaya memperoleh gambaran mengenai urbanisasi, maka tulisan ini menggunakan data migrasi risen sebagai acuan. Sebagaimana diketahui bahwa migran risen adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun lima tahun terakhir (mulai dari lima tahun sebelum pencacahan). Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal tahun yang lalu dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan maka dikategorikan sebagai migran risen yang juga merupakan bagian dari migrasi total, hanya waktunya dalam kurun lima tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2019).

Analisis dilakukan dengan membandingkan data migrasi risen Provinsi Jawa Timur hasil SP 2010 dan SUPAS 2015 (Badan Pusat Statistik, 2012 dan 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Migrasi dan Urbanisasi di Provinsi Jawa Timur: Komparasi Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2015

Membicarakan dinamika urbanisasi di Provinsi Jawa Timur tentunya tidak dapat dilepaskan dari daya tarik Kabupaten/Kota yang ada. Perbedaan daya tarik antar Kabupaten/Kota menjadi salah satu penyebab terjadinya migrasi. Dalam hal ini data migrasi neto dapat digunakan untuk mengetahui daya tarik sebuah daerah bagi kaum migran. Migrasi neto merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi ke luar. Apabila migrasi masuk lebih besar dari migrasi ke luar, maka disebut migrasi neto positif. Sebaliknya apabila jumlah migrasi ke luar lebih besar daripada jumlah migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negatif (Puspitasari, 2010). Daerah yang memiliki migrasi neto positif mengindikasikan memiliki daya tarik dibandingkan dengan daerah yang memiliki migrasi neto negatif.

Beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki angka migrasi positif, sebagian besar merupakan perkotaan. Berdasarkan hasil SP 2010, terdapat 13 daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto positif. Jumlah tersebut terdiri dari delapan kota (Malang, Madiun, Batu, Mojokerto, Probolinggo, Pasuruan, Kediri, dan Blitar) dan lima kabupaten (Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto dan Situbondo). Kota Surabaya tercatat sebagai satu-satunya kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto negatif. Meskipun demikian kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya tercatat memiliki angka migrasi neto, bahkan Kabupaten Sidoarjo mencatatkan diri sebagai wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto paling besar.

Lima tahun kemudian ketika dilakukan SUPAS 2015, terjadi sedikit perubahan terkait komposisi migrasi neto di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto positif menjadi 15 daerah. Jumlah kota yang memiliki angka migrasi positif masih tetap delapan. Perkembangan terjadi untuk kabupaten, di mana jika pada tahun 2010 hanya lima kabupaten yang memiliki nilai migrasi neto positif, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi tujuh kabupaten (Sidoarjo, Gresik, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Magetan dan Blitar).

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa sebagian besar kota di Provinsi Jawa Timur masih memiliki daya tarik bagi kaum migran. Hal ini terlihat dari banyaknya migrasi masuk ke wilayah kota serta beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan perkotaan seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Kondisi ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa terjadi urbanisasi di Provinsi Jawa Timur. Hasil SP 2010 mencatat tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 47,6% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 45,7% pada tahun yang sama (Badan Pusat Statistik, 2013). Adapun berdasarkan hasil SUPAS 2015 tingkat urbanisasi meningkat menjadi 51,1% (Badan Pusat Statistik, 2018).

Komposisi migran risen berdasarkan kelompok umur juga perlu untuk dibahas. Dilihat dari kelompok umur, maka migran di Provinsi Jawa Timur banyak dilakukan oleh mereka yang masuk pada usia produktif (usia 15-64 tahun). Berdasarkan hasil SP 2010 jumlah migran usia produktif mencapai 783.756 jiwa, atau sebesar 84,72% dari 925.116 migran di Provinsi Jawa Timur. Jumlah migran usia produktif pada tahun 2015 tercatat meningkat. Berdasarkan hasil SUPAS 2015, jumlah migran usia produksi di Provinsi Jawa Timur tercatat 808.388 jiwa atau sebesar 88,20% dari 916.567 migran.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah migran di Provinsi Jawa Timur dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas sumberdaya manusia adalah pendidikan. Berdasarkan hasil SP 2010, jumlah migran yang telah menamatkan jenjang pendidikan menengah ke atas tercatat sebanyak 453.691 jiwa atau 49,04% dari 925.116 migran. Dari jumlah tersebut tercatat 104.793 migran atau sebesar 11,33% telah menamatkan pendidikan tinggi. Lima tahun kemudian jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan menengah atas mengalami penurunan. Berdasarkan SUPAS 2015 jumlah migran yang menamatkan pendidikan menengah atas menjadi 443.736 jiwa atau 47,97% dari 916.567 migran. Meskipun demikian terdapat fenomena yang menarik, di mana jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan tinggi tidak mengalami penurunan. Jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan tinggi tercatat 108.135 jiwa atau 11,69%.

Menilik lebih rinci lagi, migran paling banyak telah menyelesaikan pendidikan D-IV/S-1. Apabila pada tahun 2010 jumlah migran dengan pendidikan D-IV/S-1 tercatat sebanyak 71.074 jiwa atau 7,68% maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 8,22% atau 76.035 jiwa. Peningkatan ini tidak terjadi pada jenjang pendidikan D-I/II/III maupun S-2/S-3. Jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan pada kedua jenjang tersebut pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2010. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa migran risen di Jawa Timur yang telah menamatkan pendidikan tinggi paling banyak pada jenjang D-IV/S-1.

Memperhatikan uraian di atas, maka urbanisasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur secara tidak langsung mengancam ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa. Dilihat dari ketersediaan angkatan kerja di desa, maka dominasi migran pada usia produktif secara tidak langsung memperlihatkan bahwa urbanisasi juga didominasi kelompok usia ini. Apabila kondisi ini tidak segera mendapat perhatian serius, maka desa akan terancam kekurangan penduduk usia produktif. Kondisi ini tentunya juga akan mengancam pertumbuhan ekonomi di desa karena kekurangan sumberdaya manusia untuk menggerakkan pembangunan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Anwar & Fatmawati (2018) bahwa jumlah penduduk usia produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Selain dari segi ketersediaan penduduk usia produktif, urbanisasi yang terjadi juga mengancam ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa. Uraian tentang peningkatan migran risen yang telah menamatkan pendidikan tinggi pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa migrasi intelektual di Provinsi Jawa Timur juga meningkat. Fenomena *brain drain* di Provinsi Jawa Timur dengan demikian semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010.

Arus urbanisasi pada kalangan migran intelektual tentu menjadi kehilangan besar bagi desa. Ketiadaan sumberdaya manusia berkualitas – migran intelektual – tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan di desa. Widyaningsih (2013) juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pembangunan desa. Dalam hal ini tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Keberadaan sumberdaya manusia yang berkualitas di desa dengan demikian memegang peranan yang sangat penting bagi maju dan berkembangnya desa.

Memperhatikan fenomena di atas, maka pemerintah dan stakeholder terkait perlu memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan urbanisasi. Tanpa adanya pengendalian terhadap arus urbanisasi maka pembangunan desa terancam stagnan karena kekurangan sumberdaya manusia berkualitas. Kebijakan yang dipilih diharapkan tidak hanya mampu mengendalikan arus urbanisasi tetapi juga mengurangi daya dorong yang dimiliki desa serta daya tarik kota.

Reserve Brain: Sebuah Strategi Mengatasi Ancaman Ketersediaan Sumberdaya Manusia Berkualitas di Desa

Gibson & Mckenzie (2012) memperlihatkan fenomena *brain drain* pada tataran negara. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa sebagian besar migran yang berkualitas dari negara miskin banyak melakukan migrasi ke luar negeri. Dalam konteks yang lebih kecil, uraian migrasi intelektual yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dapat diindikasikan sebagai proses *brain drain*.

Telah cukup banyak diskusi yang membahas dampak *brain drain* bagi daerah asal. Dalam hal ini *brain drain* tidak hanya dipandang memberikan dampak negatif tetapi juga dapat memberikan dampak positif. Mereka yang memiliki pandangan negatif terhadap fenomena *brain drain* melihat dari sisi ancaman terhadap ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas (Hagopian, Thompson, Fordyce, Johnson, & Hart, 2004). Adapun mereka yang memiliki pandangan positif memandang pelaku *brain drain* akan memberikan keuntungan bagi negara asal berupa *capital input* dalam bentuk pengiriman uang kepada keluarga mereka di dalam negeri (Ozden & Schiff, 2006). Dalam konteks di Provinsi Jawa Timur, penulis melihat dampak negatif dari fenomena *brain drain* yang terjadi lebih besar.

Memperhatikan hal tersebut, maka ancaman terhadap ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa perlu diperhatikan. Menurut Saefuloh (2012) salah satu strategi yang cukup relevan untuk mengatasi permasalahan *brain drain* di desa adalah dengan kebijakan *reserve brain*. Strategi ini berupaya untuk menarik kembali sumberdaya manusia berkualitas yang terlanjur ke luar agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian mereka guna mendukung pembangunan desa.

Guna mendukung kebijakan *reserve brain* di Provinsi Jawa Timur diperlukan berbagai langkah strategis. *Pertama*, kebijakan pembangunan diupayakan tidak kontraproduktif dengan kebijakan *reserve brain*. Pemerintah perlu melakukan kajian secara komprehensif terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat, termasuk mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan. Kebijakan pembangunan harus dilakukan secara selektif, sehingga pembangunan dapat memberikan dampak positif baik bagi kota maupun desa. Jangan sampai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah malah membuka keran urbanisasi semakin lebar. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa tidak sedikit kebijakan pembangunan yang dipilih pemerintah malah mengakselerasi urbanisasi.

Hal ini sebagaimana diungkap Novenanto (2018) manakala meneliti tentang kebijakan pembangunan tol Trans Jawa. Kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata membawa dampak terhadap urbanisasi. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur Trans Jawa malah menjadi katalisator bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Keberadaan tol Trans Jawa malah mempercepat proses urbanisasi dan modernisasi. Manakala urbanisasi menjadi semakin cepat, maka tidak dapat dipungkiri akan memberikan dampak bagi terjadinya *brain drain* bagi desa.

Kedua, mengurangi faktor pendorong dan faktor penarik terjadinya urbanisasi. Sebagaimana diketahui bahwa urbanisasi tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota. Pemerintah dengan demikian perlu segera mengidentifikasi berbagai faktor pendorong dan penarik terjadinya urbanisasi di Provinsi Jawa Timur. Manakala kedua faktor tersebut telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi faktor pendorong adalah dengan membuat ruang bagi upaya penciptaan lapangan kerja di desa. Upaya tersebut tentunya harus memperhatikan potensi yang dimiliki oleh desa, baik potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Harapannya lapangan kerja yang tercipta dapat mengakomodir sumberdaya yang tersedia.

Pembukaan lapangan kerja di desa secara tidak langsung diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa adalah dengan memberikan peran kepada migran intelektual yang bersedia kembali. Mereka tentunya memiliki *social capital* yang lebih jika dibandingkan dengan penduduk yang tidak pernah melakukan migrasi, salah satunya adalah jaringan sosial. Pelaku *brain drain* dapat ditempatkan pada posisi fasilitator dalam pembangunan desa.

Ketiga, pembentukan dan pemeliharaan jaringan diaspora. Dalam hal ini baik jaringan diaspora yang bersifat keilmuan maupun yang bersifat komunitas kemasyarakatan. Jaringan diaspora ini dapat menjadi media untuk mendapatkan sumber potensi cukup besar yang dibutuhkan untuk menjalin kerjasama antara desa dengan kota. Harapannya kerjasama yang terjalin dapat lebih efektif dan saling menguntungkan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam jaringan diaspora adalah terkait dengan kontribusi yang diberikan. Keberadaan komunitas diaspora tersebut harus dikondisikan agar benar-benar dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan desa. Dengan demikian dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan diaspora orientasi kepentingan desa perlu ditanamkan dan dipelihara sejak awal.

KESIMPULAN

Berdasarkan data Statistik Migrasi Jawa Timur yang dirilis BPS, baik berdasarkan hasil SP 2010 maupun SUPAS 2015 memperlihatkan bahwa urbanisasi di Provinsi Jawa Timur mengancam ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas di desa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah migran intelektual dalam kurun waktu lima tahun yang meningkat dari 11,33% pada tahun 2010 menjadi 11,69% pada tahun 2015. Apabila ancaman *brain drain* ini tidak segera di atasi, maka desa akan kehilangan sumberdaya manusia berkualitas yang sangat diperlukan bagi pembangunan desa.

Strategi *reserve brain* menjadi salah satu solusi yang relevan untuk mengatasi ancaman *brain drain*. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan *reserve brain* antara lain : (i) menghindari kebijakan pembangunan yang kontraproduktif dengan upaya *reserve brain*. Tidak jarang kebijakan pembangunan yang dibuat malah semakin mengakselerasi urbanisasi dan *brain drain*; (ii) mengurangi faktor pendorong dan faktor penarik urbanisasi; dan (iii) membentuk dan memelihara jaringan diaspora.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Bidang Litbang dan Data Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus berkarya.

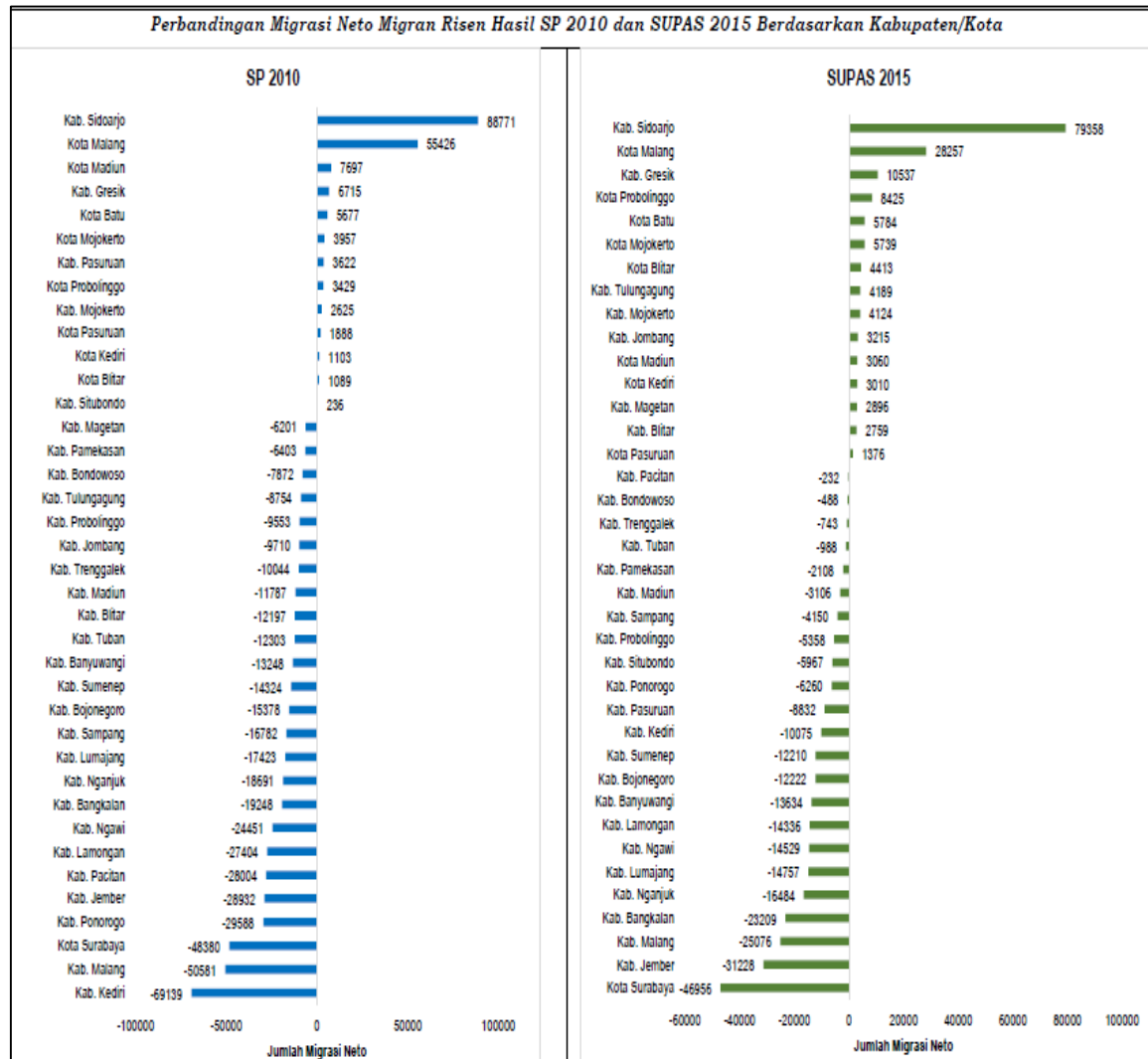
DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., & Fatmawati. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif, Kemiskinan dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(01), 15–22. Retrieved from https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional/article/viewFile/935/pdf
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010-2035. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://doi.org/2101018>

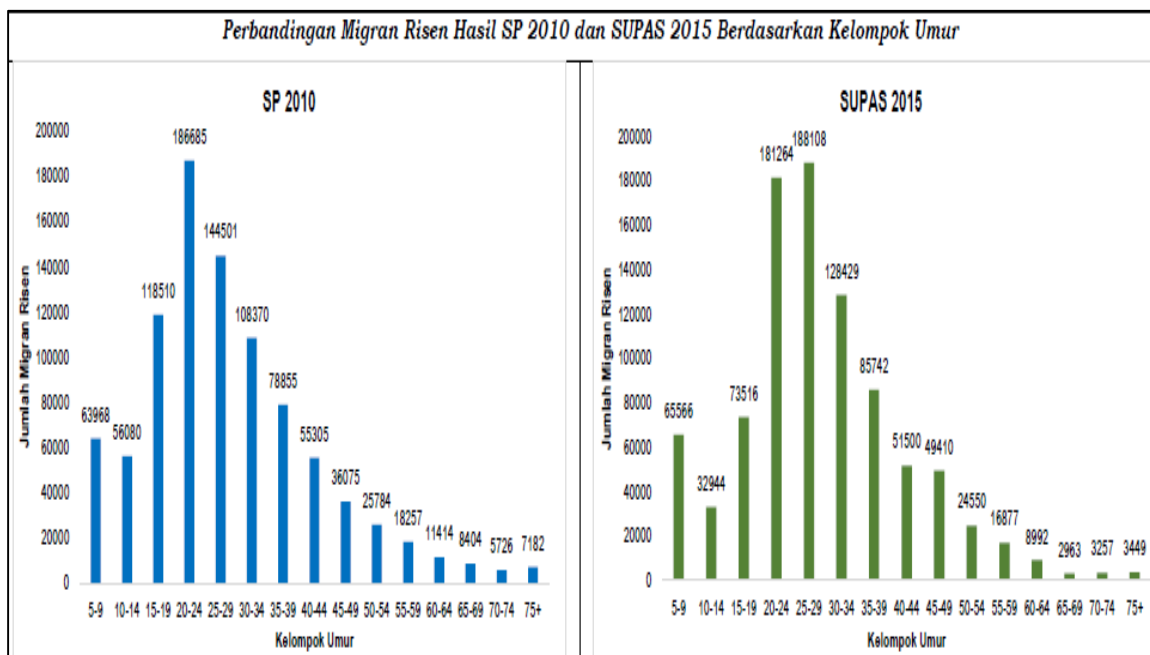
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015* (S. S. D. BPS & K. PPN/Bappenas, eds.). Jakarta: Subdirektorat Statistik Demografi Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Deskripsi Istilah Statistik. Retrieved July 30, 2019, from Badan Pusat Statistik website: https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=38&Istilah_sort=deskripsi_ind.desc
- Christiaensen, L., & Todo, Y. (2013). *Poverty Reduction during the Rural-Urban Transformation The Role of the Missing Middle* (No. 6445). Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/215021468151498716/Poverty-reduction-during-the-rural-urban-transformation-the-role-of-the-missing-middle>
- Febrianto, S., & Syahbana, J. A. (2016). Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK*, 5(1), 51–57. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/10698>
- Friana, H. (2019). Pendatang Baru Jakarta dan Lambatnya Pembangunan Desa. In *tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/pendatang-baru-jakarta-dan-lambatnya-pembangunan-desecg2>
- Gibson, J., & McKenzie, D. (2012). The Economic Consequences of “Brain Drain” of the Best and Brightest: Microeconomic Evidence from Five Countries. *Economic Journal*, 122(560), 339–375. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02498.x>
- Hagopian, A., Thompson, M. J., Fordyce, M., Johnson, K. E., & Hart, L. G. (2004). The migration of physicians from sub-Saharan Africa to the United States of America: Measures of the African brain drain. *Human Resources for Health*, 2(17), 1–10. <https://doi.org/10.1186/1478-4491-2-17>
- Isnarti, R. (2012). Gerakan Silicon Valley Indian Professionals Association (SIPA) Dalam Membantu India Mengubah Brain Drain Menjadi Brain Circulation Rika. *Andalas Journal of International Studies*, 1(1), 88–107.
- Malau, W. (2013). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) di Daerah Perkotaan. *JUPIIS*, 5(2), 39–47.
- Novenanto, A. (2018). Trans Jawa, Pertumbuhan Ekonomi dan Urbanisasi. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 123–139. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i2.275>
- Ozden, C., & Schiff, M. (2006). International Migration, Remittances & The Brain Drain. In C. Ozden & M. Schiff (Eds.), *The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6372-0>
- Puspitasari, A. W. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Migrasi Sirkuler ke Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Saefuloh, A. A. (2012). Kebijakan Reverse Brain : Mengapa Penting Dan Alternatif Pendekatan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 109–124. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/170/115>

- Siregar, R. (2017). Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional. In N. Berutu, D. Setiawan, F. Tanjung, & W. Malau (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Meda* (pp. 378–381). Retrieved from <http://semnasfis.unimed.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Sumber-Daya-Manusia-Dalam-Pembangunan-Nasional.pdf>
- Widyaningsih, N. D. (2013). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Masyarakat Dengan Kesadaran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Korelasi di Desa Temuwangi Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Tahun 2009-2010). *Educitizen*, 1(1), 68–77. Retrieved from <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/civic/article/view/2980/2042>

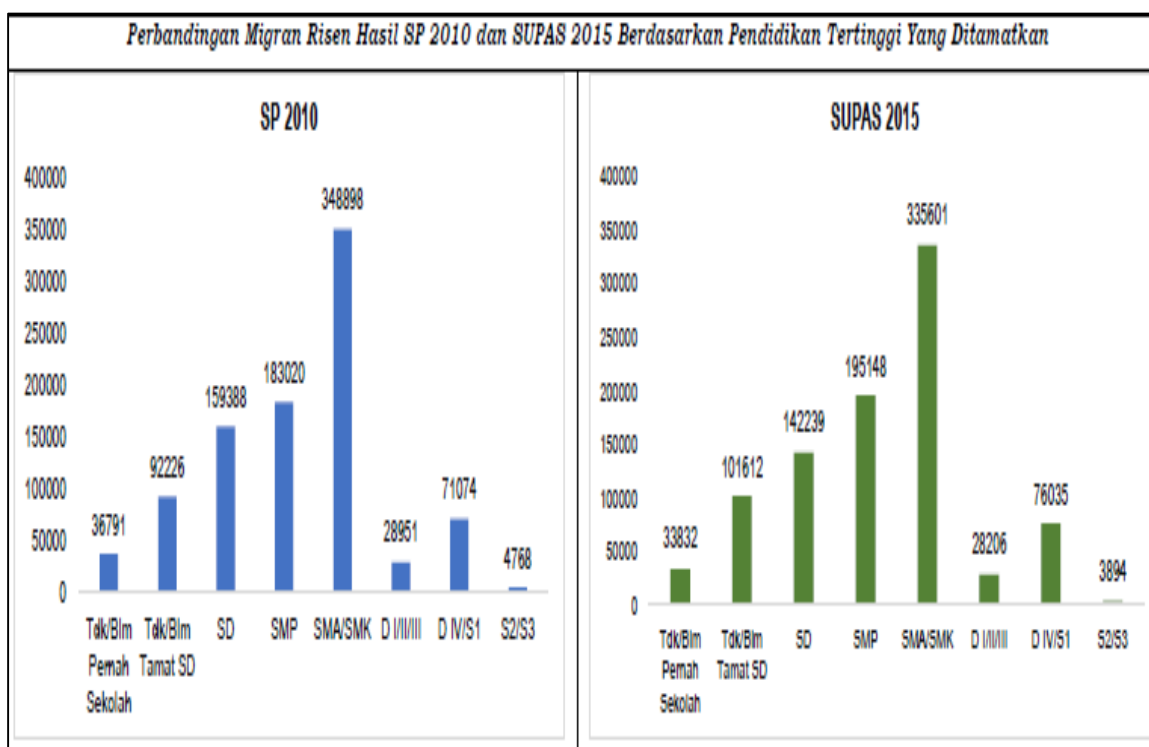
Lampiran:



Sumber : Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015



Sumber: Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015



Sumber: Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015



TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI: ANALISIS PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PEDESAAN DI DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Intihaul Khiyaroh

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
Jl. Raya Deandles No.1 Kranji Paciran (62264)

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia (SDM) pedesaan dalam rangka pembangunan desa mandiri dan strategi pemerintah dalam melakukan transformasi percepatan pengembangan desa mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang difokuskan pada peran sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan transformasi percepatan pengembangan desa mandiri. Data kualitas SDM pedesaan Desa Sidokelar dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori untuk menghasilkan sistem dan metode yang tepat dalam melakukan pengembangan desa mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal strategi yang dilakukan pemerintah Desa Sidokelar melakukan pemetaan potensi, pembinaan dan pendampingan, membangun sinergisitas dan menerapkan tata kelola desa menjadi organisasi modern. Sedangkan hasil dari transformasi pembangunan itu sendiri ialah terjadi peningkatan pada kualitas pendidikan SDM dan kader kesehatan, maupun kader pembangunan masyarakat serta sarana prasarana desa, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan juga terjadi dalam hal perekonomian desa dengan mengaktifkan bidang-bidang perekonomian desa melalui tata kelola wisata dan Bumdes.

Kata kunci : Transformasi pembangunan desa, kualitas SDM, percepatan desa mandiri.

ABSTRACT

This study aims to determine the quality of rural human resources (HR) in the context of independent village development and the government's strategy in transforming the acceleration of the development of independent villages. This study uses a descriptive qualitative approach that focuses on the role of human resources (HR) in transforming the acceleration of the development of independent villages. Data on the quality of rural HR in Sidokelar Village were analyzed and then compared with the theory to produce the right system and method for developing independent villages. The results of this study indicate that in terms of the strategy carried out by the government Sidokelar Village conducted a mapping of potential, guidance and assistance, building synergy and implementing village governance into a modern organization. While the results of the transformation of development itself are an increase in the quality of education of human resources and health cadres, as well as community development cadres as well as village infrastructure, especially in the fields of education and health. Increases also occur in the village economy by activating the fields of the village economy through tourism management and Bumdes.

Keywords: Transformation of village development, quality of human resources, acceleration of independent villages.

PENDAHULUAN

Percepatan pengembangan desa mandiri tidak lepas dari peran sumber daya manusia (SDM) baik internal dalam pemerintahan desa maupun eksternal yakni masyarakat desa yang mendukung terwujudnya desa mandiri. Sumber daya manusia merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian. Kualitas berupa potensi dan kinerja aparat pemerintahan desa terus dikembangkan demi melakukan transformasi percepatan pengembangan desa mandiri. Desa

mandiri merupakan desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya serta tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sendiri sudah diatur dalam Pemendagri No 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Bab I ketentuan umum Pasal 3 yang berbunyi “Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam bagian kedua Pemendagri no 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa diatur masalah pembangunan SDM dalam poin pemberdayaan masyarakat yang mengatur tentang; *pertama*, usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan. *Kedua*, pelatihan teknologi tepat guna. *Ketiga*, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. *Keempat*, peningkatan kapasitas masyarakat.

Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan desa yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Desa tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian dikarenakan berdasarkan observasi terdahulu yang peneliti lakukan, Desa Sidokelar sempat vakum beberapa bulan setelah adanya penangkapan Kepala Desa yang terkena kasus korupsi. Kejadian ini membuat banyak masyarakat terpukul dan beberapa kegiatan masyarakat terganggu dengan adanya kasus tersebut. Pada tahun 2018 diadakan pemilihan Kades baru dan mulailah terlihat gelagat kebangkitan desa dan perkembangan kualitas SDM Desa yang dulunya aparat pemerintahan tidak memiliki gelar sarjana kini rata-rata sudah bergelar sarjana. Selain itu di Desa Sidokelar ada beberapa wisata alam dan bahari yang bisa meningkatkan perekonomian dan percepatan desa mandiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui transformasi pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Sidokelar setelah mati suri dan mengetahui kualitas SDM aparat pemerintahan dan masyarakat Desa Sidokelar dalam percepatan pembangunan Desa Mandiri. Berdasarkan fenomena dan tujuan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana transformasi pembangunan desa dalam rangka percepatan pencapaian desa mandiri di Desa Sidokelar? Bagaimana kualitas SDM aparat pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sidokelar dalam percepatan pembangunan desa mandiri?

KONDISI DESA SIDOKELAR

Secara umum letak geografis Desa Sidokelar memiliki luas wilayah kurang lebih 5,200 Ha. Dan bisa dibagi menjadi Dua karakteristik wilayah daratannya yaitu : Permukiman 2.820 Ha dan Pekarangan 2,380 Ha. Batasan wilayah administrasi Desa Sidokelar Kec. Paciran adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pesisir Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Desa Bluri/Desa Dagan Kecamatan Solokuro
- Sebelah Barat : Desa Kemantren Kecamatan Paciran
- Sebelah Timur : Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran

Desa Sidokelar. terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, 3 (Tiga) Rukun Warga (RW), dan 9 (Sembilan) Rukun Tetangga (RT). sedang kondisi Topografi Desa Sidokelar Kec. Paciran adalah dataran rendah.

Nama Desa	:	Sidokelar
I. Keadaan Geografis		
a. Letak astronomis	:	6.8761 LS - 112.4044 BT
b. Batas desa	:	Timur : Desa Tlogo Sadang Selatan : Kecamatan Solokuro Barat : Desa Kemantren Utara: Laut Jawa
c. Luas desa	:	3,14 Km ²
d. Ketinggian dari permukaan laut	:	11,00 M
II Penduduk, Sosial Budaya, Ekonomi dan kelembagaan		
a. Jumlah total penduduk	:	
- Jumlah Kepala Keluarga	:	614
- Laki-laki	:	589
- Perempuan	:	25
b. Pekerjaan	:	
- Nelayan	:	112
- Non Nelayan	:	662
c. Rumah tangga perikanan	:	16
d. Jenis alat tangkap	:	Gillnet dan Purse seine
III Aktivitas Pengelolaan Sumberdaya		
a. Pengolahan hasil perikanan	:	2

Desa Sidokelar memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan atau organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Sebagian besar masyarakat Desa Sidokelar mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya laut dengan menggunakan teknologi pertanian ala kadarnya dan alat tangkap perikanan seperti proses tanam tumpang sari dan jaring payang juga jaring jala, hal tersebut sebagai standar ukuran bahwa sumber daya alam yang ada di Desa Sidokelar berupa hasil pertanian (polowijo) dan hasil laut aneka jenis, seperti Ikan, cumi, rajungan, kerang, Siput Laut, dan tiram.

Beberapa indikator SDM Desa Sidokelar sebagai berikut:

1. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adat istiadatnya.
2. Adanya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
3. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan.
4. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bhakti masyarakat.
6. Besarnya sumberdaya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat menorong potensi industri rumah tangga.
7. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
8. Kemampuan Melaut yang diwariskan secara turun temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap RT.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Masyarakat Desa Sidokelar sebagian besar bekerja di sektor Pertanian dan Perikanan sangat tergantung dengan kondisi makro ekonomi secara global dan juga kebijakan pemerintah tentang regulasi sektor Nelayan, harapan warga Desa Sidokelar khususnya sektor Pertanian mengharapkan adanya kebijakan yang seimbang yang dibuat pemerintah terkait mahalnya operasional Pertanian yang tidak sebanding dengan harga hasil dari Pertanian itu sendiri yang menyebabkan terpuruknya perekonomian atau pendapatan perkapita warga Nelayan.

Berdasarkan harapan serta kebutuhan warga Desa Sidokelar yang tergambar pada analisa masalah maka pemerintah Desa Sidokelar berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perubahan-perubahan serta membuat kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil khususnya Pertanian dan Perikanan dengan cara melakukan penyusunan perencanaan pembangunan strategi Desa Sidokelar yang partisipatif.

Daftar peta permasalahan hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Sidokelar tahun 2019 yang menghadirkan masing-masing perwakilan RT dan RW yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan atau tidak terakomodasi. Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Dengan begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah disini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara makro dirasakan oleh masyarakat di Desa Sidokelar:

1. Sumber Daya Alam: Secara geografis SDA Desa Sidokelar masih bergantung dengan alam hal ini bisa dilihat dari berbagai tantangan pada musim ekstrim saat musim kemarau panjang untuk pertanian dan musim baratan bagi nelayan yang tidak berani melaut karena takut dengan angin yang terlalu kencang dan gelombang laut terlalu tinggi, hal inilah factor dominan penyebab (pailit atau pelaip) sehingga dibutuhkan Badan Usaha Milik Desa BUMDes untuk penanggulangan saat pelaip seperti itu.
2. Sumber Daya Manusia: Secara sumber daya manusia Desa Sidokelar lebih pada pengembangan SDM yang dipunyai dengan memperdayakan sumber daya pada masyarakat itu sendiri dalam penggunaannya dalam membantu pemerintah desa dan juga dalam membangun perkembangan desa.
3. Ekonomi: Secara ekonomi permasalahannya adalah pada terbatasnya lahan untuk aktifitas bercocok tanam karna tergusur oleh industrialisasi dan kebutuhan para nelayan yang belum adanya Pangkalan Pendaratan Ikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang memadai.
4. Pendidikan: Tingkat pendidikan di Desa Sidokelar pada taraf sedang tapi masih banyak juga masyarakat desa yang berpendidikan di bawah wajib belajar sembilan tahun karena berbagai faktor yang menjadikan itu terjadi, diantaranya adalah kurang mampunya keluarga dalam membiayai pendidikan anak-anaknya dan mindset masyarakat yang menganggap pendidikan perempuan tidak begitu penting bagi keberlangsungan hidup dalam berumah tangga.
5. Kesehatan Lingkungan: Lingkungan kesehatan Desa Sidokelar ada sebagian kecil yang belum memenuhi angka minimal kesehatan lingkungan walau sebagian warga sudah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan masing-masing tapi masih ada juga beberapa rumah penduduk yang belum punya jamban dan belum adanya tempat septic tank.
6. Politik, Sosial dan Budaya: Kondisi politik sosial dan budaya pada Desa Sidokelar tidak ada persoalan yang hingga dapat menimbulkan masalah.
7. Kelembagaan atau Organisasi: Kelembagaan dan organisasi pada Desa Sidokelar juga tidak ada persoalan yang hingga dapat menimbulkan masalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2015:6) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian

misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah menggunakan cara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, angket dan dokumentasi, yang mana data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik penarikan informan menggunakan teknik *purposive* berdasarkan kriteria. Semua data dilihat validitas datanya menggunakan teknik triangulasi sumber dan data, serta dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi dan aset-aset alam yang berada didalamnya. Hal ini bisa terwujud beriringan dengan pengoptimalan kualitas dan kinerja sumber daya manusia di dalam Desa Sidokelar. Ketika desa terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, maka desa hanya memelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan keseimbangan alam dapat terlestarikan, sementara orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang. Cara desa dalam menjaga aset ekonomi ini berbalikan dengan model pemerintah yang bersifat ekstraktif karena menyerahkan pengelolaan alam kepada sektor privat dari pada mengutamakan *shareholder* di tingkat komunitas lokal. Sementara lingkungan kelembagaan ekonomi desa yang lebih inklusif malah tidak menjadi referensi model pengembangan ekonomi lokal.

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan desa tidak bisa berjalan sendiri, ada BPD, BumDes, LKM, dan pendamping Desa Sidokelar yang berkerja secara beriringan meningkatkan kualitas SDA dan SDM desa. Penentuan program pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) harus bekerjasama dan saling membantu untuk menyusun sebuah program pembangunan yang memiliki orientasi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan tersebut menjadi upaya untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran pembangunan sumber daya manusia. Pemilihan pokok-pokok pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penetapan sebuah kebijakan sebagai salah satu upayah untuk memberdayakan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan dapat menjadi masyarakat yang mandiri.

Hal tersebut nyatanya berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di Desa Sidokelar, pemerintah desa belum sepenuhnya fokus dalam upaya meningkatkan kualitas SDM baik dari aparat pemerintahan desa maupun masyarakat desa yang memiliki potensi dalam pengembangan SDA Desa Sidokelar. Selain itu LPMD masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa mulai dari pembangunan PDAM, tempat pembuangan akhir sampah, drainase di setiap dusun, dan perluasan jalan raya. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan LPMD yang seharusnya dapat memberikan sesuatu untuk perubahan kehidupan masyarakat, namun nyatanya masih terlalu fokus terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur jalan desa. Dalam urusan pemberdayaan masyarakat pihak Desa Sidokelar sendiri melakukan kerja sama dengan Ulama Masyarakat, Ibu-ibu PKK dan Pemuda Karangtaruna. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidokelar dan perwakilan masyarakat yang mewakili masing-masing bidang yang ada di Desa Sidokelar. Kerja sama dengan pihak luar seperti perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar wilayah Desa Sidokelar dalam

pengembangan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat Desa Sidokelar berupa pelatihan-pelatihan mulai dari pencegahan stunting, penguasaan Bahasa Inggris, pengelasan.

Dalam rapat untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan menghasilkan sebuah kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada rapat tersebut adalah:

- Meningkatkan kualitas pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan kuliitan SDM Aparat desa dilakukan dalam bidang pendidikan.
- Memberdayakan ibu-ibu PKK dan karangtaruna untuk membuat kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- Pelatihan merawat jenazah.
- Pelatihan pembuatan kuliner khas Sidokelar.
- Pelatihan keterampilan yang dikhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga.
- Pelatihan jasa boga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	0	0
Kurang Setuju	10	55,6
Setuju	7	38,9
Sangat Setuju	1	5,6
Total	18	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa SDM Desa Sidokelar dari mulai perangkat desa hingga perwakilan dari Bumdes dan BPD masih kurang terpenuhi dengan baik. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dan kinerja yang kurang maksimal.

Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berada di perdesaan yang mayoritas secara pendidikan masih rendah, maka diperlukan peran pemerintah desa yang mengarahkan kegiatan di perdesaan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas dari masyarakat desa. Sosialisasi pentingnya pendidikan anak sejak usia dini sudah mulai diterapkan pemerintahan Desa Sidokelar dengan mendirikan Satuan Pendidikan Sejenis Anak Usia Dini Taman Posyandu Kuncup Melati (SPS Tapos Kuncup Melati) di balai Desa sebagai satu langkah awal untuk meningkatkan kualitas SDM Desa Sidokelar.

Dengan demikian desa dituntut untuk menjalankan pembangunan yang sifatnya membangun sumber daya manusia yang berada di desa, bukan hanya terfokus dalam pembagunan fisik (pemavingan jalan desa), artinya pembangunan fisik dan non fisik harus dapat berjalan dengan seimbang. Pembangunan di perdesaan yang mayoritas masyarakatnya secara pendidikan rendah dan secara ekonomi masih relatif miskin, kemudian desa tersebut mengutamakan pembangunan fisik maka yang terjadi dapat menimbulkan permasalahan baru yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial. Karena dengan pembangunan fisik tersebut yang berpeluang untuk memanfaatkannya untuk membuat usaha adalah orang yang secara pendidikan dan ekonomi keluarga dianggap mampu untuk melakukan usaha tersebut. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang secara pendidikan dan pereknomianya masih rendah?

Dengan hal ini masyarakat yang memiliki pendidikan dan ekonomi rendah cenderung tidak dapat berkembang atau meningkatkan kualitas hidup mereka, karena kalah saing dengan mereka yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan yang cukup dan perekonomian yang mumpuni dan stabil. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka pembangunan di perdesaan harus berjalan dengan seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan non fisik atau biasa yang disebut dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan beberapa kegiatan yang sudah sesuai dengan Pemendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, namun hal tersebut dinilai masih kurang karena hanya beberapa kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan sumber daya manusia di Desa Sidokelar.

Dalam bagian kedua Pasal 06 Ayat 05 Pemendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, diatur mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia dalam poin pemberdayaan masyarakat yang mengatur tentang; Pertama Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, Kedua Pelatihan teknologi tepat guna, Ketiga Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, keempat Peningkatan kapasitas masyarakat kader pemberdayaan masyarakat desa. Melihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan di desa Sidokelar sudah beberapa yang sudah dilakukan dalam peningkatan pengetahuan dan kerukunan. Namun kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum terlihat.

Tabel 2. Sarana Prasarana Penunjang Sumber Daya Manusia

Pernyataan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Tidak Setuju	0	0
Tidak Setuju	11	61,1
Kurang Setuju	5	27,8
Setuju	2	11,1
Sangat Setuju	0	0
Total	18	100

Pembangunan yang seharusnya dilakukan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia atau paling tidak pembangunan fisik dan non fisik harusnya dapat berjalan beriringan, mengingat kualitas masyarakat yang ada di Desa Sidokelar mayoritas secara pendidikan dan ekonomi masih menengah ke bawah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik.

Dalam pembahasan yang peneliti uraikan juga kami mengacu atau membuat perbandingan pembangunan sumber daya manusia yang terjadi di Desa Sidokelar dengan para ahli untuk menjawab permasalahan yang ada, dalam pembahasan ini peneliti memperkuat argument pembangunan sumber daya manusia menurut Sunyoto. Menurut Sunyoto (2004:40) kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekalius politik). Pembangunan masyarakat Desa terpadu hal yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk perdesaan serta memperkuat kemandirian. Terdapat empat elemen dasar dalam program pembangunan diantaranya adalah (a) Pembangunan pertanian, (b) Industri perdesaan, (c) Pembangunan masyarakat desa dan (d) strategi pusat pertumbuhan.

Implikasi Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan dari pembangunan kualitas sumber daya manusia di pedesaan ini menurut Khairudin (1992: 68) mengatakan “tujuan atau hasil pembangunan di pedesaan lebih sering ditekankan pada bidang ekonomi, sebab kondisi ekonomi pada umumnya sangat memperhatikan, oleh sebab itu, tujuan jangka pendek lebih diarahkan pada peningkatan pada taraf hidup masyarakat”. Adanya tujuan tersebut maka kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan maupun masyarakat Sidokelar dengan menciptakan hasil untuk peningkatan taraf hidup seperti:

- a) **Memperlancar Sarana Hubungan dan Komunikasi.** Memperlancar sarana hubungan dan komunikasi ini diharapkan dapat lebih membuka desa terhadap daerah sekitarnya sehingga tidak menjadi daerah yang tertinggal. Dengan terjadinya komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pihak desa dan juga pihak pemerintah yang ada di atasnya dan juga dengan desa yang ada disekitarnya menjadi hal yang membantu desa tersebut untuk tidak tertinggal. Desa Sidokelar juga selalu menjaga komunikasi yang baik, baik komunikasi kepada pemerintah yang ada di atasnya dan juga kepada desa yang ada disekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang melibatkan pemerintah yang ada di atasnya dan tugas pemerintah sekitar desa.
- b) **Meningkatkan dan Menyempurnakan Struktur.** Organisasi Hasil pelaksanaan pelatihan–pelatihan yang diikuti oleh pemerintah desa diharapkan mampu untuk memperbaiki kinerja pemerintah desa untuk melayani masyarakat desa karena secara umum pemerintah desa adalah yang paling dekat dengan masyarakatnya. Beberapa kegiatan berupa pelatihan yang diikuti desa ini namun prosesnya masih sangat lambat karena beberapa aparturnya masih belum fokus pada tugas pokok serta kurangnya sarana dan prasarana Desa Sidokelar.
- c) **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.** Dalam peningkatan pendidikan Desa Sidokelar mulai berbenah untuk menciptakan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pada tahun 2018 lalu Desa Sidokelar mendirikan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) Taman Posyandu yang peserta didiknya mulai usia satu tahun hingga tiga tahun. Pendidikan ini berupa bermain bersama, bernyanyi, dan pendidikan karakter maupun latihan sebelum masuk pada Pendidikan anak Usia Dini (PAUD). Hasil pembangunan masyarakat desa harusnya lebih ditekankan kepada peningkatan perekonomian masyarakat, karena dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka kesejahteraan sosial dapat terwujud mengingat di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang mampu di bidang ekonomi. Hasil dari pembangunan sumber daya manusia di pedesaan haruslah ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila kriteria di atas terpenuhi maka terciptalah desa mandiri.
- d) **Pengembangan Teknologi.** Melihat dari perubahan jaman yang cukup pesat, di era modern saat ini semua kegiatan menggunakan teknologi, untuk itu masyarakat di pedesaan supaya tidak tertinggal dengan masyarakat kota, maka kegiatan pembangunan sumber daya manusia juga harus mengacu masalah teknologi. Desa Sidokelar melakukan pemasangan wifi di kantor desa membuat masyarakat desa dapat mengakses dan menggunakan internet, secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa mengenai dunia internet. Pada dasarnya dalam tercapainya tujuan dari pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari faktor yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia. Faktor yang mendorong pembangunan sumber daya manusia terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini faktor internal dan eksternal yang mendorong dalam pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;

A. Strategi Pencapaian Tujuan

Sebuah misi dan tujuan dalam sebuah organisasi mungkin saja bisa sama dengan organisasi yang lainnya, namun untuk urusan strategi untuk mencapai sebuah misi dan tujuan organisasi tersebut dapat berbeda, karena setiap organisasi memiliki kemampuan dan cara tersendiri untuk mencapai sebuah misi dan tujuan tersebut. Dalam strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidokelar untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia melakukan kerja sama dengan BPD, BumDes, Ibu-ibu PKK, Pemuda Karangtaruna dan juga Tokoh Ulama masyarakat desa, kader posyandu dan kesehatan, serta pendamping desa. Dalam hal ini pemerintah desa memberdayakan masyarakat untuk melakukan kegiatan dan untuk masyarakat juga. Dengan adanya pendanaan untuk melakukan kegiatan, maka dengan demikian masyarakat yang diberi amanah oleh pemerintah desa secara tidak langsung dapat mengembangkan kemampuannya.

B. Kegiatan Yang Menjadi Kebutuhan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sifat dan jenis kegiatan sangat penting untuk mendorong terjadinya proses pembangunan sumber daya manusia. Di desa Sidokelar sendiri sifat dan jenis kegiatan untuk membangun sumber daya manusia telah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terdapat tiga sifat dan jenis kegiatan yang mendorong pembangunan sumber daya manusia di Desa Sidokelar, berikut ini penjelasannya;

a) Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin di Desa Sidokelar ini dapat meningkatkan partisipasi yang tinggi terhadap kegiatan yang dilakukan atau yang di jalankan oleh pemerintah desa dalam rangka mengembangkan masyarakat desa. Kegiatan rutin yang dimaksud disini adalah Pertama kegiatan posyandu dan posbindu yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Kedua kegiatan olahraga mulai dari sepakbola, bola voly, senam ibu-ibu, Ketiga kegiatan perlombaan yang selalu rutin diadakan setiap saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Empat kegiatan pendidikan anak.

b) Kegiatan yang menjadi kebutuhan

Dalam hal ini kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat menjadi hal yang paling banyak mengundang partisipasi masyarakat, karena dengan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut secara tidak langsung mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah Pertama Kegiatan yang meningkatkan kualitas masyarakat seperti pelatihan dan penyuluhan, Kedua Kegiatan yang dapat meningkatkan pendidikan anak (Pendidikan TK, PAUD, Taman Posyandu dan Posbindu) Ketiga Kegiatan yang dapat meningkatkan atau menjaga kesehatan masyarakat.

c) Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan untuk dapat terlaksananya suatu kegiatan yang ditujukan terhadap masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi masyarakat di Desa Sidokelar sendiri sudah cukup bagus hal tersebut terbukti dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa dengan dihadiri atau terlibatnya masyarakat dalam kegiatan tersebut.

d) Pendanaan Kegiatan

Dalam suatu kegiatan pendanaan menjadi hal yang utama untuk selalu diperhatikan, tanpa adanya dana maka suatu kegiatan akan sulit untuk dapat teraksana mengingat suatu hal membutuhkan pembiayaan. Di Desa Sidokelar sendiri juga memberikan pendanaan kepada masing-masing pelaksana kegiatan untuk dapat menjalankan suatu kegiatan.

e) **Kerjasama Dengan Pihak Lain.**

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan maka suatu organisasi bisa melakukan kerjasama atau bantuan dari pihak lainnya, pihak lain bisa berupa pemerintah yang ada di atasnya, lembaga yang terdapat di dalam atau di luar pemerintahan tokoh masyarakat dan lain-lain. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya manusia pihak pemerintah desa juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mewujudkan pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidokelar sendiri bekerjasama dengan Puskesmas dalam bidang kesehatan, bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang berdomisili di Desa Sidokelar dalam bidang pengembangan dan pembangunan SDM, bekerjasama dengan lembaga pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa potensi Desa Sidokelar baik dalam bidang sumber daya alam, sumber daya manusia dan calon wisata baru sudah memadai tinggal penyatuan antara bidang satu dengan bidang lain. Kinerja SDM baik dari aparat pemerintahan desa maupun masyarakat umum dalam pengelolaan SDA dan calon wisata sangat dibutuhkan kesungguhan penanganan sehingga mempercepat pembangunan desa mandiri. Peningkatan kualitas SDM sudah mulai dilakukan terutama dalam bidang pendidikan, namun berpendidikan saja tidak cukup jika kinerja SDM tidak ditingkatkan. Pemerintah desa sangat berperan dalam meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa maupun masyarakat umum, dengan adanya peningkatan di bidang pendidikan maka aparat pemerintahan desa bisa mengembangkan potensi Desa Sidokelar dan melalui beberapa pelatihan maka masyarakat Desa Sidokelar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya dan SDA yang sudah tersedia.

SARAN

Pemerintah Desa Sidokelar, hendaknya melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam rangka untuk melakukan kegiatan yang dapat membangun sumber daya manusia di Desa Sidokelar. Aparatur Desa Sidokelar juga sebaiknya melakukan kegiatan pembangunan yang seimbang antar pembangunan fisik dan non fisik supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat. Kemudian untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di desa tungkulrejo pemerintah desa juga sebaiknya melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti halnya pelatihan di bidang pertanian, pelatihan untuk industri perikanan, pemanfaatan pasar desa dan pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang positif terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada Bapak Muh. Saiful Bahri dan Ibu Shofiyah, S.Ag selaku Kepala Desa Sidokelar yang memberikan izin dan kesempatan melakukan penelitian di wilayah Desa Sidokelar.
2. Kepada aparat pemerintahan Desa Sidokelar, BPD, Bumdes, dan pendamping desa yang berkenan memberikan ilmu dan pengalamannya serta bersedia memberikan data dan argumentasinya dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Kepada Bapak Dr. Imam Azhar, M.Pd. selaku rektor IAI TABAH Lamongan yang memberikan motivasi dalam pelaksanaan penelitian ini.
4. Kepada seluruh rekan Dosen IAI TABAH Lamongan dan civitasnya yang memberikan bantuan doa dalam penyelesaian penelitian ini.

5. Kepada suami dan orang tua yang penulis kasihi dengan sepenuh hati, terima kasih atas doa dan motivasinya yang tiada henti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Sholichin, Wahab. 2016. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- H, Khairudin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberti Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Undang-Undang No 06 tahun 2014 tentang DesaMandiri
- RKPDDes Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2019
- Hasil Musrenbangdes Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2019
- RPJM-Desa Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 2019



PENGEMBANGAN EDUWISATA KANOMAN FAMILY STRENGTH (KFS) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI DESA CAMPUREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Indah Fajrotuz Zahro¹ Nur Laila Rahmawati²

^{1,2}STAI Attanwir Bojonegoro

Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro 62191 Telp/Fax. (0353) 331610

ABSTRAK

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu negara dan merupakan embrio dalam pembangunan bangsa. Keluarga dapat membentuk manusia visioner yang memiliki wawasan masa depan serta memiliki pemikiran untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan terutama dalam masyarakat. Kanoman merupakan salah satu usaha BUMDes di Desa Campurejo Bojonegoro. Kanoman berarti penduduk asli yang bertugas mengurus desa. Desa Campurejo adalah salah satu desa di Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro. Penduduk desa Campurejo bersifat heterogen dan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Hal tersebut berkorelasi dengan peran keluarga. Banyak strategi yang dapat dipakai untuk menguatkan peran keluarga tetapi membutuhkan strategi dalam penerapannya di kehidupan keluarga. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan Eduwisata *Kanoman Family Strength* (KFS) untuk meningkatkan kualitas keluarga khususnya di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro dengan memanfaatkan karakter positif penduduk asli desa Campurejo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (*Research & Development*) mengacu pada model ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate*). Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui hasil FGD dan hasil observasi, sedangkan data kuantitatif yang dikumpulkan melalui penyebaran instrumen model Eduwisata *Kanoman Family Strength* (KFS) dan hasil observasi dianalisa dengan menggunakan uji statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Model Eduwisata *Kanoman Family Strength* (KFS) yang menjadi acuan dalam penguatan kualitas keluarga dalam bentuk pemaparan materi tentang penguatan keluarga, permainan edukasi keluarga, wisata edukasi keluarga dan juga evaluasi bersama keluarga .2) Pengembangan model Eduwisata *Kanoman Family Strength* (KFS) memiliki efektifitas yang sangat baik di dalam peningkatan kualitas keluarga di Desa Campurejo kabupaten bojonegoro.

Kata Kunci: Pengembangan, Eduwisata *Kanoman Family Strength* (KFS), penguatan keluarga

ABSTRACT

Family is the smallest institution in a country and is an embryo in nation building. Families can form visionary people who have insight into the future and have thoughts to advance and prosper life, especially in society. Kanoman is one of the BUMDes businesses in Campurejo Bojonegoro Village. Kanoman means the native people in charge of managing the village. Campurejo Village is one of the villages in the District of Bojonegoro. The population of Campurejo village is heterogeneous and the level of secondary education is lower. This correlates with family roles. Many strategies can be used to strengthen the role of the family but require a strategy in its application in family life. Therefore, researchers developed Eduwisata Kanoman Family Strength (KFS) to improve family quality, especially in the village of Campurejo, Bojonegoro Regency by utilizing the positive character of the native inhabitants of the village of Campurejo. The type of research used is development research (Research & Development) referring to the ADDIE model (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Data analysis uses quantitative and qualitative methods. Qualitative data was obtained through the results of the FGD and observations, while the quantitative data were collected through distributing questionnaires on the Edu tourism model of Kanoman Family Strength (KFS) and the results of observations analyzed using descriptive statistical tests. The results of this study are: 1) Educator Model Kanoman Family Strength (KFS) which is a reference in strengthening family quality in the form of material presentation on family strengthening, family education games, family education

tours and family evaluations. 2) Eduwisata Kanoman model development Family Strength (KFS) has very good effectiveness in improving family quality in Campurejo Village, Bojonegoro Regency.

Keywords: Development, Educator Kanoman Family Strength (KFS), family strengthening

PENDAHULUAN

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu negara dan merupakan embrio dalam pembangunan bangsa. Keluarga dapat membentuk manusia visioner yang memiliki wawasan masa depan serta memiliki pemikiran untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan terutama dalam masyarakat. Menurut Mattessich dan Hill (dalam Puspitawati, 2013), keluarga merupakan suatu kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan emosional sangat dekat yang menunjukkan empat hal yakni adanya interdependensi intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu, dan melakukan tugas-tugas keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua anggota keluarganya.

Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasar atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (Landis 1989; BKKBN 1992 dalam Puspitawati H, 2013). Keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga.

WHO menyebutkan terdapat beberapa fungsi keluarga (Ratnasari dalam Husaini W, 2017), yaitu a). Fungsi Biologis meliputi: fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga; b). Fungsi Psikologi meliputi : fungsi dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga; c). Fungsi Sosialisasi meliputi: fungsi dalam membina sosialisasi pada anak, meneruskan nilai-nilai keluarga, dan membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak; d). Fungsi Ekonomi meliputi: fungsi dalam mencari sumber-sumber penghasilan, mengatur dalam penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang; e). Fungsi Pendidikan meliputi: fungsi dalam mendidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya, menyekolahkan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, serta mempersiapkan anak dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa untuk kehidupan dewasa di masa yang akan datang. Keluarga yang mampu menerapkan fungsi-fungsi tersebut dapat mewujudkan ketahanan dalam keluarganya.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU Nomor 10/1992 dalam Puspitawati H, 2013). Chapman (dalam Puspitawati H, 2013) menyebutkan terdapat lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu a) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan; b) Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik; c)

Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan; d) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan; e) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis (*The National Network for Family Resilience* dalam Puspitawati H, 2013). Ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, strategi *coping* dan appraisal. Ketahanan keluarga (*family resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga (McCubbin et al. dalam Puspitawati H, 2012).

Martinez et al (dalam Puspitawati H, 2012) menambahkan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah: a). Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal; b). Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya; c). Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup; d). Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan. e). Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya, dan; f). Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

Keluarga sebagai satu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/ kerentanan yang berasal dari kekuatan dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan. Namun, kenyataannya masih banyak keluarga yang belum dapat menerapkan fungsi-fungsi dalam keluarganya dengan berbagai faktor dan pada akhirnya menyebabkan munculnya gangguan/ ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi dan lingkungan bahkan terjadinya perceraian.

Di Bojonegoro, angka perceraian dalam kurun waktu 11 bulan pada tahun 2018 terdapat lebih dari 2000 kasus. Data yang terhimpun blokBojonegoro.com menyebut, perbulan kasus perceraian rata-rata sekitar 200 lebih. Jika ditotal selama sebelas bulan cerai talak ada 892 dan gugat 1819 kasus. Total semua perkara dari berbagai jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama mencapai 3031. Menurut Sholikin, banyaknya kasus perceraian itu dilatarbelakangi beberapa faktor, di antaranya adalah ketidakcocokan, masalah ekonomi, karena ada orang ketiga, media sosial dan lainnya (Blok Bojonegoro).

Campurejo adalah salah satu desa di Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro. Penduduk Desa Campurejo adalah masyarakat yang heterogen. Di Desa Campurejo terdapat kedai yang menggunakan dana desa dalam pembangunan kedai tersebut. Kedai tersebut dikelola oleh BUMDes Desa Campurejo, yakni BUMDes Wiraguna. Kepala Desa Campurejo, Bapak Edi Sampurno, S. Sos menyatakan bahwa pembangunan kedai tersebut memerlukan dana desa sebesar

50 juta dan mendapat dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) untuk membangun fasilitas kedai dan gazebo. Menurut salah satu perangkat Desa Campurejo, Mustopo, S. Pd, keberadaan Kanoman dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung terutama keluarga karena lingkungan yang luas, aman dan nyaman bagi tempat bermain anak-anak. Berdasarkan keterangan tersebut, Kanoman dinilai memiliki potensi yang menarik untuk kegiatan keluarga dan mengelolanya menjadi tempat bermain sekaligus pembelajaran bagi keluarga agar cita-cita membangun ketahanan keluarga yang kuat dan stabil dapat terwujud.

Ketahanan keluarga merupakan aspek dasar dalam menghadapi berbagai permasalahan dan pengaruh baik internal maupun eksternal. Kuatnya ketahanan dalam keluarga, maka anggota keluarga akan terhindar dari ketegangan, konflik bahkan perceraian sehingga fungsi keluarga dapat berjalan sebagaimana mestinya hingga tercapai tujuan dibangunnya keluarga dimana setiap individu dapat beraktualisasi untuk mengembangkan potensi pribadi secara optimal.

Dibutuhkan beberapa upaya untuk dapat mewujudkan ketahanan keluarga. Y Pusparini pada tahun 2010 melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ketahanan keluarga di Bekasi dalam menghadapi perubahan masyarakat dan merumuskan strategi peningkatan ketahanan keluarga dengan mengambil sampel populasi di Desa Setia Mekar sejumlah 100 orang dengan teknik random sampling. Analisa data dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan keluarga dalam kategori harmonis saat terjadi perubahan sosial, namun terdapat potensi ancaman terjadinya konflik dalam keluarga dan terwujudnya satu konsep tentang strategi peningkatan ketahanan keluarga dalam upaya mendukung tercapainya ketahanan wilayah, sehingga pengaruh yang datang tidak mengganggu tetapi justru menciptakan kreatifitas dalam mengantisipasinya. Penelitian selanjutnya dari Rohaeni N, dkk tahun 2018. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Model Pendidikan Kehidupan Keluarga berbasis *Life Skill* dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Research and Development*. Nilai tambah dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya model *Kanoman Family Strenght* (KFS) sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga dengan menambahkan aspek ketahanan dan fungsi keluarga yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan.

Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh akademisi perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi adalah dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk riset dan pendampingan masyarakat, terlebih lagi bagi PTKIS maka peran yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan misi-misi keislaman dalam pelaksanaan pengabdianannya (Laila, dkk, 2019). Tujuan dari pelaksanaan pengembangan ini adalah untuk mengembangkan eduwisata *Kanoman Family Strenght* (KFS) dengan menyusun desain materi dan produk yang menarik bagi keluarga khususnya bagi keluarga di Bojonegoro sehingga kualitas keluarga dapat terwujud dan usaha BUMDes Kanoman dapat meningkat pendapatannya dengan meningkatnya jumlah pengunjung di Kanoman Campurejo Bojonegoro.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Jenis, Model dan Prosedur Pengembangan

Penelitian dengan judul Pengembangan eduwisata *Kanoman Family Strength* (KFS) untuk meningkatkan kualitas keluarga di desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro ini adalah jenis penelitian pengembangan yakni suatu penelitian yang menghasilkan produk tertentu, dan menguji kevalidan produk tersebut (Sugiyono, 2013: 407). Model pengembangan dari penelitian ini adalah model ADDIE yang meliputi: *analyze, design, develop, implement, evaluate* (Branch, Robert

Maribe: 2009: 2). Model ini dipilih dengan pertimbangan lebih sederhana dibandingkan dengan model-model yang lainnya. Selain itu model ini meliputi langkah-langkah yang jelas.

Prosedur pengembangan dengan model ADDIE ini meliputi tahapan-tahapan: *analyze, design, develop, implement, evaluate*. Secara rinci, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Analyze*, pada tahap ini peneliti melakukan kajian *need analysis* melalui kegiatan observasi dan wawancara terkait dengan pentingnya dikembangkan Eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro baik meliputi faktor masalah, maupun potensi yang mendukung kemungkinan dikembangkannya eduwisata tersebut.
2. *Design*, yakni pembatasan permasalahan sesuai yang dibutuhkan di lapangan seperti tujuan pembelajaran, isi bahan ajar, model penyajian materi, latihan atau evaluasi. Untuk kepentingan desain ini peneliti mengembangkan instrumen pengembangan dengan berdasarkan pada rambu-rambu pengembangan dan langkah-langkah model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)*.
3. *Develop*, proses mewujudkan model dalam bentuk prototipe. Pada tahapan ini peneliti meminta validasi dari pakar atau orang berkompeten di bidangnya, yakni pakar materi model eduwisata Arik Irawati, M.Psi. dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan pakar desain model eduwisata Eyrul Mufidah, M.Pd dosen Jurusan Ekonomi Syariah. Keduanya dari STAI Attanwir Bojonegoro. Kemudian melakukan revisi sesuai kebutuhan.
4. *Implement*, pada tahapan ini dilakukan ujicoba atau tanggapan dari produk yang telah dikembangkan pada perorangan dalam hal ini tanggapan 20 warga desa Campurejo, agar produk yang telah disusun peneliti dicermati baik dari segi materi dan desain model eduwisata. Kemudian dilakukan revisi sesuai dengan masukan yang ada.
5. *Evaluate*, pada tahapan ini dilakukan evaluasi dari pakar untuk yang kedua kalinya setelah adanya perbaikan produk dari peneliti. Setelah itu dilakukan revisi sesuai dengan masukan yang ada.

Data dan Sumber Data

Jenis data meliputi data kuantitatif yang disebarkan kepada subjek uji coba melalui angket, sedangkan data kualitatif berupa tanggapan dan saran-saran perbaikan yang diperoleh dari saran atau komentar baik secara tertulis maupun lisan melalui wawancara.

Sumber data dari penelitian dengan judul Pengembangan Eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro ini adalah:

1. *Paper*, yang berupa buku-buku yang memuat teori-teori yang dijadikan landasan aplikasi pembelajaran
2. *Person*, yang terdiri dari *expert*/ahli dalam hal ini pakar materi eduwisata, pakar bahasa dan pakar desain, serta sasaran uji coba yakni warga Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro baik secara perorangan, kelompok kecil dan kelompok besar.

Instrumen Pengumpul Data dan Teknik Analisis Data

Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data untuk mendesain pengembangan Eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro adalah melalui angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengelola data dari penelitian ini, yaitu dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan keluarga dan pariwisata merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling bersinergi dan saling melengkapi. Proses pendidikan keluarga yang dilaksanakan dalam aktivitas wisata merupakan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif, serta merupakan alternatif metode belajar yang efektif untuk meningkatkan kualitas keluarga. Aktivitas eduwisata dapat menjadi sarana bersosialisasi dan menumbuhkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Eduwisata merupakan aktivitas pariwisata yang dilakukan wisatawan dan bertujuan utama memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, pariwisata berhubungan erat dengan mata pelajaran akademis, seperti geografi, ekonomi, sejarah, bahasa, psikologi, pemasaran, bisnis, hukum, dan sebagainya.

Jafari & Ritchie (1981) mengemukakan aktivitas eduwisata meliputi; konferensi, penelitian, pertukaran pelajar nasional dan internasional, kunjungan sekolah, sekolah bahasa, dan wisata studi, yang diorganisasi baik secara formal maupun nonformal, dengan tujuan wisata alam maupun buatan. Sedangkan Cohen (2008) mengemukakan aktivitas wisata studi, meliputi pembelajaran tentang sejarah, geografi, bahasa, agama, dan budaya, melalui kunjungan situs penting, keterlibatan dalam penelitian, maupun konferensi. Tujuan utama eduwisata yakni pendidikan dan penelitian, sehingga sekolah atau perguruan tinggi dan situs sejarah menjadi destinasi utama dalam eduwisata (Wang dan Li, 2008 dalam Wijayanti, 2017b). Sebagian besar wisatawan edukasi terdiri dari mahasiswa dan pelajar yang memanfaatkan waktu liburan untuk jalan-jalan dan mendapatkan pengetahuan. Pada konteks pengertian sederhana eduwisata adalah upaya meningkatnya pengetahuan baru melalui kegiatan wisata. Motivasi wisatawan dalam bereduwisata dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: faktor daya tarik destinasi dan faktor pendorong dari daerah asal.

Hasil pengembangan Pengembangan Eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut.

Analyze

Langkah pertama dalam pengembangan bahan ajar adalah analisis kebutuhan untuk memperoleh informasi awal. Untuk mencapai hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, perangkat dan warga Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro. Hasil wawancara tersebut menghasilkan beberapa jawaban untuk dijadikan informasi awal peneliti, diantaranya:

1. Segi fasilitas, Kanoman merupakan aset desa yang awalnya dikembangkan untuk taman warga beserta wisata kuliner .
2. Segi kualitas keluarga, warga desa Campurejo perlu adanya peningkatan dalam hal teori atau implementasi langsung.
3. Segi fungsi keluarga, diketahui bahwa rata-rata fungsi yang ingin dicapai dalam keluarga berkisar dalam fungsi biologis, ekonomi dan pendidikan. Sedangkan untuk fungsi keluarga dalam hal psikologi dan sosial masih tergolong kurang.
4. Segi potensi, Kanoman memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka sebelum mendesain model eduwisata peneliti harus mengobservasi beberapa rujukan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus menentukan dasar yang kembangkan disesuaikan dengan kebutuhan warga Desa Campurejo.

Design

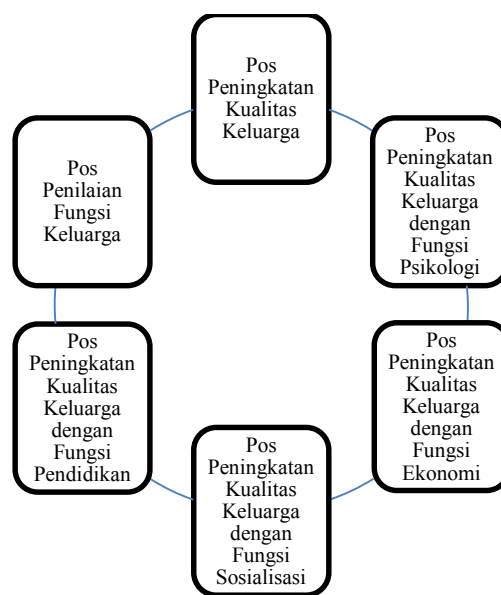
Setelah melakukan analisis kebutuhan dan memperoleh informasi yang cukup serta penentuan dasar yang kembangkan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah

mendesain model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)*. Langkah ini dimulai oleh peneliti dengan membatasi masalah-masalah yang sesuai di lapangan seperti tujuan peningkatan keluarga atau kompetensi dasar, model edukasi keluarga, model wisata keluarga, model penyampaian materi-materi serta latihan-latihan atau evaluasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga.

Langkah selanjutnya adalah peneliti mengembangkan instrumen evaluasi. Instrumen yang berhubungan dengan peningkatan kualitas keluarga yaitu pos-pos eduwisata, sedangkan instrumen yang berhubungan dengan desain fungsi keluarga adalah angket.

Develop

Peneliti dalam tahap ini melaksanakan penulisan bahan ajar sekaligus mendesainnya. Hasilnya adalah model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* dengan spesifikasi sebagai berikut.



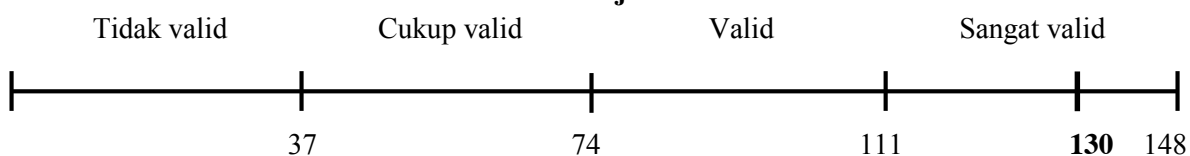
1. Pos Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Fungsi Biologis berupa pemaparan materi tentang perawatan tubuh anggota keluarga, peningkatan gizi dan nutrisi serta paparan materi-materi tentang kesehatan fisik;
2. Pos Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Fungsi Psikologi berupa pemaparan materi tentang menjaga kestabilan psikologis anggota keluarga, kontrol diri, membentuk kepribadian dan identitas anggota keluarga secara sehat mental;
3. Pos Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Fungsi Ekonomi berupa pemaparan materi tentang meningkatkan *income* keluarga dengan berwirausaha dan pembuatan hasil kreasi keluarga seperti sulam, kerajinan dari pelepah pisang, dan sebagainya. Di pos ini juga diberikan edukasi tentang pengaturan keuangan dan menabung;
4. Pos Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Fungsi Sosialisasi berupa pemaparan tentang cara membina sosialisasi pada anak sesuai dengan tahapan perkembangan dan nilai norma yang berlaku di masyarakat, Selain itu juga ada permainan rekreatif kelompok berupa outbound
5. Pos Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Fungsi Pendidikan berupa pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga, upaya mengetahui kecerdasan dan gaya belajar pada setiap anak, melatih ketrampilan baru pada anak sesuai dengan bakat dan minat.
6. Pos Penilaian Fungsi Keluarga

Di setiap pos disediakan media untuk memudahkan anggota keluarga memahami materi yang disampaikan, seperti penggunaan kartu ekspresi emosi, boneka jari (*finger doll*) dan berbagai permainan bermain peran. Kartu ekspresi emosi merupakan upaya stimulasi aspek perkembangan sosial emosional untuk mengembangkan penguasaan kecakapan emosional dan kecakapan sosial perlu dilakukan sebagai upaya memunculkan pemahaman emosi yang lebih baik, berkembangnya kesadaran diri yang positif, pembentukan jati diri sehingga dapat menjalin relasi positif dengan orang-orang di sekitarnya (Zahro, 2017).

Selain kartu ekspresi emosi untuk melatih empati, juga disediakan media berupa boneka jari (*finger doll*) pada saat bercerita (*story telling*) untuk melatih perilaku prososial anak. Melalui bercerita dengan boneka jari, anak akan belajar mengetahui perasaan diri dan perasaan orang lain yang sedang dilakoninya sesuai dengan tema cerita yang diceritakan (Zahro, 2018). Pada pos ketiga peningkatan kualitas keluarga dengan fungsi sosialisasi dengan melatih komunikasi melalui bermain peran. Bermain peran dapat mengoptimalkan kecerdasan berbahasa anak-anak dan perkembangan bahasa yang sesuai dengan tahapan perkembangan akan bermanfaat bagi anak untuk bersosialisasi dengan orang lain (Zahro, 2018).

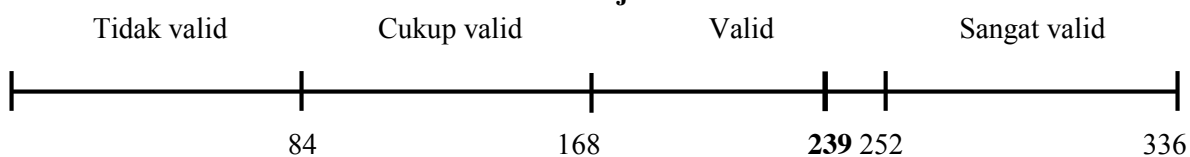
Setelah *prototipe* model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* selesai, maka langkah selanjutnya adalah uji validasi ahli. Berdasarkan uji ahli materi, maka hasil yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan skala Likert berikut.

Gambar 1. Skala Likert dari uji ahli materi model eduwisata



Hasil uji ahli materi model eduwisata ini menunjukkan bahwa materi model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro sangat valid dan layak digunakan. Sedangkan hasil yang diperoleh dari uji ahli desain digambarkan dalam skala Likert berikut.

Gambar 2. Skala Likert dari uji ahli desain model eduwisata



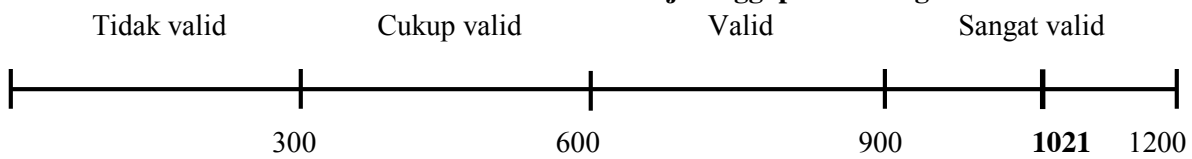
Hasil uji ahli desain ini menunjukkan bahwa desain model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro dalam kategori valid dan layak digunakan.

Pada kedua hasil uji ahli materi dan ahli desain dapat disimpulkan bahwa model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro sangat menarik.

Implement

Setelah melaksanakan uji ahli dan revisi, maka langkah selanjutnya adalah uji tanggapan warga Desa Campurejo. Responden dalam uji tanggapan ini sebanyak 20 keluarga. Hasil uji tanggapan 20 keluarga digambarkan dalam skala *Likert* berikut ini.

Gambar 3. Skala Likert dari uji tanggapan keluarga



Hasil uji tanggapan 20 keluarga ini menunjukkan bahwa model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro sangat valid dan layak digunakan karena model eduwisata sesuai dengan kebutuhan keluarga Desa Campurejo dalam peningkatan kualitas keluarga.

Evaluate

Langkah terakhir dalam pengembangan bahan ajar ini adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini peneliti melakukan perbaikan atas saran dan masukan dari hasil uji tanggapan yang diperoleh dari uji tanggapan ahli dan keluarga desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk mengembangkan model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro serta untuk mengetahui tingkat kevalidannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D) melalui prosedur ADDIE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* ini sangat menarik, valid dan layak digunakan dalam untuk meningkatkan kualitas keluarga di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil penelitian di atas serta untuk memperbaiki proses pengembangan eduwisata maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah: memberikan program-program dalam penguatan ketahanan keluarga
2. Pemerintah Desa Campurejo: berkesinambungan dalam pelaksanaan program KFS bagi warga Desa Campurejo maupun luar Campurejo
3. Peneliti Lain: diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan model atau menyertakan variabel lain untuk mendapatkan keilmuan yang lebih mendalam tentang ketahanan keluarga. Pengembangan model eduwisata *Kanoman Family Strength (KFS)* ini masih terbatas pada satu desa dan belum diuji efektifitasnya dalam responden yang lebih besar. Selain itu hanya terdapat 6 pos eduwisata untuk peningkatan kualitas keluarga. Untuk itu kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan model lain yang sesuai dengan kebutuhan serta mempraktikkan model eduwisata ini dalam jumlah responden yang lebih besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada

- 1) STAI Attanwir Bojonegoro atas arahannya sehingga pengabdian ini dapat terlaksana,
- 2) Kepala Desa Campurejo Bojonegoro beserta perangkat atas informasi dan izinnya kepada kami untuk melaksanakan pengabdian di Desa Campurejo,
- 3) Arik Irawati, M. Psi dan Eryul Mufidah, M. Pd selaku tim ahli dalam pengabdian ini,
- 4) Pengelola Kanoman atas penyediaan tempat, fasilitas dan ketersediaan untuk berdiskusi tentang konsep KFS bagi kelancaran pelaksanaan pengabdian ini,
- 5) Masyarakat Desa Campurejo, khususnya bagi masyarakat yang bersedia menjadi responden bagi pengabdian ini,

6) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Branch, Robert Maribe. 2009. *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York: Springer.
- H, Puspitawati, 2013, Konsep dan Teori Keluarga, diakses pada 5 Agustus 2019 (<http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf>)
- Jafari, J., & Ritchie, J. R. B. (1981). *Toward a Framework for Tourism Education: Problems and Prospects. Annals of Tourism Research*, 8(1), 13–34.
- Rahmawati, N.L, Zahro, I. F, dkk, 2019, Pemberdayaan Ekonomi Transformatif: Pendampingan Kewirausahaan Inovasi Pelepah Pisang pada Masyarakat Jamberejo Bojonegoro, Jurnal Engagement Volume 3 No 1 Mei 2019.
- Puspitawati, H, 2013, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, diakses pada 9 Agustus 2019, (<http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/ketahanan.pdf>)
- Rohaeni N, dkk 2018, Model Pendidikan Kehidupan Keluarga berbasis Life Skill dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga, diakses pada 9 Agustus 2019, (<http://ejournal.upi.edu/index.php/familyedu/article/view/13683>)
- Rusman. 2013. *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyosari, Punaji. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono dan Harianto. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wijayanti, A. (2017a). Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Kembang Arum Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. Tesis. Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Wijayanti, A. (2017b). Pengelolaan Produk Pariwisata Edukasi di Kota Yogyakarta. Manuskrip tidak dipublikasi.
- Husaini, W, 2017, Hubungan Fungsi Keluarga dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kartosura, Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Y Pusparini 2010, Strategi Peningkatan Ketahanan Keluarga untuk Mendukung Ketahanan Wilayah (Studi Kasus di Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), diakses pada 9 Agustus 2019, (http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=46649)
- Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Campurejo, tanggal 10-12 Juni 2019
- Wow! 11 Bulan, Angka Cerai di Bojonegoro 2000 lebih, 2018, diakses pada 9 Agustus 2019 (<http://blokbojonegoro.com/2018/12/14/wow-11-bulan-angka-cerai-di-bojonegoro-2000-lebih/>)
- Zahro, I. F. 2018. “Meningkatkan Perilaku Prososial Anak dengan Teknik *Islamic Storytelling Finger Doll*”. (*Nazhruna, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No 1), Februari. (<http://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/43>)

- Zahro, I. F. 2018 “Optimalisasi Kecerdasan Bahasa Anak Usia Dini melalui Metode Bermain Peran”. (*Aulada, Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak*, Volume 1, No 1). (<http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/aulada/article/view/212>)
- Zahro, I. F. 2017. “Pengaruh Pelatihan Empati Melalui Kartu Ekspresi Emosi terhadap Perilaku Menolong dan Perilaku Agresif pada Anak Prasekolah”. (*JCE, Journal of Childhood Education*, Vol 1, No 1). (<http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/JCE/article/view/1>)



LAPAK BACA KOMUNITAS LITERASI PONOROGO: MENGHIDUPKAN SEMANGAT BACA DARI TAMAN KOTA HINGGA KAMPUNG IDIOT

THE LIBRARY STREET OF PONOROGO LITERACY COMMUNITIES: TURN ON THE SPIRIT OF READING FROM THE CITY SQUARE UP TO IDIOT VILLAGE

Vivi Vellanita Wanda Damayanti¹, Aan Diang Frastika Aji²

¹ IAIN Ponorogo, Jl. Pramuka No.156, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

² Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email korespondensi: vvellanita@gmail.com

ABSTRAK

Ponorogo, sebuah kota budaya yang memiliki kualitas pendidikan yang terbilang rendah. Rendahnya semangat membaca menjadi salah satu hal yang diduga menjadi pemicu rendahnya kualitas pendidikan tersebut. Rendahnya semangat membaca masyarakat Ponorogo ditandai dengan rendahnya jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah Ponorogo. Berdasarkan keterangan staf Perpustakaan Daerah Ponorogo, jumlah pembaca usia sekolah semakin menurun dari waktu ke waktu. Di beberapa tempat berbeda, berdasarkan survey yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa para orangtua enggan membawa anak mereka mengunjungi perpustakaan dengan alasan sibuk serta letaknya jauh. Fasilitas serta kenyamanan juga menjadi alasan rendahnya minat mengunjungi perpustakaan. Padahal peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran membaca. Berangkat dari permasalahan tersebut, beberapa komunitas literasi Ponorogo seperti Pustaka Kaki Lima, Langit Malam, Sapu Lidi, serta beberapa komunitas yang lain secara swadaya menghadirkan perpustakaan gratis di tengah-tengah masyarakat. Lapak baca gratis dengan target utama para pengunjung *Car Free Day* Ponorogo dilakukan secara serentak setiap minggu pagi dengan beragam rangkaian acara mulai dari *talkshow*, pembacaan buku dongeng bagi anak usia pra sekolah, bimbingan konseling untuk para orang tua, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran terhadap pendidikan dan meningkatkan semangat membaca masyarakat Ponorogo. Tidak hanya melakukan hal tersebut, komunitas literasi Ponorogo juga secara rutin melakukan kunjungan ke beberapa desa tertinggal (yang sempat dikenal sebagai kampung idiot) untuk melakukan kegiatan amal, lapak baca buku gratis, serta kegiatan belajar bersama anak-anak yang belum mendapat akses pendidikan yang memadai.

Kata kunci: lapak baca, komunitas literasi, kesadaran membaca

ABSTRACT

Ponorogo is a cultural city that has a low quality of education. Less enthusiasm of reading is one of the things that is aimed has responsibility of educational low quality in Ponorogo. This enthusiasm of reading in the Ponorogo community is marked by the low number of visitors in the Ponorogo Regional Library (pusda). Based on information from the Ponorogo Regional Library staff, the numbers of school age readers are decreasing over the time. In several different places, based on the survey conducted, it is known that the parents are lazy to bring their children to the library because they were busy and the place of Ponorogo Regional Library is quite far. Facilities and comfortless are also being the reasons of the low interest in visiting library. Whereas, improving the quality of education can be done through improving reading enthusiasm. Based on these problems, several Ponorogo literacy communities such as Pustaka Kaki Lima, Langit Malam, Sapu Lidi and several other communities provide street library. The street library is held simultaneously every Sunday morning. It has main target of the Car Free Day Ponorogo visitors. Every Sunday they make some varieties of events in turn such as talk show, reading fairy tales books for pre-school children, counselling for parents, and so on. The important goal in doing these are to build awareness of education and increase the spirit of reading in the Ponorogo community. Not only do these, the Ponorogo literacy community are also routinely visiting several

remaining villages (that ever known as the idiot village) to conduct charity activities, free book reading booths, and learning activities with children who have not received adequate access to education.

Keywords: street library, literacy community, reading awareness

PENDAHULUAN

Reading is the heart of education (Far dalam Wandasari, 2017) merupakan sebuah kutipan yang menunjukkan bahwa tanpa membaca maka sebuah pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Hal serupa juga diutarakan oleh Joyo (2018) dan Wandasari (2017) yang menyatakan bahwa sebagian besar proses pendidikan sangat bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Lebih jauh lagi, Faradina (2017) menyatakan bahwa suatu masyarakat yang maju dapat dilihat dari budaya membacanya. Membaca menjadi simbol suatu peradaban masyarakat. Tingginya minat baca masyarakat dalam suatu Negara akan berimbas pada kemajuan Negara tersebut. Berdasarkan pandangan ini, Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai Negara yang masih tertinggal sebab minat baca masyarakatnya masih tergolong sangat rendah.

Berdasarkan data UNESCO tahun 2015 disebutkan bahwa indeks membaca orang Indonesia hanya 0,001 yang berarti dari 1.000 orang yang ada di Indonesia hanya ada satu orang yang memiliki minat membaca buku. Lebih lanjut, berdasarkan laporan hasil studi yang dilakukan Central Connecticut State University di New Britain, diperoleh informasi bahwa kemampuan literasi Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Angka-angka tersebut berbanding terbalik dengan tingkat melek huruf masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka melek huruf untuk golongan penduduk berumur 15-19 tahun pada tahun 2010 memiliki presentase sebesar 99.56%, tahun 2011 sebesar 98.61%, tahun 2011sebesar 98.85%, tahun 2013 sebesar 99.41%, dan tahun 2014 99.67% (Saputra, et al., 2017, Wandasari, 2017, Febriani, 2017). Capaian yang ditunjukkan oleh BPS menunjukkan bawah Indonesia memiliki tingkat melek huruf yang tinggi. Namun sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan tingginya minat baca masyarakat.

Menanggapi problematika yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui Permendikbud No 23 tahun 2015 menerapkan kebijakan literasi yaitu kegiatan membaca selama 15 menit yang dilakukan sebelum pelajaran di sekolah dimulai. Hal tersebut bertujuan untuk membangun minat baca siswa. Minat baca adalah kecenderungan yang berasal dari jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan membaca tanpa paksaan (Dalyono, 2009). Kebijakan tersebut juga diterapkan di sekolah-sekolah di Ponorogo. Namun demikian, minat baca usia sekolah masih tetap tergolong rendah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola perpustakaan kota Ponorogo, minat baca masyarakat Ponorogo sangat rendah. Keberadaan perpustakaan cenderung sepi meskipun di hari sekolah. Berdasarkan hasil wawancara secara random yang dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Ponorogo, orang tua yang memiliki anak dengan rentang usia 5-12 tahun mengaku tidak pernah membawa anak mereka ke perpustakaan daerah Ponorogo dengan berbagai alasan, di antaranya sibuk, jauh, fasilitasnya tidak lengkap, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah ironi mengingat kegiatan membaca menurut Wandasari (2017) dapat memberikan pengaruh budaya yang kuat terhadap perkembangan literasi peserta didik.

Menanggapi fenomena rendahnya minat baca masyarakat Ponorogo, maka beberapa komunitas literasi Ponorogo seperti Pustaka Kaki Lima, Langit Malam, Sapu Lidi serta beberapa komunitas yang lain secara swadaya menghadirkan perpustakaan gratis di tengah-tengah

masyarakat. Kegiatan bertajuk “Lapak Baca Gratis” merupakan sebuah kegiatan menghadirkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dengan target utama para pengunjung *Car Free Day* Ponorogo. TBM dilakukan secara serentak setiap minggu pagi dengan dikombinasikan beragam rangkaian acara mulai dari *talkshow*, pembacaan buku dongeng bagi anak usia pra sekolah, bimbingan konseling untuk para orang tua, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai pada menggerakkan semangat berliterasi di Taman Kota, Ponorogo, komunitas literasi yang ada di Ponorogo juga secara berkala berusaha menghidupkan semangat berliterasi di “Kampung Idiot” Ponorogo.

Melalui artikel ini, kegiatan yang dilakukan, tantangan serta suka-duka yang ditemui oleh komunitas-komunitas literasi Ponorogo akan dibahas dengan pendekatan teori yang relevan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ilmiah ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berupa interpretasi fenomena dalam kondisi natural (Denzin and Lincoln dalam Gall, et al, 2007). Pemaparan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kegiatan perpustakaan jalanan di Ponorogo dalam upaya meningkatkan kesadaran berliterasi masyarakat Ponorogo.

Dalam penulisan ilmiah ini, teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi berkala, kajian pustaka (*library research*) serta wawancara. Wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara semi-terstruktur (*semi-structured*) yang dilakukan dengan beberapa komunitas literasi Ponorogo di antaranya Pustaka Kaki Lima, Langit Malam dan Sapu Lidi serta pengunjung perpustakaan jalanan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, penarikan simpulan hingga ditahap akhir berupa penyusunan laporan (Sugiyono, 2010). Selain itu, Triangulasi dilakukan sebagai teknik validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kamalovo and Koletvinova (2016) menyatakan, “Reading is a basic component of education, training and development of culture.” Yang berarti bahwa membaca merupakan dasar dari pendidikan, pelatihan dan pengembangan kebudayaan. Terkait keberadaannya yang sangat penting, maka membaca menjadi sebuah keterampilan yang harus diajarkan sejak anak masuk Sekolah Dasar (Abdurrahman, 2011). Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, melainkan juga untuk menumbuhkan minat baca sejak usia dini sebab menurut loan (2011) kebiasaan membaca akan mempengaruhi pengembangan diri secara personal dan pengembangan kemampuan sosial secara umum. Pentingnya penumbuhan minat baca secara tidak langsung turut mempengaruhi keberadaan perpustakaan.

Perpustakaan merupakan gudang ilmu pengetahuan, sedangkan kegiatan mengunjungi perpustakaan merupakan hal yang menarik serta penting dilakukan (Okoro, 2004). Sejalan dengan Okoro (2004), Savanur dalam Bamidele (2011) memberikan definisi perpustakaan sebagai gudang sumber daya yang menyediakan lebih banyak peluang bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, serta memfasilitasi pencapaian kinerja akademik siswa secara luas. Oleh karena itu, perpustakaan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan budaya. Selain itu, Bamidele (2011) menyatakan bahwa perpustakaan memiliki peran besar dan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan kebiasaan membaca dengan menyediakan berbagai bahan bacaan tanpa membebani siswa dalam hal uang dan ruang.

Keberadaan perpustakaan sangat penting sebab menurut Oriogu (2015) keberadaan perpustakaan dapat mengembalikan martabat manusia dalam menghadapi tantangan sosial. Menurut Benard dan Dulle (2014), ada beberapa jenis perpustakaan yang dapat ditemui,

diantaranya adalah perpustakaan khusus, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan penelitian, perpustakaan akademik, perpustakaan digital dan lain sebagainya.

Perpustakaan jalanan merupakan salah satu bentuk perpustakaan yang dibangun secara swadaya sebagai bagian dari Taman Baca Masyarakat (TBM). Perpustakaan jalanan biasanya didirikan oleh sekelompok orang atau komunitas yang peduli akan minat baca masyarakat tanpa adanya niat untuk memperoleh keuntungan (Saputra, et al., 2017). Perpustakaan jalanan yang ada di Ponorogo merupakan perpustakaan yang dijalankan oleh beberapa komunitas yang berperan sebagai sebuah tempat pembelajaran yang sifatnya informal dengan fasilitas seadanya yang dikelola secara sukarela oleh anggota dari komunitas-komunitas yang bergabung.

Keberadaan perpustakaan jalanan muncul sebagai bentuk pembaharuan dalam dunia perpustakaan. Komunitas ini memiliki visi dan misi ingin menyediakan lapak buku yang mudah dijangkau dan gratis bagi masyarakat. Berdasarkan jenisnya, maka perpustakaan jalanan yang menggelar lapak baca setiap minggu pagi di taman kota Ponorogo merupakan bagian dari TBM. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan suatu lembaga atau program pendidikan nonformal yang turut berpartisipasi untuk memberikan layanan kebutuhan masyarakat terkait informasi dan ilmu pengetahuan melalui bahan pustaka (Kalida, 2014: 41). Fungsi yang melekat pada TBM menurut Direktorat Jenderal PAUDNI (2013) adalah sebagai berikut: 1) sumber belajar, 2) sumber informasi, dan 3) sarana rekreasi-edukasi.

Hal tersebut yang kemudian dilakukan oleh beberapa komunitas literasi Ponorogo, seperti Pustaka Kaki Lima, Langit Malam, Sapu Lidi, serta beberapa komunitas yang lain. Dengan menghadirkan lapak baca pada Car Free Day setiap minggu pagi, para pegiat literasi Ponorogo menyediakan sumber belajar informal kepada masyarakat terutama bagi para anak usia dini. Kegiatan talkshow terkait perkembangan anak-anak juga mampu menarik antusiasme orang tua dalam menyediakan sumber informasi. Para anggota yang sebagian besar merupakan mahasiswa yang bergerak dalam bidang pendidikan sedikit banyak mampu membantu menyediakan informasi terkait perkembangan anak. Melalui proses pembacaan dongeng, bercerita bersama anak-anak serta kegiatan menyanyi dan bergembira, keberadaan komunitas literasi sekaligus memenuhi kebutuhan sarana rekreasi-edukasi.

Secara tidak langsung, keberadaan komunitas literasi Ponorogo juga membangun budaya membaca masyarakat Ponorogo. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Loh et al (2007) yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor untuk membangun budaya membaca meliputi: (1) Kurasi pemilihan buku untuk pembaca, (2) Membuat buku terlihat (3) Membuat program untuk merangsang pembaca, (4) Merancang ruang untuk membaca, dan (5) Membangun ekologi untuk membaca. Kelima hal tersebut dilakukan dengan baik oleh para komunitas literasi Ponorogo.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas literasi Ponorogo dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan sosial. Menurut McLaughlin (Sukmana, 2016) karakteristik yang menonjol dari suatu gerakan sosial adalah meliputi adanya sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan dan struktur organisasi. Dengan memanfaatkan mobilisasi sumberdaya para anggota komunitasnya, komunitas literasi Ponorogo menjalankan fungsinya sebagai sebuah komunitas yang memenuhi fungsi pembelajaran, sumber informasi dan sarana rekreasi-edukasi. Di lain sisi, mobilisasi sumberdaya merupakan pemanfaatan sumberdaya yang ada dilingkungan sekitar baik yang sifatnya internal maupun eksternal untuk mendukung dan mengembangkan suatu gerakan sosial (Febriani, 2017).

Dengan mobilisasi sumberdaya, komunitas literasi Ponorogo juga turut bergerak dalam upaya pengembangan alternatif pendidikan bagi beberapa kampung idiot (Desa Karangpatihan, Krebet, Sidoharjo, dan Pandak). Meskipun belum secara rutin, namun komunitas literasi Ponorogo

beberapa kali melakukan kunjungan, memberi bantuan berupa buku bacaan untuk anak-anak, mengadakan kegiatan membaca bersama, dan membekali masyarakat melalui talkshow pentingnya pendidikan. Meskipun kegiatan yang dilakukan bukanlah kegiatan formal, namun kedepannya kegiatan ini akan dibuat menjadi kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkala.

Meninjau kegiatan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa komunitas literasi Ponorogo telah melakukan banyak inovasi, terlebih selama ini pemerintah kabupaten Ponorogo memfokuskan bantuan untuk kampung idiot berupa perbaikan sara prasarana desa (Munawaroh dan Listyani, 2016), pelatihan dan pemberdayaan ekonomi (Suluh, 2016) dan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa makanan pokok dalam bentuk sembako, air untuk MCK, pakaian pria/wanita, fasilitas kesehatan dan pembenahan rumah (Asmaroini).

Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo adalah penguatan ekonomi dengan melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan yaitu, pemberdayaan masyarakat di Balai Latihan Kerja dengan melakukan pelatihan pembuatan keset, tasbih, dan lampion. Selanjutnya pemberdayaan ternak ikan lele, lalu pemberdayaan ternak kroto yang masih dalam proses uji coba, dan pemberdayaan ternak ayam kampung yang dilakukan di Kampung Idiot, dimana masyarakat tunagrahita diberikan sepasang induk ayam. Hingga saat ini bantuan berupa fasilitas pendidikan luar sekolah masih belum menjadi fokus pemerintah sehingga komunitas literasi Ponorogo berusaha memenuhi kebutuhan tersebut hingga ada bantuan dari pemerintah.

Meskipun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas literasi di Ponorogo merupakan kegiatan yang dilakukan sepenuh hati, namun demikian kegiatan tersebut bukan tanpa tantangan. Kendala terbesar dalam menggelar lapak baca adalah keterbatasan jumlah variasi buku. Buku yang dipinjamkan dalam kegiatan lapak baca kebanyakan merupakan buku-buku pribadi yang dimiliki oleh para anggota komunitas dan lainnya merupakan bantuan buku dari beberapa penerbit Indie. Keterbatasan buku bacaan terutama buku anak-anak membuat para pengunjung terutama anak-anak merasa cepat bosan. Selain itu suasana Car Free Day yang ramai membuat kegiatan membaca dongeng, talkshow dan kegiatan lain yang dilakukan bersama membutuhkan lebih banyak energi dan sumber daya manusia untuk dapat memfasilitasi kegiatan serta memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Kegiatan membaca sangat penting sebab dapat menjadi sarana pengembangan diri secara personal baik dalam konteks pengetahuan maupun keterampilan serta berkontribusi dalam pengembangan kemampuan sosial secara umum. Meski demikian, minat baca masyarakat Ponorogo masih terbilang rendah. Hal tersebut ditandai dengan sedikitnya pengunjung perpustakaan kota Ponorogo. Melihat hal tersebut, maka komunitas literasi Ponorogo berusaha menyediakan ruang baca bagi masyarakat Ponorogo. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah akses informasi bagi semua orang dan membuat tempat baca alternatif. Lapak baca yang digelar setiap minggu pagi di taman kota Ponorogo (bersamaan dengan acara Car Free Day) menjadi salah satu solusi dari sulitnya masyarakat umum dalam mendapatkan bahan bacaan. Komunitas-komunitas literasi Ponorogo secara swadaya menggelar lapak baca. Untuk menarik perhatian masyarakat pengunjung CFD, maka acara tersebut dikombinasikan dengan acara pembacaan dongeng, talkshow terkait perkembangan anak, serta acara-acara lain yang berkaitan dengan anak-anak. Sebagai hasilnya, terlihat antusiasme pengunjung terutama anak-anak yang datang silih berganti untuk membaca dan mendengarkan dongeng. Tidak hanya menggelar lapak baca rutin di taman kota, komunitas-komunitas literasi Ponorogo juga menjangkau kampung Idiot untuk

menularkan semangat membaca bagi anak-anak di sana. Namun demikian, kegiatan tersebut bukan tanpa kendala. Variasi buku yang terbatas serta buku-buku yang sering hilang menjadi salah satu kendala bagi komunitas-komunitas literasi Ponorogo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para komunitas Ponorogo, di antaranya Pustaka Kaki Lima, Langit Malam, Sapu Lidi, serta beberapa komunitas yang lain yang dengan penuh semangat berusaha membangun minat baca masyarakat Ponorogo. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada petugas perpustakaan kota Ponorogo serta para pengunjung pusat pebelanjaan Ponorogo yang telah menyediakan waktunya dalam kegiatan wawancara. Selain itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penelitian ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada BALITBANG yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan karya ini. Semoga berkat Tuhan menyertai semua.

Sumber dana dalam penelitian ini merupakan dana pribadi dari kedua penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M 2011. *Anak Berkesulitan Belajar Teori, Diagnosis, dan Remediasinya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bamidele, IA 2015, The Library Use Habits of Senior Secondary School Students in Ogun State, Nigeria, *International Journal of Advanced Library and Information Science*, 3 (1): 170-181.
- Benard, R dan Dulle, F 2014, Assessment of Access and Use of School Library Information Resources by Secondary Schools Students in Morogoro Municipality, Tanzania, *Library Philosophy and Practice*, diakses pada 29 Juli 2019, (<http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1107>)
- Dirjen PAUDNI 2013. *Taman Bacaan Masyarakat Rintisan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan*, Kemendikbud, Jakarta.
- Faradina, N 2017, Pengaruh Program Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa Di SD Islam Terpadu Muhammadiyah An-Najah, Jatinom-Klaten, *Jurnal Hanata Widya*, 6(8): 60-69.
- Febriani, L 2017. Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka), *Jurnal Society* 5 (1):59-67.
- Gall, DM, et al 2007, *Educational Research*, Pearson, United States of America.
- Joyo, A 2018. Gerakan Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Menuju Siswa Berkarakter, *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 1(2): 159-170.
- Kamalova, LA dan Koletvinova, ND 2016. The Problem of Reading and Reading Culture Improvement of Students-Bachelors of Elementary Education in Modern High Institution, *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(4): 473-484.
- Loan, FA 2011, Reading and Library Usage Habits of the College Students, *International Journal of Information Research*, 1 (1): 1-13.

- Loh, CE, Ellis, M, Paculdar A. and Wan, ZH 2017, Building a Successful Reading Culture through the School Library: A Case Study of A Singapore Secondary School, *International Federation of Library Associations Journal*, 1-16.
- Dalyono, M 2009. *Psikologi Pendidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhsin, K 2012, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*. Aswaja dan Cakruk Publisng, Yogyakarta.
- Munawaroh, R dan Listyani, RH 2016, Praktik Sosial Pemberdayaan Masyarakat Miskin Idiot Melalui Model Kerajinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, *Paradigma*, 4 (2): 1-10.
- Okoro, CC 2004, My People are Destroyed: The Effects of Lack of Knowledge on Academic Performance of Nigerian Children. *Owena Journal of Library and Information Science*, 1 (1): 13-18.
- Oriogu, CD 2015, Catch Them Young: Developing and Improving of School Libraries and Reading Habit of Secondary School Students, *Journal of Education and e-Learning Research*, 2(4): 60-63.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, *Pengembangan Gerakan Literasi*, Kemendikbud, Jakarta.
- Saputra, ND, Damayani, NA, & Rahman, AS 2017, Kontruksi Makna Pegiat Perpustakaan Jalanan (Studi Fenomenologi tentang Kontruksi Makna Pegiat Perpustakaan Jalanan di Kota Bandung), *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 5(2): 152-159.
- Sugiyono 2010 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukmana, O 2016, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Intrans Publishing, Malang.
- Suluh, D 2016, Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6 (1): 21-27.
- Wandasari, Y 2017, Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Sebagai Pembentuk Nilai Karakter. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan* 1(1): 325-343.



PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS LAYANAN POSYANDU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN POSYANDU DI DESA PUNGPUNGAN- KALITIDU-BOJONEGORO

M. Hestu Widiyastono¹ Indah Fajrotuz Zahro²

¹Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indonesia

Jl. Kapten Tendean No. 9A Bojonegoro

²STAI Attanwir Bojonegoro.

Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro 62191 Telp/Fax. (0353) 331610

ABSTRAK

Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu menjadi salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan penanggung jawab kepala desa. Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan kader yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengelola posyandu. Enam kelompok posyandu yang berada di desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebelumnya tidak memiliki dokumen yang jelas terkait dengan status dan starata Posyandu tersebut sehingga diberikan pemdampingan untuk menguatkan kapasitas kader agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (*Research & Development*) mengacu pada model ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate*). Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui hasil FGD dan hasil observasi, sedangkan data kuantitatif yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kualitas layanan posyandu dan hasil observasi dianalisa dengan menggunakan uji statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini: 1) Peningkatan kualitas pelayanan sistem lima meja dalam proses pelaksanaan posyandu; 2) Kader posyandu semakin berkualitas dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan sehingga mampu memberikan penyuluhan dan 3) Penguatan kualitas kelembagaan posyandu.

Kata kunci : Kapasitas Posyandu, Kualitas Layanan Posyandu.

ABSTRACT

Integrated Health and Family Planning Service Post (Posyandu) is basic health activities carried out from, by and for communities assisted by health workers. Posyandu is one of the Community Resource Health Efforts (UKBM) with the person in charge of the village head. To realize these efforts, cadres are needed who have the capacity and competence in managing the posyandu. Six posyandu groups in the village of Pungpungan, Kalitidu Sub-district, Bojonegoro Regency previously did not have clear documents related to the status and status of the Posyandu, so they were provided assistance to strengthen the capacity of cadres to be able to provide better services to the community. The type of research used is development research (Research & Development) referring to the ADDIE model (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate). Data analysis uses quantitative and qualitative methods. Qualitative data was obtained through FGD results and observations, while the quantitative data collected through the distribution of posyandu service quality questionnaires and observations were analyzed using descriptive statistical tests. The results of this study: 1) Improving the quality of the five-table service system in the posyandu implementation process; 2) Posyandu cadres are increasingly qualified with increasing insight and knowledge so they are able to provide counseling and 3) Strengthening the quality of Posyandu institutions.

Keywords: Posyandu Capacity, Quality of Posyandu Services.

PENDAHULUAN

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) merupakan kepanjangan tangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melalui pemberdayaan masyarakat, dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, peran posyandu sangat penting dalam rangka mengontrol kesehatan bayi dan balita, secara umum pelayanan posyandu diperuntukkan bagi masyarakat luas namun secara khususnya diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita. Posyandu berfungsi nyata sebagai pintu masuk semua pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk bayi, balita, dan ibu hamil (Suhat dan Ruyatul Hasanah, 2014: 74)

Sebagaimana hal tersebut Aditya, T (2016: 205) mengatakan Posyandu merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah dalam bidang kesehatan, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan proses pengelolaannya mulai dari bayi, balita sampai memberikan pelayanan kepada ibu hamil. Selain posyandu memiliki fungsi dalam layanan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil juga memiliki peran penting dalam rangka penanggulangan atau pencegahan terjadinya *stunting* yang dilakukan pada masa 1000 hari kehidupan pertama bayi melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya dengan melakukan kegiatan pengisian kurva Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dilakukan satu kali dalam satu bulan.

Proses pemberian layanan posyandu telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Posyandu oleh Kemenkes RI tahun 2011, dapat diselenggarakannya oleh kelompok/kader posyandu setiap satu bulan sekali dan dalam pelaksanaannya menggunakan sistem lima meja. Namun kondisi dilapangan dalam hal ini di Desa Pungpungan Bojonegoro terdapat enam kelompok posyandu namun dalam pelaksanaannya dalam memberikan pelayanan Posyandu kurang begitu optimal terlihat dari pelaksanaannya yang seharusnya menggunakan pola atau sistem lima meja masih belum dapat menerapkan sistem lima meja tersebut. Selain itu sarana dan prasarana yang digunakan kurang cukup memadai dan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) / kader posyandu kurang memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam melaksanakan jam buka posyandu, serta beberapa kader belum memiliki cukup mental dalam memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan yang seharusnya dilakukan di meja empat sehingga penyuluhan tersebut terkadang tidak dilaksanakan dan terkadang dilaksanakan namun kurang optimal.

Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dibentuknya posyandu serta tercapainya optimalisasi peran posyandu itu sendiri maka penting untuk dipertimbangkan kualitas pelayanan posyandu dan kualitas kader posyandu, namun sayangnya jika dihadapkan dengan kenyataan sering dihadapkan pada sejumlah kendala seperti pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan pelayanan serta sarana dan prasarana dari kelompok posyandu yang kurang optimal seperti yang dijelaskan diatas.

Rata-rata kemampuan kader dari masing-masing kelompok masih minim, terlihat dalam proses pelaksanaan jam buka posyandu balita dalam memberikan pelayanan hanya berhenti pada proses pendaftaran, penimbangan dan pengisian KMS dan pemberian penyuluhan sering tidak dilakukan, selain itu tidak ada kegiatan lain yang dapat mereka lakukan selain penimbangan dan pengisian KMS padahal idealnya sebagai kader posyandu yang merupakan kepanjangan tangan dari puskesmas dapat memberikan pelayanan yang lebih seperti melakukan kunjungan kepada ibu hamil dan setelah melahirkan diluar jam buka posyandu untuk mengontrol kesehatan bayi dan ibu tersebut.

Mengingat penting dan sangat berpengaruhnya peran posyandu dalam layanan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil, khususnya dalam rangka pencegahan terjadinya *stunting* Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indonesia melaksanakan Program Peningkatan Kualitas

Layanan Posyandu, program tersebut merupakan kerjasama dengan *ExxonMobil Cepu Limited* (EMCL) secara umum program tersebut dijalankan sebagai upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas, sehingga dipandang perlu adanya pendampingan terhadap kader atau kelompok-kelompok posyandu yang berada di desa punggungan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal sebab layanan yang diberikan akan berdampak pada hasil pelayanannya.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. (Dinkes. 2019). Kegiatan posyandu berkaitan dengan pelayanan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan bayi, balita dan ibu hamil.

Secara umum posyandu dibentuk dengan tujuan mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan kesehatan masyarakat, sementara itu Eka (2011: 34) menyebutkan, tujuan dari penyelenggaraan posyandu ialah: (1) Menurunkan angka kematian ibu dan anak, (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan IMR atau *infant mortality rate*/ angka kematian bayi, (3) Mempercepat penerimaan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, (4) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan menunjang peningkatan hidup sehat, (5) Pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga tercapai peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, (6) Meningkatkan dan membina peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk usaha kesehatan masyarakat.

Posyandu dalam pelaksanaannya memiliki tujuan sasaran yang jelas Eka (2011:35) menyebutkan sasaran posyandu diantaranya adalah seluruh masyarakat dan utamanya adalah : (1) Bayi usia kurang dari 1 tahun, (2) Anak balita usia 1 sampai 5 tahun, (3) Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui, serta (4) Wanita usia subur (WUS).

Kegiatan Posyandu dilaksanakan oleh kader Posyandu berlangsung setiap satu bulan sekali berdasarkan kesepakatan kader dan petugas kesehatan dari Puskesmas setempat. Dalam pelaksanaannya menggunakan sistem 5 meja, sebagaimana Dinkes RI (2011:32) sistem 5 meja/langkah yang dimaksud yaitu: Meja 1: Pendaftaran. Meja 2: Penimbangan. Meja 3: Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat). Meja 4: Komunikasi / penyuluhan. Meja 5: Pelayanan Kesehatan. Setiap meja memiliki fungsi masing-masing, meja 1 sampai dengan meja 4 dilaksanakan oleh kader posyandu sedang meja 5 di isi oleh petugas kesehatan dari puskesmas.

Kualitas Posyandu memiliki empat tingkatan / strata yang dibedakan berdasarkan kemampuan kelompok posyandu diantara empat strata tersebut dalam (Punikasari, 2010 : 26) yakni (1) Strata Posyandu Pratama: Posyandu tingkat pratama adalah Posyandu yang, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas; (b) Strata Posyandu Madya: Pada Posyandu tingkat Madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih; (c) Strata Posyandu Purnama: Posyandu pada tingkat purnama adalah Posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dengan cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%. Serta sudah ada program tambahan, bahkan sudah ada dana sehat yang masih sederhana; (d) Strata Posyandu Mandiri: Posyandu tingkat Mandiri ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama telah terlaksana dengan baik, ada program tambahan dan Dana Sehat telah menjangkau lebih dari 50% KK.

Berawal dari adanya program pendampingan tersebut serta untuk dapat mengetahui keefektifan dan pengaruh program yang telah dijalankan, penulis tertarik untuk meneliti tentang program penguatan kapasitas layanan posyandu untuk meningkatkan kapasitas layanan Posyandu di desa Pungpungan-Kalitidu-Bojonegoro.

BAHAN DAN METODE

Desain pelaksanaan program pengabdian ini dengan menggunakan metode ADDIE yang terdiri dari 5 (lima) tahapan. Model pengembangan ADDIE terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis (*analysis*), desain (*design*), pengembangan (*development*), implementasi (*implementation*) dan evaluasi (*evaluation*) (Sugiyono, 2015: 200). LPM Indonesia melakukan analisis tentang kebutuhan dan potensi kader posyandu untuk menentukan permasalahan yang sebenarnya dan menawarkan solusi yang tepat. Selanjutnya dilakukan penentuan pendekatan pelatihan yang sesuai dengan menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan dan diskusi dengan kader posyandu. Setelah dilakukan analisis dan desain, langkah selanjutnya adalah pengembangan program dengan melaksanakan program penguatan kader posyandu selama 8 (delapan) bulan. Selesaiannya pelatihan, kader posyandu diberikan implementasi berupa penyebaran angket dan penilaian terhadap perubahan strata posyandu. Langkah terakhir adalah dengan melakukan evaluasi, dimana LPM Indonesia bersama-sama dengan kader posyandu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kualitas kader posyandu dengan mengevaluasi angket respon kader dan catatan lapangan pada lembar observasi.

Prosedur pengembangan dengan model ADDIE ini meliputi tahapan-tahapan: *analyze*, *design*, *develop*, *implement*, *evaluate*. Secara rinci, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Analyze*, pada tahap ini peneliti melakukan kajian *need analysis* melalui kegiatan observasi dan wawancara terkait dengan pentingnya pelatihan kader untuk meningkatkan kualitas kader posyandu di desa Pungpungan-Kalitidu-Bojonegoro baik meliputi faktor masalah, maupun potensi yang mendukung kemungkinan dikembangkan model pelatihan tersebut.
2. *Design*, yakni pembatasan permasalahan sesuai yang dibutuhkan di lapangan seperti tujuan pembelajaran, isi bahan ajar, model penyajian materi, latihan atau evaluasi. Untuk kepentingan desain ini peneliti mengembangkan instrumen pengembangan dengan berdasarkan pada rambu-rambu pengembangan dan langkah-langkah model pelatihan kader posyandu.
3. *Develop*, proses mewujudkan model dalam bentuk prototipe. Pada tahapan ini peneliti meminta validasi dari pakar atau orang berkompeten di bidangnya, yakni pakar materi model pelatihan kader posyandu kemudian melakukan revisi sesuai kebutuhan.
4. *Implement*, pada tahapan ini dilakukan ujicoba pada kader posyandu di desa Leran-Kalitidu-Bojonegoro akan tanggapan dari produk yang telah dikembangkan, agar produk yang telah disusun peneliti dicermati baik dari segi materi. Kemudian dilakukan revisi sesuai dengan masukan yang ada.
5. *Evaluate*, pada tahapan ini dilakukan evaluasi dari pakar untuk yang kedua kalinya setelah adanya perbaikan produk dari peneliti. Setelah itu dilakukan revisi sesuai dengan masukan yang ada.

Program peningkatan kualitas layanan posyandu di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh LPM Indonesia merupakan kerjasama dengan EMCL, program ini berlangsung selama delapan bulan sejak September 2018 berakhir hingga Juni 2019.

Sasaran pelaksanaan program tersebut adalah kelompok dan atau kader posyandu yang berada di desa Pungpungan-Kalitidu sejumlah 6 kelompok. Yakni kelompok posyandu Nusa Indah,

posyandu Mawar, posyandu Dahlia, Posyandu Melati, Posyandu Cempaka, posyandu Puspa Indah. Masing-masing kelompok posyandu terdapat 5 kader posyandu. Sehingga total peserta pelatihan kualitas kader posyandu di desa Pungpungan-Kalitidu sejumlah 30 kader posyandu. Pelaksanaan program pelatihan kualitas kader posyandu dilakukan dengan pendampingan pelaksanaan kegiatan posyandu yang berlangsung setiap satu bulan sekali. Pelaksanaan program ini dengan melakukan pengawasan serta pendampingan agar pelaksanaan pelayanan posyandu dapat berjalan sesuai alur sistem 5 meja, sebab meja 1 sampai dengan meja lima memiliki fungsi masing-masing.

Fungsi masing-masing meja yaitu: Meja 1 berfungsi untuk pendaftaran; meja 2 untuk penimbangan; meja 3 untuk pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat); meja 4: untuk komunikasi/penyuluhan perorangan berdasarkan KMS; dan meja 5 untuk tindakan (pelayanan imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi berupa obat tetes mulut tiap bulan Februari dan Agustus, pengobatan ringan, pembagian pil atau kondom, konsultasi KB-Kesehatan) yang ditangani oleh Bidan Desa atau petugas kesehatan dari Puskesmas setempat.

Selain melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu setiap satu bulan sekali dilakukan pendampingan kepada kader-kader posyandu dengan mengumpulkan seluruh kader dari 6 kelompok posyandu yang berada di desa Pungpungan dengan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pelayanan posyandu dengan mendatangkan pemateri dari Dinas Kesehatan Bojonegoro dan pemateri lain yang dipandang perlu. Jadwal kegiatan materi dan diskusi dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah:

Tabel 1: Jadwal Kegiatan Pemberian wawasan dan pengetahuan Kader dan Diskusi Kader:

No	Tanggal Kegiatan	Materi Kegiatan	Pemateri
1	27 Desember 2019	Tumbuh Kembang Anak	Fitria (Dinas Kesehatan Bojonegoro)
2	25 Januari 2019	Pelayanan Sistem Lima Meja	Imam Wahyudi (Dinas Kesehatan Bojonegoro)
3	24 Februari 2019	Pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS)	dr. Yogi (Kepala Puskesmas Pungpungan)
4	26 Maret 2019	Penyuluhan / Promosi Kesehatan	dr. Fitri Muniroh (Dinas Kesehatan Bojonegoro)
5	27 April 2019	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Indah Puji Lestari, S. Km (Tenaga Ahli Program)
6	26 Mei 2019	Stunting, Gejala dan Pencegahannya	Ahli Gizi Dinas Kesehatan Bojonegoro
7	29 Juni 2019	Gizi Balita dan Menu empat Bintang	Ahli Gizi Puskesmas Pungpungan
8	27 Juli 2019	Peningkatan Strata Posyandu	Daning (Promkes Puskesmas Pungpungan)

Disamping memberikan pendampingan dan pemberian tambahan pengetahuan serta wawasan kepada kader posyandu, LPM Indonesia juga memberikan bantuan sarana prasarana penunjang pelayanan posyandu. Sarana dan prasarana yang diberikan kepada kelompok posyandu sesuai dengan kebutuhan kelompok posyandu berdasarkan hasil *Fokus Grup Discussion* (FGD) antara LPM Indonesia dengan seluruh kader kelompok posyandu tersebut. Bantuan sarana dan prasarana yang diberikan kepada keenam posyandu di desa Pungpungan Kalitidu berupa timbangan

bayi, timbangan beserta ukuran tinggi badan, alat peraga edukatif (APE), dan buku-buku penunjang kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan kader posyandu di desa Pungpungan Kalitidu Bojonegoro selama 8 (delapan) bulan sebagai upaya untuk menguatkan kapasitas layanan posyandu di desa tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Pertama, hasil temuan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan jam buka posyandu yang seharusnya menggunakan sistem lima meja namun dalam pelaksanaannya sistem tersebut tidak dijalankan dengan baik sehingga pelaksanaan jam buka posyandu tidak berjalan rapi dan menimbulkan permasalahan lain bagi peserta posyandu seperti rebutan ingin lebih awal di layanannya dll. Berangkat dari situ kemudian dalam pelaksanaan program pendampingan yang dilakukan oleh LPM Indonesia Pendamping Lapangan (PL) memberikan pendampingan jam buka dan melakukan pengawasan dalam memberikan pelayanan selama delapan bulan dari pendampingan tersebut terlihat adanya peningkatan kualitas pelayanan sistem lima meja dalam proses pelaksanaan posyandu serta dapat dijalankan sesuai alurnya dari meja satu sampai meja lima, hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud Dinkes RI (2011:32) sistem 5 meja/langkah yang dimaksud yaitu: Meja 1: Pendaftaran. Meja 2: Penimbangan. Meja 3: Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat). Meja 4: Komunikasi / penyuluhan. Meja 5: Pelayanan Kesehatan. Setiap meja memiliki fungsi masing-masing, meja 1 sampai dengan meja 4 dilaksanakan oleh kader posyandu sedang meja 5 di isi oleh petugas kesehatan dari puskesmas.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kader posyandu kurang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan baik pengetahuan, kemampuan maupun mental sehingga dalam pelaksanaan jam buka posyandu berjalan seadanya dan kurang maksimal apalagi dalam pemberian penyuluhan atau promosi kesehatan kader tidak menguasai materi yang disampaikan dan tidak jarang dari kader-kader posyandu tidak memiliki mental /keberanian untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu balita maupun ibu hamil. Berdasarkan kondisi tersebut para kader posyandu diberikan pendampingan secara khusus dengan diberikan tambahan pengetahuan terkait dengan materi-materi penyuluhan /promosi kesehatan setiap satu bulan sekali sebagaimana tabel 1. Selain itu diberikan alat bantu berupa buku panduan pemberian PMT dan buku-buku lain yang dapat digunakan untuk memberikan penyuluhan. Kader juga diberikan tambahan materi tentang tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis. Kader posyandu diberikan bekal tentang pendampingan psikologis kepada orangtua bagaimana mengoptimalkan dan menstimulasi perkembangan sosial emosi anak. Stimulasi aspek perkembangan sosial dan emosional berfungsi untuk mengembangkan penguasaan kecakapan emosional dan kecakapan sosial anak dan perlu dilakukan sebagai upaya memunculkan pemahaman emosi yang lebih baik, berkembangnya kesadaran diri yang positif, pembentukan jati diri sehingga dapat menjalin relasi positif dengan orang-orang di sekitarnya (Zahro, 2017)

Hasil pendampingan yang diberikan menunjukkan bertambahnya kualitas SDM dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan sehingga kader posyandu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terkhusus dalam hal pemberian penyuluhan atau promosi kesehatan. Pemberian penyuluhan/ promosi kesehatan merupakan bagian penting, salah satu poin dari sistem pelayanan posyandu yang di atur oleh Dinkes RI (2012) yaitu sistem 5 meja, hasil yang dicapai kader mampu memberikan penyuluhan kondisi tersebut berbeda dengan pada waktu belum adanya program ini, sebelumnya mereka tidak cukup mampu untuk memberikan penyuluhan hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya wawasan dan juga keberanian / mental.

Ketiga, Sebelum dilakukan pendampingan program tidak ada dokumen resmi yang menyatakan kualitas kelembagaan pada enam posyandu tersebut, serta sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing tidak lengkap dan kurang memadai sehingga dalam hal ini dilakukan pendampingan dengan diberikannya bantuan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada setiap kali jam buka posyandu, alat-alat kelengkapan posyandu berupa timbangan bayi, alat ukur berat badan dan tinggi balita, papan nama posyandu, meja dan kursi posyandu serta fasilitasi kelembagaan dengan melakukan pendampingan mendapatkan legalitas dari pihak desa setempat berupa Surat Keterangan (SK) dan status kualitas Posyandu dari Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro. Berdasarkan pendampingan program penguatan kapasitas layanan posyandu yang dilaksanakan oleh LPM Indonesia bekerja sama dengan EMCL keenam posyandu mendapat Surat Keterangan (SK) kelembagaan, dan terpenuhinya sarana prasarana penunjang pelayanan posyandu, selain itu dari enam posyandu yang menjadi sasaran program mendapatkan penilaian kualitas menjadi posyandu dengan strata Purnama.

Tabel 2: Hasil Strata Posyandu

Lokasi	Nama Posyandu	Strata				Skor
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
Desa Pungpungan – Kalitidu	Nusa Indah	-	-	V	-	89
	Mawar	-	-	V	-	83
	Dahlia	-	-	V	-	89
	Puspa Indah	-	-	V	-	83
	Melati	-	-	V	-	87
	Cempaka	-	-	V	-	87

Hasil strata tersebut diperoleh setelah adanya penilaian skor dari masing-masing posyandu oleh Puskesmas Pungpungan Kalitidu.

Tabel 3: Klasifikasi Skor

Pratama	:	< 60
Madya	:	60-74
Purnama	:	75 - 94
Mandiri	:	95 - 100

Skor tersebut didapatkan berdasarkan standart penilaian yang meliputi Kelembagaan, Pengelolaan oleh Puskesmas Pungpungan Kalitidu, sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 4: Standart Nasional Penilaian Strata dan Hasil Nilai Posyandu

No	Variabel	Standar Pengukuran	Nilai	Nama Posyandu					
				Nusa Indah	Ma war	Da hlia	Puspa Indah	Mel ati	Cem paka
I	KELEMBAGAAN POSYANDU								
	a. SK Organisasi Posyandu	Ada	3	3	3	3	3	3	3
		Tidak Ada	0						

	b. Struktur Organisasi	Ada	3	3	3	3	3	3	3
		Tidak Ada	0						
II	PENGELOLAAN POSYANDU BALITA								
A	INPUT								
	1. Rencana Tertulis								
	a. Rencana Kerja Rutin	Ada	1	1	1	1	1	1	1
		Tidak Ada	0						
	b. Jadwal Kegiatan	Ada	1	1	1	1	1	1	1
		Tidak Ada	0						
	c. Rencana Menu PMT	Ada	1	1	1	1	1	1	1
		Tidak Ada	0						
	2. Sarana dan Pra-sarana								
	a. Sarana Perlengkapan								
	-Meja dan Kursi	≥ 4 macam	4	4	4	4	4	4	4
	-Dacin	2 - 3 macam	3						
	- Celana/Katok/ Sarung / Kotak timbang	1 macam	2						
	-Timbangan Injak	Tidak Ada	0						
	-Penanggulangan Diare (Oralit)								
	b. Paket Pertolongan Gizi								
	Vitamin	2 macam	2	2	1	2	1	1	1
	Tablet Fe	1 macam	1						
		tidak ada	0						
	c. Sarana dan Kelengkapan								
	-KMS / Buku KIA	≥ 4 macam	4	4	4	4	4	4	4
	-SIP (Sistem Informasi Posyandu)	2 - 3 macam	3						
	-Absensi Kader	1 macam	2						
	-Buku Kegiatan	Tidak Ada	0						
	-Notulen Hasil Rapat								
	d. Pemanfaatan Sarana Penyuluhan								
	- Poster	≥ 4 macam	4	4	4	4	4	4	4
	- Lembar Balik	2 - 3	3						

		macam							
	- Buku Pegangan Kader	1 macam	2						
	- Paket Penyuluhan KB	Tidak Ada	0						
	- Food Model / Bahan Asli								
	3. Dukungan Dana								
	a. Swadaya Masyarakat	3 Sumber Dana	4						
	b. Swasta / Kemitraan	2 Sumber Dana	3	3	3	3	3	3	3
	c. ADD / Bantuan Pemerintah	1 Sumber Dana	2						
		Tidak ada	0						
	4. Tenaga								
	a. Jumlah Kader Seluruhnya	≥ 5 Orang	2	2	2	2	2	2	2
		1 - 4 Orang	1						
	b. Jumlah Kader Aktif	≥ 5 Orang	2	2	2	2	2	2	2
		1 - 4 Orang	1						
B	PROSES								
	1. Frekwensi Posyandu Buka / Tahun	12Kali	4	4	4	4	4	4	4
		10 - 11 Kali	3						
		≤ 10 Kali	2						
	2. Kegiatan Pelayanan Posyandu								
	oleh kader (Meja 1 – 4)	Ada Lengkap	4	4	4	4	4	4	4
		Ada Tidak Lengkap	2						
	3. Pencatatan Bumil Risti	Ada	2	2	2	2	2	2	2
		tidak Ada	0						
	4. Kegiatan Penyuluhan								
	a. Di Dalam Posyandu								
	1. Perorangan	Ada	4	4		4		4	4

	(Meja 4)								
		Tidak Ada	0		0		0		
	2. Penyuluhan Kelompok	Ada	4	4	4	4	4	4	4
		Tidak Ada	0						
	b. Di Luar Posyandu								
	1. Penyuluhan Kelompok	Ada	3						
		Tidak Ada	0	0	0	0	0	0	0
	2. Kunjungan Rumah	Ada	3						
		Tidak	0	0	0	0	0	0	0
	5. Merujuk Balita Sakit (Gizi Buruk, BGM, Diare, ISPA)	Ada	4	4	4	4	4	4	4
		Tidak Ada	0						
	6. Pertemuan Pasca Pelayanan	Ada	4						
		Tidak Ada	0	0	0	0	0	0	0
	7. Pencatatan Kegiatan Imunisasi	Ada	4	4	4	4	4	4	4
		Tidak Ada	0						
C	UOTPUT								
	1. Penyajian Data di Posyandu	Ada dan ditampilkan	3						
	- Balok SKDN	Ada tapi tdk ditampilkan	2	2	2	2	2	2	2
		Tidak ada	0						
	2. Rata - rata Balita ditimbang (D/S)	≥ 80 %	4	4	4	4	4	4	4
		70 - 79 %	3						
		50 - 69 %	2						
		< 50 %	1						
	3. Rata - rata Balita Naik Berat Badannya	≥ 60 %	4	4	4	4	4	4	4

	(N/D)	40 - 59 %	2						
		< 40 %	1						
	4. Bayi dengan Imunisasi Lengkap	$\geq 85 \%$	4	4	4	4	4	4	4
		< 85 %	2						
	5. Bumil yang terdaftar di Posyandu	$\geq 60 \%$	4	4	4	4	4	4	4
		40 - 59 %	2						
		< 40 %	1						
	6. Bumil Risti	Tidak Ada	4	4	4	4	4	4	4
		Ada	0						
		Semua dirujuk	4	4	4	4	4	4	4
		Tidak semua dirujuk	0						
	7. Jumlah PUS bukan peserta KB Aktif	70 - 80 %	3	3		3			
	(tidak menginginkan anak)	60 - 70 %	2		2		2	2	2
		< 60 %	1						
	8. Program Tambahan								
	- BKB	≥ 3 macam	3						
	- PAUD	2-3 macam	2						
	- Kesehatan Lingkungan	1 - 2 macam	1	1	1	1	1	1	1
	- Tuberkulosis (TBC)	Tidak ada	0						
	9. Kegiatan Inovatif	Ada	3	3	3	3	3	3	3
		Tidak ada	0						
Total Skor				89	83	89	83	87	87

Hasil yang diperoleh dari masing-masing posyandu menunjukkan bahwa keenam posyandu tersebut mendapat strata posyandu tingkat Purnama.

KESIMPULAN

Program penguatan kapasitas layanan posyandu merupakan program pendampingan kepada kelompok atau kader posyandu yang dilaksanakan oleh LPM Indonesia bekerja sama dengan EMCL selama delapan bulan, dari hasil pelaksanaan program tersebut dapat diketahui hasil sebagaiberikut, *Pertama*, adanya peningkatan kualitas pelayanan sistem lima meja dalam proses pelaksanaan posyandu serta dapat dijalankan sesuai alurnya dari meja satu sampai meja lima, hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud Dinkes RI (2011:32). *Kedua*, Sember Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kader posyandu semakin berkualitas dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan sehingga kader posyandu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terkhusus dalam hal pemberian penyuluhan atau promosi kesehatan dan *Ketiga*, Penguatan kualitas kelembagaan posyandu, yang sebelumnya tidak ada dokumen resmi yang menyatkan status posyandu dan setelah adanya program pendampingan tersebut masing-masing posyandu mendapatkan status strata Purnama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indonesia dan STAI Attanwir Bojonegoro atas arahnya sehingga pengabdian ini dapat terlaksana,
- 2) Kepala Desa Pungpungan-Kalitidu-Bojonegoro beserta perangkat atas informasi dan izinnya kepada kami untuk melaksanakan pengabdian di Desa Campurejo,
- 3) Pemateri atas ketersediaan untuk berdiskusi tentang kader posyandu dan dukungan atas kelancaran pelaksanaan pengabdian ini,
- 4) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka, Prasetyawati Arista. 2011. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan Holistik* (Integrasi Community Oriented ke Family Oriented). Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dinas Kesehatan. 2019. *Apa Itu Posyandu*. Diakses 07 Juli 2019. (<https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2019/05/19/109/apa-itu-posyandu.html>).
- Aditya,T. 2017. *Analisis Kualitas pelayanan Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*. Diakses 06 Juli 2019. (https://www.researchgate.net/publication/324821600_Analisis_Kualitas_Pelayanan_Posyandu_Camar_Kelurahan_Poris_Plawad_Utra_Kecamatan_Cipondoh_Kota_Tangerang/link/5ae46fee458515760abf4b09/download).
- Anis Cahyati. 2016. *Pelaksanaan Program Posyandu (Studi Kasus di Desa Madu Kecamatan Mojoongo Kabupaten Boyolali)*. Diakses 26 Juli 2019. (<https://lib.unnes.ac.id/28458/1/1201412021.pdf>).
- Kementerian Kesehatan. RI 2011. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu* Diakses 01 Agustus 2019. (<http://cisdi.org/files/9f1f53a8c4b972590cfb79d815d48ceaf76e0f16.pdf>).
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Suhat dan Hasanah, R. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keaktifan Kader Dalam Kegiatan Posyandu (Studi Di Puskesmas Palasari Kabupaten Subang)*. Diakses 06 Juli 2019. (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/view/3072>).
- Zahro, I. F. 2017. “Pengaruh Pelatihan Empati Melalui Kartu Ekspresi Emosi terhadap Perilaku Menolong dan Perilaku Agresif pada Anak Prasekolah”. (*JCE, Journal of Childhood Education*, Vol 1, No 1). (<http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/JCE/article/view/1>)



PENDAMPINGAN DISTRIBUSI BIBIT TANAMAN DAN PEMETAAN *GREENHOUSE* PADA PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR (P2KP-PKPS) TP-PKK DESA SE-KABUPATEN TUBAN

ASSISTANCE OF DISTRIBUTION PLANT SEEDS AND GREENHOUSE MAPPING IN THE PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR (P2KP-PKPS) TP-PKK VILLAGE ALL TUBAN DISTRICTS

Riska Andriani^{1*}, Marita Ika Joesidawati², Sriwulan³

^{1,2,3}Universitas PGRI Ronggolawe, Jl. Manunggal 61 Tuban, Kodepos 62381

*andriani1risk@gmail.com

ABSTRAK

Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP-PKPS) merupakan salah satu upaya untuk membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Kelompok Wanita khususnya Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa melalui P2KP-PKPS dan KWT dalam upaya pengembangan pangan lokal. Sasaran program ini adalah TP-PKK di 43 desa dan KWT di 2 desa dari 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban yang telah melewati tahap seleksi lokasi dan penerima manfaat. Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan tersebut, diperlukan pendampingan dalam pendistribusian bibit tanaman, benih sayur, dan pupuk serta memetakan lokasi *greenhouse*. Mekanisme pemetaan dilakukan dengan menentukan titik koordinat lokasi pendirian *greenhouse* di 43 desa penerima hibah kegiatan P2KP-PKPS, 34 diletakkan di balai desa dan 9 diletakkan di rumah warga (Bendonglateng-Kenduruan dan Laju Lor-Singgahan, pengurus PKK (Klutuk-Tambakboyo, Bulu Meduro-Bancar, Jatisari-Senori, Sugihan-Merakurak, Trantang-Kerek, Prambon Wetan-Rengel, dan di tanah bengkok (Jegulo-Soko)). Peletakan *greenhouse* yang berbeda-beda didasarkan kebijakan masing-masing pengurus TP PKK, yang semua bertujuan memudahkan pengelolaan dan pengawasan. Pelaksanaan kegiatan P2KP-PKPS dikatakan berhasil karena anggota TP-PKK Desa penerima hibah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, dan meningkatkan keamanan pangan segar. Keberhasilan program ini didukung oleh koordinasi yang baik dan peran aktif dari Ketua TP-PKK sebagai fasilitator antara warga penerima hibah dengan aparat pemerintah, sehingga dapat meningkatkan manfaat lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Kata Kunci: *greenhouse*, bibit, P2KP-PKPS, Tuban

ABSTRACT

Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP-PKPS) is one of the efforts to cultivate diverse food consumption patterns, nutritionally balanced and safe. This activity aims to empower the Women's Group, especially the Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Village through P2KP-PKPS and Kelompok Wanita Tani (KWT) in local food development efforts. The target of this program is TP-PKK in 43 villages and KWTs in 2 villages out of 20 Subdistricts in Tuban Regency which have passed the site selection and beneficiary selection stages. Efforts to optimize these activities required assistance in the distribution of plant seeds, vegetable seeds, and fertilizers and mapping the location of the greenhouse. The mapping mechanism was carried out by determining the coordinates of the location of the establishment of greenhouses in 43 villages receiving the P2KP-PKPS grant, as many as 34 were placed in the village hall and 9 were placed in people's homes (Bendonglateng-Kenduruan and Laju Lor-Singgahan, PKK administrators (Klutuk-Tambakboyo, Bulu Meduro-Bancar, Jatisari-Senori, Sugihan-Merakurak, Trantang-Kerek, Prambon Wetan-Rengel and in bengkok land (Jegulo-Soko). The laying of different greenhouses is based on the policies of each TP-

PKK management, all of which aim to facilitate management and supervision. The implementation of P2KP-PKPS activities was said to be successful because of the knowledge, skills and attitudes of TP-PKK Village recipients and the community to use the land as a family food source, and to handle increased food security. The success of this program was supported by coordination and the active role of the Chairperson of the TP-PKK as a facilitator between grantees and government officials, so that they could increase the value of benefits from the land area as a family food source.

Keywords: greenhouse, seeds, P2KP-PKPS, Tuban

PENDAHULUAN

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP-PKPS) merupakan suatu tuntutan bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini merupakan akibat dari dampak pemanasan global, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, lahan sawah yang semakin menurun luasnya, ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan pokok yang masih tinggi, pola makan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman serta adanya perubahan gaya hidup dalam mengkonsumsi pangan pada kehidupan sehari-hari Susilo *et al*, 2018).

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan salah satu upaya untuk membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Landasan hukum pelaksanaan P2KP-PKPS antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (BKP Kementerian Pertanian, Tanpa Tahun).

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, kegiatan P2KP-PKPS di Kabupaten Tuban melalui pemberdayaan kelompok wanita khususnya TP-PKK Desa berupaya melakukan pengembangan pangan lokal. Untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut agar tercapai sesuai target yang diharapkan, diperlukan pendampingan distribusi bantuan hibah bibit tanaman, pupuk, *greenhouse*, serta memetakan lokasi *greenhouse* agar memudahkan pengelolaan dan pengawasan.

Tujuan P2KP-PKPS adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, kesadaran serta memotivasi masyarakat khususnya kelompok TP PKK dalam pemanfaatan lahan kosong atau pekarangan sebagai sumber pangan (ketahanan pangan) dan pendapatan keluarga, meningkatkan motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan serta menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan adalah alat tulis, form pengisian administrasi penerimaan hibah bibit tanaman, pupuk, dan *greenhouse*, serta GPS untuk menentukan titik koordinat lokasi pendirian *greenhouse*. Sasaran program dalam kegiatan ini adalah pengurus TP-PKK Desa, Pengurus Pokja 3, dan kelompok masyarakat khususnya masyarakat miskin desil I yang tersebar di 45 Desa pada 20 wilayah Kecamatan Kabupaten Tuban dengan 43 TP-PKK Kegiatan P2KP-PKPS, 1 KWT Kegiatan SI MANTAB, dan 1 KWT Kegiatan Pakar Pangan. Ruang Lingkup Pendampingan distribusi hibah pada program P2KP-PKPS Kabupaten Tuban Tahun 2018 meliputi pengawalan penyaluran bantuan hibah bibit tanaman, pupuk, dan *greenhouse*.

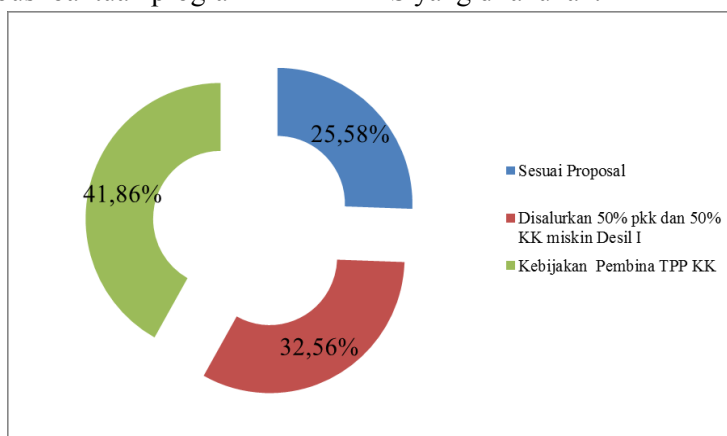
Metode yang digunakan dalam melaksanakan Pendampingan Manajemen P2KP-PKPS Kabupaten Tuban Tahun 2018 adalah sosialisasi pemahaman jenis-jenis pembukuan yang diperlukan, TOT Bagi 43 TP-PKK Desa dan 2 KWT Kabupaten Tuban, pembimbingan dan penerapan melalui identifikasi TP-PKK penerima hibah yang dilakukan dengan cara seleksi berdasarkan pengajuan proposal oleh TP-PKK Desa di 43 (empat puluh tiga) desa dan KWT di 2 desa dari 20 kecamatan Se-Kabupaten Tuban dengan Surat Pengantar Kepala UPTD Pertanian (Petunjuk Teknis, 2018).

Pemetaan *Greenhouse* berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan TP PKK Desa terhadap Kelompok Wanita yang bersedia belajar untuk mengembangkan lahan pekarangan untuk dimanfaatkan sebagai demplot kelompok. Demplot tersebut dikembangkan sebagai demplot percontohan pekarangan kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan perolehan hibah melalui dua tahap yaitu, seleksi lokasi sasaran berdasarkan proposal bantuan hibah yang ditunjang dengan Data Desil I dari BPS dan BAPPEDA yang kemudian lokasi yang dipilih sebagai penerima manfaat dilakukan identifikasi dan verifikasi oleh Tim Kabupaten melalui Survei Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL). Selanjutnya adalah seleksi penerima manfaat yaitu TP-PKK Desa yang kelembagaannya masih aktif serta warga miskin yang telah direkomendasikan oleh TP-PKK Desa untuk memperoleh bantuan hibah.

Lokasi yang terseleksi meliputi 43 (Empat puluh tiga) TP-PKK Desa dan 2 KWT di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hal ini dikarenakan perlu adanya dorongan untuk Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Pada Gambar 1, ditunjukkan distribusi bantuan program P2KP-PKPS yang dilakukan.



Gambar 1. Penyaluran bibit ke penerima hibah P2KP-PKPS tahun 2018

Bibit (Tanaman dan Benih Sayuran)

Pengawasan distribusi bibit dilakukan di 43 desa penerima hibah P2KP-PKPS tahun 2018. Bibit hibah P2KP PKPS sebagian besar ditempatkan di tempat yang aman di dalam *greenhouse* dan balai desa, akan tetapi ada beberapa desa yang mendapatkan bibit dalam kondisi kering/rusak sehingga ada beberapa tanaman yang tidak dapat disalurkan. Data jumlah bibit dan benih serta kondisi bibit di 43 desa penerima hibah P2KP PKPS saat diterima TP PKK Desa ditunjukkan pada Tabel 1. Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar bibit yang diterima oleh 43 TP PKK Desa penerima hibah dalam kondisi baik, namun ada beberapa daerah

yang bibitnya kering dan rusak sebagai contoh antara lain: Desa Sumurgung, Penambangan, Karangasem, dan Tlogo Agung.

Tabel 1. Data Jumlah dan Kondisi Bibit di 43 Desa Penerima Hibah P2KP-PKPS saat diterima TP-PKK Desa

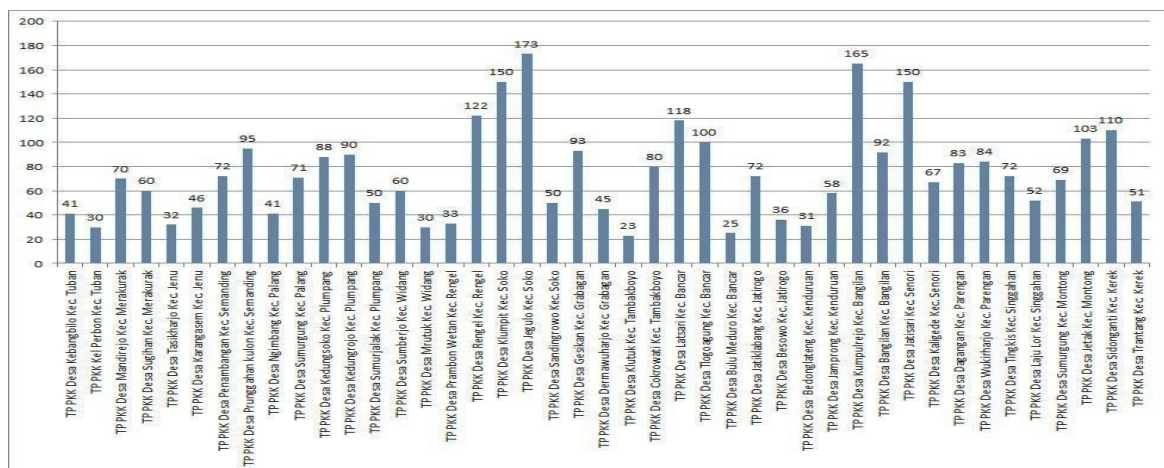
No	NAMA TP-PKK	JENIS BANTUAN DAN KONDISI TANAMAN									
		Bibit jeruk		Bibit Kelengkeng		Bibit Alpukat		Bibit Jambu		Bibit	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	TP PKK Desa Kebangbilo Kec. Tuban	11	0	53	0	27	0	24	0	21	0
2	TP PKK Kel Perbon Kec. Tuban	11	0	41	0	24	0	20	0	21	0
3	TP PKK Desa Mandirejo Kec. Merakurak	12	0	71	0	40	0	38	0	30	0
4	TP PKK Desa Sugihan Kec. Merakurak	12	0	70	0	42	0	23	0	20	0
5	TP PKK Desa Tasikharjo Kec. Jenu	11	0	44	0	25	0	20	0	20	0
6	TP PKK Desa Karangasem Kec. Jenu	11	0	49	0	28	1	30	0	30	2
7	TP PKK Desa Penambangan Kec. Semanding	12	0	79	1	44	0	26	0	27	0
8	TP PKK Desa Prunggahan kulon Kec. Semanding	12	0	79	0	65	0	59	0	25	0
9	TP PKK Desa Ngimbang Kec. Palang	11	0	48	0	30	0	28	0	21	0
10	TP PKK Desa Sumurgung Kec. Palang	12	0	67	3	41	0	41	0	30	0
11	TP PKK Desa Kedungsoko Kec. Plumpang	12	0	90	0	55	0	31	0	30	0
12	TP PKK Desa Kedungrojo Kec. Plumpang	12	0	80	0	61	0	43	0	31	0
13	TP PKK Desa Sumurjalak Kec. Plumpang	12	0	60	0	35	0	24	0	20	0
14	TP PKK Desa Sumberjo Kec. Widang	12	0	65	0	45	0	27	0	20	0
15	TP PKK Desa Mrutuk Kec. Widang	11	0	45	0	21	0	19	0	20	0

16	TP PKK Desa Prambon Wetan Kec. Rengel	11	0	49	0	21	0	20	0	20	0
17	TP PKK Desa Rengel Kec. Rengel	12	0	112	0	75	0	59	0	25	0
18	TP PKK Desa Klumpit Kec. Soko	12	0	132	0	88	0	55	0	45	0
19	TP PKK Desa Jegulo Kec. Soko	13	0	154	0	91	0	65	0	51	0
20	TP PKK Desa Sandingrowo Kec. Soko	12	0	58	0	40	0	20	0	20	0
21	TP PKK Desa Gesikan Kec. Grabagan	11	0	85	0	60	0	45	0	31	0
22	TP PKK Desa Dermawuharjo Kec. Grabagan	11	0	44	0	33	0	30	0	30	0
23	TP PKK Desa Klutuk Kec. Tambakboyo	11	0	35	0	20	0	19	0	20	0
24	TP PKK Desa Cokrowati Kec. Tambakboyo	12	0	85	0	45	0	32	0	31	0
25	TP PKK Desa Latsari Kec. Bancar	12	0	111	0	75	0	48	0	27	0
26	TP PKK Desa Tlogoagung Kec. Bancar	12	0	110	0	49	2	42	1	24	0
27	TP PKK Desa Bulu Meduro Kec. Bancar	11	0	39	0	20	0	21	0	17	0
28	TP PKK Desa Jatiklabang Kec. Jatirogo	12	0	62	0	50	0	51	0	24	0
29	TP PKK Desa Besowo Kec. Jatirogo	11	0	53	0	21	0	21	0	20	0
30	TP PKK Desa Bedonglateng Kec. Kenduruan	11	0	43	0	24	0	18	0	22	0
31	TP PKK Desa Jamprong Kec. Kenduruan	11	0	60	0	50	0	24	0	20	0
32	TP PKK Desa Kumpulrejo Kec. Bangilan	12	0	145	0	91	0	58	0	53	0
33	TP PKK Desa Bangilan Kec. Bangilan	12	0	85	0	61	0	41	0	30	0
34	TP PKK Desa Jatisari Kec. Senori	12	0	100	0	44	0	29	0	30	0
35	TP PKK Desa Kaligede Kec. Senori	12	0	80	0	38	0	29	0	21	0
36	TP PKK Desa Dagangan Kec. Parengan	12	0	86	0	50	0	32	0	30	0
37	TP PKK Desa Wukirharjo Kec. Parengan	12	0	86	0	47	0	39	0	30	0
38	TP PKK Desa Tingkis Kec. Singgahan	12	0	61	0	51	0	50	0	25	0

39	TP PKK Desa Laju Lor Kec. Singgahan	11	0	71	0	30	0	18	0	21	0
40	TP PKK Desa Sumurgung Kec. Montong	11	0	82	0	40	0	23	0	26	0
41	TP PKK Desa Jetak Kec. Montong	12	0	90	0	65	0	60	0	26	0
42	TP PKK Desa Sidonganti Kec. Kerek	12	0	100	0	65	0	62	0	25	0
43	TP PKK Desa Trantang Kec. Kerek	11	0	72	0	30	0	15	0	20	0
JUMLAH		500	0	3231	4	1957	3	1479	1	1130	2

Penyaluran ke Penerima Hibah

Jumlah KK miskin desil I yang direncanakan mendapatkan hibah melalui kegiatan P2KP-PKPS tahun 2018 pada 43 TP PKK desa di 20 Kecamatan Se-Kabupaten Tuban berdasarkan pengajuan proposal sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah KK Miskin Rencana Penerima Hibah Kegiatan P2KP-PKPS Tahun 2018 di 43 TP-PKK Desa

Berdasarkan hasil pengawalan penyaluran bibit, maka penyaluran bibit kepada penerima hibah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: disalurkan ke sejumlah KK miskin desil I yang diusulkan dalam proposal yang sudah disetujui (sebanyak 11 desa); disalurkan 50% ke KK miskin desil I dan 50% ke pengurus TP PKK (sebanyak 14 desa); kebijakan Pembina TP-PKK yang mengacu pada program desa (sebanyak 18 desa).



Gambar 3. Distribusi Bibit Tanaman dan Pupuk Bokashi Hibah Program P2KP-PKPS Tahun 2018

Pendampingan penyaluran hibah ke warga desil I sebagian besar di laksanakan di balai desa oleh pengurus dan anggota TP PKK desa. Sebelum dilakukan penyaluran hibah TP PKK desa khususnya pengurus dan pokja 3 melakukan rapat koordinasi untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hibah tersebut. Selain itu Pendamping Lapangan (PPL) desa juga memberikan materi tentang cara menanam, memupuk, dan memelihara tanaman kepada warga penerima hibah pada saat penyaluran tanaman. Kegiatan penyaluran hibah berjalan lancar dengan adanya administrasi yang baik, tanggung jawab pengurus PKK yang baik, dan pendampingan dari PPL yang berkelanjutan melalui kegiatan Sekolah Lapang (SL) yang dilakukan minimal 4 kali selama program berjalan. Pada kegiatan ini warga penerima hibah antusias mengikuti kegiatan ini.

Bokashi

Pengawalan distribusi pupuk Bokashi dilakukan di 43 desa penerima hibah P2KP PKPS tahun 2018. Pupuk Bokashi hibah sebagian besar ditempatkan di tempat yang aman (aman dari hujan dan panas) sekitar 38 desa, akan tetapi ada beberapa desa yang menempatkan pupuk bokashi di tempat yang kurang aman sehingga pupuk bokashi rusak/sobek karena panas dan hujan.

Hasil pendampingan ada 5 desa yang menempatkan pupuk bokashi pada tempat yang tidak aman antara lain: Jatiklabang, Tlogo Agung, Latsari, Kembangbilo, dan Besowo. Ketika dilakukan pendampingan pupuk bokashi hampir tersalurkan seluruhnya. Akan tetapi pada Desa Sumurjalak penyaluran belum dapat dilakukan 100%. Hal ini dikarenakan penerimaan bantuan pupuk bokashi di desa tersebut masih kurang 755 kg, yang dimungkinkan masih dalam proses pengiriman. Tim Pendampingan juga melakukan monitoring dan evaluasi, dimana seluruh pupuk bokashi sudah tersalurkan 100% di 43 desa penerima hibah P2KP-PKPS. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyelesaian masalah lokasi pupuk bokashi yang masih belum aman. Salah satu cara yang lakukan yaitu menutup pupuk bokashi dengan terpal dan mengepak pupuk bokashi yang sudah rusak kemasannya dengan plastik baru.

Pemetaan Greenhouse

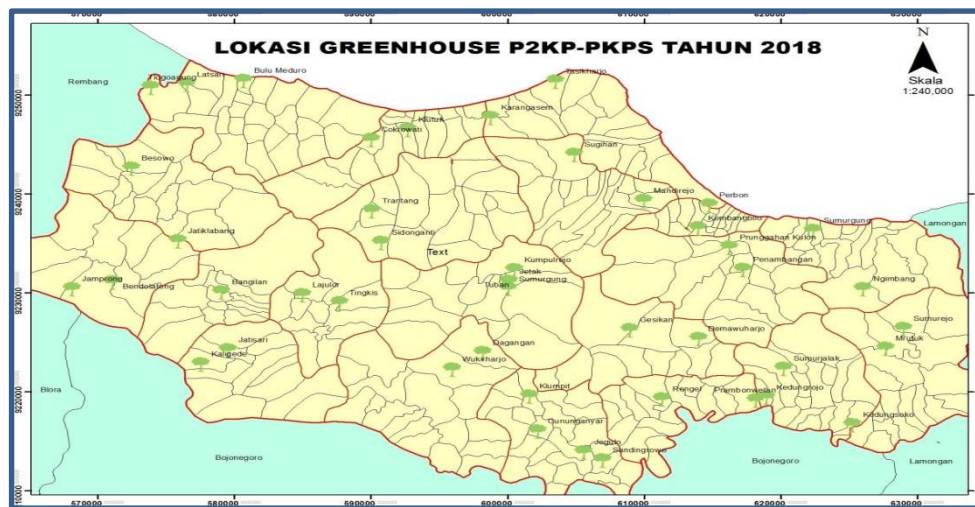
Bantuan *greenhouse* di 43 desa penerima hibah kegiatan P2KP-PKPS tahun 2018, sebanyak 34 desa meletakkan di balai desa dan 9 desa meletakkan di rumah warga (Bendonglateng-Kenduruan dan Laju Lor-Singgahan), *greenhouse* yang diletakkan di rumah pengurus PKK (Klutuk-tambakboyo, Bulu Meduro-Bancar, Jatisari-Senori, Sugihan-Merakurak, Trantang-Kerek, Prambon Wetan-Rengel), dan *greenhouse* yang diletakkan di tanah bengkok (Jegulo-Soko).



Gambar 4. Pendirian *Greenhouse* dan Penyerahan Bibit Hibah Program P2KP-PKPS Tahun 2018

Lokasi peletakan *greenhouse* yang berbeda-beda berdasarkan kebijakan masing-masing pengurus TP-PKK, yang semua bertujuan memudahkan pengelolaan dan pengawasan oleh warga. Adapun lokasi pemetaan *Greenhouse* di semua desa penerima hibah P2KP –PKPS ditentukan

menggunakan titik koordinat dengan bantuan GPS. Teknologi GPS sudah menghasilkan alat penerima data koordinat posisi yang kompak (Harsono *et al.* 2006). Lokasi peletakan *greenhouse* di 43 Desa disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Lokasi Peletakan *Greenhouse* P2KP-PKPS tahun 2018

Pada saat distribusi dan pemasangan *greenhouse* dalam keadaan baik dan terpasang dengan benar di lokasi yang ditetapkan oleh pengurus TP PKK, namun karena pengaruh musim pada saat *dropping* maka *greenhouse* mengalami kerusakan antara lain di Desa Ngimbang dan Wukirharjo, dan langsung dilaporkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban untuk diperbaiki.

KESIMPULAN

Pendampingan distribusi bibit dan pupuk serta pemetaan *greenhouse* kegiatan P2KP-PKPS dikatakan berhasil karena meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota TP - PKK Desa penerima hibah dan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan penanganan keamanan pangan segar. Program P2KP-PKPS dapat berjalan dengan lancar karena adanya peran aktif dari Ketua TP PKK sebagai fasilitator dan penghubung antara warga penerima hibah dengan aparat pemerintah. Saran dan dapat diberikan antara lain yaitu meningkatkan koordinasi semua pihak untuk keberlanjutan program, program P2KP-PKPS dapat ditindaklanjuti dengan program pengolahan hasil pemanfaatan pekarangan, perlunya fasilitasi pembentukan usaha pengolahan pangan skala UMKM yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang berasal dari pekarangan sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban atas pendanaan Program P2KP-PKPS 2018, UPTD Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Tuban, Pengurus TP-PKK Desa, dan seluruh Tim dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan distribusi bibit, pupuk, dan pemetaan *greenhous* dalam program P2KP-PKPS Kabupaten Tuban tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tanpa Tahun, *Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)*, diakses tanggal 23 Juni 2019, (<http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/percepatan-penganekaragaman-konsumsi-pangan-p2kp>).
- . ——— Tanpa Tahun, *Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)*, diakses tanggal 23 Juni 2019, (<http://bkp.pertanian.go.id/gerakan-konsumsi-pangan-beragam-bergizi-seimbang-dan-aman-b2sa>).
- Diharja, U 2015. *Implementasi Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Di Kota Lubuklinggau*. Thesis S2, Universitas Terbuka.
- Harsono, Subhan, Sikaridhoto, dan Sudarsono 2006, *Tenik Pemetaan Wilayah secara Cepat dan Akurat Menggunakan GPS yang Dikoordinasikan melalui Jaringan 3G atau yang Setara*, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Institut Teknologi Bandung.
- . ——— 1996, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan*.
- . ——— 2002, *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan*.
- . ——— 2009, *Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*.
- . ——— 2009, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*.
- . ——— 2018, *Petunjuk Teknis. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP-PKPS) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*, Kabupaten Tuban 2018.
- Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan-Badan Ketahanan Pangan 2016, *Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2015*.
- Susilo A Suradji M dan Dian P S, 2018, *Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kota Tanjungpinang*, diakses tanggal 20 Juni 2019, (<http://repository.umrah.ac.id/1985/1/SUSILO-110563201085-FISIP-2018.pdf>).



SEKOLAH PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI DESA

WOMEN'S SCHOOL IN INCREASING WOMEN'S PARTICIPATION IN THE VILLAGE

Agustina Dewi Setyari

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
agustina.sastra@unej.ac.id

ABSTRAK

Tindakan afirmatif bagi perempuan tidak akan maksimal ketika kebijakan tidak menguntungkan perempuan. Keberadaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, harus bisa meningkatkan partisipasi perempuan. Namun, sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut tidak membawa banyak perubahan pada partisipasi perempuan di tingkat desa. Mereka masih lebih banyak menjadi objek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Kenyataan ini membuat kelompok literasi perempuan melalui program sekolah perempuan menjadi cukup mendesak untuk diimplementasikan oleh desa. Melalui kelompok keaksaraan ini, diharapkan kader perempuan akan muncul menjadi kekuatan pendorong bagi partisipasi perempuan di tingkat desa. Dengan munculnya kader-kader aktivis desa, diharapkan partisipasi perempuan di desa akan meningkat sehingga mereka tidak lagi sekadar obyek dan menjadi bahan yang sah bagi pemerintah desa.

Kata kunci: aksi afirmatif, literasi perempuan, dan sekolah perempuan desa

ABSTRACT

Affirmative action for women will not be maximal when policies do not favor women. The existence of UU No. 6 tahun 2014 concerning villages, should be able to increase women's participation. However, it is very unfortunate that the law did not bring much change to women's participation at the village level. They are still more objects of the policies made by the village government. This reality makes women's literacy groups through women's school programs become urgent enough to be implemented by the village. Through this literacy group, it is hoped that female cadres will emerge to be the driving force for women's participation at the village level. With the emergence of village activist cadres, it is expected that women's participation in the village will increase so that they are no longer merely objects and become legitimate material for the village government.

Keyword: affirmative action, women's literacy, and village women's schools

PENDAHULUAN

Faktor sosial budaya merupakan salah satu penyebab utama rendahnya angka partisipasi perempuan pada sektor pengambilan kebijakan di wilayah publik, khususnya di wilayah pedesaan. Faktor sosial budaya yang membuat rendahnya tingkat partisipasi perempuan di sektor pengambilan kebijakan di wilayah publik ini adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan khususnya di pedesaan. Hal ini disebabkan pandangan sosial budaya yang menempatkan perempuan di wilayah domestik. Walaupun perempuan dilibatkan di wilayah publik lebih banyak berperan sebagai pendamping atau pembantu, bukan peran utama sebagai pengambil kebijakan.

Pilihan para perempuan untuk mengenyam pendidikan ala kadarnya juga sangat dipengaruhi oleh faktor gender yang melekat di masyarakat. Di masyarakat, perempuan diidentikan dengan penanggung jawab ranah domestik. Hal ini menimbulkan asumsi dalam masyarakat bahwa pendidikan menjadi tidak penting bagi perempuan. Menurut Fakih (2012:13-23) pengaruh budaya mengakibatkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin sebagai akibat dari perlakuan sosial yang berbeda terhadap perilaku laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan gender. Perlakuan

sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan adanya perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang diberi peran di ranah domestik membuat perempuan dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi.

Hal ini juga banyak terjadi di desa-desa yang ada di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember (2015), jumlah perempuan di Kecamatan Tempurejo tidak jauh berbeda daripada jumlah laki-laki. Jumlah perempuan di Kecamatan Tempurejo mencapai 35.323 jiwa sedangkan jumlah laki-laki 35.340 jiwa. Perbedaan jumlah tersebut tentu membuat rendahnya pendidikan pada perempuan juga menjadi lebih besar daripada laki-laki di Kecamatan Tempurejo. Persoalan rendahnya angka pendidikan pada perempuan di Kecamatan Tempurejo khususnya Desa Tempurejo menjadi masalah yang cukup krusial untuk segera ditangani. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya stereotipe dan marginalisasi perempuan di Desa Tempurejo yang berimplikasi pada rendahnya partisipasi perempuan di wilayah publik khususnya dalam pengambilan kebijakan. Rendahnya pendidikan formal maupun nonformal memiliki dampak yang cukup besar juga pada akses ekonomi perempuan Desa Tempurejo. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan formal dan pendidikan nonformal berbanding lurus dengan rendahnya akses ekonomi yang berimplikasi pada tingginya tingginya tingkat kemiskinan perempuan di Desa Tempurejo. Realitas tersebut membuat keberadaan kelompok literasi perempuan melalui sekolah perempuan menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan melalui sekolah perempuan tersebut, perempuan-perempuan Desa Tempurejo dapat diberi tambahan pengetahuan dan keahlian yang diharapkan bisa meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah publik khususnya di tingkat desa. Dengan keterlibatan aktif para perempuan di tingkat desa diharapkan kebutuhan perempuan menjadi diakomodasi oleh pemerintah desa. Pemerintah desa tidak lagi hanya mengagendakan pembangunan infrastruktur tetapi juga mengagendakan program pembangunan sumber daya manusia khususnya perempuan yang masih banyak tertinggal di Desa Tempurejo.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian pada makalah ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (1993:30) pendekatan kualitatif dipergunakan untuk memahami suatu gejala sosial secara holistik (utuh). Metode kualitatif ini memungkinkan kita untuk memahami masyarakat dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan terhadap dirinya.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sekolah perempuan ini adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Persiapan dalam pelaksanaan sekolah perempuan pada masyarakat ini meliputi beberapa hal berikut.

- a) Mendata perempuan-perempuan usia produktif di Desa Tempurejo, Kabupaten Jember
- b) Menyiapkan tempat yang sesuai untuk melaksanakan sekolah perempuan
- c) Menyiapkan media yang digunakan untuk melaksanakan sekolah perempuan

2. Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan program ini adalah metode partisipatif. Maksudnya, dalam pelaksanaan sekolah perempuan ini melibatkan secara aktif para perempuan usia produktif di Desa Tempurejo, Kabupaten Jember yang berminat untuk mengikuti sekolah ini. Pelaksanaan dan materi sekolah perempuan menggunakan modul yang sudah disediakan.

Berdasarkan uraian masalah yang dihadapi di atas, kegiatan yang dilakukan sebagai pemecahan masalah adalah sebagai berikut.

- Ceramah

Ceramah digunakan untuk mengawali sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan perempuan di tingkat desa. Dengan metode ceramah ini diharapkan para perempuan akan lebih mengetahui tentang pentingnya partisipasi perempuan di tingkat desa dalam mewujudkan kebutuhan perempuan di desa yang tidak hanya berupa infrastruktur.

- Diskusi

Dengan menggunakan metode diskusi ini diharapkan dapat dilakukan penggalian dan pemetaan masalah yang ada di sekitar peserta. Dengan adanya penggalian dan pemetaan masalah tersebut diharapkan dapat dibuat rencana tindak lanjut sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui kelompok literasi.

- Permainan

Permainan ini dilakukan sebagai media untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Selain untuk mempermudah penyampaian materi juga untuk membuat acara sosialisasi menjadi lebih menyenangkan.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan ini adalah memantau dengan tes tanggapan lisan serta penggalian input dari sasaran. Selain itu juga dapat dilihat dari RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang telah disepakati peserta. RTL yang disepakati adalah terbentuknya Kelompok Literasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yakni pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, kekerasan (*violence*), dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) (Fakih, 2012). Stereotipe atau pelabelan negatif seringkali membuat perempuan menjadi pihak yang distigmatisasi sebagai penyebab munculnya masalah. Perempuan lebih banyak dimarginalkan karena budaya menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab wilayah domestik sehingga saat bekerja di wilayah publik seringkali mendapatkan upah yang lebih kecil untuk beban kerja yang sama atau bahkan lebih berat. Di wilayah publik khususnya di bidang politik seringkali keputusan dan suara perempuan tidak diperhatikan. Perempuan sebagai makhluk yang dianggap lemah secara fisik dan nonfisik seringkali juga menjadi korban kekerasan. Selain itu, beban kerja perempuan juga lebih panjang dan lebih banyak. Beban kerja domestik pada perempuan seringkali dianggap sebagai aktivitas yang tidak produktif. Padahal aktivitas domestik yang dilakukan perempuan sangat panjang karena tidak mengenal jam kerja. Lima masalah tersebut merupakan manifestasi dari peran gender di masyarakat yang sebagian besar merugikan perempuan.

Manifestasi ketidakadilan gender yang seringkali menimpa perempuan di pedesaan adalah stereotipe dan marginalisasi pada perempuan. Peran domestik yang dibebankan pada perempuan membuat perempuan dipandang tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan stereotipe yang dilekatkan pada perempuan sebagai penanggung jawab ranah rumah tangga. Ada anggapan di masyarakat bahwa ranah rumah tangga adalah ranah yang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dalam pengelolaannya. Pandangan itu kemudian mengakar di masyarakat sehingga berkembang menjadi budaya kuat untuk mengebiri perempuan dari dunia pendidikan.

Sosialisasi tentang urgennya pendidikan bagi perempuan telah berkumandang di mana-mana. Pada September 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan

membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendirikan sekolah perempuan yang akan memberi pendidikan dan pengetahuan kepada perempuan dari berbagai usia, secara gratis dan bebas (Solichah, 2018). Namun, realisasi dari MoU tersebut masih belum dilakukan. Harusnya MoU tersebut ditindaklanjuti dengan Perbub sehingga dinas terkait dapat meneruskan dengan surat pada pemerintah desa agar merealisasikan sekolah perempuan tersebut. Perintah melalui Perbub terbukti lebih efektif untuk menginstruksi pemerintah desa agar merealisasikan sekolah perempuan dalam rangka memberdayakan perempuan sehingga dapat berpartisipasi secara aktif di tingkat desa.

Melihat urgennya peran seorang perempuan dalam membangun karakter masyarakat, tentu menjadi sangat pentinglah pendidikan bagi para perempuan. Pendidikan bagi perempuan ini salah satunya bisa dilakukan melalui sekolah perempuan. Sekarnadi merupakan salah satu sekolah perempuan yang dirintis di Desa Tempurejo. Sekolah Perempuan tersebut mencoba membangun kesadaran kritis perempuan dengan menggunakan metode diskusi dalam setiap pembelajarannya. Oleh karena itu, Sekolah Perempuan Sekarnadi mencoba meningkatkan partisipasi aktif warga belajar dalam proses pembelajaran, dengan berpartisipasi aktif baik di Sekolah Perempuan Sekarnadi maupun di organisasi lain untuk pengambilan keputusan. Selain itu, melalui sekolah perempuan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kontrol dengan memberikan pengetahuan pada warga belajar dan selanjutnya kontrol akan dimiliki warga belajar dengan sendirinya.

Namun, hal ini belum berjalan dengan maksimal karena adanya bias gender yang ada dalam masyarakat yang seringkali menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan tidaklah penting. Hal ini juga menjangkiti pemikiran para perangkat desa di Desa Tempurejo yang terkesan sangat tidak responsif gender. Dengan asumsi bahwa peran perempuan lebih banyak berada dalam rumah tangga, pendidikan bagi perempuan cukuplah pendidikan tentang memasak, mengurus anak secara kasat mata, dan berdandan. Bias gender yang terjadi sekian lama itulah yang pada akhirnya membuat para perempuan merasa menjadi manusia kedua dan hanya berperan di ranah domestik.

Peran domestik yang diberikan masyarakat pada perempuan ini membuat pendidikan formal menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting bagi perempuan. Perempuan lebih banyak mengenyam pendidikan nonformal yang berkaitan dengan ranah domestik seperti pendidikan memasak, berdandan, mengurus anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kerumahtanggaan. Hal ini menyebabkan dampak jangka panjang yang berupa rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di ranah publik khususnya di tingkat desa. Mereka lebih banyak menjadi objek dari kebijakan. Ketika perempuan tidak banyak terlibat dalam pengambilan kebijakan di ranah publik, seringkali mengakibatkan kebutuhan perempuan tidak banyak diakomodasi. Hal ini dapat dilihat dari dana desa yang belum banyak mengakomodasi kebutuhan perempuan.

Dana desa masih lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang diasumsikan merupakan kebutuhan masyarakat secara general dan diasumsikan telah mewakili kebutuhan perempuan. Padahal banyak dari kebutuhan perempuan yang tidak selalu berhubungan dengan infrastruktur. Misalnya kebutuhan kesehatan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan, stunting, TBC (*Tuberculosis*), dll. yang seringkali terabaikan karena dianggap sebagai kebutuhan pribadi. Kebutuhan lain yang seringkali terabaikan adalah kebutuhan akan perlindungan hukum terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pengembangan kewirausahaan yang berupa industri rumah tangga yang banyak dilakukan oleh perempuan seringkali juga tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah desa. Semua pengabaian tersebut lebih banyak dipicu oleh faktor minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa.

Berdasarkan realitas tersebut pada akhirnya membuat perempuan wajib memiliki pendidikan yang memadai, baik pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan kritis dan mencerahkan pada perempuan ternyata menjadi salah satu pemicu peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik khususnya perempuan.

Pendidikan nonformal bagi perempuan juga sudah mulai dikembangkan dengan berbagai model. Salah satu model pendidikan nonformal bagi para perempuan yang dapat dilakukan ini dalam bentuk sekolah perempuan di tingkat desa. Dengan adanya sekolah perempuan di wilayah desa, diharapkan para perempuan mau dan dapat berperan aktif karena selain dekat dari sisi lokasi, juga dekat dengan kebutuhan mereka sehingga mereka dapat dengan mudah mengikutinya tanpa alasan jauh dan beban tanggung jawab keluarga atau ranah domestik lain.

Kendala lain dari pemerintah desa untuk menyelenggarakan sekolah perempuan di tingkat desa adalah pendanaan dan pelaksanaan sekolah perempuan. Dalam pelaksanaan sekolah perempuan di tingkat desa, penganggaran dapat diambilkan dari dana desa yang jumlahnya cukup besar. Apabila desa tidak dapat menyelenggarakan sendiri, desa bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang pemberdayaan dan pendampingan perempuan.

Pendidikan nonformal berupa sekolah perempuan yang dilaksanakan di tingkat desa ini terkait dengan tema-tema yang berkaitan dengan bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Materi-materi dasar dalam sekolah perempuan meliputi partisipasi perempuan di ranah publik di tingkat desa, seperti dampak konsep gender terhadap perempuan, pemetaan persoalan perempuan di desa, strategi pengelolaan dan pendataan potensi desa, komunikasi di ranah publik, teknik advokasi, dan teknik negosiasi. Materi-materi dasar tersebut akan dilanjutkan dengan materi lanjutan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan responsif gender.

Materi-materi tersebut merupakan materi yang cukup penting bagi para perempuan sebagai bekal mereka berpartisipasi di tingkat desa. Hal ini dikarenakan para perempuan seringkali lemah pada sisi tersebut. Kelemahan itu terjadi karena pada umumnya para perempuan di desa tidak mengenyam pendidikan formal yang cukup tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan para perempuan tersebut berdampak pada ketidakpercayaan diri perempuan dan lemahnya keahlian perempuan untuk berargumentasi saat berpartisipasi pada kegiatan publik di tingkat desa.

Dengan adanya sekolah perempuan di tingkat desa, diharapkan para perempuan dapat menyuarakan kepentingan perempuan khususnya di tingkat desa secara lebih optimal. Dengan bekal pengetahuan kebijakan yang sensitif gender, diharapkan partisipasi perempuan di musrenbangdes dan musdes dapat meningkat. Ketika keterlibatan perempuan meningkat, diharapkan kebutuhan perempuan berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat desa juga akan dapat diakomodasi oleh pemerintah desa.

KESIMPULAN

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan membuat para perempuan di desa Tempurejo menjadi lemah secara sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya keterlibatan perempuan di ranah publik khususnya di tingkat desa. Belum banyak perempuan yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Mereka lebih banyak difungsikan sebagai objek dari kebijakan di tingkat desa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan perempuan baik pendidikan formal maupun nonformal. Adanya problem itu membuat literasi perempuan melalui sekolah perempuan menjadi sangat penting bagi perempuan di tingkat desa. Dengan sekolah perempuan yang difasilitasi oleh desa, diharapkan para perempuan lebih banyak yang berpartisipasi aktif di ranah publik berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat desa, tidak lagi hanya menjadi objek dari kebijakan di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. (Rektor Universitas Jember), Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D. (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember), dan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. (selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember), atas kerja samanya kepada peneliti selama proses penelitian ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada ahli dan informan yang telah membantu peneliti dalam penggalan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodgan, Robert dan Steven J. Taylor,. 1993, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, pp.30.
- BPS Kabupaten Jember, 2015, *Jember dalam Angka*. Jember.
- Fakih, Mansour, 2012, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. .
- Solichah, Zumrotun, 2018, Kementerian PPPA dan Pemkab Jember Berencana Dirikan Sekolah Perempuan, diakses 2 Agustus 2019, (<https://www.antaranews.com/berita/750885>)

**PERCEPATAN PENCAPAIAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI PENDAMPINGAN
WIRUSAHA PEMBELAJAR
(STUDI KASUS DI DESA JOGOREPUH, KECAMATAN PASREPAN, KABUPATEN
PASURUAN)**

***ACCELERATION OF ACHIEVEMENT OF VILLAGE'S SELF-SUFFICIENCY THROUGH
LEARNING ENTREPRENEUR
(CASE STUDY IN DESA JOGOREPUH, KECAMATAN PASREPAN, KABUPATEN
PASURUAN)***

Sugeng Hariadi¹, Susila Candra², dan Arum Soesanti³

^{1, 2, 3} LPPM, Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

E-mail: sugeng.hariadi@staff.ubaya.ac.id

ABSTRAK

Indonesia masih membutuhkan tidak kurang dari 4 juta wirausaha karena hingga akhir 2018, jumlah pengusaha baru mencapai 3,1% dari total populasi penduduk, masih tertinggal dari Malaysia (5%) atau Singapura (7%). Padahal, percepatan pertumbuhan desa mandiri memerlukan juga dukungan dari para usahawan unggul. Studi ini ditujukan untuk menjelaskan suatu fenomena dari program pendampingan wirausaha menjadi pembelajar unggul di Desa Jogorepuh, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Diharapkan diperoleh pengetahuan deskriptif (*descriptive knowledge*), pengetahuan eksplanatif (*explanative knowledge*), hingga pengetahuan eksploratif (*explorative knowledge*) dari sebuah contoh konkret tumbuh dan berkembang jiwa wirausaha unggul di desa. Studi ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kasus prospektif (*prospective case study*) untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan objek, sehingga memungkinkan untuk ditindak lanjuti berupa *action research* oleh pihak terkait. Studi kasus ini juga dilakukan dalam latar alamiah (*real-life events*), komprehensif (*holistic*), dan mendalam. Hasil studi menemukan bahwa ciri usahawan unggul adalah berani ambil risiko, tidak tertutup, pintar menganalisis, mudah beradaptasi, berfikir berbeda secara positif, memiliki hitungan jitu, serta tidak takut gagal. Kunci sukses objek dari studi ini adalah tidak terlalu banyak alasan saat gagal, selalu yakin dan terukur dalam bertindak, fokus kepada proses dan bukan hasil, selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, serta tahu yang harus dilakukan. Dengan demikian, keberadaan wirausaha pembelajar diharapkan mampu untuk mempercepat pengembangan desa mandiri karena akan membuka banyak kesempatan dan lapangan kerja.

Kata kunci: desa mandiri, wirausaha pembelajar, kunci sukses.

ABSTRACT

Indonesia still needs around 4 million entrepreneurs because by the end of 2018, the number of new entrepreneurs reached 3.1% of the total population, still lagging behind Malaysia (5%) or Singapore (7%). In fact, the acceleration of the growth of independent villages requires also the support of learning entrepreneurs. This study is aimed at explaining a phenomenon of entrepreneurship assistance programs to become superior learners in Desa Jogorepuh, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. From this study, it is expected that descriptive knowledge, explanatory knowledge, and explorative knowledge can be obtained from a concrete example of growing and developing superior entrepreneurial spirit in the village. This study uses qualitative methods with prospective case studies to find trends and direction of object development, making it possible to follow up in the form of action research by related parties. This case study is also carried out in a real-life event, comprehensive (holistic), and profound. The results of the study found that the characteristics of superior entrepreneurs were brave to take risks, not closed, smart to analyze, easy to adapt, think positively differently, have accurate counts, and not afraid of failure. The key to the success of the object of this study is that there are not too many reasons when failing, always confident and measurable in acting, focusing on

processes and not results, always taking advantage of opportunities, and knowing what to do. Thus, the existence of learning entrepreneur is expected to be able to accelerate the development of independent villages because it will open up many opportunities and employment opportunities.

Keywords: independent village, learning entrepreneur, key to success.

PENDAHULUAN

Penduduk di Indonesia bertumbuh sangat pesat sehingga menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Berdasarkan sensus 2010, jumlah penduduk Indonesia diproyeksi oleh BPS pada 2019 mencapai 268.074.600 jiwa (www.bps.go.id). Sementara pemerintah belum mampu mengimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia harus diubah agar tidak lagi menjadi pencari kerja, tetapi ikut berperan serta menjadi penyedia lapangan kerja baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Menjadi wirausaha merupakan solusi menuju kemandirian bangsa.

Jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah wirausaha di negara lain. Pada 2019, jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 3,1 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan jumlah wirausaha di beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Jumlah wirausaha di Amerika Serikat mencapai 11 persen, di Singapura mencapai 7 persen, dan di Malaysia mencapai 5 persen (Rachmawati, SN 2019). Kalau Indonesia ingin menjadi negara yang maju harus terus mengembangkan sektor wirausaha.

Melihat perbandingan jumlah wirausaha di negara maju dengan jumlah wirausaha di Indonesia, maka wajar jika pertumbuhan perekonomian di Indonesia juga masih belum optimal. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia harus didorong untuk menjadi wirausaha sehingga jumlahnya meningkat serta dapat berperan dalam mendukung ekonomi negara menuju kemandirian bangsa.

Peningkatan jumlah wirausaha diharapkan dapat mendukung kemajuan ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Pertumbuhan jumlah wirausaha dan usaha kecil perlu didukung oleh lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi berperan sangat penting dalam memotivasi lulusan serta masyarakat di sekitarnya agar menjadi wirausaha, khususnya generasi muda.

Peningkatan wirausaha dari kalangan muda akan mengurangi pengangguran bahkan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Angkatan kerja muda didorong dan didampingi untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan demikian menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran. Pendidikan, pelatihan, atau pendampingan memang penting dan sangat dibutuhkan sebagai modal dasar bagi para wirausaha. Hal ini dapat mengubah pola pikir seseorang untuk menjadikan wirausaha yang bekerja dengan menggunakan ide dan kreativitas.

Pihak perguruan tinggi dan *stakeholders* bertanggung jawab dalam mendampingi, mendidik, dan memberikan kemampuan dalam melihat peluang bisnis serta mengelola bisnis tersebut serta memberikan motivasi untuk mempunyai keberanian menghadapi risiko bisnis. Peran perguruan tinggi dalam memotivasi para generasi muda menjadi *young entrepreneurs* merupakan bagian dari salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan.

Aktivitas berskala nasional tersebut, bisa dimulai dan dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa perlu dan harus didorong untuk cepat berkembang dan bertumbuh, layaknya sebuah negara, menjadi wilayah mandiri.

Padahal, percepatan pertumbuhan desa menjadi wilayah mandiri, memerlukan juga dukungan dari para usahawan unggul. Pada 2018, Indonesia memiliki 83.931 desa. Sementara data 2017, Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, memiliki 777 kelurahan dan 7.724 desa. Bila ingin bertumbuh lebih cepat menjadi desa mandiri, salah satu yang harus didorong adalah penciptaan wirausaha muda di desa.

Studi ini ditujukan untuk menjelaskan suatu fenomena dari program pendampingan wirausaha menjadi pembelajar unggul di Desa Jogorepuh, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Wirausaha muda yang didampingi adalah pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) Bina Logam. UKM ini tidak dapat memenuhi permintaan konsumen untuk produk ring komponen otomotif dengan permintaan mencapai 100 ribu per minggu karena kemampuan produksi hanya sekitar 36 ribu per minggu.

Selain itu, untuk produk *push step* dengan proses *powder coating* masih bergantung kepada pihak ketiga sehingga waktu dan biaya produksi ditentukan oleh pihak ketiga. Faktor manajemen proses produksi, penguasaan teknologi proses, manajemen perusahaan, serta keuangan juga menjadi masalah yang harus dipecahkan. Pendampingan dilakukan agar diperoleh solusi berupa penambahan fasilitas produksi, peningkatan ketrampilan baru terkait teknologi proses dalam bidang *powder coating*. Di samping itu pemberian pengetahuan tentang manajemen produksi, perusahaan, dan keuangan bagi UKM Logam.

Dalam bidang teknologi, pendampingan diawali dengan melakukan evaluasi proses dan sistem produksi termasuk *layout* produksi, kemudian dilakukan peningkatan pengetahuan teknologi dan pembuatan atau pengadaan peralatan proses, serta perbaikan manajemen produksi di UKM Bina Logam. Pelaksanaa *monitoring* kegiatan selalu dilakukan pada setiap akhir sub kegiatan. Sedangkan dari aspek ekonomi akan dilakukan evaluasi sistem manajemen internal perusahaan dan sistem keuangan, kemudian akan dilakukan perbaikan metode manajemen perusahaan dan sistem keuangan yang sesuai dengan kondisi internal dan pasar industri komponen otomotif.

Ditargetkan akan terjadi peningkatan kapasitas produksi ring dan penurunan biaya produksi engsel karena penguasaan ketrampilan bidang *powder coating* oleh UKM. Demikian juga melakukan pembenahan terhadap manajemen produksi, manajemen perusahaan, dan sistem keuangan di UKM Bina Logam Desa Jogorepuh, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Studi pendampingan ini diharapkan diperoleh pengetahuan deskriptif (*descriptive knowledge*), pengetahuan eksplanatif (*explanative knowledge*), hingga pengetahuan eksploratif (*explorative knowledge*) dari sebuah contoh konkret tumbuh dan berkembang jiwa wirausaha muda dan unggul di desa.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kasus prospektif (*prospective case study*) untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan objek, sehingga memungkinkan untuk ditindak lanjuti berupa *action research* oleh pihak terkait (Endraswara 2012, Mulyana & Solatun 2007). Seperti halnya jenis penelitian kualitatif lain yakni fenomenologi, etnografi, etnometodologi, *grounded research* dan studi teks, studi kasus ini juga dilakukan dalam latar alamiah, holistik, dan mendalam (Mulyana 2013, Stake 1994, Yin 1994, Yunus 2010).

Alamiah artinya kegiatan pemerolehan data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata (*real-life events*). Tidak perlu ada perlakuan-perlakuan tertentu baik terhadap subjek maupun konteks di mana studi dilakukan sehingga semua berlangsung secara alamiah.

Holistik artinya informasi yang diperoleh menjadi data secara komprehensif hingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa. Berdasarkan data akan diperoleh fakta atau realitas. Agar memperoleh informasi yang komprehensif, informasi dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian, catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek.

Selain wawancara mendalam, juga dilakukan lima teknik pengumpulan data, yakni dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (*participant observation*), dan artifak fisik. Masing-masing untuk saling melengkapi (Rahardjo 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) logam Jawa Timur khususnya di Kota dan Kabupaten Pasuruan telah banyak memproduksi berbagai macam jenis produk. UKM-UKM tersebut telah beroperasi dan berkiprah cukup lama dalam mendukung perkembangan industri manufaktur Jawa Timur. Demikian juga perkembangan usaha dari tahun ke tahun cukup baik. Pada generasi awal, UKM melaksanakan proses produksi dengan masih mengandalkan pekerjaan keterampilan tangan. Saat ini proses produksi telah banyak yang mempergunakan mesin produksi, meskipun tipe mesin-mesin masih sangat sederhana.

Dengan fasilitas produksi yang sangat terbatas, karya-karya hasil produksi UKM Logam Pasuruan telah banyak dipergunakan oleh berbagai pihak baik di dalam maupun di luar Jawa Timur.

Salah satu potensi UKM Logam di Kabupaten Pasuruan saat ini adalah produksi komponen utama dan komponen pendukung otomotif seperti *tool kits* (alat perkakas) dan aksesoris otomotif. Untuk produk aksesoris otomotif paling banyak diproduksi adalah untuk khusus sepeda motor. Meskipun perkembangan UKM Logam cukup baik saat ini, akan tetapi potensi yang dimiliki masih terus berkembang.

Hal ini bisa terwujud jika aplikasi teknologi proses, manajemen produksi dan perusahaan yang benar bisa diterapkan dan diaplikasikan. Dengan demikian, kapasitas produksi, efektifitas dan efisiensi proses serta pendapatan UKM akan meningkat.

Salah satu daerah UKM Logam di Kabupaten Pasuruan yang cukup berpotensi untuk dikembangkan adalah pengerajin / usaha logam yang berada di desa Jogorepuh, Kecamatan Pasrepan. UKM Logam di desa ini, umumnya memproduksi komponen-komponen otomotif, khususnya komponen dan aksesoris sepeda motor. Contoh komponen dan aksesoris sepeda motor tersebut adalah seperti ring baut, tutup pentil, *handle*, penutup baut, engsel, *foot step*, *hand grip*,udukan *shock absorber* dan lain-lain.

Setiap jenis aksesoris sepeda motor tersebut biasanya terdiri dari beberapa varian produk, baik berbeda dalam motif, warna, dan dimensi produk. Oleh karena itu, mesin produksi harus memiliki kualifikasi kecepatan proses yang tinggi dan mudah dalam men-set-up, agar varian produk pesanan dapat terpenuhi dengan cepat.

Komponen-komponen aksesoris tersebut diproduksi salah satunya oleh UKM Bina Logam, milik responden. UKM ini merupakan pengembangan dari UKM Mayangan, Kota Pasuruan. Responden yang berpendidikan hanya sampai pendidikan dasar (SD) mengawali bekerja sebagai tenaga serabutan di UKM Mayangan, Kota Pasuruan. Setelah merasa cukup menimba ilmu, responden pulang ke desa untuk berusaha mandiri mulai dari awal.

UKM Bina Logam termasuk salah satu dari sekian UKM yang cukup baik untuk dijadikan *trigger* bagi UKM lain di lingkungan tersebut. Di samping itu, pemilik UKM tersebut memiliki kemauan untuk maju dan berkembang. Rasa ingin tahu cukup tinggi dan selalu menerapkan semua masukan dari pendamping. Setiap kunjungan yang berarti tambahan pengetahuan selalu terlihat hasil perbaikannya di kunjungan pendamping pada waktu berikutnya.

Jenis proses produksi atau proses manufaktur yang paling banyak dipergunakan adalah proses pengecoran, proses pemesinan, proses pembentukan, dan penyambungan serta proses penyelesaian akhir (*finishing*) seperti, proses *polishing*, proses *anodizing*, *phosphating*, *galvanizing*, *electroplating-chrome*, *finishing* lain. Salah satu produk unggulan dari UKM Bina Logam yang sampai saat ini adalah produk *ring* dan *push step*.

Permasalahan awal yang dihadapi oleh responden sebagai pemilik UKM Bina Logam adalah kapasitas produksi yang rendah, sistem manajemen perusahaan dan keuangan yang belum diterapkan, juga proses *wet coating* (*powder coating*) yang masih bergantung kepada pihak lain, serta penguasaan teknologi proses yang dimiliki SDM di UKM Bina Logam yang masih rendah.

Tabel 1. Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Item	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Kapasitas Produksi	36.000 unit per minggu	100.000 unit per minggu
Pembukuan Keuangan	Belum dilakukan	Sudah dilakukan
Manajemen perusahaan	Model rumahan	Sederhana UMKM
Proses <i>powder coating</i>	Dikerjakan pihak lain	Dikerjakan sendiri
Layout mesin & alur produksi	Belum tertata & kumuh	Tertata & rapi

Pendampingan yang dilakukan terhadap responden telah memberikan solusi terhadap permasalahan terutama dalam hal peningkatan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dan peningkatan kemampuan proses. Capaian 100.000 unit per minggu sesuai permintaan pasar telah terpenuhi bahkan telah melebihi.

Demikian juga telah membantu memperbaiki sistem manajemen produksi dan sistem keuangan responden dalam mengelola UKM Bina Logam. *Workshop* pembukuan sederhana telah pula menghasilkan praktik pembukuan sesuai dengan harapan. Keuangan telah tercatat harian secara rinci serta mulai memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Muncul kebiasaan mencatat dan melihat catatan dalam operasional usaha setiap hari. Keuntungan finansial juga telah meningkat dengan tata kelola keuangan sederhana yang juga telah diterapkan. Semua ini sesuai dengan rencana pendampingan yang telah disusun.

Peningkatan kapasitas produksi melalui perbaikan proses produksi khususnya dalam penggunaan mesin bubut telah terbukti. Penguasaan teknologi terkait dengan metode proses bubut dan proses *wet painting* telah jauh lebih efektif dan efisien, padahal responden hanya berpendidikan rendah. Namun, semangat pembelajar dari seorang wirausaha muda terbukti mampu membuahkan hasil yang baik.

Hasil studi melalui wawancara terhadap responden dan orang-orang di sekitarnya, menemukan bahwa ciri usahawan unggul adalah berani ambil risiko, tidak tertutup, pintar menganalisis, mudah beradaptasi, berfikir berbeda secara positif, memiliki hitungan jitu, serta tidak takut gagal.

Responden berani mengambil risiko untuk ke luar dari zona nyaman sebagai pekerja di UKM asal, keberanian ini juga terbukti saat mengambil putusan-putusan bisnis terkait penerimaan *order*, pembukaan pasar dan *networking* baru, serta berinvestasi.

Responden tidak tertutup untuk menerima saran dan nasihat perbaikan dari manapun. Terlihat ketika proses pendampingan, responden selalu memperhatikan dan terbuka menyampaikan permasalahan untuk dicarikan solusi terbaik.

Kepintaran menganalisis pasar dan situasi bisnis umum, merupakan kunci kesuksesan berikutnya. Terbukti responden selalu mencari ide-ide kreatif baik terkait jenis produk, varian, bahkan proses produksi. Semua disesuaikan dengan permintaan pasar.

UKM Bina Logam dikelola oleh responden untuk selalu terbuka beradaptasi dengan situasi dan kondisi bisnis dan pasar yang ada. Keputusan bisnis yang dilakukan dirumuskan secara fleksibel sehingga adaptis dengan situasi.

Responden memiliki cara berfikir berbeda dengan sebagian besar lingkungannya, namun secara positif. Mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Mau belajar meski susah payah dan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Namun semuanya telah dihitung dan dipertimbangkan dengan jitu. Akhirnya, responden selalu berani mencoba memulai serta tidak takut gagal. Karena dari kegagalan, akan selalu ada hikmah dan pelajaran yang sangat berharga.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kunci sukses responden sebagai pemilik UKM Bina Logam serta objek dari studi ini adalah *tidak terlalu banyak alasan saat gagal, selalu yakin dan terukur dalam bertindak, fokus kepada proses dan bukan hasil, selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, serta tahu yang harus dilakukan*. Semua sisi baik ini adalah ciri seorang pembelajar yang baik dan akan menjadi syarat keberhasilan pada masa datang.

Bila di setiap desa, hadir para usahawan muda dengan mental dan kualitas yang baik, maka percepatan pengembangan desa mandiri akan lebih menjanjikan. Keterbatasan kemampuan pemerintah pusat hingga desa, akan mampu ditutupi oleh keberadaan para wirausaha muda. Penyerapan tenaga kerja akan terjadi sehingga akan mengurangi arus migrasi dari desa ke kota serta memeratakan kemakmuran dan kesejahteraan hingga ke pelosok tanah air.

KESIMPULAN

Ciri wirausaha muda yang unggul adalah berani ambil risiko, tidak tertutup, pintar menganalisis, mudah beradaptasi, berfikir berbeda secara positif, memiliki hitungan jitu, serta tidak takut gagal. Kunci sukses wirausaha pembelajar adalah *tidak terlalu banyak alasan saat gagal, selalu yakin dan terukur dalam bertindak, fokus kepada proses dan bukan hasil, selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, serta tahu yang harus dilakukan*. Dengan demikian, keberadaan wirausaha pembelajar diharapkan mampu untuk mempercepat pengembangan desa mandiri karena akan membuka banyak kesempatan dan lapangan kerja.

UCAPAN TERIMKASIH

Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI atas hibah Pengabdian kepada Masyarakat Nomor SP DIPA-42.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Endraswara, S 2012, *Metodologi penelitian kebudayaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Horby, AS 1989. *Oxford advanced learner's dictionary*, Fourth Edition, Oxford University Press, Oxford.
- Mulyana, D & Solatun 2007. *Metode penelitian komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyana, D 2013, *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahardjo, M 2017, Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya, *Paper*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rachmawati, SN 2019, *13 upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia*, diakses pada 20 Juni 2019 (<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>).
- Stake, RE 1994, Case Studies, in Norman KD & Yvonna SL (eds.), *Handbook of qualitative research*, SAGE Publications, Inc, Thousand Oaks, California
- Yin, RK 1994, *Case study research*, SAGE Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Yunus, HS 2010, *Metode penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- <https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000>, Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010, diakses pada 13 Juli 2019.
- www.littlemachineshop, Instruction Manual Mini Lathe, 396 W Washington Blvd #500, Pasadena CA 91103.



TRIPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA-DESA WISATA KABUPATEN MALANG

Rumsari Hadi Sumarto, Asmi Desanta

Jalan Wates 99 Kawasan Bayeman Permai Yogyakarta 55182

Kandidat Doktor Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya

rumsarimpa@gmail.com

ABSTRAK

Dunia pariwisata saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang membutuhkan sarana untuk berlibur dengan menjelajahi destinasi-destinasi wisata sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak muncul destinasi wisata baru tidak terkecuali desa wisata. Namun demikian, masyarakat di beberapa desa wisata belum siap untuk mengelola secara profesional sehingga beberapa desa wisata kurang berkembang dengan baik dan menjadi *image* yang kurang baik bagi para wisatawan yang berkunjung ke desa wisata tersebut. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya interaksi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri pariwisata dalam meningkatkan kualitas SDM yang dapat mengembangkan performa desa wisata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah studi pustaka dengan menganalisis makalah-makalah desa wisata dari peneliti sebelumnya. Setelah dilakukan analisis, penulis mengemukakan analisis dari pendapat penulis melalui teori yang mendasari penulisan makalah tentang *triple helix* dalam tata kelola desa wisata di kabupaten Malang. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa SDM yang kurang profesional salah satunya menjadi kendala dalam pengelolaan destinasi wisata. Untuk itu diperlukan interaksi sinergis antar beberapa *stakeholder* untuk meningkatkan kualitas SDM yang pada akhirnya dapat meningkatkan performa desa wisata. Interaksi antara perguruan tinggi, industri pariwisata, dan pemerintah setidaknya mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas SDM di desa wisata sehingga mampu mengelola desa wisata menjadi lebih optimal dan profesional. Dengan demikian, pengembangan SDM perlu dilakukan melalui interaksi tiga *helix* yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan industri pariwisata dalam mendukung pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang

Kata kunci: Desa Wisata, Sumber Daya Manusia, *Triple Helix*

PENDAHULUAN

Pariwisata di era saat ini semakin berkembang baik di berbagai negara hingga daerah-daerah terutama daerah yang ada di Indonesia. Perkembangan pariwisata yang pesat tidak lain karena animo masyarakat untuk berwisata semakin tinggi dan telah menjadi kebutuhan untuk masyarakat modern saat ini. Dampaknya adalah destinasi-destinasi wisata menjadi semakin beragam baik destinasi wisata alam maupun buatan.

Salah satu destinasi wisata yang turut berkembang saat ini adalah desa wisata. Desa wisata mengalami perkembangan di era saat ini sebagai dampak dari ekspetasi masyarakat modern yang ingin kembali ke suasana desa yang sejuk dan asri tanpa kebisingan. Masyarakat modern membutuhkan tempat seperti desa wisata yang menawarkan wisata alam dengan fasilitas pendukung atau dipadukan dengan budaya dan kegiatan lainnya di desa.

Namun demikian, tidak semua desa wisata ramai dikunjungi para wisatawan. Beberapa desa wisata kurang menarik minat para wisatawan karena minimnya fasilitas yang ditawarkan di desa wisata dan SDM yang kurang profesional dalam mengelola desa wisata. Beberapa wisatawan bahkan kecewa dengan tata kelola desa wisata yang mereka kunjungi karena tidak sesuai dengan ekspetasi para wisatawan.

Untuk permasalahan SDM, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo mengatakan bahwa:

Kurangnya kualitas SDM di pedesaan dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di kawasan pedesaan masih didominasi lulusan sekolah dasar (SD) yakni sebesar 57,79%. Menyusul kemudian tenaga kerja lulusan SMP sebanyak 18,87%. Sedangkan tenaga kerja lulusan sekolah menengah atas (SMA) hanya berjumlah 13,07%. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171210/9/716842/pengembangan-vokasi-solusi-masalah-kualitas-sdm-pedesaan> (diakses 4 Juli 2019).

Lulusan sekolah dasar yang mendominasi masyarakat di suatu desa termasuk juga desa wisata menjadikan desa wisata kurang mampu dikelola secara profesional sehingga kurang mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan SDM di desa termasuk desa wisata agar SDM di desa mampu mengelola destinasi desa wisata tempat mereka tinggal.

Studi tentang pariwisata secara umum banyak dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Yoeti 2008; Damanik 2013; Sunaryo 2013; Muljadi & Warman 2016; Nugroho et al. 2017; Suwena dan Widyatmaja 2017. Para ahli tersebut juga membahas SDM di bidang pariwisata tetapi tidak membahas secara khusus mengenai SDM di desa wisata. Ahli yang membahas tentang desa wisata yaitu Hadiwijoyo 2012. Dapat dikatakan bahwa studi pariwisata banyak dianalisis oleh para ahli mengingat sektor pariwisata semakin berkembang di era modern ini khususnya pengembangan wisata di desa-desa wisata.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata di desa wisata agar semakin berkualitas, maka SDM di desa wisata juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas SDM di desa khususnya desa wisata perlu adanya campur tangan atau keikutsertaan *stakeholder* lain untuk mengembangkan SDM di desa wisata. Saat ini peran pemerintah tidak lagi menjadi dominan dalam mengembangkan SDM khususnya SDM di desa wisata. Pihak perguruan tinggi dan industri pariwisata perlu dilibatkan dalam pengelolaan SDM desa wisata sehingga para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke desa wisata tersebut dengan pengelolaan yang profesional. Interaksi antara pemerintah, perguruan tinggi dan industri sering disebut dengan *triple helix*.

Triple helix dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Leydesdorff dan Meyer 2006; Etzkowitz 2008; Arnkil et al. 2010; Ortiz et al. 2016; dan Beugre 2017. Menurut Etzkowitz (2008), *a triple helix regime typically begins as university, industry, and government enter into a reciprocal relationship with each other in which each attempts to enhance the performance of the other*. Etzkowitz (2008) juga mendeskripsikan peran dari stakeholders, *where university is the “generative principle of knowledge-based societies”, industry is the “locus of production”, and government “the source of contractual relations that guarantee stable interactions and exchange”*.

Pengembangan SDM di desa wisata perlu melibatkan tiga unsur yaitu perguruan tinggi yang berbasis pengetahuan yang berkaitan dengan inovasi, industri sebagai lokus dari produksi pariwisata dan pemerintah sebagai penjamin kestabilan interaksi antar *helix*. Untuk SDM di desa wisata perlu menambah pengetahuan yang inovatif dalam mengembangkan desa wisata. Industri juga perlu mendukung pengembangan SDM melalui karya produksi yang inovatif di bidang pariwisata, sedangkan pemerintah menjamin kesinambungan dari upaya perguruan tinggi dan industri dalam mendukung pengembangan SDM di desa wisata. Pada era saat ini dengan kemajuan teknologi yang semakin modern, maka perlu adanya dukungan dari perguruan tinggi, pemerintah dan industri pariwisata untuk meningkatkan kualitas desa wisata dengan inovasi di bidang pariwisata yang berkaitan dengan keberadaan desa wisata.

Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan SDM desa wisata khususnya di Kabupaten Malang melalui interaksi dalam *triple helix* yaitu pemerintah, perguruan tinggi dan industri pariwisata sehingga SDM pengelola desa wisata dapat lebih profesional dalam mengembangkan desa wisata.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedang jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lainnya (Pasolong 2013).

Penyusunan makalah ini menggunakan data-data dari berita di media cetak dan elektronik, buku-buku dan informasi lainnya. *Triple helix* dalam pengembangan sumber daya manusia di desa-desa wisata Kabupaten Malang disusun dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, majalah, jurnal penelitian dan informasi melalui media khususnya media *on line*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan desa wisata saat ini berkembang pesat di mana di setiap daerah bermunculan desa wisata yang menawarkan fasilitas dan atraksi wisata yang dapat diakses oleh para wisatawan. Namun demikian, maraknya perkembangan desa wisata saat ini belum diimbangi dengan kemampuan SDM yang profesional di bidang pariwisata khususnya pada pengembangan desa wisata. Banyak desa wisata bermunculan namun pengelolaannya kurang optimal sehingga wisatawan kurang tertarik untuk berkunjung ke desa wisata tersebut.

Secara umum kelemahan dari pengelolaan desa wisata melalui sisi SDM dari pengelola desa wisata dikemukakan oleh Adityas Nandariztyani.

Adityas Nandariztyani *Sekretaris Pokja Pariwisata Komite Ekonomi dan Industri Nasional* mengatakan bahwa:

Masalah SDM di desa wisata menjadi masalah menonjol lainnya. Nyaris semua desa wisata yang kami kunjungi menyadari bahwa sektor pariwisata bisa menjadi sektor yang membawa kemaslahatan ekonomi kepada mereka. Keyakinan tersebut bukan hanya sekedar mimpi, tapi memang lahir dari refleksi atas keberhasilan desa-desa wisata yang telah terlebih dulu memulai dan saat ini sudah memetik hasilnya. Namun minimnya SDM yang memahami sektor pariwisata membuat mimpi tersebut menjadi tersendat. <https://news.detik.com/kolom/d-4486765/infrastruktur-dan-sdm-desa-wisata> (diakses 4 Juli 2019).

Secara khusus di Kabupaten Malang, kendala dari SDM pengelola wisata dikemukakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

Sektor pariwisata di Kabupaten Malang, Jawa Timur, terus menggeliat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sayangnya, hal itu belum diimbangi dengan pelayanan yang baik dari pengelola tempat kepada para pelancong. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara mengatakan selama ini masih banyak keluhan dari wisatawan usai bertandang ke beberapa lokasi tujuan wisata.

https://www.liputan6.com/regional/read/3866258/ganjalan-di-balik-geliat-wisata-di-kabupatenmalang?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (diakses 4 Agustus 2019)

Ditegaskan oleh Adityas Nandariztyani bahwa:

Di lapangan terbukti, desa-desa wisata yang didukung oleh badan pengelola desa wisata dengan SDM-SDM yang mumpuni bergerak sangat progresif dalam mengembangkan destinasi-destinasi desa beserta kelengkapannya, seperti *homestay* dan atraksi-atraksi pelengkap.

<https://news.detik.com/kolom/d-4486765/infrastruktur-dan-sdm-desa-wisata>

(diakses 4 Juli 2019)

Dapat dikatakan bahwa apabila desa wisata didukung oleh SDM yang profesional, maka desa wisata tersebut akan dikelola dengan optimal dan dikembangkan dengan berbagai fasilitas yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut. Bahkan lebih jauh dampak dari keberadaan desa wisata tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa wisata melalui pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan desa wisata tersebut.

Desa wisata memang menarik untuk dikembangkan sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai desa wisata. Penelitian-penelitian sebelumnya menganalisis mengenai strategi pengembangan desa wisata pesisir, menguji jenis partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa dan merumuskan rencana strategis pengembangan desa wisata. Untuk penelitian sebelumnya tentang desa wisata diantaranya Pamela Dinas R. dan Rifky Aldila P (2017) dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Desa Wisata Pesisir Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik Desa Tambakrejo terkait dengan pengembangan desa wisata, untuk mengetahui potensi dan masalah, dan untuk mengetahui strategi pengembangan Desa Tambakrejo. Penelitian tersebut fokus pada pengembangan Desa Wisata Tambakrejo baik dari kondisi alam, keanekaragaman komoditas dan tempat wisata serta tenaga kerja lokal. Penelitian lebih difokuskan pada pengembangan desa wisata dan ketersediaan tenaga kerja lokal.

Penelitian lain dari Septiofera Eresus Prabowo, Djamhur Hamid dan Arik Prasetya (2016) yang berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Tujuan penelitian ini untuk menguji jenis partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah motivasi rendah, sumber daya manusia berketerampilan rendah, kesulitan politik dan peraturan dalam perizinan pangan lokal. Faktor pendukung adalah kepedulian dan komunikasi yang baik.

Penelitian berikut yaitu oleh Selamat Joko Utomo dan Bondan Satriawan (2017) mengenai Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Adapun tujuan penelitian untuk merumuskan rencana strategis pengembangan desa wisata di Kecamatan Karangploso yang berbasis pada keunikan dan sektor unggulan lokal (pertanian, peternakan, jasa dan lain-lain melalui pendekatan partisipatif. Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Karangploso memiliki potensi internal dan eksternal pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Strategi yang digunakan berupa klaster pengembangan desa wisata, lembaga desa wisata dan pengembangan desa wisata dengan tema desa wisata berperspektif *go green* yang unik, khas, sehat dan berbasis pada keunggulan hortikultura.

Untuk ketiga penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan desa wisata dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat di desa wisata tersebut. Pada penulisan makalah ini pengembangan desa wisata berbeda dengan penelitian sebelumnya karena melibatkan interaksi dari peran pemerintah, perguruan tinggi dan industri wisata.

Pariwisata saat ini memang menjadi perhatian utama di berbagai negara dan berbagai daerah khususnya di Indonesia. Menurut UU No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas layanan yang disediakan masyarakat,

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Suwena dan Widyatmaja 2017). Beberapa destinasi wisata di Indonesia saat ini menjadi tujuan wisata dari para wisatawan baik wisatawan domestik dan mancanegara. Desa wisata menjadi salah satu alternatif pilihan wisata yang berkembang di era saat ini bagi para wisatawan. Untuk desa wisata di dalam pariwisata menurut Hadiwijoyo (2012) dalam Prabowo dkk (2016) memiliki syarat sebuah desa wisata yaitu (1) aksesibilitas baik, (2) terdapat obyek-obyek menarik, (3) masyarakat dan aparat menerima dan mendukung, (4) keamanan, (5) tersedia fasilitas desa wisata (akomodasi, telekomunikasi, tenaga kerja), (6) beriklim sejuk, dan (7) berhubungan dengan obyek lain yang sudah dikenal masyarakat luas. Tenaga kerja di desa wisata sebagai SDM pariwisata memberi kontribusi besar dalam mengembangkan desa wisata. SDM pariwisata dalam hal ini merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (Sunaryo 2013). SDM di desa wisata memegang peranan penting dalam pengelolaan desa wisata sehingga lebih dikenal wisatawan dan dapat menjamin keberlanjutan dari keberadaan desa wisata. Oleh karena itu, SDM di desa wisata harus adaptif dan transformatif untuk mengembangkan desa wisata sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa wisata.

Untuk mengoptimalkan desa wisata memang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada SDM di desa wisata tersebut. Pengembangan kapasitas SDM desa wisata dalam meningkatkan *performance* desa wisata memerlukan interaksi dengan pihak eksternal. Peran pemerintah diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan SDM pengelola desa wisata sehingga mereka lebih profesional dalam mengelola desa wisata.

Hal ini setidaknya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang nampaknya tak main-main dalam menggarap potensi wisata di wilayahnya. Tak hanya menyasar perbaikan infrastruktur, Pemkab Malang pun berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pariwisata. Mewujudkan hal tersebut, Pemkab Malang menggelar diseminasi pengembangan wisata. <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/pemkab-malang-kembangkan-potensi-wisata-lewat-peningkatan-kualitas-sdm-1706216.html> (diakses 4 Juli 2019).

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara yang mengatakan bahwa:

Dari tahun ke tahun, pengembangan konsep Desa Wisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan. "Kami tetap fokus pada pengembangan Desa Wisata. Kami masih banyak mengajari masyarakat untuk menggunakan media sosial," kata Made Arya, saat dihubungi Antara, Rabu.

<https://jatim.antaranews.com/berita/265861/kabupaten-malang-fokus-kembangkan-desa-wisata> (diakses 4 Agustus 2019).

Peningkatan kualitas SDM di desa wisata memang diperlukan agar mampu membawa desa nya menjadi lebih menarik para wisatawan. Pemerintah Kabupaten Malang kembali menegaskan tentang pentingnya SDM yang berkualitas di desa wisata.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu bagian penting bagi sektor pariwisata. Dengan SDM yang berkualitas, maka akan menunjang pariwisata yang baik. Pemerintah Kabupaten Malang pun tidak ingin SDM pariwisata yang ala kadarnya. Mereka ingin menyiapkan SDM yang berkualitas. Para pelaku wisatanya harus siap dari sekarang, supaya ketika industri pariwisata ini nanti benar-benar telah tumbuh, kita tidak gupuh mencari SDM. Para pelaku wisata yang ada di desa tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga sektor pariwisata.

<https://malangtoday.net/malang-raja/kabupaten-malang/sdm-jadi-bagian-vital-industri-pariwisata-di-kabupaten-malang> (diakses 14 September 2019).

Pemerintah Kabupaten Malang memang berusaha untuk mengoptimalkan SDM dalam mengelola desa wisata. Namun demikian, optimalisasi dari pengembangan SDM di desa wisata akan lebih berkembang bila didukung dari pihak eksternal yaitu peran dari perguruan tinggi dan industri swasta. Perguruan tinggi dan industri wisata bersinergi dengan pemerintah untuk mengoptimalkan SDM pengelola desa wisata.

Interaksi antara pemerintah, perguruan tinggi dan industri swasta dalam *triple helix* dikemukakan oleh Ortiz et al. (2016) sebagaimana mengadopsi dari Etzkowitz dan Leydesdorff 1995; Etzkowitz et al. 2005; Etzkowitz 2008; Kim et al. 2012; Leydesdorff 2000 yaitu:

The 'triple helix', or university-industry-government interaction, has been increasingly recognized as the source of the competitiveness of nations, that drives the transformation of scientific and technological outcomes into economic outcomes, massively associated with the context of innovation management.

Ditambahkan oleh Etzkowitz (2008), *the first step toward a triple helix is usually collaboration among the institutional spheres most involved with innovation, taking place through their traditional roles. For example, universities, firms, and governments in a region may participate in discussions to enhance a local economy, develop a regional growth agreement, or establish a technology council.*

Interaksi dalam *triple helix* antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah semakin diakui sebagai sumber daya saing bangsa yang mendorong transformasi hasil ilmiah dan teknologi menjadi hasil ekonomi yang berhubungan dengan manajemen inovasi. Langkah pertama menuju *triple helix* biasanya kolaborasi di antara lingkup institusional yang terlibat dengan inovasi. Perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah di suatu wilayah dapat berpartisipasi untuk meningkatkan ekonomi lokal, mengembangkan perjanjian pertumbuhan regional atau membentuk dewan teknologi.

Bila dikaitkan dengan SDM di desa wisata, maka ketiga *helix* tersebut berinteraksi bersama-sama di dalam pengembangan SDM di desa wisata. Perguruan tinggi dapat meningkatkan SDM pariwisata melalui penelitian dan pengabdian yang diberikan kepada para pengelola destinasi wisata terutama wawasan yang berhubungan dengan inovasi dalam pengelolaan desa wisata. Peran perguruan tinggi signifikan dalam mendukung SDM untuk melakukan inovasi dalam pengembangan desa wisata. Kemudian perguruan tinggi, industri atau swasta dan pemerintah dalam kerangka inovasi bersama-sama mendukung dalam pengembangan SDM untuk meningkatkan ekonomi lokal di desa wisata.

Interaksi antara pemerintah, industri swasta dan perguruan tinggi setidaknya nampak pada saat diselenggarakannya Pesona Desa Wisata. Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna didampingi Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM secara resmi membuka Pesona Desa Wisata 2018 di Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (27/08/2018) siang. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan pengusaha kepariwisataan, anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Malang, perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Kepala BPJS Kesehatan, Manajemen Sriwijaya Air, akademisi dari perguruan tinggi Malang Raya, sejumlah OPD, Camat dan pengelola desa wisata se Kabupaten Malang <http://tabloidjawatimur.com/bupati-malang-buka-pesona-desa-wisata-di-ngantan> (diakses 14 September 2019).

Pada kegiatan Pesona Desa Wisata, Pemerintah Kabupaten Malang mengajak pihak lain untuk bersama-sama bersinergi dalam mendukung pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang.

Adapun sinergi yang dibangun antara pemerintah dan perguruan tinggi termasuk didalamnya industri pariwisata dilakukan oleh FEB Universitas Merdeka Malang. Dekan FEB, Dr. Rudy Wahyono, SE., MM. menjelaskan bahwa FEB Unmer Malang turut memberikan kontribusi kepada pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang. Salah satu contohnya adalah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk pengembangan desa wisata Mulyorejo di Kecamatan Ngantang. Berikutnya ada peninjauan potensi wisata Bon Pring di Kecamatan Turen dan Pemandian Wendit. Adapun peran serta mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat didasarkan kepada kebutuhan Kabupaten Malang. <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/kelola-wisata-bahari-pemkab-malang-bakal-gandeng-perguruan-tinggi-1703081.html> (diakses 14 September 2019).

Tidak hanya Universitas Merdeka Malang, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang juga melakukan kegiatan pengabdian di desa wisata Kabupaten Malang. Dalam rangka melakukan Tri Dharma Perguruan tinggi (PT), Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menjalin kerja sama untuk melakukan pengembangan desa wisata yang berada di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perjanjian kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan MOU antara Prodi IP yang dilakukan oleh Ketua Prodi Muhammad Kamil dan Kec. Donomulyo yang diwakili oleh Sekretaris Camat Donomulyo Taufik Nurohman. Dia berharap agar MOU ini dapat membantu kedua belah pihak sebagai mitra kelembagaan terkait tata kelola pemerintahan lokal, pendidikan, penelitian, pengabdian dan pengembangan riset serta bagi kemajuan desa Kedung Salam. Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholders mulai dari pemerintah, swasta dan akademisi <https://suaranasional.id/berita/detail/prodi-ip-umm-bersama-kec-donomulyo-tandatangani-mou-pengembangan-wisata> (diakses 14 September 2019).

Interaksi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan perguruan tinggi nampak melalui kerja sama untuk mengembangkan desa wisata di Kabupaten Malang. Pengembangan desa wisata setidaknya juga turut mengembangkan SDM sebagai pelaku pariwisata di desa wisata.

Sedangkan sinergi yang dibangun antara pemerintah dan industri swasta dilakukan dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa dan Prasarana Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara kepada radarmalang.id menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata mengadakan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa dan Prasarana Pariwisata kepada pelaku usaha pada tanggal 14 Maret 2019. Made berharap melalui sosialisasi tersebut, maka para pelaku usaha lebih melek perizinan sehingga di akhir tahun, para pelaku usaha wisata di Kabupaten Malang sudah mengantongi TDUP. <https://radarmalang.id/dorong-legalitas-industri-wisata-disparbud-kabupaten-malang-kumpulkan-pelaku-wisata> (diakses 14 September 2019).

SDM di desa wisata khususnya di Kabupaten Malang memang perlu dikembangkan melalui dukungan dari interaksi perguruan tinggi, industri swasta dan pemerintah dalam mengelola desa wisata. SDM di desa wisata setidaknya mampu menghasilkan produk-produk inovatif untuk meningkatkan kualitas desa wisata. Peran perguruan tinggi, industri wisata dan pemerintah dalam mengembangkan SDM signifikan untuk memberdayakan SDM tersebut menjadi lebih profesional dalam menghasilkan produk yang inovatif sesuai dengan tuntutan wisatawan modern saat ini.

Dengan adanya interaksi dari pemerintah, perguruan tinggi dan industri pariwisata, maka SDM di desa wisata akan semakin profesional dalam mengelola desa wisata sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke desa wisata khususnya di Kabupaten Malang.

KESIMPULAN

Perkembangan pariwisata yang begitu pesat saat ini berdampak juga pada berkembangnya desa wisata di berbagai daerah di Indonesia. Suasana alam yang sejuk dan asri menjadi daya tarik wisatawan di era modern saat ini. Namun demikian, pertumbuhan yang marak dari desa wisata belum dapat diimbangi dengan SDM yang profesional untuk mengelola desa wisata sehingga belum mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut terutama di desa-desa wisata Kabupaten Malang. Dengan hadirnya perguruan tinggi, industri di bidang pariwisata dan pemerintah (*triple helix*) yang saling berinteraksi dalam mendukung pengembangan SDM di desa wisata setidaknya mampu meningkatkan kapasitas SDM untuk bekerja lebih optimal dalam mengembangkan desa wisata di wilayahnya.

Namun demikian, interaksi antara perguruan tinggi, industri swasta di bidang pariwisata dan pemerintah akan berkembang lebih optimal bila melibatkan langsung masyarakat di desa wisata tersebut untuk bersama-sama berinteraksi antar unsur tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dalam penyusunan makalah ini yaitu Prof. Dr. Sumartono, Dr. Khairul Muluk, Dr. Muhammad Nuh dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Dr. Suwarman Direktur ASMI DESANTA, Dra. Iin M,Pd, Demetria, S.Pd, M.Pd, Daimatun, S.Pd, M.Pd, ibu Lely dan pak Edy ASMI DESANTA yang telah mendukung dalam penyusunan makalah ini. Sumber dana penelitian dari lembaga tempat penulis bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beugre, Constant D. 2017. *Building Entrepreneurial Ecosystem in Sub-Sahara Africa, A Quintuple Helix Model*. USA: Palgravepivot
- Damanik Phil Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Etzkowitz Henry. 2008. *The Triple Helix, University, Industry, Government Innovation in Action*. New York: Routledge
- Hadiwijoyo Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muljadi, A.J dan Warman, Andri. 2016. *“Kepariwisataan dan Perjalanan”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Saptono et al. 2017. *Tren Pariwisata Milenium, Diskursus dengan Alam, Bahasa, Sejarah dan Pasar*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Ortiz, et al. 2016. *Multiple Helix Ecosystems for Sustainable Competitiveness*. Switzerland: Springer International Publishing
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media

Suvena, I Ketut dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan

Teguh, Frans. 2017. *Strategi Pembangunan Pariwisata Indonesia, Sinergi Indonesia in Corporated dalam Mengelola Kompleksitas Pariwisata*. Call for Paper ke3 Semarang 26 Juli 2017

Yoeti, Oka A. 2008. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa

Jurnal

Etzkowitz, Henry & Loet Leydesdorff. 1995. The Triple Helix---University-Industry Government Relations: A Laboratory For Knowledge Based Economic Development. *EASST Review* 14 (1995, nr. 1) p. 14-19

Kim et al. 2012. The effect of the triple helix system and habitat on regional entrepreneurship: Empirical evidence from the U.S. *Research Policy* 41 (2012) 154– 166

Leydesdorff, Loet. 2000. The Triple Helix: an Evolutionary Model of Innovations. *Research Policy* 29. 2000. p. 243–255

Leydesdorff, Loet. & Meyer, M. 2006. Triple Helix Indicators of Knowledge Based Innovation Systems: Introduction to The Special Issue. *Research Policy*, Vol. 10, No. 35, p. 1441–1449.

Prabowo, Septiofera Eresus, Djamhur Hamid dan Arik Prasetya. 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 33 No. 2 April 2016, hal 18 - 24

Rahma, Pamela Dinar dan Rifky Aldila Primasworo. 2017. Strategi Pengembangan Desa Wisata Pesisir Di Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. *Jurnal Reka Buana* Volume 3 No 1, September 2017 - Februari 2018, Hal 41 - 52

Utomo, Selamat Joko dan Bondan Satriawan. 2017. Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Neo-Bis* Volume 11, No.2, Desember 2017 hal 142 - 153

Laporan

Arnkil, Robert, et al. 2010. *Exploring Quadruple Helix Outlining User-Oriented Innovation Models*. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project. Finland: University of Tampere

Peraturan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Website

Bupati Malang Buka Pesona Desa Wisata di-Ngantan, diakses 14 September 2019, <http://tabloidjawatimur.com>

Dorong Legalitas Industri Wisata Disparbud Kabupaten Malang Kumpulkan Pelaku-Wisata, diakses 14 September 2019, <https://radarmalang.id>

Ganjalan di Balik Geliat Wisata di Kabupaten Malang, diakses 4 Agustus 2019, https://www.liputan6.com/regional/read/3866258/?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Infrastruktur dan SDM Desa Wisata, diakses 4 Juli 2019, <https://news.detik.com/kolom/d-4486765>

Kabupaten Malang Fokus Kembangkan Desa Wisata, diakses 4 Agustus 2019 <https://jatim.antaranews.com/berita/265861>

Kabupaten Malang: SDM Jadi Bagian Vital Industri Pariwisata di Kabupaten Malang, diakses 14 September 2019, <https://malangtoday.net/malang-raya>

Kelola Wisata Bahari Pemkab Malang Bakal Gandeng Perguruan Tinggi, diakses 14 September 2019, <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/-1703081.html>

Pemkab Malang Kembangkan Potensi Wisata Lewat Peningkatan Kualitas SDM, diakses 4 Juli 2019, <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/-1706216.html>

Pengembangan Vokasi Solusi Masalah Kualitas SDM Pedesaan, diakses 4 Juli 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171210/9/716842>

Prodi IP UMM Bersama Kecamatan Donomulyo Tandatangani MOU Pengembangan Wisata, diakses 14 September 2019, <https://suaranasional.id/berita/detail>

INOVASI ATAU PENDEKATAN KOLABORASI?: PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TERPADU SECARA *ONLINE*, “DESIMA” BAGI APARAT DESA

INNOVATION OR COLLABORATIVE APPROACH ? : INTEGRATED HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT WITH *ONLINE* "DESIMA" FOR THE VILLAGE APPARATUS

Idham Ibtly^{1,2}, Faizal Aco^{1,2}, Syamsudin^{1,2}, Arif Kurniar Rakhman^{1,2}

¹Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, ²Dept. Administrasi Publik FISIPOL, Jl.Proklamasi No.1
CT. Sleman DIY

mail.idham.ibty@gmail.com, idham.ibty@up45.ac.id

ABSTRAK

Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi aparat desa di tengah perubahan lingkungan pemerintahan diperlukan karena pengaruh teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Sementara itu Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan terobosan Pelatihan Aparatur Desa secara *Online* untuk Desa Indonesia Maju, yang disebut DESIMA. Permasalahannya adalah apakah DESIMA sebagai pendekatan kolaboratif ataukah inovasi pemerintahan bagi pengembangan sumberdaya aparatur desa sebagai pilihan kebijakan untuk keberlanjutannya? Tujuan studi ini adalah memaparkan DESIMA sebagai program pengembangan sumberdaya aparatur desa yang menjadi alternatif kebijakan dengan pendekatan kolaboratif atau menjadi inovasi pemerintahan untuk pengembangan kapasitas pengelolaan program. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan telaah data sekunder, wawancara mendalam terhadap para pihak, dan penalaran induktif. Hasil studi ini menunjukkan model pelatihan DESIMA sebagai kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur desa dengan ciri-ciri inovasi pemerintahan secara terbuka, masih terbatas menggunakan pendekatan pemberdayaan dan kolaboratif, dapat menjadi dasar bagi inovasi pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan aparat desa dan kapasitas pengelolaan program. Pilihan kebijakan sebagai inovasi berkontribusi pada mekanisme pemberdayaan aparat desa yang ramah kebutuhan layanan publik di era digital. Model Desima saat ini praktis berguna untuk mengelola program pemberdayaan aparat desa bagi akselerasi dan pencapaian jumlah target kepesertaan dari aparatur desa maupun keterpaduannya bagi akomodasi kepentingan para pihak mitra strategis, serta bagi pemerintahan desa yang baik literasi telematika berbasis internet.

Kata kunci: inovasi, pendekatan kolaborasi, *e-learning*, aparat desa, DESIMA.

ABSTRACT

Innovation in Human Resources Development for the village apparatus in the changes of governance environment are needed because of the influence of internet-based information and communication technology. Meanwhile the Directorate General of Village Empowerment of the Ministry of Home Affairs is conducting a breakthrough in Human Resource Development through Village Apparatus Training friendly to Online, and is called DESIMA. The problem is whether DESIMA is a collaborative approach or is effective Human Resource Development innovation as a policy choice for its sustainability? The purpose of this study is to describe DESIMA as an effective form of human resource development program as an alternative policy with a collaborative approach or to become a governance innovation as a capacity building strategy for the empowerment of village apparatus. This study uses a qualitative approach with a review of secondary data, in-depth interviews with parties, and inductive analysis. The results of this study show that DESIMA's training program as a policy with the characteristics of open governance innovation, still limited to using a collaborative approach, can be the basis for governance innovations of capacity building management and for empowering the village apparatus. This policy contributes to the mechanism of the capacity building program in a digital era. The current model of DESIMA is practically useful for strategizing the number of participant targets

from the village apparatus as well as its integration for the policy adaptation to the strategic partners, and as good governance implementation with internet-based information technology literacy.

Key word: innovation, collaborative approach, e-learning, village apparatus, DESIMA

PENDAHULUAN

Inovasi pemerintahan atau pendekatan untuk mencapai sinergi pelibatan para pihak berkepentingan untuk pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur desa sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Aktivitas tersebut dilakukan dengan terobosan Pelatihan Aparatur Desa Secara Terpadu dengan *Online*. Program ini dinamakan DESIMA. Latar empiris bahwa selama ini pemberdayaan aparatur desa masih kurang optimal sehingga kapasitasnya belum dapat memberi kepuasan masyarakat desa dalam hal pelaksanaan beberapa urusan pemerintahan desa, seperti administrasi pemerintahan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian serta penyusunan Peraturan Desa. Kondisi seperti itu juga secara umum dirasakan oleh rata-rata aparat desa, sekitar 5 (lima) orang aparat dari setiap desa/kalurahan pada 74.754 Desa dan 8.430 Kelurahan. Mereka membutuhkan pemberdayaan untuk memiliki kompetensi atau pengembangan kapasitas sumber daya insaninya terkait dengan fungsi dan tugas masing-masing sesuai urusan wajib atau pilihan dari pelayanan publik di desa/kalurahan tersebut (PSKPPM, 2019).

Penyelenggaraan DESIMA menjadi momentum bersama bagi para pihak berkepentingan atau *stake holder* program. Pemerintah, Ditjen Bina Desa Kemendagri, menstrategikan DESIMA dengan melibatkan multi stake holder dalam menjalankan pendekatan pemberdayaan bagi aparat desa. Pihak berkepentingan tersebut mencakup pemerintah sebagai pengelola program dan kebijakan, dan 3 (tiga) Balai Desa sebagai pelaksana pelatihan dan fasilitasi, Swasta penyedia jasa pengembang telematika berbasis internet, 3 (tiga) Universitas untuk penelitian dan pengembangan, Media masa dan LSM (PSKPPM, 2019). Pelibatan stake holder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi di antara para pihak yang kompleks, yang dapat menunjukkan adanya legitimasi. Hal itu diperoleh apabila terjadi kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan organisasi (Emerson, K., dan Nabatchi, T, 2015).

Pada sisi lain, di tengah masyarakat, terjadi perubahan di berbagai aspek kehidupan karena revolusi industri 4.0. Penggunaan perangkat teknologi telekomunikasi dan informatika atau dikenal telematika berbasis internet telah memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai sumber daya informasi, kesempatan, hingga peningkatan kemampuan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungannya. Bahkan terjadi kemudahan bertransaksi serta menggunakan layanan transportasi dan logistik. Lebih lanjut, menurut Agahari, W., et al. (2018), menyatakan terjadi perubahan berbasis telematika tersebut mampu mendorong inklusi sosial, literasi digital dan pemberdayaan berbasis telematika, perubahan model bisnis, dan perubahan corak ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai inovasi. Hal itu juga menghasilkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan sembari memungkinkan partisipasi publik dalam perencanaan, pengimplementasian, dan pengawasan pembangunan. Namun demikian, ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan inovasi berbasis telematika di Indonesia, yaitu: (1) kerangka regulasi; (2) kerangka institusi; dan (3) kerangka akuntabilitas (Agahari, W., et al. (2018).

Terjadi peningkatan inovasi pemerintahan secara tajam pernah dialami berbagai Negara bagian di Amerika. Pada tahun 1985, di sana terjadi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah secara meluas. Kemudian berkembang konsepsi inovasi di pemerintahan Amerika dengan konsepsi 3R yaitu “Riset, Rekognisi, Replikasi” (Borins, S. ed., 2008). Inovasi pengembangan sumberdaya manusia dengan basis on line menjadikan pemerintahan di sana bermakna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Bogers, M., et.al., 2018). Sementara ini kebijakan inovasi Pemerintah adalah sebagai pelaksanaan Visi Misi Reformasi Birokrasi 2025 “Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Government*)”. Komisi Inovasi Nasional (KIN) yang telah berjalan juga mendorong semua pihak berkepentingan dapat berkontribusi. Agar Kementerian/Lembaga di tingkat pusat maupun OPD di provinsi dan Kabupaten/Kota pun termotivasi melakukan inovasi, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menggelar *Innovative Government Awards* (IGA) sejak 2010. Hal itu merupakan upaya terobosan untuk perbaikan kinerja pelayanan publik.

Permasalahannya apakah terjadinya perubahan secara sistemik yang bermakna untuk terus membangun pemulihan kepercayaan publik, dapat membawa semangat inovasi yang berkelanjutan dapat menjadi kebijakan dan pelayanan dari penyelenggaraan program pelatihan on line DESIMA atau masih sebatas pendekatan pemberdayaan dengan pelibatan multi stake holder dalam penyelenggaraan pelatihan DESIMA bagi aparat desa? Adapun tujuan studi ini adalah memaparkan DESIMA sebagai program pengembangan sumberdaya aparat desa yang menjadi alternatif kebijakan dengan pendekatan pemberdayaan dan kolaboratif atau menjadi inovasi pemerintahan dalam pengembangan kapasitas pengelolaan program.

KAJIAN TEORITIS

Kejelasan posisi dan kepentingan para pihak berkepentingan seperti dinyatakan pada teori stake holder berguna bagi program pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas seorang pekerja. Emerson, K., dan Nabatchi, T. (2015) menyatakan posisi dan kepentingan bermakna bagi pembentukan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi di antara para pihak yang kompleks. Hal itu dekat dengan kerangka teori legitimasi yang menyebutkan legitimasi dapat diperoleh apabila terjadi kesesuaian antara keberadaan entitas bisnis yang tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Salah satu cara untuk itu adalah dengan pemberdayaan. Diana (2015) menyebutkan pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada cara berpikir para pelaksana manajemen yang dapat membantu mendorong seorang pekerja diberikan otonomi yang lebih luas, diberi kepercayaan dan menciptakan kondisi lebih berdaya-saing sehingga memungkinkan mereka dapat membuat keputusan, lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya sehingga membuat organisasi bekerja lebih baik.

Pada pendekatan pemberdayaan bagi aparatur desa atau penyelenggara pelayanan publik, seorang aparat dapat memiliki beban dan tanggungjawab bagi pihak lainnya sebagai mitra strategis bagi warga dan masyarakat pengguna yang memiliki beragam mata pencaharian atau profesi seperti petani, perajin, tukang, bengkel sampai profesi pegawai negeri sipil, TNI, guru, penyuluh dan pendamping lainnya di pemerintahan maupun swasta di desa, tingkat kecamatan dan lainnya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing aparatur desa, maka program pengelolaan pengembangan sumber daya manusianya perlu memperhatikan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan, sampai dengan pengendaliannya agar dapat mengembangkan pola pikir yang sesuai dengan visi-misi pembaruan pemerintahan nasional sampai desa dimana mereka menjadi penyelenggara pelayanan publik. Hal ini seperti dinyatakan Diana (2015) bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk mengantisipasi

peningkatan volume pekerjaan yang senantiasa terus meningkat seiring dengan permintaan layanan dari masyarakat.

Pelibatan semua unsur dalam organisasi dan mitranya sesuai dengan kompetensi, fungsi dan tugasnya dapat membuat seseorang melakukan unjuk kemampuannya. Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab pada posisinya itu bermakna bagi pembentukan kerja tim penyelenggara layanan. Untuk mencapai tujuan program pemberdayaan, aparatur pemerintah dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas hasil kerja dari pelayanan pemerintahan. Mengingat kompleksnya program pengembangan bidang pekerjaan pada pemerintahan, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek pembuatan kebijakan, program dan pelayanan lainnya (Diana, A., 2003).

Terkait kepentingan pendekatan kolaboratif pelibatan multi pihak untuk pemberdayaan, Emerson, K., dan Nabatchi, T, (2015) menyebutkan elemen berpengaruh: (1) lingkungan eksternal yang dinamis perubahannya penuh ketidakpastian, kompleksitas dan perubahan yang tidak dapat diduga; (2) intensi kompetisi yang tinggi sehingga organisasi perlu memberdayakan orang untuk berkemampuan adaptif menjawab tantangan kompetisi; melakukan inovasi teknologi yang berubah cepat sehingga organisasi perlu memberdayakan stafnya dan orang lain pengguna jasanya untuk menggunakan sebaik mungkin teknologi maju; (3) permintaan yang tetap tinggi atas kualitas dan nilai yang lebih baik menyebabkan organisasi perlu memberdayakan staf dan mitranya untuk menemukan cara inovatif guna memperbaiki produk dan jasa; (4) tumbuhnya kepentingan ramah ekologi menuntut organisasi perlu memberdayakan orang yang terkait untuk melaksanakan kebijakan ekologi; (3) tiap personil orangnya sendiri juga harus berubah.

Senyampang kebutuhan pemberdayaan dan mengelola perubahan yang dinamis itu, penyelenggara pemerintahan dapat mengantisipasinya dengan menggunakan pendekatan pemerintahan kolaboratif. Ibtu, I (2018.b) mencermati pemerintahan kolaboratif bermakna bagi kondusifitas pemberdayaan secara deliberatif. Sedangkan Richard Magnum di dalam Emerson, K dan Nabatchi, T (2015) *collaborative governance* menyatakan sebagai pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga memerlukan deliberasi kerjasama dengan beragam *stake holder* yang mandiri untuk membangun konsensus baru dan kemitraan yang bermanfaat nyata mengatasi permasalahan yang berkembang.

Dalam konteks perubahan dinamis masyarakat global, Forum Ekonomi Dunia memperkenalkan Indeks Daya Saing Global baru yang terdapat penyesuaian dengan revolusi industry digital 4.0. yang dikenal dengan *Global Competitiveness Index the 4th Industrial Revaluation* (disingkat GCI.4IR). Indonesia pada tahun 2018 berada pada peringkat ke-45 GCI.4IR dari 140 negara. Sementara pada tahun 2009, Indonesia berada di urutan ke-54. Peringkat ini menunjukkan ada peningkatan peringkat. Indonesia dalam peringkat GCI.4IR ini (Schwab, K. 2018) berada di antara Singapura (peringkat kedua), Malaysia (ke-25), Thailand (ke-38), VietNam (ke-77) dan Kambodia (ke-110). Pemeringkatan tersebut merupakan konsep yang terkait Revolusi Industri Keempat, kemudian diintegrasikan gagasannya ke dalam definisi daya saing. Indeks tersebut mengintegrasikan aspek-aspek mapan dengan tuas baru, yang mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Ini menekankan peran modal manusia, inovasi, ketahanan dan ketangkasan. Hal itu bukan hanya pendorong tetapi juga mendefinisikan fitur keberhasilan ekonomi bagi Indonesia. Sehingga penggunaan teknologi yang lebih baik dan juga mengingatkan bahwa ini hanya mungkin sebagai bagian dari pendekatan holistik dengan faktor-faktor lain daya saing. Pada akhirnya

diformulasikan dengan prinsip obyektif, berbasis data, analisis untuk tidak memihak, berorientasi masa depan, dan rasional pada pembuatan kebijakan (Schwab, K. 2018; Denhardt, et al., 2015).

Pembelajaran menggunakan telematika berbasis internet (*Internet of Things-IOT*) berpengaruh bagi proses pemberdayaan aparat desa. Salah satu kegiatannya adalah *e-learning* atau pelatihan secara on line. Pelatihan ini dilakukan melalui perangkat berbasis internet dengan berbagai jenis format bahan ajar dan pembelajarannya, seperti video, tayangan slide, dokumen word, excel dan PDF. Juga diselenggarakan klinik konsultasi dan webinar (*live online classes*) dan *instructor-led training* sebagai salah satu cara yang baik untuk berkomunikasi dengan pelatih dan narasumber. Dengan demikian Pelatihan on line (*e-learning*) diyakini dapat memudahkan partisipan warga belajar dari mana saja, dimana saja dan kapan saja, lebih efisien dalam menjangkau area yang luas dengan biaya rendah, dan diharapkan menjadi efektif (PSKPPM, 2019). Hal tersebut dapat bermanfaat dan perubahannya dapat menjadi inovasi pemerintahan dengan inovasi secara terbuka, ada pengakuan, dan dikembangkan (Borins, ed., 2008)

Inovasi tersebut dapat diselenggarakan karena pengelolanya yang proaktif dan ambisius agar menurunnya kepercayaan publik dapat meningkat. Inovasi pemerintahan dapat dijadikan peraturan atau kebijakan publik berupa peraturan perundangan atau yang lebih rendah baik merupakan atribusi ataupun delegasi dari peraturan perundang-undangan atau bahkan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang tidak mengandung arti keberhasilan ekonomi *ansich*, tetapi keberhasilan sosial juga. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang menciptakan nilai lebih besar untuk warga pengguna atau konsumen, untuk komunitas, dan lingkungan pada saat yang sama. Teori ini dekat dengan Denhardt, et al., (2015) yang menjelaskan bahwa inovasi pemerintahan yang diakomodasi dengan peraturan bukan hanya “kebaruan” atau sesuatu yang baru; “kebaruan” itu perlu disertai dengan dampak positif bagi pemberi dan penerima layanan, dan harus menciptakan nilai guna bagi kedua belah pihak karena dinamika yang sangat cepat akibat adanya ketidakpastian.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Cresswell, J.W., 2010). Tujuannya untuk memaparkan keterlibatan para pihak berkepentingan dalam pengelolaan pelatihan DESIMA. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui penelusuran terhadap dokumen publik, laporan penelitian, artikel jurnal, serta sumber lain yang relevan. Sedangkan metode analisisnya menggunakan: (a) telaah dokumen sekunder dari laporan kegiatan uji coba dan evaluasi Pelatihan on line, serta hasil pelaksanaan seminar dan sosialisasi program DESIMA di Lampung dan Yogyakarta; (b) menggunakan data primer yang didapatkan dari diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara terhadap peserta seminar dan uji coba pelatihan on line dengan validasi, kemudian dianalisis, setelah sebelumnya dilakukan reduksi dan verifikasi data. Hasilnya dipaparkan dan dibahas dengan FGD. Kemudian dilakukan pemaparan hasil dan kesimpulan dengan memakai teknik induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Aparatur Desa dan Kolaborasi Multi Stake holder

Peluang perdagangan melalui pasar media elektronik (*e-commerce*) dengan perangkat komunikasi dan bisnis pada era “*information age*” dilaporkan Survey AC Nielsen (2017) tetap bertahan di tengah pelambatan penjualan barang konsumsi secara umum. Kebanyakan pengguna internet tetap melakukan transaksi *on line*. Bisnis *on line* dapat menjadikan sangat murah dan

terjangkau dengan akses pasar dan konsumen diseluruh wilayah maupun penjuru dunia. Meski demikian biaya produksi cukup besar dan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang kompeten (<https://tirto.id/benarkah-bisnis-media-online>)

Gambaran dinamika bisnis on line tersebut, juga sedang menjadi perhatian kebijakan pemerintah tentang arah jangkauan dan sasaran pengembangan sumberdaya manusia bagi aparatur desa untuk peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Yaitu, pemberdayaan untuk aparat desa dari 511 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 Provinsi. Pada Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta biasanya dapat dipenuhi pertahun rata-rata 48 angkatan pelatihan dengan peserta dari 1.920 desa dari wilayah kerja Balai. Artinya untuk jangkauan semua desa dapat diberikan pelatihan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu dipilih kebijakan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan Pelatihan secara on line atau *e-learning* untuk dapat menjangkau semua aparatur desa.

Untuk meningkatkan jumlah kepesertaan dan kompetensi aparatur desa dalam menjalankan kewenangan dan pelaksanaan urusan untuk Desa Indonesia Maju dan mandiri secara on line tersebut diselenggarakan program yang disebut DESIMA. Pelatihan secara on line tersebut dimaksudkan memberdayakan aparat desa. Luaran kegiatan tersebut, menurut Fasilitator Balai Pemberdayaan Desa Bapak Titus Teguh Basuki, dapat berkontribusi bagi pencapaian indikator kepelatihan pada kemampuan sumber daya aparatur desa. Sedangkan menurut mitra penyelenggara Ibu Bening Hadilinatih, Dekan Fisipol UP45, bahwa hal itu juga bermanfaat bagi pencapaian keberhasilan program pengembangan sumber daya aparatur Desa Indonesia Maju. Balai Pemerintahan Desa dari Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Pelatihan *e-learning* tersebut dengan serangkaian aktivitas di Lampung maupun di Yogyakarta dengan melibatkan sekitar lima ribu partisipan di kedua wilayah kerja Balai Pemerintahan Desa tersebut (PSKPPM, 2019). Publikasi hasil uji coba dan seminar di Lampung (www.balaipemdeslampung.org/html) dan di Yogyakarta, yang divalidasi pada FGD juga menunjukkan adanya kapasitas yang terbatas dalam melayani pelatihan bagi pemberdayaan aparat desa dari desa-desa di wilayah kerja Balai Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pelatihan *e-learning* atau berbasis *internet of things* – IOT dapat melengkapi bentuk pelatihan sebelumnya sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya aparat desa sehingga dapat menjangkau lebih luas. PSKPPM (2019) melaporkan bahwa 97% dari aparatur desa menyatakan kebutuhan untuk dapat mengikuti *e-learning* agar dapat meningkatkan kompetensi mereka.

Dalam kaitan para pihak berkepentingan dalam pengembangan sumber daya aparatur desa, di antaranya pemerintah, perusahaan swasta atau asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat daerah maupun nasional dan organisasi internasional, lembaga pemerhati lingkungan, organisasi pekerja swasta atau aparat desa maupun asosiasi terkait, organisasi profesi, komunitas berkebutuhan khusus dan lainnya, memiliki hubungan dan berpengaruh dalam kepentingan pengembangan kapasitas individu seorang staf maupun program peningkatan kapasitas organisasi. Keterlibatan para pihak seperti itu dilaporkan pula oleh Ibty, I (2018.a) bahwa para pihak berkepentingan itu memiliki posisi dan kepentingan yang dapat dikompromikan dan dilakukan kolaborasi secara baik (Ibty, I., 2018.a). Keberhasilan koordinasi para pihak dalam pelaksanaan kegiatan persiapan tersebut tervalidasi pada FGD meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan aplikasi, modul pelatihan sebagai bahan ajar secara on line sampai dengan penyelenggaraan uji coba dan seminar. Semua bentuk luaran kegiatan tersebut dapat menjadi bukti pendukung kelancaran proses kerjasama para pihak tersebut.

Adanya kebutuhan untuk peningkatan kompetensi aparat desa untuk memenuhi tugas pemerintahan desa, adanya pemahaman dari aparat desa bahwa mereka memang harus memiliki

kemampuan yang meningkat terus menerus, menindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan, konsultasi maupun akses informasi lainnya merupakan rangkuman hasil wawancara terhadap partisipan sosialisasi melalui Seminar DESIMA di Lampung dan Yogyakarta. Para aparat desa sebagai penyelenggara pelayanan dasar, infrastruktur desa, pengembangan sosial-ekonomi-dan lingkungan desa, serta penyelenggara pemerintahan desa memiliki kesadaran seperti itu, yang merupakan bagian pemahaman tentang tanggungjawab pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan desa. Hal itu dinyatakan oleh Kepala Desa Kraguman, Sunaryo, Dewi Bima Artika dosen Administrasi Negara Universitas Lampung, sesuai dengan laporan Diana (2015) bahwa terjadinya peningkatan volume pekerjaan aparat desa sejalan dengan bertambahnya permintaan layanan dari masyarakat. Diana (2015) menyatakan pula bahwa pendekatan pemberdayaan sesuai untuk pengembangan sumberdaya aparatur desa.

Sedangkan bukti yang mendukung penggunaan kolaborasi dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya aparatur desa, antara lain:

- (1) Pelaksanaan kegiatan e-learning sesuai dengan visi-misi reformasi birokrasi pemerintah; dan bagi para aparat desa dapat menerima dan memahami bahwa hal itu merupakan nilai dan prinsip yang telah dirumuskan, disosialisasikan dari atasan mereka dan diimbau untuk dijalankan oleh aparatur desa;
- (2) Pelaksanaan e-learning merupakan arahan dan praktik yang diajarkan dan diberikan motivasi dari atasan struktural mereka dan para aparat desa merasa dorongan tersebut merupakan tanggungjawab yang dibagikan kepada mereka. Sehingga mereka merasa mendapat kepercayaan untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing;
- (3) Interaksi dengan para pihak berkepentingan dan komunikasi dapat berjalan baik. Para aparat desa sebagai pengguna ujicoba *e-learning* merasakan manfaatnya dan timbul kepercayaan yang lebih tinggi;
- (4) Membangun kolaborasi dengan para pihak berkepentingan untuk tim DESIMA yang efektif. Hal ini dapat berjalan dengan melibatkan 4 universitas, yaitu Universitas Islam Riau, Universitas Moestopo Beragama, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan Universitas Krisnadipayana. Sedangkan pelibatan swasta HARUKA sebagai mitra pengembang teknologi dan aplikasi berbasis internetnya; Serta pelibatan LSM dan Paguyuban Aparatur Desa dan kader pendamping desa lainnya. Diharapkan dengan pemerintahan kolaboratif tersebut dapat menghasilkan capaian yang lebih besar (PSKPPM, 2019).

Bangun dari kolaborasi stake holder di atas baru distrategikan untuk dapat memenuhi gagasan manajemen strategik agar arah kebijakan dengan ukuran pemerintahan kolaboratif dapat dicapai dan bermanfaat. Yang dapat dikemukakan pada kondisi awal dimulai program tersebut adalah adanya pengungkit program pengembangan sumber daya manusia dengan keterpaduan pendekatan pemberdayaan yang menggunakan teknologi on line dan melakukan kolaborasi dengan multi stake holder.

2. Inovasi Pemerintahan untuk Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa

Inovasi pemerintahan yang dilakukan secara terbuka, melibatkan Multi Stake Holder dan kolaborasi multi stake holder untuk keberhasilan pemberdayaan aparatur desa, oleh para pengguna dari kalangan aparatur desa diharapkan dapat menjadi praktik inovasi dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM dengan konsisten tetap jujur, akuntabel, dan efektif (PSKPPM, 2019). Hal itu sejalan dengan Osborn, (2016) yang menyatakan bahwa Inovasi biasanya dihasilkan oleh pemikiran dan atau hasil penelitian pengembangan untuk menerapkan solusi atas diperolehnya alternatif baru yang benar-benar baru, pendekatan baru, atau pendekatan lama yang teruji kehandalannya namun ada penyesuaian untuk mengatasi permasalahan

pelayanan yang ada ketika membangun system lingkungan dan pendidikan umum (Holowchak, 2012). Dengan demikian inovasi pengembangan sumber daya aparatur desa DESIMA tidak sekedar dilihat dari kebaruannya (*novelty*), namun ada manfaat bagi pemenuhan keberhakan warga Negara. Hal itu juga sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memastikan penerapan kebijakan “*One Agency, One Innovation*” untuk inovasi pelayanan publik dapat berlanjut menjadi budaya organisasi. Muatan Kepmen PANRB adalah setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun, dengan kewajiban memunculkan “*Quick Wins*” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ([www.sinovac.menpanrb.go.id/ inovasi](http://www.sinovac.menpanrb.go.id/inovasi)). Oleh karenanya inovasi DESIMA ini sebagai model membutuhkan pelembagaannya sehingga dapat dijadikan sebagai produk dan budaya organisasi. Untuk itu perlu perangkat peraturan, dan berdasar FGD dinyatakan bahwa pada saat ini belum dibuat rencana pembentukan peraturan dimaksud.

Menurut para pengguna dari kalangan aparat desa maupun mitra para pihak berkepentingan, terdapat problematika penyelenggaraan pelatihan secara on line tersebut. Hasil FGD menunjukkan bahwa model DESIMA dari proses sampai menjadi produk inovasi itu lazim sampai menjadi kondusif apabila dapat disusun ke dalam rencana pembentukan kebijakan sampai menjadi produk kebijakannya. Inovasi tersebut menjadi dasar program menstrategikan budaya baru pelayanan pemberdayaan aparatur desa maupun para pegiat desa untuk maju dan mandiri. Langkah terobosan dengan inovasi seperti itu bermakna untuk pemulihan kepercayaan publik sebagaimana ditulis pada hasil inovasi pemerintahan oleh Borins, S. (2008) di dalam Bogers, M., et.al., (2018)

Program inovasi sejenis itu pernah menjadi energi pengungkit di Amerika, yang diakui dan diterima serta dikembangkan sehingga pentingnya menjadi tidak sekedar *boosterisme*. Menurut (Friedman (2005) di dalam Bogers, M., et.al., (2018) terdapat tiga kunci keberhasilan program itu, yaitu: (1) pengakuan, (2) replikasi, (3) penelitian sebagai sumber pengaruh dan vitalitas program yang berkelanjutan. Hal itu dapat mendorong pergeseran sistemik menjadikan inovasi sebagai kondisi untuk bertahan secara dinamis. Bahkan Donald Kettl (2005) di dalam Bogers, M., et.al., (2018) mendefinisikan fenomena perubahan ini sebagai revolusi manajemen publik secara global, dikarenakan pegiatnya kaum muda mendunia yang merupakan penjaga reformasi (*reinvention*). Programnya sendiri menjadi agen dalam proses perubahan tersebut, dan terjadi “3R” berupa pengakuan, replikasi, dan pengembangannya. Ketiga elemen ini lebih lanjut menyebarkan gagasan, keberhasilan praktik inovatif dan mempromosikan budaya inovasi dalam sektor publik. Meski terdapat banyak perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi tentang makna yang tepat dari istilah-istilah yang berkembang. Ada beberapa kesepahaman umum bahwa inovasi menunjukkan manfaat dari perubahan pada struktur lembaga pemerintah, aplikasi teknologi baru dan metodologi produksi sektor swasta, penekanan pada mendefinisikan dan mengukur kinerja pemerintah, dan pola baru keterlibatan swasta dan sektor ketiga dalam pemerintahan (Bogers, M., et.al., (2018). Dengan proses itu menjadikan elemen pemerintahan kolaboratif semakin kuat, dan dari pemberdayaan aparatur penyelenggara layanan sewajarnya apabila aparatur harus mau berubah pula dan dapat menerapkan hasil pelatihan. Hal ini dinyatakan oleh Pak Rahmanto, Ketua APDESI.

Sementara pada ranah legal, hasil FGD menunjukkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memuat bahwa: Pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pemberdayaan dengan pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan. Pendampingan desa, menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015, dimaknai sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa pendamping atau

penyelia menjadi semacam katalisator yang akan mempercepat perubahan paradigma aparat desa dalam pembangunan dari model *top down* ke *bottom up*. Ditambahkan kebijakan Kementerian PANRB memastikan penerapan kebijakan “*One Agency, One Innovation*” untuk inovasi pelayanan publik agar dapat menjadi budaya organisasi dan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun, dengan kewajiban memunculkan “*Quick Wins*” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (www.sinovac.menpanrb.go.id/inovasi).

Dari aspek kepelatihan e-learning, DESIMA merupakan program yang dimaksudkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan metode pelatihan pemberdayaan secara on line mencakup pembelajaran secara on-line, klinik konsultasi secara on-line untuk merespon permasalahan yang dimiliki aparat desa di lapangan, studi banding untuk mendapatkan solusi, serta dapat meningkatkan kompetensinya untuk studi lanjut dan sertifikasi keahlian (<http://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/3855-kemendagri-tingkatkan-kapasitas-aparatur-desa-kelola-keuangan>). PSKPPM (2019) melaporkan bahwa menurut hasil angket terdapat 97% yang menyatakan setuju bahwa pelatihan e-learning akan dapat diikuti oleh sumberdaya aparatur desa yang sudah menentukan keputusan sendiri, memiliki literasi dan kemampuan akses secara on line. Bahkan hasil FGD menyatakan bahwa paket pelatihan tersebut menguntungkan dengan manfaat berupa: fleksibilitas, jangkauan yang lebih luas, bersifat independen, hemat biaya, interaksi yang lebih inten, dan memotivasi untuk berkelanjutannya. Hanya saja hampir semua partisipan menyebutkan bahwa untuk fasilitasi kegiatan lebih lanjut tersebut terdapat kendala bagi aparatur desa yang belum cukup literasi dan kemampuan akses internetnya serta adanya ketergantungan dari persetujuan pimpinan pemerintahan desa, termasuk permasalahan pendanaannya.

Jika memperhatikan Osborne dan Brown (2005) bahwa inovasi merupakan pengenalan suatu yang baru ke dalam sebuah sistem, maka dengan aplikasi yang ada (seringkali sebatas invensi) dari sebuah ide baru, menghasilkan sebuah proses transformasi yang membawa sesuatu dari subjeknya. Sedangkan sistemnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan atau proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya, termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik, serta proses pembelajarannya. Sistem inovasi memiliki dimensi kewilayahan atau teritorial berupa elemen sistem inovasi daerah dan dimensi sektoral berupa sistem inovasi sektoral, serta klaster industri.

Sedangkan inovasi DESIMA dapat dikatakan sebagai sebuah rencana inovasi dengan adanya karakteristik, seperti dikemukakan Rogers, et al. (2014) sebagai berikut: (1) Keuntungan relatif jika dicermati *cost - benefitnya*, (2) faktor prestise sosial, kenyamanan dan kepuasan; (3) Ketahanan dan kekuatan dengan tingkat konsistensi terhadap nilai yang ada, pengalaman–pengalaman reformasi birokrasi sebelumnya, dan kebutuhan para pengguna yang potensial; (4) Kompleksitas yang masih sulit untuk dimengerti dan digunakan, dengan biaya yang masih relatif mahal apabila dibayar mandiri; (4) Daya Uji Coba; (5) Observabilitas tingkat kemudahan dan kehandalan aplikasinya.

Sedangkan penghambat dalam tumbuhnya inovasi DESIMA, hasil FGD menunjukkan antara lain: (1) Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal; (2) Tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber inovasi dan investasi; (3) Teknologi tersedia tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi; (4) Tidak ada imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi; (5) Rendahnya kemampuan; (6) Perencanaan dan penganggaran jangka pendek yang belum ada kesesuaian dengan inventor; (7) adanya tekanan administrasi; (8) Budaya menghindari resiko. Hal itu seperti temuan Geoff Mulgan dan David Albury (2003).

Adapun hal-hal yang dapat menjadi stimulus dalam inovasi e-Learning DESIMA ini hasil FGD menunjukkan antara lain: (1) Tantangan dalam lingkungan organisasi masih kondusif; (2) Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam proses maupun akhir suatu layanan selalu diakomodasi di dalam organisasi para mitra; (3) Perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim yang efektif lebih besar kemungkinan masih bersedia untuk berinovasi lebih lanjut; (4) Adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk memastikan kerja gabungan yang efektif.

Adapun apabila ditinjau dari teori kebijakan publik, maka program pengembangan sumberdaya aparatur desa secara on line DESIMA dapat dinyatakan merupakan pengejawantahan pemerintahan untuk masyarakat luas; pemanfaatan strategi untuk memecahkan masalah-masalah publik, termasuk bagi mereka yang belum beruntung dan pedesaan di lokasi terdepan terluar, dan merupakan arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam membentuk kesempatan-kesempatan atas suatu kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi kemungkinan adanya permasalahan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau suatu sasaran tertentu.

Adapun permasalahan yang diidentifikasi oleh aparat desa, hasil FGD menunjukkan antara lain:

1. Pengelola program dengan kelembagaan yang belum siap karena: (i) komitmen dalam pengembangan dengan visi kurang jelas, apakah sosial atau komersial, (ii) kompetensi SDM yang memahami karakteristik, perilaku, preferensi dan kebutuhan tidak banyak jumlahnya, (iii) bentuk layanan, pengembangan model pembiayaan, dan inovasi teknologi yang belum optimal; (iv) pemberdayaan melalui pengorganisasian kelembagaan kelompok pengguna, penyelia, dan mitranya melalui suatu Forum Koordinasi yang belum efektif;
2. Hambatan akses SDM aparatur desa termasuk hambatan literasi ICT dan on line berbasis internet.
3. Masih adanya krisis kepercayaan, dari dampak kredibilitas kelembagaan desa tersebut. Sementara selama ini belum dapat dilakukan revitalisasinya agar memiliki kondisi yang baik.

KESIMPULAN

Program DESIMA, khususnya Pelatihan on line bagi aparatur desa dapat terlaksana dengan pendekatan pemberdayaan bagi aparatur desa dan berkolaborasi kepada *multi stake holder* dalam penyelenggaraan programnya. Pada saat ini Pelatihan on line tersebut merupakan produk yang membutuhkan kebijakan peraturan dengan pertimbangan untuk pelaksanaannya yang lebih efektif. Hal ini dapat menjadikannya sebagai suatu bentuk inovasi pemerintahan dalam pengembangan sumber daya manusia yang terpadu dengan produk e-learning bagi pemberdayaan dan pengembangan kapasitasnya.

Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal seperti: kejelasan kebijakan dengan pertimbangan bauran pelaksanaan pelatihannya dengan studi kancha; Penyampaian layanan dengan perubahan cara baru dalam berinteraksi dengan calon pengguna, misalnya dengan kombinasi dengan surat edaran dan sosialisasi dan refleksi lanjutan; Perbaikan proses misalnya prosedur internal dalam format kolaborasi multi pihak; dan pembuatan modul baru yang sedang diperlukan pemerintahan desa misalnya tentang perencanaan dan bisnis model BUMDesa; Sistem internalisasi atau perbaikannya ketika seorang aparat telah memperoleh sertifikasi e-learning, bentuk *peer learning* yang berbasis pengetahuan dalam berinteraksi dengan narasumber dan aktor lain; serta adanya insentif dalam cara menjalankan tugas ke pemerintahannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Balai Pemerintahan Desa, Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta serta Dekan Fisipol dan Kepala Pusat Studi Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat UP45 yang telah memberikan dukungan beserta para pihak berkepentingan yang telah berpartisipasi dalam Studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agahari, Wirawan; Auliya, Syafira Fitri dan Putri, Dinita Andriani, 2018. *Innovation Outlook: Refleksi Inovasi Berbasis TIK di Indonesia*. www.cipg.or.id
- Anonim, PSKPPM. 2019. Laporan Pelatihan on line DESIMA di Lampung dan di Yogyakarta.
- Bolger, J., 2000. *Capacity Building: Whay, What, How* http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Biblio_Renforcement/documents/Chapter-1/Chap1Doc1.pdf
- Borins, Stanford (editor), 2008. *Innovations in Government Reseach Recognition and Replication*. Ash institute for democratic governance and innovation *John F. Kennedy School of Government Harvard University brookings institution press Washington, D.C.*
- Creswell, John W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Denhardt, Janet, V., and Denhardt, Robert B. V., 2003. "The New Public service: Serving not Steering", M.E.Sharpe Inc., New York.
- Diana, Anastasia, 2003, *TQM (Total Quality Management)*. Yogyakarta:Andi offset
- Holowchak, M.A.,2013. The Paradox of Public Service Jefferson, Education, and the Problem of Plato's Cave. *Stud Philos Educ* (2013) 32:73–86 DOI 10.1007/s11217-012-9322-7 Springer Science+Business Media B.V.
- https://www.academia.edu/30253314/Manajemen_Sumber_Daya_Manusia.pdf
- <http://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/3855-kemendagri-tingkatkan-kapasitas-aparatur-deskelola-keuangan>.
- <http://www.sinovac.menpanrb.go.id/inovasi> .
- Ibty,I. 2018(a) http://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/viewFile/344/308
- Ibty,I. 2018(b) <https://icas-pgs.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/155/2018/10/PROGRAM-BOOK-2ND-ICASPGS-2018-.pdf>
- Rasmussen, L., 2006. The adoption process in management innovation: A Knowledge Management case study. *Edinburgh Napier University, Edinburgh, UK* <http://jis.sagepub.com/content/42/3/356>.
- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion Of Innovations*. Third Edition The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 866 Third Avenue, New York, N. Y. 10022 Collier Macmillan Canada, Inc

Schwab, Klaus (editor), 2018. The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum. [http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness Report2018.pdf](http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf)



PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA MELALUI PELATIHAN BERBASIS ONLINE

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN IMPROVING VILLAGE GOVERNMENT STAFF COMPETENCIES THROUGH ONLINE BASED TRAINING

Bening Hadilinatih¹ (linatih@yahoo.com), Bambang Irjanto² (bb.irjanto@gmail.com), Nurhadi³ (noerani_14@yahoo.co.id), Cecep Effendi⁴ (cecep.effendi12@gmail.com)

¹Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Jln. Proklamasi No.1. Babarsari, Sleman. DIY

²Fak Ekonomi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Jln. Proklamasi No.1. Babarsari, Sleman. DIY

³Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Jln. Proklamasi No.1. Babarsari, Sleman. DIY

⁴Fisipol Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Timur, Jakarta Selatan

ABSTRAK

Banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa, mengisyaratkan pada Aparatur Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat memiliki kemampuan dan keahlian dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan didesa dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan berbasis online. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini diperoleh melalui penelusuran dokumen serta penggalian data dari masyarakat dan stakeholder terkait serta dengan memanfaatkan data-data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan desa memiliki minat yang cukup tinggi untuk mengikuti pelatihan aparatur desa berbasis online karena dapat belajar dengan waktu dan tempat yang fleksibel, serta lebih hemat dalam pembiayaan. Kendala pelaksanaan pelatihan online yang dapat dihadapi adalah kedisiplinan dan kendala sinyal internet yang lemah.

Kata Kunci: Aparatur Pemerintahan Desa; Peningkatan Kompetensi; Pelatihan Berbasis Online

ABSTRACT

The number of community demand and community expectation toward improving the service quality of village government staff, need village staff to improve their competence in order to have the ability and expertise to do service to the community and be able to carry out development in the village well. The aim of this study is to find out the opportunities and challenges in improving the competence of village government staff through online-based training. The data collected in this qualitative research is obtained through document tracking and data collection from the community and related stakeholders and by utilizing relevant secondary data. The result of the study indicate that village government staff have a high interest in training village staff based online because they can learn with a flexible time and place, and are more cost-effective in budget. The obstacles to implementing online training that can be faced are discipline and weak internet signal.

Keywords: Village Government Staff ; Competency Improvement; Online-Based Training

PENDAHULUAN

Banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat mengisyaratkan pada Pemerintah Desa untuk melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, selain itu juga diperlukan kesiapan sumber daya aparatur pemerintah desa. Agar pelayanan pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, maka hal yang paling mendasar untuk dilakukan adalah peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa. Pembinaan dan penataan aparatur pemerintah desa diperlukan untuk mengembangkan kompetensi yang menyangkut sikap, ketrampilan, serta keahlian dalam menghadapi tantangan setiap perkembangan dari pemerintah dan sosial masyarakat itu sendiri.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa yang disebut dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain sebagai penyelenggara pemerintahan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1 angka 4 UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa yang selanjutnya disebut sebagai aparatur pemerintah desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka aparatur pemerintah desa adalah orang atau kelompok orang yang menyusun dan melaksanakan undang-undang pada tingkat desa yang bertujuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat di desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184, terdiri dari Desa sebanyak 74.754, dan Kelurahan sebanyak 8.430 yang tersebar di 34 Provinsi, 511 Kabupaten/Kota. Dengan jumlah dan kondisi wilayah serta kompetensi aparatur pemerintah desa yang cukup besar dan beragam serta tersebar di seluruh pelosok tanah air tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan program-program peningkatan kompetensi pemerintah desa secara efektif dan efisien.

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar pelaksanaan program peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa adalah pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelatihan Berbasis Online. Program tersebut mendesak dilakukan mengingat jumlah desa dan kondisi wilayah serta kompetensi aparatur pemerintahan desa di Indonesia sangat banyak dan beragam serta tersebar di seluruh pelosok tanah air sehingga materi-materi pelatihan yang telah disusun dalam Modul-Modul Pelatihan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Desa perlu disebarluaskan secara efektif dan efisien serta disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pelatihan merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Pelatihan diperlukan oleh karena adanya tuntutan pekerjaan yang berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang sedemikian rupa memudahkan pelaksanaan pelatihan meski jarak geografis memisahkan antara pelatih dengan peserta pelatihan. Pelatihan Online merupakan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana belajar, sehingga belajar dapat dilakukan dimana saja secara Online. Pendapat lain menjelaskan bahwa Pelatihan Online merupakan proses transfer pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada mereka yang membutuhkannya dengan bantuan teknologi informasi secara cepat, efisien, dan fleksibel tanpa mengurangi esensi pembelajaran yang ada di kelas tradisional (ppm manajemen, 2019)

Dalam Pelatihan Online proses pembelajaran dilakukan melalui berbagai jenis format seperti video, tayangan slide, dokumen word, excel dan PDF. Melakukan webinar (*live online classes*) dan *instructor-led training* adalah salah satu cara yang baik untuk berkomunikasi dengan pelatih. Jadi Pelatihan online atau belajar online (*e-learning*) adalah alat atau sistem pendidikan berbasis komputer yang memungkinkan peserta belajar dimana saja dan kapan saja. Pada masa lalu pelatihan atau kursus online dilakukan dengan menggunakan perpaduan metode berbasis komputer seperti CD-ROM, saat ini pelatihan online sebagian besar dilakukan melalui internet dan berupa video yang interaktif.

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa melalui Pelatihan Berbasis Online dapat mendukung percepatan dalam pencapaian tujuan pembangunan dan pengembangan desa, karena materi-materi pelatihan dapat diakses oleh aparatur pemerintahan desa secara cepat dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Beberapa keuntungan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Pemerintah Desa melalui Pelatihan Berbasis Online adalah:

1. **Fleksibilitas**
Sistem pelatihan berbasis online memudahkan aparatur pemerintah desa untuk belajar tanpa terikat waktu dan tempat, asal terhubung internet, tanpa perlu melakukan perjalanan ke Pusat-pusat Diklat.
2. **Jangkauan yang lebih luas**
Dengan belajar online, maka aparatur pemerintah desa di seluruh pelosok tanah air bisa mengikuti kegiatan pelatihan.
3. **Bersifat Independen**
Dengan program pelatihan secara online, aparatur pemerintah desa bisa memilih sendiri kapan akan belajar dan apa yang dipelajari. Masalah-masalah yang tidak dipahami bisa ditanyakan melalui instruktur atau nara sumber, dengan mengirimkan email atau ikut dialog interaktif pada waktu-waktu tertentu, atau dengan melihat hasil diskusi pada forum yang disediakan.
4. **Menghemat Biaya**
Dengan mengikuti pelatihan secara online, maka banyak biaya yang bisa dihemat. Kebutuhan biaya transportasi, penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk pelaksanaan pelatihan
5. **Interaksi yang lebih intens**

Dengan belajar dan mengikuti pelatihan secara online, interaksi antara aparatur pemerintah desa dimanapun dengan para instruktur dapat lebih intens. Permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat dikonsultasikan secara terbuka dalam kesempatan yang tidak terbatas.

6. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pelatihan.

Dalam perjalanannya, sistem pelatihan secara online lebih mudah untuk diperbarui. Pihak penyelenggara bisa merevisi materinya kapan saja, sehingga informasi yang disajikan selalu up to date.

7. Motivasi yang berkelanjutan

Dalam system pelatihan secara online, instruktur diharapkan memahami materi pelatihan dengan baik, dan mentransfernya melalui bahasa yang mudah dipahami. Hal yang tidak kalah penting, motivasi yang terus menerus bisa dilakukan instruktur untuk menyemangati aparatur pemerintah desa agar tidak bosan untuk terus belajar.

Tujuan dan manfaat dari Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa berbasis Online perlu dipahami mengingat Pemerintah Desa yang memiliki aparatur yang berkompeten, produktif, ahli dibidangnya, serta mampu mengatasi masalah yang ada, akan memberikan citra positif aparatur pemerintah desa, yang handal dan bertanggungjawab sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan berbasis online. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa. Dengan memahami tentang peluang dan tantangan yang kemungkinan akan ditemui dalam pelaksanaan pelatihan online diharapkan dapat dilakukan kajian lebih lanjut tentang teknis implementasi pelatihan online bagi aparatur pemerintah desa.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan partisipatif oleh karena peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang menjadi wilayah kerja dari Balai Pemerintahan Desa di Lampung dan Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta. Untuk pengumpulan informasi digunakan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD dimaksudkan untuk menghindari permaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Ciri khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif lainnya (wawancara mendalam atau observasi) adalah interaksi antara peneliti dengan informan dan informan dengan informan penelitian (Sutopo, 2006). Selain FGD informasi juga diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa aparatur pemerintah desa dan karyawan Balai Pemerintahan Desa baik di Lampung dan di Yogyakarta. Data penunjang didapat dari sumber tertulis yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi lainnya. Data dianalisis secara induktif dan dideskripsikan melalui abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Aparatur Pemerintahan desa merupakan pihak yang paling dekat, paling paham dan mengerti apa yang terjadi di masyarakat desa. Dengan meningkatnya kualitas

aparatur desa, diharapkan akan dapat melahirkan program kerja yang menjawab kebutuhan warganya. Jika jumlah desa di Indonesia ada 74.954 desa, maka dengan asumsi sederhana, setiap desa memiliki perangkat 6 orang termasuk kepala desa, maka terdapat tidak kurang dari 449.742 orang di pemerintahan desa yang harus dibekali pelatihan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan data Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta, jumlah angkatan pelatihan menurut materi modul yang telah dilaksanakan di Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 01. Jumlah Angkatan Pelatihan Menurut Materi Modul Pada Th.2018

NO.	MATERI MODUL	JUMLAH ANGKATAN
1	Penataan Pemerintahan Desa	7
2	Administrasi Desa	8
3	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	7
4	Pengelolaan Keuangan Desa	8
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa untuk Pengurus LPMD	4
6	PKK	4
7	Pengurus RT	4
8	Kerja sama Desa bagi BPD	3
9	Pengawasan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	3
	Jumlah	48

Sumber: Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata per tahun Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta telah menjangkau 48 angkatan. Masing-masing angkatan pesertanya berasal dari 40 desa, dengan demikian rata-rata per tahun Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta telah berhasil menjangkau 1.920 desa. Jika rata-rata jangkauan ini dibandingkan dengan jumlah desa di wilayah kerja Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta, maka pelatihan aparatur pemerintahan desa baru akan tuntas dalam jangka waktu kurang lebih 11 tahun. Gambaran tentang pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan pelatihan aparatur pemerintahan desa oleh Balai Pemerintahan Desa Di Yogyakarta tersebut merupakan cerminan tentang jangkauan pelaksanaan pelatihan jika hanya dilakukan secara tatap muka langsung atau secara offline saja akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa kian penting dilakukan mengingat letak geografis Indonesia terkait dengan kondisi desa yang beranekaragam, baik kaitannya dengan kapasitas yang dimiliki maupun kaitannya dengan geografis. Data Ditjen Bina Pemerintahan Desa menyebutkan, sekitar 76 persen desa di Indonesia masih perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensinya (Akbar, 2019). Oleh karena itu peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting baik itu untuk pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan maupun tata kelola keuangan desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pelaksanaan pelatihan aparatur pemerintah desa memerlukan kerja sama yang harmonis di antara seluruh *stake holder* desa, baik itu pemerintah, perguruan tinggi dan swasta. Sinergi dan kerja sama untuk memfasilitasi desa

diharapkan dapat mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, unggul dan maju.

Sebagai lembaga maupun individu yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintahan desa diharapkan dapat mengupayakan peningkatan kapasitasnya agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang dilayani. Untuk itu peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa, lembaga dan tokoh-tokoh di desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan desa haruslah memperhatikan akan arti penting dari Penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien (Kurniyati, 2015:165). Penguatan atau peningkatan kapasitas diperlukan agar individu dan lembaga mampu melakukan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan atau masyarakat.

Morrison, 2015 dalam Surato Aw, (2018) menyebut bahwa untuk berkomunikasi dengan publik, telah banyak organisasi beralih ke saluran komunikasi berbasis internet yang lebih murah namun dapat mencapai target audiensi secara lebih cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan berbasis online diharapkan dapat mendukung percepatan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sebagai upaya tindak lanjut untuk mewujudkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan desa, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta melalui Pusat Studi Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (PSKPPM) melakukan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) antara Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor. 119/651/BPD, tertanggal 22 Januari 2019 dalam pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pendampingan pengembangan desa .

Secara khusus kerja sama yang ditindaklanjuti dalam rangka mendukung pelaksanaan program peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa adalah pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa melalui Pelatihan Berbasis Online. Program tersebut mendesak dilakukan mengingat jumlah desa dan kondisi wilayah serta kompetensi aparatur pemerintahan desa di Indonesia sangat banyak dan beragam serta tersebar di seluruh pelosok tanah air sehingga materi-materi pelatihan yang telah disusun dalam Modul-Modul Pelatihan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa perlu disebarluaskan secara efektif dan efisien serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

PENGENALAN PELATIHAN ONLINE BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA

Modul-Modul Pelatihan yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa perlu disebarluaskan secara efektif dan efisien. Oleh karena jumlah desa dan kondisi wilayah serta kompetensi aparatur pemerintahan desa di Indonesia sangat banyak dan beragam serta tersebar di seluruh pelosok tanah air maka Program Pelatihan Online untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa perlu diperkenalkan kepada seluruh aparatur pemerintah desa di Indonesia. Pengenalan atau sosialisasi tentang Pelatihan Online telah dilakukan pada acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa” di Lampung pada tanggal 21 Maret 2019 yang dihadiri oleh sekitar 2500 aparatur pemerintahan desa di wilayah kerja Balai Pemerintahan Desa Lampung (otonominews.co.id, 2019).

Sebelum pelaksanaan sosialisasi dalam acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa” yang diselenggarakan di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung pada tanggal 21 Maret 2019, telah dilakukan FGD dan juga wawancara antara Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung, perwakilan aparatur pemerintahan desa serta beberapa Instruktur Pelatihan dari Balai PMD Lampung.

Pengenalan selanjutnya dilakukan di Yogyakarta. Pengenalan atau sosialisasi mengenai pengembangan materi pembelajaran secara online untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa ini diperlukan mengingat perkembangan dunia digital menuntut banyak perubahan dan penyesuaian termasuk dibidang pendidikan. Dengan sistem online proses belajar mengajar tidak harus dilakukan di dalam kelas dan bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone sebagai media yang menarik. Beberapa aplikasi yang digunakan salah satunya adalah “Balai Desa”, aplikasi ini memberikan informasi atau materi yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa. Selain itu aplikasi ini mendukung program pembelajaran mandiri dan jarak jauh. Penjelasan materi tidak hanya ditampilkan dalam paparan saja namun dilengkapi dengan video, post quiz dan juga pertemuan secara online (picdeer.com, 2019) Selanjutnya sosialisasi juga dilakukan dalam acara Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa menuju Desa maju dan mandiri sewilayah kerja Balai Pemerintah Desa D.I. Yogyakarta (Guspa,W 2019).

Sosialisasi yang dilakukan di Yogyakarta juga dilakukan melalui FGD dan wawancara yang diselenggarakan oleh Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta serta beberapa Instruktur Pelatihan dari Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta. Secara garis besar dari hasil FGD dapat diperoleh masukan tentang permasalahan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta yang telah mengikuti Pelatihan secara offline (tatapmuka) yang diselenggarakan di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, sebelum mengikuti pelatihan sebagian besar memang belum memahami tentang Peraturan-peraturan yang terkait dengan Pemerintahan Desa, maupun tentang Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa. Setelah mengikuti Pelatihan aparatur pemerintahan desa yang menjadi peserta menjadi tahu dan paham tentang materi-materi modul yang diberikan. Para peserta juga dapat saling tukar menukar pengalaman tentang pelaksanaan dan permasalahan yang ditemui dalam pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing. Informasi penting yang diperoleh dari hasil FGD adalah tentang Pelaksanaan Pelatihan yang frekuensinya masih sangat jarang, oleh karena keterbatasan anggaran dari pemerintah. Sebagai akibatnya jumlah aparatur pemerintahan desa yang dilatih masih sedikit, belum dapat mencapai target seperti yang diharapkan. Untuk itu peserta FGD menyambut baik dan mendukung tentang adanya pelatihan online bagi aparatur pemerintahan desa.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa aparatur pemerintahan desa yang menjadi peserta dalam acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa” yang diselenggarakan di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung dan acara “Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa menuju Desa maju dan mandiri” sewilayah kerja Balai Pemerintah Desa D.I. Yogyakarta, dapat dirangkum sebagai berikut:

“...Kemampuan atau kompetensi aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga desa sangatlah beragam. Ada yang sudah mengetahui tentang peraturan-peraturan pemerintahan desa maupun manajemen pengelolaan desa dan juga keuangan desa, namun masih cukup banyak yang belum mengetahui dan menguasainya. Hal tersebut karena latar belakang pendidikan aparatur pemerintahan desa juga berbedabeda. Oleh

karena itu perangkat aparatur desa perlu diikutkan dalam pelatihan, baik dalam pelatihan secara tatap muka atau pelatihan melalui internet atau pelatihan online. (informan dari Bandar Lampung, 21 Maret 2019 dan informan dari Magelang 26 Maret 2019).

“...Banyak aparatur pemerintahan desa yang ingin mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam mengelola pemerintahan desa, namun untuk dapat mengikuti pelatihan tidak mudah karena jumlah peserta yang dikirim oleh pemerintah daerah sangat terbatas. Jika akan meningkatkan pengetahuan dengan kuliah di Perguruan Tinggi tidak ada biayanya.” (informan dari Bandar Lampung, 21 Maret 2019 dan informan dari Magelang 26 Maret 2019)

“...Sebagai aparatur desa yang harus mengetahui tentang manajemen pemerintahan desa maupun pengelolaan keuangan dari dana desa, aparatur desa berminat untuk dapat mengikuti pelatihan online karena kami dapat belajar dari rumah kami masing-masing, namun kami juga khawatir kami tidak dapat taat dan disiplin untuk mengikuti materi karena sering ada kegiatankegiatan sosial diluar jam kerj dan juga harus mengurus sawah dan kebun kami.” (informan dari Klaten 26 Maret 2019) “ Materi pelatihan online yang kami harapkan tidak hanya terkait dengan manajemen dan keuangan saja, namun jug materi-materi pelatihan yang terkait dengan pemanfaatan potensi desa, kewirausahaan,pertanian dan peternakan. Cara penjelasannya diharapkan juga yang sederhana dan mudah dipahami, disertai dengan contoh” (informan dari Bandar Lampung, 21 Maret 2019)

Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap perwakilan Aparatur Pemerintahan Desa yang hadir dalam acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menuju Desa Maju dan Mandiri” di Wilayah Kerja Balai Pemerintahan Desa di gedung Graha Pradipta Jogja Expo Center, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2019.

Dalam pelaksanaan sosialisasi Pelatihan Online, dilakukan penyebaran kuesioner kepada peserta yang hadir. Kuesioner yang diisi oleh peserta di Lampung dan Yogyakarta berjumlah 528. Hasil pengolahan data menunjukkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Minat untuk mengikuti Pelatihan Online.

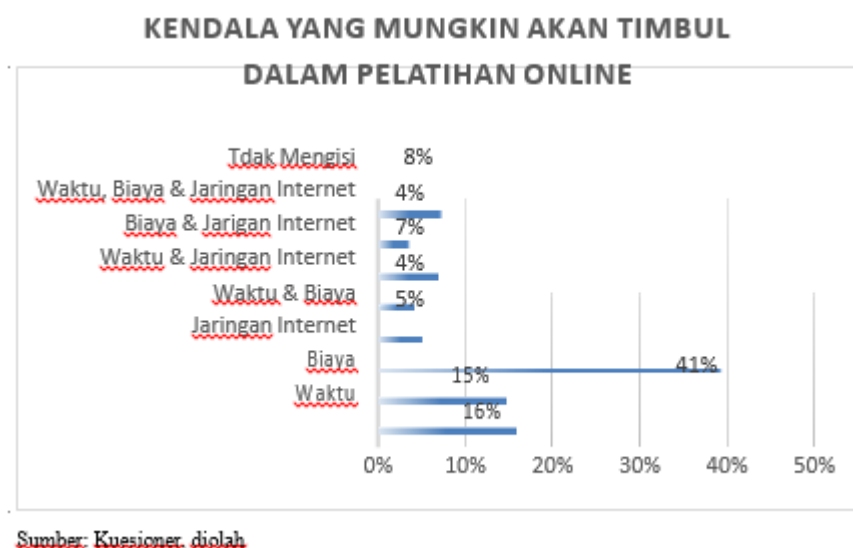
Terdapat 97% peserta yang berminat untuk mengikuti Pelatihan Online bagi peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa.

Gambar 1. Pie Chart tentang Minat untuk mengikuti Pelatihan Online



2. Kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pelatihan online.
 - a. Menurut pendapat responden, Jaringan Internet dapat menjadi kendala utama dalam pelatihan online karena sinyal yang seringkali lemah, putus-putus dan keterbatasan kuota.
 - b. Kendala yang kedua yang mungkin akan dihadapi dalam Pelatihan Online adalah waktu, karena menurut pendapat beberapa aparatur desa yang diwawancarai, mereka agak kesulitan untuk bisa mendisiplinkan diri untuk belajar apalagi kalau sudah di rumah.
 - c. Biaya, menurut pendapat responden juga dapat menjadi kendala, oleh karena jika harus membayar maka harus direncanakan dahulu dalam APBDes. Jika menggunakan uang sendiri mereka akan memikirkan dahulu tentang manfaat dari materi-materinya. Selain itu juga terkendala biaya untuk membeli pulsa.

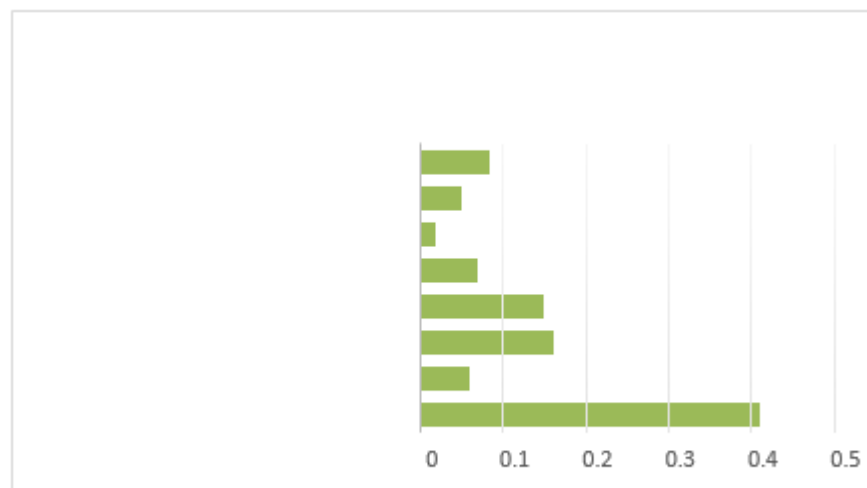
Gambar 2. Grafik Tentang Kendala-Kendala Dalam Pelatihan Online



3. Materi yang diharapkan dalam Pelatihan Online.
 - a. Materi tentang Pengelolaan Keuangan/Dana Desa (Siskeudes) sangat diharapkan oleh Perangkat Desa agar dapat membuat laporan keuangan yang benar, terkait dengan adanya Dana Desa yang tersedia.

- b. Materi tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang diharapkan adalah materi untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen Pemerintahan Desa, baik dalam kemampuan dalam menyusun perencanaan (RPJM Desa), Pengelolaan Bumdes, Administrasi Desa, Peningkatan kualitas pelayanan, maupun kemampuan dalam penggunaan computer.
- c. Materi Pengelolaan Aset dan Potensi Desa juga diharapkan oleh aparatur desa terutama materi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa.
- d. Materi Kewirausahaan juga diperlukan oleh aparatur desa terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan melalui usaha mandiri baik dalam hal produksinya maupun pemasarannya.

Gambar 3. Materi Yang Diharapkan Dalam Pelatihan Online
MATERI YANG DIHARAPKAN DALAM



Sumber: Kuesioner, diolah

Berdasarkan pendapat aparatur pemerintah desa yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pelatihan Online bagi Aparatur Pemerintah Desa memerlukan pengembangan materi pelatihan, terutama materi-materi yang terkait dengan: Pengelolaan Aset dan Potensi Desa; Materi Kewirausahaan; dan Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat desa.

Hasil dari FGD, wawancara maupun kuesioner menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa menghendaki materi-materi pelatihan disusun secara sederhana dan mudah dipahami dengan contoh-contoh nyata terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui di desa.

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN ONLINE

Kata “peluang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “kesempatan” oleh karena itu dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peluang adalah suatu keadaan memungkinkan sesuatu tujuan dapat dicapai dengan berhasil. Adapun kata “tantangan” dalam KBBI diartikan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya). Dalam hal ini tantangan yang dimaksud adaah suatu hal atau keadaan yang menuntut adanya kemampuan

untuk dapat mengatasinya.

Pelaksanaan sosialisasi, FGD, wawancara serta hasil jajak pendapat melalui kuesioner yang telah dilakukan, menghasilkan informasi tentang peluang-peluang pelaksanaan Pelatihan Online bagi peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa sebagai berikut:

- a. Wilayah geografis Negara Indonesia yang sangat luas, jumlah desa yang cukup banyak dan keterbatasan pemerintah melalui Balai Pemerintahan Desa untuk melakukan pelatihan kepada seluruh aparatur desa dalam waktu yang singkat, menjadi peluang untuk segera dilakukan pelatihan online bagi aparatur pemerintah desa.
- b. Sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi peluang untuk melaksanakan pelatihan online bagi aparatur pemerintah desa. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pelatihan online dapat mendukung pemerintah pusat untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah di daerah, khususnya aparatur pemerintah desa.
- c. Kemajuan teknologi informasi dan peningkatan jumlah pemilik dan pengguna gadget serta media sosial menjadi peluang untuk dapat dilaksanakannya pelatihan online bagi aparatur pemerintah desa.
- d. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan dana desa yang cukup besar, menjadi peluang untuk melakukan pelatihan online bagi aparatur pemerintah desa. Keharusan untuk melakukan pengelolaan anggaran dana desa yang semakin besar memiliki dampak dan konsekuensi hukum yang besar juga. Pelatihan online merupakan cara yang cukup strategis untuk dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa.
- e. Adanya tuntutan bahwa aparatur pemerintahan desa harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, mengupayakan kemandirian, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan dana desa menjadi peluang untuk melakukan pelatihan online bagi aparatur pemerintah desa. Jika aparatur desa tidak meningkatkan kompetensinya maka dapat berakibat terjadinya pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak seharusnya.

Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan online bagi aparatur pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang baru pertama kali mengikuti masih belum lancar dalam menggunakan aplikasi, baik pada saat download, maupun membuka materi pembelajaran
2. Konektivitas internet pada peserta aparatur pemerintah desa yang berada di daerah masih belum sepenuhnya lancar karena sinyal yang tidak stabil
3. Peserta yang belum terbiasa menggunakan aplikasi online belum dapat mengikuti Diskusi /Live Session secara serius karena masih perlu penyesuaian dgn System aplikasinya.

Pembangunan desa merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian serius oleh karena pembangunan yang dilaksanakan di desa diharapkan akan dapat memberkecil disparitas sosial dan ekonomi yang ada. Salah satu konsep pembangunan pedesaan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada UU Desa ini, pemerintah ingin memberikan arena yang memadai, dan leluasa untuk desa dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya, sehingga dapat mewujudkan desa yang maju dan mandiri. UU Desa merupakan

instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

Materi-materi pokok dalam pelatihan yang akan diajarkan dalam Pelatihan Online bagi aparatur pemerintahan desa, memuat materi-materi tentang Manajemen Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Peraturan Desa. Dengan mempelajari materi-materi pokok tersebut diharapkan peserta akan memiliki pemahaman, kemampuan dan ketrampilan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kendala, hambatan dan tantangan yang dapat diatasi dengan baik akan menentukan pencapaian upaya peningkatan kapasitas Aparatur pemerintahan desa. Semakin banyak aparatur pemerintahan desa disuatu wilayah yang dapat mengikuti pelatihan online diharapkan kapasitas SDM yang ada didesa tersebut akan semakin meningkat. Jika pengetahuan dan kemampuan tersebut dapat diterapkan dengan baik maka upaya untuk mewujudkan desa maju dan mandiri akan dapat tercapai seperti yang diharapkan.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi dan peningkatan jumlah pemilik dan pengguna gadget serta media sosial merupakan peluang utama yang dapat digunakan untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa berbasis online. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan dana desa yang cukup besar, dan tuntutan kemampuan untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga, menjadi peluang untuk melakukan pelatihan online bagi aparatur pemerintah desa. Minat aparatur pemerintah desa untuk mengikuti pelatihan online cukup tinggi. Melalui pelatihan online aparatur pemerintah desa dapat belajar dengan waktu dan tempat yang fleksibel, serta lebih hemat dalam pembiayaan.

Pelatihan online untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dapat berhasil jika terdapat koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terkait secara intens. Kendala, tantangan dan permasalahan yang ada seperti kelancaran jaringan internet, ketrampilan dalam menggunakan aplikasi online, serta kedisiplinan dari instruktur dan peserta pelatihan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pelatihan online sehingga terjadinya hambatan dapat diminimalisir.

Peserta pelatihan online perlu didorong untuk dapat mengikuti pelatihan secara disiplin dan sungguh-sungguh. Untuk itu perlu didukung dengan pemberian “reward” agar memiliki kemauan untuk mengikuti, misalnya dengan diberi beasiswa serta sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperpanjang masa jabatan. Selain itu juga diperlukan penetapan peraturan yang mengarahkan aparatur desa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan baik secara online maupun offline dan studi banding. Pelaksanaan pelatihan online bagi Aparatur Pemerintah Desa juga memerlukan pengembangan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan isu-isu pembangunan desa terkini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang telah dilakukan dapat terlaksana oleh karena bantuan dan dukunga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung beserta staff, Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta beserta staff, Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya penelitian ini. Hasil penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di pedesaan khususnya aparatur pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Guspa,W 2019, Hadi Prabowo: Sejak Era Jokowi Secara Nyata Beri Alokasi Dana Desa yang Tiap Tahun Meningkat, diakses pada 8 Agustus 2019, (<https://akurat.co/news/id-569350-read-hadi-prabowo-sejak-era-jokowi-secara-nyata-beri-alokasi-dana-desa-yang-tiap-tahun-meningkat>).
- Otonominews.co.id 2019, Kemendagri tingkatkan kapasitas aparatur desa kelola keuangan, diakses pada 1 Juli 2019, (<http://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/3855-kemendagri-tingkatkan-kapasitas-aparatur-desa-kelola-keuangan>)
- Picdeer.com 2019, diakses pada 8 Agustus 2019, (http://picdeer.com/media/1983938713571571921_10422275569)
- Ppm manajemen 2019, diakses pada 1 Juli 2019, (<https://ppm-manajemen.ac.id/page/e-learning>)
- Norvan Akbar, 2019, diakses pada 1 Juli 2019, Kemendagri Dorong Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (<https://jpp.go.id/polhukam/pemerintahan/329978-kemendagri-dorong-upaya-peningkatan-kapasitas-aparatur-desa>)
- Suranto, Aw, 2018, INFORMASI: Kajian Ilmu Komunikasi - ISSN (p) 0126- 0650; ISSN (e) 2502-3837 Vol. 48, No. 1 (2018), pp.1-13. doi: <http://dx.doi.org/10.21831/informasi.v48i1.20073>
- Yuli Kurniyati, Bening Hadilinatih.(2015). PENGEMBANGAN KESWADAYAAN KELOMPOK PEW.. SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN DI KOTA YOGYAKARTA. Jurnal Maksipreneur, Vol.V, No. 1, Desember 2015 Hal 160-179, <http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v5i1>



**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DESA DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN**

***QUALITY IMPROVEMENT OF VILLAGE APPARATUS RESOURCES IN REALIZING
WELFARE AND INDEPENDENCE***

Hayat

Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144 Jawa Timur Indonesia

Email: hayat@unisma.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah desa saat ini menuju masa perubahan yang signifikan di dalam pembangunan dan pemberdayaan. Banyak potensi dan sumber daya yang mampu dihadirkan melalui inovasi dan kreatifitas dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin ketat dan daya saing yang semakin tinggi. Anggaran yang diperuntukkan bagi pemerintah desa secara maksimal harus dikelola secara baik dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa dituntut untuk memberikan pelayanan secara prima. Kualitas sumber daya aparatur desa masih menjadi kendala secara umum, sehingga berdampak terhadap kualitas layanan publik. Kualitas pelayanan bagi masyarakat desa masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan perbaikan dan penguatan baik di bidang pendidikan, kompetensi maupun integritasnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa harus dibangun melalui pendidikan yang kompeten dan dipersyaratkan untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Pendidikan secara signifikan berdampak terhadap kinerja aparatur desa. Kualitas pendidikan yang baik, kompetensi yang komprehensif, dan integritas yang mumpuni dapat berpengaruh terhadap pemberian layanan yang prima. Pelayanan yang prima sebagai wujud tanggungjawab pemerintah desa terhadap kebutuhan dasar masyarakat agar mendapatkan kemudahan dan kenyamanan di dalam memberikan layanan publik bagi masyarakat desa. Aparatur desa yang berkualitas dapat menciptakan inovasi pelayanan yang prima dan mendorong pemerintahan desa yang bersih, adil, makmur, dan sentosa serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Keyword: aparatur desa, sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, kemandirian desa

ABSTRACT

The village government is currently heading for a period of significant change in development and empowerment. Many potentials and resources are able to be presented through innovation and creativity in order to face increasingly tighter challenges and higher competitiveness. The budget that is intended for the village government maximally must be managed well and on target according to the needs of the village community. This is also related to the improvement in the quality of the village apparatus resources required to provide excellent service. The quality of village apparatus resources is still an obstacle in general, which has an impact on the quality of public services. The quality of service for the village community is still a homework that must be immediately repaired and strengthened both in the fields of education, competence and integrity. Therefore, improving the quality of village apparatus resources must be built through competent and required education to continue to higher education. Education significantly impacts the performance of village officials. The quality of good education, comprehensive competence, and high integrity can influence the delivery of excellent service. Excellent service as a manifestation of the responsibility of the village government to the basic needs of the community in order to obtain convenience and comfort in providing public services to the village community. Quality village apparatuses can create excellent service innovations and encourage clean, fair, prosperous and secure village government and create a prosperous and independent society.

Keyword: village apparatus, human resources, community welfare, village independence

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian disebut dengan UU Desa memberikan definisi secara jelas dan konkret tentang pengertian desa. Disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya UU Desa memberikan angin segar bagi pemerintah desa dan semua elemen desa di dalamnya. Masyarakat desa juga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga dengan disahkannya UU Desa tersebut. Banyak perubahan dan paradigma yang selama ini melekat pada diri desa dijamah sedemikian rupa untuk maju dan mandiri. Amanat UU tersebut juga mengembalikan fungsi desa yang sesungguhnya dengan menghidupkan semua potensi yang ada. Persoalan desa yang selama ini menjadi pemisah yang sangat dalam antara desa dan kota sudah mulai diurai dan dipecahkan dengan hak rekognisi dan otonomi yang dimiliki oleh desa. Berbagai persoalan ekonomi yang menjadi boomerang dan penyumbang kemiskinan kini menjadi potensi yang terus untuk dikembangkan menjadi sebuah harapan baru bagi ekonomi nasional.

Pendidikan yang dulu menjadi persoalan klasik di desa, saat ini sudah mulai bergeliat dan menunjukkan kearah yang lebih baik. Banyak masyarakat desa yang sudah sadar tentang pentingnya pendidikan bagi generasi berikutnya. Bukan lagi mau menjadi apa, tetapi bagaimana pendidikan harus dijadikan sebagai instrument utama dalam perubahan terhadap masyarakat dan kehidupan di desa.

Sosial politik juga terus didorong untuk kearah yang lebih baik dan demokratis. Melalui kewenangan dan keleluasaan desa dalam mengelola daerahnya menuntut sebuah kebijakan sosial politik yang dinamis dan demokratis dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Untuk menjamin kehidupan sosial politik yang kritis dan menumbuhkan partisipasi yang tinggi, maka masyarakat desa melalui UU Desa didorong ikut terlibat aktif membangun desa dengan partisipasi di setiap kebijakan atau program-program yang diterapkan di dalamnya.

Banyak program-program yang sudah dilakukan oleh desa melalui dana desa, tetapi disisi lain, banyak juga program yang berbentuk bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berjalan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan perusahaan saja. Desa hanya menjadi penerima program, sehingga kadangkala kurang tepat sasaran, bahkan tidak sedikit diselewengkan oleh oknum di desa (Dakelan, dkk., 2016).

Oleh karena itu pentingnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai lokomotif perubahan di desa. Menurut Hayat (2014), mengemukakan bahwa sumber daya aparatur mempunyai peran penting dalam pengembangan organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia sebagai penggerak utama menjadi pilar penting dalam organisasi. Sedangkan sarana dan prasarana sebagai alat untuk menggerakkan organisasi, tetapi yang menentukan arah kerja dari organisasi adalah manusia itu sendiri. Maka penting untuk dibangun dan dikembangkan agar pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dan berdampak secara baik pula bagi kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aparatur desa juga sudah menjadi tuntutan atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang semakin baik. Pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat dijadikan sebagai prioritas utama dalam implementasi kebijakan pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat desa yang semakin baik dan berkualitas dalam semua aspek kehidupan, maka pelayanan menjadi hal penting yang sudah harus mulai

dibangun bagi pemerintah desa. Pelayanan publik yang baik tentunya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya aparatur desa yang berkualitas. Maka penting untuk melakukan rekrutmen aparatur desa yang baik dengan mengedepankan prinsip kompetensi, kejujuran, keadilan, kebaikan, dan profesionalisme yang diikuti oleh komitmen dan integritas yang tinggi. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian dan kesejahteraan desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih adalah untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena yang terjadi dan dinarasikan melalui berbagai literature sebagai bahan kajian dan sumber utama. Teknik analisis yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan penalaran kritis melalui berbagai referensi dengan teori-teori yang mendukung, sehingga dapat membentuk sebuah nalar kritis yang menjangkau semua aspek yang diteliti berdasar pada interpretasi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah dilakukan secara induktif yang diambil dari berbagai literatur, baik buku maupun jurnal dan berbagai informasi dari media cetak atau online. Teknik analisis secara induktif dilakukan untuk melihat fakta-fakta secara umum dan dapat ditarik benang merah dari berbagai fakta yang muncul secara baik, terstruktur dan akuntabel.

PEMBAHASAN

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa

Kualitas sumber daya manusia dalam organisasi menjadi hal yang paling penting. Sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam menggerakkan organisasi harus menjadi perhatian serius untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mulai dari rekrutmen, pengelolaan dan pengembangannya, diatur dan dimanajemen sedemikian rupa agar organisasi memiliki eksistensi dan keberlanjutan secara terarah dan berkala.

Di dalam kerangka organisasi publik, berbagai paradigma aparatur sipil negara sudah mulai bergeser, dari yang meminta harus dilayani sudah berubah pada konteks melayani masyarakat. Kiranya hal ini dapat menjadi pendidikan bagi pemerintah desa untuk belajar tentang pentingnya penguatan aparatur sipil desa.

Pelayanan publik secara penuh adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan secara total dan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang memiliki dampak terhadap perubahan di dalamnya. Administrasi publik telah banyak dipengaruhi oleh agenda reformasi yang sudah berjalan lewat satu decade, yaitu menjadikan pelayanan publik sebagai sentral dalam pembangunan secara menyeluruh dan konkret. Perubahan itu dapat dirasakan secara baik dan berdampak secara sistematis dan massif. Oleh karena itu, maka peningkatan kinerja apartur pelayanan publik menjadi sebuah keniscayaan yang terus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelayan publik sebagai tolok ukur dari penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara (Enceng, Liestyodono BL, Purwaningdyah, 2008).

Pada konteks ini, sumber daya manusia desa atau lebih dikenal dengan sumber daya aparatur desa melalui berbagai peraturan dan ketentuan perundang-undangan dituntut untuk terus berkembang dan maju mengikuti proses pembangunan desa yang semakin baik. Undang-Undang desa sudah mengamanatkan bahwa desa dengan segala hak otonominya harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan rakyat yang dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karena itu, pencapaian tertinggi dalam pemerintahan itu adalah good governance. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(Good Governance) dan berkesinambungan. Perwujudannya adalah dengan aspek profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Profesionalisme dimaksud adalah pada aspek kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Secara prinsip, profesionalisme aparatur sipil negara terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pengabdian sebagai sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi (Tumangkeng, 2019).

Persoalan sumber daya aparatur desa adalah rendahnya pendidikan dan kompetensi. Rendahnya pendidikan aparatur desa sangat berpengaruh terhadap proses layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melayani masyarakat bukan hanya sekedar memberikan hak masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana menjadikan aparatur desa sebaik-baiknya pelayanan bagi masyarakat desa. Tidak memandang siapa yang meminta layanan, bagaimana layanan itu akan dilakukan, tidak semata-mata sendiri, perilaku yang baik dan sopan menjadi hal yang paling dijaga dalam adat istiadat di desa dan banyak hal lain yang melebihi dari sekedar proses formalitas pemberian layanan.

Sebagai abdi masyarakat, aparatur sipil negara terus melakukan pembenahan dalam bidang pendidikan aparatur desa. Pengetahuan dan pendidikan mampu mengubah paradigma dan pola kehidupan kehidupan manusia di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Mengingat aparatur desa berhubungan secara langsung dengan masyarakat desa, maka harus dibangun sebuah kondisi sistem pelayanan yang merakyat, menyatu dengan masyarakat dan memberikan proses pendidikan pelayanan yang lebih baik agar masyarakat ikut serta berperan aktif dalam berbagai program pemerintahan desa. Melalui peran serta masyarakat tersebut dapat menggerakkan sistem pelayanan yang berkualitas secara baik.

Persoalan kedua adalah kompetensi aparatur desa. Pendidikan yang baik kadangkala tidak diikuti oleh kompetensi dirinya. Hal ini banyak terjadi pada sektor organisasi publik tentang tidak sinkronnya antara kompetensi dan tugas dan fungsinya, sehingga persoalan dalam pekerjaan kadangkala dibebankan kepada pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan bidangnya. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya akan berdampak terhadap penyelesaian pekerjaan yang dilakukan.

Sofo (1999) mengemukakan “A competency is composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent applications of those skill, knowledge, and attitude to the standard of performance required in employment”. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Mengadopsi pendapat McAhsan yang mengemukakan bahwa kompetensi: “...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”. Menjelaskan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2003).

Perlu untuk dilakukan penataan secara maksimal dalam pengelolaan pemerintahan desa sejak awal, agar keberlanjutan dalam pemerintahan desa bisa bergerak dan berjalan dengan baik. Kompetensi ini berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang terhadap bidang kerjanya

masing-masing. The right man on the right place. Orang yang tepat harus berada pada tempat yang tepat. Siapa melakukan apa dengan bidang pekerjaannya masing-masing.

Melalui kompetensi yang dimiliki, pegawai akan bekerja dengan keterlibatan dirinya secara langsung dan menyukai terhadap pekerjaannya. Dengan demikian, pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya akan terselesaikan dengan baik karena menyatu dalam pola pikir, pola rasa dan pola tindakan yang dimilikinya.

Terakhir adalah lemahnya pengorganisasi pemerintahan desa. Pemerintahan desa dengan hak asal usul yang melekat dalam diri desa serta memerdekakan secara penuh terhadap masyarakat desa adalah ketika UU Desa disahkan dan diimplementasikan. Gemuruh kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat desa Nampak begitu penuh semangat untuk memajukan dan membangun desa. Geliat partisipasi masyarakat dengan budaya gotong royong menjadi ciri khas masyarakat desa semakin menguat untuk menjadikan kesejahteraan sebagai nilai utama dalam pembangunannya.

Inovasi desa terus dibangun sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa. Seluruh komponen masyarakat bersatu dengan pemerintah desa membangun desa. Berbagai pola pembangunan diinisiasi oleh masyarakat desa, ada pula yang dibuat oleh pemerintah desa untuk menyediakan ruang bereksplorasi bagi masyarakat desa agar mempunyai ruang gerak yang bebas dalam pembangunan desa dan banyak lagi ruang-ruang lain yang disiapkan oleh negara untuk kesejahteraan dan kemandirian desa.

Dari semua ekspektasi itu, maka pengeorganisasi harus kembali dikelola dengan baik, Sistem pendanaan desa saat ini masih dibangun dari pemerintah pusat sampai daerah. Melalui berbagai peraturan yang mengikutinya, anggaran pemerintah desa yang cukup besa harus pula diikuti oleh sistem organisasi yang lebih baik. Mulai dari penataan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, infrastruktur, sistem pemerintahan dan pengorganisasian serta kepemimpinan harus terarah dengan baik. Agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuan dari UU No. 6 Tahun 2014.

Pengorganisasian menjadi tulang punggung pembangunan desa. Proses perencanaan kebijakan, implementasi sampai pada proses evaluasi kebijakan dikelola berdasarkan organisasi desa yang baik. Sistem dan tatanan organisasi yang lemah akan berdampak pada tatanana perencanaan pembangunan desa yang lembah pula. Hal itu akan berdampak pada proses implemementasi kebijakaannya yang lemah pula. Begitu pula proses evaluasi kebijakannya juga akan berdampak, sehingga berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Menurut Husna dan Ayukriy (2016), bahwa pengembangan aparatur sipil desa merupakan keniscayaan dan keharusan secara berkesinambungan dan berkelanjutan mengikuti perkembangan, yaitu perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi dan informasi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban. Ada beberapa cara dalam pengembangannya, yaitu:

1. Pendidikan. Membangun kesadaran dalam pendidikan bagi aparatur desa adalah penting. Difasilitasi oleh desa melalui berbagai program untuk mendorong aparatur desa untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, jika memungkinkan bisa sampai menjadi Sarjana.
2. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan). Diklat sebagai bagian dari pengembangan aparatur desa menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mengasah dan meningkatkan kompetensi aparatur sesuai bidangnya masing-masing. Pengaturan diklat tentunya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing pemerintah desa. Bisa dilakukan dalam satu tahun sekali atau setiap semester. Tujuannya adalah untuk membangun komitmen dan integritas secara berkala bagi aparatur desa, baik bagi yang baru ataupun yang sudah lama, sehingga update informasi maupun kebijakan dapat dengan segera diimplementasikan.

3. Kursus atau *in house training*. Kursus adalah untuk melatih kemampuan aparatur yang memiliki bidang kekhususan untuk meningkatkan profesionalismenya. Biasanya bisa dilakukan kepada aparatur yang memiliki tugas sebagai leader atau kepala. Untuk melatih profesionalisme kepemimpinan, maka diperlukan kursus atau *in house training* agar lebih percaya diri dan kompeten dalam bidangnya.
4. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa. Rekrutmen aparatur desa memerlukan ketelitian dan komitmen bersama agar mendapatkan kualitas aparatur desa yang berkualitas dan bekerja secara maksimal. Kunci dari pengelolaan sumber daya aparatur desa adalah proses rekrutmen yang dilakukan. Rekrutmen pegawai atau aparatur desa adalah bisa dilakukan secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan mengedepankan prinsip kompetensi, integritas dan kapabilitas calon aparatur desa.

Implementasi UU Desa dan UU Aparatur Sipil Negara

Lahirnya UU Desa memberikan semangat baru bagi desa sebagai pilar kesejahteraan bagi masyarakat desa. Dari UU Desa itulah motivasi dan harapan baru masyarakat desa tumbuh, bahkan inovasi-inovasi di tingkat desa bergeliat sedemikian rupa hingga menembus batas dan ruang yang menjadi penyekat dalam diri desa.

Hak-hak yang menjadi fundamen bagi desa juga diatur sedemikian rupa untuk memberikan ruang kemaslahatan bagi masyarakat desa. Banyak sekali keuntungan dan pendayagunaan dari UU tersebut untuk menjadi desa sebagai pilar bangsa dalam tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Mulyono (2014) menegaskan bahwa terdapat dua masalah utama dalam masa transisi implementasi UU Desa sejak UU Desa disahkan, yaitu tata kelola administrasi dan birokrasi desa serta akuntabilitas pemerintah desa. Kedua masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dalam kerangka membangun keberlanjutan program-program yang akan menjadi prioritas bagi pemerintah desa dengan aturan-aturan yang melekat di dalamnya. Pada saat ini, perjalanan UU Desa memang mengalami banyak kendala, mulai dari tata administrasi yang terus melakukan pembenahan, aparatur sipil desa yang harus terus ditingkatkan, sarana prasarana desa yang terus dibangun, infrastruktur dan pengelolaan aset desa yang terus diperbaiki. Hal ini untuk menjamin tercapainya tujuan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa yang lebih baik dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia desa terus dilakukan penguatan untuk mempersiapkan bonus demografi dan menghadapi tantangan pasar bebas yang semakin ketat. Daya saing bangsa ditentukan oleh daya saing masyarakatnya secara umum. Maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan bersama. UU Desa sudah memberikan garis untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa.

Pun demikian potensi pengembangan sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus dilakukan, terutama pada aspek sumber daya aparatur desa. UU No 5 tahun 2016 tentang aparatur sipil negara mengatur seluruh kehidupan aparatur sipil negara yang memberikan keleluasaan bagi organisasi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan aspek pendidikan, kompetensi dan nilai organisasi.

Pelaksanaan UU Desa terus mengalami peningkatan dan perbaikan di desa, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pendidikan. Pelaksanaan UUD berpengaruh terhadap pembangunan secara nasional, mempercepat pembangunan desa, mendorong sejumlah potensi desa, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Hal ini dapat menunjukkan aspek kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan atau program di desa harus didukung oleh nilai partisipasi aktif masyarakatnya, karena desa sebagai hak otonom yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk kesejahteraan bersama dalam membangun desa. Mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, musyawarah mufakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa adalah sebuah keniscayaan yang wajib ditaati bersama sesuai dengan amanat UU Desa.
2. Desa dapat lebih fokus dalam mengintensifikasi pelayanan publik serta pembangunan dalam skala yang lebih kecil, mengingat sumber keuangan desa yang relatif cukup dibandingkan dengan kuantitas urusan yang akan dilaksanakan. Kenyataan tersebut setidaknya mendorong otonomi yang dimiliki untuk menjadikan semua urusan yang telah diakui dan dihormati bukan sekedar pajangan, tetapi akumulasi dari seluruh aset yang memungkinkan Desa bertambah kaya dengan modal yang dimilikinya.
3. Desa juga berhak memperoleh akses informasi yang dapat dikelola bagi kepentingan stakeholders terkait. Hal itu mendukung terciptanya proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka good governance.
4. Administrasi yang disiplin dan tertib menjadi penting untuk dibangun bagi pemerintah desa, karena hal tersebut berkaitan dengan kejelasan hubungan kewenangan antara pemerintah Desa dengan BPD, Kecamatan, maupun dengan Pemda (Mulyono, 2014)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara atau ASN mempunyai Fungsi, Tugas, dan Peran sebagai berikut, yaitu pada Pasal 10 bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 12 bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.\

UU Aparatur Sipil Negara (ASN) lahir dari semangat bersama membangun kualitas pelayanan publik. Manajemen organisasi pemerintahan terletak pada kualitas aparatur sipil negara yang menjadi ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur yang baik dengan kompetensi dan pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas layanan yang baik. Pada pemerintahan desa juga perlu untuk mengikuti dan bersinergi dengan UU ASN untuk memaksimalkan potensi sumber daya aparatur desa yang sudah mulai melakukan berbagai inovasi pelayanan secara prima.

Perlu didorong untuk melahirkan aparatur sipil desa yang berkualitas dan pelayanan yang prima bagi masyarakat desa. Membangun aparatur sipil desa itu seperti menanam pohon dengan bibit yang unggul maka akan melahirkan buah yang berkualitas. Tentu dengan perawatan dan pengelolaan yang berkualitas pula. Potensi sumber daya aparatur desa sebenarnya sangat banyak sekali untuk diberikan akses pendidikan yang berkualitas, beasiswa maupun pengelolaan yang bersifat pendampingan bagi masyarakat desa yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Disamping itu, pengelolaan dalam pemerintah desa juga diimbangi dengan pola pendidikan dan pengorganisasian yang seimbang, setara dan maksimal. Pemberian pelatihan, worksop, pendidikan maupun bentuk lainnya kepada aparatur desa adalah dalam rangka untuk menjamin

kualitas layanan publik terhadap masyarakat desa. Manajemen yang baik adalah yang dapat menganatarakan organisasi pada tingkat yang diharapkan oleh stakeholder di dalamnya. Pemerintah desa mempunyai peluang yang cukup besar untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks agar melakukan tindakan-tindakan inovatif terhadap pengembangan sumber daya aparatur desa.

Sebagai sebuah contoh misalnya melakukan kompetisi antar desa dengan menfokuskan pada kualitas sumber daya aparatur desa dengan unsur kualitas pelayanan. Dengan demikian, maka pemerintah desa akan termotivasi untuk membangun sebuah sistem pembinaan yang baik dan menjamin sumber daya aparatur yang handal dan kompeten di dalamnya untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang prima. Bisa dilakukan setiap satu tahun sekali atau dua tahun sekali, tujuannya adalah mendorong pemerintah desa dan potensi aparatur sipil desa di dalamnya agar mengepakkan sayapnya membangun desa dengan penguatan kualitas sumber daya yang baik. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas secara otomatis akan berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Kualitas sumber daya aparatur desa dibangun berdasarkan kompetensi, keterampilan dan profesionalisme. Dibangun berdasarkan prinsip integritas, komitmen, kapabilitas, akuntabilitas, maupun kapasitas masing-masing sumber daya aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sebagai syarat dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengautan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pendidikan agar tercapai tujuan bersama yaitu menciptakan kesejahteraan, kemandirian, inovasi dan pembangunan secara nasional. Berlakunya UU Desa dan UU Aparatur Sipil Negara dapat memperkuat akses dan pengelolaan pemerintahan desa secara baik dan berkualitas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa agar tercipta tatanan pemerintahan yang baik (good governance) dan public servant yang prima. Masyarakat desa yang adil, makmur, sentosa, dan berdaya saing menjadi pilar pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Sumber daya manusia unggul, Indonesia maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiantoro, Setyo, 2015, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, disampaikan dalam Konferensi Prakarsa di Jakarta.
- Dakelan, dkk., 2016, *Mewujudkan Desa Inklusif (Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Enceng, BL, Liestyodono, MW, Purwaningdyah, 2008, *Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 2 No. 1, hal. 33-43.
- Hayat, 2014, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 8, No. 1, hal. 31-44.

- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah, 2016, *Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1, hal. 282-293.
- Mulyasa, E., 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi, 2014, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. Tahun 2014 Tentang Desa*, MMH, Jilid 43. No. 3, hal. 438-444.
- Sofo. Francesco, 1999, *Human Resource Development, Perspective, Roles and Practice Choice*. Business and Professional Publishing, Warriewood, NWS.
- Tumangkeng, Melisa Rosali, 2019, *Profesionalisme Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Wolang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*. <file:///E:/KONFERENSI/2019/PUSLITBANG%20PEMPROV%20JATIM/REFERENSI/1131-ID-profesionalisme-aparatur-des-dalam-pelaksanaan-pemerintahan-di-desa-wolaang-kec.pdf>.



**UPAYA MEMBANGUN KEMAMPUAN LITERASI BACA TULIS MASYARAKAT DESA
MELALUI KOMUNITAS BACA: STUDI ATAS TBM GELARAN BUKU JAMBU DAAR EL
FIKR, DESA JAMBU, KAYEN KIDUL, KEDIRI**

***EFFORTS IN IMPROVING THE LITERACY SKILLS OF READING AND WRITING OF
RURAL COMMUNITY THROUGH READING COMMUNITY: A STUDY ON THE
COMMUNITY LIBRARY (TBM) GELARAN BUKU JAMBU DAAR EL FIKR, JAMBU
VILLAGE, KAYEN KIDUL, KEDIRI***

Yulitin Sungkowati^{1*}

¹Balai Bahasa Jawa Timur, Jalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo 61252

*yulitins@yahoo.com

ABSTRAK

Sumber Daya Manusia generasi muda yang kompeten dan kompetitif perlu disiapkan secara serius agar dapat memperkuat daya saing bangsa pada era global. Dari sisi pendidikan, salah satu program prioritas nasional adalah literasi. Sejak tahun 2016 Kemdikbud telah menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai implementasi Permendikbud No. 23 tahun 2015. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* adalah sebuah komunitas baca yang sudah ada sebelum GLN secara resmi dicanangkan pada tahun 2017. TBM ini sudah berjuang membangun minat membaca dan menulis masyarakat desa yang masih rendah kala itu hingga meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan mengungkap dan memaparkan upaya yang dilakukan pengelola Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* untuk membangun kemampuan membaca dan menulis masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* membuat program kegiatan berbasis pada tradisi *tadarus* atau *ndarus* yang sudah mengakar di masyarakat dengan berbagai inovasi sehingga tidak monoton. Program kegiatan yang dikembangkan dari tradisi setempat itu terbukti efektif meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat terlihat dari meningkatnya kunjungan ke TBM dan hasil karya berupa buku. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan model komunitas baca dan pengembangannya di desa agar semakin banyak desa yang memiliki komunitas baca.

Kata kunci: literasi baca tulis, Gelaran Buku Jambu, komunitas baca

ABSTRACT

Competent and competitive young generation must be seriously prepared to improve Indonesia's competitiveness in the global era. In terms of education, literacy has been a national priority program. Since 2016, the Ministry of Education and Culture has promoted the National Literacy Movement (GLN) as an implementation of Regulation of the Minister of Education and Culture No. 23 of 2015. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) or 'community library' of Gelaran Buku Jambu Daar el Fikr is a reading community that has been existing even before the movement was officially announced in 2017. This community library has endeavored to significantly improve the rural community's interest in reading and writing that was low at the time. This research aims to expose and describe the effort performed by the management of TBM Gelaran Buku Jambu Daar el Fikr to improve the rural community's interest in reading and writing. This research uses the descriptive-qualitative method. The data were collected through interviews and documentation method. The result shows that the management of TBM Gelaran Buku Jambu Daar el Fikr has designed interesting program by innovatively using the tradition that has taken root in the community. The programs developed from the local tradition have been proven effective in improving the community's interest in reading and writing as shown by the increasing number of visit in this community library. This research hopefully can

present a model of reading community and its development in rural areas so that more villages will have community libraries.

Keywords: literacy skills of reading, Gelaran Buku Jambu, reading community

PENDAHULUAN

Tantangan terbesar bangsa Indonesia sampai saat ini, salah satunya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia generasi muda agar memiliki daya saing yang kuat di era global. Survei dari berbagai lembaga menempatkan Indonesia pada tingkat yang rendah minat baca masyarakatnya dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Misalnya, *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2015 menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 72 negara. Selama kurun 2012-2015, skor PISA untuk membaca hanya naik satu poin. Padahal, Forum Ekonomi Dunia 2015 menegaskan pentingnya penguasaan literasi dasar, kompetensi, dan karakter oleh semua bangsa supaya mampu bersaing pada abad 21 (Kemdikbud, 2017). Direktur Umum UNESCO menegaskan bahwa literasi adalah langkah pertama yang sangat berarti untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, UNESCO telah mencanangkan tahun 2003-2013 sebagai Dasawarsa Literasi PBB dan tahun 2005-2015 menjadi tahun Prakarsa Literasi bagi Pemberdayaan (Saryono, 2019). Literasi untuk semua telah dikampanyekan PBB ke seluruh pelosok dunia dan disambut oleh berbagai negara, misalnya Australia telah menjadikannya sebagai visi pendidikan dasar dan menengahnya (Saryono, 2019). Presiden Megawati mencanangkan Gerakan Membaca Nasional pada 12 November 2003 dan pada 2 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (BKLM, 2017). Akan tetapi, menurut Saryono (2019) keduanya belum secara formal menjadikan literasi sebagai visi pendidikan karena masih terbatas pada gerakan pemberantasan buta aksara dan gerakan gemar membaca.

Komitmen Indonesia terhadap agenda UNESCO *literacy for all* ‘literasi untuk semua’ diperkuat melalui Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang salah satu poin pentingnya adalah menggunakan waktu 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai untuk membaca buku selain buku mata pelajaran (Kemdikbud, 2015). Pada tahun yang sama diluncurkan program Gerakan Indonesia Membaca sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya baca di masyarakat dilanjutkan dengan program Kampung Literasi. Untuk menyinergikan gerakan literasi dicanangkanlah Gerakan Literasi Nasional sebagai wadah Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat di bawah koordinasi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Dengan demikian, gerakan literasi ini menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya sekolah atau pemerintah melainkan juga keluarga dan masyarakat.

Literasi perlu dipahami dalam konteks yang luas berkaitan dengan kemampuan memanfaatkan hasil bacaan untuk kecakapan hidup, bukan sekadar kemampuan membaca saja. Dalam buku *Panduan Gerakan Literasi Nasional*, Kemdikbud (2017) mengacu pada Forum Ekonomi Dunia mengemukakan enam literasi dasar yang harus dikuasai manusia di era modern, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya. Dari keenam literasi dasar tersebut dapat dikatakan bahwa literasi baca tulis merupakan “nenek moyang” dari semua jenis literasi karena dasar penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas yang bermutu dan produktif adalah membaca dan menulis. Intelektualitas dapat berkembang berkat kemampuan berpikir kritis-kreatif yang disangga oleh kemampuan membaca dan menulis (Saryono, 2019). Kemdikbud (2017) mendefinisikan literasi baca tulis sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan

memahami informs untuk menanggapi, menganalisis, dan menggunakan teks tertulis guna mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.

Sebelum gerakan literasi menggema seperti sekarang ini, TBM Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* sudah menetapkan program menulis sebagai prioritas utama. TBM Gelaran Buku Jambu tidak sekadar menyediakan buku-buku bacaan yang terjangkau untuk masyarakat, tetapi juga menjadi tempat bagi para remaja untuk belajar dan berlatih menulis. Tidak banyak komunitas baca dengan kegiatan seperti itu, setidaknya terlihat dari penelitian beberapa orang, antara lain oleh Yanto et al (2018), Sani dan Suwanto (2018), Khotimah (2018), Musyarafah (2018), Rahayu dan Novi Widiastuti (2018), Setyowidodo et al (2018), dan Susilo (2018). Lima penelitian membahas komunitas baca di berbagai daerah dan hanya melihat persoalan pengelolaan serta aktivitas membaca dalam kerangka pembinaan minat baca, tanpa ada informasi kegiatan menulis di dalamnya. Artikel Setyowidodo et al membahas TBM Gelaran Buku Jambu, tetapi terfokus pada masalah upaya mengembangkan taman bacaan itu dari sisi pengelolaan dan sarananya. Hanya artikel penelitian Susilo atas TBM Gelaran Buku Jambu yang telah menyebutkan program penulisan di dalam taman bacaan yang dikelolanya. Bahkan penelitian Haklev (2008) menunjukkan bahwa 100% TBM yang dibentuk oleh pemerintah tidak memiliki kegiatan lain selain sebagai tempat peminjaman buku. Artinya, TBM yang dibentuk pemerintah tidak berhasil karena menurut Haklev, TBM akan berhasil jika menjadi pusat kegiatan menyeluruh. TBM Gelaran Buku Jambu yang diprakarsai oleh anggota masyarakat, bukan pemerintah, dan berbasis pada komunitas dapat dikatakan sebagai TBM yang berhasil.

Penelitian ini masih perlu dilakukan untuk menjawab masalah bagaimanakah upaya membangun kemampuan literasi baca tulis oleh komunitas baca Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* agar dapat mengatasi kerumpangan penelitian yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif model komunitas baca yang dapat dikembangkan di desa-desa yang belum memiliki komunitas baca agar komunitas baca tidak sekadar menjadi tempat membaca, tetapi juga sebagai tempat belajar menulis dan berkegiatan kreatif lainnya. Apalagi, penelitian Ikhyia Ulumudin (2017) dari Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud menunjukkan bahwa Gerakan Literasi Sekolah belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran komunitas baca atas prakarsa masyarakat sendiri menjadi penting dalam rangka percepatan pengembangan desa mandiri.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian “Upaya Membangun Kemampuan Literasi Baca Tulis Masyarakat Desa Melalui Komunitas Baca: Studi atas TBM Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr*” ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data utamanya data tulis dan lisan berupa paparan kebahasaan, bukan angka-angka atau statistik. Penelitian difokuskan pada satu komunitas baca, yaitu TBM Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* di Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Bahan penelitian berupa laporan pengelola TBM berjudul “Ndarus: Ikhtiar Buku Remaja Jambu Laku Literasi Gelaran Jambu Kediri”, Akta Pendirian TBM, buku-buku hasil karya remaja Jambu, berita atau liputan kegiatan TBM di media massa, dan informasi lisan dari ketua TBM, relawan, masyarakat, dan kepala desa di Desa Jambu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara untuk mendapat informasi langsung dan memastikan fakta dari informan atau narasumber dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap (Nazir, 2014). Metode dokumentasi mencari data mengenai hal-hal terkait dari sumber yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan dokumen tulis lainnya (Arikunto, 2006). TBM Gelaran Buku Jambu awalnya akan menjadi bagian dari penelitian komunitas sastra di Jawa Timur yang sedang penulis lakukan tahun

ini sebagai pengembangan dari penelitian yang sama tahun 2008 dan 2010. Bahan-bahan untuk penelitian ini sebagian sudah penulis peroleh tahun 2016 dari ketua TBM, Ahmad Ikhwan Susilo, sedangkan informasi lisan diperoleh lewat wawancara bulan Juli 2019 di Desa Jambu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TBM Gelaran Buku Jambu Daar el Fikr

Taman Bacaan Masyarakat Gelaran Buku Jambu Daar el Fikr berada di Jalan Masjid No. 429, RT 01 RW 06, Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Komunitas baca ini terdaftar di notaris Soewito Widakdo Jalan Ahmad Yani No. 22, Pare, Kediri 64211 pada tanggal 24 April 2010 nomor akta 149. Dari dokumen Akta Pendirian Perkumpulan Gelaran Buku Jambu Daar el Fikr terungkap bahwa komunitas ini didirikan tahun 2008 dan dilatarbelakangi keprihatinan atas kondisi masyarakat desa yang rendah minat bacanya dan tidak memiliki akses terhadap sumber bacaan yang murah dan mudah dijangkau. Desa Jambu dengan luas 3.870.000 m² terdiri atas enam dusun dengan profesi mayoritas warganya adalah petani dan pedagang kecil. Keadaan ekonomi yang sulit membuat masyarakat tidak mementingkan pendidikan. Banyak anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah tingkat menengah pertama atau atas dan memilih menjadi petani, pedagang, merantau ke kota, atau menjadi TKI ke luar negeri. Potensi masyarakat kurang tergali karena banyak anak mudanya memilih pergi mencari pekerjaan di luar desa. Mereka yang tinggal di desa kurang pengetahuannya karena kurang membaca sehingga dalam rembug desa tidak muncul gagasan-gagasan bagaimana menggali potensi warga untuk membangun desa. Lembaga pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik dengan mengabaikan pembangunan sumber daya manusianya.

Dari dokumen akta terungkap tujuan komunitas Gelaran Buku Jambu, yaitu mendirikan pendidikan nonformal, meningkatkan tradisi membaca di kalangan masyarakat di sekitar TBM, membangun dan menciptakan generasi muda yang sadar dan cinta buku, menyediakan akses bacaan yang murah dan mudah bagi masyarakat, membangun tradisi dokumentasi yang kuat, dan sebagai media belajar, beraktivitas, dan berkarya. Cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain dengan pelatihan menulis, penerbitan buku hasil pelatihan, malam budaya, dan apresiasi sastra.

Laporan berjudul “Ndarus: Ikhtiar Buku Remaja Jambu Laku Literasi Gelaran Jambu Kediri” (2006) yang ditulis oleh Ahmad Ikhwan Susilo selaku ketua TBM menjelaskan latar belakang pendirian TBM dan perkembangannya hingga tahun 2016. Dengan bantuan banyak orang yang peduli, Ahmad Ikhwan Susilo membutuhkan waktu lebih kurang satu tahun untuk menyiapkan TBM hingga siap beroperasi. Prioritas kegiatan adalah membaca dan menulis buku. Untuk membangun kemampuan literasi baca tulis, Ahmad Ikhwan Susilo selaku ketua komunitas membuat program terpadu yang diadopsi dari kebiasaan sehari-hari membaca Alquran atau tadarus/ndarus. Nama Ndarus diambil sebagai nama program, tetapi yang dibaca buku karya sastra, bukan Alquran. Program Ndarus dimulai tahun 2011 dengan tujuh kegiatan, yaitu Tadarus Sastra, Ulas Baca, Lesehan Pustaka, Nonton Serempak, Gerobak Baca, Terbit Karya, dan Festival Literasi. Pengelola membuat skema kerangka kerja yang dijabarkan dalam bagan secara jelas sebagai panduan dalam mengelola komunitas baca.

Sebelum ada program Ndarus jumlah pengunjung TBM rata-rata per tahun 91 orang, mulai tahun 2011 pengunjung rata-rata per tahun 486,5. Kenaikan paling signifikan terjadi tahun 2016 jumlah pengunjung 1623 dibandingkan sebelumnya tahun 2015 sebanyak 180. Kenaikan yang tajam itu juga dikarenakan TBM telah memiliki gedung sendiri dengan ukuran 10 x 7 m² yang

berdiri di atas tanah keluarga Ahmad Ikhwan Susilo dengan dana pembangunan gedungnya dari bantuan hibah pembangunan gedung Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015.

Membaca dan Menulis sebagai Program Prioritas

Membiasakan masyarakat yang kemampuan baca bukunya masih rendah menjadi masyarakat yang bisa membaca buku, bahkan menulis buku bukanlah pekerjaan yang mudah, terlebih bagi sebuah komunitas yang tidak memiliki sumber dana tetap. Dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras-cerdas-ikhlas, dan pantang menyerah untuk mewujudkannya. Setelah melewati masa trial dan error, pada tahun ketiga berdirinya komunitas Gelaran Buku Jambu, dengan belajar dari tradisi *tadarus* atau *ndarus* Alquran dan kitab-kitab lainnya yang sudah mengakar di masyarakat, pengelola berikhtiar membuat program *Ndarus*. Ahmad Ikhwan Susilo (2016) mengatakan:

Bila selama ini *ndarus* hanya sebatas membaca kitab sebagai aktivitas ibadah, maka materi *ndarus* di Gelaran Jambu diganti dengan buku sastra. Pemilihan buku sastra berupa novel, cerpen, ataupun roman lebih mudah dalam mengantar mereka membaca.

Program *Ndarus* yang mencakupi tujuh bentuk kegiatan disusun dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti rentang waktu pelaksanaan, kondisi awal anggota atau pengunjung yang kemampuan membacanya tidak sama, dan kondisi kejiwaan para remaja yang mudah bosan. Kegiatan Ulas Baca misalnya, dibuat dengan mempertimbangkan anggota baru yang belum memiliki pemahaman tentang jenis-jenis bacaan. Agar mereka tidak salah memilih bahan bacaan dan kehilangan minat untuk membaca lagi, pengelola memilihkan bahan-bahan bacaan sastra yang sesuai, baik dari segi bahasa maupun isinya. Menurut Susilo (2016) untuk anggota pemula buku-buku yang dipilihkan kebanyakan buku-buku sastra anak yang sarat akan nilai-nilai moral, persahabatan, petualangan, dan sebagainya. Dalam kegiatan ini, upaya membuat remaja belajar menulis dilakukan dengan cara meminta mereka untuk menuliskan tanggapan berupa resensi atas buku yang dibacanya kemudian mendiskusikan dan mendokumentasikan hasilnya.

Kegiatan *Tadarus Sastra* yang dilakukan dua minggu sekali pada hari Sabtu sore atau Minggu pagi dibuat untuk membiasakan membaca sambil mengkaji isinya dan memahami maknanya. Cara yang dilakukan adalah membaca karya sastra secara bergantian per halaman dan berhenti pada tiap paragraf untuk bersama-sama mengkaji dan memahami isinya (Susilo, 2010, 2016). Para remaja diajari bagaimana menggunakan teks-teks lain atau referensi untuk menganalisis dan memahami isi suatu bacaan, misalnya dengan bantuan ensiklopedi, bahkan film dokumenter. Buku yang pernah *ditadarus* bukan buku bacaan ringan, tetapi novel sejarah berjudul *Jalan Raya Pos*, *Jalan Daendels* karya sastrawan terkemuka Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. Novel yang mengisahkan pembuatan jalan raya Anyer-Panarukan pada masa kolonial ini *ditadarus* dalam waktu satu tahun. Tempat untuk membacanya berpindah-pindah, misalnya di tepi sungai atau di kebun agar para remaja tidak bosan dan dapat lebih mengenal desanya. Kegiatan ini sering memanfaatkan tokoh-tokoh yang datang ke TBM untuk memberikan perspektif yang lain dan melatih anggota TBM berinteraksi dengan orang dari luar desanya.

Kegiatan *Lesehan Pustaka* dilakukan saat libur sekolah, diisi dengan bedah buku karya sastra atau diskusi dengan tema-tema sosial, budaya, dan pendidikan. Buku-buku yang dibicarakan tidak hanya karya sastrawan terkenal, tetapi juga buku-buku karya anggota komunitas. Pengelola TBM berupaya membuka wawasan pengetahuan para remaja seluas-luasnya dan memberi ruang untuk belajar proses kreatif secara langsung kepada pelaku seni dengan cara mengundang sastrawan, seniman, budayawan, atau praktisi pendidikan sebagai narasumber (Susilo, 2016).

Di samping kegiatan yang bersentuhan dengan daya intelektual, dalam *Ndarus* juga ada kegiatan yang bertujuan mendekatkan hubungan emosional antara anggota dan pengelola, yaitu Nonton Serempak. Para remaja tidak hanya diajak menonton film-film yang diangkat dari buku sastra dan nonsastra sebulan sekali, tetapi juga melihat pertunjukan sastra dan seni lainnya. Kegiatan Gerobak Baca dan Festival Literasi membidik sasaran masyarakat desa dari berbagai lapisan usia dan sosial dengan tujuan agar masyarakat luas juga memahami pentingnya membaca dan menulis. Gerobak Baca merupakan kegiatan yang bentuknya membawa gerobak kecil berisi buku-buku keliling desa, ke taman kota, dan membuka lapak baca di tempat-tempat banyak orang berkumpul. Festival Literasi adalah kegiatan dua tahunan yang diisi dengan peluncuran dan bedah buku, lomba memasak dengan bahan makanan tertentu sebagai kampanye pengolahan hasil pangan, pemberian penghargaan bagi ibu-ibu yang berjasa menggerakkan literasi di keluarganya, dan pentas seni. Festival Literasi yang melibatkan masyarakat seluruh desa juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM Desa Jambu untuk memamerkan dan menjual produk-produknya.

Dari semua kegiatan yang ada dalam program *Ndarus*, Terbit Karya merupakan kegiatan yang pertama digagas dan inti dari literasi baca tulis. Menurut Ahmad Ikhwan Susilo (2016), pada awalnya ia tidak yakin program menulis bagi remaja Jambu akan berhasil. Berikut penuturannya.

“Bagaimana mungkin anak Jambu yang jarang *mendaras* buku itu disuruh menulis buku? Lantas buku seperti apa yang akan mereka tulis? *Lha wong* saya sendiri saja belum bisa menerbitkan buku. Bagaimana bisa saya mengajarkannya?”

Sebagai permulaan, tugas yang diberikan cukup mudah, yaitu mengamati aktivitas ibu sejak bangun hingga istirahat di waktu malam selama satu minggu dan menuliskannya dalam bentuk catatan harian. Ahmad Ikhwan Susilo selalu siap memberikan bimbingan jika ada yang mengalami kesulitan. Hambatan terbesar mereka adalah rasa tidak percaya diri.

“...kurang lebih dua bulan saya mendampingi mereka menulis. Kadang ada kalanya memberi sedikit intimidasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Karena inilah yang menjadi masalah utama bagi mereka.Saya harus terus menerus mendampingi mereka. Artinya setiap saat mereka mengalami kesulitan dan ingin *sharing* saya harus ada. Jangan sampai mereka *mutung*.”

Dari 50 anak yang dilibatkan, hanya 28 anak yang berhasil menyelesaikan tulisannya. Buku *Aku dan Ibuku: Catatan Bakti Sepekan Anak-Anak Jambu Kediri* yang penerbitannya dibantu oleh tim Indonesia Buku Jogjakarta menjadi tonggak sejarah generasi muda Jambu yang awalnya tidak suka membaca dan tidak bisa menulis akhirnya menghasilkan karya kreatif berupa buku. TBM Gelaran Buku Jambu kemudian diberi nama *Daar el Fikr* yang artinya ‘rumah berpikir’ karena di komunitas baca itu mereka tidak hanya dibiasakan untuk membaca, menulis, dan berkegiatan lainnya, tetapi juga dibiasakan untuk berpikir.

Terbit Karya sesungguhnya merupakan kegiatan konkret literasi baca tulis karena untuk bisa menulis seseorang harus terlebih dulu bisa dan banyak membaca. Misalnya dalam proses menulis buku kumpulan cerpen *Bunga Jambu* (2012), setiap anak terlebih dahulu diberi tugas untuk membaca cerita pendek atau cerpen dan mengulasnya: 1 minggu 1 cerpen selama 6 bulan. Setelah memiliki pemahaman tentang cerpen, mereka kemudian diberi latihan dasar-dasar menulis dilanjutkan dengan praktik menulis cerpen. Ikhwan Susilo (2016) membutuhkan waktu sembilan

bulan untuk mendampingi dan terus memotivasi mereka menulis cerpen hingga terbit menjadi sebuah buku.

Proses penulisan buku-buku yang lain pun hampir sama, yaitu diawali dengan banyak membaca, diberi pelatihan menulis, selanjutnya praktik menulis dengan bimbingan dan pendampingan dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Mereka dilatih dan dibiasakan menulis dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan mereka dan dari pengalaman keseharian. Melalui kegiatan penulisan buku *Kampungku Puisiku* (2011), para remaja diajak untuk menulis keseharian mereka sebagai anak desa dan bagaimana mereka memandang desanya sehingga mereka tidak akan menjadi generasi yang asing terhadap desanya sendiri. Buku *Kampungku Puisiku*, para remaja menggambarkan desanya sebagai tempat yang hijau, sejuk, aman, dan tenteram. Ada pula yang menceritakan betapa berartinya sawah bagi mereka dan menceritakan kebiasaan mereka sebagai anak petani atau peternak yang harus membantu orang tua di sawah atau menyabit rumput untuk makanan ternak. Salah satu puisi berjudul “Sawah” ditulis oleh Agus Abidin sebagai berikut.

Sawah adalah cahaya hidup kami
jantung kehidupan
keluarga kami

Karna engkau pemberi segala
Hingga kami bisa hidup
Oh, sawah
kaulah jiwa yang bisa memberi pengharapan

kepadamu kami menyandar
semua mimpi-mimpi kami

Buku Catatan Odong-Odong (2014) berisi catatan perjalanan para remaja saat terlibat dalam kegiatan Reading Group Indonesia yang singgah di Kediri, *Madrasahku Kenanganku* (2015) merupakan kumpulan catatan pengalaman selama menimba ilmu di madrasah, dan buku *Terima Kasihku* (2016) mewujudkan upaya pendidikan karakter dengan menuliskan cerita tentang orang-orang yang berjasa dalam hidup mereka. Meskipun awalnya kesulitan untuk mulai menulis, setelah berhasil justru ingin menulis lagi seperti pengakuan Dennis, salah satu penulis yang ceritanya diterbitkan dalam buku *Terima Kasihku* (2016).

...Kalau nulis atau mengarang cerita itu susah-susah gampang. Namun saat diberi tugas suruh nulis cerita ini malah bingung dengan apa yang mau diceritakan. Cerita ini adalah ceritaku yang pertama kali dibukukan. Terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah bekerja keras menerbitkan cerita ini dan cerita teman-temanku. Selamat buat Pak Iwan yang sudah berhasil membuat kepalaku pusing. Meskipun begitu tetap bangganya 1000x. Malah ketagihan pingin buat cerita-cerita yang lain lagi...

Dari informasi pengelola, relawan, dan anggota serta hasil karya berupa buku-buku dapat dilihat bahwa kegiatan Terbit Karya secara khusus, dan program *Ndarus* secara umum dibuat dengan konsep yang matang berlandaskan tujuan pendidikan dan arah yang jelas, yaitu memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pendidikan nonformal. Program menulis ini diarahkan untuk para remaja lebih memahami dan peduli pada lingkungan sekitarnya dimulai dari

mengenai ibunya kemudian mengenali kearifan lokal desanya dan kebiasaan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan serta berterima kasih kepada yang telah berjasa pada hidupnya. Kesemua itu merupakan perwujudan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti sebagaimana amanat Permendikbud 23/2015. Dengan demikian, para remaja akan tumbuh menjadi manusia dengan karakter yang baik, kokoh berpijak pada akar budaya sendiri, berkeinginan untuk membangun desanya, bahkan diharapkan mampu mengenalkan desanya kepada masyarakat luar melalui karya nyata. Dengan sikap dan suara yang penuh percaya diri, Iza (salah seorang anggota komunitas dan sekaligus relawan), menuturkan perubahan dirinya.

oh...ternyata semua orang boleh membaca dan menulis to...dan perubahan yang paling besar adalah rasa tanggung jawab sebenarnya yang kemudian berdampak pada kecakapan hidup yang sekarang pada dunia kerja. Saya kan mengajar di Pare juga to... ketemu beberapa orang dan beberapa tim, tau apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi lebih dewasa dibanding teman-teman yang lain. Bagaimana caranya bersikap memang harus dipelajari...Kamu ada kegiatan seperti ini tanggung jawabnya bagaimana....Memang kita di sini diajak berpikir dan itu dampaknya luar biasa.....Dan pada akhirnya hasil kerjanya itu bisa dinikmati oleh kita dan direktur karena saya di Kampung Inggris. Direktur melihat oh anak ini siap jadi tutor.... Karena saya belum kuliah menjadi tutor dan ketemu dengan orang-orang yang sudah kuliah pasti kan akan minder, jadi harus tau bagaimana caranya saya bisa walaupun belum kuliah, setidaknya bisa sama dengan orang-orang yang sudah kuliah (wawancara 2019)

Komunikasi dan kerja sama dengan membangun jaringan merupakan sebuah keniscayaan agar TBM tidak sekadar menjadi ruang baca, demikian juga hal itu merupakan sebuah pembelajaran bagi para anggota tentang pentingnya kolaborasi. Komunitas Gelaran Buku Jambu telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan lintas daerah dan nasional yang memberikan pengalaman berharga bagi remaja Jambu karena bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kota. Kerja sama dengan pemerintah desa tentu menjadi yang utama mengingat keberadaan TBM di desa dan masyarakat desalah yang diharapkan paling merasakan manfaatnya. Bentuk kerja sama itu, antara lain menjadikan program literasi sebagai solusi untuk pendidikan nonformal yang belum mampu diselenggarakan oleh pemerintah desa. Akan tetapi, dinamika yang terjadi di pemerintah desa membuat kerja sama tidak berjalan seperti yang direncanakan. Meskipun demikian, kontribusi komunitas ini di bidang literasi yang berpotensi secara ekonomi diakui oleh pemerintah desa terlihat dalam program Jambu sebagai desa wisata (digagas mulai 2015) TBM Gelaran Buku Jambu dimasukkan sebagai salah satu destinasi wisata literasi dan kegiatan Gerobak Baca diadopsi dengan meletakkan gerobak berisi buku-buku bacaan berlabel Perpustakaan PKK Desa di titik-titik tujuan wisata desa, seperti di Wisata Desa Jambu dan Sungai Sejuta Ikan. Kepala Desa Jambu mengatakan sebagai berikut.

....kalau kita sebenarnya sudah ada *planning* untuk penganggaran untuk taman baca masyarakat, namun karena kebutuhan desa tidak serta bisa dialokasikan untuk taman baca karena kebutuhan saat ini juga banyak...taman baca masyarakat itu jadi bagian dari wisata desa Jambu....dari desa sering melibatkan ibu-ibu PKK di taman baca... TBM banyak kegiatan yang itu juga memberikan wawasan kepada masyarakat, kontribusinya bagi desa, jadi masyarakat kami dari hasil-hasil kegiatan di taman baca menjadi lebih terbuka wawasannya dan itu diimplementasikan di desa wisata, salah satunya adalah ibu-ibu yang mengikuti lomba memasak dan lain sebagainya, membuat olahan bahan pangan lalu dijual

di pasar papringan desa wisata....secara dukungan penuh, kami mendukung dan itu merupakan salah satu kebanggaan Desa Jambu.....

...anak-anak yang dulu tidak suka membaca sekarang sudah gemar membaca, setidaknya tau kebutuhan membaca itu untuk apa karena ramainya *gadget* itu juga berpengaruh pada anak, taman baca setidaknya dapat membatasi anak-anak dari pengaruh *gadget*....

Komunitas Gelaran Buku Jambu dengan visinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, khususnya generasi muda, melalui pendidikan nonformal tetap berkegiatan berkat militansi pengelola dan para relawan. Kegiatan-kegiatan terus dievaluasi mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik di tingkat desa, daerah maupun nasional. Di samping untuk menarik anggota dan pengunjung yang terlibat dalam kegiatan semakin banyak, juga untuk menjaga harmoni yang baik dengan masyarakat desa. Nama Tadarus Sastra diubah menjadi Reading Group untuk mengakomodasi pandangan sebagian masyarakat desa yang menganggap *tadarus* hanya untuk membaca Alquran dan kitab-kitab keagamaan lainnya bukan buku sastra, apalagi dari sastrawan yang tergolong “kiri”. Seiring dengan gencarnya pemerintah menggelorakan GLN dengan enam literasi dasar, komunitas ini juga meluaskan laku literasinya dengan menggandeng Bank Indonesia untuk mengadakan kegiatan literasi finansial agar masyarakat desa memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dengan baik. Kegiatan lainnya yang sedang dipersiapkan adalah literasi budaya dan kewargaan.

Penghargaan telah diterima dari berbagai lembaga, antara lain penghargaan sebagai guru berdedikasi dari Balai Bahasa Jawa Timur tahun 2016 untuk Ahmad Ikhwani Susilo selaku pengelola TBM Gelaran Buku Jambu dan apresiasi dari Gramedia Reading Community Competition tahun 2018 untuk 10 tahun TBM Gelaran Buku Jambu menggerakkan literasi bagi generasi muda desa (2018).

KESIMPULAN

Komunitas TBM Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* dengan program *Ndarus* yang diimplementasikan dalam enam bentuk kegiatan sebagai upaya membangun kemampuan literasi baca tulis telah berkontribusi nyata dalam Gerakan Literasi Nasional yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komunitas ini tidak hanya telah menyadarkan masyarakat, khususnya generasi muda akan pentingnya membaca dan menulis supaya dapat menguasai pengetahuan, tetapi juga melatih kepekaan rasa dan kemampuan mengembangkan daya imajinasi melalui pilihan membaca dan menulis karya sastra. Melalui tujuh kegiatan yang dikembangkan dalam program *Ndarus*, generasi muda Desa Jambu sesungguhnya telah diberi pengetahuan dan dilatih untuk memiliki keterampilan abad 21 yang menurut Forum Ekonomi Dunia 2015 sebaiknya dimiliki oleh seluruh bangsa, yaitu literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Kompetensi dasar yang mencakupi kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sudah tertanam dalam tiap bentuk kegiatan yang dikembangkan di Gelaran Buku Jambu. Dengan demikian, komunitas baca ini layak dijadikan sebagai salah satu model komunitas baca di desa untuk menggerakkan literasi baca tulis dan berkontribusi menyiapkan SDM untuk menuju desa mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Ahmad Ikhwan Susilo selaku ketua TBM Gelaran Buku Jambu *Daar el Fikr* dan para relawan yang membantu mengelola TBM, serta kepada Kepala Desa Jambu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S2006, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, PT Rhineka, Jakarta.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), 2017, *Media komunikasi dan inspirasi JENDELA pendidikan dan kebudayaan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, Peraturan Menteri Pendidikan No. 23 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Panduan gerakan literasi nasional*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Khotimah, S 2018, Sikap masyarakat terhadap program kegiatan komunitas blues (belajar luar sekolah) sebagai wadah pemberdayaan kemampuan literasi anak di desa taman endah, kecamatan purbolingo, kabupaten lampung timur, Skripsi S1, Universitas Lampung.
- Musyarafah, US 2018, Peran komunitas literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat: studi kasus di taman bacaan masyarakat lumbung ilmu komunitas literasi di jalan cibeureum goalpara kampung babakan peuntas desa sukaraja, kabupaten sukabumi, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati.
- Nazir, M 2014, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soewito Widakdo, 2010, Akta Pendirian perkumpulan gelaran buku jambu daar el fikr, No. 149, 21 April 2010, Pare, Kediri.
- Rahayu, R dan Widiastuti, N 2018, Upaya pengelola taman bacaan masyarakat dalam memperkuat minat membaca (studi kasus TBM dusun silayung, desa cibereuy, kecamatan padalarang, *JurnalCom-Edu*, 1 (2), 57-65.
- Sani, MAA, Suwanto, S A 2018, Pembinaan minat baca masyarakat melalui pembangunan taman bacaan masyarakat desa kemas klepu, semarang, jawa tengah, *ANUVA*, 2 (2), 165-176.
- Saryono, D 2018, *Literasi episentrum kemajuan kebudayaan dan peradaban*, Pelangi Sastra, Malang.
- Setyowidodo I, Yulianto D, Handayani DH 2018, Rumah pintar dalam taman belajar masyarakat, *Jurnal Terapan Abdimas*, 3 (2), 110-115.
- Susilo, AI (ed.) 2011, *Kampungku puisiku himpunan puisi dari remaja jambu Kediri*, Gelaran Jambu, Kediri, hlm. 17.
- Susilo, AI (ed.) 2016, *Terima kasihku sehimpun ungkapan syukur remaja jambu*, Gelaran Buku Jambu Kediri bekerja sama dengan Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri, hlm. 198.
- Susilo, AI 2016, *Ndarus: Ikhtiar Buku Remaja Jambu Laku Literasi Gelaran Jambu Kediri*, laporan kegiatan TBM gelaran jambu, Kediri.

- Susilo, AI 2018, Upaya membangun minat membaca melalui program ndarus di taman bacaan masyarakat gelaran buku jambu *daar el fkr*, Artikel Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, hlm. 1-9.
- Ulumudin, I 2017, Penguatan gerakan literasi sekolah, *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 10 (3), 141-155
- Yanto, A., Rodiah S., Lusiana, E 2016, Model aktivitas gerakan literasi berbasis bomunitas di sudut baca soreang. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 2 (1), 107-118.

Sumber Laman

- Håklev, S. 2008, Mencerdaskan bangsa suatu pertanyaan fenomena taman bacaan di Indonesia, diakses 20 Mei 2019, <https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/16623/1/Mencerdaskan%20Bangsa%20-%20bahasa%20indonesia2%285%29.pdf>
- Susilo, A.I. 2010. *Gelaran jambu: tadarus sastra di kampung*, 23 September, diakses pada 20 Mei 2019, (<http://www.radiobuku.com>)
- 10 tahun berjuang tumbuhkan literasi di kalangan anak muda, 28 September 2018, diakses 20 Mei 2019, <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/28/09/2018/10-tahun-berjuang-tumbuhkan-literasi-di-kalangan-anak-muda/>



PENGUATAN TATA KELOLA DEMOKRATIK UNTUK KEMANDIRIAN DESA: PENGALAMAN KEPALA DESA SEKAPUK

Noor Rohman

Pusat Kajian Perdesaan dan Politik Lokal (PUKAPPOL)
FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117 60237
E-mail: noor.rohman@uinsby.ac.id

Aniek Nurhayati

Pusat Kajian Perdesaan dan Politik Lokal (PUKAPPOL)
FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117 60237

ABSTRAK

“Kajian tentang desentralisasi dan demokratisasi desa mulai bermunculan paska pemberlakuan UU Desa (2014). Namun demikian, literatur yang mengkaji tentang demokratisasi dan kemandirian desa relatif masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini mendiskusikan bagaimana upaya kepala desa dalam mewujudkan kemandirian desa dan tata kelola yang demokratik paska UU Desa. Penulis berargumen bahwa tata kelola demokratik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan desa yang mandiri. Untuk menguatkan argumen tersebut, penulis mengelaborasi pengalaman kepala desa Sekapuk (Ujung Pangkah, Gresik) untuk mewujudkan tata kelola yang mandiri dan demokratik. Artikel ini berbasis penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dalam bentuk wawancara dan observasi, sekaligus juga menggunakan data sekunder berupa kajian dokumen dan informasi berbasis online. Ada tiga temuan utama dalam penelitian ini. *Pertama*, kepala desa berupaya untuk melakukan reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis dan inovatif. *Kedua*, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berlangsung partisipatoris, yang mana semua warga memiliki kesempatan serta akses yang setara. *Ketiga*, aparatur desa memiliki komitmen untuk peningkatan kapasitas dalam perbaikan manajemen pelayanan desa yang lebih akuntabel dan profesional.”

Kata kunci: *kepala desa, tata kelola demokratik, partisipasi warga, desa mandiri*

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya UU Desa) menjadikan Desa sebagai subjek penting dalam pembangunan. Dengan asas subsidiaritas¹, kemandirian dan kesejahteraan menjadi topik sentral yang diamanatkan UU Desa. Amanat tersebut ditegaskan dalam pasal 67 ayat 2 bahwa Desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, yang mana pemberdayaan ini merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Desa juga berkewajiban mengembangkan demokrasi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Menurut Sutoro Eko *et al.* (2014), subsidiaritas memiliki tiga makna. *Pertama*, “lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa”. *Kedua*, “negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang.” Penetapan tersebut berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang ada dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. *Ketiga*, “pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa.”

Konsep tentang kemandirian desa memang ditegaskan dalam UU Desa. Kemandirian dimaknai sebagai ‘*suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri*’ (UU Desa, 2014). Untuk menopang percepatan kemandirian, pemerintah memiliki komitmen yang jelas melalui kebijakan Dana Desa (selanjutnya DD)². Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa DD merupakan ihtiar untuk mewujudkan desa mandiri dengan prinsip redistribusi kesejahteraan.

Banyak akademisi yang telah mencurahkan kajian tentang desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia (Aspinall & Fealy 2003; Hill 2014; Nordholt & Klinken 2007). Namun demikian, sebagian besar lebih fokus memperhatikan level nasional, provinsi, dan kabupaten. Kajian pada level desa relatif belum banyak mendapatkan perhatian. Beberapa kajian misalnya seperti dilakukan oleh Lewis (2015), berusaha mengkritisi metode distribusi dana desa. Ia menilai metode yang digunakan untuk mengalokasikan dana desa masih bermasalah dan mengabaikan sumber pendapatan lain yang dimiliki oleh desa³.

Selain itu, ada juga Antlöv, Wetterberg, dan Dharmawan (2016) yang mengidentifikasi implikasi UU Desa pada tata kelola Desa. Kajian mereka fokus pada perubahan kapasitas dan peluang pemerintah desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Menurut mereka, UU Desa mempunyai potensi untuk meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah desa. Untuk mendorong akuntabilitas tersebut diperlukan intervensi dan reformasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Lembaga desa yang kuat dan demokratis juga dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan partisipatif dan proyek pembangunan yang lebih memprioritaskan kepentingan warga.

Literatur tentang demokratisasi dan kemandirian desa relatif masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini mendiskusikan bagaimana mewujudkan kemandirian desa dan menguatkan tata kelola demokratik paska UU Desa. Penulis berargumen bahwa tata kelola demokratik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan desa yang mandiri. Untuk menguatkan argumen tersebut, penulis mengelaborasi bagaimana pengalaman Kepala Desa Sekapuk, kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sistematika pembahasan dalam artikel ini diorganisir sebagai berikut. *Pertama*, bagian ini merupakan refleksi konseptual yang mendiskusikan relevansi kemandirian desa dan tata kelola demokratik. *Kedua*, bagian ini berisi deskripsi tentang metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. *Ketiga*, bagian ini menjelaskan sekilas tentang profil kepala desa dan desa Sekapuk. *Keempat*, bagian ini membahas temuan data penelitian, sekaligus juga analisis kritis dalam perspektif tata kelola demokratik.

Tata Kelola Demokratik untuk Kemandirian Desa

UU Desa tidak memberikan penjelasan yang baku dan komprehensif tentang konsep kemandirian desa, sehingga setiap individu atau institusi memiliki kebebasan untuk menafsirkannya. Meskipun ada kebebasan untuk melakukan tafsir, konsep kemandirian tidak sama

² Berdasarkan regulasi yang ada, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP 14/2014). Tahun ini (2019) prioritas penggunaannya dimanfaatkan untuk memfasilitasi program pelayanan sosial dasar, menyediakan lapangan kerja (program padat karya), meningkatkan pendapatan ekonomi warga miskin, serta perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya peningkatan gizi masyarakat (Permendes 16/2018).

³ Menurut Lewis (2015), desa-desa yang memiliki akses relatif lebih besar ke sumber pendanaan lain (terutama penghasil minyak dan gas) akan mendapatkan lebih dari yang dibutuhkan. Sebagaimana disadari oleh Lewis sendiri bahwa “desentralisasi desa” baru saja dimulai, jelas prematur untuk menilai hasil implementasi program (di tahun 2015). Apa yang dikritik oleh Lewis pun pada akhirnya mengalami perbaikan dan penyesuaian dari waktu ke waktu.

dengan *kesendirian* dan *kedirian*. Sebagaimana ditegaskan oleh Eko *et al.* (2014), kemandirian desa harus dibedakan dengan dengan kesendirian dan kedirian (ego yang kuat). Kemandirian bukan *kedirian* yang dapat memunculkan klaim bahwa desa memiliki secara penuh segala sesuatu yang berada dalam wilayahnya, sehingga tidak mau berhubungan dengan pihak lain atau bahkan tidak mau diatur oleh negara. Selain itu, *kedirian* juga akan menyebabkan adanya anggapan bahwa warga pendatang adalah orang lain yang berbeda dengan orang asli. Kemandirian juga bukan *kesendirian* yang cenderung meletakkan desa sebagai entitas yang terisolir dalam kesendirian. Desa seolah-olah dituntut untuk mengurus dirinya sendiri dengan sumberdaya yang dimiliki, tanpa adanya dukungan dari negara.

Kemandirian desa lebih produktif jika dimaknai sebagai bentuk emansipasi desa. Emansipasi di sini berkaitan dengan gagasan tentang persamaan hak dan pembebasan dari dominasi. Pendek kata, desa tidak lagi menjadi obyek imposisi, dominasi dan penerima manfaat proyek, sebaliknya desa justru berdiri tegak sebagai subyek pemberi manfaat (Eko 2015). Dengan demikian, kemandirian desa tidak lain adalah wujud keberpihakan aparatur desa untuk memberikan pelayanan kepentingan warga secara profesional dan akuntabel, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Konsep kemandirian desa memiliki beberapa karakteristik utama. *Pertama*, kemampuan untuk mengurus dan mengatur dirinya dengan kekuatan yang dimiliki. *Kedua*, memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran. *Ketiga*, sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel, dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan warga. *Keempat*, sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan, warga miskin, dll) Lebih lanjut (Eko *et al.* 2014). Ciri yang terakhir ini menunjukkan adanya relevansi antara konsep kemandirian desa dan demokratisasi desa.

Demokratisasi Desa merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis. Proses dinamis tersebut terbentuk karena demokratisasi menuntut adanya manifestasi tindakan atas nilai dan prinsip-prinsip khusus, tidak sekedar terselenggaranya prosedur demokratis tertentu (semisal pemilihan kepala desa secara langsung). Oleh karena itu, proses demokratisasi selalu berjalan dalam dua arena; struktur dan kultur (Amanulloh 2015). Arena struktur berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan yang demokratis. Sedangkan arena kultur (budaya) berkaitan dengan pengenalan, pembiasaan, dan internalisasi norma dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sosial warga desa.

Cita-cita utama politik demokratik⁴ adalah untuk memfasilitasi keterlibatan politik aktif warga negara, mendorong konsensus politik melalui dialog, merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik berbasis ekonomi produktif masyarakat. Dalam versi yang lebih radikal adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat atas sumber kekayaan negara (Fung & Wright 2003). Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Antlov (2004) bahwa *‘to support democracy, it is not enough to simply open up spaces, there need also to be actions that*

⁴ Berkaitan dengan politik demokratik, Stokke & Törnquist (2013) juga menawarkan gagasan menarik yang disebut dengan politik demokratik transformatif (*political agendas, strategies and alliances that use formal and minimalist democracy to introduce politics and policies that may enhance people's opportunities for improving democracy and making better use of it*). Pada dasarnya semangat gagasan ini adalah bagaimana membuat demokrasi berfungsi di tengah tantangan dan masalah di sekitarnya. Dengan kata lain, gagasan tersebut bukan hanya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan masalah-masalah demokratisasi, tetapi selangkah lebih maju untuk mencoba mengatasi masalah yang ada. Perspektif ini sangat penting untuk mendorong demokrasi yang lebih substantif.

allow new voices to be heard and give power to people to be involved in governing their communities’.

Kerangka kerja demokratisasi Desa dapat diklasifikasi dalam tiga bagian yang saling terkait dan bergerak simultan; mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi Desa, mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi, dan mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian Desa dan kegiatan-kegiatan Desa (Amanulloh 2015). Pada saat yang sama, proses memperkuat demokratisasi desa harus berkelindan dengan politik redistribusi kesejahteraan bagi warga desa (Rozaki 2015). Demokratisasi desa dan redistribusi kesejahteraan sesungguhnya merupakan fondasi dasar untuk membangun kemandirian desa.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pengalaman Kepala Desa Sekapuk. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan kajian dokumen (Yin 2011; Creswell 2007). Studi ini berbasis data primer penelitian lapangan dan data sekunder berbasis online yang diakses dalam kurun waktu lima bulan, mulai bulan Maret hingga Juli 2019.

Kegiatan observasi yang kami lakukan berlangsung selama dua hari (tanggal 19 dan 31 Maret 2019). Melalui observasi ini, dapat dilihat langsung kondisi sosial dan geografis Desa Sekapuk. Tidak hanya itu, beberapa capaian keberhasilan reformasi pembangunan pemerintah desa juga dapat diamati dengan jelas. Melalui observasi ini juga dapat disaksikan langsung bagaimana berlangsungnya aktivitas pelayanan Desa yang dilakukan oleh para aparatur desa Sekapuk.

Berkaitan dengan kegiatan wawancara, ada tujuh narasumber yang kami wawancarai. Tiga narasumber diwawancarai secara mendalam, sedangkan empat narasumber lainnya diwawancarai secara informal. Tiga narasumber tersebut adalah Kepala Desa Sekapuk (Abdul Halim), Kepala Desa tetangga (Banyu Urip), Perangkat Desa tetangga (Pangkah Wetan). Empat narasumber yang dimaksudkan adalah perangkat desa Sekapuk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan akademisi UIN Sunan Ampel (dua orang).

Sedangkan kegiatan kajian dokumen yang dilakukan adalah kajian terhadap segala bentuk dokumen yang berkaitan Desa Sekapuk. Sejauh ini dokumen yang bisa diakses adalah struktur kelembagaan dan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ada juga dokumen dalam bentuk video-video dokumentasi dan berita kegiatan desa yang bisa diakses melalui website pemerintah desa (<https://desasekapuk.com>). Selain itu, kajian dokumen di sini juga berkaitan dengan kajian pustaka yang berhasil kami akses berkaitan dengan tema kemandirian dan demokratisasi desa, dalam kurun waktu penelitian ini berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Abdul Halim dan Desa Sekapuk

Abdul Halim merupakan putra daerah Gresik. Ia lahir di Gresik pada tanggal 12 Desember 1981. Ia sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Pelayaran. Sebelum menjadi Kepala Desa, ia adalah sosok wirausahawan yang pernah jatuh bangun, hingga berhasil mengembangkan usahanya. Dengan berkembangnya unit usaha yang dimiliki, ia akhirnya mendirikan CV yang diberi nama “Luwest Group”. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa distribusi barang. Atas dasar motivasi pengabdian bagi tanah kelahirannya, ia kemudian ikut berkompetisi pada pilkades serentak 2017, dan terpilih sebagai kepala desa Sekapuk. Ia pun akhirnya dilantik pada tanggal 12 Desember 2017 dan resmi sebagai kepala Desa Sekapuk.

Sekapuk adalah sebuah desa yang letaknya berbatasan langsung dengan desa Wotan di sebelah barat, Daudo di sebelah selatan, Bolo di sebelah timur, serta Gosari di sebelah utara. Luas wilayahnya sekitar 2,97 km², meliputi pemukiman warga, lahan tegalan, pekarangan dan area untuk fasilitas umum. Jumlah penduduknya secara keseluruhan berkisar antara 4.913 orang, dengan populasi perempuan sebanyak 50,84 %, lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 49,15 %. Sedangkan jumlah rumah tangganya sebanyak 1.543 rumah tangga dengan rata-rata kepadatan penduduk sebanyak 3 orang per rumah tangga (BPS Gresik 2018).

Pemerintahan desa Sekapuk diselenggarakan oleh seorang Kepala Desa dengan dibantu para perangkat Desa. Perangkat desa ini terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (pasal 48 UU No. 6/2014). Sesuai dengan dokumen struktur organisasi Desa Sekapuk, jumlah perangkat desanya sebanyak 7 orang, yang mana meliputi seorang Sekretaris Desa, kepala Urusan (Kaur) Administrasi dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat, dan Kasi Pelayanan. Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai Pemerintah Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Sekapuk.

Menurut penjelasan Halim (wawancara 19/03/2019), Sekapuk merupakan daerah bekas penambangan, dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah selama sekitar 15 tahun. Akhirnya, sejak masa kepemimpinannya, citra itu mengalami perubahan, karena lokasi yang dipenuhi sampah dibersihkan diambilalih oleh Desa. Kebijakan mengambil alih lahan ini ternyata mendapat penolakan dari sebagian kecil warga. Bahkan ia pernah membuat Gazebo dua kali di lokasi itu dan dibakar oleh warga yang kontra dengannya. Terkait kejadian ini, dengan nada kecewa ia menuturkan bahwa:

“Kebangkitan temen-temen (yang bersedia iuran secara swadaya) dinodai oleh orang yang tidak puas karena kepentingan pribadinya (terganggu)” (Wawancara 19/03/2019)

Menurutnya, capaian keberhasilannya saat ini juga melalui proses yang sakit dan pahit juga.

Meskipun belum dua tahun masa kepemimpinannya. Halim memiliki capaian keberhasilan yang cukup pesat. Bahkan dengan percaya diri ia menegaskan bahwa Sekapuk saat ini layak mendapat prediket sebagai desa mandiri. Hal ini sebagaimana penegasan yang dikemukakan oleh Halim (wawancara 19/03/2019) bahwa:

“Tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa Sekapuk adalah desa mandiri. Mulai dari aspek pengelolaan pelayanan desa hingga dari aspek keuangan Desa (sudah mandiri). Tahun ini, pembiayaan (kegiatan) pemerintahan sudah 100 persen ditanggung dari Pendapatan Asli Desa. Dana Desa total digunakan untuk pembiayaan pembangunan Desa.”

Dari pernyataan tersebut, setidaknya dapat dilihat bahwa Halim merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi jelas dalam konteks mewujudkan kemandirian (*sekapuk bersama menuju desa mandiri, maju desanya makmur warganya*). Kepemimpinan politik visioner semacam ini penting bagi keberhasilan program pembangunan desa di Indonesia.

Kepala Desa yang Inovatif dan Progresif

Kepemimpinan inovatif-progresif merupakan tipe kepemimpinan yang menyadari bahwa kekuasaan itu harus dikelola untuk kepentingan warga. Model kepemimpinan ini membuka ruang partisipasi warga seluas-luasnya, transparan serta akuntabel. Tipe kepemimpinan ini juga

mengedepankan akuntabilitas kinerja, melibatkan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan. Selain itu, tipe kepemimpinan ini juga menyadari pentingnya melakukan kaderisasi dan menyiapkan kader desa, serta meningkatkan kapasitas masyarakat Desa (Mustakim 2015). Model kepemimpinan yang dijalankan oleh Halim sedikit banyak merefleksikan tipe kepemimpinan ini.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, Desa Sekapuk mengembangkan aplikasi yang dapat diakses melalui *Play Store*. Aplikasi ini menyediakan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan beberapa rubrik penting yang berkaitan dengan pemerintahan desa, mulai dari Perdes hingga APBDes (wawancara Halim 19/03/2019). Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak desa yang bermasalah dengan penggunaan DD. Namun demikian, kisah-kisah sukses Desa yang berhasil dengan tata kelolanya juga bermunculan, sebagaimana upaya transparansi yang terjadi di Sekapuk.

Era kepemimpinan Halim juga memunculkan banyak inovasi. Setidaknya ada lima inovasi yang sudah direalisasikan. Mulai dari sumur *inject* untuk menanggulangi banjir, penambahan unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pilihan RT serentak, aplikasi desa, dan desa wisata. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan Halim (wawancara 19/03/2019) bahwa:

“Tahun 2018, Sekapuk menyumbang lima inovasi; sumur *inject* menanggulangi banjir, peningkatan kinerja dan penambahan unit-unit usaha BUMDES, pilihan RT serentak, aplikasi desa online, dan desa wisata.”

Inovasinya yang berkaitan dengan BUMDES mengundang protes bos-bos lokal (*juragan*) yang terganggu kepentingannya. Protes tersebut dihadapi Halim dengan elegan dan berani. Ia menyadarkan para bos lokal tersebut bahwa BUMDES ini baru mulai menjalankan usahanya tahun 2018, mulai dari tahun 1970 sampai dengan 2017, desa tidak mendapatkan apa-apa. Pada hal gunung (yang ditambang) itu milik Desa.

Keberhasilannya dalam mengatasi para bos lokal tersebut sesungguhnya tidak lepas dari adanya partisipasi dukungan warga yang lebih luas, yang mendapatkan manfaat dari inovasi tersebut. Untuk penguatan tata kelola demokratik Sekapuk jangka panjang, Halim perlu menguatkan partisipasi warga desa⁵ dalam setiap proses pembuatan kebijakan di Desa. Menurut Baiocchi & Heller (2009), setidaknya ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh untuk menguatkan partisipasi warga. Mulai dari memberi warga peran langsung dalam pemerintahan dengan menciptakan berbagai forum publik di mana warga atau delegasi dapat secara terbuka mengartikulasikan dan memperdebatkan kebutuhan mereka. Kemudian menghubungkan usulan partisipatif warga ke proses aktual penganggaran melalui prosedur yang mengikat. Serta meningkatkan transparansi proses penganggaran dengan melibatkan aktor yang lebih beragam, mempublikasikan prosesnya, dan mengurangi kemungkinan terjadinya *elite capture*.

⁵ Partisipasi warga yang dimaksudkan di sini sebenarnya lebih menekankan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) bahwa ‘*citizen participation is a categorical term for citizen power*’. Menurut Arnstein kekuasaan warga (*citizen power*) itu harus mewujudkan dalam bentuk kemitraan/partnership (*power is in fact redistributed through negotiation between citizens and powerholders, and they agree to share planning and decision-making responsibilities*); pendelegasian kekuasaan/delegated power (*negotiations between citizens and public officials can also result in citizens achieving dominant decision making authority over a particular plan or program*) dan kontrol warga/citizen control (*participants or residents can govern a program or an institution, be in full charge of policy and managerial aspects*).

Inovasi BUMDES yang dilakukan oleh Halim berhasil menopang Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebelum ia menjabat sebagai Kepala Desa, PADes minim sekali. Setelah ia menjabat dan melakukan upaya perbaikan, bisa mencapai 380 Juta (2018), bahkan 2019 meningkat sekitar 932 Juta, mengalahkan Pagu-nya DD (Rp.892.165.000), apalagi Alokasi Dana Desa (Rp.283.063.000) atau Bagi Hasil Pajak (Rp.132.346.000) yang sangat kecil (<https://desasekapuk.com>)⁶. Artinya, dengan capaian ini Halim juga berhasil merealisasikan janji kampanyenya yang menargetkan bisa mengungguli ADD, sekaligus juga di atasnya DD. Capaian keberhasilan inovasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diraih oleh Halim menjadi bukti bahwa visinya untuk mewujudkan kemandirian desa mendekati kenyataan.

Pembangunan dan Pemberdayaan yang Partisipatoris

Partisipasi merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi desa ke arah yang lebih bermakna dan substantif. Mosher sebagaimana dikutip oleh Eko (2014), mengingatkan bahwa sungguh berbahaya jika pelayanan publik hanya didominasi oleh birokrat dan teknokrat (profesional), tanpa melibatkan partisipasi warga untuk menyalurkan kepentingannya. Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh Nordhaug (2013) bahwa kesuksesan implementasi reformasi tata kelola pemerintahan (dari atas) akan menuntut adanya dukungan dari bawah (partisipasi warga secara langsung).

Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Sekapuk, Halim menyadari pentingnya keberadaan warga desa. Tanpa adanya aspirasi dan partisipasi warga tentu sulit meraih keberhasilan. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Halim (wawancara 19/03/2019) bahwa:

“Kita sadar, sebrilian apapun ide dan gagasan pemerintah kalau tidak diterima di kalangan bawah (warga), maka tidak akan mungkin bisa berjalan maksimal. Jadi, ujung tombaknya adalah ketua RT, supaya menyampaikan apa saja program pemerintah, sekaligus juga memberitahukan apa yang menjadi permintaan (aspirasi warga) masyarakat.”

Selain aspirasi warga yang ditampung melalui ketua RT, idealnya memang aspirasi warga tersebut harus difasilitasi secara formal melalui partisipasi langsung dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Oleh karena itu, Halim perlu memastikan bahwa hak-hak warga terkait Musdes wajib terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 3 Pasal 3 Permendesa No. 2/2015, di antara hak-hak masyarakat dalam Musdes adalah: mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musdes; mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musdes maupun tindak lanjut hasil keputusan Musdes; mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musdes; mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musdes; dan menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musdes.

⁶ Kisah sukses inovasi BUMDES di Sekapuk ini menunjukkan bahwa Halim memiliki komitmen untuk memastikan bahwa BUMDES harus dapat memberikan benefit bagi warga desa. Namun demikian, inovasi pelayanan publik di Sekapuk harus terus ditingkatkan dalam konteks politik redistribusi kesejahteraan. Pengalaman inovasi di daerah lain yang belum dikembangkan di Sekapuk juga dapat dijadikan pelajaran berharga. Misalnya sebagaimana yang terjadi di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul (Kemenkeu 2017). Pemerintah Desa Panggunharjo membuat inovasi pelayanan publik bidang pendidikan dengan adanya Kartu Pintar dan Pembayaran Uang SPP dengan sampah, sedangkan bidang kesehatan adanya Kartu KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).

Musdes merupakan forum penting yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Musdes dilakukan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, mulai dari penataan Desa, perencanaan Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, hingga pembentukan BUMDES (Silahuddin 2015). Musdes juga merupakan arena penting untuk sesama warga desa saling berdialog, mendiskusikan arah kebijakan, program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, sarana dan prasarana lainnya) untuk peningkatan kualitas kesejahteraan warga (Rozaki & Yulianto 2015).

Selain Musdes, Halim perlu juga mengefektifkan forum Musrenbang Desa. Musrenbang sebagai inisiatif dari atas tentu membutuhkan partisipasi warga dari bawah. Menurut Sindre (2010), selama ini pelaksanaan Musrenbang menuai kritik dan memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah: musrenbang masih didominasi oleh elit lokal, politisi dan birokrat; musrenbang belum memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran, tetapi hanya mengidentifikasi perencanaan proyek pembangunan; jenis-jenis proyek yang diusulkan masih didominasi oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Kritik-kritik tersebut semestinya menjadi penyemangat bagi Halim maupun kepala desa di Indonesia pada umumnya untuk membuat Musrenbang Desa lebih efektif dan dinamis. Menurut pengakuan Halim (wawancara 19/03/2019) partisipasi warga dalam Musrenbang di Sekapuk berjalan cukup baik. Hal ini sebagaimana pengakuannya bahwa:

“Untuk Musrenbang partisipasi warga aktif, jadi itu harus melibatkan tokoh masyarakat, seperti pada umumnya. Cuma, di sini itu ada rapat rutin setiap bulan, setiap tanggal satu (minggu pertama), yang melibatkan RT, RW, Karang Taruna.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Halim tidak hanya mengandalkan forum Musrenbang, melainkan juga menyelenggarakan rapat bulanan secara rutin. Sayangnya, rapat bulanan tersebut masih terkesan elitis karena hanya melibatkan para elit aparatur desa. Selain itu, Halim juga belum menjelaskan lebih elaboratif terkait pelaksanaan Musrenbang di Sekapuk selama periode kepemimpinannya.

Meskipun demikian, dari berita di yang diupload di website desa (<https://desasekapuk.com>) pada tanggal 24 Juli 2019, ada bukti yang memperlihatkan bahwa pemerintah desa menekankan partisipasi warga dalam proses pembangunan. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Sekapuk terutama yang memiliki tanah di area pertanian diajak berdialog terkait dengan rencana pengurukan dan pembuatan Jalan Utama Tani (JUT). Pembangunan JUT ini rencananya akan dibiayai melalui proposal Bantuan Khusus (BK) yang diajukan Pemerintah Desa ke Dinas Pertanian, yang sudah mendapatkan lampu hijau. Dengan demikian, tidak hanya bukti partisipasi warga yang terlihat, melainkan juga bukti transparansi pemerintah desa terkait dengan bantuan yang akan diterima.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa juga berusaha untuk partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari cara pemerintah desa mengembangkan inovasi desa wisatanya. Jadi, dalam mengelola wisata SETIGI⁷, pemerintah desa mencari dana dari “surat saham warga”. Surat saham ini berasal dari warga dengan kemampuan ekonomi kelas menengah ke bawah, bukan warga kelas menengah atas. Harapannya dengan adanya wisata ini masyarakat

⁷ Menurut penjelasan Halim, nama Setigi sendiri merupakan singkatan dari Selo Tirto Giri yang memiliki arti Batu, Air dan Bukit.

sejahtera. Desa sudah maju karena ada wisatanya, dapat penghasilan, dan sebagai investornya. Jadi, masyarakat tidak hanya bekerja namun juga menjalankan usahanya, karena mereka yang jadi investornya (wawancara Halim 19/03/2019).

Berbeda dengan pengalaman di Sekapuk yang cukup optimis dengan upaya penguatan partisipasi warganya, beberapa aparatur desa tetangga justru terkesan lebih pesimis dengan partisipasi warganya. Misalnya penuturan salah seorang perangkat desa (wawancara 31/03/2019) bahwa sejak ada dana desa tingkat partisipasi warga (dalam arti swadaya) malah menurun, karena Desa dianggap sudah punya uang banyak. Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh salah seorang kepala desa (wawancara 31/03/2019) bahwa karakter masyarakatnya beda dengan Desa yang lain, masyarakatnya dinilai komitmennya pada program yang diberikan pemerintah desa agak kurang.

Aparatur Desa yang Akuntabel dan Profesional

Kemandirian desa membutuhkan adanya akuntabilitas dan profesionalitas aparatur desa. Akuntabilitas dan profesionalitas bisa terwujud dengan adanya sumber daya manusia (SDM) aparatur desa yang berkualitas. Menurut Marsaid (2009), untuk membangun kemandirian desa membutuhkan kesiapan aparatur dan masyarakat desa. Artinya, sebaik apapun program dan kebijakan yang digulirkan untuk pembangunan pedesaan, tanpa disertai SDM aparatur dan masyarakat pedesaan yang berkualitas juga mustahil bisa meraih kesuksesan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme aparatur desa tentu membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Berkaitan dengan pentingnya SDM ini, Halim pun menyadari dengan baik. Bahkan ia menegaskan bahwa pertama kali yang dilakukan setelah dilantik adalah fokus pada pengembangan kualitas SDM Desa Sekapuk. Sejauh ini, pengembangan kualitas SDM-nya dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, penguatan kapasitas perangkat desa dalam memberikan layanan administrasi serta layanan desa pada umumnya. Terkait hal ini, Halim (wawancara 19/03/2019) menuturkan bahwa:

“Sekarang (Pemdes) sudah mampu membuka lapangan kerja 300 rumah tangga, (layanan) administrasi yang berjalan sudah sehat, arsip tertib, layanan juga bisa dikatakan sudah maksimal. Kalau mau cepat kita memberikan layanan online, bisa juga lewat WA tinggal ketik nama, nomor KTP, kemudian dibuatkan dan ke sini tinggal ambil (dokumen) yang sudah jadi. Selalu ada evaluasi (kinerja) setiap dua minggu, sekaligus juga sebagai upaya mengidentifikasi masalah (pembangunan) yang ada di desa.”

Dari penuturan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah desa berusaha untuk mewujudkan akuntabilitas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan. Kepala desa dan perangkat desa menjadi aktor penting dalam “rezim kesejahteraan” yang sedang berkembang di Indonesia melalui UU Desa (Aspinall & Rohman 2017).

Bukti lain dari akuntabilitas kepala desa beserta perangkatnya adalah bahwa tahun ini sudah dianggarkan program beasiswa untuk pendidikan sebesar 10 % dari net profit BUMDES. Anggaran ini nantinya diarahkan untuk memberikan beasiswa bagi anak yatim, anak kurang mampu, atau juga untuk anak yang baru mau masuk kuliah. Selain itu, untuk menopang layanan keliling (yang dilakukan oleh aparatur desa), pemdes membeli mobil Xpander dengan menggunakan PADes. Ada Peraturan Kepala Desa yang mengatur agar memberikan layanan keliling setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Agar Pemdes bisa menyampaikan programnya secara

langsung, sebaliknya masyarakat juga bisa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa desa Sekapuk sudah sepenuhnya sempurna dalam upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa. Upaya peningkatan kapasitas ini tetap perlu dikembangkan, khususnya dalam konteks perencanaan dan pengelolaan DD yang lebih partisipatif dan demokratis. Tidak bisa dipungkiri bahwa kendala-kendala teknis seputar perencanaan dan pengelolaan DD masih terjadi di banyak Desa. Bahkan salah seorang perangkat desa tetangga (wawancara Kacong 31/03/2019) menuturkan bahwa hampir semua desa masih mengalami kendala teknis seperti penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan sejenisnya. Menurutnya kendala ini muncul karena pendamping yang disediakan terbatas, satu kecamatan hanya ada satu orang. Bahkan sebagian desa ada yang menyewa tenaga (teknis) dari luar untuk mengerjakannya. Bagi Rozaki (2015), penguatan kapasitas SDM, kelembagaan dan kewenangan dalam membuat perencanaan dan pengelolaan DD membuat peran dan fungsi warga Desa lebih terasa kehadirannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas pengalaman kepala desa Sekapuk di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan tata kelola demokratik merupakan fondasi dasar dan prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian desa. Upaya penguatan yang sudah dilakukan di Sekapuk di antaranya mewujudkan dalam bentuk kepemimpinan politik kepala desa yang inovatif dan transparan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan partisipasi warga, serta aparatur desa yang akuntabel dan profesional dalam mengelola manajemen pelayanan desa. Penguatan demokratisasi desa semacam ini akan mengantarkan mimpi kemandirian desa dapat menjadi kenyataan.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa proses demokratisasi yang berlangsung di Sekapuk belum sepenuhnya sempurna. Data tentang kontribusi kepala desa dalam konteks penguatan partisipasi warga secara langsung dalam forum Musdes dan Musrenbang Desa belum tergambar dengan baik di sini. Padahal penguatan partisipasi warga dalam kedua forum tersebut sangat penting. Penguatan kapasitas warga untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah kunci keberhasilan pelestarian demokrasi di desa. Walaupun begitu, setidaknya ada ikhtiar perbaikan yang diupayakan kepala desa, perangkat desa, dan warga masyarakat Sekapuk ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanullah, Naeni 2015, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, h. 27, 30.
- Antlöv, Hans, Wetterberg, Anna & Dharmawan, Leni 2016, Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52 (2): 161-183.
- Antlöv, Hans 2004, Civic Engagement in Local Government Renewal in Indonesia, in Hans Antlov (ed), *Citizen Participation in Local Governance: Experiences from Thailand, Indonesia, and the Philippines*, IPD for Logolink Southeast Asia, Manila, p. 139-71.
- Arnstein, Sherry R. 1969, A Ladder Of Citizen Participation, *Journal of the American Planning Association*, 35(4): 221-223.

- Aspinall, Edward & Rohman, Noor 2017, Village head elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1): 31–52.
- Aspinall, Edward & Fealy, Greg 2003, *Local power and politics in Indonesia: Democratisation and decentralisation*, ISEAS, Singapore.
- Baiocchi, Gianpaolo & Heller, Patrick 2009), Representation by Design? Variations on Participatory Reforms in Brazilian Municípios, In O. Tornquist, N. Webster & K. Stokke (ed), *Rethinking of Popular Representation*, Palgrave Macmillan, New York, pp. 119-139.
- Creswell, John W. 2007, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, London, p. 138-141.
- Eko, Sutoro et al. 2014, *Desa Membangun Indonesia*, FPPD, Yogyakarta, h. 82-85.
- Eko, Sutoro 2014, *Mendemokratisasikan Pelayanan Publik*, Yappika, Jakarta, h. 4
- Eko, Sutoro 2015, *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, h. 98.
- Fung, A. & Wright, E. O. 2003, Thinking about Empowered Participatory Governance, in A. Fung & E. O. Wright (eds), *Deepening Democracy Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, Verso, London and New York, pp. 3-42.
- Lewis, Blane D. 2015, Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes, *Public Administration and Development* 35 (5): 1-13.
- Hill, Hal (ed.) 2014, *Regional dynamics in a decentralised Indonesia*, ISEAS, Singapore.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017, *Buku Pintas Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Tanpa Penerbit, h. 106.
- Marsaid, H. 2009, Menata Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat Menuju Desa yang Maju dan Mandiri, *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*, 10(2): 180-194.
- Mustakim, Mochammad Zaini 2015, *Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, h. 12-16.
- Nordhaug, Kristen 2013, Accumulation and Inequality in China: What Spaces for Inclusion and Welfare?, in K. Stokke & O. Törnquist (ed), *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*, Palgrave Macmillan, New York pp. 127-147.
- Nordholt, Henk Schulte & Klinken, Gerry van (ed) 2007, *Renegotiating boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia*, KITLV Press, Leiden.
- Nuruddin, Muhammad 2018, *Kecamatan Ujung Pangkah dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, Gresik.
- Rozaki, Abdur 2015, Mendemokratisasikan Desa untuk Kesejahteraan Warga, *Analisis CSIS*, 44 (1): 63-79.
- Rozaki, Abdur & Yulianto, Sg. 2015, *Pelebagaian Demokrasi melalui Musyawarah Desa*, IRE Yogyakarta-CCES, Yogyakarta, h. 7.

- Silahuddin, M. 2015, *Kewenangan dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, h. 28.
- Sindre, Gyda Marås 2012, Civic Engagement and Democracy in Post-Soeharto Indonesia: A review of Musrenbang, the Kecamatan Development Program, and Labour Organising, *PCD Journal*, IV(1): 1-40
- Stokke, K. & Törnquist, O. 2013, Transformative Democratic Politics, in K. Stokke & O. Törnquist (ed), *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*, Palgrave Macmillan, New York, pp. 3-20.
- Yin, Robert K. 2011, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 101-116.
- <https://desasekapuk.com/2019/07/24/bk-dinas-pertanian-cair-pemdes-sekapuk-kumpulkan-warga/>, diakses 29 Juli 2019.



PENGEMBANGAN EKONOMI DESA,
REVITALISASI KOPERASI, UMKM, DAN BUMDes

SUBTEMA

2

DESA INDUSTRI MANDIRI PERTANIAN ORGANIK KEMITRAAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Herwin Mopangga^{1*}

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jenderal Sudiman No. 6 Kota Gorontalo 96128

*Email : herwinmopangga@ung.ac.id

ABSTRAK

Universitas Negeri Gorontalo telah menginisiasi terbentuknya Kerjasama Utara-Utara menjadi Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Kementerian Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2014 meliputi Kabupaten Gorontalo Utara, Bolaang Mongondow Utara, Buol dan Bone Bolango. Kerjasama mencakup aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penataan kelembagaan.

Program Desa Industri Mandiri berbasis pertanian organik merupakan implementasi kerjasama UNG dengan Pemkab Gorontalo Utara. UNG menginisiasi hadirnya kelembagaan ekonomi produktif di masyarakat melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama bidang pertanian, peternakan dan perikanan secara bertahap melalui inkubator berupa Rumah Produksi bioteknologi pertanian. Inovasi lokal dirangsang melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan proses produksi pupuk dan nutrisi organik cair, demplot budidaya POC/NOC, pelatihan manajemen produksi dan pemasaran serta pelatihan wirausaha berbasis POC/NOC. Program ini signifikan meningkatkan produksi padi organik dan produktivitas lahan sawah di Kabupaten Gorontalo Utara. Panen raya dilokasi percontohan bulan Maret 2015, padi organik mencatat produktivitas rata-rata 7,5 hingga 8,3 ton per hektar jauh diatas non-organik 4,5 hingga 5 ton per hektar dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta keberlangsungan Kerjasama Utara-Utara.

Kata kunci: industri, bioteknologi, pertanian, organik, kabupaten gorontalo utara

ABSTRACT

State University of Gorontalo (UNG) is initiated the establishment of North-North Cooperation into the National Border Strategic Area at the Ministry of Public Works at the end of 2014, which covers four districts; North Gorontalo Regency (Gorut), North Bolaang Mongondow (Bolmut), Buol and Bone Bolango Regency (Bonebol).

The collaboration covers aspects of education, research, community services, and institutional arrangement. The Program of Independent Industrial Village based on organic farming is the implementation of the collaboration between UNG and the Regional Government of Gorut. UNG has initiated the presence of productive economic institutions in the community through the development of Joint Business Groups in agriculture, livestock, and fisheries through incubators in the form of agricultural biotechnology production houses. Local innovation was stimulated through several activities such as training and mentoring of making processes of the liquid and solid organic fertilizer, the demonstration plot of POC/NOC, production and marketing management as well as entrepreneurial training. This program significantly increases organic rice production and productivity of paddy fields in North Gorontalo. The massive harvest at the pilot site in March 2015, organic rice recorded average productivity of 7.5 to 8.3 tons per hectare far above non-organic 4.5 to 5 tons per hectare and also has a direct impact on improving the welfare of the people in the countryside and the sustainability of North-North Cooperation.

Keyword: industry, biotechnology, agriculture, organic, north gorontalo regency

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris dengan sektor pertanian-pedesaan menjadi tulang punggung perekonomian. Meskipun telah mengalami beberapa kemajuan penting tetapi mesti diakui bahwa pertanian-pedesaan Indonesia relatif tertinggal dibanding negara lain yang justru tidak berbasis agraris. Pengembangan agroindustri pedesaan merupakan strategi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat

menjadi lahan produktif. Adapun data produksi, luas panen dan produktivitas padi sawah empat tahun terakhir ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1
Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi Sawah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2013

Tahun	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)
2010	253.563	46.987	5,52
2011	273.921	52.811	5,18
2012	295.786	51.193	4,8
2013	295.913	56.894	5,2

Sumber: BPS 2015, Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka 2014

Upaya merealisasikan DIM yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah tentu membutuhkan intervensi kebijakan, program dan anggaran yang memadai dari pemerintah setempat melalui instansi, dinas dan badan teknis serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat mulai dari petani, penyuluh, pelaku usaha hingga perguruan tinggi.

Universitas Negeri Gorontalo atau disingkat UNG telah menetapkan Gorut sebagai lokasi fokus kerjasama di tahun 2015 yang meliputi sasaran pelaksanaan KKS-Pengabdian, KKS-Posdaya, Desa Binaan serta Kerjasama Utara-Utara antara UNG dengan empat kabupaten (Fatsah, 2014). Sebagai perguruan tinggi negeri terkemuka di daerah, UNG mengambil peran strategis untuk pengembangan DIM di Gorut. Melalui tenaga tim *task force*, UNG membantu menginisiasi lahirnya kelembagaan ekonomi produktif di masyarakat melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang pertanian, peternakan dan perikanan secara bertahap yang akan membentuk usaha pendirian inkubator berupa Rumah Produksi berbasis bioteknologi pertanian. UNG telah menjadi motor penggerak lahirnya inovasi lokal seperti pelatihan dan pendampingan proses produksi POC dan NOC, demplot budidaya POC/NOC, pelatihan manajemen produksi dan pemasaran serta pelatihan wirausaha berbasis POC/NOC. UNG juga secara bertahap berupaya memfasilitasi hadirnya pusat inovasi dan alih teknologi, sentra produksi bioteknologi serta pusat informasi teknologi, produksi dan pemasaran.

Meskipun kegiatan budidaya dan agribisnis padi organik sudah dikenal dan diterapkan jauh sebelum Revolusi Hijau di Indonesia tahun 1970-an tetapi penerapan bagi petani di Gorut merupakan hal yang baru dan menarik. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar petani yang tidak familiar dengan istilah, tata cara dan seluk beluk pemanfaatan biopest, benih dan pupuk organik dalam aktivitas pertaniannya.

METODE PENELITIAN

Kerjasama Utara-Utara ditetapkan melalui Deklarasi Utara-Utara dan Penandatanganan MoU antara Rektor UNG dengan masing-masing Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara. Aspek kerjasama meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan penataan kelembagaan dan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan industri strategis berbasis komoditas lokal serta pengembangan konservasi berbasis ekowisata. Khusus untuk Gorut, mulai triwulan terakhir 2014 ditujukan pada pengembangan DIM pertanian organik yang disponsori oleh Ditjen IKM Kemperin.

Dalam implementasi kerjasama DIM pertanian organik, pihak UNG dan Gorut sepakat untuk mengambil peran masing-masing sebagai berikut:

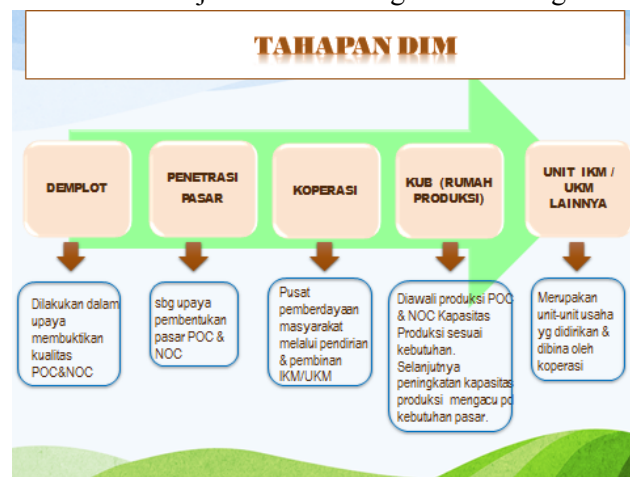
A. UNG menyiapkan:

1. Mahasiswa peserta dan Dosen Pembimbing Lapangan KKS Posdaya yang ditempatkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Mahasiswa bersinergi dengan kelompok tani ternak melaksanakan kegiatan belajar dan praktek pembuatan dan penggunaan biopest, bibit dan pupuk organik. Manfaat yang diperoleh dari program ini berupa: i) proses pembelajaran tidak hanya bersifat konseptual tetapi telah berlangsung secara kontekstual, ii) meningkatkan semangat dan motivasi mahasiswa untuk berwirausaha memanfaatkan komoditas lokal dengan bahan-bahan organik, iii) memperluas pasar dan promosi produk-produk pertanian, iv) mahasiswa dapat menyadari manfaat (*benefit*) dan kontribusi nyata (*value*) yang mereka berikan kepada kelompok sosial dan lingkungan disamping keuntungan finansial.
2. Penugasan kepada tim kerja (*task-force*) lintas keilmuan yang adalah dosen dan pengurus harian Sekretariat Bersama KUU untuk melakukan pelatihan dan pendampingan dalam rangka pengembangan DIM pertanian organik di Gorontalo utara

B. Pemkab Gorontalo utara menyiapkan:

1. Calon petani dan calon lahan (CPCL) untuk implementasi pertanian organik
2. Lokasi dan bangunan rumah produksi (RP) pupuk organik cair (POC) dan nutrisi organik cair (NOC)
3. Tenaga penyuluh pertanian dari unsur dinas pertanian dan badan penyuluh pertanian kabupaten serta perwakilan masyarakat
4. Alokasi dana APBD yang memadai untuk mendukung program DIM pertanian organik.

Rancangan percobaan lapangan (rancangan faktorial), menjadi awal kegiatan penelitian, yakni membandingkan penggunaan pupuk organik cair marolis dengan indikator pertumbuhan dan produksi tanaman padi sawah. Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, warna daun, jumlah anakan produktif dan panjang malai. Sebelumnya, dilakukan uji sampel tanah untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah, baik fisik, kimia dan biologi, melalui uji laboratorium tanah di Universitas Sam Ratulangi Manado, karena ketiadaan fasilitas tersebut di Gorontalo. Selanjutnya, tahapan pengembangan DIM UNG dan Gorut ditunjukkan secara ringkas dalam bagan berikut:



Gambar 2

Tahapan Pengembangan Desa Industri Mandiri di Kabupaten Gorontalo Utara

HASIL

Berdasarkan musim tanam tahun 2014 maka bulan Maret-April 2015 diprediksi menjadi musim panen bagi tanaman padi sawah di Gorut, dan terrealisasi. Bupati beserta jajaran pimpinan SKPD yang memperoleh laporan keberhasilan program DIM berbasis pertanian organik pun antusias untuk melaksanakan kegiatan panen raya di desa-desa percontohan seperti ditunjukkan tabel data hasil panen berikut.

Tabel 2
Perbandingan Lokasi dan Produksi Padi Organik - Non organik Menurut Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

Desa	Kecamatan	Hasil panen (ton/ha)	Panen non organik sebelumnya
Gentuma	Gentuma Raya	7,5	4,5 – 5
Iloheluma	Anggrek	7,5	4,5 – 5
Milango	Tomilito	8,3	4,5 – 5
Bubode		8,3	4,5 – 5
Bulalo	Kwandang	7,6	4,5 – 5
Buloila	Sumalata	7,5	4,5 – 5
Puncak Mandiri		7,2	4,5 – 5
Monas	Monano	7,6	4,5 – 5
Ilomangga	Tolinggula	7,8	4,5 – 5
Dulukapa	Sumalata Timur	8,1	4,5 – 5
Biau	Biau	7,48	4,5 – 5

Sumber: Data lapangan panen raya bulan Maret 2014, Dinas Pertanian Gorut, 2015

Bupati Gorontalo Utara Dr. H. Indra Yasin serta sejumlah pimpinan OPD teknis dalam kesempatan panen raya di enam dari sebelas titik (tabel 2) sangat antusias, mengemukakan bahwa Gorontalo Utara memiliki persawahan seluas 7.091 hektar, bila ditunjang produktivitas sawah rata-rata 7,6 ton per hektar maka optimis mampu memproduksi 59 ton padi dibanding sasaran semula yang hanya 54 ton di tahun 2015 ini. Lebih lanjut beliau sangat mengharapkan dukungan dan peran serta aktif yang berkesinambungan dari pihak UNG. Masyarakat yang menjadi sasaran program inipun merasakan manfaat dari program ini yang ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 3
Perbandingan sebelum dan setelah penerapan pola pertanian organik tahap awal

No	Kriteria di masyarakat & kelompok tani	Sebelum	Setelah
1	Pemahaman pentingnya pertanian organik	Rendah, tidak peduli	Cenderung meningkat karena dampak yang akan dirasakan petani
2	Kelompok tani lokal	Ada, tidak antusias karena minimnya produktivitas padi non-organik	Ada, peserta dan antusiasme meningkat karena produktivitas padi organik
3	Rumah Produksi Pupuk Organik (RPPO)	Tidak ada	Ada, tahap produksi terbatas
4	Ketersediaan sarana/prasarana; indukan, starter, hormon, vitamin	Ada, terbatas	Bertambah karena intervensi pemda
5	Bahan baku fermentasi; urine dan kotoran sapi dan kambing, bonggol pisang, bekatul, guano, karbon dll	Jarang karena tidak ada sosialisasi dan kegiatan budidaya	Mudah diperoleh karena sudah mulai dibudidayakan
6	Peralatan	Minim	Bantuan pemerintah
7	Aktivitas penjualan dan pemasaran pupuk organik	Tidak ada	Ada, tahap permulaan dengan modal, omzet dan laba terbatas
8	Jumlah dan kegiatan KUB pertanian organik	Sedikit, tidak aktif	Lebih banyak, lebih aktif karena ada dukungan pemda dan pendampingan PT

Sumber: olah data lapangan

Hasil dan manfaat yang dinikmati masyarakat petani, peternak, UMKM, Koperasi dan KUB seperti pada tabel 3 diatas merupakan dampak ikutan (*impact*) dari apa yang dicapai seperti yang ditunjukkan tabel 2, diantaranya adalah peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas lahan sebagai akibat penggunaan pupuk dan nutrisi organik cair yang dihasilkan secara mandiri oleh UMKM lokal.

KENDALA DAN SOLUSI

Meskipun secara umum penggunaan dan pemberdayaan usaha tani dengan pupuk dan nutrisi organik terbilang berhasil meningkatkan hasil panen dan produktivitas lahan sawah di Gorut tetapi masih muncul sejumlah kendala atau faktor penghambat. Sedangkan solusi yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4
Deskripsi Kendala dan Solusi Pengembangan Desa Industri Mandiri di Kabupaten Gorontalo Utara

No	Deskripsi	Kendala	Solusi
1	Faktor alam	Banjir karena tinggi curah hujan dan buruknya drainase	Pemisahan (sekat) sawah organik murni, semi dan non-organik
2	Faktor sosio-kultural	Kurangnya pemahaman dan kekhawatiran sulit memproduksi sendiri pupuk organik dan mahal nya harga jual	Mengintensifkan sosialisasi, pelatihan teknis dan pendampingan
3	Kurikulum technopreneurship	Belum tersedia	Aktif mengakses hasil riset dan publikasi online terkait technopreneurship dan TTG
4	Laboratotirum tanah dan pengujian sampel tanaman	Belum tersedia	Jangka pendek masih memanfaatkan milik Unsrat Manado

Sumber: olah data lapangan

Patut diperhatikan bahwa banjir yang terjadi sekitar Januari-Februari sempat mengancam panen. Tetapi berkat antisipasi sejak awal yakni menempatkan sawah murni organik, semi organik dan murni non-organik mampu meminimalisir kerugian akibat banjir tersebut. Sosialisasi dan pendampingan kelompok penyuluh juga cukup efektif meredam kekhawatiran dan ketidakpahaman pada keunggulan pertanian organik dibanding non-organik. Kemampuan dan kapasitas wirausaha berbasis teknologi untuk memotivasi dan mendukung kewirausahaan mahasiswa secara bertahap diintervensi dengan mata kuliah Ekonomi Technopreneurship (Mopangga, 2015; 2016; 2018). Sedangkan persoalan belum tersedianya laboratorium untuk uji sampel POC/NOC yang sebelumnya memanfaatkan fasilitas Universitas Sam Ratulangi Manado telah dimiliki sendiri oleh Faperta UNG.

Kemitraan Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berlanjut dan meluas pada sektor, komoditas dan program unggulan lainnya. Pada tahun 2017 dan 2018 kolaborasi UNG dan Pemkab Gorontalo utara dalam program DIM melalui KKN-PPM, KKS-Posdaya, KKS Revolusi Mental dan KKS-Bank Sampah. Disisi lain, program DIM mendukung pemda mengintensifkan pengembangan POC/NOC sebagai produk unggulan kawasan perdesaan atau Prukades dgn dukungan BUMDes. Target sarannya yaitu ekspor dan atau dijual ke daerah-daerah sentra pangan dan industri pertanian diluar wilayah Gorontalo Utara tahun 2020. Jumlah desa termasuk kelompok tani (gapoktan dan UMKM) yang memproduksi dan menggunakan di lahan sendiri serta memasarkan terus meningkat. Pencanangan Target Satu Juta ekor sapi bagi Kawasan Kerjasama Kawasan Utara-Utara Sulawesi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, 30 Oktober 2017 di Bone Bolango merupakan penguatan industri POC/NOC dan pertanian organik Gorontalo Utara sebagai anggota KUU.

KESIMPULAN

1. Desa Industri Mandiri kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara melalui inkubator berupa rumah produksi pupuk dan nutrisi organik cair (RPPOC/RPNOC) memanfaatkan bahan baku lokal berhasil meningkatkan produksi padi dan produktivitas lahan sawah sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat tani dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

2. DIM meningkatkan pemahaman, antusias dan keterampilan petani dan anggota KUB sehingga terjadi transfer pengetahuan dan teknologi, tumbuh inovasi lokal dan melahirkan wirausaha baru berbasis pertanian organik.
3. Berdirinya Industri Mikro, Kecil dan Menengah POC/NOC menjadi motor penggerak perekonomian ditinjau dari aspek manfaat, nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

1. Perlu dibangun sinergi yang lebih erat, intensif dan berkelanjutan antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa untuk peningkatan kapasitas, keterampilan dan penganggaran bagi kelembagaan perguruan tinggi seperti LPPM dan PKM untuk kesinambungan DIM
2. Diperlukan riset dasar, terapan dan kajian pengembangan secara terpadu oleh UNG dan Kabupaten Gorontalo Utara tentang prospek POC/NOC sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan daya saing wilayah Kerjasama Kawasan Utara-Utara Sulawesi.
3. Perlu sinergi yang lebih erat dan produktif antara para pihak untuk menciptakan ekosistem inovasi misalnya melalui adanya kelembagaan inovasi daerah yang diisi unsur pemerintah (regulator dan fasilitator), perguruan tinggi (riset dan pengembangan) serta sektor swasta sebagai penyerap dan pengguna inovasi pada skala komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahua, M.I dkk. 2014. *Pengembangan Desa Industri Mandiri (DIM) Melalui Pendekatan Inkubasi*. Bahan presentasi pada Workshop I Kerjasama Utara-Utara, Kwandang
- BPS. 2015. *Kabupaten Gorontalo Utara Dalam 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara
- Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara. 2015. *Data Hasil Panen Raya*
- Fatsah, H. 2014. *Membangun Sinergitas Utara Utara Dalam Pengembangan Potensi Daerah*. Bahan Presentasi Wakil Rektor UNG Bidang Kerjasama dan ICT. Kwandang Gorontalo Utara 9 Desember 2014
- Mopangga, H, dkk. 2014. Komoditas Unggulan Lokal sebagai Basis Inovasi dan Wirausaha Mahasiswa. Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Inovasi dan Technopreneur, Bogor 18 – 19 Februari 2013
- Mopangga, H. 2016. *Ekonomi Technopreneurship*. ISBN. 978-602-401-363-9. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Mopangga, H dan Bumulo, F. 2018. *Technopreneurship for Local Economic Empowerment by Innovative Learning Module*. Prosiding International Conference of Project Management. ISSN. 2621-993X (O) 2622-0989 (P) / November, 2018
- Syah, D. 2008. *Agroindustri Pangan Lokal; Penggerak Ekonomi Masyarakat dan Diversifikasi Pangan*. Makalah disajikan pada Pra (2) WNPG IX tanggal 11-12 Juni 2008 di Jakarta

Sumber lain:

<http://www.neraca.co.id/article/51218/Kemenperin-Bakal-Perluas-Program-Desa-Industri-Mandiri>

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/6978/Meningkatkan-Perekonomian-Rakyat-Melalui-Potensi-Pedesaan>

COMMUNITY BASED TOURISM IN SEKAPUK, UJUNG PANGKAH, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCY EFFORT IN EMPOWERING LOCAL ECONOMY

Achmad Room Fitrianto*)

Lecturer and researcher in UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRACT

The emergence of creative economy concept has changed the model of regional development. In the case of Sekapuk Village, its combine between the creativity of the community in respond to post limestone mining area and increasing their welfare. Community-Based Tourism (CBT) enterprises have play significantly in drive rural development strategy. In the context of village sovereignty and independency in empowering local economy, CBT enterprises is the back bone of the village administration in overcome various challenges faces. The present paper explores stakeholder perceptions towards the prospective shape and structure of CBT enterprise and village administration network in gathering support for developing their local tourist attraction owned. A partial Sustainability Livelihood Framework employ in this research.

The fieldwork show that the dynamic cooperation between CBT enterprise and village administration in generating venture capital from the community. By adopting sharing economy concept, CBT enterprise and village administration introduce TAPLUS (Tabungan Plus- Saving and investment program). TAPLUS encourage local communities to participate by investing their money to develop their village as a tourist destination. Not Only that, in supporting the development of tourist attraction area, CBT enterprise also provide soft loan for women single parent that just applying 9% interest rate annually for starting business in supporting tourist attraction.

There are two factors that influence the success of a CBT network, first It's rely on an authoritative funding body and second rely on communications between managers and stakeholders. The development of the limestone post mining area in Sekapuk is the evidence. The community social construction, economy potencies and community perspective are needed in maintains a balance of power in conducting sovereignty and independency effort in empowering local economy.

Keywords: Community Based Tourism, Sovereignty and independency development, Community empowerment, Limestone Post mining area

PENDAHULUAN

Moscardo (2008), Ruiz-Ballesteros dan Hernández-Ramírez (2010) melihat Community Based Tourism sebagai model pengembangan komunitas yang bisa memaksimalkan manfaat social ekonomi dari object wisata yang ditawarkan dan mampu meminimalkan dampak Lingkungan. Pendapat ini juga melihat sebagai upaya penguatan komunitas melalui pengembangan pariwisata secara effectif dan berkelanjutan (Stronza, 2008). Namun demikian usaha usaha penguatan komunitas ini memiliki beberapa kelemahan seperti kurang bisa memaksimalkan profitabilitas, pemasaran dan distribusi yang lemah (Beaumont dan Dredge, 2010; Blackstock, 2005; Goodwin dan Santilli, 2009). Lebih lanjut, Buckley (2013), Liu (2003), McKercher dan Prideaux (2014) melihat adanya hubungan yang paradox antara pengembangan pariwisata dengan kontribusi ekonomi, social-budaya dan Lingkungan. Lebih lanjut Britton (1983), Gibson (2010), Hollinshead (2004), Mowforth dan Munt (2008) menunjukkan adanya bukti kurang signifikan hubungan kesejahteraan masyarakat local dengan pengembangan pariwisata. Hal ini senada dengan umumnya yang terjadi di areal pengembangan wisata yang melibatkan investor dari luar masyarakat, dimana masyarakat hanya berperan sebagai pelengkap penderita dari dunia industry pariwisata yang digalakkan. Kondisi ini terlihat dari sebegini besar warga local hanya berperan sebagai pedagang kecil souvenir ataupun sebagai pekerja lepas di sector maintenance dan kebersihan. Sedangkan dari sisi manajerial dan sector kreatif lainnya banyak dikerjakan oleh para pendatang.

Namun demikian paper ini berusaha menunjukkan hubungan positif pengelolaan pariwisata berbasis komunitas yang memanfaatkan lokasi bekas penambangan sebagai object andalan. Desa

Sekapuk, yang memiliki areal tambang Galian C yang cukup luas dengan jumlah penduduk 4673 jiwa dengan mayoritas bekerja sebagai petani dan sekaligus buruh tambang dan penambang serta buruh migran, dalam mengelola object wisata berbasis komunitas ini bisa menjadi salah satu bukti pengelolaan wisata yang mampu meminimalkan dampak negative tanpa harus mengorbankan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Sebagaimana Ross(2012) kemukakan bila pembangunan di negara berkembang itu berbasis kepada optimalisasi sumber daya. Pajak pajak pemerintah dan sumber pendapatan pemerintah didapatkan dari pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Oleh karena itu pengembangan jaringan pengelola wisata berbasis komunitas ini bisa menjadi peluang areal perdesaan guna memperkuat operasional usaha dari masing masing anggota masyarakat yang cenderung termarginalkan.

Kondisi masyarakat Kabupaten Gresik yang secara makro dikenal sebagai areal pengembangan industry perdagangan. Khususnya Kabupaten Gresik juga dikenal melalui produk-produk unggulan yang berasal dari Gresik seperti Semen Gresik (yang sekarang menjadi Semen Indonesia) dan Pupuk Petrokimia Gresik. Kondisi umum yang seperti ini seolah olah hamper semua area di Kabupaten Gresik memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Hal ini tidak demikian di Desa Sekapuk, sampai tahun 2017 Desa sekapuk masih tercatat sebagai daerah tertinggal.

Dengan kondisi yang unik dan paradoksial ini dikembangkan metode pembangunan partisipatorif yang dimaksudkan untuk bisa melihat bagaimana asset asset local yang dimiliki masyarakat bisa dioptimalkan guna meningkatkan sumber berkehidupan masyarakat. Semenjak Badan Usaha Milik desa diperkenalkan, terdapat usaha usaha kreatif dari warga desa yang berusaha keluar dari kungkungan dan kutukan sumberdaya yang dimiliki untuk bisa berdaya. Desa Sekapuk yang dikelilingi oleh areal konsesi pertambangan batu kapur yang memiliki jangka waktu pengelolaan 25 tahun dengan SIPD No 545.4/091/116/1991 seluas 365.525 Hektar, ini berusaha bangkit dengan memanfaatkan areal tambang yang sudah tidak dipergunakan lagi dan menjadi tempat penimbunan sampah warga.

METODE PENELITIAN

Secara konseptual, tulisan ini dibangun dengan menggunakan pendekatan ekonomi ekologi sosial dalam melihat perilaku masyarakat Desa Sekapuk yang dibentuk oleh gagasan konstruksi sosial dari kerentanan yang muncul, risiko yang dihadapi, dan ketahanan yang dibangun dan dengan lokasi politik-ekonomi dari Industri perudangan.

Penduduk Sekapuk yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani di ladang dengan pengairannya bergantung pada air hujan Di sela-sela menunggu hujan datang, masyarakat juga bekerja membuat batu bata di pegunungan Sekapuk. Dengan tipologi kependudukan yang seperti itu, guna menaksimalkan potensi yang dimiliki dan menggambarkan keinginan masyarakat dan niat dalam merespon perubahan lingkungan diperlukan pemetaan aset masyarakat yang mereka miliki. Aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat adalah aset fisik, aset sumber daya manusia, aset sosial dan dukungan keuangan. Sama seperti kebanyakan tulisan lain yang menggambarkan perilaku masyarakat, tulisan ini menggunakan pendekatan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Responden dari penelitian ini adalah warga Sekapuk yang terlibat dalam pengelolaan wisata desa. Mereka diantaranya adalah perangkat desa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan wisata desa, perwakilan RT yang mengelola kantin dan kafetaria serta juga beberapa pengunjung areal wisata. Selain mewancarai target informan, penelitian ini juga melakukan observasi lapangan yang dilakukan dengan membaur bersama masyarakat dengan mengikuti ibadah di Masjid desa yang dilanjutkan dengan mengobrol dan berdiskusi dengan jamaah sholat.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan beberapa kali kunjungan yang dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah desa guna mendapatkan

informasi yang seimbang dari lapangan. Selain itu konfirmasi data juga dilakukan dengan mengkomunikasikan dengan dinas pemberdayaan dan masyarakat desa Kabupaten Gresik guna mendapatkan kerangka pengembangan kawasan guna mensinkronkan informasi lapangan dengan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah.

Karena tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperkuat proses perilaku adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan ancaman lainnya; maka pendekatan partisipatif parsial merupakan pilihan metodologis yang tepat. Secara parsial disini dimaksudkan adalah pendekatan partisipatifnya tidak dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu, namun dilakukan secara partial namun dilakukan beberapa kali pendekatan. Ada tiga alasan untuk menggunakan pendekatan partisipatif, pertama pengalihan informasi secara partisipatif mudah untuk merekam transformasi sosial terjadi karena keterlibatan aktor sosial dalam proses penggalian informasi sebagai informan (Carr & Kemmis, 1986; Koshy, 2005; Pedretti & Hodson, 1995). Dengan melibatkan tokoh local, ini bisa menlancarkan beberapa hambatan tradisional dan membuat evaluasi dan modifikasi mengikuti tren terbaru. Kedua, dengan melakukan pengalihan informasi secara partisipatif otomatis melibatkan aktor sosial secara aktif dalam penggalian informasi di samping itu bisa berfungsi sebagai bagian dari proses pendidikan masyarakat dalam memahami gejala sosial yang menjadi obyek penulisan (Carr & Kemmis, 1986; Koshy, 2005; Pedretti & Hodson, 1995, p. 476). Alasan terakhir adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan informasi menjadikan keberlanjutan pemberian informasi melalui proses betutur dan bercerita oleh masyarakat menjadi berkembang (Koshy, 2005).

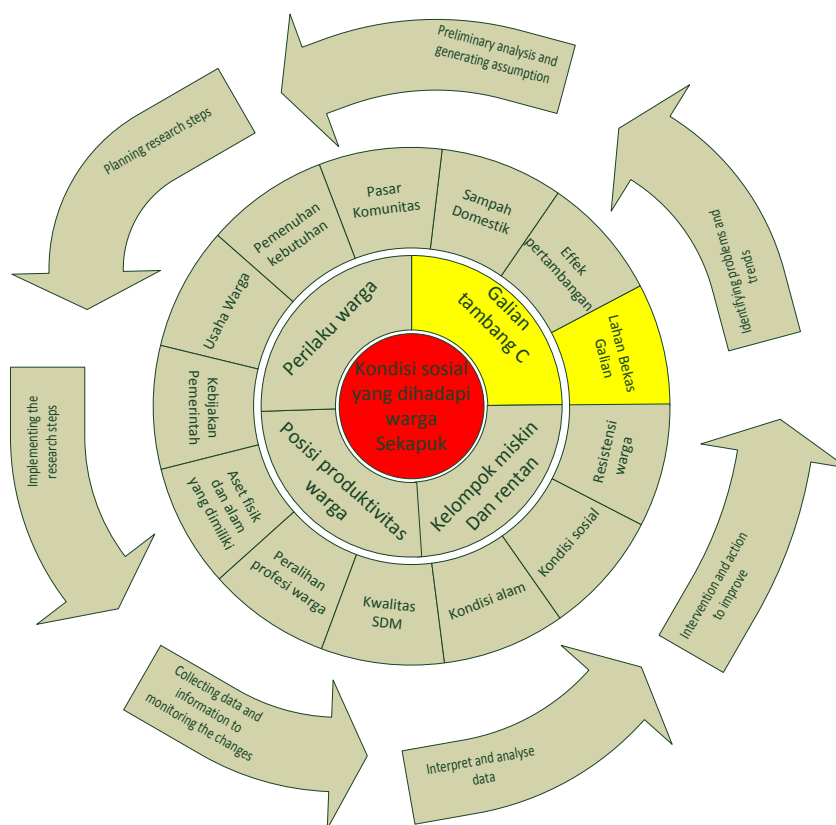
McNiff (2010) memiliki opini terkait pengalihan informasi secara partisipatif. Proses ini jelas melibatkan nilai dan emosi. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi yang menyebutkan bahwa penggalian informasi yang melibatkan secara aktif dari obyek yang digali akan berhadapan dengan dengan nilai-nilai yang dianut dan cenderung akan berbenturan dengan kemungkinan hasil analisis dan temuan lapangan. Oleh karena itu pengalihan informasi secara partisipatif selalu memiliki nilai yang sarat yang bisa menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu dalam menghadapi isu-isu yang ditampilkan. Dengan mengilhami masyarakat, melalui kegiatan dan contoh kegiatan sosial dan menunjukkan aset masyarakat dan potensi yang dimiliki, serta kebersamaan yang dibangun bisa membangun kepercayaan publik.

Sejalan dengan postulatnya McNiff, Ritzer (1975) dan Creswell (2009) yang memberikan tiga paradigma dalam melakukan penggalian informasi secara partisipatif. Pertama yang diajukan bisa dimulai dengan menunjuk pada fakta-fakta sosial yang bisa menjadi reaksi dari masyarakat terhadap alam atau gejala sosial terjadi. Kedua kebijaksanaan praktis yang telah berlaku dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari disepakati untuk menjadi pusat pengetahuan dan ketiga adalah bahwa tahap pengalihan informasi ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong perubahan pribadi dan sosial. Oleh karena itu dalam penggalian informasi partisipatif harus memiliki tingkat tinggi keterlibatan masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin tingkat partisipasi yang tinggi dan bisa bersama dengan agenda masyarakat dengan agenda kegiatan, penggalian informasi harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi. Termasuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk membuat koreksi dan dapat memutuskan atas temuan. Oleh karena itu penggalian informasi secara partisipatif membutuhkan kritik diri dan berpikir tingkat tinggi.

Dengan pertimbangan bahwa penggalian informasi secara partisipatif membutuhkan kritik diri dan berpikir tingkat tinggi, hal ini karena penulis harus menangkap sosial fakta paradigma yang membungkus melalui fungsi struktural masyarakat, konflik yang dialami masyarakat dan interaksi simbolik antar komunitas, maka penggalian informasi dilakukan secara partisipasi melalui berbagai tahap dari siklus penggalian informasi secara partisipatif, dari pemetaan masalah sampai meramalkan

prioritas yang harus dilakukan (McIntyre, 2008). Karena tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan saran kebijakan untuk mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menghadapi perubahan Lingkungan, khususnya karena proses penambangan maka proses sirkular perlu dilakukan. Proses sirkular yang dilakukan tergantung pada informasi yang sebelumnya disediakan dan ditujukan sebagai catatan untuk mengantisipasi respon di masyarakat.

Aspek-aspek dari proses sirkular yang dilakukan oleh pendekatan yang dilakukan digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 1.
Siklus penggalan informasi pada masalah social Desa Sekapuk

Dari gambar flowchart diatas dapat dilihat siklus penggalan informasi secara partisipatif yang dimulai dengan mendefinisikan masalah yang telah dihadapi, lanjutkan dengan melakukan pengamatan dari kegiatan petani dalam memecahkan masalah terjadi. Putaran berikutnya adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan dari berbagai komponen masyarakat, seperti pekerja tambang, masyarakat yang tinggal dekat areal tambang ataupun petani yang juga bekerja sabagai petambang. Strategi warga yang memaksimalkan sumber daya kunci dan elemen untuk menangani potensi bahaya dan kerentanan yang dibutuhkan untuk ditafsirkan dan dianalisis. Tahap berikutnya setelah menafsirkan dan menganalisis perilaku warga, adalah mereposisi peran dari kelompok petani, organisasi pekerja tambang dan instansi pemerintah desa yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan informasi yang dikumpulkan dari masyarakat. Selesai dari tahap ini adalah dilakukan perbandingan dari setiap reaksi yang muncul alam menghadapi ancaman yang terjadi.

HASIL

Ketertarikan awal untuk mendampingi Desa Sekapuk ini diawali dari informasi tentang kekompakkan warga desa yang mampu menyulap tempat pembuangan sampah di areal sisa penambangan galian C ini menjadi areal wisata bukit kapur.

Sekapuk adalah sebuah desa di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. dengan ketinggian 20 meter di atas permukaan air laut. Selain itu, keadaan suhu rata-rata pertahun Desa Sekapuk adalah 30° C dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.400 mm.

Luas Wilayah Desa Sekapuk adalah 297,33 hektar, yang terdiri dari 11,6 hektar pekarangan penduduk, 147,7 hektar tegalan, 0,8 hektar tanah lapangan, 2,5 hektar tanah kas desa, 0,78 hektar komplek balai desa, 1,5 hektar tanah kuburan, dan 38,226 hektar tanah lainnya atau GG Gunung. Kemudian jumlah rumah penduduk Desa Sekapuk adalah 1.142 bangunan.

Desa ini disebelah utara berbatasan dengan Desa Gosari, sebelah timur dengan Desa Bolo dan Desa Wadeng, Sebelah selatan dengan desa Doudo dan Desa Wadeng sedangkan disebelah barat berbatasan dengan desa Doudo dan Desa Wotan.

Desa Sekapuk didiami oleh 4.803 jiwa, dengan diantaranya 2.389 jiwa penduduk laki-laki dan 2.414 jiwa penduduk perempuan.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sekapuk adalah Rp. 1.800.000,-/bulan. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Sekapuk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industry, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Sekapuk, jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 1.680 orang.

Penambangan bukit kapur yang mengelilingi desa ini dilakukan secara masif oleh penduduk sejak tahun 1950-an. Penambangan, pemotongan dinding dinding batu kapur ini dilakukan tidak hanya di atas permukaan tanah, tapi juga di dalamnya sehingga diperbukitan kapur ini banyak ditemukan lorong-lorong serta tebing-tebing yang sangat unik dan sangat artistik.

Sebagaimana disebutkan dibagian sebelumnya bila di desa ini terdapat konsensi pertambangan bukit kumpur yang dimiliki oleh PT. Polowijo Gosari dengan SIPD No.545.4/091/116/1991 dengan hak pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, tanggal 27 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 tahun. Dengan luas areal konsensi pertambangan ini adalah 365.525 Ha.

Seiring dengan jalannya waktu terdapat satu area di lokasi penambangan yang tidak dipergunakan oleh PT Polowijo Gosari digunakan oleh warga sebagai tempat pembuangan sampah massal. Areal pembuangan sampah ini otomatis memiliki konsekwensi seperti menumpuknya sampah dan bau yang kurang sedap yang menyebar. Dengan kondisi yang demikian ada pemikiran dari beberapa warga yang memiliki ide untuk membersihkan areal ini dan memanfaatkan areal ini untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Keinginan ini semakin kuat setelah salah satu pengagas terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2017. Banyaknya sumber informasi terkait pengembangan wisata desa yang diakses oleh warga seperti pengelolaan bukit Brexi di Yogyakarta dan Bukit Jeddih di Bangkalan semakin membuka motivasi desa untuk mengembang areal yang awalnya gunung sampah ini menjadi areal wisata.

Proses berliku dilakukan oleh warga yang difasilitasi oleh pemerintah desa sekapuk untuk bisa mengelola lahan 2,6 Hektare untuk pengembangan wisata. Namun dengan negosiasi dengan PT Polowijo Gosari dengan mempertimbangkan peta hak konsensi yang dimiliki, areal lahan 2,6 hektar diserahkan pengelolaannya kepada desa melalui BUMDes dan Kelompok sadar wisata desa Sekapuk. Areal ini diberi nama Setigi sebagai branding baru tujuan wisata. Setigi adalah singkatan dari Selo Tirta Giri yang memiliki arti Batu, Air dan Bukit. Ketiga elemen tersebut saat ini menjadi andalan warga Sekapuk. Pemdes Sekapuk secara swadaya menyulap eks tambang perbukitan kapur menjadi kawasan Wisata Setigi yang sangat digandrungi generasi milenial.

desa. Pasar desa ini, yang terletak di pinggir jalan dekat gapura pintu masuk ke desa memiliki potensi untuk menjadi pasar wisata. Tidak hanya menjadi tempat berdagangnya dan memasarkan komoditas lokal, namun juga bisa digunakan sebagai tempat wisata kuliner kerakyatan yang representative. Kuliner yang menonjolkan kekhasan masakan masyarakat Pantura.

Kedua, Desa Sekapuk juga memiliki beberapa festival desa. Salah satu festival desa itu adalah festival ambengan pada hakekatnya adalah ekspresi rasa syukur atas rejeki dan karunia Tuhan yang dibentuk dalam penyajian nasi putih yang ditempatkan dalam wadah, wadahnya dapat berupa panci atau besek. Ambengan merupakan gambaran dari bumi (tanah) sebagai tempat hidup dan kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya, yang harus dijaga kelestariannya, karena itu merupakan unsur yang penting dalam kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan.

Ketiga, posisi desa yang berada di jalan poros pantura dan jalan desa yang cukup lebar menuju lokasi wisata desa menjadikan object wisata yang ditawarkan sangat mudah untuk diakses oleh pengunjung.

Tiga modal yang dimiliki oleh Desa Sekapuk inilah yang diolah dan dikembangkan untuk kesejahteraan melalui pengorganisasian wisata berbasis komunitas. Namun demikian pengelolaan potensi ini bukannya tanpa tantangan. Pada awal perintisan areal wisata ini terdapat beberapa penolakan warga terkait pembangunan areal wisata. Dari beberapa wawancara yang kami lakukan disebutkan terdapat aksi pembakaran terhadap gazebo gazebo sederhana yang dibangun diareal wisata, selain itu juga terdapat beberapa aksi kurang terpuji lainnya misalnya ditemukannya beberapa kotoran manusia diareal wisata. Kondisi penolakan ini muncul dikarenakan areal ini dahulunya adalah areal pembuangan sampah, kenapa areal yang seharusnya disembunyikan dimunculkan ke public. Namun seiring dengan sentuhan yang diberikan, dampingan dari beberapa instansi dan pendampingan dari perguruan tinggi perlahan perubahan ini terlihat. Terlebih lebih setelah beberapa wisatawan mancanegara yang datang dan mengunjungi areal ini merubah pandangan warga akan potensi yang dimiliki oleh SETIGI.

Setelah tantangan pertama teratasi dengan dukungan penuh warga, tantangan berikutnya adalah masalah finansial. Pengembangan areal 2,6 Hektar ini untuk bisa dijadikan areal wisata yang representative ternyata membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Pemanfaatan dana desa yang hanya terfokuskan untuk pembangunan areal wisata ini dirasa juga tidak menguntungkan secara politis karena kekritisan warga. Menghadapi hal itu maka muncul gagasan untuk mengadakan usaha menggalang dana dari masyarakat. Dana tersebut adalah dana tabungan yang dikelola oleh BUMDes untuk kurun waktu tertentu yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membangun areal wisata ini. Sejauh ini terdapat 400 warga (sertifikat) Taplus yang berkontribusi dalam proses pembangunan dari target 700 sertifikat. Masalah pembiayaan pembangunan areal wisata ini selain bersumber dari dana masyarakat, juga bersumber dari dana keuntungan pengelolaan usaha dari BUMDes yang memiliki usaha sebagai unit pembayaran listrik dan pajak serta unit usaha lainnya. Satu hal menarik yang didapat dari pengelolaan BUMDes Desa sekapuk ini adalah dari keuntungan di tahun 2017 hanya sebesar Rp 70 juta/tahun menjadi Rp 900 juta/tahun di tahun 2018. Besaran pendapat BUMDes ini diakui dari dampak penyerahan lahan konsensi tambang sebanyak 7 hektar untuk dikelola oleh BUMDes. Dengan posisi finansial seperti ini menjadikan pembangunan areal wisata berbasis komunitas ini cukup massif dilakukan. Salah satu usaha yang menonjol adalah ditanamnya 150 pohon tebubuya berbagai warga di jalan masuk desa sampai menuju lokasi wisata setigi. Kedua dibangunnya lokasi kantin yang dikelola oleh RT. Setiap RT disekapuk diberi area untuk mengelola slot kantin yang diberikan di Setigi. Ketiga adanya program pinjaman lunak kepada janda janda di desa Sekapuk untuk berusaha dengan tingkat bunga hanya 9%/tahun.

Proses pengembangan wisata berbasis komunitas ini dibangun untuk bisa menjawab ekpetasi warga guna meningkatkan kesejahteraan yang bisa dilihat dalam tigel hal. Pertama peningkatan kreatififitas dan innovasi sumber daya manusia. Upaya-upaya ini dilakukan melalui program atau kegiatan yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Salah satunya adalah program pendidikan madrasah diniah yang berpusat di Masjid desa.

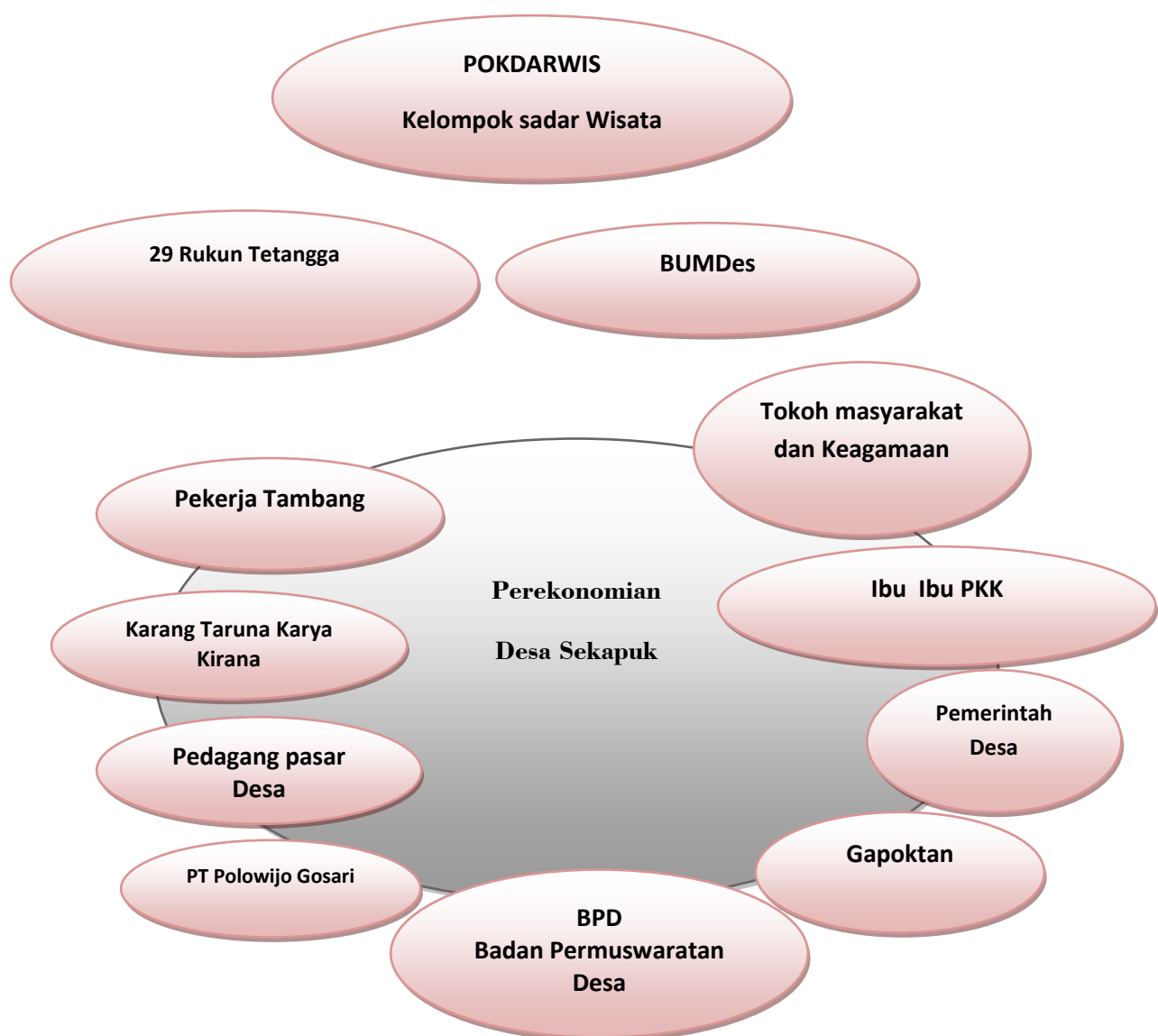
Bagan 3
Struktur harapan Warga Desa Sekapuk

Ketiga adalah dengan memberi nilai tambah kepada produk produk local. Untuk memberikan nilai tambah produk local dan mengenalkan kepada dunia luar, desa Sekapuk selain mengandalkan website desa, desa ini juga membangun aplikasi berbasis android yang dikenal dengan aplikasi JOS. Jualan online Sekapuk. Pada aplikasi JOS ini dibangun oleh pemerintah desa dan BUMDes guna memaksimalkan produk produk local Sekapuk agar dikenal luas

Ketiga ekpektasi masyarakat yang diusahakan dipenuhi oleh pemerintah desa dan BUMDes ini tergambar pada bagan 3

Usaha usaha pengembangan pembangunan berbasis kemandirian warga yang dilakukan oleh warga Desa Sekapuk ini tergambarkan oleh bagan 4 berikut:

Bagan 4
Stakeholders Desa Sekapuk



Dari bagan di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa pihak atau kelompok yang berpengaruh langsung signifikan terhadap kegiatan ekonomi Desa Sekapuk. Terlihat tokoh masyarakat dan keagamaan memiliki peran yang signifikan, mereka tidak hanya memberikan perhatian tetapi juga

berfungsi sebagai penasihat terutama jika penduduk berurusan dengan masalah ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat. BUMDes dan Pokdarwis dengan unsur pemudanya menjadi penggerak dari usaha wisata berbasis komunitas SETIGL. Selain itu peranan ibu ibu PKK dan dan Pedagang pasar desa juga terlihat tidak bisa diabaikan dalam pengembangan perekonomian desa. Usaha pemberdayaan ibu ibu ini juga terlihat dari program BUMDes yang memberikan kredit usaha dengan bunga 9% pertahun kepada para janda yang menjadi pencari nafkah tunggal dikeluarganya.

Melihat dari kondisi desa yang kondusif meskipun dengan sedikit konflik yang muncul sebagaimana digambarkan di beberapa paragraph diatas, model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Sekapuk ini bisa menjadi rujukan dan model percontohan. Hal ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi warganya yang memiliki kebulatan tekak untuk bergerak menjadi desa maju. Untuk itu di rasa sangat perlu memformalkan pola penghimpunan dana masyarakat mandiri untuk investasi usaha wisata desa ini kedalam satu kebijakan yang bisa menjamin keamanan dari dana yang digunakan. Mendaftarkan pola penghimpunan dana TAPLUS ke otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia akan memperkuat posisi hukum dari BUMDes yang mengelola TAPLUS. Model penghimpunan dana untuk investasi dan para nasabah diberi sertifikat yang bisa dialihkan ini menjadikan TAPLUS sebagai produk yang memiliki kemiripan dengan obligasi namun dikelola oleh desa. Oleh karena itu apabila pengelolaanya sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia maka produk ini bisa dilabeli sebagai obligasi desa. Produk unggulan dan inovasi penghimpunan dana masyarakat dari Desa Sekapuk.

KESIMPULAN

Terdapat minimal lima variable yang menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif khususnya pengembangan destinasi wisata. Pertama adalah adanya kesadaran dan inisiasi warga yang didukung oleh aparat pemerintah desa setempat. *Community based tourism* begitu dikenalnya. Keterlibatan masyarakat luas adalah kunci dari kegiatan wisata desa. Acapkali aktivitas keseharian masyarakat menjadi ruh pengembangan wisata dan menjadi daya tarik wisata. Merangkai sekian keberagaman potensi atau keahlian yang ada di masyarakat yang dikemas dalam usaha perencanaan, pengelolaan dan proses memperkejakan diri sendiri adalah cikal bakal kegiatan pariwisata berbasis komunitas.

Kedua adanya object wisata yang menjadi andalan. Keunggulan dengan adanya object wisata ini juga harus didukung dengan inovasi-inovasi produk dan pelayanan dengan mengedepankan kepentingan wisatawan sebagai pengguna layanan harus terus dimunculkan agar tujuan dan manfaat dari kegiatan pariwisata dapat terpenuhi. Inovasi pengembangan ini bisa juga berangkat dari budaya dan adat istiadat ini dianggap lebih memiliki nilai jual pariwisata yang cukup tinggi dan berdaya saing.

Ketiga adanya tokoh penggerak atau pengagas. Semangat sosial yang tinggi, pantang menyerah, mampu memetakan potensi dan masalah adalah modal dasar pengagas desa wisata yang berangkat dari nol. Tokoh penggerak ini harus mampu menciptakan komunikasi dan hubungan yang baik sehingga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat pelaku wisata.

Keempat adanya kekuatan jaringan dan dukungan dari pihak ketiga. Kemampuan dalam membangun jaringan dan komunikasi dengan pihak ketiga seperti pemerintah, perusahaan menjadi menunjang pengembangan wisata lokal. Dengan adanya jaringan tersebut akan mempermudah untuk mendapatkan pembinaan, pelatihan dan kemungkinan bantuan dana yang bisa digunakan untuk pengembangan desa wisata.

Kelima adanya visi keberlanjutan lingkungan. Tanpa adanya konsep keberlanjutan, konsepsi wisata ini hanya akan menjadi angan. Daya dukung lingkungan serta kualitas lingkungan sangat mempengaruhi. Sebagai contoh adalah kondisi areal bekas tambang yang cukup panas dan menyengat

ini dilakukan upaya penghijauan selain untuk memperindah lokasi juga untuk upaya konservasi lahan dengan penanaman pohon tebuaya di desa Sekapuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Beaumont, N. and Dredge, D. (2010). Local tourism governance: a comparison of three network approaches. *Journal of Sustainable Tourism*, 18 (1), 7-28.
- Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, 40 (1), 39-49.
- Carr, W., & Kemmis, S. (1986). *Becoming critical : education, knowledge, and action research*. London Philadelphia: London Philadelphia : Falmer Press.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / John W. Creswell*. Los Angeles: Los Angeles : Sage.
- Gibson, C. (2010). Geographies of tourism: (un)ethical encounters. *Progress in Human Geography*, 34 (4), 521-527.
- Goodwin, H. and Santilli, R. (2009). Community-Based Tourism: a success? *ICRT Occasional Paper 11*.
- Hollinshead, K. (2004). Tourism and new sense. In C. M. Hall & H. Tucker (Eds.), *Tourism and postcolonialism: Contested discourses, identities and representations* (pp. 25-42). London: Routledge.
- Koshy, V. (2005). *Action Research for Improving Practice: A Practical Guide*. London: London : Sage Publications Ltd.
- McNiff, J. (2010). *You and your action research project / Jean McNiff and Jack Whitehead*. London New York: London New York : Routledge.
- Moscardo, G. (2008). Community Capacity Building: an Emerging Challenge for Tourism Development. In G. Moscardo (Ed.) *Building community capacity for tourism development* (pp. 1-15). Oxford: CABI.
- Mowforth, M. and Munt, I. (2008). *Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the Third World*. London: Routledge.
- Pedretti, E., & Hodson, D. (1995). From rhetoric to action: Implementing sts education through action research. *Journal of Research in Science Teaching*, 32(5), 463-485. doi:10.1002/tea.3660320505
- Ritzer, G. (1975). Sociology: A Multiple Paradigm Science. *The American Sociologist*, 10(3), 156-167. doi:10.2307/27702185
- Ross, M. (2012). *The oil curse: how petroleum wealth shapes the development of nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Ruiz-Ballesteros, E. and Hernández-Ramírez, M. (2010). Tourism that Empowers? Commodification and Appropriation in Ecuador's Turismo Comunitario. *Critique of Anthropology*, 30 (2), 201-229.
- Stronza, A. (2008). Perspectives on Leadership Coaching for Regional Tourism Managers and Entrepreneurs. In G. Moscardo (Ed.) *Building community capacity for tourism development* (pp. 101-115). Clevedon: CABI.



PERAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DENGAN SISTEM TUMPANGSARI

Lambang Raspriyo Aji

Expert Muda Data & Pelaporan
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
Jl. Genteng Kali 49 Surabaya 60274

PENDAHULUAN

Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia) merupakan salah satu institusi Pemerintah yang memiliki kewenangan atas pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura, hal ini didasarkan dari adanya Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2010 mengenai Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia.

Perum Perhutani dalam sistem pengelolaan hutannya, selalu melibatkan peran masyarakat desa hutan dalam setiap kegiatannya. Hal ini diimplementasikan dengan adanya program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Kerjasama yang dilakukan meliputi seluruh aspek pengelolaan hutan dimulai dari persemaian hingga pemanenan. Contoh kerjasama yang paling banyak dijumpai adalah pembuatan tanaman hutan dengan pola tumpangsari atau pola tertentu, dimana masyarakat diperbolehkan menanam tanaman palawija diantara tanaman pokok kehutanan seperti jagung, padi, kedelai, kacang, lombok dan lain-lain.

Secara keseluruhan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mengelola \pm 1,1 juta hektar hutan yaitu hutan produksi dan lindung dengan sebanyak 1.906 desa yang melingkupinya. Serta sebanyak 1.825 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) binaan, yang merupakan wadah kemitraan dengan masyarakat desa hutan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian di desa.

Program PHBM yang dimiliki Perum Perhutani, mewajibkan Perum Perhutani untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa hutan, dimana pihak Perhutani memberikan suatu kebijakan pengelolaan lahan hutan untuk pertanian (*agroforestry*) dengan sistem pinjam pakai bagi petani khususnya petani yang memiliki lahan sempit bahkan tidak mempunyai lahan.

Agroforestri atau wana tani adalah suatu sistem pengelolaan lahan hutan yang merupakan kombinasi antara produksi pertanian, termasuk pohon buah-buahan maupun peternakan dengan tanaman komoditas kehutanan seperti kayu, getah pinus, getah damar, dan kayu putih.

Program PHBM yang diimplementasikan melalui sistem lahan agroforestri dengan metode tumpangsari, Perhutani mengadakan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan dalam bentuk keorganisasian LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang terdiri dari pesanggem yang mengelola hutan tumpangsari.

Perhutani mewajibkan pengelola lahan tumpangsari harus terdaftar sebagai anggota LMDH. Berdasarkan ketentuan tersebut petani yang belum terdaftar sebagai anggota LMDH memanfaatkan jaringan-jaringan yang dimiliki terhadap anggota LMDH yang dikenalnya agar dapat menjadi bagian dari LMDH.

Hak kelola lahan tumpangsari diperoleh dari pemanfaatan jaringan relasi yang dimiliki petani terhadap individu menjadi anggota LMDH sekaligus sebagai salah satu anggota masyarakat dimana petani tersebut tinggal. Hal ini dilakukan untuk memperkaya relasi sehingga memperoleh hak kelola

lahan tumpangsari dengan ikut LMDH. Adanya jaringan-jaringan yang menghubungkan antara petani dengan salah satu LMDH yang berasal dari satu komunitas masyarakat yang sama dimana mereka menganut nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka tinggal yang membentuk suatu kepercayaan antara individu yang menjadi anggota LMDH.

Setelah petani mendapatkan status keanggotaan LMDH, pengurus akan menghubungkannya kepada mantri hutan/KRPH sebagai perwakilan Perum Perhutani yang mengawasi penggunaan lahan tumpangsari guna memproses kontrak kerjasama penggunaan lahan tumpangsari. sehingga petani dapat mendapatkan hak kelola lahan tumpangsari dan mendapatkan manfaat atas penggunaan lahan tersebut. Dengan demikian Perhutani memberikan kepercayaan terhadap petani yang mengelola lahan tumpangsari untuk melakukan aktifitas pertanian dengan jaminan LMDH bahwa petani pengelola lahan tumpangsari (pesanggem) tersebut mampu mengelola dan menaati kontrak yang telah dibuat oleh Perhutani.

Adanya lahan tumpangsari bagi petani meningkatkan produktifitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terwujud kehidupan yang sejahtera dimana diantaranya peningkatan produksi pangan, pemenuhan kayu bakar, kesempatan kerja di hutan, pendapatan rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga. Kendala keterbatasan lahan yang dimiliki petani dapat diatasi dengan memiliki hak kelola lahan tumpangsari.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 2 bulan, mulai 10 Juni 2019 - 10 Agustus 2019. Penelitian dilakukan di wilayah Perum Perhutani Divre Jawa Timur.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan dan memahami kondisi sosial yang menjadi objek kajian. Metode penelitian yang digunakan peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yaitu Peran Perum Perhutani dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa melalui sistem Tanam Tumpangsari.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada fenomena yang menjadi objek kajian dan akan mempengaruhi hasil dari proses penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Observasi, observasi yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data melalui literature-literatur yang berkaitan dengan Peran Perhutani dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa serta teknik tanaman tumpangsari.
2. Wawancara, wawancara yang dilakukan peneliti dengan melakukan kegiatan bertukar informasi terhadap narasumber yang dianggap mengetahui fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia) merupakan salah satu institusi Pemerintah yang memiliki kewenangan atas pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura, hal ini didasarkan dari adanya Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2010 mengenai Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia.

Perum Perhutani merupakan subyek hukum yang kegiatannya menyediakan pelayanan kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan prinsip pengelolaan perusahaan dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Sistem Pengelolaan Hutan oleh Perum Perhutani dikenal dengan nama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dimana dalam mengelola kawasan hutannya Perhutani mengikutsertakan masyarakat desa hutan. Adapun perkembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa atau sistem PHBM tersaji sebagai berikut :

Tabel 1
Perkembangan Sistem PHBM dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa

No	Tahun	Istilah	Kegiatan
1	s/d thn 1960-an	Pembuatan Tanaman Jati dengan biaya rendah.	Pembuatan tanaman hutan sistem Tumpangsari, dengan tujuan memperoleh kegiatan penanaman dengan biaya yang rendah dan tujuan keamanan hutan.
2	1972	Prosperity Approach	Inmas Tumpangsari, Insus Tumpangsari, MA-MA (Magelang-Malang), MA-LU (Mantri-Lurah). Tujuan mengembalikan potensi dan fungsi hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3	1982	Pembangunan Masyarakat Desa Hutan	Masyarakat diwadahi dalam kelompok Tani Hutan (KTH), tujuan partisipasi masyarakat ditingkatkan.
4	1984	Perhutanan Sosial	Keikutsertaan masyarakat lebih ditekankan, tercermin dari sistem perencanaan pengelolaan hutan dengan menerapkan bottom up dan top down.
5	1994	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT)	Sinergi dengan Pemda dalam pembinaan masyarakat dan pembangunan wilayah.
6	1998	Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	Lembaga Masyarakat yang mengakar dan Mandiri/LM3, Kopontren.
7	2001	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	Paradigma Forest Timber Management menjadi Forest Resources Management Paradigma State Based Forest Management menjadi Community Based Forest Management
8	2007	PHBM Plus (SK : 268/Kpts/Dir/2007)	
9	2009	Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.	

Di dalam upaya meningkatkan fungsi hutan serta pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, Perum Perhutani mengembangkan pola kerjasama kemitraan dengan melibatkan masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan ini terwadahi dalam satu organisasi yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur saat ini sudah terbentuk 1.825 LMDH dengan 629 diantaranya telah membentuk Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) sebagai unit usaha dari LMDH.

Kerjasama yang dilakukan meliputi seluruh aspek pengelolaan hutan dimulai dari persemaian hingga pemanenan. Contoh kerjasama yang paling banyak dijumpai adalah pembuatan tanaman hutan dengan pola tumpangsari atau pola tertentu, dimana masyarakat diperbolehkan menanam tanaman palawija diantara tanaman pokok kehutanan seperti jagung, padi, kedelai, kacang, Lombok dan lain-

lain. Sedangkan pada petak hutan yang sudah tidak memungkinkan dilakukan tumpangsari, masyarakat dapat melakukan Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan (PLDT) dengan jenis komoditas yang cocok di bawah naungan seperti empon-empon dan porang.

Hasil dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, diantaranya dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa hutan sekitar petak. Data penyerapan tenaga kerja dari Perum Perhutani Divre Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2
Penyerapan Tenaga Kerja Divre Jawa Timur

NO	SATUAN KERJA	TAHUN 2014 Orang	TAHUN 2015 Orang	TAHUN 2016 Orang	TAHUN 2017 Orang	TAHUN 2018 Orang
1	2	3	4	5	6	7
1	DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR	95.866	76.650	50.842	38.298	45.687
	Jumlah	95.866	76.650	50.842	38.298	45.687

Sumber Data:

- DKP Online

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dengan adanya kegiatan Pengelolaan Hutan oleh Perum Perhutani, tidak sedikit pula masyarakat ikut serta dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani. Contoh terakhir di tahun 2018 terdapat 45.687 orang yang diserap oleh kegiatan kehutanan Perum Perhutani.

Selain menyerap tenaga kerja Perum Perhutani juga memberikan sumbangsih kepada masyarakat karena jasanya turut menjaga kelestarian hutan. Program ini diberikan kepada masyarakat secara tunai, dengan memperhitungkan seberapa besar kontribusi sebuah petak dapat menghasilkan pendapatan. Adapun hasil sharing produksi kayu dan non kayu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3
Sharing Produksi Kayu dan Non Kayu Divre Jatim

NO	SATUAN KERJA	TAHUN 2014 Rp.	TAHUN 2015 Rp.	TAHUN 2016 Rp.	TAHUN 2017 Rp.	TAHUN 2018 Rp.
1	2	3	4	5	6	7
a	DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR					
	-Kayu	6.496.995.707	4.686.454.000	2.541.607.000	5.799.354.455	7.884.653.000
b	-Non Kayu	4.271.430.056	1.613.929.000	1.052.758.000	3.390.513.659	418.657.000
	Jumlah II	10.768.425.763	6.300.383.000	3.594.365.000	9.189.868.114	8.303.310.000

Sumber Data:

- Departemen Kelola SDH

Dari tabel di atas memperlihatkan selama lima tahun terakhir Perum Perhutani Divre Jawa Timur tidak sedikit pula memberikan sharing produksi kayu dan non kayu kepada masyarakat. Pada tahun 2018 saja telah diserahkan kepada masyarakat sekitar hutan sebesar Rp 8,3 Milyar dari hasil kontribusinya terhadap terdagangnya produk-produk Perum Perhutani sampai akhir daur.

Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat khususnya kegiatan Tumpangsari atau dalam prakteknya adalah bercocok tanam di sela-sela tanaman pokok juga memberikan kontribusi pangan bagi masyarakat sekitar dan regional. Adapun data kontribusi pangan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Jawa Timur tersaji sebagai berikut:

Tabel 4
Kontribusi Pangan Divre Jawa Timur

NO	SATUAN KERJA	TAHUN 2014 Ton	TAHUN 2015 Ton	TAHUN 2016 Ton	TAHUN 2017 Ton	TAHUN 2018 Ton
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR					
a	-Padi	15.798	9.102	40.051	4.031	851
b	-Jagung	78.117	73.176	553.854	71.758	60.761
c	-Kacang-kacangan	1.889	1.380	1	376	189
d	-Lain-lain	7.059	3.073	4.112	6.296	2.129
	Jumlah II	102.863	86.731	598.018	82.461	63.930

Sumber Data:
- DKP Online

Dari tabel dapat dilihat komoditi yang ditanam masyarakat di sekitar tanaman pokok di tahun 2018 saja menghasilkan 851 ton padi, 60.761 ton jagung, 189 ton kacang-kacangan, 2.129 ton jenis lainnya.

Tumpangsari pada pembuatan tanaman hutan disebut oleh Coster (1935) dengan *“boschveldbouwmethode, een combinatie van houteelt en landbouw”* atau “gabungan antara pembudidayaan pohon dengan tanaman pertanian”. Tumpangsari pada awalnya dimaksudkan untuk membuat tanaman hutan dengan biaya serendah-rendahnya dan menyediakan kesempatan kerja kepada penduduk setempat agar tidak merusak hutan atau mencuri kayu.

Menurut Coster et.al (1935) hasil dari tumpangsari perhektar pertahun berupa padi gogo 1200 kg, jagung 990 kg, ketela 8100 kg dan kacang tanah 730 kg. Bila dikonversi ke dalam nilai rupiah saat ini, maka hasil tumpangsari adalah : Harga padi gogo kering di tingkat petani sekitar Rp 5.400,-/kg , harga komoditi jagung Rp 3.500,-/kg , ketela Rp 1.600,- , dan kacang tanah Rp 20.000/kg. Sehingga didapat Panen padi gogo kering Rp 5.400 X 1.200 kg = Rp 6.480.000,- perhektar/tahun, Panen jagung Rp 3.500 X 990 kg = Rp 3.465.000, Panen ketela Rp 1.600 X 8100 kg = Rp 12.960.000, Panen kacang tanah Rp 20.000 X 730 kg = Rp 14.600.000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kegiatan tumpangsari di lahan hutan, para petani atau masyarakat desa sekitar hutan dapat terpenuhi kebutuhan minimal dari sisi pangan. Berikutnya tumpangsari juga memberi kontribusi berupa kayu bakar. Hutan jati merupakan sumber bagi kesempatan kerja penduduk setempat dalam kegiatan formal berupa penanaman, eksploitasi hutan dan kegiatan lain seperti pembangunan dan perbaikan jalan hutan. Kesempatan kerja non formal berupa pengumpulan kayu bakar, pakan ternak, dan kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya. Penduduk yang terlibat dalam pekerjaan formal dan informal di hutan rata-rata 90% dari jumlah penduduk di desa tersebut. Data ini menunjukkan suatu ketergantungan yang cukup tinggi dari penduduk setempat kepada kesempatan kerja di hutan.

Peran Perum Perhutani terhadap kegiatan perekonomian di pedesaan sangatlah besar. Hal ini ditunjang oleh strategi pengelolaan hutan Perum Perhutani sebagai berikut :

1. Melestarikan hutan berasaskan kelestarian progresif yang mampu memberikan manfaat optimal baik langsung, maupun tidak langsung.
2. Memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraanya.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga dapat berfungsi sebagai infrastruktur pembangunan yang efektif guna mendukung pembangunan nasional.

Adanya lahan tumpangsari yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian merupakan implementasi program PHBM yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar hutan. Keterbatasan lahan untuk bercocok tanam bagi petani gurem maupun buruh tani menghambat produktifitasnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang melatarbelakangi petani kecil maupun buruh tani menjadi pesanggem atau pengelola lahan tumpangsari.

KESIMPULAN

Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Jawa telah dimulai sejak akhir abad XIX, dengan latar belakang yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai akhir tahun 1960-an pembuatan tanaman hutan dengan sistem tumpangsari, menggunakan biaya penanaman yang rendah oleh tenaga masyarakat di sekitar hutan, tidak mengalami perubahan.

Hasil Penelitian menyimpulkan masyarakat mendapat manfaat dari sistem yang dikembangkan oleh Perum Perhutani yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan sistem tanaman tumpangsari dengan tanaman pokok kehutanan diantaranya peningkatan produksi pangan, pemenuhan kayu bakar, kesempatan kerja di hutan, pendapatan rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga.

Saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Peningkatan kerjasama LMDH dan pemerintahan desa dengan membantu mengontrol kegiatan lembaga bersama pesanggem.
2. Peningkatan kerjasama antara LMDH dengan Dinas Pertanian terkait penyuluhan mengenai penyuluhan tanaman pertanian mengenai metode penanaman dan perawatan tanaman pertanian guna meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.
3. LMDH mengkoordinir hasil panen pesanggem dan melakukan pemasaran hasil pertanian pesanggem guna mengendalikan harga hasil pertanian sehingga tidak mengalami penurunan yang berakibat pada rendahnya harga jual hasil pertanian yang menyebabkan kerugian pesanggem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Balitbang Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memfasilitasi kegiatan temu ilmiah tingkat nasional tentang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa menuju Kemandirian Desa.
2. Instansi kami sendiri yang telah memfasilitasi dalam pembuatan makalah ini yaitu Perum Perhutani Divre Jawa Timur.
3. Keluarga besar Lambang Rospriyo Aji yang mendukung kami untuk turut serta dalam kegiatan temu ilmiah yang diselenggarakan oleh Balitbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Saibani, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soerjono, Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Perum Perhutani, 1996, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa,
- Tim Perum Perhutani, 2018, Statistik Perum Perhutani Divre Jawa Timur 2014-2018.
- Tim Perum Perhutani, 2015, Produk-Produk Unggulan LMDH.
- Wiga, W 2016, Pemanfaatan Modal Sosial Petani Gurem dalam Memperoleh Lahan Agroforestri Perum Perhutani, Skripsi Universitas Jember.



PEMBERDAYAAN EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS *COMMUNITY DEVELOPMENT*: STUDI di DESA PUNCU, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR

SUSTAINABLE EMPOWERMENT on COMMUNITY DEVELOPMENT BASED: STUDY IN PUNCU, KEDIRI DISTRICT, EAST JAVA

Ana Toni Roby Candra Yudha^{1*}, Akmalur Rijal², Habibah Awwaliah³

^{1,2} Pengajar FEBI UINSA Surabaya, Jalan A. Yani 117. 60237, Surabaya

³ Mahasiswa FEBI UINSA Surabaya, Jalan A. Yani 117. 60237, Surabaya

*korespondensi penulis: anatoniroby@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Jawa Timur adalah salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonominya yang berada pada nilai 6,7 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu yang nilainya sebesar 5,4 persen, sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut disokong oleh produktivitas Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model untuk pengembangan bisnis komoditas lokal desa yang melibatkan banyak *stakeholders*, dan terbentuknya koperasi sebagai lembaga inkubasi bisnis masyarakat desa setempat adalah efektif. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan yang disertai analisis eksplanatoris. Studi lebih banyak menggunakan data primer dan sebagian kecil data sekunder. Hasil penelitian ini adalah terdapat pola pembiayaan dan pemberdayaan untuk mengembangkan bisnis komoditas lokal yang kemudian dapat disusun menjadi sebuah model. Hal tersebut terbukti mampu melibatkan banyak *stakeholders* yang tidak hanya fokus pada mengembangkan aspek fisik seperti harta dan jiwa, namun juga perkembangan aspek non fisik seperti keimanan, kualitas pendidikan (akal), dan keturunannya. Sehingga dengan adanya hal tersebut perputaran ekonomi di wilayah tersebut akan terus berlaian, produktif dan stabil. Terlebih berkenaan dengan *Sustainable Development Goals* 8 (SDG's 8) tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, maka sangat sesuai jika pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan komunitas terus dilakukan dengan melibatkan koperasi dan masyarakat lokal yang akan meningkatkan level pendapatan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bersesuaian dengan hal itu maka, implikasi manajerial yang relevan adalah terus perlu adanya sinergi dan kerjasama diantara seluruh *stakeholders* yang saling memiliki keterkaitan untuk terus produktif agar juga menambah volume pembiayaan dan rekapitalisasi serta jaringan bisnis agar terjaga stabilitas ekonomi lokal pedesaan untuk terus stabil, seimbang dan terus keberlanjutan.

Kata kunci: pemberdayaan ekonomi, koperasi, SDG's, Pembangunan Berbasis Komunitas

ABSTRACT

East Java is one of the provinces in Indonesia that has very good economic growth, even exceeding the national average above 5.4%. This is largely supported by the economic productivity of Small Micro Enterprises (SME's), which include the role of village communities, local commodities, cooperatives, and other related parties. With regard to SDGs, especially the 8th SDGs about decent work and economic growth, it is very suitable if community development-based economic empowerment continues to involve cooperative institutions, and it is evident that this effort reduces the rate of poverty and fosters the economy in East Java. This study aims to produce a model for the development of local commodity businesses involving cooperative, and produce business indicators that use the Islamic economic approach. The research approach used is descriptive qualitative with a case study method accompanied by explanatory analysis. The research objects are local business people, village financial management systems, and coffee farmers in Puncu village, Kediri Regency, East Java. The results of this study that there are scheme of financing and empowerment to develop local commodity businesses capable of involving many community-based stakeholders and focus on developing physical aspects such as assets and lives, but also develop non-physical aspects such as faith, quality of education, and offspring. So that a model can be arranged. Accordingly, the implication of the relevant suggestion is to continue need for synergies and cooperation with relevant stakeholders to continue to be productive in order to maintain sustainable economic stability.

Keywords: economic empowerment, SDG, Community Development Based

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jawa Timur adalah propinsi yang ada di Indonesia yang memiliki fundamental ekonomi yang terbilang kuat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya komoditas lokal yang dapat dihasilkan dan merupakan penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup signifikan. Komoditas tersebut dihasilkan secara garis besar berasal dari peternakan, perkebunan, dan perikanan. Pada tahun 2017, hasil yang dicapai meliputi peternakan sebesar 14.955.196 atau setara dengan 89 persen, perkebunan sebanyak 1.435.109 ton atau setara dengan 9 persen dan penyumbang ketiga terkecil adalah perikanan yaitu senilai 407.815 ton atau setara dengan 2 persen dari total PDRB (BPS Jawa Timur, 2017). Komoditas unggulan tersebut banyak diperoleh dari wilayah Jawa Timur yang justru kategori wilayah pedesaan. Namun dibalik adanya hasil komoditas yang melimpah justru masih cukup besar masyarakat yang perlu diberdayakan.

Aktivitas masyarakat yang khususnya masyarakat pedesaan berbeda dengan aktivitas masyarakat di kota, masyarakat desa memiliki karakteristik tolong menolong yang lebih besar ketimbang masyarakat kota yang cenderung lebih individualis. Sehingga karakteristik partisipatif atau kekeluargaan dan pemberdayaan adalah dua konsep yang dinilai sesuai dengan pengembangan masyarakat desa (Nikkah, 2009. hal. 1). Selain itu visi *Sustainable Development Goal's* (SDG's) yang spesifik dalam membahas pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, akan juga sejalan dengan proses pemberdayaan masyarakat desa baik dalam kemampuan ekonomi, perbaikan kualitas kesehatan dan perbaikan kualitas pendidikan yang tujuannya adalah meningkatkan level ekonomi mereka (Mustangin, 2018. hal. 78).

Memang benar adanya suatu pemberdayaan akan dapat terwujud jika ada akses permodalan, meskipun bukan faktor satu-satunya (Mustangin, 2018, hal. 77). Sedangkan untuk memberdayakan masyarakat desa perlu adanya edukasi keilmuan, pendidikan sosial serta peningkatan mutu ekonomi (Sulaiman, 2016). Atas hal tersebut maka perlu adanya kajian dan penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan ekonomi dan sosial, untuk kemudian mencari alternatif solusinya agar setidaknya dapat mengurangi persoalan ekonomi masyarakat lokal secara riil dan menyeluruh.

Pemaparan mengenai komoditas unggulan dan visi dunia yang dituangkan dalam SDG's, yang disampaikan pada bagian sebelumnya telah sejalan dengan pemenuhan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebutlah yang dikehendaki oleh semua elemen masyarakat, tak terkecuali masyarakat Jawa Timur, dan khususnya masyarakat Kabupaten Kediri. Berkaitan dengan penelitian ini tentang pengembangan bisnis komoditas lokal dan pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan masyarakat, maka perlu ditelaah dan diklasifikasi komoditas yang diproduksi dan dipasarkan oleh objek penelitian. Objek penelitian ini mengambil di daerah Kediri, yang tepatnya di wilayah desa Puncu yang terdapat di kaki gunung Kelud, Kabupaten Kediri. Daerah tersebut mampu menghasilkan kopi dan cabai dengan jumlah yang cukup besar. Puncu memang merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Kelud yang memiliki karakteristik demografi penduduknya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan penduduk pedesaan yang pendidikannya masih maksimal di tingkat Sekolah Menengah, mayoritas mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun, generasi mudanya tidak terlalu berhasrat untuk mengejar pendidikan dan lebih mengutamakan pekerjaan. Hal tersebutlah yang meskipun Puncu dianugerahi kekayaan alam dan potensi komoditas lokal yang luar biasa kuantitas dan kualitas, kurang mampu termanfaatkan, sehingga kualitas kehidupan mereka dalam hal ekonomi, kesehatan dan pendidikan masih belum memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Puncu memiliki potensi alam yang dapat menjadi komoditas unggulan serta mendatangkan manfaat ekonomis bagi mereka, setidaknya ada cabai keriting, kopi, alpukat, serta air bersih yang layak untuk dikemas menjadi air mineral dalam kemasan (AMDK). Berdasarkan hasil perkebunan di Jawa Timur tahun 2016, hasil kopi

merupakan komoditas ‘bukan favorit’, terbukti pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kopi hanya sebesar 63.635 ton (Jawa Timur dalam Angka, BPS, 2017). Serta guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Puncu yang distimulan dan diawali dari kualitas perekonomiannya, perlu ada suatu model yang komposisinya berisi tentang identifikasi, pendayagunaan, evaluasi dan pengawasan serta penangan yang berkelanjutan. Hal tersebut dinilai layak dilakukan mengingat adanya dukungan dari Birokrat setempat dalam menyusun ide pendayagunaan namun juga adanya antusiasme dan keterlibatan masyarakat desa Puncu yang sangat supportif dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pendayagunaan.

Oleh karena itu berdasarkan ulasan latar belakang yang disampaikan dibagian sebelumnya maka, sangat menarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat lokal sehingga mereka dapat mendapat nilai tambah atas pemberdayaan tersebut. Sehingga topik penelitian ini relevan diberi judul Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis *Community Development*: Studi di Desa Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Bersesuaian dengan latar belakang masalah yang diuraikan di latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis pengembangan komunitas (*community developemnt*) di desa Puncu, Kabupaten Kediri?; dan
2. Bagaimana implikasi dari adanya model pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis pengembangan komunitas (*community developemnt*) di desa Puncu, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Studi

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan disusunnya model pemberdayaan ekonomi berlanjutan berbasis pengembangan komunitas (*community developemnt*; dan
2. Memberikan ulasan dan kajian yang berkenaan dengan implikasi dari adanya model pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis pengembangan komunitas (*community developemnt*) pula.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Pemaparan yang diulas pada bagian sub-bab bahan dan metode meliputi dua hal yaitu bahan yang meliputi kajian teoritis dan empris, serta metode penelitian yang meliputi pendekatan peelitian, sumber dan jenis data, teknik analisis, teknik interpretasi data, serta waktu pelaksanaan penelitian.

A. Bahan

Bahan yang dimaksud adalah studi teoritis dan studi empiris. Studi teoritis yaitu literatur yang dipakai dan memiliki relevansi dengan studi, sedangkan studi empiris adalah temuan yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Baik studi teoritis dan studi empiris akan diuraikan sebagaimana sub-bab berikut ini.

1. Studi Teoritis

Studi teoritis menjelaskan mengenai teori dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema dan konsep penelitian yang sedang diteliti. Teori tersebut terdiri dari teori pemberdayaan, SDG's, dan pembiayaan bisnis.

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan istilah yang familiar dalam hal perekonomian riil. pemberdayaan masyarakat telah diulas oleh Payne dalam Mustangin, bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberi *support* meraih dan mendapatkan kekuatan untuk beranjak produktif dan berdaya baik secara sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu Makna pemberdayaan dipandang

sebagai upaya untuk memampukan individu atau komunitas (Mustanngin, et.al., 2017). Tujuan adanya pemberdayaan tersebut adalah membentuk kemandirian pada diri masyarakat secara fisik dan mental. Pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai kekuatan atau kemampuan untuk berusaha, dan adapula yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang berkenaan dengan kekuasaan (*power*).

b. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Kemiskinan merupakan permasalahan dunia yang dialami oleh setiap negara. Dunia awalnya menanggapi akan hal tersebut dengan deklarasi *The Millenium Development Goals* (MDG's). Namun era tersebut sudah berakhir dan berubahlah menjadi *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang memiliki 17 tujuan (*goal*) (Ishartono, 2015). Adanya 17 tujuan yang diikuti oleh 169 sasaran yang mampu menutupi sebagian kekurangan yang masih terdapat pada MDG's (Hardiana, 2018).

c. Bisnis

Bisnis adalah istilah yang menjelaskan segala macam aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah untuk segala kebutuhan. Secara umum bisnis dapat diartikan sebagai, "kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan (Muslich, 2004: 46)"

2. Studi Empiris

Studi empiris ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai memiliki keterkaitan dan mampu mendukung objektivitas penelitian dalam 5 (lima) tahun terakhir.

- a. Taiwo Olabisi tahun 2015, dalam jurnalnya yang berjudul "*Effect of Cooperative Membership on the Economic Empowerment of Women in Osun State of Nigeria*" menghasilkan bahwa penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel ekonomi (pemberdayaan) adalah faktor penentu untuk keanggotaan mereka dalam berkoperasi.
- b. Mustangin tahun 2018, pada tulisannya yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagi Komunitas Petani di Daerah Cepogo" menghasilkan temuan yaitu terdapat proses pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya adalah masyarakat didorong berupaya untuk lebih mudah mengakses permodalan. Adanya Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Tekun berdampak pada terjaganya tradisi transparansi dan semangat kekeluargaan diantara para anggota yang justru menjadi wadah pemberdayaan masyarakat lokal setempat.
- c. Henriksen Anna tahun 2017, yang meneliti fokus pada pemberdayaan perempuan menghasilkan temuan bahwa kebutuhan mendesak untuk menyelidiki mengapa kelemahan tetap ada meskipun ada pengakuan di seluruh sektor tentang pentingnya dan relevansi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Kelemahan ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola perencanaan serta pengevaluasian kegiatan, dan kurangnya sumber daya serta pelaporan hasil yang tidak memenuhi standar keuangan minimal.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif. Sub-bab yang berkenaan dengan penjelasan lebih rinci berturut-turut adalah mengenai pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik validasi data.

1. Pendekatan Penelitian;

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewajibkan peneliti terlibat secara langsung dalam proses penelitian. Strategi yang digunakan pada

penelitian kualitatif kali ini menyesuaikan kebutuhan data dan *substance* penelitian, yang dalam hal ini adalah studi lapangan (*field study*) yang disertai dengan analisis eksplanatoris. Robert Yin (2000:18) menjelaskan bahwa pengertian penelitian studi kasus adalah sebuah metoda penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata

2. Ruang Lingkup Penelitian;

Ruang lingkup penelitian ini adalah area yang mencakup seluruh aktivitas bisnis dan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat Desa Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Proses bisnis lokal yang memiliki tujuan untuk menghidupi perekonomian lokal terutama masyarakat pedesaan, akan diamati dari segi model permodalan, model pengawasan, model pendampingan, dan model pemasaran. Tentunya semua model tersebut memiliki irisan pada pembahasan tentang model pembiayaan untuk pengembangan nilai ekonomis komoditas lokal.

3. Jenis dan Sumber Data;

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh pihak yang menerbitkannya, sedangkan data sekunder adalah data yang dimunculkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya (Dajan, 1991:19). Data primer berasal dari wawancara dengan ahli, akademisi dan pelaku bisnis lokal dari pengelola koperasi dan warga petani kopi di desa Puncu, Kabupaten Kediri. Mereka yang terutama mengetahui dan menjalankan kegiatan bisnis yang berafiliasi dengan koperasi dalam hal pembiayaan, observasi partisipatif, dan *focus group discussion* (FGD) serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan koperasi. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan bisnis komoditas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan pada studi ini terdiri atas beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara bertahap dengan partisipatif. Artinya bertahap adalah peneliti perlu melakukan kunjungan lapangan dengan frekuensi lebih dari sekali untuk mengamati kondisi bisnis dan kondisi pendukung lainnya. Sedangkan observasi partisipatif adalah, peneliti melakukan observasi lapangan tidak sendirian tetapi melibatkan masyarakat setempat guna mendapatkan data berupa gambaran kebiasaan, linguistik, dan progres usaha bisnis.

b. Wawancara

Teknik selanjutnya yang harus dilakukan adalah kegiatan diskusi dan wawancara terhadap beberapa informan yang memiliki latar belakang berbeda. Informan tersebut terdiri dari beberapa unsur, dimana mereka masing-masing berlatar belakang seorang pelaku bisnis (praktisi), *supervisor* yaitu delegasi lembaga yang mendampingi masyarakat lokal, akademisi dan sisanya adalah masyarakat lokal yang juga merupakan pelaku bisnis (Sumanto, 2018: 33).

c. Focus group discussion (FGD)

Peneliti perlu melakukan *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang semua informan, baik dari para ahli/akademisi dan pada praktisi (pelaku bisnis), yang bertujuan untuk mengetahui kevalidan dan keakurasian data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing informan. Tahapan selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis pula data yang diperoleh dari proses dokumentasi seperti foto, rekaman audio, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan proses kegiatan bisnis dan pembiayaannya. Hasil wawancara dan pengamatan tersebut nantinya akan didokumentasikan dengan transkrip dan rekaman audio yang kemudian disarikan ulang dalam bentuk kajian analisis.

5. Teknik Analisis Data; dan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, hal tersebut perlu dilakukan karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola pelaksanaan bisnis komoditas dan pemberdayaan yang dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat desa Puncu, Kediri. Kemudian dari deskripsi tersebut, diklarifikasikan pula dengan teori serta prinsip bisnis dan pembiayaan. Teknik analisis data dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian. Bermula penganalisisan data diawali dengan analisis data secara umum, kemudian dilanjutkan dengan lebih mempertajam analisis data sehingga diperoleh analisis yang lebih mengerucut dan efektif. Tahap selanjutnya adalah memeriksa kembali kebenaran data dengan FGD dengan masyarakat setempat, kemudian dianalisis untuk menemukan makna dari data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan, tujuan penelitian, bahan dan metode penelitian, maka diperoleh hasil penelitian yang dibahas sesuai pendekatan teknik analisis yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Setidaknya dari hasil penggalan data di lapangan, proses reduksi data, dan FGD, dapat diperoleh hasil dan diklasifikasi menjadi beberapa poin yang kemudian dari poin-poin tersebut akan disusun menjadi sebuah model.

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil temuan dan olah data, yang dibagi pula menjadi 3 (tiga) fase, yaitu fase identifikasi, fase konstruksi, dan fase aktualisasi serta evaluasi. Berikut penjelasan dan analisis dari klasifikasi dari ke-tiga fase tersebut, dan dielaborasi dengan seluruh teori dan bahan yang diperoleh dari lapangan.

a. Fase Identifikasi

Fase identifikasi ini memulai rangkaian fase pada model pemberdayaan. Pemetaan masalah yang terjadi di lapangan mendapati hasil bahwa terdapat komoditas kurang produktif, seperti hasil kebun, kopi, cabai, dan air bersih. Pada permasalahan ekonomi lokal yang terdapat komoditas unggulan, perlu adanya penataan dalam hal produksi, pengemasan, pemasaran dan penjualan. Komoditas dikatakan unggulan karena fase panen stabil, ketersediaan air melimpah dengan pH normal, dan kesuburan tanah yang mendukung.

Ada temuan menarik di lapangan bahwa, ada penduduk singgahan yang berasal dari Jombang yang berprofesi sebagai pedagang sayuran di pasar, sengaja berkunjung ke desa tersebut untuk menyewa sepetak lahan untuk ditanami cabe dan tomat. Tanaman tersebut memang memiliki tingkat *demand* yang tinggi di pasaran. Harga yang stabil, *demand* yang tinggi, dan sedikit pula kompetitornya adalah beberapa kondisi yang menjadi poin lebih untuk menyewa lahan desa, notabene adalah lahan yang berada di dataran tinggi (2000 mdpl). Nilai ekonomis dari tanam cabe dan tomat yang diperoleh ternyata juga cukup besar.

b. Fase Konstruksi

Pada fase konstruksi, dijelaskan beberapa alur kinerja diantara beberapa *stakeholder* mulai dari akademisi, birokrat setempat, dan masyarakat setempat tentunya. Ada lembaga sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam mengembangkan potensi lokal, adalah sebuah lembaga amal zakat (LAZ) yang kemudian bertugas untuk membantu dalam men-*support* masyarakat lokal dalam pemberian *skill* tambahan. Bantuan tersebut misalnya memberikan pelatihan *roasting* kopi, menggiling, mengemas sampai dengan memasarkan kopi. Pelatihan dan pemberian *skill* tersebut dilakukan sampai pada target akhir yaitu sampai masyarakat lokal (petani) mengelola olahan secara mandiri. Masyarakat setempat akan diberi pelatihan *roasting*, mencampur dan mengklasifikasikan level produk, serta sistem pencatatan keuangan yang sederhana, pelatihan tersebut disampaikan baik secara teori maupun prakteknya dengan masa pembelajaran, pemahaman hingga dinilai layak adalah selama 1 bulan. *Output* dari pelatihan ini

adalah masyarakat mampu melakukannya sendiri, dan tak lupa perlu adanya *money* untuk mengetahui perkembangan serta kemajuan *skill* yang mereka peroleh.

Stakeholder tersebut bersinergi untuk menjadi tim perumus dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa puncu yang berbasis pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas ini perlu ditindaklanjuti karena pada fase identifikasi yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, telah diperoleh hasil bahwa terdapat persoalan mengenai produksi, pengemasan produk, pemasaran, dan penjualan produk.

Pengembangan bisnis tersebut diiringi dengan pendirian lembaga pembiayaan berupa koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Berdirinya KSPPS tersebut jelas membantu interaksi ekonomi masyarakat desa, karena selain mereka dapat mengajukan pembiayaan dan menabung yang dapat menghasilkan pendapatan, bagi KSPPS juga mendapatkan rekapitalisasi untuk meningkatkan modal mereka yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK).

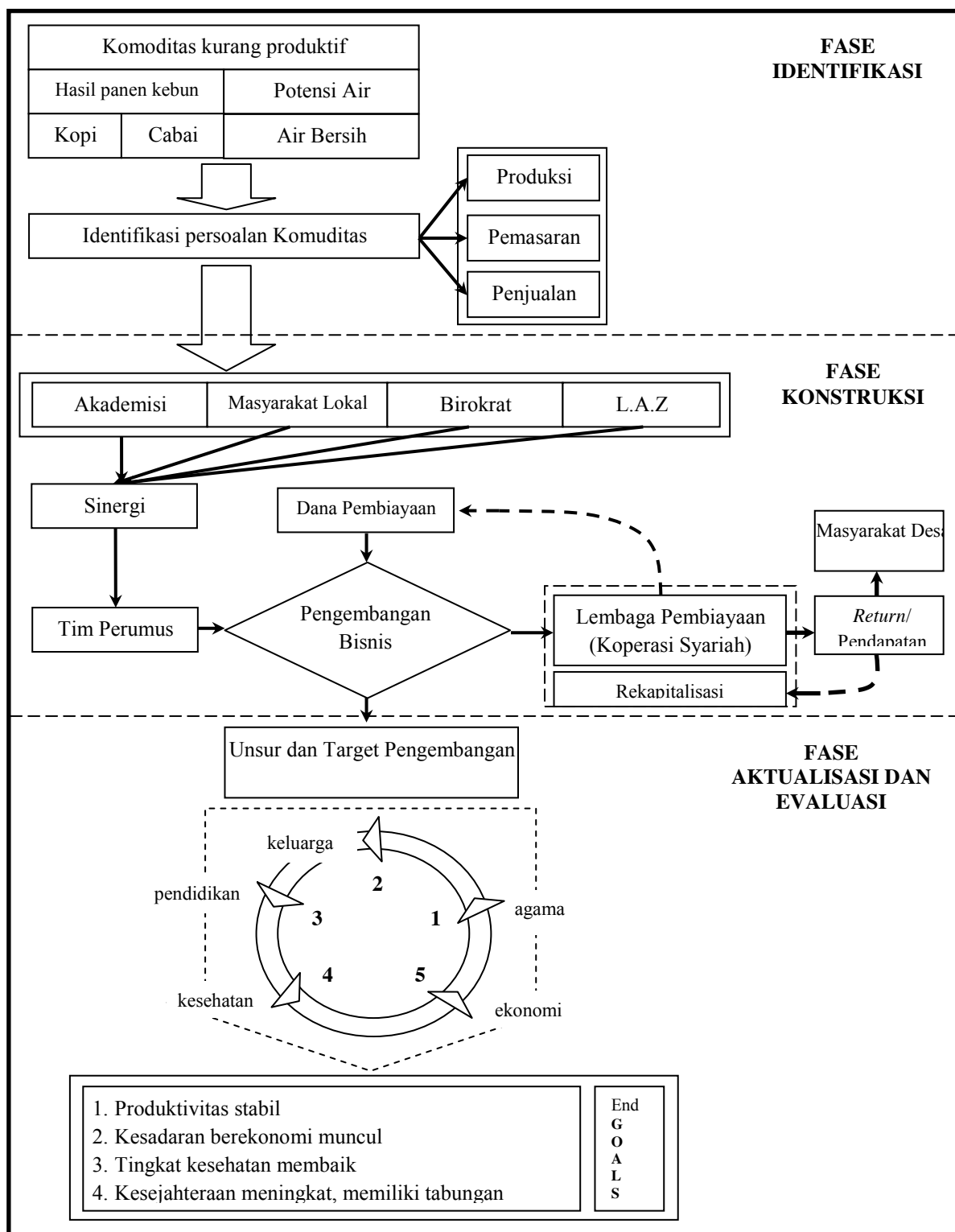
c. Fase Aktualisasi dan Evaluasi

Pada fase terakhir yaitu fase aktualisasi dan evaluasi, terdapat upaya pemastian untuk masyarakat mendapat nilai tambah dalam 5 hal perlindungan, seperti perlindungan agama, perlindungan keluarga, pemastian pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan, ekonomi yang cukup. Rangkaian pencapaian itu setidaknya dapat diraih setelah lembaga keuangan berupa KSPPS mulai beroperasi. Hal ini diperlukan dukungan dan sinergi dari beberapa unsur yaitu mulai dari masyarakat lokal tentunya, Badan Pengurus Desa, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setempat, dan dari kalangan akademisi.

Fungsi koordinatif yang dijalin antar lembaga, instansi dan masyarakat lokal tersebut dapat terus berlanjut dan dapat menghasilkan kemanfaatan yang jauh lebih besar baik dalam bidang yang sama maupun bidang lainnya. Atas ulasan tersebut, maka dapat dinilai bahwa UKM yang menjadi inkubator bisnis membutuhkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan jaringan pemasaran dan akses ke lembaga keuangan, yang ditambahkan pula edukasi tentang berekonomi yang adil dan transparan sebagaimana ilmu yang dijalankan pada lembaga keuangan berupa KSPPS.

Harapannya setelah adanya fase identifikasi, fase konstruksi, dan fase aktualisasi serta evaluasi akan diperoleh hasil maksimal, yang dijelaskan dengan parameter yaitu, produktivitas stabil, kesadaran berekonomi mulai tumbuh, tingkat kesehatan dan sanitasi lebih baik, dan kesejahteraan ekonomi pun membaik pula. Atas penjelasan tersebut dapat disusun sebuah model sebagaimana gambar di bawah.

Bersesuaian dengan gambar 1 tentang model pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang berbasis pada pengembangan komunitas di desa Puncu, kabupaten Kediri, dibagi menjadi tiga fase yakni fase identifikasi, fase konstruksi, dan fase aktualisasi dan evaluasi. Penjelasan selengkapnya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, namun setidaknya dapat diulas dan diperdalam mengenai implikasi dari adanya model tersebut.



Gambar 1.
Model Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Komunitas (*Community Developemnt*) di Desa Puncu, Kabupaten Kediri

Hingga dilakukannya penelitian dan penyusunan makalah penelitian ini, setidaknya nilai tambah yang sudah nampak sudah dapat diamati dan dirasakan baik oleh masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya. Adanya pola pemanfaatan komoditas lokal yang dilakukan oleh masyarakat setempat dapat terus berkelanjutan (*sustainable*) dapat muncul bukan hanya dari program yang terencana dan terukur dari pemerintah daerah setempat, namun harus ada inisiasi dan interaksi dukungan dari masyarakat setempat tentunya dengan bantuan dari banyak pihak ketiga.

Pemberdayaan masyarakat seperti itu akan terus berjalan dan memberikan nilai tambah serta manfaat untuk semua apabila terus terjadi sinergi antar pihak dan saling dukung. Karena dalam program Nawa Bhakti yang dicanangkan Provinsi Jawa Timur telah mengendepankan pembangunan dan masyarakat desa agar terus berdaya, dengan berdaya maka tingkat kemiskinan dan ketertinggalan pendidikan dapat berkurang secara bertahap, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam arti sebenarnya dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada pendahuluan, bahan dan metode penelitian yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan dan saran. Berikut ulasan selengkapnya

1. Kesimpulan

- a. Model pembiayaan untuk mengembangkan bisnis komoditas lokal Jawa Timur tidak hanya terletak pada mengembangkan material semata, tetapi harus menempatkan manusia sebagai subjek dan objek utamanya untuk terlibat dalam proses pengembangan bisnisnya. Sehingga setiap fase model sebagaimana yang dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat berjalan secara efektif dan juga efisien, tentunya dengan harapan dan target masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas hidup, mulai dari aspek ekonomi, keluarga, kesehatan, pendidikan hingga aspek ibadahnya.
- b. Adapun implikasi dari adanya model pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis pengembangan komunitas adalah dapat diamatinya penambahan nilai tambah yang ada pada masyarakat lokal desa Puncu yang ditunjukkan dengan indikator yang terdiri dari peningkatan kualitas pada perlindungan agama, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Upaya ini yang melibatkan banyak *stakeholders*, serta inisiasi, komitmen dan peran banyak pihak pula diharapkan menjadi unsur pendukung dalam mewujudkan desa Puncu menjadi desa mandiri yang berdaya.

2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah adanya kerjasama dengan mitra yang bersedia memberikan bantuan akses permodalan dan pemasaran. Selain itu pemerintah daerah diminta untuk lebih aktif dalam menjalin *networking* dengan mitra yang terdiri dari akademisi, LAZ, dan *stakeholders* lainnya. Diharapkan pula dengan adanya edukasi atau upaya pemahaman tentang produk lembaga keuangan untuk masyarakat lokal di desa Puncu, Kedisi akan mampu menunjang bisnis sehingga mampu berkembang yang akhirnya kualitas perekonomian mereka semakin meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan setinggi-tingginya kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dalam bentuk kemudahan, kelancaran, kepercayaan diri, dan semangat yang ulet dalam mengerjakan laporan ilmiah ini mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir yang tuntas. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw beserta para sahabat dan kerabat beliau.

Paper ini merupakan hasil karya berkelompok, yang bertujuan untuk memperoleh ulasan dan gambaran mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis pengembangan komunitas

(*community development*) dengan objek desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat dan berperan atas terselesaikannya *paper* ini, adalah:

1. Rekan menulis yaitu Akmalur Rijal, M,SEI dan Habibah Awwaliah, yang telah mendukung dalam menuntaskan penelitian secara bersama.
2. Lembaga Penelitian Ekonomi Islam (LPEI) FEB UNAIR dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar Surabaya, yang telah melibatkan kami dalam proses diskusi dan penelitian dari awal hingga selesai.
3. Civitas akademika FEBI UIN Sunan Ampel atas dukungan baik secara administratif dan materi demi terlaksananya penelitian hingga selesai.
4. Seluruh pihak lainnya yang mengetahui dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung pada proses penyelesaian *paper* ini.

Penyusunan *paper* ini tentunya layaknya peribahasa '*tak ada gading yang tak retak*', *paper* masih memiliki kesalahan. Oleh karena itu maka kami berharap koreksi baik saran maupun masukan yang membangun, dari para pembaca yang mempelajari dan memperoleh manfaat dari *paper* ini, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan demi sempurnanya *paper* penelitian di periode selanjutnya.

Demikian dengan adanya *paper* ini, kami berharap dapat membantu memperkaya khazanah ilmu dan wawasan praktek ekonomi bagi sesama, masyarakat dan semua pihak yang berkaitan dengan studi ini. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Dajan, Anto. 1991. *Pengantar Metode Statistik*. Jilid I. Jakarta: LP3ES

Henriksen, Anna. 2017. *A Study of Methodological Barries and Challenges to Enhancing Orgaizational Learning from Women's Empowerment and Gender Equality Interventions*. Learning with Purpose from Empowerment. Division of Risk Management anf Societal Safety. Faculty Engineering. Lund University, Sweden

Hardiana, Diah Rizki H., 2018. *Implementasi Sustainable Developemnt Goals (SDGs) dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Jakarta*. Research Gate

Ishartono., Raharjo, Santoso Tri.2015. *Sustainable Development Goals (SDG's) dan Pengetahuan Kemiskinan*.

Muslich, 2010. *Etika Bisnis Islam*: Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII

Mustangin, et.al. 2017. *Hasil Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Daerah Cepogo*. Social Work Journal. Vol.8, No.1, page:46-54. ISSN: 2339-0042 (p), ISSN: 2528-1577 (e)

_____, et.al. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*. Socio Global: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Departement of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjajaran.

_____, et.al. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagi Komunitas Petani di Daerah Cepogo*. International Journal of Community Service Learning. Vol.2/No.2, 2018, pp.77-83

Nikkhah, Hedayat Allah. Redzuan, Ma'rof. 2009. *Participation as a Medium of Empowerment in Community Development* . Euepan Journal of Social Sciences – Volume 11, No.1 2009

- Olabisi, Taiwo Abdulahi. *et.al.* 2015. *Effect of Cooperative Membership on the Economic Empowerment of Women in Osun State of Nigeria* .International Journal of Business and Economic Research 2015: 4(2):21-29. ISSN: 2328-7543 (*print*), ISSN:2328-756X
- Sulaiman, Adhi Iman.*et.al.* 2016. *Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren Sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Volume 3 – Nomor 2, November 2016
- Sumanto, Agus, 2018. *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah* . Dissertation of Islamic Economic Doctoral Program Universitas Airlangga, *unpublished*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 sebagai revisi Undang-undag No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah
- Yin, Robert K. 2000. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Informan interviews with local businessman, policy maker, bureaucrats, and academics



STRATEGI MENGUATKAN PELAKU USAHA TEMPE MELALUI INOVASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI DI DESA TEMBARAK KERTOSONO NGANJUK

STRATEGY TO STRENGTHEN TEMPE BUSINESS ACTIVITIES THROUGH INNOVATION AS AN ECONOMIC IMPROVEMENT EFFORTS IN VILLAGE OF TEMBARAK KERTOSONO NGANJUK

Wiwik Maryati

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)
Kompleks Ponpes Darul Ulum Peterongan Jombang Tromos Pos 10

wiwikmaryati75@gmail.com

wiwikmaryati@fia.unipdu.ac.id

ABSTRAK

Potensi unggulan desa Tembarak adalah tempe, sehingga masyarakat desa tersebut juga mengoptimalkan tempe sebagai peluang mengais rejeki. Namun demikian para pelaku usaha tempe di desa tersebut belum melakukan inovasi dalam kegiatan bisnisnya. Ini dapat dilihat dari produk tempe yang dibuat hanya sebatas pada pengolahan bahan baku tempe yaitu kedele menjadi tempe dan kripik tempe dengan rasa original saja. Selain itu produk tempe tersebut hanya dipasarkan secara sederhana yaitu diambil oleh penjual untuk dijual di pasar maupun dititipkan ke toko/warung. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kemasan yang dibuat juga masih sederhana tanpa pelabelan maupun desain kemasan yang sedemikian rupa. Tentu saja ini menjadikan sempitnya peluang memasarkan produk dan meraih pasar sasaran yang luas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana inovasi mampu menguatkan pelaku usaha tempe di desa Tembarak Kertosono yang berdampak pada peningkatan ekonomi desa. Metode kajian menggunakan *action research* dengan teknik analisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi berupa *improve* varian rasa dan kemasan produk yang dipilih sebagai bentuk tindakan (*action*) untuk menjajaki pasar sasaran terbukti mendapat respon antusias dari masyarakat yang terlihat dari peningkatan hasil penjualan. Meningkatnya hasil penjualan berdampak pada peningkatan ekonomi desa. *Action research* yang sudah dikaji tersebut perlu ditindak lanjuti pada rutinitas selanjutnya.

Kata kunci: inovasi, pelaku usaha tempe, peningkatan ekonomi, desa Tembarak

ABSTRACT

The superior potential of Tembarak village is tempe, so the villagers optimize tempe as an opportunity to earn fortune. However, the businessmen of tempe in the village not innovating. This can be seen from the tempe products which are made only to the processing of raw materials into tempe and tempe chips with original flavors. In addition, the tempe product is only marketed simply, taken to be sold in the market or entrusted to shops/ stalls. The packaging made also still simple without labeling in such a way. Of course this makes the opportunity to market products narrow and gain broad market share. This article aims to examine the extent innovation is able to strengthen the businessmen of tempe which impact on improving the economy village. The study method uses action research with descriptive analysis techniques. The results indicate that innovations in the form of improving variants of taste and product packaging were chosen as a form of action to explore the market share proved to have received an enthusiastic response from the public as seen from the increase in sales results. Increasing sales results have an impact on improving the village economy. Action research that has been studied needs to be followed up in the next routine

Keywords: innovation, tempe business actors, economic improvement, Tembarak village

PENDAHULUAN

Sudah tidak asing lagi era kompetitif saat ini menuntut sebuah keunggulan bagi sebuah produk agar mempunyai *added value*. Inovasi merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan kompetitif tersebut. Hal ini didasari pertimbangan bahwa mengelola inovasi akan dapat meningkatkan kinerja pemasaran (Taghizadeh dan Syed, 2013) maupun kinerja perusahaan (Rosli dan Syamsuriana, 2013)

yang pada akhirnya hasil dari peningkatan kinerja tersebut akan berdampak pada peningkatan kompetitif (Tamayo dkk, 2014). Oleh karena itu inovasi penting dilakukan oleh semua pelaku usaha baik di tingkat mikro sampai tingkat makro karena terbukti usaha dari para pelaku usaha tersebut telah memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam artikel Joewono (2011) bahwa peran dari pelaku usaha dalam aktivitas kewirausahaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sudah banyak pelaku usaha yang melakukan inovasi untuk pertumbuhan bisnisnya. Namun masih ada juga pelaku usaha yang belum paham dan menggunakan inovasi dalam kegiatan bisnisnya, termasuk pelaku usaha di desa Tembarak. Akibatnya dari volume penjualan maupun profitabilitas yang dialami pelaku usaha tempe di desa tersebut hasilnya biasa saja padahal ada potensi hasil tersebut dapat meningkat. Hal ini ditunjukkan dari ketika melakukan survey awal untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha tempe di desa tersebut. Data menunjukkan bahwa dari 15 pelaku usaha tempe di desa Tembarak, hanya 2 pelaku usaha tempe yang dinilai usahanya besar karena *resellernya* lebih banyak sehingga pasar sasarannya lebih luas. Untuk 13 pelaku usaha tempe lainnya pasar sasarannya hanya dijual sendiri di pasar setempat saja. Sedangkan untuk volume penjualan dan profitabilitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha tempe di desa ini rata-rata per harinya memproduksi kripik tempe dengan rasa original saja minimal 100 bungkus dengan berat 250 gram dan harga per bungkusnya Rp. 3.000,- Namun kemasan yang lebih kecil juga dibuat yang biasanya dijual ke pasar dengan harga Rp.400,-. Data Volume penjualan dan profitabilitas disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rata-Rata Volume Penjualan dan Profitabilitas Pelaku Usaha Tempe Desa Tembarak

Uraian	Dalam hari
Modal/unit (100 bungkus)	300.000
Harga jual/100 bungkus	
Laba/100 bungkus	400.000
	100.000

Sumber: Data hasil wawancara dengan pelaku usaha tempe, 2018

Berdasarkan data tabel 1 di atas dimana profit yang didapat tidak begitu tinggi nilainya, maka penting sekali untuk melakukan inovasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibidunni, Oluwole dan Ayodahun (2014) bahwa inovasi produk dapat dijadikan sebagai strategi untuk meningkatkan keberlangsungan usaha kecil menengah (UKM). Inovasi produk juga dapat mengubah minat konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Oleh karena itu inovasi produk adalah kebutuhan bagi pelaku usaha untuk memenuhi permintaan konsumen.

Desa Tembarak merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kertosono dimana salah satu potensi unggulan desa tersebut adalah tempe. Namun demikian tak banyak dari masyarakat setempat yang belum mengoptimalkan pemanfaatan tempe ini sebagai produk yang dapat dikompetitifkan. Beberapa pelaku usaha di desa tembarak ini masih memanfaatkan tempe hanya sebatas pada pengolahan bahan baku tempe yaitu kedele menjadi tempe dan pembuatan kripik tempe. Tempe mentah maupun kripik tempe yang diproduksi selama ini hanya dipasarkan pada secara sederhana dengan diambil oleh beberapa penjual untuk ditawarkan di pasar maupun dititipkan pada toko warung. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kemasan yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut juga masih sederhana dengan membungkusnya dengan plastik saja tanpa pelabelan maupun desain kemasan yang sedemikian rupa. Tentu saja ini menjadikan sempitnya peluang memasarkan produk.

Melihat fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana inovasi mampu menguatkan pelaku usaha tempe di desa Tembarak Kertosono yang berdampak pada peningkatan ekonomi desa. Dalam hal ini kajian inovasi difokuskan pada inovasi produk. Inovasi produk dapat didefinisikan sebagai penciptaan produk baru dari material baru (produk baru total) atau membuat produk untuk memenuhi kepuasan *customer* (memperbaiki produk yang sudah ada) (Langley Pals, N. & Ort, J. R., 2005). Inovasi produk juga mengacu pada pengenalan produk dan layanan baru untuk menciptakan pasar dan *customer* baru atau kepuasan pasar dan *customer* yang sudah ada (Wang and Ahmed, 2004; Wan D., Ong, C. H. & Lee, F., 2005). Inovasi produk ini terkait dengan beberapa hal yaitu: memperkenalkan produk baru, variasi produk, teknologi baru pada produk, perbedaan/ diferensiasi produk, (Rosli dan Syamsuriana, 2013). Inovasi produk juga terkait dengan kualitas produk, desain produk, ukuran produk, product line (Scholastica dan Maurice, 2013).

Inovasi produk yang dikaji di sini mulai dari pengadaan produk yang diinovasi sampai melakukan upaya pengenalan pada pasar dalam bentuk penjualan. Adapun produk yang diinovasi berupa varian rasa dan kemasan. Ini dilakukan karena varian yang ada selama ini dari kripik tempe yang dibuat oleh pelaku usaha di sana masih sebatas pada rasa original. Dengan mengembangkan varian dengan berbagai rasa yaitu balado, keju dan pedas manis diharapkan dapat memberikan keunggulan produk sehingga dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Demikian juga dengan inovasi kemasan, dilakukan dengan meningkatkan kemasan yang sudah ada mulai dari pembungkus plastik sampai labeling yang dapat meningkatkan nilai promosi.

Baik varian rasa maupun desain kemasan produk merupakan salah satu komponen dari aktivitas pemasaran yang dapat digunakan untuk menunjang kinerja pemasaran. Sebagaimana dikatakan oleh Kotler dan K.L. Keller (2016: 48) bahwa aktivitas pemasaran meliputi produk, harga, promosi dan saluran distribusi (*place*) atau 4P yang disebut dengan *marketing mix*. Pemasaran holistik direfleksikan dengan keberadaan *marketing mix* (4P) tersebut. Inilah yang dapat menentukan keberhasilan aktivitas pemasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa Tembarak kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk. Umumnya inovasi dipahami sebagai pengenalan kepada sesuatu yang baru. Pendapat lain mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan dilanjutkan eksploitasi (Wibowo, 2016:555). Secara lengkap Harvard Business essentials (dalam Wibowo, 2016:555) memberikan pengertian bahwa inovasi adalah perwujudan, kombinasi atau sintesis dari pengetahuan tentang produk, proses, atau pelayanan baru yang original, relevan dan dihargai. Sebagaimana pemahaman di atas bahwa inovasi terkait dengan perubahan, maka metode kajian yang dilakukan di sini menggunakan *action research*. *Action research* adalah metode yang digunakan untuk melakukan perubahan dalam pengembangan organisasi (Wibowo, 2016:425). Dalam *action research* ini peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kurt Lewin (dalam Sulaksana, 2004) bahwa *action research* merupakan penelitian pemecahan masalah dimana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan *client* dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dari mulai bulan Juli sampai dengan Nopember 2018. Adapun pelaksanaan *action research* selama 4 bulan tersebut meliputi kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Kegiatan *Action Research* pada Pelaku Usaha Tempe di desa Tembarak

Kegiatan	Bulan Ke-			
	1	2	3	4
Identifikasi masalah pada pelaku usaha tempe				
Sosialisasi pada perangkat desa melalui rembug desa				
Merencanakan jenis dan biaya inovasi				
Pelaksanaan (pembuatan keripik tempe varian rasa dan kemasan)				
Uji coba pemasaran produk inovasi melalui bazar pasar rakyat				
Evaluasi kegiatan				
Rencana tindak lanjut				

Dalam metode *action research* ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu melakukan survey dan keterlibatan partisipatif dengan sasaran yaitu pelaku usaha tempe. Dalam hal ini survey dilakukan dengan melakukan observasi pada awal pelaksanaan yang bertujuan pemetaan masalah yang terjadi pada pelaku usaha keripik tempe di desa Tembarak. Sedangkan keterlibatan partisipatif dilakukan dengan ikut mengobservasi dan terlibat langsung pada pembuatan produk inovasi sampai dengan keterlibatan dalam kegiatan pemasaran produk yang sudah diinovasi.

Action research ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan survey pemetaan pelaku usaha dan masalahnya yang ada di desa Tembarak.
2. Merumuskan masalah hasil pemetaan.
3. Merencanakan tindakan (*action*) sebagai solusi masalah yang dihadapi.
4. Pelaksanaan tindakan berupa pembuatan produk inovasi baik inovasi varian maupun kemasan produk.
5. Pelaksanaan tindakan berupa aktivitas pemasaran produk inovasi sebagai uji coba untuk mengetahui respon konsumen.
6. Menganalisis hasil tindakan.
7. Evaluasi tindakan.

Dengan 7 langkah yang dilakukan dalam metode *action research* ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara maupun studi literatur. Sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tembarak merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di kecamatan Kertosono. Kertosono sendiri terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan. 13 desa yang ada di kecamatan Kertosono tersebut yaitu Bangsri, Drenges, Kalianyar, Kepuh Kudu, Kutorejo, Lambangkuning, Nglawak, Pandantoyo, Pelem, Tanjung, Tembarak dan Yuwono. Sedangkan 1 kelurahan yaitu Banaran. Berdasarkan hasil survey pemetaan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di desa Tembarak, penduduk desa Tembarak mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dengan jumlah 15 RW, Tembarak merupakan desa yang cukup padat dengan jumlah penduduk kurang lebih 5000 jiwa.

Produk tempe merupakan potensi hasil olahan pertanian yang dimiliki oleh desa Tembarak, sehingga ini menjadikan potensi juga bagi perkembangan sektor perekonomian. Hasil pendataan terdapat hampir 15 pelaku usaha tempe yang ada di desa tersebut, sehingga dapat dikatakan desa Tembarak sebagai salah satu desa kawasan sentra industri tempe. Namun dari sekian jumlah pelaku

usaha tempe hanya 2 usahawan yang dinilai lebih unggul pasar sasarannya, sehingga pada *action research* kali ini hanya mengambil sampel program inovasi pada pelaku usaha tersebut. Adapun jenis inovasi yang dikembangkan adalah bauran produk dengan membuat varian rasa dan kemasan. Inovasi tersebut dipilih karena selama ini hanya ada produk kripik tempe dengan 1 rasa saja yaitu original, begitupun dengan kemasan produk hanya berupa plastik tipis tanpa ada tulisan label yang menunjukkan identitas usaha. Dengan kemungkinan pangsa pasar yang bisa jadi terus meningkat, maka pilihan inovasi harus dilakukan agar konsumen semakin tertarik dengan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan data fokus yang didapatkan di atas, maka dilakukanlah analisis perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk menjalankan temuan survey. Pada kegiatan analisis perencanaan ditentukan beberapa varian rasa yang akan dikembangkan untuk melengkapi rasa original yang sudah ada. Begitu pula dengan rencana kemasan ditentukan jenis pembungkus plastik maupun desain labeling yang meliputi: pemilihan kata-kata yang lugas dan tepat, komposisi warna maupun bentuk tulisan. Untuk varian rasa ada 3 rasa selain rasa original yaitu: rasa balado, keju dan pedas manis. Sedangkan untuk kemasan yang dilakukan adalah :

1. Pembungkus bahannya dipilih plastik yang jenisnya agak tebal ada perekatnya sekalian sekalian sehingga pelaku usaha tidak perlu melakukan proses perekatan secara manual menggunakan lilin.
2. Pada labeling identitas usaha yang dituliskan berupa nama usaha dan produk, alamat dan kontak personnya, komposisi bahan, varian rasa, waktu kadaluwarsa, berat (netto) maupun pesan slogan.



Gambar 1
Hasil Inovasi Varian Rasa dan Kemasan

Nama Usaha	: Bapak Rudi
Nama Produk	: Kripik Tempe
Alamat	: Tembarak Kertosono Nganjuk Jawa Timur Indonesia
Kontak Person	: 085854705464
Komposisi bahan:	Kedelai, tapioka, dll
Varian rasa	: Original, balado, keju, pedas manis
Exp	: Tanggal, bulan, tahun
Netto	: 250 gram
Pesan slogan	: Renyah dan gurih

Pada kegiatan perencanaan ini juga sudah ditentukan harga jual yang akan ditawarkan ke pasar, yaitu 7.000,- rupiah. Harga tersebut ditentukan lebih mahal dari sebelum diinovasi. Hal ini dikarenakan biaya produksi sebagai modal awal saat dilakukan inovasi juga lebih mahal dari sebelum inovasi. Dengan berat (netto) yang sama modal awal sebelum inovasi sebesar Rp. 3.000,-/per bungkusnya

dengan harga jual Rp. 4.000,-/bungkusnya. Sedangkan harga setelah diinovasi modal awalnya Rp. 4.000,-/bungkusnya dijual Rp. 7.000,-/bungkusnya. Pada inovasi awal ini direncanakan membuat 50 bungkus/hari. Hal ini dilakukan mengingat perlunya menjajaki pasar terlebih dahulu apakah memang konsumen menerima atau tidak setelah produk diinovasi.

Pada pelaksanaan tindakan berupa aktivitas pemasaran produk hasil inovasi, produk dipasarkan melalui kegiatan bazar pasar rakyat. Kegiatan bazar ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh desa Tembarak setiap hari minggu. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat berkarya, berkreasi untuk menyalurkan idenya dalam membuat produk sebagai sumber penghasilan. Upaya ini dilakukan oleh desa dalam rangka penggiatan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu pada program desa ini hampir semua masyarakat terlibat berpartisipasi mendukung program tersebut. Berbagai produk dipasarkan di situ mulai dari makanan, minuman, pakaian maupun kerajinan tangan.

Kegiatan bazar pasar rakyat ini merupakan peluang untuk mencoba menjajaki pasar sasaran untuk mengukur respon masyarakat sampai sejauhmana terhadap produk inovasi tersebut. Dari hasil pemasaran tersebut ternyata produk terjual habis pada minggu pertama setelah inovasi dilakukan. Begitu pula pada minggu berikutnya, bahkan sampai ada pesanan pada hari-hari berikutnya pasca kegiatan bazar. Ini menunjukkan bahwa inovasi memang sangat diperlukan dalam meraih pasar sasaran yang lebih luas. Volume penjualan dan profitabilitas pelaku usaha keripik tempe setelah diinovasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Volume Penjualan dan Profitabilitas
Pelaku Usaha Tempe Desa Tembarak Setelah Diinovasi

Uraian	Dalam hari
Modal/unit (50 bungkus)	200.000
Harga jual/50 bungkus	350.000
Laba/50 bungkus	150.000

Sumber: Data hasil penjualan pada bazar rakyat, 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dalam kegiatan bazar yang diadakan sehari saja bisa mencapai keuntungan Rp. 150.000,- dengan 50 unit yang terjual sedangkan sebelum diinovasi per harinya keuntungan yang didapat Rp. 100.000,- dengan 100 unit yang terjual. Hal ini berarti lebih ada peningkatan keuntungan setelah produk dibuat dengan aneka varian rasa dan dikemas dengan pembungkus yang lebih elegant dari sebelumnya.

Dengan melihat hasil seperti ini secara tidak langsung para pelaku usaha keripik tempe di desa Tembarak mengetahui secara pasti manfaat inovasi dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih menggiatkan inovasi pada usaha yang dijalankan. Kedepannya tidak hanya inovasi produk saja, namun juga inovasi layanan karena ternyata sudah mulai ada yang order melalui pesan antar, inovasi pemasaran dengan mulai tergerak berpikir untuk membuat *website* perusahaan ataupun pemasaran melalui media sosial lain.

Pelaku usaha tempe di desa Tembarak tersebut juga sudah saatnya mempertimbangkan perlunya mengoptimalkan jasa dari para *reseller* yang selama ini hanya mengambil dan menjualnya di pasar saja. Para *reseller* dapat dioptimalkan juga sebagai tenaga pengantar pesanan jika memang para pelaku usaha tempe di sana mulai memberlakukan inovasi layanan.

Berdasarkan analisis data yang dielaskan di atas, menunjukkan bahwa *action research* berupa inovasi produk keripik tempe di desa Tembarak berhasil dilakukan. Ini terbukti dari respon masyarakat dan hasil penjualan pada kegiatan bazar pasar rakyat. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung yaitu:

1. Keterlibatan aktif sasaran penelitian dalam hal ini adalah para pelaku usaha keripik tempe di desa Tembarak. Mulai dari penggalan data ketika survey awal sampai pada kegiatan pelaksanaan, para pelaku usaha begitu kooperatif. Kondisi sasaran penelitian ini sangat peduli pada sebuah perubahan, sehingga motivasi untuk melakukan inovasi juga ada. Terlebih ketika melihat hasil respon masyarakat yang antusias terhadap produk inovasi.
2. Peran perangkat desa yang juga sangat peduli dengan penggiatan ekonomi kerakyatan, sehingga responsif sekali pada kegiatan inovasi produk tersebut. Ini terbukti dengan diberikannya kesempatan dan tempat/stand pada kegiatan bazar untuk memasarkan produk hasil inovasi.

Adapun faktor penghambat kegiatan ini tetap ada namun tidak terkait langsung dengan kegiatan inovasi produk. Faktor penghambat yang sampai saat ini diresahkan oleh warga adalah limbah pengolahan tempe. Masalah kurangnya kesadaran pada tempat pembuangan limbah tempe yang semestinya disediakan masih sulit teratasi. Dari hasil penggalan data berbagai metode sudah dilakukan mulai dari penyuluhan sadar limbah dari dinas kesehatan dan dinas lingkungan hidup, namun tetap saja limbah belum teroptimalkan penanganannya. Oleh karena itu dari evaluasi *action research* ini maka perlu dilakukan rencana tindak lanjut yaitu:

1. Perlu melakukan rembug warga untuk mencari solusi masalah limbah tempe ini.
2. Mengingat hasil yang sudah dilihat dari inovasi produk ini, maka perlu ada upaya juga untuk program sadar limbah ini melalui komunikasi personal dengan pelaku usaha tempe. Tentunya memang upaya ini tidak mudah, perlu peran perangkat pemerintahan desa dan dukungan warga sekitar.
3. Membuka kembali jejaring kemitraan dengan berbagai pihak seperti dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan berikut dapat ditambahkan perguruan tinggi maupun dinas umkm.

Meskipun masih terdapat faktor penghambat, namun ini tidak terkait langsung dengan aktivitas inovasi sehingga penelitian ini dapat dikatakan punya dampak positif terhadap peningkatan kinerja pemasaran pelaku usaha tempe. Oleh karena itu penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa inovasi dapat meningkatkan kinerja pemasaran (Taghizadeh dan Syed, 2013). Meningkatnya kinerja pemasaran dari pelaku usaha tempe di desa Tembarak akan dapat berimbas pada peningkatan perekonomian desa. Hal ini dikarenakan selain meningkatnya penjualan pelaku usaha tempe yang berarti meningkatnya taraf kesejahteraan, desa Tembarak juga akan dikenal sebagai desa yang berhasil dalam mengoptimalkan potensi unggulan desa yaitu tempe. Dampak positif lain yang didapatkan dari inovasi produk ini kedepannya adalah apabila pelaku usaha tempe di desa tersebut semakin mapan dan maju, maka peluang penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar juga akan terbuka luas. Ini berarti keberadaan pelaku usaha tempe tersebut juga berdampak pada upaya pengentasan pengangguran. Dengan demikian penelitian ini telah mendukung penelitian Joewono (2011) yang menyatakan bahwa keberadaan usaha kecil menengah (UKM) telah ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari pembahasan permasalahan yang dikaji yaitu bahwa para pelaku usaha tempe di desa Tembarak belum pernah melakukan inovasi pada usaha yang dikelolanya. Inovasi produk berupa *improve* varian rasa dan kemasan produk dipilih sebagai bentuk tindakan (*action*) dari penelitian ini karena inovasi tersebut yang lebih tepat dilakukan sebagai langkah awal untuk menjajaki pasar sasaran.

Inovasi varian rasa dilakukan dengan membuat 4 varian, yaitu original, balado, keju dan pedas manis. Sedangkan inovasi kemasan dilakukan dengan merubah pembungkus menjadi lebih elegant yang dilengkapi dengan label nama usaha, nama produk, komposisi bahan, jenis varian rasa, netto, waktu

kadaluwarsa maupun pesan slogan. Respon antusias masyarakat ketika produk inovasi tersebut dipasarkan pada event bazar pasar rakyat di desa Tembarak. Ini terlihat dari peningkatan hasil penjualan setelah inovasi dilakukan. Peningkatan penjualan pelaku usaha tempe di desa tersebut menunjukkan peningkatan taraf perekonomian, sehingga dengan begitu dapat mengangkat perekonomian desa.

Melihat hasil penjualan setelah produk diinovasi maka beberapa saran yang perlu dilakukan adalah dengan melanjutkan program tersebut tidak cukup hanya sebatas pada kegiatan pasar rakyat pemasarannya namun dapat dilakukan pada kegiatan pemasaran rutinitas selanjutnya. Selain itu juga melaksanakan rencana tindak lanjut sesegera mungkin untuk mengatasi persoalan limbah tempe.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini ditujukan kepada:

1. Bapak Rektor Unipdu Jombang dan semua jajaran pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas khususnya pimpinan di Fakultas Bisnis dan Bahasa yang telah memberikan kesempatan untuk bisa terlibat pada kegiatan penelitian sekaligus pengabdian masyarakat di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk.
2. Ibu kepala desa dan seluruh perangkat desa Tembarak Kertosono Nganjuk yang sudah berkenan menyediakan tempat dan waktu selama proses penelitian ini.
3. Para pelaku usaha tempe di desa Tembarak yang sudah bersedia menjadi subyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibidunni, O.S., Oluwole, I dan Ayodahun, S.I 2014, Product Innovation, A Survival Strategy For Small and Medium Enterprises In Nigeria. *European Scientific Journal*, 10(1): 194-209.
- Joewono.H 2011, Strategi Pengembangan Kewirausahaan Nasional: Sebuah Rekomendasi Operasional, *Jurnal Infokop*, 19: 1-23.
- Kotler, P dan K.L. Keller 2016, *Marketing Management*, Global Edition 15, Pearson, www.downloadslide.net.
- Langlely, D. J., Pals, N. & Ort, J.R 2005, Adoption of Behaviour: Predicting Success for Major Innovations, *European Journal of Innovation Management*, 8(1): 56-78.
- Rosli, M.M. dan Syamsuriana, S 2013, The Impact of Innovation On The Performance of Small and Medium Manufacturing Enterprises: Evidence From Malaysia, *Journal of Innovation Management In Small and Medium Enterprise*, 2013(2013), Diakses pada tanggal 19 Juli 2019, (<http://www.ibimapublishing.com/journals/JIMSME/jimsme.html>), 1-16.
- Sulaksana, U 2004, *Manajemen Perubahan*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. <https://www.academia.edu>.
- Scholastica, U 2013, Impact of Product Development and Innovation On Organizational Performance, *International Journal of Management and Sustainability*, 2(12): 220-230.
- Taghizadeh, S.K. dan Syed, A.R 2013, The Effect of Service Product Innovation Management On Market Performance Through Organizational Culture: In Context Of Service Product Industry, *International Journal Of Business and Innovation*, 1 (Issue 1): 1-15.
- Tamayo, J.A, et.al 2014, Do Innovation and Cooperation Influence SMEs Competitiveness? Evidence From The Andalusian Metal-Mechanic Sector, *Innovar Journal*, 25(55): 101-115.

- Wan, D., Ong, C. H. & Lee, F 2005, Determinants of Firm Innovation in Singapore, *Technovation*, 25(3): 261-8.
- Wang, C. L. & Ahmed, P.K 2004, The Development and Validation of the Organizational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis, *European Journal of Innovation Management*, 7(4): 303-13.
- Wibowo 2016, *Manajemen Perubahan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 425 & 555.



**PRODUKSI “NATA DE SOYA” DARI LIMBAH CAIR TAHU SEBAGAI POTENSI
EKONOMI BARU MASYARAKAT DESA DRENGES KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK - JAWA TIMUR**

***THE PRODUCTION OF “NATA DE SOYA” FROM TOFU WASTE WATER AS A NEW
ECONOMIC POTENTIAL FOR THE PEOPLE IN DRENGES VILLAGE, KERTOSONO
DISTRICT, NGANJUK REGENCY – EAST JAVA***

Maisarah Maisarah, Nur Muji Astuti

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), Kode Pos 61481

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya, Kode Pos 60244

maisarah@fbs.unipdu.ac.id

ABSTRAK

Desa Drenges Kecamatan Kertosono Nganjuk merupakan daerah penghasil tahu dan sekitar 60 % dari penduduk desa berpenghasilan sebagai pengrajin tahu. Industri tahu memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat desa Drenges. Namun demikian masalah lain muncul ketika limbah cair tahu serta ampasnya belum diolah secara baik. Selama ini masyarakat desa Drenges menjadikan ampas tahu hanya sebagai pakan ternak atau diolah kembali menjadi tempe embos dengan harga jual lebih rendah dari tempe. Sedangkan limbah cair tahu dibuang begitu saja di parit sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, perlu ada tindakan guna mengatasi atau paling tidak mengurangi limbah cair tahu tersebut dengan mengolahnya menjadi bahan baru yang ramah lingkungan yaitu “Nata de soya”. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana “Nata de soya” akan bisa menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat di desa Drenges sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari Agustus hingga Oktober 2018. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu *action research* berbasis *survey*. Ada dua jenis variasi rasa dan warna yang diujicoba pasar saat pagelaran bazar di desa Drenges, yaitu rasa melon dengan warna hijau dan leci dengan warna bening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Nata de soya” ternyata memiliki cukup banyak peminat terutama pada rasa melon dengan warna hijau. Dari penelitian ini dapat pula disimpulkan bahwa “Nata de soya” dapat sangat menguntungkan karena laba yang dihasilkan bisa lebih dari 70% dari modal awal.

Kata kunci: desa Drenges, *nata de soya*, peningkatan ekonomi, lingkungan

ABSTRACT

Drenges Village, Kertosono district, Nganjuk regency is a tofu-producing region and majority of villagers earn income as tofu artisans. The tofu industry provides economic benefits to the people of Drenges village. However another problem arises when the tofu grout and its waste water has not been properly processed. So far the villagers of Drenges have made tofu grout only as animal feed or reprocessed into “tempe embos” with a selling price lower than tempe. The tofu waste water, however, is thrown away in the trench causing unpleasant smell. Therefore, there should be an action to overcome or at least reduce the tofu waste water by processing it into a new environmentally friendly material, “Nata de soya”. This article aims to examine how “Nata de soya” is able to become a new economic potential for the villagers of Drenges so that it has an impact on increasing the income of the village community. This research was conducted for 3 months from August to October 2018. The method applied in this study is a survey-based action research. There are two types of tastes and colors, melon in green and lychee in clear color that were market-tested during the bazaar performance in the village of Drenges. The results showed that “Nata de soya” turned out to have a lot of enthusiasts more specifically on those with melon taste in green color. From this study, it can also be concluded that “Nata de soya” can be very profitable because the profit gained can be more than 70% of the capital.

Keywords: Drenges village, *nata de soya*, economical improvement, environment

PENDAHULUAN

Tahu merupakan makanan olahan dari kacang kedelai yang mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, khususnya di daerah Jawa Timur. Dengan demikian, maka tak heran jika industri tahu tersebar hampir diseluruh wilayah tersebut. Industri tahu mendorong perekonomian masyarakat di beberapa desa, termasuk desa Drenges Kecamatan Kertosono Nganjuk Jawa Timur. Adanya industri tahu tersebut menjadikan mayoritas warga desa tersebut bermatapencaharian sebagai pengrajin tahu. Hasil produksi tahu dipasarkan tak hanya di wilayah Kertosono saja namun hingga di daerah lain sekitar Nganjuk, seperti Jombang dan Kediri. Namun demikian, keberhasilan industri tahu secara ekonomi tidak berdampak baik dalam hal lingkungan. Limbah tahu masih menjadi permasalahan tersendiri dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak demi menjaga pelestarian lingkungan. Untuk itu, pengolahan limbah tahu menjadi produk yang dapat dimanfaatkan sangat diperlukan guna mengurangi pencemaran lingkungan. Ada banyak ahli maupun peneliti yang berusaha untuk melakukan studi terkait dengan pengolahan limbah. Menurut Puspawiningtiyas & Damajanti (2011), pengolahan limbah merupakan salah satu dari teknologi proses, sehingga banyak ilmuwan melakukan penelitian dalam hal pengolahan limbah.

Terdapat dua jenis limbah yang dihasilkan dari pengolahan tahu yaitu ampas tahu dengan tekstur padat serta limbah cair tahu. Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat desa Drenges telah memanfaatkan limbah tahu berupa ampas sebagai makanan ternak serta diolah kembali menjadi produk makanan baru berupa tempe emboss. Sayangnya, hingga kini tempe emboss merupakan jenis makanan yang bernilai ekonomi rendah meski kandungan gizinya juga tidak kalah tinggi dengan tahu. Sedangkan limbah tahu berupa cairan sementara ini dapat dikatakan tidak termanfaatkan dengan baik. Masyarakat desa Drenges membuangnya begitu saja ke parit-parit sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengurangi keasrian lingkungan. Bau tersebut disebabkan oleh sisa-sisa bahan organik yang diuraikan oleh bakteri anaerob. Sebenarnya, limbah cair tahu juga masih memiliki kandungan gizi seperti protein, lemak dan karbohidrat. Hal ini juga disampaikan oleh Sulik dkk (2012) bahwa di dalam *whey* atau air limbah tahu masih mengandung bahan-bahan organik di dalamnya, antara lain: protein, lemak dan karbohidrat.

Salah satu solusi yang dapat dikembangkan dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair tahu yaitu dengan membuat *nata de soya*. *Nata de soya* adalah sumber makanan rendah kalori yang memiliki tekstur lembut dan berwarna putih serta mengandung banyak kadar air. Menurut Harianingsih dan Suwardiono (2014), *Nata de soya* merupakan selulosa yang mengandung air sekitar 98% dengan tekstur kenyal, putih transparan dan rasa menyerupai kolang kaling. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana *nata de soya* diminati oleh warga sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh permintaan akan nata terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari sebuah studi yang dilakukan di Malang terhadap swalayan dan supermarket, menyatakan bahwa kebutuhan akan nata di kota Malang mencapai 2 kwintal per hari (Sulik dkk, 2012). Produk *nata de soya* tersebut diharapkan dapat menjadi potensi ekonomi baru masyarakat desa Drenges.

Produksi *nata de soya* yang merupakan potensi ekonomi baru tersebut perlu diimbangi dengan metode *marketing* yang sesuai agar dapat diterima dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori *marketing mix* oleh Kotler dan Armstrong (2004) yang menyebutkan bahwa *marketing mix* adalah sebuah strategi pemasaran yang terpadu. Artinya metode pemasaran tersebut melibatkan elemen strategi dalam *marketing mix* itu sendiri.

Dalam marketing mix dikenal istilah 4 P yaitu *product, price, promotion, place*. Namun demikian, seiring laju ilmu pengetahuan, maka teori tersebut berkembang menjadi 7 P yaitu *product, price, place, promotion, people, process dan packaging*.

1. *Product.*

Produk dari perusahaan dapat berupa barang dengan wujud fisik maupun non fisik. Barang berwujud fisik misalnya produk makanan dan sebagainya. Sedangkan barang non fisik misalnya aplikasi dan lain-lain. Produk merupakan segala sesuatu atau kebutuhan yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi. Dengan adanya berbagai produk yang sama di pasar, maka sangatlah memungkinkan jika suatu perusahaan harus memikirkan cara agar produknya tersebut berbeda dengan produk lainnya.

2. *Price*

Harga merupakan pengeluaran sejumlah uang untuk mendapatkan sebuah produk tertentu. Namun demikian, pelanggan akan rela untuk mengeluarkan uang jika produk yang mereka dapatkan sesuai dengan manfaat yang akan mereka terima. Bagi sebuah perusahaan, ada beberapa permasalahan berkaitan dengan harga produk jika ingin terus eksis dalam bisnis, antara lain: biaya produksi, harga jual serta harga produk kompetitor.

3. *Place* atau saluran distribusi

Saluran distribusi merupakan salah satu hal yang dapat menentukan keberhasilan strategi marketing. Place atau saluran distribusi adalah segala upaya yang dapat dilakukan agar produk yang dipasarkan dapat dengan mudah diakses atau dijumpai oleh masyarakat.

4. *Promotion*

Promosi merupakan upaya persuasi untuk mempengaruhi ataupun mendorong calon konsumen untuk tertarik dan pada akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Dalam promosi, ada beberapa elemen penting yang dapat mempengaruhi penjualan, antara lain: sales person, public relation serta periklanan.

5. *People*

Karyawan yang loyal dan beretos kerja tinggi merupakan asset berharga sebuah perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan perlu memberikan kebijakan sehingga dapat mencapai semua itu, antara lain dengan cara: memberikan reward pada karyawan dengan kinerja terbaik, berlaku adil, menghargai hak karyawan dan memenuhi kewajibannya. Apabila kultur yang baik tersebut benar-benar diterapkan, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon karyawan potensial lainnya.

6. *Process*

Untuk mencapai pengelolaan dan pengembangan bisnis yang baik, perlu adanya SOP yang jelas di setiap divisi kerja. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik antar seluruh pegawai agar pelaksanaannya berlangsung baik. Dalam keberhasilan, tentunya harus mengalami segala bentuk proses yang dilalui dengan penuh kesabaran dan konsistensi untuk mengembangkan bisnis.

7. *Packaging*

Packaging disini dapat memiliki arti luas. Kemasan tidak hanya cenderung tentang tampilan produk yang menarik minat membeli, tetapi juga tentang keadaan perusahaan secara menyeluruh, baik itu ruang tunggu, toko, brosur serta hal-hal lain yang mencerminkan keberhasilan sebuah *marketing*.

Adapun proses pembuatan *nata de soya* yaitu pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan *nata de soya* adalah pembuatan media tanam dengan cara menyaring *whey*/air tahu dengan menggunakan kain saring lalu direbus hingga mendidih. Selanjutnya ditambahkan formula yang didalamnya mengandung bakteri *acetobacter xylinum* (Asam Cuka, Gula, Amonium sulfat (Food grade)/sari kecambah) dengan perbandingan 1:5:0,3 dari air tahu(bahan dasar). Untuk sari kecambah dengan perbandingan 1 kg kecambah untuk 100 liter bahan dasar media. Aduk sampai gula larut. Larutan ini disebut dengan *Whey asam bergula*. Tunggu 10 menit dan diamkan diatas nyala api. Larutan

yang diperoleh disebut sebagai media tanam *Acetobacter xylinum*. Angkat dari atas kompor kemudian dinginkan sampai suam-suam kuku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari Agustus hingga Oktober 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan uji coba pasar. Mekanisme wawancara dilakukan pada responden yang merupakan konsumen dari produk Nata de Soya yang dipasarkan. Survey dilakukan dengan menyebarkan questionnaire kepada semua responden sehingga data dapat ditabulasikan. Wawancara dilakukan kepada 100 responden di desa Drenges, Kertosono, Nganjuk mengenai tampilan fisik dan rasa *nata de soya*, terutama dalam hal bandingannya dengan produk sejenis yaitu *nata de coco*. Sementara untuk uji coba pasar (saat bazaar desa) digali respon masyarakat mengenai minat pasar terhadap produk *nata de soya*. Ada dua varian yang dipasarkan yaitu kemasan (kecil 300 gr dan sedang 600 gr) dan rasa (leci dan original).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Dari hasil wawancara dan uji coba pemasaran di bazaar desa setempat, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.
Penilaian responden terhadap kualitas produk

Aspek	Nilai		
	Baik	Cukup	Kurang
Tampilan Produk	90	10	0
Rasa	100	0	0
Harga	60	40	0

Tabel di atas adalah hasil wawancara mengenai produk *nata de soya* dengan masyarakat setempat yang dilaksanakan saat pelatihan pembuatan *nata de soya* dan bazaar desa. Ada tiga aspek yang diwawancarakan: (1) tampilan produk, (2) rasa produk, dan (3) harga. Secara umum, masyarakat memberikan penilaian positif untuk produk *nata de soya* tersebut.

Untuk aspek tampilan produk, 90 dari 100 orang yang diwawancarai memberikan nilai positif (baik). Masyarakat rata-rata mengatakan bahwa produk *nata de soya* tidak memiliki perbedaan tekstur dengan produk *nata de coco* yang sudah umum dijumpai di pasaran. Mereka bahkan sulit membedakan antara produk *nata de soya* dan *nata de coco*.

Demikian juga untuk aspek rasa produk. Semua responden mengatakan bahwa produk *nata de soya* memiliki rasa yang tidak berbeda dengan produk *nata de coco*. Pada umumnya mereka mengatakan bahwa produk *nata de soya* memiliki kekenyalan yang sama dengan produk *nata de coco*.

Sedangkan untuk aspek harga, 60 dari seratus orang responden mengatakan sudah lebih murah dibandingkan dengan produk *nata de coco*. Namun demikian 40 orang responden yang lain mengharapkan harganya bisa lebih murah lagi sehingga bisa lebih bersaing di pasaran.

Tabel 2.
Hasil Penjualan dalam Bazar

No.	Aspek	Jumlah Terjual
1	Kemasan:	
	Kemasan kecil (300 gr)	20
	Kemasan sedang (600 gr)	16
2	Rasa:	
	Leci	24
	Original	12

Tabel di atas menunjukkan hasil penjualan saat bazaar desa. Ada 360 kemasan *nata de soya* yang dipasarkan. Dalam penjualan saat bazaar ada dua kemasan yang dijual: sedang (600 gr) dan kecil (300 gr). Selain itu ada dua varian rasa yang dijual: leci dan original. Secara umum, masyarakat memberikan respon yang positif atas produk-produk tersebut.

Untuk kemasan besar, selama dua hari pemasaran, terjual 200 produk. Sedangkan untuk kemasan kecil terjual sebanyak 160 produk.

Sedangkan untuk varian rasa, produk nata de soya dengan rasa leci lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Sebanyak 240 produk terjual baik dalam kemasan besar maupun kemasan kecil. Sedangkan untuk varian rasa original, terjual sebanyak 120.

B. PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi terdahulu yaitu Sulik, dkk (2012), yang membandingkan besaran keuntungan antara pemanfaatan limbah cair tahu menjadi Nata de Soya dengan kecap manis. Namun demikian, penelitian ini berkisar tentang apakah produk Nata de soya sebagai produk baru yang dikenal oleh masyarakat desa dapat diterima oleh konsumen atau tidak jika ditunjang dengan beberapa varian rasa. Adapun varian rasa yang diujicobakan yaitu sebanyak 2 yaitu original dan leci. Nata de Soya original memiliki rasa asli tanpa ada campuran baik aroma maupun warna, sedangkan Nata de soya rasa leci telah ditambah dengan aroma buah leci yang memiliki rasa asam dan merupakan rasa yang populer pada produk nata de coco yang telah lebih dahulu dikenal di pasaran.

Menurut Kotler & Keller (2016) produk disini bisa berupa apa saja (baik yang berwujud fisik semacam makanan dan buku maupun yang bersifat digital berupa aplikasi dan sebagainya). Intinya produk adalah segala bentuk penawaran yang Anda lakukan kepada klien atau customer Anda, yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Dalam penelitian ini tampilan fisik dan rasa adalah keutamaan dari produk *nata de soya*. Dalam produksi *nata de soya*, sebisa mungkin tampilan fisik dan rasa haruslah sama atau lebih baik dari pada produk serupa yang sudah lama ada di pasaran, yang dalam hal ini adalah *nata de coco*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kemiripan dan bahkan cenderung sama antara tampilan fisik dan rasa nata de soya dengan nata de coco. Hal ini menunjukkan bahwa produk baru ini secara fisik dan rasa bisa bersaing di pasaran dengan produk sejenis yang sudah ada. Secara teori, produk ini bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar (Kotler & Keller, 2016). Namun demikian, apabila diperhatikan lebih seksama, tampilan nata de soya sedikit agak keruh dibandingkan dengan nata de coco mengingat bahan dasar dari pembuatan nata de soya adalah kedelai.

Namun demikian karena ia tidak memiliki keunggulan lebih dari produk sejenis, maka tampilan dan rasa seharusnya tidak menjadi daya tarik untuk promosi. Karena kualitas tampilan dan rasa yang sama, maka konsumen akan cenderung memilih produk yang sudah ada. Ini merupakan bentuk dari

resistensi terhadap produk baru (Descotes & Pauwels-Delassus, 2015). Oleh karena itu, perlu ada aspek lain yang harus ditonjolkan pada saat promosi produk.

Sementara untuk harga, para calon konsumen rata-rata mengatakan harga nata de soya lebih murah dari pada nata de coco, walaupun selisihnya hanya Rp. 500 per kemasan. Hasil ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk bermain di level harga dalam memenangkan persaingan pasar. Dari range harga yang dipasarkan saat bazaar, potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari produksi nata de soya bisa lebih dari 70% dari modal awal.

Apabila nata de soya diproduksi secara masal, bukan tidak mungkin harga akan bisa ditekan lagi sehingga harga penjualan bisa lebih murah dari pada harga saat eksperimen. Hanya saja saat memberikan harga, sebaiknya juga tidak terlalu murah, karena pasar sekarang berorientasi kepada Value bukan pada cost (Pura, 2012). Oleh karena itu produsen harus berhati-hati dalam menentukan harga agar produk nata de soya tidak terkesan berkualitas jelek karena murah.

Sementara hasil penjualan di pasar selama bazaar mengindikasikan beberapa hal. Pertama, kemasan kecil lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan produk nata de soya adalah produk baru bagi mereka, maka konsumen cenderung untuk memilih kemasan kecil untuk coba-coba (www.maxmanroe.com).

Oleh karena itu, untuk awal-awal penjualan, akan lebih baik apabila kemasan yang akan dijual di pasaran dibuat dalam kemasan kecil karena sifat yang coba-coba dari calon konsumen. Sangat disarankan bahwa kemasan kecil berkisar antara 200-300 gr. Namun demikian, disarankan juga tetap ada variasi kemasan untuk produk nata de soya yang bisa dipilih oleh konsumen, baik untuk kemasan sedang (500-600 gr) maupun besar (900-1000 gr).

Demikian juga untuk varian rasa. Kebanyakan calon konsumen lebih memilih produk nata de soya yang memiliki rasa-rasa dibandingkan dengan yang rasa original. Dengan demikian akan lebih baik apabila produsen lebih memilih memasarkan produk nata de soya dengan berbagai varian rasa, tidak hanya sebatas leci. Hal ini untuk mengantisipasi kebosanan yang mungkin akan dialami oleh konsumen terhadap produk ini.

KESIMPULAN

Dari Uraian di atas bisa disimpulkan bahwa produk *nata de soya* dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini bisa menjadi alternatif penghasilan bagi para produsen tahu karena selain memproduksi tahu dan susu kedelai, mereka juga bisa memproduksi produk lain yang juga tidak kalah menguntungkannya yaitu *nata de soya* (bisa lebih dari 70% dari modal awal).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada seluruh civitas akademika Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum karena telah memberikan kesempatan serta support kepada kami untuk melakukan kegiatan penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah kabupaten Nganjuk khususnya Kepala desa Drenges yang telah meluangkan waktu serta pikiran dalam kegiatan kami di desa tersebut. Tak lupa rasa terima kasih kami haturkan kepada para ibu PKK serta warga desa Drenges.

DAFTAR PUSTAKA

- Descotes, & Pauwels-Delassus. (2015). The Impact of Consumer Resistance to Brand Substitution on Brand Relationship. *Journal of Consumer Marketing*, 34-42.
- Harianingsih, & Suwardiono. (2014). Pembuatan Edible Film Dari Nata De Soya (Ampas Tahu) Sebagai Bentuk Waste To Product Ukm Tahu. *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, 42-46.
- Kotler, Keller, P. &, & Lane, K. (2016). *Marketing management 15 edition* . London: Pearson Education .
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). *Dasar-Dasar Pemasaran, Edisi kesembilan*,. Jakarta: Indeks.
- Pura, A. H. (2012). Marketing Mix Sebagai Alat Pembeda Dalam Persaingan. *Bina Ekonomi*, 1-9.
- Puspawiningtiyas, E., & Damajanti, N. (2011). Kajian Sifat Fisik Film Tipis Nata De Soya Sebagai Membran Ultrafiltrasi. *Techno*, 01-07.
- Sulik, d. (2012). Pemanfaatan Limbah Cair (Whey) Industri Tahu Menjadi Nata de Soya dan Kecap Berdasarkan Perbandingan Nilai Ekonomi Produksi. *J. Tek*, 4 (1): , 70–83.
- www.maxmanroe.com*. (n.d.). Retrieved 8 1, 2019, from *www.maxmanroe.com*: <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-kemasan.html>



PENGEMBANGAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI PUSAT EKONOMI MASYARAKAT DESA: STUDI PADA MUSHOLLA MAMBAUS SAADAH DESA MANYARSIDORUKUN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

Lilik Rahmawati^{1*}, Abdul Hakim², Nurlailah³

¹FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya, Kode Pos: 60236

²FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya, Kode Pos: 60236

³FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya, Kode Pos: 60236

*lilikrahmawati@uinsby.ac.id

ABSTRAK

Selama ini keberadaan tempat ibadah baik masjid maupun musholla di desa hanya digunakan sebagai tempat beribadah, tidak terkecuali mayoritas tempat ibadah di Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Tulisan ini adalah hasil pendampingan yang dilakukan di Musholla Mambaus Saadah Desa Manyarsidorukun yang digunakan sebagai pengembangan UMKM industri makanan olahan sea food sebagai komoditas lokal desa oleh jamaah musholla tersebut. Pendampingan menggunakan pendekatan ABCD (*Aset Based Community Development*). Subyek pendampingan adalah 20 jamaah musholla yang memiliki usaha olahan sea food. Stakeholder yang terlibat dalam pendampingan adalah pengurus musholla dan aparat desa. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pengurus Musholla Mambaus Saadah bekerja sama pemerintah desa setempat mampu berkoordinasi secara baik dalam pengembangan usaha yang ditekuni para jamaah musholla. Kegiatan berbasis ekonomi dituangkan dalam program kerja musholla diantaranya program penguatan Islamic Entrepreneurship dalam bentuk kajian ekonomi maupun pelatihan. Pemasaran produk secara aktif dan masif dilakukan oleh pelaku usaha, pengurus maupun aparat desa. Atas kerjasama yang solid dari unsur desa, pengurus, dan jamaah musholla, kini bisnis olahan sea food yang ditekuni para jamaah musholla terus berkembang dengan baik serta dapat menyokong kemajuan ekonomi desa.

Kata Kunci: Tempat Ibadah, Pusat Ekonomi, Desa

PENDAHULUAN

Musholla Manbaul Falah merupakan satu-satunya musholla khusus perempuan di Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Masjid maupun mayoritas musholla yang ada di desa ini biasanya diperuntukkan untuk jamaah laki-laki. Kondisi ini sangat mendukung terhadap keberhasilan segala jenis kegiatan yang memfokuskan pada perempuan, khususnya kegiatan perekonomian. Sebagian besar jamaah musholla Manbaul Falah adalah pembuat olahan sea food yang merupakan komoditas lokal desa. Setidaknya terdapat 20 jamaah musholla putri Manbaul Falah yang aktif mengemas kerupuk goreng dari bahan dasar udang maupun ikan. Pembuat olahan otak-otak maupun nugget dari udang maupun ikan.

Namun yang disayangkan, usaha produksi aneka olahan sea food ini tidak berkembang dengan baik, salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi yang minim sehingga produktivitasnya rendah dan mengalami kesulitan dalam meningkatkan volume usaha. Karena volume usaha tidak meningkat, maka pendapatan yang dihasilkan juga tidak mengalami peningkatan. Di samping itu akibat teknologi yang terbatas, usaha yang dikelola tidak memperoleh hasil yang berkualitas. Kualitas yang rendah menjadikan usaha olahan sea food kurang mampu bersaing dengan produk sejenis lainnya dan sulit menembus pasaran regional maupun nasional. Sebagai contoh adalah pada sisi pengemasan produk. Produk dikemas dengan label yang sederhana, menggunakan kertas putih tipis. Plastik yang digunakan untuk pengemasan menggunakan jenis plastik biasa, kerupuk seringkali pecah sebelum dikonsumsi.

Merujuk kondisi tersebut, ibu-ibu jamaah musholla putri Manbaul Falah pembuat olahan sea food perlu diberdayakan dalam kemampuan melakukan pengembangan usaha. Terutama usaha yang ditekuni perempuan desa. Hal ini disebabkan perempuan Indonesia khususnya di daerah perdesaan

memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “triple burden of women”, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas (Daradjad, 2010).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen UIN Sunan Ampel merupakan bagian tridharma perguruan tinggi. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Anwar, 2007).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada jamaah musholla putri pengolah sea food selaku komoditas lokal desa memfokus pada pembimbingan usaha sesuai dengan manajemen usaha yang baik sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang. Manajemen usaha yang baik menentukan keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawati yang memfokus pada Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY (Setyawati, 2011).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada jamaah musholla putri pengolah seafood selaku komoditas lokal desa bertujuan untuk:

1. Mengembangkan usaha pengemasan kerupuk goreng jama'ah musholla putri Manbaul Falah Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian jama'ah musholla putri Manbaul Falah Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
3. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat

BAHAN DAN METODE

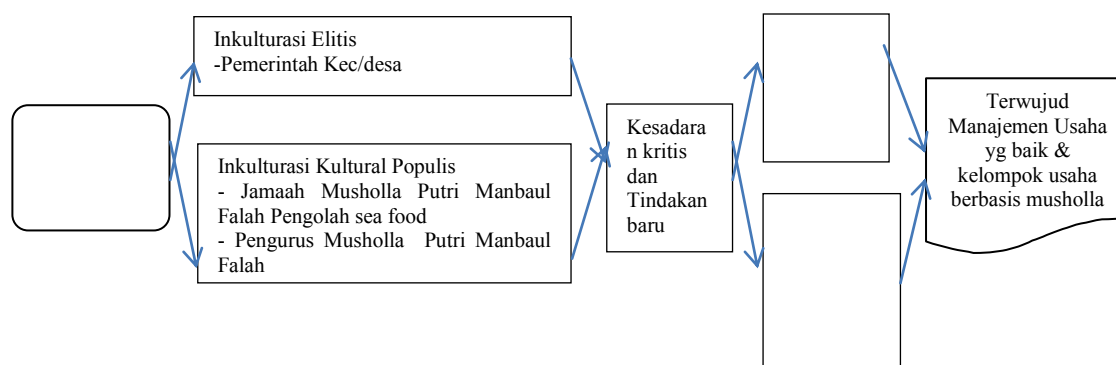
Subyek pendampingan adalah jamaah musholla putri Manbaul Falah pengolah sea food selaku komoditas lokal desa Manyar Sidorukun sebanyak 20 orang. Lokasi pendampingan dilakukan di Musolla Putri Manbaul Falah Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Stakeholder yang terlibat dalam pendampingan ini adalah Pengurus musholla, imam rowatib musholla, kepala desa dan Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK Desa Manyarsidorukun. Pengurus musolla dan imam rowatib berperan dalam mobilisasi jamaah musholla dalam kegiatan pendampingan. Adapun kepala desa dan Ibu-ibu Tim penggerak PKK desa berperan dalam proses pasca pendampingan pada aspek *tune in* program ekonomi musholla untuk peningkatan ekonomi desa.

Metode pendampingan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD). Pendekatan ABCD merupakan pendekatan yang mengarah pada pemahaman dan internalisasi asset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaannya secara mandiri dan maksimal. Asset adalah segala sesuatu yang berharga, bernilai sebagai kekayaan atau perbendaharaan. Segala yang bernilai tersebut memiliki guna untuk memenuhi kebutuhan (Afandi *et al.* 2014). Strategi yang digunakan oleh fasilitator atau pendamping dalam tahapan ABCD meliputi:

1. *discovery* (menemukan),
2. *dream* (mimpi),
3. *design* (merancang),
4. *define* (menentukan), dan
5. *destiny* (memastikan).

Melalui tahapan ABCD, pendamping bersama masyarakat dampingan bersama-sama menemukan asset atau potensi yang ada serta menguatkan potensi yang kurang optimal dan mengembangkan potensi yang telah ada namun kurang maksimal (Shalahuddin, 2015). Adapun secara holistik skema pendampingan ini digambarkan sebagai berikut:

Skema Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Usaha Kecil bagi Jamaah Musholla Putri Manbaul Falah



HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui tahapan pendampingan ABCD, tim pendampingan telah melaksanakan skenario pendampingan sampai tuntas. Tahapan pertama yaitu *discovery* (menemukan), pendamping bersama masyarakat dampingan telah menemukan asset atau potensi yang bisa dikuatkan dan dimobilisasi yaitu berupa asset individu dan asset sosial. Pada tahapan kedua yaitu *dream* (mimpi), pendamping memberikan penguatan kepada subyek dampingan terkait mimpi yang bisa diraih dan diwujudkan jika asset-aset yang dimiliki dikembangkan dengan baik. Tahapan ketiga yaitu *design* (merancang), pendamping bersama masyarakat dampingan merancang pilihan kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam rangka penguatan dan pengembangan asset. Tahapan keempat yaitu *define* (menentukan), pendamping bersama masyarakat dampingan menyepakati menyepakati beberapa pelaksanaan program prioritas. Rincian rencana pelaksanaan program pilihan komunitas ditunjukkan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1
Pelaksanaan Program Pelatihan Manajemen Bisnis Jama'ah Musholla Puttri Manbaul Falah

Tanggal	Program	Tempat	Peserta Kegiatan	Penanggung Jawab
11 November 2016	Persiapan pelaksanaan pelatihan	Musholla		Core Group dan Tim Pengabdian
12 November 2016	Pelaksanaan pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan	Musholla	Komunitas dampingan	Tim Pengabdian
13 November 2016	Monitoring pasca pelaksanaan pelatihan	Musholla		Tim Pengabdian
12 Desember 2016	Evaluasi hasil pendampingan	Musholla	Komunitas dampingan	Tim Pengabdian

Konsentrasi materi pilihan komunitas memfokus pada aspek manajemen pemasaran dan keuangan. Meski berfokus pada aspek manajemen pemasaran dan keuangan, namun terlebih dahulu pendamping menyampaikan materi mengenai potensi UKM dan strategi pengembangannya. Dalam penyampaian materi ini, point-point penting yang disampaikan adalah:

1. Potensi UKM dikembangkan oleh warga terutama yang berbasis sumberdaya lokal
2. Benefit atau manfaat yang didapat oleh warga yang mengembangkan kewirausahaan dari pada menjadi pegawai swasta atau PNS
3. Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas perkembangan UKM di Jatim dengan pemberian bantuan modal
4. Salah satu upaya pengembangan UKM di Jatim adalah dengan memberikan akses perolehan ijin usaha yang digratiskan.

Selanjutnya dilanjutkan penyampaian materi manajemen pemasaran UKM. Dalam penyampaian materi tips dan trik manajemen bisnis pemasaran, pemaparan materi lebih bersifat klinik bisnis dengan contoh kasus yang diberikan lebih banyak berfokus pada pengembangan bisnis berbasis sumberdaya lokal. Point penting materi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai pebisnis yang bergerak di bisnis sumberdaya lokal hasil olahan tambak maupun laut, maka produsen harus paham dan menguasai betul manajemen bisnis meliputi manajemen produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan manajemen pemasaran.
2. Dalam manajemen produksi, produsen harus memahami betul sifat dan karakteristik produk yang dijual. Seperti memperhatikan betul kualitas produknya dengan memperhatikan batasan kadaluarsa produk, packaging produk, dan labeling produk.
3. Pada manajemen sumberdaya manusia, produsen harus senantiasa mengamati trend dan perkembangan zaman. Sehingga motivasi untuk bersifat terbuka dengan perubahan dan belajar akan hal-hal baru harus senantiasa dipupuk.
4. Dalam manajemen pemasaran, pemasaran bisnis yang berbasis sumber daya lokal berupa olahan hasil tambak/laut semestinya pemasaran bisa dikembangkan lebih luas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ketika ada pemesanan saja, namun bisa dikembangkan dengan memasarkannya di pabrik-pabrik di sekitar Desa Manyarsidorukun.
5. Pemasaran bisa dilakukan dengan mengirimkan proposal produk ke toko atau gerai oleh-oleh khas Gresik maupun swalayan yang ada di Gresik.
6. Dalam rangka memaksimalkan pemasaran, bisa dilakukan melalui pemasaran modern melalui media online
7. Agar pemasaran online bisa menarik, pengusaha kerupuk goreng supaya menampilkan produknya sebaik mungkin dengan kemasan yang menarik.

Pada sesi selanjutnya adalah penyampaian materi manajemen keuangan. Dalam penyampaian materi manajemen keuangan lebih diarahkan pada praktik, sehingga dalam pelatihan tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Point-point penting materi yang disampaikan narasumber sehubungan materi manajemen keuangan sebagai berikut:

1. Agar bisnis yang dikembangkan oleh perempuan dapat berkembang, pengelolaan keuangan penting untuk diperhatikan.
2. Paling sederhana dilakukan adalah melalui pengelolaan keuangan yang terpisah dengan pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini dilakukan agar keuangan tidak tercampur sehingga dapat diketahui laba atau rugi atau sudah sejauh mana bisnis yang dikembangkan.
3. Dalam pengelolaan keuangan perlu diprioritaskan kewajiban individu untuk berzakat perniagaan atau shodaqah.
4. Prioritas dana untuk zakat maupun shodaqah disisihkan sejak awal sebelum dana hasil pendapatan dialokasikan untuk produksi maupun lainnya.

Selesai paparan materi tips dan trik manajemen bisnis keuangan dilanjutkan dengan berlatih membuat rancangan keuangan. Rancangan keuangan dimulai dengan membuat daftar belanja produksi. Masyarakat dampingan sangat antusias dan semangat mengikuti latihan ini. Karena sifatnya praktik,

komunitas dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok membuat rancangan keuangan sesuai dengan bisnis yang dijalankan di kelompok tersebut.

Setelah kegiatan pelatihan yang disertai praktik dilaksanakan, tim pengabdian mengadakan wawancara dengan sebagian komunitas untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang disertai praktik memberikan dampak bagi komunitas. Hasil wawancara tersebut menunjukkan respon positif, artinya tingkat pemahaman masyarakat mengalami peningkatan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Hal ini dipengaruhi oleh pemberian dan pemaparan materi yang sangat bagus oleh pemateri sehingga mudah dipahami oleh audience dan pembagian materi berupa hard copy sebagai penunjang pemahaman yang bisa mereka pelajari sendiri kapanpun di rumah serta kegiatan praktik yang dilaksanakan. Respon lain yang ditunjukkan oleh audience bahwa kegiatan sosialisasi ini mempunyai pengaruh terhadap usaha mereka menjadi lebih maju lagi karena ada semangat yang tinggi untuk mengembangkan jenis usaha mereka.

Pendampingan manajemen pemasaran dan manajemen keuangan telah dilaksanakan dengan sukses dan mendapat respon yang sangat baik dari komunitas. Melalui pendampingan ini, setidaknya komunitas mendapatkan manfaat dalam aspek terlepas dari rendahnya pendidikan dan keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga yang mendudukkan wanita sebagai agen reproduksi semata sebagaimana pandangan Daradjad. (Daradjad, 2010).



Gambar 1: Pelaksanaan Pendampingan

Selepas kegiatan pelatihan dilaksanakan, komunitas dampingan secara bersama-sama berkomitmen untuk merubah pengolahan bisnis yang selama ini dijalankan. Sehubungan dengan perubahan dalam aspek manajemen pemasaran dan keuangan, berikut ini dipaparkan perubahan yang terjadi dalam pengelolaan usaha kerupuk pada beberapa usaha kerupuk yang dikelola jamaah musholla.

1. Kerupuk Salamah

Kerupuk Salamah diproduksi oleh Ibu Umi Salamah. Beliau mempromosikan kerupuknya lewat acara perkumpulan ibu-ibu PKK di Desa Manyarsidorukun, pada akhirnya usaha pengemasan kerupuk goreng lambat laun dikenal oleh masyarakat. Untuk pemesanan langsung bisa berkunjung ke rumah. Setelah mendapatkan pelatihan manajemen pemasaran, pemasaran kerupuk goreng sekarang tidak terbatas pada Desa Manyarsidorukun saja, namun sudah diperluas sampai ke desa-desa lainnya di Kecamatan Manyar.

Sehubungan dengan pemasaran yang meluas, maka pendapatan yang diterima Ibu Umi Salamah juga bertambah. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan, Ibu Umi Salamah telah mampu memisahkan hasil dari penjualan kerupuk dengan keuangan keluarga. Dalam menetapkan harga jual kerupuk juga sudah menggunakan mekanisme penetapan harga sebagaimana materi yang disampaikan dalam pelatihan manajemen keuangan.

Ibu Umi Salamah merasakan betul manfaat dari pelatihan yang diikuti, karena dengan menerapkan manajemen pemasaran dan manajemen keuangan, Ibu Umi Salamah merasakan bisnis yang dijalankan mulai ada peningkatan.

2. Kerupuk Ita

Kerupuk Ita diproduksi oleh Ibu Hj Ita. Ibu Hj Ita memasarkannya dengan cara melakukan promosi langsung kepada masyarakat saat ada perkumpulan. Namun sesuai perkembangan zaman, Ibu Hj. Ita juga sudah memanfaatkan pemasaran online melalui BBM, Facebook, WA.

Setelah mengikuti pelatihan manajemen pemasaran, Ibu Hj Ita lebih memperluas cakupan pemasarannya tidak hanya di wilayah Desa Manyarsidorukun, namun juga di luar Desa Manyar Sidorukun bahkan sampai ke luar kecamatan Manyar. Karena Ibu Hj Ita sudah memanfaatkan pemasaran online melalui BBM, Facebook, dan WA, maka Ibu Hj Ita secara berkala telah memperbaharui postingan-postingan promosinya. Sebelum mengikuti pelatihan, Ibu Hj Ita jarang sekali memperbaharui postingan-postingan promosinya. Rutinnya Ibu Hj Ita dalam memperbaharui postingan promosinya, telah dirasakan dampak positifnya. Bagi konsumen lama, mereka ingin mencoba lagi kerupuk yang ditawarkan dan konsumen baru tertarik dengan produk yang diiklankan.

Sehubungan dengan pemasaran yang meluas, maka pendapatan yang diterima Ibu Hj Ita juga bertambah. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan, Ibu Hj Ita telah mampu memisahkan hasil dari penjualan kerupuk dengan keuangan keluarga. Hal ini dilakukan agar pendapatan tidak bercampur serta tidak mengalami kesulitan dalam mengetahui nominal laba/rugi. Ibu Hj. Ita juga telah mampu menyisihkan sekitar 40% dari omset penjualan untuk ditabung.

Dalam menetapkan harga jual kerupuk juga sudah menggunakan mekanisme penetapan harga sebagaimana materi yang disampaikan dalam pelatihan manajemen keuangan.

3. Kerupuk Noel Crab

Kerupuk Noel Crab diproduksi oleh Ibu Nunul. Dalam memasarkan kerupuk goreng, Ibu Nunul menjajakan ke rumah-rumah. Lambat laun usaha kerupuk goreng sudah dikenal oleh masyarakat Desa Manyarsidorukun. Setelah mengikuti pelatihan manajemen pemasaran, Ibu Nunul lebih memperluas cakupan pemasarannya tidak hanya di wilayah Desa Manyarsidorukun, namun juga di luar Desa Manyar Sidorukun bahkan sampai ke luar kecamatan Manyar. Karena distribusi pemasaran kerupuk goreng sudah meluas sampai ke luar kecamatan Manyar, Ibu Nunul sudah mulai melakukan pemasaran online melalui facebook, WA, maupun BBM.

Meski pemasaran online yang dijalankan masih relatif baru, namun dampak yang dirasakan cukup positif. Ibu Nunul merasakan ada peningkatan omset penjualan. Sehubungan dengan pemasaran yang meluas, maka pendapatan yang diterima Ibu Nunul juga bertambah. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan, Ibu Nunul mulai berusaha memisahkan hasil dari penjualan kerupuk dengan keuangan keluarga. Cara sederhana yang dilakukan Ibu Nunul adalah dengan memisahkan dompet yang digunakan untuk menyimpan keuangan keluarga dengan dompet yang dipakai untuk usaha. Cara sederhana ini, terbukti bisa dipakai Ibu Nunul dalam mengukur laba dan omset penjualan. Dalam menetapkan harga jual kerupuk juga sudah menggunakan mekanisme penetapan harga sebagaimana materi yang disampaikan dalam pelatihan manajemen keuangan.

4. Kerupuk Udang Sari Laut

Kerupuk Udang Sari Laut diproduksi oleh Ibu Afifah. Pada mulanya dalam memasarkan produknya, Ibu Afifah hanya menjualnya di warung sendiri. Setelah mengikuti pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan, ada perubahan metode pemasaran kerupuk. Ibu Afifah mulai memperluas jangkauan pemasaran tidak hanya dijual di warungnya sendiri, namun juga dititip-titipkan di warung-warung di Desa Manyarsidorukun dan sekitarnya.

Dalam mengelola keuangan, semula Ibu Afifah masih belum mampu memisahkan hasil dari penjualan kerupuk dengan keuangan keluarga. Namun setelah mengikuti pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan, ada perubahan dalam pengolahan keuangan meskipun secara sederhana. Ibu Afifah menggunakan dompet yang berbeda untuk menyimpan uang hasil penjualan dan uang untuk kebutuhan keluarga. Hal ini dilakukan supaya ada kejelasan pendapatan yang diperoleh dari usaha setelah dikurangi biaya produksi. Dalam menetapkan harga jual kerupuk juga sudah menggunakan mekanisme penetapan harga sebagaimana materi yang disampaikan dalam pelatihan manajemen keuangan.

Upaya ini telah berdampak pada peningkatan pendapatan Ibu Afifah. Pendapatan per minggu bisa mencapai lebih dari 300.000. Ibu Afifah bisa menabung kira-kira 40% dari laba.

5. Kerupuk Ikan Nur Yaumin

Kerupuk ikan Nur Yaumin diproduksi oleh Ibu Nur Yaumin. Pada mulanya dalam memasarkan produknya, Ibu Nur Yaumin hanya menjualnya di warung sendiri dan beberapa warung tetangga. Setelah mengikuti pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan, ada perubahan metode pemasarannya. Ibu Nur Yaumin mulai memperluas jangkauan pemasaran tidak cukup hanya dititipkan di warung terdekat, namun juga dititipkan di warung-warung di Desa Manyarsidorukun dan sekitarnya.

Dalam mengelola keuangan, Ibu Nur Yaumin telah mampu memisahkan hasil dari penjualan kerupuk dengan keuangan keluarga. Ibu Nur Yaumin mampu memisahkan pendapatan usaha dengan keuangan keluarga, Ibu Nur Yaumin menggunakan dompet yang berbeda untuk menyimpan uang hasil penjualan dan uang untuk kebutuhan keluarga. Dalam mengelola keuangan, Ibu Nur Yaumin sudah mampu memisahkan hasil dari penjualan dengan keuangan keluarga. Pendapatan dari usaha penjualan kerupuk juga mengalami peningkatan. Setiap minggu Ibu Nur Yaumin memperoleh pendapatan lebih dari 300.000. Dengan pendapatan yang bertambah Ibu Nur Yaumin mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Dalam menetapkan harga jual kerupuk juga sudah menggunakan mekanisme penetapan harga sebagaimana materi yang disampaikan dalam pelatihan manajemen keuangan.

Dari paparan di atas, membuktikan bahwa ada perubahan yang positif dari usaha yang dijalankan ibu-ibu jamaah Musholla Manbaul Falah setelah mengikuti pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan. Perubahan positif ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini saja, namun juga terus dikembangkan selepas tim pengabdian selesai bertugas. Untuk itu, dalam rangka memantau, mengevaluasi, serta meningkatkan perkembangan usaha ibu-ibu Jama'ah Musholla Manbaul Falah telah disepakati terbentuknya koordinator tim ekonomi Musholla Manbaul Falah. Tim ini diketuai oleh Ibu Hj. Cholishotun Nafsiyah, M.Pd. Tim inilah yang menjadi inisiasi terbentuknya kelompok usaha. Adanya koordinator tim ekonomi ini yang menjadi motor segala kegiatan perekonomian di Musholla.

Kini pada tahun 2019, setelah tiga tahun selesai pendampingan. Dampak pendampingan telah dirasakan manfaatnya sampai kini. Musholla yang pada umumnya dipakai sebagai kegiatan keagamaan ansich, digunakan pula sebagai pusat kegiatan ekonomi warga. Kegiatan penguatan ekonomi masyarakat semakin berkembang. Koordinator tim ekonomi yang telah berhasil dibentuk pada saat pendampingan yaitu, Ibu Hj. Cholishotun Nafsiyah, M.Pd berkolaborasi dengan pengurus musholla bersemangat dalam menggiatkan kegiatan berbasis ekonomi. Kegiatan berbasis ekonomi bahkan dimasukkan dalam program kerja musholla. Kegiatan tersebut adalah program penguatan Islamic entrepreneurship dalam bentuk kajian ekonomi maupun pelatihan yang melibatkan tim pendamping dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Sinergi antara pengurus musholla dan aparat desa dalam pengembangan ekonomi jamaah musholla juga terjalin baik. Hal ini dibuktikan dengan komitmen pengurus musholla dan aparat desa dengan melakukan pemasaran produk secara aktif dan massif. Salah satu bentuknya

adalah menjadikan kerupuk yang dikelola jamaah musolla sebagai salah satu sajian wajib dalam acara-acara penting di tingkat desa maupun kecamatan.



Gambar 2: Pengemasan Kerupuk Disertai Label yang Siap Dipasarkan

Pendampingan yang dilakukan telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan perempuan sekaligus jamaah musholla putri. Pendampingan yang dilakukan telah meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Pendampingan yang dilakukan telah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sebagaimana pandangan Anwar (Anwar, 2007).

Peruntukan tempat ibadah sebagai pusat pengembangan ekonomi juga sejalan dengan hasil penelitian Arif Suryadi yang dilakukan di Masjid Nurul Ashri Sleman. (Suryadi, 2015). Atas kerjasama yang solid dari unsur desa, pengurus, dan jamaah musholla, kini bisnis olahan sea food yang ditekuni para jamaah musholla terus berkembang dengan baik serta dapat menyokong kemajuan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian telah tampak adanya hasil yang terukur yang terlihat nyata dalam setiap tools pengabdian yang dilaksanakan. Ada perubahan yang lebih baik. Perubahannya tampak pada dua ranah. Ranah pada saat proses pengabdian dan setelah pengabdian. Saat proses pengabdian, terjadi perubahan pada komunitas yaitu:

1. Muncul kesadaran akan problem yang dihadapi
2. Muncul kemauan untuk melakukan perubahan
3. Respon, antusiasme dan kerjasama yang baik dalam memberikan informasi untuk kemajuan dan pengembangan usaha selama proses pendampingan.

Sementara itu, perubahan setelah proses pengabdian pada komunitas diantaranya adalah:

1. Mengolah, mengemas, dan melakukan pelabelan produk aneka kerupuk kemasan secara lebih baik dibanding sebelum mengikuti pelatihan
2. Melakukan manajemen usaha yang lebih baik meliputi pencatatan, pelaporan keuangan dan evaluasi bisnis dengan baik
3. Memperluas jangkauan pemasaran aneka kerupuk kemasan berbasis manajemen pemasaran tidak hanya di wilayah Desa Manyarsidorukun tetapi sampai ke luar desa bahkan sampai meluas ke kota.
4. Terbentuk kelompok usaha aneka kerupuk kemasan berbasis majelis musholla sehingga kelompok usaha setidaknya dapat menjalankan bisnis sesuai prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kelompok usaha ini diketuai oleh Ibu. Hj Cholishotun Nafsiyah.

SARAN-SARAN

Untuk memaksimalkan usaha lebih baik lagi diperlukan juga upaya pelaporan keuangan dan evaluasi bisnis. Oleh karena itu diperlukan pendampingan lanjutan khususnya terkait manajemen pelaporan keuangan. Pengurus Musholla bersama tim ekonomi yang terbentuk dapat merencanakan program pendampingan dalam aspek pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus dkk, 2014, *Modul Participatory Action Research*, LPPM UIN Sunan Ampel, Surabaya, h. 35
- Anwar, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Alfabeta, Bandung, h.25
- Daradjad, Zakiyah, 2010, Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita, *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, XVII, 01 (Januari-Juni 2010)
- Salahuddin, Nadhir dkk, 2015, *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya*, LPPM IAIN Sunan Ampel, h. 15
- Setyawati, Yuningtyas, 2011, *Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengembangan Manajemen Komoditas Perekonomian Berbasis Potensi Lokal. (Studi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY)*, Laporan Penelitian, Universitas Atmajaya, Yogyakarta 2011.
- Suryadi, Arif, 2015, *Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Nurul 'Ashri Catur Tunggal Depok Sleman*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF INOVASI SEKTOR BISNIS DAN PUBLIK

Anugerah Yuka Asmara¹ dan Irwantoro²

¹Peneliti Kebijakan Iptek dan Inovasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: a.yuka.asmara@gmail.com

²Peneliti Kebijakan Publik di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur

Email: irwanlitbangjatim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan suatu bentuk badan hukum yang diprakarsai oleh masyarakat desa dan dilegalkan melalui peraturan pemerintah desa. Pembentukan BUM Desa tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi payung hukum bagi setiap pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk BUM Desa melalui pemerintah desa setempat. BUM Desa merupakan organisasi yang bergerak di bidang baik profit maupun non profit yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dua peran yang dijalankan oleh BUM Desa menjadi tantangan tersendiri mengingat badan usaha yang berada di bawah struktur organisasi pemerintah desa ini akan menghadapi berbagai persoalan baik yang terkait dengan sektor finansial maupun non finansial di tengah derasnya kompetisi dunia usaha saat ini. Studi ini menggunakan data literatur sebagai sumber data utama dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Selain itu, studi ini akan memberikan contoh praktik BUM Desa yang ada di Indonesia sebagai bentuk aplikasi riil dari konsep inovasi sektor bisnis dan publik. Temuan studi ini bahwa BUM Desa harus melakukan berbagai bentuk inovasi agar dapat bersaing di pasar dan juga mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi publik. BUM Desa dapat melakukan dua bentuk inovasi sekaligus yaitu inovasi untuk mencari keuntungan organisasi dan juga inovasi untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Kedua bentuk inovasi tersebut harus didasarkan pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk memberikan iklim dan fasilitasi agar BUM Desa menjadi salah satu bentuk badan usaha inovatif saat ini.

Kata Kunci: Peran, Badan Usaha Milik Desa, Inovasi, Bisnis, Publik

ABSTRACT

Village-Owned Enterprise (VOE) is a legal entity initiated by local communities and formally legitimized through village government law. Formation of VOE is not separated from National Act Number 6/2014 about Village that be legality for each local government to form VOE through local village government. VOE is a dual function organization, in the first hand it is aimed to produce profit, and in the another hand it is aimed to provide optimal public service. This dual function of VOE is a challenging regarding with financial or non financial factors due to fierce competition among enterprises in the global era. This study primarily uses literature data by using descriptive-qualitative method. In addition, this study will provide real practice of VOE in Indonesia in term of application on business and public innovation. This study finding is that VOE must innovate to compete with other enterprises as well as to keep existence of VOE as public organization entity. VOE should be innovative in two ways viz. innovation to get profit for organization and innovation to provide best public service to citizens. Both innovation types are aimed to be one goal namely to increase villagers prosperity. Surely, it needs support from central government, province government, and government at regency or municipality level to create climate and facilitate VOE in order to be innovative enterprise at current time.

Keywords: Role, Village-Owned Enterprise, Innovation, Business, Public

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan suatu bentuk badan hukum yang diprakarsai oleh masyarakat desa dan dilegalkan melalui peraturan pemerintah desa. Pembentukan BUM Desa tidak terlepas dari Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi payung hukum bagi setiap pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk BUMDesa melalui pemerintah desa setempat. Pasal 1 butir 6 dalam UU RI No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Pasal di atas menegaskan bahwa BUMDesa merupakan organisasi yang bergerak di bidang baik profit maupun non profit yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dua peran yang dijalankan oleh BUMDesa menjadi tantangan tersendiri mengingat badan usaha yang berada di bawah struktur organisasi pemerintah desa ini akan menghadapi berbagai persoalan baik yang terkait dengan sektor finansial maupun non finansial di tengah derasnya kompetisi dunia usaha saat ini. BUMDesa dituntut tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi keberlangsungan usahanya dan peningkatan kesejahteraan anggotanya, namun juga dituntut untuk mengoptimalkan proses partisipasi masyarakat desa agar terlibat di dalam aktivitas tersebut.

Pasal 89 UU RI No. 6/2014 tentang Desa secara spesifik memberikan dua fungsi utama BUM Desa yang ditujukan baik untuk kepentingan bisnis dan sosial sebagaimana berikut: “Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. Legalitas ini jelas menjadi pedoman bagi setiap BUM Des untuk menjalankan 2 (dua) fungsi utama yaitu sebagai entitas bisnis dan juga sosial.

Sebagai entitas bisnis dan sosial. BUM Des memiliki tujuan untuk menghasilkan profit dan juga memberikan pelayanan publik. Kedua tujuan tersebut tentu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Tantangan saat ini ialah BUM Des yang merupakan aktivitas ekonomi berupa skala usaha kecil menengah (UKM) yang ada di level desa harus dihadapkan persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan-perusahaan sejenis di level yang lebih tinggi, seperti tingkat kabupaten/kota, nasional, bahkan internasional. Menurut Tambunan (2009), para pelaku UKM yang tidak dapat berkompetisi di pasar cenderung akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis di level global. Artinya, aktivitas ekonomi selevel BUM Desa pun tidak bisa menjalankan proses bisnis sebagaimana biasanya jika ingin usahanya eksis di tengah kompetisi global.

Tuntutan lainnya ialah adanya pemberian pelayanan publik prima. Sebagai bagian dari agen pemerintah, BUM Desa juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Perihal konteks pelayanan publik pun, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) juga menyelenggarakan kompetisi pelayanan publik atau disebut sebagai Sistem Informasi dan Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang melibatkan seluruh agen-agen pemerintah mulai level pusat, provinsi, kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk juga BUMDes di dalamnya (Kemenpan & RB, 2018).

BUMDes harus memenuhi 2 (dua) tujuan utama sekaligus yaitu mencari keuntungan dan memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat. Kedua hal tersebut dilakukan secara bersamaan melalui berbagai terobosan baru atau lazim disebut dengan inovasi. Menurut Asmara dan Rahayu (2019:59) inovasi diartikan sebagai “hal-hal baru yang bermula dari ide-ide kreatif dan

kemudian dipersepsikan baru oleh individu atau kelompok organisasi di suatu wilayah tertentu. Inovasi haruslah sesuatu yang implementatif, artinya inovasi merupakan praktik riil dari ide-ide baru yang dimunculkan oleh individu atau kelompok individu tersebut. Praktik ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, dan bukan aktor tunggal semata”.

Praktik inovasi yang dilakukan oleh BUMDes dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu inovasi di sektor bisnis untuk memenuhi tujuan pertama, dan inovasi di sektor publik untuk memenuhi tujuan kedua. Menurut Mytelka (1999), inovasi sektor bisnis, yaitu pada perusahaan-perusahaan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan biaya produksi yang efisien dan bertahan di derasnya kompetisi global saat ini. Sementara menurut OECD (2017), inovasi sektor publik terkait dengan upaya-upaya organisasi publik dalam merespon permintaan masyarakat. Hal ini karena ekosistem dari publik itu sendiri mengalami perubahan meskipun levelnya produktivitasnya rendah yang disebut sebagai *re-thinking* dan *re-scoping* dari proses, struktur, dan sistem pada ekosistem publik.

B. Rumusan Masalah

Dilema BUMDes sebagai entitas bisnis dan publik dalam lingkup desa dapat dianggap sebagai suatu tantangan yang harus diselesaikan. Kompetisi global tidak hanya mencakup bagaimana suatu perusahaan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain antar wilayah hukum, namun juga bagaimana agen-agen publik di suatu yuridiksi tertentu dapat memberikan pelayanan publik prima sehingga dapat menjadi daya tarik bagi warganya untuk berkontribusi lebih pada pembangunan wilayahnya, termasuk menarik pelaku-pelaku ekonomi untuk terlibat dalam mendorong perekonomian di wilayah tersebut.

Studi ini fokus pada bagaimana BUMDes dapat melakukan 2 (dua) bentuk inovasi sekaligus baik inovasi sektor bisnis maupun inovasi sektor publik sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan aktivitas usahanya di tengah-tengah kompetisi global saat ini. Untuk itu, studi ini mengajukan 2 (dua) pertanyaan penelitian yaitu: (a) Apa saja bentuk inovasi sektor bisnis dan publik yang dapat dilakukan oleh BUMDesa?; (b) Bagaimana bentuk-bentuk inovasi tersebut dapat dijalankan oleh BUMDesa? Adapun tujuan dari penelitian ini: (a) mengetahui bentuk-bentuk inovasi sektor bisnis dan publik yang dapat dilakukan oleh BUMDesa; (b) mendeskripsikan bentuk-bentuk inovasi tersebut dapat dijalankan oleh BUMDesa.

C. Tinjauan Pustaka

1. Usaha Kecil Menengah dan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Tambunan (2012), Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia. perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan / atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi/ antarl wilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/ sektor yang sama.

Usaha mikro kecil banyak dijumpai di wilayah perdesaan terutama berkaitan dengan jenis usaha tersebut lebih banyak dilakukan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki oleh desa dimana menurut Setyobudi (2007), sekarang ini banyak ragam jenis usaha UKM di Indonesia, diantaranya: (a) usaha

perdagangan keagenan: agen koran/majalah, sepatu pakaian dan lain-lain; (b) pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain; (c) usaha pertanian meliputi perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain; (d) Peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi; (e) Perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain; usaha industri makanan/minuman; (e) pengrajin konveksi dan lain-lain. Banyaknya usaha kecil menengah yang dijalankan berdasarkan potensi lokal di kawasan perdesaan maka sudah barang tentu membutuhkan suatu lembaga yang benar-benar dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang akan berujung pada kemandirian desa seperti yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun lembaga yang paling sesuai untuk melakukan usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Badriyadi (2012) BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim (2013) mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Menurut Maryunani (2008) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut :

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
 - b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
 - c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*);
 - d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
2. Inovasi Sektor Bisnis dan Publik

Secara umum inovasi diartikan sebagai pengembangan dan penerapan yang dinilai berhasil akan pengetahuan baru. Konsep ini berakar dari karya Joseph Schumpeterian yang mengartikan bahwa inovasi merupakan kombinasi baru dari faktor-faktor produksi. Namun pakar lain kemudian mengartikan inovasi lebih luas sebagaimana yang dicetuskan oleh Edquist bahwa inovasi tidak hanya terkait dengan kebaruan pada produk-produk (barang dan jasa), namun juga kebaruan pada proses (teknologi dan organisasi). Menurut Edquist, inovasi proses terkait dengan bagaimana cara-cara baru dalam menghasilkan suatu produk, sementara inovasi produk ialah kebaruan dari produk itu sendiri (Tambunan, 2009).

Di sektor bisnis atau perusahaan, inovasi merupakan hal baru yang dapat dipasarkan, baik yang dihasilkan melalui aktivitas penelitian dan pengembangan (litbang), maupun aktivitas non litbang (Asmara, 2019). Inovasi ditujukan untuk mencari terobosan di berbagai hal mulai produk (barang dan jasa), proses, organisasi, dan pemasaran yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing suatu perusahaan (organisasi bisnis) di tengah arus kompetisi global saat ini (OECD-Eurostat, 2005). Dengan demikian, inovasi sektor bisnis sangat erat dengan capaian profit dari suatu perusahaan dengan merespon permintaan pasar.

Inovasi sektor publik merupakan bentuk inovasi yang dasar sifatnya bermula dari inovasi sektor bisnis (Osborne and Brown, 2013; Gault, 2018). Inovasi sektor publik dapat berupa kategori inovasi sektor bisnis seperti hal mulai produk, proses, organisasi, dan pemasaran sebagaimana yang dikategorisasi oleh OECD-Eurostat (2005). Namun demikian, inovasi sektor publik memiliki bentuk dan karakteristik yang lebih luas dari hanya keempat kategori tersebut. Beberapa pakar seperti Windrum (2008), Joyce (2013), dan Hartley (2013) menyebutkan bahwa salah satu karakteristik utama dalam inovasi sektor publik ialah adanya pengakuan atau legitimasi dari sisi politis.

Windrum (2008) secara tegas memberikan karakteristik inovasi sektor publik dengan memperluas 4 (empat) kategori yang dicetuskan oleh OECD-Eurostat (2005) menjadi 6 (enam) bentuk inovasi sektor publik yaitu inovasi pelayanan, inovasi delivery pelayanan, inovasi organisasi, inovasi konseptual, inovasi kebijakan, dan inovasi sistemik. Inovasi pelayanan ialah kebaruan pada penyediaan barang dan jasa publik yang dihasilkan. Inovasi delivery pelayanan ialah kebaruan dari suatu agen publik untuk mendeliveri inovasi produk dan pelayanan tersebut ke konsumen. Inovasi organisasi ialah terkait dengan kebaruan di dalam manajemen organisasi dan sistem internal administrasi. Inovasi konseptual terkait kebaruan dari aktor-aktor publik dalam menggagas suatu perubahan. Inovasi kebijakan terkait dengan kebaruan dari kebijakan yang akan dirumuskan dan/atau dijalankan. Inovasi sistemik terkait dengan bagaimana agen publik menjalin kerjasama baik dengan agen-agen publik lain maupun dengan agen-agen swasta.

Inovasi sektor publik mendasarkan perhitungan manfaat sosial dan politik, bukan ekonomi semata (Fuglsang and Pedersen, 2011). Bahkan menurut Asmara dan Rahayu (2019) inovasi sektor publik bukan hanya aktivitas imitasi dari berbagai bentuk perubahan baru yang dilakukan oleh organisasi bisnis, namun praktik-praktik inovasi tersebut dapat muncul dari inspirasi pengetahuan lokal yang ada dan berbagai bentuk aktivitas berlanjut yang ada di dalam organisasi publik itu sendiri. Dorongan tersebut bisa berupa faktor internal dimana suatu organisasi publik ingin adanya perubahan organisasi yang lebih baik dan faktor internal berupa desakan dari masyarakat akan tuntutan hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang lebih baik.

Hartley (2013) secara tegas memisahkan bentuk inovasi sektor bisnis dan publik di dalam fase implementasinya sebagaimana yang dapat dilihat di dalam **Tabel 1.** berikut.

Tabel 1.
Perbedaan Inovasi Sektor Bisnis dan Publik Pada Fase Implementasi

	Sektor Bisnis	Sektor Publik
Desain organisasi yang meliputi struktur birokrasi, ukuran, dan	Desain organisasi yang terlalu kaku dan gemuk atau birokratis	Desain organisasi yang terlalu kaku dan gemuk atau birokratis cenderung

budaya organisasi	cenderung menghambat praktik inovasi Butuh organisasi yang adaptif terhadap lingkungan Menumbuhkan budaya inovasi menjadi faktor kritikal	menghambat praktik inovasi Butuh organisasi yang adaptif terhadap lingkungan Menumbuhkan budaya inovasi menjadi faktor kritikal
Ukuran keberhasilan	Berdasar capaian seberapa besar laba (profit) yang dihasilkan oleh organisasi tersebut (manfaat ekonomi) Adanya posisi pasar terhadap saham pasar (<i>market share</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dapat diakses atau diterima oleh masyarakat (manfaat sosial, ekonomi, politik)
Pola Pertanggungjawaban	Kepada perusahaan sebagai entitas tunggal Mekanisme pertanggungjawaban sederhana (<i>single line structure</i>)	Kepada publik (masyarakat) sebagai entitas menyeluruh Mekanisme pertanggungjawaban kompleks (<i>multi line structure</i>)

Sumber: Hartley (2013) dengan tambahan penulis (2019)

Tabel di atas tentu memperjelas bahwa inovasi sektor bisnis dan publik memiliki kesamaan dalam hal desain organisasi yang seharusnya ramping dan *adaptable* terhadap berbagai bentuk perubahan yang ada. Namun demikian, ukuran keberhasilan serta pola pertanggungjawaban antar dua organisasi bisnis dan publik menjadi pembedanya. Dengan ini jelas bahwa baik inovasi sektor bisnis dan publik memiliki irisan persamaan sifat mendasar bahwa inovasi dapat terjadi di kedua bentuk organisasi baik bisnis dan publik asalkan terdapat desain organisasi yang adaptif terhadap lingkungan dan juga tumbuhnya budaya inovasi di masing-masing organisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur atau desk research dengan metode kualitatif-deskriptif. Metode tersebut menegaskan bahwa studi ini tidak mencari pembuktian objek secara generalisasi, melainkan mengemukakan gejala-gejala sosial yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulannya berdasarkan pandangan dari peneliti. Penelitian ini dilakukan sejak 1 Juli 2019 hingga 9 Agustus 2019 secara sekuensial dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait.

Data sekunder merupakan data utama yang menjadi rujukan studi ini dengan dikuatkan oleh peneliti sebagai instrumen utamanya. Rujukan literatur-literatur baik berupa jurnal ilmiah (nasional dan internasional), prosiding ilmiah (nasional dan internasional), buku, dokumen, peraturan-perundangan, serta artikel lain terkait menjadi penting baik sebagai sumber data maupun analisisnya.

Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Huberman and Miles (1983) dengan 4 (tahapan) mulai dari reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil akhir studi ini ialah berupa penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi kebijakan terkait analisis yang sudah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Inovasi Pada BUMDesa

BUMDesa dapat melakukan berbagai bentuk inovasi baik kaitannya dengan organisasi bisnis maupun organisasi publik. Bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa akan bervariasi tergantung dari tujuan organisasi dan persoalan yang akan diselesaikan.

1. Inovasi Sektor Bisnis

BUMDesa dapat melakukan berbagai bentuk inovasi dalam mendorong aktivitas usaha ekonominya guna mendapatkan profit maupun bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain sejenis. Inovasi dalam hal ini dilakukan oleh BUMDes guna memperebutkan pasar (*profit oriented*) dan juga efisiensi biaya produksi (*less production cost*) sehingga harga jual dan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar.

Mengacu pada OECD-Eurostat (2005), ada 4 (empat) bentuk inovasi yang bisa dilakukan oleh BUMDes yaitu, inovasi produk, inovasi proses produksi, inovasi pemasaran, dan inovasi organisasi. Contoh BUMDes yang dijelaskan di dalam **Tabel 2.** berikut ini merupakan BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan BUMDes sangat dekat dengan sektor pariwisata dalam pengelolaan bisnisnya.

Tabel 2.
Empat Bentuk Inovasi BUMDes Sebagai Organisasi Bisnis

Bentuk Inovasi Sektor Bisnis	Contoh praktik yang <i>feasible</i> dilakukan oleh BUM Desa
Inovasi Produk (barang dan jasa) Inovasi sangat umum dilakukan oleh setiap organisasi bisnis dengan membuat jenis produk baru (barang dan jasa) yang dihasilkan sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Hal ini bisa dilakukan dengan tujuan merebut pasar yang sudah ada di produk sejenis, membuat pasar baru dengan produk yang baru tersebut, atau membuat segmen pasar tertentu agar tetap dapat bertahan di dunia persaingan saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat suatu merchandise atau souvenir bagi wisatawan/orang asing dengan mengusung tema keunikan desa ▪ Mengolah bahan baku yang ada di desa menjadi produk bernilai tambah (misal tanaman kopi diolah menjadi kopi bubuk dengan cita rasa khas desa) ▪ Membuat obyek wisata alam yang dikemas dengan tradisi masyarakat, edukasi, dan juga sentuhan teknologi
Inovasi Proses Produksi Inovasi ini identik dengan praktik-praktik baru dari suatu aktivitas produksi barang dan jasa di organisasi bisnis. Setiap organisasi bisnis sering melakukan inovasi di dalam suatu proses produksi baik itu untuk mendukung penciptaan produk-produk baru maupun untuk efisiensi biaya produksi. Inovasi dalam hal ini sering menjadi aktivitas pendukung dari inovasi produk ataupun terkait dengan estimasi biaya produksi yang dikeluarkan ketika harga bahan baku meningkat, sementara kemampuan daya beli masyarakat rendah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberdayakan masyarakat desa dalam pembuatan merchandise atau souvenir ▪ Menyederhanakan proses produksi pembuatan kopi bubuk dengan sentuhan teknologi, yaitu penggunaan mesin penggiling kopi listrik, bukan ditumbuk secara konvensional, sehingga kopi bubuk yang dihasilkan lebih banyak dalam waktu tertentu ▪ Pembuatan obyek wisata alam dengan memanfaatkan sampah rumah tangga daur ulang sehingga biaya pembuatan dapat diminimalisir
Inovasi Pemasaran Inovasi dalam ini sangat identik dengan cara organisasi bisnis untuk membuat konsumen tertarik dengan berbagai produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Seringkali inovasi pemasaran menjadi inovasi pertama yang dilakukan oleh organisasi bisnis ketika omset penjualannya menurun ataupun ada pesaing di segmen pasar sejenis, sementara produk yang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknik penjualan merchandise atau souvenir melalui <i>media online</i> atau menitipkan ke pusat-pusat perbelanjaan di kota terdekat. ▪ Mengemas produk kopi bubuk dengan kemasan yang menarik konsumen, tidak mudah rusak, dapat dibawa bepergian keluar kota/negeri, serta menunjukkan identitas

Bentuk Inovasi Sektor Bisnis	Contoh praktik yang <i>feasible</i> dilakukan oleh BUM Desa
dihasilkan dan proses produksi tidak mengalami kebaruan.. tetapi juga inovasi pemasaran bisa saja dilakukan karena dampak dari adanya inovasi produk dan proses produksi yang dilakukan oleh organisasi bisnis sehingga mau tidak mau organisasi ini memperkenalkan produk-produk barunya ke pasar melalui inovasi.	<p>lokal daerah disertai label halal</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan objek wisata alam ke sekolah-sekolah dasar, menengah, dan atas hingga ke perguruan tinggi. Selain itu, mengiklankan objek wisata tersebut melalui media massa cetak dan elektronik (media <i>online</i>) serta media sosial
<p>Inovasi Organisasi</p> <p>Inovasi organisasi ialah kebaruan di dalam organisasi yang membawa perubahan baru terhadap sebagian atau seluruh organisasi seperti manajemen organisasi, struktur organisasi, ataupun sumber daya organisasi. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi internal organisasi (keuangan, visi-misi, gaya kepemimpinan, dan lainnya) dan juga dengan kondisi eksternal organisasi (aturan pemerintah, kebutuhan pasar, persaingan usaha, politik, perkembangan iptek, dan lainnya). Perubahan tersebut bisa dilakukan secara bertahap maupun radikal guna mempertahankan eksistensi organisasi bisnis tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> BUMDes dapat merekrut pegawai-pegawai kreatif yang biasanya diisi oleh anak-anak karang taruna desa setempat untuk membuat desain merchandise atau souvenir yang unik serta memasarkannya dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) BUMDes memiliki divisi/unit kerja khusus yang bertanggung jawab untuk produksi kopi kemasan khas desa tersebut mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran. BUMDes dapat menjalin mitra kerjasama dengan agen perjalanan wisata, masyarakat adat desa, dan dinas pariwisata untuk membentuk konsep wisata alam yang peduli lingkungan, ramah keluarga, dan terjangkau.

Sumber: Hasil interpretasi penulis dengan konsep dasar dari OECD-Eurostat (2005)

BUMDes yang menjadi contoh di atas memang di sektor pariwisata, namun demikian, bukan berarti hanya BUMDes yang bergerak di sektor pariwisata yang bisa melakukan inovasi, tetapi BUMDes di sektor aktivitas lain juga bisa melakukan inovasi. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi dari sumber daya yang ada di desa tersebut, seperti tradisi lokal, kemampuan ekonomi dan pendidikan masyarakatnya, sumber daya alam, infrastruktur, dan dukungan pemerintah setempat (pemerintah desa yang didukung oleh pemerintah kabupaten).

2. Inovasi Sektor Publik

BUMDes juga penting dalam melakukan inovasi sebagai organisasi publik. Sebagai organisasi publik, BUMDes berinovasi tidak untuk mencari keuntungan ekonomi semata, melainkan tujuan utamanya ialah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini karena BUMDes juga berdiri karena ada sokongan dana dan fasilitas dari pemerintah setempat.

Mengacu pada model inovasi sektor publik yang digagas oleh Windrum (2008), ada 6 (enam) bentuk inovasi yang dapat dilakukan oleh BUMDes sebagai organisasi penyedia pelayanan publik yaitu inovasi pelayanan, inovasi delivery pelayanan, inovasi organisasi, inovasi konseptual, inovasi kebijakan, dan inovasi sistemik (**Tabel 3.**). Contoh BUMDes yang digunakan masih terkait dengan sektor pariwisata dengan alasan untuk memudahkan pembaca dalam memahami praktik inovasi BUMDes baik sebagai entitas bisnis maupun publik.

Tabel 3.
Enam Bentuk Inovasi BUMDes Sebagai Organisasi Publik

Bentuk Inovasi Sektor Publik	Contoh praktik yang <i>feasible</i> dilakukan oleh BUM Desa
<p>Inovasi Pelayanan</p> <p>Inovasi pelayanan sangat umum dilakukan oleh setiap organisasi publik karena tujuan utama organisasi publik ialah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai konsumen utama. Berbagai bentuk pelayanan publik dapat diberikan mulai dari kebaruan dalam hal bentuk barang dan jasa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BUMDes dapat menerbitkan kartu khusus bagi masyarakat lokal, kaum difabel, keluarga dari anak-anak berprestasi, atau mereka yang masuk kategori masyarakat miskin untuk dapat mengakses berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh desawisata dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis (inovasi produk) ▪ BUMDes dapat memberikan pelatihan rutin kepada masyarakat desa sekitar terkait pembuatan souvenir, pembuatan kopi kemasan, atau hal lainnya (inovasi jasa)
<p>Inovasi Deliveri Pelayanan</p> <p>Inovasi deliveri pelayanan merupakan cara baru agar barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi publik dapat diterima oleh konsumen dengan cara yang unik. Selain itu, tujuan inovasi ini juga untuk melakukan efisiensi terhadap biaya pembuatan produk layanan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BUMDes dapat memfasilitasi pembuatan kartu khusus bagi mereka yang terpilih dengan cara registrasi <i>online</i> dengan mengisi data secara benar dan kemudian melakukan verifikasi. ▪ Pelatihan rutin yang diberikan kepada masyarakat desa untuk menopang sektor pariwisata desa dapat diberikan secara gratis dan dapat dilakukan di sore atau malam hari, atau di waktu saat masyarakat desa selesai dari aktivitas rutin sehari-hari agar mereka mau meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini
<p>Inovasi Organisasi</p> <p>Inovasi organisasi merupakan kebaruan di dalam organisasi sektor publik. Sama halnya dengan di sektor bisnis, kebaruan dalam hal ini meliputi perubahan struktur organisasi, manajemen, dan sumber daya yang digunakan. Hal ini bisa dipengaruhi karena ada tuntutan internal organisasi (faktor kepemimpinan, efisiensi biaya, rencana kerja organisasi, dan lainnya). Selain itu juga adanya tuntutan eksternal organisasi (situasi politik, kebijakan pemerintah/regulasi, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik, dan lainnya).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Salah satu divisi/unit kerja BUMDes diisi oleh kelompok pemuda yang paham akan TI. Hal ini agar pendataan bagi kelompok penerima kartu khusus untuk mendapatkan akses wisata ke desa tersebut tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fasilitas TI dan operatornya dibutuhkan di dalam organisasi tersebut. ▪ BUMDes harus bisa mengatur waktu kerja bagi para pegawainya karena ada beberapa pegawai BUMDes yang bertanggung jawab untuk pemberian pelatihan kepada masyarakat yang seringkali hal itu dilakukan di luar jam kerja biasanya
<p>Inovasi Konseptual</p> <p>Inovasi konseptual merupakan kebaruan dari ide dasar atau desain besar dari arah organisasi ke depan. Pada umumnya inovasi tersebut muncul dari level manajemen puncak organisasi atau sekumpulan individu yang cukup berpengaruh di dalam organisasi publik tersebut. Inovasi ini bersifat sangat politis dan mendasar (radikal), sehingga perlu bentuk inovasi lain sebagai pendukungnya. Inovasi ini dilakukan karena keadaan organisasi publik saat ini dianggap belum mampu merespon kebutuhan masyarakat dan politis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan utama BUMDes bisa mencetuskan konsep wisata rakyat atau wisata inklusif, sehingga setiap orang bisa menikmati objek wisata tersebut beserta segala fasilitasnya baik dengan biaya terjangkau ataupun gratis. Tentu butuh persetujuan dari pemerintah desa ▪ Manajemen inti (pengurus) BUMDesa bersama pemerintah desa bisa mencetuskan konsep wisata dari desa oleh desa untuk desa yang berarti bahwa pengembangan wisata desa tidak lepas dari kerja keras masyarakat desa sekaligus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
<p>Inovasi Kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen Inti (Pengurus) BUMDesa dapat

Bentuk Inovasi Sektor Publik	Contoh praktik yang <i>feasible</i> dilakukan oleh BUM Desa
Inovasi kebijakan merupakan kebaruan dalam hal kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi publik. Kebaruan tersebut bisa berupa kebaruan program, regulasi, kesepakatan, panduan, ataupun bentuk kebijakan lainnya. Inovasi ini seringkali hadir untuk mendukung perubahan konsep yang dilakukan oleh manajemen puncak organisasi.	<p>mengeluarkan ketentuan bagi mereka yang terpilih mendapatkan kartu akses wisata di desa melalui syarat-syarat yang ditetapkan oleh BUMDes beserta Pemerintah Desa setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Inti (Pengurus) BUMDesa bersama Pemerintah Desa dapat mewajibkan program pelatihan/pemberdayaan bagi setiap pemuda di desa dan ibu rumah tangga sebagai bagian tidak terpisahkan dari program kemandirian desa berbasis pariwisata
Inovasi Sistemik Inovasi sistemik merupakan kebaruan dalam hal pola-pola kerjasama dan/atau kolaborasi yang dilakukan oleh suatu organisasi publik dengan organisasi publik lainnya maupun organisasi swasta (termasuk di dalamnya organisasi non-pemerintah). Kebaruan tersebut dilakukan karena adanya inovasi di dalam organisasi ataupun kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> BUMDesa dan Pemerintah Desa dapat berkolaborasi dengan dinas sosial, dinas pariwisata, Badan Pusat Statistik, dan agen pemerintah dan non pemerintah lainnya dalam mendata individu dan/atau kelompok penerima kartu khusus memasuki area wisata tersebut. Tentu diperlukan struktur organisasi yang terbuka dan fleksibel terhadap kemungkinan adanya perubahan komposisi personil di internal BUMDes akibat adanya konsekuensi kerjasama dengan pihak-pihak lain BUMDesa dapat menjalin kerjasama dengan dinas tenaga kerja, dinas perindustrian, dinas perdagangan, lembaga pelatihan swasta, lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan rutin kepada masyarakat desa secara gratis. Sebagai umpan baliknya, BUMDes dapat memberikan tenaga pengajar kartu khusus masuk area wisata yang berlaku bagi tenaga pengajar tersebut dan keluarganya

Sumber: Hasil interpretasi penulis dengan konsep dasar dari Windrum (2008)

Keenam bentuk dan praktik inovasi sektor publik dapat dilakukan sendiri oleh BUMDes maupun melibatkan pemerintah desa baik kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Inovasi yang bisa dilakukan sendiri tanpa melibatkan pemerintah desa ada di kategori inovasi pelayanan, inovasi delivery pelayanan, dan inovasi organisasi. Namun untuk inovasi konseptual, inovasi kebijakan, dan inovasi sistemik, keterlibatan pemerintah desa menjadi keharusan.

B. Feasibilitas BUM Desa Dalam Merealisaikan Bentuk-bentuk Inovasi di Sektor Bisnis dan Publik

BUMDes memang disatu sisi dituntut untuk memberikan solusi atas persoalan ekonomi masyarakat di pedesaan dan juga di satu sisi dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi itu sendiri (Kusuma dan Purnamasari, 2016; Anggraeni, 2016). Hal ini memang menjadi tantangan bagi BUMDes untuk melakukan kedua fungsi tersebut mengingat masyarakat desa tentu memiliki tantangan tersendiri seperti keterbatasan saluran komunikasi, keterbatasan akses ekonomi dan infrastruktur, keterbatasan. Begitu pula bagi BUMDes sendiri yang masih memiliki keterbatasan dalam manajemen organisasi sehingga aspek transparansi, akuntabilitas, dan fasilitas-infrastruktur masih perlu ditingkatkan (Kusuma dan Purnamasari, 2016).

Persoalan-persoalan terkait terbatasnya kemampuan manajeria dan sumber daya BUMDes bisa dilakukan melalui inovasi. Hal ini tentu akan mengarahkan pada bagaimana BUMDes dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat desa melalui inovasi. Menurut Nursetiawan (2018), inovasi pada BUMDes perlu dilakukan mengingat tuntutan permintaan masyarakat yang semakin tinggi dan beragam, sementara ketidakpastian perekonomian nasional juga masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, BUMDes yang inovatif untuk mendekatkan kebutuhan pada masyarakat sangat diperlukan saat ini.

BUMDes sebagai organisasi bisnis dan publik bisa melakukan lebih dari satu inovasi secara bersamaan, baik itu inovasi yang terkait dengan tujuan bisnis maupun tujuan publik. Kedua bentuk inovasi tersebut menjadi keharusan saat ini mengingat tuntutan masyarakat baik sebagai konsumen dari suatu produk ekonomi maupun produk publik semakin meningkat dan beragam, sehingga membuat BUMDes harus melakukan banyak perubahan (bisa dikatakan penyesuaian) terhadap berbagai dinamika masyarakat saat ini.

Di sektor bisnis, inovasi yang dilakukan BUMDes jelas untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi. Namun di sektor publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh BUM Desa menjadi isu yang sensitif. Masyarakat sebagai warga negara berhak protes jika hak-hak mereka tidak terpenuhi. Jika hal ini terus dilakukan, maka kemungkinan organisasi publik akan mengalami distrust atau ketidakpercayaan dari masyarakat termasuk juga dari para pelaku ekonomi, yang pada gilirannya akan mengakibatkan lesunya aktivitas perekonomian di suatu wilayah tersebut.

Menerapkan berbagai bentuk inovasi baik di sektor bisnis dan publik pada BUMDes memiliki lingkup berbeda. Menerapkan empat bentuk inovasi bisnis pada BUMDes dapat dilakukan secara mandiri dengan asas pertimbangan kebutuhan pasar, namun menerapkan enam bentuk inovasi sektor publik pada BUMDes memerlukan dukungan politis, baik dalam lingkup pemerintahan kecil (pemerintahan desa) maupun lingkup pemerintahan makro (pemerintahan kabupaten/provinsi/nasional) yang mana hal tersebut tergantung dari wacana inovasi yang akan digulirkan.

Menjalankan dua bentuk inovasi sekaligus di BUMDes tentu diawali dengan inovasi pada sektor publik khususnya inovasi konseptual yang diikuti oleh inovasi organisasi dan inovasi kebijakan secara bersamaan. Inovasi ini kemudian didukung oleh inovasi sistemik. Hal ini dikarenakan BUMDes merupakan entitas publik yang keberadaannya tidak terlepas dari faktor politis sehingga perubahan besar dan mendasar harus mendapat restu dari otoritas setempat, dalam hal ini pemerintah desa. Jika praktik-praktik inovasi tersebut sudah dijalankan, maka BUMDes dapat melakukan empat bentuk inovasi di sektor bisnis untuk memenuhi permintaan pasar sebagai konsumen tunggal, dan melakukan inovasi pelayanan dan inovasi delivery pelayanan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai konsumen publik.

Menjalankan inovasi sektor bisnis pada BUMDes dihadapkan pada persoalan-persoalan perhitungan untung rugi suatu perusahaan, dampaknya apakah BUMDes tersebut dapat melanjutkan usahanya dan mampu bersaing dengan perusahaan yang bergerak di segmen pasar sejenis atau tidak. Sementara, menjalankan inovasi sektor publik pada BUMDes dihadapkan pada persoalan-persoalan seberapa tanggapnya suatu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya baik kebutuhan utama maupun penunjang. Dampaknya tidak hanya pada BUMDes itu sendiri, namun meluas kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

BUMDes merupakan buah kebijakan Pemerintah Indonesia yang diamanatkan di dalam UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sama halnya dengan BUMN atau BUMD, BUMDes merupakan organisasi semi publik dan sem swasta yang disatu sisi dituntut untuk mencari keuntungan, namun di satu sisi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat Indonesia yang semakin dinamis baik sebagai konsumen ekonomi maupun konsumen publik menjadikan pembentukan BUMDes bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan dari UU RI No 6 Tahun 2014, melainkan juga BUMDes harus mampu menjalankan perannya baik sebagai organisasi bisnis dan publik.

Kedua peran BUMDes sangat kritikal dalam merespon kebutuhan masyarakat saat ini terlebih bagi masyarakat desa yang sudah bisa meleak TI. Untuk itu BUMDes harus melakukan berbagai terobosan baru (inovasi) agar kedua peran tersebut dapat dijalankan. BUMDes dapat melakukan empat bentuk inovasi di sektor bisnis, dan enam bentuk inovai di sektor publik, yang kesemuanya merupakan rangkaian dari upaya BUMDes dalam merespon kebutuhan konsumen sebagai individu dan publik. Studi ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh BUMDes terkait inovasi binsis cenderung untuk kelompok sasaran konsumen eksklusif, sementara inovasi publik cenderung untuk kelompok sasaram konsumen inklusif.

B. Rekomendasi Kebijakan

Pendekatan BUMDes dalam menjalankan peran sebagai organisasi bisnis dan publik terkait dengan pendekatan eksklusif dan inklusif. BUMDes dan Pemerintah Desa setempat sebaiknya dapat memilah kebutuhan pasar dan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk merencanakan dan menjalankan program-program BUMDes yang inovatif.

Dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap eksistensi BUMDes melalui implementasi berbagai inovasi sebaiknya diberikan melalui dukungan langsung berupa dukungan infrastruktur dan non infrastruktur termasuk pula dukungan tidak langsung berupa keterlibatan perusahaan-perusahaan skala menengah-besar melalui program corporate socgial responsbility (CSR), keterlibatan perguruan tinggi atau lembaga riset, dan keterlibatan organisasi non pemerintah.

Pembentukan iklim inovasi bagi BUMDes sebaiknya dilakukan melalui pemerintah level pusat, dalam hal ini Kementerian Desa yang bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dan didukung penuh oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDES di Gunung Kidul – Yogyakarta. *MODUS* 28 (2): 155-167.
- Asmara, A. Y. 2019. *Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Menjaga Keberlanjutan Inovasi Melalui Sistem Inovasi Total A-to-F: Kasus Pada Pelayanan Kesehatan*. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia.

- Asmara, A. Y. dan Rahayu, A. Y. S. 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan *Gancang Aron* di Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *Journal of Public Sector Innovation* 3 (2): 57 – 67.
- Badriyadi. 2012. Jurnal. *Pengelolaan Dana Pinjaman di Desa Sungai Raya*. Pontianak.
- Fuglsang, L. and Pedersen, J. S. 2011. How Common Is Public Sector Innovation and How Similar Is It to Private Sector Innovation? In *Innovation in the Public Sector Linking Capacity and Leadership*. (pp. 44-60). Palgrave Macmillan, Hampshire, UK.
- Gault, F. 2018. Defining and Measuring Innovation in All Sectors of the Economy. *Research Policy*, 47: 617– 622.
- Huberman, A. M. and Miles, M. B. 1983. Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Some Techniques of Data Reduction and Display. *Quality and Quantity*, 17:281-339 281.
- Hartley, J. 2013. Public and Private Features of Innovation. In Stephen P. Osborne and Louise Brown (Eds.), *Handbook of Innovation in Public Services* (pp. 44-59). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Ibrahim K. 2013. Pengaturan Dan Pembentukan Bumdes Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). Jurnal Ilmiah. Diakses dari http://fh.unram.ac.id/wpcontent/uploads/2014/05/pengaturan-dan_pembentukanbumdes-berdasarkan-undang-undang-nomor-32tahun-2004
- Joyce, P. 2013. Strategic Management and Change in the Public Services. In Stephen P. Osborne and Louise Brown (Eds.), *Handbook of Innovation in Public Services* (pp. 210-223). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- KemenPAN dan RB. 2018 (22 Oktober). Kementerian PANRB Tetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tetapkan-top-40-inovasi-pelayanan-publik-2018> (15 November 2018).
- Kusuma, Gabriella Hanny; Purnamasari, Nurul. 2016. Bumdes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan: Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo. Yogyakarta: Penabulu Foundation.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mytelka, L. K. 1999. Competition Policies and Innovation Practices: How the Two Relate. In *Competition, Innovation and Competitiveness In Developing Countries*. In Lynn, Krieger Mytelka (Ed). pp. 205-215. Paris-France: Development Centre Studies –OECD.
- Nursetiawan, Irfan. 2018. Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 4 (2): 72-81.
- OECD-Eurostat. 2005. *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*. Paris-France: OECD Publishing.
- OECD. 2017. Fostering Innovation in the Public Sector. Paris: OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264270879-en>.

- Osborne, S. P. and Brown, L. 2013. Introduction: innovation in public services. In Stephen P. Osborne and Louise Brown (Eds.), *Handbook of Innovation in Public Services* (pp. 1-11). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Setyobudi, Adang , 2007, *Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 12
- Tambunan, T. T. H. 2009. *SMEs in Asian Developing Countries*. England-UK: Palgrave Macmillan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Windrum, P. 2008. Innovation and Entrepreneurship in Public Services. In Paul Windrum and Per Koch (Eds.), *Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management* (pp. 3-20). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BUMDes BANYUSANGKA BERBASIS WEB *DESIGN OF WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR BANYUSANGKA BUMDes*

Khoirul Hidayat*, M Fuad Fauzul Mu'tamar, R Arief Firmansyah

Program Studi Teknologi Industri pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo

e-mail : irul_ie@yahoo.co.id

ABSTRAK

Desa Banyusangka adalah salah satu desa di Kecamatan Tanjung Bumi dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan. Hasil tangkapan berupa ikan kunir, tongkol, salam dan lain sebagainya di olah menjadi produk pangan seperti petis, nugget, dan ikan asin yang dikelola oleh BUMDes. Akan tetapi pengelolaan dan pemasaran secara konvensional yang menyebabkan beberapa kendala seperti kurang akurat laporan persediaan, pengolahan data yang kurang optimal, dan pemasaran kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang perancangan sistem informasi BUMDes Banyusangka berbasis web. Metode penelitian ini menggunakan metode Unified Software Development Process (USDP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi BUMDes Banyusangka membutuhkan lima entitas yaitu; bahan baku, produk, produksi, pelanggan, penjualan. Dengan adanya sistem informasi ini mempermudah BUMDes dalam mengelola dan memasarkan produk.

Kata kunci: Sistem Informasi, BUMDes, Banyusangka, USDP

ABSTRACT

Banyusangka Village is one of the villages in Tanjung Bumi Subdistrict with the majority of the population being fishermen. The catch in the form of turmeric, cob, salam and so on is processed into food products such as petis, nugget, and salted fish which are managed by BUMDes. However, conventional management and marketing cause several obstacles such as inaccurate inventory reports, less optimal data processing, and less optimal marketing. Therefore it is necessary to conduct research on the design of web-based Banyusangka BUMDes information systems. This research method uses the Unified Software Development Process (USDP) method. The results of this study indicate that the design of information systems for BUMDes Banyusangka requires five entities namely; raw materials, products, production, customers, sales. The existence of this information system makes it easier for BUMDes to manage and market their products.

Keywords: Information Systems, BUMDes, Banyusangka, USDP

PENDAHULUAN

Desa Banyusangka adalah salah satu desa di Kecamatan Tanjung Bumi dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan. Hasil tangkapan berupa ikan kunir, tongkol, salam dan lain sebagainya di olah menjadi produk pangan seperti petis, nugget, dan ikan asin yang dikelola oleh BUMDes. Ikan merupakan salah satu sumber protein yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Ikan banyak dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan makanan mulai dari bakso, otak-otak sampai dengan ikan asin. Di pasaran, kebanyakan masyarakat menggemari ikan asin karena harga yang murah. Selain itu, ikan asin memiliki daya simpan yang cukup lama akibat proses pengasinan yang dilakukan. Ikan asin yang berkualitas tinggi yaitu ikan asin yang diolah tanpa menggunakan bahan pengawet serta memiliki daya simpan yang lama tanpa adanya bahan pengawet (Marpaung 2015).

Perkembangan dunia bisnis seperti agroindustri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kebijakan industri nasional. Agroindustri merupakan aktivitas industri yang menggunakan bahan baku pertanian. Proses ini dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian maupun perikanan melalui peningkatan permintaan produk produk pertanian. Agroindustri sebagai salah satu pilar dari sistem agribisnis memiliki posisi strategis dalam paradigma baru karena berperan penting untuk peningkatan distribusi pendapatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Timisela et al 2014).

Sistem informasi dapat mencakup beberapa aspek, misalnya untuk penjualan dan atau stok produk yang dijual, persediaan, dll. Pada industri dengan skala besar, untuk penjualan maupun stok produk yang dijual telah menerapkan sistem penjualan berdasarkan teknologi yang canggih. Namun berbeda dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) kebanyakan masih menggunakan sistem penjualan dan stok untuk produk yang masih manual. Hal tersebut dapat berdampak terhadap pencatatan penjualan dan stok produk yang tersisa yang biasanya tidak sesuai dengan kondisi real nya. Selain itu juga berdampak pada saat pemilik toko menerima pesanan dan proses transaksinya (Anthony et al. 2017).

Menurut Prasetyo dan Susanti (2016), penjualan adalah kegiatan yang dilakukan sebagian orang dalam menjual barang atau jasa yang dimilikinya kepada konsumen untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selain itu, penjualan merupakan suatu transaksi yang berfungsi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagai jantung dari suatu perusahaan. Dalam definisi lain, penjualan adalah pemindahan hak milik atas barang atau jasa yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati. Persediaan merupakan bahan, barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu seperti proses produksi, perakitan, dll (Herjanto 2007).

BUMDes Banyuwangi dalam pengelolaan dan pemasaran masih secara konvensional yang menyebabkan beberapa kendala seperti kurang akurat laporan persediaan, pengolahan data yang kurang optimal, dan pemasaran kurang optimal. E-commerce adalah proses perdagangan berbagai produk secara elektronik yang dilakukan oleh perusahaan ke konsumen atau perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara bisnis. Aplikasi e-commerce berfungsi sebagai pemasaran, penjualan dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terutama dalam mendapatkan, mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan.

Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya sebuah website yang dapat membantu penyampaian informasi produk dan harga secara detail kepada konsumen, informasi – informasi tersebut yang dibutuhkan akan didapatkan kapan saja dan dimana saja, dapat menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan kegiatannya serta memperluas jangkauan pemasaran perusahaan. Maka diperlukan sebuah perancangan aplikasi e-commerce pada BUMDes Banyuwangi menggunakan metode Unified Software Development Process (USDP).

Nugroho (2010) mendefinisikan USDP sebagai metode rekayasa perangkat lunak berbasis komponen yang menghasilkan bagian tertentu berukuran besar dan kompleks yang saling terhubung melalui antar muka. Kurniadi (2014) mengartikan unified software development process ialah metode pengembangan perangkat lunak berorientasi objek yang terdiri dari 4 fase, Inception, Elaboration, Construction dan Transition. USDP digunakan untuk membangun sebuah kerangka kerja (framework) yang bisa dikustomisasi untuk kepentingan organisasi dan proyek yang lebih spesifik. Menggunakan framework dapat membangun beragam aplikasi karena dengan konsep coding reuse, dimana coding yang sama bisa dipakai untuk keperluan aplikasi sejenis.

Metode USDP telah digunakan untuk perancangan sistem informasi perusahaan, yaitu perancangan aplikasi e-commerce berbasis web pada pempek rendy (Yolanda, 2013), aplikasi penjualan berbasis Web (E-Commerce) Menggunakan Joomla pada mutiara fashion (Ginting, 2013), pengembangan aplikasi web untuk pengajuan cuti pegawai secara *online* (Syaripudin dan Cahyana, 2015), dan pada industri jamu madura (Hidayat 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (*applied research*). Sekaran (2006) mendefinisikan penelitian terapan merupakan penelitian yang bertujuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh manajer dalam pekerjaan, yang menuntut solusi tepat waktu. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengembangan teori, ide atau gagasan, akan tetapi lebih fokus pada penerapan penelitian

terhadap suatu masalah. Pada penelitian ini dilakukan proses perbaikan dan modifikasi terhadap pemasaran online dengan merancang aplikasi *e-commerce* sehingga diharapkan dapat mempermudah proses transaksi penjualan dan pembelian di BUMDes Banyusangka.

Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk membangun sistem informasi ini yaitu metode *Unified Software Development Process* (USDP). Berikut adalah langkah-langkah dalam merancang sebuah pengembangan sistem dengan *Unified Software Development Process* (USDP) antara lain:

1. Perencanaan
Peneliti akan mengidentifikasi kebutuhan pengguna (*user specification*), studi-studi kelayakan (*feasibility study*) serta penjadwalan pengembangan perangkat lunak.
2. Analisis
Pada tahap kedua, peneliti mengenali permasalahan yang muncul dengan mendekomposisi dan merealisasikan *use case* diagram lebih lanjut, mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, hubungan antar objek dan sebagainya.
3. Perancangan
Tahap ketiga, peneliti mencoba mencari solusi permasalahan yang didapat dari tahap analisis berupa tahap analisis kelak akan diimplementasikan dan *refinement* (penghalusan) kelas-kelas, menambahkan dan memodifikasi kelas-kelas serta mengefektifkan perangkat lunak yang akan dikembangkan.
4. Implementasi
Tahap keempat adalah implementasi, peneliti akan memiliki perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak aplikasi (*pengkodean/coding*).
5. Pengujian
Selanjutnya pengujian, digunakan untuk menentukan apakah perangkat lunak yang kita buat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum dan menghilangkan/minimalisasi cacat program (*defect*) sehingga sistem yang digunakan akan membantu para pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu teknologi informasi yang sedang berkembang pesat dan berpotensi untuk mendorong pemasaran UKM adalah media sosial. Media sosial adalah aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan kerangka pikiran ideologi dan teknologi dari web 2.0. Kemunculan media sosial *online* seperti *facebook*, *instagram*, *youtube*, *twitter* dan lainnya telah merubah penyampaian informasi penjualan produk BUMDes Banyusangka yang sebelumnya dengan pemasaran dari mulut ke mulut (*word of mouth*).

BUMDes Banyusangka salah satu BUMDes yang menjual produk ikan asin dengan kualitas super. Ikan asin di UKM tersebut dijual secara online berdasarkan banyaknya ikan asin yang dipesan konsumen. UKM ini belum menerapkan sistem informasi untuk proses penjualannya. Dengan adanya perancangan sistem informasi, diharapkan dapat memudahkan pemilik UKM dalam menjual produknya. Selain itu juga menguntungkan dari segi ekonomi dan efisiensi dalam proses transaksi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa strategi promosi yang telah dilakukan dengan cara membagikan status, unggah foto, video dan tautan serta pembaharuan status pada akun media sosial. Berikut langkah – langkah cara berbelanja yang dilakukan oleh BUMDes Banyusangka:

1. Pembeli diharuskan untuk menggunakan internet untuk mengakses ke *platform* media sosial (*facebook* atau *instagram*), kemudian masuk ke *platform* jika sudah memiliki akun atau buat akun baru pada *platform* jika tidak memiliki akun.

2. Lalu pembeli mencari akun media sosial BUMDes Banyusangka untuk *facebook* dan *instagram*. Pada kesempatan kali ini pembeli memilih produk yang diinginkan dengan menarik kebawah atau keatas (*scroll*) konten (*timeline*) pada masing – masing akun media sosial BUMDes Banyusangka.
3. Jika pembeli sudah memilih produk yang diinginkan, selanjutnya pembeli menghubungi kontak yang dicantumkan oleh BUMDes Banyusangka untuk mengetahui informasi – informasi tentang produk seperti harga produk, ketersediaan stok barang maupun potongan pembelian. Media komunikasi/informasi yang dilakukan menggunakan *whatsapp*, mengirim pesan secara langsung (*direct message/messenger*) dan email.
4. Langkah selanjutnya adalah pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer total pembelian yang harus dibayarkan ke bank yang disediakan oleh BUMDes Banyusangka dan mengharuskan pembeli untuk dikonfirmasi pengiriman uang dengan mengunggah bukti pembayaran ke kontak yang dicantumkan oleh BUMDes Banyusangka.
5. Setelah melakukan pembayaran maka BUMDes Banyusangka akan mengirimkan pesanan tersebut melalui kurir.

Penggunaan media sosial pada BUMDes Banyusangka belum membantu meningkatkan penjualan hal ini dikarenakan masih digabungkan antara media sosial pribadi dan perusahaan, minimnya pengikut (*followers*) dan informasi yang ditampilkan. Konten dari masing – masing media sosial masih sangat terbatas, *feedback* masih menunggu dan tidak langsung direspon serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang media sosial dalam membangun persona digital dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Nota pembayaran dan data pesanan transaksi berbentuk cetak kemudian ditulis dalam buku sebagai laporan penjualan.

Analisis Kebutuhan

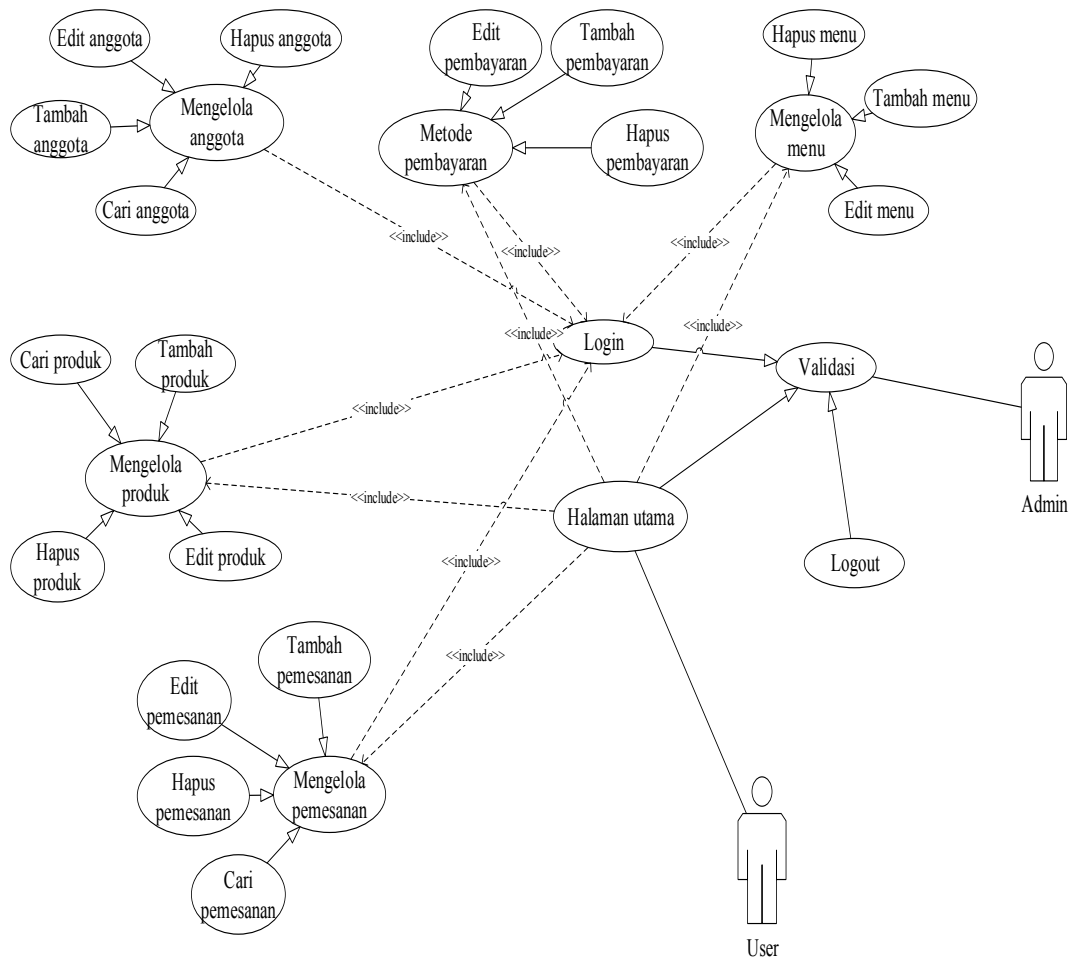
Sistem informasi ini dikembangkan dengan menggunakan *platform web* dan bisa diakses melalui jaringan yang terkoneksi dengan internet. Terdapat dua otoritas pengguna yaitu karyawan BUMDes Banyusangka dan konsumen. Adapun kebutuhan akan fasilitas dan aktivitas yang dilakukan oleh sistem secara umum yang dapat dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

1. Kebutuhan website (*user*)
 - a. Pendaftaran (*sign in*), dilakukan secara gratis untuk menjadi konsumen, kemudian dapat berbelanja di website.
 - b. *Login*, cara masuk ke dalam sistem.
 - c. Produk, bermuatan tentang produk-produk BUMDes Banyusangka, serta didalamnya terdapat pencarian produk dengan kategori tertentu.
 - d. Pemesanan barang, cara pemesanan barang yang dilakukan oleh *user* setelah *login*, barang yang telah dipesan akan tersimpan dan tercatat dalam modul administrasi. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau *cash on delivery* (COD) berserta konfirmasi pembayaran.
2. Kebutuhan modul administrasi berbasis web
 - a. *Login*, cara masuk ke dalam sistem.
 - b. Pengolahan sistem, dilakukan dengan mengolah berbagai data yaitu data pelanggan, produk dan konfirmasi pembayaran.

Analisis Sistem

Analisis adalah tahap untuk merancang sistem baru setelah proses identifikasi sistem yang berjalan dilakukan. Model *analysis* meliputi identifikasi aktor, identifikasi *use case*, *use case diagram* dan *activity diagram*. Diagram *use case* merupakan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. *Use case diagram* akan menjadi pedoman untuk langkah – langkah analisis

dan desain selanjutnya. Berikut ini adalah diagram *use case* dari aplikasi *e-commerce* BUMDes Banyusangka.

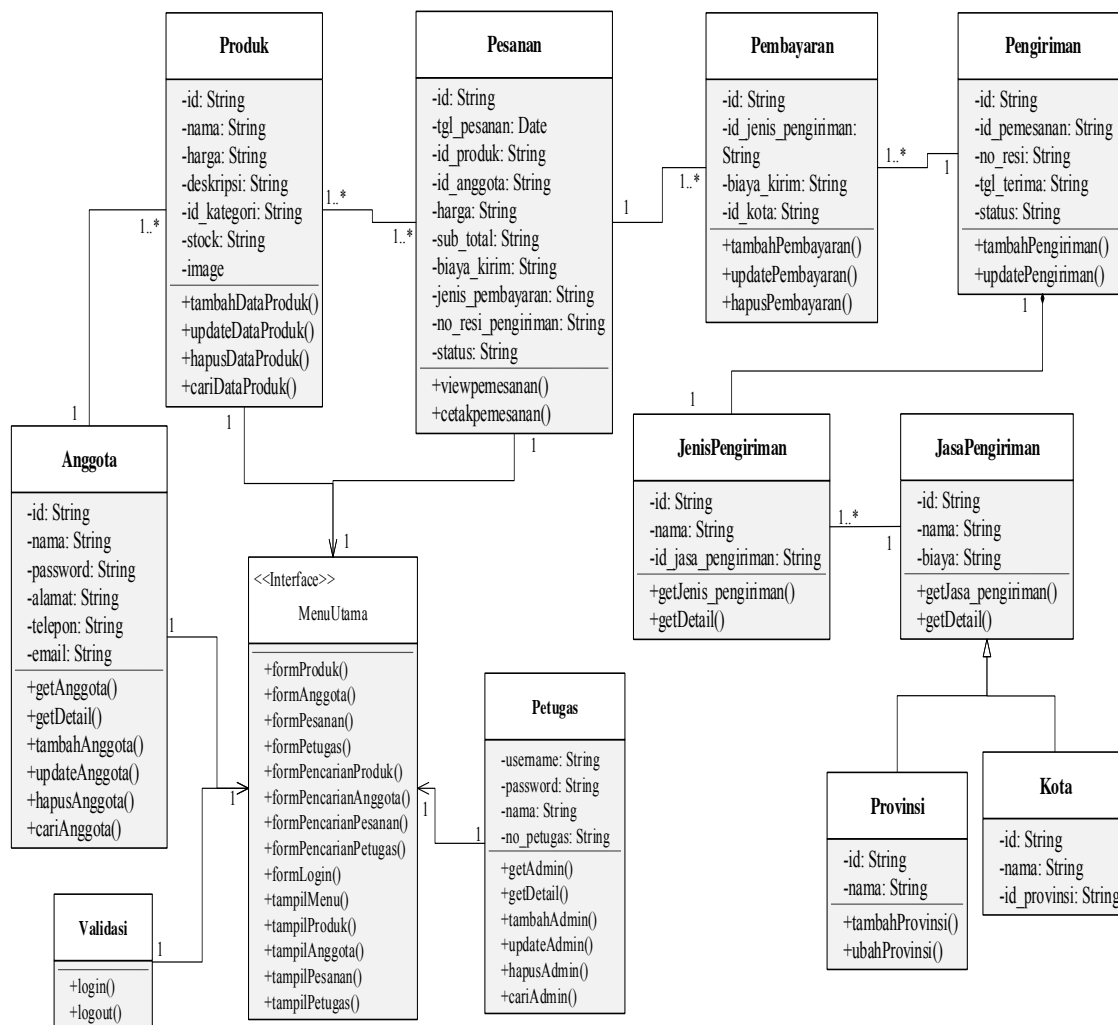


Gambar 1. Diagram use case website BUMDes Banyusangka

Activity Diagram (diagram aktivitas) memaparkan aliran aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem. Aktivitas utama yang terjadi seperti pengiriman pesanan oleh pelanggan, menerima pesanan, mengkonfirmasi pesanan dan kirim pesanan. Sistem ini dapat berupa basis data, antrian eksternal dan sistem lainnya. Berikut ini aktivitas dari website BUMDes Banyusangka.



Pada tahap perancangan aplikasi dihasilkan realisasi *use case* yang dapat digambarkan dengan menggunakan *class diagram* dan *sequence diagram*. *Class diagram* (diagram kelas) menjelaskan hubungan antar kelas secara detail yang akan membangun sistem. *Building block* utama dari kelas diagram adalah kelas, yang menyimpan dan mengelola informasi dalam sistem. Selama fase analisis, kelas mengacu pada *people*, *place*, *events* dan suatu sistem yang menangkap informasi. Pada fase desain dan implementasi, kelas mengacu pada *artifacts* seperti *windows*, *form* dan objek lain yang digunakan untuk membangun sistem. Atribut dari kelas dan nilainya menggambarkan keadaan sebuah objek yang dihasilkan sebuah kelas, sedangkan perilakunya diwakili oleh *operation*.



Gambar 3. Kelas diagram aplikasi *e-commerce* BUMDes Banyuwangi

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perancangan aplikasi *e-commerce* pada BUMDes Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa BUMDes Banyuwangi telah menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran dengan *platform* yang digunakan adalah *facebook* dan *instagram*. Pemasaran produk melalui *e-commerce* dapat menguntungkan konsumen dengan memperoleh produk yang lebih murah dan memangkas saluran distribusi yang otomatis berdampak pada pengurangan harga dan meningkat pendapatan untuk produsen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Andeka, R. T, Agustinus, F.W. 2017. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berdasarkan Stok Gudang Berbasis *Client Server* (Studi Kasus Toko Grosir “Restu Anda”). *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. 4(2): 136-147.
- Ginting, E. 2013. *Aplikasi Penjualan Berbasis Web (E-Commerce) Menggunakan Joomla Pada Mutiara Fashion*. Bandung.
- Herjanto, E. 2007. *Manajemen Operasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana.

- Hidayat, K. 2018. Modeling Information System For Agroindustry of Jamu Madura. *Jurnal Teknik*. 2(1): 47-52.
- Kurniadi, D. 2014. Perancangan Arsitektur Sistem *E-academic* dengan Konsep Kampus Digital Menggunakan *Unfied Software Development Process* (USDP) (Studi Kasus: AMIK Garut). *Jurnal Wawasan Ilmiah Manajemen dan Teknik Informatika* 5(10): 1-15.
- Marpaung, R. 2015. Kajian Mikrobiologi pada Produk Ikan Asin Kering yang Dipasarkan di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan dalam Upaya Peningkatan Keamanan Pangan di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 15(3): 145-151.
- Nugroho, A. 2010. *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek Dengan Metode USDP (Unfied Software Development Process)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasetyo, A dan Susanti, R. 2016. Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada PT. Cahaya Sejahtera Sentosa Blitar. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA*. 10(2): 1-16.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syaripudin. G. A. dan R. Cahyana. 2015. Pengembangan Aplikasi *Web* untuk Pengajuan Cuti Pegawai Secara *Online*. *Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut* 13(1): 1-8.
- Timisela, N. R., Masyhuri., Dwidjono, H. D dan Slamet, H. 2014. Manajemen Rantai Pasok dan Kinerja Agroindustri Pangan Lokal Sagu di Propinsi Maluku : Suatu Pendekatan Model Persamaan Struktural. *Jurnal Agritech*. 34(2) : 184-193.
- Yolanda, E. 2013. *Perancangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Web Pada Pempek Rendy*. Bandung: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.

INOVASI BUDIDAYA AYAM KAMPUNG ASLI UNGGUL PANCAMURTI MALANG DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI PERDESAAN

Misdiantoro¹, Irwantoro², Agung Budi Irawan³

¹MEC Kampus Kemandirian Yayasan Yatim Mandiri

²Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur

³Analisis Kebijakan Balitbang Provinsi Jawa Timur

Email: ianmisdiantoro@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negeri beriklim tropis yang mempunyai berbagai kekayaan alam melimpah dimana Tuhan sudah menyediakan dan memfasilitasi bahan makanan yang sesuai dengan daerah tropis, baik nabati maupun hewani. Khusus bahan pangan hewani Tuhan telah menitipkan ayam kampung untuk Indonesia sedangkan tugas kita adalah menjaga, melestarikan dan mengembangkannya. Data *Worldometers* menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 266,7 juta jiwa. Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut mengakibatkan semakin besar pula kebutuhan akan pangan yang harus dipenuhi termasuk kebutuhan daging khususnya daging ayam kampung. Penelitian ini bertujuan menemukan solusi bagaimana inovasi budidaya ayam kampung asli unggul dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia maupun menunjang ekonomi perdesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara dari para peternak serta menganalisis persepsi dan respon pelanggan ayam kampung asli unggul. Hasil penelitian menemukan bahwa bibit ayam kampung asli unggul Pancamurti yang mampu menjawab tantangan budidaya ayam kampung asli yang dapat dibudidayakan secara massal maupun skala industri dengan rasa daging khas ayam kampung. Disamping itu masa panen hanya sekitar 2 bulan, tingkat kematian rendah dan tingkat produksi telur cukup tinggi serta harga daging dan telur ayam kampung asli unggul mempunyai daya saing yang cukup tinggi, sehingga mampu menunjang ketahanan pangan khususnya daging ayam maupun ekonomi masyarakat perdesaan.

Kata Kunci: inovasi, ayam kampung, ketahanan pangan, ekonomi desa

ABSTRACT

Indonesia is tropical temperate land has a variety of natural resources of the lord is providing and abundant where all depends on groceries are in accordance with the tropics , good animal and vegetable. The lord has special animal foodstuffs give authority to collect chicken for indonesia while our duty is to protect , preserve and expanded. Data worldometers, indonesians stated that in 2018 as many as 266,7 million people. The number of people who large enough resulted in the need for the greater the food must be fulfilled including demand flesh especially village chicken meat. This study aims to find a solution how innovation cultivation chicken native superior can meet their food needs of indonesian people and support rural economic. The methodology used is qualitative. descriptive Data collection obtained by observation and an interview from farmers and analyzes perception and response customers chicken native. Superior. The research found that seeds chicken native pancamurti superior to the challenge cultivation chicken original can be cultivated in bulk and industrial scale with the typical. chicken meat In addition the past month, 2 only about mortality rates low and high levels of the production of eggs and in the prices of meat and eggs chicken native superior have competitiveness, high so able to support food security and economy especially chicken. rural communities.

Key words: innovation, domestic poultry, food security, rural economic

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara geografis terletak di daerah yang beriklim tropis yang memiliki ciri khas tersendiri dimana didalamnya terdapat 17.504 pulau besar dan kecil yang terbentang dari sabang sampai merauke. Data *Worldometers*, menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebanyak

266,7 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia tercatat sebagai penduduk nomer 4 terbesar di dunia. Dengan catatan pertambahan penduduk yang pesat khususnya Indonesia kebutuhan akan pangan harus tercukupi.

Indonesia patut bersyukur karena di anugerahi berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dijadikan sumber makanan penduduknya. Dari sekian hewan yang ada di Indonesia terdapat berbagai jenis ayam kampung. Keberadaan ayam kampung menjadi anugerah yang harus di jaga, dipelihara dan dikembangkan. Sehingga kesediaan pangan berbasis daging ayam bisa dijaga. Potensi keberadaan ayam kampung menjadi tantangan kita bersama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan penduduk.

Menurut data Badan Pusat Statistik produksi daging ayam ras pedaging Indonesia pada tahun 2017 sebesar 2.046.794 ton dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 2.144.013 tahun, sebagaimana tabel 1 yang menunjukkan produksi daging ayam ras pedaging seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018.

Tabel 1
Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Menurut Provinsi (Ton)

Provinsi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ACEH	4421	6106.72	6428.65	7410	7928
SUMATERA UTARA	38752	40902.39	42814.83	46286	47765
SUMATERA BARAT	19493	20063.15	20437.61	28533	28521
RIAU	40732	45307.62	47575.1	54095	55684
JAMBI	13793	13075.18	12599.23	13013	15674
SUMATERA SELATAN	29997	33318.39	36356.56	33348	34355
BENGKULU	1706	1578.88	4734.71	4376	5688
LAMPUNG	32237	33353.59	33785.87	39099	39772
KEP. BANGKA BELITUNG	16714	14838.05	15656.59	13034	14356
KEP. RIAU	8633	8586.06	8726.02	18116	18566
DKI JAKARTA	102794	129315.21	138088.5	0	0
JAWA BARAT	543765	530423.41	719820.36	823863	703124
JAWA TENGAH	130357	158672.66	187965.02	204432	201994
DI YOGYAKARTA	37367	35535.8	34627.34	34274	34510
JAWA TIMUR	198016	203139.21	219833.24	270882	277654
BANTEN	96554	73488.06	87216.62	108228	296911
BALI	8888	10453.52	9865.54	8673	8647
NUSA TENGGARA BARAT	8562	8256.7	6834.89	37810	38345
NUSA TENGGARA TIMUR	650	2386.97	4297.5	5541	5595
KALIMANTAN BARAT	31690	44436.45	40777.56	48723	51425
KALIMANTAN TENGAH	10912	11487.45	12278.13	18366	18917
KALIMANTAN SELATAN	46511	60952.23	72552.56	76534	77705
KALIMANTAN TIMUR	43641	53859.8	56531.58	61669	63519
KALIMANTAN UTARA	3393	6623.44	4249.46	3000	3354
SULAWESI UTARA	5489	7195.04	7309.94	7467	7565

Provinsi	Tahun
----------	-------

	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI TENGAH	8177	7612.99	8854.04	10778	10950
SULAWESI SELATAN	50829	53664.33	48861.62	51813	56995
SULAWESI TENGGARA	3559	3600.95	3337.45	3694	4208
GORONTALO	1450	2658.28	3899.51	3938	3939
SULAWESI BARAT	1683	1717.52	1428.92	1756	1774
MALUKU	10	67.3	65.47	68	70
MALUKU UTARA	374	421.06	530.81	373	448
PAPUA BARAT	1025	1598.8	1300.09	1337	1383
PAPUA	2204	3609.8	5855.96	6265	6672
INDONESIA	1544378	1628307	1905497.28	2046794	2144013

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Menurut data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018 Ayam buras atau ayam kampung baru menyumbang kebutuhan daging sebesar 300.000 ton pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 313.000 ton, dimana apabila melihat data yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan bahwa produksi ayam buras atau ayam kampung masih sangat kecil dibandingkan dengan produksi ayam ras.

Ketersediaan daging ayam khususnya ayam ras di Indonesia sampai saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan berskala besar seperti Charoen Pokphand Group (CP Group), PT. Japfa Comfeed Indonesia, PT Wonokoyo Jaya Corporindo dan lain-lain. Adapun khusus daging ayam kampung belum banyak perusahaan besar secara masif terlibat secara langsung. Budidaya ayam kampung banyak dilakukan oleh peternak-peternak secara mandiri. Memang sudah ada upaya dari sebagian pihak untuk memelihara ayam kampung skala industri dan masif yang kebanyakan dilakukan oleh industri kecil dan menengah.

Berdasarkan data tercatat bahwa konsumsi daging ayam ras per kapita/tahun masyarakat Indonesia pada 2017 sebesar 5,68 kg per kapita/tahun meningkat 573 gram (11,2%) dibanding konsumsi tahun sebelumnya. Sementara untuk konsumsi daging ayam kampung 782 gram per kapita/tahun naik 156 gram (24,9%) dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan peningkatan konsumsi daging ayam kampung yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Sekaligus punya potensi kemanfaatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diketahui masyarakat luas, pasar daging ayam kampung merupakan jenis komoditas yang masih tergolong mahal.

Mahalnya daging ayam kampung disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya; sulit dibudidayakan dengan cara masif dan intensif, waktu pemeliharaan lebih lama. Sehingga jumlahnya di pasaran terbatas, kebutuhan tinggi di pasaran terbatas menyebabkan harga ayam kampung mahal. Potensi ayam kampung yang besar merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia sekaligus menjadi tantangan pemeliharaan dan perawatannya. Diperlukan inovasi budidaya ayam kampung asli unggul yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan daging ayam kampung rakyat Indonesia, sehingga ketahanan pangan terjaga sekaligus berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan. Kita perlu melahirkan dan melestarikan jenis ayam kampung asli yang memiliki keunggulan-keunggulan sebagaimana yang diharapkan, yakni; lebih cepat panen, efisien dalam pakan (*food conversion ratio* rendah), tahan terhadap penyakit, tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, tekstur daging yang empuk dan rasa yang enak gurih serta aroma yang wangi khas ayam kampung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kondisi eksisting potensi ayam kampung yang selama ini masih dianggap sangat kurang produktif?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan daging ayam di masyarakat dalam menunjang ketahanan pangan berbasis potensi lokal?
3. Bagaimana inovasi budidaya ayam kampung sehingga dapat meningkatkan ekonomi perdesaan?

B. Tinjauan Pustaka

Desa sebagai wilayah yang bertumpu pada potensi lokal, terutama perekonomian berbasis pertanian dan UMKM di tengah pertumbuhan industri global, sehingga membutuhkan perhatian khusus sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama Bab IX Pasal 78 yang menyatakan bahwa:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sedangkan pada Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 83 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut bahwa pembangunan wilayah pedesaan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan. Greg Richards dan Julie Wilson menyatakan bahwa inovasi adalah pengenalan penemuan-penemuan baru atau menyebarkan makna penemuan baru tersebut ke dalam penggunaan umum di masyarakat (Richards dan Wilson, 2007). Sedangkan Hamel (2000) mengatakan bahwa strategi inovasi bukan tugas manajemen puncak saja, tetapi setiap orang bisa membantu membangun strategi inovatif. Inovasi sama dengan konsep-konsep bisnis yang sama sekali baru dan merupakan investasi.

Menurut Deputy Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Agus Puji Prasetyono menyatakan bahwa desa inovasi adalah sebuah area yang akan dibentuk sehingga produktivitas masyarakat di sebuah pedesaan menjadi meningkat dengan memberikan sentuhan teknologi dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusianya. Desa Inovasi bukan sekadar mempersiapkan teknologi sesuai kebutuhan potensi sumber daya alam di sebuah desa, tapi juga kesiapan dari masyarakatnya dimana pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi untuk menggulirkan program Desa Inovasi.

Pengembangan desa inovasi tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dikemukakan Tatang (2005) bahwa upaya pembangunan desa yang

inovatif, inklusif dan berkelanjutan dilakukan dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dengan sistem inovasi sebagai *vehicle* nya. Di dalam sistem inovasi unsur pelaku (elemen) yang harus dilibatkan terdiri dari unsur pemerintah, pebisnis, akademisi dan komunitas (ABG+C). Untuk itu prakarsa pengembangan desa-desa inovatif perlu didorong dan dikembangkan untuk mempercepat keberhasilan pembangunan desa sehingga menjadi inspirasi bagi pembaruan desa-desa lainnya. Menurut Mahroum (2007:6): *rural innovation is defined as the introduction of something new (a novel change) to economic or social life in rural areas, which adds new economic or social value to rural life*, bahwa inovasi pedesaan didefinisikan sebagai pengenalan sesuatu yang baru (perubahan baru) untuk kehidupan ekonomi dan sosial di daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2009) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 2003).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

B. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu cara mengajukan pertanyaan yang dikemukakan bebas, artinya pertanyaan tidak terpacu pada pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan (Sutrisno Hadi, 1994).

2. Observasi

Menurut Burhan (2007) observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tersedia dalam bentuk laporan-laporan maupun dalam bentuk lain yang terdokumentasi yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

D. Analisis Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2009) merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2009) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (Sugiyono, 2012) yaitu interaktif model yang mengklasifikasikan analisis data dengan tahapan :

1. Kondensasi data (pemampatan)
2. Penyajian data (display data)
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

Sedangkan obyek dari penelitian adalah budidaya jenis ayam kampung asli unggul hasil inovasi yang dilakukan oleh Agus Prayudi warga Kota Malang Jawa Timur. Jenis ayam kampung asli unggul ini belum mempunyai nama pasar, namun para peternak (pelanggan) ayam kampung asli menyebut Pancamurti berdasar lokasi ayam kampung berada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keunggulan Ayam Kampung Pancamurti

Ayam kampung asli unggul Pancamurti merupakan jenis ayam kampung asli hasil inovasi dari berkali-kali riset dan uji coba yang dilakukan oleh Agus Prayudi. Berdasarkan pemikiran beliau kenapa kita Indonesia dianugerahi ayam kampung tidak diperlihara dan kembangkan secara masif dan masal. Hasil inovasi riset dan ujicoba perkawinan silang (cross breeding) antara berbagai jenis ayam kampung melahirkan jenis ayam kampung asli unggul. Ayam kampung yang memiliki karakteristik genetik relatif stabil ketika menurunkan sifat-sifat unggul kepada keturunannya.

Awalnya jenis ayam kampung asli unggul tanpa nama. Pemberian nama ini diperoleh dari para peternak dan pelanggan yang awalnya tidak tahu jenis ayam kampung apa. Untuk tanda dikasih nama Pancamurti sesuai tempat lahirnya ayam.

Metode perkawinan silang (*cross breeding*) beberapa jenis ayam kampung lokal ini tidak ada intervensi rekayasa genetika dari luar sehingga mampu memperbaiki performance ayam, maka hasilnya merupakan ayam sehat dan alami. Ayam kampung asli unggul Pancamurti memiliki kemampuan

tumbuh lebih cepat, masa panen 2 (dua) bulan, dibandingkan ayam kampung biasa butuh waktu minimal 6 bulan siap panen. Kecepatan tumbuh ini sama sekali tidak menghilangkan sifat-sifat daging ayam kampung yang dikenal enak, gurih, namun memiliki tekstur yang lebih lembut dengan aroma khas ayam kampung.

Berbeda dengan ayam potong (ayam broiler) proses dalam tubuhnya ditambahkan gen penghasil hormon untuk mempercepat pertumbuhan. Gen ini menyebabkan ayam potong memiliki FCR yang sangat rendah. Namun ayam tidak mampu mengendalikan diri untuk mengatur pertumbuhan. Pakan sebanyak apapun akan diserap oleh tubuh ayam. Tumbuhnya cepat dan ukurannya besar karena menimbun lemak, menyebabkan tubuhnya sulit digerakkan. Itu sebabnya, beberapa kalangan masyarakat yang menjaga pola makan akan menghindari mengkonsumsi ayam potong ini (ayam horn, broiler, negeri, ras, dll). Hormon didalamnya bisa menyebabkan berbagai efek yang tidak baik bagi tubuh (obesitas, cepat menstruasi, dan lain-lain).

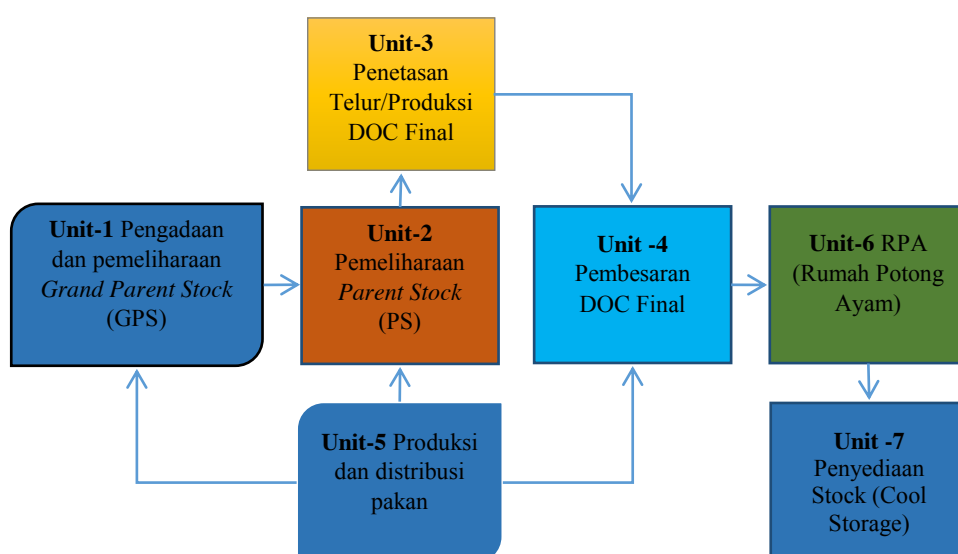
Ayam kampung pada dasarnya tidak memiliki genetik hormon pertumbuhan berlebihan, maka setiap pakan yang dikonsumsi akan diolah tubuh sesuai kebutuhan. Jika berlebih akan dibuang sebagai kotoran sehingga ayam kampung sangat sedikit berlemak (*low fat*). Sehat dan alaminya menyebabkan harga dan kebutuhan terhadap ayam kampung semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Keunggulan lain dari ayam kampung asli unggul Pancamurti mampu di ternak secara masif, masal dan bisa skala industri sebagaimana ayam ras (ayam potong/horn/ras/negeri) dan sampai saat ini ayam kampung asli Pancamurti telah menyebar secara terbatas ke berbagai wilayah terutama di Pulau Jawa, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

B. Potensi bisnis siklus ayam kampung asli unggul yang dikelola skala industri berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi khususnya di pedesaan

Bisnis ayam kampung asli unggul skala industri akan terdiri dari beberapa bagian atau unit usaha. Seluruh unit tersebut harus terkoordinasi satu sama lain karena merupakan satu kesatuan atau sistem. Dari seluruh komponen sistem tersebut, para pihak dapat mengambil bagian bisnis pada tahap yang diinginkan atau merasa lebih menguasai dan akan memberikan untung yang terbaik dalam usaha ini.

Ruang lingkup dan tahapan bisnis ayam kampung skala industri:



Gambar 1. Skema dan unit-unit bisnis ayam kampung skala industri

Gambar 1 diatas terlihat bahwa bisnis usaha ayam kampung skala industri terdiri dari banyak unit, dimana unit-unit tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan namun dapat dikelola secara terpisah oleh tiap pemilik usaha atau stake holders.

Unit-1 Pengadaan dan Pengembangan *Grand Parent Stock* (GPS)

Kuantitas dan kontinuitas bisnis daging dan telur ayam kampung ini sangat tergantung ketersediaan *Grand Parent Stock* (GPS). Pengadaan dan pengembangan unit bisnis GPS harus diutamakan agar unit-unit kelanjutannya dapat terjamin keberadaannya.

Keunggulan ayam kampung ini adalah dalam hal pengadaan *Grand Parent Stocks* (GPS) dapat di penuhi di Indonesia. Metode pengadaan indukan dengan metode *Cross Breeding*. Artinya ayam indukan ini benar-benar asli dari Indonesia dan tidak memerlukan import. Keadaan ini lebih menjamin keberadaan dan keberlangsungan usaha yang secara terus menerus.

Unit-2 Pemeliharaan *Parent Stock*

Pemeliharaan *Parent Stock* (PS) dilakukan untuk memproduksi telur ayam kampung yang akan ditetaskan menggunakan mesin penetas telur. Masa produksi PS mencapai 1,5 - 2 tahun akan menghasilkan telur rata-rata 200-250 telur per tahun. Saat ini penetasan masih menggunakan mesin tetas tradisional mengingat jumlah ayam PS dan telur yang masih terbatas.

Unit-3 Penetasan Telur dan Pengadaan DOC Final

Unit penetasan telur merupakan bagian tidak terpisahkan dari unit pemeliharaan PS. Diharapkan unit ini akan menjadi unit yang besar dan menggunakan mesin-mesin penetas yang modern, sehingga jumlah DOC yang dihasilkan setiap hari akan sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Jumlah peternak yang minat memelihara DOC ayam kampung untuk dijual sendiri ke pasar sangat banyak dan semakin semakin hari semakin bertambah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan pasar lokal saja sudah sangat kewalahan. Potensi ini perlu dikembangkan secara profesional.

Unit-4 Pembesaran DOC Final

Pembesaran DOC final (akhir, siap dijual) saat ini yang banyak dilakukan langsung oleh peternak terutama oleh peternak-peternak kecil dengan jumlah produksi antara 100 - 2.000 setiap kali panen.

Usaha pembesaran secara intensif bisa dikembangkan skala industri oleh peternak besar atau perusahaan. Sehingga tuntutan profesional seperti kontinu (berkelanjutan) dan kualitasnya terjaga.

Unit-5 Penyediaan dan Teknologi Pakan

Ketersediaan pakan sering menjadi kendala bagi peternak. Harga pakan juga akan menjadi masalah ketika jumlah ayam yang dipelihara tumbuh besar. Pada tahap awal, pakan dapat diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan pakan. Akan tetapi, jika populasi ayam sudah mencapai jutaan ekor, maka pengadaan pakan akan lebih efisien dengan cara membangun pabrik pakan sendiri.

Unit-6 Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU)

Pemotongan ayam kampung harus dilakukan sesuai standar nasional maupun internasional. Dan memenuhi syarat penyembelihan yang halal. Unit rumah potong hewan unggas harus memperoleh sertifikasi resmi dari badan terkait. Dengan dikelola secara profesional tentu berdampak ekonomis bagi pengelolanya. Penyembelihan diusahakan oleh bagian perusahaan dengan menggunakan mesin-mesin pemotong yang modern sehingga biaya pemotongan menjadi lebih murah dan efisien. Meski saat ini penyembelihan ayam kampung asli unggul masih dengan cara sederhana.

Unit-7 Pengawetan (*Cool Storage*)

Guna memenuhi kebutuhan daging ayam kampung asli ke masyarakat luas, maka keberadaan Cool Storage (ruang penyimpanan dingin) harus tersedia untuk pengawetan. Dengan adanya daging ayam beku maka distribusi ayam kampung bisa meluas.

Dengan jumlah penduduk sekitar 267 juta Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk makanan. Disamping itu pemenuhan kebutuhan pangan wajib adanya. Melihat potensi ayam kampung asli unggul tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat guna pemenuhan pangan.

Dari hasil budidaya ayam kampung asli unggul yang dilakukan bapak Agus Prayudi dapat dilihat sebagai potensi penunjang ketahanan pangan. Ditemukannya bibit unggul ayam kampung yang berbasis potensi lokal menjadikan kita tidak tergantung bibit dari luar. Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan Final Stock (FS) yang di hasilkan sendiri memudahkan kita membuat prediksi produksi telur dan daging ayam kampung sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari proses perputaran distribusi mulai bibit ayam kampung sampai produksi baik telur dan daging dipastikan berdampak ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan.

Dari hasil pengamatan di lapangan didapati informasi dan data dari peternak sebagai berikut:

1. Pak Sugeng peternak telur ayam kampung asli unggul asal desa Gambiran Kepanjen Kabupaten Malang

Memelihara 200 ekor ayam kampung asli unggul. Produk pangan yang di ambil telur. Analisa produksi telur ayam kampung asli unggul:

- Harga Pakan jenis petelur Rp. 6.000/kg
- Konsumsi pakan 1 ons/hari/ekor
- Produksi telur 70% dari populasi setiap hari
- Harga jual telur ayam kampung di pasaran Rp. 2.000/butir

Pak Sugeng harus mengeluarkan konsumsi pakan 1 ons/hari/ekor ($\text{Rp. } 600,- \times 200 = \text{Rp. } 120.000,-$). Produksi telur 70% dari populasi 200 ekor = 140 butir. Harga telur per butir $\text{Rp. } 2.000,- \times 140 = \text{Rp. } 280.000,-$ Keuntungan $\text{Rp. } 280.000,- - \text{Rp. } 120.000,- = \text{Rp. } 160.000,-/\text{hari}$. Dalam sebulan potensi keuntungan $\text{Rp. } 160.000,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 4.800.000,-$



Gambar 2 : Telur-telur ayam kampung asli unggul

2. Pesantren Kemandirian Sragen Yayasan Yatim Mandiri

Memelihara 2.000 ekor ayam kampung asli unggul. Produk pangan yang diambil daging (pembesaran). Analisa pembesaran ayam kampung asli unggul di desa Jati Batur Gemolong Sragen:

- Harga pakan jenis pedaging Rp. 7.200,-/kg
- Harga bibit ayam kampung (DOC) Rp. 6.000,-/ekor
- (Feed Conversion Ratio) 2,3
- Harga jual ayam kampung asli unggul di kandang Rp. 30.000,-/ekor
- Listrik Rp. 150.000/2 bulan.

Pesantren Kemandirian Sragen mengeluarkan biaya konsumsi pakan untuk mencapai bobot 1 kg ayam kampung sejumlah $\text{FCR } 2,3 \times \text{Rp. } 7.200,- = \text{Rp. } 16.560,-/\text{ekor}$. Ditambah harga bibit (DOC) Rp.

6.000,- Menjadi Rp. 22.560,- Jika yang dipelihara 2.000,- ekor maka biaya dikeluarkan Rp. 22.560,- x 2.000 = Rp. 45.120.000,- Tambah listrik 2 bulan Rp. 150.000,- Total biaya keluar Rp. 45.270.000,- Harga jual ayam kampung di kandang Rp. 30.000 x 2.000 = Rp. 60.000.000,- Keuntungan dalam masa panen 2 bulan Rp. 60.000.000,- - Rp. 45.270.000,- = Rp. 14.730.000,-



Gambar 3 : Final Stock (FS) siap panen

3. Pak Acep Supriatna peternak desa Wagir Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Produksi DOC Final Stock (FS)

Untuk produksi DOC final stock (FS) Pak Gede melihara indukan Parent Stock (PS) sebanyak 500 ekor. Analisa produksi DOC Final Stock (FS) sebagai berikut:

- Produksi telur 70% dari populasi setiap hari.
- Daya tetas 80% dari populasi.
- Harga jual DOC Rp. 5.000,- (franco produsen)
- Harga pakan jenis petelur Rp. 6.000/kg
- Konsumsi pakan 1 ons/hari/ekor
- Listrik Rp. 7.000/hari
- Mesin penetas kapasitas 500 telur butuh 15 mesin @ Rp 1.500.000,-

Khusus PS dibutuhkan biaya pakan dan pemeliharaan selama 6 bulan sebelum PS bertelur. Saat bertelur menunggu waktu 21 hari untuk menetas. Setelah 21 hari berikut maka masa produksi bisa rutin per pekanan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Indukan ayam kampung 500 ekor menghasilkan telur 70% x 500 = 350 telur/hari.

Dalam waktu 5 hari terkumpul 1.750 telur yang di masukkan mesin penetas. Daya tetas setelah 21 hari 80% atau sebanyak 1.400 DOC Final Stock (FS). Harga jual DOC (franco produsen) Rp. 5.000,- x 1.400,- = Rp 7.000.000,- Dalam 1 bulan bisa panen DOC 6 kali. Rp. 7.000.000,- x 6 = Rp. 42.000.000,- Biaya yang dikeluarkan pakan Rp. 600,- x 500 ekor x 30 hari = Rp 9.000.000,- biaya listrik Rp. 7.000,- x 30 hari = Rp. 210.000,- Biaya penyusutan mesin penetas Rp. 375.000/bln. Penyusutan kandang Rp. 350.000,- Penyusutan sewa lahan Rp. 200.000,- Potensi keuntungan Rp. 42.000.000,- - Rp. 10.085.000,- = Rp. 31.915.000,-



Gambar 4: DOC siap jual.

KESIMPULAN

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar ketahanan pangan wajib dijaga. Penjagaan pangan berbasis potensi lokal yakni ayam kampung asli. Inovasi untuk melahirkan bibit-bibit unggul ayam kampung harus mendapat perhatian kita bersama. Dengan memelihara dan mengembangkan potensi lokal meminimalisir ketergantungan dengan negara lain.

Bibit-bibit *grand parent stock*, *parent stock* dan *final stock* dengan leluasa dapat kita kendalikan sendiri dimana produksi dalam jumlah berapapun bisa diperhitungkan sesuai kebutuhan, artinya kebutuhan akan ketahanan pangan bisa dijaga dan dipertahankan. Dengan adanya jenis ayam kampung asli unggul yang di butuhkan masyarakat luas, pasti secara ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan meningkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tentu akan meningkat pula.

Dari beberapa sampling peternak pedesaan yang telah berhasil mengembangkan ternak ayam kampung unggul Pancamurti sangat memungkinkan untuk dijadikan *pilot project* untuk program pemberdayaan ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa berbasis budidaya ayam kampung asli unggul. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antara berbagai pihak ataupun *stakeholder* baik pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis maupun akademisi, dimana peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus dapat mengintegrasikan atau mensintesis secara holistik semua kepentingan yang dimiliki oleh pelaku bisnis, akademik, dan pemerintah itu sendiri, sehingga program dan aturan yang dibuat dapat mengayomi seluruh pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas kepada Bapak Agus Prayudi sebagai inovator maupun inisiator budidaya ayam kampung asli unggul Pancamurti yang telah memberikan informasi dan bersedia *sharing knowledge* berkaitan dengan pembudidayaan ayam kampung asli Pancamurti kepada penulis.

Disamping itu juga kami ucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara kegiatan Temu Ilmiah Nasional yang telah memfasilitasi penulis sehingga kami dapat mendesiminasikan dan mempresentasikan hasil inovasi budidaya ayam kampung asli yang merupakan potensi lokal dengan harapan mampu menunjang ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Penerbit Rineka Cipta.
- Allan M. Williams, 2007 *Rural Innovation: Rural Tourism and Innovation. Institute for the Study of European Transformations, and Working Lives Research Institute*, London Metropolitan University.
- Bungin, *Burhan*.2007.*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*.Jakarta:Putra Grafika
- Hamel, Gary. 2000. *Leading the Revolutio*. Havard Business School Press
- Kementerian Pertanian RI, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2018, *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018*
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nana Syaodih Sukmadinata (2005), *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitan Sosial*. Jakarta: Ghalia
-, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi*, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1994
- Taufik, Tatang A. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta : Pusat Pengkajian.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/09/berapa-konsumsi-daging-ayam-per-kapita-masyarakat>

**UPAYA PERLINDUNGAN POTENSI TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR BALI
UTARA UNTUK MEWUJUDKAN DESA WISATA BAHARI DAN MEMPERKUAT
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**

***AN EFFORT PROTECTION CORAL REEF IN NORTH BALI TO REALIZE A MARINE TOURISM
VILLAGE AND STRENGTHEN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VILLAGE***

Mukti Ali Asyadzili

Universitas Diponegoro, Jalan Hayam Wuruk No 5 Semarang, 81116

muktiali46@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas 5,8 juta km² yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia, salah satu contoh potensi kelautan di Indonesia adalah Terumbu Karang. Desa Pemuteran yang terletak di pesisir Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali cukup terkenal berkat keberhasilan masyarakatnya dalam mengelola terumbu karang. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah (1) Mengetahui langkah-langkah untuk mengembangkan potensi kelautan di Desa Adat Pemuteran, (2) Upaya membentuk industri dari potensi Terumbu Karang di Desa Pemuteran (3) Mengetahui pembentukan masyarakat yang berjiwa entrepreneurship di pesisir Pantai Desa Pemuteran. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan karya tulis ini yaitu menggunakan Metode Kualitatif untuk memperoleh data dari literatur-literatur yang relevan dengan karya tulis. Teknologi Coral Biorock adalah sebuah teknologi yang tepat untuk melindungi Terumbu Karang di Bali Utara. Dengan teknologi ini, nelayan yang biasanya mendapat ikan misalkan 2 Kg bisa menjadi 10 Kg per hari. Praktik sosial pelestarian dituangkan dalam bentuk program yang berintikan pada pelestarian ekosistem pantai dan laut. Untuk mewujudkan sasaran ini *Pecalang Segara* bekerja sama dengan *desa pakraman*, *desa dinas* dan *stakeholder*, melakukan berbagai praktik sosial, yakni sosialisasi program, koordinasi dengan desa tetangga, memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak, melakukan pengawasan, dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran. Maka dari itu pelaksanaan untuk melestarikan potensi kelautan yaitu Terumbu Karang di Desa Pemuteran berlandaskan *Tri Hita Karana* dan hasilnya Terumbu Karang di Desa Pemuteran menjadi ikon pariwisata bahari di Bali Utara.

Kata Kunci: *Coral Biorock, Desa Pemuteran, Pecalang Segara, Terumbu Karang, Tri Hita Karana.*

ABSTRACT

The Indonesian state have very wide maritime territory of 5.8 million km², is is three-fourths of the entire territory of Indonesia, one example of the potential of marine coral reefs in Indonesia is located in the village of Pemuteran Buleleng, Bali Province. The purpose of writing a scientific paper acres: (1) determine the steps to · develop the potential of marine in traditional village of Pemuteran, (2) efforts to establish industrial character of the potential of coral reefs in the traditional village of Pemuteran. The data collection techniques in the writing of this paper is to use quantitative method. Screened Librarianship sought concerning the location of the target material conditions associated condition of coral reefs and marine potential and for the method to be able reserves to develop the potential of the coral reefs. Preservation of social practices outlined in the form of a program with a core on coastal and marine ecosystem conservation through Pecalang for immediate. Coral Biorock method is a method to create an artificial reef live electrical low voltage so as to accelerate the formation of coral reefs in iron " constructed in various forms. With the Biorock this, many fishfinder will return to the seaside Pemuteran do we stop? Because Reefs provide plenty of food for fish finder. Fishermen who usually gets the fishfinder e.g 2 kg increased to 10 kg. The concept of Tri Hita Karana" concept is also used the United States guidelines for establishing marine tourism industry in North Bali.

Keyword: *Coral Biorock , Coral Reef , Pecalang for immediate, Pemuteran Village , Tri Hita Karana*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas 5,8 juta km² yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. Selain peran geopolitik, wilayah laut kita juga memiliki peran ekonomi yang sangat penting bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, Indonesia diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam, baik berupa sumber daya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi) sumberdaya alam yang tidak terbarukan.

Salah satu contoh potensi kelautan di Indonesia adalah Terumbu Karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Geografis Desa Pemuteran di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang kering, membuat warga hanya bisa bertanam jagung pada saat musim hujan, sehingga pekerjaan sebagai nelayan menjadi salah satu alternatif pekerjaan lainnya. Banyaknya aksi penangkapan ikan hias dengan bom potasium sejak tahun 1990-an, membuat kawasan laut Pemuteran sangat tidak menguntungkan bagi nelayan. Kawasan pembangunan Terumbu Karang buatan harus dibuat karena nelayan mencari ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan yakni menggunakan bom sehingga merusak Terumbu Karang di sana. Ditambah dengan pemanasan global yang menyebabkan pemutihan pada Terumbu Karang di sana yang menyebabkan kematian. Akibatnya, nelayan sulit mendapatkan ikan dan terpaksa berlayar jauh ke tengah laut.



Gambar 1 : Peta Lokasi Desa Pemuteran

Desa Pakraman Pemuteran merupakan desa pantai sehingga banyak warganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada awal tahun 1990-an timbul perubahan teknik penangkapan ikan, yakni mereka memakai potasium dan bahan peledak. Pemakaian teknik ini bertalian dengan semakin kuatnya penetrasi ideologi pasar yang berintikan pada keserakahan sehingga manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa lewat pasar. Bahkan yang tidak kalah pentingnya manusia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, nilai guna dan nilai simbolik sehingga keserakahan mereka menjadi bertambah hebat (Atmadja, 2010; Aryo, 2012; Groz, 2005; Fakihi, 2003). Praktik sosial perusakan ekosistem laut dan pantai di *Desa Pakraman* Pemuteran diperkuat pula oleh gagasan warga desa tentang hakikat sumber daya alam yang dianggap tidak terbatas dan bersifat terbuka. Pada mulanya pemakaian potasium dan bahan peledak bersifat kadangkala dan agen yang memakainya amat terbatas.

Namun sejak era Reformasi pada tahun 1997, menunjukkan gejala yang menarik, yakni pemakaian potasium dan bahan peledak menjadi mode di kalangan para nelayan di *Desa Pakraman* Pemuteran.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai tulisan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, tahapan-tahapan dalam suatu penelitian juga diterapkan dalam rancangan penelitian karya tulis ini, yaitu mencakup beberapa tahapan penelitian sebagai berikut.

1. Persiapan, meliputi observasi lapangan secara umum dan pengumpulan data sekunder dengan pencatatan dokumen.
2. Pengumpulan jenis data primer di lapangan melalui teknik observasi terbatas dan wawancara terbatas
3. Pengolahan data.
4. Penulisan karya.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pendiri Yayasan Karang Lestari Bapak I Gusti Agung Prana di Desa Pemuteran, para Pecalang Segara di Desa Pemuteran, dan masyarakat di Desa Pemuteran. Informan awal yang ditunjuk diposisikan sebagai informan kunci. Jumlah informan tidak dibatasi sejak awal, melainkan tergantung pada tingkat kejenuhan data yang dikumpulkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian akan dikumpulkan dengan memakai beberapa teknik pengumpulan data, yakni :

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Informan yang telah ditetapkan, diwawancarai memakai teknik wawancara mendalam. Agar wawancara mendalam dapat dilaksanakan secara terarah, maka disusun pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pikiran yang terkait dengan masalah yang dikaji. Dengan wawancara ini diharapkan bisa berlangsung fleksibel. Begitu pula informasi yang digali, tidak hanya bertumpu pada yang mereka ucapkan, tetapi disertai pula dengan penggalian yang mendalam tentang pemaknaan mereka terhadap ucapan maupun perilaku yang mereka lakukan. Dengan demikian, melalui wawancara mendalam tergali aspek *explicit knowledge* yang melekat pada informan. Untuk menghindari terjadinya distorsi data, maka pencatatan hasil wawancara dilakukan secara manual dan/atau disertai dengan perekaman dengan menggunakan alat perekam. Pemakaian alat perekam atas persetujuan informan sehingga wawancara tetap berjalan secara alamiah.



Gambar 2
Bapak I Gusti Agung Prana Pendiri Yayasan Karang Lestari
Sebagai Narasumber Wawancara

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan sebagai metode utama, di samping wawancara untuk mengumpulkan data. Pertimbangan yang digunakan adalah bahwa apa yang dikatakan narasumber sering berbeda dengan apa yang dilakukan. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pelestarian potensi Terumbu Karang yang ada di Desa Pemuteran.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini diawali dengan mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara keseluruhan berdasarkan kaitan logisnya yang kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penulisan. Mengkaitkan data dilakukan melalui triangulasi data, yaitu mengkolaborasikan data-data yang diperoleh dari ketiga metode yang digunakan (wawancara, observasi, dan dokumentasi), sehingga didapatkan kesesuaian data yang kemudian dikait-kaitkan secara logis. Kaitan-kaitan logis inilah yang kemudian disusun menjadi konsepsi pembahasan yang dipaparkan secara deskriptif dengan mengutamakan pemaparan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

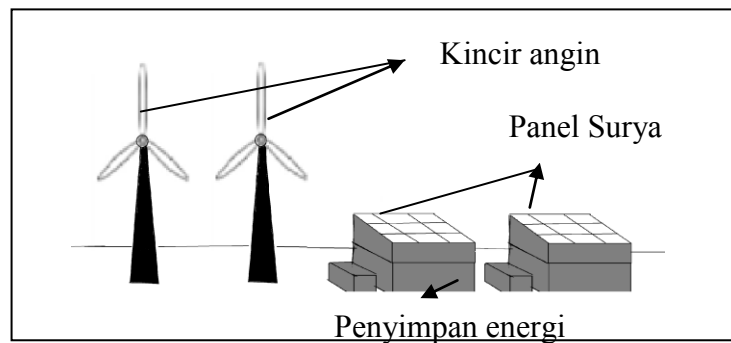
A. Teknologi *Hybrid System of Coral Biorock* untuk Melindungi Potensi Terumbu Karang di Desa Pemuteran

Biorock adalah terumbu karang buatan yang dialiri listrik tegangan rendah sehingga mampu mempercepat pembentukan karang pada besi yang dibangun dalam berbagai bentuk. Pemuteran merupakan kawasan Biorock terbesar di dunia, dengan 72 struktur bangunan yang ditanam di atas dasar laut seluas 2 Ha. Kawasan pembangunan konservasi Terumbu Karang ini dibuat karena nelayan disana mencari ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan yakni menggunakan bom sehingga merusak Terumbu Karang di sana. Ditambah dengan pemanasan global yang menyebabkan pemutihan pada Terumbu Karang di sana yang menyebabkan kematian. Akibatnya, nelayan sulit mendapatkan ikan dan terpaksa berlayar jauh ke tengah laut.



Gambar 3
Metode *Coral Biorock*

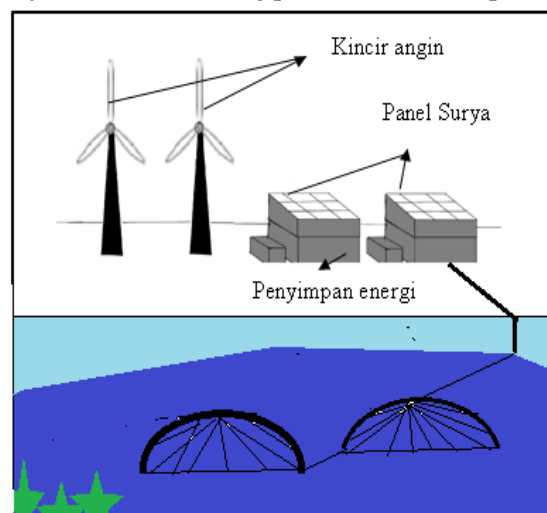
Dengan adanya *Biorock* ini, ikan akan banyak di berada di tepi pantai Pemuteran karena Terumbu Karang menjadi rumah bagi ikan dan memberikan banyak makanan bagi ikan-ikan. Nelayan yang dulunya mendapat ikan 2 Kg per hari setelah adanya Teknologi Hybrid System of Coral Biorock ini bertambah banyak lagi tangkapan ikannya menjadi 10 Kg. *Hybrid System of Coral Biorock* dapat diterapkan untuk mempercepat pertumbuhan Terumbu Karang yang ada sehingga desa wisata bahari dapat terbentuk. Hybrid System of Coral Biorock adalah suatu sistem yang menggabungkan dua buah teknologi yang akan menghasilkan energi listrik untuk dapat digunakan sebagai alternatif energi listrik pembangkit *coral biorock*. Hybrid yang digunakan ialah memadukan antara dua sistem pembangkit yaitu energi surya dan energi bayu. Kedua energi ini tepat digunakan di wilayah pesisir Desa Pemuteran.



Gambar 4.
Teknologi Hybrid Sistem of Coral Biorock

Hybrid Sistem Of Coral Biorock dengan menggunakan prinsip pengubahan energi alternatif menjadi energi listrik sebagai pembangkit *Coral Biorock* perlu diterapkan karena ada beberapa faktor diantaranya :

- Penerapan *coral biorock* masih menggunakan energi listrik PLN sehingga adanya pemborosan listrik untuk mengembangkan teknologi *coral biorock*. Penggunaan energi alternatif dapat menggantikan energi listrik PLN sehingga dapat menerapkan *coral biorock*.
- Wilayah pesisir memiliki curah hujan yang rendah, dan memiliki intensitas radiasi matahari yang tinggi dengan rata-rata suhunya 30°C , dan rata-rata kecepatan angin yang tinggi membuat penerapan *Teknologi Hybrid Sistem Of Coral Biorock* bisa diterapkan.
- Pengembangan desa wisata bahari yang berbeda dengan wisata bahari lainnya menjadikan suatu potensi pariwisata yang dapat dipromosikan ke mancanegara.
- Pengembangan desa wisata berbasis teknologi alternatif otomatis dapat menjadi suatu potensi pengembangan kawasan ekonomi pariwisata yang akan membuat pemberdayaan masyarakat di Desa Pemuteran lebih sejahtera dalam bidang perekonomian dan pariwisata.



Gambar 5
Ilustrasi Cara Kerja Hybrid Sistem Of Coral Biorock



Gambar 6
Inti Pelestarian Potensi Terumbu Karang Di Desa Pemuteran

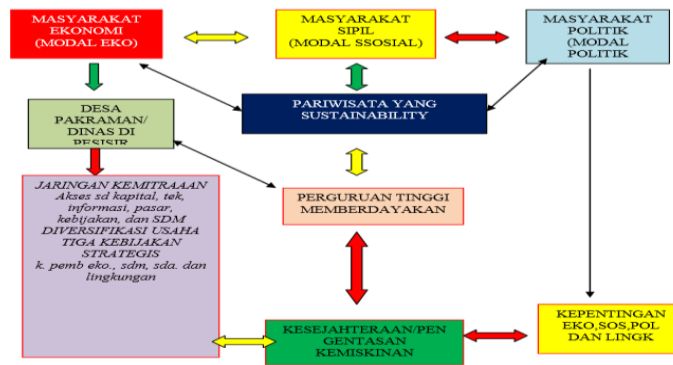
B. Pemberdayaan Masyarakat yang Berjiwa Entrepreneurship di Desa Wisata Bahari Pemuteran

Dengan adanya program konservasi Terumbu Karang ini mendorong jumlah kunjungan wisatawan yang ingin melihat Terumbu Karang dan taman yang mengelilinginya. Kontribusi positif dari pertumbuhan Terumbu Karang di daerah ini membuka potensi eko-wisata bahari dan wisata pendidikan. Baru-baru ini, 30 siswa Bali International School mengunjungi Desa Pemuteran dan Pusat Pendidikan Bio Rock (*Bio Rock Education Centre*). Para siswa dikenalkan prinsip dasar lingkungan bawah laut, sekaligus menikmati keindahan laut. Beberapa murid memilih untuk berenang dan *snorkeling*, murid lainnya menumpang di kapal berlantai kaca tembus pandang. Pariwisata seperti ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Pemuteran dan menjadikan Desa Pemuteran sebagai kawasan ekonomi pariwisata di Bali dan Indonesia.



Gambar 7
Industri Kreatif di Desa Pemuteran Akibat Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat sekitar yang tentunya memiliki pekerjaan sebagai nelayan dengan rata-rata pendapatan dibawah UMR dapat terbantu dengan adanya proyek pelestarian terumbu karang ini. Keindahan akan terumbu karang di Desa Pemuteran tentunya akan mendatangkan banyak tamu wisatawan baik domestik maupun manca negara, hal ini tentunya akan menguntungkan masyarakat pesisir yaitu dengan membentuk usaha ekonomi kreatif Desa Wisata Bahari Pemuteran. Pembentukan desa ekonomi kreatif ini tentunya akan menaikkan taraf kehidupan masyarakat pesisir.



Gambar 8
Alur Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pemuteran

Pembentukan desa wisata bahari ini tidak terlepas dari adanya inovasi dari pemanfaatan produk daerah yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Desa Pariwisata Bahari Pemuteran. Oleh-oleh ini contohnya ialah memanfaatkan hasil alam yaitu berupa ikan, dimana ketika Terumbu Karang sudah baik otomatis Terumbu Karang yang menjadi rumah dari ikan, sehingga ikan akan banyak berdatangan ke Terumbu Karang tersebut dan Nelayan bisa mendapatkan ikan yang banyak. Banyaknya ikan dapat diolah menjadi beberapa olahan pangan yang menjadi oleh-oleh seperti diolah menjadi kripik ikan, keringan ikan, Ikan Laut Betutu. Selain ikan yang dapat diolah, penduduk pesisir pantai dapat menjadi petani rumput laut sehingga nantinya ada olahan rumput laut desa Pemuteran. Disamping itu masyarakat juga dapat membentuk usaha kreatif lainnya berupa usaha-usaha jasa baik itu dari penyawaan sepeda, penginapan, dan pelatihan penyelaman. Terbentuknya desa wisata bahari ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, hal ini dikarenakan adanya usaha kreatif masyarakat diharapkan mampu meratakan ekonomi di Indonesia khususnya di Bali dan di wilayah Bali Utara sehingga mampu mengikuti perkembangan arus ekonomi global yang semakin meningkat.

KESIMPULAN

Biorock adalah terumbu karang buatan yang dialiri listrik tegangan rendah sehingga mampu mempercepat pembentukan karang pada besi yang dibangun dalam berbagai bentuk. Pemuteran merupakan kawasan Biorock terbesar di dunia, dengan 72 struktur bangunan yang ditanam di atas dasar laut seluas 2 Ha. Dengan adanya *Biorock* ini, ikan kembali banyak di tepi pantai Pemuteran karena Terumbu Karang memberikan banyak makanan bagi ikan-ikan. Nelayan yang biasanya mendapat ikan misalkan 2 Kg menjadi 10 Kg. *Hybrid System of Coral Biorock* dapat diterapkan untuk mempercepat pertumbuhan Terumbu Karang yang ada sehingga desa wisata bahari dapat terbentuk. Sistem hybrid ialah suatu sistem yang menggabungkan dua buah teknologi yang akan menghasilkan energi listrik untuk dapat digunakan sebagai alternatif energi listrik pembangkit *coral biorock*. Hybrid yang digunakan ialah memadukan antara dua sistem pembangkit yaitu energi surya dan energi bayu. Kedua energi ini tepat digunakan di wilayah pesisir Pemuteran. Tri Hita Karana adalah sebuah filsafat hidup bagi rakyat Bali, maka dari itu pelaksanaan untuk melestarikan potensi kelautan yaitu Terumbu Karang di Desa Pemuteran berlandaskan Tri Hita Karana. Praktek pelestarian Terumbu Karang di Desa Pemuteran akan membentuk karakter industri Pariwisata Bahari yang berkarakter Tri Hita Karana dalam pelaksanaannya dan sebagai timbal baliknya kawasan Desa Pemuteran menjadi pusat wisata bahari yang terkenal di Bali Utara dan siap meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah Internasional lewat industri pariwisata baharinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edy Yusuf selaku dosen pembimbing saya di Universitas Diponegoro yang telah banyak membimbing saya dalam menulis karya tulis ilmiah berupa artikel dan jurnal. Semoga kedepannya saya bisa menulis lebih banyak lagi artikel dan jurnal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, H. 2002. *Negara dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal*. (Penerjemah Pujo Semadi). Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Aryo, B. 2012. *Tenggelam dalam Neoliberalisme? Penetrasi Ideologi Pasar dalam Penanganan Kemiskinan*. Jakarta: Kepik.
- Atmadja, N.B. 2010. *Ajag Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Barker, C. 2004. *Cultural Studies Teori dan Praktik*. (Penerjemah Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bourdieu, F. 2010. *Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Kebudayaan*. (Penerjemah Yudi Santosa). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Covarrubias, M. 1972. *Island of Bali*. Oxford University Press.
- Edkins, J. Dan N.V. Williams ed. 2009. *Teori-teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. (Penerjemah Teguh Wahyu Otomo). Yogyakarta: Baca.
- Fakih, M. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 2010. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Giddens, A. 2011. *Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. (Penerjemah: A. L. Sujono). Yogyakarta: Pedati.
- Groz, A. 2005. *Anarki Kapitalisme*. (Penerjemah Komunitas Apiru). Yogyakarta: Resist Book.
- Jay, M. 2005. *Sejarah Maszhab Frankfurt Imajinasi Dialektika dalam Perkembangan Teori Kritis*. (Penerjemah Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kellner, D. 2003. *Teori Sosial Radikal*. (Penerjemah Eko-Rindang Farichbah). Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Korten, D.C. 1993. *Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. (Penerjemah Lilian Tejasudhana). Jakarta: Sinar Harapan.
- Kulka, A. 2003. *Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu*. (Penerjemah Hari Kusharyanto). Yogyakarta: Jendela.
- Kurzweil, E. 2004. *Dari Levi-Strauss sampai Foucault*. (Penerjemah Nurhadi) Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Piliang, 2004. *Postrealitas Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Puspita, Mayumi. 2016. *IAHSD (Indonesia Automatic Hybrid System Of Seawater Distillation) : Inovasi Pengubahan Air Laut Menjadi Air Tawar Daerah Pesisir Indonesia (PKM GT)*. Singraja : (Tidak Diterbitkan)

- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Penerjemah Saut Pasaribu, Rh. Widodo, dan Eka Adi Nugraha). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saeng, V. 2012. *Hebert Marcuse Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Soemardjan, S. 1993. "Arah dan Sasaran Pembangunan". Dalam Desiree Zuraida dan Jufrina Rizal *ed. Masyarakat dan Manusia dala Pembangunan Pokok-pokok Pikran Selo Soemardja*. Jakarta: Sinar Harapan. Halaman 25-214.
- Subomo. N.I. 2010. *Erich Fromm Psikologi Sosal yang Humanis*. Jakarta: Kepik Ungu.



PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI *PRODUCT COMPETITIVE ANALYSIS* PADA KERAJINAN PAHAT BATU DI DESA TAMANAGUNG KABUPATEN MAGELANG

DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMIC RESOURCES THROUGH PCA ANALYSIS IN PAHAT BATU CRAFTS IN TAMANAGUNG MAGELANG DISTRICT

Maulana Ghani Yusuf¹, Joko Hadi Susilo², Adi Firmanzah³

^{1,2,3} Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, 50241

¹maulanaghaniyusuf@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekonomi lokal seni pahat batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang dengan membandingkan usaha sejenis di beberapa daerah lain. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana analisisnya melalui *product competitive analysis* dan analisa SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tamanagung Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar dalam kesenian pahat batu. Seni pahat batu yang diproduksi diantaranya adalah patung, relief, serta peralatan memasak seperti cobek, munthu, dan lainnya. Keunggulan produk tersebut dibanding daerah lainnya karena bahan baku yang digunakan berasal dari hasil erupsi Gunung Merapi sehingga mempunyai kualitas baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu adanya pembinaan dari pemerintah untuk pengembangan sumberdaya lokal tersebut.

Kata kunci: Ekonomi lokal dan *product competitive analysis*

ABSTRACT

This study aims to determine the local economic potential of local stone carving art resources in Tamanagung Village, Magelang Regency by comparing similar businesses in several other regions. The method used is descriptive qualitative where the analysis through product competitive analysis and SWOT analysis. The results of this study indicate that the Tamanagung Village, Magelang Regency has great potential in stone carving art. Stone carvings produced include sculptures, reliefs, and cooking utensils such as cobek, munthu, and others. The superiority of the product compared to other regions is that the raw material used is derived from the eruption of Mount Merapi so that it has good quality. The results of this study indicate that the development of local economic resources can improve the standard of living and welfare of the community so that there is a need for guidance from the government for the development of these local resources.

Keywords: Local economy and *product competitive analysis*

PENDAHULUAN

Dewasa ini kondisi ekonomi di setiap negara menunjukkan perkembangan yang semakin pesat. Hal tersebut perlu diantisipasi diantaranya dengan membentuk kerjasama antar tiap negara. Kerjasama beberapa negara dalam berbagai bidang khususnya ekonomi di Asia Tenggara menjadi cikal bakal lahirnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Tujuan dari adanya MEA adalah terciptanya negara-negara mandiri di Asia Tenggara yang awalnya hanya menjadi konsumen mulai berlomba-lomba menjadi produsen bagi negara lainnya (Irawan 2015).

Perekonomian era globalisasi atau pasar bebas merupakan tantangan bagi setiap negara khususnya Indonesia. Ekonomi kreatif merupakan salah satu solusi dalam menghadapi persaingan era pasar bebas (Khristianto 2012). Ekonomi kreatif muncul sebagai fase perubahan era ekonomi terbaru melanjutkan era pertanian, industri dan informasi. Pada era ekonomi kreatif, nilai barang dan jasa ditentukan berdasarkan sejauh mana pemanfaatan inovasi dan teknologi (Rini 2010).

Ekonomi kreatif diartikan sebagai sebuah industri yang didalamnya terdapat ide-ide baru dari sumberdaya manusia kreatif dan mempunyai bakat yang bisa untuk terus dikembangkan dengan tujuan

untuk menyelesaikan setiap pekerjaan (Hardjowisastro 2009). Lebih lanjut menurutnya ide manusia tentang pengembangan sumberdaya yang terbarukan merupakan salah satu aspek dari industri kreatif yang didasarkan pada talenta dan keterampilan yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Undang-undang ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat berdasarkan atas kreatifitas, keterampilan, dan kreasi sehingga mampu menghasilkan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ramdani (2015) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi kreatif harus berdasarkan atas seni dan kerajinan dengan tetap mengedepankan nilai warisan, benda sejarah, serta tradisi dan adat istiadat yang berlaku.

Septian (2018) menyebutkan bahwa dalam rangka pengoptimalisasi perkembangan ekonomi kreatif, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif (*Bekraf*) yang bertujuan untuk meningkatkan industri kreatif di Indonesia. Tugas dari *Bekraf* adalah membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, serta melakukan sinkronisasi segala kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Keseriusan pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif membuat tahun 2009 disebut sebagai Tahun Industri Kreatif. Penetapan tersebut diakibatkan karena sumbangsih ekonomi kreatif kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja (Lak lak 2015).

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif, terdapat beberapa undang-undang terkait pengembangan ekonomi kreatif diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Kreatif Nasional, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan guna mendorong perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif. Berbagai peraturan dan undang-undang tersebut bertujuan agar setiap masyarakat khususnya pemerintah daerah mengembangkan potensi yang dimiliki berkaitan dengan ekonomi kreatif khususnya berbasis lokal.

Keberadaan industri kecil memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Industri kecil atau lebih dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada umumnya berkembang dipicu oleh semangat kewirausahaan lokal dengan pemanfaatan sumberdaya lokal (Asfi 2018). Adanya UKM dapat dijadikan sebagai faktor pemicu atau penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal di suatu wilayah. Pemberdayaan dan pengembangan industri kecil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat lokal.

Pemerintah mempunyai peran sebagai regulator dalam upaya peningkatan ekonomi lokal di suatu daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Peran tersebut bisa dalam bentuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi penuh dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peran lain yang dapat diberikan diantaranya memberikan berbagai pelatihan dalam pengembangan potensi sumberdaya lokal agar kompetensi dari industri kecil atau UKM semakin meningkat.

Kekayaan alam merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh desa, yang diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa. Masyarakat sebagai warga desa diharapkan dapat mengusahakan dan mengembangkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Seperti halnya kerajinan batu yang terletak di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang. Kerajinan seni pahat batu merupakan salah satu potensi yang ada di desa tersebut dan daerah sekitarnya. Bagi masyarakat lokal, batu merupakan sumber penghidupan karena dapat menjadi sumber penghasilan. Batu-batu yang telah diolah dan dipahat dengan aneka bentuk memiliki nilai tambah dan jual yang tinggi.

Product Competitive Analysis (PCA) adalah sebuah kegiatan analisis yang dilakukan untuk memonitor kompetitor barang sejenis dan mengantisipasi adanya pergeseran perubahan pasar yang sewaktu-waktu bisa terjadi (Walter 2019). Analisa ini diikuti dengan analisa SWOT dengan tujuan mengetahui faktor internal (kelebihan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) suatu

industri dalam pengembangannya. Analisa PCA diperlukan dalam penilaian pengembangan ekonomi lokal dengan tujuan mengetahui kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk pengembangan ekonomi lokal ke depan.

Berdasarkan kajian literatur yang dijadikan referensi dari penelitian ini, didapatkan tiga penelitian sejenis mengenai pengembangan ekonomi lokal dengan berbagai sudut pandang yang luas, diantaranya jurnal oleh Septian (2018), Hasanah (2015), dan Rini dkk (2010). Desa Tamanagung di Kabupaten Magelang merupakan salah satu desa yang terkenal memiliki kerajinan seni pahat batu dengan kualitas baik. Desa Tamanagung juga dikenal sebagai desa sentra industri kecil berupa seni pahat batu yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin atau pemahat. Industri seni pahat batu yang awalnya hanya berbentuk barang yang masih sederhana sekarang sudah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi akibat adanya inovasi dan kreatifitas yang diberikan. Kerajinan pahat batu mempunyai berbagai jenis dan bentuk seperti stupa, gapura, patung, batu relief dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya pengembangan ekonomi lokal dengan pemanfaatan ekonomi kreatif, maka dapat penulis rumuskan beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut : 1.) mengetahui potensi ekonomi lokal seni pahat batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang; 2.) mengetahui perbandingan kompetitor seni pahat batu sejenis di beberapa daerah; 3.) mengetahui rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan seni pahat batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang

A. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif diartikan sebagai sebuah industri yang didalamnya terdapat ide-ide baru dari sumberdaya manusia kreatif dan mempunyai bakat yang bisa untuk terus dikembangkan dengan tujuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan (Hardjowisastro 2009). Lebih lanjut menurutnya ide manusia tentang pengembangan sumberdaya yang terbarukan merupakan salah satu aspek dari industri kreatif yang didasarkan pada talenta dan keterampilan yang dimiliki.

B. Analisa PCA dan SWOT

Analisa PCA adalah suatu analisa yang dilakukan untuk membuat perbandingan strategi kompetitor dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan dengan pendekatan pemasaran dan lainnya. Analisa ini juga dibuat untuk membantu suatu industri dalam menentukan keuntungan dan hambatan dalam pasar yang mengandung suatu produk atau layanan tertentu (Walter 2018).

Kemudian analisa SWOT diartikan sebagai suatu metode analisis yang paling mendasar yang berguna untuk mengetahui topik dan permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil akhir dari analisis ini berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman (Rais 2009).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan fenomena secara langsung pada obyek penelitian dan wawancara terhadap beberapa *stakeholder* dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kondisi riil di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth-interview*) ke beberapa *stakeholder* terkait yang memahami kondisi sejarah, potensi, dan pengembangan pada seni pahat batu tersebut. Pertanyaan yang ditanyakan dilakukan dengan alat bantu kuesioner yang bersifat terbuka. Tujuan penggunaan kuesioner terbuka dikarenakan jawaban yang diharapkan agar lebih kompleks sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan rentan waktu antara 29 Mei sampai 1 Juli 2019. Analisis data dilakukan hasil survei dilakukan wawancara terhadap industri seni pahat batu yang diambil dari beberapa sanggar seni pahat, diantaranya

Sanggar Art Shop Linang Sayang, Sanggar Lestari Steone Art, Sanggar Nakula Sadewa, Dua Putra, dan Annisa. Data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dengan triangulasi, selain itu menggunakan analisa PCA (*Product Competitive Analysis*) untuk membandingkan hasil produk sejenis dengan daerah lainnya. Kemudian analisa tersebut dilengkapi dengan analisa SWOT dengan tujuan untuk mengetahui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya pengembangan seni pahat batu di Desa Tamanagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Ekonomi lokal Seni Pahat Batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang

Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif oleh pemerintah saat ini sudah cukup baik. Berbagai undang-undang tentang ekonomi kreatif dan dibentuknya salah satu lembaga di bawah presiden dengan nama Bekraf merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satu industri kreatif yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah UKM seni pahat batu yang terdapat di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang

Pengetahuan terhadap upaya pengembangan ekonomi kreatif di desa ini dilakukan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara terhadap beberapa stakeholder diantaranya pemerintah dan masyarakat lokal selaku pelaku industri kreatif. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Sekertaris Desa Tamanagung terdapat kurang lebih 50 sanggar seni kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang, dimana pusat kegiatan seni pahat batu terpusat di Dusun Tejawarno dan Dusun Sidoharjo.

Usaha seni pahat batu sendiri menurutnya merupakan jenis usaha turun menurun dari dulu dan berlangsung sudah cukup lama kurang lebih sejak tahun 1940-an. Salah satu tokoh yang dianggap sebagai pencetus seni pahat batu di Desa Tamanagung adalah keluarga Bapak Musto Pawiro. Menurut Kepala Dusun Sidoharjo dilengkapi dengan literatur dari Misgiya (2004) menyebutkan bahwa keluarga pencetus kerajinan seni pahat batu ini memiliki tiga orang anak terdiri dari Wiro Dikromo, Salim Djajapawiro, dan Pawiro Jumenno pada awalnya bekerja sebagai pemahat. Hasil seni pahat tersebut diantaranya berupa cobek, lesung, dan kijing. Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut semakin dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun luar desa membuat usaha ini berkembang pesat. Masyarakat sekitar mulai mencoba memanfaatkan kondisi tersebut dengan ikut membuka usaha sejenis untuk menambah penghasilannya.

Seni pahat batu di Desa Tamanagung sudah berjalan sangat lama. Sejarah panjang tersebut menjadikan desa ini dapat difungsikan sebagai aset lokal dalam pengembangan ekonomi lokal. Adanya beberapa sanggar seni kerajinan pahat batu juga memberikan dampak positif diantaranya sebagai proyeksi penyerapan tenaga kerja yang terdiri dari pengrajin, seniman, sampai kepada pengusaha. Masing-masing jenis industri memiliki tenaga kerja yang bervariasi mulai dari 2 sampai 30 orang tergantung besar dan kecilnya industri tersebut.

Produk hasil seni pahat di Desa Tamanagung memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan daerah lainnya. Keunikan produknya terdapat pada hasil seni pahat yang memiliki corak khas dan merupakan warisan dari leluhur, mulai dari patung, stupa, maupun reliefnya. Selain itu, bahan baku yang berasal langsung dari erupsi Gunung Merapi baik itu batu jenis alam maupun andesit juga menjadikan hasil pahat batu di sini mempunyai kualitas batu yang baik dibandingkan daerah lainnya. Tekstur batu yang kuat dan kokoh membuat hasil seni pahat di Desa Tamanagung tidak mudah rusak dan awet.

Lokasi seni kerajinan pahat batu berada di sepanjang Jalan Provinsi yaitu jalan yang menghubungkan antara Propinsi Jawa Tengah dan DIY menjadikan industri ini mempunyai prospek yang bagus jika dilihat dari sudut pandang aspek pengembangan kepariwisataan. Selain itu, aspek lokasi

yang tidak jauh dengan tempat wisata seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut juga menjadikan industri seni pahat batu ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut.

Berbagai potensi seni pahat batu Desa Tamanagung, mulai dari usia seni ini yang sudah lama dan turun menurun, menciptakan lapangan kerja baru, punya ciri khas dan corak sendiri, bahan baku yang kuat dan kokoh karena berasal dari erupsi Gunung Merapi, hingga lokasi yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata sampai saat ini masih belum didukung perhatian oleh pemerintah daerah setempat.

Sebagian besar penduduk lokal baik yang berprofesi sebagai pengusaha, pengrajin, dan pemahat mengeluhkan perhatian dari pemerintah daerah setempat yang hampir tidak ada. Pengembangan seni pahat batu cenderung dilakukan oleh masing-masing sanggar secara mandiri. Untuk sanggar dengan kapasitas yang kecil pengembangan yang dilakukan cenderung lebih sedikit karena minimnya kapasitas produksi dan upaya pemasaran. Berbeda dengan sanggar-sanggar besar seperti Sanggar Art Shop Linang Sayang dan Sanggar Nakula Sadewa yang pemasarannya sudah sampai ke luar negeri.

B. Perbandingan Kompetitor Seni Pahat Batu Sejenis di Beberapa Daerah Dengan Analisa PCA dan SWOT

Analisa terhadap pesaing produk sejenis dari seni pahat batu di Desa Tamanagung dapat dilakukan dengan *Product Competitiveness Analysis* (PCA). Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui keunggulan kompetitif seni pahat batu di Desa Tamanagung dibandingkan dengan beberapa usaha sejenis lainnya yang dilihat dari beberapa faktor, diantaranya :

Tabel 1.

Matriks *Product Competitiveness Analysis* Kerajinan Batu Pahat Desa Tamanagung Kabupaten Magelang

Faktor	Kerajinan Batu Pahat Tamanagung	Kerajinan Batu Pahat Trowulan	Kerajinan Batu Pahat Bali	Kerajinan Batu Pahat China
Harga	**	**	***	****
Bahan baku	Batu alam dan andesit	Batu hijau	Batu padas	Batu granit, marmer, giok
Ciri khas	Penggunaan batu lava, motif Budha	Motif Budha, Majapahitan	Motif Hindu	Penggunaan batu giok, motif Tiongkok
Tujuan ekspor	Belgia, Jerman, Swiss, Prancis	Belanda, Jerman, Belgia, Inggris, Prancis	India, Amerika Serikat, Australia	India, Mesir, Turki, Mongolia, Iran, Thailand
Dukungan pemerintah	**	**	**	***
Pemanfaatan TI	**	**	***	***

Keterangan :

* : very weak

*** : strong

** : weak

**** : very strong

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan matriks *Product Competitiveness Analysis* (PCA) di atas, dapat diketahui terdapat beberapa kompetitor dalam pengembangan sumberdaya lokal pahat batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang. Kompetitor-kompetitor didapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada stakeholder terkait yaitu dari Sekertaris Desa Tamanagung dan Kepala Dusun Sidoarjo serta beberapa

pemahat dan pengrajin seni pahat batu. Kompetitor tersebut berasal dari beberapa daerah seperti kerajinan pahat batu di Bali, Trowulan Mojokerto, dan China. Di dalam tabel matriks di atas, terdapat beberapa faktor yang dijadikan sebagai perbandingan produk seni pahat dari beberapa daerah dilengkapi dengan tingkatan peran yang diberikan dari mulai paling lemah hingga paling kuat.

Terdapat 6 faktor yang dijadikan sebagai dasar penelitian menggunakan analisa PCA (Product Competitiveness Analysis). Faktor pertama yaitu mengenai harga dari produk pahat batu yang dipasarkan. Harga produk seni pahat batu di Desa Tamanagung cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk hasil seni pahat batu di Bali dan China. Tingginya harga tersebut diakibatkan karena corak dan bahan baku yang digunakan bagus dan berkualitas. Berbeda dengan harga seni pahat di kompetitor lain seperti China karena harganya sangat murah karena kualitasnya kurang.

Faktor kedua yaitu bahan baku, dimana telah dijelaskan di atas bahwa bahan baku yang digunakan pada produk seni pahat batu di Desa Tamanagung merupakan jenis batu alam dan batu andesit yang bersumber langsung dari sisa erupsi Gunung Merapi. Jenis batu ini mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh di daerah Trowulan Mojokerto jenis batu yang biasanya digunakan adalah jenis batu hijau yang bahan bakunya biasanya didapatkan dari daerah sekitarnya yaitu di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Jenis batu seni pahat batu di Bali adalah jenis batu padas dan lava yang berasal dari erupsi Gunung Agung. Jenis batu ini cukup baik karena mempunyai tekstur yang kuat. Sedangkan untuk seni pahat batu di China jenis batu lebih banyak batu granis, marmer, dan giok.

Faktor yang ketiga yaitu ciri khas batu yang digunakan. Untuk seni pahat batu di Desa Tamanagung memiliki ciri khas corak Budha dan Majapahitan untuk daerah Trowulan. Berbeda dengan seni pahat batu di Bali yang mempunyai corak hindu karena dipengaruhi oleh kondisi kekhasan masyarakat lokal dan adat istiadat. Sedangkan untuk seni pahat batu di China mempunyai corak motif tiongkok dengan bahan dasar berupa batu giok. Faktor keempat mengenai tujuan ekspor, dimana tujuan ekspor masing-masing seni pahat batu tidak terlalu berbeda jauh. Seni pahat batu di Desa Tamanagung dan Trowulan sebagian besar di wilayah Eropa, sedangkan untuk Bali sampai ke Amerika dan Australia. Kemudian untuk China sampai ke Asia dan Afrika.

Faktor kelima yaitu mengenai dukungan dari pemerintah dalam pengembangan seni pahat batu. Jika dilihat dari faktor ini, seni pahat batu di Indonesia cenderung mempunyai tingkatan yang sama mengenai dukungan dari pemerintah yang masih minim. Berbeda dengan China, dukungan dari pemerintah di negara tersebut cenderung lebih besar terutama mengenai aspek pajak ekspor yang dibuat ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengrajin mengatakan bahwa bantuan pemerintah hampir tidak pernah ada. Pemerintah hanya memberikan anjuran dan batasan terhadap penarikan bahan baku di lereng Gunung Merapi. Untuk pelatihan, pembinaan, maupun bantuan modal belum pernah dirasakan oleh masyarakat untuk pengembangan seni pahat batu tersebut.

Faktor yang terakhir adalah pemanfaatan IT, dimana pemanfaatannya masih cenderung kurang dan dipengaruhi oleh jenis kapasitas industrinya. Seni pahat batu yang sudah cukup besar cenderung lebih melek teknologoi dibandingkan dengan industri yang masih kecil. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lokal belum banyak yang bisa menggunakan fasilitas internet. (Walter 2018) menyebutkan bahwa analisa PCA diperlukan guna menilai kompetitor barang sejenis yang diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan selanjutnya.

Berdasarkan keterangan mengenai beberapa faktor terkait seni pahat batu diatas, dapat dilihat aspek positif dan negatif dari hasil produk beberapa daerah. Setelah diketahui analisa mengenai kompetitor tahapan selanjutnya setelah adalah dilakukan analisa SWOT. Analisa SWOT bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan serta peluang dan ancaman pengembangan seni pahat batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang.

Tabel 2.

Tabel Analisa SWOT Seni Pahat Batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang

STRENGTHS	WEAKNESSES
<ul style="list-style-type: none"> Merupakan produk karya seni yang merupakan kelestarian budaya lokal Mempunyai corak dan motif yang khas (Budha) Bahan baku batu kuat (Erupsi Gunung Merapi) dan sehingga bertahan lama Adanya sumber bahan baku batu yang dapat diperoleh dari alam secara langsung 	<ul style="list-style-type: none"> Bahan baku batu dalam ukuran besar sulit ditemukan Regenerasi sumberdaya manusia yang masih minim Pengangkutan batu dari lereng merapi ke tempat produksi masih menggunakan alat manual Pemasaran yang masih kurang karena belum semua menggunakan teknologi modern
OPPORTUNITIES	THREATS
<ul style="list-style-type: none"> Produk telah digemari wisatawan asing Telah terjadi kerja sama dengan pedagang batu baik lokal maupun asing Perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga membantu proses pemasaran dan pemesanan produk via innternet Pesaing cenderung sedikit karena basisnya berupa industri seni 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya larangan dari pemerintah menggunakan alat-alat berat pada saat proses penambangan batu Apabila erupsi Gunung Api Merapi terjadi, maka proses produksi terhenti dalam waktu 3-4 bulan. Tenaga kerja berpendidikan rendah, dikhawatirkan hasil seni pahatan akan kalah saing dengan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi Bahan baku berasal dari Gunung Merapi yang semakin berkurang.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 2 mengenai analisa SWOT di atas, dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi kekuatan dan peluang pada kerajinan seni pahat batu di Desa Tamanagung untuk dikembangkan lebih lanjut. Faktor kelemahan dan ancaman merupakan dua hal yang perlu diantisipasi dalam pengembangan seni pahat batu. Pada faktor kekuatan, bahan baku yang bersumber dari erupsi Gunung Merapi merupakan keunggulan utama dari seni pahat batu di Desa Tamanagung. Bahan baku dengan ciri khas yang kuat dan berkualitas baik membuat hasil dari seni pahat batu ini dilirik oleh banyak konsumen. Sedangkan faktor kelemahan utama adalah cara perolehan bahan baku yang cenderung sulit karena masih menggunakan alat manual dan minimnya regenerasi sumberdaya manusia sebagai penerus seni pahat batu. Kelemahan selanjutnya yaitu belum maksimalnya pemanfaatan teknologi modern dalam pemasaran produk.

Faktor selanjutnya yaitu mengenai peluang dan ancaman dalam pengembangan seni pahat batu. Jika dilihat dari faktor peluang produk seni pahat batu di Desa Tamanagung digemari oleh wisatawan asing. Selain itu, adanya kerjasama dengan pedagang batu baik lokal maupun asing yang berkelanjutan membuat keberlangsungan usaha dapat terjaga. Dalam memperluas pangsa pasar, pelaku usaha dapat memanfaatkan perkembangan teknologi modern yang semakin canggih. Faktor yang terakhir adalah mengenai ancaman dari pengembangan seni pahat batu yang terdiri dari bahan baku yang semakin lama semakin berkurang disertai adanya kebijakan pemerintah yang membatasi pengambilan bahan baku. Pentingnya analisa SWOT dijelaskan oleh Fred (2012), dimana analisa tersebut merupakan salah satu analisa yang diperlukan untuk menilai pencapaian suatu usaha atau organisasi yang dilihat dari faktor

internal dan eksternal. Adanya analisa SWOT membuat suatu usaha atau organisasi bisa lebih mudah mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

C. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Seni Pahat Batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang

Setelah diketahui beberapa faktor terkait analisa SWOT, muncul suatu kebijakan dan strategi pengembangan yang dapat dilakukan terhadap seni pahat batu di Desa Tamanagung. Kebijakan dan strategi yang digunakan bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.
Tabel Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kerajinan Batu Pahat Desa Tamanagung Kabupaten Magelang

No	Kebijakan	Strategi
1	Terwujudnya ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi	Melaksanakan pengembangan yang terstruktur dibantu oleh pemerintah dan pihak terkait
2	Peningkatan kualitas dari hasil seni pahat batu	Pelatihan terhadap proses produksi seni pahat batu melalui ahlinya.
3	Peningkatan terhadap kontribusi penyerapan tenaga kerja berkualitas	Pelatihan dan pembinaan oleh pihak terkait misalnya dari Balai Latihan Kerja dan lainnya
4	Terwujudnya tingkat kepuasan pelayanan terhadap konsumen	Pengendalian mutu pelayanan dengan fokus terhadap kemauan konsumen

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui berbagai kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk pengembangan seni pahat batu Desa Tamanagung. Kebijakan yang diambil harus mengacu pada potensi dan budaya sebagai lokalitas daerah. Peningkatan dari segi kualitas produk, kontribusi penyerapan tenaga kerja serta terwujudnya kepuasan konsumen menjadi acuan dari kebijakan yang diambil. Pelaksanaan kebijakan yang diambil harus diikuti dengan strategi yang harus ditempuh.

Berbagai strategi yang dilaksanakan harus mengacu pada kebijakan yang ingin diperoleh. Pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur terkait potensi diikuti dengan berbagai pelatihan untuk peningkatan produk, keterampilan, serta mutu harus diperhatikan oleh berbagai stakeholder yang terlibat. Strategi yang paling penting adalah mengenai pemasaran produk, dimana pemasarannya sebagian besar masih menggunakan cara manual. Pemasaran produk dengan menggunakan teknologi modern hanya digunakan oleh sebagian industri dengan kapasitas menengah ke atas.

Berdasarkan beberapa poin terkait kebijakan dan strategi pengembangan seni pahat batu Desa Tamanagung yang nantinya dapat dilaksanakan oleh beberapa stakeholder, diharapkan kebijakan dan strategi tersebut mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi ekonomi lokal. Kondisi tersebut tentunya dapat mendorong adanya kemandirian ekonomi Desa Tamanagung serta penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.) industri seni pahat batu di Desa Tamanagung Kabupaten Magelang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, diantaranya bahan baku yang kuat dan mempunyai kualitas bagus karena berasal dari erupsi Gunung Merapi serta memiliki ciri khas dalam seni pahatnya. 2.) berdasarkan analisa PCA dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang menjadi keunggulan seni pahat

batu di Desa Tamanagung dibandingkan kompetitor barang sejenis yaitu dari segi bahan baku, pemasaran, dan ciri khas produk. 3.) berdasarkan analisa SWOT dapat diketahui kelebihan dari seni pahat batu terdapat pada bahan baku dan ciri khas produknya, kelemahan terdapat pada pemanfaatan alat yang sebagian besar masih manual. Sedangkan untuk peluang berupa teknologi modern dapat digunakan sebagai sarana pemasaran dan ancaman pada bahan baku yang semakin menipis dan adanya pembatasan dari pemerintah mengenai pengambilan bahan baku. 4.) kebijakan dan strategi yang bisa diambil harus mengacu pada aspek ciri khas dan kearifan lokal daerah dengan tetap memperhatikan budaya masyarakat. Selain itu perlu adanya kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan adanya generasi baru dalam menjaga kebudayaan seni pahat

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa pengembangan ekonomi lokal seni pahat batu Desa Tamanagung Kabupaten Magelang harus mengacu pada aspek ciri khas dan kearifan lokal masyarakat. Perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan yang lebih canggih serta dukungan dari pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Masyarakat Propinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan akademis karena dukungan dan semangatnya lah yang menjadikan penelitian ini dapat selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfi, Z. 2018. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). *Jurnal Transik* Vol (1) 170-190.
- Fred R, David. 2011. *Strategic Management : Concepts and Cases, 13th*. New Jersey : Prentice Hall.
- Hardjowisastro, S. 2009. Jogja Harusnya Punya Hutan Kota. *Berita Jogja*.
- Irawan, A. 2015. Ekonomi Kreatif Sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat Dalam Meningkatkan Tingkat Perekonomian. *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*. 1-5.
- Khristianto, W. 2012. Computer Usage Readiness, E-Commerce Rediness dan E-Business Readiness Pada Industri Kreatif Subsektor Agribisnis (Studi Pada Usaha Kecil Menengah Keripik Pisang di Bandar Lampung). *Jurnal*. Universitas Lampung.
- Lak Lak, N. 2015. Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol 4 (2) : 268-280.
- Rais, dkk. 2009. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia.
- Ramdani, Nurhakim. 2015. Peran Ekonomi Kreatif Dalam Tantangan ASEAN Economy Community, diakses pada 27 Juli 2019, (<http://nurhakimramdani.blogspot.co.id>).
- Rini et al. 2010. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Oleh Pemuda Dalam Rangka Menjawab Tantangan Ekonomi Global. *Jurnal UI Untuk Bangsa Seri Sosial dan Humaniora*. Volume 1.
- Septian, A. 2018. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Bidang Fashion Melalui Bauran Pemasaran. *Al-Amwal*. 10 (01) : 91-104

Walter. 2019. Cara Menerapkan Analisa Kompetitif Untuk Bisnis, diakses pada 28 Juli 2019, (<http://koinworks.com>)

PENGEMBANGAN EKONOMI DESA BERBASIS PERTANIAN KACANG BAMBARA

DEVELOPMENT OF VILLAGE ECONOMIC BASED ON BAMBARA GROUNDNUT FARMING

Endah Sri Redjeki

Bambara Groundnut Research Centre (BGRC)
Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatra 101, Gresik Kota Baru, Gresik, 61121
Email: endah.sriredjeki@umg.ac.id

ABSTRAK

Kacang bambara atau biasa dikenal sebagai kacang bogor mengandung karbohidrat 60%, protein 22% dan lemak hanya 6%. Tanaman ini mempunyai *market price* yang cukup tinggi. Seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan (*zero-waste*) untuk pangan, pakan, biopestisida, obat herbal dan menjaga kelestarian lingkungan. Kacang bambara dapat dikembangkan di lahan-lahan marginal, *low input* dan sedikit air. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi usahatani kacang bambara yang paling efisien dan efektif untuk pengembangan ekonomi desa. Metode pengumpulan data berdasarkan survey pada dua puluh tujuh petani kacang bambara di lima kecamatan di Kabupaten Gresik. Quesioner menjadi alat pengambilan data. Usahatani kacang bambara sangat menguntungkan seiring dengan luas lahan dan jenis produk yang dijual. Hasil analisis usaha tani petani kacang bambara di Gresik menunjukkan nilai R/C dalam bentuk polong segar > 1, dalam bentuk polong kering > 2, dalam bentuk benih > 3 dan dalam bentuk olahan > 5. Pendampingan petani kacang bambara mendesak diperlukan untuk meningkatkan pendapatan petani. Penyediaan air, teknik budidaya dan pasca panen yang baik akan melipatgandakan penghasilan petani kacang bambara. Pembentukan kelompok tani kacang bambara akan memperkuat daya saing petani terhadap pasar.

Kata kunci: kacang bambara, *market price*, analisis usahatani, R/C

ABSTRACT

Bambara groundnut (BG) or commonly known as 'kacang bogor' contain 60% carbohydrates, 22% protein and only 6% fat. This plant has a high enough market price. All parts of the plant can be utilized (*zero-waste*) for food, feed, biopesticides, herbal medicines, and to preserve the environment. BG can develop on marginal lands, low inputs and little water. This study aims to obtain information on the most efficient and effective BG farming for village economic development. The data collection method based on a survey of fifty farmers in five districts in Gresik Regency. Questionnaire becomes a data collection tool. Bambara farming is very profitable along with the area of land and types of products sold. The results of the analysis of the agriculture of BG farmers in Gresik show the value of R / C in the form of fresh pods > 1, in the way of dry pods > 2, in the form of seeds > 3 and the type of processed > 5. Assistance for bambara groundnut farmers is urgently needed to increase farmers' incomes. Good water supply, cultivation and post-harvest techniques will double the income of bambara groundnut farmers. The formation of the bambara groundnut farmer group will strengthen farmers' competitiveness in the market.

Keywords: bambara groundnut, farming analysis, market price, R/C

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Global Hunger Index (2018) melaporkan bahwa skor GHI Indonesia berada pada 21.9. Hal ini menunjukkan, bahwa Indonesia termasuk kelompok negara yang masih mengalami masalah kelaparan serius, kekurangan gizi, tingkat kematian balita tinggi; stunting dan Food pada balita. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia lebih buruk dibanding Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia dan Thailand. Hal ini sesungguhnya alarm untuk lebih memperhatikan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan adalah tercukupinya kebutuhan pangan setiap orang. Kecukupan pangan diartikan terpenuhinya pangan dalam hal jumlah maupun mutu pangan, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selain itu, pangan tersebut tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu alternative untuk mendukung ketahanan pangan adalah optimasi kekayaan hayati dan potensi genetik berdasarkan kearifan lokal. Salah satu tanaman bernilai gizi tinggi yang masih belum banyak dibudidayakan di Jawa Timur adalah kacang bambara (*Vigna subterranea* (L.) Verdcourt). Kacang bambara (*Bambara groundnut*) di Jawa Barat dikenal sebagai kacang bogor. Sedangkan di Jawa Timur dikenal sebagai kacang kapri. Istilah kacang kapri ini salah kaprah, mengingat kacang bambara berbuah di dalam tanah sedangkan kacang kapri (*Pisum sativum*) berbuah di atas tanah.

Tanaman kacang bambara dibudidayakan oleh petani Gresik sejak seratus tahun yang lalu. Gresik merupakan sentra tanaman kacang bambara di Jawa Timur. Tanaman ini mempunyai kandungan gizi sangat kompetitif, yaitu karbohidrat 59.93%, protein 20.75 %, lemak 5.88 %, air 10.43 %, dan abu 3.03 % (Hidayah, Mangunwidjaja, Sunarti, dan Sutrisno, 2005). Kacang bambara tidak mudah tengik karena mengandung asam lemak bebas sangat rendah, yaitu 1%. Kandungan lemaknya sebagian besar terdiri atas asam lemak tak jenuh palmitoleic, oleic, lineleic dan caprylic yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Jenis asam lemak tak jenuh kacang bambara sangat dibutuhkan oleh tubuh namun tubuh tidak mampu memproduksi sendiri (Okonkwo and Opara, 2010). Kacang bambara merupakan sumber kalori lebih tinggi dibandingkan tanaman kacang-kacangan pada umumnya, misalnya pigeonpea (*Cajanus cajan*), lentil dan kacang tunggak (FAO, 1982).

Umumnya petani kacang bambara Indonesia belum mengenal diversifikasi olahan, sehingga kacang bambara dikonsumsi hanya dalam bentuk kacang rebus atau kacang goreng. Sementara itu di negara asal kacang bambara, yaitu Afrika, berbagai olahan sudah diterapkan, antara lain sebagai: bubur atau porridge sebagaimana dilaporkan oleh Doku, (1997); Kari-kari et al. (1997), Enwere (1998) dan Olapade (2005). Biji mudanya dapat diolah sebagai susu nabati (Poulter dan Caygill, 1980) dan lebih disukai dibandingkan dengan susu kedelai Brough et al. (1993). Selain itu biji muda dapat dipanggang sebagai roasted-nut atau kacang panggang (Kay, 1979 dan Alobo 1999). Biji segar dapat ditepungkan sebagai bahan campuran tepung roti (Brough, et al., 1993) juga dilaporkan oleh (National Research Council of United States, 2006) bahwa kacang bambara dapat diekstrak untuk diambil minyaknya. Bahkan pada saat Perang Dunia ke dua, kacang bambara dimanfaatkan sebagai pengganti kopi (Burkill, 1966 cited in Linneman, 1992). Selain itu, Barimalaa, et al., (1994) melaporkan fermentasi kacang bambara dapat menghasilkan tempe dan bumbu olahan atau tauco (condiment). Sedangkan sisa olahan tepung kacang bambara (offal) dapat dimanfaatkan sebagai pakan ayam (Ukpabi, et al., 2008; Asaniyan dan Akinduro, 2008; Obih dan Ekenyem, 2010). Sedangkan sisa brangkas tanaman kacang bambara dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak (animal grazing), karena kaya nitrogen dan phosphor (Drabo et al, 1997; Kari-kari et al., 1997, Gholi, 1997; Tanimu and Aliyu, 1997) juga tambahan pakan yang menguntungkan untuk ikan *Oreochromis niloticus* (Adeparusi and Agbede, 2004).

Selain berbagai keuntungan atas manfaat kacang bambara sebagaimana tersebut di atas, Ngugi (1997) melaporkan kegunaan air rebusan daun kacang bambara bersama daun jagung sebagai obat anti diare. Sedangkan bersama daun *Lantana trifolia* ditumbuk dan ditambah air dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk mencegah ternak dan tanaman dari serangan kutu. Di Botswana, biji kacang bogor berwarna hitam dapat digunakan untuk obat anti impotensi (National Research Council of United States, 2006). Dengan demikian, kacang bambara dapat dikelola seluruh bagian tanaman (zero-waste) untuk meningkatkan penghasilan petani.

Di Indonesia, kacang bambara umumnya direbus atau digoreng untuk suguhan pada hari raya agama (Iedul Fitri atau Adha). Tanaman ini mempunyai harga pasar yang cukup tinggi, tiga kali harga

kacang tanah. Saat ini kacang bambara goreng dapat dibeli di on-line shop dengan harga bervariasi, mulai 60 hingga 200 ribu per kg. Kemasan dan label halal MUI ikut menentukan harga.

Kabupaten Gresik memiliki total luas wilayah 1.191,25 m² yang terdiri dari 18 Kecamatan (330 Desa dan 26 Kelurahan). Kabupaten Gresik bagian Utara (meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur. Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan Ujungpangkah (BPS Kab Gresik, 2019). Lima dari 18 Kecamatan di Gresik menanam kacang bambara, yaitu Bungah, Sidayu, Panceng, Ujung Pangkah, dan Kebomas. Petani Gresik menanam kacang bambara umumnya di tegalan atau pekarangan rumah secara monokultur maupun tumpangsari. Total luasan pertanaman kacang bambara di Gresik sekitar 100 ha dari sekitar 10.000 ha luas pekarangan dan tegalan yang di lima kecamatan tersebut di atas (Tabel 1). Namun dengan adanya alih fungsi lahan dan alih komoditi pertanian serta banyaknya generasi muda petani enggan terjun ke lahan telah membuat pertanian kacang bambara di Gresik makin berkurang.

Permasalahan pertanian kacang bambara adalah belum tersedianya varietas unggul dengan potensi hasil tinggi. Selama ini petani menyediakan sendiri benihnya. Selain itu petani tidak mempunyai akses pasar sehingga sangat tergantung harga tengkulak. Petani juga tidak punya pengetahuan added value kacang bambara sehingga mereka menjual hasil panennya hanya dalam bentuk polong segar.

Tabel 1.

Luas Pekarangan dan Tegal (kebun) di lima kecamatan (ha)

Kecamatan	Luas lahan (Ha)	
	Pekarangan	Tegal (Kebun)
Bungah	257.82	1,043.69
Sidayu	187.83	1,068.42
Panceng	131.70	3,154.50
Ujung Pangkah	112.29	3,112.32
Kebomas	470.00	808.00
Total	1159.64	9,186.93

Sumber: BPS Kab Gresik (2019)

Selama ini petani kacang bambara di Gresik menjual hasil panennya dalam bentuk polong segar. Mereka menjualnya langsung setelah panen. Ada lima model pemasaran kacang bambara di Gresik (Mukti, 2016) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2.

Pola Pemasaran, Farmer's share (%), Margin Pemasaran (%) dan Efisiensi Pemasaran (%) kacang Bambara di Gresik

No	Pola Pemasaran	Farmer's share (%)	Margin Pemasaran (%)	Efisiensi Pemasaran (%)
1	Petani-Konsumen	100.00	0.00	0.00
2	Petani-Pedagang- Pengecer- Konsumen	55,56	44,44	16,3
3	Petani - Tengkulak – Pedagang pengecer – Konsumen	54,17	45,83	22,23
4	Petani – Tengkulak – Konsumen	6.50	75.00	10.00
5	Petani – Tengkulak – Pedagang besar –Industry snack – Konsumen	8,13	91,88	9,68

Sumber : Mukti (2016)

Model pemasaran paling efisien adalah model 1, petani langsung menjual hasilnya ke konsumen sehingga mendapatkan keuntungan 100%. Namun umumnya petani masih melibatkan tengkulak (*middle man*) hingga berlapis-lapis sebelum *end user*.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif pengembangan ekonomi desa berbasis pertanian kacang bambara untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung ketahanan pangan dan lingkungan lestari.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat observasi dilaksanakan selama empat bulan, mulai Maret hingga Juli 2019 di lima kecamatan, yaitu Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah, Panceng dan Kebomas di Kabupaten Gresik. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi langsung. Kuesioner sebagai alat pengambil data. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari instansi terkait (BPS Kecamatan). Total responden yang diwawancarai di lima kecamatan tersebut berjumlah 27 orang mewakili petani kacang bambara dengan skala luas berkisar 100 m² hingga 2 ha. Analisis imbalan penerimaan dan biaya (R/C) dilakukan dengan menggunakan Excel.

Komponen biaya yang dihitung (*input*) meliputi tenaga kerja, sarana produksi, sewa lahan dan lain-lain. Sedangkan nilai total produksi (*output*) adalah total panen dikalikan harga lokal. Output disebut juga sebagai pendapatan kotor petani. Nilai output sangat tergantung bentuk bahan yang dijual. Pada penelitian ini output dalam bentuk *polong basah*, *polong kering* dan *kacang goreng*.

A. Analisis Imbalan Penerimaan dan Biaya (R/C)

Analisis imbalan penerimaan dan biaya yang biasa disebut R/C ini bertujuan untuk menguji sejauh mana keuntungan diperoleh dari usahatani kacang bambara dihitung selama periode satu tahun. Seberapa banyak setiap nilai rupiah biaya yang dipakai dalam kegiatan usahatani kacang bambara memberikan nilai penerimaan sebagai manfaatnya (Hernanto, 1989). Pendapatan bersih adalah output penjualan dikurangi total biaya produksi. R/C adalah pendapatan kotor (*output*) dibagi total biaya produksi (*input*). Jika nilai R/C > 1 berarti usahatani menguntungkan, jika R/C < 1 berarti usahatani merugi dan R/C = 1 berarti usahatani impas.

Tabel 3.

Komponen Usahatani (Rahim dan Diah, 2007)

KODE	TRANSAKSI	URAIAN
A	Penerimaan Tunai	Harga x Hasil Panen Yang Dijual (Kg)
B	Penerimaan Yang Diperhitungkan	Harga x Hasil Panen Yang Dikonsumsi (Kg)
C	Total Penerimaan	A+ B
D	Biaya Tunai	a. Biaya sarana Produksi
		- Benih
		- Pupuk
		- Pesticida
		- PPC/ZPT
		b. Upah tenaga kerja diluar keluarga
		c. Sewa alat bajak
		d. Sewa lahan
		e. Pajak
E	Biaya Yang Diperhitungkan	a. Upah tenaga kerja dalam keluarga
		b. Penyusutan

		c. Benih
		d. Sewa lahan
F	Total Biaya	D+E
G	Pendapatan atas biaya tunai	C-D
H	Pendapatan atas biaya total	C-F
I	Pendapatan Bersih	H - bunga pinjaman (jika ada pinjaman)
J	R/C Ratio	C/F

Pendapatan usahatani kacang bambara dihitung berdasarkan penjualan hasil panen dalam bentuk polong basah (umum dilakukan petani). Selain itu perhitungan penerimaan juga diprediksi penjualan dalam bentuk polong kering dan kacang goreng.

Pendapatan usahatani kacang bambara adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya usahatani. Pendapatan usahatani dihitung dengan rumus (Soekartawi, 2006) $Pd = TR - TC$ dimana Pd adalah pendapatan usahatani kacang bambara, TR adalah total penerimaan usahatani kacang bambara dan TC adalah total biaya usahatani kacang bambara. Sedangkan efisiensi usahatani kacang bambara dihitung dengan rumus: R/C dimana R: total penerimaan usahatani kacang bambara dan C adalah total biaya usahatani kacang bambara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik (2019), wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112^0 sampai 113^0 Bujur Timur dan 7^0 sampai 8^0 Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik memiliki total luas wilayah $1.191,25 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 18 Kecamatan (330 Desa dan 26 Kelurahan). Kabupaten Gresik bagian Utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, dan Manyar. Gresik Utara merupakan daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah (BPS Gresik, 2019). Kacang bambara ditanam petani di pekarangan dan atau tegalan, umumnya di daerah Gresik Utara. Berdasarkan BPS Kab Gresik (2019) luas pekarangan dan kebun atau tegalan di Kecamatan Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah, Panceng, dan Kebomas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Luas Lahan Tegal dan Pekarangan (ha) di Lima Kecamatan

Kecamatan	Luas lahan (Ha)	
	Pekarangan	Tegal (Kebun)
Bungah	257.82	1,043.69
Sidayu	187.83	1,068.42
Panceng	131.70	3,154.50
Ujung Pangkah	112.29	3,112.32
Ndukun	400.92	1,447.98

Sumber: BPS Kabupaten Gresik. 2019.

Berdasarkan hasil Survei yang telah dilakukan di Kecamatan Bungah, Kecamatan Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Panceng, dan Kebomas tentang usaha tani khususnya dalam berbudidaya kacang bambara, telah didapat data mengenai karakteristik petani. Berdasarkan umur petani, responden yang berbudidaya kacang bambara, rata-rata sudah mencapai umur 50 tahun keatas. Tabel presentase responden petani bambara disajikan pada Tabel 5.

Sedangkan kepemilikan lahan yang digunakan (digarap) untuk budidaya kacang bambara, menurut responden yang mendominasi adalah petani dengan garapan kurang dari 5 ha. Mayoritas petani tersebut menggarap lahan berbatu atau lahan yang tidur. Sedangkan responden yang mempunyai luas lahan sampai dengan 1 ha dan lebih dari 1 ha merupakan lahan milik petani sendiri. Data presentase responden berdasarkan luas kepemilikan lahan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5.
Presentase Responden Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur (Thn)	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
1	< 40	1	3.70%
2	41 - 50	2	7.41%
3	51 - 60	12	44.44%
4	> 61	12	44.44%
Total		27	

Tabel 6.
Presentase Responden Petani Menurut Luas Lahan (Ha)

No.	Luas Lahan (ha.)	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
1	1 - 2 ha.	2	7.41%
2	0,5 - 1 ha.	9	33.33%
3	< 0,5 ha.	16	59.26%
Total		27	

Lahan yang digunakan petani dalam bercocoktanam kacang bambara ada yang milik sendiri dan ada yang hanya menggarap lahan bekas miliknya (sudah dijual tetapi belum digunakan oleh pemilik baru). Data status kepemilikan lahan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7.
Presentase Responden Berdasarkan Kepemilikan Lahan Usaha Tani Kacang Bambara

No.	Status Kepemilikan Lahan	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
1	Pinjam	6	22.22%
2	Milik Sendiri	21	77.78%
Total		27	

Petani kacang bambara di wilayah utara Kabupaten Gresik menanam kacang bambara hanya pada saat musim hujan. Cara pengolahan dan teknik budidaya pada masing-masing daerah tidak sama. Hal ini berpengaruh pada hasil pendapatan petani terkait dengan biaya yang dikeluarkan terhadap penerapan system budidaya konvensional. Selain itu luasan lahan serta jumlah anggota keluarga yang terlibat juga berpengaruh terhadap nilai usahatannya.

Penggunaan pupuk (organik dan anorganik), responden petani juga menerapkan penggunaan yang berbeda. Sedangkan pemakaian benih mayoritas petani menggunakan benih terdahulu untuk mengantisipasi lonjakan harga bibit saat musim tanam. Penggunaan tenaga kerja bergantung pada jumlah luasan lahan yang digarap (penanaman, pembumbunan, panen). Petani yang menggarap lahan kurang dari 0.5 ha mayoritas dikerjakan sendiri atau dengan bantuan anggota keluarga. Sedangkan petani dengan luas lahan yang lebih luas (> 0.5 ha) menggunakan tenaga kerja di luar keluarga.

Pada umumnya hasil budidaya kacang bambara dijual ke pengepul dan dijual ke tetangga sekitar yang membutuhkan dalam kondisi fresh pod (polong segar). Harga jual kacang bambara beragam tergantung permintaan pasar dan jumlah hasil panen lokal. Pada saat bulan Februari sampai April harga cenderung stabil dibanding di luar bulan tersebut, mengingat banyaknya kacang bambara kiriman dari Jawa Barat yang didistribusikan oleh pedagang lokal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut hasil survey responden dapat diantisipasi dengan pemanenan di luar musim bulan tersebut, atau mengolah hasil kacang bambara menjadi kacang goreng. Kacang bambara olahan dari Gresik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dari kacang bambara dari jenis lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan petani salah satu upaya dapat dilakukan dengan menekan cost atau beban biaya budidaya serta berbudidaya dengan cara organik (tanpa menggunakan pupuk dan pestisida kimia). Tabel rata-rata harga (rupiah) usahatani kacang bambara disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8.

Rata-rata Biaya Pengeluaran Petani Responden Dalam Budidaya Kacang Bambara di Lima Kecamatan di Kabupaten Gresik

Nama Pengeluaran	Satuan	Harga Rata2	Keterangan
a. Sarana Produksi			
- Bibit/Benih	1 Gantang	65,000	1 Gantang = ± 4 Kg
- Pupuk Kandang	1 Sak	7,500	Sak ukuran 50 kg
- Pupuk Kimia	1 Sak	130,000	
- Pestisida	1 Botol	60,000	
- Bajak/Traktor	1 Hari	200,000	
b. Upah Tenaga Kerja			
- Laki-laki	1 Orang	100,000	Rata-rata Jam 07.00 – 16.00
- Perempuan	1 Orang	50,000	Rata-rata Jam 07.00 – 12.00
c. Biaya Transportasi	1 Hari	300,000	Dari Lahan, Tempat, Cuci Sampai Ke Tempat Penjualan
d. Biaya Konsumsi	Per Orang	30.000 - 50.000	
e. Sewa Lahan	Per Tahun	4,000,000	

Sumber: Data observasi primer (2019)

Usahatani kacang bambara dikatakan untung atau layak untuk dilanjutkan jika $R/C > 1$. Kacang bambara dapat dipanen pada saat umur ± 4 bulan, atau daun sudah mulai menguning, dan ada beberapa varietas yang biji nya muncul ke permukaan tanah (dalam bumbunan). Kacang yang sudah siap panen tersebut kemudian diambil dengan bantuan cangkul atau pecok, kemudian dimasukkan kedalam ember. Di tempat lain, petani menggunakan tenaga harian, dan terdapat juga petani yang menjual hasil budidaya secara tebasan (dibeli tengkulak secara borongan sebelum masa panen). Berbagai macam cara budidaya, panen, dan penanganan pasca panen termasuk penjualan, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Petani di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu, rata-rata mencapai R/C ratio < 1 . Hal ini diduga karena terbatasnya sumberdaya yang hanya melakukan penanaman dengan skala kecil, dengan sistem konvensional, serta tidak menghitung pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan. Berbeda dengan petani lain di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu dan Dsn. Sidodadi, Kec. Panceng yang sudah mulai menerapkan sistem yang lebih modern. Petani sudah menggunakan traktor, serta berbudidaya dalam skala lebih luas. Dengan demikian biaya pengeluaran (cost) bisa lebih ditekan, serta hasil yang lebih banyak dengan R/C Ratio masing-masing > 1 .

Tabel 9.
Hasil Analisis Usahatani Kacang Bambara (ha) Tahun 2019*

No	Kelompok Pengeluaran/ Keg. Usaha Tani	Fisik/ Tenaga Kerja			Total Pengeluaran (Rp)	Keterangan
		Pria	Wanita	Mesin		
I	Input	Asumsi Tenaga Kerja Pria Rp 100.000,-/hari dan Tenaga Kerja Wanita Rp 50.000,-/hari				
A	Tenaga Kerja					
	1. Pengolahan Tanah s.d siap tanam	2	0	1	Rp 1.000.000	2 Kali Pengolahan
	2. Penanaman	5	5	0	Rp 750.000	
	3. Pemeliharaan					
	- menyang/ merumput	25	25	0	Rp 3.750.000	
	- pembumbunan	15	20	0	Rp 2.500.000	
	- memupuk	2	0	0	Rp 200.000	
	- Perlindungan Tanaman	2	0	0	Rp 200.000	
	- menyiram/ pengairan	0	0	0	-	
	5. Panen dan Pasca Panen	25	0	0	Rp 2.500.000	
	Jumlah Total A.				Rp 10.900.000	
B	Sarana Produksi					
	1. Bibit Benih (kg)		50		Rp 8.750.000	harga benih/kg Rp. 175.000
	2. Pestisida		1 Paket		Rp 200.000	
	Jumlah Total B.				Rp 8.950.000	
C	Lain - lain					
	1. Sewa Lahan				Rp 4.000.000	
	Jumlah Total C.				Rp 4.000.000	
	Total Biaya Produksi (A + B + C)				Rp 23.850.000	
1. Analisis Penjualan Polong Basah						
II.	Output					
	- Total Produksi (TP) Bentuk Hasil Bobot Segar Polong (kg)				4000 kg	asumsi hasil 4 ton/ha
	- Harga Lokal (Rp/Kg)				Rp 10.000	
	- Nilai Total Produksi (NTP) Total Produksi x Harga (Rp.)				Rp 40.000.000	
III.	Pendapatan Bersih:					
	- Output Penjualan - Total Biaya Produksi				Rp 16.150.000	
IV.	R/C					
	- Pendapatan/ Total Biaya Produksi				2	
2. Analisis Penjualan Polong kering (Bibit)						
II.	Output					
	- Total Produksi TP Bentuk Hasil Polong Kering				2.400	Asumsi penurunan 40 % dari bobot segar Polong
	- Harga Setempat (Rp/Kg)				Rp 75.000	
	- Nilai Total Produksi (NTP) Total Produksi x Harga (Rp.)				Rp 180.000.000	
III.	Pendapatan Bersih:					
	- Output Penjualan - Total Biaya Produksi				Rp 155.650.000	biaya pengeringan Rp. 500000
IV.	R/C					
	- Pendapatan/ Total Biaya Produksi				7	
3. Analisis penjualan dalam bentuk kacang goreng						
II.	Output					
	- Total Produksi TP Bentuk Hasil Bobot Goreng Biji				2.000	Asumsi penurunan 50 % dari bobot segar Polong
	- Harga Setempat - UMKM (Rp/Kg)				Rp 180.000	
	- Nilai Total Produksi (NTP) Total Produksi x Harga (Rp.)				Rp 360.000.000	
III.	Pendapatan Bersih:					
	- Output Penjualan - Total Biaya Produksi				Rp 316.150.000	Asumsi tenaga kupas Rp 3.500/kg , minyak goreng, gas, packing per kg tambahan biaya 10.000
IV.	R/C					
	- Pendapatan/ Total Biaya Produksi				9	

Sumber: Data hasil observasi diolah (2019)

*Angka-angka yang ditampilkan adalah angka-angka yang berlaku di Gresik saat ini. Asumsi-asumsi yang digunakan berdasarkan nilai yang berlaku saat ini.

Bambara Groundnut Research Centre (BGRC), Pusat Unggulan Kacang Bambara Universitas Muhammadiyah Gresik berupaya menjadikan tanaman kacang bambara unggulan di Gresik. Upaya-upaya yang dilakukan BGRC antara lain setiap tahun melakukan observasi di tingkat petani untuk *update* data sekaligus memberikan penyuluhan ke petani kacang bambara di Gresik. Selain itu, BGRC juga melakukan eksperimen (*trial*) produk olahan berbahan baku kacang bambara, antara lain brownis (metodanya sudah dihapktakan), cookies, susu bambara, tempe, kue mochie, bakpia bambara, coklat dan lain-lain.

Regenerasi petani kacang bambara perlu dilakukan mengingat sebagian besar petani *sepuh* yang bekerja di lahan karena kecintaannya pada tanaman kacang bambara. Petani kacang bambara tidak mempunyai kelembagaan sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan '*bargaining power*' dengan *stake holders* dalam hal pendanaan juga saprodi. Redjeki (2018) mengusulkan model kelembagaan bagi petani kacang bambara agar lebih pasti nasibnya. Kepastian harga panen serta model pemasaran menjadi masalah tersendiri bagi petani kacang bambara. Model pemasaran langsung ke konsumen (Mukti, 2016) perlu dibangun sehingga petani dapat mengakses pasar secara langsung. Redjeki (2018) menyarankan petani kacang bambara memasarkan hasil panennya dalam bentuk polong kering, benih siap tanam (*clean seed*) dan produk makanan bambara secara on line. Untuk itu petani kacang bambara perlu mendapatkan pelatihan bisnis on-line (*e-commerce*).

Hasil analisis usahatani (Tabel 9) menunjukkan harapan peningkatan pendapatan petani kacang bambara jika mampu mengolah hasil panennya menjadi polong kering (bahan benih) R/C menunjukkan nilai 7. Namun jika petani mampu mengolahnya menjadi kacang goreng berkualitas (*healthy food*) dan dijual di supermarket sehingga mendapatkan harga 180-200 ribu rupiah per kg, maka keuntungan akan meningkat (R/C=9).

Untuk mewujudkan kesejahteraan petani kacang bambara *stakeholders* perlu bersinergi. Diawali dengan pembentukan kelembagaan petani kacang bambara dan pendampingan oleh BGRC, usahatani kacang bambara akan mampu mensejahterakan petani, tercipta pertanian berkelanjutan dan pada akhirnya ketahanan pangan mampu tercapai.

KESIMPULAN

Peningkatan ekonomi desa dapat dilakukan melalui usahatani kacang bambara. Hal ini dapat dipercepat keberhasilannya jika terdapat sinergi antara petani kacang bambara, BGRC dan *stakeholders* (Pemda, Bank, *private sector* dan *social entrepreneur*).

Model pemasaran kacang bambara yang paling efisien adalah mempertemukan petani secara langsung dengan konsumen (*offline* dan *on-line*) dengan produk bernilai ekonomi tinggi, yaitu *healthy food products*.

SARAN

Pembentukan kelembagaan Gapoktan Petani Kacang Bambara sangat diperlukan (Redjeki, 2018) dengan model Penta-helix (sinergi antara Pemda, *private sectors* atau perbankan, Perguruan Tinggi atau Research Centre, Kelompok Tani atau Gapoktan dan *social entrepreneur*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adeparusi Eo, Agbede Jo. (2004). Evaluation Of Leucaena And Gliricidia Leaf Protein Concentrate As Supplements To Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* L. Verdc) In The Concentrate As Supplements To Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* L. Verdc) The Diets Of *Oreochromis Niloticus* In 6 International Symposium Of Tilapia In Aquaculture (Ista). 2004;335-346.
- Alobo, A.P. (1999). Production And Organoleptic Assessment Of Akara From Bambara Groundnut (*Voandzeia Subterranea* (L.) Thouars). Plant Foods For Humannutrition 53. 313-320
- Asaniyan, E. K., Akinduro, V. O. (2008). Performance Of Broiler Chicks Feed Graded Levels Of Heat-Treated Bambara Groundnut (*Voandzia Subterranea* (L.) Thouars) Offals. Int. J. Poult. Sci., 7 (7): 711-714.
- Barimalaa Is, Achinewhu Sc, Yibatima I, Amadi En (1989). Studies On The Solid Substrate Fermentation Of Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* (L) Verdc). J. Sci. Food Agric. 66: 443-446
- Bps Kabupaten Gresik. 2019. Gresik Dalam Angka. <https://Gresikkab.Bps.Go.Id> Diakses 30 September 2019
- Brough Sh, Taylo, Aj, Azam-Ali Sn (1993). The Potential Of Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea*) In Vegetable Milk Production And Basic Protein Functionality Systems. Food Chem. 47: 277-283
- Doku E. V. (1997). Country Report. Promoting The Conservation And Use Of Under-Utilized And Neglected Crops. Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea*). Begemann F., Heller J. And Mushonga J. (Eds). Proceedings Of The Workshop On Conservation And Improvement Of Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* (L.) Verdc). Harare, Zimbabwe. Pp. 30-32
- Drabo, I., Sereme, P. & Dabire, C. (1997). Country Report. In Proceedings Of Workshop On Conservation And Improvement Of Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* (L.) Verdc.) 14-16 November 1995 Harare, Zimbabwe. Pp. 19-26
- Enwere Nj (1998). Foods Of Plant Origin. Afro-Orbis Publications Ltd. Pp. 194-199.
- Fao (1982). Legumes In Human Nutrition, Fao Food & Nutrition Paper No.20, Food And Agriculture Organisation Of The United Nations, Rome, Italy. 152p
- Global Hunger Index. 2018. Indonesia. <https://Www.Globalhungerindex.Org/Indonesia.Html> Diakses 21 Agustus 2019
- Goli, A.E. (1997). Bibliographical Review. In: Bambara Groundnut. *Vigna Subterranean* (L.) Verdc. In: Proceedings Of The Workshop On Conservation And Improvement Of Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* (L.) Verdc.). Heller, J., Begemann, F. And Mushonga, J., Eds. 14 – 16 November 1995, Harare, Zimbabwe, Pp. 4 – 10
- Hidayah Tn, Mangunwidjaja D, Sunarti Tc, Sutrisno. 2005. Pengaruh Suhu Proses Ekstrusi Dan Campuran Ubijalar Merah Dengan Kacang Bogor Terhadap Beberapa Karakteristik Fisik Ekstrudat. Jurnal Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang 6(2):121-130.
- Kari-Kari, S.K., Wigglesworth, D.J., Kwerepe, B.C., Balole, T.V., Sebolai, B. And Munthali, D.C. (1997) Country Report: Botswana. In: Heller, J. Begemann, F., And Mushonga, J. (Eds.), Pp11-18. 11-18. Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* (L.) Verdc.). Promoting The Conservation And

- Use Of Underutilised And Neglected Crops. 9. Proceeding Of Workshop On Conservation And Improvement Of Bambara Groundnuts (*Vigna Subterranea* L. Verdc.), 14-16 November 1995, Harare, Zimbabwe.
- Kay, D.E. (1979). Food Legumes. Crop And Product Digest No. 1. London: Tpi, P. 142.
- Linnemann, A.R. 1992. Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea*) Literature: A Revised And Updated Bibliography. Tropical. Crops Communication. 17. Dept. Tropical Crop Science, Wageningen Agricultural University, The Netherlands. 124 P
- Mukti, Vita. 2016. Analisa Usahatani Dan Pemasaran Kacang Bogor Di Kabupaten Gresik. Universitas Muhammadiyah Malang.
- National Research Council Of United States. (2006) Lost Crops Of Africa Volume Ii. Vegetables. Pp. 53-73.
- Ngugi, G.W. (1997). Country Report For Kenya. In: Promoting The Conservation And Use Of Underutilized And Neglected Crops. Proceedings Of The Workshop On Conservation And Improvement Of Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* (L.) Verdc.) 14-16 November, 1995, Harare, Zimbabwe, Pp.33-44 (Eds. Heller J., Begemann F. And Mushonga J.) International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy
- Obih, T.K.O And B.U. Ekenyem. (2010). Performance And Cost Evaluation Of Substituting Bambara Seed (*Vigna Subterranea* (L.) Verdc) Offal For Soybean Meal In The Diets Of Broiler Starter Chicks. International Journal Of Poultry Science 9(4):349-351
- Okonkwo, S.I And Mary Felicia Opara. (2010). The Analysis Of Bambara Groundnut (*Voandzeia Subterranea* (L.) Thouars) For Sustainability In Africa. Research Journal Of Applied Sciences, 5:394-396
- Olapade A.A., Ozumba A.U., Solomon H.M., Olatunji O. Andadelaja S.O. (2005). Rheological Properties And Consumer Acceptance Of Moin-Moin Premix. Nigerian Food Journal (23: 144-147)
- Poulter N.H. And Caygill J.C. (1980). Vegetable Milk Processing And Rehydration Characteristics Of Bambara Groundnut (*Voandzeia Subterranea* (L.) Thouars), Journal Of The Science Of Food And Agriculture 31: 1158 - 1163
- Soekartawi 2006. Analisis Usahatani. Jakarta: Ui Press.
- Tanimu, B. And L. Aliyu. (1997). The Status Of Bambara Groundnut Genetic Resources In Nigeria. Country Report. In. Heller J.; F. Begemann And . Mushonga, Editors. Bambara Groundnut, *Vigna Subterranea* (L.) Verdc. Promoting The Conservation And Use Of Underutilized And neglected Crops. Proceeding Of The Workshop On Conservation And Improvement Of Bambara Groundnut, 14-16 Nov. 1995. Harare, Zimbabwe, Pp.45-49
- Ukpabi, U.H.; Amaefule, K.U.; Amaefule, O.M. (2008). Performance Of Broilers Fed Raw Bambara Groundnut (*Vigna Subterranea* (L.) Verdc) Offal Diets Supplemented With Lysine And Or Methionine. Int. J. Poult. Sci., 7(12):1177-1181
- Umi Barokah, Wiwit Rahayu, Dan Mei Tri Sundari. 2014. Analisis Biaya Dan Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Karanganyar. Agric Vol.26, No. 1 & No.2, Juli - Desember 2014: 12 - 19



PENGEMBANGAN POTENSI DESA PESISIR JAWA TIMUR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

DEVELOPMENT OF POTENTIAL THE COASTAL VILLAGE OF EAST JAVA TOWARDS A PROSPEROUS SOCIETY

Ratna Ekasari¹, Heru Prastiyono²

¹Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia,
Jl. Ngelom Megare 30 Sepanjang Sidoarjo 61257

²Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia,
Jl. Ngelom Megare 30 Sepanjang Sidoarjo 61257

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : (1) mencari potensi alam yang layak dikembangkan secara ekonomis (2) analisis strategi pengembangan potensi alam (3) pemberdayaan masyarakat desa pesisir dalam mengelola potensi desa untuk menuju masyarakat sejahtera. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan populasi enam desa pesisir utara Jawa Timur. Pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data potensi alam desa pesisir secara faktual, dan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dari responden terhadap potensi alam tersebut, dengan informan perangkat desa dan warga masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuesioner. Hasil penelitian menjelaskan : (1) terdapat potensi alam pesisir yang layak dikembangkan untuk memberikan nilai ekonomis yang mampu meningkatkan kesejahteraan warganya, diantaranya hasil laut ikan, udang, kerang serta wisata pantai (2) memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan bagi warga masyarakat pesisir untuk mengolah potensi alam menjadi produk unggulan serta strategi pemasarannya, (3) memberikan solusi dalam hal permodalan usaha, perijinan serta strategi pemasaran. Kesimpulan penelitian adalah pengelolaan potensi alam pesisir dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, akan memberikan nilai jual lebih yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga.

Kata kunci : Potensi Alam, Pengembangan, Kreativitas dan Inovasi, Nilai Tambah, Masyarakat Sejahtera

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) searching for natural potentials that are economically feasible to develop (2) analysis of natural potential development strategies (3) empowering coastal village societies in managing village potentials towards prosperous societies. This research method is descriptive qualitative, with a population of six villages on Coastal Village of East Java. A quantitative approach to obtain data on the natural potential of coastal villages in a factual manner, and a qualitative approach to obtain data from respondents on the natural potential, with informants from village officials and society members. Data collection was done by Focus Group Discussion (FGD) and questionnaires. The results of the study explain: (1) there is a potential of coastal nature that is feasible to be developed to provide economic value that can improve the welfare of its citizens, including fish, shrimp, shellfish and coastal tourism (2) provide training, counseling and assistance for residents of coastal societies to process natural potential to be a superior product and its marketing strategy, (3) provide solutions in terms of business capital, licensing and marketing strategies. The conclusion of the research is the management of the potential of coastal nature with high creativity and innovation, will provide more selling values that have an impact on improving the economy of citizens

Keywords : Natural Potential, Development, Creativity and Innovation, Added Value, Prosperous Society

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Timur mempunyai wilayah laut seluas 110.764,28 km² (BPS Prov. Jatim, 2016), yang memiliki sumberdaya laut yang cukup potensial untuk dikembangkan-kelolaan. Desa pesisir merupakan wilayah desa yang meliputi tanah dan air, yang terukur dalam satuan meter persegi (m²) atau hektare, dan dapat dihuni sebagai tempat tinggal hidup sekelompok manusia untuk berkembang-biak, yang terletak di sepanjang wilayah pantai utara Jawa Timur.

Masyarakat desa pesisir sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumberdaya laut. Sesuai dengan amanah undang-undang untuk mencapai kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera (termasuk masyarakat desa pesisir), maka perhatian dan peran pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi dan mendukung terwujudnya pengembangan dan pengelolaan potensi alam laut, sangat diperlukan. Hal ini juga dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat bagi pembangunan desa pesisir, melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi laut untuk menghasilkan produk unggulan, menuju desa mandiri sejahtera.

A. Potensi Desa Pesisir

Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir/pantai Jawa Timur beragam, diantaranya potensi penangkapan ikan, budidaya tambak, industri pengelolaan ikan, peternakan, pertanian, dan wisata pantai (Siahaan 2004). Namun disamping kekayaan sumberdaya alamnya, wilayah pesisir tersebut mempunyai permasalahan pokok yaitu menyangkut kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat pesisir Jawa Timur belum mampu meningkatkan kesejahteraannya, bila dibandingkan antara potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dengan non pesisir, semestinya masyarakat pesisir lebih sejahtera dari kondisi yang ada seperti sekarang ini. Banyak problema yang mesti dicari penyelesaiannya, salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakatnya yang relatif kurang bila dibandingkan dengan wilayah non pesisir.

Sesuai penelitian Soleh.A. (2017), Strategi Pengembangan Potensi Desa, menyimpulkan bahwa ; (1) Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat, (2) Pembangunan desa harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing desa (potensi fisik dan potensi non fisik) dengan mengedepankan keunggulan masing masing desa.

Potensi Desa dalam penelitian ini adalah kekuatan/kemampuan yang tersimpan dan dimiliki desa, yang berpeluang untuk ditumbuh-kembangkan sebagai sumberdaya yang mampu mengangkat perekonomian desa yang berdampak pada kesejahteraan warga masyarakatnya. Potensi Desa yang dimaksud seperti : hasil laut, ikan, udang, kerang dan wisata laut.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian Arsiyah et.al. (2009), Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa, menyimpulkan bahwa ; (1) Bentuk/jenis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diantaranya : bantuan modal usaha, bantuan perorangan, pelatihan/penyuluhan, studi banding, bantuan peralatan, bantuan bahan baku dan strategi pasar ; (2) Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat industri kecil melalui tiga tahap, yaitu: tahap pelepasan diri, tahap pengelompokan dan tahap pengembangan yang ditunjang program “Tridaya” yang meliputi : pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan.

Sedangkan menurut penelitian Mustangin et.al. (2017), Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata, menyimpulkan bahwa salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengem- bangkan program desa wisata dalam rangka meningkatkan pendapatannya pertaniannya.

Pemberdayaan pada penelitian ini adalah proses mengembangkan, memandirikan, meningkatkan nilai diri, memotivasi masyarakat, agar memiliki kemampuan dan ketrampilan membudidayakan potensi alam desa pesisir. Dimana pemberdayaan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh pemerintahan desa-desa objek penelitian.

C. Masyarakat Sejahtera

Konsep Kesejahteraan Masyarakat menurut Biro Pusat Statistik (BPS, 2007) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebuah keluarga disebut sejahtera bila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, sosial dan agama;
2. Keluarga yang memiliki keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga; dan
3. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarganya, kehidupan sosial dengan masyarakat sekitar, beribadah secara khusuk menurut agamanya.

Kondisi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang sebagian besar hidup dari sumberdaya laut, masih belum sepenuhnya terlepas dari kemiskinan, sehingga kesejahteraan hidup yang diamanahkan undang-undang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, belum sepenuhnya tercapai. Hal Ini Senada Dengan Penelitian Rosni (2009), penelitian tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, menyimpulkan bahwa 63,63% responden tergolong Prasejahtera, 31,81% responden tergolong Sejahtera I, dan 4,56% responden tergolong Sejahtera II. Bila didasarkan pada UMR kabupaten Batubara tahun 2016 yakni Rp.2.313.625 maka seluruh responden masuk dalam kategori miskin, masyarakat prasejahtera pendapatannya Rp 897.000, masyarakat sejahtera I Rp 1.149.000, dan masyarakat sejahtera II Rp 1.470.000

BAHAN DAN METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini melibatkan jenis penelitian dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Obyek Penelitian

1. Populasi

Soegiono (2011:80) menyatakan bahwa, populasi adalah daerah yang secara umum terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, yang telah ditetapkan peneliti untuk di analisis dan selanjutnya diambil suatu kesimpulan. Menurut Ismiyanto populasi adalah keseluruhan obyek/subyek penelitian yang berupa ; orang, benda, ataupun suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan/atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.

Berdasarkan permasalahan dan objek/subyek penelitian yang telah ditetapkan, maka sebagai populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan warga masyarakat dari keenam desa objek penelitian.

Jumlah perangkat desa sebagai populasi penelitian tiap desa dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Data Populasi Desa-desa Wilayah Pesisir Jawa Timur

Kode	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Populasi Desa
1	Desa Banyusangka	Tanjung Bumi	Bangkalan	25
2	Desa Sepulu	Sepulu	Bangkalan	22
3	Desa Pesisir	Gending	Probolinggo	25
4	Desa Banjarsari	Tanjungsari	Probolinggo	24
5	Desa Pesisir	Besuki	Situbondo	20
6	Desa Blethok	Bungatan	Situbondo	23
Total				139

Sumber : Aparat tiap desa objek penelitian (2017).

2. Sampel

Metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh yakni mengambil semua jumlah populasi sebagai subyek penelitian, mengingat jumlah populasinya tidak terlalu banyak, serta konsep penelitian data statistik adalah bahwa semakin banyak n penelitian yang diperoleh, maka akan mendukung kesimpulan penelitian. Selanjutnya sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini sejumlah 139.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.

4. Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan penting dalam suatu penelitian adalah proses pengambilan data, sebagai bahan analisis untuk menjawab tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2015:225) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dibedakan menjadi data primer dengan observasi melalui wawancara dan *Focus Group Discussion*, serta data sekunder melalui Dokumentasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada subyek penelitian melalui wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan aparat desa dan tokoh masyarakat. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk *transcript interview*, kepada responden perangkat desa dan warga masyarakat.

Transkrip wawancara di pandu dengan beberapa pertanyaan untuk menggali data yang dimaksud, seperti berikut :

- a. Apa saja potensi desa?
- b. Berapa jumlah penduduk desa ? Laki-laki dan Perempuan ?
- c. Berapa angka kemiskinan desa?
- d. Berapa luas wilayah desa?
- e. Bagaimana kondisi geografis desa?
- f. Bagaimana sarana dan prasarana desa?
- g. Apa permasalahan desa yang dihadapi?
- h. Apa mempunyai visi dan misi desa ?
- i. Apakah program kerja desa? Apakah sesuai visi dan misi?

- j. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh desa?
- k. Berapa dana desa yang diperoleh desa ? Apakah kegiatan dan program kerja yang desa lakukan menggunakan dana desa?
- l. Apakah hasil dari kegiatan dan program kerja desa?
- m. Apakah capaian yang dihasilkan dari kegiatan dan program kerja bapak?
- n. Apakah peran pemerintah dalam pengembangan desa?
- o. Apakah peran aparat desa/staf desa dalam pengembangan desa?
- p. Apakah masyarakat desa turut berpartisipasi dalam kegiatan desa dan pengembangan desa?
- q. Apakah pengelolaan keuangan desa berdasarkan sumber daya desa dan kebutuhan desa?
- r. Apakah kegiatan desa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa?

Data yang diperoleh dari dokumentasi pada penelitian ini adalah data jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi alam desa, hasil sumberdaya alam, potensi desa yang mungkin dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dan digunakan untuk menjawab masalah penelitian (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Analisis data kualitatif deskriptif dilakukan terhadap data yang telah diperoleh baik melalui observasi maupun dokumentasi, dilakukan analisis, kajian dan solusi guna menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil analisis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Desa Banyusangka

Kondisi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - terletak di Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan - luas wilayah 86.017,6 ha 	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki letak dan luas wilayah yang strategis untuk dikembangkan
Kondisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah penduduk 3.339 jiwa yang terdiri dari 1.605 lelaki dan 1.734 perempuan, yang membentuk 821 KK - aparat desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa - tingkat partisipasi masyarakat desa kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - perlu dilakukan pendekatan pada masyarakat desa melalui penyuluhan dan paguyuban, agar turut serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa mengingat kurangnya partisipasi warga

Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut : udang dan ikan - mempunyai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) terbesar di Bangkalan sebagai pusat penjualan ikan dari desa yang lain - mendapat predikat sebagai desa perikanan, karena mempunyai hasil ikan terbesar di wilayah utara, yang didukung dengan kepemilikan sebanyak 40 kapal nelayan yang menghasilkan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - desa memiliki potensi hasil laut yang layak dikembangkan dan berpeluang dapat meningkatkan perekonomian warga desa
Program Desa	<ul style="list-style-type: none"> - membangun PAUD dan TK - perbaikan jalan desa pembuatan tanggul penahan gelombang laut 	<ul style="list-style-type: none"> - program desa yang direncanakan merupakan program mendasar yang
Permasalahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - jalan desa, saluran air, gedung sekolah yang rusak, fasilitas bagi nelayan yang kurang, fasilitas kesehatan yang kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan berbagai pihak terkait

2. Desa Sepulu

Kondisi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - terletak di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan - luas wilayah 1,87 KM² 	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki letak dan luas wilayah yang strategis untuk dikembangkan
Kondisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah penduduk sebanyak 4.686 jiwa terdiri dari laki-laki 1.982 jiwa dan perempuan 2.804 jiwa - aparat desa berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan desa - partisipasi masyarakat desa yang cukup tinggi, meskipun kualitas SDM-nya masih tergolong rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, perlu diapresiasi dengan melibatkan warga secara langsung untuk turut aktif sebagai pelaku pembangunan desa. dengan memberikan bekal ketrampilan berwirausaha, melalui pelatihan dan penyuluhan
Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut yakni udang dan ikan - dikenal sebagai desa pembuat kapal berskala nasional - direncanakan menjadi desa wisata laut karena mempunyai dermaga peninggalan Jepang, yang masih membutuhkan perbaikan dan penanganan intensif 	<ul style="list-style-type: none"> - desa memiliki potensi hasil laut yang layak dikembangkan dan berpeluang dapat meningkatkan perekonomian warga desa
Program Desa	<ul style="list-style-type: none"> - perbaikan jalan desa - pembuatan selokan, untuk irigasi - pembuatan tanggul penahan gelombang laut dan pembuatan dermaga - wisata laut 	<ul style="list-style-type: none"> - program desa yang direncanakan merupakan program mendasar yang dibutuhkan warga desa

Permasalahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - jalan desa, saluran air, kualitas SDM yang rendah, - kurangnya pemberdayaan masyarakat(karena ibu-ibu lebih memilih untuk langsung menjual ikannya dan tidak menambah nilai jual ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan berbagai pihak terkait - mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang pengolahan hasil laut
-------------------	--	--

3. Desa Pesisir (Gending)

Kondisi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - terletak di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo - luas wilayah 148,252 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki letak dan luas wilayah yang strategis untuk dikembangkan
Kondisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah penduduk sebanyak 1.223 jiwa terdiri dari 608 jiwa laki-laki dan 615 jiwa perempuan - aparat desa dan kepala desa berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan desa - masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa - masyarakat turut dalam kegiatan pembangunan, dan mendapatkan gaji untuk mengurangi pengangguran, pada saat musim angin/tidak melaut dan sawah terkena hama wereng sehingga gagal panen 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, perlu diapresiasi dengan melibatkan warga secara langsung untuk turut aktif sebagai pelaku pembangunan desa. dengan memberikan bekal ketrampilan berwirausaha, melalui pelatihan dan penyuluhan
Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut : ikan, udang dan kerang - sektor pertanian : Padi - peternakan : Lele, Bebek - tambak udang - garam - peluang menjadi desa Wisata Pantai 	<ul style="list-style-type: none"> - desa memiliki potensi hasil laut yang layak dikembangkan dan berpeluang dapat meningkatkan perekonomian warga desa
Program Desa	<ul style="list-style-type: none"> - membuat tembok penahan tanah - membuat bronjong penahan gelombang laut - pavingisasi jalan desa - membuat jembatan - pembangunan TK dan PAUD - pembuatan Pos Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - program desa yang direncanakan merupakan program mendasar yang dibutuhkan warga desa
Permasalahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala yang ada berupa ijin usaha, pemasaran dan modal - tingginya angka pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> - pemberdayaan warga untuk mengolah hasil alam - peran pemerintah cq dinas terkait untuk pengurusan ijin usaha dan pemodalan

4. Desa Banjarsari

Kondisi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - terletak di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Probolinggo 	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki letak dan luas wilayah yang strategis untuk dikembangkan
Kondisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah penduduk 2.568 jiwa aparat desa dan kepala desa - berperan aktif dalam pengembangan desa - warga masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, perlu diapresiasi dengan melibatkan warga secara langsung untuk turut aktif sebagai pelaku pembangunan desa. dengan memberikan bekal ketrampilan berwirausaha, melalui pelatihan dan penyuluhan
Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut, sektor pertanian dan perikanan, peternakan lele 	<ul style="list-style-type: none"> - desa memiliki potensi hasil laut yang layak dikembangkan dan berpeluang dapat meningkatkan perekonomian warga desa
Program Desa	<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan jalan desa - pemberdayaan dan pembinaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - program desa yang direncanakan merupakan program mendasar yang dibutuhkan warga desa
Permasalahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang relatif rendah dengan tingkat pendidikan maksimal SMA - tingginya angka pengangguran - terkendala izin usaha, pemasaran dan modal 	<ul style="list-style-type: none"> - permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan berbagai pihak terkait - pemberdayaan warga untuk mengolah hasil alam

5. Desa Pesisir (Besuki)

Kondisi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - terletak di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo - luas wilayah 56.424 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki letak dan luas wilayah yang strategis untuk dikembangkan
Kondisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah penduduk desa mencapai 9.500 jiwa yang terdiri dari 4.048 lelaki dan 5.452 perempuan - aparat desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa - partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, perlu diapresiasi dengan melibatkan warga secara langsung untuk turut aktif sebagai pelaku pembangunan desa. dengan memberikan bekal ketrampilan berwirausaha, melalui pelatihan dan penyuluhan
Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut berupa udang dan ikan - mempunyai TPI dan pelabuhan yang menjadi pusat penjualan ikan desa lainnya - kemungkinan menjadikan desa wisata laut 	<ul style="list-style-type: none"> - desa memiliki potensi hasil laut yang layak dikembangkan dan berpeluang dapat meningkatkan perekonomian warga desa

Program Desa	<ul style="list-style-type: none"> - pembuatan kamar mandi umum di pelabuhan - membuat tembok penahan gelombang - pavingiasasi jalan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - program desa yang direncanakan merupakan program mendasar yang dibutuhkan warga desa
Permasalahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - tingginya konsumsi alkohol oleh warga, sehingga menjadikan desa tidak aman 	<ul style="list-style-type: none"> - peran aktif keterlibatan pemerintah baik daerah maupun pusat, dengan ketegasan peraturan dan pembinaan berkelanjutan

6. Desa Blethok

Kondisi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - terletak di Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo - luas wilayah 249.620 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> - memiliki letak dan luas wilayah yang strategis untuk dikembangkan
Kondisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah penduduk 3.925 jiwa yang terdiri dari 1.925 lelaki dan 2.000 perempuan - aparat desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa - tingkat partisipasi masyarakat sangat aktif dalam pembangunan dan pengembangan desa, didukung oleh peran aktif para pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, perlu diapresiasi dengan melibatkan warga secara langsung untuk turut aktif sebagai pelaku pembangunan desa. dengan memberikan bekal ketrampilan berwirausaha, melalui pelatihan dan penyuluhan
Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut berupa udang, ikan dan kerang - hasil pertanian - budidaya pengembangan ikan dan udang faname - terdapatnya TPI sebagai tempat pemasaran ikan, dan tempat pengolahan/budidaya ikan - potensi desa wisata pantai bletok 	<ul style="list-style-type: none"> - desa memiliki potensi hasil laut yang layak dikembangkan dan berpeluang dapat meningkatkan perekonomian warga desa
Program Desa	<ul style="list-style-type: none"> - pemberdayaan masyarakat, dalam .meningkatkan kemampuan untuk mengolah hasil bumi - pembangunan jalan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - program desa yang direncanakan merupakan program mendasar yang dibutuhkan warga desa
Permasalahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - jalan desa - adanya musim paceklik setiap 3 bulan, dan 3 hari tiap bulannya pada saat bulan purnama dimana cahayanya mempengaruhi keberadaan ikan, sehingga menyebabkan nelayan tidak dapat melaut 	<ul style="list-style-type: none"> - pemenuhan kebutuhan mendasar warga terkait media transportasi - penanganan intensif pihak pemerintah baik daerah maupun pusat

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Desa Banyusangka

Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none">- hasil laut : udang dan ikan- mempunyai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) terbesar di Bangkalan sebagai pusat penjualan ikan dari desa yang lain- mendapat predikat sebagai desa perikanan, karena mempunyai hasil ikan terbesar di wilayah utara, yang didukung dengan kepemilikan sebanyak 40 kapal nelayan yang menghasilkan ikan
Pengembangan Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none">- sebagai wilayah penghasil ikan terbesar di wilayah utara, serta memiliki TPI terbesar di Bangkalan, maka Desa Banyusangka memiliki peluang mengelola ikan menjadi produk unggulan- mengolah sebagian hasil ikan menjadi Ikan Asin, dengan berbagai varian jenis dan kemasan cita rasa khas Banyusangka- bekerjasama dengan perusahaan pengolahan ikan, misalnya ikan olahan dalam kaleng di Gresik, dimana masyarakat mengolah ikan sesuai karakteristik yang diminta perusahaan, dan selanjutnya dikirim ke perusahaan untuk finishing
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- mengadakan penyuluhan/pelatihan tentang pengolahan ikan sesuai karakteristik perusahaan mitra, dengan narasumber dinas terkait atau dari pihak perusahaan- pembinaan warga desa melalui berbagai penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan warga desa dalam membudidayakan hasil bumi/laut sehingga memiliki nilai tambah dan nilai jual
Modal, Ijin Usaha, Pemasaran	<ul style="list-style-type: none">- modal usaha selain dapat mengajukan kepada pemerintah, juga bisa bekerjasama dengan perusahaan mitra dengan perjanjian tertentu- pemasaran merupakan kegiatan perusahaan mitra

2. Desa Sepulu

Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none">- hasil laut yakni udang dan ikan- dikenal sebagai desa pembuat kapal berskala nasional- direncanakan menjadi desa wisata laut karena mempunyai dermaga peninggalan Jepang, yang masih membutuhkan perbaikan dan penanganan intensif
Pengembangan Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none">- mengolah ikan sehingga mempunyai nilai tambah, misal ikan asin, ikan asap, ikan panggang- Mempersiapkan diri menjadi desa wisata laut, melibatkan pihak terkait (pemerintah/dinas maupun investor) untuk melakukan kajian dalam mengelola area wisata pantai, terkait pembangunan area wisata pantai, wahana pendukung, fasilitas umum pengunjung pantai- Mengembangkan industri kapal laut, agar mampu bersaing di skala nasional, melibatkan pihak terkait (pemerintah/dinas maupun investor) untuk melakukan kajian dalam mengelola industri kapal laut, pengetahuan, peralatan maupun fasilitas pendukung lainnya

Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - pelatihan bagi ibu-ibu agar mampu mengolah ikan, sehingga mempunyai nilai tambah. Disamping penyuluhan tentang perikanan dan pertanian - mengadakan pelatihan/penyuluhan, pengetahuan tentang pembuatan kapal laut
Modal,Ijin Usaha, Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Modal bisa melibatkan pemerintah/investor, maupun perbankan dengan konsep dan kesepakatan tertentu - Pemasaran dengan pangsa pasar korporasi yakni perusahaan pengguna kapal laut maupun pihak pribadi

3. Desa Pesisir (Gending)

Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut : ikan, udang dan kerang - sektor pertanian : Padi - peternakan : Lele, Bebek - tambak udang - garam - peluang menjadi desa Wisata Pantai
Pengembangan Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Ikan dapat diolah menjadi Krupuk Ikan, dengan berbagai varian rasa, dan kemasan menarik - Ikan dapat diolah menjadi produk Abon Ikan - Udang dapat diolah menjadi Petis khas Probolinggo - Udang dapat diolah menjadi produk Terasi khas Probolinggo - Kerang dapat diolah menjadi produk Kerajinan, seperti bingkai pigora foto - Lele diolah menjadi Abon Lele - Telor Bebek diolah menjadi Telor asin cita rasa spesial - Mengelola kerajinan bordir tenun tangan (hand made) untuk asesoris busana, secara profesional - Mengelola hasil garam bekerjasama dengan industri garam, sesuai karakteristik yang diminta industri garam beryodium - Potensi laut pesisir dapat dikelola menjadi wisata pantai yang menarik dilengkapi dengan media permainan anak, fasilitas umum lainnya, serta terjaga keasrian dan kebersihannya
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan bagi ibu-ibu untuk pengolahan ikan, udang dan lele - Pelatihan/penyuluhan untuk mengelola hasil garam - Mempersiapkan diri untuk mengelola wisata pantai
Modal,Ijin Usaha, Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu peran pihak terkait (pemerintah maupun pihak perguruan tinggi) dalam hal modal dan perijinan hingga pemasaran produknya.

4. Desa Banjarsari

Potensi Desa	- hasil laut, pertanian dan peternakan bebek dan lele
Pengembangan Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - mengolah ikan menjadi ikan asin, krupuk ikan, terasi maupun abon ikan - memproduksi telur asin - mengolah hasil ternak lele menjadi abon lele, dengan berbagai varian rasa dan kemasan - kerajinan bordir dan souvenir dari kerang laut
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan bagi ibu-ibu untuk pengolahan ikan, udang dan lele - Pelatihan/penyuluhan untuk mengelola hasil garam - Mempersiapkan diri untuk mengelola wisata pantai, berkerjasama dengan pemerintah/dinas pariwisata maupun investor
Modal, Ijin Usaha, Pemasaran	- Perlu peran pihak terkait (pemerintah maupun pihak perguruan tinggi) dalam hal modal dan perijinan hingga pemasaran produknya.

5. Desa Pesisir (Besuki)

Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut berupa udang dan ikan - mempunyai TPI dan pelabuhan yang menjadi pusat penjualan ikan desa lainnya - kemungkinan menjadikan desa wisata laut
Pengembangan Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - mengolah secara profesional hasil ikan menjadi rengginang ikan, krupuk ikan, ikan asin, abon ikan, petis, pentol ikan - mengembangkan produk unggulan berupa lopis/ketan campur, dengan citarasa dan kemasan elegant - pemberdayaan TPI yang dimiliki desa agar berkembang lebih besar, dengan menciptakan lingkungan TPI yang representatif, tertata rapi, bersih dan tata kelola profesional oleh pemerintah desa sebagai tempat perdagangan ikan - desa mempersiapkan potensi lautnya menjadi wisata pantai yang menarik, dilengkapi dengan media permainan anak, fasilitas umum lainnya, serta terjaga keasrian dan kebersihannya
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan pelatihan/penyuluhan untuk mengolah ikan menjadi produk unggulan desa bernilai jual tinggi, sesuai dengan pengembangan potensi yang ada - Mempersiapkan diri untuk mengelola wisata pantai
Modal, Ijin Usaha, Pemasaran	- Perlu peran pihak terkait (pemerintah maupun pihak perguruan tinggi) dalam hal modal dan perijinan hingga pemasaran produknya.

6. Desa Blethok

Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - hasil laut berupa ikan, udang dan kerang - hasil pertanian - memiliki TPI sebagai tempat perdagangan ikan, dan tempat pengolahan/budidaya ikan - potensi desa wisata pantai bletok
Pengembangan Potensi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - mengolah ikan menjadi ikan asin, krupuk ikan, terasi maupun abon ikan - mengolah udang menjadi produk udang faname - mengembangkan kerajinan pengolahan kerang, untuk dibuat kerajinan frame foto dan asesoris, melibatkan teknologi komputerisasi untuk mendesain frame foto dan asesoris yang update serta berjiwa mellinial, dengan pangsa pasar Bali dan Jogjakarta
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Memberdayakan warga desa untuk mengolah hasil laut agar memiliki nilai tambah, yakni budidaya ikan dan udang, melalui pelatihan/penyuluhan secara serius dan intens - Melibatkan pihak profesional untuk memberikan pelatihan/penyuluhan mengolah udang faname, sehingga menjadi produk unggulan desa yang bernilai tinggi - Memberikan pelatihan bagi kaum muda untuk mengelola kerang menjadi produk asesoris dan frame foto, dalam hal desain, motif dan model yang digemari konsumen
Modal, Ijin Usaha, Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu peran pihak terkait (pemerintah maupun pihak perguruan tinggi) dalam hal modal dan perijinan hingga pemasaran produknya.

KESIMPULAN

1. Terdapat potensi alam pesisir yang layak dikembangkan untuk memberikan nilai ekonomis yang mampu meningkatkan kesejahteraan warganya, diantaranya hasil laut ikan, udang, kerang serta wisata pantai
2. Memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan bagi warga masyarakat pesisir untuk mengolah potensi alam menjadi produk unggulan serta strategi pemasarannya,
3. Memberikan solusi dalam hal permodalan usaha, perijinan serta strategi pemasaran. Kesimpulan penelitian adalah pengelolaan potensi alam pesisir dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, akan memberikan nilai jual lebih yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga

SARAN

1. Pemerintah daerah perlu membentuk bidang khusus yang berkonsentrasi dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi warga desa dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pelatihan dan penyuluhan untuk mengelola dan mengembangkan hasil laut agar bernilai jual tinggi.
2. Dapat dijalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk menjadi mitra pendampingan bagi usaha warga desa meningkatkan nilai tambah hasil laut agar bernilai jual tinggi secara terorganisir dan berkelanjutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan berkat bantuan beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi sesuai bidang dan kewenangannya, semoga mereka mendapatkan manfaat dan pahala daripadanya. Untuk itu kami sampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Maarif Hasyim Latif
3. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Maarif Hasyim Latif
4. Pemerintah Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo

DAFTAR PUSTAKA

- Arsiyah *et.al.* 2009, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa, *Jurnal Wacana* Vol. 12, No. 2, April 2009, ISSN 1411-0199
- Albert, M. & Hahnel, R. 2005. *Traditional Welfare Theory*, <www.zmag.org/books/1/html> (diakses: 2 -02 - 2009)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2016). *Jawa Timur dalam Angka 2015*. Surabaya : BPS Prov. Jatim.
- BPS (2007:1). Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007, BPS Jakarta
- Moleong Lexy J. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- McAshan HH., 1981, *Competency Based Education and Behaviral Objectives*, USA: Education Technology Publication.
- Mustangin *et.al.* 2017, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata, *Jurnal Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Vol. 2, No. 1, Desember 2017, e-ISSN 2548-4559, p-ISSN 2541-3988
- Rosni 2009, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, *Jurnal Geografi* Vol. 9, No. 1, 2017, Available at <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo> e-ISSN: 2549-7057 | p- ISSN: 2085-8167
- Siahaan N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta : Erlangga
- Soleh.A. 2017, Strategi Pengembangan Potensi Desa, *Journal Sungkai, Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran*, Vol. 5 No. 1 Edisi Pebruari 2017, 32-52, Available online at yunie.soleh@gmail.com
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

STRATEGI BERTAHAN HIDUP NELAYAN JARING ROBIN (STUDI KASUS NELAYAN DI NAGARI LANSANO TARATAK KECAMATAN SUTERA, KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT)¹

Silvia Devi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Jl. Raya Belimbing No 16A Kelurahan Kuranji
Kecamatan Kuranji, Padang 25157
silvia160681@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study is intended to determine the form of survival strategies carried out by fishermen of Robin Fishing Net. This effort cannot be done alone by fishermen without special attention from the government and the business community. Descriptive qualitative research methods with data and information obtained through interviews and field observations. The selection of informants by purposive sampling with data sources are robin net fishermen, fisheries services, villages and sub-district devices. The results of the study revealed that most robin net fishermen only rely on their income from fishing every day. Although the results are not always sufficient for their daily needs. Working hours for robin nets fishermen actually leave a lot of time that can be used to find other work. But in reality only a small proportion of them take advantage of this situation. Socialization and training are needed to utilize the time to supplement income that can be done directly by fishermen or their family members.

Keywords : strategy, robin net fishermen, welfare

PENDAHULUAN

Raodah (2011) dalam Koentjaraningrat (1992) mengungkapkan bahwa manusia yang mencari dan menangkap ikan sebagai pekerjaan tetap dan sepenuhnya mengharapkan penghasilan dari pekerjaan tersebut dikenal dengan sebutan nelayan. Kehidupan nelayan yang selalu identik dengan kemiskinan bukanlah sebuah rahasia. Keadaan ini berlangsung sejak lama dikarenakan berbagai kendala. Secara garis besar kendala tersebut ada delapan menurut M.Acheson, 1981 dalam Adriati, (2012), yakni pertama, gangguan alam berupa ombak besar, angin kencang dan badai sering datang pada musim hujan. Kedua, yakni pengetahuan nelayan tentang beragamnya jenis ikan dan hasil laut rendah dan terbatas. Ketiga, nelayan sulit membedakan batas-batas laut karena lingkungan laut bersifat mendua. Keempat, laut milik bersama maka sumber ikan dan biotik lainnya sebagai milik kekayaan bersama pula. Kelima, teknologi pengawetan ikan yang dimiliki nelayan masih sederhana. Keenam, nelayan sering mengalami fluktuasi harga ikan di pasaran. Ketujuh, kebiasaan buruh nelayan meminjam uang kepada pedagang/tengkulak/pemilik kapal atau modal yang menyebabkan mereka dieksploitasi. Kedelapan, nelayan yang mempunyai gangguan psikologis, dimana mereka menyukai sesama nelayan mengingat mereka berminggu-minggu/ bulan melaut.

Kedelapan kendala di atas merupakan kendala yang umum dialami oleh nelayan dimanapun berada. Namun, dari delapan hal tersebut yang nampak dialami oleh nelayan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat terkecuali kendala nomor delapan. Hal ini dikarenakan para nelayan di sini tidak melaut lama, melainkan hanya beberapa jam saja dalam sehari dan dikenal sebagai nelayan tradisional.

Nelayan tradisional di sini terbagi menjadi tiga tipe yakni *nelayan jaring robin*, *nelayan pukek tapi*, dan *nelayan pukek payang*. Marbun, Firdaus, dkk, 2018 mengungkapkan adanya pembagian tiga tipe

¹ Tulisan ini bagian dari laporan penelitian kelompok yakni Marbun, Firdaus, dkk, 2018. *Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Perubahan Iklim*. Laporan Penelitian, Padang : Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.

nelayan ini berdasarkan teknologi yang digunakan. *Nelayan jaring robin* adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring dan jenis perahu yang berukuran kecil hanya bisa muat satu orang dengan dibantu dengan mesin kekuatan 5 PK.

Nelayan pukek tapi adalah nelayan yang menggunakan jaring untuk menangkap ikan di sekitar pantai atau laut dangkal. Perahu yang digunakan lebih besar dari nelayan jaring robin dan bisa dinaiki minimal enam nelayan. Perahu yang digunakan bisa menggunakan mesin robin kekuatan 5 PK bisa juga dengan kekuatan dayung tergantung dengan banyaknya anggota ketika melaut.

Nelayan pukek payang yakni nelayan yang menggunakan alat tangkap lebih besar dari dua jenis yang telah dijelaskan sebelumnya. Perahu dan pukat yang digunakan lebih besar dan bisa menampung 13 nelayan dan harganya lebih mahal. Digunakan untuk melaut diluar batas 3 teritorial.

Nelayan yang ada di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan merupakan nelayan tradisional. Kehidupan mereka sangat bergantung dengan pendapatan hasil melaut. Berdasarkan Database Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Pesisir Selatan tahun 2016, diketahui bahwa jumlah rumah tangga perikanan nelayan terbanyak nomor dua diantara 15 kecamatan yang ada. Adapun pembagian nelayan penuh dan nelayan sambilan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Nelayan Per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Jumlah
1.	Koto XI Tarusan	2.343	1.139	3.482
2.	Bayang	1.060	150	1.210
3.	Bayang Utara	0	0	0
4.	IV Jurai	697	320	1.017
5.	Batang Kapas	1.085	125	1.210
6.	Sutura	2.450	856	3.306
7.	Lengayang	2.521	689	3.210
8.	Ranah Pesisir	1.013	148	1.161
9.	Linggo Sari Baganti	2.562	756	3.318
10.	Pancung Soal	0	97	832
11.	Air Pura	735	0	735
12.	Basa Ampek Balai Tapan	0	0	0
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	0	0	0
14.	Lunang	0	0	0
15.	Silaut	0	0	0
	Jumlah	14.486	1.139	18.848

Sumber : Database DKP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas di Kecamatan Sutura terdapat sebanyak 2.450 rumah tangga perikanan (RTP) yang bekerja sebagai nelayan penuh dan 856 rumah tangga perikanan (RTP) yang bekerja sebagai nelayan sambilan. Kategori nelayan penuh ini adalah nelayan yang memang mata pencahariannya sebagai nelayan dalam kesehariannya. Sementara nelayan sambilan adalah nelayan yang dalam kesehariannya tidak hanya sebagai nelayan tetapi juga memiliki mata pencaharian lain.

Kategori nelayan berdasarkan kepemilikan alat tangkap menurut Kusnadi (2006) terbagi dua yakni nelayan pemilik dan nelayan buruh. Khusus di Nagari Taratak Lansano nelayannya masuk dalam kategori pemilik yang masuk dalam tipe nelayan jaring robin. Hal ini dikarenakan mereka memiliki satu perahu meski dibeli baru atau bekas dengan menggunakan mesin robin kekuatan 5 PK. Penyebutan

nelayan jaring robin diambil dari mesin yang bermerk Robin. Berbekal kepemilikan alat tangkap tersebut kegiatan melaut dilakukan oleh nelayan jaring robin sampai saat ini..

Penggunaan alat produksi yang terbatas seperti perahu dan alat tangkap juga menjadi tantangan masyarakat nelayan ketika melakukan penangkapan. Dalam kondisi cuaca baik, alat tangkap tersebut dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan. Namun dalam kondisi cuaca buruk, mengandalkan alat tangkap sederhana yang terbatas tersebut akan berdampak buruk bagi nelayan, bahkan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Sehingga, dalam kondisi ini nelayan lebih memilih tidak melaut dan mencari pekerjaan lain. Melihat banyaknya masyarakat yang menggantungkan diri sebagai nelayan serta tidak menentunya iklim akhir-akhir ini, maka penting kiranya mengetahui lebih mendalam bagaimana strategi masyarakat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa potensi laut serta cara yang ada mampu untuk menopang pemenuhan kebutuhan keluarga.

Secara sederhana ketika manusia terancam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan berusaha sebisa mungkin memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam. Kebutuhan hidup bagi manusia merupakan salah satu hal mendesak yang harus dipenuhi. Jika tidak akan berpengaruh pada eksistensi masyarakat itu sendiri. Hal ini senada dengan Abdoellah (2017) bahwa produksi pemenuhan kebutuhan, distribusi sumber daya, dan pengaturan tempat hidup merupakan sesuatu yang mendesak bagi semua masyarakat. selain itu, corak produksi yang mengorganisasi teknologi dan tenaga kerja menjadi terlihat sebagai batas-batas masyarakat menggali energi dan materi dari alam.

Pada saat cuaca baik maka aset tersebut dapat digunakan, akan tetapi pada saat cuaca tidak bersahabat maka aset tersebut tidak berguna. Sementara hidup terus berjalan dan kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencari alternatif pekerjaan lain atau mencari pinjaman. Ini artinya keterbatasan aset yang dimiliki oleh nelayan membuat nelayan kesulitan bertahan hidup.

Berbagai penelitian terkait strategi bertahan seperti yang dikaji oleh Wibowo and Satria (2015) yang meneliti adaptasi nelayan di pulau-pulau kecil. Penelitian ini menyimpulkan beberapa strategi adaptasi yakni diversifikasi kegiatan Ekonomi, penganekaragaman alat tangkap, perubahan area fishing ground atau daerah tangkap, dan memanfaatkan jaringan sosial dan memobilisasi anggota keluarga untuk bekerja. Penelitian ini senada dengan penelitian Rindayati, Susilowati, and Hendrarto (2013) di Pulau Moro Karimun Kepulauan Riau.

Subair et al. (2014) dalam penelitiannya di Pesisir Utara Pulau Ambon berkesimpulan bahwa mengoptimalkan kemampuan adaptasi yang dimiliki melalui praktek strategi adaptasi dilakukan dengan memodifikasi pilihan-pilihan pengetahuan, pengalaman, kearifan lokal, keterampilan dan jaringan sosial yang tersedia mampu mereduksi kerentanan dan meningkatkan resiliensi komunitas terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Ahmad Fachrudin Syah (2012) juga pernah mengadakan penelitian tentang strategi adaptasi masyarakat pesisir di Bangkalan terhadap banjir Rob akibat perubahan iklim. Adapun kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa masyarakat Bangkalan telah melakukan upaya pencegahan dengan membangun tembok di wilayah padat penduduk untuk membendung air laut dan mencegah terjadinya abrasi.

Khusus penelitian Haryono (2005) menggali tentang diversifikasi pekerjaan keluarga nelayan dalam penelitian Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi rumah tangga nelayan, yakni melakukan diversifikasi pekerjaan, baik yang terkait dengan kegiatan kenelayanan maupun di luarnya. Kemungkinan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan tergantung pada sumber-sumber daya yang tersedia di desa-desa nelayan tersebut.

Berbeda dengan kajian terdahulu tulisan ini ingin menjelaskan tentang strategi bertahan hidup nelayan jaring robin di Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan tipe nelayan jaring robin, ketua kelompok nelayan, pemerintah di kecamatan, Plt Kepala serta penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun beberapa panduan pertanyaan yang diberikan kepada informan antara lain Sejak kapan jadi nelayan? Kapan jadwal melaut? Apa saja teknologi yang digunakan? Bagaimana pendapatan hasil melaut? Bagaimana strategi bertahan hidup jika pendapatan melaut tidak mencukupi? Bagaimana pandangan pemerintah dalam melihat keberadaan nelayan di sini? Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap nelayan?

Observasi dilakukan pada saat nelayan mulai melaut yang melakukan persiapan. Menunggu nelayan pulang melaut dan sembari wawancara pada saat nelayan istirahat pulang melaut. Observasi juga dilakukan terhadap anggota keluarga nelayan yang berada di rumah. Penelitian ini dilakukan tanggal 6-14 Mei 2018, dilanjutkan penulisan laporan dan kembali mewawancarai informan pada bulan September dan Oktober 2018 melalui sambungan jarak jauh.

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di 100030- 100057 BT dan 1030"-1039" LS. Nagari ini memiliki batas-batas yakni sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Taratak, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Surantiah, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rawang Gunung Malelo. Luas nagari ini 1400 Ha atau hanya 3,51% dari luas kecamatan Sutera yang terdiri dari 120 Ha dataran dan 20 Ha lahan rendah. Berdasarkan LKPJ Lansano Taratak tahun 2017 diketahui bahwa peruntukan lahan pertanian seluas 95 Ha, lahan perumahan dan permukiman 64 Ha, lahan perkebunan 25 Ha, lahan untuk fasilitas umum 12,5 Ha, pekarangan 13 Ha, pekuburan 0,75 Ha serta perkantoran 2,5 Ha, dan sisanya lahan kosong.

Berdasarkan data di atas terlihat luasnya lahan pertanian sehingga mata pencaharian yang dominan di masyarakat adalah sebagai petani. Meski begitu banyak juga nelayan yang ketika tidak bisa melaut maka akan bekerja sebagai petani baik sebagai buruh ataupun pemilik sawah. Namun yang terdata adalah pekerjaan utama sehari-hari. Sedangkan nelayan yang kadang beralih menjadi buruh tani hanyalah waktu-waktu tertentu saja. Secara keseluruhan jumlah penduduk Nagari Lansano Taratak ada sebanyak 2.624 jiwa dengan sebanyak 1.329 jiwa laki-laki dan 1.295 jiwa perempuan. Adapun mata pencaharian penduduk di Nagari Lansano dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Penduduk Nagari Lansano Taratak Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Buruh tani	6
2.	Petani	385
3.	Nelayan	156
4.	Peternak	65
5.	Pedagang	84
6.	Tukang Kayu	23
7.	Tukang Batu	22
8.	Penjahit	5
9.	Pengrajin	3
10.	Buruh Industri	-
11.	Industri Kecil	3
12.	PNS	19
13.	TNI/POLRI	10
14.	Pensiunan	6
15.	Sopir	4

Sumber : LKPJ Wali Nagari Lansano Taratak, 2017

Menurut Miles dan Huberman, 1992 (dalam Afrizal, 2008) data dianalisis melalui alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

Analisis data tidak bisa hanya dilakukan sekali saja melainkan harus dilakukan berulang-ulang. Adapun tahap pertama yang dilakukan yakni hasil wawancara yang direkam atau ditulis dalam catatan lapangan, maka harus ditranskrip terlebih dahulu dan masing-masing hasil wawancara tersebut ditandai tingkat kepentingannya. Setelah itu dilakukan penyajian data baik itu dalam bentuk naratif, bagan atau matriks.

Pada analisis tahap kedua ini yang dilakukan adalah mengkategorisasikan data atau pengelompokan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi. Berdasarkan kodifikasi data, yang menentukan data penting dan tidak penting pada tahap pertama, peneliti membuat kategori-kategori dan data yang telah dikumpulkan.

Tahap ketiga yang dilakukan adalah mencari hubungan antara kategori yang dibuat sebelumnya. Terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang akan ditarik masih harus bersifat longgar, tetapi terbuka dan skeptis dan kemudian semakin kuat seiring kejelasan hasil yang didapat.

Tahapan yang harus dilakukan selanjutnya adalah validitas data. Seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992) bahwa makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Validitas data menurut Afrizal (2008) berarti data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.

Dalam analisa data, maka ketiga langkah ini dilakukan atau diulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan metode apapun. Ketiga langkah tersebut dilakukan terus sampai penelitian

berakhir. Jadi analisis data dalam penelitian ini adalah proses kategorisasi data, menemukan pola/ tema dan mencari hubungan dengan kategori yang telah ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Nagari Lansano Taratak

Nagari Lansano Taratak merupakan salah satu nagari di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Daerah tersebut terletak pada 100°30'-100°57' BT dan 1°30''-1°39' LS. Batas-batas wilayah nagari Lansano Taratak ini adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Taratak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Surantih, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Rawang Gunung Malelo. Topografi nagari Lansano Taratak merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan. Daerah ini terdiri dari daerah pantai dan perbukitan. Nagari Lansano Taratak berada pada ketinggian 2 sampai 4 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah tercatat 1400 Ha atau hanya 3.51 % dari luas kecamatan Sutera, terdiri dari 120 Ha dataran dan 20 Ha lahan rendah. Adapun peruntukan lahan tersebut terdiri dari lahan pertanian sekitar 95 Ha, lahan perumahan dan pemukiman 64 Ha, lahan perkebunan 25 Ha, lahan untuk fasilitas umum 12.5 Ha, pekarangan 13 Ha, pekuburan 0.75 Ha serta perkantoran 2.5 Ha. Sisanya lahan kosong, hutan dan lain-lain (LKPJ Walinagari Lansano Taratak 2017). Sementara lahan pertanian didominasi oleh sawah yang terdiri dari sawah irigasi (45 Ha) dan sawah tadah hujan (45 Ha). Daerah ini memiliki curah hujan 1000 mm sampai dengan 3000 mm pertahun dengan suhu rata-rata 260C.

Nagari Lansano Taratak merupakan nagari yang pada awalnya tidak berpenghuni. Konon wilayah ini masih berupa rawa dan hanya sedikit tanah kering. Daerah ini kemudian didatangi orang-orang yang migrasi dari daerah lain untuk mencari tempat tinggal dan bercocok tanam. Beberapa orang pertama yang masuk ke daerah ini berasal dari Langgai yang menjadi bagian dari Kerajaan Sungai Pagu. Selanjutnya menyusul kemudian orang-orang dari Ampalu, Tarusan, Batu Bala, Koto Taratak dan Taluk Batang Kapas. Selanjutnya suku pertama yang singgah di daerah ini adalah Chaniago yang diikuti kemudian oleh Sikumbang, Melayu.

Menurut beberapa sumber nama Lansano Taratak berasal dari nama 2 (dua) batang pohon Lansano yang berada di sekitar perkampungan awal masyarakat yang datang dari Sungai Pagu. Orang-orang yang datang berasal dari Langgai (Nagari Surantih) dan bersuku Caniago. Berdasarkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walinagari Lansano Taratak tahun 2017, penduduk nagari Lansano Taratak berjumlah 11.652 jiwa.

Nagari ini mempunyai beberapa dusun antara lain: 1) Dusun Air Terjun, berasal dari bandar yang terletak di sebelah utara Surau Minang yang juga dikenal dengan Masjid Darul Ihsan. Perubahan surau menjadi masjid dilakukan pada tahun 1980. Air terjun ini juga disebut dengan air terjun Lansano. 2). Dusun Jalan Baru, berangkat dari cerita pembuatan jalan untuk membuka akses ke tempat tinggal masyarakat kala itu. Masyarakat lalu bersepakat untuk membuat jalan dari halaman rumah menuju Labuah Rawang yang kini menjadi Nagari Rawang Gunung Malelo. 3) Dusun Remaja, karena dusun ini menjadi tempat bermain anak-anak hingga remaja sebelum pergi mengaji ke Masjid Nurul Huda.

Berdasarkan data tahun 2017, jumlah penduduk di Nagari Lansano Taratak berjumlah 2.624 jiwa dengan sebanyak 1.329 jiwa laki-laki dan 1.295 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk tersebut tergolong penduduk usia muda dan produktif. Sumber mata pencaharian di Nagari Lansano Taratak didominasi sebagai petani. Data tahun 2017 berdasarkan LKPJ Walinagari Lansano Taratak mencatat sebanyak 385 orang yang berprofesi sebagai petani. Menyusul kemudian nelayan yang berjumlah 156 orang. Hal ini disebabkan oleh tradisi turun temurun yang diwariskan dari dahulu. Hal lain yang

menjadi faktor pendorong masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan dan petani karena menurut mereka tidak menuntut pendidikan yang tinggi.

Masyarakat Lansano Taratak dalam hal pendidikan bisa dikatakan sudah mulai mengalami kemajuan yang terlihat setiap tahun ada penambahan anak lulusan SLTA bahkan telah banyak hingga sarjana. Nelayan-nelayan yang diwawancarai juga telah menyadari pentingnya sekolah bagi anak mereka. Namun demikian, berbagai persoalan yang mereka hadapi berpengaruh pada niat menyekolahkan anak yakni persoalan finansial. Sehingga tidak sedikit juga orang yang putus sekolah atau bahkan tidak tamat SD. Berdasarkan LKPW Walinagari Lansano Taratak tahun 2017, masih terdapat sekitar 257 orang penduduk yang tidak tamat SD. Sementara itu sudah ada sekitar 40 orang yang mencapai pendidikan sarjana.

Dilihat dari sarana dan prasarana di Nagari Lansano Taratak dikatakan kurang memadai. Gedung sekolah mulai tingkat TK hingga SLTP terdapat masing-masing satu gedung. Selain itu, ada juga Masjid dan Mushala sebagai tempat beribadah. Terdapat 2 Masjid dan 4 Mushala. Sementara untuk bidang kesehatan telah ada Puskesmas Pembantu dan lapangan sepakbola untuk kegiatan olahraga. Sebagai tempat pemasaran untuk hasil tangkap, di Nagari Lansano Taratak telah ada muara pengelolaan ikan sebagai pelabuhan kapal penangkap ikan.

B. Strategi Bertahan Hidup Nelayan Jaring Robin

Banyak kajian mengenai kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan dikatakan terjadi disebabkan kesenjangan sosial akibat dari modernisasi perikanan. Namun nyatanya banyak sebab lainnya sehingga kenyataan ini tidak bisa dinafikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Nagari Lansano Taratak secara keseluruhan penduduknya bekerja sebagai nelayan jaring robin. Kehidupan mereka bergantung dengan hasil tangkap ketika melaut. Pada saat cuaca baik maka mereka bisa melaut tetapi pada saat cuaca tidak baik maka mereka tidak bisa melaut. Hal ini dikarenakan perahu yang digunakan sangat beresiko terhadap keselamatan nyawa nelayan..

Disebut jaring robin karena alat tangkap yang mereka gunakan adalah jaring, sementara perahu berukuran kecil hanyaditumpangi 1 nelayan dan menggunakan mesin kekuatan 5 PK. Dikatakan robin karena masyarakatnya sudah familiar dengan merk mesin yang sering mereka gunakan yaitu robin. Ukuran sampan robin ini merupakan yang terkecil diantara sampan yang ada di Kecamatan Sutera dan biasanya hanya dioperasikan satu atau dua orang saja. Sesuai dengan ukurannya, wilayah operasi jaring robin ini berada di batas 3 mil laut. Biasanya dalam satu sampan robin, mereka membutuhkan 10 pieces jaring. Jaring inilah yang kemudian dibentang di tengah laut lalu ditarik kembali untuk menjaring ikan yang ada. Karena wilayah kerja yang sempit dan alat yang sederhana, maka hasil yang diperoleh dengan jaring robin juga cenderung sedikit. Biasanya dalam sekali melaut, mereka hanya dapat antara Rp.20.000,- hingga Rp.100.000,-. Hasil itu dibagi-bagi untuk kebutuhan operasional dan sisanya dibawa pulang ke rumah. Sekali operasi mereka bisa menghabiskan bahan bakar dua liter atau antara Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,-.

Sampan robin dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan jaring robin di Kecamatan Sutera khususnya di Nagari Lansano Taratak merupakan milik pribadi. Biasanya untuk memperoleh sampan yang mereka gunakan, mereka membeli sampan bekas dengan separuh harga baru. Hal ini dikarenakan mereka tidak punya cukup uang untuk membeli sampan dengan perangkatnya yang baru. Menurut masyarakat, untuk mendapatkan sampan robin dan perangkat yang baru mereka harus mengeluarkan biaya sekitar Rp. 10.000.000,-. Satu perangkat terdiri dari satu unit sampan, 10 pieces jaring dan satu unit mesin tempel, serta satu paket pemberat. Harga tersebut bisa mereka bayarkan dengan cara dicicil atau dibayar lunas jika sebelumnya mereka mempunyai tabungan. Kadang kala juga mereka membeli secara berangsur-angsur, misalnya beli perahu dulu atau beli jaring sebagian. Kemudian ketika

penghasilan agak berlebih, baru mereka memenuhi keseluruhan. Cara yang terakhir ini jauh lebih ringan tapi lama karena penghasilan yang tidak menentu. Selain itu menggunakan metode ini harus dihadapkan dengan biaya perawatan yang memang dibutuhkan karena alat yang dipakai adalah yang bekas.

Jaring-jaring yang digunakan memiliki berbagai ukuran seperti yang diungkapkan oleh Kamel (suku Caniago, 48 tahun) bahwa jaring yang dikenal dengan sebutan wareng memiliki 13 jenis. Beberapa jenis jaring yang dikenal oleh nelayan Kecamatan Sutera yakni wareng nan kadok, ama limo nan kadok, ama limo jarang, ama ampek kadok, ama insang, ama ciek, ama duo, ama tigo, lengan ampek, lengan limo, lengan enam hingga lengan tigo baleh. Ukuran terpanjang adalah lengan tigo baleh yang memiliki panjang antara 200-250 meter. Fungsi masing-masing jaring ketika digunakan pada perahu adalah sesuai dengan jenis ikan yang akan ditangkap.

Keadaan yang serba tak pasti dengan perubahan gejala alam menyebabkan fluktuasinya pendapatan nelayan. Sementara kehidupan terus harus dilalui dengan berbagai macam cara yang tetap dilakukan. Berikut strategi yang dilakukan nelayan jaring robin untuk bertahan hidup adalah:

1. Memanfaatkan potensi ketika perubahan kondisi alam

Secara berkala, nelayan tradisional Kecamatan Sutera selalu menghadapi situasi dimana ubur-ubur muncul ke pantai. Ketika musim ini tiba, masyarakat dipastikan tidak bisa melaut. Walaupun melaut, umumnya masyarakat hanya mendapatkan sedikit saja hasil tangkap. Diwaktu lain, mereka juga harus menghadapi musim anggao, suatu masa dimana tidak ada hasil tangkap sama sekali dan sekali-sekali dapat walau sedikit. Kala musim anggao tiba, biasanya sangat sedikit nelayan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Kalau ditanya tentang penghasilan, rata-rata pada masa itu mereka hanya dapat Rp.10.000,- hingga Rp. 50.000.

Ada beberapa hal yang mereka lakukan ketika menghadapi musim tersebut Salah satunya adalah menangkap kepiting atau dalam istilah setempat melukah kepiting. Kegiatan ini juga berkaitan dengan gejala alam di pesisir atau terjadinya pasang naik secara berkala. Nelayan atau daerah pesisir selalu mengalami pasang besar minimal sekali dalam sebulan. Pada saat ini, kepiting dipastikan akan muncul di daerah pasang-surut yang mudah dijangkau oleh nelayan. Selanjutnya mereka memanfaatkan pasang tersebut untuk menambah penghasilan mereka dengan mencoba melukah kepiting. Mereka memanfaatkan jaring yang rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi untuk membuat lukah, yaitu alat yang mereka pakai untuk menangkap kepiting berbentuk bangun ruang persegi panjang yang salah satu sisinya terbuka sebagai jalan masuk kepiting. Lukah ini kadang kala juga mereka beli, jika mereka tidak punya waktu untuk membuatnya. Namun umumnya mereka buat sendiri. Jika mereka beli, mereka harus mengeluarkan Rp.15.000,- untuk satu lukah. Sehingga mereka memilih membuat sendiri agar bisa lebih berhemat.

Pekerjaan melukah sangat membantu penghasilan mereka. Biasanya di saat pasang dan kala mereka memasang lukah, mereka bisa memperoleh kepiting 1 kg sekali pasang. Kepiting tersebut akan mereka jual ke pasar seharga Rp.150.000,- per kilo. Hasil ini dalam kondisi tangkap yang minim, bisa mengganti berapa hari tidak mendapat hasil ketika melaut. Pasar kepiting juga tidak begitu sulit karena hasil produksi masih sedikit dan tidak ada kegiatan menangkap yang secara khusus memproduksi kepiting setiap hari. Beberapa rumah makan atau masyarakat masih cukup banyak menampung hasil melukah tersebut. Walau begitu, tidak selalu ada pasang besar yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh tambahan sebanyak secara konsisten. Sehingga, penghasilan mereka dari menangkap kepiting hanya sebatas membantu menutupi kekurangan kebutuhan subsisten saja.

Selain melukah kepiting, nelayan juga kerap menangkap udang dan kerang. Kerang dalam bahasa setempat disebut dengan lokan. Daerah sekitar pesisir Kecamatan Sutera memang masih mempunyai lahan rawa yang ditumbuhi nipah. Lahan ini selalu tergenang sepanjang waktu dan airnya semakin dalam ketika pasang besar tiba. Di daerah ini, banyak terdapat udang dan kerang pada musim-musim

tertentu. Jika musimnya tiba, sebagian nelayan akan memanfaatkannya dengan menangkap udang ataupun lokan. Selanjutnya hasil tangkap mereka akan mereka jual ke berbagai rumah makan yang ada di daerah itu atau mereka menjualnya langsung ke pasar.

Lokan diolah menjadi penganan khas pesisir yang sangat disukai oleh hampir seluruh masyarakat. Beberapa hasil olahan lokan yang paling utama adalah sate lokan dan rendang lokan. Sate lokan merupakan kuliner khas Kabupaten Pesisir Selatan yang seringkali dihidangkan bersamaan dengan lontong. Sate ini umum diadakan di kala pagi sebagai sarapan. Selain itu, bagi restoran-restoran juga, mereka menyediakan sate lokan sebagai menu khas Pesisir Selatan. Selain itu ada rendang lokan yang sering disediakan ketika acara-acara pesta/baralek. Rendang ini memang menjadi salah satu makanan adat yang tidak pernah ketinggalan. Berbeda dengan di daerah darek yang menyediakan daging sebagai bahan utama rendang mereka ketika baralek. Di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Kecamatan Sutera rendang lokan menjadi utama pengganti rendang daging. Hal ini sesuai dengan letak geografis daerahnya yang memang lebih menyediakan *lokan* daripada sapi.

2. Membantu menarik pukut nelayan lain

Pada saat keadaan tidak baik maka nelayan robin terbatas ruang geraknya untuk melaut. Maka selain itu nelayan tersebut melakukan juga pekerjaan kepada nelayan pukek tapi atau nelayan pukek payang. Pekerjaan menarik pukek tapi bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari, hal ini karena sekali memukat membutuhkan waktu hanya 2.5 jam. Waktu selama itu dipakai mulai dari merentang pukut di laut hingga selesai menarik pukut ke tepi pantai. Jika beruntung dan memperoleh banyak ikan, biasanya anak pukek yang sedang menarik pukut tersebut meminta bantuan nelayan lain untuk menarik pukut tersebut. Selesai menarik pukek dan menjual hasil ikan yang didapat, para nelayan yang dimintai bantuan akan diberi imbalan sekadarnya. Biasanya imbalan tersebut berkisar Rp. 5000,- hingga Rp.10.000,- tergantung hasil yang diperoleh anak pukek tersebut. yang pasti, imbalan tersebut tidak sama dan tidak lebih banyak dari anak pukek karena hanya membantu sebentar saja.

Umumnya, ketika seseorang selesai menarik pukut, mereka tidak langsung pulang ke rumah. Biasanya mereka menunggu dulu beberapa waktu sambil istirahat dan ngopi di warung yang tersedia di lokasi mereka bekerja. Beberapa ada yang sambil minum, ada juga yang makan. Mereka akan semakin betah ketika hasil mereka memukat tidak sesuai dengan harapan. Biasanya jika hasil tangkap mereka tidak mencukupi, mereka akan mengulang kembali menangkap. Jika tidak mereka akan membantu orang lain menarik pukut mereka. Jika dihitung-hitung, penghasilan dari membantu menarik pukut orang lain, mereka bisa menambah penghasilan mereka hingga Rp.20.000,-. Jumlah tersebut lumayan untuk membantu menambah penghasilan yang harus dibawa ke rumah.

Manusia sebagai mahluk sosial tak kan mungkin bisa hidup sendiri. Terjadi hubungan sosial dalam setiap kelompok masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1974) bahwa nilai budaya dalam kehidupan memiliki empat konsep, yakni pertama, manusia tidak bisa hidup sendiri dalam dunia, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya dan juga alam sekitarnya. Kedua, dalam segala aspek kehidupannya manusia pada hakekatnya tergantung pada sesamanya. Ketiga, manusia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama rata dan sama rasa. Keempat, selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas. Empat konsep nilai ini berlaku pada seluruh masyarakat dimana saja, termasuk masyarakat nelayan.

Pemahaman empat konsep nilai budaya membuat hubungan antara sesama nelayan, baik nelayan buruh ataupun nelayan yang kaya memiliki hubungan yang baik. Solidaritas dan gotongroyong masih terlihat kuat dalam kehidupan nelayan. Pada nelayan jaring robin memang melakukan kegiatan melaut seorang diri. Berbeda dengan nelayan pukek tapi atau nelayan pukek payang yang anggotanya lebih dari 3 orang. Membutuhkan kerjasama yang baik dalam melaut.

Bagi nelayan jaring robin yang melakukan kegiatan melaut dari subuh sampai jam 8.00 atau 9.00 WIB. Selebihnya waktu mereka masih bisa digunakan untuk membantu nelayan lain guna menutupi kekurangan penghasilan mereka pada hari itu. Jadi dapat dikatakan bahwa membantu menarik pukat nelayan juga menjadi alasan sosial untuk membantu teman-teman. Sikap saling membantu ini memang senantiasa mereka bina untuk bisa saling mendukung di tengah penghasilan yang tidak menentu. Kadang kala mereka akan mendapat rugi dan orang lain untung, kadang kala sebaliknya yang terjadi. Dan jika hal itu terjadi, maka dengan saling membantu mereka tetap dapat penghasilan yang bisa setidaknya menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pilihan membantu pekerjaan memukat menjadi pilihan paling rasional untuk menambah pendapatan di tengah keterbatasan pilihan pekerjaan. Minimnya pendidikan dan keahlian serta terbatasnya waktu membuat tidak ada kemungkinan peluang mengerjakan pekerjaan lain menurut mereka. Menjalankan pekerjaan sebagai buruh tukang misalnya, jam kerja tidak mungkin dimulai setelah mereka pulang melaut sekitar jam 08.00 hingga jam 09.00. Sementara itu, waktu kosong mereka selepas melaut masih cukup panjang dari pagi hingga sore. Sehingga pilihan membantu pekerjaan menarik pukat nelayan lain menjadi pilihan yang rasional.

3. Melakukan pekerjaan di luar pekerjaan menangkap ikan

Melakukan pekerjaan di luar pekerjaan menangkap ikan harus dilakukan ketika tak memungkinkan melaut pada musim-musim tertentu. Bagi mereka yang memiliki ketrampilan selain melaut tidaklah sulit. Namun bagi yang tak memiliki ketrampilan lain tentu yang dilakukan adalah menjadi buruh tani baik di tanah milik keluarga atau kontrak. Namun, kalau kontrak lahan tentu ada biaya yang harus mereka tanggung. Bertani diharapkan bisa memenuhi kebutuhan beras mereka minimal selama setengah tahun. Hal ini juga dimungkinkan karena lahan yang biasa disewa tidak begitu luas. Mereka hanya memanfaatkan waktu luang mereka untuk bertani. Menanam padi bisa sangat menguntungkan buat nelayan tradisional karena beras menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Ketika stok beras ada di rumah pada saat hasil laut tidak ada, biasanya tidak begitu masalah. Mereka tidak perlu menambah hutang ke orang lain atau mencari usaha sampingan lain yang lebih berat. Mereka hanya memerlukan lauk dan sayur sebagai pendamping. Sementara lauk sendiri bisa diperoleh dari melaut. Karena seminim apapun hasil laut, mereka tetap bisa memperoleh hasil hanya untuk sekadar makan di rumah dengan cara memancing.

Menurut Kusnadi (2000), dikatakan bahwa pada masyarakat tribal dan pertanian di Swedia, pekerjaan menangkap ikan tidak hanya dilakukan satu jenis pekerjaan saja. Melainkan dibarengi dengan pekerjaan lainnya, seperti berburu, bertani maupun pekerjaan lainnya.

Demikian juga di Nagari Lansano Taratak ini, bahwa para nelayan sebagian besar memanfaatkan waktu setelah melaut dengan pekerjaan lainnya. Kegiatan bertani mereka lakukan sehari-hari di kala musimnya tiba. Biasanya masyarakat nelayan melakukannya selepas pulang dari melaut. Di lahan ini juga mereka dapat melibatkan anggota keluarga yang lain. Namun, kadang kala mereka mengupahkan pengelolaan sawah tersebut kepada orang lain. Hal ini mereka lakukan di kala hasil laut lebih menguntungkan. Walau begitu, hasil pertanian tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga setahun penuh. Satu sisi, musim tanam di Kecamatan Sutura hanya satu kali, di sisi lain lahan yang mereka kelola juga sempit. Belum lagi gagal panen yang menjadi momok setiap petani. Jadi biasanya hasil yang mereka peroleh paling maksimal hanya bisa bertahan hingga setengah tahun. Tidak mencukupi, tapi setidaknya itu bisa membantu untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jika lahan yang mereka kelola adalah lahan sewa, maka mereka juga harus menutupi biaya sewa. Mengelola sawah memang membutuhkan biaya produksi yang mahal, namun hasil pertanian bisa menjadi tabungan jika panennya berhasil.

Selain bersawah, kegiatan bertani yang dilakukan nelayan tradisional di sini adalah berladang dengan bertanam palawija serta mengelola tanaman hutan yaitu gambir. Masyarakat awam sering menggunakan gambir sebagai campuran menyirih. Masyarakat Pesisir Selatan memang sebagian ada yang menjual bahan mentah dan ada juga sebagian yang lain mengelolanya terlebih dahulu baru kemudian dijual.

Gambir atau dikenal dengan nama latin *Uncaria Gambir* Hunter Roxb. merupakan tanaman merambat yang dapat ditemukan diladang atau hutan sekunder. Ciri-ciri tanaman ini merambat, daun tunggal, bunga berbentuk bulat berkumpul berwarna merah dan hijau. Sejak dahulu, tanaman ini telah dibudidayakan oleh masyarakat Pesisir Selatan. Komoditas gambir ini dapat dimanfaatkan getah dan daunnya yang digunakan sebagai bahan baku obat-obatan dan kosmetik, penyamak kulit, pewarna tekstil, bahan cat, pembuatan bir dan ramuan (Juniarti, dkk, 2004).

Selain bertani, sebagian nelayan tradisional memanfaatkan banyak waktu luangnya untuk beternak. Hewan ternak yang mereka pelihara diantaranya Sapi, Kambing dan Ayam. Walau demikian jumlah hewan ternak mereka juga tidak banyak. Mereka biasanya beternak dengan jumlah 10 ekor paling banyak. Modal yang minim membuat mereka hanya bisa memelihara hewan ternak sedikit. Selain itu, beberapa di antara mereka juga memelihara hewan ternak orang lain dengan sistem bagi hasil penjualan. Memelihara hewan ternak bagi sebagian nelayan dirasa cukup menguntungkan karena bisa memenuhi kebutuhan diwaktu-waktu tertentu. Tapi jumlah yang minim jelas tidak bisa diandalkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar.

Selain beternak dan bertani ada juga yang mengisi waktu kosong dari melaut dengan membuat memperbaiki perahu. Tentunya keahlian ini tidak semua orang memilikinya. Biasanya untuk memperbaiki perahu mereka bisa mendapatkan Rp. 500.000,- dengan waktu memperbaiki selama 3 hari. Artinya, mereka bisa memperoleh Rp.150.000,- per hari. Tapi berapa banyak pesanan yang mereka terima dalam satu bulan menjadi masalah. Bahkan dalam setahun belum tentu mereka dapat pesanan.

C. Solusi meningkatkan kesejahteraan nelayan jaring robin

Berbagai strategi di atas menjadi pilihan terbaik yang mereka lakukan untuk tetap bisa bertahan hidup. Minimnya pendidikan, keterampilan, modal dan dukungan alam menjadi alasan mereka hanya punya pilihan-pilihan yang terbatas. Kondisi yang serba terbatas tersebut membuat strategi yang mereka miliki hanya bersifat sementara dan hanya bisa menutupi kekurangan kebutuhan subsisten yang mereka peroleh dari hasil melaut. Mereka tidak mampu memperbaiki taraf hidup dengan apa yang mereka punya. Umumnya penghasilan yang mereka dapatkan habis untuk menutupi biaya hidup dan utang yang mereka buat untuk menutupi biaya operasional melaut. Sehingga, mereka masuk dalam lingkaran yang nyata membuat mereka tidak bisa beranjak dari kemiskinan.

Berhutang selalu dilakukan oleh para nelayan terutama pada saat musim panceklik. Pinjaman pada toko-toko yang menjual sayur-mayur dan kebutuhan hidup lainnya. Selain itu juga mencari pinjaman pada toke tempat mereka biasa menjual hasil melautnya. Adapun pinjaman tersebut akan dibayar secara mencicil pada saat mereka sudah bisa kembali melaut.

Kehidupan nelayan seperti yang telah diuraikan dalam strategi bertahan hidup itu secara umum dilakukan oleh masyarakat nelayan di Nagari Lansano Taratak ini. Oleh karena itu keadaan setiap tahunnya tidak ada perubahan. Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada nelayan. Solusi lain bagi nelayan dan anggota keluarga nelayan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan baik dalam mengolah ikan maupun pemasarannya. Biasanya kegiatan ini dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok usaha rumah tangga yang dibantu pembiayaannya pada beberapa program yang ada salah

satunya yakni Program Pemberdayaan Ekonomi Pesisir yang merupakan program unggulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelatihan-pelatihan lainnya bisa dilakukan juga yakni dengan memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki misalnya membuat sulaman bayang. Ini salahsatu sumber pemasukan bagi kehidupan para nelayan yang anggota keluarganya yang tidak melaut semisal anak atau istri untuk belajar menyulam. Hasil karya keluarga nelayan tersebut hendaknya didukung oleh Dinas Pariwisata sehingga pemasaran yang membuahkan hasil dapat dinikmati langsung oleh keluarga nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nelayan robin di Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dalam upaya mempertahankan hidupnya adalah dengan tetap melaut disaat cuaca mendukung. Dalam kehidupannya bagi nelayan di daerah tersebut beberapa strategi yang mereka lakukan untuk bertahan hidup seperti memanfaatkan potensi gejala alam, membantu menarik pukat nelayan lain, melakukan pekerjaan di luar pekerjaan menangkap

Pada saat musim panceklik karena tidak bisa melaut pada saat cuaca tidak baik maka yang dilakukan adalah dengan mencari pinjaman kepada siapapun. Pinjaman pada toko-toko yang menjual sayur-mayur dan kebutuhan hidup lainnya. Selain itu juga mencari pinjaman pada toke tempat mereka biasa menjual hasil melautnya. Adapun pinjaman tersebut akan dibayar secara mencicil pada saat mereka sudah bisa kembali melaut.

Pada sebagian besar nelayan lainnya yang memiliki daya kreatifitas, maka akan mencari pekerjaan lainnya. Tidak hanya mengandalkan kebutuhan hidup dari hasil melaut, melainkan juga melakukan pekerjaan yang mendatangkan uang baik sebagai buuh bangunan maupun tukang pembuat perahu.

Umumnya nelayan jaring robin yang ada di sini hidupnya hanya mengandalkan hasil melaut. Oleh karena itu maka taraf kesejahteraan hidup nelayan masih jauh dari kata sejahtera. Kebutuhan hidup masih sangat sulit untuk ditingkatkan jika tidak ada pelatihan kepada nelayan maupun anggota keluarganya. Jika ini dibiakan maka tidak ada perubahan ke arah lebih baik.

Upaya yang seharusnya bisa dilakukan adalah dengan melakukan beberapa pelatihan yang bisa diikuti oleh nelayan dan anggota keluarga mereka. Adapun pelatihan-pelatihan tersebut antara lain pelatihan menjahit sulaman bayang khas pesisir, pengolahan sampai pemasaran hasil laut. Pihak dinas terkait hendaknya memberi pelatihan tidak sebatas itu saja melainkan memberikan kemudahan juga dalam modal sampai pada pemasarannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada Drs. Suarman Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang telah menetapkan saya masuk dalam tim untuk melaksanakan penelitian ini dengan anggaran DIPA tahun 2018. Terimakasih juga saya ucapkan kepada ketua tim yakni Firdaus Marbun dan kawan-kawan yang mengizinkan saya untuk mempublikasikan bagian kecil dari hasil penelitian yang kami lakukan. Besar harapan kami bahwa makalah ini dapat bermanfaat baik untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Dari Pengertian Sampai Pemikiran Laporan*. Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Abdoellah, S. Okan. 2017. *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Andriati, Retno, 2012. Buku Ajar Antropologi Maritim, Surabaya : PT Revka Petra Media
- Database Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016
- Haryono, Tri Joko Sri. 2005. “Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan Studi Tentang Diversifikasi Pekerjaan Keluarga Nelayan Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup.” *Berkala Ilmiah Kependudukan* 7 (2): 119–28.
- Kusnadi, 2000. *Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung : Humaiora Utama Press
- , 2009. *Keberdayaan nelayan & dinamika ekonomi pesisir*. Yogyakarta: Kerja sama Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Lembaga Penelitian, Universitas Jember dengan ar-RuzzMedia.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Lansano Taratak, 2017
- Marbun, Firdaus, dkk, 2018. *Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Perubahan Iklim*. Laporan Penelitian, Padang : BPNB Sumatera Barat
- Raodah, 2011. *Aktivitas Perekonomian*, Makasar : Dian Istana Makasar
- Rindayati, Heni, Indah Susilowati, and Boedi Hendrarto. 2013. “Adaptasi Nelayan Perikanan Tangkap Pulau Moro Karimun Kepulauan Riau Terhadap Perubahan Iklim.” In *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 265–72.
- Syah, Achmad Facruddin. 2012. “Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Bangkalan Terhadap Dampak Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim.” *Jurnal Kelautan* 3 (1): 15–22.
- Subair, Lala M. Kolopaking, Soeryo Adiwibowo, and M. Bambang Pranowo. 2014. “Adaptasi Perubahan Iklim Komunitas Desa: Studi Kasus Di Kawasan Pesisir Utara Pulau Ambon.” *Jurnal Komunitas* 6 (1): 57–69. doi:10.15294/komunitas.v6i1.2943.
- Wibowo, Ari and Satria, Arif. 2015. “Strategi Adaptasi Nelayan Di Pulau-Pulau Kecil Terhadap Dampak Perubahan Iklim (Kasus : Desa Pulau Panjang , Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau).” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, No. Agustus: 107–24.



**PENDAMPINGAN USAHA SAMBAL PECEL
DI DESA DLEMER KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN**

***BUSINESS ASSISTANCE OF PECEL SAUCE IN DLEMER VILLAGE, AROSBAYA,
BANGKALAN***

Lilis Suaibah¹, Abdur Rahman³, Rakhmawati⁴

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura

³Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura

⁴Dosen Program studi Teknik Industri Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

lilissuwaibah12@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan usaha sambal pecel menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sambal pecel dan pendapatan usaha. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan program pendampingan terhadap usaha sambal pecel di Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah kaji tindak partisipatif. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif dan analisis finansial. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan meliputi; (1). Pelatihan produksi, pengemasan, pemasaran, dan manajemen usaha (2). Usaha sambal pecel PKK Desa Dlemer layak untuk dikembangkan. Impact dari program pendampingan ini adalah peningkatan efisiensi produksi dan kualitas produk sambal pecel, sehingga nilai jual produk dan pendapatan usaha mengalami peningkatan.

Kata Kunci: *pendampingan usaha, sambal pecel, Madura*

ABSTRACT

The activity of assisting pecel sauce business is the key in increasing the competitiveness of pecel sauce products and business income. The purpose of this research is to describe the assistance program for the pecel sauce business in Dlemer Village, Arosbaya District, Bangkalan Regency. The research method applies participatory action. Data were analyzed using qualitative descriptive methods and financial analysis. The analysis showed that the assistance including; (1) training in production, packaging, marketing and business management (2) the family welfare program (PKK) in Dlemer Village is worth developing. The impact of this assistance program is the increased production efficiency and quality of pecel sauce products that increases its selling value and operating revenues.

Keywords: *Business Assistance, Pecel Sauce, Madura*

PENDAHULUAN

Madura merupakan sentra usahatani kacang tanah di Jawa Timur. Data Statistik Tanaman Pangan menunjukkan selama lima tahun terakhir, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten penghasil kacang tanah terbesar nomor dua setelah Tuban, dan di urutan ketiga adalah Kabupaten Sampang (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019). Pada tahun 2017, produksi kacang tanah di Madura sebesar 45.791 ton atau sebesar 29,89% dari total produksi Jawa Timur. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan dan Sampang cukup besar, namun belum dioptimalkan (Faizah, A.A., dan Santoso. E.B., 2013). Di Kabupaten Bangkalan, luas panen musim tanam 2016 sebesar 29.290 Ha, dengan produksi 36.067 ton dan produktivitas 12,31 ton/Ha (BPS Kabupaten Bangkalan, 2018).

Kacang tanah merupakan komoditas tanaman pangan potensial dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, karena memiliki keterkaitan yang kuat antara sektor hulu sampai hilir. Pengolahan kacang tanah menjadi produk olahan industri pangan merupakan salah satu upaya peningkatan nilai tambah dan mendukung program diversifikasi pangan (Yulifianti *et al.*, 2016). Salahsatu produk olahan kacang tanah yang memiliki prospek untuk dikembangkan adalah sambal pecel. Permintaan ekspor sambal pecel terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 permintaan ekspor

sebesar 350 ton, meningkat 197 persen dibanding tahun 2012. (Handoko, 2014). Permintaan sambal pecel untuk konsumen lokal juga cukup tinggi, karena bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sambal pecel adalah dianggap sebagai makanan pendamping yang mampu melengkapi cita rasa makanan utama di Indonesia.

Awal mulanya sambal pecel populer sebagai pendamping makanan tradisional, yaitu “pecel”, terutama di pulau Jawa (Baiq Rien, 2010). Sambal pecel merupakan sambal dengan bahan utamanya adalah kacang tanah, sedangkan bahan pendukungnya adalah cabai, gula merah, bawang putih, garam, daun jeruk purut, dan kencur. Pada perkembangannya, sambal pecel mengalami perluasan penggunaannya untuk pelengkap makanan yang lain, seperti sate, siomai, gado-gado, sambal mie dan makanan tradisional lainnya (Kementerian Pertanian, 2016). Dengan meningkatkan permintaan masyarakat akan sambal pecel, merupakan peluang bagi masyarakat dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menjadikan sambal pecel sebagai alternatif usaha komersial.

Peluang pasar usaha sambal pecel kedepan cukup besar akibat meningkatnya kebutuhan konsumsi dan berkembangnya industri pengolahan. Peluang ini harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh masyarakat Madura, karena potensi bahan baku yang tersedia di Madura cukup besar. Apalagi dengan berkembangnya sektor pariwisata dan kemudahan akses wisatawan ke Madura, maka akan semakin meningkatkan permintaan produk khas lokal Madura.

Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya merupakan salah satu desa di Kabupaten Bangkalan bagian utara yang memiliki potensi komoditas kacang tanah cukup besar. Sebagian besar kacang tanah dijual dalam bentuk komoditas dan belum dilakukan upaya pengolahan, sehingga nilai ekonomis kacang tanah relatif rendah, yaitu berkisar Rp.15.000-20.000/kg. Ada beberapa usaha rumah tangga yang melakukan pengolahan menjadi produk sambal pecel, namun kualitas produk masih belum terstandarisasi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat desa Dlemer dalam produksi sambal pecel diantaranya adalah: (a). mutu produk industri rumah tangga masih rendah, alat produksi yang digunakan masih tergolong tradisional dan manual serta pelaksanaan manajemen produksi belum dilakukan dengan baik, (b). dari sisi pemasaran produk industri rumah tangga masih terbatas di wilayah Madura, sehingga diperlukan inovasi pemasaran dan pengembangan pasar.

Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Trunojoyo Madura (UTM) bisa memberikan kontribusi keilmuan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berupa teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk; (1). mendeskripsikan program pendampingan usaha sambal pecel di Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan (2). mengetahui teknologi produksi sambal pecel (3). menganalisis kelayakan usaha sambal pecel.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kaji tindak partisipatif, yang meliputi (1). Participatory Rural Appraisal (PRA), (2). pengadaan mesin oven kacang tanah dan mesin penggiling, (3). pelatihan teknologi produksi sambal pecel, (4). pendampingan produksi secara berkala, (5). pelatihan pengemasan dan manajemen usaha, serta (6). pendampingan perluasan pemasaran.

Tujuan dilakukan Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah untuk melibatkan masyarakat sasaran agar muncul keinginan perubahan secara mandiri, dan mendorong kesadaran kritis masyarakat lainnya (Lestari. D., dan Sururi, 2016). RRA merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dilakukan oleh tim pendamping masyarakat.

PRA atau Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka

merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata. Pelaksanaan PRA ditekankan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan dan kemandirian. Diharapkan dengan penerapan metode PRA, masyarakat sasaran mampu mengenali dan menggali potensi diri, dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat, sehingga masyarakat memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (COREMAP & Departemen Perikanan dan Kelautan, 2016).

Kegiatan penelitian ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dibawah naungan LPPM universitas Trunojoyo Madura bersama mahasiswa KKN di desa Dlemer yang mana kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 selama satu bulan.

Analisis data untuk menjawab tujuan pertama dan kedua dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan untuk tujuan ketiga adalah dengan analisis finansial.

Penelitian tentang aspek usaha sambal pecel dilakukan dengan menggunakan analisis finansial untuk melihat struktur biaya dan profitabilitas usaha. Perhitungan profitabilitas dan kelayakan investasi, digunakan perimbangan total penerimaan dibandingkan total biaya yang telah dikeluarkan (R/C ratio) (Soekartawi & Soeharjo 2011). R/C ratio (return cost ratio) merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$R/C = PQ \times Q / (TFC + TVC).$$

Dimana: R = penerimaan, C = biaya, PQ = harga sambal pecel (Rp/Kg), Q = output atau jumlah produksi sambal pecel (Kg), TFC = total biaya tetap (total fixed cost) dalam satuan rupiah, TVC = total biaya variabel (total variable cost) dalam satuan rupiah.

Kriteria penilaian investasi yang digunakan yaitu, apabila R/C ratio > 1, maka usaha sambal pecel tersebut efisien dan menguntungkan, jika R/C rasio = 1, maka usaha tersebut dalam kondisi impas, dan R/C rasio < 1, maka tidak efisien atau rugi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendampingan Usaha Sambal Pecel

Untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran maka metode yang dilakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan (PRA), dengan penerapan metode PRA, masyarakat sasaran mampu mengenali dan menggali potensi diri, dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat, sehingga masyarakat memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (COREMAP & Departemen Perikanan dan Kelautan, 2016). Adapun kegiatan pendampingan dilakukan dengan menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pelatihan

Metode ini bertujuan untuk membekali ketrampilan kelompok sasaran dalam manajemen usaha. Pelatihan yang diberikan kepada mitra berupa pelatihan manajemen, produksi, pengemasan produk, manajemen keuangan dan pemasaran online.

2. Penerapan teknologi tepat guna

Pada tahap ini diberikan bantuan 1 unit prototipe teknologi (mesin oven dan penggiling kacang), kepada kelompok PKK Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Tim pendamping memberikan bimbingan secara intensif ibu-ibu PKK guna meningkatkan ketrampilan masyarakat sasaran dalam pengoperasian mesin dan produksi sambal pecel.

Desain mesin disesuaikan dengan kapasitas produksi kelompok sasaran dan menggunakan bahan yang sesuai dengan standar produksi alat-alat usaha bidang agribisnis. Dengan rekayasa teknologi ini diharapkan mutu sambal pecel dapat ditingkatkan. Untuk tahap awal rata-rata produksi sambal pecel kelompok ibu-ibu PKK Desa Dlemer sebanyak 10 kg/per hari.

Implementasi mesin oven dalam produksi sambal pecel mampu mempercepat proses produksi hingga 100% lebih cepat dibanding penggorengan secara konvensional dengan waktu produksi sebesar



1,5 jam/proses produksi untuk kapasitas 10 kg/proses produksi. Mesin penggiling menggunakan listrik sebagai sumber energi dengan kecepatan penggilingan sebesar 60 menit/proses produksi. Penggunaan mesin penggiling mampu mempercepat proses produksi hingga 100% lebih cepat dibanding penggilingan secara konvensional.

Alat yang diimplementasikan dalam program pendampingan ini sudah sesuai dengan tujuan program, yaitu dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Penggunaan bahan juga sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

3. Pelatihan produksi, pengemasan, dan manajemen usaha

Melalui pelatihan teknologi produksi, mitra telah mampu memproduksi sambal pecel yang memiliki karakteristik rendah minyak nabati dan lebih tahan lama dibanding proses produksi secara konvensional.

Di era teknologi digital peningkatan nilai tambah produk pertanian dapat dilakukan melalui teknologi pengemasan. Tujuan dari pengemasan adalah untuk meningkatkan performance produk sambal pecel. Kemasan produk yang tidak menarik menjadikan nilai jual produk tersebut juga rendah. Untuk meningkatkan nilai jual sambal pecel dapat diterapkan teknologi pengemasan dan desain produk yang menarik. Desain kemasan produk dengan software photoshop dan corel draw. Hasil desain tersebut dicetak dengan teknologi digital.

Kemasan produk terdiri dari plastik, botol plastik dan botol kaca. Melalui pelatihan pengemasan, produk mitra mengalami peningkatan performance dari yang sebelumnya menggunakan plastik menjadi dikemas dalam botol plastik dan botol kaca, sehingga secara visual lebih menarik.

Pengetahuan akan manajemen bisnis sangat penting untuk diberikan kepada kelompok sasaran, diantaranya pengetahuan tentang analisis kelayakan usaha, penentuan harga jual dan pemasaran.

B. Proses Produksi Sambal Pecel

Proses produksi sambal pecel yang diterapkan pada lokasi sasaran adalah dengan menggabungkan teknis pengovenan kacang tanah dan penyangraian bumbu, kemudian pencampuran bahan baku menjadi sambal pecel dengan menggunakan mesin penggiling. Beberapa peneliti yang lain menggunakan teknik penyangraian untuk mengolah sambal pecel (Wijayanti, N., dan Purwatiningrum, I., 2016; Anggraini, S.P.A., dan Mediaswanti, K.A., 2018).



Gambar 1.
Pelatihan Produksi Sambal Pecel

Adapun komposisi bahan baku sambal pecel per proses produksi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Komposisi Bahan Baku Sambal Pecel

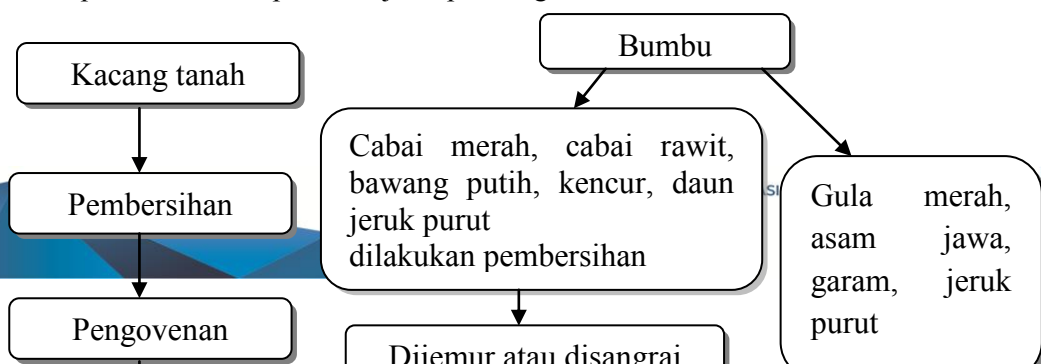
No	Bahan	Jumlah satuan
1.	Kacang tanah	1 kg
2.	Cabai merah	100 gr
3.	Canai rawit	100 gr atau sesuai selera
4.	Bawang putih	100 gr
5.	Kencur	50 gr
6.	Daun jeruk purut	6 lembar
7.	Gula merah	0,5 kg
8.	Asam jawa	50 gr
9.	Jeruk purut	Secukupnya
10.	Garam	Secukupnya

Sumber: Hasil Praktik



Gambar 2.
Produk Sambal Pecel PKK Desa Dlemer

Proses produksi sambal pecel disajikan pada bagan berikut:



Gambar 3.
Skema Produksi Sambal Pecel

C. Analisis Kelayakan Usaha Sambal Pecel

Analisa finansial usaha sambal pecel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Analisa Finansial Usaha Sambal Pecel Per Periode Produksi (1 bulan)

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Biaya Tetap				
	Penyusutan oven gas				7.000
	Penyusutan kompor gas				5.000
	Penyusutan wajan				6.000
	Penyusutan mesin penggiling				50.000
	Penyusutan mesin pengemas				10.000
	Jumlah Biaya Tetap (Rp)				78.000
2.	Biaya Variabel				
	Kacang tanah	300	Kg	21.000	6.300.000

Cabe merah	30	Kg	50.000	1.500.000
Cabe rawit	30	Kg	80.000	2.400.000
Bawang putih	30	Kg	30.000	900.000
Kencur	15	Kg	40.000	600.000
Daun jeruk purut	1800	Lbr	25	45.000
Gula merah	150	Kg	11.800	1.770.000
Asam jawa	30	Kg	10.000	300.000
Jeruk purut	3	Kg	10.000	30.000
Garam	30	bata	2.000	60.000
Pengemasan	120	buah	600	72.000
Label	120	buah	250	30.000
Gas elpiji	30	tabung	18.000	540.000
Air dan listrik	30	hari	12.500	375.000
Gaji karyawan	1	bulan	600.000	600.000
Jumlah Biaya Variabel (Rp)				15.522.000
3.	Total Biaya (Rp)			15.600.000
4.	Penerimaan			
	Jumlah produksi	390	Kg	
	Harga jual (Rp/Kg)	50.000		
	Penerimaan (Rp)			19.500.000
5.	Pendapatan (Rp)			3.900.000
6.	R/C Ratio			1,25
7.	Keuntungan per unit	Rp/unit		10.000

Rata-rata produksi sambal pecel PKK Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan per hari adalah sebesar 13 kg/hari atau per periode produksi (per bulan) sebesar 390 kg. Total biaya yang dikeluarkan oleh kelompok usaha sambal pecel PKK Desa Dlemer sebesar Rp. 15.600.000/periode, Dengan menentukan harga jual sebesar Rp. 50.000/kg pengusaha memperoleh penerimaan sebesar Rp.19.500.000, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 3.900.000/periode produksi. Berdasarkan analisis kelayakan, usaha sambal pecel layak untuk dilaksanakan dengan R/C ratio sebesar 1,25.

Penentuan harga jual didasarkan pada tingkat persaingan harga produk yang serupa di pasar tradisional. Pengusaha menentukan tingkat keuntungan sebesar 25% dari total biaya produksi. Harga jual juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku yang digunakan. Keuntungan yang diperoleh pengusaha sebesar Rp.10.000/kg.

D. Pengembangan pemasaran.

Pendampingan pengembangan pemasaran dilakukan meliputi promosi dan bagaimana mendistribusikan produk sambal pecel desa Dlemer. Saluran distribusi merupakan seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikan dari produksi ke konsumsi atau dari produsen kepada konsumen (Philip Kotler 1996).

Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh masyarakat desa Dlemer melalui pemasaran langsung ke tempat penjualan / toko, pasar, tempat wisata disekitar desa Dlemer yang juga dibantu mahasiswa KKN memasarkan ke kampus Universitas Trunojoyo Madura dan sekitarnya.

Kegiatan ini juga dilakukan dalam bentuk pembuatan media pemasaran online sederhana, misalnya melalui facebook, Instagram, dan *Whatsapp*. Pendampingan perluasan pemasaran juga dilakukan dengan diskusi tentang packing, strategi promosi, strategi menghadapi pesaing dan pemasaran online. Selain penjualan langsung, kelompok sasaran juga melakukan promosi melalui kelompok PKK tingkat kecamatan Arosbaya, dan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Arosbaya. Perluasan pemasaran dilakukan sendiri oleh PKK Desa Dlemer dengan membikin sample produk sambal pecel yang dijual dengan sistem konsinasi di warung dan sentra oleh-oleh khas Madura.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Program pendampingan usaha sambal pecel di Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan meliputi pelatihan produksi, pelatihan pengemasan, pelatihan manajemen usaha, penerapan teknologi pembuatan sambal pecel, dan pengembangan pemasaran.
2. Proses produksi sambal pecel yang diterapkan pada lokasi penelitian adalah dengan menggabungkan teknis pengovenan kacang tanah sebagai bahan baku utama, penyangraian bumbu, dan pencampuran bahan baku menjadi sambal pecel dengan menggunakan mesin penggiling tenaga listrik.
3. Usaha sambal pecel memiliki di Desa Dlemer Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan sebagai usaha komersial.

B. SARAN

1. Desa Dlemer memiliki potensi untuk dikembangkan usahanya dengan bahan baku kacang tanah yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan usaha dengan bahan baku tersebut secara optimal dan lebih baik.
2. Usaha sambal pecel yang baru dirintis perlu ditindaklanjuti dengan program selanjutnya agar usaha yang sudah ada lebih baik dan lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan penjualan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dlemer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai program KKN Pengabdian Masyarakat (KKN Abdimas) tahun semester genap 2018-2019 dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S.P.A., dan Mediaswanti, K.A., 2018. Peningkatan Nilai Produktivitas Usaha Bumbu Pecel Menggunakan Alat Sangrai Otomatis. *JAST : Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, 2 (2), 2018: 68 -73
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2018. Kabupaten Bangkalan dalam Angka Tahun 2018. <https://bangkalankab.bps.go.id/publication/2018/08/16/da10da0efd2c588504b17889/kabupaten-bangkalan-dalam-angka-2018.html>. diunduh tanggal 2 April 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019. Produksi Kacang Tanah di Jawa Timur Tahun 2007-2017. <https://jatim.bps.go.id/statistable/2018/10/29/1330/produksi-kacang-tanah-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-ton-2007-2017.html>. diunduh tanggal 2 April 2019.

- COREMAP & Departemen Perikanan dan Kelautan, 2016. Panduan Pengambilan Data dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA). Bina Marina Nusantara. Jakarta
- Faizah, A.A., dan Santoso. E.B., 2013. Arah Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Sampang. Jurnal TEKNIK POMITS 2(1): 2337-3539
- Handoko Agustinus, 2014. "Politik Sambal". KOMPAS, 4 April 2014.
- Kementerian Pertanian 2016. Petunjuk Teknis Pengelolaan Kacang Tanah dan Kacang Hijau 2016. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- Soekartawi & Soeharjo, A 2011, Ilmu usaha tani dan penelitian untuk pengembangan petani kecil, UI-Press, Jakarta
- Wijayanti. N., dan Purwatiningrum. I., 2016. Peningkatan Efisiensi Dan Kapasitas Produksi Pada Proses Pengolahan Sambel Pecel, Keripik Tempe Dan Keripik Singkong. Jurnal Teknologi Pangan Vol 7 (3): 131-138
- Yulifiant. R., Santosa. B.A.S., dan Widowati. S., 2016. Teknologi Pengolahan dan Produk Olahan Kacang Tanah. Monograf Balitkabi No. 13: 379-393.
- Philip Kotler, (1996). Manajemen Pemasaran. (Edisi ke-6 Jilid ke-2). (Penterjemah: Drs. Jaka Wasana, MSM). Jakarta: Erlangga.



PEMETAAN PENGEMBANGAN DESA TEMATIK DI KABUPATEN PACITAN

MAPPING OF THEMATIC VILLAGE DEVELOPMENT IN PACITAN REGENCY

Endriana Wahyu Alita¹, Yulianto P. Prihatmaji²,

Maharani Thalia Purwa Aditya³

Balitbangda Kab. Pacitan, Sekolah Lurah[®] Jogjakarta,

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

endriana2307@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui rumusan dan sinergi tema-tema unggulan dalam program desa tematik. Guna mencapai tujuan tersebut, akan dilakukan penggalan data dan informasi dari berbagai sumber melalui teknik, dan langkah-langkah yang tepat dengan tahapan yang telah disesuaikan dengan jadwal. Sehingga diharapkan dapat terwujudnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam pengembangan desa tematik di Kabupaten Pacitan. Adapun keluaran penelitian ini berupa Model Pengembangan Desa Tematik Di Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: pengembangan desa tematik, desa tematik

ABSTRACT

The objectives of this study are: To find out the formulation and synergy of the leading themes in thematic village programs. To achieve this goal, data and information will be extracted from various sources through techniques, and the right steps with the stages that have been adjusted to the schedule. So that it is expected to be utilized by various parties, both the Regional Government and stakeholders (stakeholders) related to the development of thematic villages in Pacitan Regency. The output of this research is in the form of Thematic Village Development Model in Pacitan District in accordance with the provisions of legislation as material for formulating regional government policies as material for formulating regional government policies.

Keywords: development of thematic villages, thematic villages

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sebagai fungsi penggerak, Pembina pengayom serta sebagai partisipasi masyarakat. Penyelenggaraannya desa dipimpin oleh Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa sedangkan Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana wilayah dan pelaksana teknis. dimana perangkat desa ini diangkat oleh warga desa. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, antara lain: terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional; terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan, dan sebagainya. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24).

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1) ditegaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Terkait hal tersebut diatas ada beberapa hal masalah yang harus dibenahi desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, beberapa masalah tersebut antara lain: terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional; terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Program pemberdayaan masyarakat saat ini telah banyak dilaksanakan seperti program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari keberhasilan dari program pemberdayaan. Namun, program pemberdayaan masyarakat sendiri belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Dilihat minimnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat disebabkan program yang bergulir belum bahkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dimana sumber daya manusia merupakan unsure penting dalam kesuksesan program ini.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan pada pasal 83 ayat (3) Bagian D menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi, yang masyarakatnya harus secara langsung ikut andil dalam proses pemberdayaan untuk kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai kesejahteraan bersama. Masyarakat sebagai pelaksana utama dalam pembangunan pengembangan desa merupakan bentuk pengembangan masyarakat (community development). Rubin, J. Herbert and Rubin, S. Irene (1992:6) mendefinisikannya sebagai berikut: 'Community Development involves local empowerment through organized groups of people acting collectively to control decisions, projects, program and policies that affect them as community'. Kelokalan budaya, bentang alam dan skema pemerintahan desa hingga pada tingkat individu atau komunitas merupakan warna dinamika pedesaan pada saat ini. Sehingga warna dinamika memunculkan terhadap konsep akademis dari perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan pada kawasan Perdesaan. Bercermin pada konsep kebijakan nasional tentang desa tersebut mengarah pada tiga pilar yakni pemerintahan (governance), pembangunan (rural development) dan pemberdayaan (empowerment).

Untuk mewujudkan pembangunan dari desa dilakukan oleh pemerintah patut diapresiasi dan tentunya dilaksanakan dengan konsep strategis untuk mencapai hasil yang optimal. Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa membangun desa mencakup upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Upaya upaya dalam membangun desa merupakan upaya menuju kemandirian sehingga mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya untuk mendukung tercapainya pembangunan desa dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga

implementasi program yang dilakukan dapat mendorong usaha ekonomi desa dalam arti luas. Dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat membuka akses produksi, distribusi, dan pasar bagi rakyat desa dalam pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat desa.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, maka dalam periode 2016-2021, visi Kabupaten Pacitan adalah: “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT” Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada. Sejahtera, mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Program Desa Tematik untuk pengembangan 171 desa-keurahan, dengan program Desa Tematik diharapkan dapat menjadi solusi dan alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan pengembangan desa ini diharapkan kesenjangan kesejahteraan yang terjadi antara kota dan desa lambat laun akan berkurang dengan pengembangan di wilayah pedesaan. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat membuka peluang pekerjaan untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya sendiri. Konsep kampung tematik menurut Idziak, Majewski, & Zmyslony (2015), lebih pada menawarkan masyarakat untuk terlibat proaktif, sehingga tidak hanya berbasis masyarakat akan tetapi juga penciptaan ruang kampung berciri khas yang berkelanjutan oleh masyarakat.

Pengembangan Desa Tematik merupakan bentuk pengembangan masyarakat (community development) untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, dimana kesadaran masyarakat didorong untuk menggali dan mengolah potensi desa hingga dapat dimanfaatkan. Program-program tematik yang diselesaikan dengan Dana Desa, Anggaran Dana Desa, Retribusi Desa dan lain-lain termasuk dukungan penuh dari APBD. dengan disinerjikan dengan dukungan keuangan lain dari kementerian, CSR, BEKRAF, filantropi, donor dari luar negeri dan lain-lain.

Target dan Luaran dari program desa tematik ini adalah Terwujudnya keswadayaan masyarakat yang mampu memetakan kebutuhan untuk pengembangan kawasan pedesaan secara mandiri, Terwujudnya pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang mampu mengelola dan memaksimalkan potensi desa, Terwujudnya masyarakat yang terampil yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, Terwujudnya sistem yang harmonis antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perencanaan dan rencana pengendalian fungsi kawasan pedesaan, dan Terciptanya transfer knowledge dari perangkat daerah kepada masyarakat ataupun penerusnya, sehingga tercipta pengembangan daerah yang berkelanjutan

Pelaksanaan konsep desa tematik memiliki tahapan yaitu tahapan pertama Seleksi dan pemetaan keunggulan dan potensi desa tematik, tahapan kedua pendampingan penyusunan village mapping dan village masterplan dan tahapan ketiga simulasi dan operasional program tematik desa. Berdasarkan tiga tahap pelaksanaan konsep desa tematik dapat dijelaskan bahwa desa tematik dapat berkembang atas kelayakan ide atau tema. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik ekonomi, sosial, adanya potensi lokal yang diangkat, dukungan keuangan dari pihak luar, inisiatif dari tokoh masyarakat, meningkatnya pendapatan, dan inisiatif dari masyarakat (Atkočiūnienė & Kaminaitė, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Kloczko-Gajewska (2014) menunjukkan bahwa kampung tematik yang berhasil merupakan kampung yang melibatkan kelompok masyarakat untuk dapat mengimplementasikan tema yang sesuai dengan kampungnya. Sebaliknya, kampung tematik dikatakan

tidak berhasil apabila dilihat dari ketidakikutsertaan masyarakat dalam implementasi tema sehingga akhirnya tema itu tidak dapat berjalan hingga ditinggalkan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini fokus pada pelaksanaan pemetaan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran maupun rekomendasi terkait dengan rumusan dan sinergi tema-tema unggulan dalam program desa tematik tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui model unggulan untuk desa tematik di Kabupaten Pacitan.

METODOLOGI

Waktu pelaksanaan adalah 4 bulan dari September sampai dengan Desember 2018 berlokasi berada di Kabupaten Pacitan. Dengan Pelaksanaan terdiri dari kegiatan, 1). Paparan desa tematik dan persiapan pemetaan, 2) Survei, observasi, wawancara, 3). Pemetaan dan penyusunan dokumen, dan 4). Penyusunan laporan dan paparan hasil pemetaan.

Daftar data yang diperlukan adalah: Daftar potensi dan keunggulan sumber daya manusia desa, Daftar potensi dan keunggulan sumber daya alam desa, Daftar potensi dan keunggulan subsektor ekonomi kreatif desa, Daftar pengembangan dan pembangunan jangka menengah desa, Daftar kegiatan pelaksanaan desa dan Daftar anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sumber data dalam program Desa Tematik ini adalah Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Kegiatan Pelaksanaan Desa (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Untuk informan yang disasar dalam program Desa Tematik ini adalah Kepala Kecamatan (Camat), Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Carik), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat/Pembangunan, Wanita Desa, Tokoh Desa (kelompok masyarakat-pokmas) dan Karang Taruna.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif dengan menggunakan desain penelitian kualitatif (Stebbins, 2001). Penelitian dengan pendekatan komparatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebuah fenomena sosial. Teknik pengumpulan data dengan Metode Wawancara Mendalam (indepth interview) Wawancara mendalam (indepth interview) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2005 : 186) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode pengolahan data yang berupa materi penilaian dari desa-desa yang meliputi: potensi desa dalam narasi tema besar, kendala yang perlu diwaspadai, dan usulan tema dan tahap pengembangannya untuk desa, akan dikompilasi, dikelompokkan dan diberi penilaian secara kuantitatif. Hasil kompilasi, klasifikasi dan penilaian diberikan penilaian kuantitatif secara deskriptif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah maupun dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2009).

Analisis Data Data-data akan dikelompokkan menurut klasifikasi sosial-ekonomi, kebudayaan dan kesenian, bentang alam dan potensi lingkungan, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain yang berhubungan erat dengan potensi dan keunggulan desa tematik. Pengelompokkan data-data tersebut akan diolah sesuai kapasitas dan potensi pengembangannya berdasarkan narasi tema, jejaring dukungan finansial, kolaborasi bantuan program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan/atau dari kementerian terkait. Analisis data yang dilakukan untuk menilai dan memberikan masukan atau susulan tema Desa Tematik akan dikelompokkan menjadi 9 penilaian sesuai Tabel 1. sebagai berikut:

Table 1. Penilaian Tema Desa Tematik

No	Penilaian
1.	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi usulan
2.	Pemahaman program desa tematik (<i>scale, goals, method</i>)
3.	Modal sosial (<i>community engagement</i>)
4.	Rekam jejak modal kegiatan awal tema (<i>initiative activities</i>)
5.	Kepemimpinan dan kerja tim (desa, warga dan kecamatan)
6.	Kejelasan dan logika narasi tematik desa
7.	Potensi unggulan tematik
8.	Rekam jejak dukungan financial untuk program (DD, ADD, APBD, CSR, etc)
9.	Dukungan mitra untuk kerjasama (training, financial, program, etc)

Sumber data : Penilaian Desa Tematik 2018

Masing-masing item penilaian seperti tergambar dalam Tabel 1 akan diberikan nilai angka sesuai pengelompokan pada Tabel .2 berikut ini:

Tabel 2. Kelompok Nilai

91-100	Istimewa
81-90	Unggul
71-80	Baik
61-70	Kelola
51-60	Bina

Sumberdata : Penilaian Desa Tematik 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pacitan merupakan Kabupaten yang terletak di pantai selatan Jawa dan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar (85% dari luas wilayah) berupa perbukitan serta merupakan kawasan ekokarst dengan letak geografis berada antara 110° 55' - 111° 25' Bujur Timur dan 7° 55' - 8° 17' Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasi dari Kabupaten Pacitan:

- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo

Secara Administratif Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 Kecamatan, meliputi : Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Sudimoro, Kecamatan Bandar.

Luas Kabupaten Pacitan adalah 1.389,87 Km² yang terdiri dari luas tanah sawah sebesar 130,15 Km² atau sekitar 9,36 persen dan luas tanah kering adalah 1.259,72 Km² atau sekitar 90,64 persen. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hujan yaitu sebesar 51,53 persen, dan sebagian besar dari tanah kering adalah untuk tanaman kayu-kayuan yaitu sebesar 35,89 persen.

Keberadaan 171 Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan relatif beragam dan lengkap. Dengan melakukan paparan proposal pengajuan pengembangan desa yang diajukan pada tiap kecamatan hal ini dilakukan untuk mendorong kreatifitas dan inovasi dari desa tersebut untuk mendukung kelestarian alam dan budaya local. Kabupaten Pacitan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta Sekolah Lurah Jogjakarta menindak lanjuti MOu Kesepakatan Bersama Nomor: 420/18/408.11/2017

dan Nomor: 1814/Rek/01/DPKA/VIII/2017 antara Rektor UII dan Bupati Pacitan dalam program desa tematik.

Pemetaan potensi dilakukan penjangkaran potensi desa dengan memaparkan potensi masing masing desa yang diajukan oleh kecamatan masing masing dengan didampingi dari kecamatan, aparatur desanya, karang taruna, wanita desa, kelompok masyarakat dan sekretaris desa atau kepala urusan pembangunan/ kesejahteraan. Dengan melibatkan banyak aktor dalam pemaparan proposal desa tematik ini dilakukan dalam forum sehingga usulan desa tematik dapat dibahas dan disepakati secara bersama-sama. Restu dalam tulisannya menyatakan bahwa Dalam pengembangan suatu desa wisata, tentu tidak terlepas dari peran berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat dan swasta. Pentingnya peran antar aktor tersebut dalam pengembangan desa wisata karena masing-masing aktor memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda sesuai dengan posisinya (Restu, 11:2016). Adapun ke-12 desa terpilih dari 12 kecamatan adalah sebagai berikut: Desa Ngromo Kecamatan Nawangan, Desa Bangun Sari Kecamatan Bandar, Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo, Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro, Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo, Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan, Desa Widoro Kecamatan Donorojo, Desa Pelem Kecamatan Pringkuku, Desa Gondosari Kecamatan Punung, Desa Katipugal Kecamatan Kebonagung, Desa Gunung Sari Kecamatan Arjosari, dan Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan untuk berdialog, diskusi dan memastikan kesiapan masing-masing stakeholder pengembang desa.

Hasil kunjungan untuk menentukan nilai prioritas sehingga kemudian dapat ditarik gambaran mengenai potensi desa yang akan diangkat. Setelah pemetaan potensi, tahapan selanjutnya adalah penentuan desa yang akan melakukan pendampingan untuk Program Desa Tematik. Tahapan penentuan desa yang akan melakukan pendampingan program desa tematik berdasarkan nilai penjangkaran dengan Paparan usulan program Desa Tematik dan kunjungan ke desa yang diusulkan atau yang melakukan paparan yang ditunjuk oleh masing masing kecamatan, Pedoman untuk penilaian Usulan Desa Tematik adalah deskripsi keadaan masing-masing desa untuk materi terhadap 3 komponen yaitu Potensi desa dalam narasi tema besar, Kendala yang perlu diwaspadai dan Usulan tema dan tahap pengembangannya untuk desa. Dengan penentuan tema desa yang diusung merupakan hasil kesepakatan desa itu sendiri dengan melibatkan berbagai aktor termasuk masyarakat dengan maksud untuk menjaring potensi lokal dari suatu wilayah baik dari aspek sosial maupun ekonomi sehingga potensi akan digunakan sebagai tema desa yang diharapkan kedepan pada saat pelaksanaan akan dapat memberikan pengaruh maupun kontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.

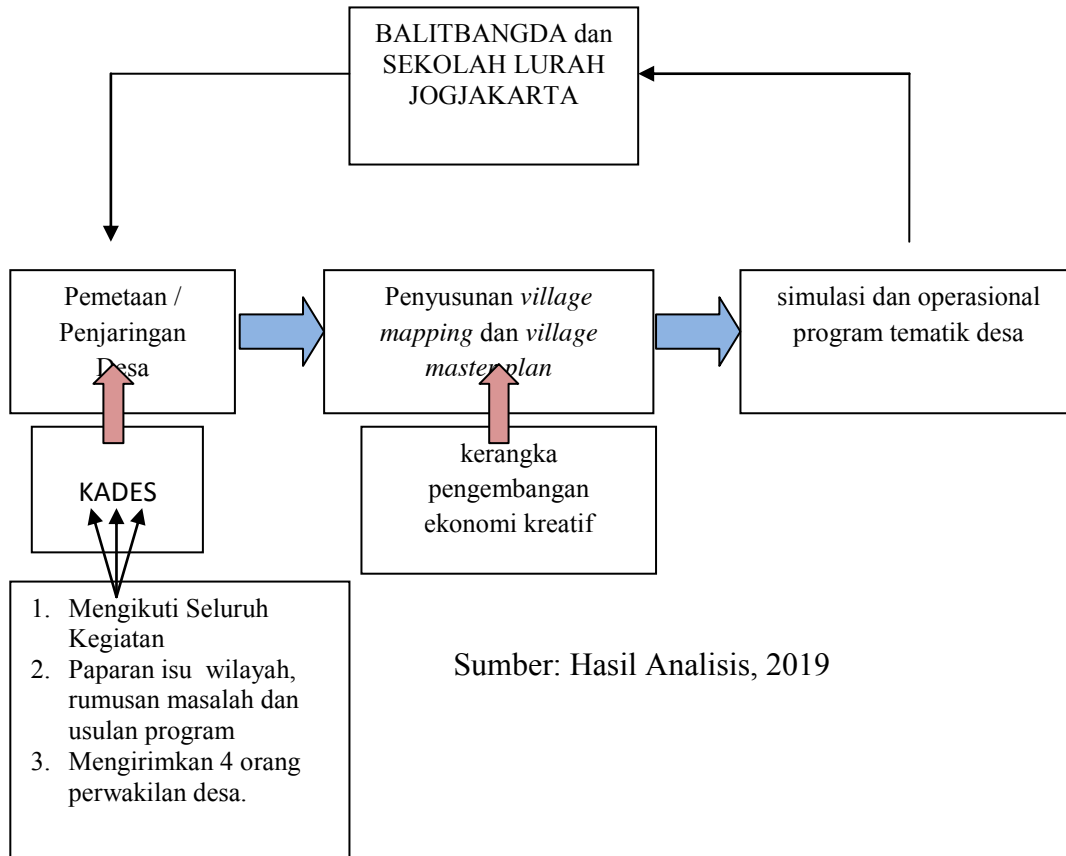
Tahapan berikutnya setelah penjangkaran desa adalah pendampingan penyusunan village mapping dan village masterplan. Tahapan pendampingan penyusunan village mapping dan village masterplan merupakan tahapan yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu, dalam target tertentu dan dengan pendekatan sesuai karakter dan kekuatan desa masing-masing. Pendampingan penyusunan gagasan dan keinginan serta masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa secara partisipatif, komunikatif, terintegratif dan evaluatif. Suripan menyatakan bahwa Pengabdian kepada masyarakat menuntut curahan waktu yang cukup agar apa yang menjadi tujuan dan output yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal (Suripan : 91:2017).

Village Mapping akan disempurnakan dan didampingi untuk diwujudkan dalam Masterplan Desa tahun 2020, dalam rentang 5, 10, 15 sampai 25 tahun mendatang. Masterplan yang dikembangkan bukan bersifat teknis, namun lebih berkarakter program, berkurikulum dan mengajak masyarakat terlibat dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif.

Tahapan setelah penyusunan village mapping dan village master plan adalah simulasi dan operasional program tematik desa. Tahapan ini merupakan bagian akhir dari tahapan desa tematik ini

setelah penyusunan village mapping dan village master plan apabila kedua tahapan diatas telah dilaksanakan.

Tahapan pelaksanaan program desa tematik adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2019

Proses pelaksanaan desa tematik di Kabupaten Pacitan berjalan sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan tujuan dikarenakan Kurang terintegrasinya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh SKPD pada objek desa/kelurahan dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam menyusun dan mengembangkan perencanaan dan dokumennya di desa/kelurahan masing-masing. Hal tersebut terjadi setiap paparan yang dilakukan oleh desa belum memiliki rencana lebih jauh dengan membuat program-program bagi pihak eksternal. Desa seharusnya membuat program yang lebih besar yang juga dapat ditawarkan ke luar. Dalam hal ini pihak pemerintah yaitu Balitbangda Kabupaten Pacitan selaku penyelenggara kegiatan sudah melaksanakan FGD tahap awal sebelum paparan akan tetapi tingkat kehadiran dari pihak kecamatan belum menguasai materi yang diberikan oleh tim. Terkait konsep desa tematik. Pada saat itu, hal utama yang ditekankan mengenai desa tematik adalah setiap desa mengangkat potensi lokal baik dari segi sosial maupun ekonomi melalui kesepakatan masyarakatnya. Penelitian terdahulu terkait implementasi desa tematik melakukan pendekatan dengan menggunakan konsep ‘tumbu oleh tutup’, kolaborasi antara *bottom up approach* dan *top down mandatory*. Gerilya mencari tokoh-tokoh penggerak pengembangan desa sembari mencari slot lentingan birokratik, administratif dan finansial. Terlalu *bottom up* membuat perjalanan lebih lamban dan kemanfaatannya kurang. Lebih condong *top down* pendekatannya kurang bergizi dan cenderung di menara gading. Namun, pola pendekatan *top - down* seringkali dianggap kaku dan kurang didasarkan pada pertimbangan yang berakar pada kebutuhan masyarakat lokal (Suradisastra, 2008). Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan tema maupun implementasi dapat berimbas pada hasil

program/kegiatan yang lebih responsif. Namun, pola maupun pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal yang didorong sebagai landasan pelaksanaan kampung tematik digantikan seluruhnya dengan pola dan pendekatan yang disesuaikan dengan waktu serta tuntutan kebutuhan masyarakat (Anindya dkk, 47-2018).

Pembahasan untuk masing-masing desa dari perwakilan 12 kecamatan sudah dilakukan pada tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

a. Desa Ngromo | Kecamatan Nawangan

Usaha rumah tangga yang akan dikembangkan nampaknya sederhana tetapi mempunyai potensi kuat karena didukung oleh komunitas. Perlu lebih dikembangkan pada kualitas produk dan derivasinya sehingga tidak menjadi klise atau produk yang sama dengan yang lain. Dukungan modal sosial maupun kepemimpinan tampak cukup kuat walau tetap perlu peningkatan pengetahuan terkait dengan produk yang ditawarkan baik dari sisi proses pengolahan, peralatannya maupun hasil produknya (low fat, low cholesterol dll).

Desa Ngromo mengusulkan menjadi sentra industri makan kecil, terutama Sermier, Kripik Pisang, dan Rengginang. Pada saat ini terdapat 3 kelompok perajin yang terdiri dari 15 orang. Jumlah ini diyakini dapat berkembang. Bahan baku berasal dari Desa Ngromo sendiri, oleh karena itu pemerintah desa yakin dapat memanfaatkannya dan mengembangkan usaha. Pemerintah desa, melalui Kepala Desa dan diamini oleh Camat Nawangan mengusulkan dana Rp. 137.550.000. Dana ini digunakan untuk pembinaan atau pelatihan masyarakat lain yang belum terlibat, untuk pengadaan alat-alat untuk produksi, dan untuk pengurusan legalitas usaha. Namun tidak ada data pemetaan potensi lain maupun data jumlah bahan baku yang tersedia.

Desa Ngromo perlu mencari pembeda produk desa Ngromo dengan produk yang sudah ada di pasar. Jika tidak ada beda atau kekhasan, maka pemasaran dapat menjadi kendala. Disamping itu, pemerintah desa juga perlu mengidentifikasi tanggapan warga dengan ide yang ditawarkan. Apakah akan banyak warga yang akan ikut memproduksi makanan kecil tersebut? Jika selama ini produksi makanan kecil sudah dianggap prospektif, mestinya sudah banyak warga yang ikut berusaha. Pemerintah desa juga berencana mengembangkan BUMDes untuk membantu pengusaha makanan kecil ini nantinya. BUMDes memang potensial menjadi penyedia bahan baku atau pemasar produk-produk desa. Namun demikian peran BUMDes perlu diperjelas dan diharapkan menjadi koordinator atau paling tidak BUMDes tidak menimbulkan konflik antarpengusaha.

Desa Ngromo perlu melakukan pemetaan potensi dengan lebih detil. Berbasis pada kondisi riil, pemerintah desa perlu lebih fokus. Mungkin desa dapat mengembangkan satu jenis makanan saja dulu, yang potensinya dianggap terbesar. Namun di sisi lain juga perlu mencari sebuah tema besar yang akan dikembangkan. Desa tidak hanya berhenti menjadi penghasil produk makanan kecil, tetapi perlu mencari potensi lain. Misalnya desa menghasilkan pisang dalam jumlah besar, maka dicari produk olahan lain selain kripik. Desa juga perlu mengidentifikasi jenis pisang apa yang baik untuk tumbuh di desa. Disamping itu perlu dicari potensi daya tarik lain dari pohon pisang. Demikian juga jika hasil terbesar dari desa adalah singkong atau ketan.

b. Desa Bangun Sari | Kecamatan Bandar

Usulan potensi desa berbasis ikan tampak belum didasari oleh kajian dan data yang cukup meyakinkan. Memang masyarakat dilaporkan telah mempunyai kolam ikan yang didukung oleh bantuan dan program sebelumnya, namun tampak kendala sumber air masih cukup dominan. Sebagai tema besar tampaknya masih perlu dieksplorasi lebih dalam potensi yang lain yang barangkali lebih kuat daripada potensi ikan tersebut. Proposal yang berbasis pada pengembangan pakan ikan tampak cenderung bersifat individual dan belum menunjukkan dengan kuat keterlibatan dan dampak kolektif yang diharapkan. Memang ada potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan menjadi penyedia bagi

masyarakat luas namun perlu diyakinkan bahwa dukungan program desa tematik ini menjangkau lebih banyak unit keluarga dan tidak hanya untuk satu pihak tertentu saja.

Desa Bangunsari mengusulkan tema perikanan sebagai keunggulan desanya. Ide ini berangkat dari upaya yang pernah dilakukan agar desa swasembada ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing. Saat ini menurut Ketua BPD Desa, semua keluarga memiliki kolam. Namun kendala pakan ikan selama ini dianggap menjadi penghalang berkembangnya usaha ini. Oleh karena itu, desa mengusulkan untuk menjadi sentra penghasil pakan ikan air tawar. Pakan ini setidaknya akan dikonsumsi secara internal oleh usaha perikanan warga. Selama ini desa tergantung supplier luar untuk pakan ikan ini. Namun demikian Ketua BPD (Bpk. Muryono) sudah menginisiasi produksi pakan ikan dengan komposisi bahan buatan sendiri. Desa mengusulkan biaya 700 juta rupiah untuk pembelian alat-alat dan bahan baku.

Peran Bpk. Muryono sangat besar dalam pengusulan ide ini. Beliau yang mempresentasikan ide ini, bukan kepala desa. Bahkan muncul kesan bahwa ini adalah usaha pribadi yang ingin disebarluaskan kepada warga lain melalui program ini. Namun demikian perlu diidentifikasi tanggapan dari warga atas ide ini. Selain itu, desa juga perlu mencari tema yang lebih besar dari tema usaha pakan ikan. Mungkin peternakan ikan dapat menjadi tema besar, dimana usaha pakan ikan menjadi salah satunya. Desa juga perlu mencari cara agar pakan ikan yang diproduksi tidak hanya untuk konsumsi sendiri, melainkan dapat dipasarkan ke luar desa.

Keputusan desa untuk mengangkat tema tertentu harus berdasar pemetaan potensi desa. Warga harus dilibatkan juga dalam sebuah rembug warga, sehingga keputusan akan didukung dan dijalankan bersama oleh warga. Keputusan desa juga harus dilembagakan dalam rencana pembangunan desa (RPJMDes) dan anggaran desa (APBDes). Orientasi tema desa seharusnya tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, tetapi juga menarik pengunjung datang atau pemasaran ke luar dari desa.

c. Desa Kasihan | Kecamatan Tegalombo

Potensi desa yang berbasis alam tampak cukup bervariasi suguhanannya namun masih “kehilangan” tema yang kuat dan cenderung dengan model yang monoton. Potensi wisata pengetahuan air/ hidrologi tampak kuat namun perlu kreativitas tinggi untuk menciptakannya serta didukung oleh upaya kuat untuk melakukan konservasi lahan. Dukungan komunitas tampak cukup baik utamanya para pemuda yang diharapkan menjadi penggerak utama pengembangan desa air ini bila konsep konservasinya dapat diterima.

Desa dikaruniai potensi sungai dan sumber air yang bagus. Desa Kasihan ingin mengangkat tema Wisata Air dalam program ini. Selain itu, kebun bambu juga terdapat di desa ini. Melalui program ini, desa mengusulkan perbaikan sarana dan pengembangan wahana wisata air. Sumber air yang ada masih dapat ditampung dalam kolam atau wahana khusus. Sumber air tersebut juga dapat diolah menjadi air kemasan.

Desa perlu hati-hati dalam memanfaatkan sumber air. Meskipun saat ini berlimpah, namun jika tidak dimanfaatkan secara bijaksana akan berbahaya. Desa juga harus menjaga agar komersialisasi sumber air menjadi air kemasan tidak jatuh kepada perusahaan-perusahaan besar. Dikhawatirkan warga justru tidak mendapat manfaat terbesarnya. Demikian pula dengan pemanfaatan sungai dan potensi alam lain. Desa harus memperhatikan kelestariannya.

Desa dapat membuat sebuah cerita menarik dari potensi alam yang ada. Siklus air dapat digambarkan secara utuh di desa Kasihan ini. Ini akan menjadi edukasi yang bagus dan langsung dapat diamati. Sementara eksplorasi potensi alam perlu diidentifikasi. Bambu yang ada dimanfaatkan untuk apa? Wisata air dan pendukungnya juga perlu diidentifikasi. Warga masyarakat harus dilibatkan dalam proses ini, sehingga pemerintah desa dapat menarik dukungan warga. Selanjutnya program harus

dimasukkan dalam RPJMDes dan APBDes. Desa juga dapat membentuk BUMDes untuk mengelola dan mendukung.

d. Desa Sukorejo | Kecamatan Sudimoro

Ide untuk mengembangkan Wana Wisata tampak kuat dan didukung dengan kepemimpinan Kades baru yang tampak telah mempunyai dukungan komunitas pemuda dan keahlian yang cukup baik. Potensi kerjasama dengan PLTU yang telah mulai digarap tampak sangat menjanjikan. Rencana “masterplan” juga telah ada walaupun perlu kreativitas lebih dan desain yang prima agar mampu menjadi daya tarik yang kuat. Dari sisi potensi alam maupun sosial konsep Wana Wisata tampak telah cukup meyakinkan walaupun konservasi lahan menjadi kendala yang perlu diperhatikan.

Desa ini mempunyai potensi yang luar biasa. Disamping mempunyai hutan yang masih cukup luas, desa juga mempunyai spot dengan panorama sunset, sunrise, dan PLTU. Desa telah membagi kawasan wisata menjadi 5 zona. Saat ini desa mempunyai kawasan wisata yang telah disiapkan, dengan nama Cagak Telu. Nama ini berasal dari adanya tiang listrik 3 unit berjajar. Di kawasan tersebut sudah ada kios makan, toilet dan pintu gerbang. Kawasan ini telah dimanfaatkan warga dan pengunjung yang ingin melihat panorama dari puncak bukit, berkemah di hutan, ataupun juga beberapa kali dipakai oleh rombongan pengendara trail untuk menjelajah hutan. Desa mengangkat tema Wana Wisata Cagak Telu. Desa ingin mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan wisata yang mencakup 5 zona.

Kawasan wisata ini memang potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, desa perlu mengembangkan tema tertentu yang lain daripada yang lain. Dengan menawarkan tema yang berbeda, akan lebih mempermudah diterima oleh masyarakat dan pengunjung. Desa seharusnya tidak berfokus pada menarik wisatawan ke kawasan tersebut sebanyak mungkin. Kehadiran wisatawan juga seringkali diikuti dengan adanya permasalahan sampah dan juga kerusakan lingkungan. Luasnya kawasan wisata yang meliputi 5 zona beresiko sulitnya pengawasan dan pengelolaan kawasan. Desa juga perlu memikirkan sarana yang dan tema besar yang menghubungkan semua zona. Zona 5 yang berupa kawasan perkebunan singkong perlu dipikirkan ulang, karena tidak selaras dengan zona yang lain.

Desa perlu membuat tema tertentu, misalnya wisata hutan sehingga tema ini mewarnai semua fasilitas dan menjadi penawaran utama bagi wisatawan yang berkunjung. Tema tersebut mencakup semua zona yang ingin dikembangkan dan menjadi sebuah cerita besar. Pengembangan kawasan harus dimasukkan dalam RPJMDes. Mengingat luasnya kawasan yang ingin dikembangkan, desa juga bisa membuat rencana pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang. Di samping itu, desa dapat menarik mitra dari manajemen PLTU dalam pengembangan kawasan.

e. Desa Hadiwarno | Kecamatan Ngadirojo

Inisiatif desa Sukorejo untuk mengembangkan konservasi penyu sangat perlu diapresiasi. Dukungan kepemimpinan yang relatif kuat dan sevisi tampak menjadi latar belakang yang kuat. Namun demikian, diperlukan pengelolaan dan komunikasi yang lebih intensif berkaitan dengan aspek legalitas tata ruang supaya tidak terjadi konflik. Saat ini lokasi penyu tidak masuk dalam zona konservasi dan ke depan sangat mungkin akan diinstrumentasikan menjadi zona konservasi melalui RDTR atau RTRW. Apabila hal ini terjadi maka perlu ada desain yang komprehensif agar tidak terjadi konflik antara aspek legalitas dengan aspek ekonomi serta sosial. Diusulkan untuk tetap berfokus pada desa konservasi penyu berbasis komunitas, artinya walaupun tidak ada instrumen hukum (misalnya dalam tata ruang) model konservasi ini diharapkan tetap berjalan dan diperkuat. Tema ini diharapkan menjadi model yang dapat ditularkan ke komunitas lainnya. Pengembangan inisiatif untuk memperkuat ekonomi desa harus dirancang dengan seksama agar aspek konservasi tidak hilang.

Desa Hadiwarno mempunyai empat pantai yang menarik dan selama ini telah dikunjungi wisatawan. Di salah satu pantai tersebut terdapat balai konservasi penyu laut. Mengingat bahwa penyu merupakan hewan yang dilindungi dan tidak semua pantai menjadi tempat bertelur penyu, desa ingin

mengembangkan wisata konservasi penyu sebagai tema desa. Desa telah mengembangkan wisata tambahan, yaitu flying fox di atas kawasan konservasi penyu. Desa juga telah mempunyai usaha souvenir bertema konservasi penyu yang dijual kepada para pengunjung.

Keberadaan konservasi penyu perlu diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen RTRW. Pengembangan kawasan harus disesuaikan dengan peruntukan kawasan tersebut. Tema konservasi penyu sebenarnya adalah tema yang menarik, karena tidak banyak pantai yang dapat dijadikan konservasi. Namun demikian, mengingat bahwa penyu tidak bertelur sepanjang waktu, maka perlu diidentifikasi potensi wisata lain yang ditawarkan. Aktivitas konservasi juga perlu didukung oleh SDM yang mumpuni. Di samping itu, desa perlu berhati-hati dalam menarik wisatawan ke pantai-pantai yang saat ini sudah semakin diminati. Jika jumlah dan perilaku wisatawan tidak bisa dikendalikan, dikhawatirkan justru akan mengganggu keberadaan penyu.

Desa dapat mengembangkan konservasi penyu dengan menarik mitra-mitra yang memiliki kapabilitas dan perhatian terhadap hal ini. Organisasi lingkungan, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu pengembangan SDM lokal. Organisasi lingkungan maupun masyarakat internasional (melalui crowdfunding, misalnya) juga dapat berkontribusi dalam pendanaan. Desa diharapkan melakukan pemetaan potensi lain yang mendukung keberadaan konservasi penyu yang telah ada. Pengunjung dapat ditawarkan aktivitas-aktivitas maupun produk-produk. Disamping itu, desa juga perlu membuat informasi berkaitan dengan waktu-waktu penyu datang ke pantai dan bertelur serta aktivitas-aktivitas konservasi penyu.

f. Desa Ngumbul | Kecamatan Tulakan

Desa Digital Ngumbul tampaknya telah mulai muncul sebagai branding. Namun demikian, karena didasari prakarsa individual maka upaya untuk menjadi gerakan komunitas perlu terus dikembangkan. Walaupun demikian, kekhasan potensi wilayah dan budaya perlu tetap dicari dan dipetakan agar desa digital ini dapat pula berkembang seimbang antara kemampuan “layanan dan informasi berbasis digital” di satu sisi dengan kondisi masyarakat dan alam di sisi lain. Oleh karena itu usulan yang terlalu spesifik ke arah perkuatan digital justru agak lemah di lihat dari integrasi ini karena belum didukung dengan potensi lainnya.

Desa Ngumbul mengusulkan tema Desa Digital dalam program ini. Desa ini telah merintis program desa digital ini sejak 2016 dan telah beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam bidang penerapan teknologi informasi untuk pengelolaan pemerintahan desa. Melalui program ini, desa merencanakan menguatkan sarana sistem informasi untuk meningkatkan koneksi, serta menguatkan sumber daya manusia dalam bidang sistem informasi. Desa ingin mengembangkan sistem informasi desa dengan data penduduk yang lebih lengkap untuk penyelenggaraan pemerintah desa maupun komunikasi pemdes dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

Tema yang ditawarkan lebih bersifat pengembangan dan perbaikan sistem internal pemerintahan desa. Desa belum memiliki rencana lebih jauh dengan membuat program-program bagi pihak eksternal. Desa seharusnya membuat program yang lebih besar yang juga dapat ditawarkan ke luar.

Media digital sebenarnya juga amat bermanfaat untuk menawarkan potensi desa bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, desa perlu mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat ditawarkan. Pemetaan potensi dan pembuatan tema yang lebih komprehensif perlu dilakukan. Internet dan dunia maya dapat menjadi alat mengakselerasi perkembangan program yang dibuat. Namun jika desa digital tetap menjadi tema sentral, maka desa perlu membuat aktivitas-aktivitas yang menarik. Mungkin desa dapat membuat workshop pembuatan web, workshop media sosial, atau workshop lain yang dibutuhkan warga desa maupun warga masyarakat di daerah Pacitan dan sekitarnya. Jasa-jasa yang berkaitan dengan dunia maya juga menarik untuk ditawarkan kepada pemerintah desa lain, BUMDes, dan perseorangan. Misalnya jasa pembuatan web, jasa konsultasi, dan sebagainya.

g. Desa Widoro | Kecamatan Donorojo

Potensi desa berbasis kelapa tampak sangat menonjol dan didukung oleh potensi lainnya termasuk di dalamnya adalah keguyuban sebagai modal sosial. Dari paparan tampak bahwa ada keinginan kuat dari masyarakat untuk mengembangkan model edukasi berbasis desa melalui potensi alam dan masyarakatnya. Model “Cocoland” atau Desa Gula Kelapa sangat potensial untuk dibangun dengan mengedepankan pendidikan dan upaya membangun keunikan pemanfaatan pohon kelapa.

Dengan potensi desa yang luar biasa berupa pantai, perkebunan, industri gula kelapa tradisional, sampai goa-goa yang masih belum banyak dieksplorasi, Desa Widoro menawarkan tema Desa Wisata Edukasi. Desa Widoro juga merupakan desa yang masih asri dengan budaya masyarakat yang masih dekat dengan alam dan suasana kekeluargaan antarwarga. Ada keinginan kuat dari warga untuk menjaga kondisi alam, suasana pedesaan, dan keakraban warga. Masyarakat desa masih kental dengan budaya gotong royong ketika membangun rumah, ketika panen maupun aktivitas lainnya. Tidak hanya pemerintah desa, salah satu pemuda desa yang hadir ketika presentasi juga mengemukakan keinginan yang sama. Hal ini patut diapresiasi dan didukung.

Tema Desa Wisata ini sebenarnya tema generik. Desa perlu lebih fokus mengembangkan tema yang ditawarkan. Desa dapat memilih salah satu tema yang paling potensial, dikembangkan dan selanjutnya pada waktunya nanti mengembangkan tema lain. Jika desa tidak fokus, dikhawatirkan justru tidak ada program yang menonjol dan berbeda dengan desa wisata pada umumnya. Keunikan menjadi kata kunci yang harus dicari oleh desa agar lebih marketable.

Tema kelapa sangat berpotensi menjadi tema sentral. Saat ini di Desa Widoro terdapat sekitar 50 pohon di setiap kepala keluarga. Dengan potensi ini, desa perlu memetakan aktivitas dan produk yang berkaitan dengan kelapa. Aktivitas mulai dari menanam bibit, panen hingga aktivitas pemanfaatan bagian-bagian dari kelapa sangat berpotensi dikembangkan menjadi aktivitas yang ditawarkan kepada pengunjung. Kelapa juga dikenal sebagai pohon yang berguna dari akar hingga daun. Oleh karenanya produk-produk yang bisa dihasilkan dan dijual oleh warga desa juga perlu dipetakan. Disamping itu, produk kuliner hasil dari kelapa juga dapat menjadi potensi besar. Industri gula kelapa yang saat ini sudah ada bisa dikembangkan menjadi lebih modern dengan memperhatikan keinginan pasar internasional. Tema lain yang menjadi alternatif adalah goa, yang di dalamnya terdapat stalagtit dan stalagmite. Desa dapat mengembangkan wisata geologi. Namun hal ini perlu didukung SDm yang mumpuni.

h. Desa Pelem | Kecamatan Pringkuku

Komoditas tembakau yang diusulkan potensial menjadi dilema. Di satu sisi memang dapat berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Di sisi lain model tata kelola berbasis “kartel” perusahaan dan ancaman tren global dapat membawa runtuhnya komoditas ini. Intinya lantas tidak ada kemandirian bagi desa. Perlu alternatif untuk mengembangkan tembakau ini melalui diversifikasi manfaat (sebagai repellent, atau obat, walau demand mungkin masih rendah). Dapat pula justru mengembangkan pupuk organik sebagai tema utama karena pada dasarnya masyarakat telah mempunyai latar belakang yang cukup kuat. Potensi budaya dapat dipakai untuk memperkuat keduanya.

Desa Pelem sudah dikenal sebagai penghasil tembakau. Hasil tembakau ini sudah diborong oleh PT. Sadana Arif Nusa dari Ponorogo. Penentuan tanaman tembakau sebagai unggulan desa sebenarnya telah melewati proses yang cukup panjang. Sebelumnya desa mencoba mengembangkan semangka sebagai produk unggulan. Namun usaha ini kurang berhasil karena sistem penyediaan pupuk yang belum mendukung. Namun demikian, saat ini masih ada warga yang menanam semangka. Dalam kaitannya dengan PT. Sadana Arif Nusa, desa ini menjual seluruh hasil tembakau kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya perusahaan tersebut menjual ke PT. Sampoerna. Warga sangat nyaman dengan

hasil tanaman tembakau ini dan berharap masih dapat diandalkan di masa depan. Melalui program ini, desa mengusulkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengolah tembakau.

Saat ini terdapat kecenderungan global untuk mengurangi produksi rokok dan mengkonversi petani tembakau menjadi petani tanaman lain. Hal ini patut diwaspadai. Desa harus mencari alternatif lain. Desa juga tidak boleh tergantung pada pihak lain, dalam hal ini PT. Sadana Arif Nusa. Hasil tembakau desa Pelem yang saat ini 100% disetorkan ke PT. Sadana juga perlu diubah.

Desa dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau mencari informasi dari sumber lain untuk mengidentifikasi manfaat tembakau selain untuk produk rokok. Hasil olahan tembakau lain dapat menjadi alternatif dan mengurangi ketergantungan. Desa juga perlu mengembangkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan tanaman tembakau yang dapat ditawarkan kepada para pengunjung.

i. Desa Gondosari | Kecamatan Punung

Presentasi tampak kuat konsepnya namun kurang lengkap dari sisi data dan analisis. Tema yang diangkat yaitu konservasi tanaman buah lokal sangat menjanjikan walaupun kendala terbesar kemampuan untuk diduplikasi keberhasilan maupun visinya perlu diupayakan dengan sangat kuat. Tanpa leadership dan ketelatenan yang kuat prospeknya perlu didukung dengan potensi desa yang lain. Namun sayang potensi ini kurang tampak dari presentasi.

Di Desa Gondosari terdapat dusun-dusun yang mengambil nama buah dan nama tanaman. Hal ini menginspirasi pemerintah desa untuk mengembangkan tema Desa Wisata Buah. Desa Gondosari, dengan tokoh Pak Bandung, saat ini sudah menanam pohon buah jeruk, nangka, sirsak, dan mangga. Disamping menjual buah, Pak Bandung juga sudah mengidentifikasi manfaat lain dari pohon-pohon yang ditanam, misalnya kayu nangka. Pak Bandung memiliki semacam padepokan untuk pengembangan buah-buahan yang ditanam. Pemerintah desa mengusulkan pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan peningkatan kapasitas SDM melalui program ini.

Wisata buah ini potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, desa perlu mengidentifikasi tanaman buah yang dapat dibudidayakan dengan baik. Buah-buahan ada yang tidak berbuah sepanjang tahun. Oleh karena sangat penting membuat pemetaan waktu yang tepat untuk panen buah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengunjung yang kecewa. Desa juga perlu mengantisipasi resiko hama. Desa dengan dibantu Pak Bandung harus mengedukasi warga, sehingga muncul Pak-Bandung-Pak Bandung lain. Desa tidak boleh tergantung pada figur tertentu saja.

Desa dapat menanam tanaman buah yang langka atau memiliki potensi pasar tinggi. Pemilihan jenis buah juga perlu diperhatikan waktu panennya. Desa dapat membuat semacam kalender panen buah. Disamping itu, desa bisa mengidentifikasi olahan-olahan buah yang dapat diproduksi. Sebaiknya buah tidak hanya dijual sebagai buah, namun ditingkatkan nilai tambahnya dengan diolah. Tidak hanya buahnya, mungkin daun, kayu atau bagian lain dari pohon yang dapat dimanfaatkan juga bisa diidentifikasi.

j. Desa Katipugal | Kecamatan Kebon Agung

Dari presentasi tampak bahwa potensi belum dapat digali dengan lengkap. Potensi alam (Ganjuran dll) belum dapat diungkap dengan baik. Indikasi adanya tanaman langka yang cukup langka di daerah tersebut sebenarnya berpotensi namun perlu dieksplorasi lebih dalam. Potensi budaya (pedalangan, wayang kulit dan karawitan) yang cenderung mulai menghilang perlu diupayakan untuk dihidupkan lagi. Apabila hal ini mungkin maka potensi budaya dan budidaya langka barangkali dapat menjadi embrio tema yang kuat.

Pantai Sangklehan dan Bukit Ganjuran berpotensi menjadi paket wisata yang menarik wisatawan. Bukit Ganjuran sendiri berpotensi menjadi tempat pengamatan rukyatul hilal. Tim Kementerian Agama telah melakukan survei di lokasi tersebut. Desa Katipugal juga memiliki potensi lain, yaitu keberadaan dalang dan perajin wayang kulit. Potensi yang lain yaitu keberadaan pohon yang

dianggap termasuk langka, yang disebut oleh masyarakat setempat pohon Langkap. Namun sampai saat ini desa belum mengeksplorasi manfaat pohon Langkap. Dari potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut, desa ingin menonjolkan wisata pantai Sangklehan dan Bukit Ganjuran sebagai tema utama. Melalui program Desa Tematik ini, Katipugal mengusulkan pembenahan sarana dan prasarana pantai dan bukit.

Desa Wisata berbasis Budaya yang diusulkan desa Katipugal perlu digali lebih dalam. Desa perlu mencari pembeda atau penciri dibanding tema serupa yang sudah banyak. Jika tidak ada pembeda, program ini berpotensi untuk tidak diminati masyarakat. Desa juga perlu membuat tema budaya yang ingin ditonjolkan. Apakah wayang kulit atau ada aktivitas budaya lain. Tema ini juga perlu diperhatikan keunikannya. Disamping itu, desa perlu mengidentifikasi potensi keikutsertaan masyarakat desa dalam program. Warga desa perlu dilibatkan dan ditumbuhkan rasa memiliki program yang diusulkan. Jika tidak, maka dukungan warga akan minimal dan berpotensi merugikan program.

Desa perlu melakukan pemetaan potensi dengan lebih mendalam. Dari pemetaan tersebut, maka desa dapat mempertajam program yang diusulkan. Sebaiknya desa tidak fokus pada wisata pantai yang generik. Dengan melakukan rembug warga, desa dapat menggali potensi sekaligus menarik dan menarik keterlibatan warga. Program yang diusulkan harus menjadi program desa yang dilembagakan dalam RPJMDes.

k. Desa Gunung Sari | Kecamatan Arjosari

Presentasi belum menunjukkan adanya usulan yang kuat. Modal tematis “gadung” masih bersifat individual dan belum menunjukkan upaya kolektif walaupun gadung menjadi bagian mata pencaharian masyarakatnya. Selain itu, tampaknya selain sebagai bahan makanan, potensi gadung masih perlu dikaji dengan mendalam kemanfaatannya agar mampu menjadi komoditas yang kuat diangkat sebagai tema.

Desa Gunungsari memiliki beberapa pengusaha kripik dan kukus umbi gadung. Para pengusaha tersebut masih memanfaatkan alat dan bahan yang sederhana. Kripik yang diolah dari tanaman yang beracun itu telah dipasarkan secara tradisional. Tanaman umbi gadung sendiri juga ditanam di desa Gunungsari. Tema kripik umbi gadung ini diusulkan menjadi tema desa. Dalam program ini, diusulkan pelatihan warga untuk mengolah umbi gadung menjadi kripik. Pengadaan alat-alat dan perijinan juga akan dilaksanakan dalam program ini.

Desa perlu mengeksplorasi pembeda kripik umbi gadung yang dihasilkan dibanding kripik-kripik sejenis yang sudah ada di pasar. Hal ini untuk meningkatkan daya saing produk. Desa juga perlu mengidentifikasi potensi keterlibatan warga. Berapa pengusaha atau kelompok warga yang akan memproduksi umbi gadung setelah program ini berjalan? Tema desa harus didukung warga desa.

Desa perlu menggali potensi umbi gadung selain diolah menjadi kripik. Perguruan tinggi dapat dijadikan mitra untuk mengeksplorasi pemanfaatan umbi gadung. Desa juga dapat bekerjasama dengan SMK Tata Boga dalam mengeksplorasi makanan olahan dari umbi gadung. Selain itu, desa juga perlu mengidentifikasi potensi tanaman umbi gadung yang ditanam di desa, baik segi kuantitas, lokasi penanaman dan lain-lain.

l. Desa Sirnobojo | Kecamatan Pacitan

Brand sebagai desa tangguh bencana tampak sudah sangat kuat. Keinginan untuk memperkuat tema dengan budidaya pengalengan hasil laut tampak menjanjikan apalagi didukung dengan kualitas hasil yang memang sudah dikenal baik (trasi, ikan asap dll.). Demikian pula dengan adanya festival sungai sudah menampilkan peta yang kuat. Hambatan yang mungkin muncul adalah para pengusaha lokal yang sangat mungkin dapat menganggap upaya ini sebagai pesaing. Oleh karenanya pengelolaan komunikasi warga menjadi kunci keberhasilan pengembangan tema tangguh bencana plus tangguh pangan ini.

Desa Sirnobojo mengusulkan tema Pengolahan Hasil Laut untuk Desa Tangguh Bencana. Walaupun desa ini tidak mempunyai pantai, tetapi desa melihat potensi hasil laut Kabupaten

Pacitan yang besar yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Selain olahan makanan segar, desa juga berencana membuat olahan yang awetan. Dengan olahan makanan awetan, desa berencana memasarkan secara lebih luas. Sedangkan berkaitan dengan desa tangguh bencana, desa telah memiliki program khusus. Desa telah membangun kewaspadaan bencana. Sarana jalur evakuasi, simulasi bencana sampai permainan-permainan untuk meningkatkan kesadaran potensi bencana telah dibuat.


Program yang diusulkan perlu lebih integratif. Hubungan antara pengolahan makanan laut dengan pengembangan desa tangguh bencana perlu lebih jelas. Hasil laut yang akan diolah perlu diidentifikasi, mengingat ada beberapa hasil laut yang tidak dapat diperoleh sepanjang tahun. Desa juga perlu mengembangkan kekhasan hasil olahan dibanding olahan yang telah ada agar lebih berdaya saing.

Pemerintah desa bersama warga (dapat juga dengan mitra-mitra yang relevan, seperti SMK Tata Boga) dapat mengidentifikasi potensi olahan yang dihasilkan. Pemerintah dapat membuat katalog dan disertai kalender makanan olahan hasil laut. Olahan tersebut dapat ditawarkan secara langsung kepada pengunjung maupun secara lebih luas secara daring/online (terutama makanan awetan).

Dari penjaringan desa tematik per kecamatan didapat Desa Siap Penyelenggara adalah desa yang dinilai siap untuk menyelenggarakan program tematik, yaitu desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro. kelompok ini dipandang mempunyai kesiapan, kapasitas, jaringan, dukungan sosial-alam-lingkungan dan budaya dan kemauan yang kuat.

Dengan jumlah sekor di dapat sebagai berikut table 3:

PENILAIAN USULAN DESA TEMATIK
Pengembangan Desa Tematik Kabupaten Pacitan dan Timur 2018

		Negroso, Kawangan Swatarya		Rojakuni Bangun Bani, Bandar Swatarya		Nila		Kashanan, Tegalombo Swatarya		Alam, Bair Swatarya		Suborojo, Radinoro Swatarya		Wana, Wetan Swatarya		Hadiwarno, Bagaditrojo Swatarya		Penyu		Ngumbul, Tulakan Swatarya		Dijital		Widoro, Donorojo Swasembada		Kelapa		Pelen, Pringuku Swasembada		Tembakaui Swatarya		Gondosari, Pnung Swatarya		Kantugal, Kibonagung Swasembada		Alam, Woyang Gunung Sari, Jarijari Swatarya		Gadung		Siroboyo, Pacitan Swatarya	
No	Penilaian	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12						
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1.	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi usulan	75	80	75	80	70	70	70	80	75	75	80	80	75	80	65	70	60	80	65	90	65	75	80	70	75	80	60	70	80	60	70	70	65	70	80	80				
2.	Pemahaman program desa tematik (scale, goals, method)	70	70	75	70	60	60	70	80	80	70	80	80	75	70	75	70	50	70	65	80	75	70	70	70	75	80	70	70	75	75	60	60	70	75	80	80				
3.	Modal sosial (community engagement)	70	70	75	70	60	60	70	80	75	75	80	80	75	70	80	70	60	75	70	90	80	75	70	75	70	70	70	75	70	75	65	60	70	75	70	75				
4.	Rekam jejak modal kegiatan awal (initiative activities)	70	80	75	75	60	70	65	70	75	70	80	75	75	85	75	80	60	80	75	80	75	75	80	70	70	80	65	70	70	60	75	60	65	75	80	85				
5.	Kepemimpinan dan kerja tim (desa, warga dan kecamatan)	65	80	75	65	50	65	70	80	75	70	70	80	75	70	80	75	70	75	70	90	80	75	75	70	70	70	70	75	70	65	60	70	70	70	70	85				
6.	Kejelasan dan logika hasil tematik desa	65	70	75	65	60	65	80	75	70	70	75	70	75	75	70	50	75	70	80	75	70	70	70	75	70	80	75	70	80	75	65	60	70	70	70	75				
7.	Potensi unggulan tematik	70	60	75	70	60	70	80	80	75	80	70	80	80	70	75	70	50	75	80	80	75	75	70	75	75	70	75	70	70	65	65	60	60	75	70	75				
8.	Rekam jejak dukungan finansial untuk program (DID, ADD, APBD, CSR, etc)	50	70	70	65	60	70	70	70	75	80	80	80	75	70	75	75	60	80	70	70	75	70	60	75	70	70	70	75	60	70	60	60	65	70	70	75				
9.	Dukungan mitra untuk kerjasama (training, financial, program, etc)	50	60	70	70	60	60	70	60	75	70	80	80	70	60	75	70	60	75	70	70	75	75	80	65	70	80	70	70	60	70	60	60	65	70	70	75				
JUMLAH		585	640	665	630	540	585	630	680	680	660	690	710	670	650	675	650	520	685	635	730	675	660	650	650	645	680	625	640	640	620	585	550	600	650	660	705				
Rata-rata		65	71.1	73.9	70	60	65	70	75.6	75.6	73.3	76.7	78.9	74.4	72.2	75	72.2	57.8	76.1	70.6	81.1	75	73.3	72.2	72.2	71.7	75.6	69.4	71.1	71.1	68.9	65	61.1	66.7	72.2	73.3	78.3				
TOTAL		70.0			65.0			73.7			76.3			73.9			68.7			75.6			72.6			72.2			70.4			64.3			74.6						
Rangking		9			11			5			1			4			10			2			6			7			8			12			3						

Sumberdata: hasil Penilaian Usulan Desa Tematik 2018.

Dari hasil penilaian dalam Tabel 4.1. diperoleh range nilai dari 64,3 terendah sampai 76,3 tertinggi. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu Kelompok Baik (nilai 71-80) sebanyak 7 desa dan Kelompok SIAP Kelola (nilai 61-70) sejumlah 5 desa. Kelompok Desa Siap Penyelenggara program tematik yaitu desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro didorong untuk menyelenggarakan Desa Tematik secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah daerah sesuai dengan tema unggulan yang diusulkan. Pendanaan bisa didapat dari Anggaran Dana Desa, Dana Desa, Retribusi Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Corporate Social Responsibility* dan sponsor dari lembaga swasta dan dukungan dari perguruan tinggi terkait.

Kelompok pertama adalah Desa Siap Penyelenggara program tematik, yaitu desa Sukorejo-Sudimoro, desa Widoro-Donorojo, dan desa Sirnobojo-Pacitan. Kelompok kedua adalah Desa Siap Pendampingan meliputi desa Hadiwarno-Ngadirojo, desa Kasihan-Tegal Ombo, dan desa Pelem-Pringkuku. Kelompok ketiga adalah Desa Siap Kelola yang meliputi desa Gondosari-Punung, desa Kantipugal-Kebon agung, dan desa Ngromo-Nawangan. Kelompok keempat adalah Desa Siap Bina yang terdiri dari desa Ngumbul-Tulakan, desa Bangun Sari-Bandar ,dan desa Gunung Sari-Arjosari. Secara lebih detail pengelompokkan desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 4. Hasil Penilaian dan Pengelompokkan Predikat Desa Tematik

No	Desa/Kecamatan	Nilai	Tema Unggulan	Kelompok	
1	Sukorejo, Sudimoro	76.3	Wana Wisata	BAIK	SIAP PENYELENGGAR A
2	Widoro, Donorojo	75.6	Kelapa		
3	Sirnobojo, Pacitan	74.6	Mitigasi dan Budaya		
4	Hadiwarno, Ngadirojo	73.9	Penyu		SIAP PENDAMPINGAN
5	Kasihan, Tegal Ombo	73.7	Alam dan Air		
6	Pelem, Pringkuku	72.6	Tembakau		
7	Gondosari, Punung	72.2	Buah	KELOLA	SIAP KELOLA
8	Kantipugal, Kebon Agung	70.4	ALAM & WAYANG		
9	Ngromo, Nawangan	70.0	Rujakuni		
10	Ngumbul, Tulakan	68.7	Dijital		SIAP BINA
11	Bangun Sari, Bandar	65.0	Nila		
12	Gunung Sari, Arjosari	64.3	Gadung		

KESIMPULAN

Dari penjarangan desa tematik per kecamatan didapat 12 desa diperoleh range nilai dari 64,3 terendah sampai 76,3 tertinggi yang dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu Kelompok Baik (nilai 71-80) sebanyak 7 desa dan Kelompok SIAP Kelola (nilai 61-70) sejumlah 5 desa. Desa Siap Penyelenggara adalah desa yang dinilai siap untuk menyelenggarakan program tematik, yaitu desa Sukorejo-Sudimoro, desa Widoro-Donorojo, dan desa Sirnobojo-Pacitan. Desa-desa dalam kelompok ini dipandang mempunyai kesiapan, kapasitas, jaringan, dukungan sosial-alam-lingkungan dan budaya dan kemauan yang kuat.

SARAN

Potensi desa yang ada dan beragam perlu disinergikan dengan rencana yang sudah ada, sedang dilaksanakan dan akan dilakukan dalam rencana pengembangan yang terencana, terukur dan sistematis. Potensi desa perlu dipetakan berdasarkan kekhasan dan keunggulan desa Sukorejo. Pemetaan yang disarankan adalah berdasarkan:

- Akses, lokasi dan peta desa
- Bentang alam dan saujana desa
- Perternakan dan lingkungan
- Kesenian, kerajinan dan kebudayaan
- Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- Infrastruktur pertanian desa

UCAPAN TERIMA KASIH

- 1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
- 2) Sekretaris Balitbangda Kabupaten Pacitan
- 3) Bapak Dr. YULIANTO P. PRIHATMAJI, IPM, IAI dari Sekolah Lurah Jogjakarta
- 4) Tim Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbangda Kabupaten Pacitan
- 5) Tim Panitia Temu Ilmiah 2019 Balitbang Prov. Jawa Timur
- 6) Dan semua pihak yang mendukung penulisan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya Putri Tamara, dkk, 2018, Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, Journal Homepage: <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl>, JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN P- ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751 Volume 6 Nomor 1, April 2018, 40-57.
- Atkočiū nienė , V., & Kaminaitė , G. (2017). The drivers of thematic village's development in strengthening their vitality. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructu re Development* , 39 (2), 139– 147. doi:10.15544/mts.2017.10.Vol.
- Idziak, W., Majewski, J., & Zmys lony, P. (2015). Community participation in sustainable rural tourism experience creation: A long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland. *Journal of Sustainable Tourism*, 23 (8–9), 1341–1362. doi:10.1080/09669582.2015.1019513.
- Kloczko-Gajewska, A. (2014). Can we treat thematic villages as social innovations? *Journal of Central European Green Innovation*, 2 (3), 49–59. Retrieved from <https://ideas.repec.org/a/ags/hukgr/188135.html>.
- Kementrian Keuangan, 2017, Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Jakarta Pusat
- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif,Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. (2009). Metode penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya
- Restu Rayi A B, 2016, Peran Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Rumah Dome (Studi mengenai Peran Pemerintah Desa Sumberharjo, Masyarakat dan Pengelola dalam Pengembangan Desa Wisata Rumah Dome di Dusun Sengir, Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta), Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/> diunduh tanggal 1 Oktober 2019 jam 11.35WIB
- Rubin, Herbert J. & Irene S. Rubin.1992. *Community Organizing & Development*. (Second Edition). USA : Macmillan Publishing Company.
- Suradisastra, K, 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 26 No. 2, Desember 2008: 82-91
- Suripan dkk, 2017, Pendampingan Penyusunan Program Pengembangan Desa Laboratorium, ABDIMAS Pedagogi, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017: 87-93.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



STRATEGI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN ASSET BADAN KREDIT DESA (BKD) HASIL TRANSFORMASI DI KABUPATEN BANYUWANGI

Emy Hidayati

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang strategi menyelamatkan asset eks Badan Kredit Desa (BKD), hasil kebijakan transformasi yang menuntut kejelasan kepemilikan dan bentuk serta badan hukum kelembagaannya. Sejumlah 86 BKD Di Kabupaten Banyuwangi dengan total asset 24 Milyar itu memilih menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), karena tidak cukup memenuhi syarat sebagaimana status yang semestinya yaitu sebagai Badan Perkreditan Rakyat (BPR). Dinamika saling klaim atas hak pengelolaan dan kepemilikan antara pengelola BKD dan pemerintah desa turut mewarnai proses panjang implementasi POJK No. 10 Tahun 2016, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui pendekatan dan analisis SLA (*Sustainable Livelihood Approach*).

PENDAHULUAN

A. Sengkarut transformasi dana bergulir perdesaan

Sejak tahun 2009, kebijakan tentang, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan lembaga keuangan mikro yang belum memiliki kejelasan status kelembagaan dan dan belum berbadan hukum sudah menjadi atensi pemerintah melalui keputusan bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam negeri serta Bank Indonesia, dengan berbagai pertimbangan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro di masyarakat, masih memiliki peran dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan, juga untuk kepentingan pengembangan usaha mikro dan kecil masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan., disisi yang diakui bahwa usaha mikro dan dan kecil telah kontribusi dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Alas an inilah yang melahirkan consensus para pihak yang telah bersepakat untuk berbagi peran dalam strategi pengembangan lembaga keuangan mikro.

Dalam dictum pertama SKB tersebut merinci Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan, kelompok Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sementara dalam focus kajian kami di dalam penelitian hanya satu saja dari sekian lembaga dimaksud yaitu Badan Kredit Desa. turut dijelaskan oleh oleh Ismawan dan Budiantoro (2005)

Dalam sejarahnya Badan Kredit Desa (BKD). telah lama beroperasi di pedesaan khususnya di Jawa. Lembaga ini menggunakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda berupa Staatsblad tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1938 Nomor 3/H, berisi tentang pemberian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan kepada Alge meene Volkscrediet Bank (AVB) yang kemudian diubah namanya menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), setelah

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Staatsblad tahun 1929 Nomor 357 dicabut, sehingga pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan BI dengan status sementara sebagai BPR.

BKD (Badan Kredit Desa) yang telah beroperasi puluhan tahun menjalankan fungsi lembaga keuangan secara inklusif di pedesaan harus mengahiri skema pengelolaan dengan status sementara sebagai BPR serta wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Jika BKD yang berdasarkan pertimbangannya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai BPR dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM, BUMDesa atau unit usaha BUMDesa, sesuai POJK Nomor 10/ POJK.03/ 2016 tentang pemenuhan ketentuan untuk transformasi BKD. Sementara dalam undang-undang No. 1/ 2013 tentang LKM dan undang-undang desa No. 6/ 2014 mensyaratkan peralihan kepemilikan dan pengelolaan asset eks BKD tersebut mengikuti tatakelola pemerintah desa. Transformasi BKD tersebut juga disinggung dalam kata pengantar sambutan (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) Marwan Jafar dalam buku BUMDesa cetakan pertama, bahwa tantangan bagi pendamping desa adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus desa maupun kawasan perdesaan. UPKP NPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUMDesa bersama pada basis lokus kawasan perdesaan “Membangun Desa”, sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUMDesa yang berbadan hukum.

Transformasi BKD menjadi PT LKM ini memunculkan pertentangan seputar kepemilikan asset dan kapasitas pengelolaan, keraguan terhadap kemampuan pemerintah desa, bahwa LKM yang mengabaikan pengawasan dapat mengalami kehilangan reputasi dan menghadapi tantangan pencapaian dan keberlanjutan dalam industri (Caudill, Gropper, & Hartarska, 2009; Hartarska & Nadolnyak, 2007; Lapenu & Pierret, 2006; Sinclair, 2012) mengingat selama ini banyak skema perguliran dana pedesaan mengalami kegagalan dalam tatakelola maupun daya jangkau terhadap nasabah. Fokus penelitian juga tentang mekanisme transformasi, tentang nasib pengelola BKD yang selama ini dalam pembinaan BRI tentang kepengurusan badan hukum PT dan bagaimana model tata kelola Lembaga Keuangan Mikro hasil transformasi tersebut, sehingga dalam tulisan ini memandang perlu mengkaji bagaimana strategi berbagai pihak dalam menyelamatkan aset dan menjaga keberlanjutan pengelolaan lembaga keuangan tersebut.

Studi kasus dalam tulisan ini merupakan penelitian empirik peristiwa perubahan tatakelola akibat kebijakan pemerintah yang menimbulkan tekanan dan pertentangan para pengelola lama dan bentuk kelembagaan baru yang belum yang bagi pengelola lama dituntut untuk beradaptasi atas suasana baru yang masih penuh dengan kesulitan-kesulitan. Sehingga penelitian ini memilih topik strategi dengan analisis menggunakan pendekatan (SLA) yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pilihan-pilihan tindakan penyelamatan asset dan keberlanjutan pengelolaan dana bergulir masyarakat. Adaptasi terhadap kerentanan, guncangan dan ketahanan serta kemampuan untuk mengatasi dan menjaga keberlanjutan sumber mata pencaharian adalah bagian penting dari analisis SLA (Davies 1996). Mereka yang tidak mampu mengatasinya (penyesuaian sementara dalam menghadapi perubahan) atau adaptasi (pergeseran jangka panjang dalam strategi mata pencaharian) pasti rentan dan tidak mungkin untuk mencapai mata pencaharian yang berkelanjutan. Menilai ketahanan dan kemampuan beradaptasi secara positif atau Berhasil mengatasinya membutuhkan analisis berbagai faktor, termasuk evaluasi historis pengalaman respons terhadap berbagai guncangan dan tekanan. Berbagai jenis kejutan atau stres, pada gilirannya, dapat menghasilkan respons yang berbeda, termasuk penghindaran, partisi ulang, resistensi atau toleransi mekanisme (Payne dan Lipton 1994: 15). Sehingga apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh BKD tersebut akan diuraikan berikut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) merupakan bentuk kebijakan terkait dengan tuntutan perubahan status kepemilikan, tatakelola dan badan hukum kelembagaan, sehingga perlu mengukur derajat ketaatan atas kebijakannya tersebut. Merujuk konsep implementasi dari Gordon (1986) dalam Keban (1994:45) mengungkapkan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini, administrator mengaturnya untuk:

- 1) Mengorganisir: mengatur sumber daya, unit-unit, dan metode untuk melaksanakan program.
- 2) Menginterpretasikan: berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan fleksibel.
- 3) Menerapkan Kebijakan yang telah diseleksi : Menerapkan berarti menggunakan 509 andate 509I509-instrumen, melakukan pelayanan rutin, pembayaran-pembayaran atau merealisasikan tujuan-tujuan program.

Hal yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melakukan program. Lebih lanjut Effendi (2001), mengidentifikasikan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tercantum dalam kebijakan.

Implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 Tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sementara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud adalah OJK selaku pemilik pemegang otoritas kebijakan, Pemda selaku fasilitator yang dalam proses pencapaian pelaksanaan transformasi tersebut dan Pemerintah Desa serta BKD yang menerima otoritas untuk tercapainya kondisi yang diharapkan. Perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan atau membentuk output yang jelas, sedangkan tugas implementasi kebijakan adalah suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil (*outcomes*) melalui aktifitas pemerintah.

B. SLA (*Sustainable Livelihoods Approach*)

Posisi BKD merupakan asset 509andate509I perdesaan, dalam klasifikasi asset atau pentagonal asset, disebutkan bahwa jenis asset terdiri dari Modal alam cadangan sumber daya alam (tanah, air, udara, sumber daya 509andate, dan lain-lain) dan jasa lingkungan (siklus hidrologi, bak pencemaran, dan lain-lain). Sumber daya manusia meliputi: keterampilan, pengetahuan, tenaga kerja (termasuk kesehatan dan kemampuan fisik). Modal ekonomi atau keuangan: modal dasar (tunai, kredit/ utang, tabungan, dan aset ekonomi lainnya). Modal sosial sumber daya 509andat (jaringan, social klaim, hubungan 509andat, afiliasi, asosiasi). Modal fisik infrastruktur (bangunan, jalan, peralatan produksi dan teknologi). Fokus penelitian ini adalah aset dana bergulir masyarakat, yaitu BKD (Badan Kredit Desa).

Kebijakan transformasi BKD merupakan bentuk tuntutan perubahan penataan kelembagaan dan kejelasan status, dan legalitas lembaga sebagai infrastruktur pendukung tatakelola. Terdapat sejumlah asset yang dimiliki oleh BKD antara lain : Sumberdaya pengelola, kantor dan sarana perkantoran. Perguliran dana masyarakat, jaringan kekerabatan nasabah dan para keluarga dekatnya sebagai bagian dari karakter atau ke – khas – an dalam merawat jangkauan pembiayaan. Secara keseluruhan merupakan sumber penghidupan atau sumber permodalan bagi pelaku mikro pedesaan.

Upaya mengatasi perubahan sebagai konsekuensi dari regulasi bagi lembaga keuangan agar dapat bertahan dan menyelamatkan serta menjaga keberlanjutan adalah inti dari pendekatan SLA

Definisi keberlanjutan lebih dimaknai sebagai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada keberadaan sumberdaya, adaptasi pada sumber-sumber penghidupan dan ketahanan terhadap kerentanan atau kemampuan mengelola sumber daya untuk dapat mengatasi tekanan dan guncangan merupakan inti dari berkelanjutan sumber penghidupan. Ketangguhan dalam menghadapi tekanan dan guncangan adalah kunci bagi adaptasi dan mengatasi sumber penghidupan (Davies 1996). Ketidakmampuan dalam mengatasi atau menyesuaikan terhadap perubahan atau adaptasi (pergeseran jangka panjang dalam strategi mata pencaharian) pasti rentan dan tidak mungkin untuk mengelola keberlanjutan sumber penghidupan untuk generasi mendatang. Sumber penghidupan olehdirumuskan sebagai bentuk asset atau sumber daya yang terdiri dari 5 jenis asset antara lain

“Mata pencaharian terdiri dari kemampuan, aset (510and, sumber daya, klaim, dan akses) dan kegiatan yang diperlukan untuk sarana untuk mempertahankan hidup; mata pencaharian dapat berkelanjutan jika memiliki daya tahan untuk pulih dari 510and dan guncangan, mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan asetnya, dan menyediakan peluang mata pencaharian berkelanjutan untuk generasi penerus bangsa; dan yang memberikan manfaat bersih bagi mata pencaharian lain ditingkat 510anda dan global dan dalam jangka pendek dan jangka panjang.” Chambers and Conway (1992).

Mengukur daya tahan dan kemampuan beradaptasi secara positif atau keberhasilan mengatasi setiap kerentanan terhadap sumber penghidupan membutuhkan analisis berbagai faktor, termasuk evaluasi historis, pengalaman merespons berbagai guncangan dan tekanan. Berbagai jenis tekanan atau stres, pada gilirannya, dapat menghasilkan respons yang berbeda, termasuk penghindaran, partisipasi ulang, resistensi atau toleransi mekanisme (Payne dan Lipton 1994: 15).

Definisi ini menyatukan dua konsep, disatu sisi ada persyaratan agar penghidupan dapat bertahan dari “510and dan guncangan” tetapi juga berkemampuan “menjaga dan meningkatkan” untuk masa depan. Elemen sentral dalam “ketahanan” terhadap 510and dan guncangan ini adalah diversifikasi elemen-elemen yang ada mata pencaharian.

Tepat sebelum penerbitan White Paper Carney (1998) memberikan visi yang lebih sederhana tetapi juga yang memiliki resonansi dengan Chambers dan Conway:

“Mata pencaharian terdiri dari kemampuan, aset (termasuk material dan sumber daya 510and) dan kegiatan yang diperlukan untuk sarana kehidupan.” dan, ketika digabungkan dengan keberlanjutan “Suatu mata pencaharian berkelanjutan ketika dapat mengatasi dan pulih dari tekanan dan mengejutkan serta mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan asetnya baik saat ini maupun saat ini masa depan, sementara tidak merusak basis sumber daya alam.”

C. Badan Kredit Desa

Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya **AVB (Algemene Volkereidiet Bank)** yang kemudian menjadi BRI pada sekitar tahun 1896. Kehadirannya erat kaitannya dengan keadaan ekonomi pedesaan di Jawa yang memprihatinkan disebabkan oleh kegagalan panen secara luas akibat musim kemarau panjang, banjir dan serangan hama. Berdasarkan pengalaman pahit ini Asisten Residen Banyumas di Purwokerto (**DE WOLF VAN WESTERRODE**) berusaha membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat guna mengatasi keadaan, dengan cara membuat lumbung-lumbung desa untuk menanggulangi keadaan akibat musim paceklik yang sering terjadi terutama di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Koperasi Reifeizen di Jerman yang prakteknya di Jawa dilaksanakan dengan prinsip Rembug Desa, dimana hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan prinsipnya gotong-royong.

D. Dasar Hukum

Badan Kredit Desa (BKD) adalah perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan. Ordonansi BKD yang termuat dalam Staatblad 357 tahun 1929, Rijksblad No 9 tahun 1938 untuk daerah Kasultanan yang menyangkut pengawasan, mengurus, dan menjalankan tata usaha, keuangan dan harta lainnya. Perkembangannya Staatblad tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No 7/ tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/ tahun 1998 pasal 58 tentang pemberian status Badan Kredit Desa sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Sruktur organisasi BKD



E. Alur Transformasi BKD dan UPK PNPM Menjadi Unit Usaha BUMDesa Bersama dalam badan hukum PT LKM Dalam

Alur ini menyesuaikan dengan pilihan transformasi BKD kabupaten Banyuwangi yang menetapkan menjadi PT LKM, sesuai dengan beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur prosedur kepemilikan asset dan pendirian LKM berbadan hukum PT .

Dasar Hukum

1. UU Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 8
2. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54
3. PP 43 tahun 2014 dirubah PP 47 tahun 2015 dirubah PP 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
5. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
6. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat
7. Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa
8. Persturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

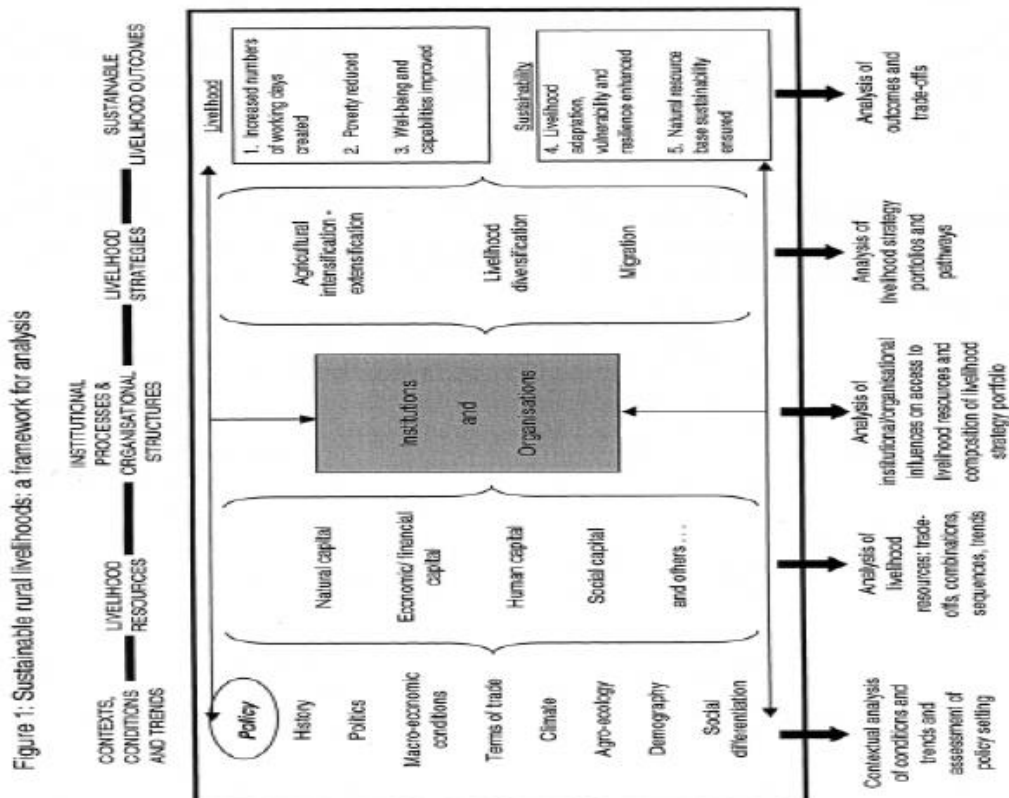


Sumber: Diolah oleh peneliti

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan SLA (*Sustainability Livelihoods Approach*) dalam memperoleh jawaban atas strategi BKD menjaga keberlanjutan sumber permodalan warga. Teknik pengumpulan data dan informasi menggunakan observasi, *Focus Group discussion* (FGD), dokumentasi dan wawancara. Peserta FGD yaitu pengurus BKD, OJK, DPMPD, Dinas Koperasi, dan UMKM, untuk memperoleh data tentang strategi

transformasi BKD, wawancara secara mendalam (*indept interview*) dilakukan dalam rangka mendapatkan data detail tentang alternative – alternative sikap yang akan diambil pihak –pihak yang terlibat dalam pelaksanaan antara lain pihak pemerintah desa sebagai pemilik asset, pengurus BKD yang mendapatkan 513andate transformasi, pihak PEMDA sebagai fasilitator pelaksanaan transformasi . Selanjutnya, pemeriksaan data tambahan melalui dokumentasi juga dilakukan untuk mengetahui produk hokum,sejarah dan model tatakelola kelembagaan dimasa lalu. Semua data dan informasi yang terkumpul diolah menggunakan analisis (Sustainabel Livelihoods Approach) sebagaimana dalam framework berikut :



Skema di atas sebagai rujukan atau guidance untuk menjelaskan tentang strategi BKD mempertahankan keberadaan sumberdaya sebagai sumbermata pencaharian dan sumberpermodalan yang terus dapat bergulir di lingkungan nasabah di perdesaan. Keadaan dilapangan atau sikap- sikap baik pertentangan, kompromi, konsolidasi dan lain sebagainya tentu ini adalah uapaya mempertahankan keberlanjutan BKD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Transformasi Pengelolaan

Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan transformasi ini didasarkan pada kepatuhan semua pihak untuk mengikuti pedoman yaitu POJK No 10/ 2016 dijelaskan bahwa BKD wajib membuat action nplan jika tidak dapat memenuhi syarat menjadi BPR.DanBKD Kabupaten Banyuwangi memilih bertransformasi menjadi LKM milik BUMDesa Bersama.karena tidak memenuhi ketentuan BPR sebagaimana yang dipersyaratkan. Kepatuhan terhadap POJK telah dipahami oleh BKD dari hasil sosialisasi yang dilakukan pihak OJK beberapa kali.Tetapi mekanisme kerjasama desa dalam

pengelolaan asset eks BKD belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa pihak baik pemda, pemerintah desa, OJK dan juga para pengurus BKD sendiri. Tidak ada satupun dokumen dari pemda berupa kebijakan yang memuat tentang pelaksanaan transformasi dana bergulir tersebut, tidak ada pedoman teknis dari pihak manapun yang dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang berwenang melaksanakan transformasi tersebut. Meskipun sosialisasi telah dilakukan dan menghadirkan kepala desa yang terdapat BKD di desanya. Keberadaan BKD yang bertahun-tahun di desa pun tidak banyak diketahui perkembangannya oleh pihak desa, mengesankan seolah BKD milik BRI dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah Desa. Meskipun dalam struktur BKD, posisi kepala desa adalah sebagai komisi 1. Selain itu muncul sikap penolakan dan perdebatan dari pihak pengurus BKD dengan alasan-alasan antara lain:

- 1) BKD dalam sejarahnya merupakan skema dana bergulir masyarakat yang diberikan kepada petani pedesaan, namun dalam perkembangannya skema tersebut telah habis/mati, kemudian diganti dengan dukungan pinjaman dari BRI, sehingga pengurus BKD menganggap perguliran dana berikutnya bukan lagi milik desa sebagaimana skema awal. Di sisi lain Kepala Desa dan BPD mempertanyakan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan dimaksud, yaitu keuntungan apa yang akan diperoleh oleh pemerintah desa jika bersedia melaksanakan transformasi asset eks BKD tersebut? Dari mana sumber biaya untuk menyelenggarakan permusyawaratan tentang transformasi tersebut? Hal ini memunculkan asumsi bahwa pihak pengurus BKD yang *notabene* beroperasi di desa dan melayani warga desa demikian juga dengan pemerintah desa. belum memahami semangat otonomi desa, dimana desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki wewenang yang luas dalam mengelola usaha desa, baik usaha dibidang jasa permodalan, perdagangan, jasa pelayanan publik, penyewaan, serta usaha-usaha yang mendukung penguatan usaha warga masyarakat,. Dengan prinsip komersial yang berarti pengelolaan usaha dijalankan untuk memperoleh keuntungan sebagai sumber pendapatan desa, dan sosial berarti lembaga usaha desa dijalankan dalam rangka menghindari bentuk-bentuk praktik monopoli dan konglomerasi, menjaga keseimbangan dan keteraturan kehidupan masyarakat desa. Desa juga dapat melakukan kerjasama dengan desa lain dalam bidang pengelolaan sumberdaya yang strategis untuk mendapatkan nilai tambah dan dikelola dalam wadah badan usaha milik desa bersama yang disebut BUMDesa Bersama. Gagasan untuk kerjasama mengelola sumberdaya desa melalui pendirian BUMDesa Bersama tersebut disepakati dalam permusyawaratan desa. sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan menteri desa no 2/ 2015 tentang permusyawaratan desa dan no 4/ 2015 tentang pendirian BUMdesa, turunan dari undang-undang desa. Kerjasama desa dalam pengelolaan asset eks BKD hasil transformasi tersebut telah dilaksanakan oleh 86 Badan Kredit Desa di Kabupaten Banyuwangi, 66 BKD berada di desa memilih bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui peleburan atau kerjasama di tingkat Kabupaten, sementara 2 BKD memilih mengelola sendiri menjadi unit usaha BUMDesa, dan 20 BKD yang ada dikelurahan belum dapat bertransformasi karena masih menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah Kabupaten tentang kepemilikan asset.
- 2) BKD merasa keberatan jika desa mengambil alih pengelolaan, apalagi harus dikelola oleh BUMDesa yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola perguliran dana selama ini, bukti kebangkrutan beberapa dana bergulir membuat trauma bagi pengurus BKD, terkesan tidak rela melepas kepemilikan dan pengelolaan, apalagi melihat praktik rekrutmen pengurus BUMdesa selama ini sangat kental dengan nepotisme oleh kepala desa. Keengganan itu menimbulkan kebuntuan koordinasi dengan pihak desa, dan menyebabkan proses *action plan* menjadi terkantung-katung. Disisi lain pihak desa juga tidak merencanakan pengalihan aset eks BKD tersebut dalam

dokumen perencanaan desa (RPJMDesa maupun APBDesa) sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Desa.

- 3) BKD tidak mengetahui posisi hirarki pemerintahan untuk melaksanakan transformasi, sehingga kesulitan memulai tahapan transformasi, disini lain pihak pemda juga belum pernah berkordinasi dengan pihak desa maupun pengurus BKD hal ini mengindikasikan bahwa potensi sumber permodalan masyarakat belum menjadi atensi kebijakan pemda. Sehingga DPMPD dalam hal ini dinas terkait dengan urusan perekonomian pedesaan juga tidak mengalokasikan sumberdaya untuk transformasi 84 BKD dengan total modal sebagai berikut.

DATA JUMLAH BKD


Rekapitulasi Penyampaian Laporan Triwulan Bkd Kepada Kr/Kojk Jember Posisi September 2017


Triwulan III				
NO	NAMA BKD	KREDIT	ASET	MODAL
1	ALASMALANG	143,630	142,261	58,146
2	BADEAN	103,911	112,432	78,154
3	BAGOREJO			
4	BAJULMATI	1,763,450	1,654,388	1,268,314
5	BAKUNGAN	124,021	120,297	85,522
6	BALAK	56,607	71,383	40,814
7	BANDJARSARI	41,494	48,740	29,388
8	BEDEWANG	35,280	37,236	16,987
9	BENCULUK			
10	BLAMBANGAN			
11	BOYOLANGU	972,651	910,127	555,489
12	BUNDER	18,231	31,893	3,041
13	CANTUK	38,555	88,584	65,457
14	CLURING	664,267	681,499	546,755
15	DADAPAN/SUMBEREJO	436,734	942,565	802,658
16	DASRI	45,381	51,276	29,515
17	GAMBIRAN	370,742	573,797	481,948
18	GENDOH	49,470	151,301	126,481
19	GENTENG KULON			
20	GENTENG WETAN	540,741	567,306	426,082
21	GLADAG	590,801	1,126,472	1,004,096
22	GLAGAH AGUNG	594,407	680,943	597,465
23	GOMBOLIRENG	21,070	24,300	1,154
24	GUMIRIH	49,782	68,063	39,490
25	JAJAG	8,588	11,212	4,098
26	JAMBEWANGI			

27	KABAT	90,951	95,607	19,326
28	KALIBARU KULON	35,185	41,970	29,727
29	KALIBARU WETAN	62,490	88,240	54,411
30	KALIGONDO	51,986	46,248	34,086
31	KALIPURO			
32	KALIREJO	29,721	25,488	13,121
33	KAMPUNG MANDAR	204,075	293,605	205,879
34	KARANGDORO	101,615	166,377	109,780
35	KARANGREJO	236,371	384,921	300,711
36	KEBALENAN	171,185	140,665	120,535
37	KEBAMAN	1,060,610	1,229,337	1,088,378
38	KEDALEMAN	251,955	312,592	251,145
39	KEDAYUNAN	218,332	229,197	195,191
40	KEMIRI	54,410	89,642	81,690
41	KEPATIHAN	164,302	155,281	58,361
42	KRADENAN	542,220	816,273	657,191
43	LABANASEM	14,119	67,447	58,456
44	LATENG	169,538	189,222	147,453
45	LEMABANGDEWO	276,747	367,866	336,585
46	LEMABANGKULON	119,797	136,775	123,494
47	LICIN	46,624	43,203	15,164
48	MACAN PUTIH	31,210	45,231	29,419
49	MELAYU	41,925	70,254	63,463
50	MOJOPANGGUNG	214,005	210,096	169,835
51	PADANG	243,326	262,789	191,762
52	PAKIS	458,128	651,101	529,717
53	PAKISTAJI	563,478	557,171	449,855
54	PANDEREJO	226,200	288,603	197,269
55	PARANGHARDJO	474,991	411,675	247,693
56	PARIJATAHWETAN	548,799	966,485	817,800
57	PENATABAN	131,960	151,074	11,588
58	PENDARUNGAN	10,040	32,344	25,559
59	PENGANDJURAN			
60	PENGANTINGAN	239,935	295,421	265,884
61	PONDOKNONGKO	93,726	153,202	101,504
62	ROGOJAMPI	50,469	52,437	15,866
63	SEMBULUNG			
64	SEMPU	377,379	656,593	549,577
65	SETAIL	103,638	101,792	80,012
66	SINGOJURUH	251,148	284,286	188,375

67	SINGONEGARAN	407,010	475,017	439,060
68	SINGOTRUNAN	51,732	48,505	16,712
69	SONGGON	880,258	978,441	807,958
70	SRATEN	379,324	504,528	494,917
71	SUKONATAR	540,835	767,070	685,524
72	SUKOREJO	230,973	173,714	178,181
73	SUMBERGONDO	12,867	19,567	12,165
74	SUMBERSEWU			
75	TAMANSARI	145,499	250,218	226,382
76	TAMPO	208,973	268,839	150,114
77	TEGALHARJO	33,456	37,445	28,383
78	TEMBOKREDJO	30,900	26,834	18,027
79	TEMUGURUH	44,699	111,532	10,931
80	TUKANGKAYU	119,790	141,043	92,553
81	WATUKEBO	736,528	715,519	604,571
82	WONGSOREJO	216,420	333,687	262,061
83	WRINGINREJO	333,353	386,158	277,296
84	YOSOMULYO	27,438	43,766	9,997
85	PURWOHARJO			
86	TEMENGGUNGAN	0	0	0
TOTAL		19,032,458	23,488,468	18,411,748

 : tidak ada laporan keuangan dari jtu

 : bkd non aktif per september 2017

 : rekapitulasi

Sumber data : TU BKD

Strategi Membangun Keberlanjutan Asset BKD

Keberlanjutan pengelolaan menjadi hal penting yang diperjuangkan oleh pengelola BKD akibat tuntutan transformasi tersebut, terdapat sejumlah sumberdaya yang harus diselamatkan antara lain 1. sumberdaya pengelola yang terdiri JTU 12 orang, mantri 5 orang, karyawan tetap 17 orang, pengelola di tingkat desa sekitar 160 orang 2. Sumberdaya fisik berupa tanah, kantor , sarana perkantoran, 3. Sumberdaya nasabah yang tersebar di 66 desa dan 20 kelurahan. setara modal bergulir senilai. Masing-masing sumberdaya tersebut selama ini menjadi kewenangan pengurus BKD yang operasionalnya mengikuti pedoman dari BRI berupa SE (Surat Edaran). Sehingga pada saat bertransformasi, keseluruhan asset tersebut diserahkan kepada pemerintah desa melalui permusyawaratan desa sebagaimana peraturan menteri desa no 2 dan no 4 tahun 2015. Tentang permusyawaratan desa dan

pendirian BUMDesa. hal ini dilaksanakan karena pilihan bentuk lembaga hasil transformasi yaitu LKM (Lembaga Keuangan Mikro), dimana dalam pasal 4 UU No 1 tahun 2013 tentang LKM , mensyaratkan kepemilikan LKM salah satunya adalah BUMDesa. meskipun dalam POJK memberi pilihan kepada pengurus BKD untuk memilih menjadi BUMDesa, tetapi hampir 63 desa bersepakat memilih menjadi LKM dengan alasan menyelamatkan semua asset BKD dari kepentingan politik kepala desa dan agar pengelola lama dapat terus melanjutkan usaha yang telah memiliki pelanggan dan karakter yang selama ini terlayani . Berikut beberapa strategi menyelamatkan dan menjaga keberlanjutan asset BKD hasil transformasi.

B. Konsolidasi Sengketa Kepentingan

Posisi pertentangan kepemilikan asset BKD menjadi polemik diantara kepala desa dan pengurus BKD, disatu sisi kepala desa merasa berhak untuk mengelola dibawah kendali desa melalui BUMDesa, yang berarti mengambil alih pengelolaan sepenuhnya. Disisi yang lain pengurus lama merasa keberatan karena melihat sejarah perguliran dana yang dikelola selama ini mengalami kebangkrutan dan mati, ada juga alasan yang lebih memberatkan pengelola BKD yaitu kehilangan jabatan atau pekerjaan jika transformasinya memilih menjadi BUMDesa. Sehingga pihak pengurus BKD mencari peluang hukum yang memungkinkan untuk memiliki kekuatan untuk memilih bentuk lembaganya. Dengan berpegang pada pasal... POJK, BKD mempertahankan diri dihadapan pemerintah daerah dan pemerintah desa bahwa pihak BKD lah yang berhak menentukan. Melalui konsolidasi yang difasilitasi oleh perguruan tinggi melalui pendampingan. Berhasil mendudukkan permasalahan dan solusinya.

Sebagian besar desa dapat menerima penjelasan tentang alasan pilihan bentuk usahanya menjadi LKM dalam kepemilikan BUMDesa Bersama dan dilaksanakan melalui kerjasama . sebagian lagi ada 3 desa yang tidak segera melaksanakan ketentuan tersebut dan memilih menunggu semacam petunjuk teknis dari pemerintah, meskipun ketentuan tentang transformasi tersebut sebenarnya juga bisa jadi pedoman, tetapi sayangnya hanya menjelaskan tentang pilihan bentuk lembaga nya dan tidak sampai teknis dan mekanisme transformasinya. demikian juga dengan pihak DPMPD yang enggan memfasilitasi proses kerjasama 63 desa, karena alasan tidak memiliki biaya untuk mengadakan pertemuan maupun menyiapkan sumberdaya pendampingan terkait dengan pelaksanaan ketentuan tersebut. Alasan-alasan yang bersifat teknis lebih mengemuka dibanding dengan alasan yang mendasar bahwa ini adalah dalam kerangka menyelamatkan asset milik masyarakat pedesaan dan menyadari bahwa transformasi ini adalah kewajiban pemerintah level desa untuk melindungi asset yang dapat dikelola dengan lebih baik.

Konflik kepentingan pihak-pihak terkait tersebut,menjadi semacam *mandatory* bagi perguruan tinggi.Selanjutnya merancang ruang- ruang diskusi dengan pihak pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam kerjasama desa, kepala desa dan BPD sebagai penyelenggaran permusyawaratan desa dan BKD selaku pengelola masa transisi. Untuk bersama-sama mengurai benang kusut dengan mempelajari bersama landasan pemikiran dan tindakan-tindakanataulangkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mempercepat proses transformasi, karena Bulan Desember 2017 adalah *deadline* revisi *action plan*.

Kehadiran tenaga pendamping BUMDesa dari unsur perguruan tinggi menjadi titik terang bagi pengurus BKD untuk berkonsolidasiperalih pertentangan yang terjadi dalam arena kepentingan penguasaan sumberdaya permodalan. Pemilihan topik penting dan strategis bagi pihak-pihak yang terkait agar menjadi kepentingan bersama. kata kuncinya adalah “penyelamatan asset eks BKD“, jargon inilah yang kemudian menjadi instrument pelaksanaan transformasi. melalui fasilitasi tenaga dosen pendamping dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. dengan menggunakan FGD bersama DPMPD,pengurus BKD dan 63 kepala desa, melalui intervensi terhadap kebijakan-kebijakan mendapatkan pemahaman bersama dan kesepakatan-kesepakatan.

C. Strategi membangun keberlanjutan asset eks BKD

Mendasarkan pada *action plan* yang telah dipilih oleh pengurus BKD, setelah menghitung bahwa tidak bisa memenuhi standar menjadi BPR. Maka perlu ada penegasan sikap dengan menindaklanjuti ketentuan dalam transformasi tersebut, dengan mengupayakan posisi pengelola BKD lama dapat terus bekerja pada lembaga baru yang nantinya akan dibentuk melalui proses transformasi.

- 1) Pengurus BKD tetap meyakinkan banyak pihak untuk dapat mengelola kembali asset pergulirandana tersebut dengan mengkampanyekan kerjasama semua BKD se-Kabupaten. Upaya ini dilakukan dalam rangka mempertahankan skema lama binaan BRI yang telah dipraktikkan bertahun-tahun dan berkembang hingga saat ini. sekaligus menjaga para pelanggan nasabah setia yang telah turun temurun. Secara ideal sikap pengelola BKD tersebut menjadi misi Lembaga Keuangan Mikro selama ini yaitu bahwa LKM mampu melepaskan ketergantungan diri dari subsidi donor dan mencapai kemandirian dengan menjaga kelancaran tingkat pengembalian, karena kegagalan LKM selama ini sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pengembalian kredit, ini yang banyak dialami oleh LKM hampir di banyak Negara Morduch (1999). Akhirnya, LKM yang bergerak pada kelompok miskin pedesaan terus menerus bergantung pada subsidi negara maupun lembaga donor.
- 2) Demi menjaga keberhasilan mempertahankan skema pengelolaan, BKD berupaya membiayai proses transformasi tersebut dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada pihak OJK. Hal ini dilakukan sebagai jalan tengah atas perdebatan pembiayaan yang tidak tersedia dalam dokumen perencanaan baik di Desa maupun di Dinas terkait. Proses panjang birokrasi yang selama ini dikeluhkan oleh pihak BKD menjadi hambatan dan memperlambat proses transformasi. Dibanding dengan saat menjadi binaan BRI, dimana semua mekanisme operasional kerjanya serta tata kelola kelembagaan hanya didasarkan pada SE (Surat Edaran BRI), seperti surat No. 342-KPK/BKD/1992 tentang Pedoman Kerja BKD yang berisi tentang 28 set buku. sehinggadari pengalaman dan budaya kerja masa lalu kini pengurus BKD terpaksa harus belajar banyak tentang tatakelola pemerintahan desa, tentang mekanisme pengelolaan asset desa sesuai dengan permendagri No.1/ 2016. Yaitu melalui permusyawaratan desa dengan peserta musyawarah yang telah ditentukan oleh peraturan menteri Desa No.2 /2015.Sementara, pendirian BUMDesa Bersama sebagai wadah kerjasama usahanya merujuk pada permendesa No. 4/2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran BUMDesa.
- 3) Mempelajari regulasi tentang kerjasama desa dalam rangka pengelolaan asset berarti perlu mempelajari banyak produk peraturan terkait , sebab kerjasama desa tersebut secara kelembagaan selain menyepakati ruang lingkup kerjasama, bentuk kerjasama, alur pembiayaan, organisasi yang mengelola kerjasama yaitu berupa BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), juga pendirian lembaga usaha yang menangani secara teknis usaha-usaha yang dikerjakamkan melalui wadah BUMDesa. ketentuan hukum yang melagisir kerjasama desa tersebut berupa PERDES (Peraturan Desa Bersama/ Peraturan Bersama Kepala Desa). Sehingga kerjasama 63 Desa yang telah bersepakat untuk menyelamatkan asset BKD tersebut telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh 6 orang delegasi tiap desa sesuai peraturan perundangan yang ada, dengan terlebih dahulu desa-desa menyepakati kerjasama melalui musyawarah desanya dan merumuskan PERDES(Paraturan desa). Keseluruhan proses tersebut merupakan konsekuensi dari demokratisasi tingkat desa, dalam praktiknya terasa melelahkan bagi sebuah penataan LKM yang seharusnya justru dilaksanakan secara independen dan profesional.
- 4) Mekanisme kerjasama yang telah disepakati tersebut selanjutnya dilegalisir melalui peraturan bersama 63 kepala desa dengan mensyaratkan no perdes sebagai konsiderannya, dalam merumuskan isi PERMAKADES tersebut terdapat pasal yang sengaja disepakati untuk

menyelamatkan posisi pengelola BKD lama secara otomatis menjadi pengurus BUMDesa Bersama maupun LKM sebagai unit usahanya, tertera dalam Bab IV pasal 4 ayat 3 perma-kades tahun 2018 tentang kepengurusan bahwa: *untuk pertama kalinya, pengurus BKD secara otomatis dapat menjadi pengurus BUMDesa Bersama*, dengan demikian pengurus BUMDesa masih memiliki peluang untuk menentukan tatakelola kelembagaan hasil transformasi.

a) Menyiasati Kebuntuan Peraturan Pendirian PT LKM

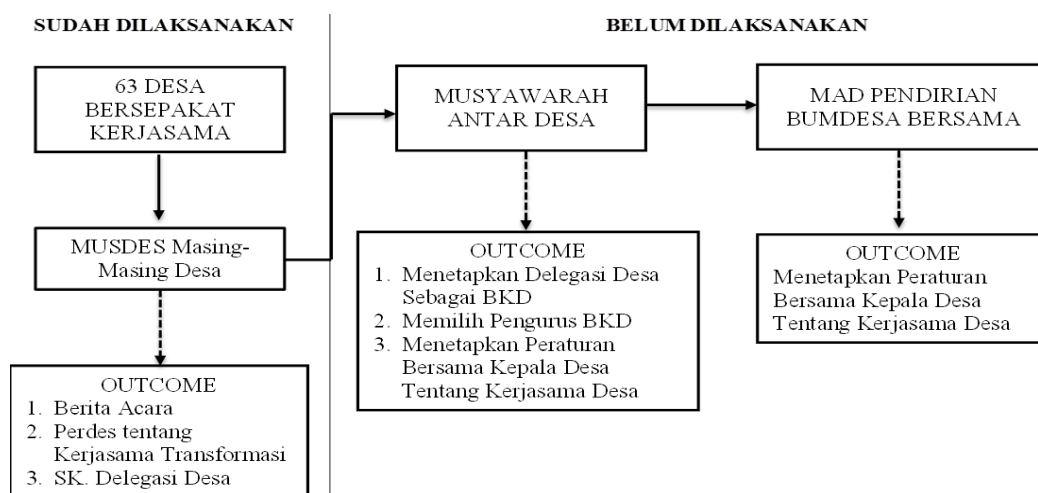
Transformasi BKD menjadi PT LKM milik unit usaha BUMDesa Bersama, terikat dengan 3 (tiga) peraturan perundangan: 1. UU Desa No. 6/ 2014 pasal 87 menyatakan bahwa BUMDesa dapat mendirikan unit usaha yang berbadan hukum dan dalam penjelasannya memungkinkan pendiriannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

b) 2. UU No. 1/ 2013 pasal 5 bahwa LKM dapat dimiliki oleh WNI, Koperasi dan BUMDesa ; 3. UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa yang berhak mendirikan PT salah satunya adalah PT, sementara badan hukum BUMDesa adalah Peraturan Desa dan tidak dapat dipersamakan dengan PT. pertentangan penafsiran regulasi tersebut sangat menghambat dan melelahkan proses transformasi. upaya konsultasi ke berbagai pihak juga belum menemukan jawaban yang sinkron. Pihak OJK bahkan menjawab melalui surat nya No. S-592/KO.0403/2019 yang menegaskan bahwa BUMDesa tidak bisa dibadan hukumkan dan diharapkan BKD dapat mencari alternative-alternatif dari berbagai sumber tentang proses transformasi BKD yang dianggap sesuai dengan ketentuan.

c) Beberapa pertimbangan memutuskan untuk mengadopsi model perizinan LKM yang pernah dilakukan di Kabupaten Ponorogo yang telah lebih awal melaksanakan transformasi tersebut dengan pendirian PT nya melalui BUMDesa Bersama dengan membuat nama PT dibelakang nya hanya untuk meloloskan prosedur administrasi perizinan yang merupakan wilayah otoritas kementerian hukum dan ham yang rupanya belum menyelaraskan dengan undang-undang yang terkait.

Bagan 2.

Hasil pelaksanaan transformasi eks BKD 63 Desa di Kabupaten Banyuwangi



Tabel hasil keputusan Peraturan Desa KERJASAMA DESA di Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

NO.	NAMA DESA	NO. PERDES
1	Alasmalang	NOMOR 5 TAHUN 2017
2	Badean	NOMOR 02 TAHUN 2017
3	Bajulmati	NOMOR 01 TAHUN 2017
4	Balak	NOMOR 5 TAHUN 2017
5	Bedewang	NOMOR 20 TAHUN 2017
6	Benculuk	NOMOR 07 TAHUN 2017
7	Blambangan	NOMOR 07 TAHUN 2017
8	Bunder	NOMOR 2 TAHUN 2017
9	Cantuk	NOMOR 4 TAHUN 2017
10	Cluring	NOMOR 5 TAHUN 2017
11	Dadapan	NOMOR02 TAHUN 2017
12	Dasri	NOMOR 5 TAHUN 2017
13	Gambiran	NOMOR 4 TAHUN 2017
14	Gendoh	NOMOR 6 TAHUN 2017
15	Gentengkulon	NOMOR 7 TAHUN 2017
16	Gentengwetan	NOMOR 4 TAHUN 2017
17	Gladag	NOMOR 06 TAHUN 2017
18	Glagah Agung	NOMOR 7 TAHUN 2017
19	Gombolirang	NOMOR 11 TAHUN 2017
20	Gumirih	NOMOR 8 TAHUN 2017
21	Jajag	NOMOR 5 TAHUN 2017
22	Jambewangi	NOMOR 4 TAHUN 2017
23	Kalibarukulon	NOMOR 03 TAHUN 2017
24	Kalibaruwetan	NOMOR 3 TAHUN 2017
25	Kaligondo	NOMOR 8 TAHUN 2017
26	Kalirejo	NOMOR 09 TAHUN 2017
27	Karangdoro	NOMOR 6 TAHUN 2017
28	Kebaman	NOMOR 7 TAHUN 2017
29	Kedayunan	NOMOR 01 TAHUN 2017
30	Kedaleman	NOMOR 06 TAHUN 2017
31	Kemiri	NOMOR 07 TAHUN 2017
32	Kradenan	NOMOR 18 TAHUN 2017
33	Labanasem	NOMOR 6 TAHUN 2017
34	Lemahbangdewo	NOMOR 32 TAHUN 2017
35	Lemahbang Kulon	NOMOR 4 TAHUN 2017
36	Licin	NOMOR TAHUN 2017
37	Macan putih	NOMOR 05 TAHUN 2017
38	Padang	NOMOR 4 TAHUN 2017
39	Pakistaji	NOMOR 08 TAHUN 2017
40	Parangharjo	NOMOR 04 TAHUN 2017
41	Parijatahwetan	NOMOR 06 TAHUN 2017
42	Pendarungan	NOMOR 8 TAHUN 2017
43	Pondoknongko	NOMOR 05 TAHUN 2017
44	Purwoharjo	NOMOR 7 TAHUN 2017
45	Rogojampi	NOMOR 5 TAHUN 2017
46	Sembulung	NOMOR 21 TAHUN 2017
47	Sempu	NOMOR 05 TAHUN 2017

48	Setail	NOMOR 5 TAHUN 2017
49	Singojujuh	NOMOR 10 TAHUN 2017
50	Songgon	NOMOR 01 TAHUN 2017
51	Sraten	NOMOR 8 TAHUN 2017
52	Sukonatar	NOMOR 08 TAHUN 2017
53	Sumbergondo	NOMOR 5 TAHUN 2017
54	Sumbersewu	NOMOR 5 TAHUN 2017
55	Tamansari	NOMOR 05 TAHUN 2017
56	Tampo	NOMOR 05 TAHUN 2017
57	Tegalharjo	NOMOR 1 TAHUN 2017
58	Tembokrejo	NOMOR 5 TAHUN 2017
59	Temuguruh	NOMOR 7 TAHUN 2017
60	Watukebo	NOMOR 2 TAHUN 2017
61	Wongsorejo	NOMOR 07 TAHUN 2017
62	Wringinrejo	NOMOR 04 TAHUN 2017
63	Yosomulyo	NOMOR 13 TAHUN 2017

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam laporan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan antara lain, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan POJK No 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat Dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, telah dapat dipenuhi oleh 66 BKD yang tersebar di 66 desa, 63 desa memilih bergabung/ kersama mendirikan BUMDesa bersama2 desa lainnya memilih mengelola sendiri melalui unit usaha BUMDesa, sedangkan 20 BKD yang berada di 20 Kelurahan yang masih belum melaksanakan ketentuan tersebut karena terhambat oleh pemahaman regulasi tentang mekanisme transformasi, pihak pemerintah daerah dan OJK belum dapat memberikan pedoman pelaksanaan.
- 2) Proses pelaksanaan transformasi dapat berjalan dan kendala pertentangan pihak-pihak terkait dapat diatasi melalui konsolidasi perbedaan kepentingan, intervensi kepada pemegang kebijakan, kampanye penyelamatan aset, dan pendampingan oleh pihak perguruan tinggi.
- 3) Sebanyak 63 desa telah dapat menyelenggarakan permusyawaratan desa untuk transformasi dan telah menghasilkan produk peraturan desa tentang kerjasama desa pengelolaan aset eks BKD hasil transformasi, SK Delegasi desa untuk menyelenggarakan Musyawarah antar desa. Penyelenggaraan MAD telah dapat dilaksanakan dan produk permakades BKAD serta permakades Pendirian BUMDesa Bersama.
- 4) Proses pendirian PT LKM oleh BUMDesa Bersama masih dalam konsultasi dengan pihak- pihak yang relevan, terkait dengan kebutuhan debatable pemahaman aturan.

SARAN

- 1) Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembuatan pedoman tata kelola kelembagaan keuangan mikro pedesaan terutama pengaliran dana masyarakat yang integratif dan sinergis. di dalam unit usaha desa dalam bentuk LKM sesuai norma dan aturan perundangan mengenai lembaga keuangan mikro. Sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaan oleh OJK selaku lembaga pengawas keuangan. Selain itu juga agar lebih memberi manfaat bagi akses permodalan usaha mikro pedesaan.

- 2) Mendorong pemerintah daerah segera melakukan penataan semua asset financial yang dikelola oleh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan masyarakat perdesaan. Baik yang berasal dari penyertaan modal desa maupun bantuan dana bergulir masyarakat yang mendapat *support* dana dari pemerintah dan memfasilitasi pengawasan atas perkembangan permodalan tersebut.
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan pendampingan dalam penatakelolaan kelembagaan keuangan mikro pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Ketentuan Badan Kredit Desa.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Dan Pembubaran BUMDesa Bersama*.
- Dunn, William N.2003. *Pengantar Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri no 96 th 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri DesaPembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2015.Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran. Badan Usaha Milik Desa.
- POJKNomor 10/POJK tentang pemenuhan ketentuan transformasi BKD yang diberikan status sebagai BPR.
- Robert Chambers and Gordon R Chonway.1991. IDS Discussion Paper, Sustainable Rural Livelihoods.
- Rustam Ahmadi, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*,Malang: Universitas Negeri Malang, Cet. 1.
- Shakil Quayes. 2012. Depth of outreach and financial sustainability of microfinance institutions. USA: Department of Economics, University of Massachusetts Lowell.
- Sugiyono, 2007, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, Cet.12.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Swee-Sum Lam Weina Zhang Achsa X. Ang Gabriel H. Jacob. March 2019. Reciprocity between Financial and Social Performance in Microfinance Institutions: Public Performance and Management Review, Forthcoming.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Desa.



PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PENGELOLA HASIL HUTAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Muhamad Ismail, Se.M.Si

Balitbangda Provinsi Papua

ABSTRAK

Besarnya potensi kehutanan di Kepulauan Yapen namun masyarakat adat yang merupakan pemilik hutan dan sebagian besar mendiami kawasan hutan tersebut masih dikategorikan penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan hutan adat, serta merumuskan strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Menggunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengelolaan potensi hutan oleh masyarakat adat berupa hasil hutan kayu dan hutan non kayu masih dilakukan secara tradisional dengan peralatan yang masih sederhana. Salah satu potensi hutan yang dikembangkan adalah pengelolaan pohon nipah menjadi minuman beralkohol yang dilakukan secara turun-temurun serta memberikan nilai ekonomi yang besar, namun disisi lain dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena pemanfaatannya yang salah sebagai minuman keras. Strategi pengembangan ekonomi masyarakat pengelola hutan adat adalah Menyiapkan model pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan; Mendorong pengelolaan hasil hutan adat yang berorientasi pada pasar domestik dan internasional; Melibatkan kelembagaan adat dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan adat; Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat adat; Menyiapkan peraturan/regulasi yang mengatur tentang kepemilikan hutan adat serta batas antar suku; Mempermudah proses perijinan pengelolaan hasil hutan; program pengelolaan hutan yang memihak kepada masyarakat miskin.

Kata kunci : hutan adat, kesejahteraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program selama ini belum memberikan dampak yang signifikan yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua mencapai 27,76% (BPS Papua, 2017). Dari total jumlah penduduk miskin di provinsi Papua Sebagian besar penduduk miskin berdomisili di daerah pedesaan/kampung dengan potensi sector kehutanan yang sangat besar, dengan mata pencaharian penduduk sebagai petani, gambaran tersebut terlihat juga di distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kesejahteraan merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan hutan. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tentunya hutan adalah termasuk kekayaan alam yang terkandung pada tanah Indonesia, sehingga segala jenis pengelolaan hutan diutamakan untuk digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Papua Tahun 2013-2018, dititik beratkan pada prioritas pembangunan pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi local. Untuk itu maka Potensi sector kehutanan yang besar jika dikelola tidak tepat, maka akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan tersebut.

Provinsi Papua sebagai provinsi terluas di Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya hutan yang sangat besar dan melimpah baik potensi kawasan hutan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan

jasa lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 782/Menhut-II/2012, luas kawasan hutan dan perairan di Provinsi Papua \pm 30.387.499. Berdasarkan fungsi hutan, luas kawasan hutan di Provinsi Papua didominasi fungsi hutan lindung dan hutan konservasi. Kawasan hutan Provinsi Papua dengan luasan 95 % dari luas daratan merupakan potensi yang sangat besar dan dapat diandalkan sebagai modal pembangunan untuk kemajuan daerah.

Kondisi penutupan lahan di wilayah Kepulauan Yapen masih didominasi oleh kawasan hutan, yaitu sebesar 79.286,75 Ha atau 82,16% dan sisanya seluas 17.215,78 Ha atau 17,84% merupakan kawasan non hutan yang dimanfaatkan untuk areal pemukiman, lahan terbuka, semak belukar, pertanian lahan kering serta bandara. Sementara itu Kawasan hutan di Kepulauan Yapen memiliki tipe ekosistem yang beragam dengan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang kaya dan khas, baik flora maupun fauna, dan penyebarannya pada daerah-daerah tertentu menjadikan setiap wilayah memiliki potensi unggulan masing-masing dan prospektif untuk rencana pengembangan ke depan

Dengan begitu besarnya potensi yang ada di Provinsi Papua secara umum dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, namun sampai saat kesejahteraan masyarakat di Papua belum dapat ditingkatkan. Banyak kebijakan di sektor kehutanan, melalui Undang-undang Republik Indonesia maupun Perdasus Provinsi Papua akan tetapi sampai saat ini belum bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Untuk itu maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengelola potensi hutan yang dimiliki dan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat yang mendiami wilayah hutan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sebagai sebuah wilayah yang memiliki potensi kehutanan yang besar, namun dalam pengelolaannya belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya IPM serta permasalahan pembangunan lainnya.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian tentang pengembangan ekonomi masyarakat desa/kampung dalam pengelolaan hutan adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat pengelola hutan di Kepulauan Yapen.
2. Menyusun strategi pengembangan ekonomi masyarakat kampung/desa

D. Manfaat Penelitian;

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Tersedianya rekomendasi bagi pemerintah daerah tentang bagaimana strategi pengembangan ekonomi masyarakat desa pengelola hutan di kabupaten Kepulauan Yapen
2. Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian sejenis di kemudian hari.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan cara apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk bisa menjawab permasalahan penelitian yang ada meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang diperoleh, diliput dan dikumpulkan dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh sebuah institusi sebelumnya. Sedangkan data primer merupakan *raw data* atau data dasar yang langsung diliput pada obyek yang diamati melalui suatu FGD (*Forum Group Discussion*) maupun wawancara mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, peraturan-peraturan dan laporan tahunan serta sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu proses penelitian. teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara Mendalam

Kegiatan Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dan bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam agar dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

c. Focus Group Discussion (FGD)

Teknik pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* atau FGD adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi keinginan, kebutuhan, sudut pandang dan pengalaman peserta tentang suatu topik atau masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang umumnya bentuk diskusi terbatas dan terfokus dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok tentang suatu permasalahan. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

d. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan disebarakan kepada para responden terpilih, dan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada responden untuk dapat menjawab atau menanggapi masalah yang diteliti secara bebas.

B. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna dan menatanya ke dalam bentuk yang siap dianalisis. Dengan kata lain, analisis deskriptif ini merupakan fase yang membicarakan mengenai penjabaran dan penggambaran termasuk penyajian data.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah untuk dipahami dan informative bagi orang yang membacanya.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang terdiri dari **Strength** (kekuatan), **Weaknes** (Kelemahan), **Opportunity** (kesempatan), dan **Threat** (ancaman), yang merupakan suatu analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki unit penelitian, yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi *internal*, serta analisis mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi unit penelitian yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi *eksternal*. Setelah diperoleh berbagai faktor kunci eksternal dan internal yang dituangkan dalam analisis kebijakan/strategi pengembangan sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis SWOT

Internal / Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan ini dikalangan birokras ipemerintah. Walaupun urian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (1999), konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomimasyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

B. Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikkan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping eksitu.

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama. Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke lembaga keuangan, sebenarnya sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Trans Kawasan Timur (KKPA PIR Trans KRI), KKPA- Bagi Hasil, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM), dan masih banyak lagi lainnya. Affirmative action untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalau pun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator Naskah No. 20, Juni-Juli 2000 untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah

distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil.

Pada tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki dampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar. Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinisikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana telah teridentifikasi 11 (sebelas) faktor internal yang terdiri dari 5 (lima) factor kekuatan (*Strengths*) dan 6 (enam) factor kelemahan (*Weaknesses*) yang diduga mempengaruhi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pengelolaan hutan. Adapun faktor-faktor kekuatan yang teridentifikasi di Kabupaten Kepulauan Yapen meliputi : Memiliki potensi HHK dan HHBK, Memiliki program pemberdayaan masyarakat adat pengelola hutan adat, Kepemilikan tanah dan hutan adat secara bersama/komunal, Tersedianya kelembagaan masyarakat adat, dan Nilai kearifan local masyarakat yang masih kuat.

Sementara itu faktor-faktor kelemahan yang merupakan hambatan bagi proses kebijakan terdiri dari 6 (enam) factor yang meliputi : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat adat, Kurangnya peran kelembagaan adat dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, Pembinaan dan pelatihan yang tidak kontinyu, Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program, Belum adanya peraturan daerah (perda/perdasus) yang mengatur tentang pengelolaan hutan adat, dan Kesulitan untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan.

Dari hasil identifikasi terhadap factor internal dari permasalahan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat pengelola hutan di kepulauan Yapen sebagaimana uraian di atas, maka sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan lebih jauh terkait identifikasi permasalahan, maka langkah

selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal yang berpengaruh di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1 Matriks IFAS Kabupaten Kepulauan Yapen

Fakor Strategis Internal	Bobot	Rating	Nilai
<u>Kekuatan (Strengths) :</u>			
1. Memiliki potensi HHK dan HHBK	0,1	4	0,40
2. Memiliki program pemberdayaan masyarakat	0,102	4	0,408
3. Kepemilikan tanah dan hutan secara bersama/komunal	0,078	3	0,234
4. Tersedianya kelembagaan masyarakat adat	0,079	3	0,237
5. Nilai kearifan local masyarakat yang masih kuat	0,075	2	0,150
Sub Total	0,434	16	1,429
<u>Kelemahan (Weaknesses) :</u>			
1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat adat	0,111	4	0,444
2. Kurangnya peran kelembagaan adat dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan	0,107	4	0,428
3. Pembinaan dan pelatihan yang tidak kontinyu	0,089	3	0,267
4. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program	0,097	3	0,237
5. Belum adanya peraturan daerah (perda/perdasus) yang mengatur tentang pengelolaan hutan	0,093	3	0,279
6. Kesulitan untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan	0,087	2	0,174
Sub total	0,566	19	1,829
Total	1	35	3,258

Dari hasil Pembobotan dan skoring secara partisipatif, menghasilkan rata-ran nilai bobot dukungan untuk faktor kekuatan 1,429, dan rata-ran nilai bobot dukungan untuk kelemahan 1,829. Dengan demikian, resultante nilai bobot dukungan untuk faktor internal adalah -0,4. Pengaruh faktor kelemahan di Kabupaten Kepulauan Yapen lebih besar daripada faktor kekuatan, sehingga resultante nilai bobot dukungan faktor internal bernilai negatif.

Sementara itu dari sisi faktor eksternal, teridentifikasi 6 (enam) peluang (Opportunities) dan 5 (lima) ancaman (Threats). Peluang yang teridentifikasi adalah; Dukungan kebijakan nasional terkait pemberdayaan masyarakat adat, Mendapat bantuan modal usaha, Dukungan program pemberdayaan dari pemerintah provinsi Papua, Peluang pasar dan permintaan terhadap produk hasil, Adanya dukungan mitra usaha, dan Meningkatnya PAD. Sedangkan ancaman yang teridentifikasi meliputi: Terjadi tumpang tindih antara peraturan daerah dan peraturan pusat terkait pengelolaan hutan, Belum ada peta yang mengatur batas-batas kepemilikan hutan adat, Ijin pengelolaan hutan menjadi kewenangan provinsi, Terbatasnya anggaran pengelolaan sector kehutanan dari pemerintah pusat, Kewenangan pengelolaan sector kehutanan dialihkan ke provinsi

Selanjutnya dari hasil identifikasi terhadap faktor eksternal dari permasalahan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat pengelola hutan di Provinsi Papua sebagaimana uraian di atas, maka

sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan lebih jauh terkait identifikasi permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui pembobotan, rating dan nilai dalam matriks EFAS yang dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Matriks EFAS Kabupaten Kepulauan Yapen

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Nilai
<u>Peluang (Opportunity) :</u>			
1. Dukungan kebijakan nasional terkait pemberdayaan masyarakat adat	0,113	4	0,452
2. Mendapat bantuan modal usaha	0,101	4	0,404
3. Dukungan program pemberdayaan dari pemerintah provinsi Papua	0,097	3	0,291
4. Peluang pasar dan permintaan terhadap produk hasil	0,095	3	0,285
5. Adanya dukungan mitra usaha	0,091	2	0,182
6. Meningkatnya PAD	0,087	2	0,174
Sub Total	0,584	18	1,713
<u>Ancaman (Threat) :</u>			
1. Terjadi tumpang tindih antara peraturan daerah dan peraturan pusat terkait pengelolaan hutan	0,098	4	0,356
2. Belum ada peta yang mengatur batas-batas kepemilikan hutan	0,094	3	0,282
3. Ijin pengelolaan hutan menjadi kewenangan provinsi	0,082	3	0,246
4. Terbatasnya anggaran pengelolaan sector kehutanan dari pemerintah pusat	0,073	3	0,219
5. Kewenangan pengelolaan sector kehutanan dialihkan ke provinsi	0,069	2	0,138
Sub total	0,416	15	1,241
Total	1	33	2,954

Dari hasil analisis faktor internal menggunakan matriks faktor strategis internal (*Internal Strategic Factors Analysis Summary/IFAS*) dan analisis faktor eksternal menggunakan matriks faktor strategis eksternal (*External Strategic Factors Analysis Summary/EFAS*). Penentuan nilai bobot, rating dan perumusan strategi pengembangan dilakukan melalui diskusi dengan para pelaksana program pemberdayaan masyarakat adat di kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan hasil analisis IFAS (**Tabel 5.1**), faktor kekuatan (*Strenghts*) mempunyai nilai sebesar 1,429, dan kelemahan (*Weakness*) mempunyai nilai sebesar 1,829. Berdasarkan hasil perhitungan dari faktor lingkungan internal, yaitu faktor kekuatan (*strenght*) dikurangi dengan faktor kelemahan (*weakness*) diperoleh nilai X sebagai sumbu horizontal = $1,429 - 1,829 = -0,4$. Dengan demikian, nilai sumbu X dalam diagram SWOT adalah -0,4.

Sementara itu, dari hasil analisis EFAS (**Tabel 5.2**), diketahui faktor peluang (*Opportunities*) mempunyai nilai sebesar 1,713 dan ancaman (*Threats*) mempunyai nilai sebesar 1, 241. Adapun nilai pada sumbu Y sebagai sumbu vertikal adalah $1,713 - 1,241 = 0,589$. Dengan demikian, nilai sumbu Y dalam diagram SWOT adalah 0,589. Hasil perhitungan matriks IFAS dan matrik EFAS menghasilkan nilai sumbu X sebesar -0,4 dan nilai sumbu Y sebesar 0,589. Posisi strategi

pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelola hutan adat di Kabupaten Kepulauan Yapen pada pemetaan analisis lingkungan strategis internal dan eksternal (Gambar 1) berada pada kuadran ketiga (III) atau pada posisi ubah strategi atau pada posisi strategi W-O, artinya dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di kabupaten Kepulauan Yapen disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada, sekaligus untuk memperbaiki kinerja atau kebijakan yang sudah ada.

Dari semua faktor yang terpilih digunakan sebagai dasar penyusunan strategi dalam upaya peningkatan kapasitas petani dalam mengakselerasi pembangunan pertanian. Dalam merumuskan strategi kebijakan peningkatan kapasitas petani, semua faktor internal dan eksternal utama seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2, menjadi pertimbangan utama. Dengan menggunakan faktor-faktor utama kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), maka disusun rumusan strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di kabupaten kepulauan Yapen. Penyusunan strategi kebijakan yang terdiri dari 4 strategi, yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel.3
Penyusunan strategi pengembangan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan hutan di kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2018

<div style="text-align: center;"> Faktor Internal </div> <div style="text-align: center;"> Faktor Eksternal </div>	Kekuatan (S): <ol style="list-style-type: none"> Memiliki potensi HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan Memiliki program pemberdayaan masyarakat adat pengelola hutan Kepemilikan tanah dan hutan secara bersama/komunal Tersedianya kelembagaan masyarakat adat Nilai kearifan local masyarakat yang masih kuat 	Kelemahan (W): <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat Kurangnya peran kelembagaan adat dan masyarakat dalam pengelolaan hutan Pembinaan dan pelatihan yang tidak kontinyu Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program Belum adanya peraturan daerah (perda/perdasus) yang mengatur tentang pengelolaan hutan Kesulitan untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan
	Peluang (O) : <ol style="list-style-type: none"> Dukungan kebijakan nasional terkait pemberdayaan masyarakat Mendapat bantuan modal usaha Dukungan program pemberdayaan dari pemerintah provinsi Papua Peluang pasar dan permintaan terhadap produk 	<div> Strategi S-O (Agresif) <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan model pengelolaan HHK, HHBK dan jasa lingkungan berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan Mendorong pengelolaan hasil hutan adat yang berorientasi pada pasar domestic dan internasional </div> <div> Strategi W-O (Diversifikatif) <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat sector kehutanan melalui penyuluhan dan pendampingan Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang sinergitas program-program pemberdayaan </div>

hasil hutan 5. Adanya dukungan mitra usaha 6. Meningkatnya PAD		masyarakat adat lintas sector dan tertata dari hulu hingga hilir
Ancaman (T): 1. Terjadi tumpang tindih antara peraturan daerah dan peraturan pusat terkait pengelolaan hutan 2. Belum ada peta yang mengatur batas-batas kepemilikan hutan 3. Ijin pengelolaan hutan menjadi kewenangan provinsi 4. Terbatasnya anggaran pengelolaan sector kehutanan dari pemerintah pusat 5. Kewenangan pengelolaan sector kehutanan dialihkan ke provinsi	Strategi S-T (Konsolidatif) 1. Menyiapkan peraturan/regulasi yang mengatur tentang kepemilikan hutan serta batas antar suku. 2. Mempermudah proses perijinan pengelolaan hasil hutan	Strategi W-T (Defensif): 1. Melibatkan kelembagaan adat dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan 2. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat

Berdasarkan hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan analisis SWOT, diperoleh alternatif-alternatif strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut :

1. Strategi S-O (Kekuatan dan Peluang)

Strategi yang bersumber dari Strengths dan Opportunities ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan yang bersumber dari lingkungan internal untuk memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal dalam memberdayakan masyarakat adat di kabupaten Kepulauan Yapen. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan model pengelolaan HHK, HHBK dan jasa lingkungan berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan.

Strategi ini diperlukan karena berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dalam pengelolaan hasil hutan selama hanya dilakukan masyarakat adat secara tradisional dengan peralatan yang sederhana, selain itu kebijakan atau konsep yang diturunkan pemerintah kurang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat, serta tidak berkelanjutan.

- Mendorong pengelolaan hasil hutan yang berorientasi pada pasar domestik dan internasional
 Strategi ini juga diperlukan karena salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini belum berorientasi pasar, kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat adat tidak dapat menikmati nilai tambah dari suatu produk yang dihasilkan dan terkesan hanya sekedar

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu diperlukan sebuah strategi yang tidak hanya melihat pada peluang pasar domestik tapi juga pasar internasional.

2. Strategi S – T (Kekuatan dan Ancaman)

Strategi yang bersumber dari Strengths dan Threats ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan yang bersumber dari lingkungan internal untuk mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di kabupaten Kepulauan Yapen. Strategi yang diambil adalah :

- a. Menyiapkan peraturan/regulasi yang mengatur tentang kepemilikan tanah/hutan adat serta batas antar suku.

Strategi ini bertujuan untuk memberikan kepastian secara hukum terhadap kepemilikan atas tanah yang dimiliki masyarakat adat, sehingga akan terlihat dengan jelas mana yang menjadi tanah/hutan Negara dan mana yang menjadi hutan adat. Selain itu strategi ini diperlukan agar dapat menghindari terjadinya konflik batas tanah adat antar suku yang mendiami wilayah tersebut.

- b. Mempermudah proses perijinan pengelolaan hasil hutan

Strategi ini diperlukan karena dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan sector kehutanan ke tingkat provinsi menyebabkan urusan perijinan menjadi panjang karena harus ke provinsi. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat adat yang oleh KPH Yapen diarahkan ke pengelolaan hasil hutan kayu menjadi semakin sulit karena terkait perijinan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan kayu yang dilakukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan local saja dan dilakukan secara individu tanpa melalui sebuah kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sudah diatur oleh pemerintah.

3. Strategi W – O (Kelemahan- Peluang)

Strategi yang bersumber dari Weakness dan Opportunities ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan meminimalkan kelemahan yang bersumber dari lingkungan internal untuk mengambil peluang dari lingkungan eksternal dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat adat sector kehutanan melalui penyuluhan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Strategi ini diperlukan karena dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pada umumnya masyarakat adat belum memahami tentang maksud dan tujuan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat adat sector kehutanan yang selama ini dilaksanakan. Strategi ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan.

- b. Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang sinergitas program-program pemberdayaan masyarakat adat lintas sector dan tertata dari hulu hingga hilir.

Strategi ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan sinergitas antar lembaga dan antar sector yang terkesan selama ini berjalan sendiri-sendiri yang menjadi salah satu kelemahan. Untuk itu diperlukan sebuah regulasi/perda yang diharapkan dapat menata program-program pemberdayaan masyarakat yang ada pada masing-masing sector agar dapat menyelesaikan permasalahan dari hulu hingga ke hilir.

4. Strategi W – T (Kelemahan-Ancaman)

Strategi yang bersumber dari Weakness dan Threats ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan meminimalisir kelemahan yang bersumber dari lingkungan internal dan juga

digunakan untuk menghindari ancaman dari lingkungan eksternal dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan kelembagaan adat dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan ;
Strategi ini diperlukan karena peran kelembagaan adat sangat penting dalam mendukung dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang diturunkan kepada masyarakat adat. Keterlibatan lembaga adat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan karena kelembagaan adatlah yang lebih tahu permasalahan dan keinginan masyarakat adat untuk diberdayakan.
- b. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat adat ;
Strategi ini diperlukan karena masyarakat adat pada umumnya sangat terbatas dalam pengetahuan dan ketrampilan terhadap pengelolaan hasil hutan. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi masyarakat adat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan hasil hutan selama hanya dilakukan masyarakat secara tradisional dengan peralatan yang sederhana, selain itu kebijakan atau konsep yang diturunkan pemerintah kurang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat, serta tidak berkelanjutan
2. Peran kelembagaan adat belum maksimal dalam mendukung kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.
3. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat sector kehutanan kurang didukung dengan penyediaan tenaga pendamping, kelembagaan kampung, sarana prasarana dan pemberian modal usaha.
4. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat sector kehutanan di Provinsi Papua terlihat belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan program sehingga terkesan masing-masing sector jalan sendiri-sendiri
5. Belum adanya peraturan daerah (perda/perdasus) yang mengatur tentang batas kepemilikan tanah dan hutan adat sehingga dapat menimbulkan konflik antar suku.
6. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini dalam pengelolaan hasil hutan yang belum berorientasi pasar, kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat adat tidak dapat menikmati nilai tambah dari suatu produk yang dihasilkan dan terkesan hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7. Pemerintah perlu memberikan kepastian secara hukum terhadap kepemilikan atas tanah yang dimiliki masyarakat adat, sehingga akan terlihat dengan jelas mana yang menjadi tanah/hutan Negara dan mana yang menjadi hutan.

B. Saran/Rekomendasi

1. Pemerintah perlu menyiapkan model pengelolaan HHK, HHBK dan jasa lingkungan berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan.
2. Mendorong pengelolaan hasil hutan yang berorientasi pada pasar domestik dan internasional
3. Menyiapkan peraturan/regulasi yang mengatur tentang kepemilikan tanah/hutan serta batas antar suku.

4. Mempermudah proses perijinan pengelolaan hasil hutan
5. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan yang berkelanjutan.
6. Menyiapkan regulasi yang mengatur tentang sinergitas program-program pemberdayaan masyarakat adat lintas sector dan tertata dari hulu hingga hilir.
7. Melibatkan kelembagaan adat dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan hutan;
8. Pendidikan dan pelathan yang berkelanjutan bagi masyarakat adat ;

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Provinsi Papua, 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2014-2019). Jayapura;
- BPS Provinsi Papua.2017. Papua Dalam Angka. Jayapura
- BPS Kepulauan Yapen, 2017. Kabupaten Dalam Angka, Serui
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2016. Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Jayapura;
- Arsyad, Lincolin at all. 2011. Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Haeruman, Herman. 2001. Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal: Bunga Rampai. Indonesia: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota.
- KPHK Yapen, 2015. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Yapen. Serui.
- Munir, Risfan dan Fitanto, Bahtiar. 2004. Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan. Indonesia: Local Governance Support Program
- Sumodiningrat, Gunawan,1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta
- World Bank. 2011. Local Economic Development, Urban Development Unit, Washington D.C.

STRATEGI BUMDES DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT LOKAL “DESA BENDO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A.Taufiq Hidayat

Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

kakaafik@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa merupakan harapan dari kementerian desa sebagai badan yang mampu meningkatkan semua potensi yang ada di desa, seperti usaha mikro (kerajinan tangan, bank sampah, lumbung padi) dan potensi alamnya (embung, bukit dan waduk). Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mendeskripsikan Strategi Badan Usaha Milik Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Lokal. Studi tentang Pengelolaan Wisata Waduk Grobogan desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan subyek penelitian adalah informan yang sudah jelas terkait tugas dan fungsinya yang dapat memberikan informasi yang akurat dan signifikan berkaitan dengan strategi Badan Usaha Milik Desa wisata waduk grobogan. Penentuan para informan tersebut dengan cara *purpose sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang digunakan ialah SOS, artinya “Seng penteng mlakuO Sek”. Berawal dari pemuda karang taruna yang tebiasa rapat disekitar waduk, kemudian yakin waduk tersebut dapat diubah menjadi kawasan wisata, modal iuran perorangan tanpa bantuan dari desa dapat menarik pengunjung, desa akhirnya memberikan bantuan dan sekarang dijadikan unit badan usaha milik desa, kesejahteraan anggota organisasi wisata meningkat dari 100 ribu/minggu menjadi 300 ribu/minggu. Kesejahteraan masyarakat lokal ikut terwujud dengan berbagai usaha kios dan warung disekitar wisata waduk. Kesimpulannya bahwa tindakan secara rasional berdasarkan tujuan dan keyakinan yang jelas dapat membangkitkan semangat mewujudkan sesuatu, dalam hal ini ialah memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan wisata.

Kata kunci : Strategi Bumdes, Pengelolaan wisata, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Hope of Village-Owned Enterprises applied by the grobogan reservoir tourism manager was able to empower local communities to be more productive whose output of the grobogan reservoir became a business entity owned by Bendo village which provided the largest village income outperforming the other Bendo village companies considering that other Bendo village businesses suffered losses like the rice barn Village-Owned Enterprises. The purpose of this study is to understand and describe: Strategies of Village-Owned Enterprises in Empowering Local Communities. Study of Grobogan Reservoir Tourism Management in Bendo Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. The research method used is qualitative and the research subjects are informants who are clearly related to their duties and functions who can provide accurate and significant information relating to the strategy of the Grobogan Reservoir Village Owned Enterprise. Determination of the informants by means of purpose sampling. Based on the results of the study, the strategy used was SOS, meaning "Zinc is important for me". Starting from youth youth who are accustomed to meeting around the reservoir, then believe the reservoir can be turned into a tourist area, individual contribution capital without assistance from the village can attract visitors, the village finally provides assistance and is now a village-owned enterprise unit, the welfare of members of tourism organizations increases from 100 thousand / week to 300 thousand / week. The well-being of the local community came into being with various business stalls and stalls around the reservoir. The conclusion is that actions rationally based on clear goals and beliefs can arouse the spirit of making things happen, in this case empowering local communities through tourism development.

Keywords: Bumdes Strategy, Tourism Management, Welfare.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 90 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa dengan: a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan, b)

melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, c) memprioritaskan badan usaha milik desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Berikut adalah keberhasilan yang mulai dipetik desa-desa di berbagai pelosok Indonesia berkat kehadiran BUMDes di desanya. Mereka mengembangkan potensi secara maksimal sehingga layak disebut sebagai 5 BUMDes juara. Berikut ini lima BUMDes hebat yang baru-baru ini di rilis kemendesa sebagai BUMDes paling terbaik di Pulau Jawa yakni: 1) BUMDes Karangandri Sejahtera, 2) BUMDes Tirta Mandiri, 3) BUMDes Srisadani, Kedungprimen, Bojonegoro, 4) BUMDesa Tirtonirmolo, 5) BUMDes Sejahtera Bleberan

Dari lima BUMDes terbaik versi kementerian desa tersebut tiga diantaranya (mayoritas) merupakan pengembangan kawasan wisata alam, jadi kesimpulan sementara peneliti ialah pemanfaatan BUMDes untuk pengembangan kawasan wisata alam lebih menjanjikan serta mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan wisata.

Bumdes Bendo juga melakukan hal yang sama yakni fokus pada pengembangan wisata alam pada sektor waduk, namun fokus tersebut bukan tanpa alasan, pihak Bumdes memprioritaskan program pada wisata waduk grobogan setelah terbukti waduk mampu memberikan income, waduk menjadi tempat wisata setelah melewati berbagai macam permasalahan seperti tak adanya dukungan desa terkait dana pada awalnya, public trust dan minimnya anggota pengurus, sedangkan untuk saat ini yang menjadi permasalahan ialah sulitnya memperoleh ijin tertentu dari beberapa dinas terkait serta beberapa pajak yang harus dibayar padahal pada saat proses pendirianya dinas terkait kurang memberi dukungan namun saat waduk nampak memiliki nilai ekonomi beberapa dinas muncul ke permukaan, yang support ada beberapa, namun yang signifikan hanya dinas pariwisata yang memberikan fasilitas studi banding ke tempat wisata yang serupa sebagai feed back.

Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami strategi BUMdes dalam mendukung pengelolaan wisata alam sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan pendapatan desa, tujuan ini dibuat berdasarkan literasi dari penelitian sebelumnya yang serupa seperti Penelitian tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES DAN OPTIMALISASI WISATA AIR DESA PAGEDENGAN KECAMATAN PAGEDENGAN KABUPATEN TANGERANG”. Oleh Yuni (2015) jurnal ISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bumdes secara umum sudah berjalan dengan baik, terutama dari segi keuangan dan perencanaan pada aspek bumdes wisata air yang optimal sehingga program bumdes di bidang tersebut dapat menambah pendapatan asli desa dikarenakan didukung sumber daya manusia yang berkualitas, sosialisasi dan kordinasi yang baik. Strategi berfokus pada pembenahan wisata air

Anggaran dana desa yang semakin lama semakin besar diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercatat Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Sri Mulyani 2017).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, sehingga peneliti kualitatif harus memiliki sifat *open minded* terhadap gejala sosial. Me-leong (2012) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dan diperkuat oleh data-data tertentu. Metode penelitian ini

digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan strategi BUMDes dan model pengelolaan wisata waduk grobogan desa bendo kecamatan kapas kabupaten bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian dimulai pada bulan Oktober 2018 – Juli 2019

Subyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang sudah jelas terkait tugas dan fungsinya yang dapat memberikan informasi yang akurat dan signifikan berkaitan dengan strategi BUMDES wisata waduk grobogan. Penentuan para informan tersebut dengan cara purpose sampling, artinya memilih informan yang bertujuan memenuhi beberapa kriteria, seperti siapa saja orang yang tepat, yang kompeten, yang dapat memberikan informasi yang terpercaya kebenarannya dan akurasi Creswell (2009:77). Berdasarkan hal tersebut maka beberapa informan yang dianggap memenuhi beberapa kriteria untuk dijadikan subyek dalam penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut :

1. Kepala desa, informan berkaitan dengan detail dana yang diterima dari program dana desa.
2. Ketua dan Bendahara Bumdes, informan berkaitan dengan detail dana peruntukan wisata waduk.
3. Ketua Pokdarwis (kelompok sadar wisata) waduk grobogan, informan berkaitan dengan sejarah, pengelolaan, hambatan, struktur organisasi dan kegiatan secara umum.
4. Bendahara Pokdarwis waduk grobogan, informan berkaitan dengan dana wisata waduk
5. Anggota Pokdarwis waduk grobogan, informan berkaitan dengan job description dan kesejahteraan setiap anggota
6. Paguyuban pedagang wisata waduk grobogan, informan terkait manfaat keberadaan wisata waduk terhadap ekonomi pedagang
7. Seluruh warga RT:01 Desa bendo, informan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar mengingat lokasi wisata waduk grobogan tersebut berada pada lingkungan RT;01

Garis Besar Panduan pertanyaan untuk informan (pengelola waduk) :

1. Bagaimana sejarah awal terbentuknya wisata waduk grobogan ?
2. Kendala seperti apa yang dialami pada saat proses terbentuknya wisata waduk grobogan ?
3. Bagaimana mengatasi kendala tersebut ?
4. Saat ini, apa saja kendala yang sedang dihadapi kaitanya dengan pengembangan wisata waduk grobogan ?
5. Menurut pendapat anda bagaimana solusi terkait kendala yang sedang dihadapi saat ini ?

Garis Besar Panduan pertanyaan untuk informan (Kepala desa) :

1. Bagaimana persepsi pemerintah desa terkait wisata waduk grobogan ?
2. Ketika proses pembentukan wisata waduk oleh pengelola bagaimana sikap pemerintah desa pada saat itu ?
3. Adakah bantuan signifikan yang diberikan ?
4. Saat ini, apa saja kendala yang sedang dihadapi kaitanya dengan pengembangan wisata waduk grobogan ?
5. Menurut pendapat anda bagaimana solusi terkait kendala yang sedang dihadapi saat ini ?

Garis Besar Panduan pertanyaan untuk informan (Ketua BUMDES) :

1. Bagaimana persepsi BUMdesa terkait wisata waduk grobogan ?
2. Ketika proses pembentukan wisata waduk oleh pengelola bagaimana sikap BUMdesa pada saat itu?
3. Adakah bantuan signifikan yang diberikan ?
4. Saat ini, apa saja kendala yang sedang dihadapi kaitanya dengan pengembangan wisata waduk grobogan ?
5. Menurut pendapat anda bagaimana solusi terkait kendala yang sedang dihadapi saat ini ?

Creswell, 2009:63 mengungkapkan empat langkah analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian Kualitatif, yaitu: (1) menentukan kasus/fenomena yang akan diteliti; (2) memilih bentuk data yang akan dicari dan dikumpulkan; (3) peneliti melakukan interpretasi secara langsung, interpretasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kasus/fenomena akan selaras dengan maksud dan tujuan penelitian, setiap interpretasi dapat menggambarkan makna-makna yang terdapat dalam suatu kasus/fenomena yang diteliti, yang diintegrasikan dapat menggambarkan keseluruhan pola yang nampak di lapangan seperti faktor penghambat dan lain-lain; (4) pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data dari interpretasi yang telah dilakukan, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu fenomena/kasus, apakah dapat menerapkannya pada sebuah populasi tertentu yang serupa

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Tema yang dibahas dalam penelitian ini ialah strategi BUMDes dan model pengelolaan wisata waduk grobogan desa bendo kecamatan kapas kabupaten bojonegoro yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat lokal; 2) sebagian besar data yang dikumpulkan ialah hasil wawancara dan dokumentasi kondisi waduk grobogan pada saat sebelum menjadi tempat wisata hingga saat ini menjadi tempat wisata, berikut disajikan dalam beberapa gambar:



Gambar 1.
Daerah bibir waduk



Gambar 2.
Daerah panggul waduk



Gambar 3.
Dataran barat waduk



Gambar 4.
Tempat masuk



Gambar 5.
Tempat bermain anak



Gambar 6.
Replika perahu tempat swafoto



Gambar 7.
Paguyuban pedagang waduk (PPW)

3) Interpretasi data pada gambar 2.1 ialah mengenai awal mula tempat diskusi dan rapat panitia 17 agustus oleh karang taruna yang kemudian ada ide untuk mempercantik supaya lebih nyaman, kreativitas berbagai bendera negara pada gambar tersebut terinspirasi dari gelaran piala dunia pada saat itu yang akan berlangsung; gambar 2.2 ialah panggul waduk yang ditambahkan ayunan dan hiasan lambang cinta sebagai tempat swafoto mengingat makin banyak muda-mudi yang berkunjung; gambar 2.3 ialah dataran tinggi sebelah barat waduk yang dibuat seolah seperti lorong warna-warni; gambar 2.4 merupakan tempat masuk awal pengunjung akan memasuki waduk yang melewati jembatan utama menuju lokasi utama; gambar 2.5 ialah tempat bermain yang dibangun untuk anak-anak karena semakin lama wisata waduk tidak hanya dikunjungi kaum muda-mudi tetapi juga sarana rekreasi keluarga; gambar 2.6 salah satu wahana foto berupa perahu yang dibuat secara gotong rotong; gambar 2.7 beberapa warung makan yang dikelola dibawah naungan paguyuban pedagang wisata waduk grobogan.

4) Semangat membuat sesuatu lebih indah dan bermanfaat adalah modal awal para pemuda karang taruna mewujudkan waduk grobogan sebagai tempat wisata, dengan biaya seadanya dan itupun dari iuran bersama yang kemudian desa melihat hal tersebut sebagai potensi yang pada akhirnya mau memberikan bantuan dana serta mulai menjadikan wisata waduk grobogan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Desa, pola seperti ini dapat dilakukan pada daerah dengan potensi alam yang serupa, hal

ini dibuktikan dari studi banding yang telah dilakukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) desa bendo di beberapa lokasi yang serupa seperti waduk selorejo Batu, kafe sawah Pujon Kidul dan Langgeran Yogyakarta.

Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh berupa data dokumentasi dan hasil wawancara, pada gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 merupakan murni hasil kerja sama secara gotong royong para pemuda karang taruna desa bendo dengan semangat “Seng penteng mlakuO Sek”, semangat SOS, begitulah para pemuda karang taruna menyebut motto kerja keras mereka, mereka berfikir kalau menunggu desa memberikan bantuan tentu visi mereka sulit terwujud mengingat pada berbagai rapat kegiatan formal di balai desa usul visi mereka mengenai pengembangan waduk sebagai basecamp mereka selalu ditolak.

Tindakan yang dilakukan pemuda karang taruna tersebut yang kemudian membentuk suatu kelompok dengan nama kelompok sadar wisata (pokdarwis) dapat disebut dengan tindakan rasional instrumental, yang menurut Weber dalam Wirawan (2009) tindakan rasional bersifat instrumental adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan.

Tujuan awal pengelola waduk ialah ingin membuat lokasi lebih nyaman saat kegiatan diskusi dan rapat kerja dilakukan kemudian berkembang menjadi bagaimana tempat tersebut dapat menghasilkan income melihat semakin banyak pengunjung yang datang karena foto keindahan hasil kerja gotong royong tersebut diupload, dishare di media sosial seperti facebook, twitter dan instagram.

Desa kemudian melihat tersebut sebagai suatu potensi wisata yang pada akhirnya mau memberikan bantuan awal dengan nominal 40 juta rupiah, dana tersebut dialokasikan untuk lebih memperindah waduk dan area sekitar, gambar 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 ialah perubahan setelah kelompok sadar wisata memperoleh bantuan dari desa. Bantuan dari desa semakin menambah motivasi kelompok sadar wisata untuk lebih mengembangkan waduk menjadi lebih baik, terbukti rencana pengelolaan mulai diaplikasikan, mulai dibentuknya paguyuban pedagang wisata waduk, pengelolaan parkir, tiket masuk hingga menyediakan paket outbound bagi siswa, mahasiswa sampai karyawan perusahaan tertentu

Temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Wijayanto 2017 tentang potensi pengembangan wisata air di waduk jatibarang semarang yang hasilnya berdasarkan analisis persepsi daya tarik objek wisata mayoritas responden (77%) menyatakan kondisi objek wisata dalam keadaan baik pada kondisi fisik waduk, sedangkan fasilitas dan aksesibilitas dalam keadaan sangat baik setelah adanya renovasi. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Suwanto (2002), mengatakan bahwa pembangunan sarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan akses menuju objek wisata tersebut yang nantinya akan menguntungkan objek wisata itu sendiri. Mayoritas responden menyatakan daya tarik wisata di Objek Wisata Waduk Jatibarang dalam kondisi baik, perpaduan antara daya tarik yang alami dengan buatan mampu menarik minat pengunjung untuk berwisata.

Perkembangan wisata waduk grobogan yang relatif cepat membuat dinas pariwisata kabupaten bojonegoro ingin berkontribusi dalam mewujudkan master plan pengelola waduk yaitu menuju desa wisata, langkah awalnya ialah mengajak kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai pengelola waduk untuk studi banding ke berbagai tempat wisata yang serupa dan sesuai dengan master plan.

Badan usaha milik desa akhirnya memutuskan untuk menjadikan wisata waduk grobogan sebagai salah satu unit usaha dari badan usaha milik desa agar wisata waduk grobogan mendapatkan dana yang besar dengan tujuan nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat lokal. Strategi keputusan tersebut relatif tepat dikarenakan unit usaha badan usaha milik desa bendo yang lainnya belum memberikan keuntungan yang signifikan, bahkan salah satu unit usahanya yakni lumbung padi dan bank sampah mengalami kerugian. Dana senilai 100 juta rupiah diberikan badan

usaha milik desa bendo secara bertahap kepada pengelola waduk untuk berbagai keperluan waduk seperti pembuatan wahana baru seperti kapal bebek dan rumah apung serta untuk pembiayaan perawatan semua wahana.

Hasilnya cukup signifikan, terbukti wisata waduk dapat meningkatkan pendapatan desa karena sebelumnya belum memberikan sumbangsih, sekarang 20% dari keuntungan wisata waduk masuk pada pendapatan asli desa (PAD) dan Badan usaha milik desa (BUMDES) bendo /6 bulan.

Kesejahteraan masyarakat lokal terlihat semakin baik dengan dibukanya wisata waduk grobogan, terlihat dari terserapnya profesi baru bagi masyarakat setempat yang semula menganggur menjadi mendapat pekerjaan seperti berdagang didalam maupun diluar kawasan wisata, festival band untuk menghibur pengunjung serta petugas parkir yang keanggotaanya dirolling setiap RT.

Strategi badan usaha milik desa yang berfokus pada potensi wisata khususnya wisata alam/air sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat lokal, hal tersebut sesuai dengan penelitian tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES DAN OPTIMALISASI WISATA AIR DESA PAGEDENGAN KECAMATAN PAGEDENGAN KABUPATEN TANGERANG”. Oleh Yuni (2015) jurnal ISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bumdes secara umum sudah berjalan dengan baik, terutama dari segi keuangan dan perencanaan pada aspek bumdes wisata air yang optimal sehingga program bumdes di bidang tersebut dapat menambah pendapatan asli desa dikarenakan didukung sumber daya manusia yang berkualitas, sosialisasi dan kordinasi yang baik.

KESIMPULAN

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita seluruh rakyat indonesia, untuk itu perlu dilakukan upaya kerja sama antara pemerintah beserta aparaturnya dengan masyarakat hingga tingkat terbawah, Badan usaha milik desa sebagai harapan dari keberadaan kementerian desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan berbagai unit usaha yang mendukung kegiatan desa yang bermanfaat serta mampu mendukung potensi unik lokal menjadi hal yang menguntungkan bagi masyarakat setempat dan fokus pada wisata alam/air merupakan bukti kesuksesan salah satu strategi Bumdes dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tujuan awal pengelola waduk ialah ingin membuat lokasi lebih nyaman saat kegiatan diskusi dan rapat kerja dilakukan kemudian berkembang menjadi bagaimana tempat tersebut dapat menghasilkan income melihat semakin banyak pengunjung yang datang. Strategi pemasaran sederhana yang efektif ialah dengan memaksimalkan media sosial, karena foto keindahan hasil kerja gotong rotong tersebut diupload, dishare di media sosial seperti facebook, twitter dan instagram. Tindakan yang menurut pemikiran sangat potensial secara ekonomis hendaknya segera dilakukan tanpa menunggu bantuan lembaga terkait, terlebih pemikiran tersebut telah disepakati secara berkelompok, hasil tersebut jika terwujud dalam bentuk sesuatu yang bernilai ekonomis akan memunculkan banyak investor entah itu dalam bentuk lembaga terkait maupun swasta.

SARAN

Dukungan yang signifikan hendaknya dilakukan oleh pihak stakeholder, dalam hal ini ialah dinas pariwisata, dinas pengairan, pemerintah desa dan bumdes yang mana sebaiknya dilakukan di awal bilamana terdapat suatu sumber daya alam tertentu pada daerahnya yang berpotensi memiliki nilai jual, artinya tanpa menunggu sekelompok orang berupaya secara mandiri mengembangkan potensi alam, survey mengenai detail sumber daya alam yang berpotensi ekonomis harus ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung penelitian ini: Bapak Andi Prabowo selaku Kepala Desa Bendo, Asnawi selaku ketua BUMDES Bendo, Ibu Muntafi'ah selaku Bendahara BUMDES, A. Sholehudin selaku ketua Pokdarwis dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Berdesa, 5 *Bumdes Terbaik Pulau Jawa*, diakses pada 15 september 2018 (<http://www.berdesa.com/ini-dia-lima-bumdes-terbaik-di-pulau-jawa/>)
- Creswell, J.B. 2009. *Penelitian Kualitatif dan Desan Riset Edisi Ketiga*. Jakarta : Pustaka belajar.
- Hidayat. 2014. *Pengaruh Fasilitas Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan*. Thesis S2, Universitas Kanjuruhan Malang
- Moloeng, lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Mulyani, Sri. 2017. *Esensi UU Desa dan Dana Desa*. Jakarta:SKB empat Menteri:3-5
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 90
- Wirawan. 2009. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Yogyakarta : Kencana
- Yuni. 2015. *Implementasi Program Bumdes Dan Optimalisasi Wisata Air Desa Pagedengan Kecamatan Pagedengan Kabupaten Tangerang*. jurnal ISIP: 27-37.



**PENGEMBANGAN EKONOMI DESA MELALUI PENGELOLAAN SAGU DALAM
RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI (STUDI KASUS DESA SIMPORO
KABUPATEN EBUNGAUW KABUPATEN JAYAPURA PAPUA)**

**VILLAGE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH MANAGEMENT SAGO USES
INCREASE SAGO'S FARMER INCOME (CASE STUDY OF EBUNGAUW DISTRICT
SIMPORO VILLAGE JAYAPURA PAPUA DISTRICT)**

Agustinus Hartopo

Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah : Memperoleh gambaran pendapatan keluarga petani Sagu di kampung Simporo Distrik Ebungfo Kabupaten Jayapura Papua. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petanisagu.

Metode Penelitian menggunakan Deskriptif kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini menggambarkan pendapatan petani serta upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan petani. Penelitian menghasilkan temuan, rata-rata pendapatan Rp. 4.816.000,-.Pendapatan responden tertinggi dari responden ternyata dicapai oleh Motorace (pengemudi speed boat). Para pengemudi menyewakan jasa angkutan danau.Tingginya pendapatan pengemudi ini, menunjukan masyarakat sangat tergantung dengan adanya angkutan sarana air. Pendapatan tertinggi kedua yaitu anggota MRP.Pendapatan tertinggi ketiga yaitu pengolah sagu. Mereka memperoleh setiap bulannya rata-rata Rp. 2.800.000,-. Pendapatan ini diperoleh produksi sagu basah. Dari hasil wawancara pembuatan sagu basah ini dikerjakan dalam 1 minggu. Apabila setiap bulan dapat menebang pohon sagu sebanyak 4 kali maka diperoleh pendapatansebesar Rp. 11.200.000. Lebih besar pendapatan dari motor race maupun anggota MRP.Temuan dalam penelitian ini dalam mengerjakan pengolahan Sagu tidak ditemukan biaya tenaga kerja, karena dikerjakan secara kekeluargaan,

Kata Kunci : Pendapatan, Petani Sagu

ABSTRACT

The purpose of this study is: Obtain a picture of the income of Sago farmers' families in the village of Simporo Ebungfo District. Identify the factors that influence the income of sago farmers. The research resulted in findings, the average income of Rp. 4,816,000. The highest respondent's income from respondents was actually achieved by Motorace (speed boat driver). These drivers rent out lake transportation services. The high income of the driver shows that the community is very dependent on the availability of water transportation. The second highest income is MRP members.

The third highest income is sago processing. They get an average of Rp. 2,800,000. This income is obtained from the production of wet sago. From the results of the interview the making of this wet sago was done in 1 week. If every moon can cut sago trees 4 times, then an income of Rp. 11,200,000. Greater income from the motor race and members of the MRP. The findings in this study in working on the processing of Sago found no labor costs, because it is done in a family,

Keywords: Income, Sago Farmers

PENDAHULUAN

Salah satu potensi yang dimiliki Kampung Simporo yaitu adanya dusun Sagu. Hampan dusun sagu masih luas di sepanjang tepi danau Sentani. Dusun Sagu yang dimiliki kampung Simporo dengan luas 1600 Ha. Dusun Sagu ini terpisah dengan kampung Simporo. Luas Kampung Simporo keseluruhan \pm 214 Ha. Terdiri dari daratan \pm 202 Ha dan \pm 12 Ha Perairan Danau (Profil Kampung Simporo 2017). Potensi ini dapat menjamin bagi ekonomi penduduk kampung Simporo.

Namun dari sisi pendapatan penduduk diduga masih rendah. Dari sisi pendapatan apabila hutan sagu diolah tentu akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Fenomena ini menarik dicari penyebabnya.

Dalam siklus produksi dikenal adanya Input, proses, output. Dari sisi pendapatan yang rendah tentu akan menjadi pertanyaan faktor-faktor apa yang menyebabkan pendapatan petani sagu sehingga pendapatan rendah. Dari sisi input apakah ada peralatan yang kurang sehingga ketika produksi sagu menjadi rendah. Dari sisi proses apakah sudah tersentuh oleh adanya teknologi. Dari sisi output bagaimana hasil produksi dapat didistribusi. Hal-hal ini tentu akan memiliki pengaruh kaitannya dengan pendapatan.

Pohon sagu memiliki nilai ekonomis. Satu pohon sagu jika dijual memiliki harga Rp. 800.000,-/batang. Dan dalam satu hektar dengan asumsi terdapat 100 pohon. Maka tanpa ada sentuhan apapun sudah memiliki nilai Rp. 80.000.000. Tetapi jika diolah tentu akan memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Maka dari sisi nilai ekonomi satu pohon sagu tentunya sudah merupakan asset pendapatan bagi keluarga di penduduk di Simporo.

Pendapatan lain dari pohon sagu ternyata diperoleh dari bagian pohon lainnya. Pelepah sagu memiliki nilai ekonomi. Daun sagu ternyata dapat juga dimanfaatkan sebagai atap. Kulit pohon sagu dapat diolah dan akan mendatangkan pendapatan petani sagu. Sayangnya potensi ini belum diolah secara baik.

Keberadaan Ondofolo dalam adat memiliki peran strategis dalam pengembangan produksi sagu. Hutan sagu tentunya berhubungan dengan kepemilikan adat secara komunal. Apabila Ondofolo sudah terlibat dalam pengelolaan sagu akan memberikan kontribusi dalam mendukung keberhasilan pengembangan sagu. Misalnya kepemilikan kilang oleh Ondofolo maka masyarakat dapat bekerja di kilang, sekaligus memproduksi sagu. Dengan demikian terjadi simbiosis mutualisme yang dapat menguntungkan dua belah pihak. Pendapatan petani sagu yang sudah terjadi sinergitas antara petani dan ondofolo diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan keluarga yang nantinya akan mengangkat dari kemiskinan.

Permintaan tepung sagu di pasar masih terbuka luas. Penggunaan tepung sagu selain dibuat untuk kebutuhan pangan direvatifnya masih sangat luas. Pemanfaatan sagu untuk industri, biofull, kosmetika merupakan peluang pasar yang dapat menampung hasil pengolahan sagu. Hal ini tentunya akan mendorong bagi pengolahan sagu menjadi barang yang memiliki derivatif tinggi dan pasar semakin membutuhkan supply akan tepung sagu.

Pengembangan sagu nantinya akan dapat dikembangkan menjadi ekowisata. Ekowisata yang dapat dikembangkan misalnya proses pembuatan sagu. Proses pembuatan sagu memiliki rantai proses yang menarik untuk dikembangkan menjadi wisata. Mulai dari penebangan, pengulitan sagu, menogok sagu, memeras sagu, hingga pengendapan untuk memperoleh sari pati sagu. Proses ini sangat menarik terutama bagi wisatawan manca negara yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam pembuatan sagu. Selain itu lingkungan pohon sagu (kawasan sagu) memiliki daya tarik lingkungan. Lingkungan sekitar pohon sagu ternyata memiliki potensi wisata terutama untuk kandungan oksigen (O^2) yang tinggi. Tingginya kandungan O^2 maka sekitar pohon sagu sangat sejuk dan memberikan kandungan udara yang kaya oksigen.

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah masalah pendapatan petani sagu. Potensi sagu sangat besar tetapi pendapatan diduga masih rendah. Maka rumusan masalah yang diajukan adalah Berapa jumlah pendapatan petani sagu di Kampung Simporo dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan penduduk petani Sagu dilaksanakan akan terlihat tingkat kesenjangannya. Sehingga masyarakat sadar akan manfaat dilaksanakan program pengembangan sagu.

Menurut Sumardi, 1982 dalam (Sutinah 2004 : 16-17) Pendapatan dilihat dari tiga sumber pendapatan yaitu :

- a. Pendapatan berasal dari sektor formal yaitu gaji yang diperoleh secara tetap, biasanya gaji bulanan atau gaji mingguan.
- b. Pendapatan yang berasal dari sektor informal yaitu berupa pendapatan tambahan yang berasal dari tukang buruh atau pedagang.
- c. Pendapaan yang berasal dari sektor sub sistem yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa tanaman, ternak dan pemberian orang lain.

Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah hasil penerimaan kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa bunga dan deviden, serta pembayaran tranfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus dalam Rahman, 2011). Upaya peningkatan pendapatan masyarakat ditujukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa program yang diterapkan di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya akan diuraikan sebagai bahan dalam pengembangan program peningkatan pendapatan masyarakat (Soetomo :2013). Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah : (1)

Memperoleh gambaran pendapatan keluarga petani Sagu di kampung Simpuro kelurahan Ebungfo. (2) Mengidentifikasi upaya pendapatan petani sagu setelah adanya program peningkatan produksi.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di Kampung Simpuro Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura. Kampung Simpuro merupakan salah satu dari 5 Kampung yang termasuk dalam wilayah Administrasi Distrik Ebungfauw-Kabupaten Jayapura, Kampung Simpuro terletak disebelah barat ibu kota Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura Papua.

Kampung Simpuro terletak disebelah Selatan Kota Sentani dengan Jarak sekitar 10 KM yang hanya dapat digunakan dengan menggunakan kendaraan motor tempel dari Yahim.

Dari segi ekonomi Kampung Simpuro terletak dipulau di pingiran danau Sentani, sehingga sangat tepat digunakan untuk usaha air tawar dan lahan perkebunan. Berdasarkan pada kondisi geografis tersebut, maka sebagian besar penduduk kampung Simpuro mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani tradisional dan nelayan ikan tradisional keramba apung.

B. Waktu Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan selama 1 bulan dimulai pada bulan awal Oktober 2018. Kajian diawali dengan studi literatur terkait dengan pendapatan keluarga petani Sagu. Survei awal dilaksanakan dengan observasi lokasi kampung Simpuro. Disertai pula dengan pendataan awal terkait dengan calon responden, penyebaran responden. Lingkungan tempat tinggal penduduk diobservasi untuk kemungkinan dapat dihitung potensi yang dapat mendatangkan pendapatan keluarga. Observasi awal juga dilakukan untuk kampung Sagu yang memiliki potensi pendapatan keluarga.

C. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode yaitu: wawancara dan Kuesioner. Wawancara merupakan metode untuk menjaring data dengan responden. Sedangkan kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data.

D. Metode Penelitian

Penentuan Responden

Populasi kajian ini adalah petani sagu di kampung Simpuro. Terdapat 90 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kampung ini. Penentuan responden dilakukan secara Purposive. Sampel penelitian adalah keluarga yang saat ini mengolah sagu.

E. Metode Analisa Data

Analisa data yang akan digunakan merupakan data kuantitatif. Data karakteristik responden dianalisis dengan bantuan software SPSS versi 13.

ANALISA DATA

Mengacu pada tujuan penelitian maka kajian ini menggunakan Deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian deskriptif kuantitatif data dianalisis yang selanjutnya dicari mean, nilai tertinggi, nilai terendah. Pendapatan yang akan dihitung pendapatan kepala keluarga, Istri dan anak. Dalam penelitian ini masih murni menghitung pendapatan belum dikurangi dengan pengeluaran lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran tentang kondisi eksisting saat pengambilan data. Selain itu karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan : umur, pendidikan, tanggungan keluarga dan asal penduduk. Dari tabel IV. 1 dilihat dari asal penduduk 100 % merupakan penduduk asli asal suku bangsa Papua. Penduduk yang berasal dari suku bangsa lain tidak ditemukan dalam penelitian ini. Dari hasil pengamatan ternyata ditemukan masyarakat yang berasal dari Serui. Ini dikarenakan adanya perkawinan antar suku yang ada di Papua. Meskipun demikian tetap diakui sebagai masyarakat asli Papua. Masyarakat asal luar suku Papua tidak ditemukan pada saat kunjungan lapangan.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No.	Umur	Pendidikan	Tagungan Keluarga	Asal Penduduk
1	40	S 1	3	Asli
2	57	S 1	5	Asli
3	62	SMA	6	Asli
4	40	SD	3	Asli
5	38	SMA	5	Asli
6	41	SMP	4	Asli
Total	278		26	
Mean	46,33		4,3	

Sumber : Data Primer 2018

Tanggungan keluarga diartikan sebagai beban yang harus ditanggung oleh kepala keluarga. Dari tabel IV.1 menunjukkan setiap kepala keluarga rata-rata menanggung 4 orang anggota keluarga.

Sedangkan berdasarkan umur responden berusia rata-rata 46 tahun. Rata –rata umur responden ini termasuk umur yang masih tergolong umur produktif. Meskipun ditemukan responden berumur lebih dari umur produktif (62 tahun). Selengkapnya data karakteristik Responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Umur	6	38,00	62,00	278,00	46,3333	10,36661
Pendidikan	6	2,00	5,00	23,00	3,8333	1,16905
Tanggungan	6	3,00	6,00	26,00	4,3333	1,21106
Asal	6	1,00	1,00	6,00	1,0000	,00000
Valid N (listwise)	6					

Sumber : Data Primer Diolah 2018

Dari tabel IV.2. nampak umur responden paling muda berumur 38 tahun dan paling tua berumur 62 tahun. Dilihat dari tingkat pendidikan maka pendidikan paling rendah Sekolah Dasar dan paling tinggi Perguruan Tinggi (S 1). Tanggungan keluarga paling sedikit menanggung 3 anggota keluarga dan paling banyak menanggung 6 anggota keluarga. Sedangkan asal responden seluruhnya merupakan suku yang ada di Papua.

B. Pendapatan Keluarga

1. Pendapatan Kepala Keluarga

Mengacu pendapat Sainudin (2010) menyebutkan Kepala rumah tangga merupakan seorang yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga tersebut. Dalam kasus kampung Simpuro Kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan keluarga. Maka berdasarkan tabel IV.2 kepala rumah tangga memiliki pendapatan, guna menghidupi keluarga. Pendapatan rata-rata ini sebenarnya lebih tinggi nilai dibandingkan upah minimum provinsi yaitu sebesar Rp. 3.000.000 /bulan.

Pendapatan tertinggi dari responden ternyata dicapai oleh Motorace (pengemudi speed boat). Para pengemudi ini menyewakan jasa angkutan danau. Tingginya pendapatan pengemudi ini, menunjukan masyarakat sangat tergantung dengan adanya angkutan sarana air.

Pendapatan tertinggi kedua yaitu anggota MRP. Responden menjadi wakil dalam lembaga adat ini, dapat memperoleh imbalan jasa. Honor yang diterima setiap bulan dapat digunakan guna menghidupi anggota keluarga.

Pendapatan tertinggi ketiga yaitu pengolah sagu. Mereka memperoleh setiap bulannya rata-rata Rp. 2.800.000,-. Pendapatan ini diperoleh produksi sagu basah. Dari hasil wawancara pembuatan sagu basah ini dilaksanakan dalam 1 minggu. Apabila setiap minggu dapat menebang pohon sagu sebanyak 4 kali maka diperoleh pendapatan sebesar Rp. 11.200.000. Lebih besar pendapatan dari motor race maupun anggota MRP.

Tabel 3. Pendapatan Kepala Keluarga

No. Res.	Kerja Sektor Jasa/Pegawai	Pendapatan dari Asset	Pendapatan Lain	Keterangan
1	3.100.000	0	0	Pegawai
2	7.000.000	0	0	Pokja MRP
3	2.500.000	0	0	Keramba Ikan
4	2.500.000	0	0	Pedagang Sagu
5	11.000.000	0	0	Motorace
6	2.800.000	0	0	Sagu
Jumlah	28.900.000	0	0	
Mean	4.816.6666	0	0	

Sumber Data : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel IV. 2 ternyata sumber utama pendapatan keluarga berasal dari kerja di Sektor Jasa/Pegawai. Sedangkan dari pendapatan aset dan pendapatan lain responden menyatakan tidak ada.

C. Pendapatan Istri

Dalam satu keluarga pada saat ini anggota keluarga termasuk istri membantu pendapatan dengan berbagai cara. Berdasarkan tabel IV 3 ternyata istri dapat berkontribusi dalam pendapatan kepala keluarga. Responden lainnya menyatakan tidak memiliki penghasilan untuk mendukung penapian kepala keluarga. Hanya satu responden yang menyatakan berkontribusi terhadap pendapatan kepala keluarga. Penghasilan ini diperoleh dari usaha berkebun.

Tabel IV.3 Pendapatan Istri

No. Res.	Kerja Sektor Jasa/Pegawai	Pendapatan dari Asset	Pendapatan Lain	Keterangan
1	0	0	0	-
2	4.000.000	0	0	Hasil Kebun
3	0	0	0	-
4	0	0	0	-
5	0	0	0	-
6	0	0	0	-
Jumlah	4.000.000	0	0	
Mean	666.6666	0	0	

Sumber Data : Data Primer 2018

D. Pendapatan Anak

Berdasarkan tabel IV.3 ternyata anak-anak responden belum berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dapat ditelusuri dari sisi umur belum ada yang bekerja atau bahkan memiliki anak besar yang bekerja di luar daerah

Tabel 4. Pendapatan Anak

No. Res.	Kerja Sektor Jasa/Pegawai	Pendapatan dari Asset	Pendapatan Lain	Keterangan
1	0	0	0	-
2	0	0	0	-
3	0	0	0	-
4	0	0	0	-
5	0	0	0	-
6	0	0	0	-
Jumlah	0	0	0	
Mean	0	0	0	

Sumber Data : Data Primer 2018

E. Pendapatan dari Pohon Sagu

Dari hasil wawancara dengan responden Luas lahan dusun Sagu di Kampung Simpuro seluas 1.600 Ha. Dusun Sagu berada di depan kampung Simpuro yang dipisahkan oleh adanya perairan danau Sentani. Letaknya terpisah dengan kampung Simpuro dan hanya dapat ditempuh dengan menggunakan speed boat atau perahu dayung. Dusun sagu masih lebat dan alamiah. Belum diatur dengan jalan setapak ataupun pembagunan kanal-kanal. Dusun Sagu dimiliki masyarakat secara komunal. Artinya dusun sagu ini dimiliki bersama dalam satu keluarga besar.

Dengan menggunakan asumsi setiap hektar terdapat 100 pohon sagu maka dengan luas dusun sagu yang dimiliki saat ini seluas 1600 ha. Maka akan ada 160.000 pohon sagu. Harga satu pohon Sagu

berdasarkan wawancara dengan penduduk dijual dengan harga Rp. 800.000. Jika hanya menjual saja tanpa mengolah menjadi pati Sagu akan diperoleh nilai sebesar Rp. 128.000.000.000,- (Seratus dua puluh delapan milyar rupiah).

Pohon Sagu memiliki nilai tambah lainnya berupa pelepah, daun, pucuk sagu yang kalau dinilai menjadi uang dapat mencapai Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per pohon. Apabila data ini mendekati kebenaran maka ada nilai ekonomi sebesar Rp. 240.000.000.000,- (Dua ratus empat puluh milyar rupiah). Ini merupakan sebuah potensi yang mana penduduk tanpa mengeluarkan tenaga untuk bekerja. Tetapi kalau penduduk mau bekerja mengolah sagu akan ada nilai lebih.

Satu pohon sagu setinggi 12 meter dapat menghasilkan 10 karung (ukuran 15 kg) Sagu basah. Setiap karung dijual ke pasar Sentani seharga Rp. 200.000,-. Maka akan diperoleh nilai besar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Dengan luas dan jumlah pohon sagu yang ada saat ini dapat menghasilkan dana sebesar Rp. 320.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar rupiah)

Pelepah daun sagu selain dapat diolah menjadi gula cair, daun dan lidinya memiliki nilai ekonomi. Daun dapat dianyam menjadi bahan penyusun Noken. Lidinya dapat dipanfaatkan menjadi sapu lidi. Daun sagu dapat dijual setelah dianyam. Harga satu anyaman atap seharga Rp. 25.000 per lembar. Setiap pohon sagu terdapat 24 – 26 pelepah sagu.

Kulit sagu yang sudah diambil (ditogok) dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusun papan. Di sekitar kampung kulit sagu hanya digunakan sebagai alas papan diatas danau. Ketika ditanya harganya dikatakan tidak memiliki nilai karena tinggal mengambil. Padahal memiliki potensi untuk menjadi bahan bangunan.

Ampas bekas remasan sagu belum memiliki nilai ekonomi. Penduduk membiarkannya di hutan. Belum ada yang mengetahui bahwa kulit sagu memiliki nilai tambah. Bila sudah dimanfaatkan kulit sagu ini akan meningkatkan pula nilai dari satu pohon sagu.

Di kampung Simpuro memiliki lahan yang dapat menjadi lahan untuk berkebun. Letaknya berada diatas bukit dengan akses hanya melalui jalan darat. Dari hasil wawancara dengan responden pernah dibudidayakan Kakao. Namun karena terserang hama, maka berhenti dan tidak dilanjutkan lagi.

F. Ongkos Pengolahan

Pengolahan sagu menjadi sagu basah ada 8 langkah yaitu : Penebangan, pemotongan menjadi tumang, angkut pohon, menguliti pohon, pangkur sagu, Ramas sagu, pengangkutan sagu. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 8 langkah ini tidak membutuhkan biaya. Seluruhnya dikerjakan secara gotong royong. Saling tolong menolong menjadi budaya diantara penduduk di kampung Simpuro karena merupakan satu saudara.

Kecuali pengangkutan sagu basah ke pasar Sentani membutuhkan dana sewa speed boat Rp. 100.000,- sampai 150.000,-. Selain itu angkut sagu dari dermaga Yahim ke pasar Phara Sentani dibutuhkan dana sekitar Rp. 100.000,-

Ramas sagu merupakan upaya mengeluarkan sari pati Sagu dari empelur. Dikerjakan oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dari hasil wawancara dengan responden penduduk yang disewa tenaga kerjanya untuk meramas sagu dihargai Rp. 100.000,- per hari. Ini jika tenaga meramas sagu didatangkan dari luar kampung Simpuro.

Upaya Meningkatkan Pendapatan Pendapatan Petani Sagu:

1. Pemanfaatan kilang Sagu

Kilang Sagu saat ini belum dimanfaatkan oleh penduduk Kampung Simpuro, Pengolahan masih bersifat tradisional. Meskipun pemerintah telah menyediakan kilang Sagu masyarakat belum memanfaatkannya. Alasan transportasi menjadi alasan utama, karena masyarakat harus mengangkut dari Dusun Sagu ke Kilang Sagu. Kebutuhan biaya untuk angkutan menjadi beban petani Sagu. Sangat berbeda yang dilaksanakan saat ini, diolah di dusun Sagu, keluar dusun sagu

sudah dalam bentuk Sagu basah. Mengatasi kondisi ini diperlukan sarana pengangkutan baik angkutan air dan darat. Kilang yang dibangun dalam dusun Sagu belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka untuk meningkatkan pendapatan agar kilang ini dapat segera dimanfaatkan.

2. Kepastian Pasar

Sagu yang diproduksi perlu mendapatkan kepastian pasar. Maka diperlukan ada Lembaga Ekonomi yang mampu menampung Sagu petani. Kepastian pasar akan memotivasi petani Sagu dalam meningkatkan produksinya. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui OPD Perindagkop dapat membentuk Koperasi yang mampu menampung produk Sagu.

3. Peningkatan Ketrampilan

Ketrampilan pengolahan Sagu untuk petani Sagu dibutuhkan dalam mengolah berbagai derivatif Sagu. Saat ini ketrampilan yang dimiliki oleh petani pada terbatas pada hasil akhir Sagu basah. Ada berbagai turunan dari produk Sagu yang mampu meningkatkan pendapatan petani. Pelatihan ketrampilan dapat dilaksanakan di Kampung dengan pertimbangan akan lebih banyak peserta yang dapat disertakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab yang akan membahas kesimpulan dan saran berdasarkan latar belakang, tujuan, hasil dan pembahasan.

1. Kesimpulan

- a. Pendapatan masyarakat Simpuro rata-rata pada umumnya setara dengan upah minimum provinsi (UMP). Tetapi jika dilihat pendapatan dari pengolahan Sagu pendapatan Rp. 2.800.000 masih berada di bawah rata-rata UMP Rp. 3.000.000.
- b. Masih ditemukan pendapatan diatas rata-rata terutama untuk jenis pekerjaan tertentu yang justru lebih tinggi dari pendapatan pengolahan Sagu.
- c. Pengolahan potensi lokal (ikan danau, kebun) memiliki potensi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
- d. Kontribusi anggota keluarga terutama istri dan anak belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga.
- e. Aset keluarga dimiliki secara komunal (ulayat). Sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.
- f. Sumber pendapatan lain belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan keluarga.
- g. Belum ditemukan peraturan yang mengatur tentang harga sagu.
- h. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan petani Sagu melalui kegiatan: pemanfaatan kilang Sagu, Kepastian Pasar dan peningkatan ketrampilan petani Sagu.

2. Saran

- a. Penyusunan peraturan baik Peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur yang mengatur harga Sagu masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat terangkat pendapatannya oleh instansi terkait dalam hal ini Perindagkop.
- b. Melibatkan lembaga Adat dalam mengembangkan Sagu pada skala bisnis.
- c. Penyusunan peraturan Bupati yang mengatur pemanfaatan dana desa untuk membiayai pengembangan potensi Sagu oleh BPMK Kabupaten.
- d. Perlunya pendampingan dan pembentukan kelompok dalam program yang diturunkan di tingkat kampung dengan melibatkan OPD Pertanian dan Perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Borjas George J. (2000) Labor Economic Second Edition, United States Of Amerika, Mc Graw-Hill Companies.
- Hawara dkk (2016) Analisis Pendapatan Keluarga Petani Sagu di Desa Aliandu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, Jurnal Agroland. 23 (2) : 94 – 100 Agustus 2016
- Pramika Depi (2017) Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Jembatan (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akutansi Vol. 2 No. 1 Juni 2017 : 33 - 49
- Wahyono Teguh (2012) Analisis Statistik Mudah dengan SPSS 20, Gramedia, Jakarta.
- PERMENDAGRI (2014) Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Jakarta
- Pramika Depi (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Universitas PGRI Palembang, Palembang.
- Rahman, Abdur, (2011) Teori Konsumsi Keynes
- Soetomo (2013) Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zubaedi (2012) Pengembangan Masyarakat, Kharisma Putra Utama, Bengkulu.



BUMDes SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

Mulyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) – Universitas Sebelas Maret (UNS)
Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) – LPPM UNS Surakarta, Jawa Tengah
Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Jebres, Surakarta - 57126
E-mail: yanto.mul@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai aspek pengembangan BUMDes di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan usaha meningkatkan ekonomi desa. Ada 7 (tujuh) bidang usaha yang ditangani oleh BUMDes ini, yaitu: (i) Umbul Kemanten; (ii) Kampung Dolanan Sidowayah; (iii) Rumah Pangan Kita; (iv) Jasa Layanan Keuangan; (v) Pertanian Padi; (vi) Perikanan Darat; dan (vii) Peternakan Sapi dan Kambing. Metode yang digunakan dalam studi ini mencakup: (i) Studi Pustaka terhadap dokumen arsip di Desa Sidowayah dan informasi terkait lainnya; (ii) Observasi Lapangan dengan datang dan mengamati langsung; dan (iii) Wawancara dengan pihak-pihak terkait (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengelola BUMDes, dan Masyarakat Desa). Hasil kajian secara keseluruhan terhadap 7 (tujuh) bidang usaha BUMDes di Desa Sidowayah telah menunjukkan bahwa BUMDes telah mampu mendukung perekonomian desa yang ditunjukkan dari indikasi optimalisasi aset dan potensi desa; penciptaan lapangan kerja; perbaikan pelayanan umum, dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kata Kunci: BUMDes, Ekonomi Desa, Desa Sidowayah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine several aspects of BUMDes in Sidowayah Village, Polanharjo Subdistrict, Klaten Regency, which are associated with the efforts to improve the village economy. There are 7 (seven) business sectors handled by this BUMDes SINERGI, namely: (i) Umbul Kemanten; (ii) Kampung Dolanan Sidowayah; (iii) Rumah Pangan Kita; (iv) Jasa Keuangan (Financial Services); (v) Pertanian Padi (Paddy Agriculture); (vi) Perikanan Darat; and (vii) Peternakan Sapi dan Kambing (Cattle and Goat Farms). The methods used in this study include: (i) Literature study of archival documents in Sidowayah Village and other relevant information; (ii) Field Observation by coming and observing directly; and (iii) Interviews with relevant parties (Village Head, Village Secretary, BUMDes Manager, and Village Community). The results of the overall study of the 7 (seven) areas of the BUMDes SINERGI have shown that the BUMDes has been able to support the village economy as indicated by indications of optimization of village assets and potentials; job creation; improved public services, and an increase in the income of the village community and also the village's original income (PADes).

Keywords: BUMDes, Village Economy, Sidowayah Village, Klaten Regency, Central Java

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1, angka (2) dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh / sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari konsep/pengertian di atas maka Pemerintah Desa (Pemdes) dapat mengalokasikan sebagian dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Pendirian BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan

dalam Pasal 7, ayat (1) dan (2) dari Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Di lain pihak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 dari Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015, bahwa tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk: (i) meningkatkan perekonomian Desa; (ii) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; (iii) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; (iv) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (v) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (vi) membuka lapangan kerja; (vii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; serta (viii) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam Peraturan Desa (Perdes) Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dari “LOHJINAWI” Menjadi “BUMDesa SINERGI“, khususnya di bagian pertimbangan juga telah dinyatakan bahwa BUMDes didirikan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. BUMdes SINERGI didirikan pada tanggal 20 April 2016 di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kata SINERGI berasal dari singkatan Sidowayah *Inner Energy*, yang mempunyai makna berangkat dari kekuatan dalam diri Sidowayah dengan cara mengoptimalkan potensi untuk pemberdayaan masyarakat, di mana dalam labangnya ada warna merah yang melambangkan kekuatan, keberanian, *energy* dan semangat.

Dalam implementasinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1, angka (6) dari Perdes tersebut juga telah dinyatakan bahwa BUMDes di Desa Sidowayah dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang **kepemilikan modal dan pengelolaannya** dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat. Konsekuensi dari konsep ini, maka keberadaan BUMDes di Desa Sidowayah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Desa dan warganya. Sinergitas yang demikian diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan berakhir dengan semakin majunya perekonomian desa dari waktu ke waktu.

Allwar et al. (2018) telah menjelaskan bahwa beberapa kegiatan utama BUMDes di Desa Sidowayah bermula dari kegiatan yang berbasis pada potensi sumberdaya air yang pada awalnya belum dirancang secara utuh mengenai tata kelola pemanfaatan sumberdaya air, khususnya untuk obyek wisata Umbul Kemanten. Agar umbul dapat menjadi penopang pengembangan ekonomi desa secara menyeluruh, dilakukan pendampingan dan penataan kelembagaan usaha yang mengarah pada terbentuknya BUMDes yang dikonversi sebagai basis kegiatan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang produktif. Pendampingan mencakup juga aspek pengembangan kelembagaan, manajemen Sumber Daya Manusi (SDM), desain peraturan dan administrasi usaha desa, penyusunan rencana usaha (*business plan*) unit-unit usaha desa, peta profil desa wisata dan wisata kuliner, usaha mendampingi unit usaha masyarakat yang akan bersinergi dengan usaha desa, serta mendorong pembuatan desain informasi unit-unit usaha skala desa yang berbasis media *online / website*.

Sementara itu, Oktaviani (2018) yang khusus menyoroti unit usaha BUMDes Kampung Dolanan Sidowayah menekankan pada aspek penerapan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Pengelola unit usaha dan Pemerintah Desa Sidowayah untuk meningkatkan jumlah / kuantitas wisatawan. Dari hasil studinya telah ditemukan bahwa metode pemasaran obyek wisata, dilakukan melalui: (i) metode periklanan, (ii) pemasaran langsung, (iii) hubungan masyarakat (humas) dan publikasi, (iv) pemasaran dari mulut ke mulut, dan (v) penjualan personal.

Dari latar belakang di atas, tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji aspek pengembangan BUMDes di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagai basis dalam pengembangan ekonomi desa, melalui pendekatan komprehensif atas 9 (sembilan) aspek pondasi bisnis (*building block*) yang terintegrasi dengan baik yang telah dikonsepkan oleh Osterwalder dan Pigneur (2012). Dengan mengkaji atas isian matrik ini, maka benang merah keberadaan **BUMDes** sebagai **basis dalam pengembangan ekonomi desa**, diharapkan dapat disimpulkan dengan baik.

BAHAN DAN METODE

Studi ini dilakukan di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana sumber data yang digunakan dalam studi ini berasal dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari hasil studi pustaka (dokumen arsip Desa Sidowayah dan informasi terkait lainnya); sedang data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan secara langsung dan melalui wawancara dengan pihak terkait (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengelola BUMDes, dan Masyarakat Desa). Observasi langsung dan wawancara dilakukan beberapa kali pada bulan April 2018.

Obyek kajian adalah keseluruhan unit bisnis yang ditangani oleh BUMDes SINERGI Desa Sidowayah, yang mencakup: (i) Umbul Kemanten (dan Umbul Siblarak); (ii) Kampung Dolanan Sidowayah; (iii) Rumah Pangan Kita; (iv) Jasa Layanan Keuangan; (v) Pertanian Padi; (vi) Perikanan Darat; dan (vii) Peternakan Sapi dan Kambing.

Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis deskriptif terhadap matriks yang mengaitkan antara keseluruhan unit bisnis dari BUMDes SINERGI Desa Sidowayah dengan aspek pondasi bisnis (*building block*) yang dikonsepkan oleh Osterwalder dan Pigneur (2012), yang mencakup: (i) Jenis Produk dan Nilai bagi Konsumen/Pelanggan; (ii) Peruntukan Produk / Segmen Pasar; (iii) Pola Hubungan dengan Konsumen; (iv) Saluran / Distribusi Penjualan Produk; (v) Aktivitas Utama / Kunci; (vi) Sumber Daya Utama; (vii) Mitra Utama; (viii) Struktur Biaya; dan (ix) Aliran Pendapatan. Masing-masing bagian di atas diperinci ke dalam beberapa pertanyaan yang memungkinkan mendapat jawaban, yang kemudian dirangkum ke dalam suatu matrik yang akan dipaparkan dalam bagian pembahasan.

Dalam menarik kesimpulan digunakan Metode Interaktif Miles & Huberman (Sugiyono (2013) dalam Oktaviani, 2018: 67) yang menghubungkan 4 (empat) proses, yaitu: (i) Pengumpulan Data (data sekunder dan primer), (ii) Reduksi Data (pemilihan dan penggolongan), (iii) Penyajian (*Display*) Data, dan (iv) Kesimpulan.

Untuk menyimpulkan bahwa keberadaan **BUMDes** dapat berperan sebagai **basis dalam pengembangan ekonomi desa**, diberikan catatan pada baris ke-10 setelah selesai mengungkap 9 (sembilan) aspek pondasi bisnis (*building block*) dari Osterwalder dan Pigneur (2012),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; secara geografis terletak di dataran rendah sisi timur kota Yogyakarta dan di sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Jarak tempuh dari pusat kota Klaten memerlukan waktu sekitar 1 jam. Kondisi wilayah Desa Sidowayah secara umum berupa lahan pertanian dan sebagian lahan perikanan. Mata pencaharian warganya, sebagian besar di sektor pertanian / agraris sehingga tingkat penghidupan ekonominya sangat ditopang oleh hasil-hasil dari sektor pertanian.

Data tahun 2018, di Desa Sidowayah menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas wilayahnya sebesar 224,418 Ha yang terbagi untuk beberpa peruntukan, yaitu: (i) Persawahan sebesar 174,316 Ha; (ii) Kolam sebesar 9,623 Ha; (iii) Permukiman sebesar 26,772 Ha; dan (iv) Tanah Makam sebesar 0,1168 Ha. Dari sisi administrasi pemerintah, terdiri atas 4 Kadus, 17 RT dan 8 RW. Dari sisi

kependudukan, jumlah KK sebanyak 1.058 orang; terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.702 orang, dan penduduk perempuan sebanyak 1.905 orang; atau secara keseluruhan berjumlah 3.607 orang. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan pemerintah desa; pada tanggal 20 April 2016 didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama BUMDes SINERGI.

Visi BUMDes SINERGI Desa Sidowayah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 8 dari Anggaran Dasar BUMDes SINERGI yaitu: "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidowayah melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan Motto: "Sinergi Hambangun Tlatah, Sinengkuyung Sagotrah, Tumuju Sidowayah Gemah Ripah, Sehat Sumringah Tinemu Bebungah".

Sementara Misi BUMDes SINERGI Desa Sidowayah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 adalah: (i) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sidowayah; (ii) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sidowayah; (iii) Menjadikan Desa Sidowayah yang berswasembada ekonomi; (iv) Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Desa Sidowayah; (v) Berkembangnya usaha-usaha untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sidowayah; (vi) Menampung seluruh usaha-usaha kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sidowayah; (viii) Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat Desa Sidowayah; (viii) Menciptakan ruang dan peluang usaha terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan; dan (ix) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggung jawaban keuangannya.

Permodalan BUMDes SINERGI, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 dari Anggaran Dasar BUMDes SINERGI, bersumber dari: (i) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (ii) Penyertaan Modal Desa; (iii) Penyertaan Modal dari Masyarakat Desa; dan (iv) Penyertaan Modal dari Pihak Ketiga.

Di lain pihak, kegiatan usaha BUMDes SINERGI, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17 dari Anggaran Dasar meliputi: (i) Bidang Produksi Primer (bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan); (ii) Bidang Kepariwisata; (iii) Bidang Pengolahan (bidang Industri Rumah Tangga / IRT); (iv) Bidang Perdagangan (jual beli barang dan Sarana Produksi Padi / Saprodi); (v) Bidang Jasa; serta (vi) Bidang Usaha lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Susunan kepengurusan Organisasi Pengelola BUMDes SINERGI Desa Sidowayah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 19, ayat (3) dari Anggaran Dasar; terdiri dari: (i) Komisaris; (ii) Pelaksana Operasional (terdiri dari Direktur, Sekretaris, dan Bendahara); dan (iii) Pengawas. Sementara untuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi berdasarkan proporsi sebagai berikut: (i) Cadangan Modal BUMDes sebesar 30%; (ii) Pengembangan usaha sebesar 37%; (iii) Komisaris, Direktur, Sekretaris, Bendahara sebesar 18%; (iv) Dana Sosial, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 10%; dan (v) Pengawas sebesar 5% (Pasal 21, ayat (4)).

Meskipun banyak unit usaha yang dikelola oleh BUMDes SINERGI, dalam kajian ini hanya akan diungkapkan 7 (tujuh) unit usaha, yaitu: (i) Umbul Kemanten; (ii) Kampung Dolanan Sidowayah; (iii) Rumah Pangan Kita; (iv) Jasa Layanan Keuangan; (v) Pertanian (Budidaya Padi); (vi) Perikanan (Budidaya Ikan Darat); dan (viii) Peternakan (Budidaya Sapi dan Kambing).

Dengan membuat matriks pondasi bisnis (*building block*) yang dikembangkan Osterwalder dan Pigneur (2012) dan memadukan dengan keseluruhan unit bisnis yang dikelola BUMDes SINERGI Desa Sidowayah; maka dampak keberadaan **BUMDes sebagai basis dalam pengembangan ekonomi desa** dapat ditarik benang merahnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagain metodologi, pondasi bisnis (*building block*) yang telah dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur (2012) mencakup 9 (sembilan) aspek, yaitu: (i) jenis produk dan nilai bagi konsumen; (ii) peruntukan produk / segmen pasar; (iii) pola hubungan dengan konsumen; (iv) saluran / distribusi penjualan produk; (v) aktivitas utama / kunci; (vi) sumber daya

utama; (vii) mitra utama; (viii) struktur biaya; dan (ix) aliran pendapatan. Hasil kajian selengkapnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Matriks Pondasi Bisnis (*Building Block*) Model Osterwalder dan Pigneur (2012) Berdasar Unit Bisnis BUMDes SINERGI Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupat Klaten, Tahun 2018-2019

No.	Aspek Usaha Bisnis BUMDes	Umbul Kemanten	Kampung Dolanan Sidowayah	Rumah Pangan Kita	Jasa Layanan Keuangan	Pertanian (Budidaya Padi)	Perikanan (Budidaya Ikan Darat)	Peternakan (Budidaya Sapi dan Kambing)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jenis Produk dan Nilai bagi Pelangan	Daya tarik wisata air (air permukaan dan wisata bawah air yang lebih dikenal dengan wisata <i>snorkeling</i> , <i>diving</i> dan <i>photo underwater</i>) Spot terapi ikan Bahan baku produksi air kemasan Kebutuhan air minum / air bersih rumah tangga	Wisata edukasi anak / jenis-jenis permainan tradisi-onal (lompat tali, egrang, dakon, gobak sodor, eng-klek, gasing bambu, hula hoop berbahan rotan, bekel, bakiak dan kincir kertas) Outbond (meniti tali, papan bergoyang, jaring laba-laba dan permainan air) Jelajah kampung dalam suasana pedesaan yang masih asri menuju Umbul Kemanten	Kebutuhan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng) dan hasil produk rumah tangga (Kue semprong / <i>egg roll</i>) dan Air Kemasan hasil olahan BUMDes SINERGI	Laku Pandai (Buka Tabungan, Setor Tunai, Tarik Tunai) E-Payment (Transfer, Multi-finance) Pembelian (Pul-sa, PLN, Token Listrik) Pembayaran (Telkom, Internet, Tiket Pesawat, Kereta Api, Asuransi, BPJS Kesehatan, dll)	Budidaya tanam-an padi sawah dengan menggunakan area tanh kas desa	Budidaya ikan darat (Ikan Nila dan Ikan Lele)	Budidaya / ternak sapi dan kambing
2.	Peruntukan Produk / Segmen Pasar	Masyarakat umum dari anak-anak hingga dewasa	Siswa sekolah PAUD, SD, hingga menengah dan tinggi	Masyarakat Desa Sidowayah dan para wisatawan	Masyarakat Desa Sidowayah dan sekitarnya	Masyarakat Desa Sidowayah dan sekitarnya	Masyarakat Desa Sidowayah dan sekitar	Masyarakat Desa Sidowayah dan sekitarnya
3.	Pola Hubungan dengan Konsumen	Konsumen / pelanggan sebagai konsumen akhir	Permainan tradisional anak dapat dijadikan sarana membentuk karakter anak, membuka diri dan saling berinteraksi	Konsumen / pelanggan sebagai konsumen akhir	Konsumen / pelanggan sebagai konsumen akhir yang dilayani	Pihak BUMDes sebagai pihak yg memproduksi padi sawah	Pihak BUMDes sebagai pihak yg memproduksi ikan air darat	Pihak BUMDes bekerjasama dengan Kelompok Ternah JAYA ABADI

No.	Aspek Usaha Bisnis BUMDes	Umbul Kemanten	Kampung Dolanan Sidowayah	Rumah Pangan Kita	Jasa Layanan Keuangan	Pertanian (Budidaya Padi)	Perikanan (Budidaya Ikan Darat)	Peternakan (Budidaya Sapi dan Kambing)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dengan temannya					
4.	Saluran / Distribusi Penjualan Produk	Komunikasi pema-saran dengan berbagai media, baik media tulis maupun media <i>online</i> ; baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (media sosial)	Presentasi di sekolah, instansi/ lembaga, mengi-kuti pameran/ parade saat menyambut ulang tahun Klaten	Komunikasi pe-masaran dengan berbagai media, baik media tulis maupun media <i>online</i> ; baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (media sosial)	Komunikasi pe-masaran dengan berbagai media, baik media tulis maupun media <i>online</i> ; baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (media sosial)	Produksi padi dilakukan di 5 lokasi tanah kas desa: 1) Siblarak, 2) Timur Kenteng, 3) Barat Gu-dang, 4) Silimar, dan 5) Barat dan Selatan Kebak	Budidaya ikan dilaksanakan di lokasi Tanah Kas Desa yang dekat air dan pemanfaatan kolam milik masyarakat yang tdk diurus dengan baik	Pihak BUMDes bekerjasama dengan Kelompok Ternah JAYA ABADI
5.	Aktivitas Utama / Kunci	Kuliner, Parkiran, <i>Outbond</i> , Edukasi Pertanian, <i>Home Stay</i> , Grojogan, Kolam renang syariah	Wisata edukasi, <i>outbond</i> dan jela-jah kampung	Penjualan / pema-saran kebutuhan pokok	Transaksi keuangan (mena-bung, membayar listrik, pembelian pulsa)	Penanaman padi sawah di 5 lokasi Tanah Kas Desa	Budidaya ikan nila dan ikan lele	Budidaya / ternak sapi dan kambing
6.	Sumber Daya Utama	Potensi air umbul Tenaga pelayanan Sarana penunjang wisata air Spot terapi ikan Kolam Umbul Kemanten	Rumah kampung dolanan, tenaga pelayanan (mana-jer, bagian litbang, pemasaran, dan pengembangan SDM), dan instru-men permainan anak	Lokasi Toko dan tenaga penjual Produk yang dijual (kebutuhan pokok dan hasil Industri Rumah Tangga / IRT	Lokasi Toko dan tenaga penjual Produk yang melayani (transaksi keuangan)	Tanah kas desa Kelompok Tani pengarang	Tanah kas desa Kelompok Tani pengarang	Lokasi ternak yang dikelola oleh Kelompok Ternah JAYA ABADI
7.	Mitra Utama	Masyarakat umum (anak-anak dan dewasa) Penyedia jasa pariwisata di Kabupaten Klaten	Intansi pendidikan utamanya sekolah dasar dan sekolah menengah baik dari Kabupaten Klaten maupun wilayah lain (Solo, Pacitan, Karang-anyar)	Kerjasama dgn pihak BULOG dalam penyediaan kebutuhan pokok (beras, gula pasir, dan minyak goreng)	Kerjasama dengan Bank BNI 46 dalam penyediaan jasa keuangan	Kelompok Tani Desa Sidowayah	Kelompok Tani Desa Sidowayah	Kelompok Ternah JAYA ABADI

No.	Aspek Usaha Bisnis BUMDes	Umbul Kemanten	Kampung Dolanan Sidowayah	Rumah Pangan Kita	Jasa Layanan Keuangan	Pertanian (Budidaya Padi)	Perikanan (Budidaya Ikan Darat)	Peternakan (Budidaya Sapi dan Kambing)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Struktur Biaya	Biaya operasional untuk tenaga kerja (gaji karyawan dan uang lembur). Biaya penyediaan sarana penunjang	Biaya operasional untuk tenaga kerja (gaji karyawan dan uang lembur). Biaya sarana pen-dukung Biaya pemelihara-an beberapa hewan di sekitar lokasi	Biaya operasional untuk tenaga ker-ja (gaji karyawan dan uang lembur). Biaya penyediaan sarana penunjang	Biaya operasional untuk tenaga ker-ja (gaji karyawan dan uang lembur). Biaya penyediaan sarana penunjang	Upah tenaga kerja berdasarkan kese-pakatan Biaya penyediaan sarana penunjang	Upah tenaga kerja berdasarkan kese-pakatan Biaya penyediaan sarana penunjang	Upah tenaga kerja berdasarkan kese-pakatan Biaya penyediaan sarana penunjang
9.	Aliran Pendapatan	Pendapatan hasil Tiket Masuk (Rp 2000) Persawaan alat (<i>diving</i> dan <i>photo under-water</i>) Spot Terapi Ikan (tiket Rp 3.500) Kolam Umbul Kemanten (tiket Rp 5.000)	Hasil penjualan tiket / jasa atas pelayanan di bidang wisata edukasi (Paket <i>Edu-Fun</i> , Paket <i>Edu-Zoo</i> , Paket <i>Edu-Craf</i>) <i>outbond</i> dan wisa-ta jelajah kampung Penyer-taan Modal dari APBDes	Hasil Pengelolaan Unit Usaha RPK Bagi Hasil Kemit-raan Penyer-taan Modal dari APBDes	Hasil Usaha Simpan Pinjam Hasil Pengelolaan Unit Usaha Bagi Hasil Kemit-raan Penyer-taan Modal dari APBDes	Persentase Hasil Laba Bersih sesu-ai Kesepakatan Penyer-taan Modal dari APBDes	Persentase Hasil Laba Bersih sesu-ai Kesepakatan Penyer-taan Modal dari APBDes	Persentase Hasil Laba Bersih sesu-ai Kesepakatan Penyer-taan Modal dari APBDes
	Dampak ke Pembangunan Desa Sidowayah	Penyerapan tenaga kerja (6 tenaga kerja upah UMR) bagian tiket masuk, parkir Rumah makan sekitar umbul	Pembentukan ka-rakter anak melalui latihan kepemim-pinan, kebersama-an/ kekompakan regu, dan pening-katan nilai gotong-royong	Pemenuhan kebu-tuhan pokok mas-yarakat desa Tempat Display hasil Industri Rumah Tangga (IRT)	Masyarakat semakin paham thd penggunaan transaksi keuangan dan perbankan	Penyerapan Tena-ga Kerja / Kel. Tani Penyer-taan Bahan Pokok Makanan (Padi)	Penyerapan Tena-ga Kerja / Kel. Tani Penyer-taan Bahan Pokok Makanan (Ikan Nila dan Lele)	Penyerapan Tena-ga Kerja, khususnya yang tergabung dalam Kel. Tani JAYA ABADI

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara (April 2018), Oktaviani (2018), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes SINERGI, dan juga dari Allwar et al. (2018).

Dari Tabel 1. dapat jelaskan bahwa interaksi antara 9 (sembilan) **Aspek Usaha Bisnis BUMDes** dan Jenis Usaha yang dikelola BUMDes SINERGI Desa Sidowayah menghasilkan temuan yang menarik. Temuan yang dimaksud selain dapat mendeteksi produk utama dari setiap unit usaha BUMdes, juga dapat digunakan untuk mengkaji aspek lain BUMDes, seperti aspek struktur biaya dan struktur pendapatan dari setiap unit usaha di bawah pengelolaan BUMDes SINERGI Desa Sidowayah.

Dalam hal usaha untuk mempertahankan keberadaan BUMDes SINERGI di Desa Sidowayah, khususnya terkait dengan aspek saluran / distribusi penjualan produk (Tabel 3.1 baris / nomor ke-4), BUMDes SINERGI telah menerapkan 2 (dua) bauran aspek pemasaran produk, yaitu: (i) Bauran Pemasaran, dan (ii) Bauran Komunikasi Pemasaran. Kunci keberhasilan suatu produk ditinjau dari aspek Bauran Pemasaran (*Marketing Mix*) sebagaimana yang dikutip dari Hermawan (2012) dalam Oktaviani (2018: 37) mencakup 4 (empat) unsur/komponen, yaitu: (i) Produk (*Product*), (ii) Harga (*Price*), (iii) Tempat (*Place*), dan (iv) Promosi (*Promotion*). Setiap unit usaha BUMDes SINERGI Desa Sidowayah terbukti mempunyai keempat unsur tersebut, di mana untuk sarana promosi hampir mengaitkan satu produk dengan produk yang lain. Dengan kata lain, dalam 1 (satu) media promosi, semua produk dari setiap unit usaha BUMDes SINERGI dapat dipromosikan / dipasarkan secara bersamaan.

Di lain pihak, ketika bauran pemasaran sudah dirumuskan, maka penunjang keberhasilan dari unit-unit BUMDes SINERGI Desa Sidowayah perlu didukung dengan Bauran Komunikasi Pemasaran yang menurut Kotler & Keller (2009) dalam Oktaviani (2018: 39) terdiri dari 8 (delapan) aspek komunikasi utama yaitu: (i) Iklan, (ii) Promosi Penjualan, (iii) Acara/Kegiatan dan Pengalaman, (iv) Hubungan Masyarakat dan Publisitas, (v) Pemasaran Langsung, (vi) Pemasaran Interaktif, (vii) Pemasaran dari Mulut ke Mulut, dan (viii) Penjualan Personal.

Sesuai dengan bagian Pendahuluan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa BUMDesa SINERGI Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten; bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 12, dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa salah satu pembentuk PADes berasal dari Hasil Usaha Desa (BUMdes) selain dari hasil pengelolaan aset desa, dan juga dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong-royong warga desa.

Dari hasil kajian atas aspek usaha bisnis BUMDes SINERGI di Desa Sidowayah telah terbukti mampu memperbaiki kondisi keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidowayah. Di lain pihak, dari hasil pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari BUMdes SINERGI Desa Sidowayah juga telah dialokasikan ke beberapa pos peruntukan yaitu sebagai berikut: (i) sebesar 30% kembali ke APBdes; (ii) sebesar 25% untuk Pengembangan Usaha; (iii) sebesar 15% untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan; (iv) sebesar 10% untuk Cadangan Modal; (v) sebesar 10% untuk Dana Pendidikan dan Kesehatan; serta (vi) sebesar 10% sisanya untuk Badan Pengawas. Hal ini jelas membawa implikasi bahwa semakin baik pengelolaan BUMDes SINERGI akan semakin memperbaiki kondisi APBDes di Desa Sidowayah.

KESIMPULAN

Interaksi 9 (sembilan) aspek usaha bisnis BUMDes dan jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes SINERGI Desa Sidowayah dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk utama dari setiap unit usaha BUMDes, di mana dari 7 (tujuh) unit usaha, yaitu: (i) Umbul Kemanten; (ii) Kampung Dolanan Sidowayah; (iii) Rumah Pangan Kita; (iv) Jasa Layanan Keuangan; (v) Pertanian (Budidaya Padi); (vi) Perikanan (Budidaya Ikan Darat); dan (viii) Peternakan (Budidaya Sapi dan Kambing); telah menghasilkan jenis-jenis produk yang berbeda dan mempunyai dampak ekonomi yang berbeda pula.

Dari pengembangan matriks aspek usaha bisnis BUMDes, juga telah mampu merekam struktur biaya, struktur pendapatan, bahkan sampai ke dampak keberadaan BUMDes SINERGI Desa Sidowayah

terhadap perekonomian desa (baris ke-10 dari Matriks Pondasi Bisnis BUMDes SINERGI). Dengan kata lain, keberadaan BUMDes SINERGI Desa Sidowayah telah berperan besar dalam mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Di samping itu juga mempunyai peran besar sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Dengan semakin baiknya kondisi APBDes sebagai dampak dari pengelolaan BUMDes yang berhasil; diharapkan akan semakin meningkatkan aktifitas ekonomi desa, dalam wujud semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap. Jika hal ini terjadi, diharapkan akan membawa dampak semakin berkurangnya tingkat pengangguran di desa, dan harapan selanjutnya akan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan di desa. Di samping itu, dengan berhasilnya pengelolaan BUMDes SINERGI Desa Sidowayah diharapkan juga akan mampu meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa, dalam wujud semakin meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Jika berbagai hal di atas, dapat dicapai maka tujuan pembangunan Desa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 78 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, niscaya akan tercapai, yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta mampu menanggulangi kemiskinan di desa, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Pemerintah Desa Sidowayah, khususnya kepada Bapak Hapsoro, S.H (Kepala Desa Sidowayah), Sekretaris Desa, Pengelola BUMDes [Bapak Imron selalu Direktur BUMDes SINERGI, Bapak Iman, S.E selaku Staff *Marketing* Kampung Dolanan Sidowayah] dan semua staff BUMDes SINERGI yang telah memberikan banyak informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan kajian ini.

Ucapan teria kasih juga disampaikan kepada para mahasiswa peserta Mata Kuliah Ekonomi Perdesaan di Jurusan Ekonomi Pembangunan – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, khususnya pada Semester Genap Pebruari – Juli 2018 dan Semester Genap Pebruari – Juli 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Osterwalder, and Yves Pigneur, 2012, *Business Model Generation: Pedoman Bagi para Visioner, Penggerak Perubahan, dan Pendobrak*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Gramedia, 169.
- Allwar, Tuasikal, Muhammad Amin, dan Soni Laksono, 2018, Pengembangan BUMDes Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Volume. 3 (01): 6-26.
- Oktaviani, Nur Fatimah, 2018, *Penerapan Bauran Komunikasi Pemasaran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Kampung Dolanan Sidowayah Polanharjo, Klaten*, Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Pemerintah Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, tp thn, *Holding BUMDes SINERGI*, Bahan Paparan.
- Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUDes) SINERGI Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Draft Peraturan.

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SINERGI Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Draft Peraturan.

Peraturan Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Nomor 03 Tahun 2016 tentang *Perubahan Nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari “LOHJINAWI” menjadi “BUMDes SINERGI”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.*

Sukasmanto, 2014, *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa*, Seri Buku Pintar BUMDesa, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 152 p.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PENINGKATAN PRODUKSI DAN MANAJEMEN USAHA IKAN ASAP MELALUI ALAT PENGASAPAN IKAN "EFHILINK"

IMPROVING PRODUCTION AND MANAGEMENT OF SMOKE FISH THROUGH SMOKED FISH TOOLS "EFHILINK"

Marita Ika Joesidawati^{1*}, Suwarsih², Heni Sri Astuti³

^{1,2)} Program Studi Ilmu Kelautan, Fakanlut, Universitas PGRI Ronggolawe

³⁾ Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Ronggolawe

*email: maritajoes@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Tuban memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar. Salah satu potensi adalah produk ikan Asap. Desa Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban merupakan daerah yang potensial untuk dilakukan pengembangan dan perbaikan produksi terhadap ikan asap yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, di wilayah ini terdapat usaha pengasapan ikan yang dilakukan oleh istri-istri nelayan dan dipasarkan secara langsung di sepanjang jalan pantura desa Karangsari yang terletak di jalur utama Pantura Surabaya-Semarang salah satunya Poklahsar Ikan Asap "Karangsari". Permasalahan yang dihadapi kelompok mitra antara lain 1) Proses produksi sangat sederhana tanpa memperhatikan SNI Produk ikan asap (2) Peralatan pengasapan ikan yang digunakan hanya dapat menampung 10-15 ekor dalam sekali proses pengasapan untuk ukuran 250 gram/ekor atau 5 -6 ekor untuk ikan yang berukuran 500-600 gram/ekor (3) Manajemen Usaha masih menggunakan pola manajemen rumah tangga dan bersifat konvensional, dan seringkali jika suami mereka tidak melaut, modal usaha yang ada habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Solusi yang ditawarkan (1) Perlunya pengenalan alat pengolahan ikan asap yang Efektif, Higienis dan Ramah Lingkungan sekaligus pelatihan dan pengenalan menggunakan pengolahan ikan asap yang higienis dan ramah lingkungan (2) Perlu pelatihan dan pendampingan tentang manajemen usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan produksi dan peningkatan pengetahuan manajemen usaha pada mitra sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi Poklasar Ikan Asap "Karangsari".

Kata kunci: Alat Pengasapan Ikan Efhilink, Perbaikan Produksi Ikan Asap, Manajemen Usaha

ABSTRACT

Tuban Regency has considerable marine fishery potential. One potential is smoked fish products. Karangsari Village, Tuban District, Tuban Regency is a potential area for the development and improvement of production of smoked fish produced. This is because, in this region there is a business of fish fumigation carried out by the wives of fishermen and marketed directly along the pantura road in Karangsari village which is located on the main route of the Pantura Surabaya-Semarang, one of them is Poklahsar Smoked Fish "Karangsari". Problems faced by partner groups include 1) The production process is very simple without regard to SNI Smoked fish products (2) The fish smoking equipment used can only accommodate 10-15 fish in a fumigation process for 250 g / fish size or 5 -6 fish for fish measuring 500-600 grams / fish (3) Business Management still uses household management patterns and is conventional, and often if their husbands do not go out to sea, the existing business capital is used up for daily needs. Solutions offered (1) The need for the introduction of effective, hygienic and environmentally friendly smoked fish processing equipment as well as training and introduction of hygienic and environmentally friendly use of smoked fish processing (2) Need training and assistance in increasing the selling value of a product by observing food safety from the products produced, (3) There needs to be training and mentoring in packaging and training techniques about marketing management and financial management. The results of the activity showed an increase in production and an increase in knowledge of business management in partners which had an impact on the economic improvement of the Poklahsar Smoked Fish "Karangsari"

Keywords: Efhilink Smoked Fish Tool, Improvement Production Smoked Fish, Business Management

PENDAHULUAN

Potensi lestari sumberdaya perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta juta ton/tahun Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal dan baru dimanfaatkan sebesar 6,83 juta ton pada tahun 2016 atau baru 86,23% dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. (KKP,2016). Kondisi ini membuktikan pengembangan sumberdaya laut kearah industri memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Pemanfaat produksi total perikanan di Indonesia sebagian besar dikonsumsi dalam bentuk segar, dan bentuk olahan lain (KKP, 2017). Salah satu bentuk olahan lain adalah ikan asap. Pengasapan ikan sampai saat ini masih belum mendapat perhatian yang cukup dari industri perikanan dan masih hanya terbatas untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri (Hukmi,2010) sehingga dibutuhkan peningkatan produksi dan kualitas produk ikan asap di Indonesia

Jumlah Unit pengolah ikan (UPI) Pengasapan/Pemanggangan di Kabupaten Tuban sebanyak 343 (Dinas Perikanan dan Peternakan, 2018). Salah satunya di desa Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban merupakan daerah yang potensial untuk dilakukan pengembangan dan perbaikan produksi terhadap ikan asap yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, di wilayah ini terdapat usaha pengasapan ikan yang dilakukan oleh istri-istri nelayan dan dipasarkan secara langsung di sepanjang jalan pantura desa Karangsari yang terletak di jalur utama Pantura Surabaya- Semarang.

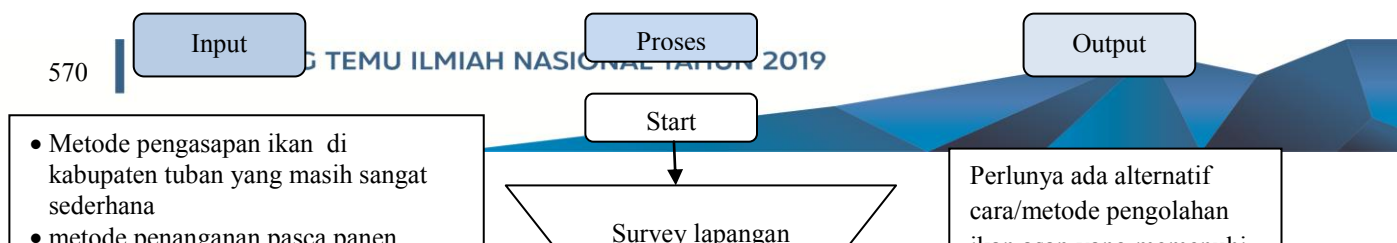
Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Ikan Asap di desa Karangsari adalah Poklahsar Ikan Asap Karangsari yang dipimpin oleh Ibu Dwi Rusmiyati berpotensi untuk dikembangkan dari segi produksi dan manajemen usahanya. Kondisi eksisting dari Poklahsar Ikan Asap Karangsari antara lain (1) Proses produksi sangat sederhana tanpa memperhatikan SNI produk ikan asap (2) Peralatan pengasapan ikan yang digunakan hanya dapat menampung 10-15 ekor dalam sekali proses pengasapan untuk ukuran 250 gram/ekor atau 5 -6 ekor untuk ikan yang berukuran 500-600 gram/ekor (3) Manajemen Usaha masih menggunakan pola manajemen rumah tangga dan bersifat konvensional, dan seringkali jika suami mereka tidak melaut, modal usaha yang ada habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada Poklahsar Ikan Asap “Karangsari”. Target kegiatan adanya peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan Poklasar Ikan Asap “Karangsari”.

BAHAN DAN METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Desa Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - Juli 2019 . Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan strategi pendekatan studi kasus. Penentuan responden didasarkan pada topik permasalahan yang dihadapi oleh poklahsar ikan asap di Desa Karangsari dan dipilih 10 orang yang secara sengaja dengan berasumsi orang yang dipilih dinilai mampu memberikan informasi langsung dan mendalam mengenai pengembangan usaha pengolahan Ikan Asap dan dapat mewakili berbagai permasalahan yang dialami pengolah asap di lokasi penelitian. Informan yang diwawancarai adalah: (1). Perwakilan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, (2) Petugas Lapang (Penyuluh Perikanan), (3) Kepala Desa Karangsari, dan (4) Beberapa Ketua Poklahsar Ikan Asap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan langsung (observasi) dan diskusi. Metode penyusunan program kegiatan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan Poklahsar ikan asap yang berhubungan dalam mengembangkan usaha ikan asap,. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok (*Group Discussion*, GD).

Rancangan hilirisasi yang dilakukan seperti pada Gambar 1 dibawah ini :



- Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 tahap yaitu
- Tahap 1 (Pengenalan Alat), Pada tahapan ini kelompok mitra sosialisasi penggunaan alat dengan alat pengasapan yang efektif, higienis dan ramah lingkungan, yang disebut “Efhilink”
 - Tahap 2 (Tahap Penerapan Teknologi Tepat Guna), Pada tahapan ini kelompok mitra diberi pelatihan tentang cara pengolahan ikan Asap yang memenuhi standar SNI, mulai pemilihan bahan baku sampai menjadi produk jadi atau produk yang siap di jual
 - Tahap 3 (Tahap Pengelolaan Keuangan), Pada tahapan ini kelompok mitra dilatih cara pengelolaan keuangan hasil penjualan

Bahan baku yang digunakan adalah ikan tongkol segar yang berukuran 500 – 600 gram/per ekor. Bahan tambahan lainnya adalah garam, bambu yang ditusukkan pada bahan baku dan junggel jagung untuk menghasilkan asap. Bahan yang digunakan untuk membuat alat pengasapan adalah pelat stainless steel, siku stainless steel, aluminium lembaran, kondensor, blower, kaca, tendon air, pipa kuningan.

Uji hasil produksi ikan asap dilakukan dengan menggunakan uji organoleptik (uji kesukaan dengan 5 panelis, yang sudah berpengalaman dibidang pengolahan ikan asap lebih 30 tahun. Pengujian kadar air ikan asap (SNI 01-2354.2-2006) dan pengukuran berat bahan bakar di awal dan akhir proses

pengasapan. Uji hasil kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha dilakukan dengan melakukan uji kemampuan terhadap yang sudah dilatihkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyusun Program Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan diskusi kelompok diperoleh kesimpulan dipilih satu pokhlaksar yang berpotensi untuk dikembangkan dari segi produksi dan manajemen usahanya sebagai pokhlaksar percontohan. Hasil observasi, wawancara dan diskusi Pokhlaksar “Karangsari” adalah perlunya ada alternatif cara/metode pengolahan ikan asap yang memenuhi standar keamanan pangan dan dapat memproduksi sepanjang tahun.

B. Pengenalan Alat Pengasapan”Efhilink”

Alat pengasapan Efhilink dibuat berdasarkan pendaftaran Paten dengan Nomor P00201810727. Cara kerja alat pengasapan ini pada prinsipnya sama dengan alat pengasapan lainnya, perbedaannya terletak pada proses dari pembuangan hasil pengasapan yang dirubah menjadi asap cair. Adapun Alat Pengasapan Efhilink seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Alat Pengasapan “Efhilink”

Alat pengasapan ini merupakan metode pengasapan tertutup sehingga proses pembentukan asap hanya terfokus pada alat pengasapan dan sangat membantu penetrasi asap pada tubuh ikan dan asap menyebar secara merata pada tubuh ikan yang diasapi.

Alat Pengasapan ini dapat menghasilkan produksi berkapasitas 15 kg ikan untuk sekali produksi (3 jam pengasapan). Sisa bahan bakar (junggel jagung atau tempurung kelapa) dalam 3 jam proses pengasapan masih dapat digunakan lagi 5-6 jam. Menurut Royani *et al*, (2015) salah satu variabel efisiensi proses pengasapan adalah jumlah bahan bakar yang tersisa setelah proses pengasapan. Volume asap cair sebanyak 50 ml selama proses pengasapan 3 jam

C. Produksi Ikan Asap

Untuk mengetahui kualitas ikan asap, dilakukan analisis organoleptik terutama uji kesukaan. Hasil analisis menunjukkan panelis memberikan nilai cukup baik terhadap ikan asap yang dihasilkan, yakni rata-rata nilai organoleptik diatas 3 (suka). Penampilan ikan asap yang kuning keemasan memberikan penilaian yang tinggi. (Gambar 3) Kondisi ini sangat berhubungan dengan proses pengasapan yang terjadi pada alat pengasapan” efhilink”.



Gambar 3. Produk Ikan Asap dengan alat pengasapan “Efhilink”

Asap dengan kandungan berbagai senyawa kimia terutama fenol akan bereaksi dengan lemak dan protein ikan membentuk warna kuning keemasan. Senyawa fenol dan karbonil berperan untuk memberikan rasa pada ikan asap (Martinez *et al.*, 2007). Sumber panas seperti tempurung kelapa, junggel jagung dapat menghasilkan volume asap dengan kualitas yang baik akan mempengaruhi nilai organoleptik ikan asap (Marasabessy 2007).

Standar nilai kadar air ikan asap menurut SNI adalah maksimal 60%. Produk ikan asap menggunakan alat pengasapan” efhilink memiliki kadar air sesuai SNI, dengan waktu pengasapan 3 jam dengan suhu ruangan antara 70 -80°C dan kelembaban ruangan 50 -63%

Kadar air merupakan faktor penting pada bahan pangan. Tinggi rendahnya kadar air dapat mempengaruhi kenampakan, tekstur, citarasa, serta daya awet bahan makanan (Hadinoto, dkk., 2016).

D. Manajemen Usaha

Kendala yang dihadapi oleh industri pengasapan ikan adalah alat pengasapan yang masih sangat sederhana, sehingga energi asap banyak terbuang serta terjadi pencemaran udara di lingkungan sekitar. Berhubung usaha produksi ikan asap sebagian besar dilakukan dengan skala kecil menengah maka sentuhan teknologi masih terbatas dengan adanya keterbatasan daya awet produk maka jangkauan pemasaran juga belum optimal (BI, 2017). Kondisi ini juga terjadi di poklaksar ikan asap “Karangsari” yang berjumlah 15 orang. Sumberdaya manusia yang rata-rata berpendidikan antara SD-SMA sangat diperlukan suatu pelatihan dan pendampingan manajemen usaha. Hasil pelatihan dan pendampingan manajemen usaha selama kegiatan (bulan mei – Juli 2019) menunjukkan adanya peningkatan hasil. (Tabel 1.)

Tabel 1. Hasil Uji Kemampuan Manajemen Usaha terhadap 15 orang Pengolah ikan asap

Jenis Analisa Kemampuan	Sebelum	Sesudah	Persentase keberhasilan
Mampu Meminimalisir Biaya Operasional	0	10	66.67%
Mampu Membedakan dan Mengerti Biaya investasi	0	15	100.00%
Mampu Membedakan dan Mengerti Biaya Operasional	0	15	100.00%
Mampu Membedakan dan Mengerti Modal kerja	0	15	100.00%
Mampu Membedakan dan Mengerti Produksi	0	13	86.67%
Mampu Membedakan dan Mengerti Pendapatan	0	13	86.67%
Mampu Memproyeksi Laba dan Rugi	0	10	100.00%
Mampu Memproyeksi BEP	0	10	100.00%
Mampu Membuat Administrasi Pembukuan	0	10	66.67%

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 15 orang setelah dilakukan pelatihan manajemen usaha menunjukkan adanya peningkatan hasil sebesar 89.63% . Kondisi ini apabila dilakukan monitoring dan evaluasi secara simultan akan berdampak pada kenaikan atau peningkatan ekonomi dari pengolah ikan asap.

KESIMPULAN

Alat pengasapan Efihilik ini pada prinsipnya sama dengan alat pengasapan lainnya, perbedaannya terletak pada proses dari pembuangan hasil pengasapan yang dirubah menjadi asap cair dan sudah mendapat no pendaftaran paten. Alat Pengasapan dikatakan Efektif ini karena dapat memproduksi 15 kg dalam 3 jam pengasapan dan sisa bahan bakar pengasapan masih dapat digunakan lagi 5-6 jam dan dapat. Higiens karena merupakan pengasapan sistem tertutup sehingga asap yang terbentuk hanya pada alat pengasapan dan sangat membantu penetrasi asap pada tubuh ikan dan asap menyebar secara merata pada tubuh ikan yang diasapi. Ramah Lingkungan karena asap yang dihasilkan dapat dirubah menjadi asap cair dan tidak mencemari lingkungan

Kualitas ikan asap terhadap uji kesukaan menunjukkan nilai cukup baik yaitu diatas 3 (suka). Penampilan ikan asap yang kuning keemasan memberikan penilaian yang tinggi. Produk ikan asap memiliki kadar air sesuai SNI yaitu 60%. Hasil pelatihan dan pendampingan manajemen usaha menunjukkan adanya peningkatan hasil sebesar 89.63%

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada DRPM-Dikti pada Skema PKM-Pengabdian Masyarakat tahun anggaran 2019 atas anggaran dana yang telah diberikan. Selain itu ucapan terimakasih disampaikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Penyuluh Perikanan Desa Karang Sari, Kepala Desa Karang Sari atas kerjasamanya dalam mendukung kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perikanan dan Peternakan, 2018. *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Peternakan, Tahun 2017*
- Hadinoto, S., J. P. M. Kolanus, dan K. R. W. Manduapessy. 2016. Karakteristik Mutu Ikan Cakalang(Katsuwonus pelamis) Asap Menggunakan Asap Cair. *Majalah BIAM* 12 (01), hal:20-26
- Hukmi, F. 2010, *Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan, Desa Raga Jaya, Kecamatan Citayan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. Skripsi. PS Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB
- KKP 2016, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016*
- KKP 2017, *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017*
- Marasabessy, I. 2007. *Produksi asap Cair dari Limbah Pertanian dan Pemanfaatannya Dalam Pembuatan Ikan Layang Asap*. Thesis. IPB, Bogor
- Martinez O, Salmeron J, Guillen MD, and Casas C. 2007. Sensorial and physicochemical characteristics of salmon (*Salmo salar*) treated by different smoking process during storage. *Food Science and Technology International* 13(6):477-484
- Royani, D. S., Marasabessy, I., Santoso, J., & Nurimala, M., 2015. Rekayasa Alat Pengasapan Ikan Tipe Kabinet (Model Oven). *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 4 (2) : 74-78
- SNI 01-2354.2-2006. Penentuan Kadar Air Produk Perikanan
- SNI 2725:2013 Ikan asap dengan pengasapan panas.

**PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MENUJU DESA PESISIR MANDIRI (STUDI KASUS
DESA PADELEGAN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN MADURA)**

***LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS INDEPENDENT COASTAL VILLAGE (CASE
STUDY OF PADELEGAN VILLAGE, PADEMAWU DISTRICT, PAMEKASAN MADURA
DISTRICT)***

Endang Tri Wahyurini

Universitas Islam Madura, Jl. PP Miftahul Ullum Bettet Pamekasan

Email : Endangrini46@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal merupakan salah satu jalan mewujudkan kemandirian ekonomi lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan dan menganalisis arah pengembangan ekonomi lokal pesisir berbasis keunggulan potensi desa sebagai upaya mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), sehingga dapat menjawab persoalan di masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Desa Padelegan sebagai desa pesisir memiliki potensi ikan teri yang cukup besar. Menjadi pusat penghasil ikan teri yang cukup besar, masyarakat Desa Padelegan sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan tangkapan utamanya ikan teri. Pemerintah daerah menetapkan desa ini sebagai kampung teri, hal ini sesuai dengan peraturan daerah untuk membentuk desa tematik berbasis sumberdaya. Masyarakat telah mengolah dan menjual ikan teri dalam bentuk segar dan olahan, antara lain : teri krispi, sambel teri, rengging teri, teri kering, dll. Partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait sangat mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan ekonomi pesisir ini. Pengembangan ekonomi di Desa Padelegan cukup baik menuju pada kemandirian desa. Kemandirian perekonomian bisa terwujud yang dipengaruhi oleh berbagai hal yaitu : regulasi mencapai (85,27%), pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan produk lokal sebanyak (95,14%), ketersediaan infrastruktur mencapai (89,07%), kelembagaan (86,35%) dan jaminan sosial (84,75%). Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padelegan bisa dicapai jika sumberdaya alam dikelola dengan benar dan berkelanjutan. Adanya industri rumah tangga merupakan kekuatan besar yang dimiliki Desa Padelegan. Sehingga sangat penting dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitasnya demi pengembangan ekonomi lokal untuk mewujudkan kemandirian lokal.

Kata kunci : Pengembangan ekonomi pesisir, kearifan lokal dan desa pesisir mandiri.

ABSTRACT

Local wisdom-based economic development is one of the ways to realize local economic independence. The purpose of this study is to provide insight and analyze the direction of local economic development based on the potential advantage of the coastal village in an effort to realize an independent community economy. This study uses descriptive analytical methods and Participatory Rural Appraisal (PRA), so that it can answer problems in the community in the process of economic development. Being a large producer of anchovy, Padelegan Village community mostly works as fishermen and the main catch is anchovy. The local government set this village as a small village, this is in accordance with local regulations to form a thematic village based on resources. The community has processed and sold fresh and processed anchovies, among others: crispy anchovies, anchovies sauce, anchovies rengging, dried anchovies, etc. Participation and support from various related parties greatly influenced the success of this coastal economic development effort. Economic development in Padelegan Village is good enough towards village independence. Economic independence can be realized which is influenced by various things, namely: achieving regulation (85.27%),

community empowerment and local product management as much as (95.14%), infrastructure availability reaching (89.07%), institutional (86.35%) institutional reach (86.35%) and social security (84.75%). Improvement of community welfare in Padelegan Village can be achieved if natural resources are managed properly and sustainably. The existence of a home industry is a great strength of Padelegan Village. So it is very important to foster and improve its quality for the development of the local economy to realize local independence.

Keywords: Development of coastal economy, local wisdom and independent coastal villages.

PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota (KepMen, 2002). Sumberdaya pesisir memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan ekonomi baik daerah maupun nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk.

Desa Padelegan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Jarak dari Desa Padelegan menuju pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 7 Km dan jarak dari kota menuju kabupaten adalah 12 Km. Keadaan Geografis Letak astronomis :7.240566 LS –113.523295 BT b.Batas desa Timur : Selat Madura Selatan : Selat Madura Barat : Desa Majungan Utara: Desa Tanjun. Luas wilayah desa :9.07 Km² (12.61%). Panjang garis pantai :10,587 km. Ketinggian dari permukaan laut : 4 mdpl (BPS, Kabupaten Pamekasan,2018).

Dalam segi ekonomi, Desa Padelegan ini merupakan desa yang mayoritas masih tergolong menengah kebawah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai nelayan, dan sebagian yang lain bekerja di pabrik ikan. Jadi, untuk tingkat ekonomi masyarakat Desa Padelegan masih dibawah standar atau menengah kebawah. Penduduk, Sosial Budaya, Ekonomi dan kelembagaan. Jumlah total penduduk 3,266 jiwa, Jumlah Rumah tangga : 971, Laki-laki:1,622 jiwa, Perempuan :1,644 jiwa dengan prosentase sex ratio 98,7%. Rumah tangga perikanan: 246 rumah tangga Jenis alat tangkap: Payang Ekosistem dan Sumberdaya Hayati Pesisir. Terumbu karang:101,13 Ha (Luasan total di Kecamatan Pademawu), Mangrove :276,71 Ha (Luasan total di Kecamatan Pademawu) (BPS, Kabupaten Pamekasan,2018). Banyaknya keluarga dan tingkat kesejahteraan di Desa Padelegan adalah Pra sejahtera sebanyak 182, Sejahtera I sebanyak 226, Sejahtera II sebanyak 486 dan Sejahtera III⁺ sebanyak 160 , dengan jumlah total 1054 (PLKB Kecamatan Pademawu, 2018).

Kusnadi (2009) secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir yaitu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya.

Kemiskinan nelayan merupakan isu lama yang terus bergulir hingga sekarang. Modernisasi perikanan pada tahun 1970-an sering dipandang sebagai penyebab timbulnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat nelayan (Suyanto, 1993). Persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan salah satunya adalah kemiskinan tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat nelayan (Kusnadi, 2009).

Dalam perkembangan berikutnya, faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan semakin kompleks, seperti adanya kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan penangkapan yang merusak lingkungan, seperti bom ikan dan potasium. Kerusakan ekosistem ini telah menurunkan tingkat pendapatan nelayan

(Ismail, 2003). Masalah perubahan iklim, keterbatasan teknologi dan akses pasar yang timpang juga menjadi penyebab kemiskinan nelayan (Muqtafa dan Nadila, 2001; Perry, 2010; Imron, 2003).

Kemiskinan nelayan tradisional terjadi karena masih belum hadirnya negara dalam melindungi hak-hak asasi nelayan dalam konteks pengelolaan perikanan hingga pemenuhan hak-hak dasarnya. Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 25% atau sekitar 7,87 juta orang miskin adalah masyarakat pesisir dimana nelayan merupakan pekerjaan utamanya. Namun dalam konteks penyediaan pangan, 80% konsumsi perikanan dalam negeri, di penuhi oleh perikanan skala kecil.

Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan dengan pembangunan dalam berbagai bidang. Berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal terus berjalan dan dikembangkan dengan melengkapi beberapa sarana dan prasarana pendukung.

Sejak akhir tahun 2015-an secara bertahap di Desa Padelegan mulai dibangun beberapa fasilitas pendukung oleh pemerintah dan terus berkembang. Fasilitas pendukung usaha ekonomi juga disiapkan. Seperti adanya beberapa dermaga dan tempat pelelangan ikan (TPI). Sebagian warga yang meliputi nelayan dan masyarakat umum lainnya ikut berperan dalam kegiatan ekonomi baik industri rumah tangga, garam dan perdagangan. Beberapa sumberdaya alam yang memiliki Desa Padelegan yang bisa dikembangkan adalah perikanan tangkap dan garam. Kegiatan ekonomi yang ada secara keseluruhan berjalan begitu saja belum ada pengelolaan yang jelas.

Bersasarkan uraian pada permasalahan tersebut, upaya pengembangan ekonomi lokal dalam upaya kemandirian desa sangatlah penting dan diutamakan. Penelitian ini membahas apa saja upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal untuk bisa mewujudkan desa pesisir yang mandiri.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sebuah desa pesisir yaitu Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pada bulan Januari sampai Mei 2019. Pengumpulan data dan informasi pendukung dilakukan secara partisipatif aktif di tingkat masyarakat maupun pemerintah desa serta nelayan. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan FGD. Penelitian PRA menempatkan masyarakat Padelegan yang menjadi kelompok sasaran sebagai ‘subjek’ dalam proses penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), sehingga dapat menjawab persoalan di masyarakat dalam proses pembangunan. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan pengembangan dari penerapan metode penelitian *Participatory Rural Appraisal* yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku proses kegiatan dan bukan sebagai objek (Handayani, 2009). Analisis data dengan menggunakan metode *Participatory Research Appraisal* (PRA). Penelitian jenis PRA bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif. Kelebihan penelitian yang menggunakan metode PRA diantaranya: lebih adaptif terhadap kebutuhan yang ada dan dirasakan masyarakat, lebih akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, lebih peka dan aspiratif bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Penggunaan PRA adalah mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan berdampak pada munculnya proses partisipasi aktif, baik teknis maupun politis dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam keseluruhan program kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari menyusun desain, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis data sampai menyusun laporan selalu bersama masyarakat/kelompok sasaran (Kusnaka & Harry Hikmat, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (*Local and Regional Economic Development*) yang pendekatannya berfokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global. Strategi pengembangan ekonomi daerah yang tepat diharapkan mampu menemukan dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (*knowledge based economy*) sekaligus berbasis sumber daya daerah (*local resources based economy*).

Pengembangan ekonomi daerah yang ada saat ini masih berbasis ideologi ekonomi tradisional. Pengembangan ekonomi daerah yang baik, seyogyanya mengadopsi pengembangan ekonomi lokal, yaitu: pendekatannya kewilayahan, pendekatan dari bawah, membangun kemitraan dan memanfaatkan potensi lokal. (Budiharsono, 2015).

Tujuan pengembangan ekonomi lokal antara lain adalah :

1. Mendorong ekonomi lokal tumbuh dan menciptakan tambahan lapangan kerja.
 2. Memberdayakan sumberdaya lokal yang tersedia
 3. Menciptakan ruang dan peluang untuk menyelaraskan persediaan dan permintaan
 4. Mengembangkan peluang-peluang baru untuk kepentingan usaha dan bisnis. (Sariono, 2019).
- Pada Tabel 1 disajikan perbedaan antara Pengembangan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Tradisional (Rodriguez-Pose, 2002).

Tabel 1. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Tradisional

NO	PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	EKONOMI TRADISIONAL
1	Pendekatan kewilayahan	Pendekatan sektoral
2	Pengembangan secara <i>bottom-up</i>	Pendekatan <i>top-down</i> , pemerintah pusat yang memutuskan bagaimana dan dimana dilakukan intervensi
3	Terdesentralisasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha	Dikelola oleh pemerintah pusat
4	Fokus pada maksimisasi potensi ekonomi setempat	Fokus pada industri besar dan insentif finansial untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi

Pengembangan ekonomi lokal dalam suatu kawasan dan keterlibatan (partisipasi) masyarakat masih belum optimal. Seluruh aktivitas ekonomi berjalan secara alamiah dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukungnya juga belum ada. Kemajuan ekonomi akan mendorong pengorganisasian kelembagaan ekonomi sebagai kebutuhan, sehingga berdiri koperasi, kelompok usaha ekonomi, toko/warung, lembaga keuangan mikro dan kegiatan usaha lainnya. Aktivitas –aktivitas ekonomi tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja dan semua orang memiliki akses ke peluang-peluang ekonomi yang tersedia dan tumbuh dinamis (Kusnadi *et al.*, 2019).

Kusnadi (2007) menjelaskan politik pembangunan desa nelayan adalah upaya sistematis, terencana dan terpadu untuk mengorganisir seluruh potensi sumberdaya pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan martabat sosial masyarakat nelayan yang didasarkan pada kebijakan penguatan kapasitas pemerintahan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya pesisir-laut, khususnya sumberdaya perikanan, secara proposional dan berkelanjutan. Basis konseptual politik pembangunan desa nelayan adalah karakteristik sumber daya

alam lokal, kondisi aktual pemerintahan dan masyarakat lokal, kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dalam sebuah konsep, Bank Dunia mendefinisikan pengembangan ekonomi lokal sebagai suatu proses dimana sektor publik (pemerintah), bisnis (swasta) dan non pemerintah, bekerjasama menciptakan kondisi-kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Dendi *et al.*, 2004 dalam Kusnadi *et al.*, 2019).

Diperlukan sebuah strategi khusus untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi lokal, hal ini dengan maksud agar setiap langkah yang diambil bisa menghasilkan capaian yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan Dendi *et al.*, (2004) bahwa strategi umum pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk mencapai : penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Hasil penelitian di Desa Padelegan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Nelayan di Kec. Pademawu

No	Desa	Nelayan Pemilik (orang)	Nelayan Pandega (orang)	Jumlah
1	Padelegan	247	1.482	1.729
2	Pagagan	100	600	700
3	Tanjung	156	777	933
4	Manjungan	8	48	56
5	Jarin	15	90	105
6	Baddurih	7	36	43
7	Pademawu Timur	-	-	-
	Jumlah	533	3.033	3.566

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Tabel 3. Usaha Garam Rakyat Kec. Pademawu

No	Desa	Jumlah Kelompok	Jumlah Petambak	Luas Lahan (Ha)	Total Produksi (Ton)
1	Dasok	5	44	15,0	4.175,0
2	Bunder	26	233	115,9	25.540,9
3	Pademawu Timur	3	27	23,7	2.904,7
4	Tanjung	9	79	53,4	6.708,7
5	Padelegan	9	77	64,3	7.973,8
6	Manjungan	17	128	130,3	17.767,1
7	Pagagan	4	28	19,1	3.199,9
8	Baddurih	4	29	24,2	4.458,5
	Jumlah	77	645	446,0	72.728,7

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Tabel 4. Industri Rumah Tangga Perikanan Kec. Pademawu

No	Desa	Jumlah Kelompok	Jumlah Petambak	Luas Lahan (Ha)	Total Produksi (Ton)
1	Dasok	5	44	15,0	4.175,0
2	Bunder	26	233	115,9	25.540,9
3	Pad. Timur	3	27	23,7	2.904,7
4	Tanjung	9	79	53,4	6.708,7
5	Padelegan	9	77	64,3	7.973,8
6	Manjungan	17	128	130,3	17.767,1
7	Pagagan	4	28	19,1	3.199,9
8	Baddurih	4	29	24,2	4.458,5
Jumlah		77	645	446,0	72.728,7

Sumber : Data Primer diolah (2019)

Pembahasan dalam pengembangan ekonomi lokal menuju desa mandiri antara lain adalah berhubungan dengan berbagai macam faktor antara lain adalah :

A. Regulasi

Regulasi (peraturan pemerintah) merupakan aturan yang harus dilaksanakan dan patuhi dalam pembangunan di Indonesia, regulasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal menuju desa mandiri sangat diperlukan suatu aturan yang jelas dan bisa diterapkan.

Dalam tujuan pembangunan ini adalah dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada regulasi pemerintah. Hal ini jelas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan taraf perekonomian masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan salah satu sektor dalam sebuah pemerintahan, tetapi harus terintegrasi dan terkontrol dengan baik.

Tindakan pemerintah yang menerbitkan peraturan khusus untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam juga patut diapresiasi. Namun, perlu ditekankan bahwa UU No. 7 Tahun 2016 harus diimplementasikan dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah harus segera menerbitkan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 27 UU No.23/2014 mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengelola sumberdaya alam di laut dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan, diluar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Data BPS periode 2000-2016 jumlah rumah tangga nelayan menurun dari tahun 2003 berjumlah 2.144.959 menjadi 965.756 pada tahun 2016. Selain itu, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan nasional gulung tikar akibat tak mendapat pasokan ikan mengingat kapal-kapal *illegal fishing* langsung membawa ikan curiannya ke luar negeri.

Turunnya jumlah rumah tangga nelayan, menjadi pertanyaan yang mendasar apakah kesejahteraan nelayan di Indonesia telah terjamin. Sehingga nelayan-nelayan yang dulunya menjadi profesi yang utama menjadi beralih pada profesi yang lain. Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan nelayan adalah wadah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Pada dasarnya, ada empat payung hukum bagi nelayan di Indonesia yaitu (i) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016), (ii) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU

Perikanan), (iii) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan (iv) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 berfungsi sebagai payung hukum utama untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. UU No. 7 Tahun 2016 mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, dan pengawasan disertai dengan sanksi pidana. Perlindungan bertujuan untuk membantu nelayan menghadapi kesulitan berkaitan dengan usaha perikanan. Sementara pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam melaksanakan usaha perikanan. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, serta pengawasan.

Terwujudnya perikanan yang berkelanjutan tentunya akan meningkatkan taraf hidup nelayan. Perlindungan hukum bagi nelayan dalam konteks perikanan tercermin dalam UU Kelautan dan UU Perikanan. UU Kelautan mengatur tentang perlunya perluasan kesempatan kerja dalam industri perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebagai kelompok yang paling rentan, nelayan kecil dan nelayan tradisional membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum lebih. Hal ini telah diakomodir dalam UU Perikanan dimana nelayan kecil diberikan kebebasan untuk tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), tidak dikenakan pungutan perikanan, dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dalam bentuk skim kredit, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penumbuhkembangan. Akan tetapi, UU Perikanan tidak mengatur terkait nelayan tradisional sehingga ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut tidak berlaku bagi nelayan tradisional. <https://icel.or.id/perlindungan-hukum-bagi-nelayan-indonesia/#more-8083>.

Dari hasil penelitian regulasi mencapai (85,27%) “sangat setuju” dan 14,73% “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi punya peran penting dalam peningkatan ekonomi lokal suatu desa.

B. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Produk Lokal

Masyarakat adalah sebuah aset pembangunan yang sangat penting, kualitas sumberdaya manusia akan menentukan sebuah keberhasilan dari upaya pembangunan dalam bidang apapun. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir tergantung pada sumber daya alam dan bersifat tidak menentu. Ketergantungan terhadap sumberdaya alam ini merupakan sebuah tantangan bagi aktifitas ekonomi masyarakat pesisir. Desa Padelegan memiliki potensi unggulan yaitu hasil tangkapan utama nelayan adalah ikan teri. Ikan teri merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting. Sebagai salah satu komoditas ekspor ikan teri juga merupakan ikan yang sangat banyak diminati oleh para konsumen dari berbagai segmentasi pasar. Kusnadi (2015) program pemberdayaan dari pemerintah atau berbagai pihak lainnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga sangat diharapkan dan dibutuhkan.

Masyarakat Desa Padelegan berperan aktif dalam dinamika pembangunan ekonomi. Mereka melakukan kegiatan pelatihan dan berorganisasi untuk meningkatkan pendapatannya. Pemberdayaan masyarakat melalui aparat pemerintah desa yang cukup aktif. Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan.

Desa Padelegan memiliki potensi unggulan yaitu hasil tangkapan utama nelayan adalah ikan teri. Ikan teri merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting. Sebagai salah satu komoditas ekspor ikan teri juga merupakan ikan yang sangat banyak diminati oleh para konsumen dari berbagai segmentasi pasar. Selain itu juga produksi garam yang cukup banyak.

Ikan teri yang peroleh dalam proses penangkapan yang cukup banyak oleh masyarakat sudah dilakukan pengolahan dengan beraneka ragam olahan (*diversifikasi*). Berbagai olahan teri antara lain menjadi teri krispi, sambel teri, rengginang teri, teri kering dan lain-lain. Banyak industri rumah

tangga yang berdiri dalam usaha pengolahan ikan teri. Mereka menjual tidak hanya pada skala lokal tetapi sudah sampai tingkat regional. Dengan adanya industri rumah tangga pengolahan teri ini yang cukup banyak dan mampu menopang perekonomian masyarakat lokal maka pemerintah Kecamatan Pademawu memberi nama sebagai “kampung teri”. Hal ini sesuai dengan konsep pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membentuk desa tematik. Dengan diberinya sebutan sebagai “kampung teri” maka Desa Padelegan akan mampu melakukan pembangunan ekonomi lokal menuju desa yang mandiri.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan pada umumnya masyarakat menyatakan “sangat setuju” (95,14%) dan “setuju” (04,86%). Berbagai pihak yang peduli pada pengembangan ekonomi lokal baik dari pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi maupun LSM. Pemberdayaan masyarakat di Desa Padelegan yang menjadi sasaran adalah para istri nelayan, para remaja dan nelayan. Jika pemberdayaan dilakukan pada mereka maka akan tercipta sumber-sumber pendapatan baru.

Hal ini menguatkan pendapat Kusnadi (2004) bahwa langkah strategis yang dapat diwacanakan untuk pemberdayaan pada masa mendatang adalah dengan mengembangkan pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi lokal secara sinergis dan terpadu.

C. Ketersediaan Infrastruktur

Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi lokal, hal ini merupakan salah satu modal sosial untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonominya. Sarana dan prasarana (infrastruktur) memiliki peranan yang sangat penting, meskipun untuk pengadaannya merupakan hal yang tidak mudah.

Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi lokal, hal ini merupakan salah satu modal sosial untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonominya.

Sarana dan prasarana (infrastruktur) memiliki peranan yang sangat penting, meskipun untuk pengadaannya merupakan hal yang tidak mudah. Namun pemerintah desa secara perlahan telah melakukan pelengkapan dan perbaikan infrastruktur di desa untuk mempermudah pelayanan dan kelancaran aktifitas masyarakat. Baik infrastruktur untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan sehari-hari.

Sarana prasarana di Desa Padelegan sudah cukup baik dan lengkap. Jalan-jalan desa yang menghubungkan antar dusun tidak terlalu rumit dan mudah dijangkau. Rumah-rumah berdiri cukup kuat dan kokoh, rumah ibadah juga bagus dan tertata baik. Berdiri juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelola ikan dan IPSAL (Instalasi Pengembangan Air Payau). Dari hasil penelitian infrastruktur mencapai (89,07%) “sangat setuju” dan 10,93% “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur sangat penting dalam peningkatan ekonomi lokal suatu desa.

D. Kelembagaan

Kelembagaan memegang kunci utama dalam mengembangkan pembangunan baik secara lokal maupun nasional. Aspek kelembagaan yang disusun oleh pemerintah desa disusun berdasarkan kondisi geografis dan karakter dari desa tersebut. Semakin kuat lembaga maka akan semakin solid dan terpadu proses pembangunannya. Hal ini juga termasuk pada upaya pembangunan ekonomi lokal. Sehingga dengan demikian diperoleh Desa Padelegan yang mandiri.

Dari hasil penelitian kelembagaan mencapai (86,35%) “sangat setuju” dan 13,65% “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan sangat penting dalam peningkatan ekonomi lokal suatu desa. Banyak lembaga keuangan di Desa Padelegan yang berbentuk koperasi sebanyak 2, selain koperasi tidak ada lembaga lainnya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab. XI yang mengatur eksistensi dan kewenangan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah cukup luas memberikan peluang kepada pemerintahan desa dan masyarakat nelayan untuk mengaktualisasikan dirinya dan membangun. Hal ini selaras dengan

Tedjaningsih, Suyudi, Nuryaman (2018) bahwa peran kelembagaan agribisnis sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian, karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani terhadap pengembangan sosial ekonomi petani, serta pasar. Pembangunan kelembagaan pertanian sebagai penunjang keberhasilan agribisnis diperlukan karena: (1) Proses pertanian memerlukan sumberdaya tangguh yang didukung oleh infrastruktur, peralatan dan kredit, (2) Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi, (3) Kegiatan pertanian mencakup rangkaian penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan tenaga kerja dan manajemen dan menempatkan output menjadi lebih berharga, (4) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat dan lokal, (5) Kompleksitas pertanian yang meliputi unit usaha dan kelembagaan sulit mencapai optimal.

E. Jaminan Sosial

Konsep jaminan sosial nelayan dikembangkan berdasarkan sifat sumberdaya perikanan yang dinamis karena pengaruh perubahan alam dan lingkungan. Berbagai resiko bisa terjadi dalam kegiatan penangkapan. Karakteristik ini mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Kondisi ketidakpastian hidup senantiasa terjadi pada kehidupan nelayan. Penghasilan yang tidak menentu semakin memperkeruh dengan kondisi kawasan perairan yang sudah dalam kondisi *overfishing*, degradasi ekosistem pesisir dan laut, dan lemahnya pemihakan kebijakan pembangunan untuk masyarakat nelayan. Kegiatan usaha perikanan tangkap merupakan aktivitas ekonomi yang kompleks karena melibatkan banyak pihak yang saling terkait secara fungsional dan substansional.

Hasil penelitian dalam kajian jaminan sosial “sangat setuju” mencapai (84,7 5%) dan 15,25% “setuju”. Hal ini dijelaskan bahwa dalam Adam (2015) nelayan dan petani merupakan dua pelaku sumber daya alam yang identik dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Petani telah mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan khusus melalui UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan nelayan paling tinggi adalah Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Oleh karena itu, DPR pada periode 2014 – 2019 mempersiapkan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Kelangsungan masyarakat nelayan berpartisipasi dalam program asuransi tersebut juga sangat ditentukan oleh konsistensi dalam perolehan pendapatan dari kegiatan melaut. Hal ini lebih meringankan tanggung jawab negara harus membiayai secara gratis seluruh kebutuhan hidup masyarakat nelayan, yaitu pendidikan dan kesehatan.

KESIMPULAN

Penduduk Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Pamekasan mayoritas bermatapencarian sebagai nelayan (65%) dengan hasil tangkapan utama yaitu ikan teri. Ikan teri sebagai hasil tangkapan terbanyak tidak hanya di jual dalam bentuk segar tetapi masyarakat sudah melakukan pengolahan ikan teri menjadi berbagai macam olahan. Dengan banyaknya industri rumah tangga pengolahan teri pendapatan masyarakat semakin meningkat. Sehingga sesuai dengan konsep pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk membentuk desa tematik maka Desa Padelegan diberi nama sebagai “Kampung Teri”.

Banyaknya keluarga dan tingkat kesejahteraan di Desa Padelegan adalah Pra sejahtera sebanyak 182, Sejahtera I sebanyak 226, Sejahtera II sebanyak 486 dan Sejahtera III⁺ sebanyak 160 , dengan jumlah total 1054.

Pengembangan ekonomi di Desa Padelegan sangat baik menuju pada kemandirian desa. Kemandirian perekonomian bisa terwujud yang dipengaruhi oleh berbagai hal yaitu : regulasi,

pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan produk lokal, ketersediaan infrastruktur, kelembagaan dan jaminan sosial.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padelegan akan dapat dicapai jika sumberdaya alam yang ada di desa tersebut benar-benar dikelola dengan benar dan berkelanjutan. Keberadaan industri rumah tangga merupakan kekuatan besar yang dimiliki Desa Padelegan. Sehingga sangat penting untuk terus dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitasnya.

SARAN

Untuk mewujudkan peningkatan ekonomi di Desa Padelegan perlu dilakukan penguatan (UMKM) industri rumah tangga terutama dalam sektor pengolahan ikan teri dan pengelolaan garam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura yang telah memberikan peluang dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka & Harry Hikmat. 2003. *Participatory Research Appraisal : Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Humaniora, Bandung.
- Budiharsono, S. 2010. Pengembangan Ekonomi Lokal Wilayah Cirebon, The Hidden Paradise Behind The Mask. Makalah Workshop and Action Pembangunan Ekonomi Kota Cirebon Berwawasan Lingkungan pada tanggal 1 Februari 2010 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon.
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humaniora Utama. Bandung.
- Tedjaningsih, Suyudi, Nuryaman, 2018. Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Mendong. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. 2018.4(2):210-226.
- Kusnadi, 2007. Jaminan Sosial Nelayan. PT. LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Kusnadi, Sunarlan, Sariono. 2019. Nelayan Osing di Blimbingsari Sinergitas Antarsektor, Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Lokal. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Porter, M. E. 2000. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. *Economic Development Quarterly*, Vol. 14 No. 1, February 2000, p: 15-34.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. "Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1."
- . 2004, "Sistem Jaminan Sosial Nasional, Bab VI: Program Jaminan Sosial, Pasal 18: Jenis Program Jaminan Sosial."

<https://icel.or.id/perlindungan-hukum-bagi-nelayan-indonesia/#more-8083>.

KONTRIBUSI KOPERASI SYARIAH DALAM MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN DESA MANDIRI DI BIDANG UMKM DAN PEREKONOMIAN DESA DI PACIRAN LAMONGAN

Eny Latifah

IAI Taarbiyatut Tholabah Lamongan
Jl.Raya Deandreas No.1 Kranji Paciran (62264)

ABSTRAK

Peran Lembaga Keuangan di dalam Suatu tatanan Pemerintahan sangatlah penting, khususnya di tingkat Pedesaan. Selain Lembaga Keuangan Perbankan disana ada juga Lembaga Keuangan Non Perbankan yang biasa menjadi pendamping masyarakat dan Pemerintahan di Tingkat Pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah itu adalah Koperasi Syariah. Dan di Desa Paciran hanya ada satu Koperasi syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera Paciran Lamongan. Koperasi syariah ini memiliki kontribusi yang sangat penting bagi percepatan pengembangan Desa Paciran Lamongan dengan menyediakan produk pembiayaan yang produktif dan kreatif dalam UMKM Masyarakat Desa Paciran demi meningkatkan keuangan dan Daya Inovatif Masyarakat Desa Paciran Lamongan dalam mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Alam dan Melestarikan Kebudayaan di Desa Paciran Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*, dimana data perusahaan dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori untuk menghasilkan sistem dan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Metode keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian adalah koperasi syariah memiliki kontribusi besar terdapat percepatan dan pengembangan Desa Mandiri di khususnya Bidang UMKM, hal itu bisa dilihat dari Ibu PKK yang ada di Desa Paciran yang memilih melakukan pembiayaan guna mendapatkan dana untuk memulai usaha dan sebagai suntikan dana untuk usaha yang telah berjalan. Selain UMKM Koperasi Syariah juga mampu memberikan dorongan dalam mempercepat usaha perekonomian di bidang Home Industri, Perdagangan, Perikanan dan Usaha Mandiri Masyarakat Desa Paciran Lamongan. Percepatan Pengembangan Desa Paciran juga mulai bermunculan wisata buatan dengan mengandalkan keindahan Alami yang dimiliki Desa Paciran untuk menarik wisata Asing agar bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat Desa Paciran.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Desa Mandiri, UMKM, Perekonomian dan Paciran.

ABSTRACT

The role of financial institutions in a government structure is very important, especially at the rural level. In addition to the Banking financial institutions there are also Non-Banking Financial Institutions which usually assist the community and government at the rural level. Islamic microfinance institutions are Islamic Cooperatives. And in Paciran Village there is only one sharia cooperative, the sharia saving and Credit Shria Cooperative (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera. This sharia Cooperative has a very important contribution to accelerating the development of Paciran Lamongan Village by providing productive and creative and creative financing products in the UMKM Paciran village community for the sake of increasing financial and innovative power of the Paciran Lamongan Village community in managing and developing natural resources and preserving culture in Paciran Lamongan village. This research uses a descriptive qualitative approach, where company data is analyzed and then compared with theory to produce a good system and method of making decision. the data validity method uses triangulation techniques. The results of the study are that sharia cooperatives have a large contribution to the acceleration and development of Independent Villages in the UMKM sector in particular. In addition to MSMEs, the Sharia Cooperative is also able to provide a boost in accelerating economic efforts in the fields of Home Industry, Trade, Fisheries and the Independent Community Business of the Paciran Lamongan Village.

Keywords: Sharia Cooperatives, Independent Villages, UMKM, Economy and Paciran City.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Paciran adalah salah satu desa pesisir utara yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Corak kehidupan di Desa ini beraneka ragam begitu juga dengan permasalahan yang dihadapinya. Meski infrastruktur Desa sudah dalam kategori baik dan jenjang pendidikan masyarakat sudah rata-rata Strata Satu (1), Hal itu tidak menjadikan Paciran menjadi Desa yang mampu Berkembang Cepat dan Mandiri dalam memperdayakan Sumberdaya Alam dan Sumber Daya Manusianya. Masih Banyak masyarakat yang mencari nafkah di kota lain dan bahkan di Negara Asing.

Pemerintah Desa Paciran kurang transparan atas apa yang akan menjadi prioritas pembangunan dan kinerjanya, sehingga masyarakat Desa Paciran lebih memprioritaskan kebutuhan masing-masing dengan bekerja secara independent dan mengasah ketrampilan demi mendapatkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan masyarakat desa Paciran tidak bisa dipisahkan dengan letak keberadaan desanya yang bersebelahan langsung dengan laut Jawa, letaknya yang langsung berhadapan dengan laut membuat masyarakat desa Paciran khususnya di dusun Jetak dan dusun Paciran kebanyakan memilih bekerja sebagai seorang nelayan. Walaupun sektor pariwisata dan sektor industri sudah mulai masuk di desa Paciran, namun hal tersebut tidak membuat jumlah nelayan di desa Paciran berkurang. Berbagai variatif profesi yang ada di Desa Paciran ternyata banyak yang memilih mengelola pendapatannya di titipkan oleh Koperasi. Pemilihan kepada Koperasi tidak hanya berkisar memberikan kepercayaan kepada koperasi untuk menjaga pendapatan mereka tetapi juga memilih koperasi dalam alternative mendapatkan tambahan dana atau kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan produktif ataupun konsumtif.

Koperasi yang berada di Desa Paciran jumlahnya ada 4 (Empat)¹ yaitu Koperasi MH.Mart, koperasi Delta Pratama, Koperasi Mina Tani, dan Koperasi Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera. Pihak Pemerintah Desa Paciran kurang begitu mengetahui basis dari masing-masing yang ada di Paciran. Apakah koperasi yang ada itu konvensional atau syariah Bapak Khusnul Khuluq selaku kepala desa Paciran mengutarakan² bahwa saya kurang begitu faham atas keberadaan koperasi syariah yang ada di Desa Paciran ini, saya menganggap bahwa semua adalah koperasi konvensional. Padahal dari 4 (empat) koperasi yang ada di Desa Paciran ada satu Koperasi yang berbasis Syariah yaitu Koperasi BMT Bina Ummat Sejahtera yang bergerak dalam basis Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menyediakan produk unggulan *Mudharabah, Murabahah, qordhul Hasan, BBA* dan lain-lain.

Peran BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) di Desa Paciran terbilang cukup penting bagi perkembangan perekonomian warga Desa Paciran dari tahun 2009 sampai 2019 ini. Jumlah Anggota yang bergabung dengan BMT BUS sampai tahun 2019 ini sebanyak 2.871 anggota dengan jumlah Asset 13.069.414.007³. Warga Paciran tidak hanya terbantu atas keberadaan BMT BUS ini dalam memenuhi kebutuhan yang sehari-hari harus dipenuhi.

Permasalahan yang ada membuat penulis tertarik mengangkat karya ilmiah yang berjudul “Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Mempercepat Pengembangan Desa Mandiri Di Bidang Umkm Dan Perekonomian Desa Di Paciran Lamongan”

¹Hasil Wawancara dengan Pak Kasmito selaku penanggungjawab atas dana Koperasi di Desa Paciran pada tanggal 23 Juli 2019 pada pukul 09.00 WIB di Balai Desa Paciran

² Kepala Desa Bapak Husnul khuluk memberikan Statemen atas pertanyaan peneliti tentang keberadaan adanya Koperasi Syariah yang ada di Desa Paciran sebagai berikut:

“saya tidak begitu mengetahui kalau di Paciran ini terdapat koperasi syariah, karena saya mengira semua jenis koperasi sama, dari situ peneliti baru menjelaskan bahwa ada satu koperasi di Paciran yang berbasis Syariah. Dan koperasi itu adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, dan letak koperasi itu persis berada di Baratnya RS. Arsy di Jalan Raya Deadles No. 183”

³ Dokumen yang peneliti dapatkan dari Wiwin Maulidah selaku *Teller* BMT BUS Paciran yang tercatat tanggal 24 Juli 2019 pukul 11.00 WIB di kantor BMT BUS Paciran.

BAHAN DAN METODE

A. Landasan Teori

1. Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan *Bait al Maal wa al Tamwil* (BMT)⁴. Baitul maal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro menurut Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyedia jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan pinjaman jasa pembayaran, pengiriman uang, dan asuransi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Definisi ADB tersebut mencakup rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan karena ada cukup banyak rumah tangga yang berpenghasilan rendah tetapi memiliki akses yang terbatas terhadap jasa keuangan, terutama di daerah pedesaan. Tujuan lembaga ini untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam pemberian kredit pada sektor riil. Karakteristik yang membedakan antara lembaga keuangan mikro syariah dengan konvensional adalah terletak pada beberapa instrumen yang diterapkannya, terutama instrumen bagi hasil (*profit and loss sharing sistem*) instrumen kerjasama dengan pola bagi hasil⁵

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan non perbankan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan Penyaluran Dana Infaq, Zakat dan Shodaqoh dari masyarakat untuk di salurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Koperasi syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran adalah koperasi syariah yang siap mendampingi masyarakat Desa Paciran dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif maupun produktif dengan pendekatan sistem yang berbasis syariah.

2. Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya harus stimulant atau perangsang.

Desa Mandiri adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat perlu menghormati aturan, kelesatarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

Tujuan UU Desa tersebut satu nafas dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Karenanya, dapat dikatakan Nawa Cita menjadi jembatan harapan ditindaklanjutnya visi dan misi pembaharuan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun mendatang. Lalu, apa saja sembilan agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawa Cita, yang isinya adalah 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi

⁴ Hadin Nuryadin, BTM dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160.

⁵ Veithzal, Riva'i dan Arifin, Avriyan *Islamic Banking*, 2010, (Jakarta: Bumi Angkasa), 235.

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*⁸, yang difokuskan pada peran dan upaya BMT dalam menjalankan visi dan misinya. Serta peran BMT *Microfinance* sebagai pendamping para wirausaha. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: (1) Primer (Sumber data utama), yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian keuangan dan bagian akuntansi, dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. (2) Sekunder (Sumber data kedua), yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menggunakan dokumentasi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian. Informan kunci (*key Informan*) adalah pimpinan perusahaan, informan penting (*Important Informan*) adalah staf marketing, dan anggota.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah terletak di desa Paciran, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Peneliti memilih Paciran tersebut, hanya desa tersebut kebanyakan masyarakatnya memiliki profesi yang heterogen. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah satu Bulan (8 Juli 2019 sampai 8 Agustus 2019) mulai survei, pengajuan penelitian, proses pencarian data, analisis data dan hasil penelitian.

D. Pemilihan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah

1. Kepala Desa Paciran atas nama Khusnul Khuluq
2. Kepala Koperasi Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera atas nama Abdul Hayat.
3. Anggota BMT Bina Ummat Sejahtera dengan perwakilan di beberapa sektor:
 1. Sektor industri, ibu Sutini
Peneliti mewancarai Ibu Sutini atas pembiayaan yang dilakukan di BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran dengan akad *Mudharabah*, yaitu sebagai modal tambahan atas industri yang dilakukan ibu Sutini. Industri yang dilakukan bertempat tinggal di Jl. KH.Zen dengan memproduksi jenang atau dodol ketan hitam dengan pangsa Pasar yang semakin hari semakin meningkat sehingga perlu modal tambahan dan Ibu Sutini memiliki BMT BUS dibandingkan Lembaga Keuangan lainnya karena Ibu Sutini lebih merasakan kekeluargaan dengan pihak BMT BUS.
 2. Sektor perdagangan, ibu Maghfiroh dan Bapak Ali Shodiqin
Peneliti mewancarai narasumber di lokasi penjualan, yaitu di pasar paciran dimana sampel itu adalah anggota pembiayaan di BMT BUS Paciran. Ibu Magfiroh penjual aneka sandal dan pakaian dalam mengutarakan bahwa sejak saya menjadi Anggota BMT BUS saya merasa kami memiliki kekerabatan dan persaudaraan serta memiliki kenyamanan karean lembaga keuangan lain lebih keras dan kurang transparan atas bagi hasilnya. Dari situ Saya (Ibu Magfiroh) memutuskan

⁶ Borni, Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, Jakarta: Kementrian Desa, Membangun Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Hal.12

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 05.

⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),83.

pembiayaan guna mendapatkan modal tambahan atas barang jualanya. Dan hal itu tidak hanya di utarakan oleh Ibu Magfiroh saja, disana ada Bapak Shodikin yang memiliki Toko Klontongan yang menjual aneka kebutuhan pokok mengutarakan bahwa BMT BUS adalah pendamping para pedagang ketika kami membutuhkan bantuan (modal tambahan).

3. Sektor perikanan, ibu Yati

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu Ibu yang memiliki usaha pengelupasan kulit Kepiting (dalam Bahasa Jawa paciran disebut dengan istilah nguplik rejungan) yang mana Suami Ibu Yati adalah Nelayan juga. Ibu Yati mengungkapkan bahwa BMT BUS memiliki tempat Istimewa bagi kami para istri Nelayan, karena mereka sudah menganggap kami adalah saudara, mereka mau mendatangi dari satu rumah ke rumah lain (jemput bola) dan itu mempermudah kami untuk menyimpan uang kami serta dapat memberi bantuan kepada kami bila kami membutuhkan uang untuk membeli perabotan rumah tangga dengan menggunakan akad *murabahah*. Kami tidak pernah merasakan fasilitas ini lembaga keuangan lainnya.

4. Sektor Jasa, Bapak Soeharto

Wawancara peneliti dengan Bapak Soeharto dilakukan di tempat usaha Bapak Soeharto yang membuka jasa Jahit dan Sablon yang dibantu istrinya. Narasumber adalah anggota BMT BUS yang tidak hanya menyimpan uang saja akan tetapi sering melakukan pembiayaan di BMT BUS, selain cara pelunasan yang lebih memiliki sistem kekeluargaan, BMT ini juga siap jemput bola sehingga Kami tidak perlu meninggalkan usaha kita. Dari situlah kami tidak memiliki berpatner dengan lembaga keuangan lainnya.

5. UMKM, ibu Dewi

Wawancara dengan ibu dewi selaku pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan di Koperasi syariah demi mendapatkan modal usaha pengelolaan bahan Ikan laut yang dikemas lebih modern dan bisa di pasarkan dengan harga lebih tinggi dibanding dengan kemasan sebelumnya. Bu dewi ini mengelola bayi kepiting yang dibuat krispy dan tahan lama, beliau juga menjual aneka kerupuk ikan.

E. Tahap-tahap penelitian

1. Tahap pra lapangan meliputi: 1) Menyusun rancangan penelitian. Pada tahap awal ini peneliti membuat proposal penelitian; 2) Memilih lapangan penelitian. Karena peneliti mengambil judul “Kontribusi Koperasi Syariah dalam Mempercepat Pengembangan Desa Mandiri Di Bidang Umkm Dan Perekonomian Desa Di Paciran Lamongan” maka lapangan penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan; 3) Mengurus perijinan. Peneliti mengajukan permohonan kepada Kepala desa Desa paciran, tempat penelitian ini berlangsung; 4) Memilih dan memanfaatkan informan. Dalam tahap ini, peneliti harus selektif dalam memilih informan. Dalam hal ini, peneliti memilih koperasi syariah BMT Bina Ummat Sejahtera Desa Paciran; 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian. Pelengkapan yang diperlukan dalam tahap ini adalah surat ijin, alat tulis, (buku catatan, bolpoint, map), jadwal kegiatan dan anggaran biaya.
2. Tahap pekerjaan lapangan meliputi: 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri yang meliputi pembatasan latar dan peneliti, penampilan peneliti harus sesuai dengan aturan yang berlaku, pengenalan hubungan peneliti dilapangan dan kemudian jadwal penelitian harus diperhatikan; 2) Memasuki lapangan dengan bersosialisasi dengan orang-orang setempat; 3) Menemui informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya yang valid. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan informan tentang bagaimana kontribusi koperasi syariah BMT BUS berperan dalam perkembangan perekonomian dan UMKM yang ada di Desa Paciran ini.

F. Teknik pengumpulan data.

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode:

1. Interview

Pengumpulan data mengenai kondisi ekonomi dan UMKM di desa Paciran serta cara-cara keluarga nelayan kecil desa Paciran dalam mempertahankan hidup adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada obyek yang diteliti. Pertanyaan ini diajukan dalam bentuk wawancara yang sebelumnya telah dipersiapkan tuntas serta dilengkapi dengan instrumennya. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁰ Dalam penelitian ini interview dilakukan menggali informasi tentang kondisi ekonomi keluarga nelayan kecil desa Paciran serta cara yang dilakukan keluarga nelayan kecil desa Paciran dalam mempertahankan hidup.

2. Observasi

Penggalian data selanjutnya adalah mengenai cara-cara mempertahankan hidup di desa Paciran dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Adapun observasi menurut Suharsimi Arikunto adalah “cara mengadakan pengamatan terhadap obyek baik langsung maupun tidak langsung”. Dengan demikian metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan kemudian mencatat segala apa yang dihasilkan dari pengamatan tersebut mengenai kondisi ekonomi desa Paciran serta cara yang dilakukan warga desa Paciran dalam mempertahankan hidup.

3. Dokumentasi

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi seperti arsip-arsip tertulis, buku, majalah, dokumen-dokumen mengenai obyek yang diteliti yang ada dilokasi penelitian. Selain itu dokumentasi berupa foto, serta catatan-catatan mengenai hal seputar cara-cara mempertahankan hidup warga di desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

G. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm.129.

¹⁰ Ibid., hlm.133

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan (lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan) berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu saksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.¹¹

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Ada tiga dasar tipe triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu: 1) Trianggulasi data, adalah penggunaan beragam sumber data suatu penelitian untuk menambah atau memperkaya data sampai benar-benar valid. Seperti dokumentasi, hasil wawancara, dan hasil observasi. 2) Trianggulasi peneliti, adalah mengadakan pengecekan diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Seperti pembimbing peneliti bertindak sebagai pengamat. 3) Trianggulasi metodologis, adalah pengumpulan data dengan berbagai metode. Seperti metode wawancara dan metode observasi.

b. Validitas Desain

Desain penelitian ini melingkupi berbagai informasi penting tentang rencana penelitian. Dalam desain penelitian diuraikan tentang pertanyaan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan berbagai prosedur untuk penentuan sampel atau informan, penggalian dan analisis data. Desain penelitian kualitatif ini juga menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Dengan kevaliditasan desain, penelitian dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara secara mendalam, keikutsertaan peneliti secara langsung di lapangan dan mendokumentasikan apa yang terjadi di lapangan.

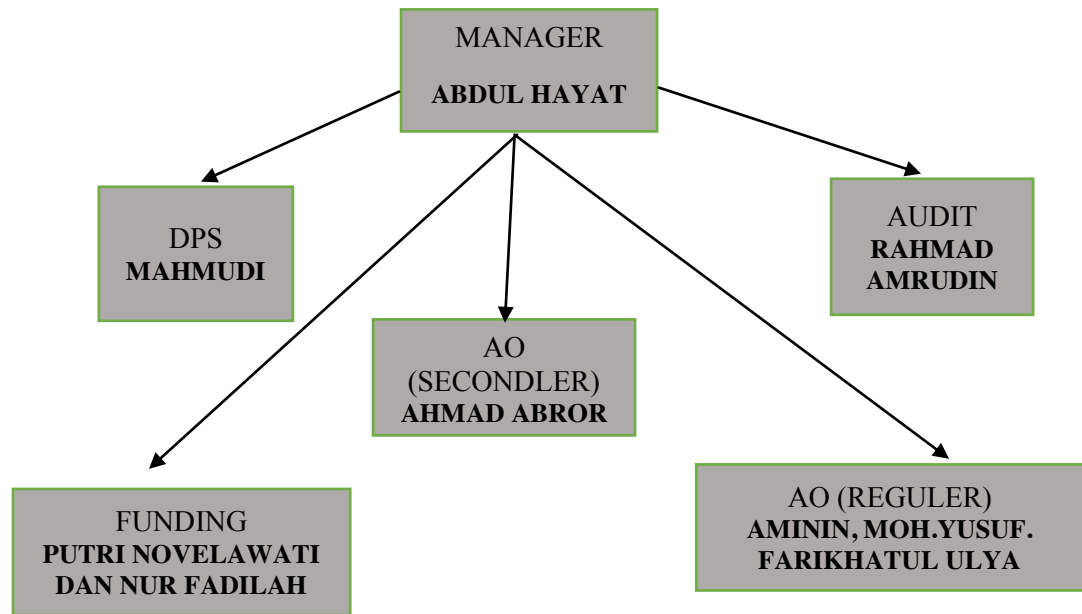
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran

Dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing-masing dan kesimpangsiuran dalam menjalani tugas dapat dihindari. Adapun struktur organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran adalah sebagai berikut:

¹¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), hlm. 339-341.



Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Bina Ummat Sejahtera Paciran

Sumber: Dokumen Bina Ummat Sejahtera Paciran¹²

2. Produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

a. Produk Simpanan

Jenis-jenis Simpanan yang ada di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah:

1) Simpanan Sukarela Lancar (*Si Relu*)

Pengertian *Si Relu* adalah produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (*pelaksana/pengelola usaha*), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

2) Simpanan Sukarela Berjangka (*Si Suka*).

Pengertian *Si Suka* adalah simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari *shohibul maal* (pemilik modal) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *mudharib* (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai *nisbah* (porsi) yang telah disepakati di awal.

3) Simpanan Siswa Pendidikan (*Si Sidik*)

Pengertian *Si Sidik* adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip *wadhiah yadh dhamanah*, yaitu *shohibul maal* menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin *shohibul maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

4) Simpanan Haji

Pengertian *Si Haji* adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadhiah yadh dhamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh

¹² Dokumen yang ditulis penulis pada tanggal 23 juli 2019 di kantor Bina Ummat Sejahtera Paciran pukul 13.00 WIB Paciran.

penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadan Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya di daftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

5) Simpanan *Ta'awun* Sejahtera (Si Tara)

Simpanan yang didukung dengan fasilitas teknologi online. Dengan akad *wadi'ah* semakin mempermudah dan menguntungkan anggota dalam bertransaksi. Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat di semua kantor cabang atau kantor BMT anggota si tara.

b. Produk Pembiayaan

1) *Mudharabah* (Modal Kerja)

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai Shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota sebagai *Mudhlorib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perkembangan pembiayaan *Mudharabah* di BMT ini bisa dikategorikan berkembang. Tahun 2012 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan sebanyak 307 orang, Tahun 2014 meningkat menjadi 315 orang dan di Tahun 2015 kemarin jumlah anggota sebanyak 384 dari seluruh jumlah anggota yang sebanyak 1836 orang.

2) *Bai'Bitsamanajil* (Jual Beli)

Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang, BMT mendapatkan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Produk ini tidak terlalu di nikmati masyarakat dibuktikan dengan hasil olahan yang diberikan pihak BMT menunjukkan bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan hanya berkisar 10 sampai 16 orang saja dari Tahun 2012 sampai 2015.

3) *Ijarah* (Jasa)

Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa *asset* pribadi maupun usaha, dengan pemberian ujroh yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan. Pelayanan yang diberikan BMT kepada anggota terkait *Ijarah* adalah layanan pembayaran telepon, pembayaran listrik, Pembayaran air sampai surat menyurat kendaraan bermotor. Meskipun perkembangan produk ini tidak sebesar produk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tapi masyarakat sudah mendapat kemudahan tanpa harus antri dan banyak memakan waktu hanya demi pembayaran-pembayaran jasa yang ada diatas. Jumlah anggota di Tahun 2015 ini yang melakukan transaksi *Ijarah* hanya sebesar 16 orang .

4) *Qardul Hasan* (Kebajikan)

Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil ataupun margin, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja. Produk ini memang jarang bisa direalisasikan, karena dalam kurun waktu 2 sampai 4 tahun hanya menangani pembiayaan sebanyak 2 atau 1 saja di tahun 2015 ini.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Koperasi Syariah atas Perkembangan UMKM di Desa Paciran

Keberadaan Koperasi Syariah BMT Bina Ummat dalam membantu perkembangan UMKM di Desa Paciran adalah: Tahun 2015 anggota koperasi syariah yang melakukan pembiayaan mudharabah (bagi hasil) demi mengembangkan usaha masyarakat desa Paciran semakin meningkat jumlahnya 384 orang dan kini tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 586 orang dengan jumlah asset 2.804.913.240. dengan prosentase anggota yang menggunakan dana pembiayaan tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan UMKM sebesar 35 orang, dengan usaha yang variatif. UMKM kripik singkong, UMKM cumi-cumi kering, dan lain-lain. Meskipun prosentase yang ditunjukkan tidak begitu signifikan atas kontribusi koperasi syariah dalam membantu pengembangan dan kemajuan usaha mikro kecil masyarakat di Desa Paciran, tetapi hal tersebut mampu menurunkan tingkat pengangguran Ibu-ibu Rumah Tangga yang awalnya tidak produktif di rumah mereka sendiri dan sekarang berusaha mencari penghasilan tambahan tanpa bergantung kepada kepala rumah tangga (suaminya).

2. Kontribusi Koperasi Syariah atas Perekonomian Desa Paciran

Bentuk kontribusi koperasi syariah dalam membantu pertumbuhan perekonomian Desa Paciran bisa dilihat dari dampungan Koperasi Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera terhadap:

a. Keinginan Ibu Rumah Tangga memiliki Penghasilan Tambahan

Kebutuhan Rumah Tangga semakin hari semakin besar, sehingga terkadang lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Ibu rumah tangga sering memproduksi aneka makanan ringan seperti gorengan-gorengan dan aneka kue untuk di jual atau di titipkan ke pedagang Pasar Paciran. Dan awal modal mereka berasal dari pinjaman dana yang didapatkan dari BMT Bina Ummat Sejahtera dengan nominal rata-rata 500.000 tanpa agunan dan bisa di angsur setiap hari sebesar 10.000 dalam jangka waktu yang sesuai keinginan anggota (3 bulan, 6 bulan). Kontribusi BMT BUS dalam menyediakan dana dan memberikan pinjaman kepada Ibu Rumah Tangga tersebut akan memberikan pendapatan tersendiri dan mampu membantu suami dalam mencari penghasilan tambahan. Kontribusi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif yaitu adanya penghasilan tambahan tetapi juga memberikan ruang inovatif dan mengurangi angka pengangguran yang ada.

b. Menjalankan Bisnis Baru

Era digital membuat masyarakat lebih melakukan jual beli secara online, baik jual beli sebagai produsen langsung, distributor (*Reseller*), atau hanya memilih menjadi konsumen akhir. Beranda Media masa seperti facebook, Instagram, telegram, dan lain-lain semua menjadi media promosi bagi kalangan muda dan ibu-ibu demi mencari penghasilan baru. Dari situ terciptalah bisnis baru yang digalang oleh para generasi milenial demi mendapatkan uang tambahan dan membantu keluarga. Dan peran koperasi syariah dalam bisnis baru yang dirancang generasi milenial adalah menjadikan BMT sebagai penyedia dana mula untuk memulai stok barang yang akan di pasarkan, seperti yang dituturkan ibu dewi yang mana memulai menjalankan bisnis online sebagai *reseller* dia meminjam BMT Bina Ummat Sejahtera sebesar 500.000 untuk operasional jual beli demi melayani calon konsumen nantinya.

c. Menciptakan Dinasti Wisata Bahari Alami

Paciran adalah desa yang dekat dengan laut utara yang memiliki keindahan dan panorama yang enak dilihat mata. Tidak jarang laut di pesisir utara desa Paciran menjadi tujuan para wisatawan local maupun interlokal sebelum atau setelah mereka berwisata di Wisata Bahari Lamongan. Ada sebuah Pantai yang Masyarakat Paciran memberi nama "Pantai Lorena" dengan dasar Laut yang ada di tepi Utara Dusun Penanjan dengan istilah Jawa-nya "Lore Deso Nanjan"

sehingga disebut Lorena. Di tepi pantai berjejer pedagang yang menjual aneka khas jajanan Desa Paciran seperti minuman Legen, Jumbrek, Siwalan, Rujak gula jawa khas Paciran dan lain-lain. Untuk bisa singgah dengan puas menikmati pemandangan pengunjung bisa gratis menikmatinya bagi yang jalan kaki dan tidak membawa kendaraan. Akan tetapi yang membawa kendaraan akan dikenai biaya parkir antara 2.000 sampai 5.000 rupiah.

Tidak hanya pantai Lorena yang menjadikan keindahan Laut Utara, ada juga “Pantai Gerong” yang terletak di gorong-gorong utara area Paciran yang mereka sering sebut dengan area “ikan duyung” dan berdampingan dengan area “Sukunan”. Pantai itu menyajikan kehidupan Nelayan dan para ibu-ibu mejajankan aneka jajanan buatan rumah mereka di sore harinya. Para penjurung bisa datang ke pantai itu bebas tanpa biaya. Pantai Gorong ini destinasi yang tergolong masih baru. Masyarakat sekitar yang inisiatif dengan dana dari masyarakat sekitar untuk menciptakan wisata kecil itu.

Kontribusi Koperasi BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran dalam adanya wisata Bahari yang ada di Desa Paciran adalah sebagai penyedia dana tambahan bagi para pedagang yang berjualan di area sekitar wisata laut tersebut, dengan dana pinjaman sekitar 500.000 sampai 1.000.000 rupiah.

3. Kontribusi Koperasi Syariah atas Perkembangan Desa Mandiri di Paciran

Perkembangan Desa Paciran memang masih belum bisa dikatakan sebagai desa yang mandiri dan maju. Karena masyarakat di desa ini masih sulit mengembangkan diri dibidang perekonomian khususnya dan diberbagai bidang lainnya. Masyarakat desa Paciran belum bisa mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder sendiri. Masyarakat masih harus meminta bantuan distribusi dan produksi dari desa tetangga atau kota-kota besar lainnya.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Desa Paciran belum bisa dikatakan sebagai desa yang mandiri baik secara financial maupun perekonomian dan bidang-bidang lainnya, sehingga peran koperasi syariah yang ada juga mengalami kendala dalam mendampingi kebutuhan desa.

Kontribusi koperasi syariah di bidang UMKM tidak begitu signifikan, akan tetapi mampu menjadi pendamping bagi ibu rumah tangga untuk berinovasi dan mendapatkan penghasilan tambahan, mampu mendampingi generasi milenial dalam berbisnis online, serta mampu mendampingi dalam mengembangkan destinasi wisata laut di desa paciran.

B. Saran

Koperasi Syariah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera bekerjasama (MoU) dengan Pemerintah Desa Paciran dalam Pelaksanaan Program Desa seperti poyek TKP (Taman Kuliner Paciran) di masa yang akan datang dan berkolaborasi dalam pengadaan dana di program kerja yang ada di BUMdes berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anas Sudijono, 2009, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Borni, Kurniawan, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Kementrian Desa, Membangun Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indoensia, Jakarta.

Burhan, Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Hadin, Nuryadin, 2004, *BTM dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ulber, Silalahi, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Veithzal, Riva'i dan Arifin, 2010, *AvriyanIslamic Banking*, Bumi Angkasa, Jakarta.

“ALAT PEMOTONG IKAN RUCAH” BAGI KELOMPOK KJA “SENDANG MARINA” KABUPATEN TUBAN

Susanti Dhini Anggraini¹, Abdul Wahid Nuruddin², Yuyun Suprpti³

^{1,2,3} Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Jl Manunggal No.61 Kecamatan Semanding Kabupaten
Tuban Jawa Timur Kode Pos 62381

¹susantidhini@gmail.com,

²nuruddinabdulwahid@gmail.com,

³yuyunsuprpti80@gmail.com.

ABSTRAK

Budidaya Laut Karamba Jaring Apung (KJA) untuk wilayah Kabupaten Tuban mulai dikembangkan di Desa Bancar Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban pada tahun 2016. Salah satu kelompok KJA pembudidaya ikan kerapu cantang di desa Bancar memiliki nama Sendang Marina. Tujuan pengabdian masyarakat ini membuat inovasi alat pemotong ikan yang efektif dan efisien berdasarkan permasalahan mitra, pada mitra proses pemotongan ikan rucuh menggunakan gunting sehingga membutuhkan waktu lama dan tenaga yang banyak, ukuran ikan yang dipotong tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan sehingga ikan tidak akan termakan oleh ikan yang dibudidaya. Metode yang kami gunakan yaitu menggunakan desain for manufacturing (DMF) yang ergonomis dengan membuat inovasi teknologi melalui model peralatan pemotong ikan rucuh yang Efektif dan Efisien. Harapan alat ini mampu menghemat waktu, tenaga pekerja, dan mengurangi biaya operasional budidaya terutama terhadap honorarium tenaga kerja serta kebutuhan pakan. alat Pemotong Ikan Rucuh ini di bernama “EFEFIT”. Alat ini juga didesain secara ergonomis, mobile dan portabel dapat membantu kelompok budidaya KJA laut dapat mengerjakan dengan aman dan nyaman dan tidak merubah postur tubuh pekerja. EFEFIT mampu mempercepat kerja dari para nelayan pemotong ikan, yang dalam 1 hari pakan yang dibutuhkan kurang lebih 50 kg dengan tenaga 6 orang pekerja dalam waktu 6 jam kerja dengan adanya alat ini hanya membutuhkan 1 orang pekerja dalam waktu 6 jam. Sehingga para nelayan bisa melakukan aktivitas lain tanpa harus memotong ikan setiap hari, dan mampu mengurangi biaya operasional dalam budidaya Laut KJA.

Kata Kunci : EFEFIT, KJA, ergonomis, mobile, portable

ABSTRACT

Karamba Jaring Apung (KJA) for the Tuban Regency began to be developed in Bancar Village, Bancar District in Tuban Regency in 2016. One of the KJA groups of Cantang grouper fish farmers in Bancar village has the name Sendang Marina. The aim of this community service is to innovate effective and efficient fish cutting tools based on the problems of partners, on partners cutting the trash fish using scissors so that it takes a long time and a lot of energy, the size of the fish cut does not match the specified size so that the fish will not be consumed by farmed fish. The method we use is to use an ergonomic design of experimental tools by making technological innovations through Effective and Efficient crumb fish cutting equipment models. Hope this tool is able to save time, labor, and reduce the operational costs of cultivation, especially on labor fees and feed requirements. This trash fish cutting tool is called "EFEFIT". This tool is also designed ergonomically, mobile and portable to help the marine KJA aquaculture group can work safely and comfortably and not change the posture of the worker's body. EFEFIT is able to accelerate the work of the fish-cutting fishermen, who in one day feeds approximately 50 kg with the power of 6 workers within 6 working hours with the existence of this tool only requiring 1 worker within 6 hours. So that fishermen can do other activities without having to cut fish every day, and be able to reduce operational costs in KJA Sea culture.

Keywords: EFEFIT, KJA, ergonomic, mobile, portable

PENDAHULAN

Budidaya Laut Karamba Jaring Apung (KJA) untuk wilayah Kabupaten Tuban mulai dikembangkan, dengan uji coba pertama adalah budidaya ikan kerapu cantang. Adapun lokasi pemasangan KJA Laut adalah di desa Bancar kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (Gambar 1). Desa Bancar merupakan daerah yang potensial untuk dilakukan pengembangan budidaya laut dengan menggunakan KJA. Kelompok Sendang marina berdiri pada bulan Nopember 2016 dan terbentuk karena adanya kesadaran dari masing-masing anggota untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya dalam KJA dan pada bulan April 2017 telah mendapatkan pelatihan di BPBAP Situbondo untuk mendapatkan materi tentang budidaya laut KJA.





Gambar 1 Lokasi Pemasangan KJA di perairan laut Bancar. Jarak antara KJA Kelompok Bina Bahari dan Sendang Marina berjarak 500 meter

Pada budidaya ikan kerapu cantang, proses pemberian pakan harus dengan proses pemotongan ikan yang disesuaikan dengan mulut ikan yang dibudidaya (Admojo, 2018). Bahan baku pakannya adalah ikan rucah yang diambil dari tempat pelelangan ikan terdekat diantaranya perairan bulu dan glondong. Pakan yang dibutuhkan dalam 1 hari minimal 5-100 kg/hari dengan menyesuaikan ukuran berat dari ikan kerapu tersebut.

Pada bulan Nopember tahun 2017 kedua kelompok KJA ini mendapatkan bantuan KJA dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk dipasang di perairan Bancar Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dan langsung dilakukan penebaran pertama benih ikan kerapu cantang. Tabel 1. merupakan profil mitra yang akan menjadi mitra.

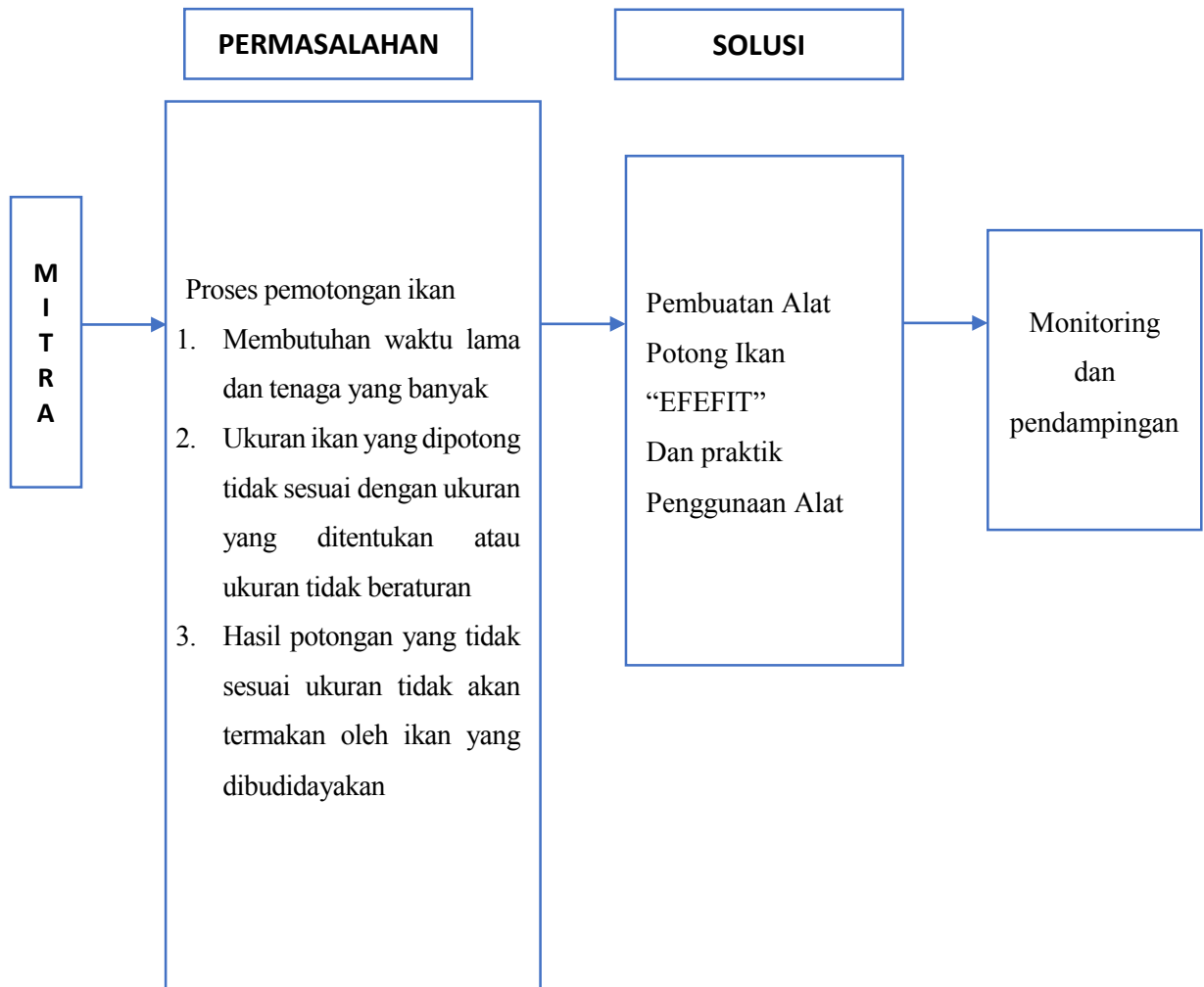
Tabel 1. Profil Mitra

KELOMPOK	SENDANG MARINA
Alamat Usaha	Kelurahan Bancar RT03 RW01 Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban
Nomor Telepon	085231251817
Jumlah Anggota	10 Orang Ketua: Muhammad Muhyidin Sekretaris: Aminah Bendahara: Baharudin Anggota: Rozi, Syukur, Afif, Nahmuji, Deni, Rani, Kasmanto
Pemotongan Ikan Rucah	 <p>± 5-50 kg/hari</p>
Kelompok	

Ikan kerapu cantang merupakan ikan kanibal. Sehingga jika tidak tepat waktu dalam pemberian pakan atau kurang dalam memberikan pakan akan terjadi kanibalisme. Yang akan berdampak juga pada berkurangnya hasil panen. Oleh karena itu pemberian pakan tepat waktu sangat penting dilakukan. Pemberian pakan harus dilakukan proses pemotongan ikan rucah terlebih dahulu. Pemotongan ikan rucah sebagai pakan di budidaya kerapu di KJA Sendang Marina masih menggunakan gunting tradisional. Hal ini mengakibatkan budidaya ini membutuhkan waktu yang lama pada proses pemotongan dan tenaga yang sangat banyak. Oleh karena itu pada pengabdian ini dibuat inovasi alat pemotong ikan rucah yang efektif dan efisien serta tepat guna. Diharapkan dapat membantu pembudidaya KJA pada proses budidaya.

BAHAN DAN METODOLOGI

Bahan yang digunakan dalam pembuatan alat EFEFIT ini antara lain stainless, pisau baja, pahat kotak stainless, roda dan baut.



Gambar 2. Metode pelaksanaan PKMS EFEFIT (Penulis, 2019)

Metode yang digunakan adalah metode DMF (Desain For Manufakturing). Dengan metode ini akan dihasilkan suatu alat yang ergonomis, efektif, efisien dan tepat guna. Alat pemotong ikan EFEFIT ini dapat membantu permasalahan mitra yaitu dapat mengurangi jumlah tenaga dan mempercepat waktu kerja. Metode pelaksanaan PKMS EFEFIT ditunjukkan pada Gambar 2.



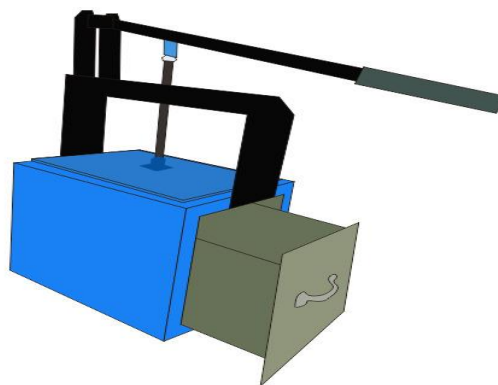
Gambar 4. Permasalahan Mitra terhadap alat pemotong ikan rucah

- Jumlah Tenaga yang dibutuhkan untuk memotong ikan rucah sebagai pakan ikan
- Cara sederhana memotong ikan rucah
- Ukuran kerapu umur 3 bulan, kebutuhan pakan dengan padat penebaran 5000 ekor
- sebesar 50 kg/hari dengan ukuran ikan rucah 3 cm
- Hasil pemotongan ikan rucah dengan alat sederhana membutuhkan waktu 6 jam untuk 50 kg

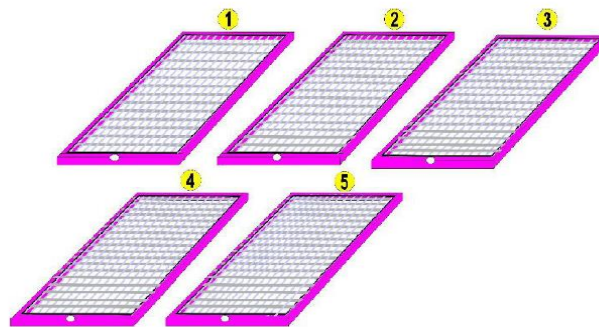
Untuk mencapai jumlah pakan yang sesuai kebutuhan budidaya dan sesuai ukuran mulut ikan yang dibudidayakan serta untuk menghemat waktu dan tenaga pekerja maka dikembangkan inovasi teknologi alat potong ikan “EFEFIT”, yaitu alat potong ikan yang efektif dan efisien, dalam arti tidak membutuhkan waktu yang lama serta tenaga yang banyak tetapi dapat memberi hasil potongan ikan yang banyak dan sesuai dengan ukuran mulut ikan. Desain dibuat sederhana dan kecil sehingga mudah dibawa atau disimpan tanpa membutuhkan ruangan yang besar.

Desain Alat Pemotong Ikan EFEFIT

Alat pemotong ikan EFEFIT didesain dengan laci utama, pegangan, tutup pintu dengan variasi ukuran pisau yang disesuaikan dengan ukuran mulut ikan pembudidaya. Desain alat EFEFIT ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Desain Alat EFEFIT yang ergonomis



Gambar 6. Variasi ukuran pisau EFEFIT

Berdasarkan Gambar 6 Alat Potong Ikan “EFEFIT” ini terdiri dari (a) Tutup pemotong ikan sekaligus sebagai alat penekan, (b) tempat pisau pemotong, (c) Laci tempat penampungan hasil ikan potong, (d) Pegangan tutup pemotong ikan sekaligus berfungsi sebagai penekan, (e) Engsel untuk membuka dan menutup alat pemotong ikan secara otomatis sehingga aman saat digunakan (f) Pegangan laci penampung ikan.

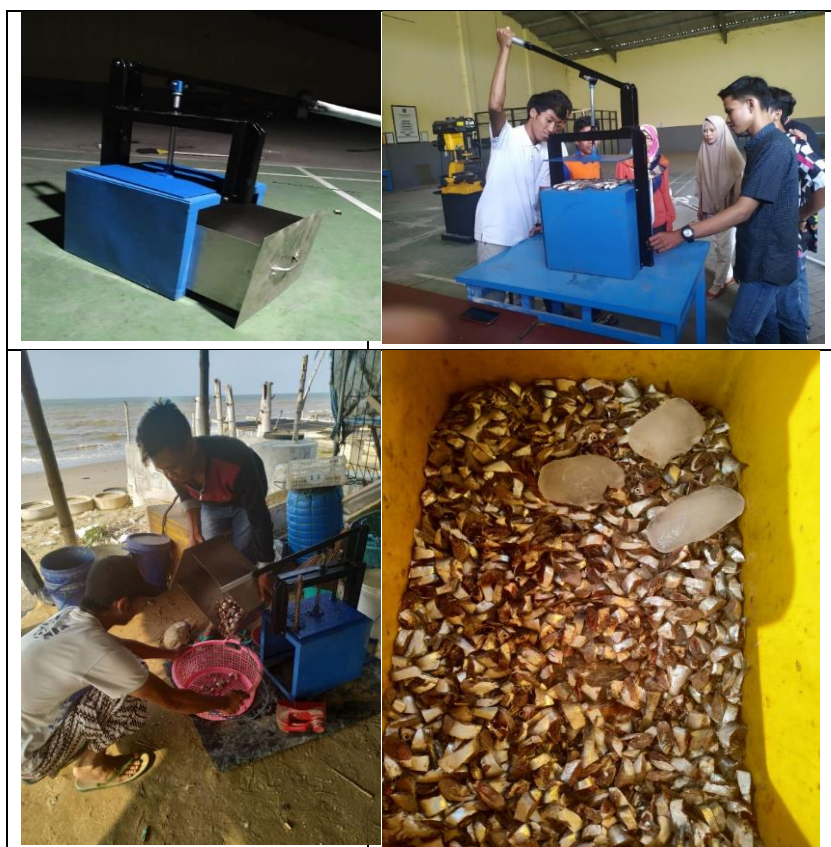
Cara kerja alat pemotong EFEFIT yaitu pisau pemotong dipasang sesuai ukuran yang dikehendaki. Adapun ukuran pisau mengacu Gambar 7: (1) pisau ukuran 1 cm x 1 cm, (2) pisau ukuran 2 cm x 2 cm, (3) pisau ukuran 3 cm x 3 cm, (4) pisau ukuran 4 cm x 4 cm, (5) pisau ukuran 5 cm x 5 cm. Desain pisau dilindungi tepian besi sehingga aman saat dilakukan pergantian ukuran pisau, kemudian ikan ditata di atas pisau, proses pemotongan dilakukan dengan menarik pegangan pintu dari atas ke bawah. Dilakukan pengulangan dengan mengisi ikan, kemudian ikan rucah yang telah dipotong di tampung di laci penampungan yang terbuat dari bahan stainless. Pemilihan bahan stainless dilakukan untuk mencegah korosi, mempermudah pencucian, Desain alat EFEFIT dipatenkan dengan no paten P00201809071 (Suwarsih dkk, 2019)

Alat Pemotong Ikan EFEFIT di KJA sendang Marina

Ikan Rucah merupakan jenis ikan kecil yang memiliki kandungan protein dan lemak yang relatif tinggi (Yolanda, 2013). Alat yang berhubungan dengan pemotong ikan rucah belum banyak ditemukan, yang banyak alat-alat pemotong ikan sederhana (Pratama, 2012). Pada PKMS ini dibuat alat pemotong ikan rucah dan video Perakitan alat EFEFIT yang dapat di lihat di youtube http://youtu.be/8kQ0vq_dvNU. Alat EFEFIT ini memiliki prosedur pisau pemotong di pasang sesuai ukuran yang dikehendaki, pisau yang dilindungi tepian besi sehingga aman saat dilakukan pergantian ukuran pisau, Ikan di masukkan di atas pisau, proses pemotongan dilakukan dengan menarik pegangan pintu dari atas ke bawah, dan dilakukan pengulangan dengan mengisi ikan secara kontinyu dan Ikan di tampung di laci penampungan.

Pemotongan ikan dengan menggunakan alat EFEFIT mampu memotong ikan rucah dan mampu mempercepat proses pemotongan ikan yang akan di gunakan sebagai pakan di budidaya KJA Sendang Marina di desa bancar kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Efektifitas alat EFEFIT dibandingkan dengan alat konvensional gunting pada proses pemotongan ikan rucah. Penggunaan gunting untuk ikan 50 kg membutuhkan waktu 6 jam dengan 6 orang pekerja, sedangkan dengan alat EFEFIT hanya membutuhkan 1 orang pekerja dengan waktu 6 jam. Hal ini sangat membantu pembudidaya KJA dan bisa menurunkan biaya operasional.

Kegiatan PKMS ini meliputi pembuatan alat, pelatihan pengenalan alat kepada mitra dan pelatihan perawatan dan keselamatan kerja penggunaan alat ditunjukkan pada gambar 7.



Gambar. 7 Alat EFEFIT dan penerapan pada MITRA

KESIMPULAN

Pembuatan Alat pemotong ikan rucah yang Efektif dan Efisien didesain secara *ergonomis*, *mobile* dan *portabel* sehingga dapat membantu kelompok budidaya KJA laut dapat mengerjakan pemotongan ikan rucah dengan aman dan nyaman dan tidak merubah postur tubuh pekerja. EFEFIT mampu mempercepat kerja dari para nelayan pemotong ikan, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga pekerja, dan mengurangi biaya operasional budidaya KJA terutama terhadap honorarium tenaga kerja dan kebutuhan pakan.

SARAN

Perlu adanya pengembangan alat pemotong ikan rucah dengan sistem pengaturan ukuran pisau, sehingga tidak membutuhkan bahan yang banyak untuk pembuatan pisau pada pemotongan ikan rucah EFEFIT.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Tim Lab Manufaktur Terintegrasi Teknik Industri Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2. Kelompok Mitra KJA Sendang Marina Desa Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.
3. Lembaga pengabdian masyarakat Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
4. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, S., D. dan Ariastita, P., G., 2018, Kriteria Lokasi Keramba Jaring Apung (KJA) *Offshoredi* Perairan Provinsi Jawa Timur, Desain dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) JURNAL TEKNIK ITS, Vol.7
- Corlett E. N. and Clark T.S, 2009, The Ergonomics of Workspaces and Machines, edition published in the taylor and francis e library, Francis
- Fadhlan, M., 2014, Rancang Bangun Mesin Seratdari Biji Kapuk (Ceiba pentandra (L.) Gaerrtn), [Skripsi]Padang: Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas
- Pratama, A. 2014. Rancang Bangun Alat Pembelah Pinang Semi Mekanik, [Skripsi], Padang: Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas.
- Roy, R.M, 2005. Operation Management, Ansari road, Daryoganj, Newdelhi
- Rasmossen, S. 2011. Production Economic, Institute of Food and Resource Economic, Denmark
- Suwarsih, marita, J dan Susanti D. A, 2019, Alat pemotong ikan rucah, no paten P00201809071,<http://patentscope.wipo.int/search/de/detail.jsf?jsessionid=149475B2E6A25319C1779>.
- Yolanda, S., Santoso, L. dan Harpeni, E., 2013, Pengaruh Substitusi Tepung Ikan Rucah Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila Gesit, e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perikanan, I, Hal .95-100.



**REVITALISASI BUDAYA SEBAGAI ATRAKSI WISATA BARU GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA ADAT KEMIREN,
BANYUWANGI**

**CULTURAL REVITALIZATION AS THE NEW TOURIST ATTRACTION IN
IMPROVING THE ECONOMY OF THE PEOPLE AT DESA ADAT KEMIREN,
BANYUWANGI**

Ayu Wanda Febrian^{1*}, Dora Melati Nurita Sandi², Masetya Mukti³

¹²³Politeknik Negeri Banyuwangi, Kabat Banyuwangi, 68461

*ayuwanda@poliwangi.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata menjadi salah satu sektor utama yang tengah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satu wisata unggulan milik Banyuwangi adalah wisata pedesaan di Desa Adat Kemiren. Desa Adat Kemiren memiliki banyak atraksi wisata yang menampilkan kebudayaan asli Kemiren. Atraksi pembuatan kopi, membatik, tarian tradisional, dan kuliner menjadi atraksi unggulan Desa Adat Kemiren. Gagasan kreatif, inovatif, dan inspiratif melalui revitalisasi budaya diperlukan dalam menuju pariwisata keberlanjutan di Desa Adat Kemiren. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kemiren perlu menemukan atau menciptakan atraksi baru guna pariwisata berkelanjutan. Tidak hanya itu, hal tersebut akan meningkatkan minat kunjung ulang wisatawan dan menciptakan *multiplier effect*. Melalui revitalisasi budaya, Kemiren dapat mengemas atraksi wisata baru yang sangat menarik minat wisatawan. Beberapa kebudayaan yang dapat direvitalisasi adalah permainan musik *gedhogan* dan tradisi *nginang*. Semakin berkembangnya zaman, musik *gedhogan* dan *nginang* dianggap sebagai sesuatu hal yang ketinggalan dan tidak *modern*. Disisi lain, hal tersebut menjadi atraksi wisata pedesaan menarik bagi para wisatawan yang mayoritas berasal dari perkotaan. Permasalahan yang ditemukan adalah para pemain atraksi tersebut sudah mulai lanjut usia, sehingga perlu generasi penerus kebudayaan tersebut. Pemberdayaan para generasi muda dapat menjadi jembatan dari permasalahan tersebut. Dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, mengenalkan, dan menguatkan kebudayaan asli Kemiren kepada generasi penerus.

Kata kunci: Budaya, atraksi wisata, wisata pedesaan, efek berganda, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

Tourism is one of the main sectors that has been developed by the Banyuwangi District government. The Kemiren Traditional Village Tour is the most attractive tour destination at Bayuwangi. Kemiren Traditional Village has many tourist attractions such as making coffee, batik, traditional dances performance, and culinary which are the main attractions of the Kemiren Traditional Village. Creative, innovative and inspirational ideas through cultural revitalization are needed in line with the sustainability tourism in the Kemiren Traditional Village. Pokdarwis or the tourism conscious community of Kemiren need to find or create new attractions for sustainable tourism. In addition, it will increase the number of tourists revisiting and creating a multiplier effect. Through cultural revitalization, Kemiren might create a new tourist attractions that are very attractive to tourists. Some of the cultures that can be revitalized are gedhogan music and betel vine tradition. Nowadays, gedhogan music and betel vine tradition are considered as things that are left behind and not modern. On contrary, this has become an attractive tourist attraction for tourists who mostly come from urban areas. The problem was that the perpetrators of the attraction are old therefore, it should be learned by the youth to keep the culture. Empowering youth can be a solution to solve these problems. To sum up, it improve the economy of the community, introduce, and strengthen the original culture of Kemiren to the next generation.

Keywords: Culture, tourist attraction, rural tourism, multiplier effects, community empowerment

PENDAHULUAN

Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat (Novia, 2014). Kabupaten dengan luas wilayah 5.782,50 km² dan terdiri dari 25 kecamatan ini tengah menggarap industri pariwisata secara lebih serius. Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam atraksi atau daya tarik wisata, mulai dari daya tarik wisata alam, buatan, maupun budaya. Ketika daya tarik wisata tersebut memiliki keunikan, keindahan, dan keanekaragaman kekayaan budaya maka dianggap mampu merangsang wisatawan untuk mengunjunginya. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Yolanda (2017) bahwa daya tarik wisata mempengaruhi keputusan berkunjung wisatawan.

Salah satu wisata unggulan yang dimiliki oleh Banyuwangi adalah wisata pedesaan di Desa Adat Kemiren. Desa yang berada di ketinggian 144 m di atas permukaan laut dengan curah hujan 2000 mm/tahun ini memiliki suhu udara rata-rata berkisar 22-26°C, sehingga cukup nyaman dan menarik dari sudut suhu udara dan pemandangan untuk wisata. Desa yang memiliki luas 117.052 m² ini juga berdekatan dengan Taman Wisata Alam Kawah Ijen sebagai objek wisata yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak di Banyuwangi (kemiren.com, 2019). Jika sektor wisata mampu dikelola dengan tepat, letak Desa Kemiren yang sangat strategis ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Semenjak didirikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada tahun 2017, keberadaan pariwisata memberikan angin segar bagi perekonomian masyarakat Kemiren. Kebutuhan wisatawan berkunjung ke Kemiren tidak hanya sekedar melihat atraksi wisata budaya, tetapi juga membutuhkan akomodasi lain seperti keperluan makan dan penginapan. Harapannya adalah wisatawan mampu membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan efek berganda (*multiplier effect*). Nilai *multiplier* ekonomi merupakan nilai yang menunjukkan sejauh mana pengeluaran wisatawan akan menstimulasi pengeluaran lebih lanjut, sehingga pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal (Belinda, 2013).

Desa Adat Kemiren telah dijadikan cagar budaya untuk melestarikan kebudayaannya. Desa ini didominasi oleh suku Using, suku asli Banyuwangi. Banyak ragam budaya asli yang dimiliki oleh suku Using, yang sangat khas dengan nuansa tradisional pedesaan. Budaya tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata desa seperti pembuatan kopi, membatik, tarian tradisional, dan kuliner. Tidak hanya itu, ragam jenis budaya yang dimiliki Desa Adat Kemiren dapat menjadi magnet baru bagi merangsang kunjungan wisata. Jika dari tahun ke tahun hanya menampilkan atraksi yang sama, maka dikhawatirkan dapat menurunkan minat kunjungan wisata dan berimbas juga pada pendapatan masyarakat dari sektor wisata. Dengan begitu maka gagasan kreatif, inovatif, dan inspiratif melalui revitalisasi budaya diperlukan menuju pariwisata keberlanjutan di Desa Adat Kemiren.

TINJAUAN PUSTAKA

Atraksi atau Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata atau “*tourist attraction*”, istilah yang lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu (Yoeti, 1985 dalam Nuraeni 2014). UU No 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Spillane (2002, dalam Nuraeni 2014) lebih menjelaskan bahwa daya tarik pariwisata memiliki lima unsur penting dalam objek wisata, yaitu: (1) *Attraction* atau hal-hal yang menarik perhatian wisatawan, (2) *Facilities* / fasilitas-fasilitas yang diperlukan, (3) *Infrastructure* /

infrastruktur dari objek wisata, (4) *Transportation* atau jasa-jasa pengangkutan, dan (5) *Hospitality* atau keramahan, kesediaan untuk menerima tamu.

Wisata Pedesaan (*Rural Tourism*)

Istilah wisata pedesaan diterapkan dalam arti luas, untuk mencakup berbagai kegiatan yang sedang dikembangkan di daerah pedesaan, yang berkaitan langsung dengan penyediaan layanan dan pengalaman dalam kegiatan wisata dan rekreasi. Wisata pedesaan didasarkan pada gambar-gambar yang dibentuk oleh sejarah, geografi, dan budaya wilayah setempat. Gambar-gambar dapat diciptakan oleh turis dan atau pengelola. Dengan adanya citra kolektif tersebut, objek sederhana dirubah menjadi tujuan wisata, sehingga wisata pedesaan dapat diartikan sebagai penemuan kembali tempat, dari sudut pandang sosial, antropologis, nilai-nilai keaslian, identitas budaya dan etnis (Canoves *el all.*, 2004)

Efek Berganda (*Multiplier effect*)

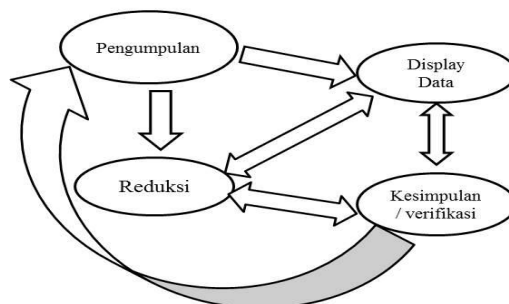
Nilai *multiplier* ekonomi merupakan nilai yang menunjukkan sejauh mana pengeluaran wisatawan akan menstimulasi pengeluaran lebih lanjut, sehingga pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Menurut terminologi, terdapat tiga efek berganda, yaitu efek langsung (*direct effect*), efek tidak langsung (*indirect effect*) dan efek lanjutan (*induced effect*). Ketiga efek ini digunakan untuk menghitung nilai ekonomi yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi dampak ekonomi di tingkat lokal. Konsep *multiplier* dapat dilihat dari jenis dampak secara langsung, tidak langsung, dan dampak lanjutan yang mempengaruhi akibat dari tambahan pengeluaran pengunjung ke dalam ekonomi lokal atau ekonomi nasional (Belinda, 2013).

Pemberdayaan Masyarakat

Dari segi bahasa pemberdayaan berasal dari kata “Daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha. Anwas (2013) menyebutkan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Payne (dalam Adi, 2012) lebih menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat itu ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial. Selain itu Makna pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memampukan individu atau komunitas. Pemberian wewenang atau kekuasaan tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan model interaktif dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017):



**Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data Model Miles dan Huberman
(Sumber: Sugiyono, 2017)**

1. Pengumpulan Data

Pada awal penelitian kualitatif, peneliti umumnya menggunakan studi *pre-eliminary* guna memverifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti benar adanya. Studi tersebut sudah masuk dalam tahap pengumpulan data. Pada studi *pre-eliminary*, peneliti sudah melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sehingga hasil dari berbagai macam aktivitas tersebut adalah data. Ketika peneliti dianggap sudah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *display* data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display data*, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dikatakan kredibel apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain daya tarik wisata alam, peran dari daya tarik kebudayaan suatu daerah memiliki peran yang penting dalam pengembangan wisata pedesaan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Canoves *et al.* (2004) bahwa pariwisata pedesaan dapat diartikan sebagai penemuan kembali tempat, dari sudut pandang sosial, antropologis, nilai-nilai keaslian, identitas budaya dan etnis.

Desa Adat Kemiren tengah gencar mengembangkan wisata pedesaan dengan memanfaatkan nilai-nilai keaslian, identitas budaya dan etnis khas Suku Using. Gagasan kreatif, inovatif, dan inspiratif melalui revitalisasi budaya diperlukan dalam menuju pariwisata keberlanjutan di Desa Adat Kemiren. Pokdarwis Kemiren perlu menemukan atau menciptakan atraksi baru guna pariwisata berkelanjutan. Dari beberapa kebudayaan yang dapat direvitalisasi adalah permainan musik *gedhogan* dan tradisi nginang. Berikut penjelasan dari hasil revitalisasi budaya di Desa Adat Kemiren:

a. Permainan Musik *Gedhogan*

Musik *gedhogan* merupakan salah satu peninggalan leluhur Suku Using. Eksistensi musik *gedhogan* semakin terkikis seiring kemajuan zaman. Selain itu, musik ini hanya dapat dimainkan secara baik dan benar oleh para wanita lanjut usia di Desa Adat Kemiren. Selama ini pihak Kemiren belum menyiapkan regenerasi penerus untuk pemain musik *gedhogan*. Kebudayaan ini sangat unik dan memiliki nilai seni yang mampu menarik minat wisatawan.

Sangat disayangkan ketika musik ini mati digerus zaman karena kurangnya kesadaran generasi penerus. Melihat nilai jual pariwisata yang tinggi dan pelestarian budaya tersebut, sangat perlu dilakukan revitalisasi budaya.



Gambar 2. Para wanita lanjut usia pemain musik *gedhogan*
(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis, 2018)

Pada tahun 2018 telah dibentuk “Paguyuban Remaja Putri Musik *Gedhogan* Desa Adat Kemiren” yang telah diinisiasi oleh Pokdarwis Desa Adat Kemiren bekerjasama dengan Politeknik Negeri Banyuwangi. Sekarang ini, Paguyuban Musik *Gedhogan* tersebut berada di bawah naungan pokdarwis Desa Adat kemiren dan setiap hari Minggu telah disepakati sebagai latihan rutin dibarengi latihan tari tradisional Banyuwangi.



Gambar 3. Pembentukan Paguyuban Musik *Gedhogan* Remaja Putri sekaligus latihan perdana yang menarik minat wisatawan asing
(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis, 2018)

Paguyuban Musik *Gedhogan* Desa Adat Kemiren memberikan manfaat yang berharga bagi masyarakat sekitar. Biasanya, para pemain musik *gedhogan* ini dapat mengantongi uang minimal Rp 20.000,00 tiap penampilan dan dapat tambahan tip dari para tamu. Bahkan bisa mengantongi sampai Rp 50.000,00 jika dapat kunjungan dari tamu-tamu istimewa seperti dari instansi - instansi pemerintahan. Pendapatan tersebut dirasakan lebih banyak jika dibandingkan

mereka menjadi buruh tani. Hal ini karena mereka tidak membutuhkan modal kerja, cukup pakaian adat dan lesung yang sudah disediakan pokdarwis.



Gambar 4. Penampilan Para Remaja Putri memainkan musik *gedhogan* di Festival Kopi Sepuluh Ewu Kemiren

(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis, 2018)

Selain memberikan manfaat secara ekonomi, keberadaan paguyuban ini juga turut menciptakan kesadaran kepada generasi penerus untuk melestarikan kebudayaan. Antusias dari para anggota paguyuban juga sangat tinggi, sehingga memberikan semangat pula bagi para pengurus dan pelatih. Hasil latihan rutin tersebut, selain menjadi daya tarik para wisatawan juga ditampilkan pada Festival Kopi Sepuluh Ewu Kemiren yang diadakan setiap tahun.

b. Tradisi Nginang

Beberapa daerah di Nusantara memiliki sebutan berbeda terhadap tradisi nginang. Ada yang menyebut nginang, nyirih, atau nyusur tergantung daerahnya yang sebenarnya aktivitasnya sama yaitu ngunyah daun pinang. Daun sirih itu biasanya disatukan dengan kapur, pinang dan gambir, lalu dikunyah sampai hancur, setelahnya mulut akan terlihat merah. Bagi masyarakat Indonesia nyirih atau nginang bukan cuma mengunyah daun dengan segala campurannya, lebih dari itu nyirih merupakan simbol budaya (kumparan.com, 2019).

Aktifitas nginang ini dapat dipercaya mampu memperkuat gigi. Para orang yang melakukan aktifitas ini, mayoritas memiliki gigi yang kuat, jarang ada yang berlubang, dan jarang yang tanggal bahkan sampai tutup usia sekalipun (baltyra.com, 2010). Nginang juga memiliki kelebihan lain yaitu menjaga kesehatan mulut, gigi, dan juga pencernaan karena di dalam daun sirih terdapat antibiotik (jawapos.com, 2017).

Seiring berjalannya waktu, tradisi nginang perlahan hilang. Hal ini karena hanya dilakukan oleh para kaum lanjut usia di daerah pedesaan. Sangat jarang ditemui generasi muda yang masih melakukannya bahkan tidak ditemui di kota-kota besar. Hal ini disinyalir karena sensasi yang dirasakan tidak terlalu menyenangkan. Bahkan bagi yang tidak terbiasa melakukannya akan muntah karena rasa dan aroma yang dihadirkan oleh nginang memang tidak semua bisa menerimanya (jawapos.com, 2017).



Gambar 5. Bahan Tradisi Nginang yang terdiri dari dauh sirih, injet/enjet, dan cuilan kecil gambir

(Sumber: Instagram Desa Kemiren, 2018)

Pasar utama dari wisata pedesaan adalah wisatawan yang secara geografis berdomisili di perkotaan. Hal ini karena aktifitas dan suasana pedesaan yang serba tradisional tidak akan ditemukan di kota yang serba modern. Tradisi nginang di Kemiren menjadi menarik bagi para wisatawan karena masih asing bagi mereka. Mereka cenderung akan penasaran dengan kegiatan yang dilakukan para nenek – nenek di Kemiren yang mulutnya berwarna merah akibat nginang.



Gambar 6. Wisatawan yang mencoba nginang di Desa Adat Kemiren

(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis, 2018)

Pada saat mengantar beberapa tamu dari kaum milenial yang berasal dari Bandung, daya tarik ini terjadi begitu alami. Saat itu ada nenek yang sedang menggulung daun sirihnya dan ada satu anak menanyakan tentang sirih tersebut. Penasaran anak tersebut mencoba karena tergiur ekspresi neneknya yang merasa nyirih itu menyenangkan. Akhirnya si anak tersebut menarik temannya yang lain untuk mencoba sensasi nyirih. Ada yang ketagihan ingin mencoba lagi, ada yang muntah karena tidak tahan pahit, ada yang takut mencoba, dan hal tersebut menciptakan suasana yang menyenangkan.



Gambar 7. Ekspresi keseruan wisatawan yang mencoba nginang di Desa Adat Kemiren
(Sumber: Dokumentasi Pokdarwis, 2018)

Hasil pengalaman tersebut, yang setelahnya masih terkenang karena terus diceritakan oleh wisatawan asal Bandung, nginang layak menjadi daya tarik wisata baru di Desa Kemiren. Para tamu biasanya memberikan tip kepada para nenek yang sedang nginang. Pada awalnya dulu hanya satu dua yang nginang tanpa maksud menarik minat wisatawan, namun karena potensi dari minat rasa penasaran wisatawan cukup tinggi, maka tradisi nginang dikemas sebagai daya tarik wisata budaya tambahan di Desa Kemiren.



Gambar 8. Pemuda pemudi dan Pokdarwis Desa Adat Kemiren
(Sumber: Instagram Desa Kemiren, 2019)

Melalui pariwisata, Kemiren tampil menjadi sebuah Desa yang membuat para warganya bangga. Hasil wawancara dengan pihak pokdarwis menyatakan bahwa pada bulan Januari – Mei 2019, omset yang didapatkan oleh Desa Adat Kemiren mencapai 140.000.000,00. Omset tersebut didapatkan dari hasil menjual paket wisata dan dana hibah dari beberapa perusahaan untuk pengembangan wisata di Kemiren. Kerja keras tersebut tidak terlepas dari peran serta para pemuda dan pokdarwis Kemiren yang terus kompak mengembangkan desanya.

Dari hasil yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat digambarkan melalui kajian yang diungkapkan oleh Kartasamita (1997 dalam Mustangin *et al*, 2017) sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya adalah pengenalan pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya. Kekuatan dari Desa Adat Kemiren terletak pada budaya Suku Using. Hal ini yang juga dijadikan *Branding* Desa yaitu “*Kemiren Soul of Osing*”. Pokdarwis sadar dengan potensi sumber daya tersebut, sehingga budaya dijadikan komoditi pariwisata dan masyarakat dimotivasi untuk memanfaatkannya secara ekonomis dan kelestarian budaya.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Diperlukan langkah-langkah positif, selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Desa Kemiren di bawah naungan Pokdarwis semakin gencar menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat. Pokdarwis mulai melakukan kerjasama dengan berbagai pihak instansi, baik pemerintahan, akademisi, maupun swasta. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai berdatangan untuk lebih mengembangkan potensi wisata Desa Kemiren. Salah satu yang tengah digarap serius adalah program paguyuban musik Gedhogan bagi kalangan remaja putri Kemiren. Kedepannya akan mulai digali kembali program-program yang mampu memberdayakan dalam waktu dekat, seperti pelaksanaan berbagai festival budaya, pelatihan *guide*, pembukaan *homestay*, dll.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemilihan wisata budaya sebagai salah satu cara pemberdayaan masyarakat di Desa Kemiren sudah sangat tepat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pokdarwis karena pada dasarnya Kemiren hanya memiliki budaya yang perlu dijaga. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya budaya memang bukan perkara mudah, sehingga pihak Pokdarwis harus memberikan bukti dulu berupa mendatangkan tamu yang sangat tertarik mencoba beragam budaya yang dimiliki Desa Kemiren. Oleh karena itu, revitalisasi budaya sebagai daya tarik wisata sangat membantu untuk keberlanjutan wisata budaya yang ada di Desa Kemiren.

KESIMPULAN

Musik *gedhogan* dan tradisi *nginang* mampu memberdayakan masyarakat dengan melalui tambahan penghasilan bagi masyarakat Kemiren dari sektor pariwisata. Ditetapkannya musik *gedhogan* dan tradisi *nginang* menjadi daya tarik wisata baru Kemiren adalah wujud jembatan dari permasalahan semakin tergerusnya budaya akibat modernisasi. Dengan demikian tujuan dari revitalisasi budaya tercapai, yaitu perekonomian masyarakat meningkat, pengenalan, dan penguatan kebudayaan asli Kemiren kepada generasi penerus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada tim pengabdian kepada masyarakat yang telah berhasil membantu Desa Adat Kemiren membentuk Paguyuban Remaja Musik *Gedhogan* sebagai langkah awal revitalisasi kebudayaan di Kemiren. Selanjutnya, terima kasih kepada Politeknik Negeri Banyuwangi yang memfasilitasi kegiatan PKM tersebut sehingga menstimulus budaya lain sebagai daya tarik wisata di Kemiren.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I,R 2012, *Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Anwas, O,M, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta
- Aspek Geografis 2019, diakses pada 27 Juli 2019, (<http://kemiren.com/aspek-geografis/>).
- Belinda, N 2013, *Analisis dampak berganda (multiplier effect) pemanfaatan wisata alam tanjung mutiara di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar*, Skripsi S1, Institut Pertanian Bogor.
- Budaya ngingang masyarakat nusantara 2019, diakses pada 27 Juli 2019, (<https://kumparan.com/potongan-nostalgia/budaya-nginang-masyarakat-nusanatara>).
- Canoves, G, Priestley, GK, Perez, MV & Romero, AB 2004, Rural tourism in Spain: An analysis of recent evolution. *J Geoforum Elsevier Ltd*, 3(5): 755-769.
- Ini filosofi tradisi ngingang di gelaran sekaten 2017, diakses pada 27 Juli 2019, (<https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2017/ini-filosofi-tradisi-nginang-di-gelaran-sekaten/>)
- Mustangin, Kusniawati, D, Islami, NP, Setyaningrum, B & Prasetyawati, E, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(1): 59-72
- Ngingang 2010, diakses pada 27 Juli 2019, (<http://baltyra.com/2010/01/13/nginang/>)
- Novia, L 2014, *IbM Kelompok masyarakat Osing dalam pemanfaatan tumbuhan obat tradisional Suku Osing Banyuwangi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- Nuraeni, BS 2014, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat kunjung ulang Wisatawan Museum Ranggawarsita Semarang, *Jurnal Bisnis STRATEGI*, 23(1): 1-20.
- Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Yolanda, F 2017, Pengaruh daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung ke objek wisata alahan panjang resort danau di atas Kabupaten Solok. *Ejournal Universitas Negeri Padang*, 1-22.

STABILISASI PANGAN DESA MELALUI MODEL BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI JAWA TIMUR

Medea Rahmadhani Utomo¹, Novil Dedy Andriatmoko²

¹ Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Jalan Veteran, Malang, 65145

² Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Jalan Veteran, Malang, 65145

medea@ub.ac.id

ABSTRAK

Stabilitas harga pangan menjadi masalah utama perekonomian di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan menyumbang inflasi paling besar setiap tahunnya. Perlu model bisnis berbasis teknologi informasi untuk mengatasi ketidakstabilan harga pangan, terutama di daerah rawan pangan. Melalui teknologi informasi pangan pedesaan kerawanan pangan dapat diatasi dengan cara merekayasa transaksi pangan dengan memasukan konsep tabungan pangan. Kedua, merekayasa sistem transportasi dengan mengadopsi model *canvassing*. Ketiga, menginisiasi Kios Pangan Desa (KPD) sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan akumulasi cadangan pangan. Terakhir, mengintrodusir jaringan pangan berbasis kelompok masyarakat melalui jaringan sistem informasi. Metode yang digunakan adalah uji hasil guna mengevaluasi kinerja sistem untuk melihat keberlanjutan sistem yang sudah diinisiasi Peran KPD melalui model bisnis berbasis teknologi informasi berguna untuk penyedia informasi kebutuhan pangan pokok dan harga masyarakat sekitar. Upaya ini di fokuskan pada masyarakat pedesaan yang mengalami kerawanan pangan di Kabupaten Pasuruan dan Malang. Melalui teknologi informasi konsumen atau masyarakat desa dapat melakukan order kepada KPD untuk pengiriman barang. Di sisi lain melalui sistem informasi, KPD melakukan pencatatan tabungan pangan yang diperoleh dari kesepakatan antara KPD dengan konsumen. Muara dari model bisnis pangan berbasis sistem teknologi informasi yakni menciptakan jaringan toko pangan untuk mencapai efisiensi dan kestabilan harga pangan bagi masyarakat desa. Berbagai aktifitas ini dijadikan sebagai simpul untuk membangun ketahanan pangan di masyarakat Jawa Timur.

Kata Kunci : Kerawanan Pangan, Stabilitas harga pangan, Kios Pangan Desa, Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Inflasi dan ancaman kekurangan pangan selalu menjadi momok pemerintah karena sangat merugikan perekonomian negara. Lembaga *buffer stock* didirikan untuk mengintervensi pasar jika suplai terganggu untuk mengurangi laju inflasi. Lembaga ini membeli kelebihan panen sebagai stok untuk disalurkan jika terjadi gangguan suplay termasuk saat bencana atau peperangan. Lembaga ini melakukan operasi pasar dan hibah pangan kepada kelompok rentan (Raskin) untuk menstabilkan harga. Lembaga dikenal sebagai *parastatals* atau penyangga stok pangan yakni “Bulog” (Ellis, 1992; Rashid et al, 2008; Purnomo, 2014).

Fluktuasi harga pangan pokok juga sering terjadi sehingga meningkatkan kerawanan pangan masyarakat terutama kelompok rawan pangan. Banyaknya rantai pemasaran juga menjadi kendala tersendiri, yang menyebabkan harga beli ditingkat petani dan harga jual ditingkat konsumen memiliki margin yang sangat besar. Perlu adanya lembaga yang bergerak dibidang pertanian agar tidak terjadi ketimpangan harga ditingkat petani dan ditingkat konsumen.

Dengan adanya sebuah lembaga perdagangan yang dikusai oleh pemerintah akan membantu petani dalam mendapatkan harga jual, sesuai dengan harga pasaran. Pada sisi cadangan pangan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti modernisasi Lumbung Pangan Desa (LPD), resi gudang, program tunda jual, juga diversifikasi pangan (Suryana, 2008). Sistem ini tidak memiliki akar yang kuat di komunitas selain juga tidak menjadi bagian dari transaksi ekonomi sehingga tidak efisien dan selalu membebani keuangan negara (Erani, et al, 2014; Purnomo, 2014).

Sistem yang dikembangkan pemerintah tersebut tidak mampu menjangkau kantong-kantong komunitas sehingga partisipasi masyarakat rendah. Informasi kerawanan dan kelimpahan pangan yang tersedia belum menyesar ke berbagai daerah dan belum terintegrasi. Selain itu, pemupukan cadangan pangan tidak dilakukan alamiah mengikuti alur transaksi pangan tetapi mengandalkan pelaku-pelaku pasar pangan besar. Masyarakat sebagai pelaku utama ditingkat lokal tidak pernah ikut dalam memupuk dan menstabilkan harga sehingga cadangan pangan dan pengendalian inflasi seolah hanya beban pemerintah (Purnomo, 2014).

Permasalahan mendasar dari sistem yang dikembangkan pemerintah tersebut tidak memiliki instrumen hingga ke kantong-kantong komunitas sehingga partisipasi masyarakat tidak ada. Selain itu, pemupukan cadangan pangan tidak dilakukan secara alamiah mengikuti alur transaksi pada pasar pangan tetapi mengandalkan pelaku-pelaku pasar pangan besar. Subsidi transportasi, resi gudang, atau program tunda jual hanya menguntungkan para pelaku besar sektor pangan. Masyarakat sebagai pelaku utama ditingkat lokal tidak pernah ikut dalam memupuk dan menstabilkan harga sehingga cadangan pangan dan pengendalian inflasi seolah hanya menjadi beban pemerintah.

Instrumen pemupukan cadangan pangan sekaligus pengendalian harga yang tidak merusak mekanisme alamiah pasar sangat diperlukan. *Unit Stabilisasi Pangan Desa* (USPD) adalah model yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. USPD menjadi agen pemerintah di akar rumput sekaligus menjadi media masyarakat berpartisipasi pada pembangunan stok pangan. Riset ini juga sangat urgen untuk mensukseskan kerja lumbung pangan desa juga bulog melalui kerja-kerja mikro yang melibatkan masyarakat dalam mengendalikan inflasi dan pemupukan cadangan pangan. Paradigma baru pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat sangat efektif dan keberlanjutan.

USPD lahir dari riset DIKTI selama tiga tahun (2012-2014) dengan tema Pengembangan “Smart Rural Food Enterprise”. Bersama dengan Balitbang Provinsi Jawa Timur dikembangkan riset aksi (action research) untuk membangun satu model pemupukan cadangan pangan dan stabilisasi harga di level komunitas. Riset ini adalah bagian dari strategi Balitbang Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi sebagai upaya menghadapi pasar bebas ASEAN. Hingga saat ini berkembang USPD model pada daerah rawan pangan diempat Kabupaten/kota yakni Kabupaten Malang, Pasuruan, Kota Malang, dan Kota Surabaya. USPD mengelola 22 Kios Pangan Desa dengan sebaran antara 4 hingga 5 kios tiap desa sesuai dengan jumlah penduduknya.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah: 1. Perlu dilakukan identifikasi potensi-potensi komunitas yang dapat dikembangkan menjadi media pengembangan cadangan pangan/tabungan pangan komunitas; 2. Melakukan analisis peran masing-masing potensi tersebut agar dapat dipilih pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan cadangan/tabungan pangan pada level komunitas; 3. Merancang sistem/cara dan rekayasa sosial untuk mengembangkan cadangan pangan pada level komunitas yang melibatkan produsen (petani) ataupun konsumen (masyarakat umum) dalam satu sistem; 4. Merancang implementasi model pengembangan cadangan/tabungan pangan yang memungkinkan komunitas secara terus menerus membangun cadangan pangannya sendiri sebagai komplemen jika terjadi tekanan terhadap ketahanan pangan baik kekurangan stok ataupun fluktuasi harga.

METODE PENELITIAN

I. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian aksi yang berpartisipasi atau dikenal dengan

Participatory Action Research (PAR). Kinerja sistem dalam mencapai tujuannya meliputi tiga aspek penting yakni

(1) kinerja stabilisasi harga pangan di level komunitas, (2) kinerja pemupukan cadangan pangan, serta

(3) kinerja peningkatan pendapatan kios pangan.

II. Lokasi dan Jangka Waktu

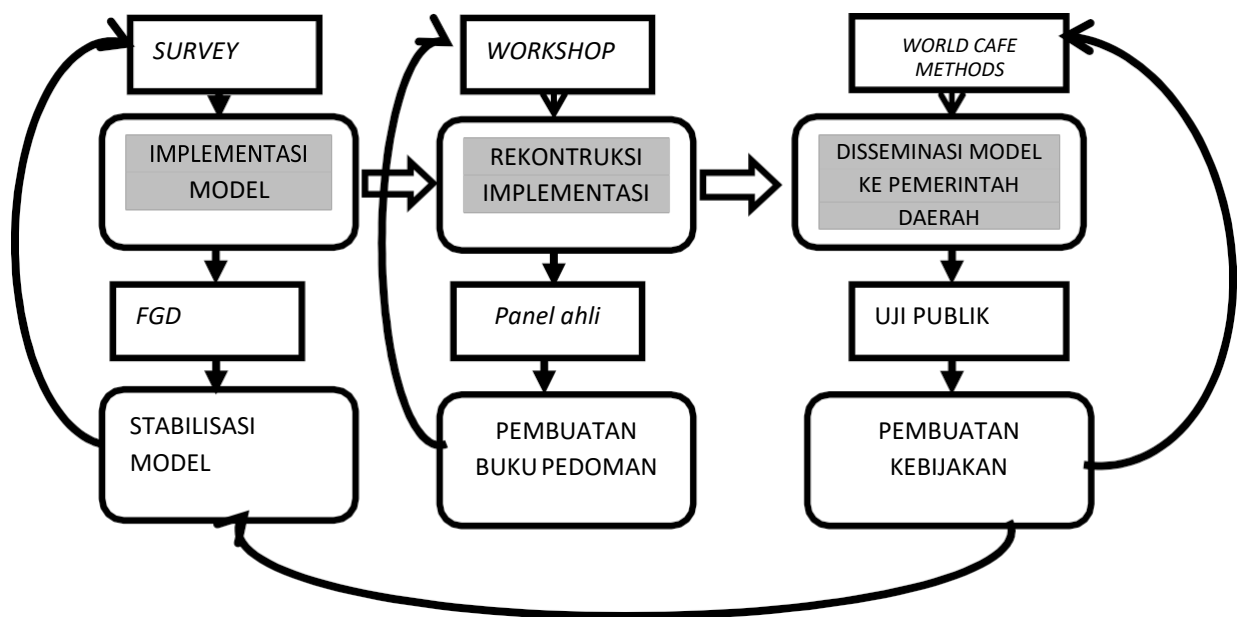
Penelitian dilakukan di tiga daerah yakni di Desa Ngadas Kabupaten Malang, Desa Wonokitri Kabupaten Pasuruan, dan Desa Jetak Kabupaten Probolinggo. Waktu penelitian dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan dimulai pada bulan April sampai dengan November 2015.

III. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Riset aksi ini dibagi menjadi tiga tahap kegiatan yakni tahap implementasi, rekonstruksi model, dan tahap diseminasi model. **Pertama**, tahap implementasi USPD terdiri dari kegiatan survey produksi pangan kawasan, survey kebutuhan pangan keluarga, survey simpul pangan komunitas calon kios pangan desa, FGD pendirian kios pangan desa, serta FGD perumusan kelembagaan USPD. Seluruh kegiatan tersebut direkonstruksi melalui panel ahli terdiri dari para ahli bidang pangan serta pengelola kios-kios pangan desa dan para kepala desa lokasi implementasi. Panel ahli digunakan untuk mengevaluasi efektivitas survey-survey yang dilakukan sehingga kuisioner yang dipakai menjadi lebih tajam dan aplikatif sehingga dapat digunakan dalam penyusunan buku pedoman.

IV. Analisis Data

Uji hasil adalah evaluasi kinerja sistem untuk melihat keberlanjutan sistem yang sudah diinisiasi. Uji ini terdiri dari tiga komponen utama yakni dinamika kelembagaannya, keekonomisan sistem dan kemampuan sistem mencapai tujuannya. **Pertama**, dinamika kelembagaan adalah kehandalan koordinasi masing-masing sub-sistem dalam USPD seperti kehandalan bagian pengadaan dan pengiriman, kehandalan kios pangan desa, dan pojok pangan alternatif. **Kedua**, keekonomisan sistem adalah evaluasi kinerja sistem apakah telah memberikan keuntungan ekonomis atau belum agar sistem mampu untuk melakukan re-investasi. **Ketiga**, kinerja sistem dalam mencapai tujuannya meliputi tiga aspek penting yakni (1) kinerja stabilisasi harga pangan di level komunitas, (2) kinerja pemupukan cadangan pangan, serta (3) kinerja peningkatan pendapatan kios pangan.



Gambar 3. Siklus Implementasi USPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Potensi-Potensi Komunitas untuk Pembangunan Informasi Cadangan Pangan

a. Pembangunan Informasi Cadangan Pangan Rumah Tangga

Cadangan pangan di rumah merupakan cadangan pangan yang dipersiapkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga, secara spesifik upaya ini dilakukan oleh petani yang mengedepankan prinsip keberlanjutan pangan di level rumah tangga. Secara umum, Cadangan pangan adalah stok pangan pokok yang diperoleh dari masyarakat baik dari hibah pangan ataupun tabungan pangan yang dikumpulkan melalui transaksi. Cadangan pangan diperoleh dari konversi tabungan pangan. Cadangan pangan yang dihimpun tersebut akan digunakan oleh anggota apabila terjadi bencana atau paceklik.

Tabel 1. Potensi Cadangan Pangan Rumah Tangga dari Pertanian

Jenis Tanaman	Bentuk stok	Fungsi	Potensi pertukaran
Kentang	Penyimpanan sisa panen di dalam pondok di sawah	Sebagai cadangan saat memerlukan sayur	Tidak bisa dipertukarkan
	kentang tertinggal dilahan saat panen	Diambil oleh pekerja saat mengolah tanah	Bisa dipertukarkan tetapi terbatas
Kobis	Sisa tanaman kobis dilahan habis panen	Diambil oleh siapa saja senyampang untuk dikonsumsi Sendiri	Bisa dipertukarkan dalam jumlah terbatas
	Sisa tanaman kobis di pematang lahan	Diambil oleh orang lain senyampang dikonsumsi sendiri	Bisa dipertukarkan dalam jumlah terbatas

Jagung	Disimpan dalam para-para di dalam rumah atau luar rumah	Diambil saat panen berkurang	Bisa dipertukarkan terbatas
Beras	Tersimpan di toko dan di rumahtangga	Diambil setiap saat sesuai kebutuhan	Dapat dipertukarkan melalui mekanisme pasar
Ketan	Tersimpan di rumahtangga	Diambil setiap saat sesuai kebutuhan	Dapat dipertukarkan melalui mekanisme pasar
Gula	Tersimpan di rumahtangga	Diambil setiap saat sesuai kebutuhan	Dapat dipertukarkan melalui mekanisme pasar
Minyak	Tersimpan di rumahtangga	Diambil setiap saat sesuai kebutuhan	Dapat dipertukarkan melalui mekanisme pasar

Sumber : data primer diolah (2015)

b. Pembangunan Informasi Cadangan Pangan dari Ternak

Ternak menjadi komoditas yang cukup memungkinkan di lingkungan sasaran USPD sebagai media pengembangan cadangan pangan di level rumah tangga. Komoditas ternak yang berkembang di Desa Wonokitri yaitu sapi dan babi. Kepemilikan sapi dengan jumlah yang besar menjadi indikator tertentu atas kelas masyarakat di Desa Wonokitri.

Tabel 2. Potensi Cadangan Pangan Rumah Tangga dari Peternakan

Jenis hewan	Bentuk stok	Fungsi	Potensi Pertukaran
Sapi	Penambahan berat badan selama pemeliharaan	Sebagai cadangan pangan permintaan pangan tinggi raya dan upacara adat)	Bisa melalui pasar
Babi	Penambahan anak	Sebagai cadangan pangan	Bisa melalui pasar
	Tiap empat bulan sekali	permintaan pangan tinggi raya dan upacara adat)	Bisa melalui pasar
	Penambahan berat badan selama pemeliharaan	Sebagai cadangan pangan permintaan pangan tinggi raya dan upacara adat)	Bisa melalui pasar
Ayam	Penambahan anak tiap empat bulan sekali	Sebagai cadangan pangan permintaan pangan tinggi raya dan upacara adat)	Bisa melalui pasar
	Penambahan berat Badan selama pemeliharaan	Sebagai cadangan pangan permintaan pangan tinggi raya dan upacara adat)	Bisa melalui pasar

Sumber: data primer diolah (2015)

c. Kelembagaan Cadangan Pangan sebagai Pengorganisasian Informasi

Cadangan pangan di level komunitas merupakan bentuk aktivitas pemupukan nilai ekonomi untuk tercapainya ketersediaan pangan berkelanjutan melalui ruang publik yang

dapat diakses berbagai komunitas. Komunitas disini terbagi menjadi komunitas sosial seperti ibu PKK, karang taruna, perkumpulan kerja bakti, dan komunitas profesi seperti komunitas tani, jasa wisata, paguyuban dan lainnya. Aparat desa dan tokoh desa mengorganisir berbagai sumber daya terutama sumber daya manusia guna terwujudnya komunitas yang solid, dan melanggengkan hubungan antar individu di dalam komunitas tersebut. Tradisi simpan pinjam antar personal menjadi hal yang biasa mereka lakukan, hal ini diupayakan guna menjaga ketersediaan pangan di dalam komunitas pangan. Dengan sistem yang berjalan seperti itu, maka akan terjadi keseimbangan stok pangan di dalam komunitas tersebut.

Tabel 3. Potensi Cadangan Pangan dari Publik

Jenis stok pangan	Bentuk stok	Fungsi	Potensi pertukaran
Stok pangan pemerintah (Rasta)	Program beras sejahtera	Menjaga suplai pangan saat paceklik	Tidak ada
Stok pangan program (Posyandu, dll)	Periodik hanya setiap bulan	Menambah asupan pangan kelompok rentan	Tidak ada
Stok pangan alam (hutan)	Tersedia tergantung musim	Memori ruang agi golongan rawan pangan untuk mendapat sumber pangan	Tidak ada

Sumber: data primer diolah (2015)

d. Media-media Sosial sebagai Teknologi Informasi Pembangun Stok Pangan

Upacara keagamaan seperti kuningan, unan-unan, jumat legi, dan nyepi memberikan makna tersendiri kepada masyarakat Tengger yang terbagi di tiga desa sasaran pengembangan cadangan pangan USPD. Upacara keagamaan tidak memberikan sisi ritual saja kepada masyarakat, akan tetapi mereka juga memanfaatkan kesempatan momentum ini sebagai media sosial pembangunan stok pangan. Tabungan pangan yang sudah mentradisi di kehidupan mereka tergantung pada intensitas pertemuan mereka dalam aktivitas-aktivitas sosial yang mereka bangun. Karang taruna sebagai media partisipasi untuk tabungan pangan di golongan pemuda Tengger. Di kegiatan arisan menjadi ajang untuk berpartisipasi dalam bentuk menitipkan uang yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dalam bentuk sembako. Ataupun menitipkan sembako pada forum arisan yang sewaktu-waktu dapat diambil saat mengalami kekurangan stok pangan di rumah tangga mereka masing-masing.

Table 4. Potensi media social dalam mengakumulasi informasi cadangan pangan

Jenis media	Potensi akumulasi pangan	Potensi direkayasa	Potensi keberlanjutan
Stok pangan dalam transaksi upacara keagamaan (public)	Tentative dan tahunan	Sangat sulit karena menyangkut ritual agama	Kurang potensial
Stok pangan dalam acara selamatan (keluarga)	Tidak menentu sesuai dengan siklus keluarga	Bisa tetapi stok langsung habis saat upacara dimulai	Kurang potensial
Stok pangan dalam transaksi jimpitan (tabungan pangan)	Lebih seragam dan terukur secara massal	Sangat bisa tetapi jumlahnya terlalu kecil dan organisasi rumit	Potensial
Stok pangan dari perdagangan	Terukur dan terus menerus	Sangat bisa tetapi sulit memasukan dalam komponen transaksi	Potensial

Sumber: Data primer diolah N=120 (2015)

II. Peran Pihak-pihak pada Implementasi USPD

Pada tahap awal, tim USPD melakukan sosialisasi di masing-masing kantor desa setempat dengan melibatkan aparat desa dan calon mitra kios pangan. Sosialisasi dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang USPD serta menampung tanggapan mereka. Pada prinsipnya suatu situasi komunitas yang kondusif dapat tercermin bagaimana kondisi di masing-masing rumah tangga saat itu. Jika terjadi kerawanan pangan di level rumah tangga, maka hal ini menjadi cerminan yang terjadi di level komunitas, yang mana disebut sebagai proses sistemik.

Tabel 5 Bentuk Cadangan Pangan dan Pihak-pihak yang Terlibat pada Level komunitas

Bentuk	Aktor	Mekanisme	Relita Sosial / Aktivitas	Potensi
Jimpitan Beras	Komunitas Ibu Rumah Tangga	Kontribusi kepada kelompok sebagai produk dagangan	Minimnya tingkat kontribusi untuk jimpitan beras	Adanya antusias untuk pemupukan Stok Cadangan Pangan di Level Komunitas
Arisan Sembako	Komunitas Ibu Rumah Tangga	Kas Simpul Pangan Desa	Ketidak merataan dalam porsi iuran sembako	Adanya kelas masyarakat atas yang mampu mengcover kebutuhan pangan komunitas
Arisan Uang	Komunitas Ibu Rumah Tangga	Kas Sosial Rumah Tangga	Ketidak teraturan dalam sistem pengolahan kas	Pembiayaan usaha pangan melalui kas arisan

Sharecropping	Komunitas Petani dan Peternak	Bagi Hasil	Aktivitas kemitraan yang belum intensif	Terintegrasinya pelaku ekonomi dan petani untuk membangun stok pangan komunitas
Posyandu	Komunitas Ibu Rumah Tangga	Penyaluran daya dukung kesehatan dan gizi dalam bentuk bantuan sembako	Partisipasi dukungan kesehatan dan gizi yang relatif kecil	Besarnya kebutuhan akan sumber daya pangan untuk menunjang kesehatan dan gizi

Sumber: Data primer diolah N=120 (2015)

Tabel 6. Bentuk Cadangan Pangan dan Pihak-pihak yang Terlibat Pada Level Rumahtangga

Bentuk	Aktor	Mekanisme	Relita Sosial / Aktivitas	Potensi
Karo	Ibu Rumah Tangga	Kirim Jenang dan Berkatan	Pengolahan jenang yang cenderung berlebih	Pemanfaatan bahan baku jenang yang tersisa untuk alternative cadangan pangan rumah tangga
Kasada	Kepala Desa	Ritual peyerahan bahan pangan ke Gunung Kramat	Bahan pangan yang belum terorganisir untuk ritual	Efisiensi kebutuhan pangan untuk ritual kasada di gunung kramat
Nyewu	Ibu Rumah Tangga	Sumbangan gula, minyak dan beras	Penyimpanan bahan pangan yang terlalu lama	Penyimpanan bahan pangan yang tersisa untuk cadangan pangan rumah tangga
Memantu / upacara perkawinan	Kepala Rumah Tangga	Sumbangan Beras kepada penyelenggara hajat.	Penyimpanan bahan pangan yang terlalu lama	Penyimpanan bahan pangan yang tersisa untuk stok kios pangan
Tunggel Kuncung	Tokoh Desa	Slametan bubur ketan dan nasi tumpeng	Belum efisiennya biaya bahan pangan untuk slametan	Penyimpanan bahan pangan yang tersisa untuk cadangan pangan rumah tangga
Kuningan	Kepala desa dan Dukun Desa / Tokoh Agama	Slametan Desa dengan melalui berkatan dan nasi tumpeng	Ketidak merataan porsi pengeluaran bahan pangan antar lapisan	Distribusi pangan dari lapisan atas kepada warga yang mengalami krisis pangan

Sumber: Data primer diolah N=120 (2015)

III. Teknologi Rekayasa Sosial Untuk Mengembangkan Cadangan Pangan

a. Rekayasa Sosial di Level Transaksi

Selain strategi pengadaan barang sebagai efektifitas rekayasa sosial di level transaksi, strategi pengiriman barang menjadi opsi yang solutif dengan memanfaatkan margin yang terkumpul melalui efisiensi biaya transportasi. Pada standar tertentu pembiayaan transportasi atau pengiriman barang dialokasikan secara optimal, maka petugas pengiriman dapat mencapai efisiensi cost jika langsung mengirim ke 15 toko dalam satu kali jalan. Hal ini akan lebih efisien jika pengiriman dilakukan pada 12 toko atau KPD. Selain itu juga dapat dioptimalkan pada kapasitas barang yang dikirim. Banyaknya barang yang dikirim secara tidak langsung menentukan efisiensi biaya yang dapat dialokasikan untuk modal aktivitas sosial masyarakat sebagai pengganti tabungan pangan.



Gambar 4. Aktivitas Petugas Pengiriman Barang USPDP

b. Rekayasa sosial di level kelembagaan

Kios Pangan Desa adalah instrumen USPDP yang dirancang sebagai media stabilisasi pangan ditingkat desa sekaligus media untuk membangun cadangan pangan dari akumulasi keuntungan. Kios ini memberikan fungsi ganda yaitu menambah pendapatan kios-kios kecil desa yang tidak mampu mengakses kapital dan mestabilkan harga pangan sekaligus membangun cadangan pangan. Melalui kios ini maka keterbaruan cadangan pangan dapat teratasi sementara pengelola mau bergerak karena ada keuntungan ekonomis.

Keduanya adalah kelemahan lumbung pangan sehingga uspd belajar dari sistem tersebut. Kios pangan melayani pembelian pangan utama yang diperlukan oleh masyarakat. Jumlah dan letak akan mempengaruhi bagaimana efektifitas simpul pangan desa ini (1) mengumpulkan tabungan pangan, (2) membangun cadangan pangan, (3) meningkatkan pendapatan kios pangan desa, dan (4) stabilisasi harga pangan pada daerah rawan pangan. Selain strategis letaknya, karakteristik para mitra kios pangan desa juga sangat menentukan keberhasilan program ini.

Cukup dimungkinkan bahwa penguatan sistem cadangan pangan tidak hanya berkembang di Desa, tetapi juga akan semakin berkembang di level perkotaan. Untuk mengagah hal ini, tentunya tidak cukup dari sumber daya yang muncul dari inovator lokal pedesaan saja, akan tetapi perlu campur tangan pemerintah secara langsung untuk menggagas dan menginisiasi Kios Pangan di level perkotaan secara kondusif dan tersietm dengan baik.

USPD mencoba untuk membangun sistem yang integrasi di lintas kawasan, dimana nilai ekonomi yang bertumbuh diperkotaan akan masuk kedalam pedesaan, dan inovasi yang dihasilkan oleh pedesaan akan memberikan kontribusi kepada perekonomian perkotaan. Sistem yang terintegrasi ini kemudian termanajemen dengan untuh didalam sistem USPD.

c. Rekayasa Nilai-Nilai Sosial

Tabungan pangan adalah produk USPD selain Kios pangan desa/Kios. Tabungan dihimpun melalui transaksi pembelian mirip jimpitan pada masa lalu. Setiap satu kilogram transaksi gula, beras, dan minyak goreng pembeli menabung Rp. 100,_. Tabungan tersebut selanjutnya dikelola oleh USPD sehingga terakumulasi menjadi saham bagi konsumen di USPD sekaligus sebagai cadangan pangan komunitas.

USPD secara kelembagaan dirancang untuk mengatasi problem sulitnya membangun cadangan pangan pada level komunitas yang melekat atau "embeded" dengan transaksi ekonomi : 1. Hibah pangan adalah media yang disediakan USPD untuk mendayagunakan hibah-hibah pangan baik dari perseorangan, instansi pemerintah, dan swasta melalui CSR, atau donor-donor lain. 2. Layanan pangan adalah instrumen yang dirancang untuk menyalurkan hibah-hibah pangan kepada kelompok rawan pangan.

Layanan pangan ini dirancang khusus untuk menggantikan pola pembagian raskin yang terkesan meredahkan orang miskin. 3. Pojok Pangan alternatif (PPA) dikembangkan oleh USPD sebagai program diversifikasi pangan. Gejala perkembangan penyakit de-generatif akibat kesalahan pola pangan menjadi konsen PPA. Dalam jangka panjang PPA juga menjadi media pembelajaran bagi melekat pangan sehat bagi komunitas.

IV. Implementasi Model Pengembangan Teknologi Informasi Cadangan/ Tabungan Pangan

a. Identifikasi Mitra USPD melalui Sistem Informasi

Cadangan pangan yang berkembang di level komunitas tentunya tidak lepas dari peran masyarakat lokal yang berpotensi untuk mendirikan kios sembako baik yang sudah berdiri lama maupun yang diinisiasi oleh USPD

Kasus yang terjadi di Desa Wonokitri adalah menggunakan pendekatan simulasi Kios Pangan Lokal. Sistem ini secara kontrak belum diresmikan oleh USPD. Dari hasil FGD terjadi kesepakatan kerjasama, baik itu dalam segi pembukuan, produktifitas, keaktifan, kelancaran dalam penagihan, dan keseriusan kerja memenuhi syarakat, maka calon mitra tersebut layak untuk diresmikan sebagai KPD USPD di Desa Wonokitri.

Pembangunan kelembagaan perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu, guna terbentuk rancangan sistem kelembagaan yang efektif. Efektifitas peran yang berpartisipasi dalam pembentukan kelembagaan tersebut, juga mempertimbangkan fungsi ekonomis, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar. Oleh karena para ahli, pelaku usaha, dan aparat desa ikut memberikan sumbangsih pemikiran dan sumber daya ekonomi pada musyawarah pembentukan kelembagaan USPD.

Selanjutnya, rumusan kelembagaan terbentuk atas dasar pertimbangan masyarakat lokal dan adanya informasi atau potensi lokal yang sedang berkembang di Desa Ngadas, Wonokitri dan Jetak yang menjadi lokasi sasaran pengembangan USPD untuk membangun cadangan pangan di level Desa. Potensi pengembangan cadangan pangan di level desa juga ditunjukkan oleh peran-peran yang muncul di Desa Jetak, Kabupaten Probolinggo. Adapun kios-kios yang sudah berdiri, baik yang kapasitasnya besar maupun kecil menjadi sasaran Tim USPD untuk diidentifikasi potensi kelayakan usaha untuk membangun cadangan pangan lokal.

Petugas USPD juga memiliki peran dalam menginterview tentang kesiapan, keseriusan, dan motivasi calon mitra untuk bergabung bersama dalam membangun cadangan pangan di Desa Jetak. Bagi calon mitra yang memenuhi kualifikasi standar kualitas KPD USPD akan di verifikasi kembali oleh manajer USPD yang juga menjalin kesepakatan kontrak kerjasama yang ditawarkan kepada calon mitra USPD.

b. Membangun Kelembagaan Pelaksana USPD melalui Sistem Informasi Desa

Dalam proses pengadaan tidak murni dilakukan pemesanan pada agen beras atau sejenisnya. Tim Pengadaan melakukan pembinaan kepada komunitas petani baik yang bergerak secara personal maupun kelompok. Adapun kelompok tani yang dibina oleh USPD, tetap diperhatikan dalam bagaimana pemerlihaannya, jenis bibit yang terstandar, dan orientasi usaha yang tidak menggunakan pestisida dan insektisida secara berlebih. Upaya-upaya ini dilakukan dengan maksud agar barang yang didistribusikan USPD kepada KPD yang tersebar di Jawa Timur tetap terjaga mutu dan kualitasnya, karena dilakukan pengawasan sejak penanaman.

Kembali Tim USPD menambah kios pangan desa. Bertempat di Desa Jetak, Sokapura Probolinggo, Tim menyerahkan secara simbolik produk USPD untuk dikenalkan pada masyarakat. Kios-kios pangan desa ini selanjutnya menjadi simpul pemupukan cadangan pangan yang terkumpul dari jimpitan Rp. 100,- tiap kilogram transaksi.

Akumulasi tabungan pangan ini akan menjadi kekuatan komunitas untuk berkontribusi pada sistem kedaulatan pangan nasional. Petugas USPD selalu memberi dampingan bagi pengelola kios pangan desa baru agar mereka dapat menjaga ritme usahanya. Sosialisasi selalu dilakukan untuk memberikan pandangan warga akan pentingnya membangun cadangan pangan bagi keluarga mereka.

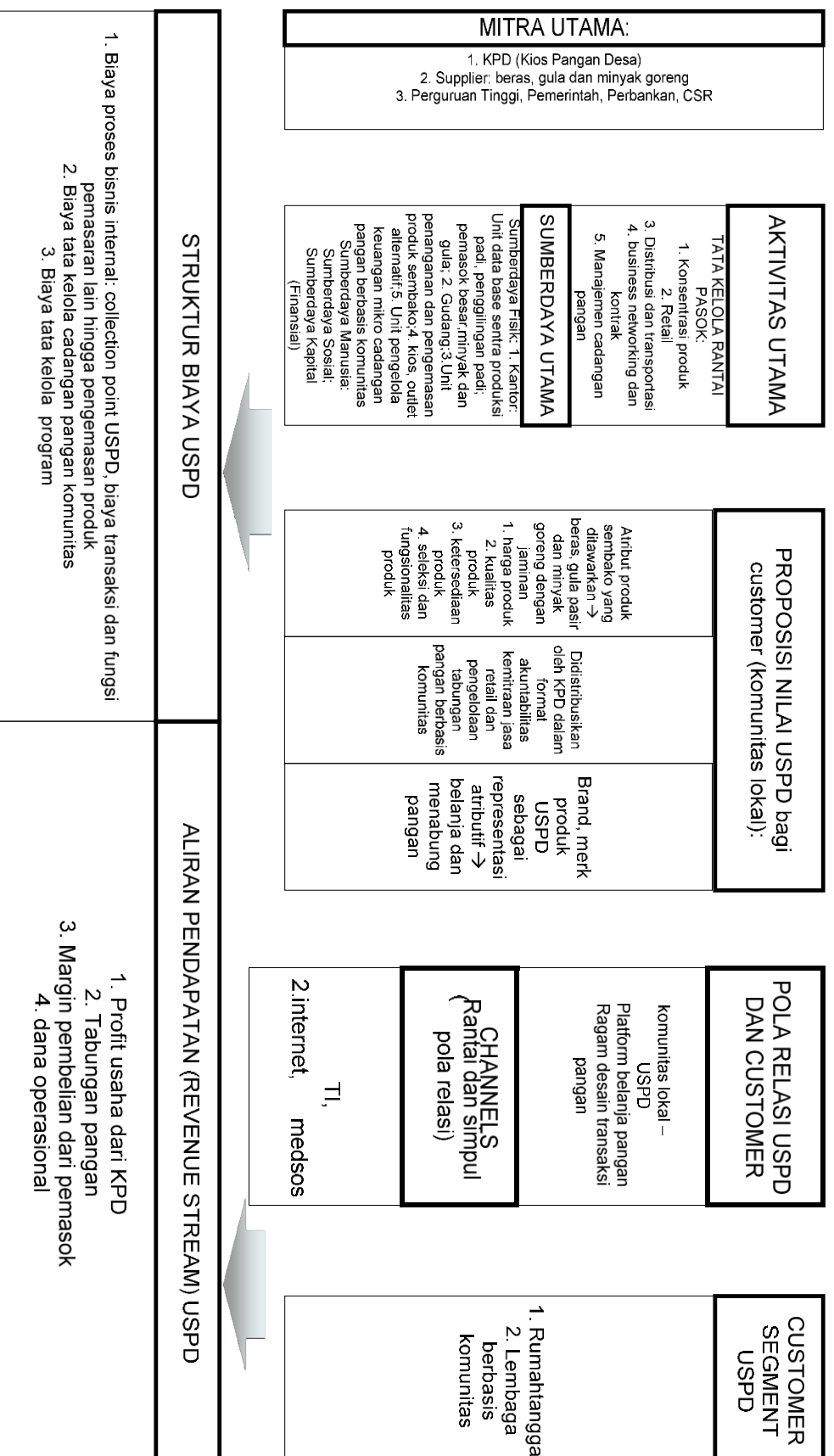
Ketertiban pencatatan pembelian menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan kios pangan. Dari buku pembelian ini USPD dapat mengontrol konsistensi para pelanggan. Membangun cadangan pangan pada level komunitas merupakan tujuan utama USPD. Tiap transaksi pangan pokok yang ada di kios pangan desa (KPD) tercatat dengan rapi. Pencatatan ini dilakukan tidak hanya untuk menghitung besar cadangan pangan, tetapi juga sebagai kontrol bagi dedikasi anggota.

Dengan pencatatan maka setiap orang akan tahu berapa besar cadangan pangan yang telah dikumpulkan. Tabungan pangan ini selanjutnya terakumulasi menjadi saham bagi anggota pada USPD. Dengan demikian dalam jangka panjang mereka akan memiliki USPD.

Upaya perbaikan sistem pembukuan dan administrasi bersama KPD yang tersebar di Desa Wonokitri penting untuk dilakukan, salah satunya melalui FGD atau musyawarah rutin yang disepakati oleh pelaku utama di sistem USPD.

Disamping Desa Wonokitri menjadi lokasi yang paling progresif dalam pengembangan stok cadangan pangan di level desa, Desa Wonokitri juga memiliki permintaan akan kebutuhan pangan yang semakin melonjak. Ditingkat KPD administrasi terdiri dari catatan penjualan serta pengumuman harga. Pengumuman harga penting supaya pelanggan memiliki acuan harga agar KPD tidak menaikkan atau menurunkan harga. Buku catatan tabungan menjadi control bagi semua pihak agar terjadi transparansi pada semua transaksi.

V. Rekonstruksi Proses Implementasi USPD berbasis Sistem Informasi



Gambar 12. Model Business Canvas Unit Stabilisasi Pangan Desa (USPD) (Andajani,T.K., 2015).

Berdasarkan atas rangkaian implementasi tersebut di atas, maka pendirian USPD di suatu kawasan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: (1) identifikasi kebutuhan pangan kawasan sekaligus produksinya, (2) melakukan analisis jaringan kerja USPD, (3) analisis kelayakan mitra USPD/KPD, (4) analisis kelembagaan/rekayasa sosial, (5) membangun organisasi pelaksana, dan (6) ketatausahaan USPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

- a. Potensi-potensi komunitas yang dapat digunakan untuk membangun cadangan pangan diantaranya adalah **pertama**, keberadaan pola pemupukan cadangan pangan melalui rekayasa pola panen tanaman pangan dengan jalan menyisakan dan menyimpan baik disengaja maupun tidak. Dengan mekanisme ini maka sumber pangan yang tersedia bagi masyarakat menjadi beragam baik jenis maupun cara mendapatkannya sekaligus keberagaman waktu. **Kedua**, potensi kelembagaan yang bisa dikembangkan dapat berupa kelembagaan yang telah dibangun oleh Negara seperti kelompok-kelompok masyarakat dan program-program ketahanan pangan. **Ketiga**, media pemupukan cadangan pangan juga dapat dilakukan melalui kegiatan upacara adat dan upacara keluarga meskipun tidak berkelanjutan, termasuk jimpitan dan kegiatan lainnya.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam system USPD berdasarkan pemetaan terdiri dari tiga pihak yakni pihak pada sisi pengadaan bahan pangan (kelompok tani dan penggilingan), kelompok pendukung produksi, dan para mitra USPD yang mengelola KPD-KPD di desa. Pada sisi pengadaan, USPD bekerja di daerah penghasil pangan dengan jalan membangun kontrak kerja pengadaan bahan pangan. Pendukung produksi terdiri dari pabrik kemasan, penyedia alat kemas dan alat-alat lainnya. Sementara itu, pada sisi distribusi USPD sepenuhnya mengandalkan KPD yang tersebar di desa-desa lokasi penelitian.
- c. Rekayasa sosial untuk menggabungkan antara potensi kelembagaan dan keterkaitan pihak-pihak dalam implementasi USPD dilakukan rekayasa pola transaksi, rekayasa model kelembagaan, serta rekayasa system nilai. **Pertama**, pada pola transaksi rekayasa dilakukan dengan jalan membebaskan cadangan pangan melalui harga jual pangan. Jadi, dengan membeli barang yang diproduksi oleh USPD secara otomatis para konsumen menabung pangan. **Kedua**, rekayasa kelembagaan dilakukan dengan mengintrodusir kios pangan desa dan jaringan pangan desa. Dengan introdusir dua system tersebut maka konfigurasi distribusi pangan akan berubah dimana model USPD mengambil bagian dalam pemupukan cadangan pangan. **Ketiga**, rekayasa nilai dilakukan melalui introdusir konsep tabungan pangan, cadangan pangan, hibah pangan, layanan pangan, dan pojok pangan alternative. Rekayasa kelembagaan ini merupakan sintesa dari potensi kelembagaan yang sudah dipetakan sebelumnya dengan temuan pihak-pihak terkait dalam analisis stakeholders.
- d. Implementasi pendirian USPD di suatu kawasan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:
(1) identifikasi kebutuhan pangan kawasan sekaligus produksinya, (2) melakukan analisis jaringan kerja USPD, (3) analisis kelayakan mitra USPD/KPD, (4) analisis kelembagaan/rekayasa sosial, (5) membangun organisasi pelaksana, dan (6) ketatausahaan USPD (seluruh instrumen terlampir).

II. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran penelitian sebagai berikut:

- a. Potensi-potensi cadangan pangan yang bersifat alamiah terutama yang melibatkan kelembagaan adat bisa diintegrasikan dengan pola pemupukan cadangan pangan melalui pasar. Dengan demikian potensi tersebut dapat menjadi cadangan yang berputar di pasar dan tidak langsung dikonsumsi habis. Artinya potensi kelebihan pasokan pangan pada saat habis kegiatan adat yang biasanya dibarengi dengan penurunan harga dan kualitas dengan terintegrasi dengan USPD dapat dihindari.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam Implementasi USPD mesti lebih diperinci terutama pihak pengelola level desa karena melibatkan pemerintahan desa. Hal ini untuk memberikan kejelasan posisi pemerintahan desa dalam USPD agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan dan atau pembiaran kegiatan USPD tanpa pantauan dari kepala desa.
- c. Rekayasa sosial yang memanfaatkan transaksi ekonomi dapat dilakukan juga pada sisi pengadaan dengan jalan mengikutkan mereka sebagai shareholder. Sementara itu rekayasa kelembagaan dengan mengintroduksi kios pangan desa (KPD) dilakukan dengan pertimbangan representative geography dan jumlah penduduk. Hal itu untuk menghindari kesan persaingan dengan pelaku lain.
- d. Seluruh tahapan implementasi tersebut sebaiknya selalu diakhiri dengan melakukan uji kestabilan system. Uji ini penting untuk memberikan kepastian instrumen yang digunakan betul sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rashid, S., Gulati, A., & Cummings Jr, R. W. (2008). *From parastatals to private trade: Lessons from Asian agriculture* (Vol. 50). Intl Food Policy Res Inst.
- Ellis, F. (1992). *Agricultural policies in developing countries*. Cambridge University Press.
- Chapoto, A., & Jayne, T. S. (2009). *The impacts of trade barriers and market interventions on maize price predictability: Evidence from Eastern and Southern Africa* (No. 56798).
- Michigan State University, Department of Agricultural, Food, and Resource Economics.
- Pangan, D. K. (2006). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006–2009. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 1(1), 57.
- Suryana, A. (2008). Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 1(1), 1-16.
- Nainggolan, K. (2008). Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, dan Harga Komoditas Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(2), 114-139.
- Bigman, D., & Reutlinger, S. (1979). Food price and supply stabilization: National buffer stocks and trade policies. *American Journal of Agricultural Economics*, 657-667

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI
UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI DESA (STUDI DI DESA WISATA SAWAHAN,
KECAMATAN WATULIMO, KABUPATEN TRENGGALEK)**

***COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF “DESA WISATA” AS A
VOCATIONAL DEVELOPMENT EFFORTS (STUDY IN DESA WISATA SAWAHAN,
KECAMATAN WATULIMO, KABUPATEN TRENGGALEK)***

Muchammad Firman Mauludin

UIN Sunan Ampel Surabaya

email: firman.smart84@yahoo.com

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata yang baik adalah pengembangan yang melibatkan masyarakat sehingga adanya desa wisata tersebut memberikan dampak positif khususnya bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu desa di Kabupaten Trenggalek yang menyuguhkan potensi keindahan alam dan berkembang menjadi desa wisata adalah Desa sawahan Kecamatan Watulimo. Pengembangan desa wisata ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Adanya potensi desa wisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekitar sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara diskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam pengembangan desa wisata. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya partisipasi dalam bentuk pikiran, materi/harta benda, tenaga, keahlian dan keterampilan, serta partisipasi dalam bentuk sosial. Keterlibatan masyarakat tersebut sangat membantu dalam membangun keberadaan desa wisata. Kesimpulan yang didapat bahwa keberadaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata di Desa Sawahan.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, pengembangan desa wisata, pengembangan ekonomi desa

ABSTRACT

The development of a good tourist village is a development that involves the community so that the existence of the “desa wisata” has a positive impact especially for the economic development of the surrounding community. One of the villages in Trenggalek which presents the potential of natural beauty and develops into a “desa wisata” is the Desa Sawahan Kecamatan Watulimo. The development of “desa wisata” is inseparable from community participation. The potential of the “desa wisata” is expected to contribute to the economic development of the surrounding community so as to reduce poverty. This study aims to determine community participation in the development of “desa wisata” in Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. This research is a field research with a qualitative descriptive approach. The location of this study was in Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. Data collected from the research results are then processed and analyzed descriptively. The results of this study indicate that the community is involved in developing “desa wisata”. The forms of community participation include participation in the form of thoughts, material or possessions, energy, expertise and skills, and social. Community involvement is very helpful in building the existence of “desa

wisata". The conclusion was that the existence of the community participated in developing "desa wisata" in Desa Sawahan.

Keywords: community participation, development of "desa wisata", village economic development

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan potensi alam yang melimpah, termasuk keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan sejarah, keberadaan seni dan budaya yang juga melimpah. Hal ini menjadi sumber akan berkembangnya pariwisata di Indonesia. Keberagaman dan kemelimpahan kekayaan alam yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia mempunyai potensi dan memiliki peluang yang masih terbuka lebar untuk pembangunan pariwisata (Rohim, 2013). Oleh sebab itu, peranan pemerintah begitu berharga dalam merumuskan kebijakan sekaligus menggali peluang dalam pengembangan pariwisata, hingga pada akhirnya akan menggugah masyarakat dalam mengenali potensi dan menggerakkan masyarakat lokal dalam membangun daerahnya.

Salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi alam yang melimpah adalah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada Oktober 2018, dalam selang waktu tiga tahun terakhir, kunjungan wisman di Jawa Timur mengalami peningkatan. Penyebab peningkatan itu termasuk oleh karena berbagai objek wisata yang sedang bermunculan di Jawa Timur. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Timur bulan Oktober tahun 2018 hingga mencapai 25.845 kunjungan. Dari angka tersebut menunjukkan kenaikan 4,06 persen dibanding dengan bulan sebelumnya 24.836 kunjungan. Bila diperbandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Timur meningkat 26,45 persen dari 20.439 kunjungan.

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang menyuguhkan potensi keindahan alam adalah Desa Sawahan di Kabupaten Trenggalek. Potensi alam yang melimpah di Desa Sawahan ini telah menumbuhkan keberadaan desa wisata yang dikenal dengan Desa Wisata Durensari. Dalam perkembangannya, Desa Wisata Durensari ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata tersebut.

Desa wisata adalah suatu wilayah desa yang dikembangkan dalam hal potensi wisatanya, dengan tidak melakukan perubahan terhadap apa yang sudah ada tetapi lebih mengutamakan menggali potensi desa dengan melibatkan unsur atau komponen desa. hingga menumbuhkan berbagai produk wisata baik skala kecil hingga pada akhirnya menciptakan serangkaian kegiatan kepariwisataan, (Dinas Kebudayaan Pariwisata, 2007).

Pada dasarnya penyelenggaraan kepariwisataan akan berdampak pada keuntungan. Pengembangan pariwisata termasuk salah satu sektor yang dapat menjadi pesaing bagi perekonomian lain. Mengingat pengembangan wisata merupakan kegiatan yang begitu luas cakupannya, maka diperlukan adanya dukungan dan peran serta masyarakat secara aktif.

Dalam pengembangan suatu desa wisata yang baik, yaitu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengelolaannya. Masyarakat merupakan pelaku aktif pada kepariwisataan, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah tersebut sendiri. Disamping itu pariwisata termasuk bagian dari aktualisasi ekonomi kerakyatan yang berfungsi sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat (Muljadi, 2014).

Dalam menggerakkan pariwisata terdapat tiga komponen penting yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Ketiga komponen tersebut diharuskan seiring sejalan dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah (Pitanam dan Gayatri, 2005)

Salah satu pendekatan dalam mengembangkan pariwisata yang baik yaitu pendekatan berbasis masyarakat melalui partisipatif aktif masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pariwisata yang baik adalah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama, termasuk bersama masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya keberadaan pariwisata yang ada akan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya. Adapun pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pariwisata antara lain : pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan keberadaan pariwisata; peningkatan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mendapat keuntungan secara ekonomi, sosial, maupun budaya; pemberian kesempatan secara seimbang terhadap laki-laki dan perempuan (Nurdiyanto, 2015).

Pada kegiatan pariwisata yang sudah terbentuk, partisipasi masyarakat yang minim terhadap munculnya pariwisata yang ada, hanya akan menenggelamkan keberadaan pariwisata tersebut. Masyarakat yang enggan terlibat pada akhirnya akan menjadi catatan negative bagi keberadaan wisata, yang pada akhirnya akan menurunkan tumbuh kembangnya atau bahkan mematikan kegiatan pariwisata yang sudah ada. Adapun pada potensi wisata pada suatu daerah yang belum berkembang menjadi desa wisata, pada akhirnya akan tetap menjadi potensi saja tanpa menghasilkan munculnya destinasi wisata baru apabila tidak diiringan dengan partisipasi masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat setempat adalah kunci penting dalam penyelenggaraan suatu desa wisata. Oleh karenanya, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi studi ini di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Teknik pengumpulan data pada studi ini dilakukan melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan desa wisata secara langsung. Adapun wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Selanjutnya data hasil penelitian yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara diskriptif untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sawahan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Desa Sawahan terdiri dari empat dusun yang antara lain Dusun Krajan, Ngrancah, Singgahan, dan Tenggong. Desa Sawahan memiliki potensi alam yang dapat dijadikan sebagai destinasi desa wisata. Saat ini wisata yang sudah terbentuk adalah Desa Wisata Durensari.

Desa Wisata Duren Sari sudah berdiri sejak tanggal 11 November 2015 yang secara resmi diresmikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Dalam pengelolaannya, Desa Wisata Duren Sari dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibimbing oleh beberapa dinas termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Bappeda Kabupaten Trenggalek, dan Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Desa Wisata Duren Sari menawarkan alam yang begitu indah, dengan sajian khas buah durian terlebih pada waktu panen durian. Desa Wisata Duren Sari Sawahan menawarkan paket wisata alam, river tubing, outbond, permainan tradisional, kuliner dan homestay.

Desa Wisata Durensari dalam pengembangannya telah melibatkan berbagai unsur diantaranya anggota masyarakat Desa Sawahan, kelompok pemuda, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pemerintah setempat.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Hari Karyono (1997) pariwisata secara umum merupakan kegiatan yang secara keseluruhan melibatkan masyarakat, pemerintah, bahkan dunia usaha dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan wisatawan. Adapun secara teknis pariwisata merupakan kegiatan yang diselenggarakan seorang ataupun sekelompok manusia didalam lingkup wilayahnya sendiri dengan mempergunakan unsur atau komponen penunjang sehingga dapat mewujudkan harapan wisatawan.

Berdasarkan Undang - Undang No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata, desa wisata merupakan suatu wilayah daerah tujuan berwisata, yang melibatkan berbagai daya tarik wisata, termasuk fasilitas sarana prasarana maupun kases yang dibalut bersama tradisi dan budaya lokal masyarakat sekitar wilatah tersebut.

Pengembangan desa wisata bertujuan untuk mengubah mainset pembangunan yang dari kepariwisataan berbasis keserakahan menjadi pariwisata yang hijau. Hal ini sebagai upaya yang tidak hanya diperuntukkan peningkatan perekonomian tetapi juga pelestarian sumbaer daya yang ada didalamnya. Adapaun prinsip dasar pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut :

(Simanungkalit, dkk,)

1. Pelibatan unsur masyarakat lokal;
2. Penerapan pariwisata dengan produk lokal;
3. Pendayagunaan sumber daya lokal dengan mengutamakan pelestarian;
4. Ruang lingkup masih kecil, sehingga memudahkan interaksi dengan masyarakat lokal;
5. Pendayagunaan fasilitas masyarakat lokal;
6. Mengintegrasikan usaha pariwisata dengan usaha bidang lainnya;
7. Peningkatan jaringan kawasan sekitar.

Pengelolaan Desa Wisata di Desa Sawahan atau yang lebih disebut dengan Desa Wisata Durensari juga dikelola oleh masyarakat sekitar. Secara umum kegiatan pengelolaannya sama seperti halnya melakukan kegiatan manajemen yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga kepada pengawasan guna mencapai tujuan yang ditargetkan.

Menurut Nanang Fatah (2004) proses manajemen melibatkan berbagai unsur atau komponen pokok termasuk pemimpin. Kegiatan manajemen tersebut meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling).

Pengembangan Desa Wisata Durensari, masyarakat di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ikut serta berpartisipasi didalamnya. Menurut Rukminto Adi (2008), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah atau potensi yang terdapat di masyarakat, melakukan pemilihan maupun pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif solusi dalam penanganan masalah, melaksanakan upaya dalam mengatasi masalah, serta melibatkan masyarakat dalam kegiaitan evaluasi terhadap perubahan.

a. Partisipasi dalam Bentuk Pikiran

Partisipasi dalam bentuk pemikiran dapat berupa penyampaian ide atau gagasan, baik dalam penyusunan program perencanaan, pelaksanaan program, maupun evaluasi. Bentuk partisipasi tersebut dapat disalurkan melalui agenda rapat, sehingga masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan ide atau gagasan yang akan dibahas bersama.

Disamping itu, terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah dibentuk di Desa Sawahan. Kelompok ini sebagai wadah masyarakat dalam pengelolaan desa wisata termasuk penyampaian ide gagasan terkait pengembangan desa wisata. Dengan adanya Pokdarwis ini, segala masukan ide gagasan akan ditampung dan selanjutnya akan dibahas dalam rapat bersama.

b. Partisipasi dalam Bentuk Materi / Harta Benda

Partisipasi dalam bentuk harta benda yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak berupa uang secara langsung, melainkan sebagian besar berupa barang seperti makanan ataupun minuman, dan penyediaan sarana terkait berbagai kegiatan yang menyangkut pengembangan Desa Wisata Durensari. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa pembangunan fasilitas desa wisata. Sehingga masyarakat secara sukarela menyediakan kebutuhan pendukung dalam kegiatan tersebut termasuk sumbangan makanan dan minuman.

c. Partisipasi dalam Bentuk Tenaga

Menurut Dirjen PMD Depdagri, partisipasi tenaga yaitu partisipasi secara aktif yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok pada kegiatan gotong royong (Sudriamunawar, 2006).

Bentuk partisipasi tenaga yang dilakukan masyarakat yaitu ikut serta memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata Durensari. Kegiatan yang dimaksud seperti perbaikan fasilitas yang ada, pembangunan sarana, kerja bakti dalam pembersihan area Desa Wisata, mengangkut material untuk pembangunan sarana prasarana, bergotong royong membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung wisata dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan Desa Wisata Durensari. Masyarakat secara sukarela memberikan bantuan tenaga demi terwujudnya Desa Wisata yang baik.

Mengingat partisipasi tenaga merupakan partisipasi yang sangat mudah dilakukan, maka masyarakat terlibat aktif dalam hal ini. Selain dalam hal pembangunan sarana prasarana, masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal penjagaan lokasi desa wisata, menjamu dan menjadi pemandu wisatawan yang datang, dan pengawasan terhadap keselamatan wisatawan.

d. Partisipasi dalam bentuk Keahlian dan Keterampilan

Partisipasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk keahlian dan keterampilan beragam. Hal ini dikarenakan keahlian dan keterampilan yang dimiliki masyarakat juga beragam. Sebagian masyarakat terampil dalam hal desain fasilitas desa wisata, sehingga mereka melakukan perencanaan dalam tata ruang desa wisata. Masyarakat ada yang ahli dalam manajemen keuangan, sehingga mereka difokuskan pada pengelolaan keuangan. Beberapa pemuda memiliki keahlian sebagai pemandu wisatawan, sehingga mereka ditugaskan untuk memandu wisatawan dan mengajarkan bagi para pemuda yang lain untuk menjadi pemandu. Beberapa ibu-ibu terampil dalam membuat hidangan, sehingga mereka aktif dibagian lapak atau semacam warung. Dalam hal pembuatan poster ataupun tulisan-tulisan, masyarakat yang terampil juga berperan aktif dalam hal tersebut.

e. Partisipasi dalam bentuk Sosial

Partisipasi sosial dari masyarakat Desa Sawahan merupakan wujud kerukunan dan keguyuban, seperti halnya takziah, kondangan, arisan, do'a bersama, dan lain sebagainya. Apabila ada masyarakat yang sedang sakit maka pengurus desa wisata ataupun Pokdarwis akan menjenguk masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh persaudaraan diantara masyarakat, sehingga tercipta keamanan dan ketentraman bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata adalah hal yang penting. Yang termasuk faktor keberhasilan kepariwisataan adalah pengkondisian lingkungan yang kondusif yang mampu tumbuh dan berkembang di suatu wilayah terutama pada masyarakat yang berlokasi disekitar diharapkan memiliki kesadaran wisata (Simanungkalit, dkk.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat di Desa Sawahan Kecamatan Watulima Kabupaten Trenggalek terlibat aktif dalam pengembangan Desa Wisata Durensari. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya berupa

partisipasi dalam bentuk pikiran, materi/harta benda, tenaga, keahlian dan keterampilan, serta partisipasi dalam bentuk sosial. Keterlibatan masyarakat dalam bernagai bentuk dan dalam berbagai kegiatan tersebut sangat membantu dalam membangun keberadaan Desa Wisata Durensari.

Dalam pengembangan desa wisata sebaiknya partisipasi masyarakat yang sudah terjalin tetap dijaga, keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pelestarian desa wisata merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan keberadaan desa wisata itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang mendalam disampaikan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan Pokdarwis Desa Wisata Durensari, Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nikita; Andriani Kusumawati; dan Luchman Hakim. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.|Vol. 61 No. 3.
- Hari Karyono. 1997. *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo.
- Muljadi, dan Andri H Warman 2014. *Kepariwisataaan dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Murniati. 2008. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nanang Fatah. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdiyanto, Sigit. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pitanam IG dan G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Penerbit Angkasa. Yogyakarta.
- Rohim, Abdur, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY). *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rukminto Adi, Isbandi, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok.FISIP IU Press.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanungkalit, Victoria br., dkk. *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta : Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementrian Koperasidan UKM RI.
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta, Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju.

PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI PEMANFAATAN TANAH BAON

(Studi pada Pemanfaatan Tanah Baon oleh Masyarakat Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Ngawi)

Sumarno, Nining Wulandari

gusmarno1912@gmail.com, niningwulandari50@gmail.com

STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi

Jl. Mantingan-Sine Km.0 Mantingan, Ngawi, Kode Pos. 63257

ABSTRAK

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Desa Pandean dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan tanah baon. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa pandean melaui pengerjaan tanah baon dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain ; 1. membangun kerjasama antara masyarakat dengan Perhutani melalui lembaga masyarakat daerah hutan (LMDH); 2. pengerjaan tanah baon secara bergantian oleh masyarakat desa pandean; 3. penanaman lahan dengan berbagai palawija sebagai produk lokal serta cepat panen; 4. memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam bertani; 5. melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarkat desa pandean dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan tanah baon sebagai sumber perekonomian alternatif yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Kata kunci : tanah baon, ekonomi, masyarakat, pandean.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the efforts of the community of Pandean village to improve the economic community by utilizing the Baon land. The method that is done in this research is by using the descriptive qualitative method through interviews, documentation and field records. In this study explain that to increase the economic community the Pandean village can be done with various efforts among others is; 1. Establishing cooperation between communities and the community through forest area Community institutions (LMDH); 2. Work of the Baon soil alternately by the community of Pandean villager; 3. Planting land with various crops as a local product; 4. Giving training to the community to improve the competence of the farming community; 5. planting with an intercropping system. Results in this research can be concluded that to increase the community economic Pandean village can be done by supported by adequate human resource capability (SDM) .

Keywords: land baon, economy, community, pandean

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan hutan, baik hutan lindung maupun hutan tropis lainnya. Hal ini sudah berjalan sejak berabad-abad lampau sudah berinteraksi secara kuat dengan hutan, sehingga antara hutan dan manusia sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam masyarakat banyak kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dari dalam hutan seperti perumahan, sandang, pangan, obat-obatan dan jasa lingkungan lainnya. Pada awalnya hubungan antara manusia dan hutan saling ketergantungan, hal ini berjalan selaras, namun dengan perkembangan jaman yang disertai dengan penambahan penduduk, peningkatan kebutuhan dan munculnya motivasi untuk meningkatkan pendapatan, maka eksploitasi terhadap sumber daya hutan mulai dilakukan secara intensif dan ekstraktif, sehingga merusak keselarasan antara manusia dan hutan tersebut. Selain itu, pemerintah dan masyarakat yang jauh dari hutan memandang hutan sebagai

sumber ekonomi. Akibatnya eksploitasi hutan secara komersial dan berskala besar berkembang pesat di wilayah Indonesia sampai saat ini. (Iswan Dunggio & Hendri Gunawan. 2009).

Kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang sebagian besar dikarenakan aktivitas manusia, antara lain pencurian kayu dan perambahan kawasan hutan, dan sebagian lainnya dikarenakan oleh bencana alam berupa kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus dan tanah longsor (Indriyanto. 2008). Faktor penyebab degradasi hutan lainnya adalah permasalahan dalam manajemen pengelolaan dan ketidakjelasan institusi yang mengelola kawasan hutan. Institusi pengelolaan hutan yang dimaksud adalah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Diharapkan dengan keberadaan KPH tersebut, kerusakan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga pengelolaan hutan lestari dapat tercapai. (Ewida Y.S & Lis Alliya. 2009). Pengelolaan hutan oleh KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasinya.

Dalam pengelolaan lahan hutan di Indonesia harus dilakukan secara sistematis, bagian perbagian, sehingga hutan Indonesia dibagi ke dalam unit pengelolaan untuk kemakmuran Negara serta masyarakat sekitar hutan. Lahan kehutanan dituntut untuk berperan sebagai : 1). tempat tinggal jutaan makhluk Tuhan dalam keadaan seimbang yang terdiri dari masyarakat tumbuhan, binatang dan jasad renik; 2). menekan pelonjakan populasi organisme tertentu yang dapat membahayakan organisme lain; 3). gudang penyimpanan bahan genetik atau plasma nutfah; 4). sumber kayu dan hasil lain seperti rotan, tumbuhan obat, anggrek dan lain-lain; 5). pengendalian debit air; 6). membersihkan udara; 7). sumber air bersih; 8). sumber ilmu pengetahuan serta bisa digunakan untuk tempat rekreasi. Pengelolaan sumber daya hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumber daya hutan, pemanfaatan sumber daya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumber daya hutan dan konservasi alam yang ada.

Untuk menjadikan hutan yang bermanfaat, maka pengelolaan hutan harus dilakukan secara bersama. Yang dimaksud pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi pihak sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional sesuai dengan keinginan yang diharapkan. (Direksi Perum Perhutani. 2007)

Salim mengatakan dalam bukunya, bahwa tujuan pengelolaan hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, karena hutan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sehingga hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. (Salim. 2003).

Menanam kembali pepohonan dalam kawasan hutan yang rusak merupakan wujud cinta pada tanaman dan awal dari proses pelestarian hutan. Hal ini juga untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan yang kurang produktif dan untuk menyediakan hasil hutan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan.

Di Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur merupakan daerah yang mempunyai wilayah hutan sangat luas dan rata-rata daerah hutan yang berada disekitar rumah penduduk masih banyak yang kosong dan tidak terfungsikan dengan baik, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian antara pihak perhutani dan masyarakat sekitar supaya lahan hutan yang masih kosong ini dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat. Lahan kosong daerah hutan yang berada disekitar rumah penduduk ini biasa disebut dengan tanah Baon. Masyarakat Desa Pandean

merupakan masyarakat yang rata-rata tingkat ekonominya masih tergolong miskin sehingga perlu adanya perhatian khusus. Untuk meningkatkan hasil ekonominya, maka masyarakat desa Pandean mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber perekonomian utama yang diantaranya dengan bertani di tanah Baon tersebut.

Untuk itu, dalam hal ini peneliti mencoba untuk menggali dan menguraikan secara jelas dari hasil penelitian tentang bagaimana meningkatkan ekonomi Masyarakat desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi ini melalui pemanfaatan tanah Baon.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan triangulasi data. Untuk menggali lebih dalam tentang tema penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan bahan instrument daftar pertanyaan yang sudah peneliti siapkan. Selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi dengan menggunakan camera digital, dan juga catatan lapangan dari hasil pengamatan selama melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pemaparan yang dikemukakan peneliti, temuan penelitian terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat Desa melalui pemanfaatan Tanah Baon di Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi yaitu : 1). Masyarakat Desa Pandean memiliki ekonomi yang meningkat secara signifikan dengan penggarapan tanah Baon; 2). masyarakat desa Pandean sebagian besar menanam tanaman Palawija di tanah Baon; 3). Palawija yang ditanam rata-rata dengan menggunakan sistem tumpang sari, sehingga masa panen lebih cepat; 4). Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) desa Pandean yang merupakan mitra dari Perhutani melakukan pelatihan kepala Masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tanamannya.

Pembahasan

Desa Pandean merupakan desa yang berada di daerah perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tepatnya berada di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini dikelilingi oleh hutan lindung yang sangat luas. Desa yang jumlah penduduknya berkisar antara 7.240 jiwa ini rata-rata bermata pencarian sebagai petani tulen dengan mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Desa Pandean ini merupakan daerah yang jauh dari perkotaan sehingga masyarakatnya rata-rata hanya berada di rumah dan jarang keluar untuk bepergian, karena untuk menuju ke kota Ngawi saja memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Hal inilah yang membuat masyarakat desa Pandean masih memiliki ketertinggalan dalam hal ekonomi dan pendidikan.

Selain bertani, sebagian kecil penduduk desa Pandean ini juga merantau dengan berprofesi sebagai pedagang, tukang bangunan dan pekerja rumah tangga. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Desa Pandean telah berdiri 5 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 2 Lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada. Untuk tenaga pengajarnya pun juga berasal dari luar daerah yang jarak rumahnya juga cukup jauh (Sragen, Mantingan, Widodaren) dan ada juga yang dari Daerah Sine.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat desa Pandean mengandalkan hasil pertaniannya yaitu dengan mengerjakan lahan sawah yang bisa panen 2 kali dalam setahun bila curah hujan dalam kondisi stabil, tetapi bila curah hujan tidak stabil maka hasil panen padi ini hanya cukup 1 kali dalam setahun. Selain itu untuk mencukupi kebutuhannya masyarakat yang diwakili oleh

Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) bekerjasama dengan Perhutani melakukan penggarapan terhadap Tanah Baon.

Tanah *Baon* merupakan tanah hutan yang berada di sekitar rumah penduduk yang merupakan tanah milik negara yang dikuasakan oleh Perum Perhutani, dimana masyarakat hanya sebatas berhak untuk mengelola tanah Baon tersebut dalam hak guna usaha. Baon merupakan penyebutan masyarakat setempat dengan alasan tertentu. Jadi dalam pengelolaan tanah Baon ini sangat berkaitan dengan hak guna usaha tanah saja yang digarap oleh masyarakat sekitar hutan dan hasilnya dapat digunakan sebagai sumber ekonomi masyarakat. (wawancara: Riyanto, 12-7-2019).

Dalam pengelolaan lahan hutan ini merupakan tanggung jawab perhutani yang kerjasama dengan masyarakat. Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan hutan. Kegiatan monitoring harus dilakukan terhadap semua kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Monitoring kegiatan tahunan dijalankan untuk memastikan apakah kegiatan sudah tepat dalam pelaksanaan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pekerjaan teknis dan non teknis. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk menganalisis sampai sejauhmana kegiatan fisik dan non fisik dalam pengelolaan petak hutan pangkuan Perhutani dan LMDH itu. (San Afri Awang, 2008)

Selaras dengan pendapat San Afri Awan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Riyanto selaku ketua Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) tentang bagaimana pengelolaan tanah Baon yang merupakan tanah kawasan hutan. Dalam wawancara tersebut dia mengatakan bahwa :

“ ... dalam pengelolaan tanah baon yang yang merupakan tanah milik Negara yang dikelola oleh Perhutani bersama dengan masyarakat ini, maka perlu pengelolaan bersama-sama. Artinya kita sama-sama untuk saling menjaga dan melestarikannya serta memanfaatkannya secara baik untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat”. (wawancara : Riyanto, 12-7-2019)

Indriyanto dalam bukunya mengatakan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia mempunyai beberapa tujuan diantaranya, untuk membangun usaha ekonomi. Untuk tujuan tersebut, pembangunan hutan diarahkan pada pola hutan industri atau hutan tanaman industri yang diharapkan dapat menyuplai bahan baku industri perkayuan yang dibangun dekat lokasi pembangunan hutan yang bersangkutan. Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan penduduk untuk kayu bakar, kayu bangunan, dan hasil-hasil lainnya dari tanaman hutan (Indriyanto, 2008).

Untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Desa Pandean maka tanah Baon yang berada di daerah hutan tersebut penggarapannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang diatur bersama dengan Pengurus Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) desa Pandean tersebut. Dalam pemanfaatan tanah Baon ini peneliti kembali melakukan wawancara kembali dengan Riyanto tentang pemanfaatan tanah baon ini. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa :

“... untuk pemanfaat tanah baon ini rata-rata masyarakat desa Pandean menanaminya dengan tanaman Palawija. Tanaman palawija diantaranya adalah ; jagung, kacang hijau, kedelai, singkong, ubi, dan kacang yang masa panennya lebih pendek dan mudah menanamnya”. (wawancara : Riyanto, 14-7-2019).

Tanaman palawija ini dipilih oleh masyarakat desa Pandean untuk ditanam di tanah Baon karena mudah memperoleh bibitnya, perawatannya tidak sulit dan masa panennya cukup singkat. Berikut data tentang jenis tanaman palawija dan berikut usia masa panennya.

Tabel 1. Jenis Tanam Palawija dan masa Panen

Nomor	Jenis Tanaman	Masa Panen
1.	Jagung	3 bulan
2.	Kacang Hijau	2 bulan
3.	Kedelai	3 bulan
4.	Singkong	8 bulan
5.	Ubi	4 bulan
6.	Kacang Tanah	3 bulan

Dalam pemanfaatan hutan di Desa Pandean ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Pandean secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba. Usaha pemanfaatan hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Selain itu juga pengelolaan hutan berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dilakukan dengan jiwa berbagi pihak yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan, waktu, dan hasil pengelolaan sumber daya hutan kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan dan saling mendukung. (Direksi Perum Perhutani, 2007).

Maksud dan tujuan kerja sama pengelolaan hutan ini adalah untuk terbentuknya sistem pengelolaan hutan yang dapat menjamin kelestarian sumber daya hutan dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan, dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam keamanan dan kelestarian sumber daya hutan. Persoalan sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan di Jawa menjadi masalah utama. Hal ini sudah tampak sejak lama dengan dibentuk respon positif oleh Perhutani yaitu berupa dinamika programnya mulai dari MALU (kerjasama Mantri dan Lurah) sampai dengan Perhutanan Sosial (PS) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM mempunyai ciri bersama, berdaya dan berbagi yang berbasis lahan dan non lahan.

Dalam hal pengelolaan hutan sebagaimana uraian di atas, maka peneliti melakukan wawancara dengan Jumali selaku kepala KPH Desa Pandean. Dalam wawancara tersebut dia menyampaikan bahwa :

“ ... untuk pengelolaan hutan yang ada di wilayah desa Pandean ini dilakukan dengan cara bekerjasama. Kerjasama yang dimaksud disini adalah Perhutani dan masyarakat sekitar hutan saling menjaga hutan dengan cara memanfaatkannya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa Pandean. Hal ini supaya memberikan kemanfaatan untuk masyarakat dan menguntungkan hutan dengan menjaganya melalui proses penanaman untuk sumber ekonomi”. (wawancara : Jumali, 13-7-2019)

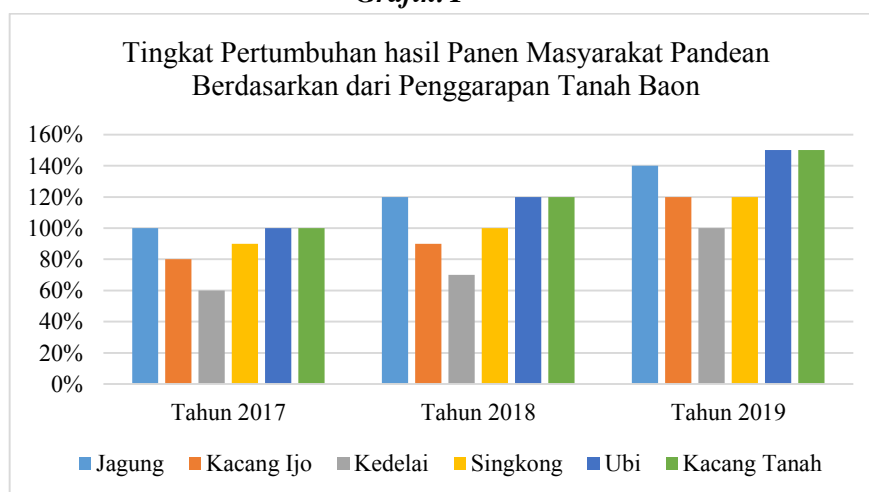
Untuk meningkatkan hasil ekonomi dari hasil penggarapan tanah Baon ini ada beberapa upaya yang dilakukan, baik upaya dari pihak Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) desa Pandean selaku penanggung jawab dan pengatur dalam penggarapan tanah baon maupun masyarakat sendiri. Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa Pandean dalam dalam penggarapan tanah baon :

Table 2. Upaya Peningkatan Ekonomi melalui Penggarapan Tanah Baon

Unsur / Instansi	Upaya yang dilakukan
Masyarakat Pandean	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penanaman tanah baon dengan tanaman Palawija yang mudah dan cepat panen. 2. Melakukan penanaman dengan sistem tumpangsari untuk memperoleh peningkatan pada nilai ekonomi.
Pengurus LMDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan kepada para petani tentang cara penanaman Palawija yang baik dan berkualitas. 2. Memberikan jadwal penggarapan tanah Baon secara bergantian dengan masyarakat lainnya supaya hasil ekonomi bias merata. 3. Membangun kerja sama yang baik antara LMDH dan perhutani setempat.

Dari uraian di atas dapat penulis uraikan bahwa penggarapan tanah Baon di Desa Pandean Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi membawa peningkatan ekonomi kepada masyarakat menjadi lebih baik dan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari grafik pendapatan masyarakat Desa Pandean penggarp tanah baon berdasarkan data profil dari Kantor Desa setempat.

Grafik. 1



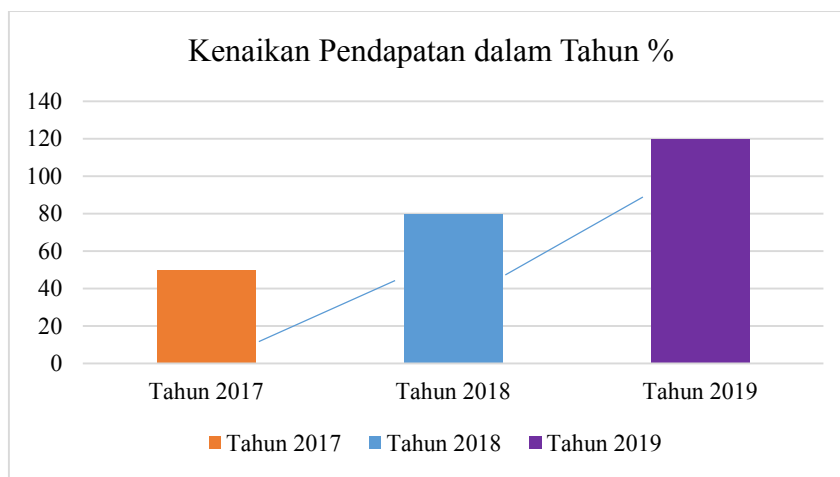
(Sumber : Profil Desa Pandean,2019)

Dari grafik 1 dapat peneliti uraikan bahwa penanaman tanah baon dengan tanaman palawijo terjadi peningkatan tiap tahunnya meskipun dengan peningkatan yang berbeda-beda pada tiap tahunnya. Dari perkembangan yang ada pada grafik dapat dijelaskan sebagai berikut : **Pertama**, Tanaman palawija berupa *Jagung* hasil panen mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 mencapai

100%, tahun 2018 sebanyak 120% artinya hasil panen mengalami peningkatan hasil panen 20%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 20%. **Kedua**, Tanaman palawija berupa *Kacang Ijo* hasil panen mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 mencapai 80%, tahun 2018 sebanyak 90% artinya hasil panen mengalami peningkatan hasil panen 10%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 30%. **Ketiga**, Tanaman palawija berupa *Kedelai* hasil panen mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 mencapai 60%, tahun 2018 sebanyak 70% artinya hasil panen mengalami peningkatan hasil panen 10%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 30%. **Keempat**, Tanaman palawija berupa *Singkong* hasil panen mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 mencapai 90%, tahun 2018 sebanyak 100% artinya hasil panen mengalami peningkatan hasil panen 10%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 20%. **Kelima**, Tanaman palawija berupa *Ubi* hasil panen mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 mencapai 100%, tahun 2018 sebanyak 120% artinya hasil panen mengalami peningkatan hasil panen 20%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 30%. **Keenam**, Tanaman palawija berupa *Kacang Tanah* hasil panen mengalami peningkatan yaitu tahun 2017 mencapai 100%, tahun 2018 sebanyak 120% artinya hasil panen mengalami peningkatan hasil panen 20%, tahun 2019 sebesar 150% artinya mengalami peningkatan sebesar 30%.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat peningkatan hasil panen paling tinggi ditempati oleh : 1). Kacang tanah, 2). Ubi, 3). Kedelai, 4). Singkong, 5). Jagung. Dari hasil pendapatan panen masyarakat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat desa Pandean melalui penggarapan tanah baon terjadi peningkatan tiap tahunnya dilihat dari hasil pendapatan tiap tahunnya yang dapat di gambarkan dalam grafik berikut :

Grafik. 2. Tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Pandean melalui pemanfaatan tanah Baon



(Sumber : Profil Desa Pandean, 2019)

Dari grafik tersebut di atas, peneliti mencoba untuk melakukan wawancara kepada Suparno selaku kepala Desa Pandean, dalam hal ini peneliti menanyakan tentang tingkat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan tanah Baon di desa Pandean. Dalam wawancara ini dia mengungkapkan bawah:

“ ... ekonomi masyarakat Pandean mengalami peningkatan cukup bagus dari penggarapan tanah baon. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan kondisi masyarakat desa Pandean. Sekarang mereka bisa membelikan sepeda motor anaknya yang semula belum punya. Selain itu bias memperbaiki rumah, membeli sapi untuk bercocok tanam dan juga hewan ternak lainnya”.

Perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat desa Pandean selain mengandalkan ekonomi dalam sektor pertanian, mereka juga mencari alternatif lain dengan cara beternak binatang seperti sapi, kerbau dan juga kambing.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut di atas penulis dapat simpulkan bahwa, peningkatan ekonomi masyarakat desa Pandean melalui pemanfaatan tanah Baon memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari yaitu dapat membeli sepeda motor, membeli hewan ternak, memperbaiki rumah dan juga untuk membiayai anak dalam sekolah. Selain itu peningkatan ekonomi masyarakat desa Pandean juga bias dilihat pada grafik pendapatan ekonomi untuk penggarapan tanah Baon yaitu tahun pertama (2017 ke 2018) mengalami peningkatan sebesar 30% dan tahun kedua (2018 ke 2019) mengalami peningkatan sebesar 40% berdasarkan profil desa Pandean.

Adapun tanaman yang menjadi alternatif untuk ditanam di tanah Baon yaitu tanaman jagung, kacang hijau, kedelai, singkong, ubi, dan kacang yang masa panennya lebih pendek dan mudah menanamnya serta praktis perawatannya. Selain itu hasil panen paling tinggi ditempati oleh : *pertama*, Kacang tanah; *kedua*, Ubi; *ketiga*, Kedelai; *keempat*, Singkong; dan *kelima*, Jagung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik atas peran dan kerja sama dari semua pihak yang telah memberikan dukungan dan serta data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1). Kepala Desa Pandean yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di desa Pandean serta memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti; 2). Pengurus Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) desa Pandean yang telah mendampingi selama penelitian dan memberikan banyak masukan selama proses penelitian berlangsung; 3). LP2M Kampus STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi yang telah memberikan support dalam pelaksanaan penelitian ini; 4). Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian ini dalam temu Ilmiah dan semoga tahun berikutnya dapat mengikuti kegiatan yang serupa. data Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi yang baik dalam pengelolaan hutan atau tanah Baon yang berada di Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ; 1). Perhutani Wilayah Desa Pandean yang telah memberikan waktu untuk melakukan penelitian ini. 2). Pengurus Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) Desa Pandean yang telah bersedia menjadi nara sumber dalam penelitian ini dan membantu dalam penggalan sumber data. 3). Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan hasil penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat desa Pandean khususnya dan masyarakat di seluruh Wilayah Jawa Timur pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin, 1994. *Hutan : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hlm : 46-89
- Arifin, Bustanul, 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Erlangga. hlm. 21-43

- Awang, San Afri. 2008, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*, Jakarta : Harapan Prima, hlm: 42-67
- Dunggio, Iswan dan Hendra Gunawan. 2009, *Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia..* Jurnal Kehutanan Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam. Ed. April 2009.
- Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, 2011. *Status Kehutanan Masyarakat di Indonesia* . Jurnal Kehutanan Masyarakat Vol. 3 No. 1 Tahun 2011. hlm : 6-12
- Indriyanto, 2008. *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm : 54-113.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor. 268/Kpts/Dir/2007. *Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (Phbm Plus)*. hlm.4-12
- Samsuudin, Ismayadi & Endro Subiandono, 2007. *Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota*. Ekspose Hasil-Hasil Penelitian, hlm : 14-20
- Setyawan Doni, 2004. *Peranan Tanah Baon Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mengger Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Tahun 2004*. Skripsi S1, Universitas Negeri Surakarta.
- Simon, Hasan, 2003. *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm : 117-135
- Suratmo, Gunawan, 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm : 32-40
- Sutanto, Rachman, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Yogyakarta: Kanisius. hlm : 45-63
- Sylviani, 2008. *Kajian Dampak Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar* . Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 5 No. 3 September 2008, hal :155-178
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Wibowo, Ari . — . *Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut : Implikasi Perubahan Iklim dan Kebijakan* . Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 7 No. 4 Edisi Khusus, Hal. 251 – 260



**PENGUATAN MANAJEMEN AGRIBISNIS DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PILOT PROJECT DESA SUMBERGONDO
KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI**

***STRENGTHENING OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT IN ORDER TO SUPPORT SELF-
SUFFICIENT VILLAGE DEVELOPMENT PILOT PROJECT SUMBERGONDO VILLAGE
GLENMORE SUB- DISTRICT BANYUWANGI***

**Andrean Eka Hardana^{*1}, Djoko Koestiono¹, Imaniar Ilmi Pariasa¹, Anisa Aprilia¹, Novi
Haryati¹, dan Heptari Elita Dewi¹**

¹Jalan Veteran Gedung F Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
Penulis korespondensi: andrean@ub.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penguatan manajemen agribisnis ini bertujuan untuk (1) memperkuat kelompok usaha agribisnis melalui peningkatan peran kelembagaan agribisnis di daerah sasaran (2) meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan kelompok usaha agribisnis di daerah sasaran (3) menjalin kerja sama dalam pemasaran produk olahan usaha agribisnis di daerah sasaran. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Sasaran program ini masyarakat petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) sumber tani makmur. Metode pelaksanaan koordinasi, diskusi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Aspek penguatan manajemen yang disasar mulai penguatan kelembagaan pertanian yang ada seperti adanya Gapoktan yang menaungi Sembilan kelompok tani dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupaya untuk mengembangkan kolektivitas modal, peningkatan produksi dan produktivitas dengan adanya pembuatan starter menggunakan Mikro Organisme Lokal (MOL) yang dinamakan pupuk organik cair (MOLE), selain itu kolektivitas pemasaran hasil pertanian dengan menjalin mitra bersama Bulog. Pada hakekatnya, kegiatan ini solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu, agar dapat meningkatkan prospek usaha agribisnis.

Kata Kunci: kolektivitas modal, produksi, dan pemasaran

ABSTRACT

Community service through the assistance of strengthening agribusiness management aims to (1) strengthening agribusiness groups through increasing the role of agribusiness institutions in the target area, (2) increasing the production, productivity and income of agribusiness groups in the target area, (3) cooperating in marketing processed agribusiness products in the target area. This activity was conducted in Sumbergondo Village, Glenmore District, Banyuwangi Regency. The target of this program is the farming community incorporated in the Joint Farmers Group (Gapoktan), sumber tani makmur. Methods of implementing coordination, discussion and Focus Group Discussion (FGD). Aspects of management strengthening targeted at strengthening existing agricultural institutions such as the existence of Gapoktan which houses nine farmer groups with Village-Owned Enterprises (BUMDes) seek to develop capital collectivity, increased production and productivity with the manufacture of starters using Micro Local Organisms (MOL) called liquid organic fertilizers (MOLE), besides, the collectivity of marketing of agricultural products by establishing partners with Bulog.

Keywords: capital collectivity, production, and marketing

PENDAHULUAN

Manajemen Agribisnis merupakan suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan pengendalian dan fungsi pengawasan dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Manajemen agribisnis mencakup dari agribisnis hulu, budidaya serta hilir memiliki dampak menyeluruh dan terkait dengan berbagai fungsi, seperti fungsi personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, pengadaan dan penyimpanan, dan lain-lain. Menurut Dimiyati (2007), secara umum permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia seperti masih rendahnya wawasan dan pengetahuan petani apabila dihadapkan dengan masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. Selain itu belum terlibatnya secara utuh peran petani dalam kegiatan agribisnis. Berbagai aktivitas petani umumnya masih terfokus pada kegiatan produksi. Serta peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Secara mendasar mayoritas petani mempunyai ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksi usahatani. Kondisi posisi tawar petani pada saat ini umumnya relatif lemah, sehingga merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Posisi tawar petani umumnya masih lemah disebabkan oleh petani yang kurang memiliki pengetahuan tentang akses dan informasi pasar maupun dari segi permodalan yang kurang memadai. Berbagai kondisi yang dihadapi oleh petani dikarenakan tidak punya saluran pemasaran, akibatnya petani menggunakan sistem tebang jual. Sistem tersebut mengakibatkan hampir sebanyak 40 % dari hasil penjualan hasil panen menjadi milik tengkulak (Branson dan Douglas, 1983).

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem *on farm* dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir.

Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi. Oleh karena itu penyuluhan pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008)

Upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian (Akhmad, 2007).

Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan. Sehingga

tujuan pendampingan penguatan manajemen agribisnis diantaranya memperkuat kelompok usaha agribisnis melalui peningkatan peran kelembagaan agribisnis di daerah sasaran, meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan kelompok usaha agribisnis di daerah sasaran dan menjalin kerja sama dalam pemasaran produk olahan usaha agribisnis di daerah sasaran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan tim pengabdian menggali dengan mendeskripsikan gambaran fenomena kondisi aktual penerapan manajemen agribisnis pada kelembagaan pertanian yaitu Gapoktan beserta kelompok tani sasaran dalam melakukan aktivitas kolektivitas permodalan, produksi, dan pemasaran.

Tempat dan Waktu

Kegiatan ini dilakukan oleh dosen yang berasal dari Laboratorium Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis beserta Laboratorium Manajemen Finansial dan Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kalender akademik Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya pada pertengahan semester genap tahun ajaran 2016/2017 hingga akhir semester genap tahun ajaran 2016/2017.

Metode pengumpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan wawancara kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berada di Desa Sumber gondo yang menaungi sembilan kelompok tani bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa). Serta observasi ke semua aktivitas gapoktan terutama berkaitan dengan manajemen agribisnis mulai dari kolektivitas modal, kolektivitas produksi dan kolektivitas pemasaran.

Metode dan Matriks

Langkah- langkah yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan diatas, maka ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Koordinasi dengan instansi perangkat desa setempat
3. Sosialisasi Kegiatan di tingkat Desa.
4. Melakukan analisis terhadap calon sasaran kelompok.
5. Kunjungan lapangan
6. Melaksanakan pendampingan yang meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan data base/profil desa Sumbergondo
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) usaha agribisnis.
 - c. Fasilitasi penguatan kelembagaan
 - d. Fasilitasi manajemen penyediaan bahan baku dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
 - e. Fasilitasi akses pasar, kemitraan dan permodalan usaha,
 - f. Fasilitasi sistem dokumentasi/ pembukuan dan analisis kelayakan usaha.
7. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Pengabdian Masyarakat.

Peningkatan Peran Kelembagaan Agribisnis

Kegiatan konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang

berada di Desa Sumber gondo yang menaungi sembilan kelompok tani bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa) berupaya untuk mengembangkan kolektifikasi modal. Kegiatan ini berupaya dalam membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif.



Gambar 1. Diskusi anantara Lembaga Pertanian dan tim jurusan sosek FP UB Sumber: Data Primer, 2018

Tim pengabdian masyarakat Sosek melakukan diskusi dengan penyuluh pertanian, perangkat desa, serta perwakilan masing-masing kelompok tani berkaitan dengan kolektivitas modal yang bisa dimanfaatkan bersama –sama. Kegiatan dilaksanakan di graha balai desa Sumbergondo. Kolektivitas modal ini dilakukan dengan kerjasama dengan bank BRI untuk permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kerjasama ini untuk mempermudah dalam hal administrasi yang diperlukan dalam pengajuan KUR. Selain itu terdapat program dari pemerintah seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang alokasi dananya terus digulirkan sebagai modal dari satu anggota ke anggota lainnya dalam satu kelompok tani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi, Produktivitas dan Pendapatan Kelompok Usaha Agribisnis

Desa sumber gondo sebagai salah satu lumbung pangan, tentunya hal ini menjadi pemicu seluruh kelompok tani untuk memberikan inovasinya. Hal ini tentunya diperlukan suatu peran lembaga yang dapat meningkatkan kolektivitas produksi dari masing-masing lembaganya. Menurut Akhmad (2007) Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.



Gambar 2. Pupuk Organil Cair MOLE) Sumber: Data Primer, 2018

Pupuk organik cair yang diproduksi oleh Gapoktan Sumber Gondo tersebut masih diproduksi secara tradisional. Proses pembuatan dengan berbagai macam bahan organik mulai dari bagian yang tidak terpakai dari pasca panen dari sayuran selada, untuk daun yang kurang layak dipanen. Selain itu dari buah naga yang tidak layak panen seperti terserang organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya bisa menjadi bahan utama dalam membuat starter untuk Mikro Organisme Lokal (MOL). Produksi pupuk organik cair ini yang kemudian diberi nama (MOLE).



Gambar 3. Budidaya buah dan sayur

Tim pengabdian masyarakat sosek dalam hal ini bersama dengan gabungan kelompok tani yang terdiri dari perwakilan anggota-anggota dari Sembilan kelompok tani melakukan diskusi di Graha Balai Desa Sumbergondo berkaitan dengan pupuk oraganik (MOLE). Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh perangkat desa, bagian keamanan publik POLRI dan TNI-AD sampai dengan penyuluh pertanian dan mantra tani. Pembahasan berkaitan dengan proses penerapan dari pupuk cair yang sudah diterapkan pada buah naga dalam meningkatkan produksi serta tanaman sayur selada untuk daun jadi lebih segar dan tahan lama. Namun terdapat hal yang menarik, dikarenakan beberapa anggota juga menggunakan sebagai obat alami atau jamu. Hal ini tentunya menjadi perhatian besar dari tim pengabdian jurusan sosek. Oleh karena itu tim membawa pupuk cair (MOLE) untuk diteliti secara kandungan di lab kimia Tanah FP UB.

Berdasarkan hasil laboratorium untuk pupuk cair MOLE tidak layak untuk dikonsumsi, namun bisa diterapkan pada tanaman. Hasil kandungan yang ada berupa PH sebesar 3,8, C-Organik sebesar 1,11, N total sebesar 0,04, C/N sebesar 26, bahan organik sebesar 1,93, unsur makro yang terdiri dari P, K, Na, Ca, Mg masing masing sebesar, 0,40;0,17;0,09;0,04;0,006. Hasil tersebut menunjukkan kandungan yang terdapat pada pupuk MOLE bisa diterapkan pada segala jenis tanaman

baik pangan maupun hortikultura.

Menjalin Kerja Sama dalam Pemasaran Produk Olahan Usaha Agribisnis

Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.



Gambar 4. Tim Sosek FP UB dengan Kelembagaan Pertanian Sumber: Data Primer, 2018

Kegiatan diskusi yang menarik yaitu terkait dengan pemasaran produk pertanian pangan maupun hortikultura selama ini dapat diserap dengan baik dipasar. Hal ini dikarenakan Gapoktan bersama dengan kelompok tani berkerjasama dengan BUMDESa untuk unit pemasaran yang kemudian beberapa produk juga dipasarkan di bulog banyuwangi. Namun, untuk produk pupuk cair (MOLE) menjadi perhatian khusus sebagai satuan input yang dipertimbangkan oleh masyarakat agar bisa dikembangkan sampai ketinggian pemasaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat sasaran untuk bisa dipasarkan ke wilayah lainnya. Oleh karena itu tim pengabdian masyarakat sosek juga memberikan saran untuk kandungan diperhatikan sebagai atribut yang melekat di produk. Selain itu pula bentuk dan ukuran kemasan yang nantinya bisa dibuat dengan wadah yang lebih menarik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kolektivitas modal ini dilakukan dengan kerjasama dengan bank BRI untuk permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kerjasama ini untuk mempermudah dalam hal administrasi yang diperlukan dalam pengajuan KUR. Selain itu terdapat program dari pemerintah seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang alokasi dananya terus digulirkan sebagai modal dari satu anggota ke anggota lainnya dalam satu kelompok tani.
2. Kolektivitas produksi, produktivitas dilakukan dengan efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi salah satunya pembuatan pupuk cair organik MOLE
3. Kolektivitas pemasaran berfokus pada input produksi yaitu pupuk organik cair berkaitan dengan kandungan diperhatikan sebagai atribut yang melekat di produk.

Saran

1. Penelitian lebih lanjut berkaitan dengan kinerja dari pupuk cair MOLE dalam aplikasinya ke tanaman berkaitan dengan produksi dan produktivitas oleh lembaga riset atau lembaga pendidikan formal
2. Pemasaran perlu diperhatikan atribut yang melekat pada pupuk organik cair MOLE khususnya kemasan dan informasi kandungan pupuk

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana dengan bantuan hibah dana PNBK dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sehingga tim mengucapkan terima kasih kepada institusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, A., (2007) 'Modernisasi Sentra Produksi Jeruk Di Indonesia', Laboratorium Data, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Tlelung-Batu, Jawa Timur
- Maulidah, Silvana. 2012. Sistem Agribisnis. Fakultas Pertanian. Malang: Universitas Brawijaya
- Montealegre, F., Thompson, S., and Eales, J.S. (2007). An empirical analysis of the determinants of success of food and agribusiness e-commerce firms. *International Food and Agribusiness Management Review*, 10(1), 61-81.
- Nuthall, P. L., & Old, K. M. (2017). Land Use Policy Will future land based food and fibre production be in family or corporate hands ? An analysis of farm land ownership and governance considering farmer characteristics as choice drivers . The New Zealand case. *Land Use Policy*, 63, 98–110. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.01.018>
- Park, T., and A. Mishra.(2003). Internet Usage by Farmers: Evidence from a National Survey. Selected paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Montreal, Canada, July 27–30, 2003.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan PerdaganganKementerian Perdagangan. 2015. Analisis Efektivitas Sistem Resi Gudang Melalui Integrasi Pasar Lelang Forward Komoditi. Jakarta: Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan
- Rahim, Abdul dan Diah, Retno Dwi Hastuti. 2007. *Ekonomika Pertanian (Pengantar, Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat
- Riana, Dina. 2010. *Penggunaan Sistem Resi Gudang*. Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia
- Setiawan, Iwan. 2008. *Collective Farming sebagai Alternatif StrategiPemberdayaan Petani*. Bandung: Unpad



PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI BUMDES DI DESA TAMANSARI, KECAMATAN LICIN, KABUPATEN BANYUWANGI

Irwan Kurniawan Soetijono, SH.,MHum

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

irwankurniawan616@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan merupakan proses panjang pengembangan potensi masyarakat. Pembangunan melibatkan banyak pihak dengan tujuan akhir masyarakat yang maju dan mandiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat, berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Salah satu desa yang telah berkembang dalam pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan mandiri secara ekonomi adalah Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Terletak di kawasan wisata utama Gunung Ijen, berbagai potensi di bidang ekonomi telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Tamansari. Sebagian kecil masyarakat telah memiliki usaha penunjang wisata meskipun dalam skala kecil, rintisan dan terpisah tanpa terkoneksi sama lain. Belakangan masyarakat menyadari diperlukan wadah yang mampu menyatukan aneka usaha kecil menengah tersebut sehingga kesejahteraan pembangunan bidang pariwisata di kawasan gunung ijen semakin meluas dan merata di rasakan oleh lebih besar masyarakat khususnya di desa tamansari. BUMDES merupakan wadah paling tepat bagi masyarakat untuk berkolaborasi di bidang pariwisata yang notabene jenis pembangunan multiplier effect. Peningkatan kemakmuran, kemajuan informasi dan teknologi, serta semakin mudahnya transportasi menuju Kawasan wisata Ijen telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara menuju kawah ijen. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang hanya bisa dijawab dengan kolaborasi dengan melibatkan stakeholder meliputi masyarakat, akademisi, pemerintah dan dunia usaha. Hasilnya adalah penguatan kelembagaan masyarakat, terciptanya inovasi dan partisipasi serta pemerataan kemandirian ekonomi. Pengakuan lain adalah Desa Tamansari berhasil meraih penghargaan "Desa Wisata Award" dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dinobatkan sebagai desa wisata terbaik dalam kategori pemanfaatan jejaring bisnis.

Kata kunci : BUMDES, mandiri ekonomi, partisipasi pembangunan.

PENDAHULUAN

Desa pada masa lalu lebih dikenal sebagai obyek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Desa tidak lebih merupakan pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Sifat kebijakan yang top down sulit menerima perbedaan unik khas desa, apalagi menggali lebih dalam potensi desa. Bagi pemerintah pada masa itu, desa yang terbentang dari sabang hingga merauke adalah sama. Hal itu berarti segala kebutuhan dan arah pengembangan pembangunan desa dianggap seragam. Padahal seperti kita ketahui bersama, desa di Indonesia yang bahkan telah ada sebelum republik ini berdiri berjumlah ribuan tentu dengan kekhasan masing-masing.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, atau yang seringkali disebut sebagai UU Desa, maka terbukalah perspektif baru pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta mampu mewujudkan cita-cita kemandirian, terutama dibidang ekonomi.

Salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam NAWA CITA adalah upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan

daerah melalui kerangka negara kesatuan. Jika selama ini tata kelola pemerintahan negara lebih didominasi oleh regim sektoral dan keuangan, pemerintahan memiliki komitmen untuk mensinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia menjadi satu kesatuan sistem yang tidak lagi terfragmentasi. Perwujudannya adalah melalui penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan penerapan sistem desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara. Pada konteks inilah posisi dan kedudukan desa semakin penting dengan perannya sebagai “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki peran strategis, bahkan terdapat optimisme bahwa desa tampil sebagai panggung utama dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk senantiasa mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan. Paradigma Undang-Undang Desa memposisikan desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah pemerintahan daerah tetapi lebih memberikan kewenangan yang besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*). Diharapkan paradigma ini dapat mempercepat kemandirian desa yang menjadi tujuan utama kinerja Kementerian Desa. Kebangkitan desa diharapkan menjadi sebuah fenomena yang semakin tumbuh berkembang menggemakan semangat menyongsong kemandirian bagi desa. Karena dengan tumbuhnya desa-desa yang mandiri dan sejahtera akan membalik fakta lama bahwa selama ini 70 persen pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota.

Fakta mencatat bahwa Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Artinya, total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 39 ribu desa tertinggal, kurang lebih 17 ribu desa sangat tertinggal, dan 1.100 desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan (Kementerian Dalam Negeri, 2013)

Kita semua menyadari bahwa persoalan yang dihadapi desa sangatlah kompleks mulai dari persoalan kemiskinan, konflik pertanahan, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan, persoalan hukum dan lain sebagainya. Sehingga dukungan masyarakat sipil amat dibutuhkan, karena merekalah praktisi sesungguhnya yang dalam kesehariannya bercengkrama dengan masyarakat khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa. Kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan desa merupakan keniscayaan agar program kemandirian desa bisa berjalan cepat dan maksimal (Palupi *et al*, 2016)

Berangkat dari persoalan penting di atas, tulisan ini akan mendiskusikan lebih mendalam mengenai upaya mewujudkan desa mandiri melalui BUMDes yang dibentuk Pemerintah Desa Tamansari, Kecamatan Licin Banyuwangi bersama warganya. Desa Tamansari berkembang sebagai desa wisata yang mampu berdaya di tengah kendala dan keterbatasan serta dinamika sosial yang dihadapi. Desa Tamansari mampu mengoptimalkan program dan kegiatan pemerintah kabupaten Banyuwangi sehingga mampu melakukan lompatan-lompatan pembangunan yang mustahil dilakukan pada masa lalu. Salah satu program pemerintah kabupaten Banyuwangi yang dapat dimanfaatkan secara optimal adalah smart kampung.

Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung Pasal 1 angka 6 disebutkan Smart Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Melalui Smart Kampung, ruang lingkup program kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tujuh kriteria berikut, yaitu (1) pelayanan publik, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) kesehatan, (4) pendidikan, seni, dan budaya, (5) peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, (6) kemiskinan, dan (7) informasi hukum. Pengembangan Smart Kampung didasarkan pada program yang menyentuh langsung pada kepentingan publik dan berbasis pada penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi.

Adapun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu (1) Bagaimana BUMDES dapat berperan dalam pembangunan berbasis partisipasi menuju kemandirian ekonomi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi ? ;(2) Bagaimana perwujudan optimalisasi pembangunan berbasis partisipasi sehingga hasil kemandirian ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas ? Tujuan kajian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana BUMDES dapat berperan dalam pembangunan berbasis partisipasi menuju kemandirian ekonomi di desa tamansari kecamatan licin kabupaten banyuwangi. Tujuan berikutnya adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana perwujudan optimalisasi pembangunan berbasis partisipasi sehingga hasil kemandirian ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

METODE PENULISAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi pengertian/makna dari individu atau sekelompok orang/masyarakat yang berada dalam masalah sosial tertentu (Creswell, 2014, h. 4). Neuman juga mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi realita sosial dan pemahaman mengenai budaya. Pendekatan kualitatif selain itu juga berfokus kepada proses yang dinamis yang dapat dilihat dari peristiwa yang diamati karena adanya keterlibatan peneliti secara langsung dalam penelitian kualitatif (Neuman, 2014, h. 17). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Alston dan Bowles (2003, h. 34) menggambarkan penelitian deskriptif sebagai penggambaran berbagai macam aspek didalam dunia sosial (*descriptive research describing various aspectis of the social world*).

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literature, observasi dan wawancara mendalam. Kajian literatur digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi data primer. Penggunaan kajian literatur bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang sudah ada sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, untuk mengetahui bagaimana penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya (Alston and Bowles, 2003, h. 64). Sedangkan studi dokumentasi sebagai data sekunder juga diperlukan untuk memperkuat dan mendukung data primer yang didapat dari field research activities. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan topik penelitian. Neuman (2013, h. 494) menyampaikan bahwa wawancara penelitian lapangan berlangsung dalam berbagai cara: mendalam, tidak terstruktur, pertanyaan terbuka, lama dan informal. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dalam melakukan wawancara agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas. Pengamatan atau obesrvasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009, h. 101). Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu berpartisipasi pada kegiatan desa yang berhubungan dengan kegiatan BUMDES serta kegiatan masyarakat yang menjadi pelaksana kegiatan BUMDES. Peneliti juga melakukan observasi secara penuh tanpa ikut berpartisipasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Desa Tamansari

Desa Tamansari adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Di kecamatan Licin selain Tamansari terdapat pula desa Banjarm desa Gumuk, desa

Jelun, desa Kluncing, desa Licin, desa Segobang dan desa Pakel. Perbatasan Desa Tamansari meliputi : Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah (Utara), Desa Licin (Timur), Desa Rembang (Selatan) dan Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso (Barat). Terhampar seluas 693.060 Ha, sebagian lahan terdiri dari sawah, perkebunan, lapangan, dan lain-lain. Topografi desa Tamansari berupa dataran tinggi yang berbentuk bukit dan dilewati oleh banyak aliran sungai (sekitar 21 anak sungai). Ketinggian berkisar 600 – 700 di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 24 – 26C. Dengan demikian kondisi alam desa Tamansari termasuk dalam kategori sejuk, subur dan kersediaan air yang melimpah.

Desa Tamansari menyajikan berbagai atraksi wisata di antaranya wisata memetik kopi, pemerah susu sapi, dan pengolahan belerang yang merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, berbagai acara terkenal juga bisa anda ikuti, seperti Tour de Ijen, Ijen Summer Jazz dan Banyuwangi Internasional Ijen Green Run. Destinasi dan Atraksi Wisata di Desa Tamansari adalah :

1. Kawah Ijen

Sebagai salah satu situs paling terkenal di Banyuwangi karena keindahan api birunya menjadikan kawah ijen sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Kawah ijen tidak hanya memiliki api biru yang memesona, namun juga menyuguhkan keagungan dan pemandangan beberapa gunung yang mengelilinginya, yaitu gunung raung, gunung suket dan gunung rante.

2. Sendang seruni

Sendang seruni adalah sebuah kolam mata air yang menakjubkan. Masyarakat sekitar mengatakan bahwa yang ada di sendang seruni bisa mencegah berbagai penyakit, mengurangi rasa lelah, dan membuat awet muda.

3. Taman gandrung terakota

Melihat kota banyuwangi yang identik dengan tari gandrung sebagai tarian sambutan membuat desa Tamansari berinovasi untuk menciptakan sebuah visualisasi dari tari tradisional. Ketika anda memasuki taman gandrung, anda akan disambut oleh deretan patung penari gandrung yang berada di persawahan terasering. Guna menjaga kealamian persawahan tersebut masih aktif digunakan untuk menanam padi. Di dalam taman gandrung terakota, anda juga bisa menikmati berbagai pertunjukan seni yang dihelat disebuah amfiteater di dalamnya.

4. Hutan Pinus

Wisata hutan pinus telah menjadi rujukan populer untuk mengambil gambar yang estetik dengan deretan pohon pinus yang menjulang tinggi. Udara sejuk dan berkabut yang menghiasinya dapat menjernihkan pikiran siapapun yang mengunjungi Hutan Pinus Desa Taman sari. Hutan pinus di desa ini terbilang sangat alami dengan para pekerja yang berlalu lalang untuk mengambil getah pinus beserta getah damar.

5. Pengolahan belerang

Memiliki keistimewaan sebagai salah satu penghasil belerang di Indonesia. Menurut Kementrian (Energi dan sumber Daya Mineral) ESDM merupakan terbesar di Indonesia. Setiap hari tidak kurang 14 ton belerang yang ditambang. Jumlah ini masih sekitar 20% dari seluruh potensi yang ada akibat kendala medan yang sulit dan teknologi pertambangan yang amat sederhana. Mulai mengalirkan belerang/sulfur dengan pipa besi sederhana, menggunakan peralatan manual dan diangkut dengan cara dipikul.

Adapun jenis usaha BUMDES berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dapat diklasifikasikan dalam 6 jenis usaha meskipun tidak terbatas tetapi pada umumnya adalah sebagai berikut:

Serving: BUM Desa menjalankan "*bisnis sosial*" yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUM Desa ini memberikan *social benefits* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh jenis usaha *Serving* yaitu Usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik desa, lumbung pangan, dan lain-lain.

Banking: BUM Desa menjalankan "*bisnis uang*", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *Banking* yaitu : Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dan sebagainya.

Renting: BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh jenis usaha *Renting* yaitu: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Brokering: BUM Desa menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh jenis usaha *Brokering* yaitu: Jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

Trading: BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha *Trading* antara lain: Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan lain-lain.

Holding: BUM Desa sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

Contoh jenis usaha *Holding* yaitu: 1) Kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil; 2) "Desa wisata" yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dan lain-lain.

Payung hukum pembentukan BUMDES Ijen Lestari Desa Tamansari kecamatan Licin banyuwangi adalah 1). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 2). Peraturan Desa Tamansari Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari; 3). Keputusan Kepala desa tamansari nomor : 188/07/KEP/429.422.08/2015 tentang pembentukan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES "Ijen Lestari" Desa Tamansari Kecamatan Licin

Adanya payung hukum tersebut merupakan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES Ijen Lestari dalam menuju pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi berbasis partisipasi. Partisipasi penting bagi tujuan pemberdayaan karena merupakan syarat pokok bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan hingga pada tujuan memampukan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan upaya kemandirian harus terarah, ditujukan langsung kepada yang memerlukan, langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran

program (partisipatif). Kartasasmita (1996) mengatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. ketiga,
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan idealnya harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat bukan dengan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada berbagai program yang sifatnya top-down / pemberian (*charity*) dari pemerintah. Sehingga tujuan akhirnya adalah membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara lestari. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam pembangunan yang pusatnya ada pada rakyat (*people-centered development*). Pemberdayaan tidak melulu menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan penataan kelembagaan. Pemberdayaan merupakan proses sosial sekaligus individual melalui suatu penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuhkembangan kreativitas. Ketiganya memerlukan kebersamaan yang memperkenankan warga desa untuk mengembangkan perasaan bersama yang menjadi tanggung jawab mereka secara mandiri atas dasar kebutuhan. Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dengan sasarannya adalah masyarakat yang terpinggirkan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal (Kuswandoro, 2016) jurnal

BUMDES ijen lestari desa tamansari dalam proses pemberdayaan masyarakat senantiasa memperhatikan tahapan-tahapan yang mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses mulai rencana pendirian BUMDES Ijen Lestari melalui penjaringan aspirasi lewat musrenbangdes, pemilihan pengurus melalui pertemuan baik formal maupun informal, pelaksanaan kegiatan BUMDES ijen lestari melalui rapat rutin hingga pertanggungjawaban kegiatan BUMDES Ijen Lestari melalui laporan pertanggungjawaban secara rutin dan berjenjang.

Untuk meningkatkan potensi baik di dalam maupun keluar, BUMDES Ijen Lestari Tamansari melakukan berbagai upaya antara lain melaksanakan berbagai pelatihan bagi masyarakat pelaku ekonomi. Pelatihan tersebut antara lain untuk pemilik homestay, pelatihan guide/ pemandu wisata profesional bagi pemuda, hilirisasi produk kopi dan lain-lain. BUMDES secara optimal memanfaatkan program pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait teknologi yakni Smart Kampung.

KESIMPULAN

1. BUMDES Ijen Lestari dapat berperan dalam pembangunan berbasis partisipasi menuju kemandirian ekonomi melalui pelaksanaan tahapan demi tahapan yang senantiasa melibatkan masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan operasional BUMDES hingga evaluasi pertanggungjawaban BUMDES.
2. Optimalisasi pembangunan berbasis partisipasi sehingga hasil kemandirian ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas adalah melalui peningkatan terus menerus potensi yang ada dimasyarakat. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang difasilitasi oleh Pemkab Banyuwangi yaitu Smart Kampung. Optimalisasi dapat juga berupa menjalin kerjasama dengan pihak pihak yang bertujuan menambah kemandirian ekonomi masyarakat baik melalui pelatihan, perusahaan (CSR) maupun pengabdian kepada masyarakat (dunia pendidikan).

SARAN

Pembangunan kemandirian masyarakat hanya dapat tercapai jika secara sadar dibangun jaringan antar desa. Pembangunan kawasan perdesaan di seputar desa Tamansari, antar kecamatan bahkan diluar kabupaten Banyuwangi amat diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan dan menambah potensi tawar desa. Potensi yang ada di kawasan menjadi modal utama untuk berkolaborasi dan bersinergi membangun kemandirian ekonomi bukan hanya desa Tamansari tetapi juga maju bersama kawasan perdesaan di sekitarnya. Yang pertama kali dilakukan adalah mengesampingkan ego sektoral dan kewilayahan untuk mencari kesamaan yakni cita-cita kemandirian kawasan. Berikutnya disusun rencana kerja yang melibatkan pemangku kepentingan (stake holder) di kawasan perdesaan di sekitar desa Tamansari. Pelibatan kegiatan secara partisipatif merupakan keniscayaan sehingga kesejahteraan dapat terdistribusi secara merata. Tidak dapat dipungkiri, perbedaan pendapat dan kecepatan kerja selalu ada. Langkah tepat untuk mengatasi perbedaan adalah saling belajar dan saling melengkapi sehingga tercipta langkah pembangunan kemandirian ekonomi yang selaras. Berikutnya adalah saling evaluasi dan saling mengingatkan tentang tujuan dan cita-cita bersama seluruh kawasan. Didasari dengan semangat transparansi niscaya kemandirian ekonomi kawasan dapat diraih bersama-sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
2. Dekan fakultas hukum 17 Agustus 1945 Banyuwangi
3. Camat Kecamatan Licin Banyuwangi
4. Kepala Desa Tamansari Kecamatan Licin Banyuwangi
5. Ketua BUMDES Ijen Lestari Tamansari licin Banyuwangi

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2013, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Creswell, J.W 2010, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*: Achmad Fawaid, penerjemah (3th ed), Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Dunham, A. 1962, *Community Welfare Organization (Principles And Practice)*, Thomas Y. Crowel Company. Green., New York.

- Fajar Nandra Caya,M. 2019, *Dampak BUMDES Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, nomor 1, April 2019.
- Neuman, W.L. 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerjemah (7th ed), Jakarta.
- Palupi, S, Ulfiah, U & Prasetyohadi. 2016, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak*, Lakpesdam PBNU Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta.
- Purnamasari, H. 2016, *Efektifitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur*. Jurnal Politikom Indosiana., Volume 1 No.2
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2015, *Panduan Pendirian BUMDES*. FE Universitas Brawijaya.
- Ramdhana, C. B. 2014. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol 1 No. 6
- Ridlwan, Z. 2014. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Hukum. Volume S No. 3.

SUB TEMA 3

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DESA

(KOPERASI PEREMPUAN, PETANI, NELAYAN, PENATAAN PASAR TRADISIONAL, OVOP, DAN AGROPOLITAN)



**OPTIMALISASI BUDIDAYA DURIAN LOKAL
SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA DESA AGROPOLITAN
SEBAGAI BASIS DESA AGROWISATA DI WONOSALAM**

***OPTIMIZATION OF LOCAL DURIAN CULTURE
AS THE BASIS OF THE AGROWISATA IN WONOSALAM***

Heru Irianto¹, Hj. Mahmudah Enny², Sutarman³

1. Universitas Bhayangkara Surabaya, Jln, Yani 114 Surabaya Kode Pos 60235

2. Universitas Bhayangkara Surabaya

3. Umsida Jl. Raya Gelam 250 Candi Sidoarjo Kodepos, 61212

heru@ubhara.ac.id

ABSTRAK

Salah satu isu pokok yang perlu mendapatkan penanganan dalam waktu dekat, adalah peningkatan produktivitas pangan, distribusi serta diversifikasi pangan dan gizi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Kecamatan Wonosalam dikenal dengan penghasil buah durian lokal, sampai sekarang belum ada data yang dapat menunjukkan berapa jumlah produksi durian di Wonosalam; akan tetapi akhir-akhir sudah sulit ditemukan durian lokal yang enak dan berkualitas seperti pada masa-masa sebelumnya padahal cita rasa durian lokal mempunyai penggemar tersendiri. Langkanya durian lokal dikarenakan selama ini petani menanam durian lokal masih secara tradisional hanya menanam saja di kebun dari biji yang dibiarkan saja untuk dapat diambil buahnya tanpa ada perawatan yang memadai sehingga produktifitasnya tidak optimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Untuk meningkatkan produktifitas durian lokal maka diperlukan adanya pendekatan dengan budidaya durian lokal secara intensif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Tujuan Penelitian Optimalisasi Budidaya Durian Lokal Sebagai Basis Terwujudnya Desa Agrowisata Di Wonosalam. Kebijakan agropolitan akan sukses apabila disinergikan dengan pariwisata karena dengan demikian akan terjadi simbiosis mutualis yang mensinergikan sektor pertanian modern dan sektor pariwisata serta sektor bisnis lainnya yang lebih mengoptimalkan potensi lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan multidisipliner yaitu dari bidang Ilmu Sosial, Ekonomi dan Serta Pertanian dengan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, untuk dapat mendukung terciptanya kawasan agropolitan dan Agrowisata maka petani harus dikembangkan skillnya karena Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dalam bertani akan tetapi juga dalam berwirausaha. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) mempunyai peran yang sangat strategis, akan tetapi hal ini tidaklah cukup dengan berbagai keterbatasan baik secara kualitas maupun kuantitas apabila dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi para petani. Agribisnis akan sukses apabila berbasis komunitas atau yang biasa dikenal sebagai *Social Bisnis*, hal ini sesuai dengan konsep *community-based social enterpris*.

Kata Kunci: Agropolitan, Agrowisata, Desa, Durian

ABSTRACT

One of the main issues that need to get maintenance in the near future, is increasing food productivity, distribution and diversification of food and nutrition for the development of people's economy. Wonosalam District is known as a producer of local durian fruit, until now there is no data that can show the amount of durian production in Wonosalam; but lately it has been difficult to find good and quality local durian as in previous times. The scarcity of local durian because so far farmers planted local durian still requires traditional planting only in the garden from the seeds that are left alone can be taken fruit without any care possible productivity is not optimal both in terms of kuantitas and kualitas. To improve product quality, quality is needed with high quality cultivation, thereby increasing the quality and yield of production. Research Objectives for Optimizing Local Durian Cultivation as the Basis of Agro Tourism in Wonosalam. Agropolitan policies will succeed because they

are synergized with tourism because there will then be a mutualist symbiosis that synergizes the modern agricultural sector and the tourism sector as well as the business sector which further enhances local potential. To achieve these objectives, this research is used for multidisciplinary from the fields of Social Sciences, Economics and Agriculture and with qualitative research methods. In this study it was concluded, to support the creation of agropolity and agro-tourism areas, farmers must develop their skills because Human Resources (HR) is not only in farming but also in entrepreneurship. Field Extension Officers (PPL) have a very strategic role, but this is quite adequate with a variety of good qualities, according to needs, as well as differences related to the challenges and increasing challenges faced by farmers. Agribis will succeed based on community or commonly referred to as Social Business, this is in accordance with the concept of community-based social entrepreneurship.

Keywords: Agropolitan , Agro Tourism, Village, Durian

PENDAHULUAN

Sekitar 82 % wilayah Indonesia berupa kawasan pedesaan dan dihuni oleh 131,8 juta jiwa (56,86% dari total penduduk. (<http://www.kompasiana.com/>). Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis (Pasal 1, Ayat 24). Untuk itu agropolitan merupakan suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Prinsip dasar pengembangan kawasan agropolitan adalah : (1) Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan pedesaan berbasis agribisnis (2) Pengembangan agropolitan merupakan program utama dan kegiatan terpadu lintas sektor dengan pendekatan *bottom-up*; (3) Penetapan kawasan agropolitan dimulai dengan penataan detail kawasan dalam bentuk cetak (*blueprint*); (4) Perencanaan disusun secara bersama antara instansi pemerintah, masyarakat tani, dan swasta/dunia usaha dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota; dan (5) Pengembangan kawasan agropolitan harus berdasarkan Master Plan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pengembangan kawasan Agropolitan tidak bisa dilepaskan dengan pengembangan kawasan Agrowisata, karena keunggulan tradisional dan keunggulan lokal sangat penting untuk mengembangkan pariwisata yang akan mendorong pengembangan ekonomi mikro maupun makro. (Sef R Baaijens, 1997 :841) Pariwisata merupakan industri dunia terbesar hal ini sangat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat tumbuh pesat (Spark Donald L, 2005: 147) Sampai sekarang para peneliti masih mengkaji masalah pariwisata sebagai strategi dalam pengembangan ekonomi. Wonosalam sebagai salah satu kawasan Agropolitan di Kabupaten Jombang dan durian merupakan salah satu produk unggulannya maka sangat potensial untuk dikembangkan agar dapat mendorong tumbuhkembangnya Agrowisata di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Optimalisasi Budidaya Durian Lokal Sebagai Upaya Terwujudnya Desa Agropolitan Sebagai Basis Desa Agrowisata Di Wonosalam. Untuk mengkaji masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini ingin mengkaji secara komprehensif dan holistik maka digunakan pendekatan kualitatif dengan dikaji multidisipliner.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan selama enam bulan dari bulan Januari sampai Juni 2019 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan multidisipliner, hal ini dilakukan agar permasalahan dapat dikaji secara komprehensif dan holistik. Penelitian dilakukan di Wonosalam sebagai Kecamatan Agropolitan merupakan kawasan pedesaan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan yang masih perlu dikembangkan untuk salah satu destinasi wisata di Kab. Jombang; yang mempunyai berbagai permasalahan yang harus ditangani secara komprehensif dan holistik serta sinergis sehingga dapat berkembang sesuai dengan potensi pedesaan. Wonosalam dikenal sebagai daerah penghasil durian lokal yang disukai para penggemar durian yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai produk unggulan untuk pengembangan ekonomi pedesaan.

Untuk menggali informasi yang luas, komprehensif dan holistik, maka informasi diperoleh dengan Observasi Partisipasi dimana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan. Peneliti bertindak menjadi observer dan menjadi bagian dari kelompok yang ditelitinya. Kelebihan dari jenis ini adalah peneliti menjadi bagian integral dari berbagai situasi yang dipelajari di lapangan, sehingga kehadirannya pun tidak mempengaruhi situasi di lapangan; peneliti melibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di lokasi penelitian dengan demikian diharapkan akan dapat diperoleh data yang benar-benar sesuai fakta di lapangan. Observasi yang dilakukan akan dapat memberikan kejelasan tentang sebuah permasalahan dan kemudian mencari solusi untuk masalah tersebut. Analisis data dilakukan di lapangan sekaligus ketika peneliti menggali informasi di masyarakat dengan melakukan analisis-analisis data dengan memilah-milah data dalam berbagai kategori untuk memperoleh hubungan berbagai fenomena di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Wonosalam Sebagai Kawasan Agropolitan

Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan dengan luas wilayah 13.904,951 Ha, secara geografis kecamatan wonosalam merupakan dataran tinggi dengan ketinggian ± 500 Mdpl. Dengan suhu rata-rata 21° - 24° celcius. Berdasarkan data Statistik 2017 tercatat Jumlah penduduk di Wonosalam 35434 jiwa. Wilayah Kecamatan Wonosalam yang merupakan wilayah pegunungan memberikan penguatan tersendiri untuk menjadikan wilayah kecamatan Wonosalam bertipologi agropolitan. Tipologi agropolitan Wonosalam didukung dengan adanya area-area wisata yang menawarkan pemandangan alam yang menawan. Kecamatan Wonosalam namanya melambung tinggi karena di kawasan ini terkenal dengan sentra penghasil buah durian berkualitas. Musim buah durian diperkirakan jatuh pada bulan Januari setiap tahunnya. Pada setiap musim buah durian, kecamatan Wonosalam kondang dengan acara "tumpeng durian," yaitu menyusun buah durian membentuk kerucut atau tumpeng. Kerucut terdiri atas ribuan buah durian. Pesta durian ini mengundang perhatian wisatawan asing maupun domestik. Setiap wisatawan atau pengunjung digratiskan menikmati manis dan legitnya durian Wonosalam yang tidak kalah dengan durian asing. Di Kecamatan Wonosalam ini pula traveler bisa menikmati pesona hutan dari beberapa tanaman produktif selain pohon buah durian. Kota kecamatan yang berada di pegunungan ini ternyata juga menyimpan banyak potensi hutan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berkembangnya agrowisata di Wonosalam.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, Mengoptimalkan dan menggali potensi desa serta meningkatkan akses pasar merupakan kunci

utama untuk memperoleh kemajuan desa.(Adi Sucipto *Kiswara*, 2018: 23) Pengembangan Kawasan Agripolitan bertujuan untuk : (1) Menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian (agribisnis) di perdesaan; (2) Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat perdesaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis agribisnis; (3) Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga ekonomi di perdesaan; (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan (5) Mewujudkan tata ruang ideal antara kota dengan desa yang saling mendukung melengkapi dan memperkuat. Untuk kriteria kawasan, pengembangan kawasan agropolitan harus memiliki : (1) Daya dukung sumberdaya alam dan potensi fisik yang memungkinkan (kesesuaian lahan, agroiklimat, dan agroekologi) untuk dapat dikembangkan sistem dan usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan; (2) Komoditas pertanian unggulan yang dapat menggerakkan ekonomi kawasan; (3) Perbandingan luas kawasan dengan jumlah penduduk, ideal untuk membangun sistem dan usaha agribisnis dalam skala ekonomis dan jenis usaha tertentu; (4) Tersedia prasarana (infrastruktur) dan sarana produksi dasar yang memadai seperti pengairan, listrik, transportasi, pasar lokal dan kios sarana produksi; dan (5) Memiliki suatu lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan, penghubung dengan daerah/kawasan sekitarnya yang terintegrasi secara fungsional.

Kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat trend wisata yang terkait dengan alam, budaya, sejarah dan arkeologi, yang semakin menambah berbagai bentuk-bentuk pariwisata di daerah pedesaan yang menjadi arah utama untuk pengembangan ekowisata. (Gašper Mrak, 2012)) Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersendiri yang memberikan nilai tambah. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata (Suparwoko) Penting bagi semua pihak bersinergi sesuai dengan kompetensinya dalam pengembangan kewirausahaan termasuk Perguruan Tinggi (2016, Heru Irianto:56) Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Agropolitan tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan Agrowisata begitu sebaliknya keduanya saling mendukung untuk dapat bersinergi memperoleh kemajuan bersama. Kawasan agropolitan, mempunyai potensi yang cukup besar namun pembangunan fasilitas yang cukup bagus belum dapat mendukung adanya pengembangan kawasan agropolitan karena kurang adanya pemberdayaan sehingga fasilitas belum dimanfaatkan secara optimal. (Suyitman 2011:139) Faktor lain yang membatasi menjaga wisatawan ke daerah yang ditentukan adalah jalan sempit hari-hari kunjungan yang berat, para wisatawan saling melewati dengan pergi dari jalan. Semua aspek dianalisis oleh penelitian ini (parameter geometrik, geologi dan geomorfologi struktur, arus wisatawan, dan pengamatan medan) mengkonfirmasi bahwa permukaan jalan akan Tidak terautentikas (Jana Janočkova, 2015 :281) Upaya-upaya terkait pengembangan kawasan agropolitan, diantaranya dengan mengajukan pengajaran maupun pelatihan terhadap dinas terkait untuk mengadakan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat maupun aparatur pemerintah di tingkat lokal. (Lilis Istoriyah) Pengembangan SDM dengan melibatkan banyak pihak menjadi kunci utama dalam memajukan wilayah pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan

Pengembangan Kawasan Durian Lokal Sebagai Kawasan Agrowisata

Semua desa di Wonosalam penghasil durian namun belum dikelola secara intensif , sehingga hasilnya sangat bervariasi dan tidak semua hasil durian berkualitas sehingga kurang dapat mempunyai nilai jual yang tinggi. Jika ada salah satu desa yang sudah cukup dikenal dengan aneka durianannya yang dapat dijadikan salah satu contoh lokasi desa wisata berbasis pertanian di Wonosalam ada desa yang dikenal Kampung Durian, itupun dikelola masih secara tradisional baik

dalam budidaya maupun pemasarannya. Kenduri Durian merupakan ikon pariwisata di Wonosalam yang diselenggarakan setiap tahunnya ; ribuan orang dari Jombang dan beberapa kota di Jawa Timur, memadati lapangan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Mereka adalah pengunjung dalam acara kenduri buah durian atau dalam bahasa jawa disebut Kenduren Duren. Kenduren Wonosalam merupakan ritual tahunan masyarakat dari 9 desa di Kecamatan Wonosalam. Masyarakat dari 9 desa, setiap desanya membuat 1 buah tumpeng berisi durian serta beberapa jenis hasil bumi. Ritual Kenduren Wonosalam dimulai dari arak-arakan 9 tumpeng dari kantor Kecamatan Wonosalam. Kesembilan tumpeng itu masing-masing diarak oleh puluhan warga dari 9 desa menuju lapangan Kecamatan Wonosalam. Selain Kenduren Duren di Wonosalam juga ada destinasi lain terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan yaitu keduri salak dan manggis di desa Jarak. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan, diantaranya dengan mengajukan pengajaran maupun pelatihan terhadap dinas terkait untuk mengadakan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat maupun aparatur pemerintah di tingkat lokal. “Kenduren duren” di Wonosalam bukan sekedar ritual selamat atau ungkapan syukur atas melimpahnya hasil panen durian bagi masyarakat Wonosalam, namun juga merupakan salah satu even yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dan masih perlu terus dikembangkan sehingga dapat menjadi daya tarik yang tinggi bagi wisatawan untuk berkunjung ke Wonosalam. Untuk mengembangkan “Kenduren Duren” menjadi Ikon pariwisata di Wonosalam perlu didukung dengan budidaya durian yang lebih intensif, sehingga pengembangan kawasan agrowisata dengan Durian sebagai produk unggulannya dapat segera terwujud.

Penerapan desa agropolitan dapat mempercepat pembangunan perdesaan dan mampu memberikan pelayanan sosial ekonomi serta berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan mengembangkan kawasan agrowisata (**Siti Arieta** , 2010) Dengan menggunakan sistem Kooperatif Farming peningkatan nilai produk dapat mencapai 52 %, ini merupakan konsep agropreneur (*Surya* , 25 April 2018) Untuk meningkatkan perkembangan kawasan ini perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap semua atribut yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat, sehingga semua dimensi di kawasan agropolitan, desa menjadi lebih baik dan berkelanjutan. (Bambang Trihartanto 2014,: 261) Pengembangan kawasan merupakan salah satu kunci berkembangnya pariwisata yang menuntut adanya pengorganisasian yang dapat memadukan faktor alam, budaya dan fasilitas yang memadai (Tarasionak, 2014:33) Untuk mengoptimalkan mengembangkan bisnis di pedesaan dan mengatasi apa pun penghalang, diperlukan dukungan semua pihak, terutama dari masyarakat dan para ahli dan pemerintah lokal (Mahmudah Enny W, 2015:3)

Mengembangkan Jiwa Binis Petani

Untuk pengembangan ekonomi di sektor pertanian maka PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) mempunyai peran yang sangat strategis, akan tetapi hal ini tidaklah cukup dengan berbagai keterbatasan baik secara kualitas maupun kuantitas apabila dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan dan tantangan-tatangan yang dihadapi para petani. Paradigma Petani miskin, petani pekerjaan rendah sudah tidak pada zamannya lagi, paradigma itu akan dapat dirubah jika petani mempunyai skill yang cukup untuk menggali potensi yang ada di desa menjadi sumber ekonomi dapat dikembangkan menjadi sektor bisnis maka kita kenal Agribis. Bertani bukan sekedar bercocok tanam/berkebun akan tetapi bertani adalah berbisnis. Untuk itulah maka petani harus dikembangkan skillnya tanpa pengembangan skill maka nasib petani tidak akan berubah. Sumber daya manusia (SDM) sebagai agent of development penting untuk mendapatkan perhatian yang serius agar mempunyai skill yang dapat mendorong untuk berkeaktifitas dalam

mengembangkan teknik dalam budidaya pertanian yang dapat menghasilkan uang seperti sektor bisnis modern khususnya budidaya durian lokal. Karena SDM yang berkualitas merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa untuk memperlancar dan meningkatkan laju pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi aset yang sangat berharga sebagaimana di negara-negara maju yang miskin sumber daya alam akan tetapi kaya akan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi. Karena memperkuat SDM berarti memperkuat kontribusi, kemampuan dalam menopang bisnis itu sendiri sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kompetensinya.

Untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan petani diperlukan adanya sinergi berbagai pihak terutama sektor swasta yang sudah sukses dalam mengembangkan bisnis di sektor pertanian (agrobis) yang dapat memberikan bantuan secara manajemen baik produksi, pascaproduksi maupun pemasaran hasil pertanian. Hal ini agar petani mampu belajar bertani dengan pola manajemen bisnis sehingga akan mendorong untuk dapat menjadi wirausaha di sektor pertanian yang sukses. Agar jiwa kewirausahaan petani dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal maka diperlukan peran mediator. Mediator dapat berasal dari berbagai kalangan misalnya tokoh lokal, perguruan tinggi ataupun dari pemerintah lokal. Peran mediator menjadi penting karena selain masih adanya kendala-kendala komunikasi untuk mencari solusi yang integrative dan komprehensif, serta ide-ide baru karena disadari adanya keterbatasan-keterbatasan masing-masing pihak. Sinergisitas dapat terjadi karena apabila masing-masing pihak yang terlibat merasa diuntungkan secara materiil maupun nonmateriil. Salah satu cara untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan petani adalah dengan mengoptimalkan program pengembangan jiwa kewirausahaan petani sehingga diperlukan : peran Mediator. (Heru Irianto, 2014:77)

Agrobis Berbasis Komunitas

Kehidupan petani di Indonesia tidak lepas dari kehidupan berkelompok, karena selain itu menjadi ciri pokok dari kehidupan masyarakat pedesaan, juga petani dalam menghadapi masalah para petani akan bersama-sama untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada; misalnya permasalahan air, hama tanaman, biaya, budidaya tanaman maupun masalah lainnya yang akan tidak mudah jika ditangani oleh individu-individu petani secara sendiri-sendiri. Demikian pula petani di Wonosalam mempunyai kelompok tani akan tetapi selama ini masih sekedar kumpul secara rutinitas dan baru saja pada akhir-akhir ini ingin mengembangkan usaha pertaniannya agar dapat lebih maju hal ini terinspirasi oleh desa-desa lainnya di luar daerah yang begitu semangat dan majunya para petani dengan berbagai kerarifan lokalnya bersama-sama bergandeng tangan dengan semua pihak untuk memajukan desa.

Bisnis di sektor pertanian di pedesaan Indonesia akan dapat optimal apabila berbasis komunitas atau yang biasa dikenal sebagai *Social Bisnis*. Sesuai dengan konsepnya, bisnis sosial berbasis masyarakat atau *community-based social enterpris* (<https://www.dbs.com/indonesia-bh/blog/live-kind>). Pada Sosial bisnis akan lebih merasa dekat secara personal layaknya keluarga pada bisnis sosial yang satu ini karena pemberdayaannya yang bersifat *self-empowerment* yang memiliki tujuan bisnis untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Umumnya, bisnis sosial ini dapat ditemui dalam bentuk koperasi, Kelompok Tani, BUMDES (yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan karena adanya UU desa dan dana desa) untuk memberikan solusi dalam menumbuhkembangkan perekonomian desa. Pada bisnis sosial ini, orientasi memang ditargetkan pada kesinambungan dan pengembangan atau *sustainable development*. Sesuai orientasi pemberdayaannya, baik anggota maupun komunitas akan sama-sama mendapatkan manfaat walaupun dalam bentuk yang berbeda. Seperti di Wonosalam saat ini sedang dirintis pengemangan durian lokal melalui komunitas “Apduri” Asosiasi Petani Durian.

Dengan Sosial Bisnis diharapkan akan dapat menemukan solusi masalah-masalah yang selalu muncul untuk dapat dihadapi bersama. Suatu keniscayaan jika paradigma bisnis yang berbasis komunitas untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dengan tetap menjaga kerukunan dan ikatan sosial yang tinggi, mengingat masyarakat pedesaan masih bersifat komunal. Apalagi Mengembangkan kawasan agropolitan tentu partisipasi yang dapat melibatkan masyarakat menjadi penting. Dengan adanya Undang-Undang Desa maka untuk mengembangkan kawasan agropolitan, untuk mendorong agrowisata maka desa dapat memanfaatkan dana desa untuk membentuk BUMDES. Dengan demikian diharapkan dapat mensinerginya semua potensi yang ada baik masyarakat/ petani, kelompok bisnis/swasta serta pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi yang ada sehingga dapat berkembang dengan tetap dapat menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Bisnis berbasis komunitas dan di Era dunia yang semakin mengglobal pemanfaatan media sosial merupakan sarana utama dalam memasarkan suatu produk yang tidak bisa ditinggalkan. Apalagi pada saat ini sudah masuk pada revolusi industri 4.0. maka dalam mengembangkan kawasan agrowisata harus didukung dengan sistem *digital marketing* yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses segala informasi dan potensi yang dimiliki para petani maupun mempermudah dalam bertransaksi yang tidak lagi terpengaruh oleh jarak dan waktu. Dengan *digital marketing* berarti juga melibatkan masyarakat secara luas dengan berbagai komunitas, yang akan menjadi media promosi yang tidak perlu biaya tinggi akan tetapi efektif. Kesadaran pentingnya Teknologi Komunikasi dan Informasi yang biasanya disebut ICT (Information and Communication Technology), bukan hanya monopoli kalangan pengusaha besar saja tetapi juga bertumbuh di kalangan pengusaha kecil dan kekuatan-kekuatan masyarakat lain, seperti Koperasi, Kelompok Tani, dan Masyarakat biasa. ICT diyakini berperan penting dalam pengembangan bisnis, kelembagaan organisasi, dan juga mampu mendorong percepatan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Kini strategi efisiensi lebih menjanjikan yaitu peningkatan manfaat teknologi, seiring dengan lebih canggihnya traktor dan peralatan, adopsi teknologi peramalan cuaca, global positioning system (GPS), citra satelit dan bioteknologi. yang menarik dalam kajian ini adalah penggunaan internet dan peranan dalam pemasaran pada industri pertanian.

KESIMPULAN

Wonosalam sebagai salah satu kawasan Agropolitan di Kabupaten Jombang dan durian merupakan salah satu produk unggulannya maka sangat potensial untuk dikembangkan agar dapat mendorong tumbuhkembangnya Agrowisata di Kabupaten Jombang. Prinsip dasar pengembangan kawasan agropolitan akan sukses apabila disenergikan dengan pengembangan kawasan Agrowisata, dengan menggunakan pendekatan agribisnis.

Untuk dapat mendukung terciptanya kawasan agropolitan dan Agrowisata maka petani harus dikembangkan skillnya karena Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai *agent of development* penting untuk mendapatkan perhatian yang utama agar lebih kreatif untuk menggali potensi lokal untuk dapat mengembangkan budidaya durian yang lebih intensif. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) mempunyai peran yang sangat strategis, akan tetapi hal ini tidaklah cukup dengan berbagai keterbatasan baik secara kualitas maupun kuantitas apabila dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi para petani.

Untuk mengoptimalkan pengembangan Agrobis maka petani harus dikembangkan jiwa kewirausahaannya terlebih dahulu. Hal ini agar petani mampu belajar bertani dengan pola manajemen bisnis sehingga akan mendorong untuk dapat menjadi wirausaha di sektor pertanian yang sukses. Agar jiwa kewirausahaan petani dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal maka

diperlukan peran mediator. Mediator dan mentor dapat berasal dari berbagai kalangan misalnya tokoh local, pembisnis, perguruan tinggi ataupun dari pemerintah local

Agribis akan sukses apabila berbasis komunitas atau yang biasa dikenal sebagai *Social Bisnis*. Sesuai dengan konsepnya, bisnis sosial berbasis masyarakat atau *community-based social enterpris*. Pada Sosial bisnis akan lebih merasa dekat secara personal layaknya keluarga pada bisnis sosial yang satu ini karena pemberdayaannya yang bersifat *self-empowerment* yang memiliki tujuan bisnis untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Bisnis sosial ini dapat berupa koperasi, Kelompok Tani, BUMDES, dengan Sosial Bisnis diharapkan akan dapat menemukan solusi masalah-masalah yang selalu muncul untuk dapat dihadapi bersama. Suatu keniscayaan jika paradigma bisnis yang berbasis komunitas untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dengan tetap menjaga kerukunan dan ikatan sosial yang tinggi, mengingat masyarakat pedesaan masih bersifat komunal. Apalagi Mengembangkan kawasan agropolitan tentu partisipasi yang dapat melibatkan masyarakat menjadi penting. Dengan adanya Undang-Undang Desa maka untuk mengembangkan kawasan agropolitan, untuk mendorong agrowisata maka desa dapat memanfaatkan dana desa untuk membentuk BUMDES. Dengan demikian diharapkan dapat mensinerginya semua potensi yang ada baik masyarakat/ petani, kelompok bisnis/swasta serta pemerintah desa sehingga akan mempercepat terwujudnya agrowisata yang berbasis pada agropolitan tetap dapat menjaga nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Bhayangkara yang telah memberikan dukungan berupa pendanaan melaksanakan penelitian, Ucapan terima kasih kami ucapkan pula kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang salah satu tenaga pengajarnya ikut terlibat dalam penelitian ini, Ucapan terima kasih pula kami ucapkan kepada BalibangProv Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada masyarakat dan perangkat pemerintahan di Wonosalam yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arieta Siti, 2010, Community Based Tourism Pada Masyarakat Pesisir; Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Pemberdayaan Ekonomi Jurnal Dinamika Maritim Vol . 2 No.1 September

Enny W Mahmudah, J.Andy Hartanto, Rr Herini Siti Aisyah , Budiono , Implementation of Corporate Social Responsibility Policy (CSR) To Empower Small, Micro, Medium Economy (SMEs) IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 17, Issue 5.Ver. IV (May. 2015), www.iosrjournals.org DOI: 10.9790/487X-17540103 www.iosrjournals.org | Page

Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek, Alenka Fikfak, ,Turi Zem In Poselitveni Vzor Ci Na Podeželj U , AR 2012/1, UKKm , 71113, 33848, Cobis2, Preejoto 2012

Irianto Heru ,2016, , Rr. Herini Siti Aisyah, J. Andy Hartanto, Mahmudah Enny W, The Role of Universities in the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) to Develop Entrepreneurship in Indonesia, ISSN 1927-517x E-ISSN 1927-5188 Published by Canadian Center of Science and Education Vol 5, No 1: 56 <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/par/article/view/59415/31853>

Irianto Heru, Hj. Mahmudah Enny W., Rr Herini Siti Aisyah, L. Budi Kagramanto, SH., MH. MM, Model Design of the Implemnetation of Corporate Social Responsibility (Csr) Program in Response to Educated Unemployment , IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 9, Ver. VIII (Sep. 2014), PP 75-77 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org/http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue9/Version-8/L019987577.pdf:77

Istoriyah, Lilis Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Studi di Kecamatan Ciamis
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/669/559>

Janočková Jana, Maria Koščová, Jana Jablonska , 2015, The ability of tourist natural trails to resist Tourism load and possibilities for reducing The environmental impacts : case stu dy Of the slovak paradise national park (slovakia) Ekologia, 2015, Vol. 34, No. 3, p. 281–292, 2015 :281

Kiswara Adi Sucipto 2018, Menggali Semua Potensi Ekonomi Desa , Mengoptimalkan dan menggali potensi desa serta meningkatkan akses pasar merupakan kunci utama untuk memperoleh kemajuan desa Kompas 25 April

Maaijens Sef R, Peter Nijkamp and Kees Van Montfort, Explanatory Meta-analysis for the Comparison and Tranfer of Regional Tourist Income Multipliers, Faculty of Economics, Free University Amsterdam, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam :841

Sutjahjo Suyitman, , Analisis Tingkat Perkembangan Kawasan Agropolitan Desa Perpat Kabupaten Belitung Berbasis Komoditas Unggulan Ternak Sapi Potong Analysis of Area Development of Perpat Agropolitan Village, District of Belitung Based on Beef Cattle Commodities

Sparks, Donald L , Tourism in the New South Afrika: Social Responsibility and the Tourist Experience , African Studies Review, Sep 2005, 48,2 Art & Humanities Database :147

Tarasionak, 2014, Strategic planning of tourist destinations: new approach towards territorial organization of tourism in Belarus , Geografijos metraštis 47, 2014 ISSN 23358610 :33)

Trihartanto Bambang, Suroyo Handayan , 2014, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol. 25, no. 3, hlm. 243-261, Desember 2014, ISSN 0853-9847 © 2014 SAPPK ITB dan IAP, Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wiwandari 261

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Koran Surya, Petani Garap Sawah 200 Hektare, 25 April 2018,. Dengan menggunakan sistem *Cooperatif Farming* peningkatan nilai produk dapat mencapai 52 %, ini merupakan konsep agropreneur

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
http://www.kompasiana.com/arisahmadrisadi/badan-usaha-milik-desa-BUMDES-harapan-baru_5510db76813311d334bc733

<https://www.dbs.com/indonesia-bh/blog/live-kind/kenali-dulu-ragam-bisnis-sosial-di-bawah-ini-sebelum-anda-memulainya.pagee>

<http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol17-issue5/Version-4/A017540103.pdf> : PP 01-03

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN INOVASI DESA

THE ROLE OF THE SIDOARJO REGENCY OF COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT DEPARTMENT IN IMPROVING VILLAGE INNOVATION

Fitriyatus Sholihah

Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo – 61211

fitriyasholihah@gmail.com

Munari Kustanto

Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo – 61211

munarikustanto@gmail.com

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 menjadi tantangan baru dalam pengembangan ekonomi global, termasuk juga ekonomi desa. Inovasi menjadi salah satu kunci sukses dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Tulisan ini bertujuan mengupas peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan inovasi desa di Kabupaten Sidoarjo. Memperhatikan program yang akan dievaluasi saat ini juga sedang dilaksanakan, maka tulisan ini menggunakan pendekatan evaluasi program kualitatif. Hasil dari kegiatan evaluasi yang dilakukan menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo memiliki program yang dapat meningkatkan inovasi desa. Meskipun demikian masih diperlukan adanya perbaikan indikator output agar dapat mendorong iklim inovasi desa di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : indikator, inovasi desa, revolusi industri 4.0

ABSTRACT

The Industrial Revolution 4.0 became a new challenge in the development of the global economy, including the village economy. Innovation is one of the keys to success in facing challenges in the era of disruption. This article aims to explore the role of the Community and Village Empowerment Service in improving village innovation in Sidoarjo Regency. Paying attention to the program that will be evaluated is currently being implemented, so this paper uses a qualitative program evaluation approach. The results of the evaluation activities conducted found that the Sidoarjo Regency Community and Village Empowerment Service had programs that could improve village innovation. Even so, there is still a need to improve output indicators in order to encourage village innovation climate in Sidoarjo Regency.

Kata Kunci : indicator, village innovation, industrial revolution 4.0

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang memasuki fase baru yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Sebuah era yang membuka peluang bagi terjadinya perubahan yang sangat besar, tiba-tiba bahkan tidak jarang sangat mengejutkan. Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom dunia asal Jerman sekaligus pendiri dan Ketua Eksekutif *World Economic Forum* (WEF). Melalui bukunya “*The Fourth Indust Revolusi Industrial Revolution*”, dijelaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 telah berhasil mengubah secara fundamental hidup dan kerja manusia (Schwab, 2016). Skala, ruang lingkup dan kompleksitas Revolusi Industri 4.0 jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Hal ini yang menjadikan Revolusi Industri 4.0 sangat berbeda dengan revolusi industri sebelumnya.

Bahkan Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian serius untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 sebagaimana disampaikan berikut ini :

“Digitalisasi, computing power dan data analytic telah melahirkan terobosan-terobosan yang mengejutkan di berbagai bidang, yang men-disrupsi (mengubah secara fundamental) kehidupan kita. Bahkan men-disrupsi peradaban kita, yang mengubah lanskap ekonomi global, nasional, dan daerah serta lanskap politik global, nasional dan daerah. Lanskap interaksi global, nasional, dan daerah. Semuanya akan berubah” (Online/Ant, 2018).

Memperhatikan pernyataan tersebut, maka inovasi menjadi kunci sukses tidaknya mengarungi Revolusi Industri 4.0 yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dihadapi.

Hal ini senada dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) yang terangkum dalam sembilan program prioritas bertajuk Nawacita. Dalam Nawacita Program ke-3 disebutkan bahwa pemerintah Jokowi-JK ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan program tersebut diperlukan perencanaan dan inovasi dari setiap kepala daerah dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah (Simpul Perencana, 2017).

Dalam upaya mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah ada 3 aktor utama yang berperan dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa, yaitu (1) Pemerintah Kabupaten sebagai perencana, fasilitator, pengawas dan evaluator, (2) Pemerintah kecamatan sebagai fasilitator antara pemerintah kabupaten dan desa. Dan (3) pemerintah desa dengan upaya meliputi menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan seperti memberikan pelatihan/pendidikan kepada masyarakat, mendirikan koperasi simpan pinjam serta membangun sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat (UH Andini, 2017).

Sebagai bagian dari kehidupan global yang terus berubah, desa juga dituntut untuk terus berinovasi. Hal ini sangat diperlukan guna menghadapi tantangan jaman yang semakin tidak mengenal batas. Sudah menjadi tugas pemerintah tentunya untuk dapat memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap desa. Harapannya keberadaan desa dapat memainkan peran yang tidak kalah penting dalam pembangunan.

Dalam upaya mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 105 Tahun 2018, dinas ini melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Inovasi desa tentunya menjadi salah satu substansi yang juga menjadi tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

Tulisan kali ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana program dan kegiatan beserta indikatornya berkontribusi terhadap peningkatan inovasi desa. Sebagaimana diketahui bahwa penentuan indikator program dan kegiatan dalam sebuah organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut guna mencapai tujuannya. Demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, berbagai indikator yang dipasang diharapkan dapat mendukung capaian organisasi, salah satunya adalah inovasi desa.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan beserta indikator menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini guna memastikan keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo

memberikan kontribusi bagi pengembangan inovasi desa. Dengan demikian desa di Kabupaten Sidoarjo juga dapat berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan tuntutan jaman.

Studi tentang peran instansi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Menurut Ramadhan (2010) baiknya peran BPMPD memberikan pengaruh positif bagi kinerja aparatur pemerintah desa. Dalam hal ini mereka menjadi lebih tahu mengenai tugas dan fungsinya.

Studi lain juga mengupas tentang implementasi tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2013) menemukan bahwa implementasi tupoksi BPMPD dipengaruhi oleh faktor peran serta masyarakat desa, LSM, lembaga ormas pedesaan, sarana prasarana, SDM di BPMPD, aparat pemerintah desa, dan pendanaan. Meskipun tupoksi BPMPD sebagian besar telah berhasil diimplementasikan, tetapi masih terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal.

Studi yang mengupas peran institusi pemberdayaan masyarakat dan desa dan pembangunan desa juga telah ada. Salah satunya adalah penelitian Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. Penelitian yang dilakukan di Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ini menemukan bahwa peran yang dijalankan BPMPD telah sesuai dengan regulasi yang ada. Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan juga telah terlaksana 100% sebagaimana indikator yang ada. Ketersediaan anggaran menjadi faktor pendukung, sedangkan kurangnya pemahaman aparat menjadi faktor penghambat (Firmansyah, Amin, & Irawan, 2014).

Studi yang terkait dengan inovasi desa juga telah ada, salah satunya adalah penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Menurut Nurgiarta & Rosdiana (2019), upaya peningkatan SDM masih belum didukung oleh keberadaan infrastruktur yang memadai. Akibatnya masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Adapun inovasi yang dilaksanakan telah mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memaksimalkan potensi lokal desa.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih membahas permasalahan implementasi tugas pokok dan fungsi instansi pemberdayaan masyarakat desa, maka studi ini akan memfokuskan pada upaya mengoptimalkan peran instansi dengan menetapkan indikator yang relevan. Demikian pula dengan permasalahan inovasi, maka tulisan ini lebih pada upaya merumuskan indikator program dan kegiatan yang koheren dengan peningkatan inovasi desa. Tulisan ini dengan demikian berupaya mengisi kekosongan dari berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan evaluasi program kualitatif, mengingat program yang akan dievaluasi saat ini juga sedang dilaksanakan. Evaluasi program kualitatif merupakan suatu evaluasi yang memfokuskan pada bagaimana memperbaiki mekanisme/proses suatu program dalam capaian sasaran pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam kaitan peningkatan inovasi desa yang menjadi tugas dari Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Tahapan evaluasi dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran kegiatan dengan pencapaian indikatornya, baik dalam hal tupoksi maupun aplikatif kegiatan

Pembahasan pada tulisan ini tidak dilakukan terhadap keseluruhan program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Tulisan ini lebih memfokuskan pada salah satu bidang yang terkait dengan pembinaan inovasi desa yaitu Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Sebagai informasi bidang ini mempunyai tugas antara lain : (a) Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; (b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; (c) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Mendorong Inovasi Desa Melalui Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya mengidentifikasi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan inovasi desa, maka terlebih dahulu akan disampaikan mengenai deskripsi program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang menjadi *leading sector* bagi penumbuhan inovasi desa. Program ini dibentuk guna mendukung pencapaian sasaran ‘meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan’, selain keberdayaan dari aspek kelembagaan.

Kinerja program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat ini sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, kinerja program ini ditentukan oleh kegiatan : (i) Peningkatan keberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat, di mana terdapat dua indikator yaitu : (a) Jumlah Lembaga Keuangan Masyarakat yang dibina; dan (b) Jumlah Lembaga Keuangan Masyarakat yang dimonev; (ii) Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Usaha Ekonomi Masyarakat, di mana terdapat dua indikator yaitu : (a) Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina; dan (b) Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi; (iii) Pemanfaatan sumber daya pedesaan, di mana terdapat dua indikator yaitu : (a) Jumlah Peserta Inovasi Masyarakat yang difasilitasi; dan (b) Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi; (iv) Peningkatan kapasitas pendamping masyarakat, di mana terdapat dua indikator yaitu : (a) Jumlah Program Instansi Pemerintah lain yang difasilitasi; dan (b) Jumlah pendamping masyarakat yang dibina; serta (v) Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (DBHCHT) dengan indikator Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.

Berdasarkan data-data tersebut, kemudian dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan beserta indikatornya. Memperhatikan indikator program, dari tiga indikator yang dipasang semuanya perlu dilakukan perbaikan karena kurang mencerminkan kinerja sebuah program. Selanjutnya ketika memperhatikan kegiatan dalam program ini, dari lima kegiatan yang ada tidak semuanya memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan inovasi desa. Tercatat hanya dua kegiatan yang koheren dengan upaya peningkatan inovasi desa di Kabupaten Sidoarjo, yakni kegiatan (ii) dan (iii). Pembahasan selanjutnya dengan demikian akan lebih difokuskan pada evaluasi terhadap indikator di kedua kegiatan tersebut.

Hasil evaluasi terhadap dua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang selama ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya sebatas kegiatan rutinitas tahunan. Sebagai contoh bentuk dari kegiatan (ii) indikator yang pertama (a) Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang dibina berupa pembinaan kepada lembaga usaha ekonomi masyarakat pedesaan (UPPKS, UED-SP, P3 EL, BUMDES). Kegiatan ini dilakukan setiap tahun tanpa adanya tindak lanjut dari hasil pembinaan kepada peserta. Kesan yang ditangkap dari kegiatan tersebut bahwa pembinaan dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban tanpa melihat seberapa paham peserta pembinaan dengan materi yang disampaikan dan tindak lanjut apa yang dilakukan setelah dilakukan pembinaan.

Sedangkan untuk indikator yang kedua (b) Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi, bentuk kegiatan yang selama ini dilakukan hanya berupa surat pemberitahuan kepada lembaga keuangan desa adanya kredit dana pinjaman bergulir dari Bank Jatim. Padahal seyogyanya dana ini sangat berguna bagi lembaga keuangan desa sebagai penguatan modal usaha guna meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa. Sangat disayangkan apabila hanya sebatas surat pemberitahuan tanpa dilakukan pendampingan pengajuan dan tindak lanjut pemanfaatan dana tersebut sehingga terkesan seperti biro informasi saja. Padahal salah satu tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, dalam arti lain mengawal, mendampingi dan membantu desa dalam memanfaatkan dana tersebut.

Untuk kegiatan (iii) indikator yang pertama (a) Jumlah Peserta Inovasi Masyarakat yang difasilitasi, bentuk kegiatan berupa “Pekan Bursa Inovasi Desa” dan dilakukan setiap tahun. Jumlah desa yang mengikuti kegiatan tersebut menjadi inputan untuk capaian target indikator setiap tahunnya. Sebagai instansi pemerintah yang diberi tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, di mana salah satunya adalah menumbuhkembangkan inovasi desa. Memperhatikan hal tersebut maka kegiatan yang dilakukan masih sangat jauh dari harapan, khususnya untuk mendorong dan meningkatkan inovasi demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat Sidoarjo.

Ouput kegiatan yang masih berfokus pada kuantitas peserta inovasi tentu belum berkontribusi langsung kepada peningkatan kemandirian ekonomi desa. Apalagi jika melihat salah satu tugas pokok dan fungsi yang diemban adalah mendorong inovasi berbasis sumberdaya potensial pada masing-masing desa. Diharapkan potensi sumberdaya yang ada pada masing-masing desa dapat dioptimalkan melalui sentuhan inovasi. Dengan demikian inovasi dapat memberikan nilai lebih bagi sumberdaya potensial yang ada di desa sekaligus memberikan daya dukung bagi upaya penguatan ekonomi desa. Kekuatan ekonomi desa inilah yang akan menjadi modal penting bagi pemberdayaan dan pembangunan desa.

Memperhatikan berbagai uraian di atas, maka dilakukan perbaikan dan reformulasi terhadap indikator program dan kegiatan. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan perbaikan dan reformasi indikator program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Indikator Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR	PERBAIKAN	FORMULASI/DESKRIPSI HASIL PERBAIKAN
Program	Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : a. UPPKS Berkembang	Persentase UPPKS Berkembang	
		Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : b. UED-SP Berkembang	Persentase UED-SP Berkembang	
		Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : c. P 3 EL Berkembang	Persentase P 3 EL Berkembang	
		Persentase Usaha Ekonomi masyarakat pedesaan yang Berkembang : d. BUMDES Berkembang	Persentase BUMDES Berkembang	
Kegiatan	Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina	<i>Persentase usaha ekonomi masyarakat yang menindaklanjuti hasil pembinaan</i>	<i>Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan</i> $\frac{\text{Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina}}{\text{Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dibina}} \times 100\%$
		2. Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		
Kegiatan	Pemanfaatan Sumber Daya Pedesaan	1. Jumlah Peserta Inovasi Masyarakat yang difasilitasi	<i>persentase inovasi teknologi yang memanfaatkan sumber daya/potensi pedesaan</i>	<i>Jumlah Inovasi Teknologi Yang Memanfaatkan Sumber Daya/Potensi Pedesaan</i> $\frac{\text{Jumlah Inovasi Teknologi Yg Ikut Lomba TTG}}{\text{Jumlah Inovasi Teknologi Yg Ikut Lomba TTG}} \times 100\%$

Memperhatikan tabel 1 di atas, terlihat bahwa dua indikator yang dipasang untuk kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Usaha Ekonomi Masyarakat kurang dapat menggambarkan kinerja output. Mengingat kedua indikator tersebut hanya memfokuskan capaian pada jumlah usaha ekonomi. Apabila kedua indikator tersebut yang digunakan, maka inovasi desa kurang mendapat energi sebab hanya berfokus pada kuantitas usaha ekonomi yang dibina. Dengan demikian indikator tersebut perlu diperbaiki dengan mengganti menjadi *Persentase usaha ekonomi masyarakat yang menindaklanjuti hasil pembinaan*.

Adapun untuk dua indikator yang dipasang pada kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Pedesaan, terdapat satu indikator yang perlu diperbaiki. Indikator tersebut adalah Jumlah Peserta Inovasi Masyarakat yang difasilitasi. Apabila indikator ini yang dijadikan acuan maka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo hanya sebatas penyelenggara lomba. Selain itu potensi yang ada di desa juga belum menjadi perhatian dalam melakukan inovasi, dampaknya usaha ekonomi masyarakat desa tidak terlalu terdampak. Dengan demikian perlu dilakukan perbaikan indikator menjadi *persentase inovasi teknologi yang memanfaatkan sumber daya/potensi pedesaan*.

Melalui perbaikan kedua indikator kegiatan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dapat mendorong tumbuh kembangnya inovasi desa. Di samping itu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki desa, maka inovasi juga dapat memberikan dampak bagi peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa. Manakala usaha ekonomi masyarakat desa meningkat, secara tidak langsung masyarakat desa menjadi lebih berdaya.

KESIMPULAN

Memperhatikan hasil pembahasan di atas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Indikator program yang dipasang dalam Rencana Strategis memperlihatkan masih perlu ada perbaikan agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu untuk kegiatan yang terkait dengan peningkatan inovasi desa, masih perlu dilakukan perbaikan indikator antara lain : (a) indikator pembinaan bukan terfokus pada kuantitas, tetapi memastikan sejauhmana pembinaan yang diberikan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat; dan (b) indikator terkait dengan inovasi juga harus berfokus pada kualitas bukan kuantitas sehingga mampu mengoptimalkan sumberdaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Bidang Litbang dan Data Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus berkarya.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M., Amin, J., & Irawan, B. (2014). Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara). *EJournal Administrative Reform*, 2(4), 2671–2682.
- Jaya, K. (2013). *Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar*. Universitas Hasanuddin.
- Nurgiarta, D. A., & Rosdiana, W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Jurnal Mahasiswa*, 1–8.

- Retrieved from
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/27137/24838>
- Online/Ant, R. W. (2018). *Jokowi Ingin Masyarakat Manfaatkan Revolusi Industri 4.0*. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/read171019/jokowi-ingin-masyarakat-manfaatkan-revolusi-industri-40.html>
- Ramadhan, S. (2010). *Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Simpul Perencana Vol 30 Tahun 14. (2017). *Perlunya Inovasi dan Kreativitas Dalam Pembangunan Daerah*
- Andini UH, Mochamad SalehS, Ainul Hayat. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No.12, Hal 7-11. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/80782-ID-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-dari-des.pdf>



KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DESA YANG BERDAYA SAING

CORE COMPETENCE OF REGIONAL INDUSTRY FOR THE DEVELOPMENT OF A COMPETITIVE VILAGE ECONOMY

Edy Santoso^{1*}

¹ Universitas Jember, Jl. Kalimantan No. 37 Jember 68121

* E-mail: santoso_edy@yahoo.com

ABSTRAK

Secara empiris wilayah yang berkembang selalu didukung dengan industri-industri yang memiliki daya saing. Industri akan berkembang dengan baik jika memiliki kompetensi unggulan yang bersifat khas daerah. Kompetensi inilah yang menjamin keberlanjutan aktivitas ekonomi wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi inti industri daerah dan strategi pengembangan kompetensi inti untuk industri yang berdaya saing. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil survey dengan lokasi penelitian di Kabupaten Jember. Penentuan kompetensi inti dilakukan dengan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Sedangkan penyusunan strategi pengembangan industri menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk unggulan prioritas adalah sangkar burung. Kompetensi inti dalam industri sangkar burung di Kabupaten Jember adalah teknologi dan SDM. Efisiensi produksi dan perbaikan kualitas produk akan tercapai dengan adanya teknologi yang lebih baik. SDM sebagai pelaksana industri sangkar burung juga perlu diperhatikan dalam pengembangan industri sangkar burung. Strategi jangka pendek dalam rangka pengembangan industri sangkar burung adalah ditekankan pada kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dan penataan/penguatan kelembagaan. Pada jangka menengah ditekankan pada peningkatan ketrampilan tenaga kerja, teknologi, permodalan, dan promosi. Sedangkan jangka panjang ditekankan pada program pengembangan kluster dan bahan baku.

Kata Kunci: Kompetensi Inti Industri Daerah, AHP, SWOT, Kabupaten Jember

ABSTRACT

Empirically, developing regions are always supported by industries that have competitiveness. The industry will grow up if it has competencies based on the unique of the region. The core competency will guarantees to the sustainability of regional economic activities. This study aims to analyze the core competencies of regional industries and strategies for developing core competencies for competitive industries. The study uses primary data obtained from survey results with research locations in Kabupaten Jember. The determination of core competencies is carried out using the Analytic Hierarchy Process (AHP). While the preparation of industrial development strategies using SWOT analysis. The results showed that the priority product was bird cage. The core competencies in the bird cage industry in Kabupaten Jember are technology and human resources. Production efficiency and product quality improvement will be achieved with better technology. Human Resource as the executor of bird cage industry also needs to be considered in the development of bird cage industry. The short-term strategy in the context of developing a bird cage industry is to emphasize training activities to increase business actors' knowledge and institutional arrangement/ strengthening. In the medium term the emphasis is on improving the skills of the workforce, technology, capital and promotion. While the long-term emphasis is on the cluster development program and raw materials.

Keywords: Core Competence, Analytic Hierarchy Process (AHP), SWOT, Kabupaten Jember

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah masih rendahnya daya saing industri di pasar internasional. Menurut IMD Competitiveness Report, pada

tahun 2019 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi 32 dari 63 negara. Meskipun peringkat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 dimana Indonesia berada pada posisi 43. Namun, posisi Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia (22) dan Thailand (25).

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah (otonomi daerah), dalam Perpres no. 28 Tahun 2008, mengamanatkan setiap daerah untuk mengembangkan kompetensi inti industri daerah. Kompetensi Inti Industri Daerah adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian Propinsi dan Kabupaten/Kota menuju kemandirian.

Untuk meningkatkan daya saingnya, Pemerintah Daerah perlu mengetahui kompetensi intinya dan mengembangkan kompetensi inti tersebut. Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi inti adalah sekumpulan kemampuan terintegrasi yang dimiliki daerah untuk dapat membangun daya saing daerahnya dengan keunikan yang dimiliki oleh daerah (Depperin, 2007). Pemilihan kompetensi inti dari suatu wilayah akan berimplikasi wilayah tersebut berkonsentrasi pada komoditi (produk) tersebut. Dengan kata lain, wilayah tersebut menjadi terspesialisasi.

Konsep kompetensi inti dipopulerkan oleh Prahalad dan Hamel (1990), didasarkan pada serangkaian tes yang mengidentifikasi sumber daya organisasi yang menawarkan nilai strategis terbesar. Kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi pembelajaran, yang memberikan manfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis.

Sebagai sektor yang memproduksi barang dan jasa, sektor industri harus menjadi sektor yang memiliki daya saing sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang memiliki kompetensi. Kementerian perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. *Pertama*, pendekatan *top down* melalui pengembangan 35 klaster industri prioritas yang memiliki total output 78 persen dan total ekspor 83 persen. *Kedua*, pendekatan pendekatan *bottom up* yaitu melalui penetapan kompetensi inti industri (model KIID) yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing.

Kompetensi inti daerah merupakan sekumpulan sumber daya dan kemampuan (aset-aset) daerah yang memiliki kekhasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan daerah. Keunggulan atau keunikan yang dimiliki tiap wilayah atau daerah dapat membuat pesaing kesulitan untuk menirunya (Chumaira et al. 2010). Dengan mengambil pemikiran mengenai konsep *one village one product* (OVOP) berdasarkan kompetensi berbasis kekhasan produk yang dikembangkan oleh Gubernur Hiramatsu di daerah Oita-Jepang dengan prinsip dasar OVOP yaitu pikiran global kegiatan lokal, usaha mandiri dan kreativitas, pengembangan sumberdaya manusia. Tujuan dari gerakan ini adalah memperbaiki atau menyempurnakan sumber-sumber atau produk-produk lokal sedemikian sehingga dapat diterima oleh pasar internasional (Matsui, 2019).

Sementara itu pada tataran nasional Indonesia, konsep di atas diadopsi menjadi SAKA SAKTI (satu kabupaten/kota satu kompetensi inti) yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Martani Huseini. Menurutnya untuk membangun daya saing daerah diperlukan penciptaan kompetensi inti bagi daerah tersebut. Hal ini diperlukan agar seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut terfokus pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti. Dengan kata lain, kompetensi inti dapat digambarkan sebagai sesuatu yang unik, khusus, sulit ditiru, dan lebih unggul dalam kompetisi (Nurchahyo et al. 2011).

Kabupaten Jember memiliki cukup banyak industri, terutama industri kecil dan menengah. Peranan sektor industri di Kabupaten Jember terhadap perekonomian daerah cukup signifikan yaitu

adalah 7.3 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,55 persen pada tahun 2013 (BPS, 2011-2014). Sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian wilayah, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan daya saing sektor industri ini melalui pengembangan kompetensi inti industri daerah sehingga diharapkan dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun pasar global yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan kajian kompetensi inti industri daerah, (2) menyusun strategi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Kabupaten Jember.

Pembahasan selanjutnya dari tulisan ini adalah terkait dengan metodologi yang digunakan, temuan hasil penelitian dan pembahasan serta penyampaian kesimpulan dari penelitian ini.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 di Kabupaten Jember yang meliputi 31 kecamatan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil survei lapang, melalui suatu metode pengumpulan data yang telah dirancang oleh peneliti, dengan menggunakan instrumen kuisioner dan wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dan konsultasi publik (FGD). Konsultasi publik ataupun FGD diperlukan untuk menjaring masukan atau saran dari berbagai *stakeholders* yang terlibat. Dalam penelitian ini digunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan kompetensi inti industri di Kabupaten Jember dan analisis SWOT untuk menyusun strategi pengembangan kompetensi inti tersebut.

Analytical Hierarchy Process (AHP) diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. AHP merupakan sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Karena menggunakan input persepsi manusia, AHP dapat digunakan untuk mengolah data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi obyektif dan multi kriteria yang didasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Dalam perkembangannya AHP tidak hanya digunakan untuk menentukan prioritas pilihan-pilihan dengan banyak kriteria.

Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah analisis yang dilakukan terhadap kemungkinan pengembangan kompetensi inti industri daerah dilihat berdasarkan pada potensi, kendala, peluang dan tantangan pembangunan dan pengembangan kompetensi inti industri daerah. Dalam pelaksanaan analisis SWOT dilakukan dengan membedakan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam hubungannya dengan pengembangan industri terpilih di Kabupaten Jember. Dengan analisis SWOT tahapan faktor-faktor berpengaruh dalam pengembangan industri akan ditemukan empat strategi.

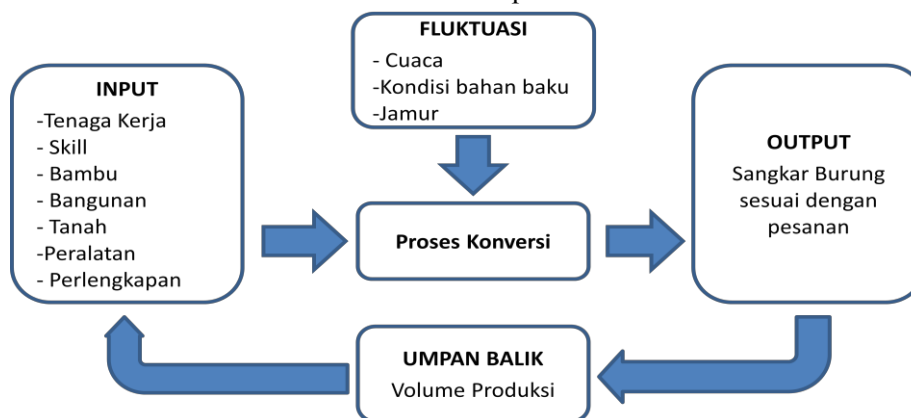
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Inti Industri

Berdasarkan kebijakan pembangunan industri Jawa Timur, Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan potensi produk unggulan di tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Timur dalam rangka pengembangan industri unggulan melalui kebijakan pengembangan kompetensi inti daerah. Untuk Kabupaten Jember, produk unggulan yang telah ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah adalah produk unggulan sangkar burung. Terdapat beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi sangkar burung antara lain Kecamatan Sukowono, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Ledokombo dengan total jumlah unit usaha

mencapai 180 pada tahun 2014. Sistem nilai generik menggambarkan aktivitas di sepanjang rantai nilai, mulai dari rantai nilai pemasok hingga rantai nilai pembeli. Masing-masing memiliki peranan yang terkait satu dengan lainnya membentuk aktivitas ekonomi bersama. Secara generik, peta aktivitas dalam rantai nilai industri sangkar burung dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 1. Peta Aktivitas Operator Rantai Nilai



Penelitian ini lebih fokus pada pemetaan variabel-variabel yang menjadi kompetensi inti dari industri sangkar burung di Kabupaten Jember dan strategi pengembangan kompetensi inti tersebut. Pemilihan kompetensi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti keunikan, daya saing, keterbukaan terhadap pasar baru, dan kemanfaatan yang lebih baik bagi pelanggan. Penetapan kriteria kompetensi dan sub kompetensi ini berdasarkan preferensi dari para narasumber pada saat dilakukan wawancara dan didiskusikan lagi pada FDG. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Dari analisis AHP diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Kriteria Kompetensi

No.	Kriteria	Skor Bobot
1.	Unik	0,066
2.	Daya Saing	0,543
3.	Keterbukaan	0,276
4.	Manfaat	0,116

Dari hasil analisis diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengembangkan industri sangkar burung aspek yang relatif penting untuk diperhatikan adalah aspek daya saing dengan nilai skor 0,543 berikutnya adalah aspek keterbukaan terhadap pasar baru dengan nilai skor 0,276 kemudian manfaat yang lebih baik dengan skor 0,116 dan yang terakhir adalah unik dengan skor 0,066.

Secara keseluruhan pengembangan industri sangkar burung berdasarkan empat kriteria diatas yaitu kriteria keunikan, daya saing, keterbukaan, dan manfaat, pada level sub kriteria, maka kompetensi yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan analisis AHP adalah teknologi dengan skor 0,245 dan SDM dengan skor 0,195. Ini berarti untuk mengembangkan industri sangkar burung perlu menekankan pada aspek teknologi dan SDM disamping aspek lainnya. Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian kompetensi berdasarkan keseluruhan kriteria.

Tabel 2. Hasil Pengujian Kompetensi Berdasarkan Keseluruhan Kriteria

No.	Sub Kriteria	Skor Bobot	Rangking
1.	Teknologi	0,245	1
2.	Sumberdaya Manusia	0,195	2
3.	Prospek Pasar	0,145	3
4.	Infrastruktur	0,114	4
5.	Budaya	0,113	5
6.	Pengembangan Ekonomi	0,112	6
7.	Sumberdaya Alam	0,075	7

Untuk pengembangan kompetensi inti daerah maka perlu diidentifikasi beberapa faktor strategis internal dan eksternal dari industri sangkar burung di Kabupaten Jember. Faktor strategis internal dan eksternal dari industri sangkar burung dirangkum dalam Tabel 3 berikut. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan dari industri sangkar burung tersebut, sedangkan faktor strategis eksternal dari industri sangkar burung terdiri dari peluang dan ancaman terkait dengan pengembangan industri ini.

Tabel 3. Analisis Matrik SWOT

Faktor Strategis Internal Faktor Strategis Eksternal	Kekuatan (Strengths) <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja trampil - Tenaga Kerja Banyak dan murah - Ketrampilan Turun Temurun - Ketersediaan bahan baku - Berpotensi menjadi kluster ang berdaya saing tinggi 	Kelemahan (Weaknesses) <ul style="list-style-type: none"> - Permodalan - Teknologi sederhana - Tingkat ketergantungan - Kualitas relatif rendah - Kelembagaan belum optimal - Inovasi dan desain - Manajemen organisasi dan usaha yang sederhana - Pengetahuan rendah tentang legal aspek
	Peluang (Opportunities) <ul style="list-style-type: none"> - Menyerap tenaga - Peningkatan kualitas teknologi - Ketersediaan pasar - Pengembangan produk berkualitas dan bervariasi 	Strategi S-O <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan ketrampilan pekerja - Kreatifitas desain - Efisiensi produksi - Membuka ruang pamer - Kerjasama dengan pihak terkait
	Ancaman (Threats) <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kompetitor dari daerah lain berkenaan dengan harga, kualitas dan desain 	Strategi W-O <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan produk - Meningkatkan kreatifitas - Fasilitas kredit lunak - Pengadaan alat produksi yang lebih baik
	Strategi S-T <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan brand dan paten - Pengelolaan keuangan - Seleksi bahan baku - Promosi intensif - Insentif bagi pengrajin 	Strategi W-T <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama dengan pihak terkait - Memperkuat organisasi - Memutus ketergantungan dengan pemasok bahan baku

Pembahasan Kompetensi inti Kabupaten Jember

Industri sangkar burung yang ada di Kabupaten Jember kebanyakan masih merupakan industri rumahan di mana tenaga kerjanya sebagian besar masih saudara sendiri atau tetangga setempat. Sebagian besar Industri ini masih belum terdaftar pada dinas perindustrian dan perdagangan setempat. Mengandalkan teknologi sederhana dalam proses produksi dengan ketrampilan yang diperoleh secara turun-temurun, industri ini mampu bertahan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pelakunya. Berdasarkan hasil analisis, keberhasilan pengembangan industri sangkar burung akan berpeluang semakin besar apabila mempertimbangkan beberapa aspek seperti keunikan, daya saing, keterbukaan dan manfaat dengan memperhatikan skala prioritasnya. Secara berurutan adalah aspek-aspek tersebut adalah: pertama, upaya meningkatkan daya saing dengan produk sejenis baik daya saing dalam hal harga maupun kualitas perlu dilakukan mengingat cukup banyaknya kompetitor dari wilayah lain untuk produk sejenis. Kedua, memperluas jangkauan penjualan (keterbukaan) dari produk sangkar burung yang dihasilkan. Selama ini pemasaran produk industri sangkar burung masih terbatas pada wilayah Jawa Timur, perlu membuka peluang untuk pemasaran di luar Jawa Timur. Ketiga, meningkatkan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dari pemakaian produk yang dihasilkan. Keempat, memperhatikan ciri khas atau keunikan produk yang dihasilkan oleh industri ini. Untuk menjadi produk yang sustainable maka harus ada karakteristik lokal yang melekat pada produk tersebut. Produk tanpa lokalitas tidak menjamin keberlanjutannya (Matsui, 2019).

Berdasarkan keseluruhan kriteria, dalam rangka pengembangan industri sangkar burung maka alternatif kompetensi yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut: (1) Teknologi, faktor teknologi ini berkaitan dengan teknologi produksi sehingga diharapkan dapat memproduksi sangkar burung dengan efisien dan kualitas yang lebih baik yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari sangkar burung yang dihasilkan, (2) Sumberdaya Manusia (SDM), kemampuan ketrampilan SDM sebagai pelaku dari industri ini perlu juga dibangun agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga dan meningkatkan daya saing, menurut Triharini et al. (2014) SDM memegang peranan penting terkait pengembangan desain produk yang dapat memahami kebutuhan pasar sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional, (3) Prospek Pasar, faktor prospek pasar ini berkaitan dengan peluang pasar yang cukup luas dan terserapnya produk di pasar, dengan aspek ini yang keterbukaan terhadap pasar baru akan lebih cepat tercapai, (4) infrastruktur, infrastruktur meliputi kelembagaan industri sangkar burung dan infrastruktur ekonomi seperti koperasi/bank untuk pendanaan, (5) Budaya, faktor budaya ini berkaitan dengan ciri khusus yang menunjukkan kekhasan dengan seni budaya daerah setempat yang berpengaruh pada model sangkar burung yang dihasilkan, (6) Pengembangan Ekonomi, Faktor pengembangan ekonomi ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat setempat dan secara ekonomi memang usaha sangkar burung ini memberikan keuntungan, dengan aspek ini yang kemanfaatan akan lebih cepat tercapai dari keberadaan industri ini. (7) Sumberdaya Alam, SDA terkait dengan pasokan bahan baku industri sangkar burung terutama bambu dan kayu, kontinuitas pasokan bahan baku perlu dijaga agar produksi sangkar burung tidak mengalami hambatan.

Strategi pengembangan

Claymone (2011) menemukan bahwa faktor penyebab kegagalan gerakan OVOP di Indonesia dan Thailand disebabkan oleh tiga elemen yaitu: (1) lemahnya pemahaman terkait filosofi dan pendekatan OVOP, (2) masalah kebijakan yang bersifat top down, (3) dan rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi strategi pengembangan kompetensi inti daerah didasarkan pada kondisi eksisting dan peluang pengembangan di masa yang akan datang

sehingga lebih implementatif. Strategi dan rencana tindak disepersiapkan untuk program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui posisi produk kompetensi inti yang dalam hal ini untuk Kabupaten Jember adalah industri sangkar burung. Melalui analisis ini, peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada masing-masing jenis produk unggulan dapat diketahui secara lebih terperinci. Dalam analisis SWOT faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT ini diarahkan pada identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pada industri sangkar burung yang memberi pengaruh terhadap pengembangan industri sangkar burung.

Aplikasi dari strategi pengembangan industri sangkar burung dilakukan dalam rencana tidak baik dalam rencana tindak jangka pendek, jangka menengah dan rencana tindak jangka panjang. Rencana tindak jangka pendek terdiri dari (1) Pelatihan manajemen usaha dan (2) Penguatan Kelembagaan. Rencana tindak jangka menengah terdiri dari (1) Peningkatan keahlian tenaga kerja dan perajin sangkar burung, (2) Otomatisasi teknologi produksi, (3) penguatan permodalan dan (4) pengembangan media promosi. Rencana tindak jangka panjang terdiri dari (1) Pengembangan kluster dan (2) Penjaminan bahan baku.

KESIMPULAN

Dalam rangka menuju desa mandiri, maka pengembangan infrastruktur ekonomi desa mutlak dilakukan. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan. Peningkatan aktivitas ekonomi desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun perlu diperhatikan, pengembangan ekonomi desa harus fokus pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang memiliki daya saing. Salah satu ciri aktivitas ekonomi yang memiliki daya saing adalah aktivitas ekonomi yang di dasarkan pada kompetensi inti. Kompetensi inti daerah merupakan suatu keunggulan yang unik dari suatu daerah yang tidak dapat ditiru kompetensinya oleh daerah lain dan berbasiskan pada beberapa sumber daya tertentu yaitu SDA, SDM, aspek lingkungan daerah, dan prospek masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian kompetensi inti industri daerah serta menyusun strategi pengembangan kompetensi inti industri daerah di Kabupaten Jember. Menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil survey dengan lokasi penelitian di Kabupaten Jember, penentuan kompetensi inti dilakukan dengan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Sedangkan penyusunan strategi pengembangan industri menggunakan analisis SWOT. Dari hasil analisis data yang diperoleh kesimpulan bahwa produk unggulan yang ditetapkan sebagai kompetensi inti daerah di Kabupaten Jember adalah sangkar burung. Kompetensi inti dalam industri sangkar burung di Kabupaten Jember adalah teknologi dan SDM. Efisiensi produksi dan perbaikan kualitas produk akan tercapai dengan adanya teknologi yang lebih baik. Pengembangan SDM pelaksana industri sangkar burung perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas produk industri sangkar burung. Beberapa saran yang perlu dilakukan adalah pada jangka pendek ditekankan pada kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen usaha serta penataan/penguatan kelembagaan. Pada jangka menengah ditekankan pada peningkatan ketrampilan tenaga kerja, otomatisasi teknologi produksi, penguatan permodalan, dan pengembangan media promosi. Sedangkan jangka panjang ditekankan pada program pengembangan kluster dan penjaminan bahan baku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bappekab Jember dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang memfasilitasi dan memberikan data dan informasi selama penelitian berlangsung. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada para pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) 2011. *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Jember.
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2014. *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Jember
- Chumaira, C, Murwendah & Amirzam 2010, Peningkatan daya saing nasional: satu kabupaten satu kompetensi inti (sakasakti) melalui kewirausahaan pemerintah, *Jurnal UI untuk Bangsa Seri Sosial dan Humaniora*, Vol. 1:25-36.
- Claymone, Y 2011, A Studi on One Village One Product (OVOP) in Japan and Thailand as an Alternatif of Community Development in Indonesia: A Perspective on Japan and Thailand, *The International Journal of East Asian Studies*.
- Departemen Perindustrian 2007, *Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah*, Jakarta.
- IMD World Competitiveness Centre 2019, *World competitiveness ranking*, Lausanne, Switzerland.
- Matsui, K 2019, Strategi pengembangan daerah: pendekatan gerakan OVOP untuk konteks pembangunan daerah di Indonesia. Materi kuliah tamu FEB Universitas Brawijaya, Malang, 2 Mei 2019.
- Nufus, K 2012, Pengembangan kompetensi inti dalam rangka meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah di Minahasa Tenggara. *Jurnal Liquidity*, Vol. 1 (2): 135-141.
- Nurcahyo, R, Maemunsyah, Z, Muslim, E dan Saparudin 2011, Perancangan strategi pengembangan industri di Kabupaten Tangerang berbasis kompetensi inti, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 10 (3): 252-263.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Presiden no. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional*.
- Prahalad, C.K. dan Hamel, G 1990, The Core Competence of the Corporation, *Harvard Business Review* 68(3):79-91.
- Triharini, M, Larasati, D dan Susanto, R 2014, Pendekatan One Village One Product (OVOP) untuk mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah, Studi kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, *Journal of Visual Art and Design*, Vol. 6 (1).

**MODAL SOSIAL PENDUKUNG PEREMPUAN PERAMU HERBAL DALAM
PENGELOLAAN PONDOK JAMU BERBASIS *SHELTER* UNTUK PENGEMBANGAN
WISATA SEBAGAI RINTISAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN BANGKALAN DAN
SUMENEP**

***SOCIAL CAPITAL AS SUPPORT WOMEN IN THE MANAGEMENT OF PONDOK JAMU
BASED SHELTER FOR TOURISM DEVELOPMENT AS A STUB OF INDEPENDENT
VILLAGE IN DISTRICT BANGKALAN AND SUMENEP***

Ekna Satriyati¹

¹Dosen Antropologi-Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura
ekna.satriyati@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Keberhasilan usaha ramuan herbal berupa pondok jamu berbasis *shelter* sebagai pengembangan wisata potensial di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep Tahun 2018, tidak lepas dari peran perempuan peramu herbal. Mereka memanfaatkan modal sosial sebagai pendukung pengembangan wisata guna rintisan desa mandiri. Tujuan penelitian menganalisis bentuk modal sosial yang digunakan perempuan peramu herbal dalam pengelolaan pondok jamu berbasis *shelter*. Penelitian ini menggunakan metode dan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang fokus di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Keabsahan data diukur dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menyatakan bahwa modal sosial perempuan peramu herbal, terdiri atas tiga bagian yakni jaringan, kepercayaan dan norma. Pertama, jaringan terdiri atas jaringan pemerintahan dan jaringan antar perempuan wirausaha. Kedua, kepercayaan terdiri atas kepercayaan pada pemerintah dan kepercayaan pada masyarakat. Ketiga, norma terdiri atas norma agama dan norma lingkungan. Kesimpulan bahwa modal sosial memiliki peran penting sebagai pendukung perempuan peramu herbal mewujudkan pengembangan wisata sebagai rintisan desa mandiri di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep.

Kata Kunci: Desa Mandiri, Modal Sosial, Perempuan Peramu.

ABSTRACT

The success of Jamu herb business in the form of Pondok Jamu based shelter as the development of potential tourism in Bangkalan and Sumenep district in 2018, not from the role of female herbal herbs. They utilize social capital as a supporter of tourism development for the independent village stub. Research aims to analyse the form of social capital used by women herbal medicine in the management of a Pondok Jamu shelter-based. This study uses methods and analyses using descriptive qualitative with a phenomenological approach that focuses in Bangkalan and Sumenep regencies. The results of the study stated that the form of female social capital is herbal, consisting of three parts namely network, trust and norms. Firstly, the network consists of two forms of government and entrepreneurial network. Secondly, trust consists of two forms of trust in the Government and trust in society. Thirdly, the norm consists of two forms of religious norms and environmental norms. The conclusion that social capital has an important role as a supporter of female herbs create a tourism development as a stub independent village in Bangkalan and Sumenep district.

Keywords: Independent Village, Herbal's Women, Social Capital.

PENDAHULUAN

Negara tropis yang terkenal oleh keanekaragaman hayati salah satunya adalah Indonesia. Kekayaan hayati di Indonesia berupa berbagai jenis tumbuhan yang diolah sebagai makanan, minuman dan bahan herbal. Bahan herbal di Indonesia digunakan sebagai ramuan jamu tradisional

maupun obat modern. Negara Indonesia yang memiliki kekayaan hayati seharusnya menjadi produsen bahan herbal terbesar di dunia. Akan tetapi di Indonesia justru pembuatan dan pemakaian obat berbahan kimia jauh lebih besar dibandingkan obat herbal (Kompas, 31/10/2011). Ketiadaan dukungan dana dan teknologi guna pengembangan bahan herbal setara dengan obat medis membuat ramuan herbal jarang dipercaya oleh konsumen dunia guna merawat dan mengobati kesehatan (Kompas, 09/07/2009).

Keterbatasan ramuan herbal sebagai obat tradisional adalah belum banyak penelitian ilmiah yang menunjang pemahaman mengenai cara kerja ramuan herbal dalam tubuh manusia. Keterbatasan pengetahuan tersebut membuat ramuan herbal jarang menjadi pusat kajian farmasi, industri dan ekonomi. Ramuan herbal atau di Indonesia disebut jamu merupakan ramuan dari berbagai tanaman obat yang memiliki standar susunan bahan maksimal 5 jenis simplisia (bahan herbal) saja. Apabila jumlah susunan simplisia lebih banyak jumlahnya akan menimbulkan kesulitan pada saat pelaksanaan uji standar mutu (Handayani dan Suharmiati, 1997 : 1)). Informasi pengetahuan tentang ramuan herbal belum terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan ketiadaan ruang atau tempat untuk menghubungkan antara yang pemilik pengetahuan lokal tentang ramuan herbal dengan penggunaanya. Selain itu, minimnya dokumentasi tertulis dan rekaman visual diprediksikan akan mendorong secara perlahan punahnya pengetahuan tradisional (Handayani, L, 2003 : i).

Pada tahun 2010, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar menunjukkan hampir separuh (49.53%) masyarakat Indonesia berumur 16 tahun ke atas menggunakan ramuan herbal atau jamu. Ada lima persen (5%) menggunakan herbal secara rutin tiap hari, sedangkan sisanya (44.53%) tidak rutin meminum jamu namun tetap menggunakan ramuan herbal (Surabaya Pos, 30/10/2011). Kesadaran yang cukup tinggi terhadap penggunaan ramuan herbal merupakan bagian dari pola hidup Masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan. Kesadaran menjaga kesehatan tidak hanya sekedar kesadaran kesehatan fisik saja namun juga kesadaran mental manusia. Gangguan kesehatan fisik pada manusia selalu berkaitan dengan mental serta kondisi sosial budaya dalam suatu masyarakat. Hal tersebut yang menghasilkan upaya-upaya penyembuhan yang ada sangat bervariasi antara masyarakat satu dengan yang lainnya (Ahimsa-Putra, 2005).

Upaya-upaya menjaga pemeliharaan kesehatan yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lain menunjukkan bahwa setiap masyarakat di Indonesia memiliki kemampuan budaya dalam menyelesaikan persoalan kesehatan. Salah satu masyarakat yang memiliki kemampuan meramu, pengelolaan dan tradisi minuman herbal yang disebut jamu. Penggunaan jamu diartikan sebagai racikan tumbuhan untuk pemeliharaan kesehatan, penyembuhan tradisional dan kecantikan. Jamu perkembangannya terletak di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur (Suharmiati dan Lestari H., 1996: 1).

Ramuan herbal yang terkenal dari Provinsi Jawa Timur adalah Jamu Madura. Teknologi jamu dikuasai oleh Orang Madura sebagai upaya pemeliharaan kesehatan fisik dan mental. Pelestarian Jamu Madura ditunjang oleh pemahaman persepsi masyarakat terhadap kemujarabannya. Jamu Madura yang berkembang saat ini dipercaya memiliki khasiat setara dengan yang dikembangkan oleh para peramu herbal masa lalu di Madura. Prinsip dasarnya semua jamu di Jawa maupun Madura memiliki bahan ramuan yang serupa. Hal yang membedakan antara Jamu Madura dengan Jamu Jawa adalah jumlah bahan herbal yang lebih banyak serta intensitas penggunaan lebih banyak untuk perawatan tubuh perempuan dan keperluan aktivitas seksual.

Kepercayaan yang berlebih terhadap khasiat perawatan tubuh perempuan dan keperluan seksual menyebabkan sebagian besar Jamu Madura berfokus pada hal yang berkaitan dengan pada pemeliharaan kinerja organ dan penampilan kecantikan bagian tubuh yang berhubungan dengan

pembinaan keharmonisan hubungan suami istri. Kenyataan ini menyebabkan pula Perempuan Madura jadi terkenal sebagai calon istri yang diidealkan untuk teman hidup (Rifai, 2007:74).

Bahkan keyakinan terhadap kemampuan Jamu Madura, bukan hanya sekedar mitos tapi selalu diidentikkan dengan kenikmatan seksual. Jamu Madura selain terkenal di dalam negeri juga terkenal di luar negeri, salah satunya adalah Malaysia dan Arab Saudi. Berbagai ragam merek berasal dari usaha rumah tangga jamu tradisional sampai pada usaha jamu modern, tumbuh dan berkembang dari Kabupaten Bangkalan sampai ke Kabupaten Sumenep, (Bustami, 2006 : 45). Kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar Madura terhadap Jamu Madura mendorong peningkatan pendapatan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). Dua tahun terakhir (2018-2019) angka peningkatan pendapatan hampir 35% diraih pengusaha IKOT di Kabupaten Bangkalan dan 25% diraih oleh pengusaha IKOT di Kabupaten Sumenep (Data Dinas Perindustrian Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, 2019). Angka peningkatan pendapatan IKOT sebagai bagian efek positif meningkatnya kunjungan wisata di kedua kabupaten tersebut.

Peran penting yang membawa efek positif dari peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep adalah keberadaan pondok jamu yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha IKOT. Pondok jamu merupakan kios jamu yang dirancang sebagai tempat terbuka untuk berjualan jamu, konsultasi khasiat jamu dan ruang diskusi untuk keluhan kesehatan pengguna jamu. Penggagas ide pendirian dan pengembangan pondok jamu dirancang oleh perempuan pengusaha jamu dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan upaya menarik wisatawan lokal, nasional dan internasional. Seiring peningkatan pendapatan perempuan pengusaha jamu, fungsi pondok jamu juga berkembang menjadi *shelter* yakni tempat pertemuan dan ruang diskusi terbuka antara peramu, pengusaha, pengguna dan dinas kabupaten. *Shelter* juga menjadi media yang mendorong perkembangan informasi dan komunitas pengusaha jamu yang berkeinginan merintis desa mandiri. Pada Kabupaten Bangkalan, pondok jamu berbasis *shelter* lebih berkembang dalam bentuk komunitas grup dunia maya, sedangkan pada Kabupaten Sumenep dalam bentuk komunitas arisan.

Keberhasilan perempuan pengelola pondok jamu berbasis *shelter* tidak lepas dari modal sosial yang mendukung upaya mereka dalam memajukan usahanya. Keberadaan modal sosial sebagai tolak ukur untuk melihat apa dan siapa yang mendukung kios jamu menjadi pondok jamu sampai memiliki komunitas pada keseharian maupun di dunia maya. Modal sosial sebagai rangkaian proses hubungan antar manusia yang didukung oleh jaringan, norma dan kepercayaan sosial. Ketiga bagian pendukung tersebut berfungsi melakukan koordinasi dan kerjasama guna efisiensi dan efektifitas mencapai tujuan serta keuntungan bersama atas ikatan nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati (Thobias, 2013).

Modal sosial berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, peran modal sosial merupakan alokasi percepatan sumberdaya menjadi aset unggulan daerah penunjang wisata dan mewujudkan rintisan desa mandiri. Bagi masyarakat, peran modal sosial merupakan proses kepercayaan, kerjasama dan partisipasi untuk saling menjaga dan memobilisasi sumberdaya kolektif guna mencapai tujuan bersama (Kusumastuti, 2015). Bagi perempuan peramu herbal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, peran modal sosial merupakan kekuatan besar yang menghasilkan kapasitas beradaptasi dalam pengelolaan pondok jamu berbasis *shelter* guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan menulis artikel berjudul Modal Sosial Pendukung Perempuan Peramu Herbal dalam Pengelolaan Pondok Jamu Berbasis Shelter untuk Pengembangan Wisata sebagai Rintisan Desa Mandiri di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep.

TINJAUAN PUSTAKA

Modal Sosial

Hubungan antar manusia yang memiliki sistem dengan menekankan pada nilai kebersamaan dan kepercayaan dalam satu komunitas atau antar komunitas disebut sebagai modal sosial (*social capital*). Nilai kebersamaan dan kepercayaan membentuk masyarakat yang kuat, mandiri dan bertanggungjawab. Adapun nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai pencegah masalah sekaligus juga solusi apabila terjadi masalah. Solusi diharapkan tidak merugikan pihak manapun (Hasbullah, 2016). Modal sosial (*social capital*) memiliki unsur pokok yakni *Participatory networking* (partisipasi dalam jaringan), *Resiprocity* (resiprositas atau tukar menukar kebaikan), *Trust* (Kepercayaan atau rasa percaya), Norma Sosial, Nilai-nilai dan Tindakan Proaktif (Hasbullah, 2016). Berikut penjelasan lengkap setiap unsur :

1. *Participatory networking* (Partisipasi dalam jaringan)
Partisipasi dalam jaringan atau relasi jaringan adalah suatu bentuk partisipasi dari individu manusia dalam suatu jaringan yang mewadahi berbagai aktivitas yang diselenggarakan dalam jaringan. Wadah aktivitas dalam jaringan berupa lembaga sosial, lembaga sosial keagamaan, organisasi sosial, organisasi massa dan lembaga atau organisasi lainnya. Pemenuhan kepentingan individu dapat dilihat dari proses pembentukan relasi sosial dalam masyarakat disesuaikan dengan lingkungan dan kemampuan. Pembentukan relasi diwujudkan dalam partisipasi. Partisipasi merupakan bentuk kemampuan individu atau masyarakat untuk menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergi. Bentuk partisipasi memiliki kekuatan besar sebagai penentu kekuatan modal sosial dalam masyarakat.
2. *Resiprocity* (resiprositas atau hubungan timbal balik)
Resiprositas adalah hubungan timbal balik yang memiliki kecenderungan saling tukar menukar kebaikan. Wujudnya adalah kepedulian sosial atau solidaritas sosial, saling memperhatikan serta saling membantu satu dengan lainnya. Resiprositas terjadi karena dorongan menaati norma dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu atau masyarakat.
3. *Trust* (Kepercayaan)
Trust atau kepercayaan sebagai unsur terpenting dalam relasi suatu hubungan antar dua individu atau lebih. Kepercayaan dianggap sangat penting terutama dalam hubungan kerjasama antar individu, lembaga, masyarakat dan bangsa. Kepercayaan menjadi modal sosial individu yang utama untuk mencapai tujuan hidup.
4. *Social's Norm* (Norma Sosial)
Norma adalah bentuk aturan tertulis dan tidak tertulis yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh individu pada perilakunya. Norma sosial adalah bentuk norma yang bersifat sosial. Rujukan norma sosial bersumber dari norma dengan orientasi ajaran agama. Norma sosial digunakan sebagai pedoman individu dalam melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial dengan individu lain sehari-hari.
5. Nilai-nilai
Nilai merupakan suatu tatanan untuk menuntun individu atau masyarakat melakukan tindakan sesuai dengan hak dan kewajiban serta diupayakan bermanfaat bagi individu atau masyarakat lainnya. Nilai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan agar sistem sosial budaya tercapai keseimbangan.
6. Tindakan Proaktif
Tindakan proaktif adalah tindakan dalam wujud perilaku yang selalu mengambil inisiatif. Sikap proaktif bermakna tanggung jawab penuh atas perilaku individu sendiri, baik perilaku pada masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Sikap proaktif dianggap mampu membuat

pilihan-pilihan hidup berdasarkan prinsip serta nilai yang berlaku dan disepakati dalam masyarakat.

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang dianggap mampu mempercepat pertumbuhan nilai ekonomi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup dan merespon yang sektor-sektor produktif lain. Pariwisata menggali sumber dana pembangunan baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk devisa. Kelangkaan devisa dapat diatasi dengan industri pariwisata. Bagi masyarakat Indonesia, pengembangan pariwisata mempengaruhi peningkatan penghasilan, taraf hidup dan kesejahteraan (Nyoman S. Pendit, 2002).

Pada Kabupaten Bangkalan dan Sumenep sektor pariwisata memiliki dampak langsung pada masyarakat yang berwirausaha dan berdekatan tinggal pada kawasan wisata. Masyarakat memanfaatkan peluang dengan peluang wirausaha, persewaan, lahan parkir serta tempat peristirahatan. Pulau Madura sebagai wilayah yang sedang berkembang pasca jembatan Suramadu beroperasi, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai peningkatan ekonomi dan mendapatkan tambahan devisa. Pemerolehan devisa dari sektor pariwisata sangat membantu program pemerintah kabupaten dan provinsi Jawa Timur.

Sistem pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep banyak menggunakan modal sosial sebagai bentuk partisipasi langsung masyarakat terhadap pariwisata. Pemerintah daerah memiliki peran mengontrol secara langsung serta mengeksplorasi potensi pariwisata yang dimiliki tiap wilayah untuk menambah pendapatan daerah. Kedua belah pihak yakni masyarakat dengan pemerintah daerah dapat melakukan sinergi untuk mengembangkan potensi di sektor kepariwisataan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara deskripsi modal sosial yang mendukung perempuan peramu herbal dalam pengelolaan pondok jamu berbasis *shelter* untuk pengembangan wisata sebagai rintisan desa mandiri di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Fokus penelitian diletakkan pada tiga bagian unsur modal sosial yakni :

1. *Participatory networking* (Partisipasi dalam jaringan)
2. *Trust* (Kepercayaan)
3. *Social's norm* (Norma Sosial)

Informan penelitian adalah 5 perempuan pengusaha sekaligus peramu herbal yang memiliki pondok jamu dan komunitas. Lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Data priomer disusun berdasarkan observasi dan wawancara pada informan. Data sekunder disusun berdasarkan penelusuran arsip, data dinas di kedua kabupaten, artikel koran serta dokumen penunjang lainnya. Analisis data menggunakan teknis analisis kualitatif yakni menyiapkan data, menyusun data, membaca data, memberi coding data, mendeskripsikan lokasi penelitian, mendeskripsikan data, menganalisis data sesuai dengan tema yang menjawab pertanyaan penelitian dan menyajikan kembali deskripsi berupa narasi dengan bentuk laporan kualitatif (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep

Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten paling barat di Pulau Madura. Letaknya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang, Sebelah barat dan

selatan berbatasan dengan Selat Madura. Lokasi Kabupaten Bangkalan paling dekat dengan Kota Surabaya. Luas Kabupaten Bangkalan 1.260,14 km² terdiri dari 18 kecamatan dengan 273 desa dengan 8 kelurahan serta berpusat di Kecamatan Bangkalan (Bangkalan dalam Angka, 2013). Industri berkembang di Kabupaten Bangkalan terdiri dari 3 jenis yakni industri kecil dan rumahtangga, industri sedang dan besar. Jumlah industri kecil dan rumahtangga selama 10 tahun terakhir paling banyak 5.701 unit, jumlah industri sedang 185 unit dan industri besar 29 unit (Bangkalan dalam Angka, 2013).

Peran industri kecil dan rumahtangga sangat penting karena menopang hampir $\frac{3}{4}$ masyarakat di seluruh kabupaten. Potensi industri kecil yang terdapat di Kabupaten Bangkalan adalah industri batik tulis, industri besi tempa, makanan, minuman, ramuan herbal atau jamu dan olahan hasil laut (Dinas Perindustrian Bangkalan, 2018). Industri rumah tangga yang mengolah ramuan herbal berkembang seiring banyak wirausaha jamu. Bentuk kios jamu dimodifikasi menjadi pondok jamu dan dikelola oleh para perempuan peramu herbal. Pada setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan, selalu terdapat usaha ramuan herbal. Namun paling banyak berada di Kecamatan Bangkalan.

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten paling timur Pulau Madura. Letaknya disebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan Kabupaten Pamekasan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores. Kabupaten Sumenep Luas Kabupaten Sumenep adalah 2.093.25 km² dengan populasi 1.041.915 km². Kabupaten Sumenep terdiri dari Sumenep daratan dan kepulauan. Pada Sumenep kepulauan terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 tidak berpenghuni. Total terdapat 126 pulau (Sumenep dalam Angka, 2015).

Peran industri di Kabupaten Sumenep tidak sebesar di Kabupaten Bangkalan. Namun bersama pertumbuhan pariwisata di Sumenep, industri rumahtangga berkembang pesat dan mampu mewujudkan wirausaha mandiri. Industri rumahtangga skala mikro yang tersebar diberbagai kecamatan membuat Dinas Perdagangan membuat klasifikasi tanaman agronomis dan bentuk sosialisasi. Ramuan herbal merupakan potensi industri yang menguntungkan mikro karena merupakan ikon kedua terbesar di Madura. Para perempuan pengusaha ramuan herbal juga rata-rata memiliki pondok jamu pada kios jamu mereka.

Modal Sosial Pendukung Perempuan Peramu Herbal

Participatory Network (Partisipasi dalam jaringan)

Partisipasi dalam jaringan sosial mendukung interaksi sehingga menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama yang kuat antar individu dengan individu lain atau masyarakat. Kekuatan partisipasi jaringan sosial terbentuk dengan mengukur kekuatan kerjasama di dalamnya sehingga memperkuat modal sosial yang ada. Masyarakat hidup berdampingan dengan masyarakat lain melalui variasi hubungan saling berdampingan dan dilakukan dengan prinsip sukarela (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Masing-masing individu dalam kelompok masyarakat berupaya guna menyatukan diri pada pola hubungan yang sinergi. Hal tersebut mempengaruhi kekuatan modal sosial suatu kelompok (Hasbullah, 2016)

Hubungan antara partisipasi dengan pondok jamu yang memiliki *shelter* dan komunitas memiliki partisipasi jaringan atau kerja sama dengan pemerintah dan perempuan wirausaha herbal menjadi penting guna mendukung perkembangan upaya pondok jamu meningkatkan pendapatan, memelihara hubungan dengan pemerintah serta komunitas. Peran dinas pariwisata baik di Kabupaten Bangkalan maupun di Sumenep dalam membantu para perempuan peramu jamu sebatas member informasi pameran, mengikutsertakan pada pameran dan memberi info apabila ada aktivitas kegiatan di kabupaten. Peran dinas pariwisata bagi perempuan peramu jamu belum

maksimal dalam pedampingan terhadap mereka. Hal tersebut dirasakan oleh perempuan peramu herbal sering harus mengurus permohonan dulu ke dinas perindustrian baru dikoordinasikan dengan dinas pariwisata. Waktu yang panjang serta proses yang berjenjang membuat pengusaha perempuan peramu herbal memutuskan untuk menggunakan partisipasi jaringan antara pengusaha perempuan peramu herbal. Pondok jamu yang seharusnya dapat pengalaman dan pengetahuan baru dari partisipasi pemerintah berupa bantuan, dukungan dan bimbingan teknis.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Sumenep bersama-sama pengusaha kecil dan rumahtangga membentuk asosiasi kelompok usaha kecil dan rumahtangga. Anggotanya adalah para pengusaha yang memiliki kategori usaha kecil dan rumahtangga. Asosiasi ini diharapkan mampu membantu pengembangan masing-masing usaha kecil dan rumahtangga. Namun partisipasi asosiasi ini ternyata belum maksimal. Kelompok perempuan peramu herbal di Bangkalan merasa kurang puas dengan kerja asosiasi pengusaha kecil dan rumahtangga. Pada akhirnya mereka membentuk persatuan pengusaha wanita Republik Indonesia (Perwira). Perkembangan partisipasi Perwira di Bangkalan mengalami kemajuan yang pesat dan berkembang menghasilkan ruang pamer serta komunitas yang saling bersinergi dalam operasional usaha masing-masing. Saling membantu apabila kekurangan bahan baku, saling bertukar informasi apabila membutuhkan bahan herbal yang sulit dibeli di Bangkalan dan kerjasama lainnya.

Berbagai dinas di lembaga pemerintah kabupaten baik di Bangkalan dan Sumenep mengandalkan program sosialisasi guna meraih capaian kerjasama baru dengan para pengusaha. Pada tataran ini, bentuk sosialisasi, oleh kelompok perempuan peramu jamu dirasa belum menghasilkan capaian yang maksimal. Solusinya diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten Bangkalan dan Sumenep dengan pemerintah desa dan perwakilan pengusaha. Pondok jamu yang berkembang pesat melalui persatuan wanita Republik Indonesia (Perwira) belum mendapat partisipasi aktif dari Pemerintah Kabupaten.

Sebaliknya, partisipasi jaringan perempuan peramu herbal satu dengan lainnya sangat kuat dan potensial dalam mendukung pengembangan pondok jamu berbasis shelter guna meningkatkan wisata dan rintisan desa mandiri. Jaringan dengan perempuan peramu jamu dengan sesama peramu jamu yang memiliki usaha ramuan herbal baik sesama kabupaten maupun dengan jaringan perempuan peramu herbal pada kabupaten lainnya. Jaringan antar perempuan peramu herbal ini dalam mengembangkan pondok jamu dengan konsep *shelter* sebagai ruang diskusi dengan pengguna jamu. Jaringan dengan pemerintah maupun dengan sesama perempuan peramu jamu tersebut tidak berbentuk materi namun berbentuk modal partisipasi dukungan, kesempatan dan informasi yang menjadi penting dalam pengembangan pondok jamu sebagai penunjang wisata di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep.

Trust (kepercayaan)

Kepercayaan sebagai unsur terpenting dalam relasi suatu hubungan antar dua individu atau lebih. Kepercayaan dianggap sangat penting terutama dalam hubungan kerjasama antar individu, lembaga, masyarakat dan bangsa. Kepercayaan menjadi modal sosial individu yang utama untuk mencapai tujuan hidup. Kepercayaan yang kuat akan menjadi modal utama dalam pembentukan modal sosial dimasyarakat (Hasbullah, 2016).

Tindakan kolektif yang melandasi rasa saling mempercayai akan meningkatkan partisipasi dalam ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun bersama demi kemajuan. Proses mempercayai dalam pembangunan agak sulit menghindari situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Lebih jauh lagi masyarakat yang kurang memiliki rasa percaya satu sama lain sehingga terkadang muncul sifat individu yang menyimpang dari norma dan nilai yang ada yang berakibat pada terhambatnya proses pembangunan masyarakat.

Pondok-pondok jamu di berbagai wilayah di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep disambut antusias oleh warga di kedua kabupaten. Antusias warga dikarenakan pengguna jamu dapat mendiskusikan keluhan kesehatan dan mendapatkan informasi herbal langsung dari peramu herbal. Selama ini, pengguna jamu hanya dapat membeli jamu tanpa ada proses berdiskusi dengan peramu. Pada awalnya, pondok-pondok jamu berbasis *shelter* tidak terlalu disukai oleh pengguna jamu karena dianggap seperti kios jamu modern yang hanya dilayani tanpa ada diskusi keluhan kesehatan dan informasi. Namun setelah tahu bahwa konsep *shelter* adalah pusat informasi dan diskusi maka pondok-pondok jamu menjadi rujukan pertama untuk keperluan akan pengobatan herbal. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa masyarakat Bangkalan dan Sumenep memiliki kepercayaan yang tinggi dalam proses pengembangan pondok jamu.

Pada perkembangan lebih lanjut, Pemerintah Bangkalan dan Sumenep melihat potensi wisata dan rintisan desa mandiri apabila pondok jamu dijadikan ikon dalam pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah pada kedua kabupaten memberikan ijin operasional lebih mudah dan mendukung berkembangnya pondok jamu berbasis *shelter*. Pada hasil penelitian ini kepercayaan yang didapat para perempuan peramu herbal adalah dari masyarakat dan pemerintah.

Social's Norms (norma sosial)

Bentuk aturan tertulis dan tidak tertulis yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh individu pada perilakunya. Norma sosial adalah bentuk norma yang bersifat sosial. Rujukan norma sosial bersumber dari norma dengan orientasi ajaran agama. Norma sosial digunakan sebagai pedoman individu dalam melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial dengan individu lain sehari-hari (Hasbullah, 2016).

Pada pondok-pondok jamu belum mendapat ijin untuk aktivitas *shelter* dan komunitas sehingga keberadaan pondok-pondok jamu lebih dimaknai sebagai tempat wisata untuk mendapatkan ramuan herbal. Pengurusan ijin hanya pada dinas perindustrian dan kesehatan. Ketetapan peraturan juga hanya peraturan operasional suatu usaha saja, belum menyentuh tata cara pelaksanaan operasional usaha dengan komunitasnya. Namun, hal ini patut diwaspadai apabila kedepan pondok-pondok jamu mengalami perkembangan yang pesat sebagai ikon wisata maka dibutuhkan peraturan melekat agar komunitas yang berada dalam kegiatan pondok jamu dapat diatur perilakunya sesuai nilai sosial yang berlaku di Bangkalan dan Sumenep.

Pada ketentuan keramaian pengunjung pondok jamu dilakukan peraturan tidak tertulis oleh para perempuan peramu jamu. Peraturan tentang kunjungan pada pondok jamu terdiri atas jam operasional dan berkunjung. Selain itu juga peraturan untuk tidak melakukan aktivitas lain di dalam pondok jamu. Diskusi dan konsultasi pun memiliki waktu seperti jam kerja agar tidak menimbulkan fitnah dilingkungan sekitar pondok jamu.

Ada saran dari pembinaan unit usaha kecil dan rumahtangga Kabupaten baik di Bangkalan maupun Sumenep bahwa di dalam pondok jamu sebaiknya juga menyediakan menu lain agar pengunjung seperti mengunjungi kafe bukan kios jamu. Hal tersebut ditolak oleh para perempuan peramu herbal. Pembentukan pondok jamu sebagai perkembangan kios jamu adalah untuk mempertahankan kekhususan suatu tempat yang memang hanya untuk perawatan dan pengobatan tradisional jamu. Seperti rumah sakit juga punya hak untuk menyediakan ruang khusus tidak bercampur dengan kepentingan lainnya.

Nilai kekhususan terhadap tempat ramuan herbal dikarenakan memperhatikan tentang ajaran agama yang sangat menghormati *privacy* seseorang pada saat melakukan konsultasi. Selain itu juga di sekitar pondok jamu, para perempuan peramu jamu, melakukan penanaman dan pembibitan tanaman bahan herbal. Untuk itu para peramu jamu tidak memperkenankan pondok jamu diubah fungsinya seperti *café*. Sebab akan menyalahi aturan nilai dan norma lingkungan.

KESIMPULAN

Pondok jamu berbasis *shelter* merupakan ide dan pengembangan bentuk wirausaha para perempuan peramu jamu di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Tujuan dibuatnya pondok jamu adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peramu dan masyarakat sekitarnya. Pada perkembangannya pondok jamu memerlukan dan menggunakan modal sosial untuk mendukung berjalannya program asosiasi. Modal sosial merupakan faktor utama yang harus dimiliki masyarakat dalam mengoptimalkan potensi usaha namun tidak mengabaikan norma sosial. Analisis terhadap pondok jamu sebagai *shelter* guna mendukung wisata dan rintisan desa mandiri. Untuk itu dibutuhkan modal sosial dalam mencapai tujuan. Adapun modal sosial yang dimiliki para perempuan peramu jamu adalah : Pertama, jaringan terdiri atas dua bentuk yakni jaringan pemerintahan dan jaringan antar perempuan wirausaha. Kedua, kepercayaan terdiri atas dua bentuk yakni kepercayaan terhadap pemerintah dan kepercayaan terhadap masyarakat. Ketiga, norma terdiri atas dua bentuk yakni norma agama dan norma lingkungan. Kesimpulan bahwa modal sosial memiliki peran penting sebagai pendukung perempuan peramu herbal mewujudkan pengembangan wisata sebagai rintisan desa mandiri di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep.

SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah kabupaten agar dapat berinisiatif untuk membuka kerjasama dengan pihak swasta dan universitas untuk melakukan pengembangan dan penelitian pengembangan pondok jamu lebih lanjut. 2) Perempuan peramu herbal dapat memperkuat asosiasi menjadi kelembagaan melalui kelompok usaha herbal dan pemerintah kabupaten agar bersinergi dan dapat mewujudkan segera merealisasikan rintisan desa mandiri dengan wisata herbal. 3) Pemerintah kabupaten hendaknya segera melakukan pemetaan usaha kecil rumah tangga khusus herbal dan melakukan perencanaan rintisan desa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. 2005. "Kata Pengantar: Fenomenologi Gender di Jember" dalam Buku Hamdanah *Musim Kawin di Musim Kemarau*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.
- , 2005. "Kesehatan Dalam Perspektif Ilmu Sosial-Budaya" dalam Buku Atik Tri Ratnawati dkk *Masalah Kesehatan Dalam Kajian Ilmu Sosial-Budaya*. Yogyakarta : Kepel Press untuk CE dan BU Fak.Kedokteran UGM serta RSUP. Dr. Sardjito.
- Bustami, A.L. 2006. "Seksualitas Orang Madura : Gelas Bergoyang dan Sendok pun Bergetar" artikel dalam Jurnal Srintil Media Perempuan berjudul *Komodifikasi Seksualitas dan Perwadagan Perempuan*. Jakarta : Kajian Perempuan Desantara bekerjasama dengan The Ford Foundation.
- Handayani dan Suharmiati, 1997. "Meracik Obat Tradisional Secara Rasional" dalam *Warta Tumbuhan Obat Indonesia*, Vol. 2 Nomor 2, 1997, p. 20-25.
- Handayani, Lestari. 2003. *Membedah Rahasia Ramuan Madura*. Jakarta : Agromedia Pustaka.
- Hasbullah, Jaousairi. 2016. *Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta : MR-United Press
- Kusumastuti, Ayu. 2015. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Sosiologi*, Vol 20, No. 1, Januari 2015, hal 81-97

Rifai, M.A. 2007. *Manusia Madura. Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta : Pilar Media.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

----- 2012. *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta

Thobias, Erwin. 2013. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Perilaku Kewirausahaan . *Jurnal Acta Diurna, Vol 2, No. 2. 2013*.

Pendit, S.Nyoman. 2002. *Sektor Pariwisata di Daerah*. Denpasar : Udayana Press.

Dokumen Pemerintah :

Bangkalan dalam Angka. 2013. Tidak diterbitkan.

Data Statistik Industri Herbal dalam laporan Dinas Perindustrian Kabupaten Bangkalan, 2018. Tidak diterbitkan.

Sumenep dalam Angka. 2015. Tidak diterbitkan.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 2010. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Koran :

Artikel “Tak Selamanya Jamu Itu Obat” dalam koran Kompas 09 Juli 2009 hal 24.

Artikel “Jamu Tradisional Madura Mulai Luntur” dalam koran Surabaya Pos 30 Oktober 2011 hal 16.

Artikel “Jamu Indonesia Perlu Dukungan Penelitian” dalam koran Kompas, 31 Oktober 2011 hal 24.

**OPTIMALISASI PELIBATAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN DESA
MANDIRI MELALUI KOPERASI PEREMPUAN
(Studi kasus Koperasi Wanita Ananda Desa Pagendingan Kabupaten Pamekasan)**

***THE OPTIMIZATION OF WOMEN INVOLVEMENT IN THE DEVELOPMENT OF
INDEPENDENT VILLAGE PROGRAM THROUGH WOMEN'S FINANCIAL
COOPERATIVE
(Case study of Ananda Women's Financial Cooperative in Pagendingan
Pamekasan)***

Nur Dina Camelia¹

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237.

ABSTRAK

Program pengembangan desa mandiri menjadi angin segar dalam sektor pembangunan nasional yang menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di pedesaan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ialah mengenai pengarus utamaan gender dalam program desa mandiri khususnya dalam bidang ekonomi. Adanya koperasi perempuan menunjukkan bahwa posisi perempuan di masyarakat pedesaan tidak lagi dilihat sebagai sebuah subordinat, tapi justru memiliki peran yang tidak kalah vital dengan laki-laki dalam memaksimalkan percepatan pengembangan program desa mandiri tersebut. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana upaya pengoptimalisasian peran perempuan di sektor ekonomi desa melalui koperasi perempuan dapat menjadi sebuah sarana penting untuk melibatkan seluruh entitas masyarakat desa dalam mewujudkan program desa mandiri. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, tulisan ini berusaha menjabarkan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di pedesaan serta memberikan berbagai upaya penanggulangan untuk memaksimalkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dengan menggunakan koperasi perempuan.

Keywords: Koperasi perempuan, pelibatan perempuan, perempuan berdaya, ekonomi perempuan, desa mandiri.

ABSTRACT

The development of independent village program is totally a breakthrough for national development sector which shows the increasing of government's attention toward rural development. One important thing to note is about gender mainstreaming in this programs, especially in the economic sector. The existence of women's financial cooperative shows that women's position in rural communities is no longer seen as a subordinate, but rather has a vital role as men in maximizing the acceleration of the development of the independent village program. This paper aims to analyze deeper about the efforts to optimize the role of women in rural economic sector through women's financial cooperative that can be an important means to involve all village community entities in realizing the goals of the program. Using the qualitative descriptive method, this paper attempts to describe the problems faced by women in rural areas and provide various countermeasures to maximize women's participation in rural development by mean of women's financial cooperative.

Keywords: Women financial cooperative, women involvement, women empowerment, women's economy, independent village.

PENDAHULUAN

Program Desa Mandiri berusaha mewujudkan desa yang memiliki kemandirian dan keberlanjutan sehingga mampu berdaya dan mampu meningkatkan sektor ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya desa. Salah satu faktor untuk mencapai pemenuhan target tersebut bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu sangat penting untuk menyediakan kemudahan akses dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan secara merata baik bagi laki-laki maupun perempuan agar memberikan dampak yang lebih luas terhadap pencapaian pembangunan.

Dalam banyak kultur, perempuan sering dijauhkan dari peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga, desa maupun tingkat nasional (Rahayu dalam Wiati 2007). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa, setengahnya adalah jumlah penduduk perempuan masih tertinggal di berbagai bidang pembangunan yang memengaruhi produktivitas nasional. Ketertinggalan perempuan diberbagai bidang pembangunan terjadi merata di seluruh negara dari berbagai kawasan di dunia, yang mendorong Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) pengganti agenda Milenium Development Goals/MDGs dan sekaligus mengagendakan planet 50:50 gender equality pada tahun 2030 (Yambise dalam Kemenpppa, 2017).

Dengan memahami problematika tersebut, maka dalam upaya percepatan program desa mandiri sangatlah dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat responsif gender. Hal ini dikarenakan sistem patriarki di pedesaan masih lebih kuat jika dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan, yang kemudian berdampak pada ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Masalah tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kesenjangan dalam bidang ekonomi secara khusus akan berdampak terhadap realisasi program Desa Mandiri. Mengingat para perempuan desa yang mayoritas bekerja di sektor informal masih menghadapi berbagai permasalahan seperti terbatasnya akses terhadap modal dan sumber daya keuangan, akses terhadap pelatihan ketrampilan, serta akses terhadap informasi pasar (Ratnasari, 2011).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan dari ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Data menunjukkan bahwa posisi dan status perempuan masih menghadapi hambatan dibandingkan laki-laki di berbagai bidang pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia adalah 92,6 sedangkan IPG dunia rata-rata adalah 93,8. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi keenam dari semua negara ASEAN (Kemenpppa, 2018).

Guna mengatasi berbagai masalah ketimpangan yang terjadi di masyarakat serta mempercepat pencapaian Desa Mandiri dibutuhkan berbagai upaya lanjutan seperti memperbaiki kesenjangan akses masyarakat dan memperbaiki infrastruktur desa, salah satunya ialah dengan mulai merevitalisasi fungsi koperasi. Pada dasarnya upaya pemberdayaan perempuan melalui koperasi telah dimulai sejak lama khususnya oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak tahun 1980. Salah satunya ialah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui koperasi dan UKM (Masula, 2017). Koperasi sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi desa, merupakan salah satu motor penggerak keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. Adanya koperasi perempuan memungkinkan para perempuan desa untuk terlibat aktif dalam menggerakkan perekonomian di desa bahkan lebih lanjut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan desa.

Penelitian ini fokus pada upaya pengoptimalan partisipasi dan pemberdayaan perempuan melalui koperasi perempuan di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Desa Pagendingan Kecamatan Galis. Secara keseluruhan di Kabupaten Pamekasan terdapat sekitar 372 koperasi yang terdata, yang 188 diantaranya merupakan koperasi wanita (KemenKopUKM, 2019). Di Desa Galis sendiri ada 8 Kopwan yang terdaftar, salah satunya adalah Koperasi Wanita Ananda. Keberadaan Koperasi Wanita Ananda sangat menarik karena cukup berkembang sejak awal didirikannya pada tahun 2010. Selain itu koperasi ini justru terlahir di bawah naungan salah satu kelompok wanita di desa yang menunjukkan bibit pemberdayaan perempuan di Pagendingan sudah mulai tumbuh.

Dalam membahas koperasi perempuan juga perlu untuk membahas relasinya dengan isu gender dalam aspek pembangunan, maka yang perlu diperhatikan ialah tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan penguasaan terhadap hak-hak, tanggung jawab, pengambilan keputusan dan berbagai akses baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Hal ini membutuhkan perhatian penuh mengingat laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman, prioritas, pilihan dan hambatan yang berbeda dalam berbagai aspek pembangunan. Oleh karena itu penting untuk memahami pengertian konsep partisipasi dan gender dalam pembangunan untuk memahami eksistensi koperasi perempuan.

Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi dan gender dalam pembangunan telah menjadi bagian dari diskursus dan praktek dari emansipasi. Konsep ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang selama ini termarginalisasi, seperti kelompok perempuan dan kelompok miskin untuk merepresentasikan kelompok mereka (Akerkar, 2001). Dalam artian bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk turut terlibat dalam berbagai keputusan dan kegiatan sosial politik kemasyarakatan.

Kata partisipasi sendiri pada dasarnya digunakan dalam berbagai aspek dan kegiatan dengan berbagai pengertian yang berbeda. Pengertian partisipasi dalam tulisan ini mengacu pada penggunaan metode partisipatori dalam berbagai proyek pembangunan, serta bagaimana masyarakat terlibat dalam berbagai proses pemerintahan ataupun proses politik. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatoris untuk memahami dan mengatasi berbagai realita berbasis gender di masyarakat dengan memperhatikan berbagai masukan dan strategi dari kelompok-kelompok berbeda terhadap proses pembangunan yang dalam penelitian ini fokusnya adalah kelompok perempuan.

Gender dalam Pembangunan

Sejak tahun 1970an gender memang telah menjadi bagian dari isu pembangunan. Para praktisi pembangunan saat itu menyadari bahwa perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pembangunan yang kemudian berdampak pada ketidak mampuan mereka untuk memperoleh keuntungan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu kemudian mulailah digagas agenda Perempuan dalam Pembangunan (PdP) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas perekonomian dan pembangunan. Akan tetapi kemudian agenda ini mulai memperoleh berbagai kritikan karena dianggap membuat para perempuan justru memperoleh beban kerja mereka sebagai buruh dan di sisi lain juga mengabaikan tentang bagaimana agenda ini mengabaikan perspektif laki-laki (Akerkar, 2001).

Oleh karena itu kemudian mulailah diinisiasi agenda baru yang diberi nama Gender dalam Pembangunan (GdP) pada tahun 1990an sebagai sebuah pendekatan baru sebagai upaya memperbaiki pencapaian dari agenda sebelumnya. Pendekatan ini berusaha untuk melihat relasi sosial dan interaksi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, serta konteks dan konstruksi dari maskulinitas dan femininitas. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk melihat bagaimana

keberadaan Koperasi Wanita Ananda dapat menjadi alternatif dalam melihat relasi sosial dalam program pembangunan desa dengan memperhatikan isu gender dalam pembangunan.

BAHAN & METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Zuriah, 2009). Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Pagendingan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan situs penelitiannya adalah Koperasi Wanita Ananda di Pagendingan. Lebih lanjut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi & studi kepustakaan baik terhadap literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian maupun arsip-arsip yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Koperasi Wanita Ananda

Koperasi Wanita Ananda merupakan salah satu koperasi perempuan di Kecamatan Galis yang berdiri pada tanggal 19 April 2010 dan telah tersertifikasi dengan Nomor Badan Hukum 19/BH/XVI.19/2010, Tanggal 19 April 2010. Koperasi perempuan ini digagas oleh para ibu-ibu yang sebelumnya tergabung dalam sebuah organisasi Kelompok Wanita Tani (KWT) Kartini yang telah berdiri lebih lama dan memiliki struktur organisasi yang lebih kuat.

Pendirian koperasi ini dilatar belakangi dari pengalaman para anggota KWT itu sendiri yang selama ini selalu kesulitan untuk memperoleh modal usaha mereka, sehingga kemudian banyak dari anggotanya yang terjatir simpan pinjam dengan para rentenir desa yang memiliki bunga pinjaman antara 20 – 30%. Masalah ini ternyata tidak hanya menimpa anggota KWT saja, namun juga dialami oleh para perempuan lainnya di Desa Pagendingan yang mayoritas bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional.

Menghadapi problematika yang dihadapi perempuan di desa Pagendingan tersebut, dimulailah pembentukan Koperasi Wanita Ananda dengan tujuan awalnya ialah untuk memutus mata rantai simpan pinjam para perempuan desa Pagendingan dengan para rentenir. Meski digagas oleh ibu-ibu KWT Kartini namun tidak semua anggota KWT secara otomatis menjadi anggota Koperasi Wanita Ananda, dikarenakan dalam koperasi diterapkan sistem simpanan wajib dan iuran pokok, yang mungkin menjadi beban bagi beberapa anggota KWT. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan Koperasi Wanita Ananda bersifat sukarela dan tidak ada paksaan di dalamnya.

Selain anggota KWT, Koperasi Wanita Ananda ini juga diikuti oleh perempuan-perempuan lainnya di Pagendingan. Sehingga jumlah anggota koperasi semakin bertambah dari yang semula berjumlah 38 orang pada awal pembentukannya, pada tahun 2018 mencapai 112 anggota koperasi. Struktur organisasi koperasi wanita ini terdiri dari penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Desa Melalui Koperasi

Keberadaan Koperasi Wanita Ananda memberikan harapan baru bagi para perempuan di Desa Pagendingan untuk mengatasi berbagai problematika di masyarakat yang selama ini mereka alami. Tujuan utama didirikannya koperasi ini ialah untuk memutus mata rantai simpan pinjam masyarakat dengan rentenir mulai membuahkan hasil. Semakin banyak masyarakat yang memilih untuk tidak bergantung pada rentenir yang berdampak pada semakin berkurangnya jumlah rentenir di desa Pagendingan.

Selain hal tersebut terdapat beberapa pencapaian dalam pelibatan perempuan dalam

kegiatan desa melalui keberadaan Koperasi Wanita Ananda ini, diantaranya ialah:

1. Memperoleh berbagai pengetahuan baru melalui pelatihan dan pendampingan.
Upaya ini dilakukan mengingat keberadaan koperasi wanita yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mampu memberikan bantuan kepada sesama yang miskin dalam arti luas ketertindasan dalam hal biologis dan sosial melalui pendidikan, konsultasi, pendampingan dan memberikan advokasi sehingga dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian desa (Masula, 2017). Koperasi Wanita Ananda telah menyelenggarakan berbagai kegiatan tersebut seperti pelatihan kepemimpinan, pembinaan dari Dinas Koperasi, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan dan pelatihan perencanaan keluarga.
2. Bertambahnya opsi lapangan pekerjaan baru dan dihasilkannya berbagai produk baru. Hal ini dikarenakan pada awalnya sebagian besar perempuan Pagendingan bekerja sebagai petani dan pedagang di pasar tradisional yang menjual hasil tani. Namun kemudian dengan semakin banyaknya kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Koperasi Wanita Ananda ini membuat para perempuan Pagendingan kini memiliki berbagai pilihan wirausaha dan hasil produk baru seperti batik ikat celup, kerupuk lele, kopi jahe dan pinang muda.
3. Penyediaan wadah pemasaran yang bekerjasama dengan BUM Desa. Hal ini merupakan kelanjutan dari munculnya berbagai produk baru di Desa Pagendingan. Guna membantu dan mempermudah pendistribusian produk hasil usaha baru para perempuan tersebut maka kemudian dijalinkan kerjasama antara Koperasi Wanita Ananda dengan BUM Desa Pagendingan. Melalui kerjasama ini mampu membantu peningkatan penghasilan anggota koperasi dan memperoleh keuntungan dari kerjasama ini.
4. Semakin banyak perempuan terlibat dalam ranah publik di desa, yang semakin mempermudah pencapaian tujuan-tujuan dari Desa Mandiri. Salah satunya ialah dibentuknya perpustakaan Ananda yang dikelola oleh para anggota koperasi. Perpustakaan ini kemudian berkontribusi terhadap kampanye peningkatan minat baca di desa dan membantu mengurangi angka buta huruf karena di dalamnya juga terdapat kegiatan belajar membaca.

Berdasarkan berbagai penjelasan pencapaian partisipasi perempuan Pagendingan melalui koperasi seperti diatas, dapat dilihat bagaimana Koperasi Wanita Ananda dapat mulai berkontribusi terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui 3 aspek: *Pertama*, aspek pemberdayaan ekonomi. Melalui koperasi perempuan ini para perempuan Pagendingan memiliki kemudahan terhadap akses modal sehingga kemudian mereka mampu membiayai usaha mereka dan dapat meningkatkan kemandirian mereka di bidang ekonomi. Selain itu mereka juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan dengan sesama perempuan pelaku usaha lainnya, sehingga mempermudah mereka dalam mengelola usaha yang mereka tekuni. Bahkan lebih lanjut usaha yang mereka miliki ini mulai mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa.

Kedua, meningkatkan kondisi pekerjaan para perempuan Pagendingan. Karena melalui jaringan yang terbangun antara anggota-anggota Koperasi Wanita Ananda ini akhirnya mereka mampu memiliki akses untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi yang mereka tekuni sehingga mereka mampu meningkatkan usaha mereka melalui sistem kerjasama.

Ketiga, pemberdayaan sosial. Dengan adanya Koperasi Wanita Ananda ini mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai kemampuan teknis dan manajemen yang sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu jaringan yang telah mereka bangun melalui koperasi ini juga memungkinkan mereka untuk memperoleh akses kerjasama sosial yang baik antar masyarakat sehingga mereka mampu memperoleh barang-barang dan jasa yang lebih murah.

Selain itu para perempuan yang terlibat dalam koperasi ini mengalami peningkatan rasa percaya diri, karena kini mereka telah memperoleh pengetahuan yang cukup tentang hak-hak dan kontribusi apa saja yang bisa dilakukan oleh perempuan baik dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum ataupun pembangunan secara khusus.

Berbagai pencapaian dalam pelibatan perempuan melalui koperasi ini di lain sisi juga dipengaruhi dengan kepemimpinan perempuan di Desa Pagendingan. Hal ini dikarenakan Kepala Desa Pagendingan saat ini merupakan seorang perempuan, yaitu ibu Hj. Rahmawati yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Wanita Ananda. Adanya kepala desa perempuan memiliki pengaruh yang baik terhadap meningkatnya pelibatan perempuan dalam kegiatan desa melalui Koperasi Wanita Ananda ini. Selain itu juga semakin mempermudah untuk membentuk kebijakan desa yang bersifat gender partisipatoris.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kebijakan partisipatoris tersebut ialah dengan merencanakan program penyertaan laki-laki dalam upaya pelibatan perempuan di kegiatan desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan penyadaran pada mereka bahwa perempuan juga berhak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan publik dan pengambilan keputusan di desa, yang mana dalam mewujudkan hal ini perempuan tidak mampu mewujudkannya sendiri melainkan juga butuh kesamaan persepsi tentang tata kelola desa partisipatif gender. Salah satu cara merealisasikannya ialah dengan diseminasi isu gender dalam pembangunan dan menginisiasi kerjasama usaha antara pihak laki-laki dan perempuan guna mempercepat pencapaian Desa Mandiri. Seperti dengan menjembatani para pelaku usaha laki-laki dan perempuan untuk dapat bekerja sama dalam mengembangkan usahanya dan sebagaimana rencana Kepala Desa Pagendingan untuk membuat Desa Wisata yang akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan memberdayakan seluruh masyarakat potensial Pagendingan baik laki-laki maupun perempuan.

Kendala Koperasi Perempuan dalam Pembangunan Desa

Selain berbagai dampak positif yang dirasakan oleh perempuan Pagendingan melalui Koperasi Wanita Ananda ini, di sisi lain juga masih terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi sebagaimana berikut:

1. Terhambatnya perputaran modal karena dalam perspektif para anggota dana hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada Koperasi Wanita Ananda dianggap sebagai bantuan. Hal ini sangat menjadi tantangan bagi para pengurus koperasi untuk membuat roda perputaran simpan pinjam koperasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Terhambatnya kaderisasi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan memberikan pelatihan lanjutan kepada anggota koperasi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya perempuan desa yang belum mengenyam pendidikan, serta enggannya para intelektual desa untuk terlibat.
3. Sistem patriarki di Desa Pagendingan yang masih cukup kuat. Masih banyak anggapan masyarakat yang menilai bahwa perempuan lebih baik berdiam diri di rumah dan tidak terlibat dalam berbagai kegiatan publik. Sedangkan di sisi lain meskipun beberapa perempuan telah memperoleh sebagian akses untuk bekerja di sektor ekonomi akan tetapi berbagai perspektif ketimpangan gender masih sangat mempengaruhi keseharian masyarakat Pagendingan. Hal ini justru dapat memberikan beban ganda bagi perempuan yang jika tidak segera diatasi mampu memicu berbagai tindak kekerasan ataupun eksploitasi terhadap perempuan itu sendiri.
4. Guna menanggapi berbagai permasalahan tersebut tentu sangatlah dibutuhkan solusi yang tepat dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk bekerjasama mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh para perempuan desa di Pagendingan. Lebih lanjut diharapkan

upaya pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa melalui koperasi perempuan ini semakin ditingkatkan dengan berbagai pendidikan dan kepelatihan khususnya terkait dengan perubahan pola pikir yang mengarah pada gender partisipatoris dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting untuk mulai memasukkan isu pengarus utamaan gender dalam ranah pembangunan, salah satunya dalam program Desa Mandiri. Hal ini merupakan hal yang penting untuk mewujudkan tata kelola desa partisipatif yang menyertakan wacana gender dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang sama dalam proses pembangunan melalui program Desa Mandiri salah satunya melalui Koperasi Perempuan.

Eksistensi Koperasi Wanita Ananda di Desa Pagendingan menunjukkan bahwa sangatlah memungkinkan untuk mulai melibatkan perempuan dalam program pembangunan desa dengan memanfaatkan eksistensi koperasi perempuan. Koperasi Wanita Ananda menunjukkan berbagai pencapaian yang cukup baik meski sangat jauh untuk dikatakan sempurna, akan tetapi dapat menjadi batu pijakan bagi para perempuan Desa Pagendingan untuk mulai terlibat dalam berbagai kegiatan desa.

Lebih lanjut di masa mendatang diharapkan eksistensi koperasi perempuan secara lebih luas tidak hanya mampu memberdayakan perempuan di desa saja, namun juga mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan yang mana hal tersebut juga merupakan pencapaian inti dari yang ingin dicapai oleh program Desa Mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih saya sampaikan kepada bapak H. Syaifullah Farid Wajidi, S.H., M.H. selaku Kabag Kesejahteraan Rakyat Pamekasan dan Ibu Dr. Hj. Waqi'atul Masrurah, M.Si. selaku pengurus Organisasi Muslimat Cabang Pamekasan yang telah membantu dalam proses pencarian data lapangan penelitian ini. Selanjutnya juga saya sampaikan terimakasih yang luar biasa kepada ibu Hj. Rahmawati sebagai Kepala Desa Pagendingan sekaligus Ketua Koperasi Wanita Ananda yang telah bersedia untuk berbagi data dan pengetahuan terkait penelitian ini. Serta tak lupa terimakasih kepada ibu Magfiroh dan ibu Usmiyati dari Kelompok Wanita Tani yang juga turut bersedia untuk menjadi responden dari penelitian. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang bersifat mandiri dengan pendanaan yang berasal dari peneliti sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerkar, Supriya, 2001, *Gender and Participation*, Institute of Development Studies, November.
- Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, *Kepemimpinan Perempuan Desa*, Jakarta.
- Masula, Imroatu Choirah. *Revitalisasi Koperasi Wanita dalam Menumbuhkembangkan Perekonomian Desa*, KTI Perkoperasian Tingkat Jawa Timur, 2017.
- Ratnasari, Saleh, & Rozikin, 2011, Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (3) : hlm. 51 – 60.

- Wiati, Catur Budi, 2007, Perempuan Pembaharu Desa, dalam Indriatmoko (eds), *Dari Desa ke Desa Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*, CIFOR, Jakarta, hlm. 121– 131.
- Zuriah, Nurul, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 92.
- Kementerian Koperasi dan UMKM, Koperasi Jawa Timur, Pamekasan, diakses pada 20 Juli 2019, (<http://nik.depkop.go.id/>).
- Tingkatkan Akses Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi, 2018, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses pada 2 Agustus 2019, (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1811/tingkatkan-akses-dan-partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-ekonomi>).

**PENGEMBANGAN POTENSI PESISIR DAN WISATA LOKAL DALAM SKEMA
COLLABORATIVE GOVERNANCE: STUDI DI DESA TANJUNG PASIR KABUPATEN
TANGERANG**

**COASTAL POTENCY AND LOCAL TOURISM DEVELOPMENT IN COLLABORATIVE
GOVERNANCE PERSPECTIVE: STUDY IN TANJUNG PASIR VILLAGE TANGERANG
REGENCY**

Indra Pratama Putra S¹⁾, Ismail²⁾, Haryono³⁾

¹Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Gadjah Mada, Jl. SosioYustisia No.2 Bulaksumur Yogyakarta 55281

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Bhayangkara, Jl. Ahmad Yani No.14 Kota Surabaya 60231

³Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara,
Jl. Ahmad Yani No.14 Kota Surabaya 60231 Surabaya

*indra.pratama.p@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi *collaborative governance* dalam mengatasi kesenjangan antara tingginya potensi sumber daya alam (SDA) pesisir namun tidak diimbangi dengan pengelolaan di tataran lokal dan terhambat karena adanya gejala sosial masyarakat. Gejala tersebut berupa lemahnya kemampuan baik pemerintah di tataran *street level* maupun masyarakat sendiri. Sangat menarik ketika terjadi paradoks banyaknya kelebihan dan peluang kesejahteraan namun pada kenyataannya belum mampu terselesaikan dan masih terjadi keterpurukan. Dengan dilatarbelakangi oleh fenomena kumuh kawasan, minimnya penataan prasarana sarana utilitas (PSU) sosial dan ekonomi, serta kemiskinan masyarakat pesisir di kawasan wisata, penelitian ini berupaya menjelaskan peran *stakeholder* dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Objek penelitian yakni di kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang yakni Desa Tanjung Pasir. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis dilakukan dengan teknik *participation rural appraisal* (PRA) yang dilanjutkan pemetaan SWOT dan identifikasi strategi pengembangan kawasan wisata pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tanjung Pasir telah memiliki *trigger* dalam pengembangan wisata lokal berbasis pesisir seperti Pantai Tanjung Pasir, Penangkaran Buaya, Resort Tanjung Pasir, Jalur Penyeberangan Pulau Wisata, Wisata Mangrove, dan Wisata Kuliner. Sementara permasalahan utama terletak pada kemampuan sumber daya lokal yang belum optimal untuk meningkatkan standar kualitas wisata beserta komponen yang dimiliki seperti penataan kawasan dan pemberdayaan warga. Selain itu perlu dilakukan optimalisasi aspek-aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan elemen tambahan pendukung pengembangan pariwisata. Pasca pemetaan isu strategis, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan menggerakkan lapisan *stakeholder* dalam bentuk pembagian peran, sinergitas kerjasama pengembangan, serta sinkronisasi penataan kawasan wisata di Desa Tanjung Pasir untuk mensejahterakan dan memandirikan desa. Sebagai implikasi, penelitian ini telah menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam kaitannya dengan strategi pengembangan pariwisata di Desa Tanjung Pasir.

Kata Kunci: sumber daya pesisir, wisata, Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang

ABSTRACT

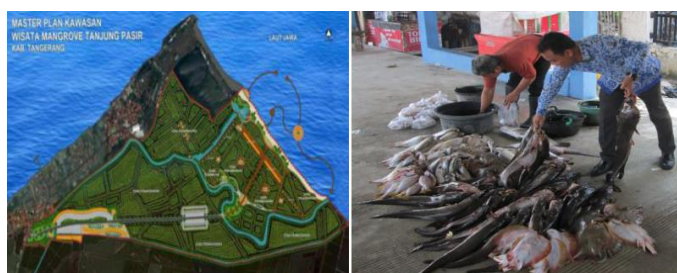
This research aims to study collaborative governance strategy in order to solve gap problem between abundance of natural resources but not equal in local management and constrained social phenomenon. Some barriers like low capacity that happen in street level government and local population. It will be interesting because paradox occur in abundance of advantages and welfare

opportunity but can not make local society out of local downturn and poverty (vicious circle). This research background is slum area phenomenon, low arrangement of local infrastructure, and poverty around tourism object and then attempted to explain stakeholder role in order to solve the problem. The research held in Banten Province, especially in coastal area in Tanjung Pasir Village. The research methods performed with interview, observation, and documents study. Field result also analyzed by participation rural appraisal (PRA) and continued by SWOT analysis and coastal tourism development identification strategy. The result of this research is two strategic issue: at first, Tanjung Pasir Village has some tourism development triggers like Tanjung Pasir Beach, Crocodile Captivity Park, Tanjung Pasir Resort, crossing access tourism island, Mangrove Park, and Seafood Culinary; secondly, main problem in tourism development is in local capacity of human resources (especially in quality standard enhancement of tourism components and local empowerment). Based on the field result, it necessary to improve tourism development components like attraction, amenity (accommodation), accessibility, and ancillary. After it is done in strategic issue mapping, it also necessary to coordinating all of stakeholder in collaboration scheme to develop tourism area in Tanjung Pasir Village to make welfare society. The implication of this research are contribute in tourism developing strategy by Tangerang Regency Government.

Keywords: coastal resources, tourism, Tanjung Pasir, Tangerang Regency

PENDAHULUAN

Secara geomorfologi, Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Pesisir Laut Jawa yang terletak di bagian utara. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau merupakan daerah penyangga kawasan ibukota. Berkenan dengan keberadaan kawasan pesisir, maka tentu saja adanya Laut Jawa tersebut membentuk satu karakteristik daerah sebagai daerah pesisir. Selain itu, adanya karakteristik kawasan pesisir juga berdampak pada peluang keberadaan potensi bahari dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Kabupaten Tangerang. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2017, PDB perikanan tumbuh di atas 7% dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (5,07%) pada tahun 2017 (BPS, 2018).



Gambar 1. Peta Wilayah dan Potensi Perikanan Desa Tanjung Pasir
Sumber. Hasil Dokumentasi Tim (2017)

Kontribusi sektor perikanan tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal pesisir di Desa Tanjung Pasir. Kajian yang dilakukan Nizar (2018) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 berada pada kisaran 5-6%. Kenyataan ini sekaligus mengafirmasi fenomena di Indonesia yang menyebutkan bahwa pesisir yang seharusnya mampu membawa kesejahteraan justru dalam kenyataannya masyarakat cenderung stagnan dan termarginalkan (Satria, 2015). Di Desa Tanjung Pasir, minimnya kesejahteraan ditinjau dari beberapa aspek yakni: pertama dari tatanan sosial berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yakni 85% penduduk hanya mengenyam pendidikan dasar dan tidak bersekolah (Monograf Desa Tanjung Pasir, 2018); kedua dari aspek lingkungan berupa

kumuhnya pesisir dan akses wisata serta kesiapan penataan infrastruktur yang buruk (SK Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015), serta; ketiga, pendapatan ekonomi masyarakat masih berada pada kisaran 50-100 ribu perhari dan dibawah rata-rata UMK Kabupaten Tangerang (SK Gubernur Banten No.561/Kep.442-Huk/2017, diakses pada 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka strategi harus dilakukan secara komprehensif dan saling berkaitan. Keterkaitan tersebut berkontribusi dalam menghambat kemajuan kawasan termasuk dalam pembangunan wisata lokal yang telah diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Potensi utama di Desa Tanjung Pasir adalah hasil perikanan (termasuk kuliner laut) dan wisata bahari. Baik produk perikanan maupun wisata, seluruhnya telah dikenal serta dikunjungi oleh masyarakat lokal di Kabupaten Tangerang dan di luar seperti Kota Jakarta. Data TPI Desa Tanjung Pasir mencatat pada tahun 2014 dan 2015 (diakses pada 2017), jumlah produksi perikanan mencapai 82,653 ton dan 75,088 ton dalam satu tahun. Dari pengamatan lapangan, belum ada pengolahan ikan untuk diubah menjadi produk tahan lama. Untuk produk perikanan segar, masyarakat lokal lebih banyak menjual mentah dan melelang secara langsung di tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Tanjung Pasir.

Untuk destinasi wisata, trigger yang telah dimiliki Desa Tanjung Pasir yakni Pantai Tanjung Pasir, penangkaran buaya, situs penggilingan tebu, Tanjung Pasir Resort, dan balai benih ikan dan udang yang di dalamnya terdapat embrio taman mangrove. Dari observasi peneliti, menunjukkan bahwa pengelolaan wisata di Desa Tanjung Pasir tampak belum memadai baik dari segi atraksi, amenitas, akomodasi, serta aksesibilitas. Selain itu juga hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Suharsono et al (2015) yang menyimpulkan bahwa kondisi kebersihan (masalah sampah) dan estetika wisata di Pantai Tanjung Pasir menunjukkan adanya kekurangan. Kekurangan tersebut khususnya dari segi atraksi wisata, kelengkapan (kamar mandi umum/toilet), pembuangan sampah, fasilitas penyeberangan, dan kelengkapan lainnya. Padahal jika dikelola secara serius, maka wisata pesisir akan menjadi trigger utama dalam menumbuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Spillane (1989) bahwa pariwisata berpeluang memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya dalam akses lapangan kerja dan bidang lainnya.

Pertumbuhan wisata dihasilkan melalui pengembangan karakteristik lokal di Desa Tanjung Pasir, khususnya perpaduan antara potensi dengan produk lokal. Tujuannya adalah supaya menarik masyarakat lokal dan sekitarnya untuk datang berkunjung. Sebagaimana dinyatakan oleh Risanti (2010) bahwa upaya untuk menarik wisatawan adalah dengan penawaran produk di lokasi wisata. Di Desa Tanjung Pasir, ketertarikan tersebut disebabkan oleh hasil laut dengan kualitas prima, harganya yang lebih murah, dan lebih baik jika harus membeli produk laut yang sudah melalui proses pembekuan setelah didistribusikan di swalayan dan pasar-pasar. Hanya saja, sepanjang keberlangsungan eksplorasi potensi alam terbatas pada penjualan ikan mentah/asin dan kuliner lokal. Untuk pariwisata, ketertarikan pengunjung muncul dari adanya panorama pesisir. Permasalahannya adalah minimnya kapasitas pengelolaan baik dari SDM, tatanan infrastruktur, serta lingkungan sekitar wisata.

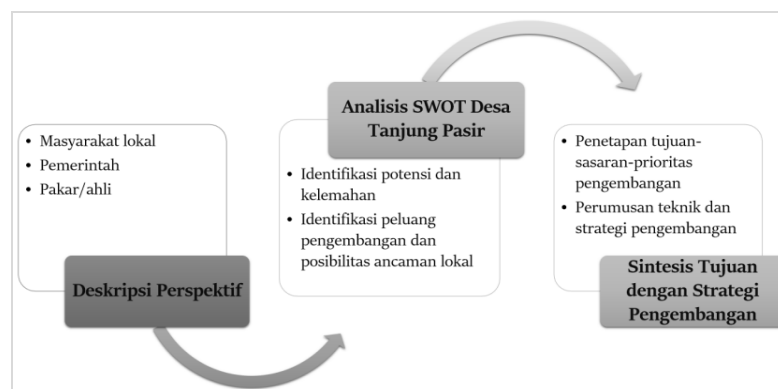
Pengelolaan wisata di Desa Tanjung Pasir memiliki kondisi yang hampir sama dengan pengelolaan SDA, masih terdapat hambatan dan keterbatasan. Beberapa atraksi wisata existing seperti Pantai Tanjung Pasir, penangkaran buaya, situs penggilingan tebu, Tanjung Pasir Resort, dan balai benih ikan dan udang yang menyatu dengan embrio taman mangrove pada saat ini memiliki kondisi yang belum dikelola penuh. Dengan kata lain bahwa beberapa embrio atraksi wisata yang sebetulnya mampu menjadi tulang punggung kemajuan Desa Tanjung Pasir namun

kesiapan pengembangannya masih rendah mengingat kondisinya yang sangat minim perhatian dari masyarakat lokal.

Peluang pengembangan Desa Tanjung Pasir lainnya adalah rencana pengembangan budidaya mangrove dan keberadaan resort di wilayah setempat. Bagi masyarakat setempat, sebetulnya hal ini menjadi peluang nilai tambah untuk meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan lokal. Adanya perpaduan antara potensi sumber daya pesisir dengan dukungan wisata konservasi alam diyakini akan mendatangkan perubahan berupa peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Pasir. Selain itu, lokasi taman mangrove di Desa Tanjung Pasir juga menyatu dengan Pantai Tanjung Pasir yang merupakan prioritas pembangunan dalam program pengembangan pusat seni budaya dan pariwisata pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Hanya saja terdapat permasalahan berupa keterbatasan SDM lokal, rendahnya kualitas manajemen pengelolaan wisata dari masyarakat dan pemerintah desa, akses modal yang belum terjangkau secara menyeluruh, serta rencana prioritas pengembangan yang belum terimplementasikan sepenuhnya. Dampaknya meskipun potensi melimpah namun menjadikan kondisi di Desa Tanjung Pasir cenderung stagnan sehingga membutuhkan upaya strategi penanganan dan pengelolaan melalui kerjasama dan kolaborasi antar stakeholder. Tujuan utamanya adalah menemukan solusi dan strategi dalam menangani paradoks tingginya potensi pesisir namun belum maksimal terkelola.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menganalisis kajian dibutuhkan strategi dan metode selama pengumpulan data/informasi, analisis, serta penyusunan hasil. Pengumpulan data dan informasi kajian dilaksanakan melalui triangulasi. Pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta pandangan para pakar atau ahli. Untuk penyusunan naskah hasil lapangan, digunakan metode kualitatif yang menjadikan peneliti berperan sebagai participant observer (partisipan pengamat) yang melaksanakan proses pencatatan, perekaman, serta pengamatan (Ahmad, 2015). Sebagai batasan, kajian berfokus pada potensi pesisir dan wisata lokal beserta pengelolaan di Desa Tanjung Pasir.



Gambar 2. Skema Metodologi Kajian

Sumber. Keban (*diolah penulis*, 1999)

Data seputar kondisi lapangan (masyarakat, pemerintah, dan pakar/ahli) didapatkan melalui metode PRA atau participation rural appraisal (wawancara, interview, studi dokumentasi, pelaksanaan observasi, dan FGD). Alasan penulis menggunakan metode PRA yakni penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan partisipatif yang berupaya mendapatkan perspektif masyarakat lokal dari berbagai tokoh masyarakat (local strong man) dan pemerintah

lokal (street level government) yang mewakili perspektif kondisi lokal yang kemudian dilakukan analisis serta disinergikan dengan upaya perencanaan (Mustanir et al, 2018). Perspektif ini mulai dari eksplorasi permasalahan, trend atau kebiasaan masyarakat, serta kebutuhan dari masyarakat dalam pengembangan wilayah desa. Untuk persepsi pemerintah, dilakukan analisa kajian dan evaluasi dokumen perencanaan daerah (evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan stakeholder, serta kondisi riil di lapangan). Untuk perspektif ahli/pakar yakni berupa sinkronisasi observasi lapangan (potensi alam (SDA) dan potensi lokal/kawasan) dan dilanjutkan dalam bentuk rumusan desain baik program maupun teknis pengembangan wilayah amatan. Analisis lainnya juga dirumuskan melalui tahapan FGD yang mempertemukan semua pihak yang berkepentingan di Desa Tanjung Pasir, baik dalam konteks substansi perikanan kelautan, pariwisata, dan pembangunan wilayah.

Dari seluruh temuan sebelumnya, maka kemudian dilakukan analisa SWOT lingkungan internal dan eksternal. Di lingkungan internal Desa Tanjung Pasir, dianalisis beberapa hal yakni: a).sumber daya pesisir (khususnya potensi perikanan/kelautan dan wisata); b).strategi pembangunan pariwisata yang telah dilakukan, dan; c).kinerja pembangunan potensi lokal dan pariwisata. Pengkajian dilakukan dengan klasifikasi aspek-aspek apakah kemudian mendorong atau justru menghambat pembangunan. Untuk lingkungan eksternal, dilakukan kajian seputar kecenderungan berupa aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi dari luar yang berdampak pada pembangunan pesisir lokal. Dari lingkungan eksternal, kemudian diidentifikasi berbagai peluang (opportunities) pengembangan dan ancaman (threats) yang perlu dihindari. Pasca dilakukan analisa SWOT, maka kemudian disusun sintesis antar tujuan dan prioritas serta strategi pengembangan sektor unggulan. Selama menyusun strategi pengembangan sektor unggulan, terdapat beberapa poin penting dalam tiap sektor yang harus dipahami peneliti yakni:

1. Adanya legitimasi kuat baik oleh masyarakat lokal yang diukung dokumen kebijakan sebelumnya (diperoleh melalui konsensus pembangunan);
2. Adanya kontribusi dukungan peluang ekonomi baik di skala lokal maupun luar kawasan;
3. Adanya harmonisasi (keterpaduan) pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, pemerataan, lingkungan yang stabil, serasi dengan kondisi alam, dan peningkatan kualitas hidup penduduk;
4. Adanya dukungan potensi fisik seperti kesesuaian lahan dan zona ekologi;
5. Adanya dukungan dari kondisi demografi penduduk lokal, teknologi, dan kelembagaan masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Isu Strategis dan Pemetaan SWOT

Perpaduan antara potensi kelautan dan morfologi pesisir merupakan kekuatan utama bagi penduduk di Desa Tanjung Pasir. Sejauh ini bagi sebagian besar penduduk lokal, laut beserta hasil kekayaan yang dimiliki menjadi sumber penghidupan dalam keberlangsungan kehidupan. Selain untuk dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi, hasil laut dan kekayaan lainnya memberikan penghidupan melalui adanya usaha-usaha masyarakat di sekitar pesisir Laut Jawa. Usaha yang dijalankan mulai dari penjualan ikan (baik mentah maupun siap konsumsi), barang-barang komplementer yang dibutuhkan untuk menangkap ikan, bahan bakar kapal, atau dalam bentuk jasa berkaitan dengan pesisir dan kenelayan seperti wisata. Dengan kata lain bahwa pesisir memiliki daya tarik tersendiri dalam menciptakan keberlangsungan dan keberlanjutan hidup bagi masyarakat. Tidak hanya ditujukan bagi masyarakat lokal, usaha yang ada di Desa Tanjung Pasir

berkaitan dengan potensi-potensi pesisir juga menarik minat masyarakat dari luar desa untuk berkunjung ke desa untuk turut menikmati potensi dan kekayaan pesisir.

Permasalahan masyarakat pesisir lokal adalah keterbatasan SDM, keterbatasan modal sebagai dampak dari pendapatan yang terbatas, serta penataan lingkungan dan kawasan yang membutuhkan revitalisasi dan pengembangan lanjutan. Lebih lanjut lagi bahwa adanya kendala tersebut merupakan ancaman sekaligus hambatan pengembangan kawasan. Sebagai konsekuensi sekaligus tantangan yang muncul strategi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan kondisi yang dilanjutkan dengan improvisasi peran antar *stakeholder* dan lembaga. Peran tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, membuka akses permodalan masyarakat, serta melaksanakan kewajiban pemerintah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir.

Tabel 1. Pemetaan SWOT Sumber Daya Pesisir dan Wisata Tanjung Pasir

Potensi	Kelemahan
<i>a. Geografis pesisir;</i> <i>b. Pusat aktifitas kenelayanan;</i> <i>c. Aktifitas TPI;</i> <i>d. Embrio taman mangrovae;</i> <i>e. Jalur akses pulau wisata;</i> <i>f. Dukungan masyarakat lokal.</i>	<i>a. Pendangkalan tepi laut;</i> <i>b. Docking dan breakwater buruk;</i> <i>c. Abrasi dan pencemaran laut;</i> <i>d. Sarpras wisata yang terbatas;</i> <i>e. Kesadaran wisata masih rendah;</i> <i>f. Minim pemberdayaan lembaga lokal;</i> <i>g. Minim jalinan kemitraan.</i>
Peluang	Ancaman
<i>a. Possible untuk integrasi antar titik wisata;</i> <i>b. Kerjasama multistakeholder yang memungkinkan untuk dilaksanakan melalui sinergitas program.</i>	<i>a. Distorsi lingkungan pesisir;</i> <i>b. Transisi dan distorsi budaya kenelayanan dan masyarakat lokal;</i> <i>c. Perubahan tata guna lahan.</i>

Sumber. Observasi (2018)

Pesisir berikut sumber dayanya merupakan modal utama dalam pengembangan Desa Tanjung Pasir. Panorama pantai juga telah mampu menjadi *trigger* berkaitan dengan atraksi wisata desa. Tanpa melakukan upaya perawatan yang signifikan, masyarakat dapat menikmati hasil laut yang sangat bernilai. Peran masyarakat hanya dengan menjaga kebersihan kawasan pantai dan laut sehingga mampu mengeksplorasi dan mengolah hasil laut. Dampak lain adalah memberikan pemasukan pendapatan dan menghidupkan perekonomian melalui keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga kapal ikan, dan aktivitas kenelayanan. Hal ini juga tampak dari usaha masyarakat desa yang membuka warung-warung sederhana, pedagang kaki lima, penginapan, perlengkapan pemancingan, usaha kenelayanan, dan usaha lainnya. Hal ini bukan hanya bagi pelaku aktivitas di pesisir dan TPI, namun juga menambah pendapatan bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan pantai.



Gambar 3. Embrio Taman Mangrove (kiri); Pantai Tanjung Pasir (kanan)

Sumber. Dokumentasi (2018)

Desa Tanjung Pasir telah memiliki wisata *existing* berbasis panorama bahari. Sejauh ini, wisata pesisir cukup diminati khususnya Pantai Tanjung Pasir dan jalur akses penyeberangan menuju pulau wisata (karena aksesnya cukup dekat) yang telah menjadi alternatif destinasi wisata bagi masyarakat lokal dan luar Kabupaten Tangerang. Sebagaimana dinyatakan Arianti (2016) bahwa sektor unggulan sangat berpeluang terhadap pembangunan kawasan dan daerah, khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini juga tampak selama aktivitas pengelolaan wisata, masyarakat menyediakan jasa penyeberangan dan penyewaan kapal menuju Kepulauan Seribu sehingga berdampak pada kontribusi pendapatan bagi masyarakat penyedia jasa. Di samping itu juga beberapa wisata yang telah berjalan tengah menjadi prioritas untuk dilakukan revitalisasi dan dipadukan dengan embrio wisata baru yakni taman mangrove yang menyatu dengan tambak budidaya ikan. Isu yang berkembang adalah adanya integrasi melalui dijadikannya taman mangrove sebagai akses menuju Pantai Tanjung Pasir. Hal ini dapat dilihat melalui rancangan jalan dengan lebar 5-6 meter yang secara swadaya dibangun masyarakat beserta tokoh masyarakat di dalam wilayah taman mangrove. Rancangan jalan ini sekaligus menunjukkan adanya dukungan penuh dari masyarakat terhadap pembangunan pariwisata di Desa Tanjung Pasir.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Pasir ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat desa dan jenis pekerjaan. Berdasarkan Data Monograf Desa Tanjung Pasir tahun 2015 (*diakses pada 2018*), sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan dasar dan tidak bersekolah (5.413 penduduk atau 85% dari seluruh penduduk). Selain itu, dari aspek pekerjaan sebagian besar merupakan nelayan dan pekerja di sektor informal seperti buruh, nelayan pesisir, dan tidak bekerja (terdapat kurang lebih 5.261 buruh dan nelayan atau 83% serta 871 atau 13% penduduk yang tidak bekerja). Proporsi tingginya jumlah buruh menunjukkan kenyataan bahwa masyarakat sangat lemah dalam pengembangan potensi lokal dan sulit mengoptimalkan pendapatan dari sektor pesisir, khususnya dalam upaya peningkatan nilai tambah produk. Selain itu juga minimnya pekerja pengelola di sektor wisata *existing* yang resmi menandakan bahwa kemampuan masyarakat dalam pengelolaan wisata sangat rendah dan konvensional.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi aspek yang harus dipertimbangkan. Kondisi di Desa Tanjung Pasir berkenaan dengan lingkungan adalah keberadaan lahan kumuh sejumlah 3,06ha (Surat Keputusan Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang). Luasan ini juga termasuk di sekitar akses lokasi wisata dan cukup mengganggu ketika dilewati masyarakat yang berkunjung ke beberapa titik wisata. Selain itu, infrastruktur di sekitar kawasan kenelayan juga sangat buruk. Dari observasi yang dilakukan, terjadi pendangkalan di sekitar *docking* kapal dan *breakwater* mulai rusak. Dampaknya adalah aktifitas masyarakat nelayan terganggu ketika berlayar dan berlabuh saat menangkap ikan akibat lumpur yang mengendap di tepian dermaga. Selain itu juga terdapat dampak berupa pencemaranm penurunan kualitas risorsis,

gangguan pada habitat, serta terancamnya satwa liar, serta sedimentasi karang (Gladstone et al, 2013; Hasler *et al*, 2008).



Gambar 4. Degradasi Tepian Pesisir Tanjung Pasir

Sumber. Dokumentasi Peneliti (2018)

Problem kawasan kumuh dan rendahnya kualitas SDM lokal turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Pasir. Tingginya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki sulit dioptimalkan sebagai ciri khas desa mengingat adanya keterbatasan terutama dalam pengelolaan dan pembuatan produk lokal. Dari observasi dan triangulasi yang dilakukan peneliti terhadap *stakeholder* lokal, pemerintah, beberapa warga setempat, nelayan, serta kajian dokumen pemerintah daerah, tercatat bahwa penghasilan warga lokal berkisar antara 50-100 ribu setiap harinya. Jika dihitung, maka pendapatan warga lokal berkisar 1,5-3 juta setiap bulannya. Pendapatan tertinggi tersebut memang cukup mendekati standar upah minimum (UMK) di Kabupaten Tangerang yang berkisar pada angka Rp. 3.622.215,00 perbulan (SK Gubernur Banten No.561/Kep.442-Huk/2017, diakses pada 2018). Namun dengan adanya pendapatan tersebut menjadikan masyarakat sangat sulit dalam menyisihkan sebagian materi yang dimiliki sebagai modal pengembangan SDA pesisir. Dengan kata lain bahwa dibutuhkan campur tangan pemerintah dan pihak-pihak di luar masyarakat lokal untuk dapat membuka akses permodalan serta pemberdayaan dalam kerangka pengembangan potensi SDA perikanan dan kelautan.

Keberadaan beberapa titik wisata *existing* beserta aktivitas dalam satu desa menjadi potensi pengembangan utama bagi Desa Tanjung Pasir. Jejak keberhasilan seputar wisata sendiri ditunjukkan melalui adanya hubungan keseimbangan titik temu antara permintaan dengan penawaran (Gunn *et al*, 2002). Kajian mengenai daya dukung di Pantai Tanjung Pasir menunjukkan adanya kelayakan berkaitan dengan jumlah pengunjung di Pantai Tanjung Pasir dengan jumlah 162 orang dalam satu harinya (Muflih *et al*, 2015). Hal ini juga ditemukan dari keterangan masyarakat pengelola bahwa wisatawan di Pantai Tanjung Pasir berkisar antara 150 orang hingga 200 orang. Kondisi ini tentunya memberikan adanya peluang pengembangan yang lebih lanjut berkenaan dengan pengelolaan wisata di Desa Tanjung Pasir.

Strategi Pembagian Peran Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pariwisata

Berdasarkan perspektif kebijakan daerah, Desa Tanjung Pasir merupakan wilayah promosi sekaligus ditetapkan sebagai prioritas pembangunan destinasi pariwisata daerah. Prioritas ini dirancang melalui penetapan beberapa program di Kabupaten Tangerang antara lain program pengembangan pusat seni budaya dan pariwisata, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan), dan Program Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Sebagai konsekuensi dari beberapa program, maka selama pelaksanaannya program tersebut melibatkan beberapa pihak organisasi perangkat daerah (OPD) dalam bentuk kerjasama pengembangan wilayah. Beberapa OPD tersebut antara lain Bappeda Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang, BPMPTSP, Sekertariat Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemuda Olahraga Budaya

dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan. Secara keseluruhan, masing-masing OPD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) selama pengembangan potensi dan kawasan serta telah ditetapkan dalam rencana program pembangunan dipetakan sebagai berikut:

Nasional	KEMENDESPT	KEMENATR	KEMENPERIN	KEMENDAG
	KEMENBUMN	KKP	KEMENTAN	
	BPN	KEMENPPPA	KEMENKOPUKM	
	KEMENPUPR	KEMENPAR	KEMENHUTLH	
Daerah Provinsi	BLH	Dinas Pemuda & Olah Raga	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	BPPM	Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Kelautan & Perikanan	Dinas Sumber Daya Air & Permukiman Dinas Kop & UMKM	
	BKPP	Dinas Bina Marga & Tata Ruang		
	BPB	Dinas Kehutanan & Perkebunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata		
Daerah Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja		Dinas Perikanan	
	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata		Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	Dinas Bina Marga & SDA		Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	
	Dinas Tata Ruang & Bangunan		Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	
	Dinas Perumahan, Permukiman, & Pemakaman		Dinas PPPA	
	Dinas Kop Usaha & Mikro		BPBD	
Lokal	Pemerintah Desa Tanjung Pasir		Koperasi Mina Dharma	TNI Angkatan Laut
	Kecamatan Teluknaga		Koperasi Mina Fajar	Perhutani
	Kelompok binaan UPK		Koperasi Mina Bunga Tanjung	Pelaku Usaha
	Komunitas TOPLES		Tim Pengelola TPI Tanjung Pasir	
	Komunitas Tani		Masyarakat	
	Komunitas Nelayan			

Gambar 5. Pemetaan stakeholder

Sumber. Analisis (2017)

Fokus dan strategi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan wisata di Desa Tanjung Pasir didasarkan pada konsep perencanaan yang harmonis. Dengan menyesuaikan visi misi dari Kabupaten Tangerang, maka penekanan pembangunan yakni pada perbaikan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan, serta hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada harmonisasi sosial budaya, ekonomi, dan alam atau *triple-p* yakni *people*, *profit*, and *planet* (Stren et al, 1992). Dengan kata lain bahwa *people* diartikan sebagai perbaikan manusia beserta aspek sosial budaya; *profit* diartikan sebagai manfaat keuntungan dari segi kesejahteraan ekonomi, dan; *planet* diartikan sebagai alam yang harus dilestarikan dan dijaga kualitasnya. Aspek sosial budaya merupakan aspek dimana masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupan melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Berkenaan dengan potensi pesisir dan pariwisata di Desa Tanjung Pasir, maka asumsinya adalah terdapat keterkaitan antara peningkatan kualitas hidup dalam bentuk dorongan pemberdayaan dan peningkatan SDM di Desa Tanjung Pasir.

Kabupaten Tangerang memang belum memiliki tinjauan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan pariwisatanya. Namun berkaitan dengan pariwisata dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, acuan yang dapat dipakai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisata, tepatnya pada pasal 4 undang-undang tersebut yang secara substantif menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya aktifitas kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada skala lokal dan kedaerahan, baik Pemda Tangerang maupun masyarakat lokal di Desa Tanjung Pasir sangat menginginkan adanya perubahan bagi masyarakat terlebih ketika dikaitkan dengan adanya paradoks berupa “potensi kawasan yang tinggi namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan”.

Urgensi dari aspek alam dan lingkungan sangat tinggi dalam kaitannya dengan keberlanjutan kehidupan ekosistem dan tempat tinggal makhluk hidup. Namun hal ini seringkali dipelekan akibat terlalu mengejar dampak ekonomi tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang ada. Salah satu upaya preventif untuk menjaga aspek alam dan lingkungan hidup adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat serta mengedukasi dalam mengkonservasi alam secara berkelanjutan. Selain itu, pada kawasan destinasi pariwisata sebaiknya didorong untuk terus memantau dampak pada lingkungan binaan, seperti tingkat kebersihan atau konversi lahan.

Pemantauan perkembangan kawasan pariwisata yang sudah dilakukan secara umum adalah melalui keberadaan jumlah kunjungan wisatawan atau pengunjung melalui mekanisme pencatatan bandara, pelabuhan, atau pos-pos lain dimana masyarakat wisatawan datang. Padahal, kondisi tersebut hanya merepresentasikan jumlah dan belum mampu memberikan aspek penilaian terhadap kondisi pariwisata dan strategi apa yang nantinya hendak digunakan dalam memajukan kawasan pariwisata. Aspek lain yang sangat berpotensi dalam menilai kinerja pariwisata seperti pencatatan profil pengunjung secara lebih dalam, seperti asal, pola perjalanan, pengeluaran, dan tingkat kepuasan wisatawan adalah informasi yang sangat penting untuk mengetahui segmen pasar yang mengunjungi nantinya dan hal ini harus dikembangkan. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi dana yang bergulir di destinasi dan mengoptimalkan supaya wisatawan pengunjung mendapatkan kesan bahwa kawasan wisata mampu memberikan kualitas dengan harga yang sesuai. Meningkatnya kapasitas pengelola juga sangat penting karena akan menjamin bergulirnya serta menentukan akuntabilitas dan efektifitas pengembangan. Terlebih lagi berdasarkan regulasi otonomi daerah, pembangunan kepariwisataan di daerah menjadi salah satu tugas dari pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Optimalisasi potensi pesisir, kesejahteraan dan kemandirian lokal, dan aspek kehidupan-penghidupan yang lebih menjadi fokus utama dalam skema kolaborasi membangun Desa Tanjung Pasir. Inti masalah di Desa Tanjung Pasir yakni berupa paradoks antara melimpahnya potensi bahari yang dimiliki namun terkendala oleh berbagai hambatan sosial ekonomi dan lingkungan. Masalah lainnya adalah kualitas pengelolaan yang rendah menjadikan rendahnya investasi di Desa Tanjung Pasir. Sejauh ini, potensi bahari dan pariwisata *existing* telah menjadi *trigger* serta tulang punggung penghidupan masyarakat lokal. Embrio lainnya yakni keberadaan hutan mangrove yang nantinya terintegrasi sebagai jalur masuk menuju Pantai Tanjung Pasir serta diharapkan menjadi ikon dari Desa Tanjung Pasir. Namun yang menjadi masalah adalah keterbatasan SDM, komponen penunjang pariwisata, serta kondisi penataan infrastruktur yang buruk telah menjadi hambatan sehingga belum ada tingkat kepercayaan dari luar untuk turut berinvestasi mengembangkan potensi yang ada, baik dari segi sumber daya kelautan maupun pariwisata,

Berdasarkan hasil kajian melalui metode terkait, maka penting adanya untuk merumuskan strategi dalam bentuk perbaikan dari beberapa segi peningkatan kualitas SDM lokal baik dan nilai-

nilai kebersamaan dalam bentuk modal sosial di masyarakat selama pengelolaan potensi SDA bahari dan pariwisata; akses permodalan mikro dan bimbingan teknis (pemberdayaan), khususnya berkaitan dengan manajemen modern kawasan pesisir dan pemanfaatan sumber dayanya; pelaksanaan konservasi lingkungan pesisir, penataan infrastruktur kawasan, dan revitalisasi lingkungan agar masyarakat bisa segera menciptakan kawasan yang lebih potensial, dan; merealisasikan secara penuh skema berbagi peran antar *stakeholder* baik secara vertikal atau horizontal. Melihat kondisi yang ada pada saat ini, maka urgensi yang ada yakni diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik masyarakat, organisasi masyarakat, pemerintah, serta *stakeholder* lainnya untuk berkolaborasi, berbagi peran, dan saling bersinergi selama pengembangan kawasan pesisir di Desa Tanjung Pasir. Secara nyata, upaya ini dilaksanakan melalui implementasi program pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun inovasi lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 2015 hingga 2018. Bersamaan dengan pelaksanaan penelitian, peneliti merupakan asisten dosen/peneliti sekaligus tenaga ahli di Pusat Kajian Perumahan dan Permukiman (*Sustainable Habitat Engineering Research Center*) Universitas Gadjah Mada Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi pada lembaga sebagai wadah berkarir dan fasilitasi pendanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan salam hormat kepada Assoc.Prof. Ir. Budi Prayitno, M.Eng (selaku pimpinan lembaga serta guru) dan Sugiyanto, MPA (kolega penelitian) selama riset berlangsung, serta Drs. Ismail, M.Si (Wakil Rektor Bidang III Ubhara Surabaya) dan Dr. Haryono (dosen dan pejabat LPPM Ubhara Surabaya) sebagai kolega/*reviewer* penulisan artikel jurnal. Di luar itu, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Balitbang Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator publikasi temu ilmiah tingkat nasional serta pihak kontributor yang belum sempat tercantum.

DAFTAR PUSTAKA

- ^[1]Ahmad, J 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- ^[2]Arianti, D 2016, Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis *Input Output*), *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12(4): 347-360.
- ^[3]Burke, L, Selig, E & Spalding, M 2002, *Reef at Risk in Southeast Asia*. World Resources Institute (WRI), Washington DC.
- ^[4]Gladstone, W., Curley, B., Shokri, MR 2013. Environmental Impacts of Tourism in The Gulf and The Red Sea. *Marine Pollution Bulletin*. 72(2): 375-388. <http://doi.org/5zz>
- ^[5]Gunn, CA & Var, T 2002, *Tourism Planning: Basics, Concept, Cases (fourth edition)*, Routledge, UK.
- ^[6]Hasler, H & Ott, JA 2008, Diving Down The Reefs? Intensive Diving Tourism Threatens The Reefs of The Northern Sea, *Marine Pollution Bulletin*, 56(10): 1788-1794. <http://doi.org/5zz>

- [7]Keban, YT 1998, Aplikasi *Strategic Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Fakfak Provinsi Irian Jaya, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, II(1): 96-125.
- [8]Mustanir, A, Yasin, A, Irwan, & Rusdi, M 2018, Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam *Transect* pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif, *Jurnal Moderat*, 4(4): 1-14.
- [9]Nizar, NI 2018, Analisis Perekonomian dan Potensi Ekonomi Kreatif Tangerang Selatan, *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi*, 2(1): 87-107.
- [10]Risanti, Irma 2010, Pengembangan Fasilitas *Green Canyon* sebagai Kawasan Wisata di Kabupaten Ciamis, *Management Resort and Leisure*, Universitas Pendidikan Indonesia (tidak untuk diterbitkan).
- [11]Satria, A 2015, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- [12]Spillane, JJ 1989, Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya, Kanisius, Yogyakarta.
- [13]Stren, R, White, R & Whitney, J 1992, *Sustainable Cities: Urbanization and The Environment in International Perspective*, Westview Press, Boulder.
- [14]Suharsono, Prasadja, H & Pong, T 2015, Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, *Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 5(1): 261-268.

Dokumen/Produk Kebijakan

- [15]Monograf Desa Tanjung Pasir 2017 (*diakses tahun 2018*)
- [16]Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten menurut Lapangan Usaha 2013-2017, 2018, Banten, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (*diakses tahun 2019*)
- [17]SK Bupati Tangerang No:050/Kep.47-Huk/2015 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tangerang. (*diakses tahun 2018*)
- [18]SK Gubernur Banten No.561/Kep.442-Huk/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (*diakses tahun 2018*)
- [19]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (*diakses tahun 2018*).

MODEL PENGEMBANGAN AGROWISATA BERBASIS KAWASAN PERKEBUNAN DILLEM WILIS

AGROPOLITAN DEVELOPMENT MODEL BASED AREA OF PLANTATION IN WILIS

M. Amir. HT¹, Ratna Dewi Judhaswati²

Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur

Alamat Kantor Balitbang Prov. Jatim

Jln. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya

amirlitbang@yahoo.com.id

HP. 085741575939

ABSTRAK

Tujuan utama dari artikel ini sebagai salah satu alternatif konsep pembangunan kawasan yang mampu mengatasi permasalahan pembangunan wilayah perdesaan serta meningkatkan pengelolaan pertanian berkelanjutan. Salah satu kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai obyek tujuan wisata adalah Perkebunan Dilem Wilis yang merupakan perkebunan aset milik Pemerintah Trenggalek, dikelola oleh BUMD dibawah pengawasan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, kearah konsep Pengembangan Argowisata terletak di Desa Dompok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Strategi dalam modernisasi pertanian, yaitu: perubahan teknologi dan inovasi, Konsep pengembangan agrowisata sebagai pengembangan industri wisata alam, yang bertumpu pada pembudidayaan kekayaan alam. Dengan memakai metode sesologi dan letratur menggambarkan pemanfaatan ruang penggunaan lahan Perkebunan Dilem Wilis menjadi zona atraksi wisata. Maka hasil yang akan dicapai terwujudnya Argowisata Kebun Dilem Wilis, sebagaimana amanat Undang-undang kepariwisataan Nomor 9 Tahun 1990 yaitu Penyelenggaraan kepariwisataan adalah memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.

Kata Kunci: Agrowisata berbasis kawasan perkebunan.

ABSTRACT

The main purpose of this article as an alternative concept of regional development that is able to overcome the problems of rural area development and improve sustainable agriculture management. One area that has the potential to be developed as a tourist destination is the Dilem Wilis Plantation which is an asset owned by the Trenggalek Government, managed by the BUMD under the supervision of the Forestry and Plantation Agriculture Office, towards the Argowisata Development concept located in Dompok Village, Bendungan District, Trenggalek Regency. Strategies in the modernization of agriculture, namely: technological change and innovation, the concept of developing agro-tourism as the development of the natural tourism industry, which is based on the cultivation of natural resources. By using the method of sesology and letratur describe the use of Dilem Wilis Plantation land use space into a tourist attraction zone. Then the results to be achieved in the realization of the Dilem Wilis Gardens Argotourism, as mandated by the Law of Tourism No. 9 of 1990, namely the Implementation of tourism is to introduce, utilize, preserve and improve the quality of objects and tourist attractions.

Keywords: Plantation-based agro-tourism.

PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pemerintah daerah juga dituntut untuk berperan aktif dalam proses memberdayakan masyarakat perdesaan yang mata pencaharian pokoknya adalah bertani, banyaknya program yang

dilaksanakan oleh pemerintah telah banyak berdampak pada perubahan taraf hidup masyarakat perdesaan, meskipun tidak merata hasil capaiannya tetapi sudah dapat dirasakan bagaimana dampak yang terjadi.

Alternatif pengembangan wilayah yang diharapkan dapat mengatasi dampak negatif dari suatu pembangunan adalah dengan pengembangan kawasan agrowisata. Maka wilayah harus di dasarkan atas keunggulan komparatif lokasi, dengan demikian produk-produk perkebunan yang mempunyai karakteristik khusus serta harus mempunyai orientasi pengembangan yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi hasil saja, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayahnya

Salah satu program pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah program agrowisata, program ini akan memanfaatkan kawasan perdesaan dengan basis pertanian secara luas, yaitu perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan, untuk kemajuan perdesaan dan perkembangan perekonomian masyarakat perdesaan menuju kemajuan, dan yang menarik dari artikel ini, adanya keterpaduan, antara program pengembangan agropolitan dengan program Pengembangan Agrowisata Kawasan Kebun Dilem Wilis, juga berbasis perkebunan di Desa Dompoyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.

Oleh karena itu, agrowisata dipandang sebagai suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (*agribisnis*) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian secara umum di wilayah sekitarnya.

Menurut Nasution, 1998 dan Rusastra *et al.*, 2002 Keberhasilan pelaksanaan program pengembangan agropolitan akan memberikan dampak teknis dan ekonomis secara nyata terhadap pembangunan wilayah, dalam bentuk:

- a) Harmonisasi dan keterkaitan hubungan yang saling menguntungkan antara daerah pedesaan dan perkotaan;
- b) Peningkatan produksi, diversifikasi, dan nilai tambah pengembangan agribisnis yang dinikmati secara bersama-sama oleh masyarakat dalam kawasan pengembangan agropolitan;
- c) Peningkatan pendapatan, pemerataan kesejahteraan, perbaikan penanganan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan pertanian dan pedesaan; dan
- d) Dalam konteks regional dan nasional akan terjadi efisiensi pemanfaatan sumberdaya, peningkatan keunggulan komparatif wilayah, perdagangan antar daerah, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi pembangunan.

Pendekatan pembangunan perdesaan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah itu sendiri, dimana ketergantungannya dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan. Agrowisata menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian secara luas dan pengelolaan sumberdaya alam memang merupakan mata pancaharian utama bagi sebagian besar masyarakat perdesaan. Dari berbagai alternatif model pembangunan, pendekatan agrowisata dipandang sebagai konsep yang dapat mengatasi permasalahan ketidakseimbangan perdesaan dengan perkotaan.

Maka lokus kegiatan yang dapat diangkat dalam artikel ini, adalah pengembangan agrowisata yang ada di Kabupaten Trenggalek, untuk itu dapat disimak tabel dibawah ini, kondisi umum Kabupaten Trenggalek tahun 2017.

Tabel 1. Kondisi Umum Kabupaten Trenggalek

No.	Jenis data	Nilai
1.	Luas Wilayah	126.140 ha
2.	Panjang Pantai	96 km
3.	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	Rp. 16,1 Triliun
4.	3 Sektor Dominan	Pertanian (29,86%) Perdagangan (15,76%) Industri Pengolahan (14,53%)
5.	Lapangan Pekerjaan Pertanian, Perkebunan,, Kehutanan,, Perburuan dan Perikanan	48,48%
6.	PDRB Per Kapita	Rp. 23,28 Juta/Kapita/Tahun
7.	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	5,02 %
8.	Laju Inflasi	3,4 %
9.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	68,1
10.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3,48 %
11.	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,35
12.	Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin)	12,96 %
13.	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	65,79
14.	IDM (Indeks Desa Membangun)	0,66

Sumber: Bappeda Kab. Trenggalek

Sedangkan landasan hukum pelaksanaan pengembangan agropolitan di Kabupaten Trenggalek mengacu pada:

1. Tahun 2006 Agropolitan Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Watulimo
 - ♦ Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 050/5074/201.2/2006
 - ♦ Perbup Trenggalek Nomor 12 Tahun 2006
2. Tahun 2017. Agropolitan Kecamatan Pule
 - ♦ Keputusan Bupati Trenggalek No. 188.45/391/35.03.001.3/2017. 5 April 2017
 - ♦ Tahun 2017. Review Masterplan Agropolitan dan Minapolitan Bendungan dan Watulimo.
3. Tahun 2018
 - ♦ Penyusunan Masterplan Agropolitan Bendungan
 - ♦ Penyusunan Masterplan Agropolitan Watulimo

Bila menyimak dari arti kata agropolitan dapat dilihat dari beberapa teori sebagai berikut:

Agropolitan terdiri dari kata “agro” = pertanian dan “politan” = kota, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian (*departemen pertanian, 2002 dalam Pranoto, 2005*). Hasan (2003) mengemukakan bahwa kegiatan kota tani berbasis budidaya pertanian, konservasi sumberdaya alam dan pengembangan potensi daerah dengan bingkai pembangunan berwawasan lingkungan, yang merupakan suatu upaya untuk menghindari kesalahan pembangunan masa lalu.

Menurut (Saefulhakim, 2004) “Agro” bermakna: “tanah yang dikelola” atau “budidaya tanaman”, yang digunakan untuk menunjuk berbagai aktivitas berbasis pertanian. Sedang “polis”

bermakna “a Central Point or Principal”. Agro-polis bermakna : lokasi pusat pelayanan sistim kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian.

Kawasan agropolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian (*agropolis*) yang merupakan pusat pelayanan (*Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 2003*).

Sedangkan pengertian Argowisata cakupannya sangatlah luas dan banyak hal seringkali berisikan dengan ekowisata. Ekowisata dan agrowisata memiliki banyak persamaan, terutama karena keduanya berbasis pada sumber daya alam dan lingkungan.

Ekowisata atau ecotourism merupakan pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada usaha-usaha pelestarian alam atau konservasi, sebagai contoh ekowisata adalah Taman Nasional, Cagar Alam, Kawasan hutan lindung, Cagar trumbu karang, Bumi Perkemahan.

Argowisata menurut Moh.Reza T, dan Lisdiana F, adalah obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Argowisata dan agrotourism dapat diartikan juga sebagai pengembang industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan kekayaan alam, industri ini mengendalkan pada kemampuan, budaya daya, baik pertanian, peternakan dan perikanan ataupun kehutanan.

Baik agrowisata yang berbasis budidaya, maupun ekowisata yang bertumpu pada upaya-upaya konservasi berorientasi pada pelestarian sumber daya alam serta masyarakat dan budaya lokal. Pengembangan agrowisata dapat dilakukan dengan mengembangkan kawasan yang sudah ada, atau dibangun serpeti kawasan agropolitan, kawasan usaha ternak maupun kawasan industri perkebunan, dengan demikian pengembangan kawasan agrowisata dapat dikatakan bahwa mengembangkan suatu kawasan yang mengedepankan wisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonominya, maka industri wisata ini yang diharapkan mampu menunjang berkembangnya pembangunan agribisnis secara umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penggunaan metodologi ditempuh beberapa metode/cara dalam pengumpulan data-data baik data primer maupun data sekunder, sehingga dalam menghimpung informasi diperlukan wawancara dengan teknik wawancara terstruktur yang sebelumnya disusun daftar pertanyaan untuk diajukan kepada informan, bertujuan untuk mengetahui pandangan pihak-pihak terkait terhadap kondisi wilayah Kebun Dilem Wilis, sumbernya Para Pejabat Instansi Pemerintah, Pengelola Kebun Dilem Wils dan Masyarakat seputar Kebun Dilem Wilis. Kemudian Observasi atau pengamatan secara langsung, bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi obyek, dalam pengamatan meliputi aspek-aspek yang dapat dilihat seperti dalam tabel dibawah ini;

Tabel 2. Jenis data untuk observasi

No.	Jenis data	Tujuan observasi
1.	Karakteristik Wilayah <ul style="list-style-type: none">● Pola● Elemen pengisi● Bentuk● Fungsi● Peran● Ketersediaan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">☐ Dasar bagi analisis karakteristik wilayah☐ Dasar dalam mengidentifikasi permasalahan wilayah Kebun Dilem Wilis,-☐ Dasar dalam menentukan arah atraksi kegiatan wisata Kebun Dilem Wilis.

2.	Permasalahan atau isu strategis	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dasar bagi analisis atraksi kegiatan ◆ Dasar dalam mengidentifikasi permasalahan wilayah ◆ Dasar dalam menentukan arah atraksi kegiatan wisata Kebun Dilem Wilis.
----	---------------------------------	---

Sumber: Kerangka Pikir Peneliti (diolah).

Kemudian dalam menghimpun data-data sekunder, ditempuh melalui tindakan seperti pada tabel dibawah ini;

Tabel 3. Instansi dan Jenis Data

No.	Nama Instansi	Jenis data	Tujuan dan Kegunaan
1.	Bappeda Kab. Trenggalek	<ul style="list-style-type: none"> ■ RTRW ■ RDTR 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dasar bagi analisis kakarakteristik wilayah ◆ Dasar dalam mengidentifikasi permasalahan wilayah ◆ Dasar dalam menentukan arah pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Dilem Wilis.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ● Bappeda Kab. Trenggalek ● Dinas Tata Ruang Pertanian dan Kebersihan 	Data kondisi SDA - Topografi - Iklim - Kondisi tanah - Hidrologi	= Dasar bagi analisis karakteristik wilayah = Dasar dalam menentukan arah pengembangan dan penataan wilyah
		+ Luas lahan terbangun dan tidak terbangun + Penggunaan Lahan	
3.	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Trenggalek	Karakteristik Wilayah - Pola bentuk wilayah - Fungsi & Peran wilayah - Lokasi - Luas - Sistem Pengolahan - Karakteristik kawasan - Potensi wisata yang ada.	= Dasar bagi analisis karakteristik wilayah = Dasar dalam menentukan arah pengembangan dan penataan wilayah.

Sumber: Kerangka Pikir Peneliti (diolah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Potensi Agrowisata dilihat dari Kondisi Fisik Kawasan Perkebunan Dilem Wilis

(a). Jenis Tanah

Kandungan tanah di kebun Dille Wilis adalah latosol liat, sifatnya mempunyai lapisan solum tanah yang tebal, sangat tebal dari 130 cm sampai 5 meter, warnanya merah, coklat sampai kekuning-kuningan., kandungan bahan organik berkisar antara 3-9 % tetapi biasanya sekitar 5 % saja. Reaksi tanah berkisar antara pH 4,5 - 6,5 yaitu dari asam sampai agak asam.

Kondisi tanah yang tahan terhadap erosi sangat baik untuk pengembangan tanaman perkebunan, mengingat kawasan kebun Dille Wilis memiliki potensi untuk dieksplorasi lebih jauh khususnya jika ingin mengembangkan lebih jauh perkebunan kopi, cengkeh dan tanaman hias. Dengan potensi pengembangan sebagai kawasan perkebunan, kawasan Dille Wilis sangat potensi berkembang menjadi kawasan agrowisata dengan mengedepankan tanaman perkebunan kopi dan cengkeh sebagai komoditi utama. Guna meningkatkan kualitas tanah dapat dilakukan rekayasa pengolahan nutrisi tanah untuk menyesuaikan kebutuhan nutrisi tanaman dengan menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan.

(b). Iklim

Rata-rata temperatur udara di Kebun Dille Wilis 20,50 C, dengan suhu minimum 19,50 C dan suhu maksimum 21,50 C. Tipe iklim di perkebunan Dille Wilis adalah tipe C (agak basah/ semi basah), dengan ciri-ciri memiliki minimal 6 bulan basah dan 3-5 bulan kering. Tipe iklim ini dicirikan dengan vegetasi hutan rimban, diantaranya terdapat jenis vegetasi yang daunnya gugur pada musim kemarau misalnya jati. Curah hujan kondisinya cukup sering. Hujan di kawasan Dille Wilis dapat terjadi sewaktu-waktu, namun dengan intensitas sedikit.

Kondisi iklim yang dingin dan agak basah membuat kawasan perkebunan Dille Wilis menjadi salah satu kawasan di Kabupaten Trenggalek yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan peristirahatan dan liburan akhir pekan.

(c). Ketinggian dan kontur lahan

Kawasan zona A wilayah perkebunan Dille Wilis terletak pada ketinggian 600-850 dpl. Secara umum kondisi landscape yang terbentuk pada kawasan Dille Wilis adalah berbukit dan curam. Kawasan ini memiliki beberapa puncak perbukitan dengan kemiringan lereng beragam mulai dari berombak 15' – 25', berbukit 25' – 45' sampai dengan bergunung dengan kemiringan lereng >45. Saat melakukan observasi pada kawasan, kondisi alam seperti ini sangat menarik untuk dikembangkan. Kawasan dengan kontur perbukitan sangat menarik jika dikembangkan menjadi kawasan wisata yang bertema petualangan baik secara kelompok maupun bersama keluarga.

(d). Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah Perkebunan Dille Wilis tergolong cukup baik pada kawasan perkebunan terdapat sumber air bersih dengan anak aliran kali di lembah gunung wilis. Kawasan zona A terdapat satu anak aliran kali dengan debit air yang cukup tinggi. Sumber air yang selama ini telah dimanfaatkan oleh perkebunan menjadi tenaga penggerak kincir pabrik pengolahan kopi Van Dille. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan industri, sumber air ini juga bisa dimanfaatkan untuk peternakan dan perkebunan tanaman bunga hias. Aliran anak kali yang melintas zona Agrowisata bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan wisata.

2. Analisis Infrastruktur Kawasan Zona Agrowisata

Infrastruktur dalam pengertian dasarnya sama dengan prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, dalam hal perencanaan pengembangan zona Agrowisata Kebun Dille Wilis, dengan melihat sejauhmana kondisi dan fungsi dari infrastruktur yang ada di kawasan perencanaan Kebun Dille Wilis untuk mendukung kegiatan Agrowisata, seperti infrastruktur jalan, dan jembatan, infrastruktur jaringan telekomunikasi, infrastruktur jaringan listrik, dan air bersih.

(a). Analisis Prasarana Jalan dan Jembatan

Jalan yang terdapat di kawasan kebun Dillem Wilis sudah tergolong baik. Jalan utama mempunyai perkerasan aspal hotmix dengan lebar 4 meter dan bahu jalan $\frac{1}{2}$ meter tanpa drainase pingir jalan. Jaringan jalan aspal hotmix yang menuju kawasan zona A Argowisata Perkebunan Dillem Wilis, jika diukur dari pusat Kecamatan Bendungan hingga Kantor Wisma Dillem Wilis sepanjang sekitar 2,2 km.

Sedangkan jalan yang menghubungkan sentra kegiatan peternakan terpadu yang ada di kawasan zona A memiliki lebar 2 meter dengan perkerasan makadam dan plat semenisasi, hanya beberapa lokasi mempunyai kondisi jalan makadam yang buruk. Kontur kawasan yang berbukit membuat jalan cukup licin saat musin penghujan ditambah kondisi jalan yang rusak.

Untuk kondisi jembatan penghubung yang ada saat ini masih kurang memadai, terutama jembatan yang menghubungkan antara kegiatan peternakan terpadu, kegiatan industri pengolahan biji kopi Van Dillem dan kawasan green house. Jenis jembatan yang menghubungkan antara jalan utama dan kawasan peternakan terpadu berupa jembatan cor beton dengan kontruksi besi baja sebagai tulangan balok beton dan plat jembatan. Lebara jembatan 2 meter dengan kekuatan daya dukung seberat ± 2 ton. Saat ini jembatan tersebut hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda ³ jenis pick up. Sedangkan jembatan yang menghubungkan antara pabrik pengolah kopi Van Dillem kondisinya berupa jembatan kontruksi beton bertulangan baja dengan lebar 2 meter dan kekuatan daya dukung juga seberat ± 3 ton.

(b). Analisis Prasarana Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi yang ada di kawasan perencanaan berupa tower jaringan seluler yang merupakan milik profider swasta. Dari pemantauan dilapangan terlihat ada satu unit tower jaringan selular di pusat Kecamatan Bendungan yang digagas sebagai Agropolitan, namun kondisi sinyal masih lemah terdapat titik lokasi blank spot yang tidak terjangkau sinyal selular. Kondisi alam yang merupakan kawasan berbukit memang sangat berpengaruh pada kekuatan gelombang sinyal. Maka untuk memperkuat sinyal tersebut perlu proses penambahan jaringan pada tempat-tempat tertentu di kawasan Kebun Dillem Wilis.

(c). Analisis Jaringan Listrik

Jaringan listrik dapat dilihat dari adanya tinag-tiang listrik dan beberapa travo penguat tegangan di kawasan Kebun Dillem Wilis, dari hasil pengamatan supply listrik bersumber dari PLN Trenggalek. Pada pusat Kecamatan Bendungan diketahui terdapat satu unit PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang memutar mini turbin berdaya SOKW/5.000 VA, untuk supply listrik dibagian selatan wilayah Desa Dompok.

(d). Analisis Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang urgen diperlukan bagi manusia terutama air minum dan kebutuhan sanitasi lainnya. Secara eksisting kawasan Kebun Dillem Wilis memiliki sumber air yang cukup baik bersumber dari mata air di jajaran pegunungan wilis. Di dalam perencanaan Bappeda sendiri dilewati jaringan pipa PDAM yang berasal dari sumber mata air tersebut, kualitas air tergolong cukup baik saat musim kering, namun tetap harus melalui pengolahan agar bisa terjaga kualitas air pada musim hujan. Sebab bisa saja mengalami perubahan warna air akibat dari erosi tanah dibagian atas lembah, walau demikian air sumber dimaksud tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan peternakan terpadu, green house dan penduduk setempat.

Maka untuk dikembangkan menjadi kawasan agrowisata yang utama perlu ditingkatkan pengembangan sistem pengolahan air sumber sehingga dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh perkebunan Dillem Wilis sendiri.

3. Analisis Potensi Atraksi Obyek Daya Tarik Wisata

Potensi alam yang dimiliki kebun Dillem Wilis selama ini belum dikelola dengan baik, beberapa infrastruktur yang ada memiliki nilai historis yang tinggi bagi perkembangan Kabupaten Trenggalek. Pengembangan zona Agrowisata sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, karakteristik kawasan serta nilai historis suatu kawasan.

Secara deskriptif dari kondisi fisik kawasan, infrastruktur pendukung dan eksisting perkebunan Dillem Wilis terdapat beberapa potensi atraksi wisata yang nantinya dapat dijadikan obyek atraksi daya tarik wisata perkebunan Dillem Wilis sebagai berikut:

(a). Peternakan Terpadu

Kawasan perbukitan dengan suasana tenang, suhu yang dingin dengan terpaan sinar matahari yang cukup baik, cocok untuk peternakan. Pengembangan peternakan terpadu selain bernilai ekonomi juga dapat dimanfaatkan sebagai wisata edukasi bagi pengunjung agrowisata.

Target pengunjung dari atraksi wisata dimaksud adalah pelajar dan masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui aktifitas peternakan hewan khususnya hewan penghasil susu, dari berbagai jenis hewan dengan sistem kandang terpisah dan terpusat dalam satu kawasan. Adapun jenis hewan ternak yang berpotensi untuk dikembangkan di perkebunan Dillem Wilis adalah sapi perah, kambing etawa dan peternakan sapi pendaging. Pengembangan sektor wisata peternakan terpadu ini juga nantinya menjadi bidang usaha bagi perkebunan Dillem Wilis selaku pengelola. Oleh karena itu pengembangan kawasan peternakan terpadu nantinya wajib memiliki fasilitas pengolahan hasil produksi peternakan, fasilitas perawatan hewan ternak dan fasilitas pengolahan hasil produksi peternakan. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang adapt dijadikan atraksi wisata edukasi dari peternakan terpadu ini, seperti:

1. Wisata edukasi mengenal jenis-jenis hewandipeternakan,-
2. Wisata edukasi cara perawatan hewan ternakan yang baik,-
3. Wisata edukasi teknik memeras susu sapi/susu kambing etawa,-
4. Wisata edukasi teknologi dan cara mengolah produksi hasil ternak,-
5. Wisata edukasi teknik pengelolaan limbah peternakan menjadi energi terbarukan dan pupuk organik.

(b). Area Budidaya Taman Bunga (Tanaman Langkah & Hias)

Kawasan perkebunan Dillem Wilis sangat potensial untuk pengembangan kegiatan budidaya tanaman bunga, tanaman langkah dan tanaman hias. Kondisi eksisting kawasan perbukitan dapat dijadikan lahan tanaman bunga yang bisa menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung untuk melakukan selfi dan foto-foto bersama sebagai latar tumbuhan bunga-bunga menarik, dengan mengembangkan potensi yang ada, tentu jadi daya tarik tersendiri bagi kawasan Agrowisata.

Pengembangan area budidaya tanaman hias juga mempunyai nilai ekonomi yang baik buat pengelolaan kawasan agrowisata Kebun Dillem Wilis, dengan atraksi pengembangan budidaya tanaman hias seperti:

1. Pengunjung dapat mengenal jenis tanaman yang dibudidayakan,-
2. Pengunjung bisa melihat proses perawatannya,-
3. Pengunjung dapat memetik bunga dapat disuling jadi minyak wangi,
4. Pengunjung dapat membeli bibit tanaman langkah,-

(c). Kawasan Wisata Pertanian Terasering

Persawahan yang ada di kawasan Perkebunan Dillem Wilis membentuk sistem berundak, disimak menjadi bentangan pahatan wajah bumi nan indah, keunikan alam yang mengagumkan ini buah karya dari teknologi kearifan lokal. Disinilah indahnya pertanian terasering jika dikelola secara

apik dan rapih dengan sistem tradisional. Sawah yang ditanami dengan varietas padi telah menjadi obyek wisata karena keindahan area kawasan persawahan di Kebun Dille Wilis.

Pandangan terasering merupakan bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis teknologi pertanian ini sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu di Nusantara, termasuk di Desa Dompoyong. Sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Indonesia, teknologi tradisional terasering membentuk pesona keindahan lansekap dengan budaya dan hamparan pertanian, rencana Balitbang juga ikut merencanakan demplot budidaya bawang merah dimusin penghujan di area dimaksud.

Suatu sistem kearifan lokal yang sangat layak untuk dikembangkan sebagai daya tarik agrowisata dan wisata budaya. Pada kawasan terasering Kebun Dille Wilis, tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri jika kawasan pertanian terasering di kawasan ini dijadikan salah satu atraksi agrowisata, pengembangan akses jembatan-jembatan alami dari bambu atau kayu sebagai pijakan jalan untuk menikmati panorama dan suasana persawahan terasering yang unik, selain itu pengunjung juga bisa langsung turun berjalan diantara pematang sawah. Maka atraksi yang jadi daya tarik untuk dikembangkan di kawasan wisata pertanian terasering adalah:

1. Pengunjung dapat menikmati panorama alam dan keunikan persawahan terasering sebagai teknologi tradisional,-
2. Pengunjung dapat berwisata edukasi dan terlibat mengolah lahan sawah, menanam padi, merawat padi atau panen padi bersama,-
3. Pengunjung dapat ikut membawa pulang hasil panen,-
4. Pengunjung dapat melakukan dokumentasi di area persawahan.

(d). Museum Pabrik Pengolah Kopi Van Dille

Pabrik Pengolahan Kopi Van Dille mempunyai sejarah perkembangan tersendiri yang menjadi ciri khas Kebun Dille Wilis, dari informasi warga setempat pabrik ini sudah dibangun sejak tahun 1929 sebelum era kemerdekaan. Dibangun pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang dimiliki oleh petani kopi warga negara Belanda yang bernama Mr. Van Dille, lebih menarik lagi masyarakat sekitar wisma Dille Wilis ada beberapa yang masih memahami cara operasional pabrik pengolahan kopi disini.

Pabrik pengolahan kopi ini terbagi tiga area utama pengolahan kopi; *Area pertama* merupakan areal penerimaan bahan baku biji kopi matang yang baru dipanen. Cara kerjanya biji kopi yang masuk akan digiling untuk melepaskan antara biji dan daging buah kopinya, yang menarik teknologi yang digunakan sangat ramah lingkungan, yakni menggunakan kincir dengan tenaga penggerak air dalam mengolah biji kopinya. *Area kedua* yakni area oven yang merupakan area untuk memanggang biji kopi setelah dilepaskan dari dagingnya, disini merupakan area bangunan oven yang sangat besar dengan sistem pemanasan menggunakan media kayu bakar untuk memanggang dan memasak biji kopi. Area ketiga merupakan gudang penyimpanan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil olahan biji kopi sebelum dipasarkan.

Merekondisi serta merestorasi kembali pabrik pengolahan kopi van Dille akan menambah nilai historis kawasan Kabupaten Trenggalek sebagai kawasan sentra industri kopi pada jaman Belanda. Rekonstruksi pabrik pengolahan kopi Van Dille menjadi bentuk dan fungsinya kembali ke awal masa berdirinya tentu akan sangat menarik. Dimana sebuah monumen pabrik yang dapat beroperasi sebagai suatu atraksi wisata yang menarik, mengingat teknologi seperti ini sudah langka dan tidak digunakan lagi oleh pabrik pengolahan biji kopi modern. Pabrik kopi Van Dille ini satu-satunya di Indonesia sebagai pabrik pengolahan biji kopi yang menggunakan tenaga penggerak mesin kincir air yang juga merupakan peninggalan Belanda.

Guna menambah daya tarik pabrik kopi ini nantinya dapat juga dikembangkan area fasilitas pengolahan dan penggilingan kopi sehingga para pengunjung dapat langsung menikmati kopi Van

Dillem, disamping itu area ini juga disiapkan tempat khusus pengunjung untuk duduk-duduk santai sambil menikmati kopi olahan tradisional dengan suasana alam dan eksotis di kawasan Kebun Dillem Wilis.

Adapun daya tarik wisata yang adapt dijadikan sebagai aktifitas pengunjung sebagai berikut:

1. Pengunjung bisa menyaksikan adanya bangunan hasil restorasi pabrik kopi Van Dillem menjadi museum yang bisa beroperasi seperti awal sejak mulai didirikan. Hal ini akan menjadi obyek wisata yang penting dalam booklet perjalanan wisata bersejarah di Kabupaten Trenggalek,-
2. Pengunjung dapat berwisata edukasi tentang berbagai macam tanaman kopi yang ada di Kebun Dillem Wilis,-
3. Atraksi operasional pabrik pengolah biji kopi akan menjadi pengalaman yang langka bagi wisatawan,-
4. Pengunjung dapat berwisata edukasi menyaksikan teknik pengolahan biji kopi menjadi kopi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda,-
5. Pengunjung dapat menikmati suguhan kopi Van Dillem secara langsung di area tempat istirahat sekitar kawasan pabrik.

4. Analisis Cluster Pengembangan Kawasan Agrowisata

Pengertian cluster merupakan kata dalam bahasa asing menurut kamus oxford cluster diartikan bila dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang sama, diposisikan pada suatu kawasan atau ikatan yang erat bersama-sama. Bila disimak lebih dalam maka cluster bermakna kelompok, gugusan, rumpun, rangkaian, gabungan dari suatu hal, dengan demikian dapat ditarik pemaknaan bahwa cluster pengembangan kawasan agrowisata adalah kelompok aktifitas atraksi wisata yang dapat dijadikan suatu paket-paket wisata. Tujuannya dari kegiatan dimaksud adalah membuat pengunjung lebih mudah untuk memilih paket-paket wisata sesuai dengan minat dan ketertarikannya, seperti:

(a). Cluster Agrowisata Edukasi Kebun Dillem Wilis

Pengelompokan agrowisata ini bertujuan untuk menyatukan dan memberikan nuansa keseragaman terhadap beberapa jenis kegiatan wisata, dimana kegiatan pada paket Agrowisata Edukasi Kebun Dillem Wilis adalah:

1. Wisata Peternakan,-
2. Wisata Budidaya Tanaman Bunga, dan tanaman langka,-
3. Wisata Pertanian Terasering.

Lokasi ketiga area wisata ini memang saling berdekatan dan saling berkoneksi. Ketiga paket wisata ini nantinya akan dijadikan satu paket Agrowisata Edukasi Kebun Dillem Wilis.

(b). Cluster Wisata Sejarah dan Rekreasi

Cluster wisata sejarah dan rekreasi Kebun Dillem Wilis, menghubungkan beberapa kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan zona peristirahatan di Kebun Dillem Wilis, area wisata dimaksud adalah:

1. Area museum benda sejarah,-
2. Kawasan museum pabrik pengolah kopi Van Dollem,-
3. Area santai pinggir kali (Riverside Rest Area),-
4. Area Puncak Pantau.

Lokasi ini cukup berdekatan, pada area ini nantinya pengunjung bisa berkeliling melihat-lihat isi museum bersejarah lebih jauh tentang Kebun Dillem Wilis.

5. Cluster zona Bermain dan zona Ketangkasan

Pada cluster zona bermain dan zona ketangkasan ini merupakan aktifitas, dengan maksud menggabungkan atraksi wisata yang dimiliki. Konsep permainan, pembentukan karakter dan

hiburan. Pengembangan kawasan wisata yang saling beroneksi akan memudahkan pengunjung untuk menikmati seluruh atraksi wisata yang ada. Atraksi wisata seperti:

1. Kolam Renang Alami,-
2. Area Bermain Anak,-
3. Area Lapangan Outbond,-
4. Atraksi Sirkuit ATV,-
5. Area Flying Fox.

6. Cluster Wisata Air

Pengembangan cluster wisata air bertujuan untuk menggabungkan atraksi wisata yang berhubungan dengan air kedalam satu ruang kegiatan, seperti area wisata air yang termasuk dalam cluster ini adalah:

1. Waduk mini,-
2. Area wisata body rafting Kali Dilem Wilis.

Waduk mini Dilem Wilis merupakan potensi wisata air yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nantinya berbagai atraksi wisata dapat dilakukan di waduk tersebut. Pada area waduk, bisa dibangun bendungan untuk menampung air pada zona lembah yang nantinya dapat menjadi waduk. Bendungan dimaksud akan menjadi bangunan pengontrol debit air.

Untuk atraksi wisata body rafting ini, titik stranya akan dimulai dari titik pintu air bendungan, kemudian menyusuri kali sepanjang 500 meter hingga sampai ke dekat kawasan wisata Dilem Wilis, sedangkan untuk kembali ke area awal, akan bisa dibangun jalan inspeksi sepanjang kali hingga ke bendungan. Sedangkan titik finis body rafting, pengunjung bisa menaiki AVT hingga menuju titik awal.

Kawasan agrowisata sebagai sebuah sistem tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang bersifat administratif, tetapi lebih pada skala ekonomi dan ekologi yang meliputi kawasan agrowisata Kebun Dilem Wilis. Dengan demikian kawasan agrowisata dapat meliputi desa-desa dan kota kecamatan sekaligus, sesuai dengan pola interaksi ekonomi dan ekologinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil observasi pada kondisi eksisting, maka dilakukan analisis berdasarkan data yang ada, kemudian kegiatan perencanaan kedepan melalui pengembangan zona Agrowisata Kebun Dilem Wilis. Dapat diketahui, hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan Perkebunan Dilem Wilis terletak di Desa Dompjong dan Desa Botoputih Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan luas lebih kurang 228,123 ha, kawasan Perkebunan Dilem Wilis berada pada ketinggian 700-94 dpl, dengan kontur kemiringan 15°-45°. Dengan kondisi iklim yang dingin Dilem Wilis juga dapat mendukung perkembangan komoditas peternakan Sapi Perah, sebagai obyek atraksi wisata.
2. Penggunaan Lahan Perkebunan Dilem Wilis dapat dibagi dalam beberapa zona lahan wisata yakni:
 - a. Zona A yang merupakan Kawasan Wisata dengan luas ± 6 ha,-
 - b. Zona B dan C merupakan area prioritas kebun kopi luas ± 90 ha,-
 - c. Zona D, E, F dan G merupakan area kebun campur luas ± 132 ha.
3. Pengembangan Zona Agrowisata Dilem Wilis, terletak pada wilayah Zona A lebih tepatnya terletak di Desa Dompjong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, dengan batas kawasan:
 - a. Utara : Kawasan Perkebunan Dilem Wilis Zona D,-

- b. Barat : Kawasan Perkebunan Dilem Wilis Zona C,-
 - c. Selatan : Kawasan Perkebunan Dilem Wilis Zona B,-
 - d. Timur : Kawasan Perkebunan Dilem Wilis Zona B.
4. Kawasan argowisata merupakan suatu kawasan yang memiliki kriteria yang ada di Perkebunan Dilem Wilis, seperti:
 - a. Sub sistem usaha pertanian primer (on fram) yang antara lain terdiri dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan,-
 - b. Sub sistem industri pertanian yang antara lain terdiri industri pengolahan, kerajinan pengemasan, dan pemasaran baik lokal maupun ekspor,-
 - c. Sub sistem pelayanan yang menunjang kesinambungan dan daya dukung kawasan baik terhadap industri dan layanan wisata maupun sektor agro, misalnya transportasi dan akomodasi, penunjang layanan lainnya.
 5. Kawasan wisata kebun Dilem Wilis, terbentuk interaksi yang intensif dan saling mendukung bagi kegiatan agro (tanaman bunga hias) dengan kegiatan pariwisata dalam kesatuan kawasan, dari berbagai kegiatan dan produk wisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

B. Saran:

Sebagai saran yang dapat disampaikan dari hasil analisis pengembangan agrowisata di Kebun Dilem Wilis, adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana data yang ada pada kawasan Kebun Dilem Wilis memiliki banyak anak sungai dan air terjun dengan debit air yang cukup, potensi ini dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik dengan membangun pembangkit Listrik Mikro Hidro,-
2. Dari pembagian zona wisata, diperlukan keterlibatan pihak swasta dalam mengembangkan kawasan Kebun Dilem Wilis menjadi Kawasan Agrowisata sebagai investasi penanam modal,-
3. Dari cakupan luas kawasan zona kebun Dilem Wilis, diperlukan keterlibatan institusi Litbang dan kalangan Akademisi untuk bersinergi memikirkan pengembangan argowisata berbasis perkebunan dan industri pertanian serta peternakan terpadu, khususnya memanfaatkan potensi teknologi dan inovasi,-
4. Dari kriteria pengembangan Perkebunan Dilem Wilis, maka diperlukan pemikiran untuk menata produk perkebunan sebagai salah satu atraksi wisata menarik untuk dikembangkan kedepan seperti produk saphi perah,-
5. Perlu kejelasan status Lahan Kebun Dilem Wilis, agar tidak menjadi kendala dalam proses pengembangan program kegiatan perencanaan di Kawasan Kebun Dilem Wilis menjadi Pengembangan Argopolitan di Kecamatan Bendungan ke arah Argowisata di Desa Dompok yang berbasis Industri Pertanian secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Tata cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta: Bappenas. <http://pu.net>.
- Betri Andita Eky Hapsari (2008). *Perencanaan Lanskap Bagi Pengemangan Agrowisata Di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu Di Kabupaten Magelang*. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor.

- Dwikki Rahadian Yudha Wijayanto, 2015, Evaluasi Kesesuaian Pengembangan Kawasan Agropolitan Untuk Komoditas Kopi Pada Skpp I Di Kabupaten Jombang, Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.
- Gumelar, S Sastrayuda. 2010. Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata (Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure). http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN
- Harun, Uton Ruston. 2004. Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan dalam sistem perkotaan regional di Indonesia. Dalam Rustadi et al. 2006. Kawasan Agropolitan, Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang. Bogor: Crespent Press.
- I Wayan Rusastra et al, Kinerja Dan Perspektif Pengembangan Model Agropolitan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agribisnis, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Muhammad Harist Insan Kamil (2015). *Konsep Perencanaan Ekowisata Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Daya Tarik Wisata Di Desa Sakti Pulau Nusa Penida Provinsi Bali*. (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kabul Mahi, Ali, 2014. Agropolitan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPG) Kabupaten Trenggalek 2005-2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2010-2015.
- Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032.
- Perencanaan Pengembangan Zona Agrowisata Kebun Dilem Wilis Tahun Anggaran 2016.
- Rancangan Rencana Detail Tata Ruang BWP Bendungan 2013-2033.
- Salundik. 1998. Pengolahan Limbah Cair Usaha Peternakan Sapi Peraah dengan Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes* (Mart) Solms.) (Thesis). Magister Sains Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan. Gadjah Mada University Press. Bogor. 195-196.



PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS APEL DENGAN PENINGKATAN LAHAN PRODUKSI BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

DEVELOPMENT OF APPLE AGRIBUSINESS AREAS BY INCREASING PRODUCTION LAND BASED ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Dendy Setyawan

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur (60235)

Email : dendysetyawan1989@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan wilayah budidaya apel supaya tetap lestari, perlu diarahkan pada lahan – lahan yang memiliki karakter tanah dan iklim yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sistem Informasi Geogarfis memadukan berbagai data sebagai sumber otomatisasi evaluasi kesesuaian lahan untuk deteksi potensi pengembangan lahan budidaya apel. Pada daerah penelitian diperoleh kelas kesesuaian lahan S1 untuk kawasan agribisnis apel seluas dua belas persen dari area penelitian.

Kata kunci : Apel, Lahan, SIG

ABSTRACT

The development of apple cultivation areas in order to remain sustainable, needs to be directed to lands that have soil and climate characteristics that are suitable to the needs of plants. Geogarfis Information System integrates various data as a source of automation in evaluating land suitability to detect potential development of apple cultivation land. In the study area, it was obtained S1 land suitability class for apple agribusiness area 361793,19 Ha, around 12% of the research area.

Key words : Apple, Land, GIS

PENDAHULUAN

Impor buah apel Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 74.019 ton senilai US\$ 32.005.000 atau setara dengan Rp.288.045.000.000,- (1 US\$ = Rp.9000,-) jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat 3,9% per tahun hingga tahun 2010. Membanjirnya buah apel impor ini seiring dengan lesunya kegiatan agribisnis apel di dalam negeri yang mulai berlangsung pada tahun 2000-an dengan ditunjukkan oleh kondisi pertanaman apel di lahan petani yang kurang terpelihara, menurunnya produksi dan mutu buah yang dihasilkan, harga sarana produksi yang tidak terjangkau dan harga buah apel yang relatif murah (Balitjestro, 2015).

Tabel 1. Produksi tanaman Holtikultura di Indonesia

Kode Prov	Provinsi	Apel				
		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Hasil (Kg/Phn)	Rata-Rata Hasil (Ton/Ha)
11	Aceh	600	1	98	162,50	132,44
12	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
13	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
14	Riau	-	-	-	-	-
15	Jambi	-	-	-	-	-
16	Sumatera Selatan	7	0	0	57,14	46,57
17	Bengkulu	-	-	-	-	-
18	Lampung	-	-	-	-	-
19	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
21	Kep. Riau	-	-	-	-	-
	Sumatera	607	1	98	161,29	131,45
31	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
32	Jawa Barat	-	-	-	-	-
33	Jawa Tengah	24	0	1	29,17	23,77
34	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
35	Jawa Timur	2.256.876	2.769	242.762	107,57	87,67
36	Banten	-	-	-	-	-
	Jawa	2.256.900	2.769	242.763	107,56	87,67
51	Bali	-	-	-	-	-
52	Nusa Tenggara Barat	265	0	15	55,47	45,21
53	Nusa Tenggara Timur	65	0	10	153,85	125,38
	Bali & Nusa Tenggara	330	0	25	74,85	61,00
61	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
62	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
63	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
64	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
	Kalimantan	-	-	-	-	-
71	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
72	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
73	Sulawesi Selatan	2.500	3	30	12,00	9,78
74	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
75	Gorontalo	-	-	-	-	-
76	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
	Sulawesi	2.500	3	30	12,00	9,78
81	Maluku	-	-	-	-	-
82	Maluku Utara	-	-	-	-	-
91	Papua Barat	-	-	-	-	-
94	Papua	-	-	-	-	-
	Maluku & Papua	-	-	-	-	-
	Luar Jawa	3.437	4	153	44,40	36,19
	Indonesia	2.260.337	2.773	242.915	107,47	87,59

(Sumber : Statistik Produksi Hortikultura Tahun 2014)

Ketergantungan akan apel import mengalami titik terburuk, sampai produk buah apel impor menguasai pangsa pasar di dalam negeri hingga 98%. Sedangkan buah apel lokal hanya mengisi pangsa pasar hanya 1-2% dari produksi Apel Malang. Apel memang buah subtropis sehingga kurang bisa berkembang secara baik diseluruh wilayah Indonesia, hanya daerah tertentu seperti Malang, Bandung, Bogor ataupun daerah lain yang memiliki cuaca hampir sama dengan daerah subtropis. Secara total pasar (*market*) apel impor di Indonesia dikuasai oleh Tiongkok 50%, AS 38%, Prancis 10%, dan sisanya Australia, Jepang dan Selandia Baru (Kementerian Perindustrian – Direktorat Jenderal Agro, 2015). Sampai saat ini sentra produksi apel utama di Indonesia hanya di Jawa Timur yang mulai tumbuh berkembang pada tahun 1970-an dan pada puncak perkembangannya pada tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an di Batu, Poncokusumo Malang dan Nongko Jajar Pasuruan (Balitjestro, 2015).

Pengembangan wilayah apel tetap lestari, maka penanaman baru perlu diarahkan pada lahan – lahan yang memiliki karakter tanah dan iklim yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penggunaan lahan untuk tanaman apel dalam waktu yang jangka panjang secara intensif menggunakan agroinput anorganik telah menyebabkan degradasi lahan sehingga produktivitas tanaman cenderung menurun. Pada tabel 1 menunjukkan produktifitas tanaman apel di Indonesia.

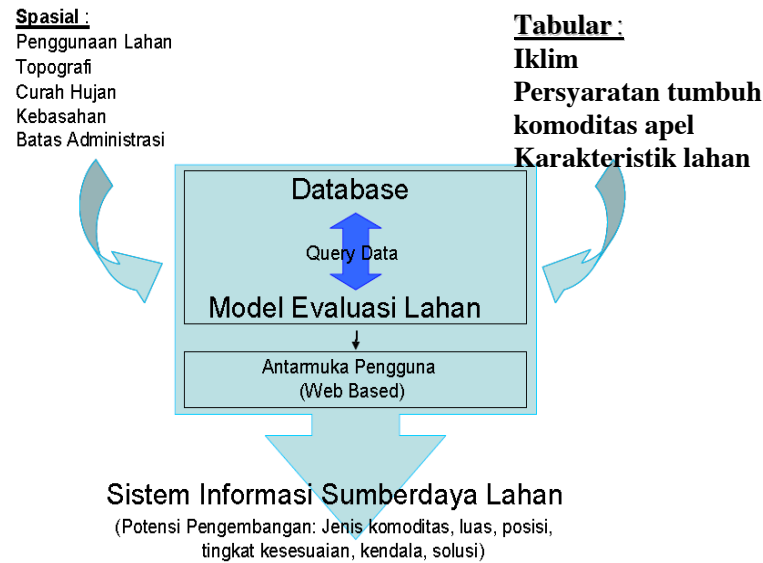
Rendahnya kesuburan lahan apel petani disebabkan oleh (a) bahan organik dan pupuk kimia yang diberikan pada pohon apel tidak optimal, dan (b) lahan apel petani telah tercemar bahan kimia. Rendahnya bahan organik lahan apel menurut Balijestro, yaitu berkisar dari 1,5 – 2,0 % dari nilai optimal sekitar 5%(Suhariyono dkk, 2015). Sedikitnya bahan organik yang diberikan oleh petani dapat menyebabkan struktur tanah rusak dan diperparah oleh terjadinya pencemaran bahan kimia yang diakibatkan oleh tingginya intensitas penyemprotan pestisida yang berlebihan, sehingga terjadi akumulasi bahan aktif logam berat. Fenomena tersebut menjadikan mikroorganisme yang ada di tanah menjadi berkurang sehingga secara keseluruhan mengakibatkan tanah mengeras dan kesuburan lahan semakin menurun.

Peningkatan produksi tanaman apel khususnya di wilayah Jawa Timur, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas areal penanaman (Ekstensifikasi), mengingat populasi tanaman apel di Jawa Timur saat ini masih terkonsentrasi di kabupaten Malang yang mencapai 80 % dari jumlah seluruh tanaman apel yang ada di Jawa Timur. Melakukan perluasan lahan pertanian sendiri tidak dapat diterapkan di sembarang daerah, karena setiap daerah memiliki karakteristik lahan. Diperlukan sumberdaya alam seperti iklim dan tanah yang harus diperhatikan untuk melakukan ekstensifikasi. Salah satu cara untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi pengembangan tanaman apel adalah dengan memperhatikan aspek agroklimatnya yaitu faktor iklim yang meliputi curah hujan, suhu, dan radiasi. Faktor tanah yang perlu diperhatikan adalah sifat fisik, kimia dan topografi.

Daerah Pengembangan Kawasan Agribisnis Apel dengan Peningkatan Lahan Produksi Berbasis Sistem Informasi Geografis berada di Kecamatan Poncokusumo di Kabupaten Malang dan Kec Tutar di Kabupaten Pasuruan. Terletak dilembar pegunungan tengger yang merupakan gunung api aktif secara geologis terbentuk berbatu dari material vulkanis hasil produksi gunung berapi yang dari jenis tanah andosol dan regosol, dengan topografi berbukit, memiliki 10 (sepuluh) jumlah bulan basah dan kering, dengan ketinggian rata – rata 841 mdpl. Poncokusumo memiliki curah hujan 2258 dengan kelembaban 75% dan suhu 16-17 °C (sesuai data Dinas Pertanian Jawa Timur). Tanah Andosol merupakan jenis tanah berwarna hitam yang mengindikasikan merupakan tanah vulkanis hasil erupsi gunung berapi, yang memiliki tekstur lempung- berpasir. Unsur kimia tanah *Andosol* memiliki unsur *Al* yang sangat dominan dibanding unsur *Fe* dan *Si*. Unsur *Al* yang tinggi dikarenakan berasal dari batuan induk yang bersifat masam (*liparit*), sehingga sangat resisten dengan fosfor. *Regosol* relatif sama dengan andosol tetapi memiliki ukuran butir yang lebih kasar, berwarna merah kekuningan sampai coklat kekuningan. Jenis tanah *Andosol* dan *Regosol* kaya akan unsur hara, tetapi kekurangan unsur *N*, sehingga diperlukan pupuk Organik, Kandang dan Hijau untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman.

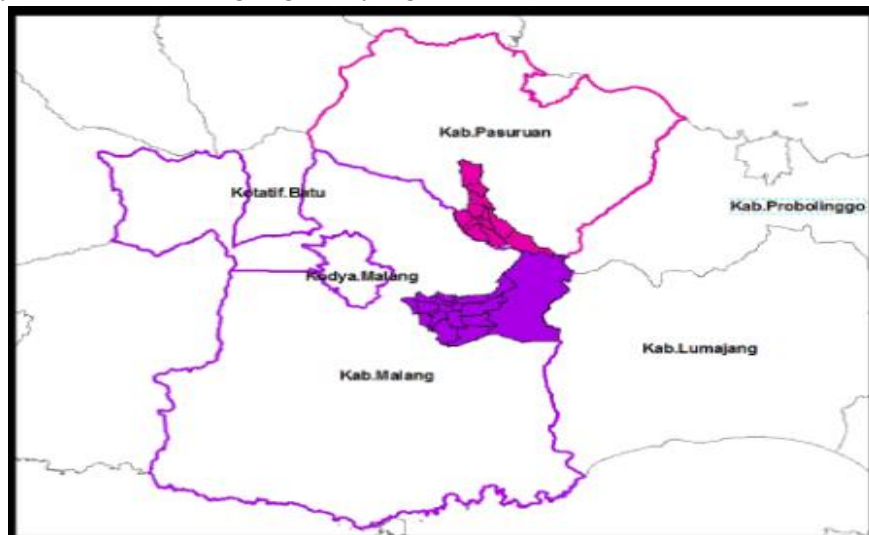
BAHAN DAN METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah sistem informasi sumber otomatisasi evaluasi kesesuaian lahan untuk deteksi potensi pengembangan lahan budidaya apel dengan memadukan teknologi penginderaan jauh (SIG) dengan pengambilan sampel tanah di lapangan dipadukan dengan data sekunder sebagai literatur, kerangka berpikir sistem informasi untuk menggambarkan daerah pengembangan kawasan agribisnis pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir sistem informasi sumber daya lahan dalam pengembangan kawasan agribisnis Apel

Kegiatan dilakukan di wilayah Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, lokasi penelitian ditunjukkan pada gambar 2. Kegiatan lapangan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan November 2018, yaitu dengan melakukan pengambilan data lapangan baik data primer maupun data sekunder di lokasi kegiatan dan di berbagai instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang dari berbagai instansi terkait lainnya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan.



Gambar 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei, hal yang dilakukan meliputi pengamatan, pengukuran, pencatatan secara sistematis terhadap berbagai kajian yang menjadi objek penelitian. Penetapan lokasi untuk pengambilan sampel tanah ditentukan dengan cara stratified random sampling. Pengolahan peta dilakukan dengan bantuan software GIS. Peta satuan lahan memiliki peran yang penting dalam penelitian ini. Untuk membuatnya diperlukan interpretasi peta topografi dan peta geologi skala. Kedua peta tersebut untuk menghasilkan peta bentuk lahan. Peta tanah, peta

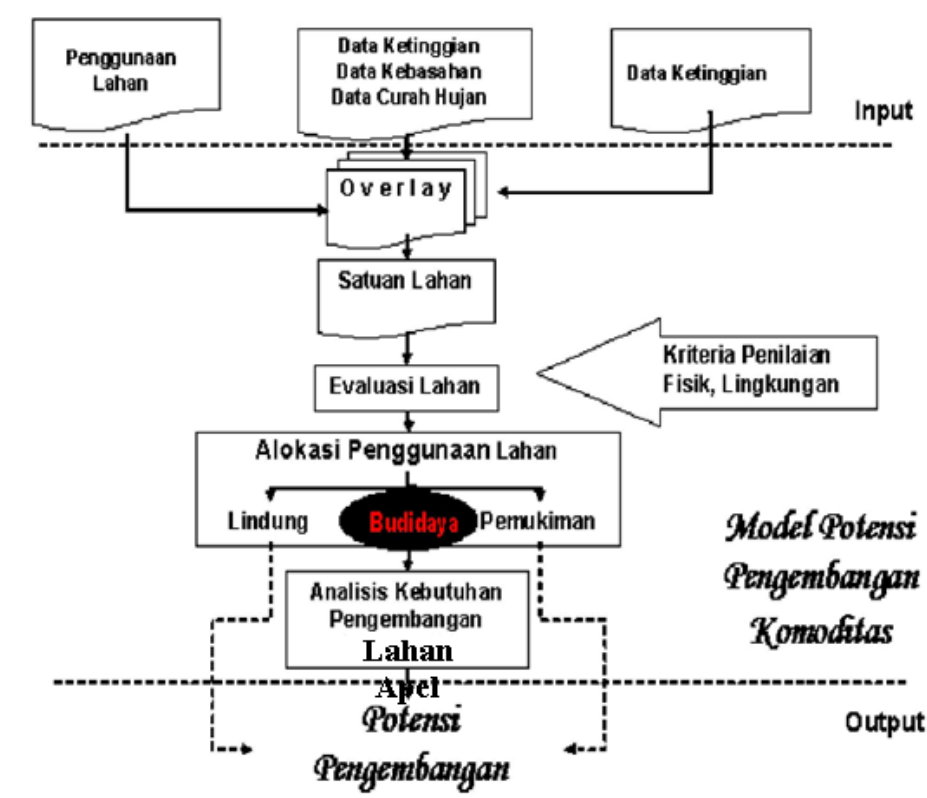
bentuklahan, dan peta penggunaan lahan, dengan skala yang sama 1 : 150.000 dilakukan tumpang susun (overlay) menggunakan program ArcGIS 10.5 (*Arc Map 10.5*, *Arc Scene 10.5* dan *Arc Globe 10.5*) untuk mendapatkan peta satuan lahan. Peta satuan lahan digunakan sebagai dasar untuk menentukan lokasi pengambilan sampel

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan hasil analisis laboratorium yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait guna mendukung kegiatan penelitian. Pada Tabel 2 dikelompokkan kebutuhan data beserta sumber data, sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Jenis Data

No	Jenis Data	Lingkup	Sumber Data
1	Data Lapangan	Ketersediaan Air {bulan kering, curah hujan/tahun, kelembaban (%), LGP (hari)}.	Survei lapangan
		Media perakaran {tekstur, drainase tanah, kedalaman efektif(cm)}.	
		Tipe penyiapan Lahan {(batuan permukaan (%), singkapanbatuan(%))}.	
		Tingkat bahaya erosi {bahaya banjir, bahaya erosi danlereng(%)}	
2	Data Laboratorium	Retensi hara {KTK tanah,Kejenuhan basa, pH tanah, C-organik(%)}	Analisis Laboratorium
		Hara tersedia { total N, P ₂ O ₅ ,K ₂ O}	
3	Peta	AdministrasiKawasan	BAPPEDA
4	Geografis Wilayah	Topografi, batas wilayah, luas wilayah, ketinggian tempat.	BAPPEDA
5	Iklim	Curah hujan bulanan dan tahunan, temperatur, kelembaban relatif,kemiringan lahan	BMKG
6	Tanaman apel	Hasil, Produktivitas dan Produksi	BPS
7	KondisiSosial danEkonomi dan Masyarakat	Jumlah penduduk, pendidikan, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan kepadatan penduduk	BPS

Tabulasi data sesuai pada tabel 2, diolah sesuai digram alur pada gambar 3 untuk mendapatkan informasi kelas kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan agribisnis apel :



Gambar 3. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan lokasi pengamatan dilakukan atas dasar kelas penggunaan lahan dan bentuk kelerengan pada peta RBI dengan software ArcGIS 10.5. Pemilihan lokasi pengamatan diprioritaskan kepada lahan dengan luasan yang dominan yaitu pada lahan sawah, tegalan, semak, dan pekarangan. Lahan sawah yang memiliki intensitas kegiatan pertanian yang sangat tinggi, sehingga sangat memungkinkan terjadinya penurunan kualitas lahan. Selain dari penurunan kualitas lahan, alih fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan sawah disebabkan karena lahan sudah tidak produktif. Evaluasi lahan dilakukan supaya dalam pemanfaatan lahan sawah yang sudah tidak produktif dapat diupayakan untuk pengembangan apel jenis unggul yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Pengamatan tanah di lapangan bertujuan untuk memperoleh data sifat-sifat morfologi tanah dan penyebarannya. Berdasarkan jenis data dan sifat-sifat morfologi yang perlu untuk diketahui, pengamatan tanah dilakukan dengan membuat minipit sedalam 40 cm. Lokasi minipit dipilih pada tempat yang bukan merupakan bekas timbunan sampah/pupuk, tanah galian atau timbunan tanah lainnya, bekas bangunan atau jalan, kuburan, ubinan, pesemaian, percobaan, tempat sampah, atau pembuangan kotoran dan bekas-bekas material lainnya.

Pengambilan sampel tanah dilakukan secara komposit, yaitu contoh yang dikumpulkan dari beberapa titik pengamatan melalui pemboran yang dicampur merata menjadi satu contoh yang homogen. Contoh tanah komposit ini merupakan kumpulan dari contoh tanah mineral lapisan atas. Apabila terdapat lapisan organik, maka lapisan tersebut tidak diikutsertakan dalam pengambilan (Sukarman dkk, 2004). Contoh diambil pada kedalaman efektif tanam apel 0 – 40 cm dari 10 tempat dengan radius 50 m. Dari 10 sampel tersebut kemudian dicampur dan diambil sekitar 1 kg untuk dianalisis di laboratorium.

Analisis sampel tanah dilakukan di laboratorium dan mengacu pada Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanah (2009). Parameter-parameter yang dianalisis disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu parameter-parameter yang berkaitan dengan kesesuaian lahan.

Parameter-parameter tanah yang diamati adalah:

- Penyiapan sampel tanah;
- Penetapan kadar air kering mutlak;
- Tekstur tanah dengan metode pipet;
- Kemasaman Tanah (pH) aktual;
- Carbon organik (C-organik) dan Bahan Organik (BO) dengan metode Walkley dan Black;
- Kandungan P_2O_5 tersedia menggunakan metode Olsen pada tanah dengan pH >5,5 (Fosfat dalam suasana netral/alkali) dan metode Bray-1 dan Kurt I pada tanah dengan pH <5,5 (Fosfat dalam suasana asam);
- Penetapan Susunan Kation, Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan Kejenuhan Basa (KB) ditetapkan dengan pengestrak NH_4OAc pH-7,0;
- Penetapan Kadar N Total dengan metode Kjeldahl.

Seluruh data diinterpretasi berdasarkan konsep evaluasi lahan yaitu dengan proses pendekatan pencocokan antara karakteristik lahan sebagai parameter dengan persyaratan penggunaan lahan yang telah disusun berdasarkan satuan lahan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan. Pada proses penentuan kelas kesesuaian lahan didasarkan pada faktor pembatas (limiting factors) yang mengacu pada hukum minimum yaitu kelas kesesuaian lahan ditentukan oleh nilai terkecil. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan hingga tingkat sub kelas berdasarkan Kriteria Kesesuaian Lahan Djaenudin dkk (2011), yaitu: S1 (sangat sesuai/*highly suitable*); S2 (cukup sesuai/*moderately suitable*); S3 (marjinal sesuai/*marginally suitable*); dan N (tidak sesuai/*not suitable*). Analisis Laboratorium dilakukan dengan analisis Kimia dan Fisika lengkap seperti tersaji dalam tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Data analisis kimia sampel tanah daerah penelitian

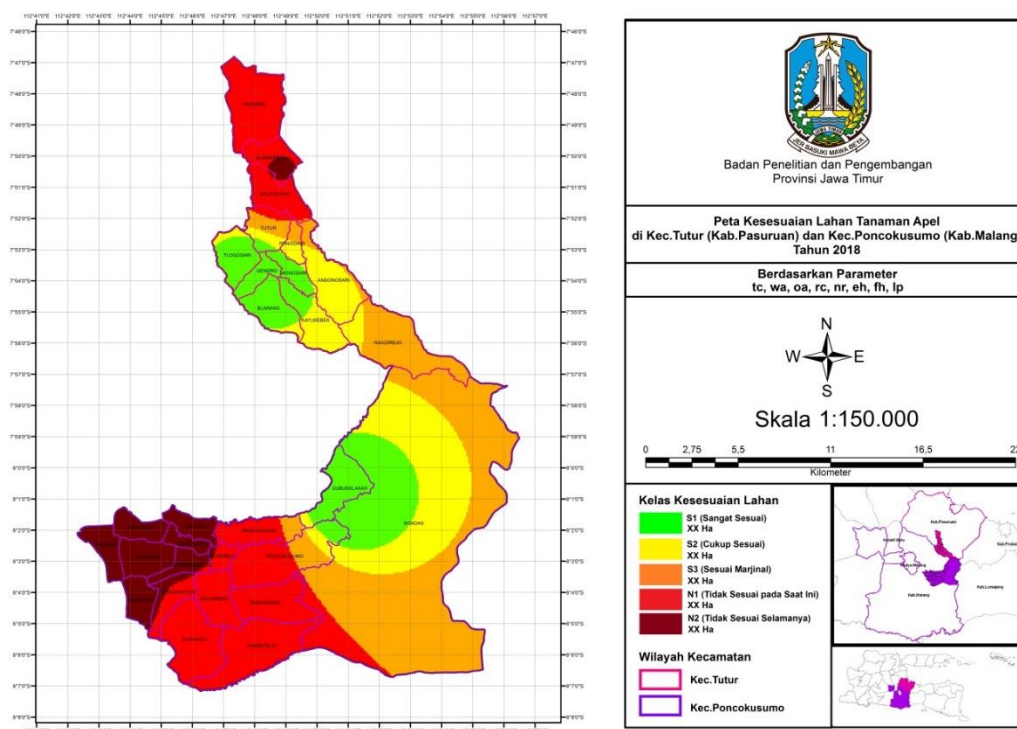
Sampel	Parameter Kimia												
	pH H ₂ O	pH KCl	C Organik	N Total	P BRAY	KTK	Ca-dd	Mg-dd	K-dd	Na-dd	Ec	Redoks	Kadar Air
	%	%	%	%	ppm	cmol/Kg	me/100g	me/100g	me/100g	me/100g	mS	mv	%
Ngembal	5.45	4.41	0.81	0.05	22.97	32.98	6.05	0.08	0.33	0.02	0.04	95	5.6
Sumberpitu	5.59	4.77	0.81	0.04	52.13	47.8	5.06	0.6	0.37	0.23	0.039	81	8.16
Kalipucang	5.46	4.47	1.34	0.05	20.9	52.34	5.2	2.38	0.39	0.01	0	86	10.69
Togosari	5.45	5	3.77	0.1	0.13	32.73	4.98	6.96	0.1	0.01	0	68	5.6
Blarang 1	5.55	4.62	2.11	0.09	106.22	38.92	5.03	4.62	0.26	0.02	0.01	79	12.36
Gubukklakah 1	5.89	4.95	2.99	0.11	6.56	24.54	5.17	7.25	0.16	0.02	0	66	4.38
Wonorejo	5.38	4.61	1.23	0.05	288.33	22.76	6.41	4.33	0.6	0.21	0.19	89	2.88
Belung	5.54	4.55	0.55	0.03	39.12	29.71	7.46	6.84	0.18	0.12	0.14	82	4.58
Karangnongko	6.09	5.04	0.75	0.04	48.49	29.7	4.12	1.97	0.28	0.14	0.09	58	3.1
Karanganyar	6.09	5.15	1.18	0.05	31.88	18.18	4.75	7.03	0.24	0.23	0.03	53	1.6
Ngadireso	5.74	4.71	1.27	0.05	0.25	22.25	8.42	6.79	0.33	0.03	0.09	76	2.29
Ngebruk	6.16	5.12	0.62	0.03	60.1	31.74	10.68	4.06	0.02	0.04	0.14	74	2.29
Blarang 2	5.58	4.71	2.17	0.08	107.11	39.37	5.17	4.36	0.31	0.02	0.01	76	10.82
Gubukklakah 2	5.89	4.97	2.98	0.11	6.53	26.71	5.53	7.31	0.19	0.02	0	67	6.23

Tabel 4. Data analisis fisika sampel tanah daerah penelitian

Sampel	Parameter Fisika							
	Tekstur Tanah				Bulk Density cm/jam	Porositas %	Permeabilitas	
	Pasir	Debu	Liat	Keterangan			cm/jam	Keterangan
Ngembal	3	58	39	Lempung liat berdebu	1.49	27.55	2.45	Sedang
Sumberpitu	2	88	10	Liat berdebu	1.43	30.3	1.45	Agak Lambat
Kalipucang	1	88	11	Debu	1.35	39.87	4.91	Sedang
Togosari	2	73	25	Liat berdebu	1.33	38.38	2.53	Sedang
Blarang 1	1	92	7	Debu	1.26	45.77	3.87	Sedang
Gubukklakah 1	3	52	45	Lempung liat berdebu	1.32	38.07	2.22	Sedang
Wonorejo	3	78	19	lempung berdebu	1.48	37.57	2.81	Sedang
Belung	4	82	14	Lempung liat berdebu	1.52	30.86	3.57	Sedang
Karangnongko	2	82	16	lempung berdebu	1.67	24.72	0.38	Lambat
Karanganyar	9	40	51	Liat berdebu	1.54	35.19	0.19	Lambat
Ngadireso	6	65	29	Lempung liat berdebu	1.48	38.04	4.71	Sedang
Ngebruk	3	37	60	Liat	1.6	27.63	3.27	Sedang
Blarang 2	3	86	11	Debu	1.33	42.87	3.73	Sedang
Gubukklakah 2	3	50	47	Liat berdebu	1.24	41.99	2.89	Sedang

Pada Gambar 4, menunjukkan kelas kesesuaian lahan S1 di Kecamatan Poncokusumo terletak di Desa Gubukklakah yang telah dikenal lama sebagai daerah sentra budidaya apel di Malang Bagian Timur. Daerah lain disekitar Gubukklakah yang berpotensi untuk dikembangkan budidaya apel terletak di Desa Ngadas dan sebagian kecil wilayah Desa Wringinanom dan Poncokusumo. Perbedaan ketinggian yang mencolok antara desa sentra Produksi Apel dengan desa penyangga di sekitarnya mengakibatkan daerah sekitarnya tidak sesuai untuk budidaya Apel. Faktor bahan kasar, batuan di permukaan dan C Organik yang menjadi penyebab utama ketidakcocokan budidaya apel. Rencana pengembangan Apel ke daerah Desa Ngadas bukan tanpa kendala, karena sebagian besar daerah Desa Ngadas terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sentra Apel Kabupaten Pasuruan di Desa Tuter dan Pungging ternyata sesuai kelas kesesuaian lahan berada di kelas S2 – S3, hal ini sesuai yang disampaikan oleh petani yang mengeluhkan membengkaknya biaya produksi apel dan penurunan produktifitas dari tahun ketahun terutama daerah desa Pungging. Efek pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya suhu disinyalir menjadi penyebab utama turunnya kualitas dan produktifitas apel. Pergeseran kelas kesesuaian lahan ke daerah yang memiliki topografi tinggi yang memiliki suhu lebih rendah seperti Desa Tlogosari, Gendro, Blarang, dan Wonosari, salah satu bukti pemanasan global sangat berpengaruh pada pertumbuhan apel. Penyebaran nilai pembobot pada peta menggunakan metode stokastik yang terdapat pada GIS sehingga daerah yang kosong di isi pembobotan daerah sekitarnya.

Rencana pengembangan lahan budidaya apel di daerah Kecamatan Poncokusumo dan Tuter, sesuai kelas kesesuaian lahan dari perhitungan software GIS diperkirakan memiliki luas 3617.93 km² untuk kelas S1, lebih detil bisa dilihat pada tabel 5. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan pengambil kebijakan dan stakeholder lainnya, dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi buah apel. Pengembangan daerah budidaya apel di daerah S1, dimungkinkan dengan *effort*/usaha yang minimal dan berharap hasil yang maksimal, karena kebutuhan dasar pertumbuhan pohon apel sudah tersedia secara alami.



Gambar 4. Kelas Kesesuain Lahan untuk tanaman apel di Kecamatan Tutur, Kab.Pasuruan dan Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang

Tabel 5. Luasan kesesuaian lahan budidaya Apel

Kelas	Luas		
	(ha)	(km ²)	%
S1	361793.1935	3617.9319	12.3639
S2	693947.0069	6939.4701	23.7150
S3	908236.9225	9082.3692	31.0381
N1	670664.2224	6706.6422	22.9193
N2	291558.6548	2915.5865	9.9637
Total	2926200.0000	29262.0000	100.0000

KESIMPULAN

Sumberdaya lahan sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Apel memiliki spesifikasi khusus yang harus dikandung oleh lahan supaya bisa tumbuh dengan baik, seperti dalam tabel klasifikasi Djaenudin dkk (2011) yang mengelompokkan kelas – kelas lahan yang sesuai dengan kelas kemampuannya. Penggunaan metode survei, meliputi pengamatan, pengukuran, pencatatan secara sistematis terhadap berbagai kajian yang menjadi objek penelitian, pengolahan peta dilakukan dengan bantuan software GIS untuk mendapatkan peta satuan lahan yang dikombinasikan dengan hasil pengambilan sampel dari survei lapangan. Wilayah Poncokusumo dan Tutur sangat potensial untuk pengembangan apel. Wilayah Kecamatan Poncokusumo, apel bisa dikembangkan untuk apel di desa Ngadas. Dan untuk Kecamatan Tutur yang memenuhi nilai kesesuaian kelas S1 di desa Blarang, Wonosari, Tlogosari, Gendro dan sebagian desa Kayu Kebek. Secara Geografis wilayah tersebut sangat memenuhi kelas kesesuaian lahan untuk mengembangkan

daerah agribisnis Apel. Pengembangan Kawasan agribisnis Apel, harus memperhatikan kemampuan lahan, karena apel hanya bisa berkembang pada daerah tertentu. Apel cocok dengan lahan yang mengandung tanah *Latosol*, *Andosol* dan *Regosol*, yang berasal dari rombakan material gunung berapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur atas kepercayaan dan pembiayaan sehingga penelitian ini terlaksana, beserta seluruh peneliti, dan staf yang mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agroekoteknologi, J. O., & No, I. (2014). No Title, 2(2337), 941–948.
- Barus, B dan U. S. Wiradisastra. 2000. *Sistem Informasi Geografi Sarana Manajemen Sumberdaya. Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.*
- Christina, D. R., Rustiadi, E., Barus, B., Ilmu, D., Lahan, S., Pertanian, F., ... Ipb, K. (2012). *Pemetaan Lahan Berpotensi Untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus : Provinsi Jawa Barat) Mapping of Potential Land for Supporting Proposal of the Planning of Sustainable Food Based Agricultural Land (A Case Study in West Java Province)*, 14(April), 29–36.
- Buchori, I. 2010. *A GIS Model for Predicting Disaster Prone Areas Affected by Global Sea-Level Rise: a Case Study of Semarang City*
- Hardjowigeno S, Widiatmaka. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University*
- <http://balitjestro.litbang.pertanian.go.id/pewilayahan-tanaman-apel-di-jawa-timur/>. Pewilayahan Tanaman Apel di Jawa Timur.
- Kementerian Perindustrian – Direktorat jenderal Agro, 2015 98% Pasar Buah Apel di Dalam Negeri Dikuasai Produk Impor
- Pendahuluan, I., Cadangan, L., & Pangan, P. (2012). Model Pemetaan Sawah dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (Model of Rice Field Mapping and It ' s Protection using Remote Sensing and GIS).
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013
- Program, P., Sida, P., Daerah, S. I., Mendukung, D., Pembangunan, P., Di, D., ... Kunci, K. (n.d.). No Title, 1–9.
- Rayes, M.L. 2007. *Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan*. Penebit Andi. Yogyakarta.
- Rustiadi, Ernan et al. 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Jakarta* : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- Surya, D. (2009). *Pembuatan Sistem Informasi Geografis Kesesuaian Lahan Tanaman Tebu Berbasis Web Di Kabupaten Merauke*.
- Susetyo, B., Arifin, H. S., & Arifin, N. H. S. (2010). *Mendukung Model Perumusan Kebijakan Manajemen Lanskap Di Sempadan Ciliwung , Kota Bogor (Spatial Analysis Of Land Capability And Suitability For Policy Formulation Model Of Landscape Management At Ciliwung Riparian In Bogor City)*, (15), 51–58.
- Sugiyono 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Sumberdaya, J. (1999). *Tanaman Apel Di Kota Batu - Jawa Timur Spasial Analisis For Evaluation Of Apple ' s Land Suitability In Batu City – East Java*, 1–7.
- TTG Teknologi Pertanian (2013). *Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*
- Wijayanto Yagus. 2013. *Bahan Ajar Evaluasi Sumber Daya Lahan Dengan Sistem Informasi Geografis*. Jember. Fakultas Pertanian Universitas Jember



**PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA PANTAI SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DESA
Studi Kasus: Pantai Kutang, Kabupaten Lamongan**

***IMPROVEMENT OF ATTRACTIVE BEACH TOURIST AS
EFFORTS TO INCREASE VILLAGE'S REVENUE***
Case studi : Kutang Beach, Lamongan Districts

Diah Novianti^{1*}, Judiono²

^{1*} Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jalan Gayung Kebonsari 56 Surabaya
novi.litbangjatim64@gmail.com

² Universitas Sunan Giri Surabaya
Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo
judiono2006@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dampaknya dapat langsung dirasakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam usaha tersebut. Semakin banyak dan menariknya suatu destinasi wisata akan semakin menarik minat pengunjung untuk berdatangan sehingga akan semakin cepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di Kabupaten Lamongan, sektor pariwisata menempati urutan ke-3 dalam kontribusi terhadap nilai PDRB Kabupaten Lamongan tahun 2018.

Kajian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran jelas terkait pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang berdasarkan hasil analisa data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengunjung, pedagang dan juga pengelola Pantai Kutang.

Hasil wawancara dengan pengunjung diketahui bahwa sebagian besar responden (56,25%) merupakan pengunjung yang baru pertama kali datang ke Pantai Kutang, alasan pengunjung mendatangi Pantai Kutang adalah untuk memenuhi rasa penasaran tentang daya tarik obyek wisata tersebut (50%), dan hampir seluruh responden (93,75%) menyatakan bahwa Pantai Kutang merupakan obyek wisata yang menarik.

Sebagian besar pedagang merasakan peningkatan penghasilan dengan keberadaan obyek wisata Pantai Kutang dibanding dengan kegiatan mereka sebelumnya. Disamping itu, dengan besarnya pengunjung obyek wisata tersebut, BUMDes Labuhan juga dapat memberikan peluang kerja bagi golongan usia produktif untuk bekerja dengan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Sebanyak 8 (delapan) orang bekerja untuk melayani pengunjung. Di samping itu desa juga mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang.

Pengelola obyek wisata ini sangat antusias untuk mendapatkan pendampingan guna peningkatan daya tarik sehingga dapat menjadi salah satu penopang dalam langkah menuju desa mandiri.

Kata kunci: pariwisata, obyek wisata, manajemen

ABSTRACT

Tourism is one of the sectors that influences the people economy. The impact can be directly felt by the actors involved in the business. The more attractive a tourist destination the more people visit the destination. In Lamongan District, based on statistical report of 2018, tourism sector sited the 3rd position in contributing to the value of the Gross Regional Domestic Product.

This study is quantitative descriptive which provides description related to the management of the tourism object Kutang Beach based on the results of primary and secondary data analysis. Primary

data were obtained from the results of interviews conducted with visitors, traders and also managers of Kutang Beach.

The results of interviews with visitors show that most respondents (56.25%) were first-time visitors to Kutang Beach, the reason visitors visited the Kutang Beach tourism object was to fulfilling curiosity about the beauty and attractiveness of the beach (50%), and almost all respondents (93.75%) stated that Kutang Beach is a beautiful object tourism.

Most of the traders stated that they get more income with the existence of the Kutang Beach tourism object compared to their previous activities. In addition, with the large number of visitors to the beach, BUMDes Labuhan can also provide opportunities for productive age groups to work by earning a steady income each month. A total of 8 (eight) people work to serve visitors. In addition, the village also gets a share of the revenue from the management of Kutang Beach.

The managers of this beach are hopeful for the assistance in order to increase attractiveness that may be one of the pillars in the steps towards an independent village.

Keywords: tourism, tourism object, management,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dampaknya dapat langsung dirasakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam usaha tersebut. Semakin banyak dan menariknya suatu destinasi wisata akan semakin menarik minat pengunjung untuk berdatangan sehingga akan semakin cepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di Kabupaten Lamongan, sektor pariwisata menempati urutan ke-3 dalam kontribusi terhadap nilai PDRB Kabupaten Lamongan tahun 2018.

Kecamatan Brondong yang berada di wilayah pantai Utara Kabupaten Lamongan memiliki potensi wisata pantai namun masih belum bisa diandalkan sebagai destinasi wisata, dan sangat membutuhkan perhatian pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya wisata. Salah satu obyek wisata yang ada saat ini adalah obyek wisata di Pantai Kutang yang berlokasi di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong.

Pengembangan obyek Wisata Pantai Kutang tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu obyek wisata andalan di kawasan Brondong, dan juga dapat menjadi pelengkap destinasi wisata yang ada di wilayah utara Kabupaten Lamongan.

Dalam upaya pengembangan sumber daya wisata Pantai Kutang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa sekitar. Pemberdayaan masyarakat desa dapat berperan serta dalam pemanfaatan peluang kebutuhan prasarana wisata. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memberikan perhatian terhadap perkembangan obyek wisata Pantai Kutang sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata di kawasan tersebut yang dapat berimbas terhadap peningkatan pendapatan. Kajian pengelolaan kawasan wisata Pantai Kutang merupakan evaluasi terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh desa sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan desa dalam rangka menuju desa mandiri yang tangguh dan kreatif sebagai salah satu pilar kesejahteraan warga desa.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas didapat rumusan masalah dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang saat ini?
2. Bagaimana pengaruh keberadaan obyek wisata Pantai Kutang terhadap kegiatan perekonomian warga desa?

Maksud dan Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran terkait pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang saat ini berdasarkan hasil evaluasi hasil survey.

Tujuan Kajian:

1. Untuk mendapatkan informasi pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang saat ini;
2. Untuk mendapatkan informasi pengaruh keberadaan obyek wisata pantai Kutang terhadap kegiatan perekonomian warga desa;

Sasaran

Sasaran dari kajian ini adalah:

1. Didapatkannya informasi pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang saat ini;
2. Didapatkannya informasi pengaruh keberadaan obyek wisata pantai Kutang terhadap kegiatan perekonomian warga desa

Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah peningkatan kunjungan ke obyek wisata Pantai Kutang yang dapat berimbas terhadap peningkatan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat desa sebagai langkah menuju desa mandiri.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran jelas terkait pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang berdasarkan hasil analisa data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengunjung dan juga pedagang di Pantai Kutang. Kajian ini bersifat ilmiah artinya hasil kajian yang dilaporkan merupakan hasil tinjauan, identifikasi dan narasi yang dilakukan berdasarkan keilmuan terkait. Bersifat deskriptif artinya kajian ini menguraikan kondisi yang ditemui di lokasi kegiatan saat ini dan peraturan perundang-undangan serta teori hasil kajian/penelitian terkait dengan pengelolaan pantai. Disamping itu kajian ini juga menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pantai serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan pantai Kutang saat ini sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sementara mempelajari hasil kajian/penelitian terdahulu terkait pengelolaan pantai di beberapa lokasi dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dimaksudkan untuk mendapatkan rujukan dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pantai.

Analisa yang dilakukan diuraikan secara kuantitatif, berdasarkan hasil pengisian kuesioner kepada pengunjung dan pedagang di lokasi kajian.

Tahapan kajian

Tahapan yang dilakukan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian pustaka terkait kegiatan penelitian/kajian yang telah dilakukan dan juga kajian peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan obyek wisata pantai;
2. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
3. Penyusunan draft laporan;
4. Survey di lokasi, meliputi wawancara terstruktur kepada pengunjung dan pedagang di lokasi kajian;

5. Analisa data dan penyusunan laporan dengan penekanan kepada kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan.

Lokasi dan Jangka Waktu

Kegiatan kajian ini berlokasi di obyek wisata Pantai Kutang yang terletak di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong dan dilaksanakan pada tahun 2019.

Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk kemudian dianalisa dalam kegiatan kajian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lokasi kajian, baik hasil peninjauan langsung di lapangan dan juga hasil wawancara dengan pengunjung, pedagang dan juga pihak yang berkompeten dalam pengelolaan Pantai Kutang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain antara lain BAPPEDA Kabupaten Lamongan, BALITBANGDA Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong dan juga Desa Labuhan.

Analisa Data

Data yang didapat, baik primer dan juga sekunder, dianalisa secara ilmiah, kuantitatif dan terintegrasi untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini. Hasil analisa tersebut dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi dalam kajian ini. Rekomendasi yang disarankan bersifat implementatif, dapat dan mudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, merupakan hasil diskusi dengan Tim dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan

Pendekatan Teoritis dan Empiris

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, secara normatif memberikan batasan, bahwa:

- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Beberapa definisi dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai antara lain:

- Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu .
- Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Terkait dengan perlindungan kawasan pesisir, Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mendefinisikan bahwa bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan

perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota antara lain:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan beberapa definisi antara lain:

- Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Menurut Triatmojo (1999), dan Kasim (2012), garis pantai didefinisikan sebagai batas pertemuan antara permukaan daratan dan permukaan air laut, batas itu dapat bervariasi bentuknya dan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan garis pantai bersifat sangat dinamis dan terus menerus disebabkan adanya pergerakan sedimen, arus, terjangan gelombang maupun perubahan penggunaan lahan.

Kawasan pantai dikategorikan sebagai kawasan peralihan antara darat dan air sehingga mempunyai karakteristik ekosistem yang unik dan cenderung mendapat tekanan yang berat dari aktifitas manusia. Pengembangan yang pesat pada kawasan pesisir akibat pertambahan jumlah penduduk, dan penambahan infrastruktur dapat menyebabkan perubahan ekosistem pesisir yang mempunyai peranan sebagai pelindung alami kawasan pesisir (Burke dkk, 2001).

Garis pantai yang berkaitan erat dengan proses perubahan di kawasan pesisir merupakan salah satu faktor penting untuk memonitor kawasan pesisir terkait dengan perlindungan lingkungan dan kegiatan pembangunan disekitarnya (Kasim, 2012).

Hasil penelitian Sardiyatmo dkk, 2013, menyimpulkan bahwa perubahan panjang garis pantai Semarang 42.6% dipengaruhi oleh kecepatan arus, 30.8% dipengaruhi oleh sedimen, 21.5% dipengaruhi oleh gelombang dan 8.1% dipengaruhi oleh angin. Terjadinya abrasi pantai Semarang 51.6 % dipengaruhi oleh arus, 18.0% dipengaruhi oleh gelombang, 14.2% dipengaruhi oleh sedimen dan 7.1% dipengaruhi oleh angin sedang perubahan akresi pantai Semarang 39.5% dipengaruhi oleh arus, 33.9% dipengaruhi oleh sedimen, 19.30% dipengaruhi oleh gelombang dan 8.3% dipengaruhi oleh angin.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu

dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa. BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente. Nurcholis, (2011, h.88)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6° 51' 54'' sampai dengan 7°23'6'' Lintang Selatan dan antara 112° 4'41'' sampai dengan 112° 33'12'' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Lamongan meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Luas Wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 km² atau setara dengan 181.280 Ha., terdiri dari daratan rendah berawa dengan ketinggian 0 – 25 m seluas 50,17 % dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25 – 100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15 % merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan bertekstur sedang 114.884 Ha atau 63,37% dari luas wilayah. Selain itu, wilayah dengan luas 63.709 Ha atau 35,14 % adalah tanah dengan tekstur halus sedangkan tanah dengan tekstur kasar mempunyai luas sebesar 2.687 Ha atau 1,48% dari luas wilayah Kabupaten Lamongan seluruhnya. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2017 sebanyak 1.360.987 jiwa yang terdiri atas 681.587 jiwa penduduk laki-laki dan 679.400 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2017 sebesar 1,003. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2017 mencapai 751 jiwa/km².

Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong sebagai salah satu kecamatan yang terletak di sebelah utara (pantura) Kabupaten Lamongan, berada pada koordinat antara 06° 53'30,81'' - 7° 23'6'' lintang selatan dan 112° 17'01,22'' – 112°33'12'' bujur timur, dengan ketinggian desa/ Kelurahan dalam Kecamatan Brondong antara 5-73 m dari permukaan air laut. Luas wilayah Kecamatan Brondong adalah 70,14 Km². Batas-batas wilayah Kecamatan Brondong adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Laren; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Paciran dan Kecamatan Solokuro. Lapangan kerja di bidang Perikanan/ Pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja penduduk di Kecamatan Brondong yakni sejumlah 19.914 jiwa, sedangkan paling kecil bidang konstruksi sebanyak 371 jiwa.

Pantai Kutang

Pantai Kutang terletak di Dukuh Kentong, Desa Labuhan. Pantai Kutang merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya, namun belum menggema hingga ke luar daerah. Pantai Kutang memiliki pesona tersendiri, selain menawarkan keindahan pantai berpasir putih, pantai ini juga dipercantik dengan adanya jembatan kayu berwarna-warni. Jembatan tersebut dibangun memanjang sebagai penghubung dari lokasi parkir hingga lokasi pantai. Pengunjung bisa merasakan sensasi jalan-jalan santai di atas jembatan, berfoto-foto sambil menikmati panorama lautan yang tenang di sebelah utara dan hijaunya hutan mangrove di sebelah selatan. Saat ini Pantai Kutang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penamaan Pantai Kutang berkaitan dengan kutang atau bra. Jauh sebelum Pantai Kutang menjadi destinasi wisata, di lokasi ini banyak sekali ditemukan kutang yang berserakan hingga membuatnya nampak kumuh dan kotor. Hingga suatu ketika masyarakat setempat berinisiatif untuk bersih-bersih pantai dengan mengumpulkan sampah berupa kutang dan sampah-sampah lainnya. Itulah awal mula dinamakannya pantai ini dengan nama Pantai Kutang.

Obyek wisata Pantai Kutang merupakan suatu destinasi wisata yang cukup menarik karena keindahan alamnya. Lokasi Pantai Kutang tidak jauh dari jalan Daendels yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Disamping wisata pantai, di sekitar pantai terdapat beberapa destinasi yang cukup menarik antara lain adanya tempat pendaratan ikan, khususnya ikan tongkol, ladang yang ditanami cabai di Desa tetangga yaitu Desa Sidomukti. Disamping itu terdapat pula sentra ikan kerapu, lebih dikenal dengan sebutan Kampung Kerapu, tambak bandeng dan tambak udang vaname. Benih kerapu diperoleh dari Bondowoso jenis kerapu karet. Penduduk di sekitar Pantai Kutang banyak yang bermatapencaharian di sektor perikanan, baik perikanan budi daya maupun tangkap.

Berdasarkan informasi dari salah seorang perangkat desa dan juga pengurus pengelolaan Pantai Kutang dapat diketahui bahwa dengan adanya pengelolaan pantai oleh BUMDes sebagai destinasi wisata telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pengelola Pantai Kutang memiliki 8 (delapan) pekerja. Beberapa anggota masyarakat lainnya membuka usaha warung makanan dan minuman yang melayani pengunjung Pantai Kutang.



Gambar 1, Salah Satu Sisi Pantai Kutang
Sumber: Dok. Pribadi, 2019

Dari hasil wawancara terstruktur dengan pengunjung sebagai responden didapat data sebagai berikut:

1. Usia responden

Pengunjung Pantai Kutang yang menjadi responden 31,25% berusia kurang dari 20 tahun; 37,50% berusia antara 20-30 tahun; 25% berusia antara 41-50 tahun dan sebanyak 6,25% berusia lebih dari 50 tahun.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pengunjung (68,75%) berusia kurang dari 30 tahun. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian dari pengelola Pantai Kutang mengingat bahwa dalam usia tersebut merupakan usia yang mudah tertarik atau 20-30 tahun; 25% tetapi juga mudah bosan terhadap suatu obyek. Hal ini terkait dengan perlunya selalu melakukan pembenahan dan juga penambahan obyek kunjungan untuk menarik minat pengunjung untuk selalu datang. Hal yang menguntungkan adalah keindahan pemandangan dan udara nyaman di sekitar pantai sehingga menggugah orang untuk mengunjungi obyek wisata Pantai Kutang.

2. Asal responden

Sebanyak 25% responden berasal dari wilayah sekitar Kecamatan Brondong, sebanyak 37,50% berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Lamongan diluar Kecamatan Brondong, sebanyak 25% berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur diluar Kabupaten Lamongan dan sebanyak 12,50% berasal dari wilayah luar Provinsi Jawa Timur.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pengunjung (62,50%) berasal dari Kabupaten Lamongan, terutama Kecamatan Brondong, lokasi keberadaan Pantai Kutang. Hal ini menunjukkan masih kurang dikenalnya Pantai Kutang oleh masyarakat luas di luar masyarakat Kabupaten Lamongan. Keadaan ini menuntut untuk lebih gencarnya lagi promosi keberadaan Pantai Kutang ke masyarakat luas. Tentu saja perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang obyek wisata.

3. Informasi tentang Pantai Kutang

Sebanyak 62,50% mendapatkan informasi tentang Pantai Kutang dari media sosial dan sebanyak 37,50% mendapatkan informasi dari teman ataupun saudara.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa media sosial mempunyai peran sangat penting sebagai media promosi. Etika dalam promosi perlu diperhatikan sehingga pengunjung/calon pengunjung kecewa karena perbedaan yang sangat menyolok antara promosi dengan fakta di lapangan.

4. Jumlah anggota rombongan

Sebanyak 87,50% pengunjung berombongan 3-5 orang dan 12,50% pengunjung berombongan lebih dari 5 orang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pengunjung obyek wisata yang datang sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa obyek wisata Pantai Kutang memiliki potensi kunjungan dalam jumlah cukup besar, sehingga pihak pengelola perlu memperhatikan kesiapan Pantai Kutang dalam menerima pengunjung dalam jumlah besar.

5. Merupakan kunjungan kali ke

Sebanyak 56,25% pengunjung baru datang pertama kali; 25% pengunjung datang untuk kedua kalinya dan sebanyak 18,75% pengunjung mengulangi kunjungan lebih dari 3 kali.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (56,25%) merupakan pengunjung yang baru pertama kali datang ke Pantai Kutang. Keadaan ini menuntut kesiapan pihak pengelola obyek wisata Pantai Kutang untuk melayani pengunjung sehingga ada keinginan untuk berkunjung ke Pantai Kutang kembali bersama kelompoknya. Artinya, pengunjung tersebut juga merupakan salah satu media promosi bagi pengenalan obyek wisata Pantai Kutang.

6. Alasan kunjungan

Sebanyak 50% pengunjung datang karena alasan penasaran; 37,50% untuk mengisi liburan; 12,50% untuk menemani teman.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa alasan pengunjung mendatangi obyek wisata Pantai Kutang adalah untuk memenuhi rasa penasaran tentang keindahan dan daya tarik obyek wisata tersebut (50%). Sebagaimana uraian pada angka 5., keadaan ini menuntut kesiapan pihak pengelola obyek wisata Pantai Kutang untuk melayani pengunjung sehingga ada keinginan untuk berkunjung ke Pantai Kutang kembali bersama kelompoknya.

7. Pengeluaran minimal yang harus disiapkan untuk menikmati suasana

Sebanyak 62,50% pengunjung mengatakan bahwa pengeluaran minimal yang harus disiapkan untuk menikmati suasana di Pantai Kutang cukup murah; 31,25% menyatakan standar/biasa dan hanya 6,25% menyatakan mahal.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (62,50%) menyatakan bahwa pengeluaran yang harus dipersiapkan untuk mengunjungi obyek wisata Pantai Kutang adalah murah, sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Biaya minimal di lokasi tersebut meliputi tiket masuk, retribusi parkir, harga makanan dan aksesibilitas menuju ke lokasi obyek wisata.

8. Kesan tentang Pantai Kutang

Sebanyak 93,75 % menyampaikan kesan bahwa Pantai Kutang adalah obyek wisata yang menarik dan hanya sebesar 6,25% menyatakan kesan biasa.

Hampir seluruh responden (93,75%) menyatakan bahwa Pantai Kutang merupakan obyek wisata yang menarik. Beberapa hal menarik tersebut antara lain pemandangan laut yang indah, udara yang nyaman dengan adanya semilir hembusan angin, anjungan tempat istirahat.

Dalam kajian ini juga dilakukan wawancara dengan beberapa pedagang makanan minuman, merupakan warga masyarakat Desa Labuhan. Sebagian besar pedagang merasakan peningkatan penghasilan dengan keberadaan obyek wisata Pantai Kutang dibanding dengan kegiatan mereka sebelumnya. Disamping itu, dengan besarnya pengunjung obyek wisata tersebut, BUMDes Labuhan juga dapat memberikan peluang kerja bagi golongan usia produktif untuk bekerja sebagai penjual tiket masuk, penjaga parkir, dan lain sebagainya dengan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Sebanyak 8 (delapan) orang bekerja untuk melayani pengunjung. Di samping itu desa juga mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang.

Dari hasil wawancara dan survey di lokasi disadari bahwa saat ini pengelolaan obyek wisata Pantai Kupang masih dalam taraf konvensional dengan harapan dapat mencapai suatu manajemen pengelolaan yang profesional. Untuk itu pengelola obyek wisata ini sangat antusias untuk mendapatkan pendampingan guna peningkatan daya tarik sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang berarti pula adanya peningkatan pendapatan dari obyek wisata Pantai Kutang. Disamping itu, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa obyek wisata Pantai Kutang merupakan salah satu potensi Desa Labuhan yang dapat memberikan kontribusi pendapatan desa dan juga meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Dengan adanya keterlibatan BUMDes sebagai pengelola obyek wisata ini maka peningkatan penghasilan dari obyek wisata Pantai Kutang dapat berpengaruh positif terhadap pendapatan desa. Hal ini berarti pula bahwa obyek wisata Pantai Kutang menjadi salah satu penopang dalam langkah menuju desa mandiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Saat ini pengelolaan obyek wisata Pantai Kutang masih dalam taraf konvensional, akan tetapi dengan segala potensi yang dimiliki diharapkan dapat dikelola dalam suatu manajemen pengelolaan yang profesional.
2. Obyek wisata Pantai Kutang merupakan salah satu potensi Desa Labuhan yang dapat memberikan kontribusi pendapatan desa dan juga meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Dengan adanya keterlibatan BUMDes sebagai pengelola obyek wisata ini maka peningkatan penghasilan dari obyek wisata Pantai Kutang akan berpengaruh positif terhadap pendapatan desa. Hal ini berarti pula bahwa obyek wisata Pantai Kutang menjadi salah satu penopang dalam langkah menuju desa mandiri.

Rekomendasi

1. Diperlukan pendampingan dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Pantai Kutang sehingga dapat dikelola secara profesional serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.
2. Diperlukan kehadiran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya mengintegrasikan obyek wisata Pantai Kutang dengan beberapa obyek di kawasan sekitar Pantai Kutang seperti Kampung Kerapu, tambak bandeng, tambak udang vanamae serta sentra cabe sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan pengunjung obyek wisata Pantai Kutang dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan Dalam Angka Tahun 2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong Dalam Angka Tahun 2018
- Burke, L., Kura, Y., Kassem, K., Revenga, C., Spalding, M., & McAllister, D. (2001). Coastal Ecosystem, World Resources Institute. USA.
- Kasim, F. 2012. Pendekatan beberapa metode dalam monitoring perubahan garis pantai menggunakan dataset penginderaan jauh Landsat dan SIG, Jurnal Ilmiah Agropolitan, 5, 620-635.
- Nurcholis, Hanif(2011), Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta, Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
- Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Triatmojo, B. (1999). Teknik Pantai. Beta Offset.Yogyakarta.
- Sardiyatmo, dkk (2013), Dampak Dinamika Garis Pantai Menggunakan Citra Satelit Multi Temporal Pantai Semarang Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Saintek Perikanan Vol. 8, No. 2, 2013 :33-37